PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

2024 Annual Report
Laporan Tahunan



Transformation Journey to Achieve Sustainable Growth

Perjalanan Transformasi untuk Mencapai Pertumbuhan Berkelanjutan

Metode Penyusunan dan Tentang Laporan Tahunan

Preparation Method and About The Annual Report

Laporan Tahunan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk tahun buku 2024 diterbitkan bersamaan dengan Laporan Keberlanjutan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk tahun buku 2024, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk memberikan gambaran secara utuh tentang kinerja, risiko, peluang, dan prospek Perseroan di masa depan, sehingga membantu Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan memahami tujuan strategis Perseroan dan perkembangannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan.

Laporan Tahunan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk tahun buku 2024 mengangkat tema **"Perjalanan Transformasi untuk Mencapai Pertumbuhan Berkelanjutan"**. Tema tersebut dipilih berdasarkan analisis dan kajian yang mendalam berdasarkan fakta dan perkembangan bisnis di sepanjang tahun 2024 serta mempertimbangkan keberlanjutan bisnis Perseroan.

Laporan Tahunan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk tahun buku 2024 disusun berdasarkan pada Anggaran Dasar Perusahaan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, dan Surat Edaran OJK Nomor: 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Laporan Tahunan ini juga mencakup pengungkapan keterbukaan yang lebih mendalam dan komprehensif terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good Corporate Governance (GCG), yang mengacu pada Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka (SEOJK) serta disusun dengan memperhatikan aspek best practice sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) maupun ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS), sekaligus mengacu pada kriteria penilaian Annual Report Award (ARA) oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG). Pengungkapan pelaksanaan GCG juga memuat kebijakan SMAP di internal Perseroan serta Corporate Rating yang dikeluarkan oleh lembaga rating indenpenden.

Dalam laporan tahunan ini, penyebutan satuan mata uang dinyatakan dalam "Rupiah", "Rp" atau "IDR" merujuk pada mata uang resmi Republik Indonesia, sedangkan "Dollar AS" atau "USD" merujuk pada mata uang resmi Amerika Serikat. Semua informasi keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Penyebutan kata "WEGE" dan "Perseroan atau Perusahaan" didefinisikan sebagai PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk yang menjalankan bisnis utamanya di bidang Konstruksi Bangunan Gedung, Modular dan Konsesi.

Laporan Tahunan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk 2024 disajikan dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca dan dicetak dengan kualitas yang baik. Laporan Tahunan ini dapat dilihat dan diunduh melalui situs web resmi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk yaitu www.wikagedung.co.id.

The Annual Report of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk for the 2024 fiscal year is published and integrated with the Sustainability Report of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk for the fiscal year of 2024, which is an inseparable entity to provide a complete picture of the Company's performance, risks, opportunities, and prospects in the future, so as to help Shareholders and Stakeholders understand the Company's strategic objectives and its development in creating sustainable value.

The Annual Report of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk for the 2024 fiscal year carries the theme **"Transformation Journey to Achieve Sustainable Growth Sustainable"**. The theme was chosen based on in-depth analysis and study based on facts and business developments throughout 2024 and considering the sustainability of the Company's business.

The Annual Report of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk for the fiscal year of 2024 is prepared based on the Company's Articles of Association, Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Financial Services Authority (OJK) Regulation Number: 29/POJK.04/2016 concerning Annual Reports of Issuers or Public Companies, and OJK Circular Letter Number: 16/SEOJK.04/2021 concerning the Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies.

This Annual Report also includes a deeper and more comprehensive disclosure regarding the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles, which refers to the Guidelines for Good Corporate Governance of Public Companies (SEOJK) and is prepared by considering best practice aspects as stipulated in the Indonesian General Guidelines for Corporate Governance (PUGKI) and ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS). It also refers to the assessment criteria of the Annual Report Award (ARA) by the National Committee on Governance Policy (KNKG). The disclosure of GCG implementation also contains the Anti-Bribery Management System (SMAP) policy within the Company as well as the Corporate Rating issued by an independent rating agency.

In this annual report, the mention of currency units is stated in "Rupiah", "Rp" or "IDR" referring to the official currency of the Republic of Indonesia, while "US Dollar" or "USD" refers to the official currency of the United States. All financial information is presented in Rupiah currency in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

The mention of the words "WEGE" and "Company" is defined as PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk which runs its main business in the field of Building Construction, Modular and Concession.

The Annual Report of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk 2024 is presented in two languages, namely Indonesian and English by using easy-to-read font types and sizes as well as printed with good quality. This Annual Report can be viewed and downloaded on the official website of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, namely www.wikagedung.co.id.

Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab

Disclaimer and Limitations of Liability

Laporan Tahunan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk tahun buku 2024 disusun untuk memenuhi ketentuan pelaporan hasil kinerja Perseroan pada periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 kepada regulator.

Laporan Tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, serta tujuan Perseroan, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan. Sedangkan, pernyataan-pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang, serta lingkungan bisnis yang terkait, sehingga dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan. Oleh karena itu, Perseroan tidak menjamin bahwa pernyataan atau informasi prospektif tersebut menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan ataupun akan membawa hasil tertentu sesuai harapan, hasil sebenarnya di masa depan dapat berbeda karena dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor di luar kendali Perseroan.

The Annual Report of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk for the 2024 fiscal year was prepared to fulfil the requirements for reporting the Company's performance results for the period January 1, 2024 to December 31, 2024 to the regulator.

This Annual Report contains statements of the Company's financial condition, operating results, projections, plans, strategies, policies, and objectives, which are classified as forward-looking statements in the implementation of prevailing laws, except for historical matters. These statements have prospective risks, uncertainties, and may result in actual developments that are materially different from those reported. For the meantime, the prospective statements in this Annual Report are made based on various assumptions regarding current and future conditions, as well as the related business environment, the actual developments hence may be materially different from those reported. Therefore, the Company does not guarantee that these prospective statements or information are the main basis for decision-making or will bring certain results as expected, the actual results in the future may differ because they may be influenced by several factors beyond the Company's control.



Penjelasan Tema

Theme Explanation



Transformation Journey to Achieve Sustainable Growth

Perjalanan Transformasi untuk Mencapai Pertumbuhan Berkelanjutan

Industri konstruksi global sedang mengalami transformasi besar sebagai respons terhadap tantangan ekonomi, ketidakpastian geopolitik, serta dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Kondisi ini berpengaruh terhadap pertumbuhan proyek infrastruktur dan menuntut perusahaan untuk terus beradaptasi agar tetap kompetitif dan berkelanjutan. Dalam menghadapi situasi tersebut, Perseroan mengambil langkah strategis melalui berbagai inisiatif transformasi guna memastikan pertumbuhan yang lebih kuat, efisien, dan inovatif.

Memasuki usianya ke-16 (enam belas) tahun dan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola, Perseroan melakukan perubahan visi dan misi guna mempertajam arah tujuan Perseroan yang dapat menjawab tantangan bisnis serta dinamika industri konstruksi ke depannya sebagai landasan strategis dalam mengarahkan tujuan dan kebijakan perusahaan. Visi dan misi yang baru menjadi pedoman bagi manajemen dan seluruh karyawan dalam mencapai target jangka panjang serta mewujudkan aspirasi Perseroan untuk menjadi mitra terpercaya dalam menciptakan ekosistem konstruksi yang inovatif dan berkelanjutan.

Transformasi dalam aspek teknologi menjadi salah satu pilar utama dalam upaya peningkatan efisiensi dan profitabilitas. Implementasi *Building Information Modeling* (BIM) secara menyeluruh di setiap proyek memungkinkan integrasi desain, konstruksi, dan manajemen proyek secara *real-time*, sehingga mengurangi potensi kesalahan dan meningkatkan efisiensi. Selain itu, penerapan *Enterprise Resource Planning* (ERP) berbasis *System Application and Processing* (SAP) membantu optimalisasi kontrol biaya serta meningkatkan efektivitas pengelolaan operasional dengan sistem yang terintegrasi dan berbasis data.

Dalam mendukung pertumbuhan berkelanjutan, Perseroan terus meningkatkan kapabilitas pada inovasi konstruksi modular sebagai strategi *Backward Offsite Construction*. Sejak diimplementasikan pada tahun 2018, teknologi ini terbukti mampu mengurangi emisi karbon dan limbah konstruksi, sekaligus mempercepat waktu pengerjaan

The global construction industry is undergoing a major transformation in response to economic challenges, geopolitical uncertainties, and the increasingly apparent impacts brought from climate change. These conditions have an effect on the growth of infrastructure projects and require companies to continue to adapt in order to remain competitive and sustainable. In facing this situation, the Company has taken strategic steps through various transformation initiatives to ensure stronger, more efficient, and more innovative growth.

Welcoming our 16th (sixteenth) anniversary and as part of an undertaking to strengthen governance, the Company has changed its vision and mission to sharpen the direction of the Company's goals that can answer business challenges and the dynamics of the construction industry in the future as a strategic foundation in directing the company's goals and policies. The new vision and mission serve as guidelines for the management and all employees in achieving long-term targets and realizing the Company's aspirations to become a trusted partner in creating an innovative and sustainable construction ecosystem.

Transformation in terms of technology is one of the main pillars as our endeavor to increase efficiency and profitability. The comprehensive implementation of Building Information Modeling (BIM) in every project allows for real-time integration of design, construction, and project management, thereby reducing the potential for errors and increasing efficiency. Furthermore, the implementation of Enterprise Resource Planning (ERP) based on System Application and Processing (SAP) helps to optimizing cost control and increase the effectiveness of operational management with an integrated and data-based system.

In supporting sustainable growth, the Company continues to improve its capabilities in modular construction innovation as a Backward Offsite Construction strategy. Since its implementation in 2018, this technology has proven to reduce carbon emissions and construction waste, while accelerating completion time for each project. This step

proyek. Langkah ini menjadi salah satu bagian dari strategi jangka panjang perusahaan dalam penerapan ESG (*Environmental, Social, Governance*), serta mencapai target *Net Zero Emissions* pada 2060. Komitmen terhadap transisi energi bersih juga diwujudkan melalui penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan operasional dan kendaraan dinas. Selain itu, seluruh jajaran Direksi telah beralih ke kendaraan listrik sebagai bukti nyata dukungan Perseroan dalam mengurangi emisi karbon serta meningkatkan efisiensi energi.

Selain itu, tidak hanya dalam operasional, praktik ESG juga diterapkan ke dalam proyek-proyek konstruksi Perseroan dengan mengusung konsep bangunan hijau (*Green Building*), di mana konsep tersebut dirancang untuk menjadi bangunan yang efisien dan ramah lingkungan. Setiap pembangunan proyek konstruksi bangunan hijau, Perseroan telah mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan seminimal mungkin, mulai dari tahap perencanaan hingga pengoperasian dan pemeliharaan.

Sementara pada praktik sosial, Perseroan fokus pada implementasi keberagaman (*diversity*) dalam lingkungan perusahaan, di mana Perseroan secara konsisten mendorong keterlibatan perempuan dalam lingkungan kerja serta kepemimpinan dalam struktur organisasi Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan berkomitmen untuk terus memperkuat prinsip kesetaraan gender sekaligus memperluas inisiatif keberagaman di seluruh lini bisnis guna menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif, inovatif serta berdaya saing tinggi.

Dalam mendukung keberlanjutan transformasi ini, Perseroan terus memperkuat tata kelola dengan mengadopsi prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) salah satunya berbasis standar *ASEAN Corporate Governance Scorecard* (ACGS). Selain itu, implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001 semakin mempertegas komitmen Perseroan dalam menciptakan lingkungan bisnis yang transparan dan akuntabel.

Berlandaskan pada nilai-nilai AKHLAK, Perseroan mengembangkan "Rumah Transformasi" sebagai wadah yang mengarah ke tujuan pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Melalui Rumah Transformasi, Perseroan fokus pada aspek-aspek yang dapat menunjang ketercapaian pertumbuhan yang diinginkan, termasuk pada fokus dalam strategi bisnis melalui kebijakan keuangan, peningkatan kinerja melalui implementasi BIM, serta pengembangan bisnis maupun pengelolaan konstruksi secara berkelanjutan.

Perjalanan transformasi menuju pertumbuhan berkelanjutan telah memberikan pengaruh positif terhadap bisnis maupun operasional Perseroan, sehingga berhasil mencetak kinerja positif di tahun 2024. Untuk itu, segala pencapaian dan kinerja positif termasuk realisasi *milestones* dalam agenda keberlanjutan yang tercapai di tahun 2024 menjadi fondasi yang kuat untuk sehat, tumbuh, dan berkelanjutan, agar dapat mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).

is part of the company's long-term strategy in implementing ESG (Environmental, Social, Governance), and succeeding the Net Zero Emissions target by 2060. The commitment to the clean energy transition is also realized through the use of electric vehicles as operational vehicles and official vehicles. Moreover, the entire Board of Directors has switched to electric vehicles as an actual evidence of the Company's support in reducing carbon emissions while increasing energy efficiency.

In addition, not only in operations, ESG practices are also applied to the Company's construction projects by carrying the concept of green buildings, where the concept is designed to be efficient and environmentally friendly buildings. In every green building construction project, the Company has considered the impact on the environment as minimal as possible, starting from the planning stage to operation and maintenance.

In the meantime, in social practices, the Company focuses on implementing diversity in the corporate environment, where the Company consistently encourages the involvement of women in the work milieu and leadership in the Company's organizational structure. Therefore, the Company is committed to continuing to strengthen the principle of gender equality while expanding diversity initiatives across all business lines to create a more inclusive, innovative, and highly competitive work environment.

In supporting the sustainability of the transformation, the Company continues to strengthen governance by adopting the principles of Good Corporate Governance (GCG), one of which is based on the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) standard. Besides, the implementation of the ISO 37001 Anti-Bribery Management System (SMAP) further emphasizes the Company's commitment to creating a transparent and accountable business environment.

According to the values of AKHLAK, the Company has developed the "House of Transformation" as a platform that leads to the goal of healthy and sustainable business growth. Through Rumah Transformasi, the Company focuses on aspects that can support the achievement of the desired growth, including focusing on finance policies business strategies, improving performance through the implementation of BIM, as well as business development and construction management that are performed sustainably.

The transformation journey towards sustainable growth has had a positive impact on the Company's business and operations, hence it has succeeded in achieving positive performance in 2024. Therefore, all achievements and positive performance including the realization of milestones in the sustainability agenda accomplished in 2024 become a strong foundation for being healthy, growing, and in sustainability, in order to realize sustainable growth in accordance with the targets set in the Company's Long-Term Plan.

Kesinambungan Tema

Theme Continuity

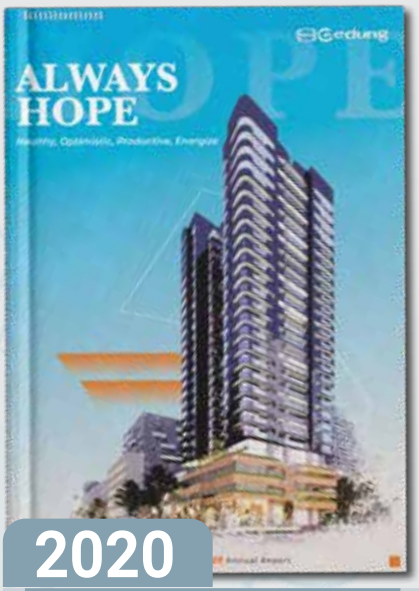


2019

A Spirit to Achieve the Goal
Semangat Untuk Mencapai Tujuan

Di tengah kondisi yang penuh tantangan, Perusahaan tetap berupaya mewujudkan kinerja positif melalui penerapan strategi usaha yang efektif dan efisiensi yang berkelanjutan. Dari sisi pengembangan usaha, pola Bisnis Inti, *Backward Integration, dan Forward Integration* semakin memantapkan pertumbuhan Perusahaan di tahun 2019.

In the midst of challenging conditions, the Company continues to strive to achieve positive performance through the implementation of effective business strategies and sustainable efficiency. In terms of business development, the pattern of Core Business, Backward Integration, and Forward Integration further strengthened the growth of the Company in 2019.

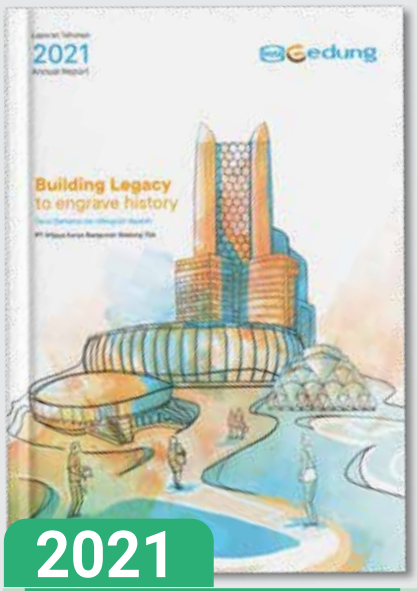


2020

Always Hope
(Health, Optimistic, Pray, Energize
Selalu Berharap
(Sehat, Optimis, Berdoa, Bersemangat)

Perusahaan menghadapi tantangan tahun 2020 dengan menginternalisasikan *"Always HOPE"*. Tema ini menekankan bahwa Perusahaan pastinya berharap *(Hope)* kepada seluruh insan Perusahaan untuk dapat selalu mencari peluang bisnis *(Opportunity)* agar dapat survive dan berkelanjutan (Sustainable) dengan selalu menjaga kesehatan (Healthy), optimis *(Optimistic)*, berdoa/beribadah *(Pray)* dan tetap bersemangat *(Energize)*.

The Company embraced the challenges in 2020 through the internalization of "Always HOPE". The theme emphasized the Company's expectation (Hope) to all employees to always look for business opportunities (Opportunity) in order to survive and be sustainable by always maintaining health (Healthy), being optimistic (Optimistic), diligently worshipping (Pray) and being energetic (Energize).



2021

Building Legacy to Engrave History
Terus Berkarya dan Mengukir Sejarah

Tahun 2021 mencatat sejarah baru bagi Perusahaan dengan rampungnya pekerjaan struktur atap baja dan retractable roof proyek megastruktur Jakarta International Stadium (JIS). Selain itu, Perusahaan juga merampungkan Pit Building untuk ajang World Superbike Mandalika. Kedua proyek megastruktur ini melengkapi daftar panjang portfolio mahakarya Perusahaan yang bernilai sejarah dan bertaraf internasional. Keberhasilan yang tak terlepas dari keahlian, kolaborasi, serta komitmen untuk Terus Berkarya dan Mengukir Sejarah.

In 2021, The Company engraved another history by completing the installation of retractable roof for its megastructure project, Jakarta International Stadium (JIS). The Company also completed the Pit Building for the World Superbike Mandalika. These two megastructure projects add to the list of the Company's historical and international masterpieces. Such achievements which manifest expertise, collaboration, and commitment to continue Building Legacy to Engrave History.



2022

Towards Responsive Unity Sustainable Teamwork (TRUST)
Menuju Kerjasama Tim Yang Responsif, Bersatu dan Berkelanjutan

Kami berkomitmen untuk membangun TRUST dengan semua pemangku kepentingan kami, termasuk klien, mitra, dan karyawan. Responsif berarti memberikan layanan yang cepat dan efisien, selalu memprioritaskan kebutuhan klien kami. Bersatu artinya dengan bekerja bersama sebagai tim, kami dapat mencapai kesuksesan yang lebih besar dan memberikan hasil yang lebih baik untuk klien kami. Berkelanjutan mendorong kami memahami pentingnya melindungi lingkungan dan menciptakan solusi yang berkelanjutan. Sebagai sebuah tim, kami dapat memberikan proyek berkualitas tinggi dan menciptakan hubungan yang langgeng dengan klien kami.

We are committed to building TRUST with all our stakeholders, including customers, partners and employees. Responsive means providing fast, efficient service, always prioritizing customer needs. United means that by working together as a team, we will be able to achieve greater success and deliver better results for our customers. Sustainability means that we understand the importance of protecting the environment and creating sustainable solutions. As a team, we are able to deliver high quality projects and build long lasting relationships with our clients.



2023

15th Years Of Devotion: Be The Change
15 Tahun Pengabdian: Jadilah Perubahan

15 tahun pengabdian di industri konstruksi gedung bukan sebuah perjalanan yang mudah. Perubahan gradual Perusahaan selayaknya sebuah metamorfosis, yang terjadi untuk merespon beragam dinamika yang terjadi di lingkungan ekonomi dan bisnis konstruksi bangunan serta selaras dengan kemajuan dan perkembangan teknologi. Proses transformasi yang melibatkan segenap insan Perusahaan mampu menorehkan berbagai prestasi yang patut dibanggakan sebagai bagian dari pengabdian Perusahaan di industri konstruksi bangunan gedung.

The Company's 15 years of serving the building industry not been an easy journey. The gradual changes of the company are like a metamorphosis that takes place in response to various dynamics that occur in the economic environment and in the building construction business as well as in accordance with the progress and evolution of technology. The transformation process, which involved all the Company's employees, has resulted in various achievements that the Company can be proud of as part of its devotion to the building construction industry.



Daftar Isi
Table of Content

Metode Penyusunan dan Tentang Laporan Tahunan Preparation Method and About The Annual Report	2
Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab Disclaimer and Limitations of Liability	3
Penjelasan Tema Theme Explanation	4
Kesinambungan Tema Theme Continuity	6
Keunggulan Kompetitif WEGE WEGE Competitive Advantages	12
Komitmen dan Implementasi ESG Commitment and Implementation of ESG	14
Dukungan Keberlanjutan Melalui Produk Modular Wege Sustainability Support through Wege Modular Products	20
Pencapaian WEGE 2024 2024 WEGE Achievements	28
Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certifications	30

01. Ikhtisar Utama
Performance Highlights

Ikhtisar Data Keuangan Penting Important Financial Data Summary	38
Ikhtisar Operasional Operational Highlights	46
Ikhtisar Organisasi Organizational Highlights	50
Ikhtisar Saham Shares Information	50
Informasi Penghentian Sementara Perdagangan Saham (Suspension) dan/ atau Penghapusan Pencatatan Saham (Delisting) Information on Temporary Suspension of Stock Trading (Suspension) and/or Delisting of Stock Listing	54
Informasi Tentang Aksi Korporasi Saham Information about Corporate Stock Action	54
Informasi Efek Lainya Other Effects Information	54

02. Laporan Manajemen
Management Report

Laporan Dewan Komisaris Report of the Board of Commissioners	59
Laporan Direksi Report of the Board of Directors	75
Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2024 Statement Letter from The Board of Directors and Commissioners for the Responsibility of the 2024 Annual Report	92

03. Profil Perusahaan
Company Profile

Informasi Umum Perusahaan General Company Information	96
Riwayat Singkat Perusahaan Brief History of The Company	98
Informasi Perubahan Nama Emiten Pada Tahun Buku Information on Changes in the Issuer's Name in the Fiscal Year	101
Jejak Langkah Milestones	102
Visi, Misi dan Budaya Perusahaan Vision, Mission and Corporate Culture	104
Makna Logo Perusahaan Signification of Company Logo	108
Kegiatan dan Bidang Usaha Activities and Business Fields	109
Wilayah Oprasional Operational Areas	114
Daftar Keanggotaan Organisasi atau Asosiasi List of Organization or Association Membership	116
Struktur Organisasi Perusahaan Organizational Structure	118
Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners' Profile	120
Profil Direksi Board of Directors' Profile	134
Perubahan Susunan Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris yang Terjadi Setelah Tahun Buku Berakhir Changes in The Composition of The Board of Directors and/or Board of Commissioners that Occur After the End of the Fiscal Year	150
Profil Pejabat Eksekutif Executives' Profile	152
Peristiwa Penting Significant Events	164
Sumber Daya Manusia Human Capital	176
Komposisi Pemegang Saham Shareholders Composition	203
Struktur Group Perusahaan Company Group Structure	210
Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Subsidiaries, Associates, and Joint Ventures	211
Kronologis Penerbitan dan/ atau Pencatatan Saham Chronology of Shares Issuance and/or Listing	220

Kronologis Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya
Chronology of Issuance and/or Listing of Other Securities 221

Lembaga dan/atau Profesi Penunjang
Institutions and/or Supporting Professions 222

Informasi pada Website Perusahaan
Information on The Company Website 225

04. Tinjauan Pendukung Bisnis
Business Supporting Review

Teknologi Informasi
Information Technology 232

Building Information Modeling (BIM)
Building Information Modeling (BIM) 244

Manajemen Pengetahuan dan Inovasi
Knowledge and Innovation Management 255

05. Analisis dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis

Tinjauan Perekonomian
Economic Review 264

Tinjauan Industri Konstruksi
Construction Industry Overview 270

Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha
Operational Review per Business Segment 274

Tinjauan Keuangan
Financial Overview 283

Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang
Capacity to Pay Debts and Level of Receivable Collectibility 299

Portofolio Kontrak Baru Perusahaan
Company's New Contract Portfolio 302

Struktur Modal
The Capital Structure 306

Ikatan yang Material untuk Investasi Barang Modal
Material Commitments for Capital Expenditures 308

Realisasi Investasi Barang Modal
Realization of Capital Expenditures 308

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi setelah Tanggal Laporan Akuntan
Information and Material Facts Occurring After the Accountant's Report Date 309

Kebijakan Dividen dan Pembagiannya
Dividend Policy and its Distribution 309

Informasi Tentang Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP)
Information about Employee and/or Management Stock Ownership Programs (ESOP/MSOP) 311

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Realization of Use of Funds From Public Offering 311

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan Usaha, Akuisisi, dan/atau Restrukturisasi Utang/Modal
Material Information Regarding Investment, Expansion, Divestment, Business Merger, Acquisition, and/or Debt/Capital Restructuring 316

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Dengan Pihak Afiliasi/Pihak Berelasi
Material Information on Transactions that Contain Conflict of Interest and/or Transactions with Affiliated Parties/Related Parties 316

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perusahaan
Changes in Legislation that Have A Significant Impact on the Company 326

Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya Terhadap Perusahaan
Changes in Accounting Policies and Their Impact on The Company 326

Dampak Perubahan Harga yang Berpengaruh terhadap Pendapatan dan Kinerja Keuangan Perusahaan
The Impact of Price Changes that Affect the Company's Revenue and Financial PerformancE 327

Informasi Tentang Dampak Nilai Tukar Mata Uang Asing
Information on the Impact of Foreign Exchange Rates 327

Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian yang Bersifat Luar Biasa
Financial Information Containing Extraordinary Events 327

Kontribusi Pajak Terhadap Negara
Tax Contribution To The State 328

Aspek Pemasaran
Marketing Aspect 329

Perbandingan antara Target dan Realisasi Serta Proyeksi untuk 1 (Satu) Tahun ke Depan
Comparison Between Targets and Realizations and Projections for the Next 1 (One) Year 331

Prospek Usaha
Business Prospects 336

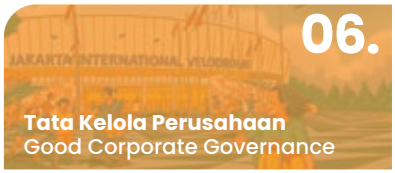
Informasi Keberlangsungan Usaha
Information on Business Continuity 340

Laporan Pemeringkat Perusahaan oleh Lembaga Rating
Company Rating Report by the Rating Agency 341

Key Performance Indicator (KPI) Perusahaan
Company Key Performance Indicator (KPI) 342

Rencana Jangka Panjang Perusahaan
Company Long Term Plan 343

Rumah Transformasi WEGE
WEGE House of Transformation 344



06.
Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Pernyataan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Statement of Corporate Governance Implementation	348
Penerapan Tata Kelola Perusahaan Secara Berkelanjutan Implementation of Sustainable Corporate Governance	353
Struktur dan Mekanisme Corporate Governance Structure and Mechanism of Corporate Governance	363
Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders	365
Dewan Komisaris Board of Commissioners	397
Komisaris Independen Independent Commissioner	414
Organ Pendukung Dewan Komisaris Supporting Organs of the Board of Commissioners	416
Komite Lain di Bawah Dewan Komisaris Other Committees under The Board of Commissioners	458
Direksi Board of DIrector	459
Organ Pendukung Direksi Supporting Organs of The Board of Directors	474
Komite di bawah Direksi Committee Under the Board of Directors	493
Transparansi Informasi Terkait Dewan Komisaris dan Direksi Information on Transparency Related to The Board of Commissioners and The Board of Directors	493
Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Remuneration of The Board of Commissioners and Board Of Directors	504
Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi Diversity of The Board of Commissioners and Board of Directors	511
Penilaian Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris Performance Assessment of The Board of Commissioners and Board of Directors	513
Sistem Pengendalian Internal Internal Control System	516
Manajemen Risiko Risk Management	524
Auditor Eksternal External Auditor	533
Perkara Hukum yang Berdampak Material yang Dihadapi oleh Perusahaan, Entitas Anak, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Material Legal Matters Faced by the Company, Subsidiaries, Members of the Board of Directors, and Members of the Board of Commissioners.	543
Akses Informasi dan Data Perusahaan Access to Company Information and Data	545
Tata Kelola Teknologi Informasi Information Technology Governance	550
Kode Etik Code of Conduct	550
Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja Kepada Manajemen dan/ atau Karyawan Antara Lain Berupa Program Kepemilikan Saham Oleh Manajemen (Management Stock Ownership Program/ MSOP) dan/atau Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan (Employee Stock Ownership Program/ ESOP) Policy on Granting Long-Term Performance-Based Compensation to Management and/or Employees, Including in the Form of a Management Stock Ownership Program (MSOP) and/or an Employee Stock Ownership Program (ESOP).	557
Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Paling Lambat 3 (Tiga) Hari Kerja Setelah Terjadinya Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan atas Saham Perusahaan Terbuka Share Ownership of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners No Later Than 3 (Three) Business Days After the Occurrence of Ownership or Any Change in Ownership of the Public Company's Shares	557
Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Information Technology Governance	558
Kebijakan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) Whistleblowing System Policy	580
Kebijakan Anti Korupsi Anti-Corruption Policy	584
Pengendalian Gratifikasi Whistleblowing System Policy	586
Hubungan dengan Kreditur Relationship with Creditors	590
Tata Kelola Pengadaan dan Kemitraan Relationship with Creditors	591
Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan Perusahaan Transparency of The Company's Financial and Non-Financial Condition	594
Keterlibatan dalam Aktivitas Politik Involvement In Political Activities	595
Pencegahan Transaksi Orang dalam (Insider Trading) Prevention of Insider Trading	595

Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
Involvement In Political Activities 596

Transparansi Praktik Bad Governance
Involvement In Political Activities 598

Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Implementation of Aspects and Principles of Good Corporate Governance in Accordance with the Regulations of the Financial Services Authority. 599



Komitmen dan Kebijakan Pelaksanaan Program Keberlanjutan di Lingkup Perusahaan
Commitment and Policy for Implementing Sustainability Programs in the Company 606

Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility Program 607

Sustainable Development Goals (SDGs)
Sustainable Development Goals (SDGs) 609

Pilar Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Pillars of Social and Environmental Responsibility 610

Topik Pembangunan Keberlanjutan
Sustainable Development Topic 611

Realisasi Penggunaan Dana Corporate Social Responsibility
Realization of The Use of Corporate Social Responsibility Funds 611





Kriteria SEOJK Nomor 16/ SEOJK.04/2021 Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik
SEOJK Criteria Number 16/ SEOJK.04/2021 Regarding the Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies 744

Penerapan Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS)
Implementation of Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS) 766

Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI)
General Guidelines for Indonesian Corporate Governance 912

Index Kriteria Penilaian Annual Report Award (ARA)
Annual Report Award (ARA) Assessment Criteria Index 936

Keunggulan Kompetitif WEGE

WEGE Competitive Advantages

01



TOTAL SOLUTION CONTRACTOR

Menyediakan layanan konstruksi yang terintegrasi dari hulu ke hilir (*design and build*), melalui strategi *backward-forward integration* serta mengintegrasikan teknologi yang inovatif dan berkelanjutan.

Providing integrated construction services from upstream to downstream (design and build), through a backward-forward integration strategy and integrating innovative and sustainable technologies.

02



PIONEER

WEGE sebagai pionir Modular *construction* di Indonesia. WEGE telah mengembangkan dan menerapkan teknologi modular *construction* diberbagai jenis proyek, dengan keunggulan pada efisiensi waktu, kualitas, serta keberlanjutan bangunan yang ramah lingkungan.

WEGE as a pioneer of Modular construction in Indonesia. WEGE has developed and implemented modular construction technology in various types of projects, with advantages in time efficiency, quality, and sustainability of environmentally friendly buildings.

03

TRACK RECORD IN BUILDING CONSTRUCTION

WEGE memiliki rekam jejak yang terbukti dan terpercaya dalam konstruksi bangunan gedung dengan berbagai tipe, ukuran, segmen, dan tingkat kompleksitas. Sejak awal pendirian pada tahun 2008 hingga tahun 2024, WEGE berhasil memperoleh kontrak baru sebanyak 410 proyek dengan total nilai proyek mencapai Rp55,90 triliun. Dari capaian perolehan proyek baru, sebesar 92,53% berasal dari eksternal, sementara 7,47% berasal dari internal melalui entitas induk. Dengan berbagai pemberi kerja *(owner)*, 44,89% proyek berasal dari swasta, 25,41% dari pemerintah, dan 29,70% dari BUMN. Sementara itu, berdasarkan tipe proyek yang dikerjakan, 40,19% merupakan proyek residential, 12,81% *commercial*, 17,62% *office*, dan 29,38% *public facilities*.

WEGE has a proven and trusted track record in building construction of various types, sizes, segments, and levels of complexity. Since its inception in 2008 until 2024, WEGE has successfully obtained 410 new contracts for projects with a total project value of Rp55.90 trillion. From the achievements in obtaining new projects, 92.53% derived from external sources, while 7.47% derived from internal sources through the parent entity. With various employers (owners), 44.89% of projects derived from the private sector, 25.41% from the government, and 29.70% from BUMN. In the meantime, based on the type of project being worked on, 40.19% were residential projects, 12.81% commercial, 17.62% office, and 29.38% public facilities.



04



LEADERSHIP

Memiliki kepemimpinan yang kuat dalam menghadapi tantangan serta kemampuan strategis dalam mengelola human capital guna mewujudkan visi bisnis ke depan.

Having strong leadership in facing challenges and strategic capabilities in managing human capital to realize the future business vision.

05

SUSTAINABLE FUTURE

Sebagai pemimpin dalam pembangunan berkelanjutan, WEGE mengintegrasikan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) ke dalam strategi dan operasional bisnis, menjadikannya salah satu keunggulan kompetitif utama. Pada aspek lingkungan, WEGE berfokus pada pengurangan emisi karbon, efisiensi energi, dan material ramah lingkungan. Dalam aspek sosial, WEGE mendukung kesejahteraan karyawan, masyarakat lokal, keberagaman *(diversity)*, serta mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui infrastruktur strategis. Di bidang tata kelola, WEGE menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan menjunjung tinggi transparansi, praktik anti-korupsi, serta penciptaan nilai ekonomi yang memberikan dampak positif bagi sosial dan lingkungan.



As a leader in sustainable development, WEGE integrates Environmental, Social, and Governance (ESG) principles into its business strategy and operations, making it one of its main competitive advantages. In the environmental aspect, WEGE focuses on carbon emission reduction, energy efficiency, and environmentally friendly materials. In the social aspect, WEGE supports the welfare of employees, local communities, diversity, and supports the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs) through strategic infrastructure. In the area of governance, WEGE implements Good Corporate Governance (GCG) by upholding transparency, anti-corruption practices, and the creation of economic value that has a positive impact on society and the environment.

06

BUILDING INFORMATION MODELING (BIM)

WEGE sebagai perusahaan pertama di Indonesia yang memperoleh ISO 19650-1:2018 dan ISO 19650-2:2018 BSI Kitemark™ dari PT BSI (British Standards Institute) Group Indonesia dalam penerapan *Building Information Modeling* (BIM). WEGE telah menerapkan teknologi BIM di berbagai proyek, yang mampu memberikan gambaran menyeluruh secara 3 dimensi tentang proyek yang akan dikerjakan. Dengan pemanfaatan BIM, WEGE dapat menyusun perencanaan secara lebih akurat serta meminimalisir risiko pada setiap tahapan pengerjaan proyek.



WEGE as the first company in Indonesia to obtain ISO 19650-1:2018 and ISO 19650-2:2018 BSI Kitemark™ from PT BSI (British Standards Institute) Group Indonesia in the application of Building Information Modelling (BIM). WEGE has implemented BIM technology in various projects, which is able to provide a comprehensive 3-dimensional picture of the project to be worked on. By utilizing BIM, WEGE can plan more accurately and minimize risks at every stage of the project.

07

GOVERNMENT OF INDONESIA AS THE ULTIMATE SHAREHOLDER

- WEGE secara tidak langsung memiliki hubungan afiliasi melalui penyertaan modal oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang diwakili oleh Kementerian BUMN sebagai pemegang saham mayoritas PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, selaku entitas induk Perseroan.
- Akses terhadap sumber pendanaan dari Bank BUMN, perjanjian kerja sama dalam rangka kegiatan usaha Perseroan dengan BUMN lain, entitas anak, serta badan dan institusi pemerintah yang berwenang.



- WEGE indirectly has an affiliate relationship through capital participation by the Government of the Republic of Indonesia, represented by the Ministry of SOEs as the majority shareholder of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, as the parent entity of the Company.
- Access to funding sources from state-owned banks, cooperation agreements in the context of the Company's business activities with other state-owned enterprises, subsidiaries, and authorized government agencies and institutions.

Komitmen dan Implementasi ESG

Commitment and Implementation of ESG



PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) mengeluarkan kebijakan keberlanjutan pada tanggal 5 April 2024 sebagai bentuk komitmennya dalam menerapkan keberlanjutan di seluruh lini bisnis dan aktivitas operasionalnya. Dalam rangka menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemangku kepentingan, WEGE mengintegrasikan strategi nya terhadap prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), melalui :

1. Menyediakan/menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas, menjadi mitra terpercaya bagi para pemangku kepentingan, serta menjalankan sistem manajemen lingkungan dalam setiap aktivitas operasionalnya;
2. Memperhatikan dampak ekonomi, social dan lingkungan dalam menjalankan kegiatannya serta bertanggung jawab terhadap *Construction Lifestyle;*
3. Menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, etika bisnis serta patuh terhadap hukum yang berlaku;
4. Melakukan inovasi untuk meningkatkan pertumbuhan dan penciptaan nilai yang berkelanjutan serta senantiasa mendorong pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan;
5. Menjalankan aspek keberlanjutan secara strategis di lingkungan bisnis.

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) issued a sustainability policy on April 5, 2024, as a commitment to implementing sustainability across all business lines and operational activities. In order to create long-term value for stakeholders, WEGE integrates its strategy with Environmental, Social, and Governance (ESG) principles, by:

1. Providing/producing quality products and services, being a trusted partner for stakeholders, and implementing environmental management systems in every operational activity;
2. Considering economic, social, and environmental impacts in its activities and being responsible for Construction Lifestyle;
3. Conducting business activities based on good corporate governance principles, business ethics, and compliance with prevailing laws;
4. Innovating to increase growth and sustainable value creation, and promoting sustainable social and economic development;
5. Implementing sustainability aspects strategically in the business environment.



WIKA Gedung

KEBIJAKAN KEBERLANJUTAN
PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG, Tbk.

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk. (WIKA Gedung) berkomitmen untuk menerapkan konstruksi berkelanjutan dan menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemangku kepentingan melalui praktik berkelanjutan dalam seluruh bisnis WIKA Gedung, serta mengintegrasikan strategi dan aktivitasnya ke dalam tanggung jawab terhadap *Environment, Social, Governance* (ESG).

Konteks keberlanjutan WIKA Gedung tidak terlepas dari dinamika industri, perubahan regulasi dan standar, strategi bisnis yang dirumuskan perusahaan, kegiatan operasional yang dijalankan, *value chain*, dan kepedulian para pemangku kepentingan, melalui:

a. Menyediakan/menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas, menjadi mitra terpercaya bagi para pemangku kepentingan, serta menjalankan sistem manajemen lingkungan dalam setiap aktivitas operasionalnya
b. Memperhatikan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan dalam menjalankan kegiatannya serta bertanggung jawab terhadap *Construction Lifecycle*
c. Menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, etika bisnis serta patuh kepada hukum yang berlaku
d. Melakukan inovasi untuk meningkatkan pertumbuhan dan penciptaan nilai yang berkelanjutan serta senantiasa mendorong pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan
e. Menjalankan aspek keberlanjutan secara strategis di lingkungan bisnis

WIKA Gedung menjamin implementasi Kebijakan Keberlanjutan dengan upaya perbaikan secara berkelanjutan serta mensosialisasikannya ke seluruh karyawan WIKA Gedung.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 April 2024

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG, Tbk.
Direksi

Hadian Pramudita
Direktur Utama

Selaras dengan perubahan visi dan misi WEGE khususnya dalam tujuan keberlanjutan, WEGE memastikan bahwa penerapan keberlanjutan sepanjang tahun 2024 mencakup:

1. Lingkungan (*Environment*)
    a. Melakukan pemantauan terhadap pencapaian target *Net Zero Emissions* berjalan sesuai dengan peta jalan *(roadmap)* yang sudah ditetapkan;
    b. Proaktif dalam mengelola strategi dan risiko Transisi Energi terbarukan dan solusi rendah karbon;
    c. Menerapkan kebijakan terkait efisiensi energi, pengurangan emisi, pengelolaan limbah, serta konservasi keanekaragaman hayati; dan
    d. Memproritaskan keberlanjutan dalam strategi pengembangan produk ramah lingkungan yang memiliki daya saing tinggi.

2. Sosial (*Social*)
    a. Fokus pada kepentingan Sumber Daya Manusia yakni karyawan dengan memberikan pengembangan kompetensi dan pelatihan secara intens serta memberikan lingkungan yang aman dan nyaman; dan
    b. Fokus pada kepuasan pelanggan melalui pemberian akses serta layanan yang baik terhadap seluruh pelanggan.

3. Tata Kelola (*Governance*)
    a. Membangun budaya keberlanjutan diseluruh aktivitas perusahaan;
    b. Mengembangkan strategi keberlanjutan melalui kebiijakan dan arahan pembangunan keberlanjutan;
    c. Mengintegrasikan prinsip ESG ke dalam seluruh aspek operasional dan strategis perusahaan; dan
    d. Menjaga keberlangsungan bisnis dengan meningkatkan sistem tata kelola perusahaan, kualitas pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjaga etika bisnis sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Keberlanjutan merupakan bagian dari strategi perjalanan transformasi perusahaan dan menjadi kunci transformasi strategi penguatan tata kelola yang berlangsung di Perseroan. Dalam menjalankan praktik keberlanjutan, WEGE secara konsisten mengevaluasi seluruh penerapan strategi keberlanjutan, kemudian diselaraskan dengan target yang tercantum dalam peta jalan transformasi perusahaan.

In conformity with the changes in WEGE's vision and mission, particularly in sustainability goals, WEGE ensures that the implementation of sustainability throughout 2024 includes:

1. Environment
    a. Monitoring the achievement of Net Zero Emissions targets according to the established roadmap;
    b. Proactively managing strategies and risks related to renewable energy transition and low-carbon solutions;
    c. Implementing policies related to energy efficiency, emission reduction, waste management, and biodiversity conservation;
    d. Prioritizing sustainability in the development strategy of environmentally friendly products with high competitiveness.

2. Social
    a. Focusing on the interests of human resources, namely employees, by providing intensive competency development and training, as well as providing a safe and comfortable work environment;
    b. Focusing on customer satisfaction through providing access and good services to all customers.

3. Governance
    a. Building a sustainability culture across all company activities;
    b. Developing sustainability strategies through policies and directives for sustainable development;
    c. Integrating ESG principles into all aspects of operational and strategic company activities;
    d. Maintaining business continuity by improving corporate governance systems, quality of Human Rights fulfillment, and maintaining business ethics in accordance with prevailing regulations.

Sustainability is part of the company's transformation journey strategy and is a key to transforming governance strengthening strategies that are ongoing in the Company. In implementing sustainable practices, WEGE consistently evaluates the entire implementation of sustainability strategies, which are later aligned with the targets listed in the company's transformation roadmap

ENVIRONMENTAL



KOMITMEN
Commitment



WEGE berkomitmen untuk mencapai NZE pada tahun 2060 untuk Cakupan 1, 2, dan 3 melalui Kebijakan Keberlanjutan tanggal 5 April 2024.
WEGE is committed to achieving NZE (Net Zero Emission) by 2060 for Scope 1, 2, and 3 through the Sustainability Policy dated April 5, 2024.

EKO-EFISIENSI PROGRAM
Eco-Efficiency Program

7 UNIT MOBIL LISTRIK
Electric Car Unit

1 UNIT MOTOR LISTRIK
Electric Motorcycle Unit

25% PROYEK GREEN BUILDING
Green Building Project

5 GREENHOUSE BINAAN WEGE
Greenhouse Binaan WEGE

- Penerapan Sistem Modular dalam proyek WEGE melalui metode Prefabricated Prefinished Volumetric Construction (PPVC) yang ramah lingkungan dan mengusung prinsip lean construction
- Penggunaan lampu LED & Lampu Sensor
- The implementation of the Modular System in WEGE projects through the environmentally friendly Prefabricated Prefinished Volumetric Construction (PPVC) method, which adopts the principles of lean construction.
- The use of LED lights & Sensor Lights.

PENGELOLAAN EMISI KARBON
Carbon Emission Management

SCOPE 1	SCOPE 2	SCOPE 3
10.913,77 tCO_2e	7.748,23 tCO_2e	361,55 tCO_2e
Stationary Combustion, Mobil Fuel and Refrigerant	Purchased Electricity	Material Transport and Business Travel

PENGGUNAAN ENERGI
Energy Usage

178.051
Gigajoule (GJ)

INTENSITAS ENERGI PER PENDAPATAN
Energy intensity of GDP

0,0485
(GJ/Juta Rupiah | million Rupiah)

PROGRAM KAMPUNG IKLIM (PROKLIM) KEBUN JASMINE, BANDUNG MENCAPAI TINGKATAN PROKLIM MADYA
The "Kampung Iklim (Proklim)" Program in Jasmine Garden, Bandung, has reached the Proklim Madya level

KONSERVASI FAUNA BERUANG MADU, BALIKPAPAN
Sun Bear Fauna Conservation, Balikpapan

Revitalisasi taman bermain Pusat Konservasi Beruang Madu di Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup (KWPLH) Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai dukungan terhadap pusat pendidikan dan konservasi Beruang Madu di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) seluas 1,3 hektar dengan total 7 beruang madu.
Revitalization of the playground at the Sun Bear Conservation Center in the Environmental Education Tourism Area (KWPLH) Balikpapan, East Kalimantan, as support for the education and conservation center for Sun Bears in the Nusantara Capital City (IKN) area, spanning 1.3 hectares with a total of 7 Sun Bears.



PELESTARIAN LINGKUNGAN & KONSERVASI
Environmental Conservation & Conservation

5 **Penanaman Pohon Langka Dalam Program Penanaman Pohon Langka Endemik Nusantara, Sinergi Dengan Grup Wika Meliputi Sonokeling, Kemuning Hutan, Terap Hijau, Belimbing Papua, Randu Alas.**
Planting Rare Trees within the Rare Endemic Nusantara Tree Planting Program, Synergy with the Wika Group including Sonokeling (Rosewood), Kemuning Hutan (Forest Orange Jessamine), Terap Hijau (Green Terap), Belimbing Papua (Papuan Starfruit), Randu Alas (Silk-cotton Tree)



764
Bibit Pohon
Tree Seeds

STRATEGI RISIKO IKLIM
Climate Risk Strategy

- **Risiko Fisik**
  Potensi kerugian secara fisik yang disebabkan oleh dampak dari perubahan iklim:
  1. **Kenaikan Permukaan Laut**
  2. **Stress Panas pada Pekerja**
  3. **Aksesibilitas Situs**
  4. **Ketersediaan Sumber Daya Air**
- **Risiko Transisi**
  Mengacu pada risiko yang terkait dengan transisi ekonomi rendah karbon:
  1. **Tekanan Investor**
  2. **Preferensi Konsumen**
  3. **Ketidakpastian Regulasi**
  4. **Teknologi Baru**
- **Physical Risks**
  Potential physical losses caused by the impacts of climate change:
  1. **Sea Level Rise**
  2. **Heat Stress on Workers**
  3. **Site Accessibility**
  4. **Availability of Water Resources**
- **Transition Risks**
  Refers to risks associated with the transition to a low-carbon economy:
  1. **Investor Pressure**
  2. **Consumer Preferences**
  3. **Regulatory Uncertainty**
  4. **New Technologies**

PROGRAM ZERO WASTE
Zero Waste Program

Inisiatif untuk mengurangi timbulan sampah melalui pemilahan, pemanfaatan kembali, dan kerja sama dengan berbagai pihak agar limbah tidak berakhir di tempat pembuangan akhir.
Initiatives to reduce waste generation through sorting, reuse, and collaboration with various parties to prevent waste from ending up in landfills.



TOTAL KONSUMSI AIR
Total Water Consumption

140,99 M^3

BIAYA LINGKUNGAN HIDUP
Environmental Costs

Rp93.591.500
Mencakup biaya untuk penanaman pohon dan upaya konservasi.
Includes costs for tree planting and conservation efforts

WEGE menjadi perusahaan konstruksi pertama di Indonesia yang meraih sertifikasi ISO 50001:2018 sebagai bentuk komitmen dalam pengelolaan energi yang efisien dan berkelanjutan
WEGE is the first construction company in Indonesia to achieve ISO 50001:2018 certification as a form of commitment to efficient and sustainable energy management

SOCIAL



INKLUSI KEUANGAN
Financial Inclusion

MODULAR ERP WEGE

SAP BUILDING INFORMATION MODELING

HAK ASASI MANUSIA
Human Rights

- Penerapan Respectful Workplace Policy (RWP)
- Tidak terdapat kejadian pelanggaran HAM di WIKA Gedung
- Implementation of the Respectful Workplace Policy (RWP).
- There were no incidents of human rights violations at WIKA Gedung.

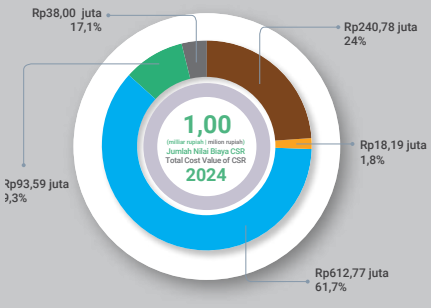


PENGEMBANGAN DAN EVALUASI KARYAWAN
Employee Development and Evaluation

- **Biaya Pengembangan Kompetensi Karyawan**
  Employee Competency Development Costs
  Rp1,98
  miliar | Billion
- **Karyawan mendapatkan penilaian dan evaluasi kinerja dalam rangka mendukung pengembangan karier**
  Employees receive performance appraisals and evaluations to support career development.
  100%

REALISASI DANA CSR
Realization of CSR Funds





PENGUKURAN DAN PENILAIAN DAMPAK PROGRAM CSR
Measurement and Assessment of CSR Program Impacts

PAUD MODULAR
Paud Modular
3,42

TERAS BRAGA
Teras Braga
4,56

WEGE LAPAK
WEGE Lapak
3,42

Angka tersebut dapat diartikan bahwa nilai investasi yang diberikan oleh WEGE setiap Rp1 menghasilkan nilai manfaat yang signifikan melalui Program CSR. Artinya program CSR Perseroan memberikan daampak positif bagi penerima manfaat.

This figure can be interpreted to mean that the investment value provided by WEGE for every Rp1 generates a significant benefit value through the CSR Program. This signifies that the Company's CSR program has a positive impact on beneficiaries.

INDEKS KEPUASAN PELANGGAN
Customer Satisfication Index

93,39%

Melebih target yang ditetapkan yaitu 87,5%
Exceeding the set target of 87.5%



SERTIFIKASI PEKERJA
Certification Worker



50%

karyawan tersertifikasi terhadap total karyawan
of certified employees to total employees

KEBERAGAMAN KARYAWAN
Diversity Employees

% Jumlah Karyawan perempuan terhadap total karyawan
% of female employees to total employees:

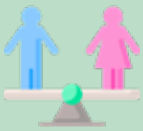
12%
Karyawan Perempuan
Female Employee

Jumlah Karyawan
Total Employees



500
Karyawan
Employee

KESETARAAN GENDER
Gender Equality



88%
Karyawan Laki-Laki
Male Employee

12%
Karyawan Perempuan
Female Employee

0
Kasus non-diskriminasi
Non-discrimination cases

UMKM BINAAN
Mentored SMEs

60
UMKM Binaan
UMKM Binaan

Mendukung UMKM, baik dari karyawan internal maupun masyarakat eksternal, untuk meningkatkan perekonomian melalui pelatihan, sertifikasi, kesempatan mengikuti bazaar, dan berbagai kegiatan lainnya.
Supporting SMEs (Small and Medium Enterprises), both from internal employees and the external community, to improve the economy through training, certification, opportunities to participate in bazaars, and various other activities.

KONTRIBUSI KEPADA MASYARAKAT
Contribution to the Community

Peluncuran Grand Design CSR sebagai acuan strategis dalam pengelolaan program tanggung jawab sosial perusahaan.
The launch of the CSR Grand Design as a strategic reference in managing the company's social responsibility programs.



RATA-RATA JAM PELATIHAN PER KARYAWAN
Average training hours per employee

24,96





TINGKAT TURNOVER
Turnover Level

5,46%

PEMBERDAYAAN DISABILITAS
Disabilty Empowerement

- **Total Penyandang Disabilitas**
  Total Disabled Persons
- **Total Pelatihan atau Pendampingan**
  Total Training/Mentoring
- **Nilai Ekonomi yang Dihasilkan**
  Economic Value Generated

17
Penerima Manfaat
Beneficiaries



Meningkatkan keterampilan dan kualitas hidup penyandang disabilitas melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, dan advokasi dengan memanfaatkan daur ulang barang bekas menjadi produk bernilai ekonomi.
Improving the skills and quality of life of persons with disabilities through training, mentoring, and advocacy activities by utilizing the recycling of used goods into economically valuable products.

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
Occupational Safety and Health (OSH)



26.672.550
jam | hours

GOVERNANCE



SNI ISO 27001:2013
Sistem Manajemen Keamanan Informasi
SNI ISO 27001:2013
Information Security Management System

SNI ISO 50001:2018
Sistem Manajemen Energi
SNI ISO 50001:2018
Energy Management System

SNI ISO 31000:2018
Sistem Manajemen Risiko
SNI ISO 31000:2018
Risk Management System

SNI ISO 9001:2015
Sistem Manajemen Kualitas
SNI ISO 9001:2015
Quality Management System

SNI ISO 45001:2018
Sistem Manajemen Kesehatan Dan Keselamatan Kerja
SNI ISO 45001:2018
Occupational Health and Safety Management System

SNI ISO 14001:2015
Sistem Manajemen Lingkungan
SNI ISO 14001:2015
Environmental Management System

Sertifikat Penghargaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Certificate of Award
Occupational Health and Safety Management System

SNI ISO 37001: 2016
Sistem Manajemen Anti Penyuapan
SNI ISO 37001:2016
Anti-Bribery Management System

RATING
Tahun | Year 2023



31.1

SUSTAINALYTICS
Kategori High Risk
High Risk Category

Penilaian Implementsi GCG
GCG Implementation Assessment



90,49%

Sangat Baik atau Level 4
Very Good or Level 4

ASEAN Corporate Governance Scorecard
Assessment ACGS oleh IICD (Indonesia Institut for Corporate Directorship)
Mencerminkan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara menyeluruh dan sesuai dengan standar internasional.
Reflecting the comprehensive implementation of Good Corporate Governance principles in accordance with international standards.

Keberagaman
Diversity



2 dari 4 anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen
2 out of 4 members of the Board of Commissioners are Independent Commissioners



1 orang anggota Dewan Komisaris merupakan Perempuan
1 member of the Board of Commissioners is a Woman

Whistleblowing System
Whistleblowing System



Zero Whistleblowing

jumlah Pelaporan Pelanggaran
number of Violation Reports



Terbentuknya Komite Tata Kelola Terintegrasi
Establishment of Integrated Governance Committee



Membentuk unit khusus penanggung jawab Keberlanjutan
Establish a special unit responsible for Sustainability

Sistim Manajemen Anti Penyuapan
Anti-Bribery Management System



Zero Briberry

Penghargaan
Awards



- **CSA Awards 2024: Award Of Excellence The Sustainable Modular Innovation**
- **Transparansi & Penurunan Emisi Korporasi Terbaik 2024**
- **Indonesia Sustainable Development Goals Award (ISDA) 2024**
- **TJSL &CSR AWARDS 2024**
- CSA Awards 2024: Award Of Excellence The Sustainable Modular InnovationBest Corporate Transparency & Emission Reduction 2024
- Indonesia Sustainable Development Goals Award (ISDA) 2024 TJSL &CSR AWARDS 2024

KEPATUHAN TERHADAP HUKUM
Compliance with the Law



- Tidak terdapat kasus ketidakpatuhan terhadap regulasi yang menyebabkan sanksi/denda [GRI 2-27]
- Tidak terdapat kasus korupsi yang terjadi di lingkungan perusahaan
- There were no cases of non-compliance with regulations that resulted in sanctions/fines [GRI 2-27]
- There were no cases of corruption that occurred within the company environment.



Penerbitan Kebijakan Keberlanjutan
Publication of Sustainability Policy

KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN
Stakeholder Engagement

WEGE mengadakan Stakeholder Engagement Forum 2024 yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal
WEGE held a 2024 Stakeholder Engagement Forum which was attended by various stakeholders, both internal and external



Dukungan Keberlanjutan Melalui Produk Modular WEGE

Sustainability Support through WEGE Modular Products



Konstruksi modular merupakan salah satu inovasi dalam industri konstruksi yang memberikan kontribusi nyata terhadap upaya keberlanjutan. Metode ini dikenal lebih ramah lingkungan karena mampu mengurangi limbah konstruksi, menghemat konsumsi energi, serta meminimalkan gangguan terhadap lingkungan sekitar, baik pada tahap produksi di workshop/pabrik (*off-site*) maupun saat proses pemasangan di lokasi proyek (*on-site*).

Sebagai pionir dalam pengembangan konstruksi modular di Indonesia, WEGE telah memulai pengembangan dan memperkenalkan produk konstruksi modular sejak tahun 2018 melalui pembentukan Divisi Modular. Inisiatif ini merupakan bagian dari strategi transformasi bisnis Perseroan yang berorientasi pada inovasi, efisiensi, dan keberlanjutan.

Lebih dari sekadar inovasi teknis, pengembangan modular WEGE juga menjadi tonggak awal dalam integrasi prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) ke dalam proses bisnis inti Perseroan. Melalui pendekatan *Backward Offsite Construction*, produk modular WEGE menawarkan solusi konstruksi yang lebih presisi, cepat, efisien, dan ramah lingkungan.

Modular construction is one of the innovations in the construction industry that makes a real contribution to sustainability endeavors. This method is known to be more environmentally friendly because it can reduce construction waste, save energy consumption, and minimize disruption to the surrounding environment, both during the production stage in the workshop/factory (off-site) and during the installation process at the project location (on-site).

As a pioneer in the development of modular construction in Indonesia, WEGE has started developing and introducing modular construction products since 2018 through the establishment of the Modular Division. This initiative is part of the Company's business transformation strategy that is oriented towards innovation, efficiency, and sustainability.

More than just a technical innovation, the development of WEGE modular is also an initial milestone in the integration of Environmental, Social, and Governance (ESG) principles into the Company's core business processes. Through the Backward Offsite Construction approach, WEGE modular products offer more precise, fast, efficient, and environmentally friendly construction solutions.

Dengan sistem konstruksi yang lebih terencana, terkontrol, dan terintegrasi, modular WEGE tidak hanya mendorong efisiensi dari sisi waktu dan biaya, tetapi juga berkontribusi signifikan dalam mengurangi jejak karbon di seluruh siklus konstruksi. Hal ini sejalan dengan komitmen Perseroan dalam mendukung pencapaian target *Net Zero Emissions* (NZE) pada tahun 2060 yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia.

MODULAR WEGE



Offsite Construction
Offsite Construction

- Kualitas lebih stabil
- *Safety* meningkat
- Proses pekerjaan lebih terukur & Minim gangguan

- More stable quality
- Safety increases
- More measurable work processes with minimal disruption



Efisiensi Energi
Energy Efficiency

- Masa konstruksi cepat
- Tidak banyak alat berat energi lebih rendah
- Mengurangi emisi gas rumah kaca 17-30%

- Fast construction period
- Less heavy equipment, lower energy
- Reduce greenhouse gas emissions by 17-30%

Menurut studi oleh para akademisi dari University of Cambridge dan Edinburgh Napier University. Konstruksi Modular menghasilkan CO2 41-45% lebih rendah dibanding metode konvensional dalam membangun rumah.

Mengapa kita harus mengubah cara kita membangun?

Karena saat ini dibutuhkan bangunan berkelanjutan (*Sustainable Building*) yang merupakan konsep desain dan konstruksi yang berfokus mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya (*Lean Construction*).

With a more planned, controlled, and integrated construction system, WEGE modular not only drives efficiency in terms of time and cost, but also contributes significantly to reducing the carbon footprint throughout the construction cycle. This is in conformity with the Company's commitment to supporting the achievement of the Net Zero Emissions (NZE) target by 2060 as initiated by the Indonesian Government.

MODULAR WEGE



Ramah Lingkungan
Environmentally Friendly

- Minim limbah & sisa material
- Minim polusi suara & udara
- Dapat dipindah & digunakan kembali

- Minimal waste & remaining materials
- Minimal noise & air pollution
- Can be moved & reused



Lokal
Local

- Karya anak bangsa (tim R&D) internal WEGE
- Mengutamakan pemilihan material lokal
- Difabrikasi di *workshop* WEGE sendiri

- The work of children of the nation (WEGE's internal R&D team)
- Prioritize the selection of local materials
- Fabricated in WEGE's own workshop

According to a study by academics from the University of Cambridge and Edinburgh Napier University, Modular construction produces 41-45% less CO2 than conventional methods of building a house.

Why should we change the way we build?

Today we need sustainable buildings (Sustainable Building) which is a design and construction concept that focuses on reducing negative impacts on the environment and increasing the efficiency of resource use (Lean Construction).

1. **Perubahan Iklim** | **Climate Change**
Suhu rata-rata permukaan bumi tahun 2023 meningkat 1,5°C yang berdampak pada kekeringan, kelangkaan air, kebakaran, naiknya permukaan laut, banjir, pencairan es kutub, bencana badai dan penurunan keanekaragaman hayati. (Sumber : news.un.org)
In 2023, the Earth's average surface temperature rose by 1.5°C, resulting in severe environmental impacts including drought, water scarcity, wildfires, rising sea levels, flooding, polar ice melting, extreme storms, and a decline in biodiversity.

2. **Tingginya Emisi Industri Konstruksi** | **High Emissions from the Construction Industry**
Bangunan beroperasi dan industri konstruksi menghasilkan 40% emisi CO_2 global tahunan. (Sumber : architecture2030.org)
Building operations and the construction industry account for 40% of global annual CO_2 emissions.

3. **Tingginya Sampah Industri Konstruksi** | **The High Volume of Construction Industry Waste**
Sampah industri konstruksi secara global mencapai 2 miliar metrik ton/tahun. Diperlukan aksi pengurangan limbah. (Sumber : Global waste generation statistics & facts, 2020)
Globally, the construction industry generates approximately 2 billion metric tons of waste annually. Urgent action is needed to reduce this waste.





SISTEM MODULAR WEGE

Sistem konstruksi modular WEGE telah melalui serangkaian proses riset dan uji dari berbagai aspek serta merupakan karya anak bangsa yang patut dibanggakan. Proses Produksi sistem modular juga dilakukan dengan tetap mengedepankan kaidah-kaidah yang berlaku dan sudah melalui pengujian.

WEGE MODULAR SYSTEM

The WEGE modular construction system has gone through a series of research and testing processes from various aspects and is a proud work from the children of the nation. The modular system production process is also undertaken by continuing to prioritize prevailing procedures and has been tested.








Prefabrikasi Berstandar ISO
ISO Standardized Prefabrications

Nilai TKDN Tinggi (59%)
High TKDN Value (59%)

Memiliki Hak Cipta
Has Copyright

Lulus Uji Siklik
Passed Cyclic Testing

Melalui Proses Riset Panjang
Through an Extensive Research Process

WEGE terus berinovasi dalam mengembangkan metode konstruksi yang adaptif dan berkelanjutan guna menjawab berbagai tantangan di industri konstruksi. Saat ini, Perseroan memiliki tiga tipe produk modular, yaitu:

WEGE continues to innovate in developing adaptive and sustainable construction methods to address various challenges in the construction industry. Currently, the Company has three types of modular products, namely:



MOLI (Modular Lite)



WG Flatpack



Volumetrik

MOLI (Modular Lite)

Sistem konstruksi modular ringan untuk maksimal 2 lantai, dengan perakitan tanpa alat berat. Dikirim berupa bagian terkecil atau batang rangka.

MOLI (Modular Lite)

Lightweight modular construction system for up to 2 floors, with assembly without heavy equipment. Delivered in the form of the smallest parts or trusses.



Prototipe dipabrik Modular
Prototype in Modular Manufacturing



Proses Perakitan Rangka. Proyek Paddock, Mandalika
Frame Assembly Process, Paddock Project, Mandalika



Fullbelly Hotel, Sentul
Hotel Fullbely, Sentul



Copyright by WEGE

WG Flatpack

Sistem konstruksi modular cepat dan praktis untuk maksimal 4 lantai. Dikirim dalam bentuk panel atau modul lantai, modul atap, kolom dan panel dinding.

WG Flatpack

Fast and practical modular construction system for up to 4 floors. Delivered in the form of floor panels or modules, roof modules, columns and wall panels.



Pit Building, Mandalika



RS Covid Pulau Galang
Pulau Galang Covid Hospital



RS Covid Tanjung Duren
Tanjung Duren Covid Hospital



Paddock, Mandalika
Mandalika, Paddock



Hunian Pekerja IKN
IKN Imployeer Housing



Copyright by WEGE

Volumetrik

Sistem konstruksi modular yang 90% dipabrikasi, untuk bangunan 5 lantai ke atas. Studi saat ini sudah mencapai 14 lantai. Dikirim dalam bentuk 3D satu ruangan lengkap dengan interior dan instalasi MEP terpasang.

Volumetrik

Modular construction system that is 90% prefabricated, for 5 floors buildings and above. Current studies have reached 14 floors. Delivered in 3D form of one room complete with interior and MEP installations installed.



Uji angkut
Shipping Test



Prototipe Modul Volumetrik





Copyright by WEGE

MODULAR CIRCULAR

Modular Circular merupakan pendekatan dalam sistem konstruksi modular yang mengedepankan prinsip ekonomi sirkular (*circular economy*), yaitu pemanfaatan sumber daya secara efisien dan berkelanjutan melalui praktik daur ulang, penggunaan ulang (*reuse*), dan pengurangan limbah sejak tahap desain hingga akhir siklus hidup bangunan. Pendekatan ini tidak hanya mendukung efisiensi material dan energi, tetapi juga memperkuat ketahanan rantai pasok serta menekan dampak lingkungan dari aktivitas konstruksi.

Sebagai bentuk implementasinya, Divisi Modular WEGE berkolaborasi dengan berbagai pihak yang kompeten di bidangnya, baik dari segi *research and development* (R&D), pemasaran, substitusi material ramah lingkungan, maupun kegiatan publikasi dan *knowledge sharing* dalam rangka mengkampanyekan konstruksi yang ramah lingkungan (*eco-friendly construction*).

MODULAR CIRCULAR

Modular Circular is an approach in a modular construction system that emphasizes the principle of a circular economy, namely the efficient and sustainable use of resources through recycling, reuse, and waste reduction practices from the design stage to the end of the building's life cycle. This approach not only supports material and energy efficiency, but also strengthens the resilience of the supply chain and reduces the environmental impact of construction activities.

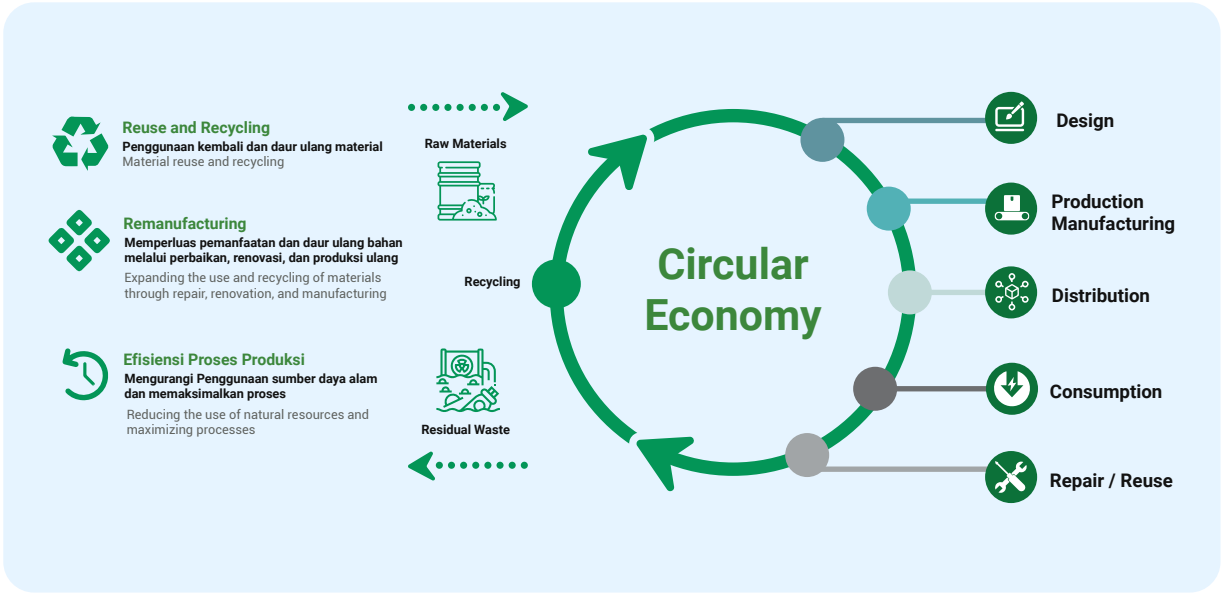
As the implementation, the WEGE Modular Division collaborates with various competent parties in their fields, both in terms of research and development (R&D), marketing, environmentally friendly material substitution, as well as publication and knowledge sharing activities in order to campaign for environmentally friendly construction (eco-friendly construction).

Program Modular Circular

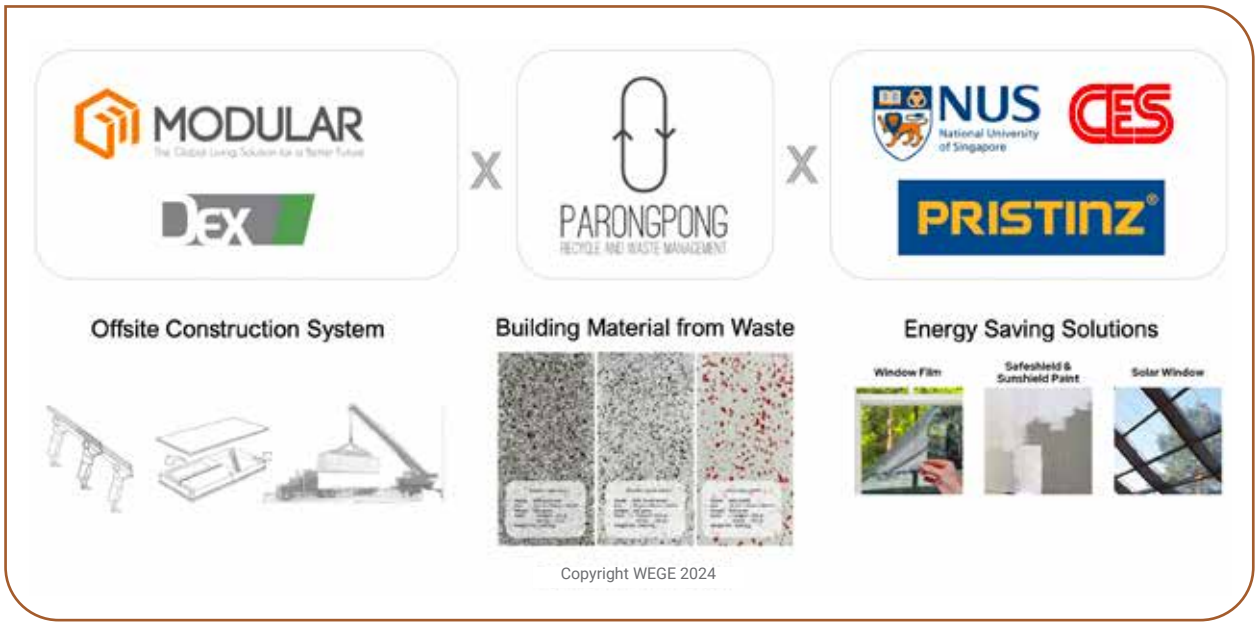
Konstruksi sirkular adalah strategi dimana penggunaan energi dan prinsip daur ulang menjadi dasar dalam pemilihan material dan metode dengan tujuan menekan penggunaan sumber daya dalam upaya mengurangi dampak terhadap iklim dan lingkungan (*Net Zero Emissions*).

Circular Modular Program

Circular construction is a strategy where the energy use and recycling principles are the basis for selecting materials and methods with the aim of reducing resource use in an undertaking to reduce impacts on climate and environment (Net Zero Emissions).

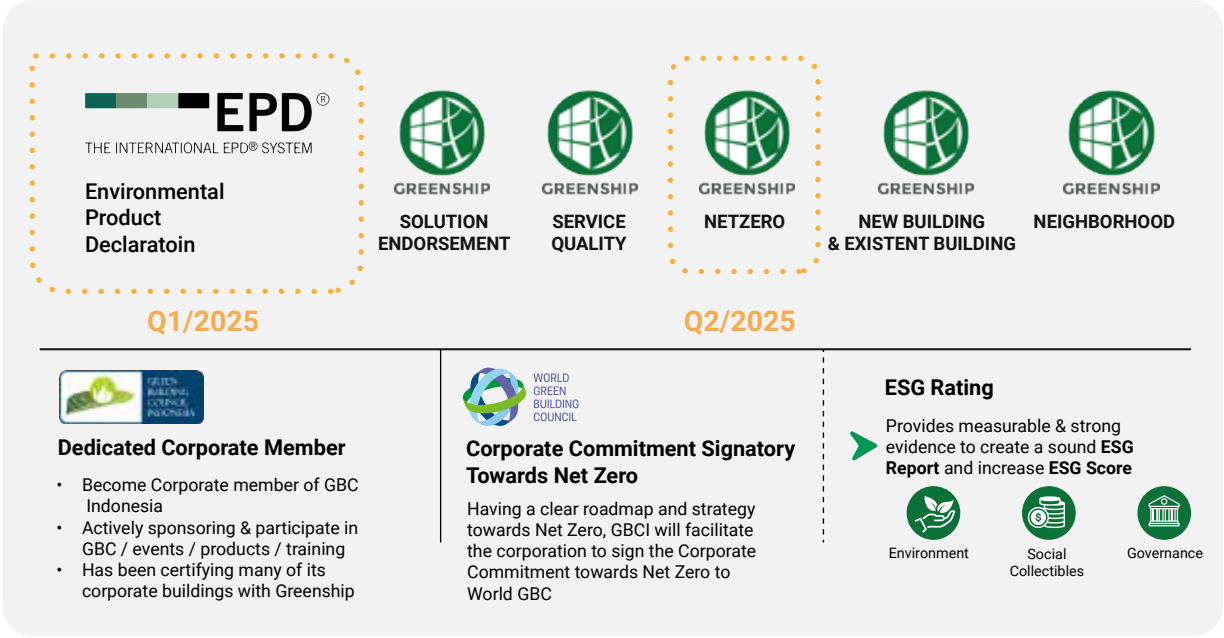


Modular Circular
Road to Net Zero Emissions



PROGRAM SERTIFIKASI NZE (WEGE x DEX)

NZE CERTIFICATION PROGRAM (WEGE x DEX)



NZE menjadi prioritas WEGE dalam upaya menghadapi perubahan iklim. Untuk itu, WEGE berkomitmen dalam mengurangi jejak karbon untuk mencapai target NZE. Salah satu langkah penting yang dilakukan Perseroan dalam mencapai target tersebut adalah melalui program sertifikasi NZE.

NZE is WEGE's priority in an effort to address climate change. To that end, WEGE is committed to reducing its carbon footprint to achieve the NZE target. One of the important steps taken by the Company in achieving this target is through the NZE certification program.

INDONESIA : HOW OPTIMISED DESIGN IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY CAN REDUCE EMISSIONS

Indonesia: How Optimised Design in the construction industry can reduce emmissions

The production and processing of metals, minerals, and other materials is a major contributor to climate change, in fact, according to the international Resource Panel (IRP), it accounts for almost one quarter of the world's greenhouse gas emissions. Going beyond energy efficienct and using materials more effciently offers both environmental and economic benefits - and it's key to achieving the goals of the Paris Agreement

In its 2020 report on resource efficiency and climate change, IRP set out seven strategies that public and private sector stakeholders can use to achieve greater material efficienct and foster climate action

- Using less material design
- Fabrication Yield Improvement
- Product lifetime extension
- Material Substitution
- Enhanced end-of-life recovery of recycling of materials
- Move intensive use
- Recovery, remanufacturing & Reuse of components

The Indonesian company WIKA Gedung reduces emissions by using less materials in their adapted construction process. While this is a small contribution in the grand scheme of things, the combined efforts of enterprises play a major role in a addressing climate change



Using less material by design

WIKA Gedung uses a modular system which many building parts are manufactured off-site and assembled on-site. This method saves up to 90% of time and uses less concrete and steel. This in turn means that the building foundations have to support less weight and therefore need less concrete as well. The lighter modules require less steel, while still guaranteeing a safe and stable structure that complies with standard building codes



An example of modular construction
in a two-storey hospital built by WIKA Gedung, the modular construction method saved around one third of the concrete used for the foundation of the structure, as well as 28% of steel compared to a conventional building. This avoided ~355 t CO_2e during construction - an important contribution to climate protection.



Approximately one third of concrete and steel saved



~355 t CO_2e*

* Equivalent to the GMG Emissions of 48 return flights from Jakarta to Berlin



In by making material efficiency
part of your climate strategies.
Published by: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Registered offices: Bonn and Eschborn, Germany
Address: Kothener Straße 2-3, 10963 Berlin, Germany
www.giz.de/en

Project: Initiative Resource Efficiency and Climate Action (IREK II) on behalf of the Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Nuclear Safety and Consumer Protection (BMUV)
The project is part of the International Climate Initiative (IKI)
Responsible: Elisabeth Dürr, Head of Division
GIZ is responsible for the content of this publication.
Design/Layout: kippconcept GmbH, Bonn
Berlin 2024

Studi dilakukan di 4 negara:

Argentina
Argentina's Institute for Standardisation and Certification (CIRSOC)
How recycling of material in the construction industry can reduce emissions
Savings 21000 t Co2e

Indonesia
WIKA Gedung (Modular)
How optimized design in the construction industry can reduce emissions
Savings 355 t Co2e

Studi dilakukan di 4 negara:

Mexico
Rusave
How optimized design in the leather industry can reduce emissions
Savings 3900 kg Co2e

Studi dilakukan di 4 negara:

Ecuador
CKG Brand
How recycling of material in the construction industry can reduce emissions
Savings 3900 kg Co2e

Metode konstruksi modular merupakan solusi atas tantangan tingginya emisi karbon yang dihasilkan oleh sektor konstruksi. Modular WEGE berkomitmen untuk terus mengembangkan metode ini sebagai bagian dari kontribusi Perseroan dalam mendukung pencapaian target *Net Zero Emissions* (NZE). Sejalan dengan penerapan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG), konstruksi yang berkelanjutan menjadi fokus utama Modular WEGE dalam membangun fondasi bagi kehidupan masa depan yang lebih baik serta mendorong terciptanya nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

The modular construction method is a solution to the challenge of high carbon emissions generated by the construction sector. Modular WEGE is committed to continuing to develop this method as part of the Company's contribution to supporting the achievement of the Net Zero Emissions (NZE) target. In line with the implementation of the Environmental, Social, and Governance (ESG) principles, a sustainable construction is the main focus of Modular WEGE in building the foundation for a better future life as well as encouraging the creation of long-term value for all stakeholders.

Pencapaian WEGE 2024

2024 WEGE Achievements

Capaian Revenue Stream

Revenue Stream Achievements



Rp **3,67** triliun | trillion



Pendapatan Konstruksi
Construction Revenue



Pendapatan Konsesi
Concession Revenue



Pendapatan Industri Modular
Modular Industry Revenue



Pendapatan Properti
Property Revenue

Laba Bersih Tahun Bejalan

Laba Bersih Tahun Bejalan

Rp **67,96** miliar | billion



46,14% YoY

Total Aset

Total Assets



Rp **5,73** triliun trillion

2,98% YoY

Total Ekuitas

Total Equity



Rp **2,61** triliun trillion

1,85% YoY

Saldo Kas dan Setara Kas

Cash and Cash Equivalents Balance



Rp **1,03** triliun trillion

0,55% YoY



Capaian Rasio Keuangan

Financial Ratio Achievement



Marjin Laba Kotor

Gross Profit Margin

8,37%

meningkat dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 7,62%
increased compared to the 2023 achievement of 7.62%

Rasio Lancar

Current Ratio



175,51%

capaian tahun 2023 sebesar 193,20%, dan capaian lebih dari 100%
2023 achievement of 193.20%, and achievement of more than 100%

Rasio Utang Berbunga terhadap Ekuitas

Gearing Ratio

0,18x

capaian tahun 2023 sebesar 0,09x, dan capaian kurang dari 1x / 100%
2023 achievement of 0.09x, and achievement of less than 1x / 100%

Rasio Jumlah Liabilitas terhadap Ekuitas

Debt to Equity Ratio (DER)

1,20x

capaian tahun 2023 sebesar 1,17x, dan capaian kurang dari 2x / 200%
2023 achievement of 1.17x, and achievement of less than 2x / 200%

Capaian Perolehan Proyek
Project Acquisition Achievement

Kontrak Baru I New Contract

Rp 2,72 triliun trillion

sebanyak **33** proyek baru yang diperoleh di tahun 2024
as many as **33** new projects achieved in 2024



Kontrak Dihadapi I Order Book

Rp 9,01 triliun trillion

Perolehan Kontrak Baru Berdasarkan Lini Bisnis
New Contract Acquisition by Business Line

Konstruksi Construction

Rp2,10 triliun | trillion — 77,42%

Industri Modular Modular Industry

Rp613,19 miliar | billion — 22,58%

Corporate Rating

idBBB

SEHAT
SOUND

Kategori Layak Investasi
Investment Grade Category

PEFINDO
CREDIT RATING AGENCY

Perolehan Kontrak Baru Berdasarkan Pemberi Kerja (Owner)
New Contract Acquisition by Employer (Owner)

Pemerintah Government

Rp1,68 triliun | trillion — 61,86%

BUMN State-Owned Enterprises

Rp597,88 miliar | billion — 22,02%

Swasta Private

Rp437,89 miliar | billion — 16,13%

Perolehan Kontrak Baru Berdasarkan Jenis Proyek
New Contract Acquisition by Project Type

Perkantoran Office

Rp817,68 miliar | billion — 30,11%

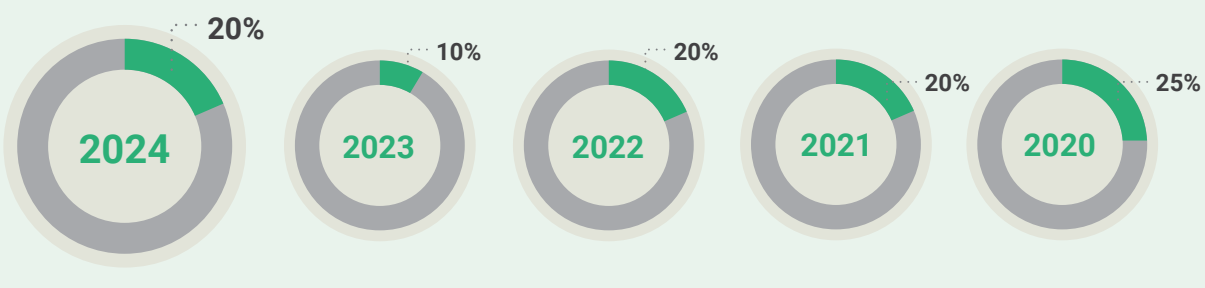
Residensial Residential

Rp702,53 miliar | billion — 25,87%

Fasilitas Publik Public Facilities

Rp1,19 triliun | trillion — 44,02%

Dividend Payout Ratio



Penghargaan dan Sertifikasi

Awards and Certifications

PENGHARGAAN DAN PENGAKUAN EKSTERNAL
EXTERNAL AWARDS AND RECOGNITION



MURI

Pembangunan Hunian Modular Siap Huni Tercepat (Hunian TNI 4 lantai, luas 2.246 m2 dalam 180 jam 3 menit 17 detik)
Fastest Ready-to-Occupy Modular Housing Development (4-storey TNI Housing, area 2,246 m2 in 180 hours 3 minutes 17 seconds)

Piagam Penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia No.11770/R.MURI/VIII/2024
Indonesian World Record Museum Award Charter No.11770/R.MURI/VIII/2024

2 Agustus 2024
August 2, 2024



MURI

Pembangunan Hunian Modular Topping Off Tercepat (Hunian TNI 4 lantai, luas 2.246 m2 dalam 16 jam 3 menit 40 detik)
Fastest Topping Off Modular Housing Development (4-storey TNI Housing, area 2,246 m2 in 16 hours 3 minutes 40 seconds)

Piagam Penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia No.11769/R.MURI/VIII/2024
Indonesian World Record Museum Award Charter No.11769/R.MURI/VIII/2024

2 Agustus 2024
August 2, 2024



MURI

Renovasi Dan Pembangunan Kembali Prasarana PON Dari Cabang Olahraga Terbanyak
Renovation and Redevelopment of PON Infrastructure from Most Sports Branches

Piagam Penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia No.11865/R.MURI/IX/2024
Indonesian World Record Museum Award Charter No.11865/R.MURI/IX/2024

9 September 2024
September 9, 2024



MURI

Bangunan Tower Hunian Dengan Komponen Pracetak Tertinggi
Residential Tower Building with Highest Precast Components

Piagam Penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia No.11951/R.MURI/X/2024
Indonesian World Record Museum Award Charter No.11951/R.MURI/X/2024

11 Oktober 2024
October 11, 2024



MURI

Proyek Pembangunan Tower Hunian Dengan Komponen Pracetak Terbanyak
Residential Tower Development Project with The Most Precast Components

Piagam Penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia No.11952/R.MURI/X/2024
Indonesian World Record Museum Award Charter No.11952/R.MURI/X/2024

11 Oktober 2024
October 11, 2024



MURI

Pembangunan Tower Hunian Siap Huni Tercepat Dengan Sistem Struktur Pracetak
Fastest Ready-to-Occupy Residential Tower Development with Precast Structure System

Piagam Penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia No.11953/R.MURI/X/2024
Indonesian World Record Museum Award Charter No.11953/R.MURI/X/2024

11 Oktober 2024
October 11, 2024







TRANSPARANSI & PENURUNAN EMISI KORPORASI TERBAIK 2024
BEST CORPORATE TRANSPARENCY AND EMISSION REDUCTION 2024

PLATINUM

Transparansi Perhitungan Emisi Korporasi
Transparency of Corporate Emissions Calculations

Bumi Global Karbon Foundation & Investortrust

29 Mei 2024
May 29, 2024

CSA AWARDS 2024 AWARD OF EXCELLENCE

The Sustainable Modular Innovation

CSA Awards

31 Oktober 2024
October 31, 2024

MEDIA RELATIONS AWARD (MRA) 2024

SILVER WINNER

Program Press Gathering Terbaik 2024
Best Press Gathering Program 2024

Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat
Central Press Company Union (SPS)

20 September 2024
September 20, 2024







INDONESIA SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS AWARD (ISDA) 2024

PLATINUM

Pilar Pembangunan Ekonomi Tujuan SDGs 9.1 (a)
Industri, Inovasi dan Infrastruktur
Pillars of Economic Development SDGs Goal 9.1 (a)
Industry, Innovation and Infrastructure

Modular, Enhancing Indonesia's Sustainable Future Construction

Corporate Forum for CSR Development (CFCD)

14 November 2024
November 14, 2024

ANUGERAH HUMAS INDONESIA 2024

BRONZE WINNER

Kategori Media Internal Sub Kategori Video Profile
Internal Media Category Video Profile Sub Category

Humas Indonesia

11 Oktober 2024
October 11, 2024

CSR AWARDS 2024

Most Impactful Program – Health & Education

Bumi Global Karbon Foundation & Investortrust

24 Oktober 2024
October 24, 2024



TJSL & CSR AWARDS 2024

PILAR EKONOMI GOLD

Kontribusi 4 Pilar TJSL BUMN Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SDGs
Contribution of 4 Pillars of BUMN TJSL in Supporting the Achievement of SDGs

BUMN TRACK

30 Juli 2024
July 30, 2024

PENGHARGAAN MENTERI PEKERJAAN UMUM 2024
MINISTER OF PUBLIC WORKS AWARD 2024

Sebagai Kontraktor Paket Pembangunan Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator I
As Development Package Contractor for Building and Office Area of the Coordinating Ministry I

Kategori Kinerja Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) Pada Proyek IKN Terbaik Bidang Cipta Karya
Category of Implementation Performance of the Construction Safety Management System (SMKK) in the Best IKN Project in the Public Works Sector

Menteri Pekerjaan Umum
Minister of Public Works

8 November 2024
November 8, 2024

PENGHARGAAN MENTERI PEKERJAAN UMUM 2024
MINISTER OF PUBLIC WORKS AWARD 2024

Sebagai Kontraktor Paket Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Rumah Susun Paspampres
As an Integrated Construction Package Contractor, Design and Build Paspampres Flats

Kategori Kinerja Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) Pada Proyek IKN Terbaik Bidang Perumahan
Category of Implementation Performance of the Construction Safety Management System (SMKK) in the Best IKN Project in the Housing Sector

Menteri Pekerjaan Umum
Minister of Public Works

8 November 2024
November 8, 2024



LACP VISION AWARDS 2023
ANNUAL REPORT COMPETITION LACP WINNER

1. Platinum Award
2. Top 100 Reports Worldwide
3. Top 100 Report Asia-Pasific Region
4. Top 20 Indonesia Reports
5. Best Letter to Shareholders
6. Technical Achievement Award

LACP (League Of American Communications Professionals)

2024

SERTIFIKAT
CERTIFICATE



SNI ISO 9001:2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS-REQUIREMENTS

Certificate No. QSC 00726

Sucofindo

Masa berlaku dari 8 Maret 2022 sampai 7 Maret 2025
Validity period from March 8, 2022 to March 7, 2025



SNI ISO 14001:2015 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS - REQUIREMENTS WITH GUIDANCE FOR US

Certificate No. EMS 00085

Sucofindo

Masa berlaku dari 8 Maret 2022 sampai 7 Maret 2025
Validity period from March 8, 2022 to March 7, 2025



SNI ISO 45001:2018 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM - REQUIREMENTS WITH GUIDANCE FOR US

Certificate No. OHS 00012

Sucofindo

Masa berlaku dari 8 Maret 2022 sampai 7 Maret 2025
Validity period from March 8, 2022 to March 7, 2025



SNI ISO 31000:2018 RISK MANAGEMENT SYSTEMS - GUIDELINES

Certificate No. SCM 00005

Sucofindo

Masa berlaku dari 17 Februari 2023 sampai 16 Februari 2024
Validity period from February 17, 2023 to February 16, 2024



SNI ISO 50001:2018 ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS - REQUIREMENTS WITH GUIDANCE FOR US

Certificate No. EnMS 00021

Sucofindo

Masa berlaku dari 18 Desember 2023 sampai 17 Desember 2026
Validity period from December 18, 2023 to December 17, 2026



SNI ISO 37001:2016 ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM

Certificate No. SAB 00086

Sucofindo

Masa berlaku dari 24 Februari 2025 sampai 10 Februari 2028
Validity period from February 24, 2025 to February 10, 2028



ISO 21500
PROJECT MANAGEMENT SYSTEM

Declaration Number:
ConSta-21500-001-I-24

TÜV NORD

Masa berlaku dari 10 Januari 2024 sampai 9 Januari 2025
Validity period from January 10, 2024 to January 9, 2025



SNI ISO 27001:2013
SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI

Certificate No. 01 07 L 22000720

TÜV NORD

Masa berlaku dari 15 Desember 2022 sampai 14 Desember 2025
Validity period from December 15, 2022 to December 14, 2025



OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MANAGEMENT SYSTEM

REG. SMK3.2022.SUC.SK-1641

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Minister of Manpower of the Republic of Indonesia

Masa berlaku dari 13 Mei 2022 sampai 13 Mei 2025
Validity period from May 13, 2022 to May 13, 2025



DE BRAGA BY ARTOTEL, BANDUNG

for its commitment in sourcing sustainable palm oil, in the year 2024 with 25% coming from its portfolio of total purchase volume, and participating in "Strengthening Collaborative Action for Sustainable Consumption and Production Initiative" which initiated by WWF-Indonesia.

CLIMATE AND MARKET TRANSFORMATION – WWF INDONESIA

20 Juni 2024
June 20, 2024

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank


WIKA Gedung



IKHTISAR UTAMA
Performance Highlights

Perseroan mencatat kinerja positif di tengah tantangan industri konstruksi, didukung oleh kontribusi segmen modular yang menjadi faktor diferensiasi melalui efisiensi waktu dan inovasi sebagai produk berkelanjutan

The company recorded positive performance amidst the challenges of the construction industry, supported by the contribution of the modular segment which serves as a differentiating factor through time efficiency and innovation as a sustainable product.

Ikhtisar Data Keuangan Penting
Important Financial Data Summary

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

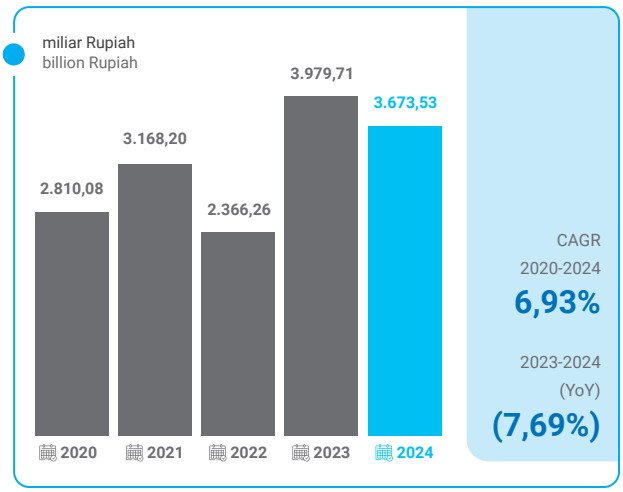
(Dinyatakan dalam Miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain | Expressed in Billions of Rupiah)

	2024	2023	2022	2021	2020	YoY 2023-2024 (%)	CAGR 2020-2024 (%)
Pendapatan Usaha Revenue	3.673,53	3.979,71	2.366,26	3.168,20	2.810,08	(7,69%) ▼	6,93% ▲
Jasa Konstruksi Construction Services	3.368,26	3.782,58	2.084,28	3.089,72	2.690,29	(10,95%) ▼	5,78% ▲
Industri Industry	237,35	127,38	226,50	38,96	96,52	86,32% ▲	25,22% ▲
Konsesi Concession	67,10	52,87	46,29	17,68	10,60	26,91% ▲	58,62% ▲
Properti Property	0,82	16,88	9,19	21,84	12,67	(95,15%) ▼	(49,59%) ▼
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenues	(3.366,03)	(3.676,50)	(2.138,21)	(2.897,72)	(2.598,01)	(8,44%) ▼	6,69% ▲
Laba Kotor Gross Profit	307,50	303,22	228,05	270,48	212,07	1,41% ▲	9,73% ▲
Beban Usaha Operating Expenses	(114,42)	(73,67)	(60,93)	(58,27)	(63,29)	55,31% ▲	15,96% ▲
Pendapatan Lainnya Other Income	135,06	123,38	277,99	231,87	88,35	9,47% ▲	11,19% ▲
Beban Lainnya Other Expenses	(230,45)	(120,75)	(175,54)	(150,63)	(2,02)	90,85% ▲	226,96% ▲
Beban Keuangan Financial Expense	(28,25)	(66,40)	(56,46)	(63,52)	(32,50)	(57,45%) ▼	(3,44%) ▼
Beban Pajak Penghasilan Final Final Income Tax Expense	(96,41)	(114,63)	(66,43)	(96,75)	(84,96)	(15,90%) ▼	3,21% ▲
Bagian Laba (Rugi) Entitas Asosiasi Share in Profit (Loss) on Associate	(4,79)	(14,62)	1,39	0,00	0,00	(67,24%) ▼	0,00% -
Bagian Laba Ventura Bersama Share in Profit on Joint Venture	99,66	10,77	80,73	83,05	38,24	825,74% ▲	27,06% ▲
Laba (Rugi) Selisih Kurs Foreign Exchange Gain (Loss)	0,06	(0,78)	1,46	0,25	0,36	(107,25%) ▼	(36,88%) ▼
Laba sebelum pajak penghasilan Profit before income tax	67,96	46,50	230,26	216,48	156,25	46,14% ▲	(18,79%) ▼
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Income tax benefit (expenses)	0,00	0,00	0,00	(0,09)	0,10	0,00% -	(100,00%) ▼
Laba Tahun Berjalan **Profit for the year**	**67,96**	**46,50**	**230,26**	**216,39**	**156,35**	**46,14%** ▲	**(18,80%)** ▼
Laba (Rugi) Komprehensif Lain Setelah Pajak Other Comprehensive Profit (Loss) After Tax	(11,35)	(4,60)	1,89	1,02	(0,63)	147,06% ▲	91,50% ▲

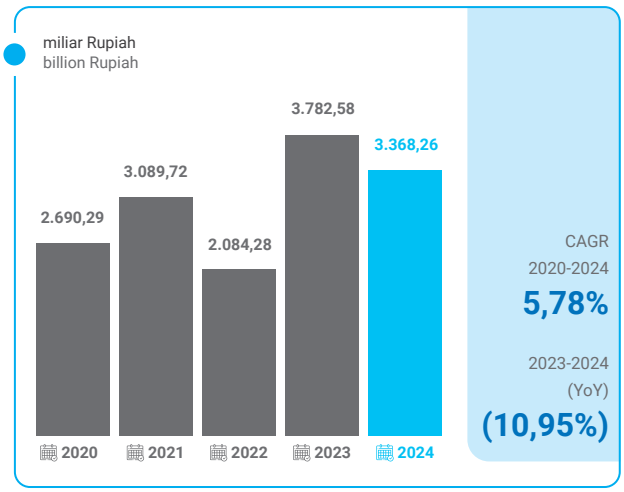
(Dinyatakan dalam Miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain | Expressed in Billions of Rupiah)

	2024	2023	2022	2021	2020	YoY 2023-2024 (%)	CAGR 2020-2024 (%)
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan **Total Comprehensive Profit for the Year**	**56,60**	**41,90**	**232,15**	**217,41**	**155,72**	**35,08%** ▲	**(22,35%)** ▼
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan kepada : Profit for the Year Attributable to:							
Pemilik Entitas Induk Equity Holders of The Parent Entity	67,89	46,70	230,06	213,88	153,28	45,36% ▲	(18,42%) ▼
Kepentingan Non Pengendali Non Controlling Interest	0,07	(0,20)	0,20	2,51	3,07	(134,15%) ▼	(61,28%) ▼
Jumlah Total	67,96	46,50	230,26	216,39	156,35	46,14% ▲	(18,80%) ▼
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan kepada : Total Comprehensive Income for the Year Attributable to:							
Pemilik Entitas Induk Equity Holders of The Parent Entity	56,54	42,11	231,95	214,90	152,77	34,27% ▲	(22,00%) ▼
Kepentingan Non Pengendali Non Controlling Interest	0,07	(0,20)	0,20	2,51	2,95	(134,15) ▼	(60,88%) ▼
Jumlah Total	56,60	41,90	232,15	217,41	155,72	35,08% ▲	(22,35%) ▼
Laba bersih per Saham (Rupiah penuh) **Net Income Per Share (in full Rupiah)**	**7,09**	**4,88**	**24,03**	**22,34**	**16,01**	**45,36%** ▲	**(18,42%)** ▼

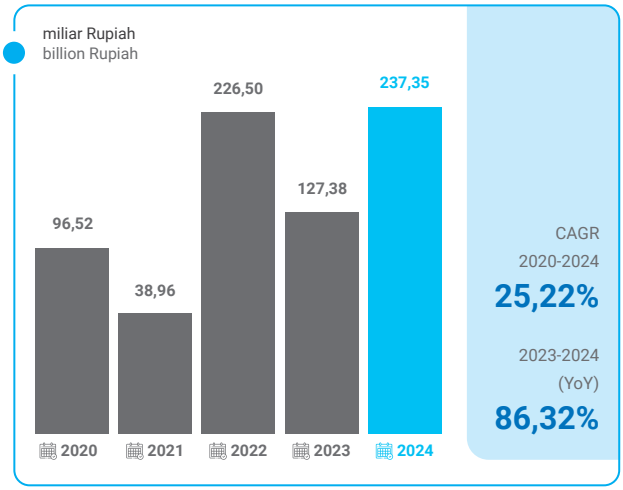
Total Pendapatan Segmen Usaha
Total revenue by business segment



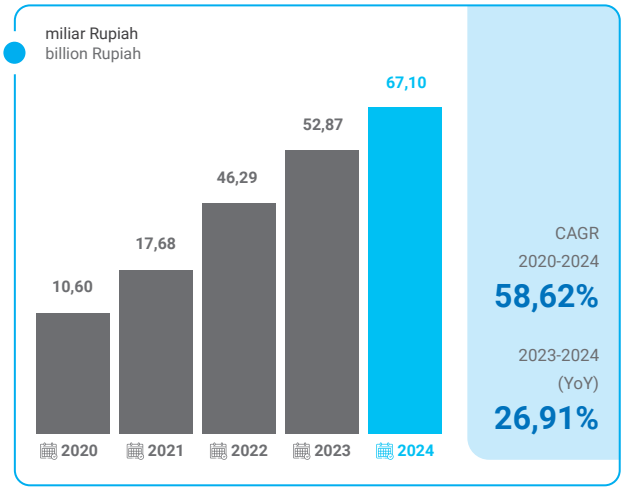
Pendapatan Segmen Jasa Konstruksi
Construction Services Segment Revenue



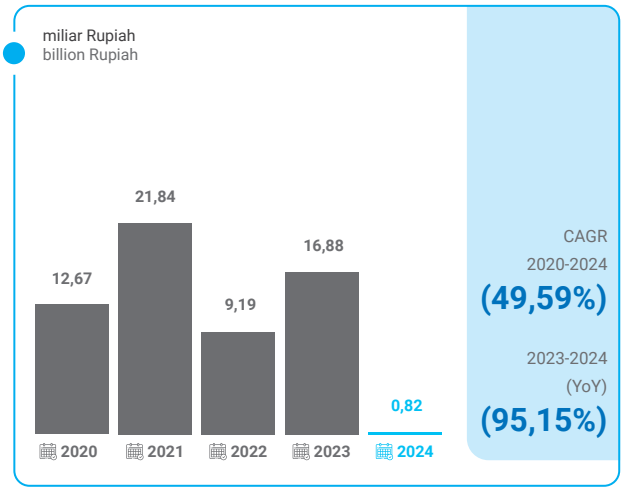
Pendapatan Segmen Industri
Revenue from the Industrial Segmen



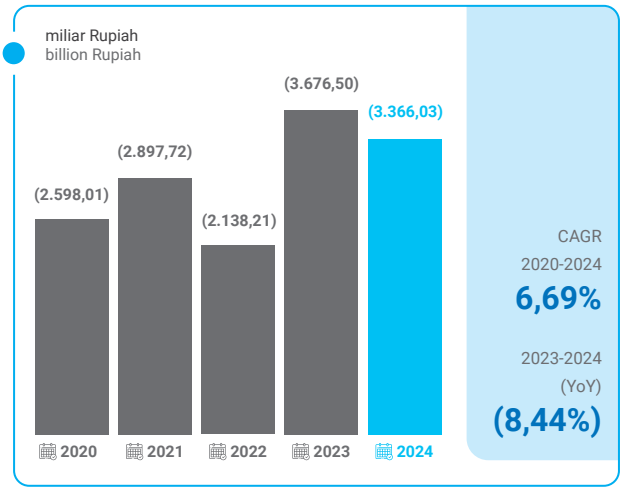
Pendapatan Segmen Konsesi
Revenue from the Concession Segment



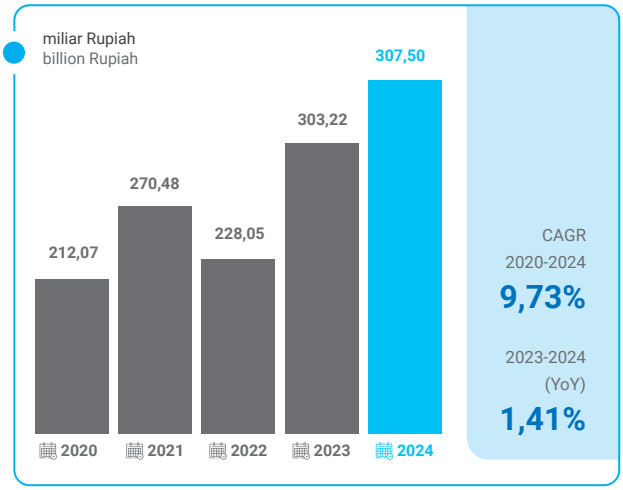
Pendapatan Segmen Properti
Revenue from Properti Segment



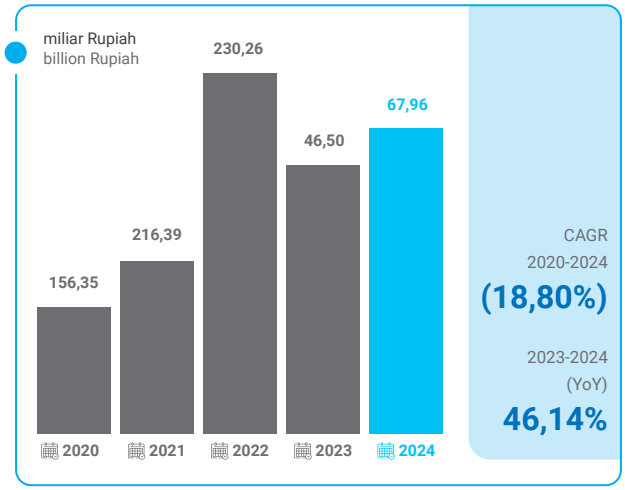
Beban Pokok Pendapatan
Cost of Revenues



Laba Kotor
Gross Profit



Laba Tahun Berjalan
Profit for the year

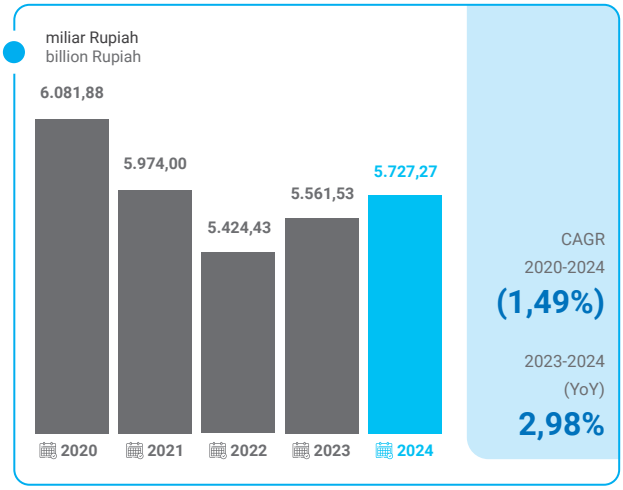


LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

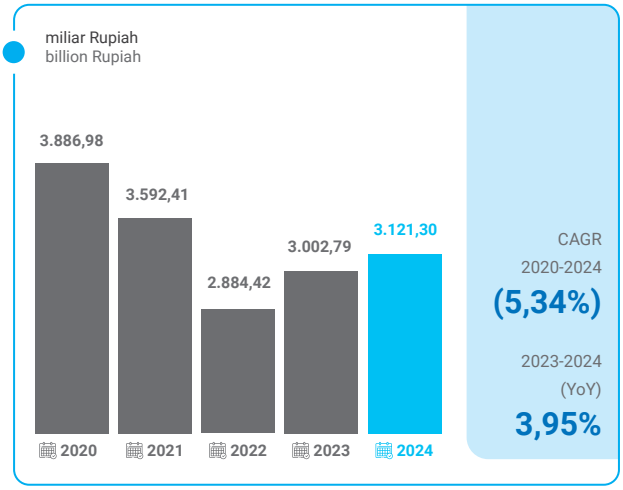
(Dinyatakan dalam Miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain | Expressed in Billions of Rupiah)

	2024	2023	2022	2021	2020	YoY 2023-2024 (%)		CAGR 2020-2024 (%)	
Total Aset Lancar Total Current Assets	4.414,67	4.261,07	3.979,84	4.456,58	4.702,71	3,60%	▲	(1,57%)	▼
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	1.030,73	1.036,43	916,34	1.467,87	1.508,00	(0,55%)	▼	(9,07%)	▼
Total Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets	1.312,60	1.300,46	1.444,59	1.517,42	1.379,17	0,93%	▲	(1,23%)	▼
Penyertaan Saham Investment in Shares	3,55	3,55	127,30	127,30	127,15	0,00%	-	(59,13%)	▼
Properti Investasi Investment Properties	259,41	259,41	258,19	258,19	253,67	0,00%	-	0,56%	▲
Aset Tetap Fixed Assets	47,48	71,32	93,03	142,14	180,65	(33,43%)	▼	(28,40%)	▼
Investasi Pada Entitas Asosiasi Investment in Associates	18,24	23,03	37,65	0,00	0,00	(20,80%)	▼	0,00%	-
Investasi Pada Ventura Bersama Investment in Joint Ventures	519,35	505,44	524,94	512,81	466,10	2,75%	▲	2,74%	▲
Total Aset Total Assets	**5.727,27**	**5.561,53**	**5.424,43**	**5.974,00**	**6.081,88**	**2,98%**	▲	**(1,49%)**	▼
Total Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	2.515,36	2.205,58	2.007,72	3.062,98	3.164,04	14,05%	▲	(5,57%)	▼
Total Liabilitas Jangka Panjang Total Non-Current Liabilities	605,95	797,21	876,70	529,43	722,94	(23,99%)	▼	(4,32%)	▼
Total Liabilitas Total Liabilities	**3.121,30**	**3.002,79**	**2.884,42**	**3.592,41**	**3.886,98**	**3,95%**	▲	**(5,34%)**	▼
Total Ekuitas Total Equity	**2.605,97**	**2.558,74**	**2.540,01**	**2.381,59**	**2.194,90**	**1,85%**	▲	**4,39%**	▲
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada : Equity Attributable to:									
Pemilik Entitas Induk Equity Holders of The Parent Entity	2.603,97	2.556,81	2.537,87	2.346,11	2.161,93	1,84%	▲	4,76%	▲
Kepentingan Non Pengendali Non Controlling Interest	2,00	1,93	2,13	35,48	32,97	3,57%	▲	(50,36%)	▼
Total Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilitas dan Ekuitas	**5.727,27**	**5.561,53**	**5.424,43**	**5.974,00**	**6.081,88**	**2,98%**	▲	**(1,49%)**	▼

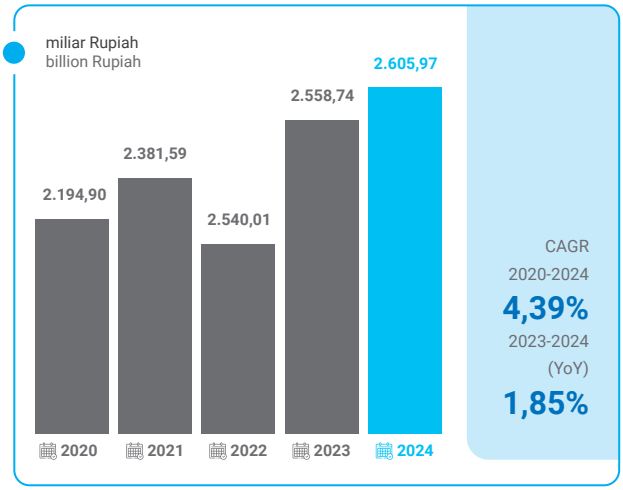
Total Aset
Total Assets



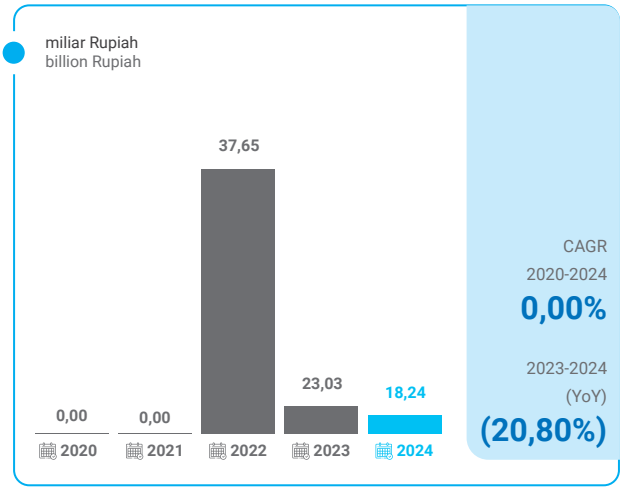
Total Liabilitas
Total Liabilities



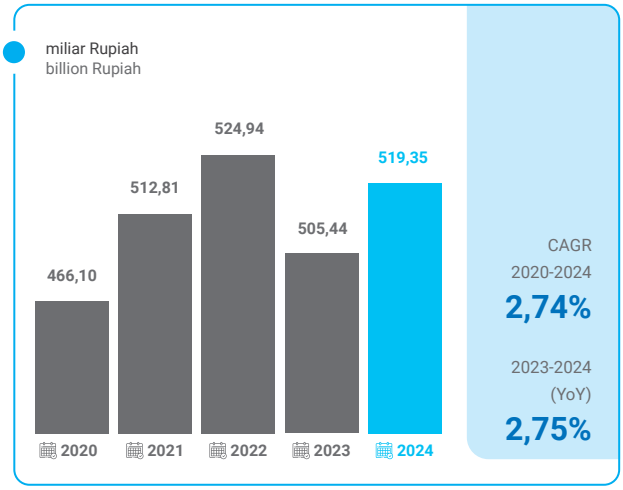
Total Ekuitas
Total Equities



Investasi Pada Entitas Asosiasi
Investment in Associates



Investasi Pada Ventura Bersama
Investment in Joint Ventures

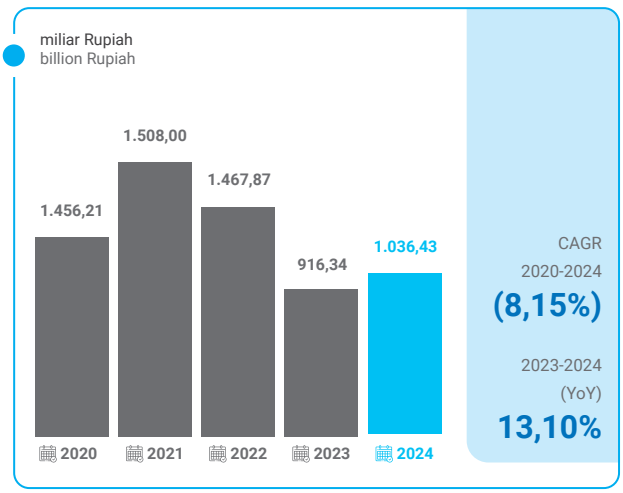


LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS

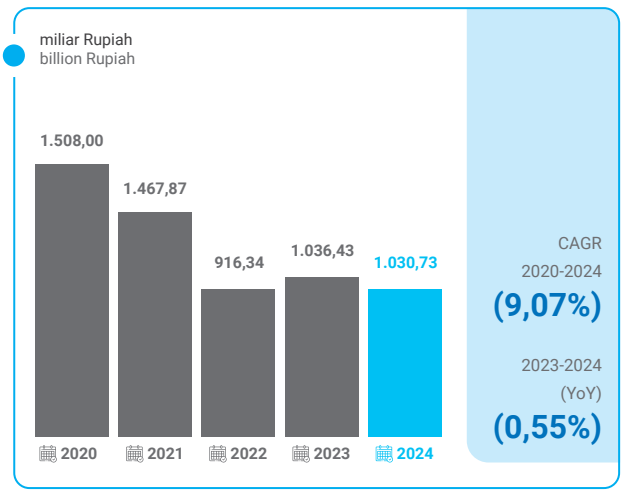
(Dinyatakan dalam Miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain | Expressed in Billions of Rupiah)

	2024	2023	2022	2021	2020	YoY 2023-2024 (%)	CAGR 2020-2024 (%)
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi Net Cash Flows Provided by (Used in) Operating Activities	(256,58)	567,74	(597,87)	103,33	104,61	(145,19%) ▼	(25,14%) ▼
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi Net Cash Flows Provided by (Used in) Investing Activities	71,04	18,08	81,29	(97,36)	(252,48)	292,84% ▲	(27,17%) ▼
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan Net Cash Flows Provided by (Used in) Financing Activities	179,76	(464,95)	(36,40)	(46,34)	199,30	(138,66%) ▼	(2,55%) ▼
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas Net (Decrease) Increase in Cash and Cash Equivalents	(5,79)	120,87	(552,99)	(40,37)	51,43	(104,79%) ▼	(42,08%) ▼
Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing Kas dan Setara Kas Effect of Foreign Exchange Rate Changes in Cash and Cash Equivalents	0,09	(0,78)	1,46	0,25	0,36	(111,62%) ▼	(28,98%) ▼
Saldo Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun Balance of Cash and Cash Equivalents at Beginning of Year	1.036,43	916,34	1.467,87	1.508,00	1.456,21	13,10% ▲	(8,15%) ▼
Saldo Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun **Balance of Cash and Cash Equivalents at The End of Year**	**1.030,73**	**1.036,43**	**916,34**	**1.467,87**	**1.508,00**	**(0,55%) ▼**	**(9,07%) ▼**

Saldo Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun
Balance of Cash and Cash Equivalents at Beginning of Year



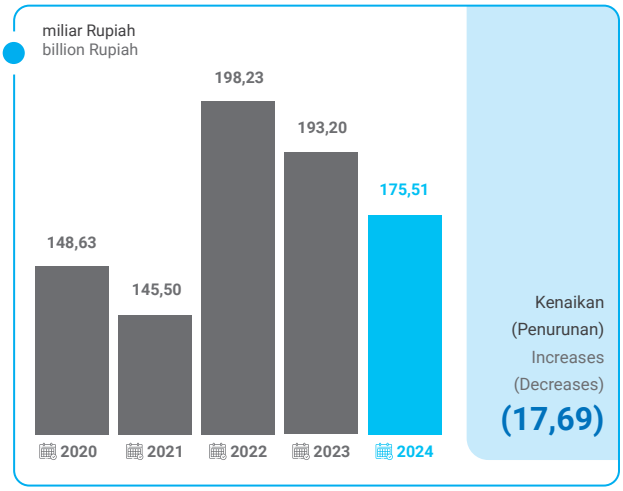
Saldo Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun
Balance of Cash and Cash Equivalents at The End of Year



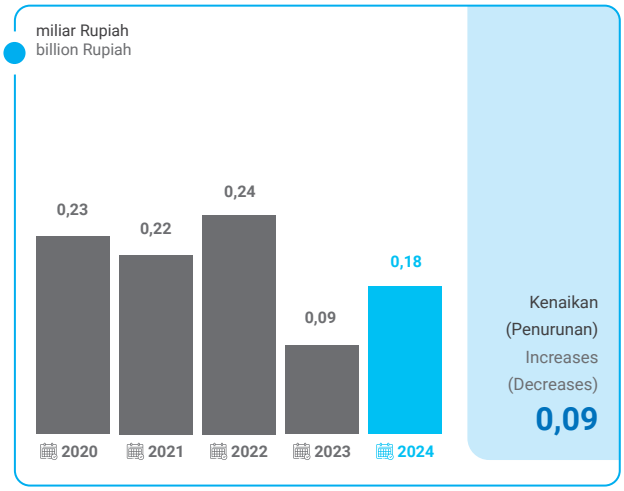
RASIO KEUANGAN DAN RASIO PENTING LAINNYA
FINANCIAL RATIOS AND OTHER IMPORTANT RATIOS

	2024	2023	2022	2021	2020	Kenaikan (Penurunan) Increases (Decreases) (%)	
Rasio Likuiditas (%) Liquidity Ratio (%)							
Rasio Kas Cash ratio	40,98	46,99	45,64	47,92	47,66	(6,01)	▼
Rasio Cepat Quick Ratio	161,59	174,99	179,75	134,94	136,73	(13,40)	▼
Rasio Lancar Current ratio	175,51	193,20	198,23	145,50	148,63	(17,69)	▼
Rasio Solvabilitas (kali) Solvability Ratio (times)							
Rasio Jumlah Liabilitas terhadap Ekuitas Debt to equity ratio (DER)	1,20	1,17	1,14	1,51	1,77	0,03	▲
Rasio Jumlah Liabilitas terhadap Aset Debt to total assets ratio (DAR)	0,55	0,54	0,53	0,60	0,64	0,01	▲
Rasio Utang Berbunga terhadap Ekuitas Gearing Ratio	0,18	0,09	0,24	0,22	0,23	0,09	▲
Rasio Utang Berbunga terhadap EBITDA Debt to EBITDA	1,64	0,86	1,64	1,42	1,85	0,79	▲
Rasio EBITDA terhadap Interest EBITDA to Interest	9,84	3,93	6,49	5,93	8,56	5,92	▲
Rasio Ekuitas terhadap Jumlah Aset Total equity to total assets ratio	0,45	0,46	0,47	0,40	0,36	(0,01)	▼
Rasio Aktivitas Activity Ratio							
Kolektibilitas Piutang (hari) Collection Period (days)	54,17	63,83	83,15	65,05	83,79	(9,66)	▼
PerputaranTotal Aset (kali) Total Assets Turnover (times)	0,64	0,72	0,44	0,53	0,46	(0,07)	▼
Perputaran Modal Kerja (kali) Working Capital Turnover (times)	1,93	1,94	1,20	2,27	1,83	(0,01)	▼
Rasio Profitabilitas (%) Profitability Ratio (%)							
Imbal Hasil terhadap Ekuitas Return on Equity (ROE)	2,61	1,82	9,07	9,09	7,12	0,79	▲
Imbal Hasil terhadap Aset Return on Assets (ROA)	1,19	0,84	4,24	3,62	2,57	0,35	▲
Imbal Hasil terhadap Investasi Return on Investment (ROI)	2,99	3,47	6,60	3,85	2,73	(0,48)	▼
Marjin (%) Margin (%)							
Marjin Laba Kotor Gross profit margin (GPM)	8,37	7,62	9,64	8,54	7,55	0,75	▲
Marjin Laba Usaha Operating profit margin (OPM)	5,26	5,77	7,06	6,70	5,29	(0,51)	▼
Marjin Laba Bersih Net profit margin (NPM)	1,85	1,17	9,73	6,83	5,56	0,68	▲

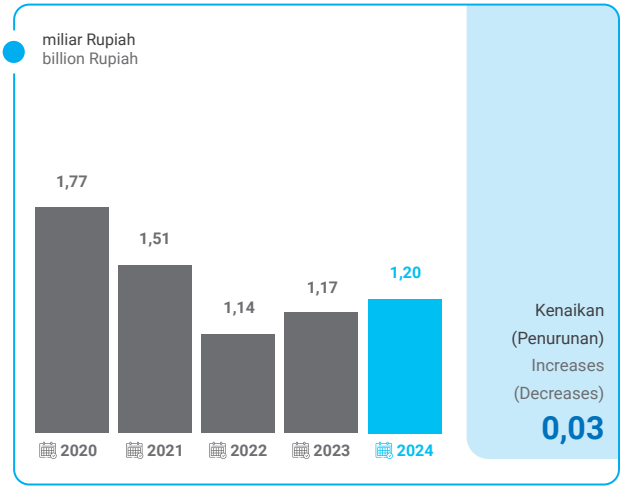
Rasio Lancar
Current ratio



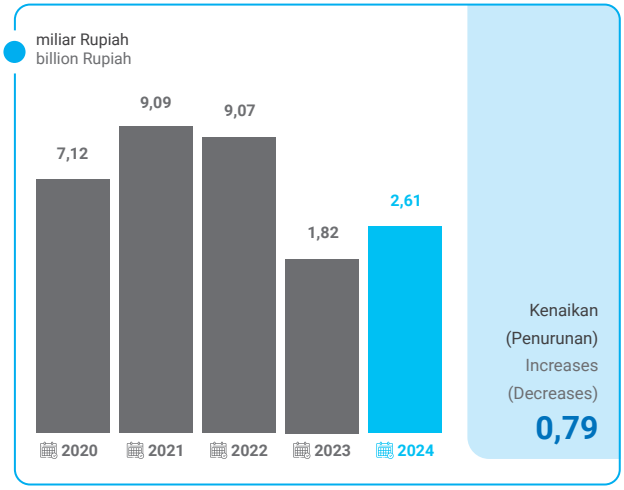
Rasio Utang Berbunga terhadap Ekuitas
Gearing Ratio



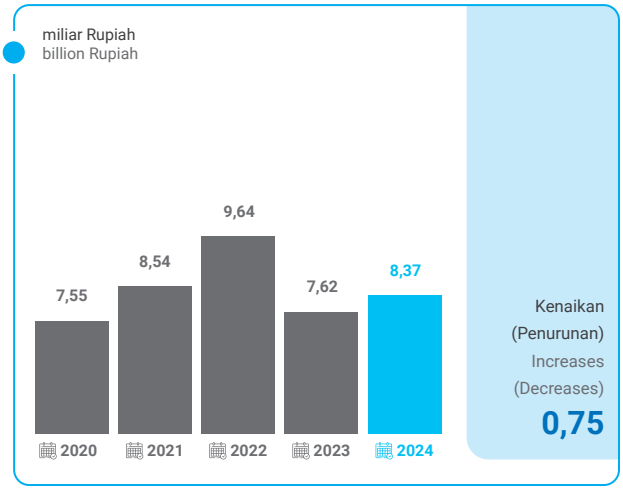
Rasio Jumlah Liabilitas terhadap Ekuitas
Debt to equity ratio (DER)



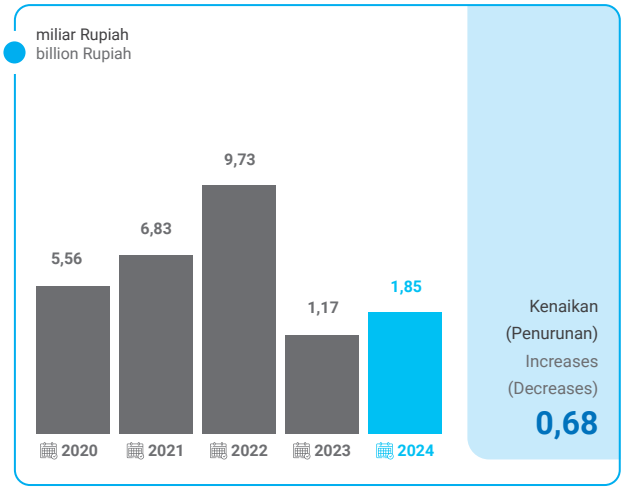
Imbal Hasil terhadap Ekuitas
Return on Equity (ROE)



Marjin Laba Kotor
Gross profit margin (GPM)



Marjin Laba Bersih
Net profit margin (NPM)



Ikhtisar Operasional

Operational Highlights

KINERJA OPERASIONAL BERDASARKAN SEGMEN USAHA
OPERATIONAL PERFORMANCE BY BUSINESS SEGMENT

(Dinyatakan dalam Miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain | Expressed in Billions of Rupiah)

	2024	2023	2022	2021	2020	YoY 2023-2024 (%)		CAGR 2020-2024 (%)	
Kontrak Baru New Contracts									
Nilai Kontrak Proyek Baru Berdasarkan Segmen Usaha New Project Contract Value Based on Business Segment	2.715,42	5.134,33	5.466,95	2.761,84	3.037,47	(47,11%)	▼	(2,76%)	▼
Konstruksi Construction	2.102,23	5.045,80	4.943,09	2.123,45	2.651,16	(58,34%)	▼	(5,63%)	▼
Konsesi & Properti/Investasi Consessions & Property/ Investments	0,00	72,07	55,49	39,95	23,27	(100,00%)	▼	(100,00%)	▼
Industri - Modular Industry - Modular	613,19	16,46	451,01	205,63	15,82	3.625,73%	▲	149,51%	▲
Industri - WIKA Pracetak Gedung* Industry - WIKA Pracetak Gedung	0,00	0,00	17,36	392,81	347,22	0,00%	-	(100,00%)	▼
Kontrak Lama Carry Over									
Nilai Kontrak Proyek Lama Berdasarkan Segmen Usaha Value of Carry Over Contracts Based on Business Segment	6.294,06	6.955,16	7.549,41	10.183,15	11.467,63	(9,51%)	▼	(13,93%)	▼
Konstruksi Construction	6.202,42	6.781,81	7.282,55	9.869,48	11.350,70	(8,54%)	▼	(14,02%)	▼
Konsesi & Properti/Investasi Consessions & Property/ Investments	70,45	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	▲	0,00%	-
Industri- Modular Industry- Modular	21,19	173,35	167,41	0,74	0,00	(87,78%)	▼	0,00%	-
Industri - WIKA Pracetak Gedung* Industry - WIKA Pracetak Gedung	0,00	0,00	99,45	312,93	116,93	0,00%	-	(100,00%)	▼

* Pada 25 Juli 2022, Perseroan menjual 2% kepemilikan saham pada WIKA Pracetak Gedung (WPG) kepada PT Wijaya Karya BetonTbk (WTON), sehingga kepemilikan Perseroan berkurangdari 51% menjadi 49%. Perubahan ini mengubah status WPG dari Entitas Anak menjadi Entitas Asosiasi, yang berdampak pada pencatatan perolehan kontrak secara konsolidasian. | On July 25, 2022, the Company sold 2% of its share ownership in WIKA Pracetak Gedung (WPG) to PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON), so that the Company's ownership was reduced from 51% to 49%. This change changed WPG's status from a Subsidiary Entity to an Associate Entity, which has an impact on the recording of contract acquisition on a consolidated basis.

KINERJA OPERASIONAL BERDASARKAN PEMBERI KERJA (OWNER)
OPERATIONAL PERFORMANCE BASED ON EMPLOYER (OWNER)

(Dinyatakan dalam Miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain | Expressed in Billions of Rupiah)

	2024	2023	2022	2021	2020	YoY 2023-2024 (%)		CAGR 2020-2024 (%)	
Kontrak Baru New Contracts									
Nilai Kontrak Proyek Baru Berdasarkan Pemberi Kerja (Owner) New Project Contract Value Based on Owner	2.715,42	5.134,33	5.466,95	2.761,84	3.037,47	(47,11%)	▼	(2,76%)	▼
Pemerintah Government	1.679,66	4.463,44	2.047,09	1.263,51	1.209,93	(62,37%)	▼	8,55%	▲
BUMN SOE	597,88	256,82	954,30	437,45	1.360,91	132,81%	▲	(18,59%)	▼

(Dinyatakan dalam Miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain | Expressed in Billions of Rupiah)

	2024	2023	2022	2021	2020	YoY 2023-2024 (%)	CAGR 2020-2024 (%)
Swasta Private	437,89	414,07	2.465,56	1.060,88	466,63	5,75% ▲	(1,58%) ▼
Kontrak Lama Carry Over							
Nilai Kontrak Proyek Lama Berdasarkan Pemberi Kerja (Owner) Carry Over Contract Value Based on Owner	6.294,06	6.955,16	7.549,41	10.183,15	11.467,63	(9,51%) ▼	(13,93%) ▼
Pemerintah Government	4.281,63	1.650,54	890,20	1.609,63	887,78	159,41% ▲	48,19% ▲
BUMN SOE	1.063,32	2.207,61	4.362,34	6.180,43	7.051,40	(51,83%) ▼	(37,68%) ▼
Swasta Private	949,11	3.097,01	2.296,87	2.393,09	3.528,45	(69,35%) ▼	(27,98%) ▼

KINERJA OPERASIONAL BERDASARKAN JENIS PROYEK
OPERATIONAL PERFORMANCE BY PROJECT TYPE

(Dinyatakan dalam Miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain | Expressed in Billions of Rupiah)

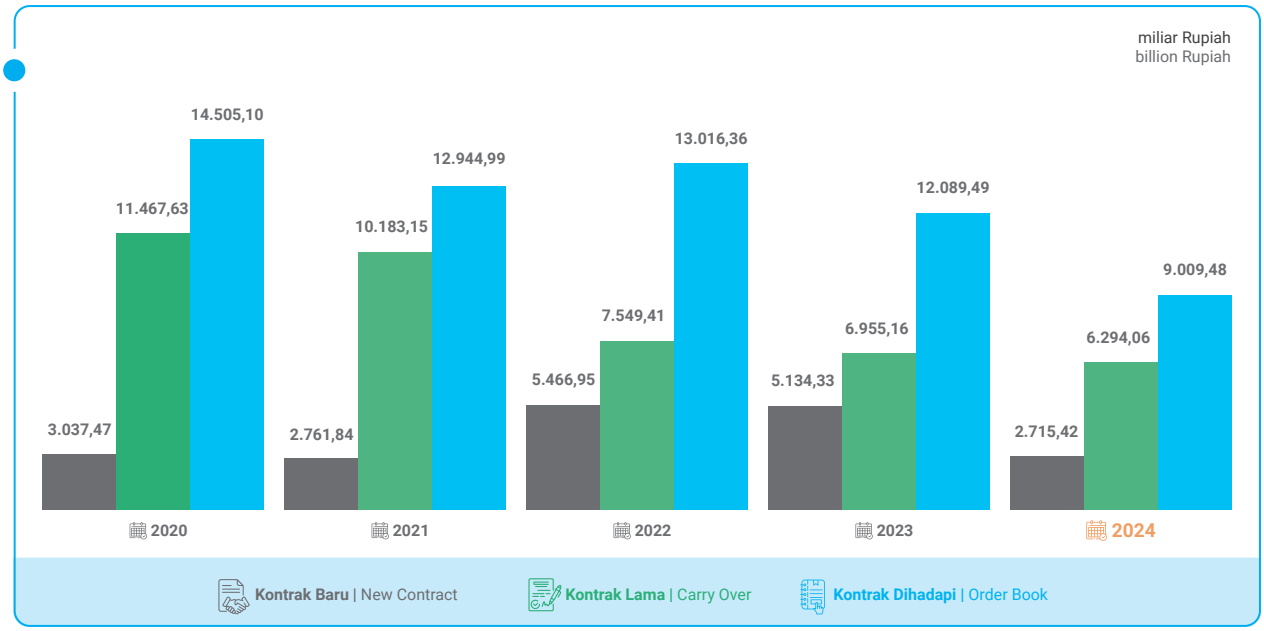
	2024	2023	2022	2021	2020	YoY 2023-2024 (%)	CAGR 2020-2024 (%)
Kontrak Baru New Contracts							
Nilai Kontrak Proyek Baru Berdasarkan Jenis Proyek New Project Contract Values by Project Type	2.715,42	5.134,33	5.466,95	2.761,84	3.037,47	(47,11%) ▼	(2,76%) ▼
Perkantoran Office	817,68	994,45	1.617,43	123,48	899,90	(17,78%) ▼	(2,37%) ▼
Residensial Residential	702,52	1.951,88	398,98	917,87	63,02	(64,01%) ▼	82,73% ▲
Fasilitas Publik Public Facilities	1.195,22	2.105,68	2.957,15	1.450,33	1.507,08	(43,24%) ▼	(5,63%) ▼
Komersial Commercial	0,00	82,32	493,39	270,16	567,47	(100,00%) ▼	(100,00%) ▼
Kontrak Lama Carry Over							
Nilai Kontrak Proyek Lama Berdasarkan Jenis Proyek Carry Over Projects Value by Project Types	6.294,06	6.955,16	7.549,41	10.183,15	11.467,63	(9,51%) ▼	(13,93%) ▼
Perkantoran Office	1.626,86	1.269,27	222,22	996,94	583,80	28,17% ▲	29,20% ▲
Residensial Residential	2.703,32	2.614,30	5.253,43	5.790,31	6.898,99	3,41% ▲	(20,88%) ▼
Fasilitas Publik Public Facilities	1.878,31	2.607,45	2.004,56	3.184,25	3.324,15	(27,96%) ▼	(13,30%) ▼
Komersial Commercial	85,57	464,14	69,20	211,65	660,69	(81,56%) ▼	(40,01%) ▼

KINERJA OPERASIONAL SECARA KESELURUHAN
OVERALL OPERATIONAL PERFORMANCE

(Dinyatakan dalam Miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain | Expressed in Billions of Rupiah)

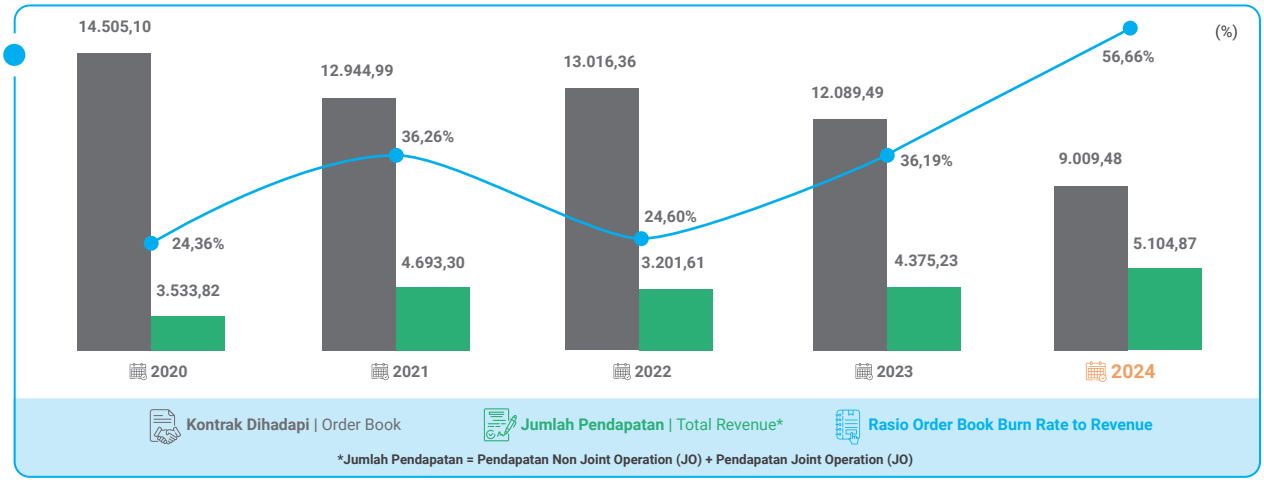
	2024	2023	2022	2021	2020	YoY 2023-2024 (%)	CAGR 2020-2024 (%)
Kinerja Oprasional (Rp Miliar) Oprational Performance (Rp Billion)							
Kontrak Baru New Contracts	2.715,42	5.134,33	5.466,95	2.761,84	3.037,47	(47,11%) ▼	(2,76%) ▼
Kontrak Lama Carry Over	6.294,06	6.955,16	7.549,41	10.183,15	11.467,63	(9,51%) ▼	(13,93%) ▼
Kontrak Dihadapi Order Book	9.009,48	12.089,49	13.016,36	12.944,99	14.505,10	(25,48%) ▼	(11,22%) ▼
Rasio Order Book Burn Rate to Revenue (x)							
Kontrak Dihadapi Order Book	9.009,48	12.089,49	13.016,36	12.944,99	14.505,10	(25,48%) ▼	(11,22%) ▼
Jumlah Pendapatan Total Revenue	5.104,87	4.375,23	3.201,61	4.693,30	3.533,82	16,68% ▲	9,63% ▲
Pendapatan Non JO (Joint Operation) Revenues Non JO (Joint Operation)	3.673,53	3.979,71	2.366,26	3.168,20	2.810,08	(7,69%) ▼	6,93% ▲
Pendapatan JO (Joint Operation) Revenues JO (Joint Operation)	1.431,35	395,52	835,35	1.525,10	723,74	261,40% ▲	18,59% ▲
Rasio Order Book Burn Rate to Revenue	56,66%	36,19%	24,60%	36,26%	24,36%	56,56% ▲	23,49% ▲

Kinerja Perolehan Proyek
Project Revenue Performance



Rasio Order Book Burn Rate to Revenue

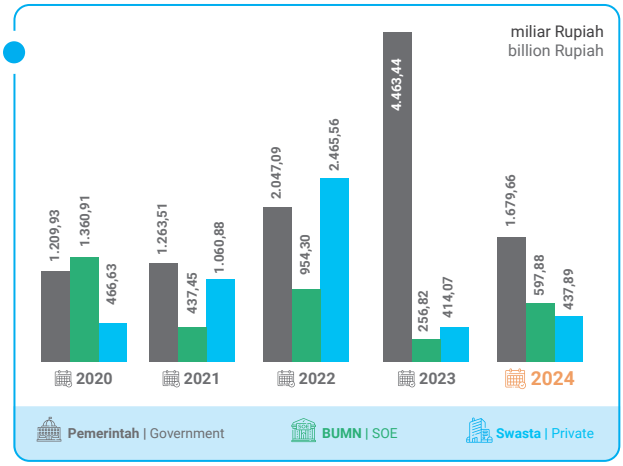
Rasio Order Book Burn Rate to Revenue



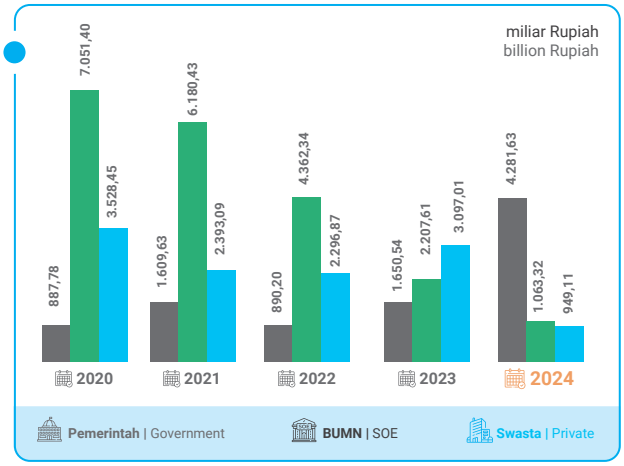
Kinerja Operasional Berdasarkan Pemberi Kerja (Owner)

Operational Performance Based On Employer (Owner)

Kontrak Baru | New Contracts



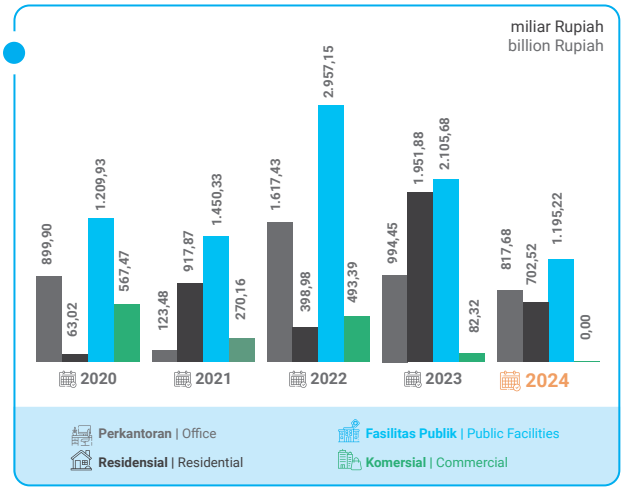
Kontrak Lama | Carry Over



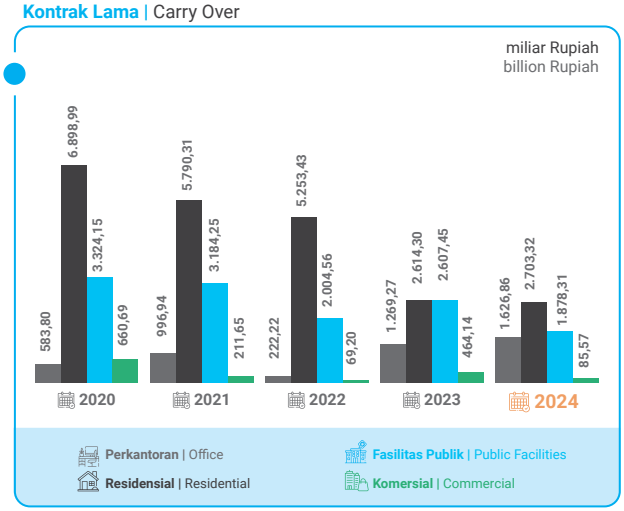
Kinerja Operasional Berdasarkan Jenis Proyek

Operational Performance By Project Type

Kontrak Baru | New Contracts



Kontrak Lama | Carry Over



Ikhtisar Organisasi
Organizational Highlights

	2024	2023	2022	2021	2020
Jumlah Karyawan Total Employee	500	525	558	569	583
Penilaian Penerapan GCG GCG Assessment Score	90,49** (sangat baik | verry good) ASEAN Corporate Governance Scorecard	89,61* (sangat baik | verry good) SK-16/S.MBU/2012	89,61 (sangat baik | verry good) SK-16/S.MBU/2012	88,03 (sangat baik | verry good) SK-16/S.MBU/2012	84,08 (baik | good) SK-16/S.MBU/2012
Penilaian Kepuasan Pelanggan Customer Satisfaction Index Score	93,39%	93,50%	94,85%	94,12%	88,97%

*) Sehubungan dengan diterbitkannya Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN RI No. SK-12/S.MBU/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Pencabutan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 mengenai Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN, serta belum adanya keputusan pengganti yang ditetapkan, maka Perseroan tidak melaksanakan assessment penerapan GCG untuk Tahun Buku 2022 yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2023.
In connection with the issuance of a copy of the Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs of the Republic of Indonesia No. SK-12/S.MBU/08/2023 dated August 16, 2023 concerning the Revocation of the Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs, and the absence of a replacement decision has not been determined, the Company did not carry out an assessment of the implementation of GCG for the 2022 Fiscal Year which should have been carried out in 2023.

**) Pada Tahun Buku 2024, Perseroan melaksanakan assesment penerapan GCG untuk Tahun Buku 2023 dengan mengacu pada indikator/Parameter Penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard.
In the 2024 Fiscal Year, the Company conducted an assessment of the implementation of GCG for the 2023 Fiscal Year by referring to the ASEAN Corporate Governance Scorecard Assessment indicators/Parameters.

Ikhtisar Saham
Shares Information

KODE SAHAM | STOCK CODE

WEGE

WEGE telah tercatat dan memperdagangkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia sejak 30 November 2017.

WEGE has been listed and traded its shares on the Indonesia Stock Exchange since November 30, 2017.

Perseroan telah melaksanakan Penawaran Umum Perdana (Initial Public Offering/IPO) dengan jumlah 2.872.000.000 saham biasa yang ditawarkan kepada masyarakat, yang telah dinyatakan efektif sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. S-444/D.04/2017 tanggal 20 November 2017. Selanjutnya, saham tersebut tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 November 2017 dengan kodesaham WEGE. Informasi lebih lanjut mengenai penawaran umum tersebut dapat ditemukan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

The Company has conducted an Initial Public Offering (IPO) with a total of 2,872,000,000 common shares offered to the public, which has been declared effective in accordance with the Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. S-444/D.04/2017 dated November 20, 2017. Furthermore, the shares were listed on the Indonesia Stock Exchange on November 30, 2017 with the stock code WEGE. Further information regarding the public offering can be found in the Company Profile Chapter in this Annual Report.

INFORMASI KINERJA SAHAM

STOCK PERFORMANCE INFORMATION

2024	Harga Saham (Rp) | Share Prices (Rp)				Jumlah Saham Beredar (jutalembar) Number of Shares Outstanding (million shares)	Volume Transaksi (Saham) Transaction Volume (shares)	Kapitalisasi Pasar (Rp-miliar) Market Capitalization (Rp-billion)
	Pembukaan Opening	Tertinggi Highest	Terendah Lowest	Penutupan Closing			
Triwulan I 1st Quarter	81	82	80	80	9.572	2.225.400	765,76
Triwulan II 2nd Quarter	57	59	56	58	9.572	1.223.800	555,18
Triwulan III 3rd Quarter	83	86	82	86	9.572	13.228.100	823,19
Triwulan IV 4th Quarter	63	64	62	64	9.572	247.100	612,61

2023	Harga Saham (Rp) | Share Prices (Rp)				Jumlah Saham Beredar (jutalembar) Number of Shares Outstanding (million shares)	Volume Transaksi (Saham) Transaction Volume (shares)	Kapitalisasi Pasar (Rp-miliar) Market Capitalization (Rp-billion)
	Pembukaan Opening	Tertinggi Highest	Terendah Lowest	Penutupan Closing			
Triwulan I 1st Quarter	135	136	133	134	9.572	3.463.800	1.282,65
Triwulan II 2nd Quarter	91	94	91	92	9.572	10.924.600	880,62
Triwulan III 3rd Quarter	101	102	100	102	9.572	5.823.600	976,34
Triwulan IV 4th Quarter	78	82	78	80	9.572	5.519.100	765,76

DATA GRAFIK PERGERAKAN HARGA, VOLUME DAN KAPITALISASI PASAR SAHAM WEGE TAHUN 2023-2024

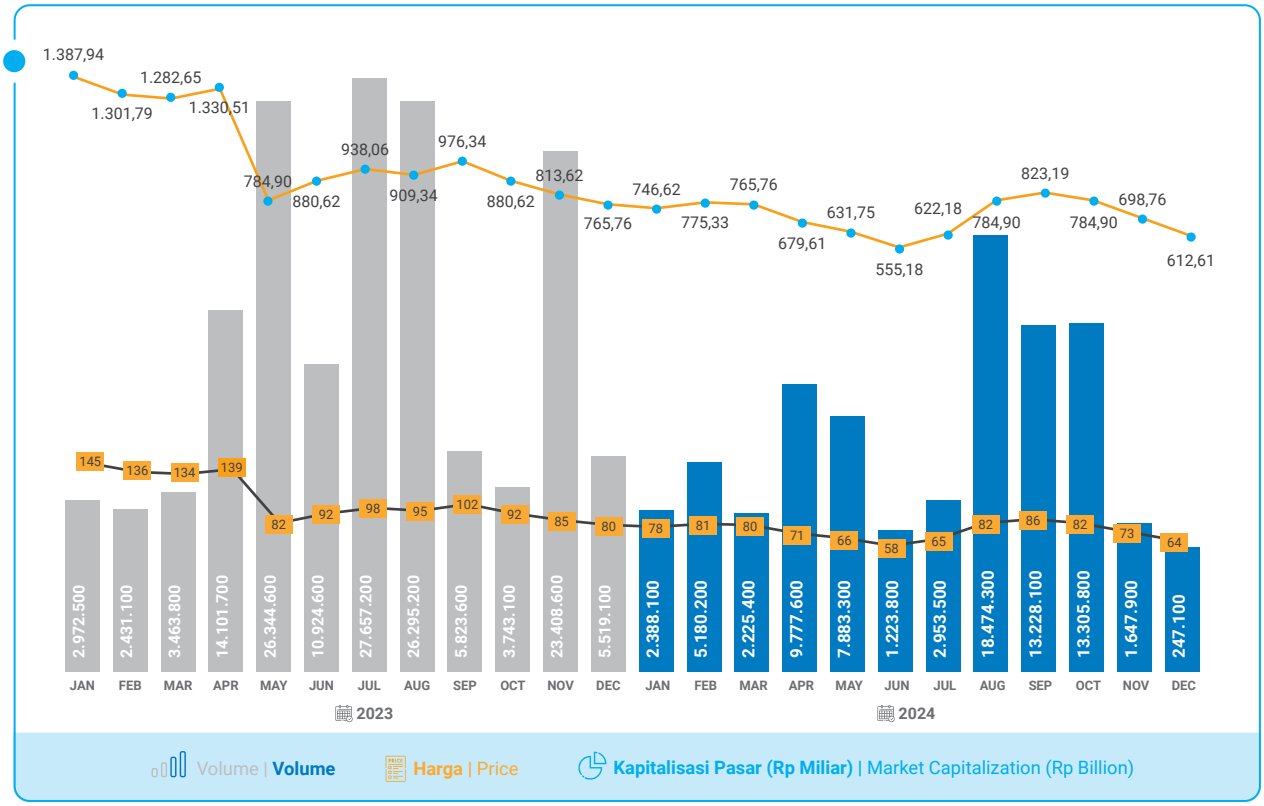
WEGE STOCK PRICE, VOLUME AND MARKET CAPITALIZATION MOVEMENT CHART DATA 2023-2024

		Harga | Price (Rp)	Volume	Kapitalisasi Pasar | Market Capitalization (Rp)
2024	Januari | January	78	2.388.100	746.616.000.000
	Februari | February	81	5.180.200	775.332.000.000
	Maret | March	80	2.225.400	765.760.000.000
	April	71	9.777.600	679.612.000.000
	Mei | May	66	7.883.300	631.752.000.000
	Juni | June	58	1.223.800	555.176.000.000
	Juli | July	65	2.953.500	622.180.000.000
	Agustus | August	82	18.474.300	784.904.000.000
	September	86	13.228.100	823.192.000.000
	Oktober | October	82	13.305.800	784.904.000.000
	November	73	1.647.900	698.756.000.000
	Desember | December	64	247.100	612.608.000.000

		Harga | Price (Rp)	Volume	Kapitalisasi Pasar | Market Capitalization (Rp)
2023	Januari | January	145	2.972.500	1.387.940.000.000
	Februari | February	136	2.431.100	1.301.792.000.000
	Maret | March	134	3.463.800	1.282.648.000.000
	April	139	14.101.700	1.330.508.000.000
	Mei | May	82	26.344.600	784.904.000.000
	Juni | June	92	10.924.600	880.624.000.000
	Juli | July	98	27.657.200	938.056.000.000
	Agustus | August	95	26.295.200	909.340.000.000
	September	102	5.823.600	976.344.000.000
	Oktober | October	92	3.743.100	880.624.000.000
	November	85	23.408.600	813.620.000.000
	Desember | December	80	5.519.100	765.760.000.000

Grafik Pergerakan Harga, Volume, dan Kapitalisasi Pasar Saham WEGE Tahun 2023-2024

WEGE Stock Price, Volume, and Market Capitalization Movement Chart 2023-2024



GRAFIK PERGERAKAN HARGA DAN VOLUME SAHAM TRIWULANAN 2023-2024

QUARTERLY STOCK PRICE AND VOLUME MOVEMENT CHART 2023-2024

(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah | Expressed in million of Rupiah)

	2024				2023			
	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Harga Price	80	58	86	64	134	92	102	80
Volume	2.225.400	1.223.800	13.228.100	247.100	3.463.800	10.924.600	5.823.600	5.519.100

GRAFIK PERGERAKAN HARGA DAN KAPITALISASI PASAR TRIWULANAN 2023-2024

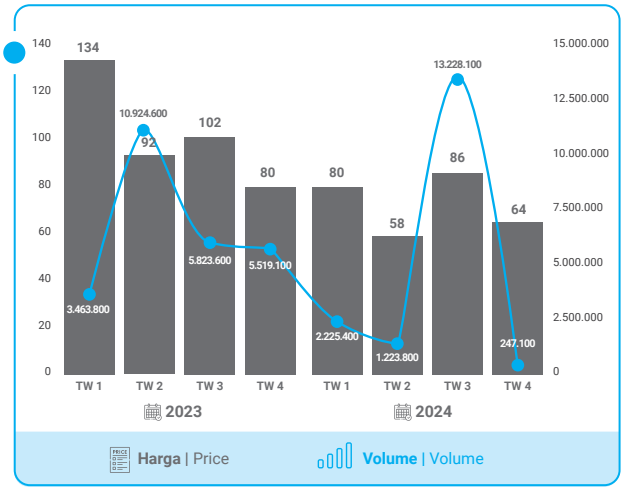
QUARTERLY PRICE ACTION AND MARKET CAPITALIZATION CHART 2023-2024

(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah | Expressed in million of Rupiah)

	2024				2023			
	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Harga Price	80	58	86	64	134	92	102	80
Kapitalisasi Pasar Market Capitalization	765.760	555.176	823.192	612.608	1.282.648	880.624	976.344	765.760

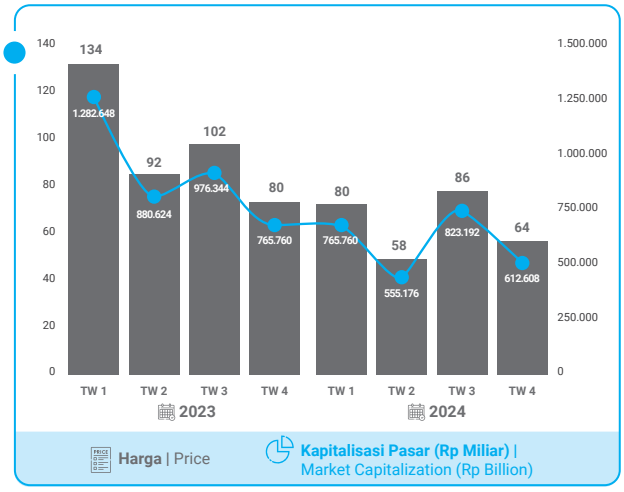
Grafik Pergerakan Harga Dan Volume Saham Triwulanan 2023-2024

Quarterly Stock Price And Volume Movement Chart 2023-2024



Quarterly Price Action And Market Capitalization Chart 2023-2024 (dalam Jutaan Rupiah)

Quarterly Stock Price And Volume Movement Chart 2023-2024 (in million of Rupiah)



Informasi Penghentian Sementara Perdagangan Saham (Suspension) dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham (Delisting)

Information on Temporary Suspension of Stock Trading (Suspension) and/or Delisting of Stock Listing

Perseroan dengan ini melaporkan bahwa sepanjang tahun 2024, tidak terdapat penerimaan sanksi yang berdampak pada aktivitas perdagangan saham di Bursa Efek tempat saham Perseroan tercatat dan diperdagangkan. Hal ini mencakup tidak adanya penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) maupun penghapusan pencatatan saham (*delisting*).

The Company hereby reports that throughout 2024, there were no sanctions received that had an impact on stock trading activities on the Stock Exchange where the Company's shares are listed and traded. This includes no temporary suspension of stock trading (suspension) or delisting of shares.

Informasi Tentang Aksi Korporasi Saham

Information about Corporate Stock Action

Sepanjang tahun 2024, Perseroan tidak melaksanakan aksi korporasi yang menyebabkan perubahan pada saham, seperti pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, maupun penambahan atau pengurangan modal.

Throughout 2024, the Company did not carry out any corporate actions that caused changes in shares, such as stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, changes in the nominal value of shares, issuance of convertible securities, or additions or reductions in capital.

Namun demikian, Perseroan telah melaksanakan pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2023, yang dibayarkan kepada pemegang saham pada tahun 2024. Informasi lebih rinci mengenai pembayaran dividen dapat ditemukan pada Bab Analisa dan Pembahasan Manajemen dalam Laporan Tahunan ini.

However, the Company has distributed cash dividends for the 2023 financial year, which were paid to shareholders in 2024. More detailed information regarding dividend payments can be found in the Management Discussion and Analysis Chapter in this Annual Report.

Informasi Efek Lainya

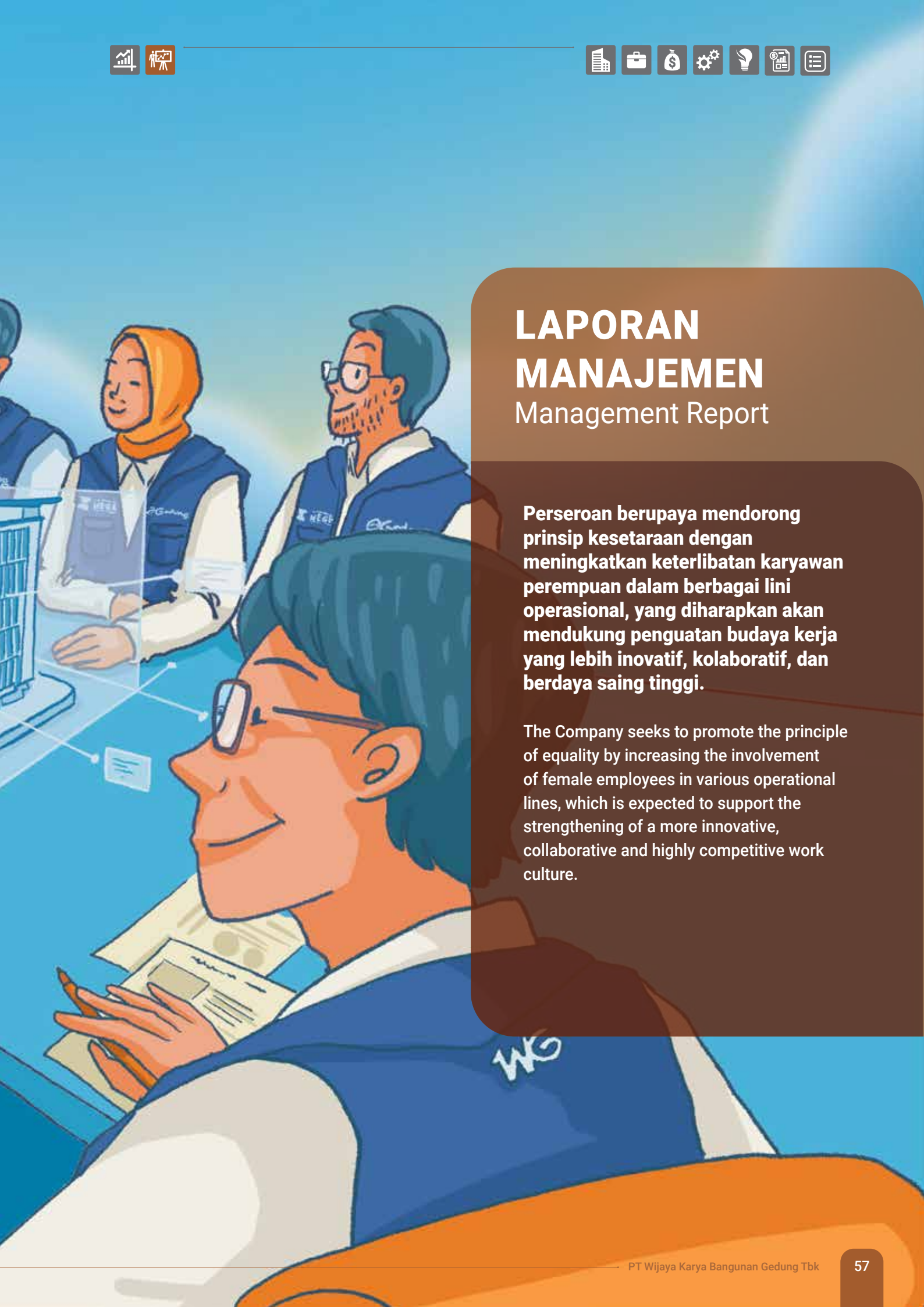
Other Effects Information

Sepanjang tahun 2024, Perseroan tidak menerbitkan obligasi, sukuk, maupun obligasi konversi, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Oleh karena itu, Perseroan tidak menyajikan informasi mengenai jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (*outstanding*), tingkat bunga/imbalan, tanggal jatuh tempo, maupun peringkat obligasi/sukuk selama dua (2) tahun terakhir.

Throughout 2024, the Company did not issue bonds, sukuk, or convertible bonds, either in Indonesia or abroad. Therefore, the Company does not present information regarding the number of bonds/sukuk/convertible bonds outstanding, interest rates/yields, maturity dates, or bond/sukuk ratings for the last two (2) years.

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

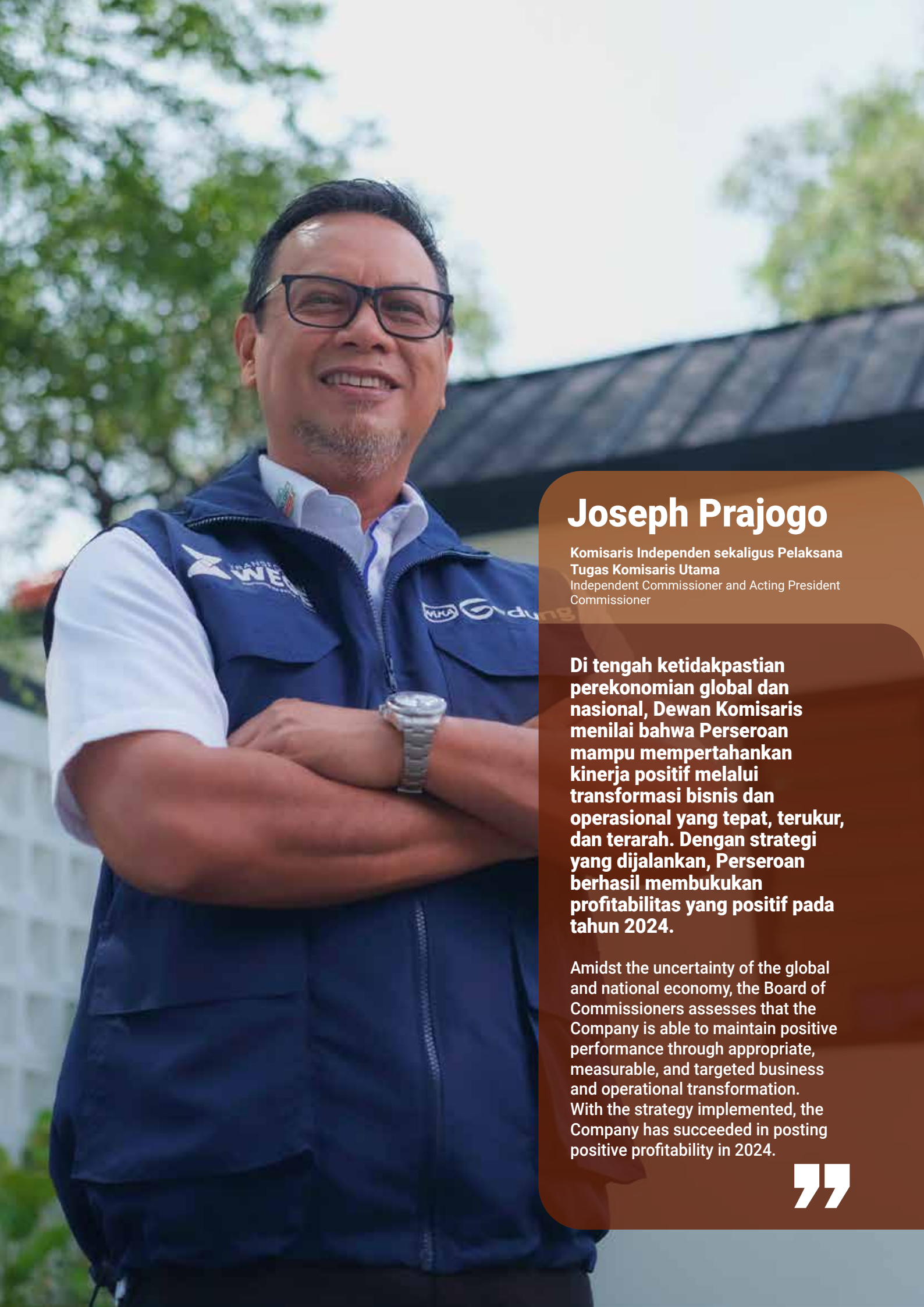




LAPORAN MANAJEMEN
Management Report

Perseroan berupaya mendorong prinsip kesetaraan dengan meningkatkan keterlibatan karyawan perempuan dalam berbagai lini operasional, yang diharapkan akan mendukung penguatan budaya kerja yang lebih inovatif, kolaboratif, dan berdaya saing tinggi.

The Company seeks to promote the principle of equality by increasing the involvement of female employees in various operational lines, which is expected to support the strengthening of a more innovative, collaborative and highly competitive work culture.



Joseph Prajogo

Komisaris Independen sekaligus Pelaksana Tugas Komisaris Utama
Independent Commissioner and Acting President Commissioner

Di tengah ketidakpastian perekonomian global dan nasional, Dewan Komisaris menilai bahwa Perseroan mampu mempertahankan kinerja positif melalui transformasi bisnis dan operasional yang tepat, terukur, dan terarah. Dengan strategi yang dijalankan, Perseroan berhasil membukukan profitabilitas yang positif pada tahun 2024.

Amidst the uncertainty of the global and national economy, the Board of Commissioners assesses that the Company is able to maintain positive performance through appropriate, measurable, and targeted business and operational transformation. With the strategy implemented, the Company has succeeded in posting positive profitability in 2024.

Laporan Dewan Komisaris

Report of the Board of Commissioners

PEMEGANG SAHAM DAN PEMANGKU KEPENTINGAN YANG TERHORMAT,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) atau Perseroan mampu menghadapi berbagai tantangan sepanjang tahun 2024 dan tetap mempertahankan kinerja yang baik. Dengan penerapan strategi yang tepat serta sinergi yang kuat antara Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pemangku kepentingan, Perseroan mampu tumbuh secara berkelanjutan dan sehat.

Sejalan dengan peringatan hari jadi ke-16, Perseroan mampu menorehkan pencapaian positif serta menunjukkan ketangguhan dalam menghadapi dinamika bisnis yang semakin kompleks. Keberhasilan ini tidak terlepas dari komitmen Perseroan dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik serta penguatan sinergi di dalam grup usaha.

Dewan Komisaris menyadari bahwa tahun 2024 merupakan periode penuh tantangan, baik dari faktor internal maupun eksternal. Oleh karena itu, kami senantiasa menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan arahan strategis guna memastikan Perseroan tetap berada pada jalur pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi global, tren industri, serta kebijakan pemerintah, Dewan Komisaris terus mendukung Perseroan dalam mengoptimalkan kinerja dan menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris berpegang pada prinsip independensi serta berpedoman pada *Board Manual* Pedoman Tata Kerja Direksi dan Dewan Komisaris, Anggaran Dasar Perseroan, Pedoman *Code of Corporate Governance*, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada kesempatan ini, saya mewakili jajaran Dewan Komisaris menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk Tahun Buku 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para Pemegang Saham dan seluruh Pemangku Kepentingan. Laporan ini mencakup penilaian kinerja Direksi, evaluasi terhadap komite-komite di bawah Dewan Komisaris, pandangan atas prospek usaha, serta penerapan tata kelola perusahaan.

PANDANGAN ATAS LINGKUNGAN EKONOMI DAN BISNIS

Sepanjang tahun 2024, ekonomi global menghadapi berbagai ketidakpastian. Ketegangan geopolitik, fragmentasi pola perdagangan dunia, pergeseran pola pertumbuhan ekonomi spasial yang memengaruhi suku bunga dan risiko utang, perubahan dalam arus investasi keuangan global, serta pesatnya digitalisasi antarnegara

DEAR ESTEEMED SHAREHOLDERS AND STAKEHOLDERS,

We express our gratitude to the Almighty God for His grace and blessings, hence, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) or the Company is able to encounter various challenges throughout 2024 and maintain good performance. With the right strategy and strong synergy between the Board of Commissioners, Board of Directors, and all stakeholders, the Company is able to grow sustainably and with soundness.

In conformity with the commemoration of our 16th anniversary, the Company has been able to make positive achievements and demonstrate resilience in facing increasingly complex business dynamics. This success is inseparable from the Company's commitment to implementing good corporate governance and strengthening synergy within the business group.

The Board of Commissioners is aware that 2024 is a period full of challenges, both from internal and external factors. Therefore, we continuously carry out our supervisory function and provide strategic direction to ensure that the Company remains on a sustainable growth path. Taking into account global economic conditions, industry trends, and government policies, the Board of Commissioners continues to support the Company in optimizing performance and creating added value for shareholders and stakeholders.

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners adheres to the principle of independence and is guided by the Board Manual for the Work Procedures of the Board of Directors and the Board of Commissioners, the Company's Articles of Association, the Code of Corporate Governance Guidelines, Financial Services Authority regulations, and prevailing laws and regulations.

On this occasion, I, on behalf of the Board of Commissioners, submit a report on the implementation of supervisory duties and providing advice to the Board of Directors for the 2024 Fiscal Year as our accountability to the Shareholders and all Stakeholders. This report includes an assessment of the performance of the Board of Directors, an evaluation of the committees under the Board of Commissioners, views on business prospects, and the implementation of corporate governance.

OUTLOOK ON THE ECONOMIC AND BUSINESS ENVIRONMENT

Throughout 2024, the global economy faces various uncertainties. Geopolitical tensions, fragmentation of world trade patterns, shifts in spatial economic growth patterns that affect interest rates and debt risks, changes in global financial investment flows, and rapid digitalization between countries are the main factors that impact

menjadi faktor utama yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi global. Selain faktor global, dinamika nasional, termasuk isu politik, pemilihan presiden (Pilpres), dan pemilihan kepala daerah (Pilkada), turut memberikan pengaruh tidak langsung terhadap bisnis Perseroan.

Perubahan kepemimpinan politik di berbagai negara turut memberikan dampak terhadap perekonomian global. Pada tahun 2024, pemilihan umum berlangsung di lebih dari 60 (enam puluh) negara, melibatkan sekitar empat miliar penduduk dunia, dan menghasilkan pemimpin-pemimpin baru, baik di negara maju maupun berkembang. Pergantian kepemimpinan ini berpotensi membawa perubahan arah kebijakan di berbagai sektor. Di Indonesia, pemilihan umum juga menghasilkan pergantian kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Dengan berbagai tantangan yang terjadi, aktivitas perekonomian global cenderung mengalami pelemahan dengan kinerja yang bervariasi di setiap kawasan. Sementara itu, kinerja ekonomi negara-negara maju masih cukup *resilien*, meskipun lebih rendah dibandingkan periode sebelum pandemi. Pada tahun 2024, ekonomi Amerika Serikat tumbuh sebesar 2,3% (yoy), sedangkan kawasan Eropa mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 1,1% (yoy), yang merupakan laju pertumbuhan tercepat sejak awal tahun 2023. Di sisi lain, ekonomi Tiongkok menunjukkan tanda-tanda perlambatan, sementara negara-negara di kawasan ASEAN tetap resilien meskipun menghadapi penurunan permintaan global.

Di tengah berbagai tantangan global yang masih tinggi, perekonomian Indonesia mampu tumbuh secara solid sebesar 5,03% (yoy) pada tahun 2024. Inflasi juga tetap terkendali dalam kisaran target 2,5% ±1%, dengan realisasi sebesar 2,61% pada akhir tahun 2024, mencerminkan stabilitas makroekonomi yang terjaga.

Pesta demokrasi, mulai dari pemilihan presiden (Pilpres) hingga pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada tahun 2024, turut memberikan dampak terhadap perekonomian Indonesia. Perubahan kebijakan ekonomi pasca pemilihan umum memengaruhi berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Bagi sektor infrastruktur, pemilihan umum tahun 2024 mendorong peningkatan pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari visi besar calon presiden dan kepala daerah, yang bertujuan membentuk fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable economic growth*) bagi masa depan Indonesia.

Kendati prospek sektor infrastruktur tetap positif, diperlukan ketangkasan (*agility*) dalam merespons berbagai tantangan dengan cepat dan efektif. Sektor ini juga harus mampu beradaptasi serta menyesuaikan strategi dengan dinamika yang terus berkembang agar tetap kompetitif di tengah persaingan yang semakin ketat.

global economic growth. In addition to the global factors, national dynamics, including political issues, presidential elections (Pilpres), and regional head elections (Pilkada), also have an indirect impact on the Company's business.

Changes in political leadership in various countries also have an impact on the global economy. In 2024, general elections have taken place in more than 60 (sixty) countries, involving around four billion people in the world, and producing new leaders, both in developed and emerging countries. This change in leadership has the potential to bring about changes in policy direction in various sectors. In Indonesia, the general election also resulted in a change in leadership from President Joko Widodo to President-elect, Prabowo Subianto.

With the various challenges that occur, global economic activity tends to weaken with varying performance in each region. In the meantime, the economic performance of developed countries remains to be fairly resilient, although lower than the period before the pandemic. In 2024, the United States economy grew by 2.3% (yoy), while the European region recorded economic growth of 1.1% (yoy), which becomes the fastest growth rate since early 2023. On the other hand, China's economy shows sign of slowing, while countries in the ASEAN region remain despite facing a decline in global demand.

Amidst various global challenges that are still high, the Indonesian economy was able to grow solidly by 5.03% (yoy) in 2024. Inflation also remains under control within the target range of 2.5% ±1%, with a realization of 2.61% at the end of 2024, reflecting maintained macroeconomic stability.

The democratic celebration, starting from the presidential election (Pilpres) to the regional head elections (Pilkada) in 2024, also has an impact on the Indonesian economy. Changes in economic policy after the general election affect various sectors, including education, health, and infrastructure. For the infrastructure sector, the 2024 general election encourages increased infrastructure development as part of the grand vision of presidential and regional leader candidates, which aims to form a foundation for sustainable economic growth for Indonesia's future.

Despite of the prospects for the infrastructure sector remain positive, agility is needed in responding to various challenges rapidly and effectively. This sector shall also be able to adapt and adjust strategies to the continuously developing dynamics in order to remain competitive amidst increasingly tight competition.

PENILAIAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP KINERJA DIREKSI DAN IMPLEMENTASI STRATEGI PERUSAHAAN

Pencapaian Kinerja Direksi dan Dasar Penilaiannya

Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada Direksi atas optimalisasi strategi dan implementasi kebijakan yang selaras dengan tujuan Perseroan. Upaya yang telah dilakukan Direksi dalam merumuskan langkah-langkah strategis serta menjalankannya secara efektif telah berkontribusi terhadap pencapaian kinerja yang positif di tengah dinamika bisnis yang menantang.

Secara finansial, pengelolaan Perseroan yang dilakukan Direksi dapat bertahan dengan baik meskipun menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait pengelolaan cash flow. Sebagai entitas yang dimiliki oleh BUMN, Perseroan memiliki tanggung jawab dalam memastikan efisiensi operasional, salah satunya melalui pengendalian Harga Pokok Penjualan (HPP) sebagai indikator dalam pencapaian laba kotor. Dewan Komisaris secara berkala melakukan pemantauan agar HPP dapat dikelola secara optimal dan tetap sejalan dengan target yang telah ditetapkan dalam RKAP.

Selain aspek keuangan, pengembangan *Human Capital* (HC) menjadi salah satu tantangan utama bagi Perseroan, seiring dengan dinamika bisnis yang semakin kompleks. Penguatan kapabilitas HC menjadi faktor kunci dalam meningkatkan daya saing, yang tidak hanya mencakup peningkatan keterampilan (*skills*), pengetahuan (*knowledge*), dan wawasan intelektual, tetapi juga implementasi praktik terbaik (*best practices*) di industri konstruksi.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap pertumbuhan berkelanjutan, Dewan Komisaris juga menekankan pentingnya implementasi aspek keberlanjutan dalam praktik sosial, salah satunya melalui penguatan prinsip keberagaman (*diversity*). Dalam industri konstruksi yang secara historis didominasi oleh tenaga kerja laki-laki, Perseroan berupaya mendorong prinsip kesetaraan dengan meningkatkan keterlibatan karyawan perempuan dalam berbagai lini operasional termasuk dalam posisi kepemimpinan. Perseroan percaya bahwa inklusivitas dan kesempatan yang setara bagi seluruh karyawan, tanpa memandang gender, akan mendukung penguatan budaya kerja yang lebih inovatif, kolaboratif, dan berdaya saing tinggi.

Dalam menetapkan *Key Performance Indicator* (KPI), Dewan Komisaris mempertimbangkan berbagai aspek penilaian secara komprehensif, termasuk efisiensi dalam pelaksanaan rencana kerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan, persentase peningkatan dan realisasi pencapaian, serta indeks kepuasan pelanggan, baik internal maupun eksternal. Pada tahun 2024, KPI Korporat yang melekat pada KPI Direksi mencatat skor pencapaian sebesar 99,60. Capaian ini diperoleh berdasarkan evaluasi terhadap beberapa kriteria prioritas yang menjadi

BOARD OF COMMISSIONERS' ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE AND IMPLEMENTATION OF COMPANY'S STRATEGY

Board of Directors' Performance Achievements and Assessment Basis

The Board of Commissioners appreciates the Board of Directors for optimizing strategies and implementing policies that are aligned with the Company's objectives. The initiatives made by the Board of Directors in formulating strategic steps and implementing them effectively have contributed in achieving positive performance amidst challenging business dynamics.

Financially, the management of the Company by the Board of Directors has been able to survive well despite facing a number of challenges, especially related to the cash flow management. As an entity owned by a BUMN, the Company has a responsibility to ensure operational efficiency, one of which is through controlling the Cost of Goods Sold (COGS) as an indicator in achieving gross profit. The Board of Commissioners periodically performs monitoring so as to the COGS can be managed optimally and remain in line with the targets set in the RKAP.

In addition to the financial aspect, the development of Human Capital (HC) is one of the main challenges for the Company, along with increasingly complex business dynamics. Strengthening HC capabilities is a key factor in increasing competitiveness, which does not only include in improving skills, knowledge, and intellectual insight, but also implementing best practices in the construction industry.

As part of its commitment to sustainable growth, the Board of Commissioners also emphasizes the importance of implementing sustainability aspects in social practices, one of which is through strengthening the principle of diversity. In the construction industry, which has historically been dominated by male workers, the Company seeks to promote the principle of equality by increasing the involvement of female employees in various operational lines, including in leadership positions. The Company believes that inclusivity and equal opportunities for all employees, regardless of gender, will support the strengthening of a more innovative, collaborative, and highly competitive work culture.

In determining the Key Performance Indicator (KPI), the Board of Commissioners considers various aspects of the assessment comprehensively, including efficiency in implementing work plan in accordance with the targets that have been set, percentage of growth and realization of achievements, and customer satisfaction index, both internal and external. In 2024, the Corporate KPI attached to the Board of Directors' KPI recorded an achievement score of 99.60. This achievement was obtained based on an evaluation of several priority

fokus penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Direksi, di antaranya aspek Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia, Inovasi Model Bisnis, Kepemimpinan Teknologi, Peningkatan Investasi, serta Pengembangan Talenta.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap keberlanjutan, Dewan Komisaris juga menekankan pentingnya implementasi aspek *Environmental, Social, and Governance* (ESG), khususnya dalam praktik sosial melalui keberagaman (*diversity*). Pada tahun 2024, Direksi terus mendorong keterlibatan perempuan dalam lingkungan kerja dan kepemimpinan Perseroan. Hal ini tercermin dari peran aktif Ibu Suli Fatimah sebagai anggota Dewan Komisaris, serta peningkatan jumlah karyawan perempuan yang mencapai 12,00% dari total karyawan. Perseroan berkomitmen untuk terus memperkuat prinsip kesetaraan gender dengan meningkatkan peran perempuan dalam bisnis dan operasional. Ke depan, Perseroan akan terus memperluas inisiatif keberagaman di seluruh lini bisnis guna menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif, inovatif, dan berdaya saing tinggi.

Dewan Komisaris juga mengapresiasi keberhasilan Perseroan dalam melaksanakan transformasi bisnis pada tahun 2024. Keberhasilan ini tercermin dalam pencapaian kinerja positif di berbagai aspek, termasuk peningkatan laba bersih yang mencapai Rp67,96 miliar, atau tumbuh sebesar 46,14% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp46,50 miliar. Selain itu, Perseroan menunjukkan kinerja likuiditas dan solvabilitas yang baik.

Transformasi yang dijalankan pada tahun 2024 menjadi langkah strategis bagi Perseroan dalam memperkuat daya saing dan meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Transformasi ini tidak hanya berdampak pada perbaikan kinerja keuangan, tetapi juga membentuk landasan yang lebih kokoh dalam menghadapi dinamika industri. Sebagai bagian dari strategi pertumbuhan berkelanjutan, transformasi Perseroan mencakup penyesuaian struktur organisasi, penguatan budaya AKHLAK, percepatan inovasi, serta perubahan visi dan misi Perseroan guna memastikan arah pertumbuhan yang lebih adaptif, berkelanjutan, dan berorientasi pada penciptaan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

Pengawasan Terhadap Implementasi Strategi Perusahaan dan Pemberian Nasihat Kepada Direksi

Dewan Komisaris memiliki peran utama dalam mengawasi serta memberikan nasihat kepada Direksi terkait pengelolaan Perseroan, sebagaimana diatur dalam Pedoman Kerja Perseroan (*Board Manual*). Pengawasan yang dilakukan mencakup perumusan kebijakan strategis, penerapan strategi bisnis, hingga evaluasi atas implementasinya. Dalam menjalankan fungsi ini, Dewan Komisaris secara aktif memberikan bimbingan, masukan, serta saran yang mempertimbangkan dinamika industri dan perkembangan internal Perseroan. Tindakan pengawasan juga dilakukan melalui koordinasi

criteria that are the focus of the Board of Commissioners' assessment of the Board of Directors' performance, including aspects of Economic and Social Value for Indonesia, Business Model Innovation, Technology Leadership, Investment Increase, and Talent Development.

As part of its commitment to sustainability, the Board of Commissioners also emphasizes the importance of implementing Environmental, Social, and Governance (ESG) aspects, especially in social practices through diversity. In 2024, the Board of Directors continues to encourage the women involvement in the Company's work environment and leadership. This is reflected in Mrs. Suli Fatimah's active role as a member of the Board of Commissioners, as well as the increase in the number of female employees reaching 12.00% of the total employees. The Company is committed to continuing to strengthen the principle of gender equality by increasing women role in business and operations. Going forward, the Company will continue to expand diversity initiatives across all business lines to create a more inclusive, innovative, and highly competitive work environment.

The Board of Commissioners also appreciates the Company's success in implementing business transformation in 2024. This success is reflected in the achievement of positive performance in various aspects, including an increase in net profit reaching Rp67.96 billion, or growing by 46.14% compared to 2023 of Rp46.50 billion. Moreover, the Company demonstrated good liquidity and solvency performance.

The transformation carried out in 2024 is a strategic step for the Company in strengthening competitiveness and improving good corporate governance. This transformation not only has an impact on improving financial performance, but also forms a stronger foundation in facing industry dynamics. As part of a sustainable growth strategy, the Company's transformation includes adjusting the organizational structure, strengthening AKHLAK culture, accelerating innovation, and changing the Company's vision and mission to ensure a more adaptive, sustainable growth direction that is oriented towards creating long-term value for all stakeholders.

Supervision of The Implementation of The Company's Strategy and Providing Advice to The Board of Directors

The Board of Commissioners has a primary role in supervising and providing advice to the Board of Directors regarding the management of the Company, as stipulated in the Company's Work Guidelines (Board Manual). The supervision carried out comprises the formulation of strategic policies, implementation of business strategies, and evaluation of their implementation. In carrying out this function, the Board of Commissioners actively provides guidance, input, and suggestions that take into account industry dynamics and internal developments of the Company. Supervisory actions are also carried

yang intensif dan komunikasi yang aktif dengan Direksi, baik melalui mekanisme pelaporan maupun diskusi dalam forum rapat yang diselenggarakan secara berkala.

Agar pengawasan berjalan efektif dan sesuai dengan fungsinya, Dewan Komisaris didukung oleh komite-komite di bawahnya, yaitu Komite Audit, Komite Nominasi, Remunerasi, dan GCG, serta Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi, dengan dukungan Sekretaris Dewan Komisaris. Peran dan tanggung jawab masing-masing komite telah diatur dalam *Board Manual*, dan piagam komite terkait.

Menimbang pencapaian positif Perseroan sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris menilai bahwa seluruh komite telah menjalankan tugasnya dengan baik serta berperan secara optimal dalam mendukung pengawasan terhadap tata kelola dan operasional Perseroan.

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 12 (dua belas) kali rapat internal dengan tingkat kehadiran rata-rata 100%. Frekuensi rapat ini telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, serta Anggaran Dasar Perseroan yang mewajibkan rapat Dewan Komisaris diselenggarakan paling sedikit sekali dalam dua bulan. Setiap rapat dipimpin oleh Komisaris Utama, atau oleh anggota Dewan Komisaris lainnya apabila Komisaris Utama berhalangan hadir.

Pelaksanaan tugas Komisaris Utama Perseroan saat ini dirangkap oleh Komisaris Independen, yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap kepengurusan Perseroan, memberikan masukan kebijakan, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi operasional.

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris menyelenggarakan 11 (sebelas) kali rapat dengan Direksi, dengan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris mencapai 100%. Keputusan yang dihasilkan dalam rapat koordinasi antara Dewan Komisaris dan Direksi bersifat mengikat bagi seluruh peserta rapat. Rapat gabungan ini menjadi forum penting bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk membahas laporan kinerja secara berkala, meninjau kondisi serta prospek usaha, serta mengevaluasi kebijakan nasional yang berpotensi memengaruhi operasional Perseroan.

Intensitas pertemuan dan komunikasi yang aktif antara Dewan Komisaris dan Direksi berperan krusial dalam proses pengambilan keputusan strategis. Dewan Komisaris, dengan pengalaman dan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing anggotanya, senantiasa memberikan pandangan dan masukan yang konstruktif bagi pengembangan Perseroan. Berdasarkan hasil pengawasan sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris menilai bahwa implementasi

out through intensive coordination and active communication with the Board of Directors, both through reporting mechanisms and discussions in meeting forums that are held periodically.

In order for supervision to run effectively and in accordance with its functions, the Board of Commissioners is supported by the committees below it, namely Audit Committee, Nomination, Remuneration, and GCG Committee, and Integrated Risk and Governance Monitoring Committee, with the support of the Secretary of the Board of Commissioners. The roles and responsibilities of each committee have been regulated in the Board Manual, and the relevant committee charter.

Considering the Company's positive achievements throughout 2024, the Board of Commissioners assesses that all committees have carried out their duties well and played an optimal role in supporting supervision of the Company's governance and operations.

Throughout 2024, the Board of Commissioners held 12 (twelve) internal meetings with an average attendance rate of 100%. This meeting frequency has complied with the provisions stipulated in OJK Regulation No.33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, as well as the Company's Articles of Association which require the Board of Commissioners' meetings to be held at least once every two months. Each meeting is chaired by the President Commissioner, or by another member of the Board of Commissioners if the President Commissioner is unable to attend.

The implementation of the duties of the Company's President Commissioner is currently concurrently served by an Independent Commissioner, who is responsible for supervising the Company's management, providing policy input, and ensuring operational accountability and transparency.

Throughout 2024, the Board of Commissioners held 11 (eleven) meetings with the Board of Directors, with an attendance rate of 100% of the Board of Commissioners members. Decisions made in the coordination meeting between the Board of Commissioners and the Board of Directors are binding on all meeting participants. This joint meeting is an important forum for the Board of Commissioners and the Board of Directors to discuss periodic performance reports, review business conditions and prospects, and evaluate national policies that have the potential to affect the Company's operations.

The intensity of meetings and active communication between the Board of Commissioners and the Board of Directors plays a crucial role in the strategic decision-making process. The Board of Commissioners, with the experience and competence possessed by each of its members, constantly provides constructive views and input for the development of the Company. Based on the results of supervision throughout 2024, the Board of Commissioners assesses

strategi Perseroan telah dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta sejalan dengan kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

Mekanisme dan Frekuensi Pemberian Nasihat

Dewan Komisaris secara aktif memantau pengelolaan Perseroan oleh Direksi melalui mekanisme rapat rutin. Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi diselenggarakan secara teratur guna membahas berbagai aspek strategis, termasuk pemantauan kinerja bisnis, organisasi, manajemen risiko, pengendalian internal, kepatuhan hukum, sumber daya manusia, teknologi, serta aspek utama lainnya yang berpengaruh terhadap keberlanjutan bisnis Perseroan.

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris telah mengadakan 12 (dua belas) kali rapat gabungan dengan Direksi. Dalam setiap pertemuan, Dewan Komisaris memberikan arahan, saran, dan rekomendasi dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) serta mempertimbangkan kondisi terkini yang dihadapi Perseroan.

Selain melalui forum rapat, Dewan Komisaris juga menyampaikan nasihat kepada Direksi melalui diskusi langsung maupun komunikasi tertulis, seperti surat menyurat. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan efektivitas komunikasi serta mendorong kolaborasi yang sinergis antara Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjalankan strategi Perseroan.

Pandangan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi dan Dasar Pertimbangannya

Momentum pertumbuhan ekonomi yang berada di level 5,03% berdampak pada prospek bisnis konstruksi yang diyakini dapat berkembang lebih baik, di mana industri jasa konstruksi di Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini tercermin dari struktur Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, di mana sektor konstruksi menempati posisi ke-4 konstribusi terbesar dalam tiga tahun terakhir sebesar 10,09%. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa sektor ini menjadi pilar penting dalam perekonomian nasional, terutama dalam mendukung berbagai proyek pembangunan yang harus diselesaikan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang.

Namun, dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025, terdapat penyesuaian *(refocusing)* anggaran pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah sehingga akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan industri konstruksi kedepannya. Dengan adanya *refocusing* anggaran ini

that the implementation of the Company's strategy has been carried out in accordance with prevailing laws and in line with the interests of all stakeholders.

Mechanism and Frequency of Advice Provision

The Board of Commissioners actively monitors the management of the Company by the Board of Directors through a routine meeting mechanism. Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors are held regularly to discuss various strategic aspects, including monitoring business performance, organization, risk management, internal control, legal compliance, human resources, technology, and other key aspects that affect the sustainability of the Company's business.

Throughout 2024, the Board of Commissioners has held 12 (twelve) joint meetings with the Board of Directors. In each meeting, the Board of Commissioners provided direction, advice, and recommendations while remain to prioritizing the principles of Good Corporate Governance (GCG) and considering the current conditions faced by the Company.

In addition to the meeting forums, the Board of Commissioners also provides advice to the Board of Directors through direct discussions and written communication, such as correspondence. This approach is taken to ensure effective communication and encourage synergistic collaboration between the Board of Commissioners and the Board of Directors in implementing the Company's strategy.

Board of Directors' View on the Business Prospects and the Basis for its Considerations

The momentum of economic growth at the level of 5.03% has an impact on the prospects of the construction business which is believed to be able to develop better, where the construction services industry in Indonesia continues to show positive developments. This is reflected in the structure of Indonesia's Gross Domestic Product (GDP), where the construction sector is in the 4th position with the largest contribution in the last three years at 10.09%. This achievement indicates that the sector is an important pillar in the national economy, especially in supporting various development projects that is required to be completed in accordance with the Medium-Term Development Plan and Long-Term Development Plan.

However, with the issuance of Presidential Instruction (Inpres) No. 1 of 2025 concerning Spending Efficiency in the Implementation of the State Budget (APBN) and the 2025 Regional Budget (APBD), there is an adjustment (refocusing) of the infrastructure development budget carried out by the government, it hence will have a significant impact on the growth of the construction industry in the future. With this budget refocusing, there is the potential for a decrease in the

berpotensi terjadinya penurunan alokasi dana untuk proyek-proyek strategis, hingga memperlambat pertumbuhan sektor konstruksi yang selama ini menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Di sisi lain, masifnya proyek-proyek pembangunan konstruksi yang berjalan sepanjang tahun 2024, menghadirkan tantangan baru, seperti perkembangan teknologi yang semakin pesat, meningkatnya persaingan, serta ketersediaan sumber daya konstruksi yang semakin kompleks. Selain itu, aspek tata kelola regulasi dan kelembagaan menjadi faktor yang harus diantisipasi dalam memastikan kelangsungan operasional yang optimal. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Perseroan terus berupaya menciptakan peluang melalui berbagai strategi, termasuk penguatan pemasaran dengan fokus pada pasar Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemerintah, swasta yang selektif, serta pengembangan proyek skema *Build-Operate-Transfer* (BOT) dan *Build-Lease-Transfer* (BLT) pada captive market.

Perseroan juga berkomitmen untuk terus berinovasi melalui transformasi digital, pengembangan produk baru seperti Volumetric Modular, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program pengembangan *Human Capital*. Dari sisi operasional, strategi utama yang diterapkan Perseroan berfokus pada peningkatan profitabilitas, pengelolaan arus kas yang optimal, serta *re-focusing* pelanggan. Sementara dari sisi keuangan, Perseroan menerapkan kebijakan selektif dalam pemilihan pelanggan dengan mempertimbangkan kecukupan pendanaan serta memastikan arus kas positif bagi seluruh *Strategic Business Unit* (SBU), serta pencapaian rating perusahaan yang sehat.

Dewan Komisaris menilai bahwa strategi yang ditetapkan serta implementasi yang dijalankan oleh Direksi telah dilakukan secara sistematis dan terukur dengan melihat dengan mempertimbangkan kompetensi, peluang pasar serta optimalisasi sumber daya yang dimiliki. Keberhasilan Perseroan dalam menjaga pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan tidak terlepas dari langkah-langkah strategis yang diterapkan, termasuk inovasi dalam teknologi konstruksi modular. Pendekatan ini menjadi solusi bagi Perseroan dalam meningkatkan efisiensi proyek, baik dari segi waktu maupun biaya, sehingga memberikan nilai tambah yang signifikan dalam menghadapi tantangan industri yang semakin kompleks.

Selain itu, Dewan Komisaris memandang pencapaian Perseroan sepanjang tahun 2024 sebagai hasil dari transformasi bisnis yang dilakukan secara menyeluruh. Strategi yang disusun tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan finansial, tetapi juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan melalui penerapan prinsip *Environment, Social, and Governance* (ESG). Pendekatan ini diyakini mampu menciptakan nilai jangka panjang bagi Perseroan serta para

allocation of funds for strategic projects, thus slowing down the growth of the construction sector which has been one of the main drivers of national economic growth.

On the other hand, the massive construction projects that will be running throughout 2024 will present new challenges, such as increasingly rapid technological developments, increasing competition, and the availability of increasingly complex construction resources. Furthermore, the aspects of regulatory and institutional governance are factors that are required to be anticipated in ensuring optimal operational continuity. In order to encounter these challenges, the Company continues to strive to create opportunities through various strategies, including strengthening marketing by focusing on the State-Owned Enterprises (BUMN), government, selective private markets, and developing Build-Operate-Transfer (BOT) and Build-Lease-Transfer (BLT) scheme projects in the captive market.

The Company is also committed to continuously innovating through digital transformation, developing new products such as Volumetric Modular, and improving the quality of human resources through numerous Human Capital development programs. In the operational perspective, the main strategy implemented by the Company focuses on increasing profitability, optimal cash flow management, and customer refocusing. For the meantime, in the financial perspective, the Company implements a selective policy in selecting customers by considering adequate funding and ensuring positive cash flow for all Strategic Business Units (SBU), as well as achieving a healthy company rating.

The Board of Commissioners assesses that the strategies set and implementation carried out by the Board of Directors have been carried out systematically and measurably by considering competencies, market opportunities and optimization of existing resources. The Company's success in maintaining sustainable business growth is inseparable from the strategic steps implemented, including innovation in modular construction technology. This approach is a solution for the Company in increasing project efficiency, both in terms of time and cost, thus providing significant added value in facing increasingly complex industry challenges.

Furthermore, the Board of Commissioners views the Company's achievements throughout 2024 as the result of a comprehensive business transformation. The strategy formulated is not merely oriented towards financial growth, but also takes into account the sustainability aspects through the application of the Environment, Social, and Governance (ESG) principles. This approach is believed to be able to create long-term value for the Company and its stakeholders.

pemangku kepentingan. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian positif Perseroan dalam perolehan proyek baru sepanjang tahun 2024, yang mencapai 33 proyek dengan total nilai sebesar Rp2,72 triliun. Dengan demikian, total keseluruhan proyek atau *order book* Perseroan di tahun 2024 mencapai Rp9,01 triliun.

This is proven by the Company's positive achievements in obtaining new projects throughout 2024, reaching 33 projects with a total value of Rp2.72 trillion. Therefore, the total projects or order book of the Company in 2024 reached Rp9.01 trillion.

Melalui evaluasi terhadap proyeksi ekonomi global, nasional, serta dinamika industri, Dewan Komisaris meyakini bahwa strategi yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2025 telah selaras dengan dinamika perekonomian global maupun nasional dengan mempertimbangkan berbagai faktor risiko dan peluang yang ada. Oleh karena itu, Dewan Komisaris optimis bahwa Perseroan dapat mencapai target yang telah ditetapkan, dengan tetap mengedepankan tata kelola yang kuat serta prinsip kehati-hatian dalam mengelola risiko.

Through an evaluation of global and national economic projections, as well as industry dynamics, the Board of Commissioners believes that the strategy formulated in the 2025 Company Work Plan and Budget (RKAP) is in line with the dynamics of the global and national economy by considering a number of risk factors and opportunities. Thus, the Board of Commissioners is optimistic that the Company can achieve the targets that have been set, while remain to prioritizing strong governance and the prudence principle in managing risks.

Ke depan, Dewan Komisaris yakin bahwa Perseroan akan terus mempertahankan posisinya sebagai pionir dalam inovasi modular di sektor konstruksi Indonesia, sekaligus memperkuat daya saingnya dalam menghadapi dinamika industri yang terus berkembang.

Going forward, the Board of Commissioners is confident that the Company will continue to maintain its position as a pioneer in modular innovation in the Indonesian construction sector, while strengthening its competitiveness in facing the dynamics of the ever-evolving industry.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Pandangan Dewan Komisaris terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Perseroan menjalankan bisnisnya dengan berlandaskan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG). Penerapan GCG yang berkelanjutan dan konsisten tidak hanya bertujuan untuk memenuhi ketentuan regulasi, tetapi juga telah menjadi bagian dari budaya kerja sehari-hari. Perseroan berkomitmen untuk terus mengembangkan praktik GCG guna menciptakan pertumbuhan bisnis yang progresif. Sebagai wujud nyata komitmen tersebut, Perseroan telah menetapkan parameter penilaian yang digunakan untuk mengukur efektivitas implementasi GCG.

Dewan Komisaris turut berbangga atas pencapaian Perseroan sepanjang tahun 2024, di mana Perseroan berhasil meningkatkan kualitas penerapan GCG yang tercermin dalam hasil penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard yang dilakukan oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD). Berdasarkan asesmen yang dilakukan oleh para asesor independen, Perseroan memperoleh skor 90,49 dengan predikat *Very Good* atau Level 4, yang menunjukkan bahwa praktik GCG yang dilakukan Perseroan telah sepenuhnya mengadopsi standar internasional.

Dewan Komisaris juga senantiasa menjalankan fungsi pengawasan dengan menekankan pentingnya penerapan prinsip GCG di seluruh aspek operasional Perseroan. Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi serta organ Perseroan lainnya telah menjalankan tugas dan

CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

Board of Commissioners' Views on the Implementation of Corporate Governance

The Company runs its business based on the principles of Good Corporate Governance (GCG). Continuous and consistent implementation of GCG is not only aimed at fulfilling regulatory requirements, but has also become part of the quotidian work culture. The Company is committed to continuously developing GCG practices in order to create progressive business growth. As a concrete manifestation of this commitment, the Company has established assessment parameters used to measure the effectiveness of GCG implementation.

The Board of Commissioners is also proud of the Company's achievements throughout 2024, where the Company has succeeded in improving the quality of GCG implementation as reflected in the results of the ASEAN Corporate Governance Scorecard assessment conducted by the Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD). Based on the assessment conducted by independent assessors, the Company obtained a score of 90.49 with a Very Good or Level 4 predicate, indicating that the Company's GCG practices have fully adopted international standards.

The Board of Commissioners also continues to carry out its supervisory function by emphasizing the importance of implementing GCG principles in all aspects of the Company's operations. The Board of Commissioners assesses that the Board of Directors and other

tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip tata kelola yang berlaku. Ke depan, Dewan Komisaris berkomitmen untuk mempertahankan serta meningkatkan implementasi GCG secara berkelanjutan.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola, pada tahun 2024, Perseroan melakukan perubahan visi dan misi perusahaan. Visi dan misi memiliki peran strategis dalam mengarahkan tujuan dan kebijakan Perseroan, serta menjadi pedoman bagi manajemen dan seluruh karyawan dalam mencapai target jangka panjang. Dengan visi baru "Menjadi mitra terpercaya dalam menciptakan ekosistem konstruksi yang inovatif dan berkelanjutan", Perseroan menegaskan komitmennya untuk memberikan dampak positif terhadap industri konstruksi dan keberlanjutan bisnis. Perubahan visi dan misi yang disahkan pada 30 Desember 2024 ini dinilai oleh Dewan Komisaris sebagai langkah strategis yang relevan dengan dinamika industri konstruksi yang terus berkembang.

Dalam rangka memperkuat implementasi GCG, Perseroan juga membentuk Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi di bawah Dewan Komisaris pada 14 Mei 2024, berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk No. SK.02.01/KOM.0001.WEGE/2024. Pembentukan komite ini didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip tata kelola yang baik. Komite ini diharapkan dapat memberikan masukan strategis terkait manajemen risiko dan tata kelola yang lebih terintegrasi dengan entitas induk.

Dewan Komisaris juga mengapresiasi komitmen Perseroan dalam menerapkan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) sebagai bagian dari strategi bisnisnya. Upaya ini bertujuan untuk mendorong Perseroan dalam menerapkan praktik terbaik serta memperkuat fondasi keberlanjutan jangka panjang.

Dalam upaya meningkatkan dan menyempurnakan praktik GCG, Perseroan mengacu pada ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) dan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Berdasarkan kedua pedoman tersebut, Dewan Komisaris menilai bahwa penerapan GCG di lingkungan Perseroan terus berjalan secara efektif dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Atas berbagai pencapaian tersebut, Dewan Komisaris berkeyakinan bahwa sistem, prosedur dan mekanisme tata kelola yang diterapkan Perseroan telah berfungsi secara efektif di seluruh lini organisasi. Hal ini semakin memperkuat keyakinan bahwa Perseroan berada pada jalur yang tepat dalam menciptakan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Company organs have carried out their duties and responsibilities in accordance with prevailing governance principles. Going forward, the Board of Commissioners is committed to maintaining and improving the implementation of GCG in a sustainable manner.

As part of efforts to strengthen governance, in 2024, the Company changed the company's vision and mission. The vision and mission have a strategic role in directing the Company's goals and policies, as well as being a guideline for management and all employees in achieving long-term targets. With the new vision of "Becoming a trusted partner in creating an innovative and sustainable construction ecosystem", the Company affirms its commitment to providing a positive impact on the construction industry and business sustainability. The changes to the vision and mission, which were ratified on December 30, 2024, are assessed by the Board of Commissioners as a strategic step that is relevant to the dynamics of the construction industry that continues to grow.

In order to strengthen the implementation of GCG, the Company also formed an Integrated Risk and Governance Monitoring Committee under the Board of Commissioners on May 14, 2024, based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk No. SK.02.01/KOM.0001.WEGE/2024. The establishment of this committee is based on prevailing laws and good governance principles. This committee is expected to provide strategic input related to risk management and governance that is more integrated with the parent entity.

The Board of Commissioners also appreciates the Company's commitment to implementing the Environmental, Social, and Governance (ESG) principles as part of its business strategy. This endeavour aims to encourage the Company to implement best practices and strengthen the foundation of long-term sustainability.

In an effort to improve and perfect GCG practices, the Company refers to the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) and the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUGKI) issued by the National Committee for Governance Policy (KNKG). Based on these two guidelines, the Board of Commissioners assesses that the implementation of GCG in the Company's environment continues to run effectively and has increased from year to year.

Apropos to these achievements, the Board of Commissioners believes that the governance systems, procedures and mechanisms implemented by the Company have functioned effectively across all lines of the organization. This further strengthens the belief that the Company is on the right track in creating sustainable and responsible business growth.

Pandangan Dewan Komisaris atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko

Sistem pengendalian internal merupakan mekanisme pengawasan yang diterapkan secara berkesinambungan di seluruh lini Perseroan. Dewan Komisaris memahami bahwa pengendalian internal dan pengelolaan risiko memiliki peran krusial dalam memastikan kelangsungan dan efektivitas operasional Perseroan. Oleh karena itu, Dewan Komisaris secara aktif berperan dalam memberikan persetujuan atas Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang telah dirancang dan diterapkan oleh Direksi.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris memastikan efektivitas SPI melalui pemantauan yang dilakukan oleh Komite Audit dan Komite Pemantauan Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi. Komite-komite tersebut berperan dalam menelaah berbagai risiko yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap Perseroan, termasuk eksposur risiko serta pengendalian dan pengamanan teknologi informasi. Perseroan juga telah membangun sistem pengendalian internal yang berfungsi untuk mengamankan aset dan kepentingan perusahaan melalui unit kerja Internal Audit.

Efektivitas SPI yang diterapkan memungkinkan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) secara efisien, tepat waktu, dan terarah. Hasil evaluasi tahunan atas efektivitas sistem pengendalian internal menunjukkan bahwa secara keseluruhan, sistem ini telah berjalan dengan baik dan dinilai memadai. Selain itu, guna mendukung kebutuhan pasar dan pengembangan bisnis, Perseroan melakukan penyempurnaan Pedoman Sistem Pengendalian Internal, yang telah disahkan pada tahun 2024.

Dalam aspek manajemen risiko, Dewan Komisaris turut berperan aktif dalam mengawasi implementasi manajemen risiko yang dijalankan oleh Direksi. Melalui Komite Pemantauan Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi, Dewan Komisaris mengevaluasi kecukupan sistem manajemen risiko, memastikan bahwa identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, serta pelaporan risiko telah dilakukan secara komprehensif dan akurat sesuai dengan kajian yang dilakukan secara berkala.

Penerapan manajemen risiko yang efektif diharapkan mampu menciptakan dan melindungi nilai Perseroan, menjadikannya lebih unggul dan kompetitif. Dengan mengadopsi konsep *Three Lines Model*, yang mencakup lini operasional, manajemen risiko, serta audit internal, Perseroan berupaya untuk memitigasi risiko yang berpotensi memberikan dampak signifikan serta menghindari konflik kepentingan dalam penyelesaian masalah. Dewan Komisaris menilai bahwa implementasi manajemen risiko Perseroan telah memenuhi harapan dan kepentingan para pemangku kepentingan serta mendukung pencapaian visi dan misi Perseroan secara berkelanjutan.

Board of Commissioners' View on the Effectiveness of the Internal Control System and Risk Management

The internal control system is a supervisory mechanism that is applied continuously across all lines of the Company. The Board of Commissioners understands that internal control and risk management have a crucial role in ensuring the continuity and effectiveness of the Company's operations. Therefore, the Board of Commissioners actively plays a role in providing approval for the Internal Control System (SPI) that has been designed and implemented by the Board of Directors.

In carrying out its supervisory function, the Board of Commissioners ensures the effectiveness of the SPI through monitoring carried out by the Audit Committee and the Integrated Risk Monitoring and Governance Committee. These committees play a role in reviewing numerous risks that have the potential to have an impact on the Company, including risk exposure and information technology control and security. The Company has also built an internal control system that functions to secure the company's assets and interests through the Internal Audit work unit.

The effectiveness of SPI that is implemented allows the achievement of targets that have been set in the Company's Work Plan and Budget (RKAP) and the Company's Long-Term Plan (RJPP) efficiently, on time, and in a focused manner. The results of the annual evaluation of the effectiveness of the internal control system show that overall, this system has been running well and is considered adequate. In addition, in order to support market needs and business development, the Company has improved the Internal Control System Guidelines, which were ratified in 2024.

In terms of risk management, the Board of Commissioners plays an active role in overseeing the implementation of risk management carried out by the Board of Directors. Through the Integrated Risk Monitoring and Governance Committee, the Board of Commissioners evaluates the adequacy of the risk management system, ensuring that identification, measurement, monitoring, control, and reporting of risks have been carried out comprehensively and accurately in accordance with periodic studies.

The implementation of effective risk management is expected to be able to create and protect the Company's value, making it superior and more competitive. By adopting the Three Lines Model concept, which includes operational lines, risk management, and internal audit, the Company seeks to mitigate risks that have the potential to have a significant impact and avoid conflicts of interest in solving problems. The Board of Commissioners assesses that the implementation of the Company's risk management has met the expectations and interests of stakeholders and supports the achievement of the Company's vision and mission in a sustainable manner.

Pandangan atas Penerapan dan Pengelolaan *Whistleblowing System* (WBS)

Perseroan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) melalui kebijakan pelaporan pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS). Kebijakan ini dirancang untuk memberikan akses yang mudah bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pimpinan dan karyawan, dalam melaporkan dugaan pelanggaran secara aman dan transparan. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas serta mendorong budaya kepatuhan di seluruh lini Perseroan.

Sebagai wujud nyata dari komitmen tersebut, Perseroan telah mengembangkan kanal WBS berbasis digital yang terintegrasi untuk menangani pengaduan, termasuk yang berkaitan dengan gratifikasi. Pengelolaan WBS dilakukan secara sinergis oleh Dewan Komisaris, Direksi, serta Tim Kepatuhan Tata Kelola Perusahaan guna memastikan mekanisme pelaporan berjalan secara efektif dan kredibel.

Dewan Komisaris senantiasa mendukung upaya Perseroan dalam menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. WBS menjadi instrumen penting dalam mewujudkan budaya kerja yang transparan, jujur, dan bertanggung jawab. Agar penerapannya berjalan optimal, Perseroan telah menyediakan berbagai kanal pengaduan bagi pelapor untuk melaporkan dugaan maupun kejadian *fraud*.

Setelah laporan diterima, penanggung jawab WBS akan melakukan verifikasi awal sebelum meneruskannya kepada Tim Kepatuhan. Selanjutnya, Tim Kepatuhan akan mengkaji laporan berdasarkan klasifikasi perkara, seperti pelanggaran kode etik, gratifikasi, serta dugaan tindakan penyuapan baik dalam aspek keuangan maupun non-keuangan. Investigasi dilakukan secara independen dan profesional guna memastikan setiap laporan ditindaklanjuti sesuai dengan prinsip GCG.

Dewan Komisaris memandang bahwa WBS memainkan peran strategis dalam memperkuat tata kelola Perseroan serta meningkatkan kesadaran karyawan dan pemangku kepentingan terhadap tindakan anti fraud. Oleh karena itu, sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris secara berkala melakukan pemantauan atas efektivitas implementasi WBS serta memberikan arahan kepada Direksi agar sosialisasi WBS terus dilakukan secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, Dewan Komisaris menilai bahwa penerapan WBS di Perseroan telah berjalan dengan baik dan efektif dalam mendukung terwujudnya tata kelola perusahaan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

View on the Implementation and Management of the Whistleblowing System (WBS)

The Company is committed to improving the quality of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) through a policy of reporting violations or Whistleblowing System (WBS). This policy is designed to provide easy access for all stakeholders, including leaders and employees, to report alleged violations in safe and transparent manner. The main objective of the policy is to create a work environment with integrity and encouraging a culture of compliance throughout the Company.

As a concrete manifestation of this commitment, the Company has developed an integrated digital-based WBS channel to handle complaints, including those related to gratification. WBS management is carried out synergistically by the Board of Commissioners, Board of Directors, and the Corporate Governance Compliance Team to ensure that the reporting mechanism runs effectively and credibly.

The Board of Commissioners continues to support the Company's initiatives to create a work environment free from corruption, collusion, and nepotism. WBS is an important instrument in realizing a transparent, honest, and responsible work culture. In order for its implementation to run optimally, the Company has provided various complaint channels for reporters to report suspected or incidents of fraud.

After the report is received, the person in charge of WBS will conduct an initial verification before forwarding it to the Compliance Team. Furthermore, the Compliance Team will review the report based on the classification of the case, such as violations of the code of conduct, gratification, and alleged bribery in both financial and non-financial aspects. Investigations are carried out independently and professionally to ensure that each report is followed up in accordance with GCG principles.

The Board of Commissioners views that WBS plays a strategic role in strengthening the Company's governance and increasing employee and stakeholder awareness of anti-fraud measures. Therefore, throughout 2024, the Board of Commissioners will periodically monitor the effectiveness of WBS implementation and provide direction to the Board of Directors so as to the WBS socialization continues to be carried out sustainably.

Overall, the Board of Commissioners assesses that the implementation of WBS in the Company has been running well and effectively in supporting the realization of clean, transparent, and accountable corporate governance.

Penilaian Dewan Komisaris atas Kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap jalannya Perseroan, Dewan Komisaris dibantu oleh organ pendukung yang meliputi Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Nominasi, Remunerasi, dan GCG, serta Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi. Keberadaan komite-komite ini bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan serta memastikan efektivitas penerapan prinsip tata kelola yang baik di lingkungan Perseroan.

Setiap komite memiliki peran dan tanggung jawab yang telah ditetapkan dalam pedoman kerja guna memastikan pelaksanaan tugas secara profesional, transparan, dan akuntabel. Anggota komite terdiri dari tenaga ahli di bidangnya yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memberikan evaluasi dan rekomendasi atas berbagai aspek operasional serta tata kelola Perseroan.

Secara berkala, Dewan Komisaris melakukan evaluasi atas kinerja masing-masing komite guna memastikan efektivitas fungsi pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Adapun hubungan struktural antara Dewan Komisaris dan organ pendukungnya adalah sebagai berikut:

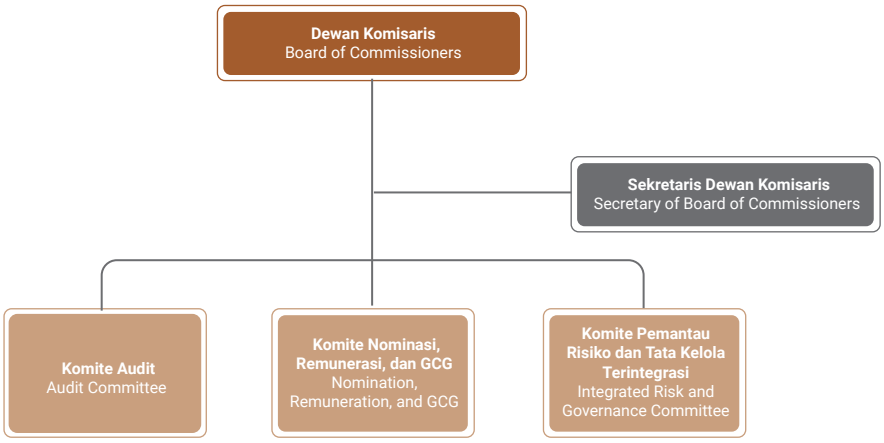
Board of Commissioners' Assessment of Committees' Performance Under the Board of Commissioners

In carrying out its supervisory function over the running of the Company, the Board of Commissioners is assisted by supporting organs including Secretary of the Board of Commissioners, Audit Committee, Nomination, Remuneration, and GCG Committee, and Risk Monitoring and Integrated Governance Committee. The existence of these committees aims to optimize the supervisory function as well as to ensure the effectiveness of the implementation of good governance principles within the Company.

Each committee has a role and responsibility that has been set out in the work guidelines in order to ensure the implementation of duties in a professional, transparent, and accountable manner. Committee members consist of experts in their fields who are in charge in assisting the Board of Commissioners in providing evaluations and recommendations on various aspects of the Company's operations and governance.

Periodically, the Board of Commissioners evaluates the performance of each committee to ensure the effectiveness of the supervisory function and compliance with prevailing regulations. The structural relationship between the Board of Commissioners and its supporting organs is as follows:

Struktur dan Hubungan Dewan Komisaris dengan Organ Pendukung Dewan Komisaris
Structure and Relationship of Board Commissioners with its Supporting Organs



Komite Audit bertugas membantu dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan, khususnya dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal, meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan, serta meninjau ruang lingkup dan ketepatan penugasan auditor eksternal. Sepanjang tahun 2024, Komite Audit telah menyelenggarakan 32 (tiga puluh dua) kali rapat dengan agenda utama mencakup evaluasi kinerja keuangan Perseroan serta efektivitas Sistem Pengendalian Internal.

The Audit Committee sees service with assisting and being responsible to the Board of Commissioners in carrying out its supervisory function, particularly in ensuring the effectiveness of the internal control system, increasing transparency in financial reporting, and reviewing the scope and appropriateness of external auditor assignments. Throughout 2024, the Audit Committee has held 32 (thirty-two) meetings with the main agenda including evaluating the Company's financial performance and the effectiveness of the Internal Control System.

Sementara itu, Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG bertugas membantu dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris agar pengawasan dan pemberian nasihat dalam hal penerapan mekanisme nominasi, remunerasi dan pelaksanaan GCG dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan. Sepanjang tahun 2024, Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG telah menyelenggarakan 13 (tiga belas) kali rapat dengan agenda evaluasi penerapan nominasi dan remunerasi, implementasi prinsip-prinsip GCG, serta kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan yang berlaku.

Dalam rangka memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) secara terintegrasi dengan entitas induk, Perseroan membentuk Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi pada tahun 2024 untuk mendukung Dewan Komisaris dalam mengawasi penerapan manajemen risiko dan tata kelola agar memenuhi prinsip kecukupan prosedur serta efektivitas pengelolaan risiko. Sepanjang tahun 2024, Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi telah menyelenggarakan rapat bersama seluruh entitas anak PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) sebagai entitas induk pada 17 Oktober 2024, dengan agenda mencakup arahan dari Komisaris Utama WIKA selaku Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi, pemaparan dan diskusi kinerja anak perusahaan, serta agenda strategis lainnya. Dalam struktur organisasi Komite Tata Kelola Terintegrasi, Komisaris Utama Perseroan turut berperan sebagai anggota bersama perwakilan anak perusahaan WIKA lainnya, guna memastikan sinergi dan implementasi tata kelola yang efektif di seluruh entitas dalam grup.

Organ pendukung Dewan Komisaris lainnya adalah Sekretaris Dewan Komisaris, yang dinilai telah menjalankan tugasnya secara optimal dengan kinerja yang baik dalam mendukung efektivitas fungsi pengawasan dan peran Dewan Komisaris. Secara khusus, Sekretaris Dewan Komisaris berperan dalam memastikan kelancaran administrasi Perseroan serta membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan pencapaian target Perseroan pada tahun 2024, sehingga berkontribusi dalam peningkatan efektivitas tata kelola perusahaan.

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya di sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris menilai seluruh organ pendukung di bawah Dewan Komisaris telah menjalankan fungsinya dengan baik melalui pendapat dan rekomendasi yang diberikan, serta berperan dalam memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang selaras dengan prinsip-prinsip GCG.

Meanwhile, the Nomination, Remuneration and GCG Committee is officiated with assisting and being responsible to the Board of Commissioners in providing recommendations to the Board of Commissioners so as to the supervision and advice regarding the implementation of the nomination, remuneration and GCG implementation mechanisms can be carried out effectively and sustainably. Throughout 2024, the Nomination, Remuneration and GCG Committee has held 13 (thirteen) meetings with the agenda of evaluating the implementation of nomination and remuneration, implementation of GCG principles, and compliance with prevailing regulations and policies.

In order to strengthen the implementation of good corporate governance (GCG) in an integrated manner with the parent entity, the Company established Risk Monitoring and Integrated Governance Committee in 2024 to support the Board of Commissioners in overseeing the implementation of risk management and governance in order to meet the principles of adequacy of procedures and effectiveness of risk management. Throughout 2024, the Integrated Risk and Governance Monitoring Committee has held a joint meeting with all subsidiaries of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) as the parent entity on October 17, 2024, with an agenda including direction from the President Commissioner of WIKA as Chair of the Integrated Governance Committee, presentation and discussion of subsidiary performance, and other strategic agendas. In the organizational structure of the Integrated Governance Committee, the President Commissioner of the Company also plays a role as a member together with representatives of other WIKA subsidiaries, to ensure synergy and effective implementation of governance across all entities in the group.

Another supporting organ of the Board of Commissioners is the Secretary of the Board of Commissioners, who is considered to have carried out his duties optimally with good performance in supporting the effectiveness of the supervisory function and the role of the Board of Commissioners. Specifically, the Secretary of the Board of Commissioners plays a role in ensuring the smooth administration of the Company and assisting the Board of Commissioners in supervising the management policies and achievement of the Company's targets in 2024, thereby contributing to increasing the effectiveness of corporate governance.

Based on the implementation of its duties and responsibilities throughout 2024, the Board of Commissioners assesses that all supporting organs under the Board of Commissioners have carried out their functions well through the opinions and recommendations provided, and have played a role in ensuring the implementation of corporate governance that is aligned with GCG principles.

INFORMASI PERUBAHAN KOMPOSISI DAN SUSUNAN DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2024, terdapat perubahan dalam komposisi Dewan Komisaris Perseroan. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada 29 Februari 2024, Sdr. Taufan Gestoro diangkat sebagai Komisaris Independen menggantikan Sdr. Ance, yang sebelumnya menjabat berdasarkan keputusan RUPSLB tanggal 15 Januari 2021.

Selanjutnya, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2023 yang dilaksanakan pada 20 Mei 2024 menetapkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Sumadi dari jabatannya sebagai Komisaris Utama. Beliau sebelumnya diangkat berdasarkan keputusan RUPST tanggal 19 April 2022 dan selanjutnya ditunjuk sebagai Direktur Manajemen Risiko dan Legal di PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, sebagaimana ditetapkan dalam RUPST PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Tahun Buku 2023.

Sebagai tindak lanjut, menunjuk Sdr. Joseph Prajogo sebagai Komisaris Independen sekaligus Pelaksana Tugas Komisaris Utama berdasarkan Keputusan Diluar Rapat Dewan Komisaris.

Adapun Komposisi dan dasar pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan dapat dilihat pada tabel berikut:

INFORMATION ON ALTERATIONS IN THE COMPOSITION AND STRUCTURE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

During 2024, there were alterations in the composition of the Company's Board of Commissioners. Based on the decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) held on February 29, 2024, Mr. Taufan Gestoro was appointed as Independent Commissioner replacing Mr. Ance, who previously served based on the decision of the EGMS dated January 15, 2021.

Furthermore, the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) for the 2023 Fiscal Year held on May 20, 2024 determined the honorable dismissal of Mr. Sumadi from his position as President Commissioner. He was previously appointed based on the decision of the AGMS dated April 19, 2022 and was subsequently appointed as Director of Risk Management and Legal at PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, as stipulated in the AGMS of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk for the 2023 Fiscal Year.

As a follow-up, appointed Mr. Joseph Prajogo as Independent Commissioner and Acting President Commissioner based on a Decision Outside the Board of Commissioners Meeting.

The composition and basis for the appointment of members of the Company's Board of Commissioners can be seen in the following table:

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris
Table of Composition and Basis for Appointment of the Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Masa Jabatan Tenure	Periode Jabatan Term of Office	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Joseph Prajogo	Komisaris Independen sekaligus Pelaksana Tugas Komisaris Utama Independent Commissioner and Acting President Commissioner	28 Juli 2020 - RUPS 2025 July 28, 2020 - 2025 GMS	Periode - 1 Period - 1	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 28 Juli 2020 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 51 tanggal 28 Juli 2020. Decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) dated July 28, 2020 and confirmed in the Deed Number 51 dated July 28, 2020.
Suli Fatimah	Komisaris Commissioner	10 Mei 2023 - RUPS 2028 May 10, 2023 - 2028 GMS	Periode - 1 Period - 1	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 10 Mei 2023 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 2 tanggal 10 Mei 2023. Decision of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) dated May 10, 2023 and confirmed in the Deed Number 2 dated May 10, 2023.
Danis Hidayat Sumadilaga	Komisaris Commissioner	10 Mei 2023 - RUPS 2028 May 10, 2023 - 2028 GMS	Periode - 1 Period - 1	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 10 Mei 2023 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 2 tanggal 10 Mei 2023. Decision of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) dated May 10, 2023 and confirmed in the Deed Number 2 dated May 10, 2023.
Taufan Gestoro	Komisaris Independen Independent Commissioner	29 Februari 2024 - RUPS 2029 February 29, 2024 - 2029 GMS	Periode - 1 Period - 1	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 29 Februari 2024 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 6 tanggal 29 Februari 2024. Decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) dated February 29, 2024 and confirmed in the Deed Number 6 dated February 29, 2024.

Kompetensi dan pengalaman serta latar belakang pendidikan formal anggota Dewan Komisaris, saling mendukung dan saling melengkapi sehingga dapat melaksanakan fungsi pengawasan dan penasihatan kepada Direksi dalam hal pengelolaan perusahaan dengan baik. Dewan Komisaris juga berkomitmen untuk bersama-sama bekerja keras dalam menjalankan fungsi pengawasan Perseroan sehingga dapat mencapai target yang sejalan dengan visi dan misi Perseroan.

The competence, experience and formal educational background of the members of the Board of Commissioners, support and complement each other, they hence may carry out the supervisory and advisory functions to the Board of Directors in terms of managing the company well. The Board of Commissioners is also committed to working hard together in carrying out the Company's supervisory function so as to be to achieve targets that are in line with the Company's vision and mission.

PENUTUP

Pada kesempatan ini, Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih kepada para Pemegang Saham yang telah memberikan arahan dan masukan yang cukup konstruktif bagi Perseroan di sepanjang tahun 2024. Dewan Komisaris juga menyampaikan apresiasinya kepada Direksi atas kerja sama dan komitmen yang telah ditunjukan dalam rangka mencapai target dan berkinerja positif.

Dewan Komisaris juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh Direksi serta seluruh jajaran manajemen dan karyawan yang telah memberikan kontribusinya secara optimal, khususnya di tengah tantangan industri konstruksi saat ini. Dewan Komisaris berharap, perjalanan tahun 2024 menjadi catatan penting bagi seluruh insan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk untuk dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan harapan di tahun-tahun mendatang agar dedikasi, komitmen, dan profesionalisme dapat terus terjaga sekaligus ditingkatkan sehingga Perseroan dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.

CLOSING

On this occasion, the Board of Commissioners would like to express gratitude the Shareholders who have provided sufficiently constructive direction and input for the Company throughout 2024. The Board of Commissioners also expressed our appreciation to the Board of Directors for the cooperation and commitment that has been shown in order to achieve targets and perform positively.

The Board of Commissioners also expressed our appreciation to the entire Board of Directors and all levels of management and employees who have contributed optimally, especially amidst the current challenges of the construction industry. The Board of Commissioners hopes that the journey of 2024 become an important note for all people of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk to be able to synergize and collaborate with the hope that in the coming years, dedication, commitment, and professionalism may continue to be maintained and improved, the Company hence can achieve sustainable growth.

\

Jakarta, 25 April 2025
Jakarta, April 25 2025

Atas Nama Dewan Komisaris,
On Behalf of the Board of Commissioners,



Joseph Prajogo
Komisaris Independen sekaligus Pelaksana Tugas Komisaris Utama
Independent Commissioner and Acting President Commissioner



Hadian Pramudita

Direktur Utama
President Director

Sepanjang tahun 2024, Perseroan terus memperkuat fundamental bisnis serta mendorong pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan guna membangun fondasi yang kokoh bagi keberlanjutan jangka panjang. Seluruh strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan dijalankan secara bertahap, tepat sasaran, dan selaras dengan tujuan transformasi Perseroan.

Throughout 2024, the Company continues to strengthen business fundamentals and encourage healthy and sustainable growth to build a solid foundation for long-term sustainability. All strategies and policies that have been formulated are implemented in stages, on target, and in line with the Company's transformation goals.

Laporan Direksi

Report of the Board of Directors

PEMEGANG SAHAM DAN PEMANGKU KEPENTINGAN YANG TERHORMAT,

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Perseroan dapat melalui tahun 2024 dengan baik serta mencatatkan berbagai capaian positif, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan dan dinamika di industri konstruksi.

Pada kesempatan yang baik ini, saya mewakili Direksi menyampaikan Laporan Tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus komitmen Perseroan terhadap prinsip keterbukaan informasi kepada para pemegang saham, regulator, dan seluruh pemangku kepentingan. Seluruh informasi yang disampaikan dalam laporan ini, khususnya yang berkaitan dengan kinerja operasional dan keuangan Perseroan, telah disusun secara transparan, akurat, dan mengacu pada ketentuan regulasi yang berlaku.

TINJAUAN LINGKUNGAN EKONOMI

Pentingnya Pengembangan Infrastruktur dalam Ekspansi Sektor Konstruksi

Infrastruktur merupakan pondasi bagi Indonesia untuk mampu berkompetisi dengan negara-negara lain, sekaligus dapat memberikan dampak berganda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, diantaranya dengan menciptakan lapangan kerja dan titik pertumbuhan ekonomi baru. Keberhasilan pembangunan infrastruktur sangat ditentukan oleh pasokan sumber daya material dan peralatan konstruksi. Untuk itu, pengelolaan tata kelola rantai pasok material dan peralatan konstruksi harus dilakukan dengan baik, untuk memastikan ketersediaannya baik dari segi kuantitas dan kualitas.

Peningkatan aktivitas pembangunan infrastruktur nasional dapat memberikan daya ungkit yang tinggi bagi pertumbuhan industri konstruksi. Hal ini tercermin dari peningkatan yang luar biasa kinerja sektor konstruksi dan menjadi salah satu industri terbesar dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara. Salah satu pendorong utama pertumbuhan sektor konstruksi di Indonesia adalah investasi signifikan dari Pemerintah dalam proyek-proyek infrastruktur. Upaya Pemerintah untuk meningkatkan konektivitas nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan infrastruktur merupakan faktor penting dalam ekspansi sektor konstruksi.

Faktor pendorong lain yang sangat berdampak bagi sektor konstruksi adalah urbanisasi yang cepat dan pertumbuhan populasi di Indonesia juga menjadi kontributor utama bagi industri konstruksi. Dengan semakin banyaknya orang yang pindah ke kota, permintaan akan bangunan hunian dan komersial serta infrastruktur perkotaan juga turut meningkat pesat.

DEAR ESTEEMED SHAREHOLDERS AND STAKEHOLDERS,

Praise and gratitude we offer to the presence of The God Almighty for the abundance of His grace and gifts, so as to the Company can go through 2024 well and record various positive achievements, despite encountering with various challenges and dynamics in the construction industry.

On this good occasion, I represent the Board of Directors in submitting the Annual Report as a form of accountability and the Company's commitment to the principle of openness of information to shareholders, regulators, and all stakeholders. All information presented in this report, especially that relating to the Company's operational and financial performance, has been prepared transparently, accurately, and refers to prevailing regulatory provisions.

ECONOMIC ENVIRONMENT REVIEW

The Importance of Infrastructure Development in Construction Sector Expansion

Infrastructure is the foundation for Indonesia to be able to compete with other countries, while also being able to provide a multiplier effect to drive Indonesia's economic growth, including by creating jobs and new economic growth points. The success of infrastructure development is largely determined by the supply of construction material and equipment resources. Therefore, the management of the supply chain governance of construction materials and equipment must be carried out properly, to ensure their availability in terms of both quantity and quality.

Increasing national infrastructure development activities can provide high leverage for the growth of the construction industry. This is reflected in the extraordinary increase in the performance of the construction sector and becoming one of the largest industries with the fastest growth in Southeast Asia. One of the main drivers of the growth of the construction sector in Indonesia is the significant investment from the Government in infrastructure projects. The Government's endeavor to improve national connectivity and drive economic growth through infrastructure development are important factors in the expansion of the construction sector.

Another driving factor that has a major impact on the construction sector is rapid urbanization and population growth in Indonesia is also a major contributor to the construction industry. With more and more people moving to cities, the demand for residential and commercial buildings and urban infrastructure has also increased rapidly.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia pada tahun 2024 mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,03% (*year on year/yoy*) secara kumulatif. Pertumbuhan tersebut masih dibayangi oleh ketidakpastian dan berbagai tantangan global yang masih membayangi, seperti fragmentasi geoekonomi, ketegangan geopolitik, hingga Proyeksi ekonomi global pada 2024 dan 2025 per Desember 2024 menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memproyeksikan pertumbuhan PDB global sebesar 3,2% pada 2024 dan 3,1% pada 2025.

Sektor konstruksi berperan penting dalam mendukung upaya Pemerintah untuk memperluas infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, industri konstruksi Indonesia merupakan salah satu yang terbesar dan berkembang paling cepat di Asia Tenggara.

Pertumbuhan Stabil Berkat Kebijakan Tepat

Sepanjang tahun 2024, perekonomian Indonesia menunjukan kinerja yang kuat dan stabil. Kinerja ekonomi yang solid ditandai dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,1%, sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,0%. Stabilitas ekonomi dan politik, didukung oleh kebijakan fiskal dan moneter yang efektif, berhasil meningkatkan kepercayaan investor serta mendorong realisasi investasi di berbagai sektor.

Kendati demikian, perekonomian dunia masih dibayangi oleh ketidakpastian yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti cuaca ekstrem, disinformasi dan misinformasi yang dihasilkan oleh *artificial intelligence*, risiko sosial dan polarisasi, risiko biaya hidup serta maraknya *cyber attacks*. Namun perekonomian Indonesia pada tahun 2024 mampu tumbuh solid sebesar 5,03% (yoy) dengan inflasi yang terkendali pada rentang sasaran 2,5% dengan rentang toleransi ±1% yakni 1,57% di tahun 2024.

Adapun sektor utama pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu meningkatnya Industri Pengolahan sebesar 4,5% sekaligus menjadi kontributor terbesar dalam pertumbuhan PDB. Pertumbuhan industri pengolahan didukung oleh peningkatan produksi manufaktur dan ekspor produk olahan, Perdagangan Besar dan Eceran yang mencatat pertumbuhan 4,8%. Sektor ini diuntungkan oleh meningkatnya konsumsi domestik dan daya beli masyarakat.

Sektor lainnya yang menjadi pendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia adalah Informasi dan Komunikasi dengan pertumbuhan tertinggi mencapai 9,3%. Sektor ini terus berkembang seiring dengan digitalisasi dan penetrasi internet yang semakin luas. Sektor pengeluaran dan konsumsi rumah tangga juga mengalami pertumbuhan sebesar 4,9%. Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga menunjukkan peningkatan sebesar 4,6%, sehingga mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia.

According to the Central Statistics Agency (BPS), the Indonesian economy in 2024 recorded a cumulative growth of 5.03% (year on year/yoy). This growth remains being overshadowed by uncertainty and various global challenges that remain loom, such as geoeconomic fragmentation, geopolitical tensions, to Global economic projections in 2024 and 2025 as of December 2024 showed relatively stable growth. The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) projects global GDP growth of 3.2% in 2024 and 3.1% in 2025.

The construction sector plays a significant role in supporting the Government's undertakings to expand infrastructure throughout Indonesia. In addition, the Indonesian construction industry is one of the largest and fastest growing in Southeast Asia.

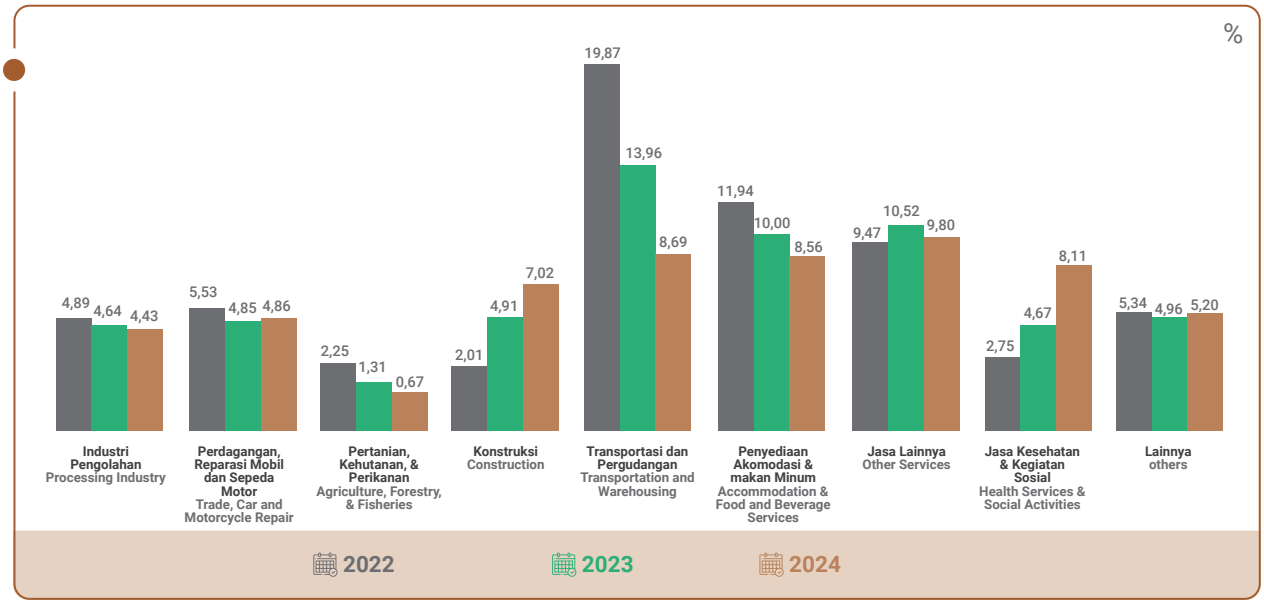
Stable Growth Owing to the Applicable Policies

Throughout 2024, the Indonesian economy showed strong and stable performance. Solid economic performance is marked by Gross Domestic Product (GDP) growth of 5.1%, slightly increasing compared to the previous year which reached 5.0%. Economic and political stability, supported by effective fiscal and monetary policies, has succeeded in increasing investor confidence and encouraging investment realization in various sectors.

However, the world economy remains being overshadowed by uncertainty caused by various factors such as extreme weather, disinformation and misinformation generated by artificial intelligence, social risks and polarization, cost of living risks and rampant cyber attacks. However, the Indonesian economy in 2024 was able to grow solidly by 5.03% (yoy) with controlled inflation in the target range of 2.5% with a tolerance range of ±1%, namely 1.57% in 2024.

The main sector driving Indonesia's economic growth is the increase in the Manufacturing Industry by 4.5% while also being the largest contributor to GDP growth. The growth of the processing industry was supported by an increase in manufacturing production and exports of processed products, Wholesale and Retail Trade which recorded a growth of 4.8%. This sector benefited from increasing domestic consumption and people's purchasing power.

Another sector that drove Indonesia's economic growth was Information and Communication with the highest growth reaching 9.3%. This sector continues to grow along with digitalization and increasingly widespread internet penetration. The household expenditure and consumption sector also experienced growth of 4.9%. Investment or Gross Fixed Capital Formation (PMTB) also showed an increase of 4.6%, reflecting investor confidence in Indonesia's economic prospects.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)
Source: Central Statistics Agency (BPS)

Tingkat inflasi sepanjang tahun 2024 tercatat sebesar 1,57% *yoy* dan Angka ini merupakan yang terendah sepanjang sejarah Indonesia. Inflasi tersebut terjaga dalam rentang sasaran 2,5% ± 1% yang ditetapkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia. Stabilitas inflasi ini menunjukkan kemampuan Pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Implementasi kebijakan fiskal yang tepat sasaran, seperti optimalisasi pendapatan negara dan efisiensi belanja serta sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter berhasil menjaga stabilitas makroekonomi serta mendorong pertumbuhan yang inklusif.

The inflation rate throughout 2024 was recorded at 1.57% yoy and this figure is the lowest in Indonesian history. The inflation was maintained within the target range of 2.5% ± 1% set by the government and Bank Indonesia. This inflation stability indicates the Government's ability to maintain price stability and people's purchasing power. The implementation of targeted fiscal policies, such as optimizing state revenues and spending efficiency as well as synergy between fiscal and monetary policies has succeeded in maintaining macroeconomic stability and encouraging inclusive growth.

TINJAUAN LINGKUNGAN BISNIS

Pertumbuhan Industri Konstruksi Yang lebih Kuat di Tahun 2024

Sektor konstruksi memainkan peran vital dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Kontribusi sektor konstruksi akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia melalui Produk Domestik Bruto (PDB). Sektor konstruksi menjadi salah satu kontributor terbesar keempat dalam tiga tahun terakhir periode 2022 - 2024. Pertumbuhan sektor konstruksi di tahun 2024 mencapai 7,02% yoy dari pencapaian PDB. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2023 mencapai 4,91% yoy dengan kontribusi mencapai 10,09% terhadap PDB. Pertumbuhan dari sektor konstruksi terjadi seiring dengan banyaknya proyek infrastruktur yang dijalankan Pemerintah maupun swasta.

BUSINESS ENVIRONMENT REVIEW

Stronger Growth in the Construction Industry in 2024

The construction sector plays a vital role in infrastructure development in Indonesia. The contribution of the construction sector will have a significant impact on Indonesia's economic growth through Gross Domestic Product (GDP). The construction sector is one of the fourth largest contributors in the last three years of the 2022-2024 period. The growth of the construction sector in 2024 reached 7.02% yoy of GDP achievement. This growth is higher than in 2023 which reached 4.91% yoy with a contribution of 10.09% to GDP. The growth of the construction sector occurs along with the many infrastructure projects carried out by the government and the private sector.

Kendati memiliki prospek yang cerah, industri jasa konstruksi di Indonesia tetap menghadapi beberapa tantangan diantaranya ketersediaan bahan baku, tenaga kerja terampil dan perubahan regulasi adalah beberapa isu yang perlu diatasi untuk memastikan kelancaran proyek-proyek konstruksi. Untuk menghadapi tantangan tersebut, industri konstruksi harus *agile* dalam merespons berbagai tantangan dengan cepat dan efektif. Industri konstruksi juga harus mampu beradaptasi untuk menyesuaikan strategi sesuai dengan kondisi yang terus berubah agar dapat tetap kompetitif di tengah persaingan yang semakin ketat.

ANALISA KINERJA PERUSAHAAN

Strategi dan Kebijakan Perusahaan Tahun 2024

Perseroan menyusun strategi keberlanjutan untuk jangka pendek dan jangka panjang kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang sejalan dengan Rencana Jangka Panjang (RJP). Dalam RKAP dan RJP tersebut memuat strategi dan target-target yang hendak dicapai Perseroan pada tahun buku berikutnya.

Sebagaimana tercantum dalam RKAP, kebijakan dan strategi Perseroan difokuskan pada empat aspek utama sebagai berikut:

1. Aspek Pemasaran
   Strategi pemasaran difokuskan pada ekspansi ke pasar premium serta peningkatan penetrasi di pasar BUMN. Selain itu, Perseroan juga membidik segmen pemerintah dan swasta secara selektif, dengan mempertimbangkan berbagai aspek strategis, baik dari sisi keuangan maupun non-keuangan.

2. Aspek Pengembangan
   Pengembangan dilakukan melalui produk baru berupa volumetric modular. Di samping itu, Perseroan mengakselerasi transformasi digital melalui implementasi *Building Information Modeling* (BIM) pada seluruh proyek, serta penerapan *Enterprise Resources Plan* (ERP) yang berbasis System *Application and Processing* (SAP).

3. Aspek Operasional
   Strategi operasional diarahkan pada penguatan orientasi pelanggan melalui pembentukan organisasi yang lincah (*agile organization*), peningkatan *employee engagement*, pengembangan *sustainable leadership*, dan pelaksanaan *ready to work program*. Perseroan juga mengintensifkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan utama, penerapan BIM Level 2 dan *lean construction* di *seluruh Strategic Business Unit* (SBU), serta efisiensi biaya melalui optimalisasi rantai pasok (SCM) dan manajemen alat berat.

Despite having bright prospects, the construction services industry in Indonesia remain to face several challenges including the availability of raw materials, skilled labor and regulatory changes are some of the issues that need to be addressed to ensure the smooth running of construction projects. To encounter these challenges, the construction industry must be agile in responding to various challenges quickly and effectively. The construction industry shall also be able to adapt to adjust strategies according to changing conditions in order to remain being competitive amidst increasingly fierce competition.

COMPANY PERFORMANCE ANALYSIS

Corporate Strategy and Policy for 2024

The Company has prepared a short-term and long-term sustainability strategy into the Company's Work Plan and Budget (RKAP) which is in conformity with the Long-Term Plan (RJP). The RKAP and RJP contain strategies and targets that the Company wants to achieve in the following financial year.

As stated in the RKAP, the Company's policies and strategies are focused on four main aspects as follows:

1. Marketing Aspect
   The marketing strategy is focused on expanding into the premium market and increasing penetration in the BUMN market. In addition, the Company also targets the government and private segments selectively, by considering various strategic aspects, both from a financial and non-financial perspective.

2. Development Aspect
   Development is carried out through new products in the form of volumetric modular. In addition, the Company is accelerating digital transformation through the implementation of Building Information Modeling (BIM) in all projects, as well as the implementation of an Enterprise Resources Plan (ERP) based on System Application and Processing (SAP).

3. Operational Aspects
   Operational strategies are directed at strengthening customer orientation through the establishment of an agile organization, increasing employee engagement, developing sustainable leadership, and implementing a ready to work program. The Company also intensifies collaboration with key stakeholders, the implementation of BIM Level 2 and lean construction across all Strategic Business Units (SBU), as well as cost efficiency through supply chain optimization (SCM) and heavy equipment management.

4. Aspek Keuangan
   Strategi keuangan difokuskan pada pencapaian profitabilitas yang sehat dan arus kas positif di seluruh *Strategic Business Unit* (SBU), didukung efisiensi operasional melalui pengendalian Harga Pokok Penjualan (HPP).

Perkembangan teknologi yang pesat, disertai dengan berbagai tantangan di industri konstruksi saat ini, mendorong Perseroan untuk terus fokus pada pengembangan konstruksi modular sebagai salah satu produk unggulan. Metode offsite dalam konstruksi modular terbukti menjadi strategi yang efektif dalam mengurangi biaya, mempercepat waktu pengerjaan, serta menurunkan konsumsi energi secara signifikan. Selain itu, metode ini juga berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca dan mendukung upaya mitigasi perubahan iklim. Konstruksi modular menawarkan keunggulan tambahan berupa kemudahan dalam pemindahan dan penggunaan kembali (*reuse*), menjadikannya solusi yang lebih ramah lingkungan. Sejak diimplementasikan pada tahun 2018, konstruksi modular telah memberikan dampak signifikan terhadap kinerja Perseroan, mendukung komitmen terhadap prinsip ESG (*Environmental, Social, and Governance*), serta sejalan dengan inisiatif Perseroan untuk mencapai *Net Zero Emissions* (NZE) di masa depan. Dengan fokus pada keberlanjutan, konstruksi modular diharapkan dapat terus memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan Perseroan pada tahun 2024 dan seterusnya.

Peranan Direksi dalam Perumusan Strategi

Pada tahun 2024, Perseroan memasuki usia ke 16 tahun. Sejalan dengan visi baru, "Menjadi mitra terpercaya dalam menciptakan ekosistem konstruksi yang inovatif dan berkelanjutan", Perseroan menegaskan komitmennya untuk mewujudkan Perseroan yang sehat, tumbuh dan berkelanjutan. Memasuki fase pertumbuhan yang lebih matang, Perseroan merumuskan serangkaian inisiatif strategis untuk mendorong transformasi bisnis dan operasional secara menyeluruh.

Direksi, sebagai organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan, memiliki peran sentral dalam perumusan strategi. Seluruh tindakan dan keputusan Direksi senantiasa diarahkan untuk kepentingan terbaik Perseroan. Dalam menjalankan tugasnya, Direksi menyusun strategi jangka pendek, menengah, dan panjang yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang (RJP) Perseroan.

Strategi tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui program kerja yang dilaksanakan oleh unit-unit terkait dalam organisasi. Direksi juga menetapkan rincian anggaran untuk masing-masing program kerja, yang dilengkapi dengan proyeksi keuangan baik untuk Perseroan maupun entitas anak.

4. Financial Aspects
   The financial strategy is focused on achieving healthy profitability and positive cash flow across all Strategic Business Units (SBU), supported by operational efficiency through controlling Cost of Goods Sold (COGS).

The rapid development of technology, accompanied by a number of challenges in the current construction industry, encourages the Company to continue to focus on developing modular construction as one of its leading products. The offsite method in modular construction has proven to be an effective strategy in reducing costs, accelerating work time, and significantly reducing energy consumption. Furthermore, this method also contributes to reducing greenhouse gas emissions and supporting climate change mitigation undertakings. Modular construction offers the additional advantage of ease of relocation and reuse, making it a more environmentally friendly solution. Since its implementation in 2018, modular construction has had a significant impact on the Company's performance, supporting its commitment to ESG (Environmental, Social, and Governance) principles, and in conformity with the Company's initiative to achieve Net Zero Emissions (NZE) in the future. With a focus on sustainability, modular construction is expected to continue to provide a positive contribution to the Company's growth in 2024 and beyond.

The Role of the Board of Directors in Strategy Formulation

In 2024, the Company goes into its 16th year. In line with the new vision, "To become a trusted partner in creating an innovative and sustainable construction ecosystem", the Company affirms its commitment to realizing a healthy, growing and sustainable Company. Entering a more established growth phase, the Company has formulated a series of strategic initiatives to drive comprehensive business and operational transformation.

The Board of Directors, as the Company's organ that has the authority and full responsibility for managing the company, has a central role in strategy formulation. All actions and decisions of the Board of Directors are continually directed towards the best interests of the Company. In carrying out its duties, the Board of Directors prepares short, medium and long-term strategies which are outlined in the Company's Work Plan and Budget (RKAP) as an annual elaboration of the Company's Long-Term Plan (RJP).

The strategy is next being implemented through work programs implemented by related units within the organization. The Board of Directors also stipulates the budget details for each work program, which are equipped with financial projections for both the Company and its subsidiaries.

Sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian, Direksi secara berkala melakukan evaluasi terhadap implementasi strategi yang telah dijalankan. Evaluasi ini mencakup pencapaian kinerja, pelaksanaan inisiatif strategis, serta pemantauan profil risiko. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Direksi melakukan penyesuaian, perbaikan, dan penyempurnaan strategi guna memastikan relevansi dan efektivitas kebijakan yang diterapkan.

Selain itu, Direksi juga secara rutin melakukan kajian dan observasi mendalam terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi Perseroan. Langkah-langkah penyelesaian diterapkan secara berkelanjutan guna menjamin tercapainya tujuan perusahaan dan peningkatan kinerja secara konsisten.

Pencapaian dan Realisasi Target Tahun 2024

Transformasi yang dilakukan oleh Perseroan pada tahun 2024 berhasil membawa pertumbuhan positif terhadap kinerja Perseroan. Sebagai bagian dari perjalanan bisnis, transformasi antara lain, perubahan visi dan misi, yang menjadi landasan baru dalam mencapai tujuan strategis jangka panjang Perseroan.

Pada tahun 2024, Perseroan berhasil mencapai sebagian besar target yang telah ditetapkan, seperti pencapaian Total Pendapatan melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp5,10 triliun atau 114,83% dari target Rp4,44 triliun, Total Aset sebesar Rp5,73 triliun atau 100,82% dari target Rp5,68 triliun, dan Laba Kotor *(Gross Profit)* sebesar Rp307,50 miliar atau 121,13% dari target Rp253,87 miliar. Sementara itu, terdapat beberapa target yang belum tercapai antara lain Kontrak Baru sebesar Rp2,72 triliun atau 53,54% dari target Rp5,07 triliun, dan Laba Bersih sebesar Rp67,96 miliar atau 76,25% dari target Rp89,13 miliar meskipun tumbuh 46,14% dibandingkan realisasi laba bersih tahun 2023 sebesar Rp46,50 miliar.

Kendati demikian, beberapa target yang belum tercapai dipengaruhi oleh sejumlah faktor, terutama faktor eksternal mencakup dinamika industri konstruksi dan tekanan ekonomi makro yang berdampak pada penurunan permintaan serta keterbatasan proyek baru, sehingga memengaruhi pencapaian beberapa indikator kinerja Perseroan.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, Perseroan telah mengambil berbagai langkah strategis, antara lain peningkatan efisiensi operasional, penguatan hubungan dengan klien utama, penerapan inovasi dan tekonologi, perluasan penetrasi pasar melalui produk unggulan, serta optimalisasi strategi bisnis lainnya. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Perseroan untuk menjaga daya saing dan memastikan kesinambungan pertumbuhan secara berkelanjutan.

Pencapaian positif kinerja Perseroan pada tahun 2024 juga sejalan dengan pencapaian Indeks Kepuasan Pelanggan (CSI) sebesar 93,39%. Analisis terhadap skor CSI tersebut menunjukkan bahwa

As a form of supervision and control, the Board of Directors periodically evaluates the implementation of the strategies that have been implemented. This evaluation includes performance achievement, implementation of strategic initiatives, and monitoring of risk profiles. Based on the results of the evaluation, the Board of Directors makes adjustments, improvements, and refinements to strategies to ensure the relevance and effectiveness of the policies implemented.

In addition, the Board of Directors also routinely conducts in-depth studies and observations of various challenges and problems encountered by the Company. Resolution steps are implemented sustainably to ensure the achievement of company goals and consistent performance improvement.

Achievement and Realization of 2024 Targets

The transformation carried out by the Company in 2024 has succeeded in bringing positive growth to the Company's performance. As part of the business journey, the transformation includes, among others, changes in vision and mission, which become a new foundation in achieving the Company's long-term strategic goals.

In 2024, the Company succeeded in achieving most of the targets that have been set, such as achieving Total Revenue exceeding the target set at Rp5.10 trillion or 114.83% of the target of Rp4.44 trillion, Total Assets of Rp5.73 trillion or 100.82% of the target of Rp5.68 trillion, and Gross Profit of Rp307.50 billion or 121.13% of the target of Rp253.87 billion. In the meantime, there are several targets that have unachieved, including New Contracts of Rp2.72 trillion or 53.54% of the target of Rp5.07 trillion, and Net Profit of Rp67.96 billion or 76.25% of the target of Rp89.13 billion, although it grew 46.14% compared to the realization of net profit in 2023 of Rp46.50 billion.

However, several targets that unachieved are influenced by numerous factors, especially external factors including the dynamics of the construction industry and macroeconomic pressures that have an impact on decreasing demand and limited new projects, thus affecting the achievement of several of the Company's performance indicators.

In response to these challenges, the Company has taken various strategic steps, including increasing operational efficiency, strengthening relationships with key clients, implementing innovation and technology, expanding market penetration through superior products, and optimizing other business strategies. These undertakings are part of the Company's commitment to maintaining competitiveness and ensuring sustainable growth.

The Company's positive performance achievement in 2024 is also aligned with the attainment of the Customer Satisfaction Index (CSI) of 93.39%. Analysis of the CSI score indicates that the level of

tingkat kepuasan pelanggan mengalami peningkatan, mencerminkan keberhasilan Perseroan dalam memenuhi ekspektasi dan kebutuhan pelanggan, serta menciptakan pengalaman yang positif dalam setiap layanan yang diberikan di tengah tantangan industri yang dihadapi.

customer satisfaction has increased, reflecting the Company's success in meeting customer expectations and needs, as well as creating a positive experience in every service provided amidst the challenges encountered by the industry.

Tantangan yang Dihadapi dan Langkah Penyelesaiannya

Kondisi sektor konstruksi nasional sepanjang tahun 2024 menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks, baik dari faktor eksternal maupun internal. Salah satu tantangan utama adalah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), yang dipengaruhi oleh dinamika global maupun domestik. Dari dalam negeri, pasar keuangan menunjukkan sikap *wait and see* terhadap arah kebijakan suku bunga Bank Indonesia (BI). Sementara dari sisi eksternal, ketidakpastian atas kebijakan suku bunga The Fed, perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok, serta data ekspor-impor dan deflasi yang lebih tinggi dari perkiraan turut memberikan tekanan tambahan terhadap nilai tukar dan iklim investasi.

Challenges Encountered and Steps to Resolve Them

The condition of the national construction sector throughout 2024 faces a number of reasonably complex challenges, both from external and internal factors. One of the main challenges is the weakening of the rupiah exchange rate against the United States (US) dollar, which is influenced by global and domestic dynamics. Domestically, the financial market is showing a wait and see attitude towards the direction of Bank Indonesia's (BI) interest rate policy. Meanwhile, from the external side, uncertainty over the Fed's interest rate policy, slowing economic growth in China, and higher-than-expected export-import and deflation data have also put additional pressure on the exchange rate and investment climate.

Pelemahan nilai tukar rupiah berdampak langsung terhadap biaya operasional, khususnya akibat kenaikan harga bahan baku impor seperti besi, baja, semen, serta peralatan berat yang digunakan dalam proyek-proyek konstruksi. Hal ini menyebabkan tekanan terhadap biaya produksi yang pada akhirnya dapat memengaruhi margin keuntungan dan kelancaran pelaksanaan proyek.

The weakening of rupiah exchange rate has a direct impact on operational costs, especially due to the increase in the price of imported raw materials such as iron, steel, cement, and heavy equipment used in construction projects. This causes pressure on production costs which can ultimately affect profit margins and the smooth implementation of projects.

Di sisi lain, tantangan juga muncul dari aspek regulasi yang kompleks dan dinamis, termasuk pemenuhan ketentuan dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021. Kepatuhan terhadap regulasi ini membutuhkan pemahaman yang komprehensif agar kegiatan operasional tetap berjalan efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, ketersediaan tenaga kerja profesional yang terampil dan bersertifikasi masih menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan proyek.

On the other hand, challenges also arise from complex and dynamic regulatory aspects, including compliance with the provisions of the Construction Services Law and Government Regulation No. 14 of 2021. Compliance with this regulation requires a comprehensive understanding so as to the operational activities continue to run effectively and in accordance with prevailing laws and regulations. Furthermore, the availability of skilled and certified professional workers remains a challenge in maintaining the quality and timeliness of project implementation.

Faktor-faktor lain seperti inflasi, fluktuasi harga material, dan ketidakpastian ekonomi global turut memperbesar risiko terhadap keberlangsungan proyek yang tengah berjalan maupun yang akan datang.

Other factors such as inflation, material price fluctuations, and global economic uncertainty also increase the risk to the sustainability of ongoing and future projects.

Sebagai respons terhadap berbagai tantangan tersebut, Perseroan telah merumuskan dan menerapkan sejumlah langkah strategis, antara lain:

In response to these challenges, the Company has formulated and implemented a number of strategic steps, including:

1. Optimalisasi rantai pasok (*supply chain*) dan pemilihan vendor strategis untuk mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor serta menekan biaya logistik;
2. Peningkatan efisiensi operasional melalui penerapan teknologi konstruksi seperti *Building Information Modeling* (BIM) dan *lean construction*;

1. Optimizing the supply chain and selecting strategic vendors to reduce dependence on imported raw materials and reduce logistics costs;
2. Increasing operational efficiency through the application of construction technology such as Building Information Modeling (BIM) and lean construction;

3. Penerapan manajemen risiko secara menyeluruh yang mengacu pada standar ISO 31000:2018 guna mengidentifikasi dan memitigasi risiko finansial, operasional, dan hukum;
4. Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan berkelanjutan dan kerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan untuk mencetak tenaga ahli bersertifikasi;
5. Penguatan strategi bisnis dan pemasaran dengan membidik proyek-proyek strategis yang bernilai tinggi dan berkelanjutan;
6. Pemantauan ketat terhadap dinamika ekonomi makro guna menyusun proyeksi keuangan dan strategi yang adaptif terhadap perubahan pasar; dan
7. Optimalisasi strategi korporasi lainnya, yang disesuaikan dengan perkembangan kondisi pasar dan kebutuhan operasional.

Langkah-langkah tersebut diambil sebagai bentuk komitmen Perseroan dalam menjaga daya saing, ketahanan usaha, dan kesinambungan pertumbuhan di tengah dinamika lingkungan usaha yang terus berkembang. Dengan strategi yang adaptif dan terukur, Perseroan optimistis dapat terus menjaga kinerja yang sehat dan berkelanjutan di masa mendatang.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Peningkatan Kualitas Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG)* dilakukan secara konsisten dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kinerja Perseroan. Upaya Perseroan untuk terus meningkatkan kualitas penerapan prinsip GCG dilakukan secara berkesinambungan dengan cara me-*review* berkala kebijakan internal Perseroan untuk memastikan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan memastikan bahwa implementasi seluruh kebijakan internal yang berlaku saat ini sudah memenuhi prinsip-prinsip GCG yakni Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Kewajaran di semua tingkat atau jenjang organisasi.

Penerapan praktik GCG yang ada di seluruh jenjang Perseroan bertujuan untuk mendorong pengelolaan Perseroan secara profesional, efisien, dan efektif. Selain itu, penerapan GCG juga mampu memberdayakan fungsi kerja secara maksimal serta meningkatkan kemandirian Organ Perseroan. Sesuai dengan Anggaran Dasar, Perseroan memiliki organ utama yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi bagi pemegang saham; Dewan Komisaris yang berperan dalam melakukan pengawasan dan pemantauan Perseroan; serta Direksi yang bertugas dalam pengelolaan maupun kepengurusan Perseroan.

Melalui RUPS, para pemegang saham dapat berperan aktif dalam menentukan arah dan kebijakan perusahaan. Pada tahun 2024, Perseroan menyelenggarakan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang

3. Implementing comprehensive risk management that refers to the ISO 31000:2018 standard to identify and mitigate financial, operational, and legal risks;
4. Increasing workforce competency through ongoing training and collaboration with various educational institutions to produce certified experts;
5. Strengthening business and marketing strategies by targeting high-value and sustainable strategic projects;
6. Close monitoring of macroeconomic dynamics in order to prepare financial projections and strategies that are adaptive to market changes; and
7. Optimizing other corporate strategies, which are adjusted to developments in market conditions and operational needs.

These steps are taken as a form of the Company's commitment to maintaining competitiveness, business resilience, and sustainable growth amidst the dynamics of the ever-evolving business environment. With an adaptive and measurable strategy, the Company is optimistic to be able to continue maintaining healthy and sustainable performance in the future.

IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE

Improving the Quality of Implementation of Corporate Governance

The implementation of good corporate governance (GCG) are carried out consistently to be able to contribute improving the Company's performance. The Company's undertakings to continually improve the quality of the implementation of GCG principles are carried out continuously by periodically reviewing the Company's internal policies to ensure their compliance with prevailing laws and regulations. The Company ensures that the implementation of all current internal policies has met the principles of GCG, namely Transparency, Accountability, Responsibility, Independence and Fairness at all levels or levels of the organization.

The implementation of GCG practices at all levels of the Company aims to encourage professional, efficient and effective management of the Company. In addition, the implementation of GCG is also able to empower work functions optimally and increase the independence of the Company's Organs. In accordance with the Articles of Association, the Company has main organs, namely the General Meeting of Shareholders (GMS) as the highest decision-making forum for shareholders; the Board of Commissioners which plays a role in supervising and monitoring the Company; and the Board of Directors who are responsible to running and managing the Company.

Through the GMS, shareholders can play an active role in determining the direction and policies of the company. In 2024, the Company held 1 (one) Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on May 20,

Saham Tahunan (RUPST) pada 20 Mei 2024 dan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 29 Februari 2024. Perseroan senantiasa memenuhi prinsip *fairness* kepada para pemegang saham dalam hal hak-hak dan kewenangannya dalam pelaksanaan RUPS Perseroan.

2024 and 1 (one) Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on February 29, 2024. The Company continuously fulfills the principle of fairness to shareholders in terms of their rights and authorities in implementing the Company's GMS.

Selain RUPS, organ lain yang sangat memengaruhi jalannya GCG adalah fungsi Dewan Komisaris. Perseroan memiliki 4 (empat) orang anggota Dewan Komisaris yang mampu memberikan nasihat dan arahan sesuai dengan keahlian dan pengalaman masing-masing anggota. Arahan dan nasihat yang disampaikan sangat relevan terhadap kondisi Perseroan sehingga membawa kinerja Perseroan yang lebih positif di tahun 2024 di tengah tantangan industri konstruksi dan ekonomi.

In addition to the GMS, another organ that greatly influences the implementation of GCG is the function of the Board of Commissioners. The Company has 4 (four) members of the Board of Commissioners who are able to provide advice and direction according to the expertise and experience of each member. The direction and advice provided are very relevant to the Company's condition hence it brings the Company's performance to be more positive in 2024 amidst the challenges of the construction industry and economy.

Sementara itu, visi dan misi merupakan komponen strategis bagi perusahaan yang diyakini mampu membuat perusahaan melihat potensi masa depan dan cenderung mendorong pemikiran jangka pendek maupun penentuan target jangka panjang. Upaya yang dilakukan Perseroan untuk memperkuat tata kelola perusahaan adalah perubahan Visi-Misi Perseroan yang disahkan dalam Rapat Direksi Nomor: MJ.01.00/A.DIR.00003.WEGE/2024 tanggal 24 Desember 2024. Perubahan ini kemudian disetujui Dewan Komisaris di dalam Rapat Dewan Komisaris yang melibatkan Direksi (Rakomdir) Nomor SE.01.03/A.KOM.00001/2025 tanggal 30 Desember 2024.

For the meantime, the vision and mission are strategic components for the company that are believed to be able to make the company see future potential and tend to encourage short-term thinking and long-term target determination. The Company's undertakings to strengthen corporate governance are changes to the Company's Vision-Mission which were ratified in the Board of Directors Meeting Number: MJ.01.00/A.DIR.00003.WEGE/2024 dated December 24, 2024. This change was later approved by the Board of Commissioners in the Board of Commissioners Meeting involving the Board of Directors (Rakomdir) Number SE.01.03/A.KOM.00001/2025 dated December 30, 2024.

Melalui visi menjadi "Mitra yang terpercaya dalam menciptakan ekosistem konstruksi yang inovatif dan berkelanjutan", Perseroan berharap dapat memberikan dampak yang positif terhadap keberlangsungan bisnis Perusahaan. Untuk mewujudkan visi tersebut, Perseroan telah menentukan beberapa langkah yang dituangkan dalam misi yakni memperkuat kepercayaan dan transparansi, memprioritaskan solusi untuk pelanggan, mengintegrasikan teknologi untuk inovasi, menciptakan ekosistem kolaboratif dengan mitra strategis, serta berorientasi keberlanjutan sebagai inti proses operasi. Perubahan visi dan misi tersebut dinilai manajemen sebagai bentuk penyesuaian organisasi terhadap perubahan, antara lain persaingan, regulasi, perilaku konsumen, teknologi, ekonomi, serta siklus hidup organisasi.

Through the vision of becoming a "Trusted Partner in Creating an Innovative and Sustainable Construction Ecosystem", the Company hopes to have a positive impact on the sustainability of the Company's business. To realize the vision, the Company has stipulated several steps outlined in the mission, namely strengthening trust and transparency, prioritizing solutions for customers, integrating technology for innovation, creating a collaborative ecosystem with strategic partners, and being oriented towards sustainability as the core of the operational process. The changes in vision and mission are considered by management as a form of organizational adjustment to changes, including competition, regulation, consumer behavior, technology, economy, and the organizational life cycle.

Dalam upaya memperkuat GCG melalui Komite Tata Kelola Terintegrasi (TKT), Direksi memiliki peran penting sebagai pengelola perusahaan yang bertanggung jawab untuk memastikan penerapan tata kelola yang baik, termasuk dalam menyusun dan menetapkan kebijakan manajemen risiko dan kebijakan terkait tata kelola terintegrasi, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut diterapkan secara konsisten. Direksi melalui Sistem Pengendalian Internal (SPI) juga memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi di perusahaan, termasuk penilaian kecukupan pengendalian internal, manajemen

In order to strengthen GCG through the Integrated Governance Committee (IGC), the Board of Directors has an important role as a company manager who is responsible for ensuring the implementation of good governance, including in preparing and establishing risk management policies and policies related to integrated governance, and ensuring that these policies are implemented consistently. The Board of Directors through the Internal Control System (SPI) also monitors and evaluates the implementation of integrated governance in the company, including assessing the adequacy of internal control,

risiko dan fungsi kepatuhan. Kemudian, Direksi menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari komite TKT, sekaligus memastikan bahwa temuan tersebut ditangani dengan tepat dan efektif. Secara berkala, Direksi memberikan laporan kepada Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan tata kelola terintegrasi di Perseroan.

risk management and compliance functions. Then, the Board of Directors follows up on the findings and recommendations of the IGC committee, while ensuring that the findings are handled appropriately and effectively. Periodically, the Board of Directors provides reports to the Board of Commissioners regarding the implementation of integrated governance in the Company.

Terkait dengan peran pengelolaan dan pengurusan Perseroan yang dilakukan Direksi, Direksi menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan, serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan peristiwa yang berkaitan dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS. Pada tahun 2024, Perseroan memiliki 5 (lima) orang anggota Direksi dengan tugas dan tanggung jawab yang berbeda sebagaimana tercantum dalam *Board Manual*.

In relation to the role of management and administration of the Company carried out by the Board of Directors, the Board of Directors carries out all actions related to the interests of the company and in accordance with the intent and purpose of the company, and represents the Company both inside and outside the court regarding all matters and events related to restrictions as stipulated in laws and regulations, Articles of Association and/or GMS Decisions. In 2024, The Company has 5 (five) members of the Board of Directors with different duties and responsibilities as stated in the Board Manual.

Sesuai dengan yang tertuang dalam peraturan yang berlaku dan *Board Manual*, Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi paling sedikit sekali dalam 1 (satu) bulan, dan dalam rapat tersebut Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2024, Direksi telah menyelenggarakan Rapat Direksi sebanyak 7 (tujuh) kali, sedangkan Rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris sebanyak 11 (sebelas) kali.

In accordance with the prevailing regulations and the Board Manual, the Board of Directors is required to hold a Board of Directors Meeting at least once a month, and in that meeting the Board of Directors may invite the Board of Commissioners. Throughout 2024, the Board of Directors has held 7 (seven) Board of Directors Meetings, while Joint Meetings with the Board of Commissioners were held 11 (eleven) times.

Perseroan senantiasa menyampaikan informasi secara transparan, akurat, dan tepat waktu kepada para pemegang saham serta seluruh pemangku kepentingan. Komitmen ini diwujudkan melalui keterbukaan dan kesetaraan informasi dalam berbagai laporan dan informasi Perseroan yang diterbitkan melalui situs web resmi Perseroan, Bursa Efek Indonesia, maupun sarana komunikasi ke media massa.

The Company constantly delivers information transparently, accurately, and on time to the shareholders and all stakeholders. This commitment is realized through openness and equality of information in various reports and information from the Company published through the Company's official website, the Indonesia Stock Exchange, and communication facilities to the mass media.

Perseroan juga menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap upaya Pemerintah untuk memberantas tindak korupsi dan *fraud* di Indonesia. Tahun 2024, Perseroan membuat kebijakan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 sebagai bagian dari langkah Perseroan untuk mencegah terjadinya *fraud* dan sebagai bagian dari upaya Perseroan dalam penguatan praktik GCG. Perseroan juga terus memperkuat pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*/WBS), yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari penerapan SMAP.

The Company also shows a high commitment to the Government's undertakings to eradicate corruption and fraud in Indonesia. In 2024, the Company made a policy to implement the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (SMAP) as part of the Company's steps to prevent fraud and as part of the Company's endeavor to strengthen GCG practices. The Company also continues to strengthen the management of the Whistleblowing System (WBS), which is an integral part of the implementation of SMAP.

Perseroan menyadari bahwa efektivitas praktik WBS tidak mudah untuk dilaksanakan karena dibutuhkan pemahaman dan kesadaran dari setiap organ Perseroan. Untuk itu, Perseroan membuat ketentuan mengenai pelaksanaan WBS dan tercantum dalam Kode Etik Pegawai (*Code of Conduct*). Adapun dalam pelaporan WBS, identitas pelapor akan dirahasiakan serta mendapat perlindungan secara hukum. Hal ini dilakukan agar pelapor tidak takut untuk melakukan pelaporan atas kejadian *fraud* atau indikasi *fraud* maupun pelanggaran lainnya yang ditemukan.

The Company realizes that the effectiveness of WBS practices is not easy to implement because it requires understanding and awareness from each organ of the Company. For this reason, the Company has made provisions regarding the implementation of WBS and is stated in the Employee Code of Conduct. In WBS reporting, the reporter's identity will be kept confidential and will receive legal protection. This is carried out to hence the reporter is assured to report incidents of fraud or indications of fraud or other violations found.

Setiap pelaporan atas dugaan pelanggaran terhadap penerapan *Code of Conduct* Pegawai ditindaklanjuti oleh Tim Kepatuhan Tata Kelola Perusahaan dengan berkoordinasi dan bekerja sama dengan organ Perseroan terkait guna memastikan penyelesaian yang objektif serta sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Pegawai yang masuk, sehingga tidak terdapat proses investigasi maupun sanksi yang dijatuhkan selama periode pelaporan.

Komitmen Perseroan untuk terus berupaya meningkatkan penerapan GCG dilakukan dengan uji nilai (asesmen) secara berkala berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Perseroan telah menetapkan kriteria kinerja keberlanjutan dalam Indikator Kinerja Kunci (KPI/ *Key Performance Indicators*) sebagai tolok ukur kinerja Direksi.

Sehubungan dengan pencabutan SK-16/S.MBU/2012 tentang indikator penilaian dan evaluasi penerapan GCG, dalam rangka peningkatan penerapan GCG di lingkungan perusahaan, Perseroan mengacu pada *ASEAN Corporate Governance Scorecard* (ACGS). Instrumen penilaian ACGS dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip *corporate governance* berstandar internasional, terutama prinsip-prinsip *corporate governance* yang dikeluarkan oleh OECD dan International Corporate Governance Network (ICGN). Berdasarkan asesmen yang dilakukan oleh para asesor independen, pada tahun Perseroan memperoleh skor 90,49 dengan predikat *Very Good* atau Level 4, yang menunjukkan bahwa praktik GCG yang dilakukan Perseroan telah sepenuhnya mengadopsi standar internasional.

Selain itu, Perseroan juga mengacu pada Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola. Hasil penilaian atas tingkat kepatuhan terhadap penerapan prinsip-prinsip GCG tersebut menjadi acuan bagi Perseroan dalam melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap implementasi praktik GCG di masa mendatang.

Kriteria Utama Penilaian Kinerja Direksi

Penetapan *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan aspek strategis yang selaras dengan tujuan dan prioritas korporasi. Penilaian difokuskan pada pencapaian target kinerja Perseroan secara menyeluruh, efektivitas pelaksanaan strategi bisnis, serta kontribusi Direksi dalam menciptakan nilai tambah dan menjaga kesinambungan pertumbuhan usaha.

Pada tahun 2024, pencapaian KPI Korporat yang menjadi acuan dalam penilaian kinerja Direksi mencapai skor 99,60. Capaian ini diperoleh berdasarkan kriteria strategis yang telah ditetapkan, antara lain aspek Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia, Inovasi Model Bisnis, Kepemimpinan Teknologi, Peningkatan Investasi, serta Pengembangan Talenta.

Every report of alleged violations of the implementation of the Employee Code of Conduct is followed up by the Corporate Governance Compliance Team by coordinating and collaborating with the relevant Company organs to ensure objective resolution and in accordance with the principles of good corporate governance. Throughout 2024, there were no reports of alleged violations of the Employee Code of Conduct received, there hence was no investigation process or sanctions imposed during the reporting period.

The Company's commitment to continue to strive to improve the implementation of GCG is carried out through periodic value tests (assessments) based on established standards. The Company has set sustainability performance criteria in Key Performance Indicators (KPI) as a benchmark for the Board of Directors' performance.

In connection with the revocation of SK-16/S.MBU/2012 concerning the assessment and evaluation indicators for the implementation of GCG, in order to improve the implementation of GCG in the corporate environment, the Company refers to the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS). The ACGS assessment instrument was developed based on internationally standardized corporate governance principles, especially the corporate governance principles issued by the OECD and the International Corporate Governance Network (ICGN). Based on the assessment conducted by independent assessors, in 2018 the Company obtained a score of 90.49 with a Very Good or Level 4 predicate, indicating that the Company's GCG practices have fully adopted international standards.

In addition, the Company also refers to the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUGKI) issued by the National Committee for Governance Policy (KNKG) as part of undertakings to strengthen governance. The results of the assessment of the level of compliance with the implementation of GCG principles serve as a reference for the Company in conducting evaluations and continuous improvements to the implementation of GCG practices in the future.

Main Criteria for the Board of Directors' Performance Assessment

The determination of the Board of Directors' Key Performance Indicators (KPI) is carried out by considering strategic aspects that are aligned with corporate goals and priorities. The assessment focuses on the achievement of the Company's overall performance targets, the effectiveness of business strategy implementation, and the Board of Directors' contribution in creating added value and maintaining sustainable business growth.

In 2024, the achievement of the Corporate KPI which is the reference in assessing the Board of Directors' performance reached a score of 99.60. This record was obtained based on the strategic criteria that have been set, including aspects of Economic and Social Value for Indonesia, Business Model Innovation, Technology Leadership, Investment Increase, and Talent Development.

Pengukuran dan penetapan KPI tersebut mencerminkan tingkat keberhasilan Direksi dalam mengarahkan dan mengelola Perseroan secara keseluruhan sesuai strategi jangka pendek maupun jangka panjang yang telah ditetapkan di awal tahun. Selain pengukuran berbasis KPI korporat, penilaian juga dilakukan secara individual untuk masing-masing anggota Direksi, dengan mempertimbangkan kriteria seperti tingkat kehadiran dalam Rapat Direksi maupun Rapat Koordinasi bersama Dewan Komisaris, partisipasi aktif dalam diskusi dan pengambilan keputusan, kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan perusahaan, serta komitmen terhadap keputusan kolektif yang telah disepakati.

Hasil evaluasi kinerja Direksi, baik secara kolektif maupun individual, menjadi dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham dalam pengambilan keputusan terkait pengangkatan kembali maupun pemberhentian anggota Direksi di periode mendatang.

Penilaian Kinerja Komite Di Bawah Direksi

Perseroan tidak memiliki komite yang berada dibawah Direksi hingga periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Namun demikian, keberadaan Organ Pendukung di bawah Direksi telah mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dalam membantu Direksi menjalankan fungsi pengelolaan Perusahaan. Selama tahun 2024, Organ Pendukung di bawah Direksi telah melaksanakan tugasnya dengan baik serta menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik di setiap pelaksanaan fungsinya.

STRATEGI IMPLEMENTASI KEBERLANJUTAN TAHUN 2024

Pendekatan Holistik untuk Mencapai Keberlanjutan Jangka Panjang

Perseroan menyadari bahwa aktivitas bisnis dan operasional perusahaan memiliki dampak yang signifikan terhadap kelangsungan bumi dan makhluk hidup. Oleh karena itu, dalam menjalankan bisnisnya, Perseroan berkomitmen untuk menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Perseroan meyakini bahwa dengan menyelaraskan ketiga aspek ini, akan tercipta pondasi yang kokoh untuk mewujudkan bisnis yang berkesinambungan dengan pencapaian kinerja yang optimal.

Sepanjang tahun 2024, Perseroan telah menyelaraskan sebagian besar aktivitas bisnis dan operasionalnya dengan fokus pada aspek ESG, yang dijelaskan sebagai berikut:

Aspek Lingkungan:

Sebagai upaya mengurangi dampak lingkungan, Perseroan melakukan transisi penggunaan kendaraan operasional untuk manajemen dan karyawan, beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik (*electric vehicle/EV*). Untuk mendukung pencapaian tujuan

The measurement and determination of these KPIs reflect the level of success of the Board of Directors in directing and managing the Company as a whole in accordance with the short-term and long-term strategies that have been set at the beginning of the year. In addition to corporate KPI-based measurements, assessments are also carried out individually for each member of the Board of Directors, by considering criteria such as the level of attendance at Board of Directors' Meetings and Coordination Meetings with the Board of Commissioners, active participation in discussions and decision-making, compliance with company regulations and policies, and commitment to collective decisions that have been agreed upon.

The results of the Board of Directors' performance evaluation, both collectively and individually, become the basis for consideration by Shareholders in making decisions regarding the reappointment or dismissal of members of the Board of Directors in the upcoming period.

Performance Assessment of the Committees Under the Board of Directors

The Company does not have a committee under the Board of Directors until the period ended on December 31, 2024. However, the existence of Supporting Organs under the Board of Directors has been able to carry out its duties and responsibilities well in assisting the Board of Directors in performing the Company's management functions. During 2024, the Supporting Organs under the Board of Directors have completed their duties well and implemented the principles of good corporate governance in each of their functions.

SUSTAINABILITY IMPLEMENTATION STRATEGY IN 2024

A Holistic Approach to Achieve Long-Term Sustainability

The Company is aware that the company's business and operational activities have a significant impact on the sustainability of the earth and living creatures. Therefore, in running its business, the Company is committed to implementing sustainable financial principles and creating sustainable economic growth by aligning the interests of Environmental, Social, and Governance (ESG). The Company believes that by aligning these three aspects, a solid foundation will be created to realize a sustainable business with optimal performance achievement.

Throughout 2024, the Company has aligned most of its business and operational activities with a focus on ESG aspects, which are explained as follows:

Environmental Aspect:

As an undertaking to reduce environmental impact, the Company is transitioning the use of operational vehicles for management and employees, switching from fossil fuel vehicles to electric vehicles (EV). To support the achievement of the Net Zero Emissions target by

Net Zero Emissions pada tahun 2060, Perseroan juga fokus pada peningkatan kapabilitas teknologi konstruksi modular yang dapat mengurangi emisi dan limbah akibat pengerjaan proyek. Penggunaan material bahan baku dan bahan pembantu yang berkualitas dan ramah lingkungan juga menjadi prioritas, selain berbagai program lainnya yang mendukung keberlanjutan.

Aspek Sosial:
Perseroan memahami bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peranan penting untuk keberlanjutan bisnis perusahaan. Potensi SDM yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk meraih keberhasilan, baik secara individu maupun dalam mencapai tujuan organisasi. Pada tahun 2024, salah satu fokus utama Perseroan adalah implementasi keberagaman (*diversity*) dalam lingkungan perusahaan. Kami terus mendorong keterlibatan perempuan dalam berbagai posisi kepemimpinan, termasuk di jajaran Dewan Komisaris. Komitmen terhadap kesetaraan gender (*gender equality*) dan perluasan inisiatif keberagaman di seluruh lini bisnis bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Hal ini tercermin dari jumlah karyawan wanita yang mencapai 12% dari total karyawan pada tahun 2024.

Untuk memenuhi tanggung jawab terhadap masyarakat, Perseroan rutin menyelenggarakan kegiatan yang ditujukan kepada masyarakat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*/CSR). Peran aktif Perseroan dalam kegiatan CSR telah terintegrasi dengan ISO 26000 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui empat pilar, yakni: WEGE Hijau, WEGE Sehat, WEGE Pintar, dan WEGE Peduli. Sepanjang tahun 2024, Perseroan telah melaksanakan serangkaian kegiatan CSR dari berbagai pilar tersebut.

Aspek Tata Kelola:
Untuk memperkuat prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, Perseroan mengadopsi prinsip-prinsip yang diatur dalam *ASEAN Corporate Governance Scorecard* (ACGS) dan berpedoman pada standar Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001. Hal ini bertujuan untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani penyuapan di lingkungan perusahaan secara menyeluruh, termasuk dalam aktivitas bisnis.

Terkait dengan pengelolaan risiko yang berhubungan dengan perubahan iklim, Perseroan telah mengembangkan strategi untuk menangani dua jenis risiko: risiko fisik yaitu kerugian yang disebabkan oleh dampak fisik perubahan iklim, dan risiko transisi yaitu risiko yang terkait dengan transisi menuju ekonomi rendah karbon, seperti ketidakpastian regulasi, tekanan dari investor, perubahan preferensi konsumen, serta perkembangan teknologi baru.

Untuk mewujudkan keberlanjutan secara konsisten, Perseroan telah menetapkan rangkaian kebijakan strategis yang mengatur secara detail pengelolaan, *monitoring* hingga evaluasi berbagai aspek, mulai dari strategis, pemasaran hingga target keuangan yang harus dicapai.

2060, the Company is also focusing on improving the capabilities of modular construction technology that can reduce emissions and waste from project work. The use of quality and environmentally friendly raw materials and auxiliary materials is also a priority, in addition to various other programs that support sustainability.

Social Aspect:
The Company understands that Human Capital (HC) play an important role in the sustainability of the company's business. The potential of HC can be utilized to achieve success, both individually and in achieving organizational goals. In 2024, one of the Company's main focuses is the implementation of diversity in the company environment. We continue to encourage the involvement of women in various leadership positions, including on the Board of Commissioners. Commitment to gender equality and expansion of diversity initiatives across all business lines aims to create an inclusive, innovative, and highly competitive work environment. This is reflected in the number of female employees by 12% of total employees in 2024.

In order to fulfill its responsibility to the community, the Company regularly organizes activities aimed at the community through its Corporate Social Responsibility (CSR) program. The Company's active role in CSR activities has been integrated with ISO 26000 and the Sustainable Development Goals (SDGs) through four pillars, namely: Green WEGE, Healthy WEGE, Smart WEGE, and Caring WEGE. Throughout 2024, the Company has carried out a series of CSR activities from these various pillars.

Governance Aspect:
In order to strengthen the principles of good corporate governance, the Company implements the principles set out in the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) and is guided by the ISO 37001 Anti-Bribery Management System (SMAP) standard. This aims to prevent, detect, and handle bribery in the company environment comprehensively, including in business activities.

Regarding the risk management that related to climate change, the Company has developed a strategy to handle two types of risks: physical risks, namely losses caused by the physical impacts of climate change, and transition risks, namely risks related to the transition to a low-carbon economy, such as regulatory uncertainty, pressure from investors, changes in consumer preferences, and the development of new technologies.

In order to realize sustainability consistently, the Company has established a series of strategic policies that regulate in detail the management, monitoring and evaluation of various aspects, ranging from strategy, marketing to financial targets that must be achieved.

Direksi optimis, dengan sinergi dan pendekatan secara holistik yang dilakukan di semua lini, Perseroan mampu menangkap peluang dan mewujudkan bisnis yang berkelanjutan.

PROSPEK USAHA TAHUN 2025

Pada tahun 2025, arah kebijakan Pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, tidak lagi menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur secara masif sebagaimana periode sebelumnya, melainkan lebih difokuskan pada program-program yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, ketahanan pangan, serta hilirisasi industri. Perubahan fokus ini menjadi tantangan tersendiri bagi sektor konstruksi yang selama ini menjadi tulang punggung pembangunan infrastruktur nasional. Namun demikian, Perseroan meyakini bahwa peluang tetap terbuka, terutama pada proyek-proyek strategis lanjutan seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), fasilitas sosial, infrastruktur pendidikan dan kesehatan, serta kawasan industri dan perumahan yang mendukung agenda hilirisasi dan kemandirian pangan.

Untuk itu, dalam menghadapi dinamika pasar konstruksi yang berubah, Perseroan akan mengedepankan strategi diversifikasi proyek, penguatan efisiensi operasional, serta peningkatan kapabilitas teknologi konstruksi, khususnya pada segmen modular yang efisien, adaptif, dan berkelanjutan. Perseroan juga akan memperkuat portofolio investasi melalui kolaborasi strategis dengan mitra BUMN dan swasta, termasuk merespons peluang dari sektor privat yang diperkirakan akan tumbuh seiring membaiknya daya beli dan aktivitas ekonomi domestik.

Di tengah ketidakpastian global, volatilitas biaya bahan baku, dan tantangan likuiditas, Perseroan akan menjaga kehati-hatian dalam pengelolaan arus kas, memperkuat manajemen risiko proyek, serta mengedepankan tata kelola dan keberlanjutan sebagai landasan utama. Direksi optimis, dengan fondasi bisnis yang kuat dan pendekatan strategis yang adaptif, Perseroan mampu menjaga kinerja yang sehat dan berkelanjutan sepanjang tahun 2025.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Tahun 2024, komposisi Direksi Perseroan mengalami perubahan sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan, antara lain:

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Syailendra Ogan sebagai Direktur Keuangan, *Human Capital* dan Manajemen Risiko;
2. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Akhmadi Tricahyono sebagai Direktur Operasi II;
3. Mengalihkan penugasan Sdr. Dwi Purnomo dari semula Direktur QHSE (*Quality, Health, Safety, Environment)* dan Pemasaran menjadi Direktur Operasi II; serta

The Board of Directors is optimistic that with synergy and a holistic approach carried out in all lines, the Company will be able to capture opportunities and realize a sustainable business.

BUSINESS PROSPECTS IN 2025

In 2025, the policy direction of the new Government led by the elected President and Vice President, Prabowo Subianto and Gibran Rakabuming Raka, will no longer focus on massive infrastructure development as in the previous period, but will instead focus more on programs that support improving the quality of human capital, food security, and industrial downstreaming. This change in focus is a challenge for the construction sector, which has been the backbone of national infrastructure development. However, the Company believes that opportunities remain open, especially in continued strategic projects such as the development of the Indonesian Capital City (IKN), social facilities, education and health infrastructure, as well as industrial and residential areas that support the downstreaming and food independence agenda.

Therefore, in facing the changing dynamics of the construction market, the Company will prioritize a project diversification strategy, strengthening operational efficiency, and increasing construction technology capabilities, especially in the efficient, adaptive, and sustainable modular segment. The Company will also strengthen its investment portfolio through strategic collaboration with BUMN and private partners, including responding to opportunities from the private sector which are expected to grow along with improving purchasing power and domestic economic activity.

Amid global uncertainty, volatility in raw material costs, and liquidity challenges, the Company will maintain prudence in cash flow management, strengthen project risk management, and prioritize governance and sustainability as the main foundation. The Board of Directors is optimistic that with a strong business foundation and an adaptive strategic approach, the Company will be able to maintain healthy and sustainable performance throughout 2025.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

In 2024, the composition of the Company's Board of Directors has changed according to the decision of the Annual General Meeting of Shareholders (GMS), comprising:

1. Confirming the honorable dismissal of Mr. Syailendra Ogan as Director of Finance, Human Capital and Risk Management;
2. Honorably dismissing Mr. Akhmadi Tricahyono as Director of Operations II;
3. Transferring the assignment of Mr. Dwi Purnomo from the previous Director of QHSE (Quality, Health, Safety, Environment) and Marketing to Director of Operations II; and

4. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:
   a. Sdr. Hartanto Karti Raharjo sebagai Direktur Keuangan, *Human Capital* dan Manajemen Risiko; dan
   b. Sdr. Tomo Dwihasputro sebagai Direktur QHSE (*Quality, Health, Safety, Environment*) dan Pemasaran.

Adapun komposisi susunan Direksi Perseroan selengkapnya terdiri atas 1 (satu) Direktur Utama dan 4 (empat) Direktur, yaitu sebagai berikut:

4. Appointing the names below as Members of the Company's Board of Directors as follows:
   a. Mr. Hartanto Karti Raharjo as Director of Finance, Human Capital and Risk Management; and
   b. Mr. Tomo Dwihasputro as Director of QHSE (Quality, Health, Safety, Environment) and Marketing.

The complete composition of the Company's Board of Directors consists of 1 (one) President Director and 4 (four) Directors, as follows:

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi
Table of Composition and Basis for the Appointment of Board of Directors

Nama Name	**Jabatan** Position	**Masa Jabatan** Terms of Office	**Periode Jabatan** Length of Service	**Dasar Pengangkatan** Basis of Appointment
Hadian Pramudita	Direktur Utama President Director	19 April 2022 - RUPS 2027 April 19, 2022 - GMS 2027	Periode-1 Period-1	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 19 April 2022 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 5 tanggal 19 April 2022. Decision of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) dated April 19, 2022 and confirmed in Deed Number 5 dated April 19, 2022.
Tomo Dwi Hasputro	Direktur QHSE (Quality, Health, Safety, Environment) dan Pemasaran Director of QHSE (Quality, Health, Safety, Environment) and Marketing	20 Mei 2024 - RUPST 2029 May 20, 2024 – AGMS 2029	Periode-1 Period-1	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 20 Mei 2024 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 8 tanggal 20 Mei 2024. Decision of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) dated May 20, 2024 and confirmed in Deed Number 8 dated May 20, 2024.
Bagus Tri Setyana	Direktur Operasi I Director of Operations I	28 Juli 2020 - RUPS 2025 July 28, 2020 - GMS 2025	Periode-1 Period-1	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 28 Juli 2020 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 51 tanggal 28 Juli 2020. Decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) dated July 28, 2020 and confirmed in Deed Number 51 dated July 28, 2020.
Dwi Purnomo	Direktur Operasi II Director of Operations II	10 Mei 2023 - RUPS 2028 May 10, 2023 - GMS 2028	Periode-1 Period-1	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 10 Mei 2023 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 2 tanggal 10 Mei 2023. Decision of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) dated May 10, 2023 and confirmed in Deed Number 2 dated May 10, 2023.
Hartanto Karti Raharjo	Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko Director of Finance, Human Capital and Risk Management	20 Mei 2024 - RUPST 2029 May 20, 2024 - AGMS 2029	Periode-1 Period-1	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 20 Mei 2024 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 8 tanggal 20 Mei 2024. Decision of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) dated May 20, 2024 and confirmed in Deed Number 8 dated May 20, 2024.

Atas nama Perseroan, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Sdr. Syailendra Ogan dan Akhmadi Tricahyono, atas kontribusi yang telah diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perusahaan.

On behalf of the Company, we would like to express our appreciation and gratitude to Mr. Syailendra Ogan and Akhmadi Tricahyono, for their contributions during their tenure as members of the Company's Board of Directors.

PENUTUP DAN APRESIASI

Saya mewakili jajaran Direksi menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas kepercayaan, komitmen, dan dukungan seluruh pemangku kepentingan sehingga Perseroan mampu memberikan kontribusi yang positif atas pencapaian kinerja Perseroan di tahun 2024.

Kepada pemegang saham, Direksi mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya kepada kami untuk menjalankan fungsi pengelolaan kepengurusan yang telah diberikan. Kami sampaikan juga kepada seluruh jajaran Dewan Komisaris, kami mengucapkan terimakasih atas pengawasan dan nasihat serta arahan yang diberikan, sehingga kepengurusan Perseroan dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan kinerja positif di tengah tantangan industri konstruksi saat ini.

Akhir kata, Direksi memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada seluruh karyawan atas dedikasi dan kontribusi terbaik yang telah diberikan kepada Perseroan. Perseroan akan terus menjunjung tinggi komitmen untuk menghasilkan kinerja yang terbaik di masa depan, terutama kepada pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

CLOSING AND APPRECIATION

On behalf of the Board of Directors, we would like to express our highest gratitude and appreciation for the trust, commitment, and support from all stakeholders hence the Company is able to make a positive contribution to the achievement of the Company's performance in 2024.

To the shareholders, the Board of Directors would like to express thanks for the trust in us to carry out the management functions that have been given. We would also like to express to the entire Board of Commissioners, we would like to show gratitude for the supervision, advice and direction given, so as to the management of the Company can be carried out properly and produce positive performance amidst the current challenges of the construction industry.

Finally, the Board of Directors would like to express our highest appreciation to all employees for their dedication and the best contribution that has been given to the Company. The Company will continue to uphold its commitment to produce the best performance in the future, especially to shareholders and all stakeholders.

Jakarta, 25 April 2025
Jakarta, April 25 2025

Atas Nama Direksi,
On Behalf of the Board of Directors,



Hadian Pramudita
Direktur Utama
President Director

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2024

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik Pasal 17 ayat (1) dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk tahun 2024 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 25 April 2025
Jakarta, April 25 2025

Dewan Komisaris
Board of Commissioners



Joseph Prajogo
Komisaris Independen sekaligus Pelaksana Tugas Komisaris Utama
Independent Commissioner concurrently serving as Acting President Commissioner



Suli Fatimah
Komisaris
Commissioner



Danis Hidayat Sumadilaga
Komisaris
Commissioner



Taufan Gestoro
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Statement Letter from The Board of Directors and Commissioners for the Responsibility of the 2024 Annual Report

According to the Financial Services Authority Regulation No.29/POJK.04/2016 on Annual Reports of Public Company article 17 point (1) and good corporate governance principles, we the undersigned below state that all information in the Annual Report 2024 of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk has been completely published and solely responsible for the truth of the contents of the Annual Report.

With this statement is made in truth.

Jakarta, 25 April 2025
Jakarta, April 25 2025

Direksi
Board of Directors



Hadian Pramudita
Direktur Utama
President Director



Hartanto Karti Raharjo
Direktur Keuangan, *Human Capital* dan Manajemen Risiko
Director of Finance, Human Capital and Risk Management



Tomo Dwi Hasputro
Direktur QHSE (*Quality, Health, Safety, Environment*) dan Pemasaran
Director of QHSE (Quality, Health, Safety, Environment) and Merketing



Bagus Tri Setyana
Direktur Operasi I
Director of Operation I



Dwi Purnomo
Direktur Operasi II
Director of Operation II


MODULAR

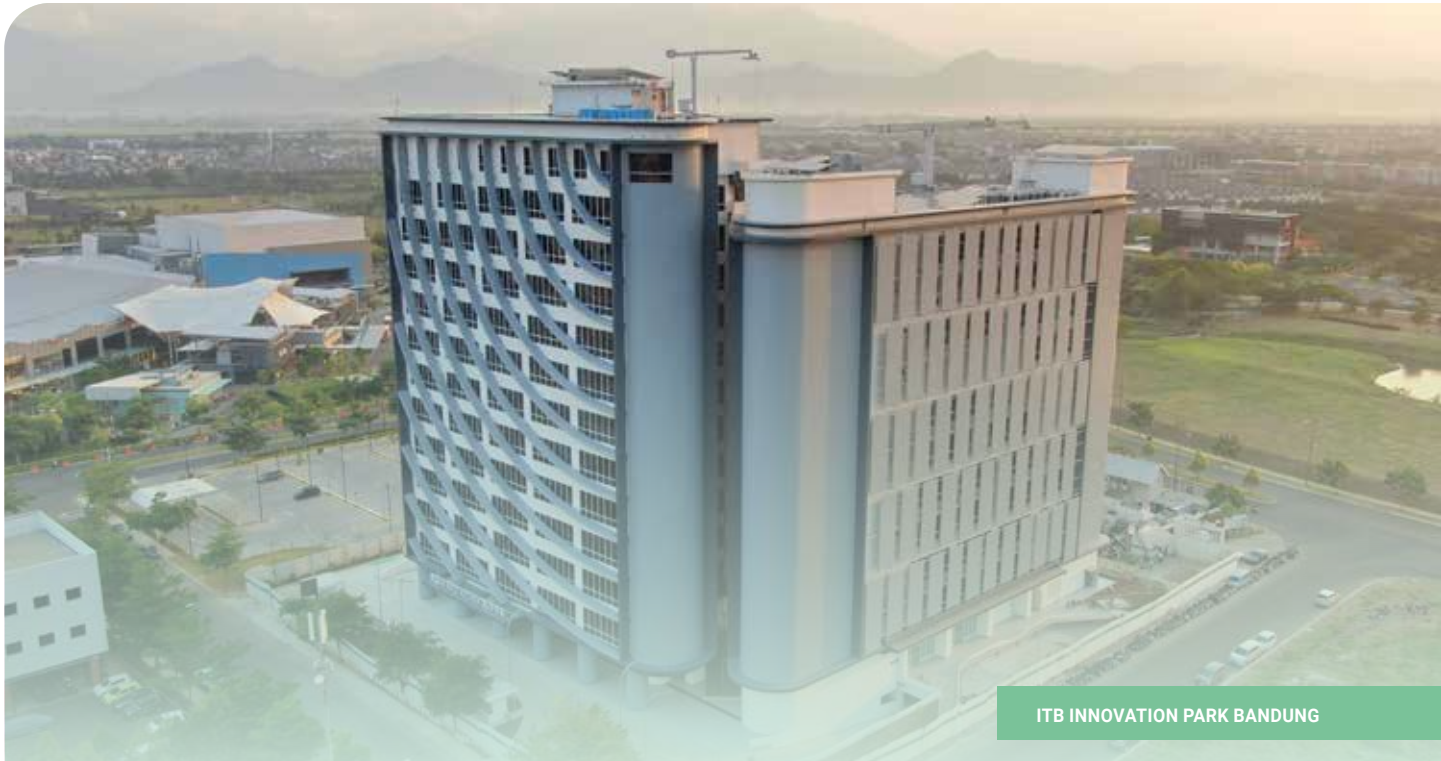


PROFIL PERUSAHAAN
Company Profile

WEGE merupakan perusahaan konstruksi terintegrasi yang bisnis utamanya (*core business*) pada jasa konstruksi bangunan gedung, didukung oleh *backward integration* melalui industri modular dan pracetak, serta *forward integration* melalui bisnis konsesi.

WEGE is an integrated construction company whose core business is in building construction services, supported by backward integration through the modular and precast industries, and forward integration through the concession business.

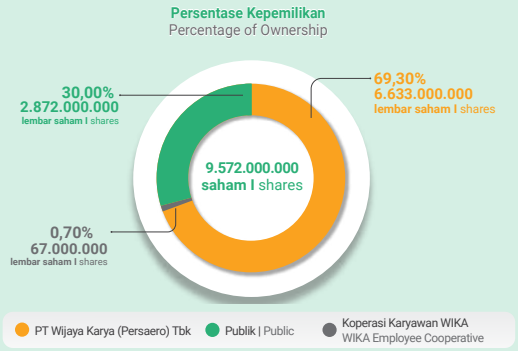
Informasi Umum Perusahaan
General Company Information



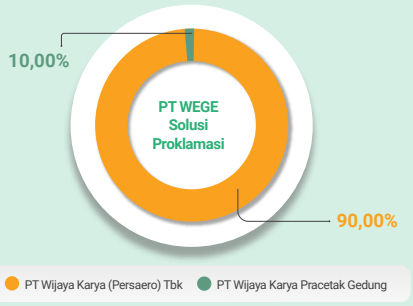
ITB INNOVATION PARK BANDUNG

Nama Perusahaan Company Name	**PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk**
Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment	Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 43 tanggal 24 Oktober 2008 Deed of Establishment of Limited Liability Company No. 43 dated 24 October 2008
Bidang Usaha Business Field	• Jasa Konstruksi Bangunan Gedung • Investasi dan Konsesi • Industri Modular • Building Construction Services • Investment and Concession • Modular Industry
Domisili Domicile	Jakarta Timur, Indonesia East Jakarta, Indonesia
Tanggal Pendirian Date of Establishment	24 Oktober 2008 October 24, 2008
Tanggal Pencatatan Saham Date of Share Listing	30 November 2017 November 30, 2017
Kode Saham Stock Code	**WEGE**
Nama Bursa Name of Exchange	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange
Modal Dasar Authorized Capital	Rp3.800.000.000.000 yang terbagi atas 38.000.000.000 lembar saham dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp100 per lembar saham. Rp3,800,000,000,000 divided into 38,000,000,000 shares with a nominal value of Rp100 per share.
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid-up Capital	Rp957.200.000.000 yang terbagi atas 9.572.000.000 lembar saham dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp100 per lembar saham. Rp957,200,000,000 divided into 9,572,000,000 shares with a nominal value of Rp100 per share.

Kepemilikan Saham
Share Ownership



Entitas Anak Perusahaan
Subsidiaries



Jumlah Karyawan
Number of Employees

500 karyawan
500 employee

Alamat
Address

Kantor Pusat Headquarters	WIKA Tower 1, Lantai 7-10 Jalan D.I. Panjaitan Kav. 9 RT/003 RW/011, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara , Jakarta Timur 13340, Indonesia Phone : (+62) 21 8590 8862 Faximile : (+62) 21 8590 4146 Email : corsec@wikagedung.co.id
Entitas Anak Perusahaan Subsidiary Entities	WIKA Tower 1, Lantai 8 Jalan D.I. Panjaitan Kav. 9 RT/003 RW/011, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara , Jakarta Timur 13340, Indonesia Phone : (+62)21 8516250 Email : pt.wegesolusiproklamasi@gmail.com
Modular Factory	Komplek Industri Kembang Kuning Jalan Raya Narogong KM 26.5, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat Phone : (+62) 21 8590 8862 Email : modular@wikagedung.id

Sekretariat Perusahaan
Corporate Secretariat

Corporate Secretary **Purba Yudha Tama**	WIKA Tower 1, Lantai 7-10 Jalan D.I. Panjaitan Kav. 9 lantai 7, Jakarta, Indonesia Email: corsec@wikagedung.co.id
Hubungan Investor (khusus Pasar Modal) Investor Relations (exclusively Capital Market)	WIKA Tower 1, Lantai 7-10 Jalan D.I. Panjaitan Kav. 9 lantai 7, Jakarta, Indonesia Email: investorrelations@wikagedung.id

Situs Web dan Kanal Media Sosial
Website and Social Media Channels

Situs Web : www.wikagedung.co.id
Instagram : @ptwikagedungid
Facebook : @ptwikagedungID
Twitter/X : @ptwikagedungID
LinkedIn : @ptwikagedungid
YouTube : @ptwikagedungid
TikTok : @ptwikagedungID
Spotify : WEGE Podcast

Riwayat Singkat Perusahaan
Brief History of The Company



PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, (selanjutnya disebut WEGE atau Perseroan) berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta No. 43 tanggal 24 Oktober 2008 yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-92223.AH.01.01 tanggal 1 Desember 2008.

Perseroan didirikan sebagai entitas anak PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) dengan fokus bisnis pada jasa konstruksi bangunan gedung yang membidik pasar swasta. Sementara itu, segmen pasar pemerintah dan BUMN ditangani oleh Departemen Bangunan Gedung WIKA.

Seiring perkembangannya, pada tahun 2013 Perseroan merambah bisnis properti dengan proyek pertamanya yaitu Apartemen Tamansari Tera. Selanjutnya, pada tahun 2015, Perseroan melanjutkan ekspansi dengan mengembangkan dan memasarkan Apartemen Tamansari Mahogany.

Pada tahun 2016, Perseroan mendirikan PT Wijaya Karya Pracetak Gedung (WPG) sebagai entitas anak yang bergerak di bidang industri beton pracetak gedung. WPG berkedudukan di Jakarta Selatan dan didirikan berdasarkan Akta No. 142 tanggal 23 Desember 2016, yang dibuat di hadapan Sri Ismiyati, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0001918.AH.01.01 tanggal 17 Januari 2017.

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, (hereinafter referred to as WEGE or the Company) is domiciled in South Jakarta, established based on Deed No. 43 dated October 24, 2008 made before Imas Fatimah, S.H., Notary in Jakarta. The deed of establishment has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-92223.AH.01.01 dated December 1, 2008.

The Company was established as a subsidiary of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) with a business focus on building construction services targeting the private market. In the meantime, the government and State-owned Enterprises (SEO) market segments are ran by the WIKA Building Department.

As it development, in 2013 the Company entered the property business with its first project, namely the Tamansari Tera Apartment. Furthermore, in 2015, the Company continued its expansion by developing and marketing the Tamansari Mahogany Apartment.

In 2016, the Company established PT Wijaya Karya Pracetak Gedung (WPG) as a subsidiary engaged in the precast concrete building industry. WPG is domiciled in South Jakarta and was established based on Deed No. 142 dated December 23, 2016, made before Sri Ismiyati, S.H., Notary in Jakarta. The deed of establishment has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0001918.AH.01.01 dated January 17, 2017.

Pada 25 Juli 2022, Perseroan melepas 2% kepemilikan sahamnya di WPG kepada PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON), sehingga kepemilikan Perseroan berkurang menjadi 49%. Perubahan struktur kepemilikan ini menyebabkan status WPG beralih dari Entitas Anak menjadi Entitas Asosiasi.

On July 25, 2022, the Company released 2% of its share ownership in WPG to PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON), the Company's ownership hence was reduced to 49%. This alteration in ownership structure caused WPG's status to change from a Subsidiary Entity to an Associate Entity.

Pada tahun 2016, terjadi penggabungan Departemen Bangunan Gedung WIKA ke dalam Perseroan, sehingga cakupan bisnis yang sebelumnya berfokus pada pasar swasta berkembang mencakup segmen pemerintah dan BUMN. Integrasi ini semakin memperkuat kapasitas dan kapabilitas Perseroan dalam industri konstruksi bangunan gedung.

In 2016, the WIKA Building Construction Department was merged into the Company, so as to the business scope that previously focused on the private market expanded to include the government and SEO segments. This integration further strengthened the Company's capacity and capabilities in the building construction industry.

Pada tahun 2017, Perseroan melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham atau *Initial Public Offering* (IPO) di Bursa Efek Indonesia. Perseroan telah dinyatakan efektif berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. S-444/D.04/2017 tanggal 20 November 2017. Saham Perseroan kemudian tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 November 2017 dengan kode saham WEGE.

In 2017, the Company carried out an Initial Public Offering (IPO) on the Indonesia Stock Exchange. The Company has been declared effective based on the Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. S-444/D.04/2017 dated November 20, 2017. The Company's shares were then listed on the Indonesia Stock Exchange on November 30, 2017 with the stock code of WEGE.

Dalam Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan menerbitkan sebanyak 2.872.000.000 saham biasa atas nama, yang seluruhnya merupakan Saham Baru yang diterbitkan dari portepel Perseroan. Saham Perseroan memiliki nilai nominal Rp100,- per saham dan mewakili 30,00% dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Harga Penawaran ditetapkan sebesar Rp290,- per saham, sehingga total nilai penawaran mencapai Rp832.880.000.000.

In the Initial Public Offering, the Company issued 2,872,000,000 registered common shares, all of which are New Shares issued from the Company's portfolio. The Company's shares have a nominal value of Rp100 per share and represent 30.00% of the Company's issued and fully paid-up capital after the Initial Public Offering. The Offering Price was set at Rp290 per share, the total offering value hence reached by Rp832,880,000,000.

Pada tahun 2018, Perseroan membentuk Divisi Modular untuk memperluas kegiatan usaha di industri konstruksi teknologi modular. Langkah ini juga menandai awal penerapan aspek *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam proses bisnis inti Perseroan. Sebagai bagian dari strategi *Backward Offsite Construction*, industri modular memberikan nilai tambah pada setiap bangunan dan kebutuhan ruang, dengan menawarkan kualitas yang lebih presisi, sistem konstruksi yang lebih cepat, serta ramah lingkungan.

In 2018, the Company established the Modular Division to expand its business activities in the modular technology construction industry. Such step also marked the beginning of the implementation of Environmental, Social, and Governance (ESG) aspects in the Company's core business processes. As part of the Backward Offsite Construction strategy, the modular industry adds value to every building and space requirement, by offering more precise quality, faster construction systems, and environmentally friendly.

Bisnis modular Perseroan terus berkembang setiap tahunnya, serta pemanfaatannya semakin dapat diandalkan dan teruji dalam pembangunan konstruksi gedung. Kontribusi signifikan dari modular ini terlihat jelas selama pandemi Covid-19, ketika Perseroan mengoptimalkan penggunaan teknologi modular untuk pembangunan beberapa rumah sakit darurat guna perawatan pasien di berbagai wilayah di Indonesia.

The Company's modular business line continues to grow every year, and its use is increasingly reliable and proven in building construction. The significant contribution of this modular was clearly seen during the Covid-19 pandemic, when the Company optimized the use of modular technology for the construction of several emergency hospitals for patient care in various regions in Indonesia.

Pada tahun 2018, Perseroan memperluas lini bisnisnya ke konsesi dengan meresmikan proyek konsesi pertama yaitu Hotel De Braga Bandung melalui skema BOT (*Build-Operate-Transfer*) dengan partner PT Sarinah.

In 2018, the Company expanded its business line to concessions by inaugurating the first concession project, namely Hotel De Braga Bandung through a BOT (Build-Operate-Transfer) scheme with partner PT Sarinah.

Pada tahun 2019, Perseroan mendirikan PT Wege Solusi Proklamasi (WSP) sebagai entitas anak yang bergerak di bidang konstruksi, real estate, hotel, dan perparkiran. WSP berkedudukan di Jakarta Timur dan didirikan berdasarkan Akta No. 85 tanggal 28 Mei 2019, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0035258.AH.01.01 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Wege Solusi Proklamasi, serta tercatat dalam daftar WSP No. AHU-0116523.AH.01.11 pada tanggal 22 Juli 2019.

Pada akhir tahun 2024, Perseroan mengambil langkah penting dengan melakukan perubahan terhadap Visi dan Misi, yang telah disusun dan dibahas dalam Rapat Direksi dan Manajemen, sebagaimana tercantum dalam Risalah Rapat Nomor : MJ.01.00/A.DIR.00003. WEGE/2024 tanggal 24 Desember 2024. Perubahan ini kemudian disetujui dalam Rapat Dewan Komisaris yang melibatkan Direksi (Rakomdir), sebagaimana tertuang dalam Risalah Rapat Nomor : SE.01.03/A.KOM.00001/2025 tanggal 30 Desember 2024. Perubahan visi dan misi ini dilakukan sebagai respons terhadap tantangan industri dan tuntutan bisnis yang semakin dinamis, serta untuk mencapai keberlanjutan (*sustainability*) yang berkelanjutan bagi Perseroan.

Seiring dengan perkembangan bisnis, Perseroan terus berupaya meningkatkan kinerja dan keberlanjutan usaha dengan memperkuat bisnis utamanya di sektor jasa konstruksi bangunan gedung. Hal ini dilakukan melalui *backward integration*, yang mencakup pengembangan industri modular dan pracetak, serta *forward integration* melalui bisnis konsesi.

Meski berusia relatif lebih muda dibandingkan para pesaingnya, Perseroan telah menjadi partner pilihan dalam bidang konstruksi bangunan gedung yang mengedepankan *safety & quality* dalam menciptakan ruang (*space*) untuk kehidupan manusia yang lebih baik. Berbagai proyek konstruksi berskala besar dan kompleksitas tinggi

In 2019, the Company established PT Wege Solusi Proklamasi (WSP) as a subsidiary engaged in construction, real estate, hotels, and parking. WSP is domiciled in East Jakarta and was established based on Deed No. 85 dated May 28, 2019, made before Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta. This deed of establishment has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0035258.AH.01.01 of 2019 concerning the Ratification of the Establishment of the Limited Liability Company Legal Entity PT Wege Solusi Proklamasi, and is recorded in the WSP list No. AHU-0116523.AH.01.11 on July 22, 2019.

At the end of 2024, the Company took an significant step by making changes to the Vision and Mission, which had been prepared and discussed in the Board of Directors and Management Meeting, as stated in the Minutes of Meeting Number: MJ.01.00/A.DIR.00003. WEGE/2024 dated December 24, 2024. This change was then approved in the Board of Commissioners Meeting involving the Board of Directors (Rakomdir), as stated in the Minutes of Meeting Number: SE.01.03/A.KOM.00001/2025 dated December 30, 2024. This change in vision and mission was made in response to industry challenges and increasingly dynamic business demands, as well as to achieve sustainable sustainability for the Company.

Along with its business development, the Company continues to strive to improve business performance and sustainability by strengthening its main business in the building construction services sector. This is executed through backward integration, which includes the development of the modular and precast industries, as well as forward integration through the concession business.

Despite of being relatively newer than its competitors, the Company has become the top of mind in terms of building construction that prioritizes safety & quality in creating space for a better human life. Various large-scale and high-complexity construction projects have been successfully accomplished, including Dhoho International Airport



telah berhasil diselesaikan, antara lain Dhoho International Airport Kediri, Jakarta International Stadium, Jakarta International Velodrome, Jakarta International Equestrian Park, pembangunan berbagai rumah sakit darurat Covid-19 menggunakan teknologi modular, serta berbagai proyek lainnya.

Pencapaian Perseroan dalam pembangunan berbagai jenis proyek, seperti perkantoran, residensial, fasilitas publik, dan komersial, merupakan hasil dari transformasi bisnis yang komprehensif. Pengembangan metode *offsite construction* modular yang efisien dan ramah lingkungan didorong oleh inovasi melalui penerapan teknologi *Building Information Modelling* (BIM) pada seluruh proyek, serta penerapan *System Applications and Products (SAP)*. Dengan langkah-langkah tersebut, per 31 Desember 2024, Perseroan berhasil memperoleh 410 kontrak baru dengan total nilai proyek mencapai Rp55,90 triliun, yang mencerminkan keberhasilan strategi dan komitmen Perseroan terhadap pertumbuhan yang berkelanjutan.

Kediri, Jakarta International Stadium, Jakarta International Velodrome, Jakarta International Equestrian Park, the construction of various Covid-19 emergency hospitals by using modular technology, and other numerous projects.

The Company's achievements in the construction of various types of projects, such as offices, residential, public facilities, and commercial, are an outcome of a comprehensive business transformation. The development of efficient and environmentally friendly modular offsite construction methods is driven by innovation through the application of Building Information Modeling (BIM) technology to all projects, as well as System Applications and Products (SAP). With these steps, as of December 31, 2024, the Company has succeeded in obtaining 410 new contracts with a total project value of Rp55.90 trillion, reflecting the success of the Company's strategy and commitment to sustainable growth.

Informasi Perubahan Nama Emiten Pada Tahun Buku

Information on Changes in the Issuer's Name in the Fiscal Year

Sejak didirikan hingga penerbitan laporan tahunan ini, Perseroan tidak mengalami perubahan nama. Perseroan mengalami perubahan status menjadi perusahaan terbuka setelah dinyatakan efektif berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. S-444/D.04/2017 tanggal 20 November 2017. Selanjutnya, saham Perseroan tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 November 2017. Dengan demikian, nama Perseroan yang digunakan hingga saat ini adalah PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

Since its establishment as of the publication of this annual report, the Company has not changed its name. The Company although changed its status to a public company after being declared effective based on the Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. S-444/D.04/2017 dated November 20, 2017. Furthermore, the Company's shares were listed on the Indonesia Stock Exchange on November 30, 2017. Therefore, the name of the Company until present is PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.



Jejak Langkah
Milestones

2008

WEGE didirikan berdasarkan Akta No. 43 tanggal 24 Oktober 2008 sebagai entitas anak PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), dengan *core business* pada penyediaan jasa konstruksi bangunan gedung yang menyasar segmen pasar swasta.

WEGE was established based on Deed No. 43 dated October 24, 2008 as a subsidiary of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), with a core business in providing building construction services targeting the private market segment.

2012

WEGE menjalankan transformasi strategis untuk meningkatkan pertumbuhan profitabilitas melalui penerapan strategi *Blue Ocean*, optimalisasi efisiensi biaya, serta peningkatan kapabilitas sumber daya manusia.

WEGE carried out strategic transformation to increase profitability growth by implementing Blue Ocean strategy, optimizing cost efficiency, and improving human resource capabilities.

2013

WEGE memperluas bisnis ke sektor properti melalui proyek perdana, Apartemen Tamansari Tera.

WEGE expanded its business into the property sector through its first project, Tamansari Tera Apartment.

2014

WEGE memperoleh kontrak proyek *superblock* pertama, dengan nilai kontrak lebih dari satu triliun rupiah.

WEGE obtained the first superblock project contract, with a contract value of more than one trillion rupiah

2016

- **Terjadi penggabungan Departemen Bangunan Gedung WIKA ke dalam WEGE, sehingga cakupan bisnis yang sebelumnya berfokus pada pasar swasta berkembang mencakup segmen pemerintah dan BUMN. Penggabungan ini semakin memperkuat kapasitas dan kapabilitas WEGE dalam industri konstruksi bangunan gedung.**
- **WEGE bersama WTON mendirikan entitas anak yang bergerak di bidang industri pracetak berdasarkan Akta No. 142 tanggal 23 Desember 2016.**

- **There was a merger of WIKA's Building Construction Department into WEGE, the business scope hence previously focused on the private market expanded to include government and SEO segments. This merger further strengthened WEGE's capacity and capability in the building construction industry.**
- **WEGE with WTON established a subsidiary engaged in the precast concrete building industry based on Deed No. 142 dated December 23, 2016.**

2017

WEGE melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering*/IPO) di Bursa Efek Indonesia, yang dinyatakan efektif berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. S-444/D.04/2017 tanggal 20 November 2017. Saham Perseroan tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 November 2017 dengan kode saham WEGE.

WEGE conducted an Initial Public Offering (IPO) on the Indonesia Stock Exchange, which was declared effective based on the Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. S-444/D.04/2017 dated November 20, 2017. The Company's shares were listed on the Indonesia Stock Exchange on November 30, 2017 with the stock code of WEGE.value of more than one trillion rupiah.

2018

- **WEGE memperluas bisnis ke sektor konstruksi teknologi modular melalui pembentukan Divisi Modular.**
- **WEGE memperluas lini bisnisnya ke konsesi dengan meresmikan proyek konsesi pertama, Hotel De Braga Bandung.**

- **WEGE expanded its business into modular technology construction sector through the establishment of the Modular Division.**
- **WEGE expanded its business line into concessions by inaugurating its first concession project, namely Hotel De Braga** Bandung.

> 2019

WEGE mendirikan PT Wege Solusi Proklamasi (WSP) berdasarkan Akta No. 85 tanggal 28 Mei 2019, sebagai entitas anak yang bergerak di bidang konstruksi, *real estate*, hotel, dan perparkiran.

WEGE established PT Wege Solusi Proklamasi (WSP) based on Deed No. 85 dated May 28, 2019, as a subsidiary engaged in construction, real estate, hotels, and parking.

> 2020

Pertumbuhan bisnis Modular WEGE dimulai dengan diterimanya pemesanan produk Modular FLATPACK dalam jumlah besar untuk pembangunan berbagai rumah sakit khusus penanganan Covid-19, yang berhasil diselesaikan dalam waktu singkat dan mencatatkan rekor nasional.

The growth of WEGE's Modular business began with the reception of a large mandate for FLATPACK Modular products for the construction of various special hospitals for Covid-19, which were successfully completed in a short time as well as has been set a national record.

> 2021

WEGE menjadi perusahaan konstruksi pertama yang memperoleh sertifikasi ISO 19650:2018 BIM *Design and Construction* BSI Kitemark.

WEGE became the first construction company to obtain ISO 19650:2018 BIM Design and Construction BSI Kitemark certification.

> 2022

WEGE berhasil meraih proyek pertama di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menggunakan teknologi modular, yaitu pembangunan Hunian Pekerja Konstruksi (HPK), dengan kapasitas besar dan waktu penyelesaian yang cepat.

WEGE has successfully achieved the first project in the Indonesian Capital City (IKN) that uses modular technology, namely the construction of Construction Worker Housing (HPK), with a large capacity and fast completion time.

> 2023

- **WEGE menjadi perusahaan konstruksi pertama di Indonesia yang memperoleh sertifikasi ISO 50001:2018 mengenai Sistem Manajemen Energi (*Energy Management System*).**
- **WEGE became the first construction company in Indonesia to obtain ISO 50001:2018 certification for Energy Management System.**

> 2024

WEGE melakukan penguatan melalui perubahan Visi dan Misi guna merespons dinamika tantangan industri dan tuntutan bisnis, serta untuk memastikan tercapainya keberlanjutan (*sustainability*) bagi Perseroan.

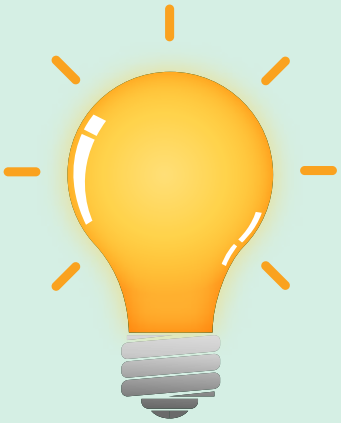
WEGE is strengthening through changes to its Vision and Mission in order to respond to the dynamics of industry challenges and business demands, as well as to ensure sustainability for the Company.

Visi, Misi dan Budaya Perusahaan
Vision, Mission and Corporate Culture

Pada tahun 2024, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk melakukan perubahan Visi dan Misi yang telah disusun dan dibahas dalam Rapat Direksi dan Manajemen, sebagaimana tercantum dalam Risalah Rapat Nomor MJ.01.00/A.DIR.00003.WEGE/2024 tanggal 24 Desember 2024. Perubahan ini kemudian disetujui dalam Rapat Dewan Komisaris yang melibatkan Direksi (Rakomdir), sebagaimana tertuang dalam Risalah Rapat Nomor SE.01.03/A.KOM.00001/2025 tanggal 30 Desember 2024.

VISI DAN MISI TERBARU
NEWEST VISION AND MISSION

NEW!



VISI | Vision

Menjadi mitra yang terpercaya dalam menciptakan ekosistem konstruksi yang inovatif dan berkelanjutan

To be a trusted partner in creating an innovative and sustainable construction ecosystem



MISI | Mission

1. **Memperkuat kepercayaan dan transparansi**
2. **Memprioritaskan solusi untuk pelanggan**
3. **Mengintegrasikan teknologi untuk inovasi**
4. **Menciptakan ekosistem kolaboratif dengan mitra strategis**
5. **Berorientasi keberlanjutan sebagai inti proses operasi**

1. Strengthening trust and transparency
2. Prioritizing solutions for customers
3. Integrating technology for innovation
4. Creating a collaborative ecosystem with strategic partners
5. Sustainability-oriented as the core operating process

Perubahan visi dan misi ini dilakukan sebagai respons terhadap tantangan industri dan tuntutan bisnis yang semakin dinamis, serta untuk mencapai keberlanjutan (*sustainability*) yang berkelanjutan bagi Perseroan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi terbaru, Perseroan telah mengidentifikasi enam faktor kunci sukses yang menjadi landasan pencapaian tujuan strategis, yaitu: fokus pada pelanggan, inovasi teknologi, pengembangan sumber daya manusia, kepemimpinan dan manajemen yang efektif, kemitraan strategis, serta keberlanjutan. Melalui penerapan faktor-faktor kunci sukses ini, Perseroan bertujuan untuk menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan, memperkuat daya saing di pasar, dan mencapai tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan.

In 2024, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk made changes to the Vision and Mission that had been prepared and discussed in the Board of Directors and Management Meeting, as stated in the Minutes of Meeting Number MJ.01.00/A.DIR.00003.WEGE/2024 dated December 24, 2024. This change was then approved in the Board of Commissioners Meeting involving the Board of Directors (Rakomdir), as stated in the Minutes of Meeting Number SE.01.03/A.KOM.00001/2025 dated December 30, 2024.

VISI DAN MISI SEBELUMNYA
ERSTWHILE VISION AND MISSION

VISI | Vision

Menjadi partner pilihan dalam menciptakan ruang (*space*) untuk kehidupan manusia yang lebih baik

To be the preferred partner in creating space for a better human life

MISI | Mission

1. **Produk dan jasa yang berkualitas**
2. **Peduli terhadap kehidupan**
3. **Engagement bagi pemangku kepentingan utama**
4. **Tata kelola perusahaan dan praktik etika bisnis**
5. **Inovasi untuk meningkatkan pertumbuhan dan penciptaan nilai**

1. Quality in product and services
2. Care for Life
3. Key Stakeholders Engagement
4. Good Corporate Governance and Ethical Business Practices
5. Innovation to Boost Growth and Value Creation



This change in vision and mission was made in response to the challenges of the industry and increasingly dynamic business demands, as well as to achieve sustainable sustainability for the Company. In order to actualize the newest vision and mission, the Company has identified six key success factors that are the basis for achieving strategic goals, namely: customer focus, technological innovation, human resource development, effective leadership and management, strategic partnerships, and sustainability. Through the implementation of these key success factors, the Company aims to create sustainable added value, strengthen competitiveness in the market, and achieve the long-term goals that have been set.

BUDAYA PERUSAHAAN
CORPORATE CULTURE

Perseroan berkomitmen untuk membangun budaya perusahaan yang mampu mendukung peningkatan kualitas kinerja melalui penerapan keyakinan (*beliefs*), nilai-nilai (*values*), serta perilaku dan sikap kerja yang sesuai dengan tujuan strategis perusahaan. Berpedoman pada Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: SE-7/MBU/07/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, Perseroan sebagai anak perusahaan BUMN wajib menerapkan Nilai-Nilai Utama yang dikenal dengan singkatan AKHLAK.

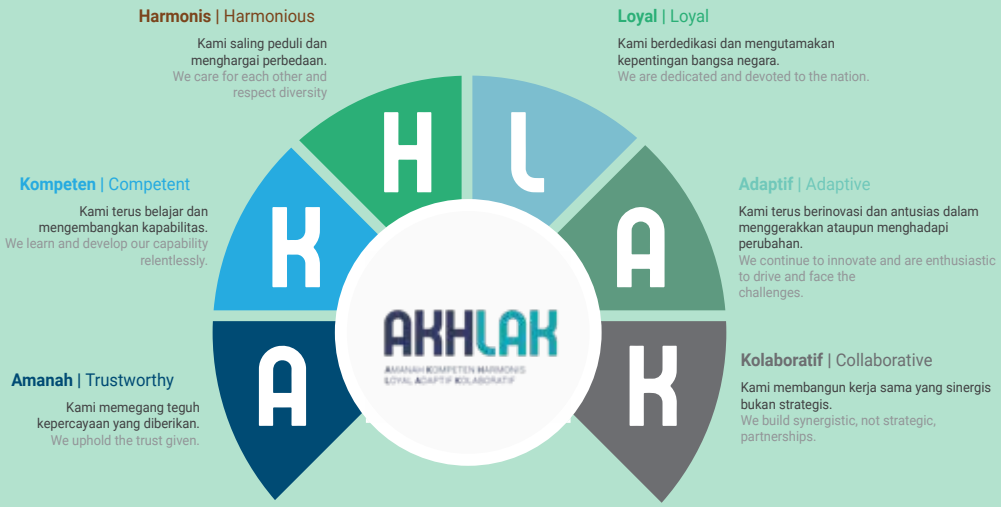
Core values AKHLAK merupakan bagian dari transformasi *Human Capital* yang dirancang untuk meningkatkan daya saing BUMN di tingkat global sekaligus menciptakan ekosistem kerja yang mendukung pengembangan talenta unggul. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai perekat budaya kerja yang selaras dengan visi Perseroan dalam mendorong kinerja industri nasional.

Perseroan berperan aktif dalam mensosialisasikan dan menerapkan *core values* AKHLAK di seluruh lapisan organisasi, guna memastikan budaya kerja yang mendukung keberlanjutan kinerja serta kontribusi maksimal terhadap pencapaian tujuan perusahaan.

The Company is committed to building a corporate culture that is able to support the improvement of performance quality through the implementation of beliefs, values, as well as work behaviour and attitudes that are in accordance with the company's strategic objectives. Guided by the Circular of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number: SE-7/MBU/07/2020 dated July 1, 2020 concerning the Core Values of Human Capital of State-Owned Enterprises, the Company as a subsidiary of SEO is required to implement the Core Values known by the abbreviation AKHLAK.

AKHLAK core values are part of the Human Capital transformation designed to increase the competitiveness of SEO at the global level while creating a work ecosystem that supports the development of superior talent. These values function to fasten a work culture that is in conformity with the Company's vision in driving national industrial performance.

The Company plays an active role in socializing and implementing AKHLAK core values at all levels of the organization, in order to ensure a work culture that supports sustainable performance and maximum contribution to achieving company goals.



Panduan Perilaku "AKHLAK"
Behaviour Guide of "AKHLAK"

Nilai Inti Core Values	Kalimat Afirmatif Affirmative Sentences	Kata Kunci Keywords	Panduan Perilaku Code of Conducts
Amanah Trustworthy	Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan. We uphold the trust given.	1. Integritas 2. Tulus 3. Konsisten 4. Dapat Dipercaya 1. Integrity 2. Truthful 3. Consistent 4. Trustworthy	1. Memenuhi janji dan komitmen 2. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan 3. Berpegang teguh pada nilai moral dan etika 1. Fulfilling promises and commitments 2. Being responsible for the tasks, decisions and actions carried out 3. Adhering to moral and ethical values
Kompeten Competent	Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. We learn and develop our capability relentlessly.	1. Kinerja Terbaik 2. Sukses 3. Keberhasilan 4. Learning Agility 5. Ahli di Bidangnya 1. Best Performance 2. Success 3. Achievement 4. Learning Agility 5. Expert in the Field	1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah 2. Membantu orang lain belajar 3. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik 1. Improving self-competence to answer ever-changing challenges 2. Helping others to learn 3. Completing tasks with the best quality

Panduan Perilaku "AKHLAK"
Behaviour Guide of "AKHLAK"

Nilai Inti Core Values	Kalimat Afirmatif Affirmative Sentences	Kata Kunci Keywords	Panduan Perilaku Code of Conducts
Harmonis Harmonious	Kami saling peduli dan menghargai perbedaan. We care for each other and respect diversity.	1. Peduli (Caring) 2. Perbedaan (Diversity) 1. Caring 2. Diversity	1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya 2. Suka menolong orang lain 3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif 1. Respect everyone regardless of their background 2. Like to help others 3. Build a conducive work environment
Loyal Loyal	Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. We are dedicated and devoted to the nation.	1. Komitmen 2. Dedikasi (rela berkorban) 3. Kontribusi 1. Commitment 2. Dedication (willing to make sacrifices) 3. Contribution	1. Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan Negara 2. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar 3. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika 1. Maintaining the good name of fellow employees, leaders, SEO, and the State 2. Willing to make sacrifices to achieve greater goals 3. Obeying leaders as long as they do not conflict with the law and ethics
Adaptif Adaptive	Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. We continue to innovate and are enthusiastic to drive and face the challenges	1. Inovasi 2. Antusias terhadap Perubahan 3. Proaktif 1. Innovation 2. Enthusiasm for Change 3. Proactive	1. Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik 2. Terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi 3. Bertindak proaktif 1. Quickly adapting to become better 2. Continuously making improvements following technological developments 3. Acting proactively
Kolaboratif Collaborative	Kami membangun kerja sama yang sinergis. We build strategic collaborations.	1. Kesediaan bekerjasama 2. Sinergi untuk hasil yang lebih baik 1. Willingness to cooperate 2. Synergy for better outcomes	1. Memberi kesempatan pada berbagai pihak untuk berkontribusi 2. Terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah 3. Menggerakan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama 1. Providing opportunities for various parties to contribute 2. Being open to working together to produce added value 3. Mobilizing the use of various resources for common goals



PELANTIKAN CHANGE AGENT WEGE 2024
JAKARTA, 2 JULI 2024

Makna Logo Perusahaan
Signification of Company Logo



Logo Perusahaan berasal dari logo PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. sebagai Induk Perusahaan, dengan penambahan kata "Gedung" yang menunjukan identitas Perusahaan sebagai entitas usaha dalam menyediakan ruang bagi aktivitas manusia sebagai kontraktor gedung dalam pemahaman luas (*terintegrasi/ total solution*) dan pengembangannya baik secara *forward* dan *backward*.

Warna biru pada logo menunjukan identitas khas WIKA Group. Selain itu, warna biru melambangkan inovasi dan teknologi, yang menjadi landasan utama bagi Perusahaan dalam seluruh aktivitasnya untuk meningkatkan pertumbuhan dan menciptakan nilai tambah.

Huruf "G" dalam logo, yang berbentuk pita, melambangkan persembahan Perusahaan kepada para pemangku kepentingan. Logo ini mencerminkan komitmen Perusahaan dalam menciptakan keterlibatan *(engagement)* melalui pendekatan "*Say, Stay, dan Strive*" yang diimplementasikan melalui penyediaan "*Quality in Product and Services*" serta kepedulian terhadap kehidupan (*Care for Life*).

Warna oranye pada logo melambangkan kreativitas, semangat, dan energi positif. Dengan filosofi ini, Perusahaan berkomitmen untuk menjadi mitra pilihan bagi para pemangku kepentingan utama melalui penciptaan nilai yang berkelanjutan dan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar.

The Company's logo is derived from the logo of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. as the Parent Company, with the addition of the word "Building" which points toward the Company's identity as a business entity in providing space for human activities as a building contractor in a broad understanding (integrated/total solution) and its development both forward and backward.

The blue color in the logo specifies the distinctive identity of WIKA Group. In addition, the blue color symbolizes innovation and technology, which are the main foundations for the Company in all its activities to increase growth and create added value.

The letter "G" in the logo, which is in the form of a ribbon, symbolizes the Company's offering to stakeholders. This logo reflects the Company's commitment to creating engagement through the "Say, Stay, and Strive" approach which is implemented through the provision of "Quality in Product and Services" and care for life (Care for Life).

The orange color in the logo implies creativity, enthusiasm, and positive energy. With this philosophy, the Company is committed to becoming the partner of choice for key stakeholders through the creation of sustainable value and positive contributions to the surrounding environment.

Kegiatan dan Bidang Usaha
Activities and Business Fields


RUSUN PASPAMPRES IKN

KEGIATAN USAHA MENURUT ANGGARAN DASAR TERAKHIR PERUSAHAAN

Sesuai dengan Anggaran Dasar sebagaimana tertuang dalam Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk Nomor : 3 tanggal 16 Mei 2023, dibuat di hadapan Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto, S.H., Notaris di Jakarta, serta telah memperoleh persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0027786.AH.01.02 Tahun 2023 tanggal 22 Mei 2023 ("Anggaran Dasar Perseroan"), maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagai berikut :

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini adalah melaksanakan usaha di bidang:
   a. Industri konstruksi dan engineering;
   b. Jasa pemborongan dengan pola progress termin maupun *turnkey/Build Operate Transfer* (BOT);
   c. Pengelolaan dan penyewaan gedung/kawasan niaga terpadu;
   d. Perdagangan dan pemeliharaan peralatan serta material konstruksi;
   e. Layanan peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi dan engineering pada khususnya sesuai dengan prinsip-prinsip perseroan terbatas;

BUSINESS ACTIVITIES ACCORDING TO THE COMPANY'S LATEST ARTICLES OF ASSOCIATION

In accordance with the Articles of Association as stated in the Statement of Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk Number: 3 dated May 16, 2023, made before Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto, S.H., Notary in Jakarta, and has obtained approval for amendments to the Articles of Association from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: AHU-0027786.AH.01.02 of 2023 dated May 22, 2023 ("Articles of Association of the Company"), the intent and purpose and business activities of the Company are as follows:

1. The intent and purpose of this Company is to carry out business in the fields of:
   a. Construction and engineering industry;
   b. Contracting services with a progress term pattern or turnkey/ Build Operate Transfer (BOT);
   c. Management and rental of buildings/integrated business areas;
   d. Trading and maintenance of equipment and construction materials;
   e. Services to improve capabilities in the field of construction and engineering services in particular in accordance with the principles of a limited liability company;

f. Realti : sebagai pengembang realti;
g. Properti : sebagai pengembang property;
h. Industri pendukung konstruksi bangunan Gedung;
i. Investasi: sebagai investor baik langsung maupun melalui penyertaan saham pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
j. Penyediaan ruang (*space provider*) pada sarana infrastruktur transportasi bandar udara, pelabuhan, transportasi masal (TOD), dan infrastruktur sosial (*healthcare*); dan
k. Pembangunan dan pengembangan kawasan (*city builder*).

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
   a. Pekerjaan pembangunan gedung (seluruh sektor pembangunan) termasuk sarana dan prasarananya, baik yang dilakukan di lokasi proyek *(onsite)* maupun di luar lokasi proyek *(offsite)*.
   b. Pekerjaan mekanikal, elektrikal, dan *plumbing* gedung.
   c. Jasa perencanaan, *feasibility study*, perancangan (desain), *quantity surveying*, *project management services*, *construction management services*, pengawasan, dan pekerjaan rancang bangun (*design and build*).
   d. Pembelian/pengadaan lahan sebagai persediaan, pengembangan, pengelolaan, penjualan dan/atau penyewaan, di bidang properti, dan realti serta konsesi yang berkaitan dengan penyediaan ruang untuk fasilitas publik dan sosial diantaranya fasilitas kesehatan, pendidikan, kebudayaan, olahraga, keagamaan dan/atau sarana dan prasarana publik.

3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk:
   a. Layanan peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi dan engineering;
   b. Penyediaan jasa pengadaan/perdagangan penyewaan peralatan/material konstruksi;
   c. Industri terkait di bidang konstruksi bangunan gedung; dan
   d. Usaha-usaha lain yang menunjang kegiatan usaha utama maupun penunjang Perseroan di atas.

PRODUK DAN/ATAU JASA YANG DIHASILKAN

WEGE merupakan perusahaan konstruksi terintegrasi yang bisnis utamanya (*core business*) pada jasa konstruksi bangunan gedung, didukung oleh *backward integration* melalui industri modular dan pracetak, serta *forward integration* melalui bisnis konsesi. Sesuai dengan Anggaran Dasar terakhir, produk dan/atau jasa yang saat ini dijalankan oleh Perseroan sebagai berikut:

f. Realty: as a realty developer;
g. Property: as a property developer;
h. Building construction support industry;
i. Investment: as an investor either directly or through equity participation in subsidiaries and/or joint ventures;
j. Space provider for airport, port, mass transportation (TOD), and social infrastructure (healthcare) transportation infrastructure; and
k. Development and development of areas (city builder).

2. In order to achieve the above intent and purpose, the Company carries out the following main business activities:
   a. Building construction work (all development sectors) including facilities and infrastructure, both carried out at the project location (onsite) and outside the project location (offsite).
   b. Mechanical, electrical, and plumbing work on buildings.
   c. Planning services, feasibility studies, design, quantity surveying, project management services, construction management services, supervision, and design and build work.
   d. Purchase/procurement of land as inventory, development, management, sale and/or rental, in the field of property, and realty and concessions related to the provision of space for public and social facilities including health, education, culture, sports, religious and/or public facilities and infrastructure.

3. In addition to the main business activities as referred to above, the Company may carry out supporting business activities in order to optimize the utilization of owned resources for:
   a. Capacity building services in the field of construction and engineering services;
   b. Provision of procurement/trade services for rental of construction equipment/materials;
   c. Related industries in the field of building construction; and
   d. Other businesses that support the Company's main and supporting business activities above.

PRODUCTS AND/OR SERVICES PRODUCED

WEGE is an integrated construction company whose core business is in building construction services, supported by backward integration through the modular and precast industries, and forward integration through the concession business. In accordance with the latest Articles of Association, the products and/or services currently run by the Company are as follows:



Jasa Konstruksi Bangunan Gedung

Perseroan menerapkan konsep bangunan gedung terintegrasi yang diawali dengan bisnis inti di sektor konstruksi bangunan gedung melalui strategi *Total Solution* Service, yang menawarkan layanan *end-to-end* mencakup studi kelayakan, perencanaan, perancangan, konstruksi, *operation and maintenance* serta pendanaan. Layanan ini mencakup berbagai jenis pekerjaan, termasuk fondasi, struktur, MEP *(Mechanical, Electrical and Plumbing)*, *lighting*, arsitektur, interior, lansekap dan sebagainya. Pendekatan ini memberikan nilai tambah bagi pelanggan melalui solusi terintegrasi yang komprehensif dan efisien dalam satu paket layanan. Selain itu, Perseroan telah mengimplementasikan *lean construction* dengan mengawali transformasi melalui digitalisasi proses *engineering*.

Offsite Construction

Untuk mendukung bisnis inti di sektor konstruksi bangunan gedung, Perseroan memiliki strategi *backward offsite construction* dengan kegiatan usaha yang mencakup modular dan pracetak. Penerapan *offsite construction* ini merupakan bagian dari langkah Perseroan untuk memperkuat integrasi usaha melalui pengembangan lini bisnis yang lebih komprehensif.

Modular WEGE mengusung konsep konstruksi *offsite* yang ramah lingkungan, efisien dalam penggunaan energi, serta memberikan keuntungan dari segi waktu pengerjaan yang lebih cepat. Produk-produk modular, termasuk MOLI (Modular Lite), WG Flatpack, dan Volumetrik, dirancang dengan sistem prefabrikasi modul-modul yang dapat dirangkai menjadi bangunan. Selain itu, Perseroan juga melalui perusahaan asosiasi, PT Wijaya Karya Pracetak Gedung (WPG), memperkuat lini bisnis pracetak dengan menawarkan produk-produk seperti balok pracetak, kolom pracetak, dan komponen struktur pracetak.

Baik industri modular dan pracetak semakin menjadi pilihan utama dalam metode konstruksi modern, karena mengutamakan efisiensi waktu, penggunaan sumber daya yang optimal, dan tetap menjaga kualitas bangunan. Untuk mendukung inovasi berkelanjutan, Perseroan telah memperoleh sejumlah hak paten terkait produk-produk *offsite construction* dan melanjutkan riset dan pengembangan untuk menciptakan solusi konstruksi yang lebih unggul dan efisien.

Building Construction Services

The Company implements an integrated building concept that begins with the core business in the building construction sector through the Total Solution Service strategy, which offers end-to-end services including feasibility studies, planning, design, construction, operation and maintenance and financing. This service covers various types of work, including foundations, structures, MEP (Mechanical, Electrical and Plumbing), lighting, architecture, interior, landscaping and so on. This approach provides added value to customers through comprehensive and efficient integrated solutions in one service package. In addition, the Company has implemented lean construction by initiating the transformation through the digitalization of the engineering process.

Offsite Construction

In rder to support the core business in the building construction sector, the Company has a backward offsite construction strategy with business activities that include modular and precast. The implementation of this offsite construction is part of the Company's steps to strengthen business integration through the development of a more comprehensive business line.

WEGE Modular carries the concept of offsite construction that is environmentally friendly, efficient in energy use, and provides benefits in terms of faster processing time. Modular products, including MOLI (Modular Lite), WG Flatpack, and Volumetrik, are designed with a prefabricated system of modules that can be assembled into buildings. In addition, the Company also, through its associated company, PT Wijaya Karya Pracetak Gedung (WPG), strengthens its precast business line by offering products such as precast beams, precast columns, and precast structural components.

Both the modular and precast industries are increasingly becoming the main choice in modern construction methods, because they prioritize time efficiency, optimal use of resources, and maintain building quality. In supporting continuous innovation, the Company has obtained a number of patents related to offsite construction products and continues research and development to create superior and more efficient construction solutions.

Concession

Business Stream Konsesi merupakan bagian dari upaya Perseroan untuk mengembangkan bisnis ke sektor *forward*, dengan fokus pada pengelolaan aset-aset lahan milik pemerintah serta BUMN/BUMD melalui skema investasi *Public Private Partnership* (PPP) atau Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Tujuan utama dari bisnis ini adalah untuk memperoleh seluruh pekerjaan konstruksi yang terkait dengan proyek konsesi dan investasi, sekaligus menghasilkan pendapatan berulang (*recurring income*) yang dapat mendukung keberlanjutan bisnis.

Bisnis konsesi ini melanjutkan transformasi dari lini bisnis properti yang sebelumnya dijalankan oleh Perseroan. Adapun ruang lingkup kegiatan usaha konsesi meliputi penyediaan dan pengelolaan berbagai infrastruktur khususnya bangunan gedung, seperti bangunan kebandarudaraan, rumah sakit, dan perkantoran, yang bertujuan untuk memberikan manfaat jangka panjang serta pendapatan yang berkelanjutan bagi Perseroan.

Hingga akhir tahun 2024, Perseroan telah memiliki dua proyek konsesi, yaitu Hotel De Braga di Bandung, yang dikerjakan bersama partner PT Sarinah dengan skema *Build-Operate-Transfer* (BOT) selama 25 tahun, serta proyek konsesi Graha Mantap di Menteng, Jakarta, yang dikerjakan bersama partner Bank Mandiri Taspen dengan skema BOT selama 30 tahun. Selain itu, Perseroan juga memiliki satu proyek investasi, Fave Hotel yang berlokasi di Karawang.

Concession

Business Stream Concession is part of the Company's efforts to develop business into the forward sector, with a focus on managing government-owned land assets and BUMN (SOE)/BUMD (ROE) through the Public Private Partnership (PPP) or Government Business Entity Cooperation (KPBU) investment scheme. The main objective of this business is to obtain all construction work related to concession and investment projects, while generating recurring income that can support business sustainability.

This concession business continues the transformation of the property business line previously run by the Company. The scope of concession business activities includes the provision and management of various infrastructures, especially building structures, such as airport buildings, hospitals, and offices, which aim to provide long-term benefits and sustainable income for the Company.

By the end of 2024, the Company has two concession projects, namely the De Braga Hotel in Bandung, which is being worked on with partner PT Sarinah with a Build-Operate-Transfer (BOT) scheme for 25 years, and the Graha Mantap concession project in Menteng, Jakarta, which is being worked on with partner Bank Mandiri Taspen with a BOT scheme for 30 years. In addition, the Company also has one investment project, Fave Hotel, located in Karawang.

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

Wilayah Operasional
Operational Areas



OPERATION DIVISION
Area Operasi

- Provinsi I Province DKI Jakarta
- Provinsi Jawa Barat | Province of West Java
- Provinsi I Province Banten
- Provinsi I Province Sumatera

OPERATION & CONCESSION DIVISION
Area Operasi

- Provinsi I Province Kalimantan
- Property Konsesi di seluruh Indonesia | Concession Property throughout Indonesia



OPERATION & MODULAR DIVISION
Area Operasi

- Provinsi Jawa Timur | Province of East Java
- Provinsi I Province Bali
- Provinsi I Province NTB
- Provinsi I Province NTT
- Provinsi I Province Yogyakarta
- Provinsi I Province Sulawesi
- Provinsi I Province Maluku
- Provinsi I Province Papua
- Provinsi Jawa Tengah | Province of Central Java
- Pabrik Modular | Modular Factory

Daftar Keanggotaan Organisasi atau Asosiasi

List of Organization or Association Membership

Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor konstruksi, Perseroan secara aktif berpartisipasi dalam berbagai asosiasi profesional dan organisasi terkait. Keanggotaan ini bertujuan untuk memperluas jaringan bisnis, meningkatkan kapabilitas perusahaan, serta mempererat komunikasi dengan para pemangku kepentingan.

Partisipasi aktif Perseroan juga mencerminkan komitmen terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan upaya kolaboratif dalam mengatasi berbagai tantangan operasional, sekaligus mendukung pencapaian tujuan strategis.

Hingga akhir tahun 2024, Perseroan tercatat sebagai anggota dalam organisasi dan asosiasi berikut:

As a company engaged in the construction sector, the Company actively participates in a number of professional associations and related organizations. These memberships aim to expand business networks, improve company capabilities, as well as strengthen communication with stakeholders.

The Company's active participation also reflects a commitment to the principles of good corporate governance and collaborative determinations in overcoming various operational challenges, while supporting the achievement of strategic goals.

As of the end of 2024, the Company is registered as a member of the following organizations and associations:

No.	Nama Organisasi/Asosiasi Name of Organization/Association	Ruang Lingkup Scale	Posisi Keikutsertaan di Organisasi/Asosiasi Position of Membership in the Organization/Association	Jatuh Tempo Keanggotaan Membership Expiration Date
1	Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Indonesian National Construction Implementation Association (GAPENSI)	Nasional National	Anggota Member	6 Januari 2026 January 6, 2026
2	Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Chamber of Commerce and Industry (KADIN)	Nasional National	Anggota Member	28 Maret 2025 March 28, 2025
3	Gabungan Perusahaan Nasional Rancang Bangun Indonesia (GAPENRI) Association of Indonesian National Design and Construction Companies (GAPENRI)	Nasional National	Anggota Member	10 Oktober 2025 October 10, 2025
4	Asosasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) Association of Indonesian National Design and Construction Companies (GAPENRI)	Nasional National	Anggota Member	31 Desember 2025 December 31, 2025

1



2



3



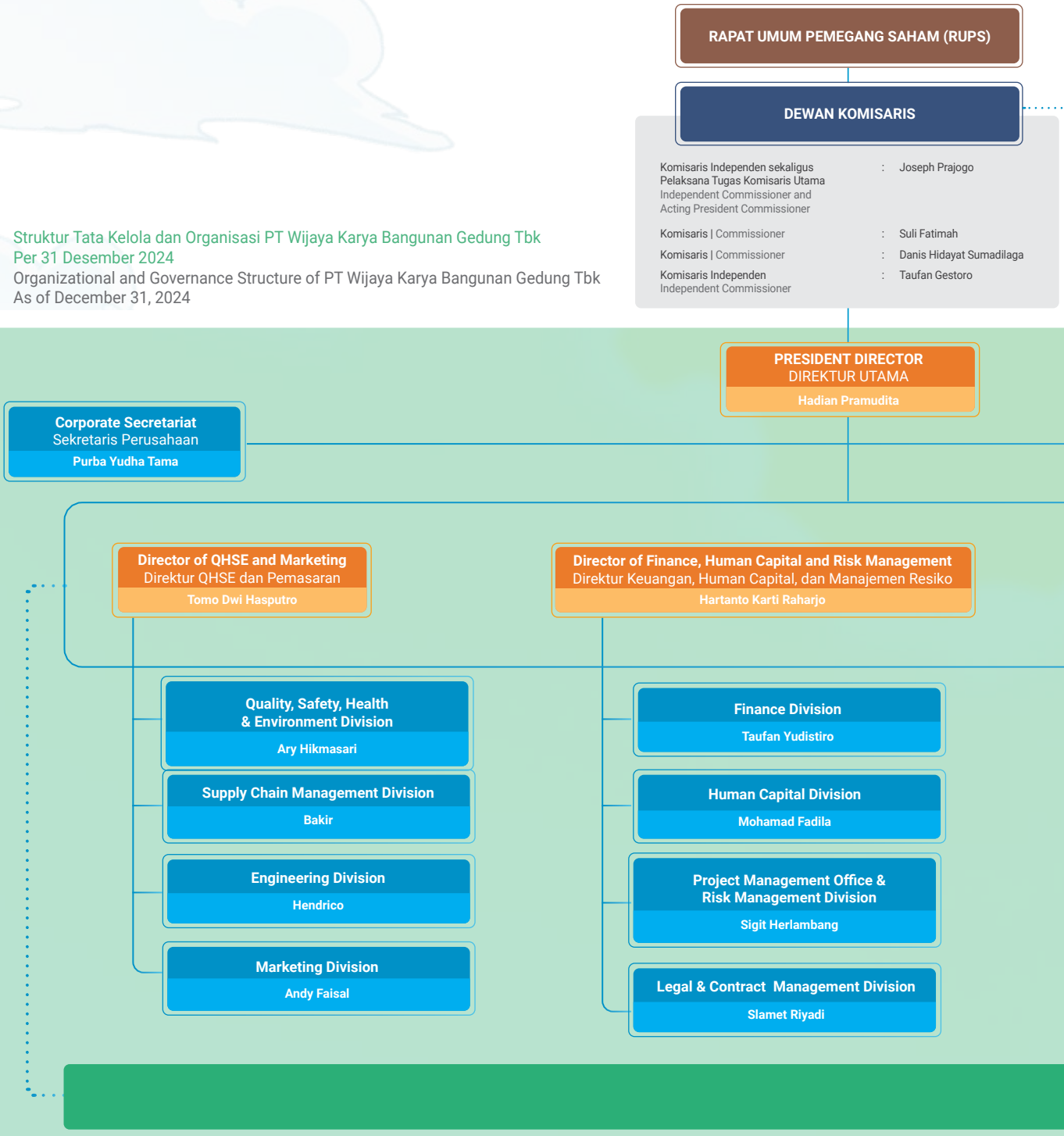
4



Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

Struktur Organisasi Perusahaan
Organizational Structure

Struktur Tata Kelola dan Organisasi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk
Per 31 Desember 2024
Organizational and Governance Structure of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk
As of December 31, 2024



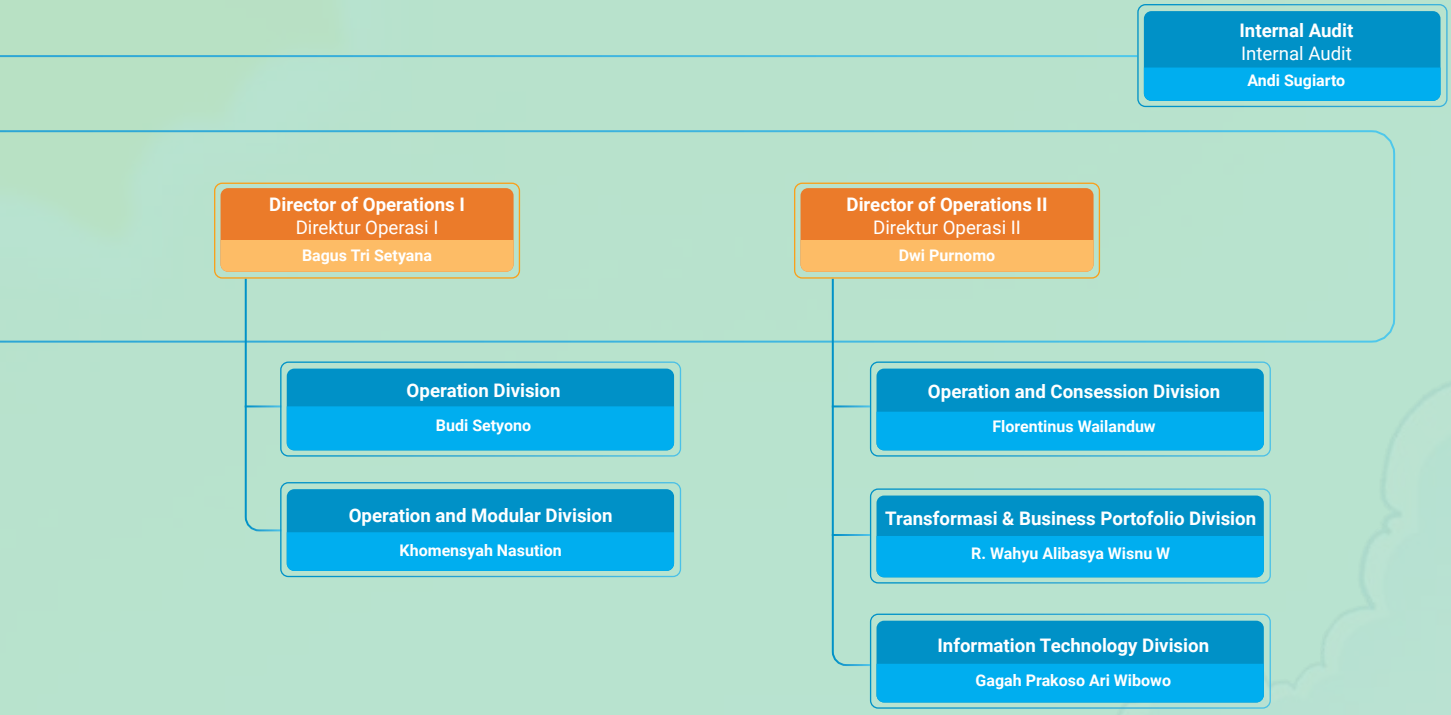
Penetapan susunan Komite Dewan Komisaris, ditetapkan berdasarkan SK Dewan Komisaris per tanggal 11 Juni 2024.

Di tahun 2024, terdapat perubahan organisasi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk yang disahkan melalui Surat Keputusan Nomor: SK.01.01/A.DIR.WG.09365/2024 tanggal 31 Juli 2024 tentang Susunan Organisasi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. Sementara itu, diatas organ Direksi terdapat organ RUPS dan Dewan Komisaris yang memiliki peran masing-masing.

Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasannya dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite-Komite Penunjangnya.

Di tahun 2024, Komite penunjang Dewan Komisaris juga mengalami perubahan susunan yang disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk tanggal 11 Juni 2024. Komite penunjang Dewan Komisaris antara lain Komite Audit, Komite Nominasi, Remunerasi, *Good Corporate Governance* (GCG), dan Komite Pemantauan Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi.

Komite Audit		Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG		Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi		Sekretaris Dewan Komisaris
Ketua merangkap Anggota Chairman and Member	: Joseph Prajogo	Ketua merangkap Anggota Chairman and Member	: Taufan Gestoro	Ketua merangkap Anggota Chairman and Member	: Joseph Prajogo	Apridio Rizak Karunia
Anggota | Member	: Taufan Gestoro	Anggota | Member	: Suli Fatimah	Anggota | Member	: Danis Hidayat Sumadilaga	
Anggota | Member	: Darawati	Anggota | Member	: Diah Sulistiorini	Anggota | Member	: Apridio Rizak Karunia	
		Anggota | Member	: Mohamad Fadila			



Perusahaan Asosiasi

Establishment of the Board of Commissioners' Committee structure is determined based on the Decree of the Board of Commissioners dated June 11, 2024.

In 2024, there was a change in the organization of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk which was ratified through Decree Number: SK.01.01/A.DIR.WG.09365/2024 dated July 31, 2024 concerning the Organizational Structure of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. In the meantime, above the Board of Directors, there are the GMS and Board of Commissioners which have their respective roles.

The Board of Commissioners in carrying out its supervisory duties is assisted by the Secretary of the Board of Commissioners and its Supporting Committees.

In 2024, the supporting committees of the Board of Commissioners also experienced changes in their composition which were ratified through the Decree of the Board of Commissioners of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk dated June 11, 2024. The supporting committees of the Board of Commissioners include the Audit Committee, Nomination Committee, Remuneration, Good Corporate Governance (GCG), and Integrated Risk Monitoring and Governance Committee.

Profil Dewan Komisaris
Board of Commissioners' Profile



Taufan Gestoro
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Suli Fatimah
Komisaris
Commissioner



Joseph Prajogo

Komisaris Independen sekaligus Pelaksana Tugas Komisaris Utama
Independent Commissioner and Acting President Commissioner

Danis Hidayat Sumadilaga

Komisaris
Commissioner


WEGE

Joseph Prajogo

Komisaris Independen sekaligus Pelaksana Tugas Komisaris Utama
Independent Commissioner and Acting President Commissioner

Periode Jabatan Term of Office	**28 Juli 2020 - RUPST 2025 (Periode Pertama)** July 28, 2020 - 2025 AGMS (First Period)	**Usia** Age	**53 tahun per 31 Desember 2024** 53 years old as of December 31, 2024
Kewarganegaraan Nationality	**Indonesia** Indonesian	**Domisili** Domicile	**Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia** South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	**Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 28 Juli 2020 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 51 tanggal 28 Juli 2020.** Decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) dated July 28, 2020 and confirmed in the Deed Number 51 dated July 28, 2020.
Riwayat Pendidikan Educational Background	**Sarjana Akuntansi dari Universitas Atmajaya (1995).** Bachelor of Accounting from Universitas Atmajaya (1995).
Sertifikasi dan/atau Pelatihan Certification and/or Training	• **Sertifikasi Qualified Risk Governance Professional (2024)** • **Pelatihan Transforming, Developing, and Sustaining Company in the Era of Turbulance, Uncertainty, Novelty, and Agility dari Asosiasi Auditor Internal (2023)** • **Pembekalan Komisaris Internal WIKA Group - Wikasatrian (2023)** • Qualified Risk Governance Professional Certification (2024) • Training of Transforming, Developing, and Sustaining Company in the Era of Turbulance, Uncertainty, Novelty, and Agility dari Asosiasi Auditor Internal (2023) • Orientation of Internal Commissioner of WIKA Group - Wikasatrian (2023)
Riwayat Pekerjaan Employment Record	• **Komisaris Utama PT Berdikari Manajemen Investasi (2024 - sekarang)** • **Komisaris Independen PT Berdikari Manajemen Investasi (2020 - 2024).** • **Direktur PT Petro Inovasi Indonesia (2017 - sekarang).** • **Direktur PT Pandu Tunggal Permana (2011 - 2017).** • President Commissioner of PT Berdikari Manajemen Investasi (2024 - sekarang) • Independent Commissioner of PT Berdikari Manajemen Investasi (2020 - 2024). • Director of PT Petro Inovasi Indonesia (2017 - sekarang). • Director of PT Pandu Tunggal Permana (2011 - 2017).
Rangkap Jabatan Concurrent Position	• **Komisaris Utama PT Berdikari Manajemen Investasi (2024 - sekarang)** • **Komisaris Independen PT Berdikari Manajemen Investasi (2020 - 2024).** • **Direktur PT Petro Inovasi Indonesia (2017 - sekarang).** • President Commissioner of PT Berdikari Manajemen Investasi (2024 - sekarang) • Independent Commissioner of PT Berdikari Manajemen Investasi (2020 - 2024). • Director of PT Petro Inovasi Indonesia (2017 - sekarang).
Hubungan Afiliasi Affiliation	**Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun Pemegang Saham.** No affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors nor Shareholders.
Kepemilikan Saham Shareholding	**Tidak memiliki saham di PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk per 31 Desember 2024.** No shareholding in PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk as of December 31, 2024.


TRANSFORMASI
WEGE

Suli Fatimah

Komisaris
Commissioner

Periode Jabatan Term of Office	**10 Mei 2023 - RUPST 2028 (Periode Pertama)** May 10, 2023 - 2028 AGMS (First Period)	**Usia** Age	**51 tahun per 31 Desember 2024** 51 years old as of December 31, 2024
Kewarganegaraan Nationality	**Indonesia** Indonesian	**Domisili** Domicile	**Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia** West Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	**Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 10 Mei 2023 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 2 tanggal 10 Mei 2023.** Decision of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) dated May 10, 2023 and confirmed in the Deed Number 2 dated May 10, 2023.
Riwayat Pendidikan Educational Background	**Magister Psikologi, Jurusan Psikologi, Universitas Tarumanegara (2018)** Master of Psychology, Department of Psychology, Universitas Tarumanegara (2018)
Sertifikasi dan/atau Pelatihan Certification and/or Training	• **Strengtening Leadership for Transformation (2024)** • **Pelatihan Komisaris Profesional (2023)** • **Pembekalan Komisaris Internal WIKA Group - Wikasatrian (2023)** • Strengtening Leadership for Transformation (2024) • Professional Commissioner Training (2023) • Orientation of Internal Commissioner of WIKA Group - Wikasatrian (2023)
Riwayat Pekerjaan Employment Record	• **Senior Vice President of Human Capital Division PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2023 - sekarang)** • **Kepala Divisi Human Capital PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2020-2023)** • **General Manager Manajemen Talenta PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2020)** • Senior Vice President of Human Capital Division PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2023 - sekarang) • Chairman of Human Capital Division of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2020-2023) • General Manager of Talent Management of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2020)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	**Senior Vice President Human Capital - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk** Senior Vice President of Human Capital - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Hubungan Afiliasi Affiliation	**Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun Pemegang Saham.** No affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors nor Shareholders.
Kepemilikan Saham Shareholding	**Tidak memiliki saham di PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk per 31 Desember 2024.** No shareholding in PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk as of December 31, 2024.



Danis Hidayat Sumadilaga

Komisaris
Commissioner

Periode Jabatan Term of Office	**10 Mei 2023 - RUPST 2028 (Periode Pertama)** May 10, 2023 - 2028 AGMS (First Period)	**Usia** Age	**64 tahun per 31 Desember 2024** 64 years old as of December 31, 2024
Kewarganegaraan Nationality	**Indonesia** Indonesian	**Domisili** Domicile	**Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia** South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	**Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 10 Mei 2023 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 2 tanggal 10 Mei 2023.** Decision of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) dated May 10, 2023 and confirmed in the Deed Number 2 dated May 10, 2023.
Riwayat Pendidikan Educational Background	**S3 Doktor Bidang Strategic Management, Universitas Indonesia (2016)** Doctoral Degree in Strategic Management, Universitas Indonesia (2016)
Sertifikasi dan/atau Pelatihan Certification and/or Training	**Pembekalan Komisaris Internal WIKA Group - Wikasatrian (2023)** Orientation of Internal Commissioner of WIKA Group - Wikasatrian (2023)
Riwayat Pekerjaan Employment Record	• **Pelaksana Tugas Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN (Otorita Ibu Kota Nusantara (2024 - sekarang)** • **Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2021 - 2024)** • **Widyaiswara Ahli Utama Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2020 - sekarang)** • **Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2018 - 2020)** • Acting Deputy for Facilities and Infrastructure of OIKN (Ibu Kota Nusantara Authority (2024 - present) • Chairman of the Task Force for the Implementation of the Development of the Ibu Kota Nusantara, Ministry of Public Works and Public Housing (2021 - 2024) • Senior Expert Lecturer for Human Resource Development, Ministry of Public Works and Public Housing (2020 - present) • Director General of Human Settlements, Ministry of Public Works and Public Housing (2018 - 2020)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	• **Pelaksana Tugas Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN (Otorita Ibu Kota Nusantara (2024 - sekarang)** • **Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2021 - 2024)** • **Widyaiswara Ahli Utama Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2020 - sekarang)** • Acting Deputy for Facilities and Infrastructure of OIKN (Ibu Kota Nusantara Authority (2024 - present) • Chairman of the Task Force for the Implementation of the Development of the Ibu Kota Nusantara, Ministry of Public Works and Public Housing (2021 - 2024) • Widyaiswara Lead Expert for Human Resource Development, Ministry of Public Works and Public Housing (2020 - present)
Hubungan Afiliasi Affiliation	**Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun Pemegang Saham.** No affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors nor Shareholders.
Kepemilikan Saham Shareholding	**Tidak memiliki saham di PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk per 31 Desember 2024.** No shareholding in PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk as of December 31, 2024.


Gedung
TRANSFORMASI
WEGE

Taufan Gestoro

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Periode Jabatan Term of Office	**29 Februari 2024 - RUPST 2029 (Periode Pertama)** February 29, 2024 - 2029 AGMS (First Period)	**Usia** Age	**58 tahun per 31 Desember 2024** 58 years old as of December 31, 2024
Kewarganegaraan Nationality	**Indonesia** Indonesian	**Domisili** Domicile	**Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia** East Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	**Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 29 Februari 2024 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 6 tanggal 29 Februari 2024.** Decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) dated February 29, 2024 and confirmed in the Deed Number 6 dated February 29, 2024.
Riwayat Pendidikan Educational Background	**Pama Akademi Militer (1990)** Military Academy Pama (1990)
Sertifikasi dan/atau Pelatihan Certification and/or Training	**Sertifikasi Qualified Risk Governance Professional (2024)** Certification of Qualified Risk Governance Professional (2024)
Riwayat Pekerjaan Employment Record	• **Direktur D BAIS TNI (Kep/818/VIII/2022) (2022)** • **Danrem 173/PVB DAM XVII/CEN (2021)** • **WAASINTEL KASAD BID. INTELEK DAN HUBLU (2020)** • **PAMEN DENMA MABESAD (DIK LEMHANAS) (2016)** • Director of D BAIS TNI (Kep/818/VIII/2022) (2022) • Danrem 173/PVB DAM XVII/CEN (2021) • WAASINTEAL KASAD BID. INTELLECT AND FOREIGN RELATIONS (2020) • PAMEN DENMA MABESAD (DIK LEMHANAS) (2016)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	**Tidak memiliki rangkap jabatan per 31 Desember 2024.** No concurrent positions as of December 31, 2024.
Hubungan Afiliasi Affiliation	**Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun Pemegang Saham.** No affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors nor Shareholders.
Kepemilikan Saham Shareholding	**Tidak memiliki saham di PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk per 31 Desember 2024.** No shareholding in PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk as of December 31, 2024.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN ALASAN PERUBAHANNYA

Pada Tahun Buku 2024, terjadi perubahan komposisi Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada tanggal 29 Februari 2024, serta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2023 yang diselenggarakan pada tanggal 20 Mei 2024.

Dalam RUPSLB tersebut, Taufan Gestoro diangkat sebagai Komisaris Independen menggantikan Ance, yang sebelumnya diangkat berdasarkan keputusan RUPSLB tanggal 15 Januari 2021, terhitung sejak 5 Desember 2023. Selain itu, RUPST memutuskan pemberhentian dengan hormat Sumadi sebagai Komisaris Utama, yang sebelumnya diangkat berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 16 Mei 2023, terhitung sejak 15 Mei 2024.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan di Luar Rapat Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk Nomor : TP.01.01/A.KOM.WG.07078/2024, Joseph Prajogo ditunjuk sebagai Komisaris Independen sekaligus Pelaksana Tugas Komisaris Utama, efektif sejak 16 Mei 2024. Penunjukan ini telah dikukuhkan dalam RUPST sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 8 tanggal 20 Mei 2024.

Dengan perubahan tersebut, komposisi Dewan Komisaris Perseroan per 31 Desember 2024 berjumlah empat (4) orang, yang terdiri dari 2 (dua) Komisaris Independen, dengan salah satunya juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas Komisaris Utama, serta 2 (dua) Komisaris. Komposisi serta dasar pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tersebut dapat dilihat lebih lanjut pada tabel berikut.

CHANGES TO THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND EXPLANATIONS FOR THE CHANGES

In the 2024 Fiscal Year, there was a change in the composition of the Company's Board of Commissioners based on the decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) conducted on February 29, 2024, and the decision of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) for the 2023 Fiscal Year held on May 20, 2024.

In the EGMS, Taufan Gestoro was appointed as Independent Commissioner replacing Ance, who was previously appointed based on the decision of the EGMS dated January 15, 2021, effective from December 5, 2023. In addition, the AGMS decided to honorably dismiss Sumadi as President Commissioner, who was previously appointed based on the Deed Number 4 dated May 16, 2023, effective from May 15, 2024.

Furthermore, based on the Decision Apart from the Meeting of the Board of Commissioners of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk Number: TP.01.01/A.KOM.WG.07078/2024, Joseph Prajogo was appointed as Independent Commissioner as well as Acting President Commissioner, effective since May 16, 2024. This appointment has been confirmed in the GMS as stated in the Deed Number 8 dated May 20, 2024.

With this change, the composition of the Company's Board of Commissioners as of December 31, 2024 is four (4) people, consisting of 2 (two) Independent Commissioners, one of whom also serves as Acting President Commissioner, and 2 (two) Commissioners. The composition and basis for the appointment of the Members of the Board of Commissioners can be seen further in the following table.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris
Table of Composition and Basis for Appointment of the Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Masa Jabatan Tenure	Periode Jabatan Term of Office	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Joseph Prajogo	Komisaris Independen sekaligus Pelaksana Tugas Komisaris Utama Independent Commissioner and Acting President Commissioner	28 Juli 2020 - RUPST 2025 July 28, 2020 - 2025 AGMS	Periode - 1 Period - 1	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 28 Juli 2020 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 51 tanggal 28 Juli 2020. Decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) dated July 28, 2020 and confirmed in the Deed Number 51 dated July 28, 2020.
Suli Fatimah	Komisaris Commissioner	10 Mei 2023 - RUPST 2028 May 10, 2023 - 2028 AGMS	Periode - 1 Period - 1	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 10 Mei 2023 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 2 tanggal 10 Mei 2023. Decision of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) dated May 10, 2023 and confirmed in the Deed Number 2 dated May 10, 2023.
Danis Hidayat Sumadilaga	Komisaris Commissioner	10 Mei 2023 - RUPST 2028 May 10, 2023 - 2028 AGMS	Periode - 1 Period - 1	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 10 Mei 2023 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 2 tanggal 10 Mei 2023. Decision of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) dated May 10, 2023 and confirmed in the Deed Number 2 dated May 10, 2023
Taufan Gestoro	Komisaris Independen Independent Commissioner	29 Februari 2024 - RUPST 2029 February 29, 2024 - 2029 AGMS	Periode - 1 Period - 1	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 29 Februari 2024 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 6 tanggal 29 Februari 2024. Decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) dated February 29, 2024 and confirmed in the Deed Number 6 dated February 29, 2024.

PROFIL ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA TAHUN BUKU 2024 YANG MENGALAMI PERGANTIAN
PROFILE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS MEMBERS WHO WERE REPLACED IN THE 2024 FISCAL YEAR



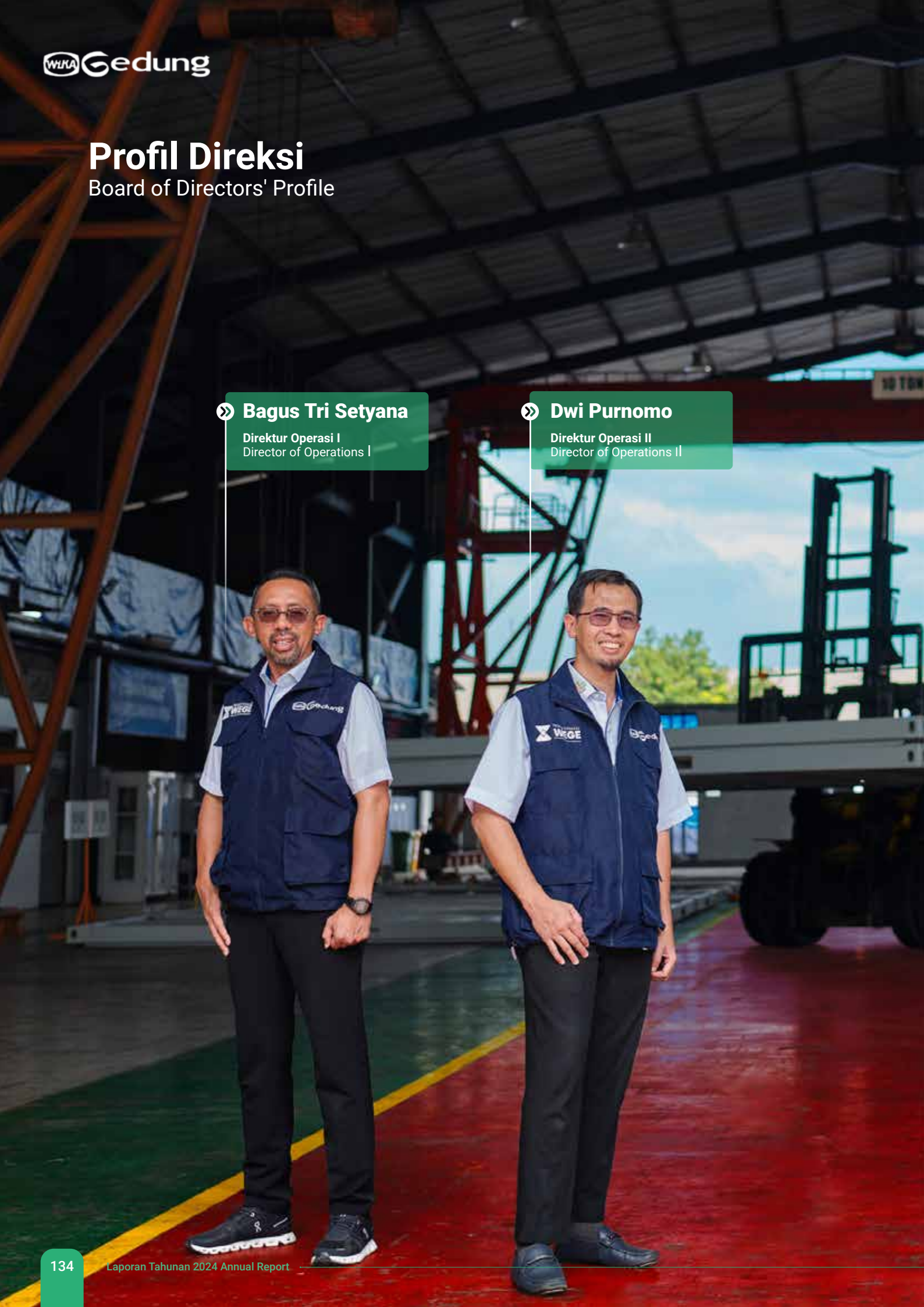
Sumadi

Komisaris Utama
President Commissioner

Periode Jabatan Term of Office	19 April 2022 - 20 Mei 2024 April 19, 2022 - May 20, 2024
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia Indonesian
Usia Age	52 tahun per 31 Desember 2024 52 years old as of December 31, 2024
Domisili Domicile	Bogor, Jawa Barat, Indonesia Bogor, West Java, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Komisaris Utama | President Commissioner Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 10 Mei 2023 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 2 tanggal 10 Mei 2023. Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) dated May 10, 2023 and confirmed in the Deed Number 2 dated May 10, 2023. Komisaris | Commissioner Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 19 April 2022 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 5 tanggal 19 April 2022. Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) dated April 19, 2022 and confirmed in the Deed Number 5 dated April 19, 2022.
Dasar Hukum Pemberhentian Legal Basis for Dismissal	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 20 Mei 2024 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 8 tanggal 20 Mei 2024. Decision of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) dated May 20, 2024 and confirmed in the Deed Number 8 dated May 20, 2024.
Riwayat Pendidikan Educational Background	Magister Manajemen Keuangan dari Universitas Binus Business School (2023) Master of Financial Management from Universitas Binus Business School (2023)
Riwayat Pekerjaan Employment Record	• Direktur Manajemen Risiko dan Legal PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2024 - sekarang) • Komisaris Utama PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (2022 - 2024) • Senior Vice President Divisi Keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2020 - 2024) • Manajer Biro Akuntansi dan Pajak PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2020) • Director of Risk Management and Legal of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2024 - present) • President Commissioner of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (2022 - 2024) • Senior Vice President of Finance Division of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2020 - 2024) • Manager of Accounting and Tax Bureau of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2020)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak memiliki rangkap jabatan per 20 Mei 2024. No concurrent positions as of May 20, 2024.
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun Pemegang Saham. No affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors nor Shareholders.
Kepemilikan Saham Shareholding	Tidak memiliki saham di PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk per 20 Mei 2024. No shareholding in PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk as of May 20, 2024.

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

Profil Direksi
Board of Directors' Profile



Bagus Tri Setyana
Direktur Operasi I
Director of Operations I

Dwi Purnomo
Direktur Operasi II
Director of Operations II



Hadian Pramudita

Direktur Utama
President Director

Tomo Dwi Hasputro

Direktur QHSE (Quality, Health, Safety, Environment) dan Pemasaran
Director of QHSE (Quality, Health, Safety, Environment) and Marketing

Hartanto Karti Raharjo

Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko
Director of Finance, Human Capital and Risk Management



Hadian Pramudita

Direktur Utama
President Director

Periode Jabatan Term of Office	**19 April 2022 - RUPST 2027 (Periode Pertama)** April 19, 2022 - 2027 AGMS (First Period)	**Usia** Age	**63 tahun per 31 Desember 2024** 63 years old as of December 31, 2024
Kewarganegaraan Nationality	**Indonesia** Indonesian	**Domisili** Domicile	**Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia** South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	**Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 19 April 2022 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 5 tanggal 19 April 2022.** Decision of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) dated April 19, 2022 and confirmed in the Deed Number 5 dated April 19, 2022.
Riwayat Pendidikan Educational Background	**Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Parahyangan, Bandung (2010).** Bachelor of Civil Engineering from Universitas Parahyangan, Bandung (2010).
Sertifikasi dan/atau Pelatihan Certification and/or Training	• **Strategic Investment (2019)** • **Business Improvement Leaders (2018)** • **Developing Strategic Mindset Program (2018)**
Riwayat Pekerjaan Employment Record	• **Direktur Utama PT Wijaya Karya Beton Tbk (2017 - 2022).** • **Direktur I Pemasaran dan Pengembangan Usaha PT Wijaya Karya Beton Tbk (2016 - 2017).** • **Direktur Pemasaran PT Wijaya Karya Beton Tbk (2012 - 2016).** • President Director of PT Wijaya Karya Beton Tbk (2017 - 2022). • Director I of Marketing and Business Development of PT Wijaya Karya Beton Tbk (2016 - 2017). • Marketing Director of PT Wijaya Karya Beton Tbk (2012 - 2016).
Rangkap Jabatan Concurrent Position	**Tidak memiliki rangkap jabatan per 31 Desember 2024.** No concurrent positions as of December 31, 2024.
Hubungan Afiliasi Affiliation	**Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun Pemegang Saham.** No affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors nor Shareholders.
Kepemilikan Saham Shareholding	**Tidak memiliki saham di PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk per 31 Desember 2024.** No shareholding in PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk as of December 31, 2024.



Hartanto Karti Raharjo

Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko
Director of Finance, Human Capital and Risk Management

Periode Jabatan Term of Office	**20 Mei 2024 - RUPST 2029 (Periode Pertama)** May 20, 2024 - 2029 AGMS (First Period)	**Usia** Age	**53 tahun per 31 Desember 2024** 53 years old as of December 31, 2024
Kewarganegaraan Nationality	**Indonesia** Indonesian	**Domisili** Domicile	**Yogyakarta, Indonesia** Yogyakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	**Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 20 Mei 2024 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 8 tanggal 20 Mei 2024.** Decision of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) dated May 20, 2024 and confirmed in the Deed Number 8 dated May 20, 2024.
Riwayat Pendidikan Educational Background	**Magister Manajemen dari Universitas Islam Indonesia (2022)** Master of Management from Universitas Islam Indonesia (2022)
Sertifikasi dan/atau Pelatihan Certification and/or Training	• **Certified Risk Governance Professional (2024)** • **Integrated GRC for Sustainable Business (2022)** • **Directorship Program (2022)** • Certified Risk Governance Professional (2024) • Integrated GRC for Sustainable Business (2022) • Directorship Program (2022)
Riwayat Pekerjaan Employment Record	• **Manajer Divisi Keuangan PT Wijaya Karya Beton Tbk (2022 - 2024)** • **Manajer Biro Keuangan Korporasi PT Wijaya Karya Beton Tbk (2021 - 2022)** • **Manajer Bagian Evaluasi Hasil Usaha PT Wijaya Karya Beton Tbk (2020 - 2021)** • Finance Division Manager of PT Wijaya Karya Beton Tbk (2022 - 2024) • Corporate Finance Bureau Manager of PT Wijaya Karya Beton Tbk (2021 - 2022) • Business Results Evaluation Division Manager of PT Wijaya Karya Beton Tbk (2020 - 2021)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	**Tidak memiliki rangkap jabatan per 31 Desember 2024.** No concurrent positions as of December 31, 2024.
Hubungan Afiliasi Affiliation	**Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun Pemegang Saham.** No affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors nor Shareholders.
Kepemilikan Saham Shareholding	**Kepemilikan saham PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk per 31 Desember 2024: 70.000 lembar saham (0,0007313%)** Shareholding of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk as of December 31, 2024: 70,000 shares (0.0007313%)



Tomo Dwi Hasputro

Direktur QHSE (Quality, Health, Safety, Environment) dan Pemasaran
Director of QHSE (Quality, Health, Safety, Environment) and Marketing

Periode Jabatan Term of Office	**20 Mei 2024 - RUPST 2029 (Periode Pertama)** May 20, 2024 - 2029 AGMS (First Period)	**Usia** Age	**48 tahun per 31 Desember 2024** 48 years old as of December 31, 2024
Kewarganegaraan Nationality	**Indonesia** Indonesian	**Domisili** Domicile	**Depok, Jawa Barat, Indonesia** Depok, West Java, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	**Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 20 Mei 2024 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 8 tanggal 20 Mei 2024.** Decision of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) dated May 20, 2024 and confirmed in the Deed Number 8 dated May 20, 2024.
Riwayat Pendidikan Educational Background	**Sarjana Arsitektur, Universitas Soegijapranata, Semarang (2021)** Bachelor of Architecture, Universitas Soegijapranata, Semarang (2021)
Sertifikasi dan/atau Pelatihan Certification and/or Training	• **Marketing Role Model Sharing Session (2021)** • **Pelatihan Quality Control Circle for Project Manager (2021)** • **Penataran Keanggotaan Ikatan Arsitek Indonesia (2020)** • Marketing Role Model Sharing Session (2021) • Quality Control Circle Training for Project Manager (2021) • Membership Upgrading of Ikatan Arsitek Indonesia (2020)
Riwayat Pekerjaan Employment Record	• **Manajer Divisi Pemasaran PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (2023 - 2024)** • **Manajer Divisi Operasi Konstruksi I PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (2022-2023)** • **Manajer Proyek Mega Jakarta International Stadium PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (2019 - 2022)** • Marketing Division Manager of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (2023 - 2024) • Construction Operations Division I Manager of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (2022-2023) • Project Manager of the Jakarta International Stadium Mega Project at PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (2019 - 2022)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	**Tidak memiliki rangkap jabatan per 31 Desember 2024.** No concurrent positions as of December 31, 2024.
Hubungan Afiliasi Affiliation	**Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun Pemegang Saham.** No affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors nor Shareholders.
Kepemilikan Saham Shareholding	**Tidak memiliki saham di PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk per 31 Desember 2024.** No shareholding in PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk as of December 31, 2024.



Bagus Tri Setyana

Direktur Operasi I
Director of Operations I

Periode Jabatan Term of Office	**28 Juli 2020 - RUPST 2025 (Periode Pertama)** July 28, 2020 - 2025 AGMS (First Period)	**Usia** Age	**54 tahun per 31 Desember 2024** 54 years old as of December 31, 2024
Kewarganegaraan Nationality	**Indonesia** Indonesian	**Domisili** Domicile	**Cimahi, Jawa Barat, Indonesia** Cimahi, West Java, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	**Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 28 Juli 2020 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 51 tanggal 28 Juli 2020.** Decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) dated July 28, 2020 and confirmed in the Deed Number 51 dated July 28, 2020.
Riwayat Pendidikan Educational Background	**Magister Teknik Sipil dari Universitas Pelita Harapan, Jakarta (2010).** Master of Civil Engineering from Universitas Pelita Harapan, Jakarta (2010).
Sertifikasi dan/atau Pelatihan Certification and/or Training	• **Pelatihan Integrasi Lean Construction LPS - TAKT PLAN dan PPM (2023)** • **Pelatihan Executive Insight Leadership (2021)** • **Sertifikasi Program Profesi Insinyur (2019)** • Integrated Training of Lean Construction LPS - TAKT PLAN and PPM (2023) • Executive Insight Leadership Training (2021) • Engineering Professional Program Certification (2019)
Riwayat Pekerjaan Employment Record	• **General Manajer Departemen Operasi 7 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2020).** • **Manajer Divisi 7 Sipil Umum 3 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2017 - 2020).** • **Manajer Proyek Pembangunan Jalan Tol Soreang Pasir Koja PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2016 - 2017).** • General Manager of Operations Department 7 of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2020). • Division Manager 7 General Civil 3 of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2017 - 2020). • Project Manager of Soreang Pasir Koja Toll Road Development PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2016 - 2017).
Rangkap Jabatan Concurrent Position	**Komisaris PT Wege Solusi Proklamasi (Entitas Anak)** Commissioner of PT Wege Solusi Proklamasi
Hubungan Afiliasi Affiliation	**Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun Pemegang Saham.** No affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors nor Shareholders.
Kepemilikan Saham Shareholding	**Tidak memiliki saham di PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk per 31 Desember 2024.** No shareholding in PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk as of December 31, 2024.



Dwi Purnomo

Direktur Operasi II
Director of Operations II

Periode Jabatan Term of Office	**10 Mei 2023 - RUPST 2028 (Periode Pertama)** May 10, 2023 - 2028 AGMS (First Period)	**Usia** Age	**44 tahun per 31 Desember 2024** 44 years old as of December 31, 2024
Kewarganegaraan Nationality	**Indonesia** Indonesian	**Domisili** Domicile	**Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia** East Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	**Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 10 Mei 2023 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 2 tanggal 10 Mei 2023.** Decision of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) dated May 10, 2023 and confirmed in the Deed Number 2 dated May 10, 2023.
Riwayat Pendidikan Educational Background	**Sarjana Teknik Sipil, Universitas Sebelas Maret (2003)** Bachelor of Civil Engineering, Sebelas Maret University (2003)
Sertifikasi dan/atau Pelatihan Certification and/or Training	• **Corporate Finance (2021)** • **Pelatihan Manajemen Risiko (2019)** • **Sertifikasi ASEAN Chartered Professional Engineer (2015)** • Corporate Finance (2021) • Risk Management Training (2019) • ASEAN Chartered Professional Engineer Certification (2015)
Riwayat Pekerjaan Employment Record	• **Direktur QHSE dan Pemasaran PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (2023 - 2024)** • **Direktur Utama PT Wijaya Karya Pracetak Gedung (2019 - 2023)** • **Manajer Proyek Masjid Raya Provinsi Jawa Barat PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (2018 - 2019)** • QHSE and Marketing Director of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (2023 - 2024) • President Director of PT Wijaya Karya Pracetak Gedung (2019 - 2023) • Project Manager of West Java Grand Mosque of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (2018 - 2019)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	**Tidak memiliki rangkap jabatan per 31 Desember 2024.** No concurrent positions as of December 31, 2024.
Hubungan Afiliasi Affiliation	**Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun Pemegang Saham.** No affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors nor Shareholders.
Kepemilikan Saham Shareholding	**Tidak memiliki saham di PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk per 31 Desember 2024.** No shareholding in PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk as of December 31, 2024.

PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DIREKSI DAN ALASAN PERUBAHANNYA

Pada Tahun Buku 2024, terjadi perubahan komposisi Direksi Perseroan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2023 yang diselenggarakan pada tanggal 20 Mei 2024. Dalam RUPST tersebut, Hartanto Karti Raharjo diangkat sebagai Direktur Keuangan, *Human Capital*, dan Manajemen Risiko menggantikan Syailendra Ogan, yang sebelumnya diangkat berdasarkan Akta Nomor 27 tanggal 21 Maret 2019, terhitung sejak 17 Mei 2024.

Selanjutnya, penugasan Dwi Purnomo yang semula menjabat sebagai Direktur QHSE *(Quality, Health, Safety, Environment)* dan Pemasaran dialihkan menjadi Direktur Operasi II, menggantikan Akhmadi Tricahyono, yang sebelumnya diangkat berdasarkan Akta Nomor 6 tanggal 21 April 2022, terhitung sejak ditutupnya RUPST tersebut.

Dalam RUPST tersebut, juga mengangkat Tomo Dwi Hasputro sebagai Direktur QHSE dan Pemasaran.

Dengan perubahan tersebut, komposisi Direksi Perseroan per 31 Desember 2024 berjumlah lima (5) orang, yang terdiri dari : 1) Direktur Utama, 2) Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko, 3) Direktur QHSE *(Quality, Health, Safety, Environment)* dan Pemasaran, 4) Direktur Operasi I, dan 5) Direktur Operasi II. Komposisi serta dasar pengangkatan Anggota Direksi tersebut dapat dilihat lebih lanjut pada tabel berikut.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS AND EXPLANATIONS FOR THE CHANGES

In the 2024 Fiscal Year, there was a change in the composition of the Company's Board of Directors based on the decision of the 2023 Fiscal Year Annual General Meeting of Shareholders (AGM) conducted on May 20, 2024. In the AGM, Hartanto Karti Raharjo was appointed as Director of Finance, Human Capital, and Risk Management replacing Syailendra Ogan, who was previously appointed based on Deed Number 27 dated March 21, 2019, effective as of May 17, 2024.

Furthermore, the assignment of Dwi Purnomo, who previously served as Director of QHSE (Quality, Health, Safety, Environment) and Marketing, was transferred to Director of Operations II, replacing Akhmadi Tricahyono, who was previously appointed based on Deed Number 6 dated April 21, 2022, effective as of the closing of the AGM.

In the AGM, Tomo Dwi Hasputro was also appointed as Director of QHSE and Marketing.

With these changes, the composition of the Company's Board of Directors as of December 31, 2024 comprises five (5) people, consisting of: 1) President Director, 2) Director of Finance, Human Capital, and Risk Management, 3) Director of QHSE (Quality, Health, Safety, Environment) and Marketing, 4) Director of Operations I, and 5) Director of Operations II. The composition and basis for the appointment of the Board of Directors members can be seen further in the following table.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi
Table of Composition and Basis for Appointment of the Board of Directorsw

Nama Name	Position Position	Masa Jabatan Tenure	Periode Jabatan Term of Office	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Hadian Pramudita	Direktur Utama President Director	19 April 2022 - RUPST 2027 April 19, 2022 - 2027 AGMS	Periode - 1 Period - 1	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 19 April 2022 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 5 tanggal 19 April 2022. Decision of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) dated April 19, 2022 and confirmed in the Deed Number 5 dated April 19, 2022.
Hartanto Karti Raharjo	Direktur Keuangan, *Human Capital* dan Manajemen Risiko Director of Finance, Human Capital and Risk Management	20 Mei 2024 - RUPST 2029 May 20, 2024 - 2029 AGMS	Periode - 1 Period - 1	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 20 Mei 2024 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 8 tanggal 20 Mei 2024. Decision of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) dated May 20, 2024 and confirmed in the Deed Number 8 dated May 20, 2024.
Tomo Dwi Hasputro	Direktur QHSE *(Quality, Health, Safety, Environment)* dan Pemasaran Director of QHSE (Quality, Health, Safety, Environment) and Marketing	20 Mei 2024 - RUPST 2029 2029 May 20, 2024 - 2029 AGMS	Periode - 1 Period - 1	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 20 Mei 2024 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 8 tanggal 20 Mei 2024. Decision of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) dated May 20, 2024 and confirmed in the Deed Number 8 dated May 20, 2024.
Bagus Tri Setyana	Direktur Operasi I Director of Operations I	28 Juli 2020 - RUPST 2025 July 28, 2020 - 2025 AGMS	Periode - 1 Period - 1	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 28 Juli 2020 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 51 tanggal 28 Juli 2020. Decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) dated July 28, 2020 and confirmed in the Deed Number 51 dated July 28, 2020.
Dwi Purnomo	Direktur Operasi II Director of Operations II	10 Mei 2023 - RUPST 2028 May 10, 2023 - 2028 AGMS	Periode - 1 Period - 1	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 10 Mei 2023 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 2 tanggal 10 Mei 2023. Decision of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) dated May 10, 2023 and confirmed in the Deed Number 2 dated May 10, 2023.



Syailendra Ogan

Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko
Director of Finance, Human Capital, and Risk Management

Periode Jabatan Term of Office	21 Maret 2019 - 20 Mei 2024 March 21, 2019 - May 20, 2024
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia Indonesian
Usia Age	51 tahun per 31 Desember 2024 51 years old as of December 31, 2024
Domisili Domicile	Bogor, Jawa Barat, Indonesia Bogor, West Java, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 21 Maret 2019 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 25 tanggal 21 Maret 2019. Decision of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) dated March 21, 2019 and confirmed in the Deed Number 25 dated March 21, 2019.
Dasar Hukum Pemberhentian Legal Basis for Dismissal	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 20 Mei 2024 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 8 tanggal 20 Mei 2024. Decision of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) dated May 20, 2024 and confirmed in the Deed Number 8 dated May 20, 2024.
Riwayat Pendidikan Educational Background	Magister Manajemen, Universitas Binus, Jakarta (2023) Master of Management, Universitas Binus, Jakarta (2023)
Riwayat Pekerjaan Employment Record	• Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko PT Wijaya Karya Beton Tbk (2024 - sekarang) • Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (2019 - 2024) • General Manager Departemen Human Capital PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2017 - 2019) • Manajer Biro Keuangan Departemen Bangunan Gedung PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2014 - 2017) • Director of Finance, Human Capital, and Risk Management of PT Wijaya Karya Beton Tbk (2024 - present) • Director of Finance, Human Capital, and Risk Management of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (2019 - 2024) • General Manager of Human Capital Department of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2017 - 2019) • Manager of Finance Bureau of Building Department of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2014 - 2017)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak memiliki rangkap jabatan per 20 Mei 2024. No concurrent positions as of May 20, 2024.
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun Pemegang Saham. No affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors nor Shareholders.
Kepemilikan Saham Shareholding	Tidak memiliki saham di PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk per 20 Mei 2024. No shareholding in PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk as of May 20, 2024.



Akhmadi Tricahyono

Direktur Operasi II
Director of Operations II

Periode Jabatan Term of Office	19 April 2022 - 20 Mei 2024 April 19, 2022 - May 20, 2024
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia Indonesian
Usia Age	58 tahun per 31 Desember 2024 58 years old as of December 31, 2024
Domisili Domicile	Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia Sidoarjo, East Java, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 19 April 2022 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 5 tanggal 19 April 2022. Decision of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) dated April 19, 2022 and confirmed in the Deed Number 5 dated April 19, 2022.
Dasar Hukum Pemberhentian Legal Basis for Dismissal	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 20 Mei 2024 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 8 tanggal 20 Mei 2024. Decision of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) dated May 20, 2024 and confirmed in the Deed Number 8 dated May 20, 2024.
Riwayat Pendidikan Educational Background	Magister Manajemen, Universitas Binus, Jakarta (2019) Master of Management, Universitas Binus, Jakarta (2019)
Riwayat Pekerjaan Employment Record	• Direktur Operasi II PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (2022-2024) • Kepala Divisi Engineering PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2022) • Kepala Divisi Bangunan Gedung PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2022) • Manajer Proyek Besar EPCC Divisi Industrial Plant PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2020 - 2021) • Director of Operations II of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (2022-2024) • Head of Engineering Division of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2022) • Head of Building Division of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2022) • EPCC Major Project Manager of Industrial Plant Division of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2020 - 2021)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak memiliki rangkap jabatan per 20 Mei 2024. No concurrent positions as of May 20, 2024.
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun Pemegang Saham. No affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors nor Shareholders.
Kepemilikan Saham Shareholding	Tidak memiliki saham di PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk per 20 Mei 2024. No shareholding in PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk as of May 20, 2024.

Perubahan Susunan Anggota Direksi dan/ atau Anggota Dewan Komisaris yang Terjadi Setelah Tahun Buku Berakhir

Changes in The Composition of The Board of Directors and/or Board of Commissioners that Occur After the End of the Fiscal Year

Hingga diterbitkannya Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2024, tidak terdapat perubahan pada susunan anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris Perseroan.

As of the publication of the Company's Annual Report for the 2024 Fiscal Year, there are no changes to the composition of the members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners of the Company.



Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

Profil Pejabat Eksekutif
Executives' Profile




Mohamad Fadila
Vice President Of
Human Capital Division
R. Wahyu Alibasya Wisnu W
Vice President of Transformation and
Business Portfolio Development Division
Andi Sugiarto
Head of Internal Audit
Hendrico
Vice President of
Engineering Division

Profil Pejabat Eksekutif
Executives' Profile





Sigit Herlambang
Vice President of Project Management Office and Risk Management Division

Khomensyah Nasution
Vice President of Operation and Modular Division

Budi Setyono
Vice President of Operation Division

Gagah Prakoso Ari Bowo
Vice President of Information Technology Division



Purba Yudha Tama
Corporate Secretary

Warga Negara Indonesia, 41 tahun dan berdomisili di Tangerang. Meraih gelar Magister Applied Finance dari Universitas Binus, Jakarta (2023).

Menjabat sebagai Corporate Secretary sejak 27 Juli 2022 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : SK.02.01/A.DIR.WG.6328/2022.

Jabatan yang pernah diemban di Perusahaan adalah sebagai General Manager Investor Relations WIKA (2020- 2022), Manajer Investor Relations WIKA (2019-2020), dan Ahli Madya 2 Investor Relations WIKA (2018-2019).

Indonesian, 41 years old, and domiciled in Tangerang. He holds a Masters degree in Applied Finance from Universitas Binus, Jakarta (2023).

Served as Corporate Secretary since July 27, 2022 based on the Decree of the Board of Directors Number: SK.02.01/A.DIR.WG.6328/2022.

Positions previously held in the Company are General Manager of Investor Relations WIKA (2020-2022), Manager of Investor Relations WIKA (2019-2020), and Associate Expert 2 Investor Relations WIKA (2018-2019).



Andi Sugiarto
Head of Internal Audit

Warga Negara Indonesia, 52 tahun, dan berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Ahli Madya Akuntansi dari Universitas Diponegoro, Semarang (1994).

Menjabat sebagai Head of Internal Audit sejak 2 Juni 2021 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : SK.02.01/A. DIR.WG.3603/2021.

Jabatan yang pernah diemban di Perusahaan adalah Kepala Satuan Pengawas Internal WIKA Rekayasan Konstruksi (2019), Kepala Pemeriksa Satuan Pengawas Internal WIKA (2019), dan Manajer Bidang Keuangan dan Human Capital Proyek Pembangunan Pipa Trasmisi Gas dari Gresik Semarang Divisi Industrial Plant WIKA (2015).

Indonesian, 52 years old, and domiciled in Jakarta. He holds an Associate Degree in Accounting from Universitas Diponegoro, Semarang (1994).

Served as Head of Internal Audit since June 2, 2021 based on the Decree of the Board of Directors Number: SK.02.01/A. DIR. WG.3603/2021.

Positions previously held in the Company are Head of Internal Supervisory Unit of WIKA Rekayasan Konstruksi (2019), Head of Auditor of Internal Supervisory Unit of WIKA (2019), and Manager of Finance and Human Capital for the Gas Transmission Pipeline Construction Project from Gresik Semarang, Industrial Plant Division of WIKA (2015).







Slamet Riyadi
Vice President of Legal And Contract Management Division

Warga Negara Indonesia, berusia 54 tahun dan berdomisili di Bogor. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Suryadarma (2019).

Menjabat sebagai Vice President of Legal and Contract Management Division sejak 9 November 2023 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : SK.02.01/A. DIR.WG.07108/2023.

Jabatan yang pernah diemban di Perusahaan adalah sebagai Senior Manager Litigation Legal Dept (2023), General Manager Litigation Legal Dept (2020), dan Ahli Utama Litigation Legal Department (2018).

Indonesian, 54 years old, and domiciled in Bogor. He holds a Bachelor of Law degree from Universitas Suryadarma (2019).

Served as Vice President of Legal and Contract Management Division since November 9, 2023 based on the Decree of the Board of Directors Number: SK.02.01/A. DIR.WG.07108/2023.

Positions previously held in the Company are Senior Manager of Litigation Legal Dept (2023), General Manager of Litigation Legal Dept (2020), and Main Expert of Litigation Legal Department (2018).



Hendrico
Vice President of Engineering Division

Warga Negara Indonesia, 53 tahun, dan berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Sriwijaya, Palembang (1995).

Menjabat sebagai Vice President of Engineering Division sejak 12 Mei 2014 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : SK.02.01/ DIR.WG.062/2014.

Jabatan yang pernah diemban di Perusahaan adalah sebagai Kepala Bagian engineering dan Sistem WEGE (2013), Kepala Bagian engineering WEGE (2009), dan Ahli Muda Engineering WIKA (2005).

Indonesian, 53 years old, and domiciled in Jakarta. He holds a Bachelor's degree in Civil Engineering from Universitas Sriwijaya, Palembang (1995).

Served as Vice President of Engineering Division since May 12, 2014 based on the Decree of the Board of Directors Number: SK.02.01/ DIR.WG.062/2014.

Positions previously held in the Company are Head of Engineering and Systems WEGE (2013), Head of Engineering WEGE (2009), and Young Engineering Expert WIKA (2005).







Mohamad Fadila
Vice President Of Human Capital Division

Warga Negara Indonesia, 44 tahun, dan berdomisili di Bekasi. Meraih gelar Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen PPM (2005).

Menjabat sebagai Vice President of Human Capital Division sejak 1 November 2023 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : SK.02.01/A. DIR.WG.01422/2023.

Jabatan yang pernah diemban di Perusahaan adalah sebagai Senior Manager Organizational Development (2023), General Manager Organizational Development (2020), dan General Manager Rekrutmen dan Pengharkatan (2020).

Indonesian, 44 years old, and domiciled in Bekasi. He holds a Masters in Management from PPM Management College (2005).

Served as Vice President of Human Capital Division since November 1, 2023 based on the Decree of the Board of Directors Number: SK.02.01/A. DIR.WG.01422/2023.

Positions previously held in the Company are Senior Manager Organizational Development (2023), General Manager Organizational Development (2020), and General Manager Recruitment and Appreciation (2020).



Sigit Herlambang
Vice President of Project Management Office and Risk Management Division

Warga Negara Indonesia, 42 tahun, dan berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Magister Manajemen Konstruksi dari Universitas Indonesia, Jakarta (2004).

Menjabat sebagai Vice President of Project Management Office and Risk Management Division sejak 8 Desember 2023 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : SK.02.01/A. DIR.WG.07991/2023.

Jabatan yang pernah diemban di Perusahaan adalah sebagai Koordinator Bidang Quantity Survey (2023), Manajer Divisi Konstruksi II (2023), dan Manajer Divisi Konstruksi III (2020).

Indonesian, 42 years old, and domiciled in Jakarta. He holds a Masters degree in Construction Management from Universitas Indonesia, Jakarta (2004).

Served as Vice President of Project Management Office and Risk Management Division since December 8, 2023 based on the Decree of the Board of Directors Number: SK.02.01/A. DIR.WG.07991/2023.

Positions previously held in the Company are as Coordinator of Quantity Survey (2023), Manager of Construction Division II (2023), and Manager of Construction Division III (2020).







Gagah Prakoso Ari Bowo
Vice President of Information Technology Division

Warga Negara Indonesia, 41 tahun, dan berdomisili di Jawa Barat. Meraih gelar Magister Teknik Sipil dari Universitas Gadjah Mada (2010).

Menjabat sebagai Vice President of Information Technology Division sejak 29 Oktober 2022 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : SK.02.01/DIR.WG.08136/2022.

Jabatan yang pernah diemban di Perusahaan adalah sebagai Manajer Proyek UGM Paket 1 (2020), Manajer Proyek UGM Paket 3 (2019), dan Deputy Manajer Proyek Masjid Raya Jawa Barat (2018).

Indonesian, 41 years old, and domiciled in West Java. He holds a Masters degree in Civil Engineering from Universitas Gadjah Mada (2010).

Served as Vice President of Information Technology Division since October 29, 2022 based on the Decree of the Board of Directors Number: SK.02.01/DIR.WG.08136/2022.

Positions previously held in the Company are as UGM Project Manager Package 1 (2020), UGM Project Manager Package 3 (2019), and Deputy Project Manager of the West Java Grand Mosque (2018).



Bakir
Vice President of Supply Chain Management Division

Warga Negara Indonesia, 40 tahun, dan berdomisili di Jawa Tengah. Meraih gelar Magister Logistik dari Institut Teknologi Bandung (2019).

Menjabat sebagai Vice President of Supply Chain Management Division sejak 3 Juni 2024 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : SK.02.01/A.DIR.WG.07256/2024.

Jabatan yang pernah diemban di Perusahaan adalah sebagai Manager of Procurement Department (2024), Coordinator Quantity Survey EPCC WIKA (2023), dan Kepala Seksi QA/QC Proyek EPC Amonium Nitrat (2023).

Indonesian, 40 years old, and domiciled in Central Java. He holds a Masters degree in Logistics from Institut Teknologi Bandung (2019).

Served as Vice President of Supply Chain Management Division since June 3, 2024 based on the Decree of the Board of Directors Number: SK.02.01/A.DIR.WG.07256/2024.

Positions previously held in the Company are Manager of Procurement Department (2024), Coordinator Quantity Survey EPCC WIKA (2023), and Head of QA/QC Section of the Ammonium Nitrate EPC Project (2023).







Ary Hikmasari
Vice President of Quality, Safety, Health and Environment Division

Warga Negara Indonesia, 54 tahun, dan berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Magister Teknik Industri dari Universitas Indonesia, Depok (2015).

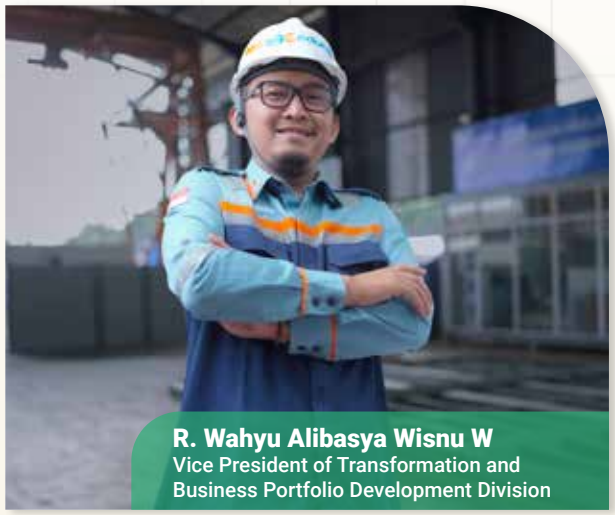
Menjabat sebagai Vice President of Quality, Safety, Health and Environment Division sejak 1 Januari 2015 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : SK.02.01/A.DIR.10342/2014.

Jabatan yang pernah diemban di Perusahaan adalah sebagai Manajer Biro Manajemen Sistem (2017), Manajer Sistem Manajemen Biro QSHE WEGE (2014), dan Manajer Biro Sistem Manajemen WIKA (2012).

Indonesian, 54 years old, and domiciled in Jakarta. He holds a Masters degree in Industrial Engineering from Universitas Indonesia, Depok (2015).

Served as Vice President of Quality, Safety, Health and Environment Division since January 1, 2015 based on the Decree of the Board of Directors Number: SK.02.01/A.DIR.10342/2014.

Positions previously held in the Company are Manager of the System Management Bureau (2017), Manager of the QSHE WEGE Bureau Management System (2014), and Manager of the WIKA Management System Bureau (2012).



R. Wahyu Alibasya Wisnu W
Vice President of Transformation and Business Portfolio Development Division

Warga Negara Indonesia, 46 tahun, dan berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya (2002).

Menjabat sebagai Vice President of Transformation and Business Portfolio Development Division sejak 1 April 2024 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : SK.02.01/A. DIR.WG.01902/2024.

Jabatan yang pernah diemban di Perusahaan adalah sebagai Manajer Biro Manajemen Risiko (2020), Manajer Divisi Modular WEGE (2018), Manajer Unit Tamansari Propero Divisi Property WEGE (2014), dan Kepala Bagian Talent WEGE (2014).

Indonesian, 46 years old, and domiciled in Jakarta. He holds a Bachelor's degree in Civil Engineering from Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya (2002).

Served as Vice President of Transformation and Business Portfolio Development Division since April 1, 2024 based on the Decree of the Board of Directors Number: SK.02.01/A. DIR.WG.01902/2024.

Positions previously held in the Company are as Manager of the Risk Management Bureau (2020), Manager of the WEGE Modular Division (2018), Manager of the Tamansari Propero Unit, WEGE Property Division (2014), and Head of Talent WEGE (2014).







Taufan Yudistiro
Vice President of Finance Division

Warga Negara Indonesia, 46 tahun, dan berdomisili di Jawa Tengah. Meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Airlangga, Surabaya (2013).

Menjabat sebagai Vice President of Finance Division sejak 1 April 2019 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : SK.01.01/A. DIR.00894/2019.

Jabatan yang pernah diemban di Perusahaan adalah sebagai Manajer Bidang Keuangan dan Administrasi Proyek Mega Teluk Lamong WIKA (2018), Manajer Keuangan dan Human Capital Divisi 4 DSU 2 WIKA (2016), dan Kepala Seksi Keuangan Proyek WIKA (2006).

Indonesian, 46 years old, and domiciled in Central Java. He holds a Masters in Management from Universitas Airlangga, Surabaya (2013).

Served as Vice President of Finance Division since April 1, 2019 based on the Decree of the Board of Directors Number: SK.01.01/A. DIR.00894/2019.

Positions previously held in the Company are as Manager of Finance and Administration of the Mega Teluk Lamong WIKA Project (2018), Manager of Finance and Human Capital Division 4 DSU 2 WIKA (2016), and Head of Finance Section of the WIKA Project (2006).



Andy Faisal
Vice President of Marketing Division

Warga Negara Indonesia, 52 tahun, dan berdomisili di Banten. Meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (2009).

Menjabat sebagai Vice President of Marketing Division sejak 15 Juli 2024 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : SK.02.01/A. DIR.08945/2024.

Jabatan yang pernah diemban di Perusahaan adalah sebagai Manajer Bidang Pemasaran Wilayah II (2020), Manajer Bidang Administrasi Pemasaran (2019), dan Manajer Bidang Bisnis Pemasaran (2017).

Indonesian, 52 years old, and domiciled in Banten. He holds a Masters in Management from Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (2009).

Served as Vice President of Marketing Division since July 15, 2024 based on the Decree of the Board of Directors Number: SK.02.01/A. DIR.08945/2024.

Positions previously held in the Company are as Marketing Manager for Region II (2020), Marketing Administration Manager (2019), and Marketing Business Manager (2017).







Budi Setyono
Vice President of Operation Division

Warga Negara Indonesia, 52 tahun, dan berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Diponegoro, Semarang (1997).

Menjabat sebagai Vice President of Operation Division sejak 2 Januari 2023 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : SK.02.01/A. DIR. WG.08776/2022.

Jabatan yang pernah diemban di Perusahaan adalah sebagai Manajer Proyek RSUD Kalideres (2022), Manajer Proyek Rusun Padat Karya (2020), dan Manajer Proyek Gedung Serbaguna Wikasatrian (2019).

Indonesian, 52 years old, and domiciled in Jakarta. He holds a Bachelor's degree in Civil Engineering from Universitas Diponegoro, Semarang (1997).

Served as Vice President of Operation Division since January 2, 2023 based on the Decree of the Board of Directors Number: SK.02.01/A. DIR.WG.08776/2022.

Positions previously held in the Company are as Project Manager of Kalideres Regional Hospital (2022), Project Manager of Labor-Intensive Flats (2020), and Project Manager of Wikasatrian Multipurpose Building (2019).



Khomensyah Nasution
Vice President of Operation and Modular Division

Warga Negara Indonesia, 45 tahun, dan berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2003).

Menjabat sebagai Vice President of Operation and Modular Division sejak 6 Juli 2023 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : SK.02.01/A.DIR. WG.03584/2023.

Jabatan yang pernah diemban di Perusahaan adalah sebagai Manajer Proyek Benhil Hotel & Service Apartment (2022), Manajer Proyek Taman Ismail Marzuki (2019), dan Manajer Proyek Hotel & Office Benhil Central (2018).

Indonesian, 45 years old, and domiciled in Jakarta. He holds a Bachelor's degree in Civil Engineering from Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2003).

Served as Vice President of Operation and Modular Division since July 6, 2023 based on the Decree of the Board of Directors Number: SK.02.01/A.DIR. WG.03584/2023.

Positions previously held in the Company are Project Manager of Benhil Hotel & Service Apartment (2022), Project Manager of Taman Ismail Marzuki (2019), and Project Manager of Hotel & Office Benhil Central (2018).







Florentinus Wailanduw
Vice President of Operation and Concession Division

Warga Negara Indonesia, 49 tahun, dan berdomisili di Depok. Meraih gelar Sarjana Teknik Arsitektur dari Universitas Diponegoro, Semarang (1998).

Menjabat sebagai Vice President of Operation and Concession Division sejak 4 Juli 2023 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : SK.02.01/A.HC.WG.03579/2023.

Jabatan yang pernah diemban di Perusahaan adalah sebagai Manajer Proyek BI Millennial (2022), Deputy Manajer Proyek Hotel Pullman (2022), dan Manajer Proyek RSUP Fatmawati (2021).

Indonesian, 49 years old, and domiciled in Depok. He holds a Bachelor's degree in Architecture Engineering from Universitas Diponegoro, Semarang (1998).

Served as Vice President of Operation and Concession Division since July 4, 2023 based on the Decree of the Board of Directors Number: SK.02.01/A.HC.WG.03579/2023.

Positions previously held in the Company are BI Millennial Project Manager (2022), Deputy Project Manager of Hotel Pullman (2022), and Project Manager of RSUP Fatmawati (2021).





Peristiwa Penting
Significant Events

JANUARI 2024
JANUARY 2024

3 Januari | January 3



Kunjungan Tahun 2024 WEGE di Proyek Gedung STMKG
WEGE 2024 Visit to STMKG Building Project

Direksi, Dewan Komisaris, dan Manajemen WEGE memulai tahun 2024 dengan melakukan kunjungan ke Proyek Gedung Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG). Kunjungan ini mencerminkan komitmen perseroan terhadap transparansi dan akuntabilitas, serta bertujuan memperkuat hubungan internal dan komunikasi di antara pemangku kepentingan utama perusahaan.

The Board of Directors, Board of Commissioners, and WEGE Management began 2024 by visiting the Meteorology, Climatology and Geophysics College (STMKG) Building Project. This visit reflects the company's commitment to transparency and accountability, and aims to strengthen internal relationships and communication among the company's key stakeholders.

30 Januari | January 30



WEGE Hadirkan Kafetaria Kampus UNPAR Berbasis Modular
WEGE Presents Modular-Based UNPAR Campus Cafeteria

WEGE bekerja sama dengan PT Karya Bakti Parahyangan (KBP) dan segenap civitas akademika Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) Bandung, melaksanakan acara ground breaking pembangunan kafetaria berbasis sistem konstruksi modular di lingkungan kampus UNPAR.

WEGE in collaboration with PT Karya Bakti Parahyangan (KBP) and the entire academic community of Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) Bandung, held a groundbreaking event for the construction of a cafeteria based on a modular construction system on the UNPAR campus.

31 Januari | January 31



WEGE Raih Kontrak Gedung Sistem Peringatan Dini Bencana BMKG di Jakarta dan Bali
WEGE Signs Contract for BMKG Disaster Early Warning System Building in Jakarta and Bali

WEGE dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melakukan penandatanganan kontrak kerja untuk pekerjaan pengembangan sistem operasional Indonesia Tsunami Early Warning System (inaTEWS) di Gedung Jakarta dan Bali.

WEGE and the Meteorology, Climatology, and Geophysics Agency (BMKG) signed a work contract for the development of the operational system of the Indonesia Tsunami Early Warning System (inaTEWS) in the Jakarta and Bali Buildings.



FEBRUARI 2024
FEBRUARY 2024

6 Februari | February 6



WEGE Rehabilitasi dan Renovasi Stadion Teladan di Medan
WEGE Rehabilitates and Renovates Teladan Stadium in Medan

WEGE bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Pemerintah Kota Medan, telah melaksanakan acara ground breaking untuk proses rehabilitasi dan renovasi Stadion Teladan di Medan.

WEGE together with the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR) and the Medan Municipal Government, has held a groundbreaking event for the rehabilitation and renovation process of Teladan Stadium in Medan.

22 Februari | February 22



WEGE dan Parongpong RAW Lab Kolaborasi dalam Pembuatan Paviliun Berkelanjutan di ARCH:ID 2024
WEGE and Parongpong RAW Lab Collaborate to Create Sustainable Pavilion at ARCH:ID 2024

Dalam ajang Indonesia Architecture Exhibition & Conference (ARCH:ID) 2024, WEGE dan Parongpong RAW Lab berhasil menciptakan sebuah paviliun yang memikat dengan mengusung konsep keberlanjutan. Inovasi menarik ini diberi nama "Modular Lite" (MoLi).

In the Indonesia Architecture Exhibition & Conference (ARCH:ID) 2024, WEGE and Parongpong RAW Lab successfully created an attractive pavilion with a sustainability concept. This interesting innovation is named "Modular Lite" (MoLi).

23 Februari | February 23



Kolaborasi ITS dan WEGE dalam Misi Nol Emisi : Inovasi Modular untuk Bangunan Ramah Lingkungan
ITS and WEGE Collaboration in Zero Emission Mission: Modular Innovation for Eco-Friendly Buildings

Dalam upaya mendukung visi keberlanjutan dan menghadapi tantangan perubahan iklim, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menjalin kemitraan strategis dengan WEGE melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU). Kolaborasi ini menandai komitmen kedua belah pihak untuk memajukan konstruksi ramah lingkungan dan mengembangkan inovasi-inovasi berkelanjutan dalam industri konstruksi.

As an initiative to support the vision of sustainability and facing the challenges of climate change, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) has established a strategic partnership with WEGE through the signing of a Memorandum of Understanding (MoU). This collaboration marks the commitment of both parties to advance environmentally friendly construction and develop sustainable innovations in the construction industry.

27 Februari | February 27



Groundbreaking Stadion Surajaya Lamongan, Desain Modern Berstandar FIFA
Groundbreaking of Surajaya Stadium in Lamongan, Modern Design with FIFA Standards

WEGE telah memulai pembangunan Stadion Surajaya Lamongan yang mengusung desain modern dan memenuhi standar FIFA. Dengan kapasitas 12.097 kursi tunggal, stadion ini dirancang untuk menawarkan kenyamanan sekaligus menjamin keamanan optimal bagi para penonton.

WEGE has started construction of Surajaya Lamongan Stadium which carries a modern design and meets FIFA standards. With a capacity of 12,097 single seats, the stadium is designed to offer comfort while ensuring optimal safety for spectators.

29 Februari | February 29



WEGE Menggelar RUPSLB Tahun 2024
WEGE Conducts 2024 EGMS

WEGE telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 29 Februari 2024. Agenda utama dalam RUPSLB tersebut adalah mengenai perubahan pengurus Perseroan.

WEGE conducted an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on February 29, 2024. The main agenda of the EGMS was regarding changes to the Company's management.

MARET 2024
MARCH 2024

8 Maret | March 8



Komitmen Konstruksi Berkelanjutan, WEGE Tanam Bibit Pohon Langka dan Buah di Wikasatrian
Commitment to Sustainable Construction, WEGE Plants Rare Tree and Fruit Seedlings in Wikasatrian

WEGE ikut berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan berpartisipasi dalam penanaman pohon langka dan buah di area Wikasatrian, Pasir Angin, Bogor.

WEGE played an active role in preserving the environment by participating in planting rare trees and fruit in the Wikasatrian area, Pasir Angin, Bogor.

25 Maret | March 25



WEGE dan BMKG Resmikan Gedung Bangunan Hijau Pertama di Kota Tangerang
WEGE and BMKG Inaugurates First Green Building in Tangerang City

WEGE meresmikan Gedung Pendidikan dan Laboratorium MKGI Center of Excellence untuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di Kota Tangerang, yang menjadi gedung bangunan hijau pertama di kota tersebut.

WEGE inaugurated MKGI Center of Excellence Education and Laboratory Building for the Meteorology, Climatology, and Geophysics Agency (BMKG) in Tangerang City, which becomes the first green building in the city.

APRIL 2024
APRIL 2024

25 April | April 25



WEGE Raih Penghargaan BIM 5D TBQ dari Glodon Technical Indonesia
WEGE Receives BIM 5D TBQ Award from Glodon Technical Indonesia

WEGE meraih BIM 5D TBQ Excellence Award dalam acara Glodon AEC Connect Day 2024 yang bertema "Build, Lead, and Thrive" di Energy Building, SCBD, Jakarta.

WEGE won BIM 5D TBQ Excellence Award at the Glodon AEC Connect Day 2024 with event theme of "Build, Lead, and Thrive" at the Energy Building, SCBD, Jakarta.

MEI 2024
MAY 2024

15 Mei | May 15



WEGE Tandatangani Kontrak KSO Pembangunan Gedung Fasilitas Telkomsel
WEGE Signs KSO Contract for Telkomsel Facilities Building Construction

WEGE menandatangani Kontrak Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT Pelitamaju Multiswakarsa untuk pembangunan Gedung Facility Support Telkomsel Smart Office (FSTSO) 1 di Jakarta.

WEGE signed a Joint Operation Contract (KSO) with PT Pelitamaju Multiswakarsa for the construction of the Telkomsel Smart Office Facility Support Building (FSTSO) 1 in Jakarta.

20 Mei | May 20



WEGE Menggelar RUPS Tahunan Tahun Buku 2023
WEGE Conducts Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2023

WEGE telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2023 pada tanggal 20 Mei 2024. Rapat membahas delapan agenda utama, termasuk penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk pembagian dividen dan perubahan pengurus.

WEGE has conducted an Annual General Meeting of Shareholders (AGM) for the 2023 Fiscal Year on May 20, 2024. The meeting discussed eight main agendas, including determining the use of the Company's net profit for dividend distribution and changes to management.

27 Mei | May 27



WEGE Garap Pembangunan Gedung Facility Support Telkomsel Smart Office (FSTSO)
WEGE Works on Construction of Telkomsel Smart Office (FSTSO) Facility Support Building

WEGE KSO telah resmi memulai pembangunan Gedung Facility Support Telkomsel Smart Office (FSTSO) di Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 52, Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

WEGE KSO has officially started the construction of the Telkomsel Smart Office (FSTSO) Facility Support Building on Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 52, Kuningan Barat, Mampang Prapatan, South Jakarta.

29 Mei | May 29



WEGE Raih Predikat "Platinum" di Ajang Penghargaan Transparansi dan Penurunan Emisi Karbon
WEGE Receives "Platinum" at Transparency and Carbon Emission Reduction Awards

WEGE meraih predikat Platinum dalam ajang Penghargaan Transparansi dan Penurunan Emisi Karbon 2024, sebagai pengakuan atas komitmen perusahaan dalam transparansi dan upaya penurunan emisi karbon.

WEGE received Platinum at the 2024 Carbon Emissions Reduction and Transparency Awards, in recognition of the company's commitment to transparency and carbon emissions reduction.

JUNI 2024
JUNY 2024

6 Juni | Juny 6



Kunjungan Kerja Komisaris dan Direksi WEGE ke Ibu Kota Nusantara (IKN)
Project Visit of WEGE's Board of Commissioners and Board of Directors to Ibu Kota Nusantara (IKN)

Dewan Komisaris dan Direksi WEGE melakukan kunjungan kerja untuk meninjau rogress terkini sejumlah proyek yang tengah dikerjakan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

The Board of Commissioners and Board of Directors of WEGE conducted a project visit to review the latest progress of a number of projects currently being executed in Ibu Kota Nusantara (IKN).

JULI 2024
JULY 2024

19 Juli | July 19



WEGE Resmikan Gedung Geomaritim PIP Makassar
WEGE Inaugurates PIP Makassar Geomaritime Building

WEGE berhasil menyelesaikan pembangunan Gedung Geomaritim Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar. Proyek ini diresmikan oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.

WEGE successfully completed the construction of the Geomaritime Building of the Makassar Maritime Polytechnic (PIP). The project was inaugurated by the Minister of Transportation, Budi Karya Sumadi.

30 Juli | July 30



WEGE Raih Dua Penghargaan Prestisius dalam TJSL & CSR Award 2024
WEGE Receives Two Prestigious Awards at TJSL & CSR Award 2024

WEGE meraih dua penghargaan bergengsi dalam TJSL & CSR Award 2024, termasuk predikat TOP #4 Star (Gold) untuk kategori Pilar Ekonomi BUMN & Anak Perusahaan BUMN Tbk.

WEGE received two prestigious awards in the 2024 TJSL & CSR Award, including the TOP #4 Star (Gold) predicate for the BUMN & BUMN Tbk Economic Pillar category.

AGUSTUS 2024
AUGUST 2024

2 Agustus | August 2



WEGE Selesaikan Proyek Hunian Modular TNI-IKN Tercepat, Raih Dua Rekor MURI
WEGE Completes TNI-IKN Modular Housing Project Fastest, Achieves Two MURI Records

WEGE KSO sukses menyelesaikan proyek hunian modular TNI di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan dua penghargaan Rekor MURI: Pembangunan Hunian Modular Topping Off Tercepat (16 jam, 3 menit, 40 detik untuk hunian 4 lantai dengan luas area 2.246 m²) dan Pembangunan Hunian Modular Siap Huni Tercepat (180 jam, 3 menit, 17 detik untuk hunian 4 lantai dengan luas area 2.246 m²).

WEGE KSO successfully completed the TNI modular housing project in the Indonesian Capital City (IKN) with two MURI Record awards: Fastest Topping Off Modular Housing Construction (16 hours, 3 minutes, 40 seconds for a 4-story residence with an area of 2,246 m²) and Fastest Ready-to-Occupy Modular Housing Construction (180 hours, 3 minutes, 17 seconds for a 4-story residence with an area of 2,246 m²).

5 Agustus | August 5



Topping Off Tower Castilla Sky House Alam Sutera
Topping Off Tower Castilla Sky House Alam Sutera

WEGE bersama PT Risland Sutera Properti (Risland) sukses melaksanakan *topping off* Gedung Apartemen Sky House Tower Castilla di Alam Sutera, Tangerang, menandai tahap akhir menuju penyelesaian proyek konstruksi.

WEGE together with PT Risland Sutera Properti (Risland) successfully carried out the topping off of the Sky House Tower Castilla Apartment Building in Alam Sutera, Tangerang, marking the final stage towards the completion of the construction project.

21 Agustus | August 21



Investor dan Analyst Grup Meeting: Pemaparan Kinerja dan Strategi WEGE
Investor and Analyst Group Meeting: WEGE Performance and Strategy Presentation

WEGE, melalui Direksi, Corporate Secretary, dan Investor Relations, menyelenggarakan pertemuan dengan analis dan investor untuk memaparkan perkembangan terkini terkait kinerja perseroan dan strategi bisnis yang dijalankan. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat komunikasi dan hubungan yang transparan dengan para pemangku kepentingan di pasar modal.

WEGE, through the Board of Directors, Corporate Secretary, and Investor Relations, held a meeting with analysts and investors to present the latest developments related to the company's performance and business strategies. The meeting aims to strengthen transparent communication and relationships with stakeholders in the capital market.

26 Agustus | August 26



WEGE Raih Penghargaan 'Innovator of the Year' di ASEAN Autodesk Award 2024
WEGE Wins 'Innovator of the Year' Award at ASEAN Autodesk Award 2024

WEGE meraih penghargaan Grand Winner Innovator of the Year di ASEAN Autodesk Award 2024 di Kuala Lumpur. Penghargaan ini merupakan apresiasi atas keberhasilan WEGE dalam mengimplementasikan teknologi *Building Information Modeling* (BIM) pada proyek Bandara Internasional Dhoho Kediri.

WEGE won Grand Winner Innovator of the Year award at the ASEAN Autodesk Award 2024 in Kuala Lumpur. This award is an appreciation for WEGE's success in implementing Building Information Modeling (BIM) technology in the project of Dhoho Kediri International Airport.

30 Agustus | August 30



Public Expose Live WEGE 2024
2024 WEGE Public Expose Live

WEGE terpilih sebagai salah satu emiten yang diundang untuk berpartisipasi dalam Public Expose Live 2024 yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia. Acara ini dihadiri oleh analis, investor, dan pemangku kepentingan lainnya, yang bertujuan untuk memberikan informasi terkait pencapaian kinerja, strategi, dan rencana pengembangan perusahaan. Public Expose ini menjadi sarana penting bagi WEGE untuk meningkatkan transparansi, memperkuat hubungan dengan investor, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik oleh para pemangku kepentingan di pasar modal.

WEGE was selected as one of the issuers invited to participate in the 2024 Public Expose Live organized by Indonesia Stock Exchange. This event was attended by analysts, investors, and other stakeholders, which aims to provide information related to the company's performance achievements, strategies, and development plans. This Public Expose is an important means for WEGE to increase transparency, strengthen relationships with investors, and support better decision-making by stakeholders in the capital market.

SEPTEMBER 2024
SEPTEMBER 2024

6 September | September 6



WIKA-WEGE Sukses Bangun RS Vertikal Katastropik Pertama dan Terbesar di Indonesia
WIKA-WEGE Successfully Builds the First and Largest Catastrophic Vertical Hospital in Indonesia

Presiden Joko Widodo meresmikan Rumah Sakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Surabaya sebagai RS Vertikal Katastropik pertama dan terbesar di Indonesia, yang merupakan hasil proyek WIKA-WEGE KSO.

President Joko Widodo inaugurated the Ministry of Health (Kemenkes) Hospital in Surabaya as the first and largest Catastrophic Vertical Hospital in Indonesia, which becomes the result of the WIKA-WEGE KSO project.

9 September | September 9



Grand Opening Rammah Food Collective: Kafetaria Modular Pertama di Kampus UNPAR Bandung
Grand Opening of Rammah Food Collective: The First Modular Cafeteria on UNPAR Bandung Campus

WEGE bersama dengan PT Karya Bakti Parahyangan, secara resmi meluncurkan Rammah Food Collective, kafetaria pertama di Kampus Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) yang dibangun menggunakan teknologi Modular Lite (MoLi).

WEGE together with PT Karya Bakti Parahyangan, officially launched Rammah Food Collective, the first cafeteria at Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) campus built using Modular Lite (MoLi) technology.

9 September | September 9



WEGE Selesaikan Renovasi dan Pembangunan Kembali 12 Venue PON XXI 2024

WEGE Completes Renovation and Redevelopment of 12 Venues for PON XXI 2024

WEGE KSO berhasil menyelesaikan renovasi dan pembangunan kembali 12 venue Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI di Aceh dan Sumatera Utara, sebagai bagian dari persiapan infrastruktur untuk pelaksanaan PON XXI 2024.

WEGE KSO has successfully completed the renovation and reconstruction of 12 venues for the XXI National Sports Week (PON) in Aceh and North Sumatra, as part of the infrastructure preparation for the implementation of PON XXI 2024.

20 September | September 20



WEGE Raih Silver Winner di Media Relations Award SPS 2024

WEGE Receives Silver Winner in the SPS Media Relations Award 2024

WEGE meraih Silver Winner dalam Media Relations Award (MRA) 2024 kategori Press Gathering. Penghargaan ini mencerminkan komitmen WEGE dalam menjaga komunikasi transparan, efektif, serta memperkuat hubungan strategis yang berkelanjutan dengan media.

WEGE received Silver Winner from Media Relations Award (MRA) 2024 in the Press Gathering category. This award reflects WEGE's commitment to maintaining transparent, effective communication, and strengthening sustainable strategic relationships with the media.

OKTOBER 2024
OCTOBER 2024

2 Oktober | October 2



Presiden Jokowi Resmikan PLBN Terpadu Karya WEGE

President Jokowi Inaugurates WEGE's Integrated PLBN

Presiden Joko Widodo meresmikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu yang merupakan hasil karya WEGE. PLBN ini tidak hanya menjadi fasilitas strategis untuk perlintasan orang dan barang, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap pengembangan wilayah perbatasan sebagai simbol kedaulatan dan kemajuan Indonesia.

President Joko Widodo inaugurated Integrated Cross-Border Post (PLBN) as one of WEGE's project. This PLBN is not merely a strategic facility for the crossing of people and goods, but also reflects a commitment to the development of border areas as a symbol of Indonesia's sovereignty and progress.

10 Oktober | October 10



WEGE Resmikan Taman Bermain dan Tanam Pohon Langka di KWPLH Beruang Madu Balikpapan

WEGE Inaugurates Playground and Rare Plants Trees at KWPLH Balikpapan Sun Bear

Sebagai wujud komitmen terhadap SDG dan ESG, WEGE meresmikan revitalisasi Taman Bermain dan penanaman pohon langka di Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup (KWPLH) Beruang Madu, Balikpapan, bersama Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Balikpapan.

As a commitment to SDG and ESG, WEGE inaugurated the revitalization of the Playground and planting of rare trees at Beruang Madu Environmental Education Tourism Area (KWPLH), Balikpapan, together with Balikpapan Protected Forest Management Unit (KPHL).

18 Oktober | October 18



Bandara Internasional Dhoho Kediri Karya WEGE Resmi Beroperasi
Dhoho Kediri International Airport by WEGE is Officially Operating

Bandara Internasional Dhoho Kediri resmi dioperasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Peresmian ini menandai langkah penting dalam pengembangan konektivitas dan perekonomian di wilayah Jawa Timur.

Dhoho Kediri International Airport was officially operated by the Coordinating Minister for Maritime Affairs and Investment, Luhut Binsar Pandjaitan. This inauguration marks an important step in developing connectivity and economy in the region of East Java.

31 Oktober | October 31



WEGE Raih Penghargaan The Sustainable Modular Innovation di CSA Award
WEGE Wins The Sustainable Modular Innovation Award at CSA Awards

WEGE meraih penghargaan The Sustainable Modular Innovation pada CSA Award 2024. Penghargaan ini mengapresiasi inovasi WEGE dalam pengembangan modular sebagai solusi untuk mendukung keberlanjutan infrastruktur di Indonesia.

WEGE won the Sustainable Modular Innovation award at the 2024 CSA Awards. This award appreciates WEGE's innovation in modular development as a solution to support sustainable infrastructure in Indonesia.

NOVEMBER 2024
NOVEMBER 2024

8 November | November 8



WEGE Raih Penghargaan Keselamatan Kerja dari Kementerian Pekerjaan Umum
WEGE Receives Occupational Safety Award from Ministry of Public Works

WEGE meraih dua penghargaan Keselamatan Kerja dari Kementerian Pekerjaan Umum dalam ajang Penghargaan Konstruksi Indonesia 2024 atas penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) di proyek Pembangunan Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator 1 IKN dan paket Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Rumah Susun Paspampres IKN.

WEGE received two Occupational Safety awards from the Ministry of Public Works at the 2024 Indonesian Construction Awards for the implementation of the Construction Safety Management System (SMKK) in the IKN Coordinating Ministry 1 Office Building and Area Development project as well as the Integrated Construction Package for Design and Construction of IKN Paspampres Flats.

21 November | November 21



WEGE Dorong Inovasi dan Keberlanjutan Melalui Pembangunan ITB Innovation Park Bandung

WEGE Promotes Innovation and Sustainability Through Development of ITB Innovation Park Bandung

WEGE telah menyelesaikan pembangunan ITB Innovation Park di Summarecon Bandung, Jawa Barat. Proyek ini menjadi simbol kemajuan pendidikan tinggi dengan mengintegrasikan inovasi, teknologi, dan keberlanjutan.

WEGE has completed the construction of ITB Innovation Park in Summarecon Bandung, West Java. This project is a symbol of the advancement of higher education by integrating innovation, technology, and sustainability.

26 November | November 26



WEGE Tandatangani Kontrak Pembangunan Gedung Pusat Onkologi RSUP Klaten

WEGE Signs Contract for Construction of Klaten General Hospital Oncology Center Building

WEGE menandatangani kontrak untuk pembangunan Gedung Pusat Onkologi RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro di Klaten, Jawa Tengah. Proyek ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, manajemen RSUP, Kementerian Keuangan, dan Islamic Development Bank (IsDB).

WEGE signed a contract for the construction of the Oncology Center Building of Dr. Soeradji Tirtonegoro General Hospital in Klaten, Central Java. This project is a collaboration between the Ministry of Health, management of the General Hospital, Ministry of Finance, and Islamic Development Bank (IsDB).

28 November | November 28



WEGE Raih Penghargaan Platinum ISDA 2024 atas Inovasi Modular

WEGE Wins 2024 ISDA Platinum Award for Modular Innovation

WEGE meraih penghargaan Platinum di ajang Indonesian Sustainable Development Goals Award (ISDA) 2024 atas program "Modular, Enhancing Indonesia's Sustainable Future Construction". Penghargaan ini mengapresiasi komitmen WEGE terhadap pembangunan berkelanjutan melalui inovasi teknologi modular.

WEGE won the Platinum award at the Indonesian Sustainable Development Goals Award (ISDA) 2024 for "Modular, Enhancing Indonesia's Sustainable Future Construction" program. This award appreciates WEGE's commitment to sustainable development through modular technology innovation.

29 November | November 29





Investor & Analyst Meeting dan Site Visit di ITB Innovation Park
Investor & Analyst Meeting and Site Visit at the ITB Innovation Park

WEGE menyelenggarakan Investor & Analyst Meeting di Hotel De Braga, yang merupakan salah satu proyek konsesi yang terletak di Jl. Braga, Bandung, serta Site Visit di proyek ITB Innovation Park, sebuah proyek konstruksi yang berlokasi di Summarecon, Gedebage, Bandung. Dalam pertemuan ini, WEGE membahas kinerja perseroan, strategi, dan rencana pengembangan ke depan, sementara site visit memberikan kesempatan kepada investor dan analis untuk mengunjungi langsung proyek unggulan perseroan. Acara ini bertujuan untuk memperkuat komunikasi, meningkatkan transparansi, dan menjaga hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan di pasar modal.

WEGE held an Investor & Analyst Meeting at Hotel De Braga, which is one of the concession projects located at Jl. Braga, Bandung, as well as a Site Visit the ITB Innovation Park project, a construction project located in Summarecon, Gedebage, Bandung. In this meeting, WEGE discussed the company's performance, strategy, and future development plans, while the site visit provided an opportunity for investors and analysts to visit the company's flagship projects directly. This event aims to strengthen communication, increase transparency, and maintain good relations with stakeholders in the capital market.

DESEMBER 2024
DECEMBER 2024

18 Desember | December 18



PMJ Land Tower Capai Topping Off: Komitmen WEGE terhadap Infrastruktur Berkelanjutan
PMJ Land Tower Accomplishes Topping Off: WEGE's Commitment to Sustainable Infrastructure

WEGE melalui konsorsium WEGE KSO telah mencapai tahap topping off pada pembangunan PMJ Land Tower di Jalan Kayu Putih Raya, Jakarta. Pencapaian ini merupakan wujud komitmen WEGE dalam menghadirkan infrastruktur modern yang memenuhi standar keberlanjutan dan keunggulan.

WEGE through WEGE KSO consortium has reached the topping off stage in the construction of PMJ Land Tower at Jalan Kayu Putih Raya, Jakarta. This achievement is a manifestation of WEGE's commitment to presenting modern infrastructure that meets sustainability and excellence standards.

20 Desember | December 20



WEGE Bangun Basilika Pertama di Indonesia di Ibu Kota Nusantara
WEGE Builds Indonesia's First Basilica in Ibu Kota Nusantara

WEGE resmi memulai pembangunan Basilika Santo Fransiskus Xaverius di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Proyek ikonis ini mencakup Basilika pertama di Indonesia, Gereja, dan Plaza Kerukunan, menjadikan kawasan ini simbol toleransi dan kerukunan umat beragama di Indonesia.

WEGE officially started the construction of the Basilica of St. Francis Xavier in Ibu Kota Nusantara (IKN), East Kalimantan. This iconic project includes the first Basilica in Indonesia, a Church, and Plaza Kerukunan, making this area a symbol of tolerance and harmony between religious communities in Indonesia.

23 Desember | December 23



WEGE Gelar Topping Off Gedung FSTSO: Bangunan Inovatif dan Berkelanjutan

WEGE Performs Topping Off of FSTSO Building: Innovative and Sustainable Building

WEGE melalui WG-PELITA KSO sukses menyelenggarakan seremoni topping off Gedung Facility Support Telkomsel Smart Office (FSTSO). Momen ini menandai tonggak penting dalam pembangunan gedung modern yang mengusung berbagai fitur inovatif dan berkelanjutan.

WEGE through WG-PELITA KSO successfully performed a topping off ceremony for the Facility Support Telkomsel Smart Office (FSTSO) Building. This moment marks a significant milestone in the construction of a modern building that carries various innovative and sustainable features.

24 Desember | December 24



Peresmian Stasiun Whoosh Karawang

Inauguration of Whoosh Karawang Station

WEGE turut meresmikan Stasiun Whoosh Karawang, yang ditandai dengan pemberhentian perdana kereta cepat Whoosh dari Stasiun Halim Jakarta ke Stasiun Whoosh Karawang. Stasiun Whoosh Karawang merupakan hasil karya WEGE dalam mendukung pengembangan infrastruktur di Indonesia.

WEGE also inaugurated Whoosh Karawang Station, which was marked by the first stop of the Whoosh fast train from Halim Station Jakarta to Whoosh Karawang Station. Whoosh Karawang Station is WEGE's work to supporting infrastructure development in Indonesia.

Sumber Daya Manusia
Human Capital

Perseroan meyakini bahwa sumber daya manusia yang unggul merupakan kunci dalam menghadapi persaingan bisnis dan kemajuan teknologi yang semakin dinamis. Oleh karena itu, Perseroan terus berupaya menjadi entitas yang adaptif dan inovatif dengan mengelola karyawan (*Human Capital)* secara terintegrasi, sesuai dengan Proses Bisnis serta Visi dan Misi Perseroan.

Pengelolaan sumber daya manusia dilakukan mulai dari perencanaan strategis pengembangan organisasi hingga masa pensiun karyawan. Proses ini mencakup berbagai tahapan, termasuk rekrutmen, pengembangan kompetensi, pengelolaan kinerja, hingga pengelolaan karier, yang semuanya dirancang untuk memastikan karyawan mampu berkontribusi secara maksimal terhadap keberlanjutan bisnis Perseroan.

Untuk mendukung hal tersebut, Perseroan telah menyusun *Grand Design & Human Capital Development System* yang berfungsi sebagai panduan utama dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia secara efektif dan berkelanjutan. Sistem ini dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga untuk menciptakan tenaga kerja yang siap menghadapi tantangan di masa depan.

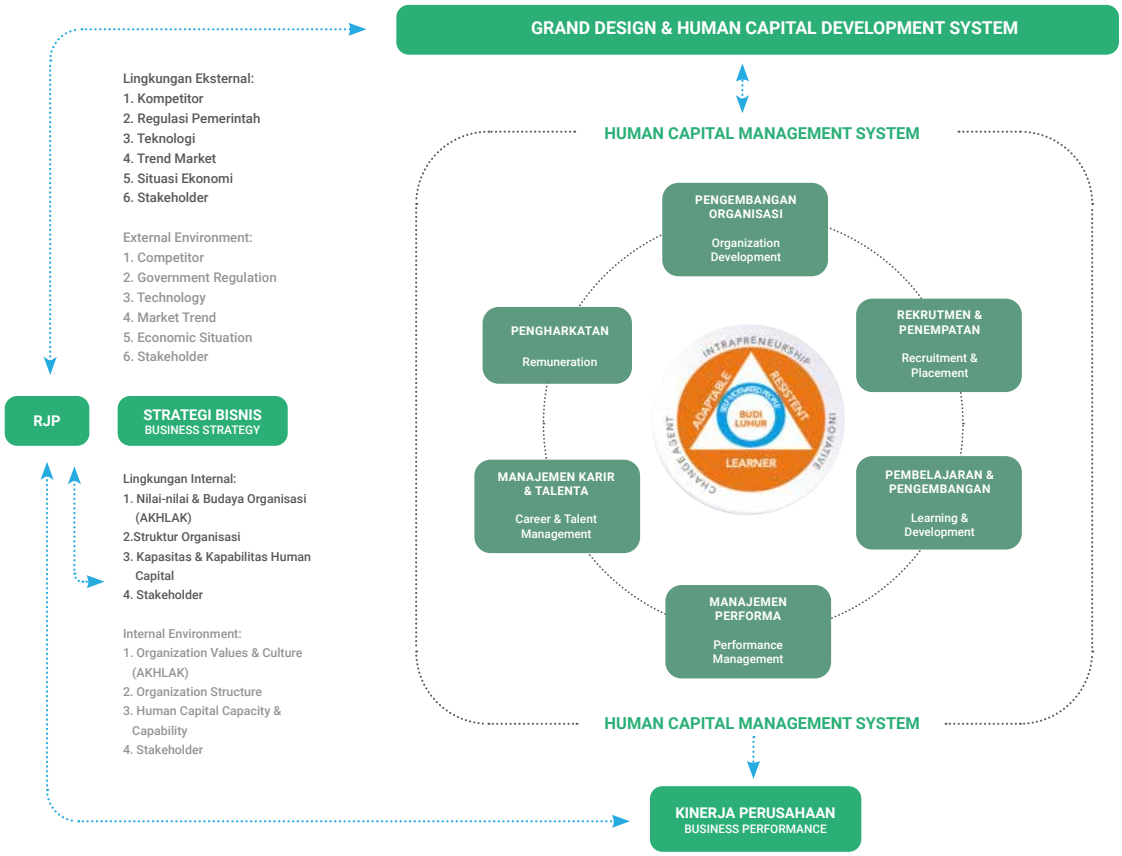
Adapun *Grand Design & Human Capital Development System* yang dimiliki oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

The Company believes that superior human capital is the key to facing increasingly dynamic business competition and technological advances. Therefore, the Company continues to strive to become an adaptive and innovative entity by managing employees (Human Capital) in an integrated manner, in accord with the Company's Business Process and Vision and Mission.

Human capital management is carried out starting from strategic planning for organizational development to employee retirement. This process comprises various stages, including recruitment, competency development, performance management, to career management, all of which are designed to ensure that employees are able to contribute optimally to the sustainability of the Company's business.

In order to support this, the Company has prepared a Grand Design & Human Capital Development System which functions as the main guide in managing and developing human capital effectively and sustainably. This system is designed not only to meet short-term needs, but also to create a workforce that is ready to face future challenges.

The Grand Design & Human Capital Development System owned by the Company is as follows:



Human Capital Management System

Human Capital Management System (HCMS) merupakan sistem informasi yang dirancang untuk mendukung pengelolaan manajemen di bidang sumber daya manusia. Sistem ini dikembangkan oleh WIKA Group dan terintegrasi dengan seluruh anak perusahaannya, termasuk WEGE. HCMS berfungsi untuk membantu karyawan dan Perseroan dalam melaksanakan berbagai proses administrasi personalia serta menyediakan akses informasi terkait kepegawaian.

Karyawan dapat mengakses HCMS melalui situs internal Perseroan. Informasi yang dapat diakses melalui aplikasi ini, diantaranya:

- Data Pribadi Karyawan: Informasi dasar yang dimiliki setiap karyawan.
- Manajemen Kinerja: Evaluasi kompetensi dan pencapaian kinerja karyawan.
- Pelatihan dan Pengembangan: Informasi terkait program pelatihan yang telah diikuti.
- Informasi Lainnya: Data tambahan yang relevan dengan kepegawaian.

Selain itu, modul *Employee Self-Service* pada HCMS memungkinkan karyawan untuk mengajukan cuti, dinas, klaim, pinjaman, koperasi, serta memantau status surat perjalanan dinas secara mandiri.

Pengembangan Sistem Teknologi Informasi HCMS

Sebagai bagian dari pengembangan berbasis teknologi, *Human Capital Division* bekerja sama dengan *Information Technology Division* untuk menghadirkan sistem *Employee Battery* pada aplikasi My-WEGE. Sistem ini menyediakan berbagai informasi yang dapat diakses oleh karyawan, di antaranya:

1. *Individual Development Plan* (IDP)
2. *Performance Category*
3. *Mandatory Training Information*
4. *Individual Career Plan* (ICP)
5. *Assessment Report*
6. *Grading & Quadrant Remuneration*
7. *Employee Performance*
8. Kriteria Unjuk Kerja (KUK)
9. *Track Record* Jabatan

Sistem ini dirancang untuk mendukung transparansi, efisiensi, dan kemudahan akses dalam pengelolaan sumber daya manusia, sekaligus memperkuat komitmen Perseroan dalam pengembangan karyawan secara berkelanjutan.

HUMAN CAPITAL DIVISON

Human Capital Division WEGE berperan sebagai penanggung jawab utama dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Perseroan. Tanggung jawab ini mencakup seluruh proses pengelolaan SDM, mulai dari perencanaan strategis hingga evaluasi pelaksanaan program kerja yang sedang berjalan. Selain itu, *Human Capital Division* juga telah memadukan sistem pengelolaan SDM dengan strategi bisnis yang bertujuan meningkatkan daya saing dan akselerasi kinerja Perseroan.

Human Capital Management System

Human Capital Management System (HCMS) is an information system designed to support human capital management. This system was developed by WIKA Group and integrated with all its subsidiaries, including WEGE. HCMS functions to assist employees and the Company in carrying out various personnel administration processes and providing access to information related to personnel.

Employees can access HCMS through the Company's internal website. Information that can be accessed through this application contains:

- Employee Personal Data: Basic information owned by each employee.
- Performance Management: Evaluation of employee competency and performance achievement.
- Training and Development: Information related to training programs that have been attended.
- Other Information: Additional data relevant to personnel.

In addition, the Employee Self-Service module in HCMS allows employees to apply for leave, work, claims, loans, cooperatives, and monitor the status of official travel letters independently.

HCMS Information Technology System Development

As part of technology-based development, the Human Capital Division collaborates with the Information Technology Division to present the Employee Battery system on the My-WEGE application. This system provides various information that can be accessed by employees, including:

1. Individual Development Plan (IDP)
2. Performance Category
3. Mandatory Training Information
4. Individual Career Plan (ICP)
5. Assessment Report
6. Grading & Quadrant Remuneration
7. Employee Performance
8. Performance Criteria (KUK)
9. Job Track Record

This system is designed to support transparency, efficiency, and ease of access in human capital management, while strengthening the Company's commitment to sustainable employee development.

HUMAN CAPITAL DIVISON

Human Capital Division WEGE plays role of the person in charge for the management and development of human capitals (HR) in the Company. This responsibility covers the entire HR management process, from strategic planning to evaluation of the implementation of ongoing work programs. In addition, the Human Capital Division has also integrated the HR management system with business strategies aimed at increasing the Company's competitiveness and performance acceleration.

Sebagai organ pendukung utama dalam pengembangan organisasi, *Human Capital Division* memiliki fungsi strategis yang disesuaikan dengan arah dan proses bisnis Perseroan. Beberapa fungsi utama *Human Capital Division* meliputi:

- Perencanaan dan pemenuhan kapasitas *human capital* sesuai dengan kebutuhan dan kapabilitas Perseroan.
- Meningkatkan keterlibatan (*engagement)* karyawan melalui inisiatif, strategi, dan program yang komprehensif.
- Mengkaji dan mengimplementasikan konsep manajemen mutakhir, termasuk pengembangan budaya Perseroan, sistem remunerasi, hubungan industrial, serta pengelolaan *human capital* berbasis teknologi informasi.
- Mengoptimalkan kaderisasi, pengembangan, dan pemeliharaan *human capital* sesuai dengan arah perkembangan Perseroan.

Struktur Human Capital Division

Human Capital Division terdiri dari dua departemen utama, yaitu:

1. *Talent and Development Department*
    - Pengembangan Organisasi
    - Rekrutmen dan Penempatan
    - Pembelajaran dan Pengembangan
    - Manajemen Karir dan Talenta
2. *Compensation and Benefit Department*
    - Manajemen Performa
    - Sistem Pengharkatan
    - Hubungan Industrial

Dengan struktur yang terorganisasi dan peran strategis tersebut, *Human Capital Division* Perseroan terus berupaya untuk mendukung pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan melalui pengelolaan SDM yang terencana dan berkelanjutan.

REKRUTMEN DAN PENEMPATAN

Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan terencana adalah salah satu elemen kunci keberhasilan operasional dan strategi jangka panjang perusahaan. Dalam mendukung bisnis dan pertumbuhan Perseroan, strategi rekrutmen dan penempatan yang efektif menjadi fokus utama. Perseroan tidak hanya memastikan kecukupan jumlah tenaga kerja, tetapi juga penempatan yang tepat berdasarkan tugas, fungsi, dan tanggung jawab, guna memastikan bahwa setiap individu dapat memberikan kontribusi optimal bagi perusahaan.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Perseroan melaksanakan kajian menyeluruh terkait Rencana Kebutuhan SDM. Kajian ini mempertimbangkan potensi proyek baru, arah pengembangan bisnis jangka panjang, produktivitas, kapasitas, dan kapabilitas organisasi, sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Pemenuhan kebutuhan SDM dilakukan melalui proses rekrutmen, dengan pendekatan yang komprehensif untuk memastikan tercapainya target yang ditetapkan.

As the main supporting organ in organizational development, Human Capital Division has strategic functions that are adjusted to the direction and business processes of the Company. Some of the main functions of the Human Capital Division encompass:

- Planning and fulfilling human capital capacity according to the Company's needs and capabilities.
- Increasing employee engagement through comprehensive initiatives, strategies, and programs.
- Reviewing and implementing the latest management concepts, including the development of the Company's culture, remuneration system, industrial relations, and information technology-based human capital management.
- Optimizing the cadreship, development, and maintenance of human capital in accordance with the direction of the Company's development.

Human Capital Division Structure

The Human Capital Division consists of two main departments, namely:

1. Talent and Development Department
    - Organizational Development
    - Recruitment and Placement
    - Learning and Development
    - Career and Talent Management
2. Compensation and Benefit Department
    - Performance Management
    - Reward System
    - Industrial Relations

By the organized structure as well as the strategic role, the Company's Human Capital Division continues to strive to support the achievement of the company's long-term goals through planned and sustainable HR management.

RECRUITMENT AND PLACEMENTQUALITY AND PLANNED

human capitals (HR) are one of the key elements of the company's operational success and long-term strategy. In supporting the Company's business and growth, effective recruitment and placement strategies are the main focus. The Company to not merely ensure sufficient workforce numbers, but also the proper placement based on tasks, functions, and responsibilities, to ensure that each individual can provide optimal contribution to the company.

As part of the initiative, the Company conducted a comprehensive study related to the HR Needs Plan. This study considers the potential for new projects, long-term business development directions, productivity, capacity, and organizational capabilities, as stated in the Company's Work Plan and Budget (RKAP). Fulfilment of HR needs is carried out through a recruitment process, with a comprehensive approach to ensure the achievement of the set targets.

Untuk menjaring talenta terbaik dari berbagai latar belakang, Perseroan mengimplementasikan proses seleksi yang sistematis, mencakup:
1. Seleksi Administrasi
2. Tes Psikologi
3. *Focus Group Discussion* (FGD)
4. Wawancara Teknis
5. Wawancara Personalia
6. Tes Kesehatan.

Calon karyawan yang berhasil melewati proses seleksi diwajibkan mengikuti program *On The Job Training* (OJT) selama enam bulan. Program ini dirancang untuk membekali calon karyawan dengan pemahaman mendalam tentang sistem manajemen WEGE, nilai-nilai perusahaan AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif), serta keterampilan dasar melalui pelatihan di kelas dan praktik lapangan. Selain itu, program ini mencakup pembentukan kerja sama tim (*team building*), pelatihan kedisiplinan, dan penyusunan makalah yang harus dipresentasikan sebagai bagian dari evaluasi akhir. Selama program OJT, setiap calon pegawai akan didampingi oleh mentor yang memberikan arahan dan bimbingan secara langsung.

Untuk menjaga objektivitas hasil seleksi, Perseroan melibatkan lembaga independen dan tim rekrutmen yang terdiri dari perwakilan dari berbagai fungsi atau unit kerja. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), memastikan transparansi dan akuntabilitas di setiap tahapan.

Sesuai RKAP, Perseroan menargetkan jumlah pegawai di tahun 2024 sebanyak 540 orang. Namun, realisasi jumlah pegawai di tahun 2024 tercatat sebanyak 500 orang. Perbedaan ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk mutasi dan promosi lintas WIKA Group, pegawai yang memasuki usia pensiun, serta pegawai yang mengundurkan diri.

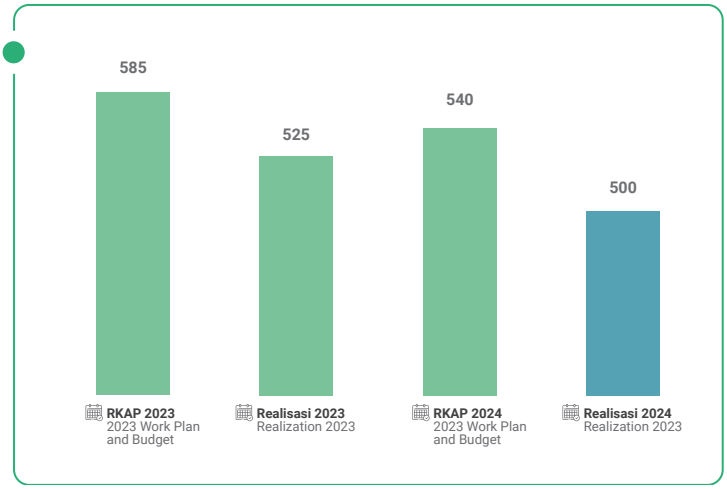
To recruit the best talents from various backgrounds, the Company implements a systematic selection process, comprising:
1. Administrative Selection
2. Psychological Test
3. Focus Group Discussion (FGD)
4. Technical Interview
5. Personnel Interview
6. Health Test

Prospective employees who successfully pass the selection process are required to participate in the On The Job Training (OJT) program for six months. This program is designed to equip prospective employees with an in-depth understanding of the WEGE management system, the company values AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif), and basic skills through classroom training and field practice. In addition, this program includes team building, discipline training, and preparation of papers that must be presented as part of the final evaluation. All through the OJT program, each prospective employee will be accompanied by a mentor who provides direct direction and guidance.

To maintain the objectivity of the selection results, the Company involves an independent institution and a recruitment team consisting of representatives from various functions or work units. This process is carried out by upholding the principles of Good Corporate Governance (GCG), ensuring transparency and accountability at every stage.

In accord with the RKAP, the Company targets the number of employees in 2024 to be 540 people. However, the actual number of employees in 2024 was recorded at 500 people. This difference was due to several factors, including transfers and promotions across WIKA Group, employees entering retirement age, and employees resigning.

Rekrutmen Pegawai 2023-2024
Employee Recruitment 2023-2024



PENGEMBANGAN DAN PELATIHAN KARYAWAN

Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan program pengembangan dan pelatihan karyawan yang dirancang secara terencana, sistematis, dan berkesinambungan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan pengetahuan karyawan di berbagai aspek operasional, sekaligus mendukung pencapaian target bisnis secara berkelanjutan. Setiap tahun, Perseroan memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia melalui program pelatihan yang terkoordinasi, terarah, dan terukur guna menciptakan tenaga kerja yang andal dan berdaya saing tinggi.

Perseroan juga memandang bahwa penerapan prinsip kesetaraan dalam kesempatan kerja merupakan elemen penting dalam mendorong pertumbuhan perusahaan. Oleh karena itu, Perseroan berkomitmen untuk memberikan peluang yang setara kepada seluruh karyawan, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, atau kondisi individu lainnya. Prinsip ini diterapkan secara konsisten pada seluruh tahap manajemen sumber daya manusia, mulai dari proses rekrutmen, pengembangan kompetensi dan keahlian, hingga penetapan jenjang karier dan kebijakan remunerasi.

Melalui program pelatihan yang inklusif dan berbasis kebutuhan operasional, Perseroan memastikan setiap karyawan memiliki akses untuk mengembangkan potensinya. Dengan demikian, karyawan tidak hanya mampu berkontribusi secara optimal terhadap perusahaan, tetapi juga dapat memenuhi tuntutan perubahan dan tantangan di lingkungan kerja.

Pelatihan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2024 dan diikuti oleh para pejabat serta karyawan Perseroan adalah sebagai berikut:

EMPLOYEE DEVELOPMENT AND TRAINING

The Company is committed to implementing employee development and training programs that are designed in a planned, systematic, and sustainable manner. This program aims to improve employee competency, skills, and knowledge in various operational aspects, while supporting the achievement of business targets in a sustainable manner. Every year, the Company prioritizes human capital development through coordinated, targeted, and measurable training programs to create a reliable and highly competitive workforce.

The Company also views that the application of the principle of equality in employment opportunities is an important element in driving the company's growth. Therefore, the Company is committed to providing equal opportunities to all employees, without distinguishing between ethnicity, religion, race, class, gender, or other individual conditions. This principle is applied consistently at all stages of human capital management, from the recruitment process, competency and expertise development, to determining career levels and remuneration policies.

Through inclusive and operational needs-based training programs, the Company ensures that every employee has access to develop their potential. Therefore, employees are not only able to contribute optimally to the company, but can also meet the demands of change and challenges in the work environment.

The training conducted throughout 2024 and attended by the Company's officials and employees is as follows:

No	Pelatihan Training	Waktu Pelaksanaan Time of Event		Jumlah Hari Number of Days	Penyelenggara Organizer	Jumlah Peserta Number of Participants
		Tanggal Mulai Start Date	Tanggal Selesai End Date			
1	Assessment Soft Competency 10 Januari 2024 Soft Competency Assessment January 10, 2024	8/01/2024	10/01/2024	2	PPM Manajemen	2
2	Pelatihan Professional Pitch Deck Presentation Batch 1 Professional Pitch Deck Presentation Training Batch 1	15/01/2024	16/01/2024	2	Bengkel Slide	27
3	Sertifikasi Qualified Internal Auditor (QIA) Tingkat Lanjutan Qualified Internal Auditor (QIA) Certification Advanced Level	22/01/2024	3/02/2024	12	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)	1

No	Pelatihan Training	Waktu Pelaksanaan Time of Event		Jumlah Hari Number of Days	Penyelenggara Organizer	Jumlah Peserta Number of Participants
		Tanggal Mulai Start Date	Tanggal Selesai End Date			
4	Sertifikasi Ahli Muda K3 Konstruksi Youth K3 Construction Expert Certification	20/01/2024	27/01/2024	6	PT Transafe Dharma Persada	18
5	Assessment Soft Competency 10-12 Januari 2024 Soft Competency Assessment January 10-12, 2024	10/01/2024	12/01/2024	1	PPM Manajemen	35
6	Pelatihan Planning & Scheduling Menggunakan Aplikasi Microsoft Project Batch 3 Planning & Scheduling Training Using Microsoft Project Application Batch 3	30/01/2024	2/02/2024	4	PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	27
7	*Group Coaching* Satria Prameswari	18/01/2024	18/01/2024	1	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	9
8	*WFPM Batch 8*	1/01/2024	1/03/2024	24	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	23
9	*Feed Forward Assessment Soft Competency* Februari PPM Feed Forward Assessment Soft Competency February PPM	26/02/2024	29/02/2024	1	PPM Manajemen	35
10	Inhouse Training dan Sertifikasi Bidang Dana Pensiun Inhouse Training and Certification in Pension Fund Field	12/02/2024	20/02/2024	4	Perkumpulan ADPI dan LSPDP	1
11	Kapabilitas Talenta Angkatan 1 Talent Capability Batch 1	15/02/2024	1/03/2024	8	Wikasatrian Pusat Kepemimpinan	2
12	*Managing Result Batch 11*	12/02/2024	16/02/2024	4	Wikasatrian Pusat Kepemimpinan	3
13	Pelatihan Basic Safety Officer Basic Safety Officer Training	27/02/2024	29/02/2024	3	QSHE Division PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	31
14	Pelatihan Cubicost Batch 6 Cubicost Training Batch 6	21/02/2024	23/02/2024	3	PT Glodon Technical Indonesia	15
15	Pelatihan Cubicost Modul Tme Batch 2 Cubicost Training Module Tme Batch 2	19/02/2024	20/02/2024	2	PT Glodon Technical Indonesia	19
16	Pelatihan Customer Satisfaction Index (CSI) Pelaksana Pengelola Usaha (PPU) Customer Satisfaction Index (CSI) Training for Business Management Executors (PPU)	29/02/2024	29/02/2024	1	QSHE Division PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	45
17	Pelatihan Manajemen Kontrak Batch 25 Training for Contract Management Batch 25	28/02/2024	29/02/2024	2	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	5

No	Pelatihan Training	Waktu Pelaksanaan Time of Event		Jumlah Hari Number of Days	Penyelenggara Organizer	Jumlah Peserta Number of Participants
		Tanggal Mulai Start Date	Tanggal Selesai End Date			
18	Pelatihan Refreshment Fungsi Komersial dan Fungsi Keuangan Batch 1 Training for Refreshment of Commercial and Financial Functions Batch 1	6/02/2024	7/02/2024	2	PMO & Risk Management Division PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	36
19	Pelatihan Refreshment Fungsi Komersial dan Fungsi Keuangan Batch 2 Training for Refreshment of Commercial and Financial Functions Batch 2	15/02/2024	16/02/2024	2	PMO & Risk Management Division PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	32
20	Pelatihan Refreshment QPASS Training for Refreshment of QPASS	1/02/2024	1/02/2024	1	QSHE Division PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	48
21	Seminar Bulan K3 OSH Month Seminar	13/02/2024	13/02/2024	1	QSHE Division PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	92
22	Sertifikasi Certified Public Private Partnerships Program (CP3P) Foundation Certification Of Certified Public Private Partnerships Program (CP3P) Foundation	20/02/2024	27/02/2024	4	APMG International	1
23	Sertifikasi Kemenaker Ahli Muda K3 Konstruksi Certification of Ministry of Manpower for Young OSH Construction Experts	18/02/2024	20/02/2024	2	PT Mitra Dinamis Yang Utama	15
24	Sertifikasi Qualified Internal Auditor (QIA) Tingkat Manajerial Certification of Qualified Internal Auditor (QIA) Managerial Level	19/02/2024	28/02/2024	9	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)	1
25	Sosialisasi QMSL Fungsi SCM Socialization of QMSL SCM Function	20/02/2024	20/02/2024	1	QSHE Division PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	74
26	Talkshow Bulan K3 Talkshow of OSH Month	13/02/2024	13/02/2024	1	QSHE Division PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	92
27	Technical Advisory Group dalam Greenship Solution Endorsement 1.0 Technical Advisory Group in Greenship Solution Endorsement 1.0	21/02/2024	21/02/2024	1	GBCI	2
28	*Feed Forward Assessment Soft Competency* Maret PPM Feed Forward Assessment Soft Competency March PPM	1/03/2024	4/03/2024	1	PPM Manajemen	2
29	Pelatihan Business Presentation and Data Visualization Business Presentation and Data Visualization Training	4/03/2024	5/03/2024	2	Bengkel Slide	27

No	Pelatihan Training	Waktu Pelaksanaan Time of Event		Jumlah Hari Number of Days	Penyelenggara Organizer	Jumlah Peserta Number of Participants
		Tanggal Mulai Start Date	Tanggal Selesai End Date			
30	Pelatihan Catatan Penyimpangan & Permintaan Tindakan Korektif dan Preventif (CP-PTKP) Training of Deviation Notes & Requests for Corrective and Preventive Actions (CP-PTKP)	5/03/2024	5/03/2024	1	QSHE Division PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	45
31	Pelatihan Cubicost Lanjutan Batch 4 Advanced Cubicost Training Batch 4	7/03/2024	8/03/2024	2	PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.	11
32	Pelatihan Cubicost Modul TBQ Batch 1 Cubicost Training Module TBQ Batch 1	4/03/2024	4/03/2024	1	PT Glodon Technical Indonesia	5
33	Pelatihan Environmental, Social, and Governance (ESG) Awareness Environmental, Social, and Governance (ESG) Awareness Training	15/03/2024	15/03/2024	1	PT DGI Levner Consulting	31
34	Pelatihan How To Be an Attractive MC How To Be an Attractive MC Training	7/03/2024	7/03/2024	1	Sekretariat Perusahaan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.	44
35	Pelatihan Quality Control Circle (QCC) Quality Control Circle (QCC) Training	26/03/2024	26/03/2024	1	QSHE Division PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	45
36	Pelatihan Supervisory Skill Supervisory Skill Training	5/03/2024	15/03/2024	4	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	6
37	Assessment Soft Competency Soft Competency Assessment	24/04/2024	24/04/2024	1	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	1
38	*Managing Result Batch 12*	29/04/2024	3/05/2024	4	Wikasatrian Pusat Kepemimpinan	5
39	Pelatihan dan Sertifikasi Certified Procurement Specialist (CPSP) Certified Procurement Specialist (CPSP) Training and Certification	17/04/2024	8/05/2024	13	Lembaga Pengembangan dan Kompetensi Nasional (LPKN)	1
40	Pelatihan Peningkatan Kapabilitas Manajer Madya Angkatan 12 Middle Manager Capability Improvement Training Batch 12	30/04/2024	21/06/2024	24	Wikasatrian Pusat Kepemimpinan	10
41	*Sharing Knowledge Contractor All Risk (CAR)*	29/04/2024	29/04/2024	1	SCM Division PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	93
42	Uji Keahlian Internal Internal Expertise Test	23/04/2024	26/04/2024	1	PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.	10

No	Pelatihan Training	Waktu Pelaksanaan Time of Event		Jumlah Hari Number of Days	Penyelenggara Organizer	Jumlah Peserta Number of Participants
		Tanggal Mulai Start Date	Tanggal Selesai End Date			
43	Pelatihan Academy Bootcamp Business Intelligence Analyst Academy Bootcamp Business Intelligence Analyst Training	1/04/2024	1/09/2024	48	PT Lentera Bangsa Benderang	1
44	Pelatihan dan Sertifikasi Warehouse Management Warehouse Management Training and Certification	21/05/2024	22/05/2024	2	Supply Chain Indonesia	2
45	Pelatihan Greenship Professional Greenship Professional Training	13/05/2024	21/05/2024	5	GBCI	1
46	Pelatihan Negotiation Skill Negotiation Skill Training	15/05/2024	15/05/2024	1	PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.	20
47	Pelatihan Pengendalian Dokumen dan Penyimpanan Rekaman Document Control and Record Storage Training	2/05/2024	2/05/2024	1	QSHE Division PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	42
48	Pelatihan Penggunaan Alat Ukur QPASS QPASS Measuring Instrument Use Training	15/05/2024	15/05/2024	1	QSHE Division PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	42
49	Pelatihan Refreshment Aplikasi Mobile Inspeksi (MOI) Mobile Inspection Application Refreshment Training (MOI)	3/05/2024	3/05/2024	1	QSHE Division PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	48
50	Sertifikasi Ahli Madya K3 Konstruksi K3 Construction Associate Expert Certification	2/05/2024	2/05/2024	1	PT Menuju Karir Gemilang	4
51	Sertifikasi Petugas Peran Kebakaran Kelas D Kemenaker Certification of Fire Officers Class D Ministry of Manpower	20/05/2024	23/05/2024	4	PT Mitra Dinamis Yang Utama	20
52	Workshop Chief Financial Officer (CFO) Chief Financial Officer (CFO) Workshop	20/05/2024	21/05/2024	2	Ilmukeuangan.com	2
53	Workshop Energy Review Energy Review Workshop	7/05/2024	8/05/2024	2	PT Mitra Sistem Sinergi	37
54	Assessment Soft Competency Soft Competency Assessment	11/06/2024	11/06/2024	1	Experd Consultant	1
55	Forum Diskusi Aktivitas Logistik SCM Konstruksi SCM Construction Logistics Activity Discussion Forum	5/06/2024	5/06/2024	1	SCM Division PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	52
56	Pelatihan dan Sertifikasi Cobit 2019 Cobit 2019 Training and Certification	6/06/2024	7/06/2024	2	Inixindo	1

No	Pelatihan Training	Waktu Pelaksanaan Time of Event		Jumlah Hari Number of Days	Penyelenggara Organizer	Jumlah Peserta Number of Participants
		Tanggal Mulai Start Date	Tanggal Selesai End Date			
57	Pelatihan dan Sertifikasi Qualified Risk Management Professional (QRMP) Qualified Risk Management Professional (QRMP) Training and Certification	24/06/2024	28/06/2024	5	PPM Manajemen	1
58	Pelatihan Metode Kerja Finishing Basah Wet Finishing Work Method Training	26/06/2024	26/06/2024	1	QSHE Division PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	42
59	Pelatihan Pengantar Mutu Qa/Qc Qa/Qc Quality Introduction Training	4/06/2024	4/06/2024	1	QSHE Division PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	38
60	Pelatihan Pengantar Mutu QA/QC Lanjutan Advanced QA/QC Quality Introduction Training	25/06/2024	25/06/2024	1	QSHE Division PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	38
61	Uji Keahlian Internal Hard Competency Internal Hard Competency Skill Test	4/06/2024	12/06/2024	1	PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.	17
62	Webinar Corporate Culture Specialist Corporate Culture Specialist Webinar	13/06/2024	13/06/2024	1	ACT Consulting	2
63	Webinar Penghitungan Emisi Karbon Industri & Skema Perdagangan Karbon Industrial Carbon Emission Calculation Webinar & Carbon Trading Scheme	3/06/2024	3/06/2024	1	PT Satu Teknologi Asia	8
64	Assessment Soft Competency Experd Juli Experd Soft Competency Assessment July	22/07/2024	31/07/2024	1	Experd Consultant	26
65	Assessment Soft Competency PPM Juli PPM Soft Competency Assessment July	29/07/2024	9/08/2024	1	PPM Manajemen	18
66	Kontrak Manajemen Batch 26 Contract Management Batch 26	23/07/2024	24/07/2024	2	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	10
67	*Managing Result Batch 13*	9/07/2024	17/07/2024	4	Wikasatrian Pusat Kepemimpinan	9
68	Pelatihan Cubicost Batch 7 Cubicost Training Batch 7	10/07/2014	12/07/2024	3	PT Glodon Technical Indonesia	13
69	Pelatihan Cubicost Batch 8 Cubicost Training Batch 8	17/07/2024	19/07/2024	3	PT Glodon Technical Indonesia	10
70	Pelatihan Cubicost Modul Tme Batch 3 Cubicost Training Module Tme Batch 3	15/07/2024	16/07/2024	2	PT Glodon Technical Indonesia	2
71	Pelatihan QPASS QPASS Training	23/07/2024	23/07/2024	1	QSHE Division PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	39

No	Pelatihan Training	Waktu Pelaksanaan Time of Event		Jumlah Hari Number of Days	Penyelenggara Organizer	Jumlah Peserta Number of Participants
		Tanggal Mulai Start Date	Tanggal Selesai End Date			
72	Pengukuhan Calon Wisudawan QIA dan Konferensi Auditor Internal 2024 Inauguration of QIA Graduates and Internal Auditor Conference 2024	10/07/2024	11/07/2024	2	Dewan Sertifikasi QIA dan Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)	1
73	*PMP Study Group*			12	PMI Chapter Indonesia	5
74	Program Sertifikasi Witness BNSP – LSP Wika BNSP Witness Certification Program – LSP Wika	27/07/2024	27/07/2024	1	LSP Wika	4
75	Seminar Nasional Skema PPP pada Penyelenggaraan Proyek EPC Infrastruktur Indonesia National Seminar on PPP Scheme in The Implementation of Indonesian Infrastructure EPC Projects	17/07/2024	17/07/2024	1	Gabungan Perusahaan Nasional Rancangbangun Indonesia	1
76	Workshop Praktik dan Kepatuhan Hukum dalam Pengadaan Barang Jasa Workshop on Legal Practice and Compliance in Procurement of Goods and Services	11/07/2024	11/07/2024	1	Hukumonline	2
77	Key User Training SAP Tahap 2 SAP Key User Training Phase 2	6/08/2024	9/08/2024	4	PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	41
78	Pelatihan Auditor Internal Sistem Manajemen Mutu LSP Internal Auditor Training of LSP Quality Management System	26/08/2024	29/08/2024	4	LSP Wika	1
79	Pelatihan dan Sertifikasi Certified Securities Analyst Certified Securities Analyst Training and Certification	3/08/2024	5/10/2024	10	CSA Institute	1
80	Pelatihan Finishing Kering Plafond Gypsum Gypsum Ceiling Dry Finishing Training	20/08/2024	20/08/2024	1	QSHE Division PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	36
81	Pelatihan KPI: Aligning Organization's Performance KPI Training: Align Organization's Performance	13/08/2024	14/08/2024	2	PPM Manajemen	14
82	Pelatihan Mock Up Mock Up Training	7/08/2024	7/08/2024	1	QSHE Division PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	10
83	Pelatihan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan Awareness SNI ISO 37001:2016 Training Anti-Bribery Management System Awareness	15/08/2024	16/08/2024	2	PT Sucofindo	35

No	Pelatihan Training	Waktu Pelaksanaan Time of Event		Jumlah Hari Number of Days	Penyelenggara Organizer	Jumlah Peserta Number of Participants
		Tanggal Mulai Start Date	Tanggal Selesai End Date			
84	Satria Pratama Batch 26	27/08/2024	29/08/2024	3	Wikasatrian Pusat Kepemimpinan	4
85	Seminar dan Short Course HAKI 2024 2024 HAKI Seminar and Short Course	20/08/2024	22/08/2024	3	HAKI	4
86	Seminar Passive Fire Protection Design pada Material Konstruksi Baja Passive Fire Protection Design Seminar on Steel Construction Materials	9/08/2024	9/08/2024	1	LPJK dan Propan	6
87	Technical Advisory Group Greenship Transit Station Versi 1.0 Technical Advisory Group Greenship Transit Station Version 1.0	9/08/2024	9/08/2024	1	GBCI	2
88	Workshop Sertifikasi Smart Building Smart Building Certification Workshop	9/08/2024	9/08/2024	1	Aptiknas dan Eventcerdas	6
89	Ahli Kontrak Konstruksi (CCCS) Construction Contract Expert (CCCS)	23/09/2024	27/09/2024	5	BUMN I2li	1
90	Assessment Soft Competency LPTUI September LPTUI Soft Competency Assessment September	12/09/2024	25/09/2024	1	LPTUI	23
91	*End User Training SAP Special Case Modul Sales Distribution*	30/09/2024	30/09/2024	1	IT Division PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	7
92	*Forkabim Workshop Autodesk Construction Cloud*	10/09/2024	10/09/2024	1	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	2
93	*Managing Result Batch 14*	5/09/2024	10/09/2024	4	Wikasatrian Pusat Kepemimpinan	2
94	Pelatihan dan Sertifikasi Qualified Risk Governance Professional (QRGP) Training and Certification Qualified Risk Governance Professional (QRGP)	10/09/2024	12/09/2024	3	PPM Manajemen	2
95	Pelatihan Perancang Kontrak (CCD) Training Contract Designer (CCD)	9/09/2024	12/09/2024	4	BUMN I2li	1
96	Pelatihan Rencana Kerja Mutu QPLAN Training Quality Work Plan QPLAN	25/09/2024	25/09/2024	1	QSHE Division PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	36
97	Pelatihan Work Method Statement (WMS) Training Work Method Statement (WMS)	11/09/2024	11/09/2024	1	QSHE Division PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	67
98	*Refreshment Work Breakdown Structure (WBS)*	6/09/2024	6/09/2024	1	IT Division PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	11

No	Pelatihan Training	Waktu Pelaksanaan Time of Event		Jumlah Hari Number of Days	Penyelenggara Organizer	Jumlah Peserta Number of Participants
		Tanggal Mulai Start Date	Tanggal Selesai End Date			
99	*User Acceptance Test (UAT) SAP*	9/09/2024	20/09/2024	9	IT Division PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	17
100	*Workshop TKDN*	25/09/2024	25/09/2024	1	SCM Division PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	81
101	Assessment Soft Competency Experd Oktober Assessment Soft Competency Experd October	28/10/2024	28/10/2024	1	Experd	24
102	Assessment Soft Competency PPM Oktober Assessment Soft Competency PPM October	29/10/2024	29/10/2024	1	PPM Manajemen	11
103	End User Training Pengisian WBS SAP End User Training WBS SAP Filling	7/10/2024	7/10/2024	1	Information Technology Division PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	37
104	*End User Training SAP All Modul*	21/10/2024	25/10/2024	4	Information Technology Division PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	72
105	Pelatihan Cubicost Batch 10 Cubicost Training Batch 10	9/10/2011	11/10/2024	3	PT Glodon Technical Indonesia	13
106	Pelatihan Cubicost Batch 11 Cubicost Training Batch 11	16/10/2024	18/10/2024	3	PT Glodon Technical Indonesia	6
107	Pelatihan Cubicost Batch 9 Cubicost Training Batch 9	2/10/2024	4/10/2024	3	PT Glodon Technical Indonesia	4
108	Pelatihan Cubicost Modul Tme Batch 4 Cubicost Training Module Tme Batch 4	21/10/2024	22/10/2024	2	PT Glodon Technical Indonesia	4
109	Pelatihan dan Sertifikasi Perancang Kontrak Training and Certification of Contract Designers	16/10/2024	19/10/2024	4	Justitia Training Center	3
110	Pelatihan Pajak Terapan Brevet A&B Terpadu Integrated Brevet A&B Applied Tax Training	16/10/2024	17/01/2025	41	Ikatan Akuntan Indonesia	7
111	Pelatihan Tukang: Lifting dan Rigging Training Workers: Lifting and Rigging	3/10/2024	3/10/2024	1	Corporate Secretariat & QSHE Division PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	31
112	Satria Pratama Batch 28	29/10/2024	31/10/2024	3	Wikasatrian Pusat Kepemimpinan	4

No	Pelatihan Training	Waktu Pelaksanaan Time of Event		Jumlah Hari Number of Days	Penyelenggara Organizer	Jumlah Peserta Number of Participants
		Tanggal Mulai Start Date	Tanggal Selesai End Date			
113	End User Training SAP All Modul Tahap 2 End User Training SAP All Module Stage 2	18/11/2024	21/11/2024	4	Information Technology Division PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	104
114	Key User Training (KUT) SAP Lanjutan Advanced Key User Training (KUT) SAP	13/11/2024	13/11/2024	1	Information Technology Division PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	10
115	Pelatihan Accounting for Consolidation Reporting Accounting for Consolidation Reporting Training	9/11/2024	18/01/2025	12	PPA FEB UI	2
116	Pelatihan Basic Financial Modeling Basic Financial Modeling Training	16/11/2024	30/11/2024	3	PPA FEB UI	2
117	Pelatihan Certified Ethical Hacker (CEH) di Multimatics Certified Ethical Hacker (CEH) Training at Multimatics	18/11/2024	22/11/2024	5	Multimatics	1
118	Pelatihan dan Sertifikasi Certified Risk Governance Professional (CRGP) Certified Risk Governance Professional (CRGP) Training and Certification	12/11/2024	15/11/2024	4	PT RAP	1
119	Pelatihan dan Sertifikasi Certified Risk Management Professional (CRMP) Certified Risk Management Professional (CRMP) Training and Certification	4/11/2024	11/11/2024	5	PT RAP	2
120	Pelatihan *Finance for Finance* Finance for Finance Training	28/11/2024	29/11/2024	2	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	6
121	Pelatihan Microsoft Excel for Accountant Microsoft Excel Training for Accountant	5/11/2024	7/11/2024	3	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)	2
122	Pelatihan Planning & Scheduling Menggunakan Aplikasi Microsoft Project Batch 4 Planning & Scheduling Training Using Microsoft Project Application Batch 4	13/11/2024	15/11/2024	3	PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	20
123	Sertifikasi Qualified Internal Auditor (QIA) Tingkat Dasar Qualified Internal Auditor (QIA) Certification Basic Level	4/11/2024	16/11/2024	12	YPIA	1
124	Workshop Kontrak Manajemen Management Contract Workshop	11/11/2024	12/11/2024	2	School of Quantity Surveying	85

No	Pelatihan Training	Waktu Pelaksanaan Time of Event		Jumlah Hari Number of Days	Penyelenggara Organizer	Jumlah Peserta Number of Participants
		Tanggal Mulai Start Date	Tanggal Selesai End Date			
125	*Corporate Finance Batch 11*	11/12/2024	13/12/2024	3	Wikasatrian Pusat Kepemimpinan	1
126	Feed Forward Assessment Soft Competency Desember PPM Feed Forward Assessment Soft Competency December PPM	19/12/2024	20/12/2024	1	PPM Manajemen	19
127	Feed Forward Assessment Soft Competency Desember Internal Feed Forward Assessment Soft Competency December Internal	9/12/2024	20/12/2024	1	PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	32
128	Pelatihan Cubicost Lanjutan Batch 5 Cubicost Advanced Training Batch 5	17/12/2024	18/12/2024	2	PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	12
129	Pelatihan dan Sertifikasi Qualified Risk Management Professional (QRMP) Qualified Risk Management Professional (QRMP) Training and Certification	9/12/2024	13/12/2024	5	PPM Manajemen	1
130	Pelatihan *Finance for Non Finance* Finance for Non Finance Training	10/12/2024	11/12/2024	2	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	4
131	Pelatihan Ketinggian dan Perancah Height and Scaffolding Training	20/12/2024	20/12/2024	1	PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	25
132	Perpanjangan SKA Kemnaker Extension of SKA of The Ministry of Manpower	3/12/2024	3/12/2024	1	TBC	38
133	Satria Pratama Batch 29	18/12/2024	20/12/2024	3	Wikasatrian Pusat Kepemimpinan	1
134	*In-House Training Certified Property Analyst (IT-CPA)*	5/12/2024	6/12/2024	2	Panangian School of Property	20

PROGRAM PENGEMBANGAN KARYAWAN

Program pengembangan Perseroan terbagi ke dalam empat kategori utama, yaitu pengembangan *soft skill*, *hard skill*, seminar, dan sertifikasi. Realisasi pelaksanaan program pengembangan sepanjang tahun 2024 berdasarkan kategori tersebut dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

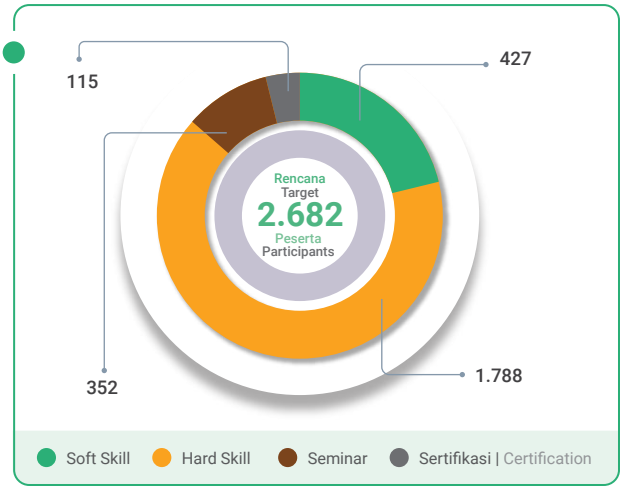
EMPLOYEE DEVELOPMENT PROGRAM

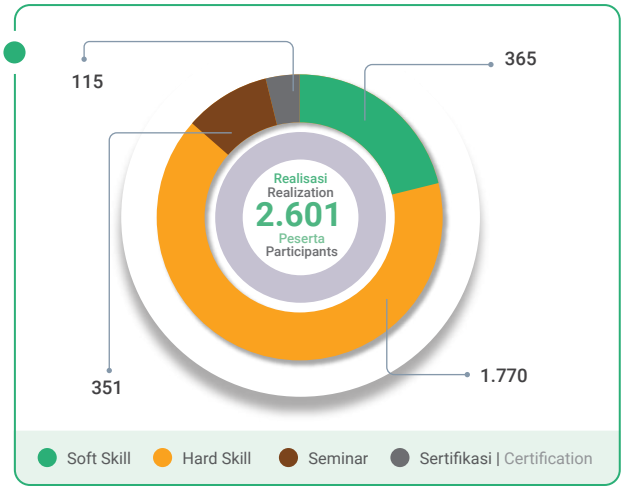
The Company's development program is divided into four main categories, namely soft skill development, hard skill development, seminars, and certification. The realization of the implementation of development programs throughout 2024 based on these categories can be seen in the following table and graph:

Pengembangan Karyawan 2023-2024 (orang/peserta)
Employee Development 2023-2024 (person/participant)

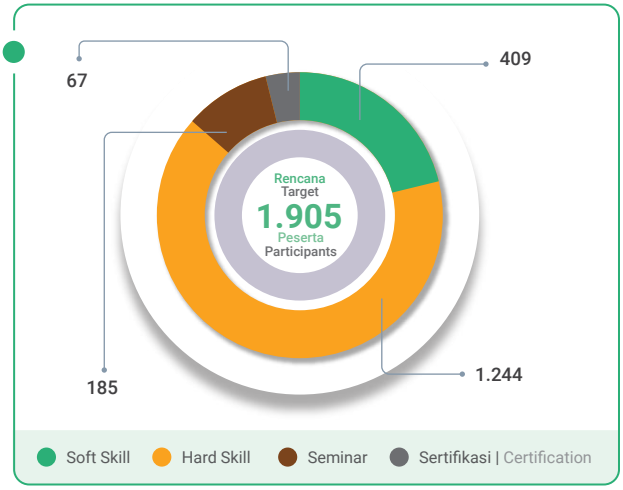
Pengembangan Karyawan Employee Development	2024		2023	
	Rencana Terget	Realisasi Realization	Rencana Terget	Realisasi Realization
Soft Skill	427	365	409	397
Hard Skill	1.788	1.770	1.244	1.216
Seminar	352	351	185	181
Sertifikasi | Certification	115	115	67	67
Jumlah Peserta Number of Participants	2.682	2.601	1.905	1.861

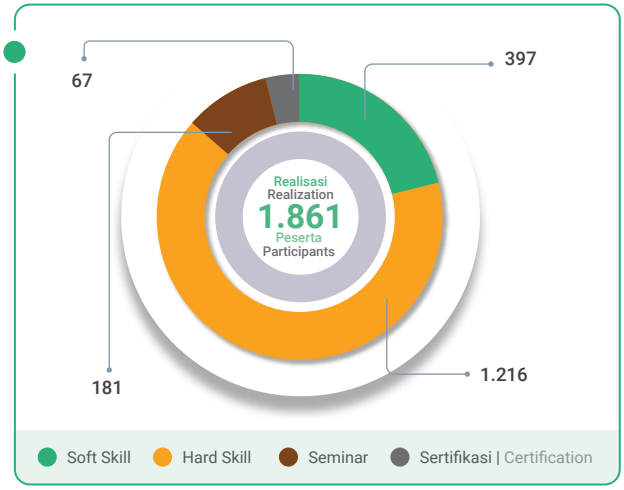
Target dan Realisasi Pengembangan Karyawan 2024
Target and Realization Employee Development Plan 2024





Target dan Realisasi encana Pengembangan Karyawan 2023
Target and Realization Employee Development Implementation 2023





BIAYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

Perseroan telah merealisasikan alokasi biaya untuk pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan karyawan selama tahun 2024 sebesar Rp 1.983.318.438. Investasi ini mencerminkan komitmen Perseroan dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia secara berkelanjutan.

Adapun rincian biaya pengembangan kompetensi karyawan sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

EMPLOYEE COMPETENCY DEVELOPMENT COSTS

The Company has realized the cost allocation for the implementation of employee training and development programs during 2024 amounting to Rp1,983,318,438. This investment reflects the Company's commitment to improving human capital competencies in a sustainable manner.

The details of employee competency development costs throughout 2024 are as follows:

Biaya Pengembangan Kompetensi Karyawan 2024
Employee Competency Development Costs 2024

No	Program Program	Biaya (Rp) Budget (Rp)
1	Pendidikan Reguler Regular Education	542.583.564
2	Pendidikan Lanjutan Advanced Education	140.700.000
3	Pelatihan Dasar Basic Training	564.526.072
4	Asesmen dan Implementasi Budaya Culture Assessment and Implementation	582.808.802
5	Pengembangan Direksi dan Komisaris Development of the Board of Directors and Board of Commissioners	152.700.000
Jumlah		1.983.318.438

RENCANA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEDEPAN

Dalam menghadapi tantangan industri yang terus berkembang dan perubahan dinamis dalam lingkungan bisnis, Perseroan menyadari pentingnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai salah satu pilar utama keberlanjutan Perseroan. Perencanaan strategis yang berkesinambungan menjadi dasar dalam memastikan bahwa setiap karyawan memiliki kompetensi dan kapabilitas yang relevan untuk mendukung pencapaian visi Perseroan.

Sejalan dengan Rencana Jangka Panjang (RJP) *Human Capital*, di tahun 2025 WEGE terus mempercepat implementasi program pengembangan karyawan. Program ini dirancang untuk mengantisipasi dinamika pasar dan kemajuan teknologi, dengan fokus yang seimbang pada peningkatan kompetensi teknis serta pengembangan *soft skills*. Keterampilan seperti kepemimpinan, kolaborasi tim, dan adaptabilitas menjadi prioritas utama dalam membangun SDM yang tangguh dan inovatif. Melalui pelatihan intensif, kursus interaktif, dan pengalaman praktik langsung, karyawan WEGE didorong untuk memperluas wawasan dan mengasah kemampuan yang selaras dengan kebutuhan bisnis masa kini dan masa depan.

FUTURE HUMAN CAPITALS DEVELOPMENT PLAN

In facing the challenges of the ever-growing industry and dynamic changes in the business environment, the Company realizes the importance of human capital (HR) development as one of the main pillars of the Company's sustainability. Continuous strategic planning is the basis for ensuring that every employee has the relevant competencies and capabilities to support the achievement of the Company's vision.

In conformity with the Human Capital Long-Term Plan (RJP), in 2025 WEGE continues to accelerate the implementation of employee development programs. This program is designed to anticipate market dynamics and technological advances, with a balanced focus on improving technical competencies and developing soft skills. Skills such as leadership, team collaboration, and adaptability are top priorities in building resilient and innovative HR. Through intensive training, interactive courses, and hands-on practical experience, WEGE employees are encouraged to broaden their horizons and hone their skills in line with current and future business needs.

Selain itu, pengembangan SDM di WEGE juga bertujuan membangun budaya kerja yang kolaboratif dan inklusif. Inisiatif ini diwujudkan melalui penguatan jaringan komunikasi, fasilitasi pertukaran pengetahuan, serta promosi kolaborasi lintas-fungsional yang didasari oleh nilai-nilai utama perusahaan, yaitu AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif). Dengan pendekatan ini, Perseroan memastikan bahwa setiap karyawan mendapatkan kesempatan yang setara untuk berkembang, berkontribusi maksimal, dan menjadi bagian dari perjalanan menuju keberhasilan organisasi secara berkelanjutan.

Furthermore, HR development at WEGE also aims to build a collaborative and inclusive work culture. This initiative is realized through strengthening communication networks, facilitating knowledge exchange, and promoting cross-functional collaboration based on the company's core values, namely AKHLAK (Trusted, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, and Collaborative). With this approach, the Company ensures that every employee gets an equal opportunity to develop, contribute maximally, and be part of the journey towards sustainable organizational success.

PENILAIAN KINERJA

Penilaian kinerja merupakan elemen krusial dalam mendukung pertumbuhan dan pencapaian visi Perseroan. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap karyawan memiliki pemahaman yang jelas mengenai tanggung jawabnya, sekaligus memberikan landasan yang adil dan transparan untuk evaluasi dan pengembangan. Dengan pendekatan berbasis kinerja, Perseroan berkomitmen untuk mendorong peningkatan produktivitas serta pengembangan kompetensi individu yang berkelanjutan.

Dalam rangka menerapkan kebijakan remunerasi, setiap karyawan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan *Key Performance Indicator* (KPI) yang telah ditetapkan secara berjenjang. KPI tersebut ditinjau dan dirumuskan setiap tahun, sejalan dengan tahapan pemenuhan rencana jangka panjang untuk mencapai visi Perseroan. Target dari setiap karyawan dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Karya (KK), yang pencapaiannya dipantau secara berkala setiap enam bulan sekali. Selanjutnya, evaluasi ini akan dirangkum dalam Penilaian Karya (PK) pada akhir tahun sebagai dasar untuk meninjau kebijakan remunerasi.

Selain pencapaian hasil kinerja, peninjauan remunerasi juga mempertimbangkan hasil Evaluasi Kompetensi (EK) dan *assessment* psikologis yang dilakukan kepada setiap karyawan. Bobot EK dan PK disesuaikan dengan kebutuhan strategis Perseroan, di mana EK merepresentasikan kemampuan *hard competency* sementara PK merepresentasikan hasil dan capaian kinerja secara keseluruhan. Pendekatan holistik ini memastikan bahwa aspek kualitas individu dan hasil kerja mendapatkan perhatian yang seimbang dalam proses penilaian kinerja.

Dengan sistem penilaian yang terintegrasi dan berbasis data, Perseroan berupaya menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan individu sekaligus mendukung pencapaian tujuan strategis Perseroan secara berkelanjutan.

PERFORMANCE ASSESSMENT

Performance assessment is a crucial element in supporting the growth and achievement of the Company's vision. This system is designed to ensure that each employee has a clear understanding of their responsibilities, while providing a fair and transparent basis for evaluation and development. With a performance-based approach, the Company is committed to encouraging increased productivity and sustainable development of individual competencies.

In order to implement the remuneration policy, each employee carries out their duties and responsibilities based on the Key Performance Indicators (KPIs) that have been set in stages. The KPIs are reviewed and formulated annually, in conformity with the stages of fulfilling the long-term plan to achieve the Company's vision. The targets of each employee are stated in the form of a Work Agreement (KK), the achievement of which is monitored periodically every six months. Furthermore, this evaluation will be summarized in the Work Assessment (PK) at the end of the year as a basis for reviewing the remuneration policy.

In addition to achieving performance results, the remuneration review also considers the results of the Competency Evaluation (EK) and psychological assessments conducted on each employee. The weight of EK and PK is adjusted to the Company's strategic needs, where EK represents hard competency capabilities while PK represents overall performance results and achievements. This holistic approach ensures that aspects of individual quality and work results receive balanced attention in the performance appraisal process.

With an integrated and data-based appraisal system, the Company strives to create a work environment that supports individual growth while supporting the achievement of the Company's strategic goals in a sustainable manner.

Manajemen Performa

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan, Perseroan menerapkan strategi manajemen performa yang terintegrasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, produktif, dan inovatif. Strategi ini dirancang untuk memastikan keterlibatan dan kesejahteraan karyawan melalui program pengembangan kompetensi, pengukuran performa berbasis data, serta evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas inisiatif yang dijalankan.

Perseroan meyakini bahwa karyawan yang memiliki tingkat keterlibatan tinggi akan lebih termotivasi dan mampu memberikan kontribusi maksimal bagi pencapaian tujuan strategis Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan secara konsisten melaksanakan survei keterlibatan karyawan guna mengidentifikasi area perbaikan dan memantau indikator utama yang mencerminkan kesehatan organisasi.

Pada tahun 2024, hasil Survei Keterlibatan Karyawan mencatat skor keterlibatan sebesar 73%, yang mencerminkan bahwa 73% dari total 500 karyawan yang berpartisipasi dalam survei tergolong sebagai karyawan yang "*Engaged*". Temuan ini menjadi landasan dalam menyusun kebijakan strategis yang berorientasi pada peningkatan keterlibatan dan produktivitas karyawan, sekaligus memperkuat daya saing Perseroan di masa depan.

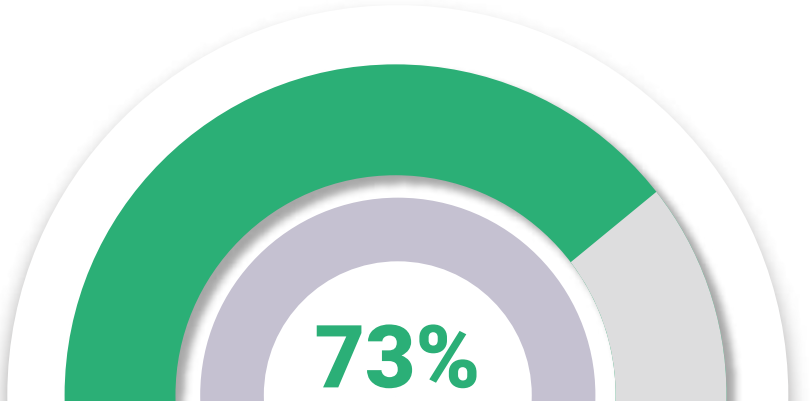
Performance Management

In order to support the achievement of the company's vision and mission, the Company implements an integrated performance management strategy to create a conducive, productive, and innovative work environment. This strategy is designed to ensure employee engagement and well-being through competency development programs, data-based performance measurement, and continuous evaluation of the effectiveness of the initiatives carried out.

The Company believes that employees who have a high level of engagement will be more motivated and able to provide maximum contribution to achieving the Company's strategic goals. Therefore, the Company consistently conducts employee engagement surveys to identify areas of improvement and monitor key indicators that reflect the health of the organization.

In 2024, the results of the Employee Engagement Survey recorded an engagement score of 73%, reflecting that 73% of the total 500 employees who participated in the survey were classified as "Engaged" employees. This outcome is the basis for formulating strategic policies that are oriented towards increasing employee engagement and productivity, while strengthening the Company's competitiveness in the future.

Engagement Score 2024



DARI 500 KARYAWAN 73% ENGAGEMENT (361)
RATA-RATA ENGAGEMENT SCORE 459

500 EMPLOYEES OF 73% ENGAGEMENT (361)
AVERAGE ENGAGEMENT SCORE 459

Terdapat 73% pegawai berada di kategori Engaged didalam Employee Engagement Survey 2024.
There are 73% of employees in the Engaged category in the Employee Engagement Survey 2024

DEMOGRAFI KARYAWAN

Demografi karyawan merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung keberhasilan operasional dan pencapaian visi Perseroan. WEGE memiliki sumber daya manusia dengan latar belakang, keahlian, dan budaya kerja unggul yang menjadi aset strategis dalam mewujudkan tujuan besar Perseroan.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap pengembangan sumber daya manusia, WEGE secara konsisten mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja serta menciptakan organisasi yang efektif, efisien, dan adaptif dalam menghadapi tantangan dunia bisnis.

Hingga 31 Desember 2024, jumlah karyawan Perseroan tercatat sebanyak 500 orang, mengalami penurunan sebesar 4,76% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 525 orang.

Profil demografi karyawan Perseroan dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini.

EMPLOYEE DEMOGRAPHICS

Employee demographics are one of the important aspects in supporting operational success and achieving the Company's vision. WEGE has human capitals with superior backgrounds, expertise, and work culture that are strategic assets in realizing the Company's major goals.

As part of its commitment to human capital development, WEGE consistently encourages improving the quality of its workforce and creating an effective, efficient, and adaptive organization in facing the challenges of the business world.

As of December 31, 2024, the number of the Company's employees was recorded at 500 people, a decrease of 4.76% compared to the previous year which was 525 people.

The demographic profile of the Company's employees can be seen in the following table and graph.

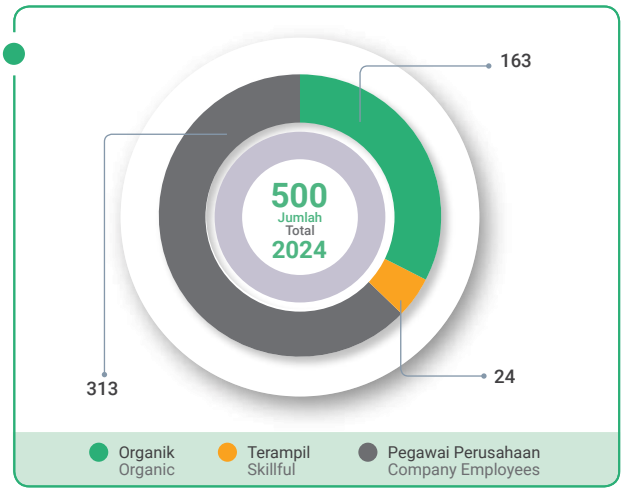
Pergerakan Jumlah Karyawan dalam 5 (Lima) Tahun Terakhir 2020-2024
Graph of Number of Employees in the Last 5 (Five) Years 2020-2024

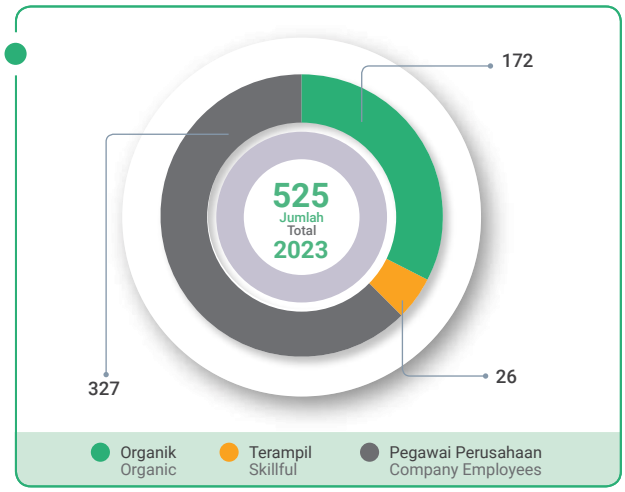
Tahun Year	Jumlah Karyawan Number of Employees
2024	500
2023	525
2022	558
2021	569
2020	583



Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian 2023-2024 (orang)
Composition of Employee Based on Employment Status 2023-2024 (people)

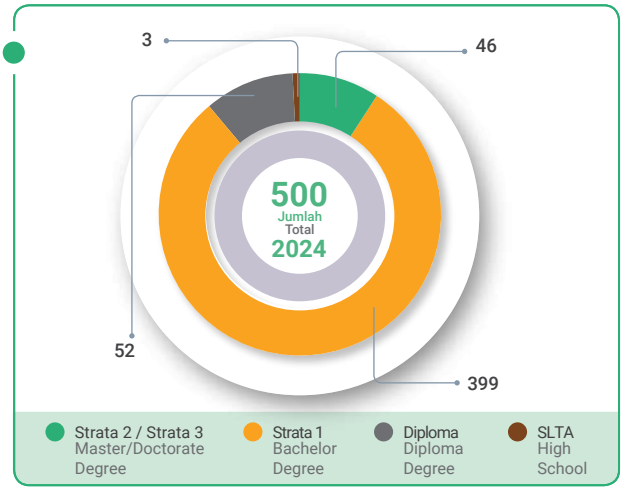
Status Kepegawaian Employee Status	2024			2023		
	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total
Organik Organic	145	18	163	153	19	172
Terampil Skillful	17	7	24	18	8	26
Pegawai Perusahaan Company Employees	278	35	313	289	38	327
Jumlah Total	440	60	500	460	65	525

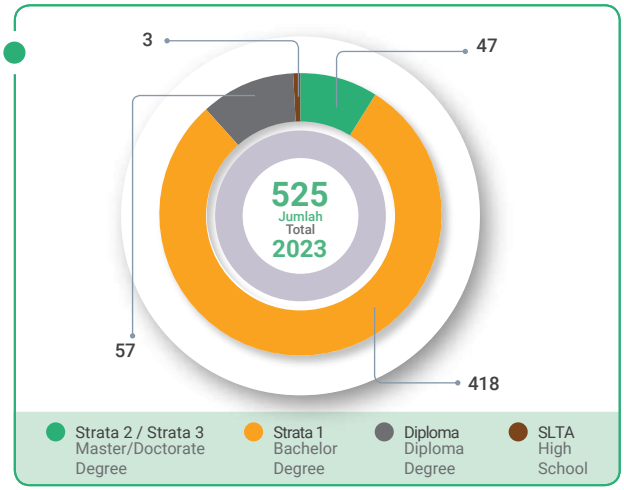




Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan 2023-2024 (orang)
Composition of Employee Based on Education Level 2023-2024 (people)

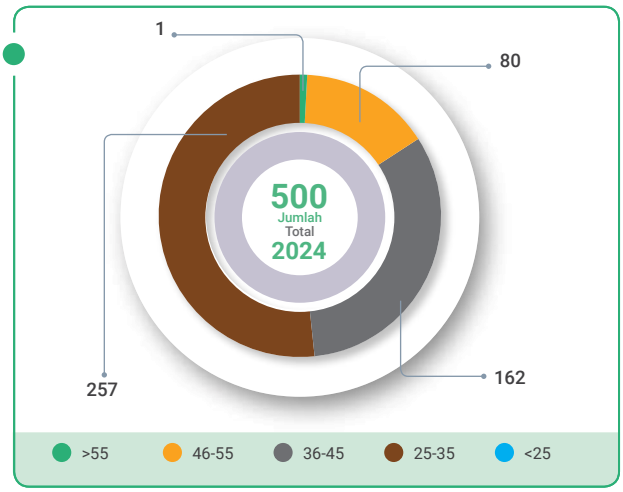
Tingkat Pendidikan Education Level	2024			2023		
	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total
Strata 2 / Strata 3 Master/Doctorate Degree	35	11	46	35	12	47
Strata 1 Bachelor Degree	353	46	399	370	48	418
Diploma Diploma Degree	49	3	52	52	5	57
SLTA High School	3	0	3	3	0	3
Jumlah Total	440	60	500	460	65	525

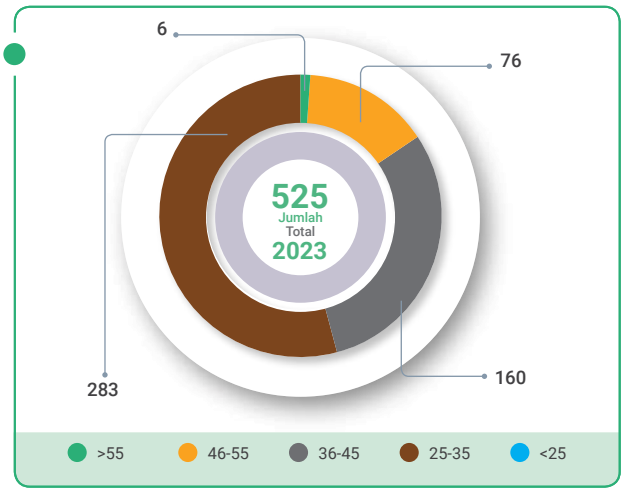




Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia 2023-2024 (orang)
Composition of Employee by Age 2023-2024 (people)

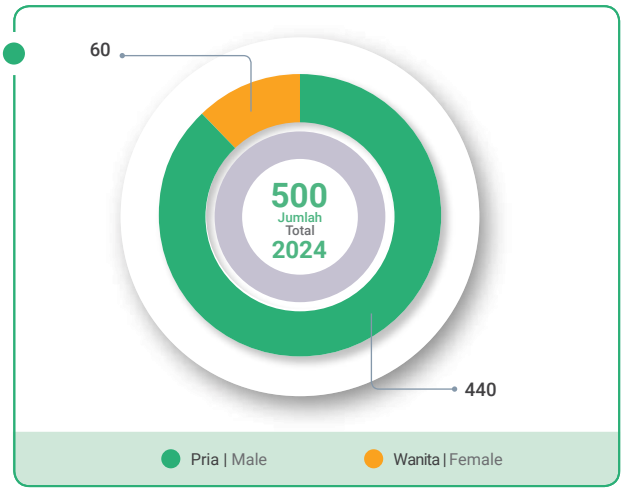
Rentang Usia Age Range	2024			2023		
	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total
>55	1	0	1	6	0	6
46-55	70	10	80	68	8	76
36-45	142	20	162	139	21	160
25-35	227	30	257	247	36	283
<25	0	0	0	0	0	0
Jumlah Total	440	60	500	460	65	525

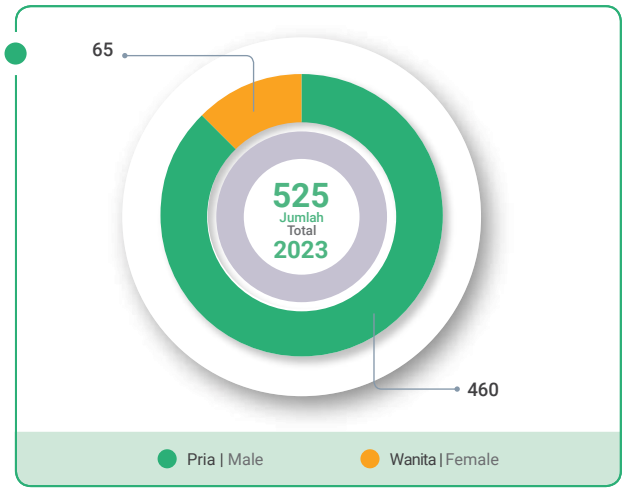




Komposisi Karyawan Berdasarkan Gender/Jenis Kelamin 2023-2024 (orang)
Composition of Employee Based on Gender 2023-2024 (people)

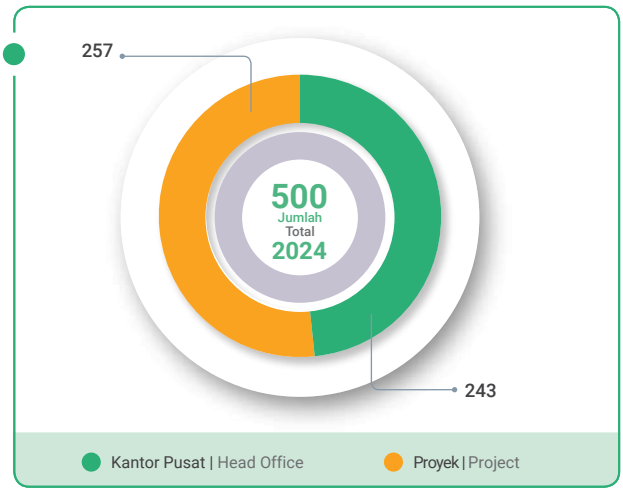
Gender	2024		2023	
	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)
Pria| Male	440	88,00%	460	87,62%
Wanita | Female	60	12,00%	65	12,38%
Jumlah | Total	500	100%	525	100%

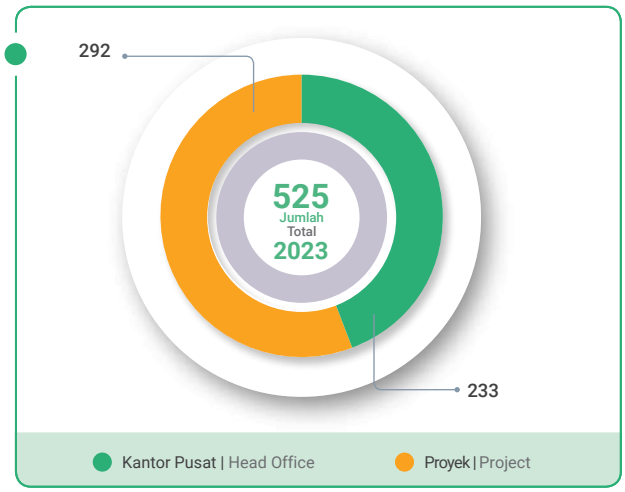




Komposisi Karyawan Berdasarkan Penempatan Kerja 2023-2024 (orang)
Composition of Employee Based on Job Placement 2023-2024 (people)

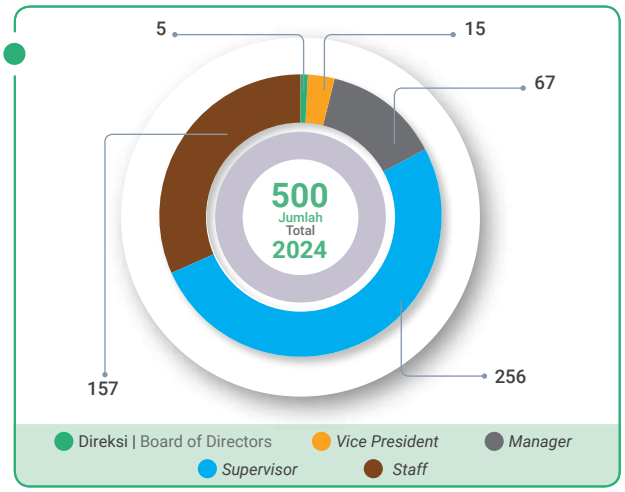
Penempatan Kerja Job Placement	2024			2023		
	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total
Kantor Pusat | Head Office	184	59	243	179	54	233
Proyek | Project	256	1	257	281	11	292
Jumlah | Total	440	60	500	460	65	525

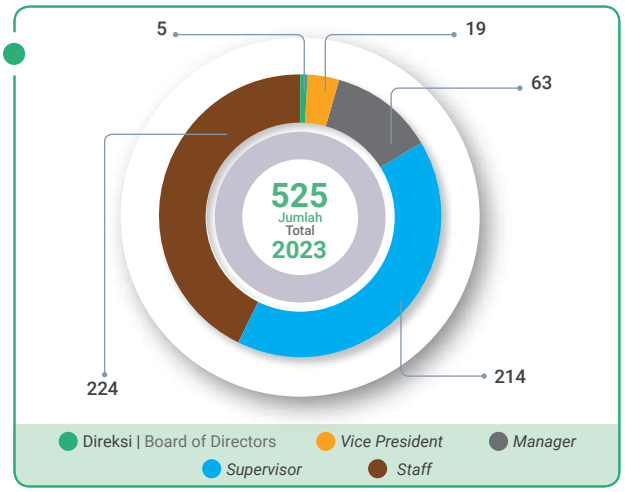




Komposisi Karyawan Berdasarkan Jabatan (2023-2024)
Composition of Employee Based on Position 2023-2024 (people)

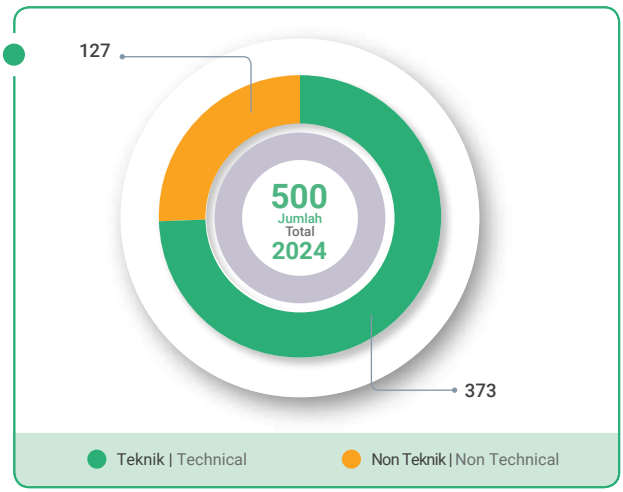
Level Jabatan Position Level	2024			2023		
	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total
Direksi Board of Directors	5	0	5	5	0	5
Vice President	14	1	15	17	2	19
Manager	60	7	67	58	5	63
Supervisor	225	31	256	184	30	214
Staff	136	21	157	196	28	224
Jumlah Total	440	60	500	460	65	525

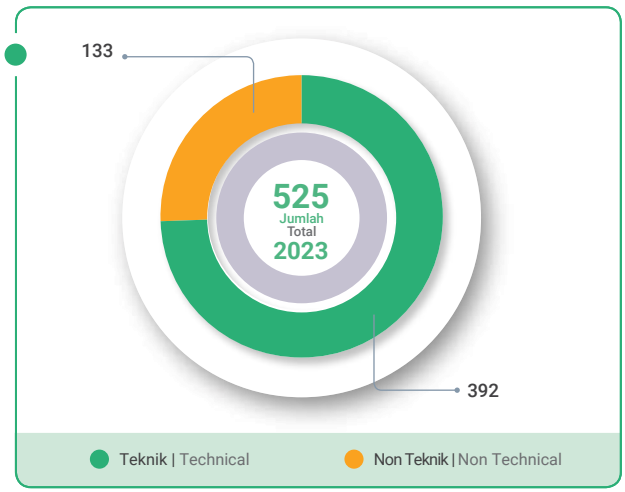




Komposisi Karyawan Berdasarkan Spesialisasi Keahlian 2023-2024 (orang)
Composition of Employee Based on Expertise Specialization 2023-2024 (people)

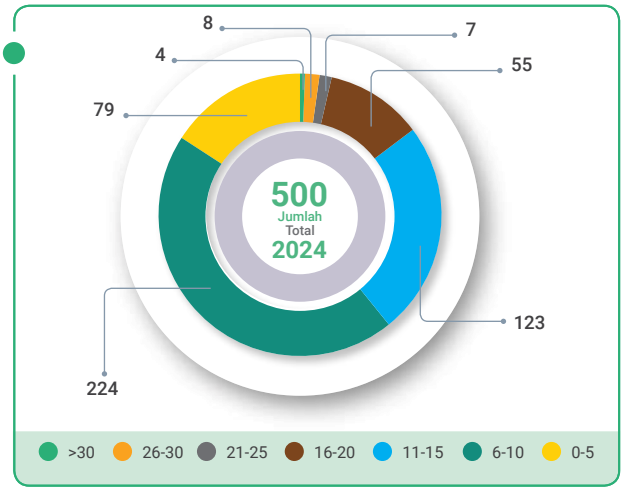
Spesialisasi Keahlian Expertise Specialization	2024			2023		
	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total
Teknik Technical	335	38	373	351	41	392
Non Teknik Non Technical	105	22	127	109	24	133
Jumlah Total	440	60	500	460	65	525

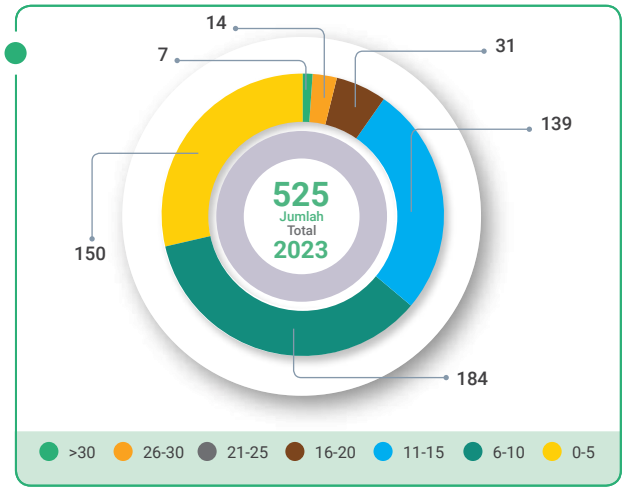




Komposisi Karyawan Berdasarkan Masa Kerja 2023-2024 (orang)
Composition of Employee Based on Work Period 2023-2024 (people)

Masa Kerja Work Period	2024			2023		
	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total
>30 tahun | >30 years	4	0	4	7	0	7
26-30 tahun | 26-30 years	6	2	8	12	2	14
21-25 tahun | 21-25 years	5	2	7	0	0	0
16-20 tahun | 16-20 years	54	1	55	28	3	31
11-15 tahun | 11-15 years	109	14	123	127	12	139
6-10 tahun | 6-10 years	199	25	224	157	27	184
0-5 tahun | 0-5 years	63	16	79	129	21	150
Jumlah | Total	440	60	500	460	65	525





TINGKAT PERPUTARAN KARYAWAN

Tingkat perputaran karyawan mencerminkan dinamika keluar-masuknya tenaga kerja di suatu perusahaan dalam periode tertentu. Selama tahun 2024, tingkat perputaran karyawan di Perseroan tercatat sebanyak 28 orang, yang menunjukkan tidak ada kenaikan dibandingkan tahun 2023.

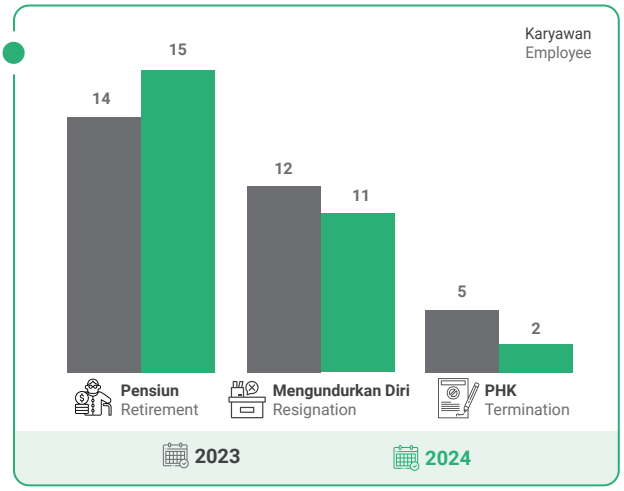
Secara umum, perputaran karyawan di Perseroan disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu memasuki masa pensiun, pengunduran diri, dan pemutusan hubungan kerja, sebagaimana disajikan dalam grafik terlampir. Meskipun penurunan tingkat perputaran di tahun 2024 relatif tidak signifikan, hal ini mencerminkan komitmen Perseroan dalam menciptakan lingkungan kerja yang stabil dan kondusif, mendukung kesinambungan operasional bisnis, serta mempertahankan kepuasan dan keterlibatan karyawan.

EMPLOYEE TURNOVER RATE

Employee turnover rate reflects the dynamics of the workforce entering and leaving a company during a certain period. Throughout 2024, the employee turnover rate in the Company was recorded at 28 people, which indicates no increase compared to 2023.

In general, employee turnover in the Company is due to three main factors, namely entering retirement, resignation, and termination of employment, as presented in the attached graph below. Despite of the decline in the turnover rate in 2024 was relatively insignificant, this reflects the Company's commitment to creating a stable and conducive work environment, supporting the continuity of business operations, and maintaining employee satisfaction and engagement.

Perputaran Karyawan
Employee Turnover



PROGRAM PENSIUN

Sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi karyawan, WEGE senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap kesejahteraan, termasuk saat memasuki masa pensiun. Perseroan memastikan tersedianya fasilitas perlindungan pasca kerja yang dirancang untuk mendukung kebutuhan dan kenyamanan karyawan setelah masa bakti berakhir. Fasilitas tersebut meliputi:

1. Dana Pensiun
   Perseroan menyelenggarakan program dana pensiun melalui:
   - Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)
   - Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)

RETIREMENT PROGRAM

As a form of appreciation for employee contributions, WEGE always pays full attention to welfare, including when entering retirement. The Company ensures the availability of post-employment protection facilities designed to support the needs and comfort of employees after their service period ends. These facilities include:

1. Pension Fund
   The Company organizes a pension fund program through:
   - Defined Benefit Pension Program (PPMP)
   - Defined Contribution Pension Program (PPIP)

2. Program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan
   Seluruh karyawan Perseroan diikutsertakan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan), yang mencakup:
   - Jaminan Hari Tua (JHT)
   - Jaminan Pensiun (JP)
   - Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
   - Jaminan Kematian (JKM)

3. Program Imbalan Pasca Bekerja
   Program ini diberikan kepada karyawan sesuai dengan kesepakatan bersama Serikat Pekerja, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
   Perseroan menyediakan bantuan kesehatan bagi pensiunan dan pasangannya, melalui kepesertaan dalam asuransi umum maupun BPJS Kesehatan.

HUBUNGAN INDUSTRIAL

WEGE berkomitmen untuk membangun dan memelihara hubungan industrial yang sehat dan harmonis dengan menciptakan sistem hubungan kerja yang konstruktif antara karyawan dan Perseroan. Hubungan ini didasarkan pada asas saling menghormati, dengan tujuan menciptakan keseimbangan antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban. Komitmen tersebut diwujudkan melalui komunikasi yang intensif dan keterlibatan aktif antara WEGE dan karyawan dalam upaya mencapai target yang telah dirancang.

Perseroan memandang karyawan sebagai mitra strategis dalam membangun hubungan kerja yang harmonis. Untuk itu, WEGE secara konsisten menjalankan komunikasi yang teratur dan berkesinambungan dengan karyawan. Sebagai bentuk dukungan terhadap hak karyawan, Perseroan juga memiliki serikat pekerja yang berfungsi sebagai wadah bagi karyawan untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Sebagai bagian dari upaya menjalin komunikasi yang baik, WEGE secara rutin mengadakan pertemuan antara perwakilan manajemen dan serikat pekerja. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan kerja yang harmonis dan dinamis, serta memastikan keamanan hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Untuk mendukung hubungan kerja yang kondusif, WEGE telah menyusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB), yang menjadi pedoman kerja sama antara karyawan dan Perseroan. PKB ini tidak hanya mengatur hak dan kewajiban, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian masalah atau perselisihan yang mungkin terjadi di tempat kerja.

2. BPJS Ketenagakerjaan Social Security Program
   All employees of the Company are included in the Employment Social Security Program (BPJS Ketenagakerjaan), which includes:
   - Old Age Security (JHT)
   - Pension Security (JP)
   - Work Accident Security (JKK)
   - Death Security (JKM)

3. Post-Employment Benefits Program
   This program is provided to employees in accordance with the agreement with the Workers Union, as stated in the Collective Labor Agreement (PKB).

4. Health Care Guarantee
   The Company provides health assistance for retirees and their spouses, through participation in general insurance and BPJS Health.

INDUSTRIAL RELATIONS

WEGE is committed to building and maintaining healthy and harmonious industrial relations by creating a constructive working relationship system between employees and the Company. This relationship is based on the principle of mutual respect, with the aim of creating a balance between the fulfillment of rights and the implementation of obligations. This commitment is realized through intensive communication and active involvement between WEGE and employees in an effort to achieve the targets that have been designed.

The Company views employees as strategic partners in building harmonious working relationships. For this reason, WEGE consistently carries out regular and continuous communication with employees. As a form of support for employee rights, the Company also has a labor union that functions as a forum for employees to convey their aspirations.

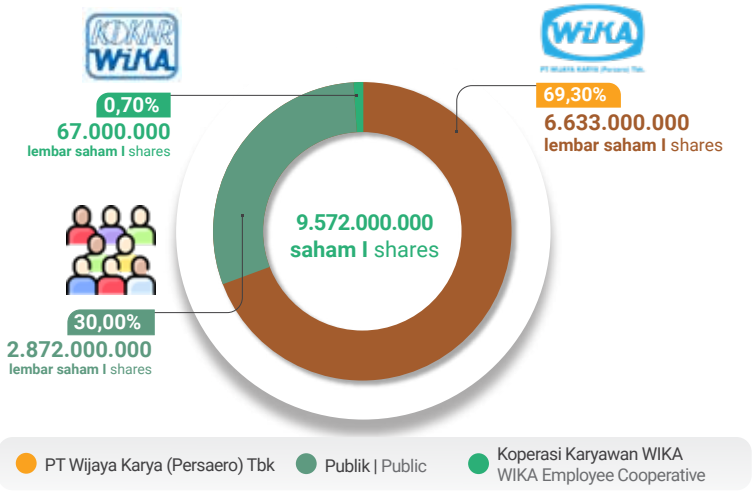
As part of initiative to establish good communication, WEGE regularly conducts meetings between representatives of management and labor unions. This meeting aims to strengthen harmonious and dynamic working relationships, as well as ensure the security of the rights and obligations of both parties.

In supporting conducive working relationships, WEGE has prepared a Collective Labor Agreement (CLA), which serves as a guideline for cooperation between employees and the Company. The CLA not only regulates rights and obligations, but also functions as a mechanism for resolving problems or disputes that may occur in the workplace.

Komposisi Pemegang Saham
Shareholders Composition

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM WEGE PER 31 DESEMBER 2024

WEGE'S SHAREHOLDERS COMPOSITION AS OF DECEMBER 31, 2024



Pemegang Saham Shareholders	Kepemilikan Saham di Awal Tahun (1 Januari 2024) Share Ownership at the Beginning of the Year (January 1, 2024)			Kepemilikan Saham di Akhir Tahun (31 Desember 2024) Share Ownership at Year End (December 31, 2024)		
	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares	Persentase Kepemilikan (%) Percentage of Ownership (%)	Nilai Nominal (Rp) Nominal Value (Rp)	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares	Persentase Kepemilikan (%) Percentage of Ownership (%)	Nilai Nominal (Rp) Nominal Value (Rp)
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	6.633.000.000	69,30	663.300.000.000	6.633.000.000	69,30	663.300.000.000
Koperasi Karyawan WIKA	67.000.000	0,70	6.700.000.000	67.000.000	0,70	6.700.000.000
Publik - masing-masing di bawah 5% Public - each under 5%	2.872.000.000	30,00	287.200.000.000	2.872.000.000	30,00	287.200.000.000
Jumlah Total	9.572.000.000	100,00	957.200.000.000	9.572.000.000	100,00	957.200.000.000

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM DENGAN KEPEMILIKAN >5%

COMPOSITION OF SHAREHOLDERS WITH OWNERSHIP >5%

Pemegang Saham Shareholders	Kepemilikan Saham di Awal Tahun (1 Januari 2024) Share Ownership at the Beginning of the Year (January 1, 2024)			Kepemilikan Saham di Akhir Tahun (31 Desember 2024) Share Ownership at Year End (December 31, 2024)		
	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares	Persentase Kepemilikan (%) Percentage of Ownership (%)	Nilai Nominal (Rp) Nominal Value (Rp)	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares	Persentase Kepemilikan (%) Percentage of Ownership (%)	Nilai Nominal (Rp) Nominal Value (Rp)
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	6.633.000.000	69,30	663.300.000.000	6.633.000.000	69,30	663.300.000.000

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM DENGAN KEPEMILIKAN <5%

COMPOSITION OF SHAREHOLDERS WITH OWNERSHIP <5%

Pemegang Saham Shareholders	Kepemilikan Saham di Awal Tahun (1 Januari 2024) Share Ownership at the Beginning of the Year (January 1, 2024)			Kepemilikan Saham di Akhir Tahun (31 Desember 2024) Share Ownership at Year End (December 31, 2024)		
	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares	Persentase Kepemilikan (%) Percentage of Ownership (%)	Nilai Nominal (Rp) Nominal Value (Rp)	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares	Persentase Kepemilikan (%) Percentage of Ownership (%)	Nilai Nominal (Rp) Nominal Value (Rp)
Koperasi Karyawan WIKA WIKA's Employee Cooperative	67.000.000	0,70	6.700.000.000	67.000.000	0,70	6.700.000.000
Publik - masing-masing di bawah 5% Public - each under 5%	2.872.000.000	30,00	287.200.000.000	2.872.000.000	30,00	287.200.000.000

INFORMASI KEPEMILIKAN SAHAM OLEH DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

SHARE OWNERSHIP INFORMATION BY THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS

Direksi dan Dewan Komisaris Board of Directors and Board of Commissioners		Kepemilikan Saham WEGE Secara Langsung Direct Ownership of WEGE Shares				Kepemilikan Saham WEGE Secara Tidak Langsung Indirect Ownership of WEGE Shares
		Kepemilikan Saham Tahun 2024 Share Ownership in 2024		Kepemilikan Saham Tahun 2023 Share Ownership in 2023		
Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares	Persentase Kepemilikan (%) Percentage of Ownership (%)	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares	Persentase Kepemilikan (%) Percentage of Ownership (%)	
Direksi Board of Directors						
Hadian Pramudita	Direktur Utama President Director	-	-	-	-	Pemegang saham utama/ pengendali PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau selaku entitas induk Perseroan adalah Negara Republik Indonesia, yang diwakili oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan sekaligus menjadi pemilik akhir WEGE. Selama tahun 2023 sampai dengan akhir tahun 2024, tidak terdapat Direksi dan Dewan Komisaris dengan kepemilikan saham tidak langsung WEGE.
Syailendra Ogan*	Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko Director of Finance, Human Capital and Risk Management	-	-	-	-	
Hartanto Karti Raharjo*	Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko Director of Finance, Human Capital and Risk Management	70.000	0,0007313	-	-	

Direksi dan Dewan Komisaris Board of Directors and Board of Commissioners		Kepemilikan Saham WEGE Secara Langsung Direct Ownership of WEGE Shares				Kepemilikan Saham WEGE Secara Tidak Langsung Indirect Ownership of WEGE Shares
		Kepemilikan Saham Tahun 2024 Share Ownership in 2024		Kepemilikan Saham Tahun 2023 Share Ownership in 2023		
Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares	Persentase Kepemilikan (%) Percentage of Ownership (%)	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares	Persentase Kepemilikan (%) Percentage of Ownership (%)	
Tomo Dwi Hasputro*	Direktur QHSE dan Pemasaran Director of QHSE and Marketing	-	-	-	-	The main/controlling shareholder of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk or as the parent entity of the Company is the Republic of Indonesia, represented by the Government of the Republic of Indonesia/ Ministry of State-Owned Enterprises (BUMN), and is also the ultimate owner of WEGE. During 2023 until the end of 2024, there are no Board of Directors and Board of Commissioners with indirect share ownership of WEGE.
Bagus Tri Setyana	Direktur Operasi I Director of Operations I	-	-	-	-	
Akhmadi Tricahyono*	Direktur Operasi II Director of Operations II	-	-	-	-	
Dwi Purnomo*	Direktur Operasi II Director of Operations II			-	-	
Dewan Komisaris **Board of Commissioners**						
Sumadi*	Komisaris Utama President Commissioner	-	-	-	-	
Joseph Prajogo	Komisaris Independen yang sekaligus merangkap sebagai Pelaksana Tugas Komisaris Utama Independent Commissioner who also serves as Acting President Commissioner	-	-	-	-	
Suli Fatimah	Komisaris Commissioner	-	-	-	-	
Danis Hidayat Sumadilaga	Komisaris Commissioner	-	-	-	-	
Ance**	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-	-	-	

Direksi dan Dewan Komisaris Board of Directors and Board of Commissioners		Kepemilikan Saham WEGE Secara Langsung Direct Ownership of WEGE Shares				Kepemilikan Saham WEGE Secara Tidak Langsung Indirect Ownership of WEGE Shares
		Kepemilikan Saham Tahun 2024 Share Ownership in 2024		Kepemilikan Saham Tahun 2023 Share Ownership in 2023		
Nama Name	**Jabatan** Position	**Jumlah Saham (lembar)** Number of Shares	**Persentase Kepemilikan (%)** Percentage of Ownership (%)	**Jumlah Saham (lembar)** Number of Shares	**Persentase Kepemilikan (%)** Percentage of Ownership (%)	
Taufan Gestoro**	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-	-	-	

Selama tahun buku 2024, Perseroan melakukan perubahan dalam susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang turut memengaruhi kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Perubahan ini didasarkan pada keputusan yang diambil dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, dengan rincian sebagai berikut:
Throughout the 2024 fiscal year, the Company made changes to the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners which also affected share ownership by members of the Board of Directors and Board of Commissioners. These changes were based on decisions taken at the Annual GMS and Extraordinary GMS, with the following details:

*Hasil Keputusan didalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 yang dilaksanakan pada 20 Mei 2024, sebagai berikut:
*Results of the Decisions in the Annual General Meeting of Shareholders for the 2023 Fiscal Year conducted on May 20, 2024, as follows:

- Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Sumadi sebagai Komisaris Utama yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 16 Mei 2023, Sdr. Syailendra Ogan sebagai Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 27 tanggal 21 Maret 2019, Sdr. Akhmadi Tricahyono sebagai Direktur Operasi II yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 6 tanggal 21 April 2022.
- Mengalihkan penugasan Sdr. Dwi Purnomo yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 16 Mei 2023, dari semula Direktur QHSE (Quality, Helath, Safety, Environment) dan Pemasaran menjadi Direktur Operasi II.
- Mengangkat Sdr. Hartanto Karti Raharjo sebagai Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko dan Sdr. Tomo Dwi Hasputro Direktur QHSE dan Pemasaran.
- Ratifying the honorable dismissal of Mr. Sumadi as President Commissioner who was appointed based on Deed Number 4 dated May 16, 2023, Mr. Syailendra Ogan as Director of Finance, Human Capital and Risk Management who was appointed based on Deed Number 27 dated March 21, 2019, Mr. Akhmadi Tricahyono as Director of Operations II who was appointed based on Deed Number 6 dated April 21, 2022.
- Transmitting the assignment of Mr. Dwi Purnomo who was appointed based on Deed Number 4 dated May 16, 2023, from the previous Director of QHSE (Quality, Health, Safety, Environment) and Marketing to Director of Operations II.
- Appointing Mr. Hartanto Karti Raharjo as Director of Finance, Human Capital and Risk Management and Mr. Tomo Dwi Hasputro as Director of QHSE and Marketing.

**Hasil Keputusan didalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilaksanakan pada 29 Februari 2024, sebagai berikut:
**Results of the Decisions in the Extraordinary General Meeting of Shareholders conducted on February 29, 2024, as follows:

- Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Ance sebagai Komisaris Independen yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 15 Januari 2021, dan mengangkat Sdr. Taufan Gestoro sebagai Komisaris Independen.
- Ratifying the honorable dismissal of Mr. Ance as Independent Commissioner who was appointed based on the decision of the Extraordinary GMS on January 15, 2021, and appoint Mr. Taufan Gestoro as Independent Commissioner.

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM DAN PERSENTASE KEPEMILIKAN BERDASARKAN STATUS

SHAREHOLDERS COMPOSITION AND OWNERSHIP PERCENTAGE BASED ON STATUS

Status Pemegang Saham Shareholder Status	Kepemilikan Saham Tahun 2024 Share Ownership in 2024			Kepemilikan Saham Tahun 2023 Share Ownership in 2023		
	Jumlah Pemegang Saham Number of Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares	Persentase Kepemilikan (%) Percentage of Ownership (%)	Jumlah Pemegang Saham Number of Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares	Persentase Kepemilikan (%) Percentage of Ownership (%)
Pemodal Nasional **National Investor**						
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	1	6.633.000.000	69,30	1	6.633.000.000	69,30
Koperasi Karyawan WIKA WIKA's Employee Cooperative	1	67.000.000	0,70	1	67.000.000	0,70
Perorangan Indonesia Indonesian Individual	15.226	1.908.960.886	19,94	16.384	1.873.187.886	19,57
Koperasi Cooperative	2	353.031.900	3,69	3	361.969.900	3,78
Dana Pensiun Pension Fund	6	25.345.900	0,26	6	25.345.900	0,26
Asuransi Insurance	4	37.886.000	0,40	4	37.886.000	0,40
Bank Bank	1	15.000.000	0,16	1	15.000.000	0,16
Perseroan Terbatas Limited Liability Company	29	386.987.415	4,04	33	466.034.815	4,87
Reksadana Mutual Funds	-	-	-	2	2.611.600	0,03
Sub-Total **Sub-Total**	**15.270**	**9.427.212.101**	**98,49**	**16.435**	**9.482.036.101**	**99,06**
Pemodal Asing **Foreign Investors**						
Perorangan Asing Foreign Individual	20	2.839.200	0,03	18	2.764.300	0,03
Badan Usaha Asing Foreign Business Entity	19	141.948.699	1,48	22	87.199.599	0,91
Sub-Total **Sub-Total**	**39**	**144.787.899**	**1,51**	**40**	**89.963.899**	**0,94**
Total **Total**	**15.309**	**9.572.000.000**	**100,00**	**16.475**	**9.572.000.000**	**100,00**

KOMPOSISI 20 PEMEGANG SAHAM TERBESAR DAN PERSENTASE KEPEMILIKANNYA

COMPOSITION OF THE 20 LARGEST SHAREHOLDERS AND THEIR PERCENTAGE OWNERSHIP

No	Nama Pemegang Saham Shareholder Name	Status Status	Domisili Domicile	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares	Persentase Kepemilikan (%) Percentage of Ownership (%)
1	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	BUMN/Perusahaan Terbatas BUMN/Limited Company	Domestik Domestic	6.633.000.000	69,30
2	PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk	Perseroan Terbatas Limited Liability Company	Domestik Domestic	339.578.514	3,55
3	Koperasi Karya Mitra Satya	Koperasi Cooperative	Domestik Domestic	329.148.800	3,44
4	Koperasi Karyawan WIKA	Koperasi Cooperative	Domestik Domestic	67.000.000	0,70
5	Haiyanto	Perorangan Domestik Domestic Individual	Domestik Domestic	54.792.900	0,57
6	Caceis Bank, Ireland Branch / Nichejungle Icav	Badan Usaha Asing Foreign Business Entity	Asing Foreign	46.737.800	0,49
7	Sutanto	Perorangan Domestik Domestic Individual	Domestik Domestic	35.230.500	0,37
8	Christanto Chandra Pranata	Perorangan Domestik Domestic Individual	Domestik Domestic	33.117.500	0,35
9	DBS Bank Ltd S/A Inclusif Value Fund	Badan Usaha Asing Foreign Business Entity	Asing Foreign	27.742.400	0,29
10	Danny Rachmad	Perorangan Domestik Domestic Individual	Domestik Domestic	26.047.600	0,27
11	Koperasi Karya Mitra Satya	Koperasi Cooperative	Domestik Domestic	23.883.100	0,25
12	Henri	Perorangan Domestik Domestic Individual	Domestik Domestic	22.017.800	0,23
13	Tan Alin Herawati	Perorangan Domestik Domestic Individual	Domestik Domestic	21.900.100	0,23
14	Pershing LLC Main Custody Account	Badan Usaha Asing Foreign Business Entity	Asing Foreign	20.552.000	0,21
15	Dana Pensiun Wijaya Karya PPMP	Perseroan Terbatas Limited Liability Company	Domestik Domestic	20.232.700	0,21
16	Ervin Wijaya	Perorangan Domestik Domestic Individual	Domestik Domestic	20.042.100	0,21
17	PT. Jasa Raharja (Persero)	Asuransi Insurance	Domestik Domestic	19.761.100	0,21
18	Amir Hamzah	Perorangan Domestik Domestic Individual	Domestik Domestic	19.695.100	0,21
19	Stefanus Widjaja	Perorangan Domestik Domestic Individual	Domestik Domestic	19.631.000	0,21
20	Harianto	Perorangan Domestik Domestic Individual	Domestik Domestic	18.720.000	0,20

PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI PERUSAHAAN, BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, SAMPAI KEPADA PEMILIK INDIVIDU

Pemegang saham utama dan pengendali Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung hingga tingkat pemilik individu, adalah sebagai berikut:

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk merupakan entitas induk Perseroan dengan kepemilikan sebesar 69,30%, setara dengan 6.633.000.000 lembar saham.

Pemegang saham utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, yang juga merupakan entitas induk Perseroan, adalah Negara Republik Indonesia. Kepemilikan ini diwakili oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan kepemilikan sebesar 91,018% atau setara dengan 36.291.702.781 lembar saham per 31 Desember 2024. Dengan demikian, Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemilik akhir dari Perseroan.

MAJOR AND CONTROLLING SHAREHOLDERS OF THE COMPANY, WHETHER DIRECTLY OR INDIRECTLY, UP TO INDIVIDUAL OWNERS

The Company's principal and controlling shareholders, both directly and indirectly to the individual owner level, are as follows:

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk is the Company's parent entity with ownership of 69.30%, equivalent to 6,633,000,000 shares.

The principal shareholder of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, which is also the Company's parent entity, is the Republic of Indonesia. This ownership is represented by the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of State-Owned Enterprises (BUMN), with ownership of 91.018% or equivalent to 36,291,702,781 shares as of December 31, 2024. Accordingly, the Government of the Republic of Indonesia is the ultimate owner of the Company.

Nama Pemegang Saham Shareholder Name	Alamat Address	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares	Persentase Kepemilikan (%) Percentage of Ownership (%)
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	WIKA Tower 2 Jalan D.I. Panjaitan Kav. 10 lt.1 Jakarta 13340 Indonesia. Phone : +6221 8067 9200 Faximile : +6221 2289 3830 www.wika.co.id	6.633.000.000	69,30
Kementerian Badan Usaha Milik Negara	Kantor Kementerian BUMN Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat 10110 DKI Jakarta, Indonesia. Phone: +6221 29935678 Faximile : +6221 29935740 www.bumn.go.id	36.291.702.781	91,018

Struktur Group Perusahaan

Company Group Structure



Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Subsidiaries, Associates, and Joint Ventures

ENTITAS ANAK
SUBSIDIARIES

PT Wege Solusi Proklamasi



Nama Name	Bidang Usaha Business Fields	Kepemilikan Saham Shareholding (%)		Waktu Pendirian Time of Establishment	Status Operasi Operation Status	Jumlah Aset (Rp Miliar) Total Assets (Rp Billion)		Domisili Domicile
		2024	2023			2024	2023	
PT Wege Solusi Proklamasi	Konstruksi, Real Estate, Hotel, Perparkiran. Construction, Real Estate, Hotel, Parking.	90,00	90,00	28 Mei 2019 May 28, 2019	Beroperasi Operating	157,87	164,29	Indonesia

Profil Singkat PT Wege Solusi Proklamasi

Pendirian PT Wege Solusi Proklamasi

PT Wege Solusi Proklamasi (selanjutnya disebut WSP) berkedudukan di Jakarta Timur dan didirikan berdasarkan Akta No. 85 tanggal 28 Mei 2019, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Hukum

Brief Profile of PT Wege Solusi Proklamasi

Establishment of PT Wege Solusi Proklamasi

PT Wege Solusi Proklamasi (hereinafter referred to as WSP) is domiciled in East Jakarta and was established based on Deed No. 85 dated May 28, 2019, made before Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta. This deed of establishment has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through the

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0035258.AH.01.01 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Wege Solusi Proklamasi, dan daftar WSP Nomor : AHU-0116523.AH.01.11 Tahun 2019 tanggal 22 Juli 2019.

Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: AHU-0035258.AH.01.01 of 2019 concerning the Ratification of the Establishment of the Limited Liability Company Legal Entity PT Wege Solusi Proklamasi, and WSP list Number: AHU-0116523.AH.01.11 of 2019 dated July 22, 2019.

WSP memulai kegiatan operasional secara komersial pada tahun 2019.

WSP started commercial operations in 2019.

Bidang Usaha

PT Wege Solusi Proklamasi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha Konstruksi, Real Estate, Hotel dan Perparkiran. Selain itu, WSP juga berperan sebagai *Special Purpose Vehicle* (SPV) yang menjalankan investasi melalui skema *Build-Operate-Transfer* (BOT) WEGE-Mandiri pada proyek Graha Mantap.

Business Field

PT Wege Solusi Proklamasi is a company engaged in the Construction, Real Estate, Hotel and Parking business sectors. In addition, WSP also acts as a Special Purpose Vehicle (SPV) that carries out investments through the Build-Operate-Transfer (BOT) WEGE-Mandiri scheme on the Graha Mantap project.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan serta susunan pemegang saham PT Wege Solusi Proklamasi per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Capital Structure and Shareholder Composition

The capital structure and shareholder composition of PT Wege Solusi Proklamasi as of December 31, 2024 are as follows:

Pemegang Saham Shareholders	Kepemilikan Saham per 31 Desember 2024 Shareholding as of December 31, 2024		
	Jumlah Saham Total Shares	Persentase Kepemilikan Percentage of Ownership (%)	Rupiah Penuh Full Rupiah (Rp)
Modal Dasar Authorized Capital	100.000		100.000.000.000
Modal ditempatkan dan Disetor Penuh: Issued and Fully Paid Capital:			
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	22.500	90,00	22.500.000.000
PT Wijaya Karya Pracetak Gedung	2.500	10,00	2.500.000.000
Jumlah **Total**	**25.000**	**100,00**	**25.000.000.000**
Saham dalam Portepel Shares in Portfolio	75.000		75.000.000.000

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Wege Solusi Proklamasi per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Composition of the Board of Directors and Board of Commissioners

The composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Wege Solusi Proklamasi as of December 31, 2024 is as follows:

Nama Name	Jabatan Position
Bagus Tri Setyana	Komisaris Commissioner
Bobby Parluhutan	Direktur Director

Ikhtisar Data Keuangan

Ikhtisar data keuangan PT Wege Solusi Proklamasi per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Financial Data Overview

The financial data overview of PT Wege Solusi Proklamasi as of December 31, 2024 is as follows:

Rupiah Penuh | Full Rupiah

	2024	2023
Jumlah Aset Total Assets	157.866.279.953	164.292.421.749
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	137.314.562.101	144.430.554.659
Jumlah Ekuitas Total Equity	20.551.717.852	19.861.867.090

ENTITAS ASOSIASI
ASSOCIATED ENTITY

Nama Name	Bidang Usaha Business Fields	Kepemilikan Saham Shareholding (%)		Waktu Pendirian Time of Establishment	Status Operasi Operation Status	Jumlah Aset (Rp Miliar) Total Assets (Rp Billion)		Domisili Domicile
		2024	2023			2024	2023	
PT Wijaya Karya Pracetak Gedung	Perindustrian, Perdagangan, Jasa Industry, Trade, Services	49,00	49,00	23 Desember 2016 December 23, 2016	Beroperasi Operating	339,98	347,61	Jakarta Selatan, Indonesia South Jakarta, Indonesia
PT Patra Wijaya Realtindo	Pembangunan, Developer, Properti Development, Developer, Property	10,00	10,00	7 Agustus 2019 August 7, 2019	Belum Beroperasi Not Operating Yet	-	-	Jakarta Selatan, Indonesia South Jakarta, Indonesia
PT Wijaya Karya Bitumen	Pertambangan dan Industri Aspal Alam Mining and Natural Asphalt Industry	0,61	0,61	12 Mei 2013 May 12, 2013	Beroperasi Operating	0,35	0,38	Jakarta Timur, Indonesia East Jakarta, Indonesia

PT Wijaya Karya Pracetak Gedung

Profil Singkat PT WIJAYA KARYA PRACETAK GEDUNG

Pendirian PT Wijaya Karya Pracetak Gedung

PT Wijaya Karya Pracetak Gedung (selanjutnya disebut WPG) berkedudukan di Jakarta Selatan dan didirikan berdasarkan Akta No. 142 tanggal 23 Desember 2016, yang dibuat dihadapan Sri Ismiyati, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0001918.AH.01.01 tanggal 17 Januari 2017.

WPG memulai kegiatan operasional secara komersial pada tahun 2017.

Bidang Usaha

PT Wijaya Karya Pracetak Gedung merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha Perindustrian, Perdagangan dan Jasa.

1. Bidang Usaha Perindustrian
   meliputi industri beton pracetak, antara lain produksi beton pracetak gedung dan perumahan berikut pemasangannya, komponen dan/atau material gedung dan perumahan lainnya, serta kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan kelancaran serta kontinuitas produksi, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

2. Bidang Usaha Perdagangan
   meliputi penjualan beton pracetak gedung dan perumahan berikut pemasangannya, serta komponen dan/atau material gedung dan perumahan, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

3. Bidang Usaha Jasa
   meliputi jasa konstruksi, layanan keagenan untuk komponen dan/atau material, serta perencanaan dan pengembangan produk dan sistem untuk bangunan gedung, perumahan, bangunan industri dan pergudangan.

Brief Profile of PT WIJAYA KARYA PRACETAK GEDUNG

Establishment of PT Wijaya Karya Pracetak Gedung

PT Wijaya Karya Pracetak Gedung (hereinafter referred to as WPG) is domiciled in South Jakarta and was established based on Deed No. 142 dated December 23, 2016, made before Sri Ismiyati, S.H., Notary in Jakarta. This deed of establishment has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: AHU-0001918.AH.01.01 dated January 17, 2017.

WPG started commercial operations in 2017.

Business Fields

PT Wijaya Karya Pracetak Gedung is a company engaged in the Industrial, Trade and Services business sectors.

1. Industrial Business Field
   includes the precast concrete industry, including the production of precast concrete for buildings and housing including its installation, components and/or other building and housing materials, as well as other activities related to the smoothness and continuity of production, both domestically and abroad.

2. Trading Business Field
   includes the sale of precast concrete for buildings and housing including its installation, as well as components and/or building and housing materials, both domestically and abroad.

3. Service Business Field
   includes construction services, agency services for components and/or materials, as well as planning and development of products and systems for buildings, housing, industrial buildings and warehousing.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan serta susunan pemegang saham PT Wijaya Karya Pracetak Gedung per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Capital Structure and Shareholder Composition

The capital structure and shareholder composition of PT Wijaya Karya Pracetak Gedung as of December 31, 2024 are as follows:

Pemegang Saham Shareholders	Kepemilikan Saham per 31 Desember 2024 Shareholding as of December 31, 2024		
	Jumlah Saham Total Shares	Persentase Kepemilikan Percentage of Ownership (%)	Rupiah Penuh Full Rupiah (Rp)
Modal Dasar Authorized Capital	2.000.000.000		200.000.000.000
Modal ditempatkan dan Disetor Penuh: Issued and Fully Paid Capital:			
PT Wijaya Karya Beton Tbk	255.000.000	51,00	25.500.000.000
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	245.000.000	49,00	24.500.000.000
Jumlah **Total**	**500.000.000**	**100,00**	**50.000.000.000**
Saham dalam Portepel Shares in Portfolio	1.500.000.000		150.000.000.000

PT Patra Wijaya Realtindo

PWR

Profil Singkat PT Patra Wijaya Realtindo

Pendirian PT Patra Wijaya Realtindo

PT Patra Wijaya Realtindo (selanjutnya disebut PWR) didirikan pada tanggal 7 Agustus 2019 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 67, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor: AHU-0041018.AH.01.01.Tahun 2019 tertanggal 19 Agustus 2019.

Perseroan, bersama PT Wijaya Karya Realty (WIKA Realty) dan PT Patra Jasa, membentuk sebuah perusahaan patungan (Joint Venture/JV) dengan komposisi kepemilikan saham sebesar 10% untuk Perseroan, sementara sisanya dimiliki oleh PT Patra Jasa dan WIKA Realty. Pembentukan PT Patra Wijaya Realtindo bertujuan untuk mengoptimalkan aset PT Patra Jasa.

Bidang Usaha

PT Patra Wijaya Realtindo merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan, developer, dan properti.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan serta susunan pemegang saham PT Patra Wijaya Realtindo per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Brief Profile of PT Patra Wijaya Realtindo

Establishment of PT Patra Wijaya Realtindo

PT Patra Wijaya Realtindo (hereinafter referred to as PWR) was established on August 7, 2019 based on Deed of Establishment Number 67, made before Jose Dima Satria, SH., M.Kn., Notary in Jakarta. This deed of establishment has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree Number: AHU-0041018.AH.01.01.Year 2019 dated August 19, 2019.

The Company, together with PT Wijaya Karya Realty (WIKA Realty) and PT Patra Jasa, established a joint venture (Joint Venture/JV) with a share ownership composition of 10% for the Company, while the remainder is owned by PT Patra Jasa and WIKA Realty. The establishment of PT Patra Wijaya Realtindo aims to optimize PT Patra Jasa's assets.

Business Field

PT Patra Wijaya Realtindo is a company engaged in the fields of construction, developer, and property.

Capital Structure and Shareholder Composition

The capital structure and shareholder composition of PT Patra Wijaya Realtindo as of December 31, 2024 are as follows:

Pemegang Saham Shareholders	Kepemilikan Saham per 31 Desember 2024 Shareholding as of December 31, 2024		
	Jumlah Saham Total Shares	Persentase Kepemilikan Percentage of Ownership (%)	Rupiah Penuh Full Rupiah (Rp)
Modal Dasar Authorized Capital	50.000		50.000.000.000
Modal ditempatkan dan Disetor Penuh: Issued and Fully Paid Capital:			
PT Patra Jasa	7.500	60,00	7.500.000.000
PT Wijaya Karya Realty	3.750	30,00	3.750.000.000
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	1.250	10,00	1.250.000.000
Jumlah **Total**	**12.500**	**100,00**	**12.500.000.000**
Saham dalam Portepel Shares in Portfolio	37.500		37.500.000.000

PT Wijaya Karya Bitumen

Profil Singkat PT Wijaya Karya Bitumen

Pendirian PT Wijaya Karya Bitumen

PT Wijaya Karya Bitumen (selanjutnya disebut WIKA Bitumen), sebelumnya bernama PT Sarana Karya (Persero), didirikan berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H., Nomor 1 tanggal 1 September 1984. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor C2-931.HT.01.01.TH.1986 tanggal 7 Februari 1986.

Berdasarkan Akta Nomor 83 tanggal 30 Juni 2014 yang dibuat oleh M. Nova Faisal, S.H., Notaris di Jakarta, PT Sarana Karya (Persero) resmi berubah nama menjadi PT Wijaya Karya Bitumen. Perubahan anggaran dasar ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-05084.40.20.2014 tanggal 7 Juli 2014.

WIKA Bitumen memulai kegiatan operasional secara komersial pada tahun 2013

Bidang Usaha

PT Wijaya Karya Bitumen merupakan perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi, eksploitasi, pengolahan batuan aspal dan semua bitumen, baik padat maupun cair termasuk perdagangan dan pengangkutan hasil produksi aspal.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan serta susunan pemegang saham PT Wijaya Karya Bitumen per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Brief Profile of PT Wijaya Karya Bitumen

Establishment of PT Wijaya Karya Bitumen

PT Wijaya Karya Bitumen (hereinafter referred to as WIKA Bitumen), previously known as PT Sarana Karya (Persero), was established based on Notarial Deed of Imas Fatimah, S.H., Number 1 dated September 1, 1984. This deed of establishment has been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia through Decree Number C2-931.HT.01.01.TH.1986 dated February 7, 1986.

Based on Deed Number 83 dated June 30, 2014 made by M. Nova Faisal, S.H., Notary in Jakarta, PT Sarana Karya (Persero) officially changed its name to PT Wijaya Karya Bitumen. This change in the articles of association has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree Number AHU-05084.40.20.2014 dated July 7, 2014.

WIKA Bitumen started its commercial operations in 2013

Business Field

PT Wijaya Karya Bitumen is a company engaged in the exploration, exploitation, processing of asphalt rock and all kind of bitumen, both solid and liquid, including trading and transportation of asphalt production.

Capital Structure and Shareholder Composition

The capital structure and shareholder composition of PT Wijaya Karya Bitumen as of December 31, 2024 are as follows:

Pemegang Saham Shareholders	Kepemilikan Saham per 31 Desember 2024 Shareholding as of December 31, 2024		
	Jumlah Saham Total Shares	Persentase Kepemilikan Percentage of Ownership (%)	Rupiah Penuh Full Rupiah (Rp)
Modal Dasar Authorized Capital	570.00		570.000.000.000
Modal ditempatkan dan Disetor Penuh: Issued and Fully Paid Capital:			
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	257.862	99,39	257.862.000.000
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	1.594	0,61	1.594.000.000
Jumlah Total	259.456	10,00	259.456.000.000
Saham dalam Portepel Shares in Portfolio	310.544.000.000		310.544.000.000

VENTURA BERSAMA ATAU KERJA SAMA OPERASI (KSO)

Perseroan mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai ventura bersama, yaitu pengaturan di mana para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan tersebut memiliki hak atas aset neto dari ventura tersebut. Pihak-pihak ini disebut sebagai venturer bersama.

Venturer bersama mengakui kepentingannya dalam ventura bersama sebagai investasi, yang dicatat menggunakan metode ekuitas sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Per 31 Desember 2024, Perseroan secara konsolidasi mencatat investasi pada ventura bersama dengan rincian sebagai berikut:

JOINT VENTURE OR JOINT OPERATION (KSO)

The Company classifies joint arrangements as joint ventures, which are arrangements in which the parties that have joint control over the arrangement have rights to the net assets of the venture. These parties are referred to as joint venturer.

Joint venturer recognizes their interests in joint ventures as investments, which are accounted for using the equity method in accordance with prevailing accounting standards.

As of December 31, 2024, the Company on a consolidated basis records investments in joint ventures with the following details:

Ventura Bersama/KSO Joint Venture/KSO	**Proyek** Project	**Porsi Kepemilikan** Ownership Portion	**Status** Status	**Laba (Rugi) Tahun Berjalan** Profit (Loss) of the Year **(Rp Juta)** (Rp Million)	**Saldo Akhir Investasi Ventura Bersama** Joint Venture Investment Ending Balance **(Rp Juta)** (Rp Million)	**Aset** Asset **(Rp Juta)** (Rp Million)
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Mutiara Masyhur Sejahtera	Tamansari Prospero Konstruksi Tamansari Prospero Construction	60% : 40%	Berjalan Running	230,74	183.429,58	257.265,28
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - Pemprov DKI (Gedung Sekolah 1)	Gedung Sekolah Paket 1 School Building Package 1	49,5% : 50,5%	Selesai Finished	0,00	96.805,83	107.951,13
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - Pemprov DKI (Gedung Sekolah 5)	Gedung Sekolah Paket 5 School Building Package 5	49,5% : 50,5%	Selesai Finished	0,00	53.066,15	96.662,77
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Mahoni Citra Persada	Tamansari Mahogany Konstruksi Tamansari Mahogany Construction	60% : 40%	Berjalan Running	0,00	36.948,62	55.240,95
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Nindya Karya	Venue PON Aceh	55% : 45%	Berjalan Running	24.118,50	28.092,12	72.541,01
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Adhi Karya Tbk	Pembangunan Hunian Pekerja Konstruksi (IKN) Construction Workers Housing Development (IKN)	60% : 40%	Selesai Finished	0,00	26.339,39	124.582,63
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - Pemprov DKI (Gedung Sekolah 2)	Gedung Sekolah Paket 2 School Building Package 2	49,5% : 50,5%	Selesai Finished	0,00	26.993,53	49.249,47
KSO PT Wijaya Karya Tbk - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	Paket 3 Pembangunan AGLC, ASLC, IFFLC UGM Berjalan Running	50,5% : 49,5%	Selesai Finished	0,00	15.506,62	300.063,58
KSO PT Wijaya Karya Tbk - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	RSUPT Vertikal Surabaya Vertical General Hospital of Surabaya	70% : 30%	Selesai Finished	19.549,34	13.286,08	346.306,99
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Wijaya Karya Tbk	BMKG 2	90% : 10%	Berjalan Running	8.891,38	11.644,04	155.393,07

Ventura Bersama/KSO Joint Venture/KSO	**Proyek** Project	**Porsi Kepemilikan** Ownership Portion	**Status** Status	**Laba (Rugi) Tahun Berjalan** Profit (Loss) of the Year **(Rp Juta)** (Rp Million)	**Saldo Akhir Investasi Ventura Bersama** Joint Venture Investment Ending Balance **(Rp Juta)** (Rp Million)	**Aset** Asset **(Rp Juta)** (Rp Million)
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Abadi Prima Inti Karya	Pembangunan Hunian Pekerja Konstruksi 2 (IKN) Construction Workers Housing Development 2 (IKN)	70% : 30%	Berjalan Running	23.950,00	11.317,74	182.759,03
KSO PT Wijaya Karya Tbk - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	Pembangunan SGLC & ERIC UGM Development of SGLC and ERIC UGM	51% : 49%	Berjalan Running	0,00	11.959,62	58.071,73
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Wijaya Karya Tbk	BI Manokwari	60% : 40%	Berjalan Running	4.445,98	8.283,46	106.875,56
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Brantas Abipraya	Pembangunan Hunian Pekerja TNI (IKN) Construction of TNI Workers Housing (IKN)	65% : 35%	Selesai Finished	10.281,90	6.050,55	58.949,54
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Jaya Konstruksi	PMJ Land	55% : 45%	Berjalan Running	2.746,51	3.592,68	57.738,71
KSO PT Wijaya Karya Tbk - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	Rumah Dinas Prajurit TNI AD Indonesian Army Soldiers' Official Residence	49% : 51%	Selesai Finished	0,00	5.711,52	14.331,96
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Pembangunan Perumahan Tbk	Perluasan Bandara Banjarmasin Banjarmasin Airport Expansion	47,5% : 52,5%	Selesai Finished	0,00	3.071,42	340.786,31
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Pelitamaju Multiswakarsa	Telkom Landmark Tower	70% : 30%	Berjalan Running	1.281,19	2.437,47	38.360,06
KSO PT Wijaya Karya Tbk - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	Proyek Pembangunan Gedung 1 dan 2 ITB Innovation Park (IIP) Bandung Teknopolis Construction Project of Buildings 1 and 2 ITB Innovation Park (IIP) Bandung Teknopolis	40% : 60%	Selesai Finished	1.305,50	2.322,40	94.042,38
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Shimizu Corporation	Benhil Hotel Service Apartement	30% : 70%	Berjalan Running	1.423,74	2.183,67	21.477,59
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Adhi Karya Tbk	DKUT Gresik	40% : 60%	Berjalan Running	1.771,87	2.119,61	124.582,63
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Brantas Abipraya	Gereja Basilika Basilica Church	60% : 40%	Berjalan Running	0,00	27,29	0,00
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Jaya Konstruksi	Pengembangan RSUD Kalideres Development of Kalideres Regional Hospital	55% : 45%	Berjalan Running	(332,33)	0,00	486,82
Sub Jumlah Sub Total				99.664,32	551.189,37	
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Less: Allowance for Impairment Losses				0,00	(31.836,80)	
Jumlah Total				99.664,32	519.352,57	

Kronologis Penerbitan dan/atau Pencatatan Saham

Chronology of Shares Issuance and/or Listing

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Pada tahun 2017, Perseroan melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham atau *Initial Public Offering* (IPO) di Bursa Efek Indonesia. Perseroan telah dinyatakan efektif berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. S-444/D.04/2017 tanggal 20 November 2017. Saham Perseroan kemudian tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 November 2017 dengan kode saham WEGE.

Dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan menerbitkan sebanyak 2.872.000.000 saham biasa atas nama, yang seluruhnya merupakan Saham Baru yang diterbitkan dari portepel Perseroan. Saham Perseroan memiliki nilai nominal Rp100,- per saham dan mewakili 30,00% dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Harga Penawaran ditetapkan sebesar Rp290,- per saham, sehingga total nilai penawaran mencapai Rp832.880.000.000.

INITIAL PUBLIC OFFERING OF SHARES

In 2017, the Company conducted an Initial Public Offering (IPO) on the Indonesia Stock Exchange. The Company has been declared effective based on the Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. S-444/D.04/2017 dated November 20, 2017. The Company's shares were then listed on the Indonesia Stock Exchange on November 30, 2017 with the stock code WEGE.

In this Initial Public Offering, the Company issued 2,872,000,000 registered common shares, all of which are New Shares issued from the Company's portfolio. The Company's shares have a nominal value of Rp100,- per share and represent 30.00% of the Company's issued and fully paid-up capital after the Initial Public Offering. The Offering Price was set at Rp290,- per share, so as to the total offering value reached by Rp832,880,000,000.

KRONOLOGIS PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Secara ringkas, berikut adalah kronologis pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

CHRONOLOGY OF THE INITIAL PUBLIC OFFERING OF SHARES

In brief, the following is the chronology of the effecting of the Company's Initial Public Offering of Shares.

Jumlah Saham Yang Ditawarkan Number of Shares Offered	:	2.872.000.000 lembar saham I shares
Persentase Penawaran Umum Perdana Saham Initial Public Offering Percentage	:	30,00%
Nilai Nominal Nominal Value	:	Rp100,- per saham I per share
Harga Penawaran Bid Price	:	Rp290,- per saham I per share
Jumlah Nilai Penawaran Umum Perdana Saham Total Value of Initial Public Offering of Shares	:	Rp832.880.000.000
Tanggal Efektif Effective Date	:	20 November 2017 November 20, 2017
Masa Penawaran Umum Perdana Saham Initial Public Offering Period	:	22 - 24 November 2017 November 22 - 24, 2017
Tanggal Penjatahan Rationing Date	:	28 November 2017 November 28, 2017
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan/Refund Refund Date for Booking	:	29 November 2017 November 29, 2017
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik Electronic Share Distribution Date	:	29 November 2017 November 29, 2017
Tanggal Pencatatan Saham pada Bursa Efek Indonesia Share Listing Date on the Indonesia Stock Exchange	:	30 November 2017 November 30, 2017

STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering*/IPO), struktur modal saham dan susunan pemegang saham Perseroan, baik sebelum maupun setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebagai berikut :

CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDERS

With the sale of all shares offered in the Initial Public Offering (IPO), the Company's share capital structure and shareholder composition, both before and after the implementation of the Initial Public Offering, are as follows:

Keterangan Description	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham Before initial public offering			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham After initial public offering		
	Jumlah Saham (lembar) Total Shares (Shares)	**Jumlah Nilai Nominal (Rp)** Total Nominal Value (Rp)	**Persentase Kepemilikan (%)** Percentage of ownership (%)	**Jumlah Saham** (lembar) **Total Shares (Shares)**	**Jumlah Nilai Nominal (Rp)** Total Nominal Value (Rp)	**Persentase Kepemilikan (%)** Percentage of ownership (%)
Modal Dasar Authorized Capital	12.000.000.000	1.200.000.000.000		12.000.000.000	1.200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Issued and Paid Up Capital						
WIKA	6.633.000.000	663.300.000.000	99,00	6.633.000.000	663.300.000.000	69,30
Koperasi Karyawan WIKA	67.000.000	6.700.000.000	1,00	67.000.000	6.700.000.000	0,70
Publik	-	-	-	2.872.000.000	287.200.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Total Issued and Paid Up Capital	6.700.000.000	670.000.000.000	100,00	9.572.000.000	957.200.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel Shares in Portfolio	5.300.000.000	530.000.000.000		2.428.000.000	242.800.000.000	

*Dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap Saham
*With a nominal value of Rp100,- (one hundred Rupiah) per Share

Kronologis Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya

Chronology of Issuance and/or Listing of Other Securities

Hingga periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan tidak menerbitkan efek lainnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak menyajikan informasi terkait efek tersebut, termasuk nama, tahun penerbitan, tingkat bunga/imbalan, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, nama bursa tempat efek dicatatkan, peringkatnya, maupun informasi lain yang perlu disampaikan terkait efek tersebut.

Until the period ending on December 31, 2024, the Company did not issue any other securities. Therefore, the Company does not present information related to these securities, including the name, year of issuance, interest rate/yield, maturity date, offering value, name of the exchange where the securities are listed, their ranking, or other information that needs to be submitted related to these securities.

Lembaga dan/atau Profesi Penunjang

Institutions and/or Supporting Professions

AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

PUBLIC ACCOUNTANTS AND PUBLIC ACCOUNTING FIRMS

Kantor Akuntan Publik (KAP) Public Accounting Firm (KAP)	:	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Akuntan Publik (AP) Public Accountant (AP)	:	Lith Alfansuri
Alamat Address	:	Plaza ASIA, Level 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190 T: +62 21 5140 1340 F: +62 21 5140 1350 E: inquiry@rsm.id www.rsm.id
Periode Penugasan Assignment Period	:	2024
Jasa Yang Diberikan Services Provided		Audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024. General audit of the Consolidated Financial Statements of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk for the Fiscal Year ending on December 31, 2024.
Jasa Lain yang Diberikan Other Services Provided	:	• Melakukan prosedur *Assurance* atas Laporan Penilaian Tingkat Pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI) untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2024. • Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern sebagai wujud penerapan Pernyataan Standar Auditing (PSA) No.62 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024. • Conducting Assurance procedures on the Key Performance Indicators (KPI) Achievement Level Assessment Report for the Fiscal Year ending December 31, 2024. • Audit of Compliance with Laws and Regulations and Internal Control as a form of implementation of Auditing Standards Statement (PSA) No.62 for the year ending December 31, 2024.
Biaya Jasa (*Fee*) Service Fee	:	Rp470.000.000

PERDAGANGAN DAN PENCATATAN SAHAM

TRADING AND STOCK LISTING

Nama Name	:	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)
Alamat Address	:	Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia Tel: +62 21 515 0515 Fax: +62 21 515 4153 Website: www.idx.co.id E-mail: listing@idx.co.id
Jasa Yang Diberikan Services Provided	:	Biaya pencatatan saham tahunan/Annual Listing Fee, dan informasi perdagangan. Annual Listing Fee, and trading information.
Biaya Jasa (*Fee*) Service Fee	:	Rp250.000.000

KUSTODIAN
CUSTODIAN

Nama Name	:	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
Alamat Address	:	Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1, Lantai 5 Jl. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia Tel: +62 21 515 2855 Fax: +62 21 529 91199 Website: www.ksei.co.id E-mail: helpdesk@ksei.co.id
Jasa Yang Diberikan Services Provided	:	Menyediakan jasa untuk mengadministrasikan Efek yang telah dikeluarkan, dan penyedia layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek serta distribusi hasil aksi korporasi. Providing services to administer securities that have been issued, and providing services for storing and settling securities transactions as well as distributing the results of corporate actions.
Biaya Jasa (*Fee*) Service Fee	:	Rp10.000.000

BIRO ADMINISTRASI EFEK
SECURITIES ADMINISTRATION BUREAU

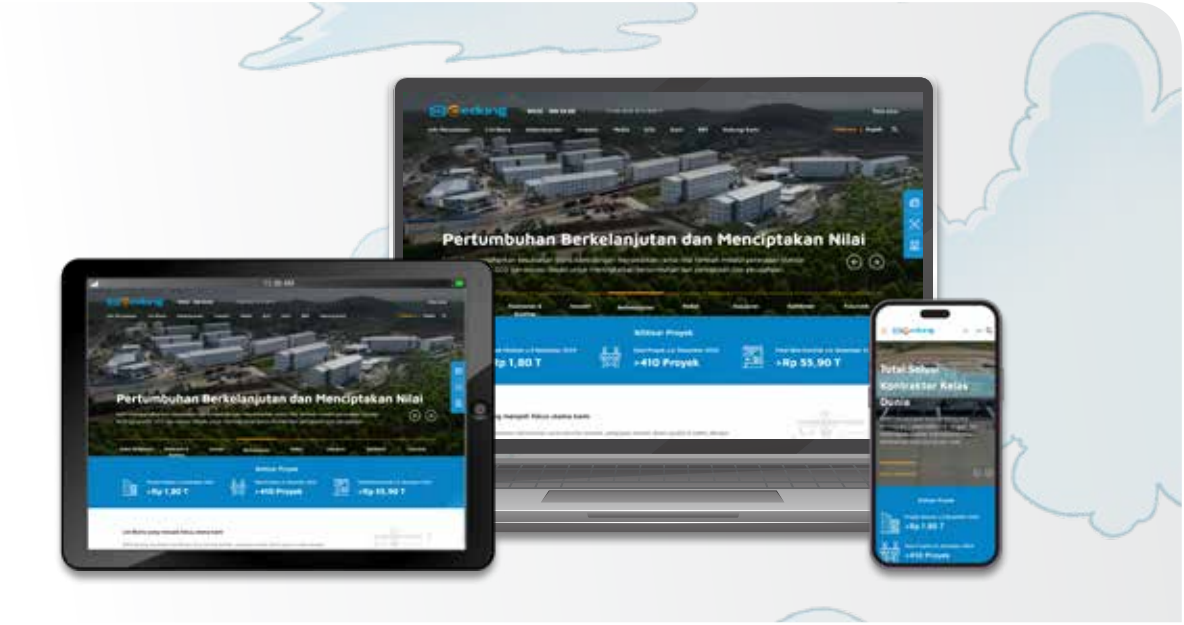
Nama Name	:	PT Datindo Entrycom
Alamat Address	:	Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120, Indonesia Tel: +62 21 350 8077 Fax: +62 21 350 8078 E-mail: dm@datindo.com
Jasa Yang Diberikan Services Provided	:	Pencatatan Daftar Pemegang Saham dan Jasa Administrasi di Pasar Modal Registration of Shareholder List and Administrative Services in the Capital Market
Biaya Jasa (*Fee*) Service Fee	:	Rp40.000.000

NOTARIS
NOTARY PUBLIC

Nama Name	:	Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto, S.H.
Alamat Address	:	Jl. Sultan Agung No. 3 Jakarta Selatan T: (021) 83796396, 83796397 E: notaris_dgls@yahoo.com
Jasa Yang Diberikan Services Provided	:	Notaris dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 20 Mei 2024.
Biaya (*Fee*) RUPST AGM Fee	:	Rp37.000.000
Jasa Yang Diberikan Services Provided	:	Notaris dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa tanggal 29 Februari 2024. Notary in the execution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (GMS) on February 29, 2024.
Biaya (*Fee*) RUPSLB EGMS Fees	:	Rp22.000.000

Informasi pada Website Perusahaan

Information on The Company Website



Perseroan menyediakan situs web resmi yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh pemangku kepentingan melalui alamat www.wikagedung.co.id. Keberadaan situs web ini merupakan wujud komitmen Perseroan terhadap keterbukaan informasi, sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat mengakses informasi terkini terkait Perseroan secara transparan dan akurat.

Situs web resmi Perseroan disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik. Situs ini disajikan dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dan telah memenuhi amanat Pasal 6 POJK No. 8/POJK.04/2015, yang mengharuskan penyampaian informasi yang mencakup, antara lain:

1. Informasi Umum Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Informasi bagi Pemodal atau Investor;
3. Informasi Tata Kelola Perusahaan; dan
4. Informasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Dengan adanya situs web ini, Perseroan berkomitmen untuk menyediakan saluran komunikasi yang efektif, guna memfasilitasi pemangku kepentingan dalam mengakses informasi yang relevan, komprehensif, dan sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi.

The Company provides an official website that can be easily accessed by all stakeholders through the address www.wikagedung.co.id. The existence of this website is a manifestation of the Company's commitment to information transparency, all stakeholders hence can access the latest information related to the Company in a transparent and accurate manner.

The Company's official website is prepared in accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 8/POJK.04/2015 concerning the Website of Issuers or Public Companies. This site is presented in two languages, namely Indonesian and English, and has fulfilled the mandate of Article 6 of POJK No. 8/POJK.04/2015, which requires the submission of information that includes, among others:

1. General Information of Issuers or Public Companies;
2. Information for Investors;
3. Corporate Governance Information; and
4. Corporate Social Responsibility Information.

On this website, the Company is committed to providing an effective communication channel, in order to facilitate stakeholders in accessing information that is relevant, comprehensive, and in accordance with the principle of information transparency.

Tabel Keterbukaan Informasi pada Situs Web Perusahaan
Table of Informations Disclosure on the Company's Perusahaan

Nama Kanal Channel Name	Konten Content
Info Perusahaan Company Info	• Tentang Kami • Visi, Misi dan Nilai Perusahaan 1. Visi dan Misi 2. Nilai Perusahaan • Struktur Perusahaan 1. Struktur Group Perusahaan 2. Struktur Organisasi Perusahaan • Manajemen 1. Direksi 2. Dewan Komisaris • Sambutan Direktur Utama • Sekretaris Perusahaan • Penghargaan dan Sertifikasi • Alamat dan Informasi Kontak • About Us • Vision, Mission and Company Values 1. Vision and Mission 2. Company Values • Company Structure 1. Company Group Structure 2. Company Organizational Structure • Management 1. Board of Directors 2. Board of Commissioners • President Director's Greeting • Corporate Secretary • Awards and Certifications • Address and Contact Information
Lini Bisnis Business Line	• Konstruksi 1. Lingkup Usaha 2. Proyek Berjalan 3. Proyek Selesai • Investasi dan Konsesi 1. Lingkup Usaha 2. Proyek Berjalan 3. Proyek Selesai • Modular 1. Lingkup Usaha 2. Proyek Berjalan 3. Proyek Selesai • Pracetak Gedung 1. Lingkup Usaha 2. Proyek Berjalan 3. Proyek Selesai • Construction 1. Scope of Business 2. Ongoing Projects 3. Completed Projects • Investment and Concession 1. Scope of Business 2. Ongoing Projects 3. Completed Projects • Modular 1. Scope of Business 2. Ongoing Projects 3. Completed Projects • Precast Building 1. Scope of Business 2. Ongoing Projects 3. Completed Projects

Tabel Keterbukaan Informasi pada Situs Web Perusahaan
Table of Informations Disclosure on the Company's Perusahaan

Nama Kanal Channel Name	Konten Content
Keberlanjutan Sustainability	• Tanggung Jawab Sosial Perusahaan • Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan • Human Capital • Tata Kelola Perusahaan • Corporate Social Responsibility • Occupational Safety, Health and Environment • Human Capital • Corporate Governance
Investor Investor	• Informasi Perseroan 1. Tentang Kami 2. Dewan Komisaris 3. Direksi • Informasi Finansial 1. Laporan Keuangan 2. Ikhtisar Keuangan 3. Presentasi Perseroan 4. Laporan Tahunan 5. Prospektus • Tata Kelola Perusahaan 1. Rapat Umum Pemegang Saham 2. Struktur dan Kebijakan GCG 3. Kode Etik 4. Komite Audit dan Risiko 5. Komite Nominasi dan Remunerasi 6. Sistem Pelaporan Pelanggaran • Keterbukaan Informasi 1. Pengumuman Emiten 2. Update Investor • Informasi Saham 1. Grafik Interaktif 2. Harga Historis 3. Fundamental Saham 4. Struktur Pemegang Saham 5. Informasi Dividen • Permintaan Informasi 1. Pemberitahuan Email 2. Daftar Analis 3. Unduh Dokumen 4. Kontak Invetsor Relation (IR) • Company Information 1. About Us 2. Board of Commissioners 3. Board of Directors • Financial Information 1. Financial Statements 2. Financial Highlights 3. Company Presentation 4. Annual Report 5. Prospectus • Corporate Governance 1. General Meeting of Shareholders 2. GCG Structure and Policy 3. Code of Ethics 4. Audit and Risk Committee 5. Nomination and Remuneration Committee 6. Violation Reporting System • Information Disclosure 1. Issuer Announcement 2. Investor Update • Stock Information 1. Interactive Charts 2. Historical Prices 3. Stock Fundamentals 4. Shareholder Structure 5. Dividend Information • Information Request 1. Email Notification 2. Analyst List 3. Documents Download 4. Contact of Investor Relation (IR)

Tabel Keterbukaan Informasi pada Situs Web Perusahaan
Table of Informations Disclosure on the Company's Perusahaan

Nama Kanal Channel Name	Konten Content
Media Media	• Media 1. Berita 2. Siaran Pers 3. Presentasi 4. Ebook 5. Kliping 6. Infografis • Press Kit 1. Logo WIKA Gedung 2. Logo Produk 3. Profil Perusahaan 4. Video Profil 5. Print Ads 6. Protokoler • Kegiatan Pers • Video Terkait • Media 1. News 2. Press Release 3. Presentation 4. E-book 5. Clippings 6. Infographics • Press Kit 1. WIKA Building Logo 2. Product Logo 3. Company Profile 4. Profile Video 5. Print Ads 6. Protocol • Press Activities • Related Videos
Good Corporate Governance (GCG)	• Ikhtisar • Komitmen GCG • Struktur GCG • Pedoman GCG • Manajemen Risiko • Whistle Blowing dan Gratifikasi • Pengadaan • Piagam Komite Audit • Sistem Manajemen Anti Penyuapan • Peta GCG • Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal • ACGS (ASEAN Corporate Governance Scorecard) • Anggaran Dasar Perusahaan • Overview • GCG Commitment • GCG Structure • GCG Guidelines • Risk Management • Whistle Blowing and Gratification • Procurement • Audit Committee Charter • Anti-Bribery Management System • GCG Map • Capital Market Supporting Institutions and Professions • ACGS (ASEAN Corporate Governance Scorecard) • Company Articles of Association
Building Information Modeling (BIM)	• *Building Information Modeling* • Implementasi *Building Information Modeling* • Sertifikasi *Building Information Modeling* • Building Information Modeling • Building Information Modeling Implementation • Building Information Modeling Certification

Tabel Keterbukaan Informasi pada Situs Web Perusahaan
Table of Informations Disclosure on the Company's Perusahaan

Nama Kanal Channel Name	Konten Content
Karir Career	• Berkarir Bersama Kami • Our People • Career with Us • Our People
Hubungi Kami Contact Us	Hubungi Kami Contact Us

Situs web Perseroan juga telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Annual Report Award, antara lain:

The Company's website has also met the criteria set out in the Annual Report Award, including:

Uraian Description	Ketersediaan Availability	Keterangan Information
Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu Shareholder information down to the individual ultimate owner	√	https://investor.wikagedung.co.id/shareholdings.html
Isi Kode Etik Code of Conducts Contents	√	https://www.wikagedung.co.id/gcg/pedoman-gcg
Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) General Meeting of Shareholders (GMS) Information	√	https://investor.wikagedung.co.id/gms.html
Struktur Grup Perusahaan Corporate Group Structure	√	https://www.wikagedung.co.id/info-perusahaan/struktur-perusahaan?q=struktur-group-perusahaan
Analisis Kinerja Keuangan Financial Performance Analysis	√	https://investor.wikagedung.co.id/financials.html
Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir) Separate annual financial statements (last 5 years)	√	https://investor.wikagedung.co.id/financials.html
Profil Dewan Komisaris dan Direksi Profile of the Board of Commissioners and Board of Directors	√	https://www.wikagedung.co.id/info-perusahaan/manajemen?q=dewan-komisaris https://www.wikagedung.co.id/info-perusahaan/manajemen?q=dewan-komisaris
Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal Charter of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, and Internal Audit Unit	√	https://www.wikagedung.co.id/gcg/pedoman-gcg

√ = tersedia pada situs web Perusahaan | available on the Company's website
x = belum tersedia pada situs web Perusahaan | not yet available on the Company's website

Perseroan juga memiliki akun media sosial sebagai bagian dari upaya keterbukaan informasi dan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan, di antaranya:

The Company also has social media accounts as part of its initiatives to provide open information and communication with all stakeholders, namely:

Facebook Instagram Twitter YouTube TikTok LinkedIn Spotify


MODULAR



TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS
Business Supporting Review

Perseroan menempatkan Teknologi Informasi (TI) sebagai salah satu pilar utama dalam mendukung efektivitas operasional dan pencapaian tujuan bisnis.

The Company places Information Technology (IT) as one of the main pillars in supporting operational effectiveness and achieving business goals.

Teknologi Informasi
Information Technology



Teknologi Informasi (TI) memiliki peran strategis dalam mendukung operasional dan pertumbuhan Perseroan, terutama dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, serta keamanan data. Sejalan dengan transformasi digital, Perseroan terus berinvestasi dalam sistem dan infrastruktur TI guna mengoptimalkan proses bisnis, memperkuat pengambilan keputusan berbasis data, serta meningkatkan layanan bagi pemangku kepentingan. Implementasi TI yang terintegrasi tidak hanya mendukung produktivitas internal, tetapi juga memperkuat daya saing Perseroan di industri konstruksi.

Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan daya saing, keunggulan kompetitif, dan efisiensi kerja melalui pemanfaatan TI yang inovatif. Untuk itu, Perseroan secara berkelanjutan mengoptimalkan peran sumber daya manusia dengan kompetensi khusus di bidang TI dalam pengendalian dan pengawasan sistem. Selain itu, Perseroan menerapkan inovasi dan pengembangan teknologi yang adaptif guna memastikan kebutuhan bisnis dapat diakomodasi secara optimal.

Komitmen Perseroan dalam pengelolaan dan pengembangan TI berlandaskan pada visi dan misi dalam membangun ekosistem TI yang terintegrasi. Strategi ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas proses bisnis utama, manajemen, dan fungsi pendukung, dengan tetap mengacu pada dinamika industri serta penerapan praktik terbaik.

Information Technology (IT) plays a strategic role in supporting the Company's operations and growth, especially in improving efficiency, accuracy, and data security. In line with digital transformation, the Company continues to invest in IT systems and infrastructure to optimize business processes, strengthen data-based decision-making, and improve services for stakeholders. Integrated IT implementation not only supports internal productivity, but also strengthens the Company's competitiveness in the construction industry.

As part of its long-term strategy, the Company is committed to continuously improving competitiveness, competitive advantage, and work efficiency through innovative IT utilization. To that end, the Company continuously optimizes the role of human resources with specific competencies in IT in system control and supervision. In addition, the Company implements adaptive technology innovation and development to ensure that business needs can be optimally accommodated.

The Company's commitment to IT management and development is based on its vision and mission in building an integrated IT ecosystem. This strategy is designed to improve the effectiveness of key business processes, management, and support functions, while remaining to referring to the industry dynamics and implementing best practices.

VISI DAN MISI TEKNOLOGI INFORMASI

Visi

Mengembangkan Teknologi Informasi sebagai Pelayanan yang Efisien, Efektif, Inovatif, dan Selaras dengan Proses Bisnis Perusahaan dengan Menerapkan Keamanan Digital.

Misi

1. **Eksploitasi dan eksplorasi benefit atas *improvement* proses bisnis berbasis TI**
   Identifikasi eksploitasi dan eksplorasi potensi benefit implementasi TI untuk meningkatkan kualitas proses bisnis, dalam rangka penurunan risiko bisnis, peningkatan efisiensi biaya, peningkatan mutu produk atau cara bisnis baru yang lebih efektif.

2. **Penyediaan Layanan Sistem Informasi Terintegrasi**
   Menyediakan layanan sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung proses bisnis manajemen, proses bisnis utama dan proses bisnis pendukung, merujuk kepada perkembangan dinamika bisnis dan *benchmarking industry.*

3. **Infrastruktur yang aman dan handal**
   Menyediakan layanan jaringan komunikasi, data center/*disaster recovery center* yang aman dan handal melalui adopsi platform teknologi yang memperhatikan aspek keberlangsungan layanan dan skalabilitas beban ke depan.

4. **Peningkatan kematangan Tata Kelola TI dan Data**
   Meningkatkan kematangan atau kapabilitas pengelolaan teknologi dan data, dalam rangka pemenuhan kepatuhan regulasi dan kebutuhan pemenangan persaingan industri.

KEBIJAKAN TEKNOLOGI INFORMASI

Perseroan telah menetapkan Kebijakan Pengamanan Informasi dan Manajemen Layanan Teknologi Informasi sebagai pedoman dalam mengelola keamanan data dan layanan teknologi guna mendukung operasional serta melindungi informasi strategis. Pimpinan dan seluruh karyawan Perseroan berkomitmen untuk memproteksi informasi kritikal pelanggan, internal Perseroan, dan karyawan. Langkah ini dilakukan untuk mendukung keberhasilan seluruh unit bisnis WEGE dengan memastikan perlindungan data, keamanan operasional, dan kepatuhan hukum. Perseroan memberikan layanan Teknologi Informasi (TI) terbaik melalui unit pengelolaan TI sesuai kebutuhan bisnis. Untuk mewujudkan hal tersebut, Perseroan berkomitmen secara konsisten menerapkan:

1. Penggunaan *software* berlisensi di lingkungan WEGE
2. Sistem Manajemen Pengamanan Informasi dalam ISO 27001
3. Sistem Manajemen Layanan dalam ISO 20000-1
4. Peraturan perundangan terkait Sistem Manajemen Pengamanan Informasi dan Sistem Manajemen Layanan

VISION AND MISSION OF INFORMATION TECHNOLOGY

Vision

Developing Information Technology as an Efficient, Effective, Innovative Service, and in Alignment with Company Business Processes by Implementing Digital Security.

Mission

1. **Exploitation and exploration of benefits from IT-based business process improvement**
   Identify exploitation and exploration of potential benefits of IT implementation to improve the quality of business processes, in order to reduce business risks, increase cost efficiency, improve product quality or new, more effective business methods.

2. **Provision of Integrated Information System Services**
   Providing integrated information system services to support business management processes, main business processes and supporting business processes, referring to the development of business dynamics and industry benchmarking.

3. **Safe and reliable infrastructure**
   Providing safe and reliable communication network services, data center/disaster recovery center through the adoption of technology platforms that pay attention to aspects of service continuity and future load scalability.

4. **Increasing the maturity of IT and Data Governance**
   Increasing the maturity or capability of technology and data management, in order to fulfill regulatory compliance and the needs of winning industry competition.

INFORMATION TECHNOLOGY POLICY

The Company has established an Information Security Policy and Information Technology Service Management as a guideline in managing data security and technology services to support operations and protect strategic information. The Company's management and all employees are committed to protecting critical customer information, internal Company information, and employees. This step is taken to support the success of all WEGE business units by ensuring data protection, operational security, and legal compliance. The Company provides the best Information Technology (IT) services through IT management units according to business needs. In order to realize this, the Company is committed to consistently implementing:

1. Use of licensed software in the environment of WEGE
2. Information Security Management System in ISO 27001
3. Service Management System in ISO 20000-1
4. Laws and regulations related to Information Security Management System and Service Management System

Tujuan keamanan informasi ditetapkan, dipantau, dan ditinjau secara berkala untuk memastikan relevansi terhadap kebutuhan bisnis WEGE dan mendukung keberlanjutan operasional.

Pengamanan informasi adalah tanggung jawab semua pihak di lingkungan WEGE. Manajemen layanan TI menjadi tanggung jawab unit pengelola TI dalam proses perencanaan, desain, pengembangan, implementasi, dan operasi layanan TI.

WEGE akan melakukan perbaikan berkelanjutan pada sistem manajemen keamanan informasi melalui pengembangan proses, pelatihan karyawan, dan adopsi teknologi terkini.

Kebijakan pengamanan informasi dan manajemen layanan TI diberlakukan secara menyeluruh di seluruh unit kerja serta pihak ketiga yang bekerja sama dengan WEGE. Kebijakan ini akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya dalam mendukung kebutuhan operasional dan tujuan strategis Perseroan. Kebijakan ini dikomunikasikan dan tersedia bagi seluruh *stakeholder*.

Information security objectives are set, monitored, and reviewed periodically to ensure relevance to WEGE's business needs and support operational sustainability.

Information security is the responsibility of all parties in the WEGE environment. IT service management is the responsibility of the IT management unit in the process of planning, designing, developing, implementing, and operating IT services.

WEGE will make continuous improvements to the information security management system through process development, employee training, and adoption of the latest technology.

Information security policies and IT service management are implemented comprehensively across all work units and third parties working with WEGE. This policy will be evaluated periodically to ensure its effectiveness in supporting the Company's operational needs and strategic objectives. This policy is communicated and available to all stakeholders.



Kebijakan Pengamanan Informasi dan Manajemen Layanan Teknologi Informasi
Information Security and Information Technology Service Management Policy



Sistem Manajemen Keamanan Informasi SNI ISO 27001:2013
Information Security Management System SNI ISO 27001:2013

KERANGKA KERJA TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Perseroan menerapkan kerangka kerja tata kelola Teknologi Informasi (TI) yang berlandaskan pada prinsip efektivitas, efisiensi, keamanan, serta kepatuhan terhadap regulasi dan standar industri. Kerangka kerja ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap inisiatif dan investasi TI selaras dengan strategi bisnis Perseroan, mendukung keberlanjutan operasional, serta meningkatkan daya saing di era digital.

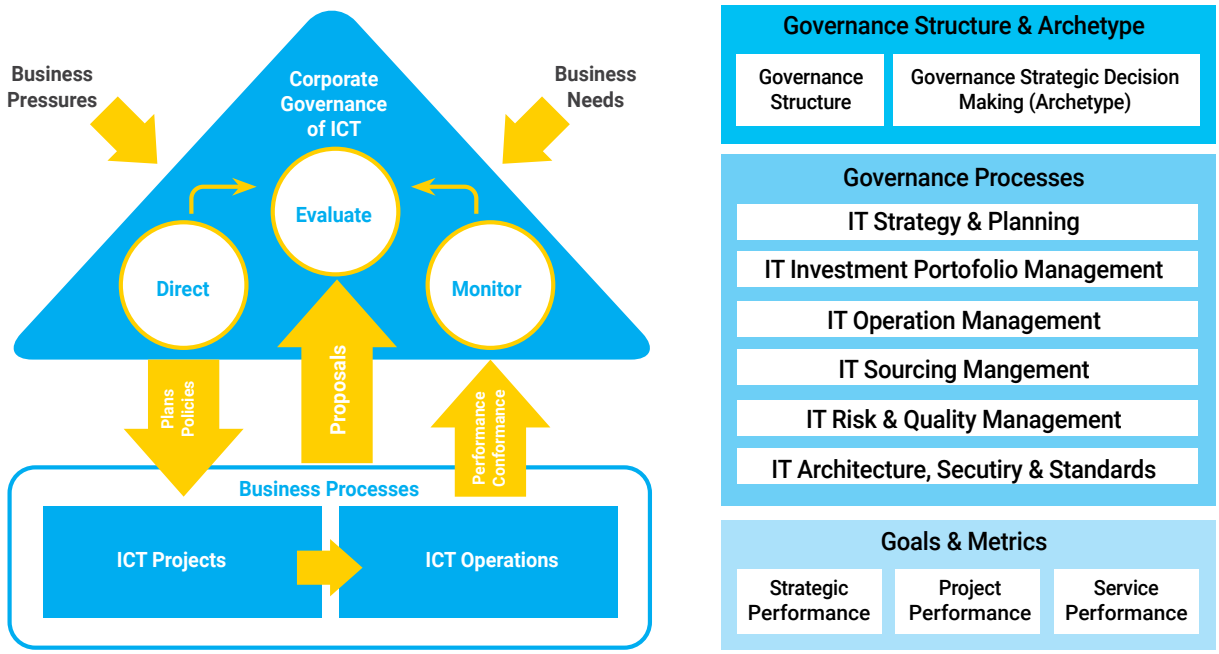
Dengan penerapan tata kelola yang terstruktur dan berbasis praktik terbaik, Perseroan berkomitmen untuk terus mengembangkan ekosistem TI yang andal, inovatif, serta mampu mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE FRAMEWORK

The Company implements an Information Technology (IT) governance framework based on the principles of effectiveness, efficiency, security, and compliance with regulations and industry standards. This framework is designed to ensure that every IT initiative and investment is aligned with the Company's business strategy, supports operational sustainability, and increases competitiveness in the digital era.

With the implementation of structured governance based on best practices, the Company is committed to continuing to develop a reliable, innovative IT ecosystem that is able to support sustainable business growth.

Kerangka Kerja Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi
Information and Communication Technology Governance Framework



PENGELOLA SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

Perseroan menempatkan Teknologi Informasi (TI) sebagai salah satu pilar utama dalam mendukung efektivitas operasional dan pencapaian tujuan bisnis. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas dan kebutuhan akan sistem TI yang andal, Perseroan telah membentuk struktur organisasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan TI secara terintegrasi.

Sistem TI di lingkungan Perseroan dikelola oleh Information Technology Division, yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Operasi II. Divisi ini memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan TI berjalan secara optimal, selaras dengan arah pengembangan bisnis, serta mampu menjawab tantangan industri yang semakin dinamis.

Sebagai bagian dari penguatan tata kelola TI, Information Technology Division membawahi dua departemen, yakni Enterprise Resources Planning Department dan Information System Department. Dengan struktur yang terarah dan berbasis best practice, Perseroan berkomitmen untuk terus mengembangkan kapabilitas TI guna meningkatkan efisiensi operasional, daya saing, serta ketahanan bisnis secara berkelanjutan.

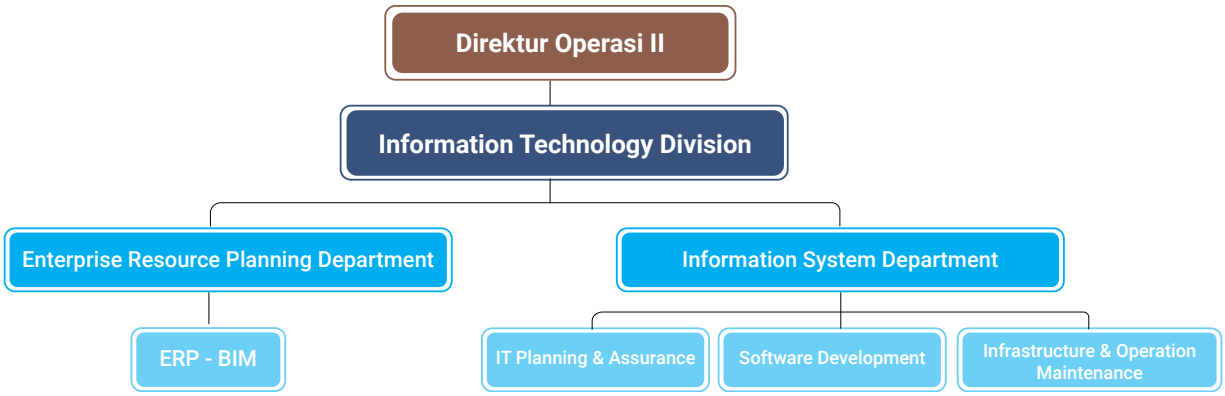
INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEM MANAGER

The Company places Information Technology (IT) as one of the main pillars in supporting operational effectiveness and achieving business goals. Along with the increasing complexity and need for a reliable IT system, the Company has established an organizational structure that is responsible for the management and development of IT in an integrated manner.

The IT system in the Company's environment is managed by the Information Technology Division, which is directly responsible to the Director of Operations II. This division has a strategic role in ensuring that IT management runs optimally, in conformity with the direction of business development, and is able to answer the challenges of an increasingly dynamic industry.

As part of strengthening IT governance, the Information Technology Division oversees two departments, namely the Enterprise Resources Planning Department and the Information System Department. With a structure that is focused and based on best practices, the Company is committed to continuing to develop IT capabilities to improve operational efficiency, competitiveness, and business resilience in a sustainable manner.

Struktur Organisasi Pengelola Sistem Teknologi Informasi WEGE per 31 Desember 2024
WEGE Information Technology System Management Organizational Structure as of December 31, 2024



Adapun tugas dan taggung jawab Information Technology Division sebagai pengelola sistem TI WEGE, adalah sebagai berikut:

The duties and responsibilities of the Information Technology Division as the WEGE IT system manager are as follows:

No	Posisi Position	Deskripsi Tanggung Jawab Description of Responsibilities
1	Enterprise Resource Planning Department	a. Mengelola, merencanakan, dan mengembangkan sistem ERP secara terintegrasi. b. Memastikan sistem ERP mendukung efisiensi proses kerja di seluruh unit perusahaan. c. Memantau pelaksanaan dan evaluasi sistem ERP, termasuk memberikan bantuan dan dukungan terkait. a. Managing, planning, and developing an integrated ERP system. b. Ensuring the ERP system supports work process efficiency across all company units. c. Monitoring the implementation and evaluation of the ERP system, including providing related assistance and support.
2	Information System Department	a. Mengembangkan dan memelihara sistem informasi yang digunakan oleh perusahaan. b. Menyediakan infrastruktur TI yang aman, andal, dan sesuai kebutuhan. c. Menangani manajemen data, keamanan informasi, serta koordinasi dengan vendor atau pihak eksternal. a. Developing and maintaining information systems used by the company. b. Providing secure, reliable, and appropriate IT infrastructure. c. Handling data management, information security, and coordination with vendors or external parties.
3	ERP-BIM	a. Melakukan analisis kebutuhan bisnis untuk penerapan ERP dan BIM (*Building Information Modeling*). b. Berkoordinasi dengan pengguna dan tim TI untuk memastikan solusi ERP/BIM tepat guna. c. Mengimplementasikan dan mengevaluasi keberhasilan penerapan sistem. a. Conducting business needs analysis for ERP and BIM (Building Information Modeling) implementation. b. Coordinating with users and IT teams to ensure ERP/BIM solutions are appropriate. c. Implementing and evaluating the success of system implementation.
4	IT Planning & Assurance	a. Menyusun perencanaan dan kebijakan TI di perusahaan. b. Mengawasi penerapan standar dan prosedur TI, termasuk audit dan quality assurance. c. Mendukung pengembangan dan inovasi teknologi untuk mendukung kinerja perusahaan. a. Developing IT planning and policies in the company. b. Supervising the implementation of IT standards and procedures, including audits and quality assurance. c. Supporting technology development and innovation to support company performance.

No	Posisi Position	Deskripsi Tanggung Jawab Description of Responsibilities
5	Software Development	a. Membangun dan memelihara aplikasi perangkat lunak sesuai kebutuhan bisnis. b. Menyusun dokumentasi teknis dan melakukan uji kualitas (QA). c. Melakukan pemecahan masalah (debugging) dan peningkatan fitur pada aplikasi yang sudah berjalan. a. Building and maintaining software applications according to business needs. b. Compiling technical documentation and conducting quality control (QA). c. Conducting troubleshooting (debugging) and feature enhancements on running applications.
6	Infrastructure & Operation Maintenance	a. Menangani infrastruktur jaringan, server, dan perangkat keras lainnya. b. Memberikan dukungan operasional, pemeliharaan, dan pemecahan masalah terkait TI. c. Menjaga ketersediaan layanan dan memastikan sistem berfungsi optimal setiap saat. a. Handling network infrastructure, servers, and other hardware. b. Providing operational support, maintenance, and troubleshooting related to IT. c. Maintaining service availability and ensure the system functions optimally at all times.

PELAKSANAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Dalam rangka menghadirkan sistem Teknologi Informasi (TI) yang andal, aman, dan selaras dengan kebutuhan bisnis, Perseroan mengimplementasikan TI dengan mengacu pada standar serta prinsip tata kelola yang diakui secara internasional. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas operasional, memperkuat keamanan informasi, serta mengoptimalkan proses bisnis guna mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Perseroan menerapkan aspek-aspek berikut dalam pengelolaan TI:

1. **COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies)**
   Perseroan mengacu pada standar ini untuk mengukur tingkat kematangan tata kelola TI guna memastikan keselarasan dengan strategi bisnis. Penyusunan dan penerapan COBIT 4.1 mengacu pada Dokumen Audit COBIT Versi 4.1 PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk Tahun 2022, yang menjadi referensi dalam meningkatkan efektivitas kontrol serta pengelolaan TI. Selain itu, proses peningkatan ke COBIT 2019 juga dilaksanakan melalui penilaian pada 24 proses tata kelola TI, dengan target peningkatan nilai kematangan hingga mencapai 3,20.

2. **ISO 27001**
   Dalam upaya memperkuat keamanan informasi, Perseroan menerapkan standar ISO 27001:2013 sebagai kerangka kerja komprehensif untuk pengelolaan risiko keamanan informasi. Standar ini memastikan sistem TI Perseroan memiliki mekanisme kontrol yang efektif dalam menjaga kerahasiaan, integritas, serta ketersediaan data, termasuk pengelolaan aset informasi dan pembatasan akses. Selain itu, Perseroan juga meningkatkan penerapan ISO 27001:2013 ke ISO 27001:2022 untuk memperkuat perlindungan informasi dan data pribadi secara lebih optimal.

IMPLEMENTATION OF INFORMATION TECHNOLOGY

In order to present a reliable, secure, and business-oriented Information Technology (IT) system, the Company implements IT by referring to internationally recognized governance standards and principles. This approach aims to improve operational effectiveness, strengthen information security, and optimize business processes to support sustainable growth.

The Company implements the following aspects in IT management:

1. **COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies)**
   The Company refers to this standard to measure the level of IT governance maturity to ensure alignment with business strategy. The preparation and implementation of COBIT 4.1 refers to the COBIT Audit Document Version 4.1 of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk in 2022, which is a reference in improving the effectiveness of IT control and management. In addition, the upgrade process to COBIT 2019 is also carried out through an assessment of 24 IT governance processes, with a target of increasing the maturity value to reach 3.20.

2. **ISO 27001**
   In an effort to strengthen information security, the Company has implemented the ISO 27001:2013 standard as a comprehensive framework for managing information security risks. This standard ensures that the Company's IT system has an effective control mechanism in maintaining the confidentiality, integrity, and availability of data, including information asset management and access restrictions. In addition, the Company has also upgraded the implementation of ISO 27001:2013 to ISO 27001:2022 to strengthen the protection of information and personal data more optimally.

3. **Rencana Jangka Panjang (RJP) Perseroan**
   Pengembangan TI selalu diselaraskan dengan arah pertumbuhan bisnis guna mengakomodasi kebutuhan strategis Perseroan. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan sistem TI yang mendukung efisiensi operasional, meningkatkan daya saing, serta memastikan keberlanjutan bisnis di tengah dinamika industri.

Sebagai bagian dari strategi pengelolaan dan pengembangan TI, Perseroan secara konsisten menghadirkan inisiatif yang sejalan dengan kebutuhan bisnis. Inisiatif tersebut dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

1. Technology Independence, yaitu independen terhadap teknologi spesifik;
2. Ease of Use, yaitu kemudahan penggunaan oleh user;
3. Application Integration, yaitu integrasi antar sistem informasi;
4. Analytical Services, yaitu penguatan layanan analitikal dan pengambilan keputusan.

Secara umum, pengelolaan dan pengembangan Teknologi Informasi Perseroan di tahun 2024, lebih ditekankan pada:

1. Implementasi **SAP** modul Project System, Sales & Distribution, Material Management, Finance & Controlling, Human Capital Management.
2. Persiapan Integrasi SAP dan ERP-WEGE.
3. Peningkatan keamanan informasi menggunakan standar ISO 27001.
4. Persiapan peningkatan versi dan skor *IT Maturity* menggunakan kerangka kerja COBIT untuk tata kelola dan manajemen TI.
5. Penguatan infrastruktur TI dan jaringan komunikasi untuk memastikan keandalan operasional dan efisiensi sistem.
6. Digitalisasi Operasional dengan penerapan tanda tangan digital dan sistem manajemen dokumen berbasis *paperless* untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi.

PROGRAM STRATEGIS 2024

Sejalan dengan arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP) serta roadmap Teknologi Informasi (TI) 2024-2028, Perseroan melalui Information Technology Division telah menyusun program strategis pengembangan TI tahun 2024 guna meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat daya saing, serta mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

3. **The Company's Long-Term Plan (RJP)**
   IT development is constantly aligned with the direction of business growth in order to accommodate the Company's strategic needs. This approach aims to create an IT system that supports operational efficiency, increases competitiveness, and ensures business sustainability amidst industry dynamics.

As part of its IT management and development strategy, the Company consistently presents initiatives that are in conformity with business needs. These initiatives are developed based on the following principles:

1. Technology Independence, which is independent of specific technology;
2. Ease of Use, which is ease of use by users;
3. Application Integration, namely integration between information systems;
4. Analytical Services, namely strengthening analytical services and decision making.

In general, the management and development of the Company's Information Technology in 2024, is more emphasized on:

1. Implementation of SAP modules Project System, Sales & Distribution, Material Management, Finance & Controlling, Human Capital Management.
2. Preparation of SAP and ERP-WEGE Integration.
3. Improving information security using the ISO 27001 standard.
4. Preparation of IT Maturity version and score upgrades using the COBIT framework for IT governance and management.
5. Strengthening IT infrastructure and communication networks to ensure operational reliability and system efficiency.
6. Operational Digitalization with the implementation of digital signatures and paperless-based document management systems to improve efficiency and accuracy.

STRATEGIC PROGRAM 2024

In conformity with the policy direction stated in the Company's Long-Term Plan (RJPP) and the 2024-2028 Information Technology (IT) roadmap, the Company through the Information Technology Division has prepared a strategic IT development program for 2024 to improve operational efficiency, strengthen competitiveness, and support sustainable business growth.

Adapun program strategis tersebut mencakup:

1. Penerapan modul ERP BIM WG di seluruh proyek untuk memperkuat integrasi data.
2. Pengembangan aplikasi CRM untuk mengoptimalkan pengelolaan basis data pelanggan.
3. Peningkatan kompetensi tim melalui pelatihan dan sertifikasi TI secara berkelanjutan.
4. Pengembangan aplikasi ERP Manufacturing guna memperlancar proses produksi di Pabrik Modular.
5. Digitalisasi bisnis dengan menambah kapasitas infrastruktur serta penerapan sistem paperless dan tanda tangan digital.
6. Persiapan audit eksternal guna mencapai IT Maturity menggunakan COBIT 2019 serta pemenuhan standar ISO 27001:2022.
7. Pembangunan dashboard ERP WG sebagai alat pemantauan kinerja dan evaluasi manajemen.
8. Integrasi aplikasi Data Pegawai dengan seluruh sistem operasional untuk menyelaraskan informasi sumber daya manusia.

MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI

Untuk memastikan keberhasilan program pengembangan Teknologi Informasi, Perseroan membentuk IT Steering Committee yang terdiri dari pemangku kepentingan utama dengan pengetahuan dan kompetensi di bidangnya masing-masing. Komite ini bertanggung jawab dalam mengarahkan, mengawasi, serta memastikan bahwa perencanaan, pengembangan, dan implementasi sistem TI berjalan sesuai dengan strategi dan kebutuhan bisnis Perseroan.

IT Steering Committee berperan dalam memberikan dukungan terhadap inisiatif TI, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, serta memastikan keselarasan antara investasi TI dengan tujuan strategis Perseroan. Selain itu, komite ini berfungsi sebagai pengawas dalam pelaksanaan program TI, guna memastikan kepatuhan terhadap kebijakan internal serta standar operasional TI yang berlaku secara internasional.

Sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola TI yang efektif, Perseroan juga menetapkan kebijakan dan regulasi yang mendukung percepatan implementasi inisiatif digital, dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik serta standar internasional di bidang teknologi informasi.

The strategic program includes:

1. Implementation of the ERP BIM WG module across all projects to strengthen data integration.
2. Development of CRM applications to optimize customer database management.
3. Improving team competency through continuous IT training and certification.
4. Development of ERP Manufacturing applications to streamline the production process at the Modular Factory.
5. Business digitalization by increasing infrastructure capacity and implementing a paperless system and digital signature.
6. Preparation for external audits to achieve IT Maturity using COBIT 2019 and compliance with ISO 27001:2022 standards.
7. Development of the ERP WG dashboard as a tool for monitoring performance and evaluating management.
8. Integration of Employee Data applications with all operational systems to align human resource information.

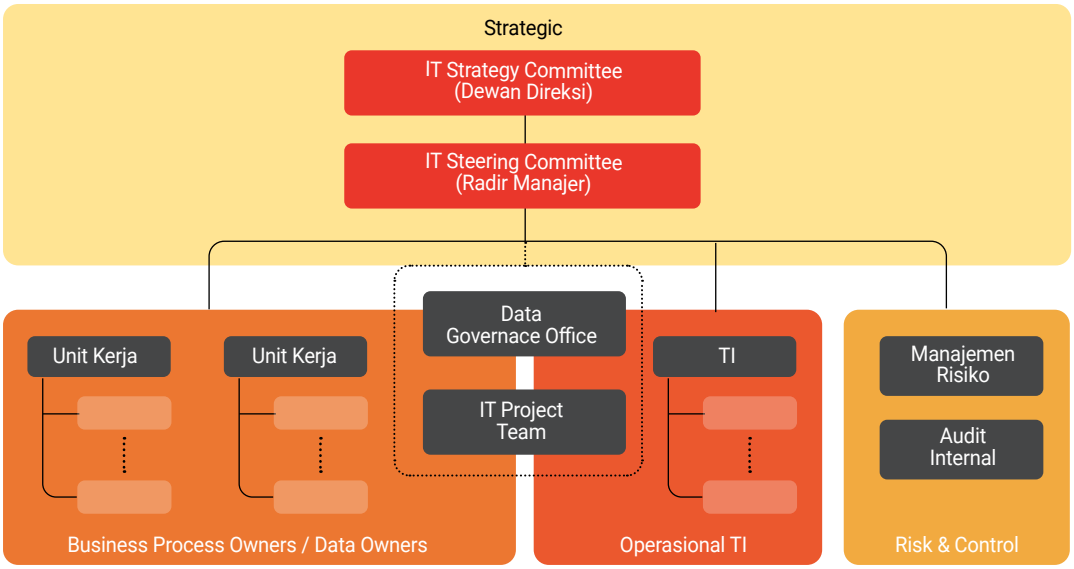
INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT

In order to ensure the success of the Information Technology development program, the Company has formed an IT Steering Committee consisting of key stakeholders with knowledge and competence in their respective fields. This committee is responsible for directing, supervising, and ensuring that the planning, development, and implementation of IT systems are in accordance with the Company's strategy and business needs.

The IT Steering Committee plays a role in providing support for IT initiatives, both in the short and long term, and ensuring alignment between IT investments and the Company's strategic objectives. In addition, this committee functions as a supervisor in the implementation of IT programs, to ensure compliance with internal policies and internationally applicable IT operational standards.

As a commitment to the effective IT governance, the Company also establishes policies and regulations that support the acceleration of the implementation of digital initiatives, while remaining to referring to the principles of good governance and international standards in the information technology field.

Manajemen Teknologi Informasi WEGE
WEGE Information Technology Management



IT MATURITY ASSESSMENT

Sebagai bagian dari upaya memastikan efektivitas proses bisnis dan tata kelola yang terstruktur, Perseroan secara berkala melakukan penilaian tingkat kematangan Teknologi Informasi (*IT Maturity*).

Berdasarkan asesmen independen pada tahun 2022, Perseroan meraih skor *IT Maturity* sebesar 3,03. Mengingat prioritas implementasi SAP pada tahun 2024, penilaian resmi berikutnya akan dijadwalkan kembali pada tahun 2025, dengan target peningkatan skor *IT Maturity* menjadi 3,20.

Pendekatan dan strategi TI yang diterapkan Perseroan tetap selaras dengan prinsip tata kelola yang baik. Penilaian atas *IT Maturity* mencakup berbagai aspek utama, seperti pengarahan, perencanaan dan kebijakan, akuntabilitas, pengukuran kinerja, pengembangan kompetensi, komunikasi, serta pemanfaatan teknologi dan otomatisasi. Assessment independen yang dijadwalkan pada tahun 2025 diharapkan dapat memberikan gambaran objektif atas pencapaian dan peningkatan yang telah dilakukan.

Ke depan, Perseroan akan terus memperkuat kapabilitas dan integrasi sistem TI guna meningkatkan efisiensi operasional, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, serta memperkokoh daya saing dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

IT MATURITY ASSESSMENT

As an effort to ensure the effectiveness of business processes and structured governance, the Company periodically assesses the level of Information Technology (IT) maturity.

Based on independent assessment in 2022, the Company achieved an IT Maturity score of 3.03. Given the priority of SAP implementation in 2024, the next official assessment will be rescheduled in 2025, with a target of increasing the IT Maturity score to 3.20.

The IT approach and strategy implemented by the Company remain in line with the principles of good governance. The assessment of IT Maturity covers various key aspects, such as direction, planning and policy, accountability, performance measurement, competency development, communication, and utilization of technology and automation. The independent assessment scheduled for 2025 is expected to provide an objective picture of the achievements and improvements that have been made.

Going forward, the Company will continue to strengthen the capabilities and integration of IT systems to improve operational efficiency, support data-based decision making, and strengthen competitiveness and sustainable business growth.

ROADMAP PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Perseroan telah menetapkan Roadmap Teknologi Informasi (TI) untuk periode 2024–2028 sebagai langkah strategis dalam memperkuat sistem TI yang terintegrasi dan adaptif terhadap kebutuhan bisnis. *Roadmap* ini mencakup pemetaan rencana jangka pendek dan jangka panjang yang bertujuan untuk mendukung pencapaian visi, misi, serta tujuan bisnis Perseroan.

Sebagai panduan utama dalam pengelolaan dan pengembangan TI, *Roadmap* ini memberikan arah yang jelas dan terstruktur terkait strategi investasi teknologi, modernisasi infrastruktur digital, serta penguatan sistem yang mendukung efektivitas operasional dan pengambilan keputusan berbasis data.

Dengan implementasi yang sistematis dan berkelanjutan, Perseroan berkomitmen untuk terus mendorong inovasi teknologi, meningkatkan kapabilitas digital, serta memperkuat ketahanan sistem dalam menghadapi dinamika industri dan percepatan transformasi digital.

INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT ROADMAP

The Company has established an Information Technology (IT) Roadmap for the period 2024–2028 as a strategic step in strengthening an integrated and adaptive IT system to business needs. This Roadmap includes mapping of short-term and long-term plans aimed at supporting the achievement of the Company's vision, mission, and business goals.

As the main guide in IT management and development, this Roadmap provides clear and structured direction regarding technology investment strategies, digital infrastructure modernization, and strengthening systems that support operational effectiveness and data-based decision making.

With systematic and sustainable implementation, the Company is committed to continuing to drive technological innovation, improve digital capabilities, and strengthen system resilience in facing industry dynamics and the acceleration of digital transformation.

***Roadmap* Teknologi Informasi WEGE 2024 – 2028**
WEGE Information Technology Roadmap 2024 - 2028

2024

Digitalization Starter

- IT Maturity: 3,00 - COBIT 2019
- ISO 27001:2013 Surveillance
- Asset Settlement
- Project Management
- Leadership Training
- L1 BIM Utilize
- ERP Evaluation

2025

IT Governance

- IT Maturity: 3,20
- ISO 27001:2022 Certification
- Refinancing, Monetizing SPV
- Engage, Ready to Work
- L2 BIM Optimize (All Project)
- ERP-SCM Implementation
- SAP Implementation
- WBS Training
- Legal-Adkon-Manajemen Risiko Terintegrasi
- Business Intelligence Feasibility Study

2026

ERP Optimization

- IT Maturity: 3,25
- SOP Adapted (Pedoman, Procedure, Instruksi Kerja)
- ISO 27001:2022 Surveillance
- ISO 20000 Certification
- Customer Oriented Program
- Engage, Sustainable Leadership
- L2 BIM Utilize, L3 BIM Optimize
- Business Intelligence Preparation & Development

2027

ERP Optimization & Integration

- IT Maturity: 3,30
- Dashboard Management/Business Intelligence
- Lean Manufacturing, Additive, 3D Modular
- ISO 27001 Recertification
- ISO 20000 Surveillance
- Monetizing Asset, Bond
- L3 BIM Optimize All Project
- Business Intelligence Development & Implementation

2028

Data Driven Decision Making

- IT Maturity: 3,35
- Big Data Research
- Business Intelligence Evaluation
- Lean Construction & Construction 4.0, Eco-friendly Material
- ISO 20000 Surveillance
- ISO 27001 Surveillance
- Restructure, Monetizing Asset, Right Issue
- Customer Centric Product
- DFMA
- L3 BIM Integration with ERP

FRAMEWORK IMPLEMENTASI DIGITALISASI

Perseroan menerapkan *Framework* Implementasi Digitalisasi sebagai panduan dalam mengembangkan ekosistem digital yang terintegrasi, guna meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung pencapaian tujuan bisnis. *Framework* ini mengacu pada tiga pilar utama, yaitu *People*, *Process*, dan *Technology*, yang berperan dalam membangun tata kelola teknologi informasi yang efektif.

DIGITALIZATION IMPLEMENTATION FRAMEWORK

The Company implements the Digitalization Implementation Framework as a guide in developing an integrated digital ecosystem, in order to improve operational efficiency and support the achievement of business goals. This framework refers to three main pillars, namely People, Process, and Technology, which play a role in building effective information technology governance.

***Framework* Implementasi Digitalisasi WEGE**
WEGE Digitalization Implementation Framework



INVESTASI TEKNOLOGI INFORMASI

Perseroan secara berkelanjutan melakukan investasi di bidang Teknologi Informasi (TI) guna mendukung optimalisasi sistem dan infrastruktur yang selaras dengan strategi bisnis. Perseroan meyakini bahwa pemanfaatan TI yang efektif berperan penting dalam meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat pertumbuhan, serta memperkuat daya saing di industri. Oleh karena itu, Perseroan mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan dan pengelolaan TI sebagai bagian dari strategi transformasi digital yang berkelanjutan.

Pada tahun 2024, Perseroan mengalokasikan anggaran sebesar Rp14,26 miliar untuk pengembangan sistem informasi dan infrastruktur guna mendukung pengembangan sesuai *roadmap* yang telah ditetapkan.

INFORMATION TECHNOLOGY INVESTMENT

The Company continuously invests in Information Technology (IT) to support the optimization of systems and infrastructure that are aligned with business strategies. The Company believes that effective use of IT plays an important role in improving operational efficiency, accelerating growth, and strengthening competitiveness in the industry. Therefore, the Company allocates a special budget for IT development and management as part of a sustainable digital transformation strategy.

In 2024, the Company allocated a budget of Rp14.26 billion for the development of information systems and infrastructure to support development according to the established roadmap.

Investasi ini mencerminkan komitmen Perseroan dalam membangun ekosistem TI yang andal, inovatif, dan terintegrasi guna mendukung efektivitas proses bisnis, meningkatkan ketahanan sistem, serta memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan usaha di tengah dinamika industri yang terus berkembang.

RENCANA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KE DEPAN

Seiring dengan meningkatnya peran Teknologi Informasi (TI) dalam operasional Perseroan, TI tidak lagi sekadar alat pendukung, tetapi telah menjadi elemen strategis yang mendorong pencapaian tujuan bisnis. Pemanfaatan teknologi yang optimal memungkinkan Perseroan meningkatkan efisiensi, mempercepat transformasi digital, serta memperkuat daya saing di industri.

Untuk memastikan keberlanjutan inovasi dan efektivitas pengelolaan TI, Perseroan telah menyusun rencana pengembangan TI untuk tahun 2025 dengan mengacu pada Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) serta roadmap TI. Rencana ini mencakup beberapa aspek utama sebagai berikut:

1. Transformasi digital berkelanjutan dilakukan dengan mengoptimalkan integrasi SAP-ERP-BIM-WEGE,
2. Perseroan akan memperkuat tata kelola dan keamanan informasi melalui peningkatan *IT Maturity* serta penerapan standar ISO 27001:2022.

This investment reflects the Company's commitment to building a reliable, innovative, and integrated IT ecosystem to support the effectiveness of business processes, improve system resilience, and ensure business sustainability and growth amidst the dynamics of the ever-evolving industry.

INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT PLAN FOR THE FUTURE

As the role of Information Technology (IT) in the Company's operations increases, IT is no longer only a supporting tool, but has become a strategic element that drives the achievement of business goals. The optimal utilization of technology allows the Company to increase efficiency, accelerate digital transformation, and strengthen competitiveness in the industry.

In order to ensure the sustainability of innovation and the effectiveness of IT management, the Company has prepared an IT development plan for 2025 by referring to the Company's Long-Term Plan (RJPP) and the IT roadmap. This plan covers several main aspects, are as follows:

1. Continuous digital transformation is carried out by optimizing the integration of SAP-ERP-BIM-WEGE,
2. The Company will strengthen governance and information security by increasing IT Maturity and implementing the ISO 27001:2022 standard.

Building Information Modeling (BIM)
Building Information Modeling (BIM)



Sebagai bagian dari transformasi digital dalam industri konstruksi, Perseroan telah mengadopsi *Building Information Modeling* (BIM) untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam seluruh tahapan proyek. BIM merupakan teknologi yang memungkinkan simulasi informasi proyek secara menyeluruh dalam model tiga dimensi yang terintegrasi, sehingga memfasilitasi perencanaan yang lebih presisi, optimalisasi sumber daya, serta koordinasi antar disiplin yang lebih efektif.

Perseroan mulai menerapkan BIM sejak tahun 2016, dengan proyek Jakarta International Velodrome yang menjadi salah satu venue dalam Asian Games 2018. Keberhasilan implementasi teknologi ini tidak hanya meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan proyek, tetapi juga menjadi titik awal bagi Perseroan dalam memperluas pemanfaatan BIM pada berbagai proyek konstruksi strategis lainnya.

Dengan semakin kompleksnya kebutuhan industri konstruksi, Perseroan terus mengembangkan kapabilitas BIM melalui peningkatan kompetensi tenaga ahli, investasi dalam teknologi pendukung, serta penguatan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Langkah ini sejalan dengan komitmen Perseroan untuk menghadirkan solusi konstruksi yang lebih inovatif, efisien, dan berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan bisnis serta menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan.

SERTIFIKASI *BUILDING INFORMATION MODELING*

Perseroan terus memperkuat komitmennya dalam penerapan teknologi *Building Information Modeling* (BIM) dengan mengedepankan standar internasional. Sebagai pencapaian signifikan, Perseroan menjadi yang pertama di Indonesia yang meraih Sertifikasi ISO 19650-1:2018 BSI Kitemark dan ISO 19650-2:2018 BSI Kitemark dari PT BSI (British

As part of the digital transformation in the construction industry, the Company has adopted Building Information Modeling (BIM) to improve efficiency and accuracy in all stages of the project. BIM is a technology that enables the simulation of project information as a whole in an integrated three-dimensional model, thus facilitating more precise planning, resource optimization, and more effective interdisciplinary coordination.

The Company began implementing BIM in 2016, with the Jakarta International Velodrome project which was one of the venues for the 2018 Asian Games. The successful implementation of this technology not only improved the quality and timeliness of project execution, but also became the starting point for the Company in expanding the use of BIM in various other strategic construction projects.

With the increasingly complex needs of the construction industry, the Company continues to develop BIM capabilities by improving the competence of experts, investing in supporting technology, and strengthening collaboration with various stakeholders. This step is in conformity with the Company's commitment to present more innovative, efficient, and sustainable construction solutions to support business growth and create added value for stakeholders.

BUILDING INFORMATION MODELING CERTIFICATION

The Company continues to strengthen its commitment to implementing Building Information Modeling (BIM) technology by prioritizing international standards. As a significant achievement, the Company is the first in Indonesia to achieve ISO 19650-1:2018 BSI Kitemark and ISO 19650-2:2018 BSI Kitemark certification from PT BSI (British

Standards Institute) Group Indonesia. Sertifikasi ini menegaskan bahwa Perseroan telah memenuhi standar tertinggi dalam pengelolaan informasi berbasis BIM, mulai dari tahap perencanaan hingga implementasi proyek konstruksi.

BSI Kitemark merupakan sertifikasi dengan level tertinggi di bidang BIM, yang diberikan oleh BSI Group, satu-satunya lembaga sertifikasi internasional resmi dari Pemerintah Britania Raya. Pengakuan ini mencerminkan keunggulan Perseroan dalam menerapkan BIM secara terstruktur, efektif, dan sesuai dengan standar global, sehingga meningkatkan daya saing dalam industri konstruksi.

Dengan diperolehnya sertifikasi ini, Perseroan semakin memperkuat posisinya sebagai pelopor dalam penerapan BIM di Indonesia. Ke depan, Perseroan akan terus mengembangkan dan mengoptimalkan teknologi BIM dalam berbagai proyek strategis guna mendorong efisiensi, inovasi, dan keberlanjutan dalam industri konstruksi.

Standards Institute) Group Indonesia. This certification confirms that the Company has met the highest standards in BIM-based information management, from the planning stage to the implementation of construction projects.

BSI Kitemark is the highest level of certification in the field of BIM, awarded by BSI Group, the only official international certification body from the British Government. This recognition reflects the Company's excellence in implementing BIM in a structured, effective, and global standard manner, thereby increasing competitiveness in the construction industry.

By obtaining this certification, the Company further strengthens its position as a pioneer in implementing BIM in Indonesia. Going forward, the Company will continue to develop and optimize BIM technology in numerous strategic projects to drive efficiency, innovation, and sustainability in the construction industry.

BSI Kitemark Certificate Building Information Modeling





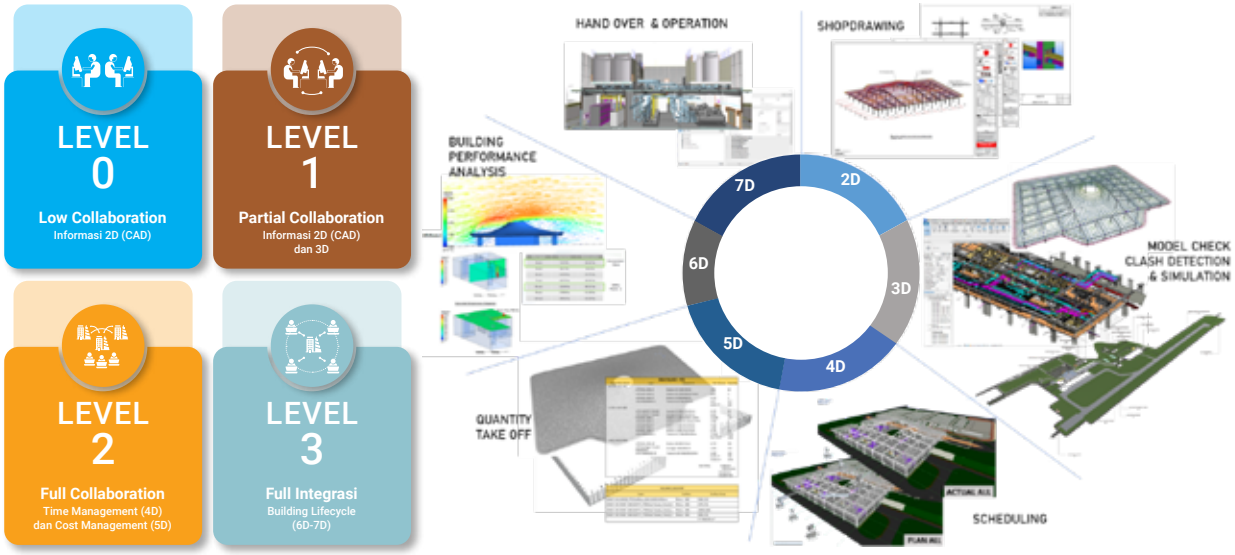
LEVEL PENERAPAN *BUILDING INFORMATION MODELING*

Perseroan terus mengembangkan *Building Information Modeling* (BIM) sebagai bagian dari transformasi digital di industri konstruksi. BIM tidak hanya meningkatkan efisiensi dan akurasi proyek, tetapi juga mengintegrasikan manajemen informasi untuk perencanaan dan pengendalian yang lebih efektif. Implementasi BIM dilakukan mulai dari proses tender hingga tahap konstruksi di lapangan, memastikan setiap fase proyek terkelola dengan baik. Proses penerapan yang dijalankan Perseroan mencakup berbagai level, dari 3D hingga 7D, yang mendukung optimalisasi proyek serta meningkatkan daya saing dan inovasi Perseroan.

APPLICATION LEVEL OF BUILDING INFORMATION MODELING

The Company continues to develop Building Information Modeling (BIM) as part of the digital transformation in the construction industry. BIM does not only improve project efficiency and accuracy, but also to integrate information management for more effective planning and control. BIM implementation is carried out from the tender process to the construction stage in the field, ensuring that each phase of the project is well managed. The implementation process carried out by the Company covers various levels, from 3D to 7D, which supports project optimization and increases the Company's competitiveness and innovation.

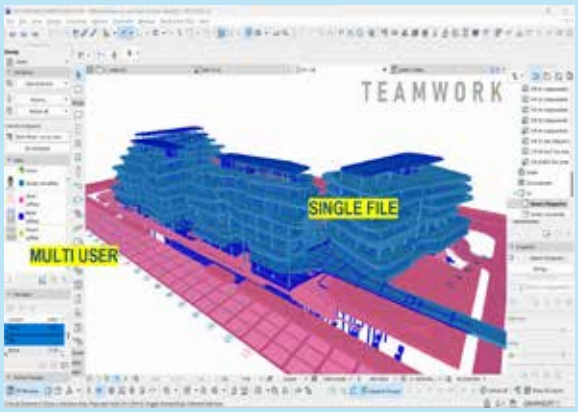
Level Penerapan *Building Information Modeling*
Application Level of Building Information Modeling



01 SURVEY PHOTOGRAMMETRY
PHOTOGRAMMETRY SURVEY

Photogrammetry atau *aerial surveying* adalah teknik pemetaan yang memanfaatkan foto udara. Proses ini dimulai dengan pengambilan foto menggunakan drone yang telah diprogram dengan jalur dan sudut pengambilan tertentu. Foto yang dihasilkan kemudian diolah menjadi *point cloud*, yang pada tahap akhir menghasilkan gambaran 3D dari kondisi eksisting serta data kontur. Output ini memberikan visualisasi yang akurat untuk memahami kondisi lapangan secara menyeluruh.

Photogrammetry or aerial surveying is a mapping technique that utilizes aerial photography. This process begins with taking photos using a drone that has been programmed with a specific path and angle. The resulting photos are then processed into a point cloud, which in the final stage produces a 3D image of existing conditions and contour data. This output provides accurate visualization to understand field conditions as a whole.





02 KOORDINASI DESAIN
DESIGN COORDINATION

Koordinasi desain dilakukan melalui pembagian tugas yang terstruktur, di mana setiap individu dapat bekerja secara bersamaan menggunakan fitur cloud dan file sharing. Dengan sistem ini, pengguna dapat berkolaborasi dalam satu model file kapan pun dan di mana pun.

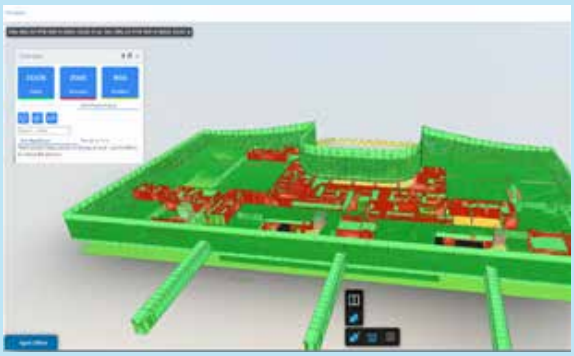
Selain itu, koordinasi juga mencakup pertukaran informasi proyek yang dikelola melalui berbagai sistem dan tools oleh seluruh stakeholder. Kolaborasi berbasis cloud memungkinkan tim proyek bekerja lebih efektif dengan menghubungkan semua pihak terkait dalam berbagai aspek siklus hidup proyek.

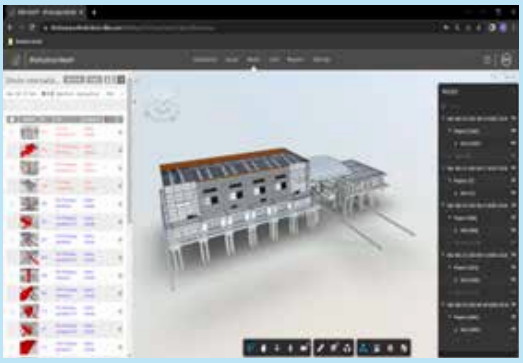
Untuk memastikan interoperabilitas antar disiplin, digunakan format file standar seperti IFC (*Industry Foundation Class*), yang memungkinkan setiap tim proyek mengakses data sesuai dengan kebutuhan fungsionalnya.

Design coordination is done through a structured division of duties, where each individual can work simultaneously using cloud and file sharing features. With this system, the users can collaborate on a single file model anytime and anywhere.

Besides, the coordination also includes the exchange of project information managed through a number of systems and tools by all stakeholders. Cloud-based collaboration enables project teams to work more effectively by connecting all parties involved in various aspects of the project life cycle.

In order to ensure interoperability between disciplines, standard file formats such as IFC (Industry Foundation Class) are used, which allows each project team to access data according to their functional needs.





03 VIRTUAL REALITY
VIRTUAL REALITY

Model yang dibuat menggunakan Archicad atau Revit disinkronisasikan langsung ke Twinmotion, kemudian diekspor sebagai file BIM Motion agar dapat dioperasikan dalam mode Virtual Reality (VR). Dengan VR, perubahan kondisi bangunan dapat divisualisasikan secara *real-time*, termasuk simulasi faktor lingkungan seperti cuaca (hujan, musim kemarau, dan lainnya), sehingga memberikan representasi yang lebih dinamis dan mendetail.

Models created using Archicad or Revit are synchronized directly to Twinmotion, later exported as BIM Motion files hence they can be operated in Virtual Reality (VR) mode. With VR, changes in building conditions can be visualized in real-time, including simulations of environmental factors such as weather (rain, dry season, and others), thus providing a more dynamic and detailed representation.



04 AUGMENTED REALITY
AUGMENTED REALITY

Pemodelan 3D dapat diekspor menjadi maket digital yang dapat diakses di mana saja dengan skala yang telah disesuaikan, memungkinkan visualisasi yang lebih interaktif dan fleksibel sesuai kebutuhan.

3D Modeling can be exported into digital mock-ups that can be accessed anywhere at a customized scale, allowing for more interactive and flexible visualizations as needed.



05 BIMX
BIMX

BIMx menampilkan model dalam tampilan 2D dan 3D, sehingga mendukung proses tinjauan bangunan di lapangan melalui berbagai perangkat. Selain itu, BIMx menyajikan informasi detail terkait posisi lokasi, spesifikasi, serta referensi vendor, sehingga meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan.

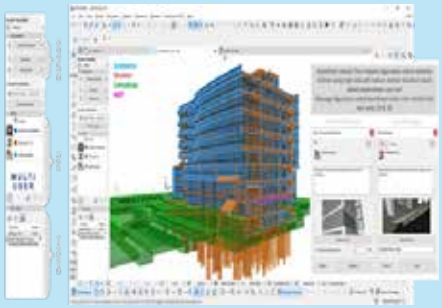
BIMx displays models in 2D and 3D views, supporting the building review process in the field through various devices. Moreover, BIMx presents detailed information regarding location positions, specifications, and vendor references, increasing efficiency in decision making.



06 BIM 3D
BIM 3D

BIM 3D merupakan representasi digital tiga dimensi yang mencakup informasi seluruh elemen fisik dalam proyek konstruksi. Teknologi ini mendukung koordinasi, integrasi, dan visualisasi yang akurat untuk memastikan efektivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek.

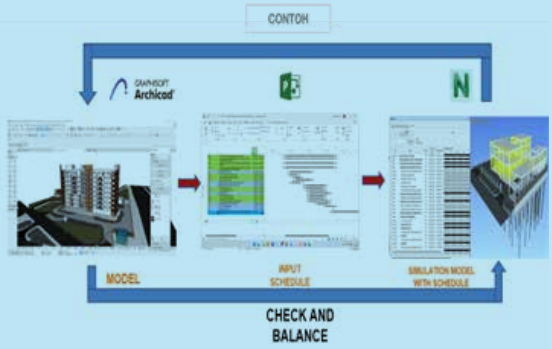
BIM 3D is a three-dimensional digital representation that includes information on all physical elements in a construction project. This technology supports accurate coordination, integration, and visualization to ensure effectiveness in project planning and implementation.



07 BIM 4D
BIM 4D

BIM 4D menyajikan pemodelan tahapan konstruksi yang terintegrasi dengan aspek waktu. Teknologi ini memungkinkan pemantauan progres proyek secara real-time, memastikan efisiensi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan proyek, serta meningkatkan transparansi dalam setiap tahap konstruksi.

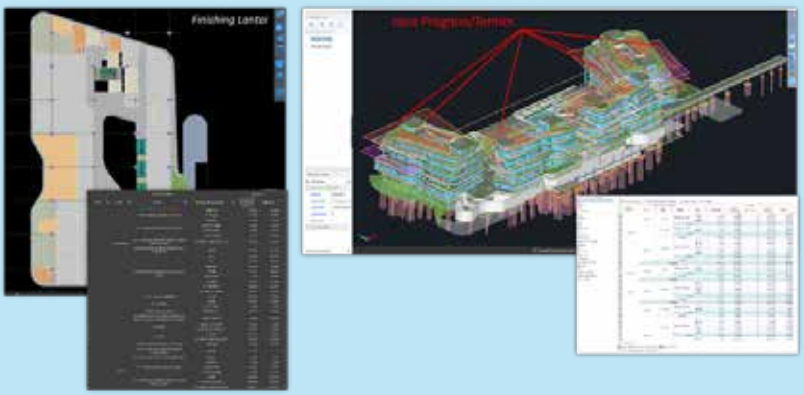
BIM 4D presents integrated construction stage Modeling with time aspects. This technology allows real-time monitoring of project progress, ensures efficiency in project planning, implementation, and management, and increases transparency in every stage of construction.



08 BIM 5D
BIM 5D

Penerapan BIM 5D menggunakan *software* Glodon Cubicost sebagai solusi spesialis dalam Take-off Quantity. Teknologi ini mendukung tim estimasi dan Quantity Surveyor (QS) dalam pengendalian volume pekerjaan, pengelolaan segmentasi progres, serta klaim pembayaran secara lebih akurat dan efisien, sehingga meningkatkan transparansi dan efektivitas dalam pengelolaan biaya konstruksi.

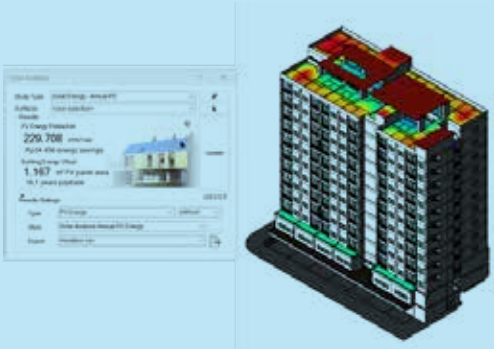
The implementation of BIM 5D uses Glodon Cubicost software as a specialist solution in Take-off Quantity. This technology supports the estimation team and Quantity Surveyor (QS) in controlling work volume, managing progress segmentation, and payment claims more accurately and efficiently, thereby increasing transparency and effectiveness in managing construction costs.



09 BIM 6D
BIM 6D

BIM 6D mendukung analisis energi bangunan dengan menggunakan *software* Rhinoceros yang terintegrasi dengan Grasshopper, Ladybug, Honeybee, dan EnergyPlus. Teknologi ini memungkinkan evaluasi menyeluruh terhadap aspek performa bangunan, seperti heat transfer, OTTV, pencahayaan alami, dan sistem pendingin. Selain itu, BIM 6D berperan dalam optimalisasi desain untuk memenuhi standar *Green Building*, mendukung efisiensi energi, dan keberlanjutan bangunan.

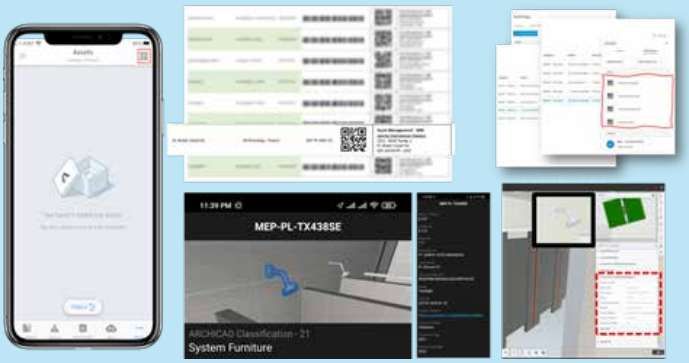
BIM 6D supports building energy analysis using Rhinoceros software integrated with Grasshopper, Ladybug, Honeybee, and EnergyPlus. This technology enables a comprehensive evaluation of building performance aspects, such as heat transfer, OTTV, natural lighting, and cooling systems. Additionally, BIM 6D plays a role in optimizing designs to meet Green Building standards, support energy efficiency, and building sustainability.



10 BIM 7D
BIM 7D

BIM 7D merupakan pendekatan terintegrasi dalam manajemen fasilitas, di mana seluruh informasi terkait pengoperasian dan pemeliharaan bangunan dikonsolidasikan dalam satu model informasi. Metode ini memungkinkan pengelola gedung melacak aset penting, termasuk status operasional, manual pemeliharaan, informasi garansi, serta spesifikasi teknis, guna meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan pengelolaan fasilitas.

BIM 7D is an integrated approach to facility management, where all information related to building operations and maintenance is consolidated in one information model. This method allows building managers to track critical assets, including operational status, maintenance manuals, warranty information, and technical specifications, to improve the efficiency and sustainability of facility management.



IMPLEMENTASI *BUILDING INFORMATION MODELING*

Sebagai bagian dari strategi pengembangan teknologi dan inovasi, Perseroan terus mengoptimalkan penerapan *Building Information Modeling* (BIM) guna meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kolaborasi dalam setiap tahapan proyek. BIM telah diintegrasikan sejak fase tender untuk memperkuat daya saing Perseroan dalam proses perolehan proyek, dengan menghadirkan model dan alat digital dalam *beauty contest tender*. Beberapa teknologi yang digunakan mencakup *Virtual Reality* (VR), yang menciptakan simulasi lingkungan nyata dalam bentuk screenplay; *Augmented Reality* (AR), yang menghadirkan maket digital secara interaktif untuk memberikan gambaran lebih jelas terhadap desain proyek; serta aplikasi BIMx, yang memungkinkan visualisasi desain konstruksi secara *real-time* melalui perangkat seluler, sehingga mempermudah koordinasi di lapangan.

Sepanjang tahun 2024, Perseroan berhasil menerapkan BIM secara menyeluruh di seluruh proyek, memastikan proses perencanaan dan eksekusi yang lebih terintegrasi serta meningkatkan efektivitas koordinasi tim proyek. Selain itu, Perseroan juga berfokus pada pengembangan sumber daya manusia berbasis teknologi untuk mendukung keberlanjutan implementasi BIM dan memastikan kesiapan tenaga kerja dalam menghadapi transformasi digital di sektor konstruksi.

Komitmen Perseroan dalam implementasi BIM tercermin pada proyek-proyek yang telah dijalankan. Secara kumulatif, sejak 2016 hingga 2024, Perseroan telah menerapkan BIM pada 53 proyek dengan berbagai tipe, mencakup beragam tingkat kompleksitas sesuai karakteristik masing-masing proyek.

Beberapa proyek utama yang telah mengadopsi BIM antara lain Jakarta International Stadium (JIS), Grha Pertamina Jakarta, Pelindo Office Surabaya, Pasar Rakyat Pariaman, UGM Paket 3, Bank Indonesia Palangkaraya, Hotel Domestik Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Gedung SGLC & ERIC Kampus UGM, Dhoho International Airport, Gedung Bio Farma Bandung, dan masih banyak lainnya. Selain itu, BIM juga telah diterapkan pada proyek-proyek berskala besar dengan nilai proyek lebih dari Rp1,0 triliun, di antaranya Jakarta International Stadium (JIS) senilai Rp1,89 triliun (2019), Bandara International Dhoho Kediri senilai Rp1,79 triliun (2022), serta Rusun Paspampres IKN senilai Rp1,63 triliun (2023).

Penerapan BIM di berbagai proyek ini mencerminkan komitmen Perseroan dalam meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akurasi perencanaan konstruksi, sekaligus memperkuat daya saing di industri konstruksi melalui pemanfaatan teknologi digital.

IMPLEMENTATION OF BUILDING INFORMATION MODELING

As part of its technology and innovation development strategy, the Company continues to optimize the implementation of Building Information Modeling (BIM) to improve efficiency, accuracy, and collaboration in every stage of the project. BIM has been integrated since the tender phase to strengthen the Company's competitiveness in the project acquisition process, by presenting digital models and tools in the beauty contest tender. Some of the technologies used include Virtual Reality (VR), which creates a simulation of a real environment in the form of a screenplay; Augmented Reality (AR), which presents interactive digital models to provide a clearer picture of the project design; and the BIMx application, which allows real-time visualization of construction designs via mobile devices, thus facilitating coordination in the field.

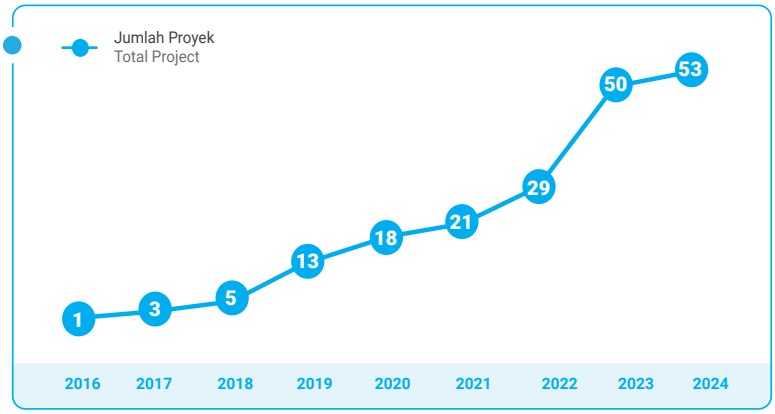
Throughout 2024, the Company successfully implemented BIM comprehensively across all projects, ensuring a more integrated planning and execution process and increasing the effectiveness of project team coordination. In addition, the Company also focuses on developing technology-based human resources to support the sustainability of BIM implementation and ensure the readiness of the workforce in facing the digital transformation in the construction sector.

The Company's commitment to implementing BIM is reflected in the projects that have been carried out. Cumulatively, from 2016 to 2024, the Company has implemented BIM in 53 projects of various types, covering various levels of complexity according to the characteristics of each project.

Several major projects that have adopted BIM include Jakarta International Stadium (JIS), Grha Pertamina Jakarta, Pelindo Office Surabaya, Pasar Rakyat Pariaman, UGM Package 3, Bank Indonesia Palangkaraya, Domestic Hotel Terminal 3 Soekarno-Hatta International Airport, SGLC & ERIC Building UGM Campus, Dhoho International Airport, Bio Farma Building Bandung, and many others. In addition, BIM has also been implemented in large-scale projects with a project value of more than Rp1.0 trillion, including Jakarta International Stadium (JIS) worth Rp1.89 trillion (2019), Dhoho Kediri International Airport worth Rp1.79 trillion (2022), and Rusun Paspampres IKN worth Rp1.63 trillion (2023).

The implementation of BIM in various projects reflects the Company's commitment to increasing the effectiveness, transparency and accuracy of construction planning, while strengthening competitiveness in the construction industry through the use of digital technology.

Implementasi BIM di Proyek 2016-2024
BIM Implementation in Projects 2016-2024



PENGHARGAAN ATAS PENERAPAN *BUILDING INFORMATION MODELING*

Sebagai bagian dari transformasi digital di industri konstruksi, Perseroan terus mengembangkan dan mengoptimalkan penerapan *Building Information Modeling* (BIM) guna meningkatkan efisiensi, akurasi, serta kolaborasi dalam setiap tahapan proyek. BIM memungkinkan integrasi data yang lebih baik, visualisasi yang lebih detail, serta perencanaan yang lebih matang dalam proses konstruksi, sehingga menghasilkan proyek yang lebih berkualitas dan tepat waktu.

Keberhasilan Perseroan dalam menerapkan BIM memperoleh pengakuan di tingkat internasional dengan diraihnya penghargaan Innovator of the Year dalam ASEAN Autodesk Award 2024 atas proyek Bandara Internasional Dhoho Kediri. Penghargaan ini menjadi bukti atas komitmen Perseroan dalam mengadopsi teknologi konstruksi terkini, mendorong efisiensi dan inovasi, serta memperkuat daya saing di industri konstruksi berbasis digital.

AWARDS FOR THE IMPLEMENTATION OF BUILDING INFORMATION MODELING

As part of the digital transformation in the construction industry, the Company continues to develop and optimize the implementation of Building Information Modeling (BIM) to improve efficiency, accuracy, and collaboration in every stage of the project. BIM allows for better data integration, more detailed visualization, and more mature planning in the construction process, resulting in projects that are of higher quality and on time.

The Company's success in implementing BIM has received international recognition by winning the Innovator of the Year award at the 2024 ASEAN Autodesk Award for the Dhoho Kediri International Airport project. This award is proof of the Company's commitment to adopting the latest construction technology, driving efficiency and innovation, and strengthening competitiveness in the digital-based construction industry.

Innovator of the Year di ASEAN Autodesk Award 2024
BIM proyek Bandara Internasional Dhoho Kediri
BIM of Dhoho Kediri International Airport project



BENCHMARKING TERHADAP IMPLEMENTASI BIM WEGE

Keberhasilan BIMWG dalam meraih berbagai penghargaan di tingkat internasional, khususnya di Asia Tenggara (ASEAN), menjadikan WEGE sebagai tujuan *benchmarking* bagi institusi akademik. Salah satu kegiatan *benchmarking* tersebut dilakukan oleh Universiti Putra Malaysia (UPM) pada 10 Desember 2024 di Kantor Pusat WEGE, Jakarta.

Kegiatan ini dihadiri oleh Dr. Maszura Abdul Ghafar selaku Koordinator Program Studi beserta dua perwakilan mahasiswa dari UPM. Dari WEGE, turut hadir Purba Yudha Tama selaku Corporate Secretary, Arddhanu Zunanto Hardhi selaku Manager of BIM Department, serta sejumlah pegawai lainnya.

Diskusi dalam sesi ini menjadi wadah pertukaran pengetahuan yang konstruktif antara kedua institusi. Kedua pihak berbagi wawasan mengenai implementasi BIM serta pencapaian di bidang teknologi konstruksi. Selain itu, dibahas pula strategi pengembangan dan inovasi untuk meningkatkan efektivitas penerapan teknologi konstruksi di sektor masing-masing.

BENCHMARKING ON THE IMPLEMENTATION OF BIM WEGE

BIMWG's success in winning various awards at the international level, especially in Southeast Asia (ASEAN), has made WEGE a benchmarking destination for academic institutions. One of the benchmarking activities was carried out by Universiti Putra Malaysia (UPM) on December 10, 2024 at WEGE Head Office, Jakarta.

This activity was attended by Dr. Maszura Abdul Ghafar as the Study Program Coordinator along with two student representatives from UPM. Also present from WEGE were Purba Yudha Tama as Corporate Secretary, Arddhanu Zunanto Hardhi as Manager of the BIM Department, and a number of other employees.

The discussion in this session became a forum for constructive knowledge exchange between the two institutions. Both parties shared insights regarding BIM implementation and achievements in the field of construction technology. Besides, the development and innovation strategies were also discussed to increase the effectiveness of the application of construction technology in their respective sectors.



INVESTASI TEKNOLOGI *BUILDING INFORMATION MODELING*

Sebagai bagian dari komitmen dalam mengadopsi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, Perseroan terus mengembangkan implementasi *Building Information Modeling* (BIM). Teknologi ini berperan penting dalam mengoptimalkan proses perencanaan, desain, konstruksi, serta manajemen proyek secara lebih terintegrasi dan presisi, sejalan dengan strategi transformasi digital Perseroan.

BUILDING INFORMATION MODELING TECHNOLOGY INVESTMENT

As part of its commitment to adopting technology to improve operational efficiency and effectiveness, the Company continues to develop the implementation of Building Information Modeling (BIM). This technology plays an important role in optimizing the planning, design, construction, and project management processes in a more integrated and precise manner, in line with the Company's digital transformation strategy.

Pada tahun 2024, Perseroan mengalokasikan anggaran sebesar Rp2 miliar untuk pengembangan dan penerapan teknologi BIM guna meningkatkan efisiensi perencanaan, konstruksi, dan manajemen proyek. Hingga akhir tahun, realisasi belanja modal (*Capex*) mencapai Rp1,8 miliar atau sekitar 90% dari total anggaran, yang digunakan untuk pengadaan perangkat lunak, peningkatan infrastruktur digital, serta pelatihan sumber daya manusia dalam optimalisasi teknologi BIM.

RENCANA PENGEMBANGAN *BUILDING INFORMATION MODELING* KE DEPAN

Sebagai bagian dari strategi transformasi digital di industri konstruksi, Perseroan terus mengembangkan implementasi *Building Information Modeling* (BIM) guna meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kolaborasi dalam setiap tahapan proyek. Pada tahun 2025, Perseroan merencanakan penguatan integrasi BIM dengan teknologi konstruksi terkini, termasuk pemanfaatan drone, pemindaian laser 3D, serta kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) untuk meningkatkan akurasi pengumpulan data lapangan. Selain itu, penerapan konsep *lean construction* akan menjadi salah satu strategi utama dalam meningkatkan produktivitas, mengurangi pemborosan, serta mempercepat penyelesaian proyek dengan tetap menjaga kualitas hasil akhir. Kolaborasi yang lebih erat dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelanggan dan mitra strategis, juga menjadi fokus utama dalam mencapai keberlanjutan dan efisiensi operasional.

Sejalan dengan penguatan digitalisasi, Perseroan juga merencanakan peningkatan maturitas integrasi BIM Level 2 dengan *Enterprise Resource Planning* (ERP) guna mengoptimalkan efektivitas perencanaan dan pengendalian proyek. Integrasi ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap jadwal dan anggaran proyek melalui sistem yang lebih terstruktur dan berbasis data *real-time*. Dengan pemanfaatan teknologi ini, Perseroan berkomitmen untuk meningkatkan akurasi dalam manajemen sumber daya, memperkuat koordinasi antar tim proyek, serta memastikan pengelolaan proyek yang lebih transparan dan akuntabel. Langkah ini diharapkan dapat mendorong terciptanya proyek-proyek yang lebih inovatif, efisien, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi Perseroan dalam menghadapi tantangan industri konstruksi di masa depan.

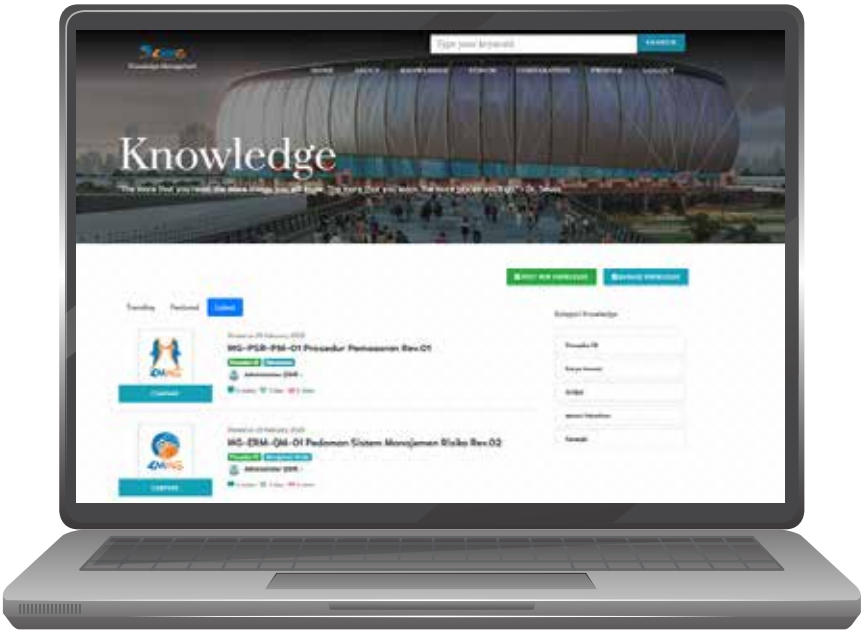
In 2024, the Company allocated a budget of Rp2 billion for the development and implementation of BIM technology to improve the efficiency of planning, construction, and project management. By the end of the year, the realization of capital expenditure (Capex) reached Rp1.8 billion or around 90% of the total budget, which was used for software procurement, improving digital infrastructure, and training human resources in optimizing BIM technology.

BUILDING INFORMATION MODELING DEVELOPMENT PLAN IN THE FUTURE

As part of the digital transformation strategy in the construction industry, the Company continues to develop the implementation of Building Information Modeling (BIM) to improve efficiency, accuracy, and collaboration in every stage of the project. In 2025, the Company plans to strengthen the integration of BIM with the latest construction technology, including the use of drones, 3D laser scanning, and artificial intelligence to improve the accuracy of field data collection. Furthermore, the implementation of the lean construction concept will be one of the main strategies in increasing productivity, reducing waste, and accelerating project completion while maintaining the quality of the final results. Closer collaboration with all stakeholders, including customers and strategic partners, is also a major focus in achieving sustainability and operational efficiency.

In conformity with strengthening digitalization, the Company also plans to increase the maturity of BIM Level 2 integration with Enterprise Resource Planning (ERP) to optimize the effectiveness of project planning and control. This integration aims to ensure compliance with project schedules and budgets through a more structured system based on real-time data. By utilizing this technology, the Company is committed to improving accuracy in resource management, strengthening coordination between project teams, and ensuring more transparent and accountable project management. This step is expected to encourage the creation of more innovative, efficient and sustainable projects, in line with the Company's vision in facing the challenges of the construction industry in the future.

Manajemen Pengetahuan dan Inovasi
Knowledge and Innovation Management



MANAJEMEN PENGETAHUAN

Sebagai bagian dari komitmen terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan optimalisasi kinerja bisnis, Perseroan mengembangkan sistem manajemen pengetahuan yang terstruktur dan terintegrasi. Sistem ini dirancang untuk memastikan transfer pengetahuan yang berkelanjutan serta penerapan praktik terbaik di seluruh lini bisnis.

Perseroan menerapkan Knowledge Management WIKA Gedung (KMWG) sebagai sistem manajemen pengetahuan yang bertujuan untuk mengelola, mendokumentasikan, dan mendistribusikan informasi strategis serta pengalaman kerja bagi seluruh karyawan. KMWG Online, yang diluncurkan pada 1 April 2020, berperan dalam mendukung pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Melalui KMWG, Perseroan memastikan penerapan praktik terbaik dalam konstruksi bangunan gedung, mendorong inovasi, serta meningkatkan efektivitas dan produktivitas operasional di seluruh proyek dan unit kerja.

Selain menyediakan akses terhadap Prosedur, Instruksi Kerja, Karya Inovasi, dan Artikel, KMWG Online juga berfungsi sebagai platform kolaboratif bagi karyawan untuk berbagi informasi dan memberikan masukan guna meningkatkan kualitas pengetahuan yang tersedia.

Pada September 2020, Perseroan mengembangkan WG Learning, sebuah aplikasi E-Learning yang dirancang untuk memfasilitasi pelatihan bagi karyawan yang ditunjuk. WG Learning memungkinkan pelaksanaan pelatihan secara serentak di berbagai lokasi tanpa memerlukan pertemuan tatap muka, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran.

KNOWLEDGE MANAGEMENT

As part of its commitment to improving the quality of human resources as well as to optimizing business performance, the Company has developed a structured and integrated knowledge management system. This system is designed to ensure continuous knowledge transfer and the implementation of best practices across all business lines.

The Company has implemented Knowledge Management of WIKA Gedung (KMWG) as a knowledge management system that aims to manage, document, and distribute strategic information and work experience for all employees. KMWG Online, launched on April 1, 2020, plays a role in supporting the development of human resource competencies. Through KMWG, the Company ensures the implementation of best practices in building construction, encourages innovation, and increases operational effectiveness and productivity across all projects and work units.

In addition to providing access to Procedures, Work Instructions, Innovation Works, and Articles, KMWG Online also functions as a collaborative platform for employees to share information and provide input to improve the quality of available knowledge.

In September 2020, the Company developed WG Learning, an E-Learning application designed to facilitate training for designated employees. WG Learning enables simultaneous training in various locations without the need for face-to-face meetings, thus increasing the efficiency and effectiveness of the learning process.

Berbagai informasi yang diperbarui dalam KMWG, termasuk Prosedur, Instruksi Kerja, dan Karya Inovasi, disebarluaskan melalui *blast* WhatsApp agar dapat diakses oleh seluruh karyawan. Dengan sistem ini, inovasi dan pengetahuan yang dikembangkan di satu unit kerja dapat diterapkan di unit lain, mendorong peningkatan berkelanjutan dan pemerataan pengetahuan di seluruh organisasi.

Sebagai bagian dari strategi penguatan manajemen pengetahuan, Perseroan juga menyelenggarakan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi karyawan, di antaranya:

1. ***Knowledge Sharing***

   Sebagai bagian dari komitmen Perseroan dalam mendorong budaya pembelajaran dan peningkatan kapabilitas internal, program *Knowledge Sharing* diselenggarakan di tingkat perusahaan untuk memperkuat transfer pengetahuan dan penerapan *best practices* di berbagai unit kerja. Program ini berfokus pada bidang *engineering, quality*, dan *safety*, yang memiliki peran strategis dalam memastikan standar mutu dan keselamatan di seluruh proyek.

   Melalui *Knowledge Sharing*, Perseroan menciptakan *platform* bagi karyawan untuk berbagi wawasan, pengalaman, serta inovasi yang telah terbukti efektif dalam pelaksanaan proyek. Program ini juga berfungsi sebagai forum diskusi yang mendorong kolaborasi lintas unit, sehingga solusi terbaik dapat diadaptasi dan diterapkan secara lebih luas.

   Adapun pelaksanaan *Knowledge Sharing* di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Numerous information updated in KMWG, including Procedures, Work Instructions, and Innovation Works, are disseminated via WhatsApp blast, it hence can be accessed by all employees. By this system, the innovation and knowledge developed in one work unit can be applied in other units, encouraging continuous improvement and equalization of knowledge throughout the organization.

As part of the knowledge management strengthening strategy, the Company also organizes various programs aimed at improving employee competency, including:

1. **Knowledge Sharing**

   As part of the Company's commitment to fostering a culture of learning and improving internal capabilities, the Knowledge Sharing program is held at the company level to strengthen knowledge transfer and the implementation of best practices in various work units. This program focuses on the fields of engineering, quality, and safety, which have a strategic role in ensuring quality and safety standards across projects.

   Through Knowledge Sharing, the Company creates a platform for employees to share insights, experiences, and innovations that have proven effective in project implementation. This program also has functions as a discussion forum that encourages cross-unit collaboration, so that the best solutions can be adapted and implemented more widely.

   The implementation of Knowledge Sharing in 2024 is as follows:

No.	Tema Knowledge Sharing Knowledge Sharing Theme	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date
1	Budayakan K3, Sehat dan Selamat dalam Bekerja, Terjaga Keberlangsungan Usaha Promote K3, Healthy and Safe at Work, Maintain Business Continuity	13 Februari 2024 February 13, 2024
2	Lesson learned proyek selesai, Bandara International Dhoho Kediri Lesson learned from completed project, Dhoho Kediri International Airport	21 Maret 2024 March 21, 2024
3	Lesson learned proyek selesai, GOR JAKTIM dan STMKG Lesson learned from completed project, GOR JAKTIM and STMKG	20 Juni 2024 June 20, 2024
4	Lesson learned proyek selesai, GOR PON ACEH dan BIN Lesson learned from completed project, GOR PON ACEH and BIN	26 September 2024 September 26, 2024
5	Lesson learned proyek selesai, ITB Innovation Park Bandung Lesson learned from completed project, ITB Innovation Park Bandung	20 Desember 2024 December 20, 2024

Dengan adanya program ini, Perseroan memastikan bahwa seluruh insan perusahaan memiliki akses terhadap informasi dan praktik terbaik yang terus diperbarui. Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kerja, memperkuat standar operasional, serta mendorong terciptanya inovasi berkelanjutan di seluruh lini bisnis.

With this program, the Company ensures that all company personnel have access to information and best practices that are continuously updated. This initiative is expected to improve work quality, strengthen operational standards, and encourage the creation of sustainable innovation across all business lines.

2. ***Benchmarking Quality***

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas dan standarisasi, Perseroan melaksanakan *Benchmarking Quality* untuk menetapkan tolak ukur standar mutu Perseroan. Program ini bertujuan untuk mengidentifikasi unit kerja yang telah berhasil menerapkan standar kualitas secara optimal, sehingga dapat menjadi referensi bagi unit kerja lainnya dalam meningkatkan kinerja dan efektivitas operasional.

Pelaksanaan *Benchmarking Quality Excellence* dikoordinasikan oleh QSHE Division dan melibatkan fungsi QA/QC serta Produksi dari setiap unit kerja. Melalui kegiatan ini, Perseroan memastikan bahwa praktik terbaik dalam aspek kualitas dapat dibagikan dan diterapkan secara konsisten di seluruh proyek, guna mendukung pencapaian standar mutu yang tinggi dan berkelanjutan. *Benchmarking Quality* dilakukan pada proyek yang sedang berjalan maupun kunjungan pada area mockup di WIKA Pratama Learning Center (WLC).

3. ***Quality Control Circle* (QCC)**

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas dan optimalisasi proses kerja, Perseroan mengimplementasikan *Quality Control Circle* (QCC), sebuah kegiatan berbasis tim yang berfokus pada perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*). Program ini melibatkan kelompok kecil yang terdiri dari 3-7 anggota dengan bidang pekerjaan serupa, yang secara berkala berdiskusi dan berkolaborasi untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta menyelesaikan permasalahan terkait pekerjaan dan lingkungan kerja.

Pelaksanaan QCC bertujuan untuk:

a. Meningkatkan kepedulian karyawan terhadap kemajuan Perseroan.
b. Menyediakan wadah bagi karyawan untuk menuangkan ide dan kreativitas dalam inovasi proses kerja.
c. Melatih kemampuan pemecahan masalah (*problem-solving skills*).
d. Mendorong kerja sama tim serta mengembangkan keterampilan kepemimpinan (*leadership*).

Setelah melalui proses diskusi dan perbaikan, hasil dari QCC dipresentasikan dalam Konvensi QCC, yang menjadi platform untuk berbagi solusi inovatif dan penerapan praktik terbaik guna meningkatkan efektivitas dan produktivitas operasional di lingkungan Perseroan. Pada Konvensi QCC tingkat nasional TKMPN 2024 yang diselenggarakan di Bali pada 2-6 Desember 2024, Perseroan mengirimkan dua tim QCC, yakni QCC Modular yang memperoleh penghargaan Gold dan QCC Vertikal yang memperoleh penghargaan Platinum.

2. **Benchmarking Quality**

As part of efforts to improve quality and standardization, the Company implements Benchmarking Quality to determine the Company's quality standard benchmarks. This program aims to identify work units that have successfully implemented quality standards optimally, they hence can be a reference for other work units in improving operational performance and effectiveness.

The implementation of Benchmarking Quality Excellence is coordinated by the QSHE Division and involves the QA/QC and Production functions of each work unit. Through this activity, the Company ensures that best practices in quality aspects can be shared and applied consistently across projects, in order to support the achievement of high and sustainable quality standards. Benchmarking Quality is carried out on ongoing projects and visits to the mockup area at the WIKA Pratama Learning Center (WLC).

3. **Quality Control Circle (QCC)**

As part of efforts to improve quality and optimize work processes, the Company applies Quality Control Circle (QCC), a team-based activity that focuses on continuous improvement. This program involves small groups of 3-7 members with similar fields of work, who periodically discuss and collaborate to identify, analyze, as well as resolve problems related to work and the work environment.

The implementation of QCC aims to:

a. Increase employee awareness of the Company's progress.
b. Provide a forum for employees to express ideas and creativity in work process innovation.
c. Train problem-solving skills.
d. Encourage teamwork and develop leadership skills.

After going through a process of discussion and improvement, the results of the QCC are presented at the QCC Convention, which is a platform for sharing innovative solutions and implementing best practices to improve operational effectiveness and productivity in the Company's environment. At the 2024 TKMPN National QCC Convention held in Bali on December 2-6, 2024, the Company sent off two QCC teams, namely QCC Modular which received the Gold award and QCC Vertical which received the Platinum award.

4. ***Knowledge Management Award* (KM Award)**
KM Award merupakan penghargaan yang diberikan kepada pegawai atau pengguna paling aktif dalam mengakses dan berkontribusi di portal KMWG Online serta berperan aktif dalam *knowledge creation*. Setiap pengguna yang mengakses, menulis, serta memberikan umpan balik terhadap artikel yang disebarluaskan akan memperoleh poin yang terakumulasi setiap tahun.

Penghargaan ini bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif pegawai dalam memperoleh dan menyebarluaskan informasi terbaru terkait Sistem Manajemen WIKA Gedung (SMWG), sehingga pengetahuan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal di seluruh unit kerja.

5. ***BRO Project Award***
Sebagai bagian dari inisiatif untuk meningkatkan kolaborasi dan standarisasi di seluruh proyek, Perseroan mengembangkan BRO Project Award, sebuah program yang mengadopsi konsep Sister City. Konsep ini memungkinkan dua proyek dengan karakteristik berbeda untuk bekerja sama dalam berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik guna mempercepat implementasi standar perusahaan secara konsisten.

Setiap proyek memiliki keunikan dan keunggulan tersendiri, yang dapat menjadi sumber pembelajaran bagi proyek lainnya. Melalui BRO Project Award, Perseroan mendorong sinergi antar proyek dalam rangka akselerasi standarisasi operasional, peningkatan efisiensi, serta optimalisasi pelaksanaan standar perusahaan.

Sepanjang tahun 2024, program BRO Project Award telah dilaksanakan pada 12 September 2024 sebagai bagian dari komitmen Perseroan dalam membangun ekosistem kerja yang kolaboratif dan berorientasi pada peningkatan kualitas proyek.

INOVASI YANG DILAKUKAN

Inovasi terus menjadi pilar utama dalam mendukung strategi pertumbuhan Perseroan di sektor konstruksi. Sepanjang tahun, Perseroan berfokus pada pengembangan solusi kreatif dan penerapan teknologi terkini untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat daya saing, dan menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Langkah-langkah inovatif yang dilakukan meliputi penerapan metode konstruksi yang lebih ramah lingkungan dan hemat waktu, serta penguatan ekosistem digital dalam seluruh proses bisnis. Selain itu, Perseroan juga mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam proses bisnis, seperti penggunaan material bangunan yang mendukung konsep hijau dan pengurangan limbah konstruksi. Melalui berbagai inisiatif ini, Perseroan tidak hanya merespons perubahan kebutuhan pasar tetapi juga berperan aktif dalam memimpin transformasi industri konstruksi menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.

4. **Knowledge Management Award (KM Award)**
KM Award is an accolade given to the most active employees or users in accessing and contributing to the KMWG Online portal and playing an active role in knowledge creation. Every user who accesses, writes, and provides feedback on the articles that are disseminated will receive points that are accumulated every year.

This award aims to encourage active participation of employees in obtaining and disseminating the latest information related to the WIKA Building Management System (SMWG), so as to the available knowledge can be utilized optimally in all work units.

5. **BRO Project Award**
As part of the initiative to enhance collaboration and standardization across projects, the Company has developed the BRO Project Award, a program that adopts the Sister City concept. This concept allows two projects with different characteristics to work together to share knowledge, experience, and best practices to accelerate the implementation of company standards consistently.

Each project has its own uniqueness and advantages, which can be a source of learning for other projects. Through the BRO Project Award, the Company encourages synergy between projects in order to accelerate operational standardization, increase efficiency, and optimize the implementation of company standards.

Throughout 2024, the BRO Project Award program was implemented on September 12, 2024 as part of the Company's commitment to building a collaborative work ecosystem that is oriented towards improving project quality.

REALIZED INNOVATIONS

Innovation continues to be a key pillar in supporting the Company's growth strategy in the construction sector. Throughout the year, the Company focused on developing creative solutions and implementing the latest technology to improve operational efficiency, strengthen competitiveness, and create added value for stakeholders. Innovative steps taken include implementing more environmentally friendly and time-saving construction methods, as well as strengthening the digital ecosystem in all business processes. In addition, the Company also integrates sustainability principles into business processes, such as the use of building materials that support green concepts and reducing construction waste. Through these initiatives, the Company not only responds to changing market needs but also plays an active role in leading the transformation of the construction industry towards a more sustainable future.

Perseroan senantiasa mendorong karyawan untuk menciptakan inovasi yang tidak hanya bertujuan mempermudah pelaksanaan pekerjaan, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional, kualitas hasil kerja, dan daya saing Perseroan. Penerapan inovasi ini dilakukan baik di lingkungan proyek maupun di kantor pusat, sehingga memberikan dampak positif yang merata dalam seluruh aktivitas bisnis Perseroan. Sepanjang tahun 2024, berbagai inovasi yang telah dilakukan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

The Company continually encourages the employees to create innovations that not merely aiming to facilitate the implementation of work, but also improving operational efficiency, quality of work results, and the Company's competitiveness. The implementation of this innovation is carried out both in the project environment and at the head office, it hence has a positive impact that is evenly distributed in all of the Company's business activities. Throughout 2024, a number of innovations that have been carried out by the Company are as follows:

No	Bulan Month	Judul Inovasi Innovation Title	Karya Inovasi Innovation Works
1	Maret March	Pengembangan Microsoft Project Berbasis Last Planner System Microsoft Project Development Based on Last Planner System	Engineering Division
2	Maret March	Video Tutorial WG Sophia (Helpdesk IT) WG Sophia Video Tutorial (IT Helpdesk)	Information Technology Division
3	Maret March	Metode Safety Screen pada Konstruksi Bangunan Tingkat Tinggi Safety Screen Method in High Rise Building Construction	Proyek Apartemen Sky House Alam Sutera Sky House Alam Sutera Apartment Project
4	Maret March	Lesson Learn Meneruskan Pekerjaan Eksisting Lesson Learned Continuing Existing Work	Proyek Apartemen Sky House Alam Sutera Sky House Alam Sutera Apartment Project
5	Maret March	Tombol Nirkabel dan Pintu Pengaman Passanger Hoist Wireless Button and Passenger Hoist Safety Door	Proyek Apartemen Sky House Alam Sutera Sky House Alam Sutera Apartment Project
6	Maret March	Inovasi Proposal Teknis - Penggunaan Cad Mapper dalam Penyusunan Layout Management Plan Technical Proposal Innovation - Use of Cad Mapper in Layout Management Plan Preparation	Engineering Division
7	April April	Penutupan Celah Panel Kolom Dan Balok Risha dengan Bata Ringan dan Finish Plester Aci - QCC Proyek Rehabilitasi Cianjur Closing the Risha Column and Beam Panel Gaps with Lightweight Bricks and Aci Plaster Finish - QCC Cianjur Rehabilitation Project	Proyek Rehabilitasi & Renovasi Prasarana dan Pendidikan Pasca Gempa Bumi Kabupaten Cianjur Post-Earthquake Infrastructure and Education Rehabilitation & Renovation Project in Cianjur Regency
8	April April	QCC BI Millenial - Treatment Menyamarkan Waterline pada Permukaan Granit QCC BI Millenial - Treatment to Disguise Waterlines on Granite Surfaces	Proyek BI Millenial BI Millennial Project
9	April April	Kajian Redesign Baja Strutting Untuk Penahan Dinding Secant Pile Study of Strutting Steel Redesign for Secant Pile Retaining Walls	Proyek Gedung BMKG Inatews BMKG Inatews Building Project
10	Mei May	Inovasi Penggunaan Alat Dipstick untuk Pengecekan Leveling Epoxy Lantai Innovation in Using Dipstick Tools to Check Epoxy Floor Leveling	Proyek Gedung No. 34 Skala Pilot Biofarma Bandung Building Project No. 34 Biofarma Bandung Pilot Scale
11	Mei May	Metode Evaluasi Dampak Implementasi BIM (*Building Information Modeling*) Impact Evaluation Method of BIM (Building Information Modeling) Implementation	Engineering Division
12	Juni June	Inovasi Penggunaan Aplikasi Manpro sebagai Digitalisasi Pengendalian Dokumen pada Proyek Pembangunan Gedung No. 34 PT Biofarma Innovation in Using the Manpro Application as Digitalization of Document Control in the Construction Project of Building No. 34 PT Biofarma	Proyek Gedung No. 34 Skala Pilot Biofarma Bandung Building Project No. 34 Biofarma Bandung Pilot Scale

No	Bulan Month	Judul Inovasi Innovation Title	Karya Inovasi Innovation Works
13	Juli July	Efisiensi Desain Perencanaan Konfigurasi Tiang Pancang melalui Analisa Detailing Internal Forces Pile (Upper, Middle, Bottom) pada Proyek Pembangunan Gedung UKM, Tower Ruang Kekas dan Laboratorium Politeknik Pekerjaan Umum Kota Semarang Efficiency of Pile Configuration Planning Design through Detailing Analysis of Internal Forces Pile (Upper, Middle, Bottom) in the Construction Project of UKM Building, Tower Ruang Kekas and Laboratory of Public Works Polytechnic of Semarang	Engineering Division
14	Agustus August	Standarisasi Penumpukan Corner Post dan Pengiriman Frame Corner Post Stacking and Frame Delivery Standardization	Operation and Modular Division
15	Agustus August	QCC Halim - Pemakaian Jidar pada Pelaksanaan Pemasangan Terakota Guna Mencapai Standar Quality QCC Halim - Use of Jidar in the Implementation of Terracotta Installation to Achieve Quality Standards	Proyek Revitalisasi Gedung VVIP & VIP Bandara Halim Perdanakusuma Halim Perdanakusuma Airport VVIP & VIP Building Revitalization Project
16	September September	Transformasi Menuju Digital dalam upaya Mengurangi Penggunaan Kertas serta Efektivitas Pengendalian Dokumen Transformation Towards Digital in an Effort to Reduce Paper Usage and Document Control Effectiveness	Proyek Gedung Wing 1 PUPR - IKN Wing 1 Building Project PUPR - IKN
17	Oktober October	Pengembangan Modul Desain and Build Design and Build Module Development	Engineering Division
18	Oktober October	Penggunaan Base Isolator Lead Rubber Bearing Pada Gedung Inatews Bali Use of Lead Rubber Bearing Base Isolator in Inatews Bali Building	Proyek Gedung BMKG Inatews BMKG Inatews Building Project
19	Oktober October	Penerapan Sistem Manajemen Energi Implementation of Energy Management System	QSHE Division
20	Oktober October	Inovasi Penerapan BIM melalui Model Development Data dan Custom Parameter Progress Konstruksi Innovation in BIM Implementation through Model Development Data and Custom Parameters for Construction Progress	Proyek Rusun Paspampres - IKN Paspampres Flats Project - IKN
21	Oktober October	Value Enggineering Pemakaian Bracket Portabel pada Pemasangan HT Toilet Tanpa Merusak Pekerjaan Waterproofing sebagai Acceptance Criteria Pekerjaan Waterproofing Toilet Value Engineering Use of Portable Brackets in Installing Toilet HT Without Damaging Waterproofing Work as Acceptance Criteria for Toilet Waterproofing Work	Proyek Rusun Paspampres - IKN Paspampres Flats Project - IKN
22	Oktober October	Mobile of Inspection	QSHE Division
23	Oktober October	Optimalisasi Facade Lengkung ITB Optimization of ITB Curved Facade	Engineering Division
24	Oktober October	Pemanfaatan Struktur Baja Konvensional sebagai Perkuatan Konstruksi Modular WGF Median di Daerah Rawan Gempa di Indonesia Utilization of Conventional Steel Structures as Reinforcement of Modular WGF Median Construction in Earthquake-Prone Areas in Indonesia	Engineering Division
25	Desember December	Penggunaan Webgis dalam Proyek Gedung Use of Webgis in Building Projects	Engineering Division
26	Desember December	Pendekatan Konstruksi Ramping WIKA Gedung WIKA Building Lean Construction Approach	Engineering Division
27	Desember December	Sistem Jacking untuk Pemasangan Friction Pendulum pada Gedung Bertingkat Jacking System for Friction Pendulum Installation on Multi-Storey Buildings	Proyek Gedung BMKG Inatews BMKG Inatews Building Project
28	Desember December	Welding Embedded Precast Cantilever	Proyek Pulo Mas Jaya Land Tower Pulo Mas Jaya Land Tower Project

No	Bulan Month	Judul Inovasi Innovation Title	Karya Inovasi Innovation Works
29	Desember December	Safety Railing & Barricade Modular	Operation and Modular Division
30	Desember December	Portable Shelter	Operation and Modular Division
31	Desember December	Adjustable Railing untuk Pintu Void Adjustable Railing for Void Door	Operation and Modular Division
32	Desember December	Sharing Implementasi Bar Bending Schedule menggunakan BS 8666 Sharing Implementation of Bar Bending Schedule using BS 8666	Proyek ITB Innovation Park ITB Innovation Park Project
33	Desember December	Inovasi Proteksi Safety Railing Adjustabe Shaft Lift Innovation of Safety Railing Protection Adjustable Shaft Lift	Operation and Concession Division
34	Desember December	Inovasi Lantai Modular Tanpa Frame Bottom sebagai Metode Percepatan Pekerjaan Innovation of Modular Floor Without Frame Bottom as a Method to Accelerate Work	Proyek Hunian Pekerja Konstruksi II Tahap 2 Construction Workers Housing Project II Phase 2
35	Desember December	Penggunaan Platform Gantung Use of Hanging Platforms	Proyek Kementerian Koordinator 1 Coordinating Ministry Project 1
36	Desember December	Integrasi Data Monitoring Checklist Hunian Menggunakan Aplikasi BIM Residential Data Monitoring Checklist Integration Using BIM Application	Proyek Rusun Paspampres - IKN Paspampres Flats Project - IKN
37	Desember December	Pemindahan Fungsi Bangunan Arahan Menteri PUPR Transfer of Building Functions Directed by the Minister of PUPR	Proyek Gedung Wing 1 PUPR - IKN Wing 1 Building Project PUPR - IKN
38	Desember December	Pekerjaan Cleanroom Cleanroom Jobs	Proyek Gedung No. 34 Skala Pilot Biofarma Bandung Biofarma Bandung Pilot Scale Building Project No. 34
39	Desember December	Inovasi Alat Bantu Mal-Malan Armatur Me Innovation of Mall-Malan Armatur Me Assistance Tools	Operation and Concession Division
40	Desember December	Inovasi Shelter Portable Portable Shelter Innovation	Operation and Concession Division
41	Desember December	Penggunaan Software Cubicost Use of Cubicost Software	Proyek Kementerian Koordinator 1 Coordinating Ministry Project 1
42	Desember December	Pembuatan Alat Press Perbaikan Perancah Making Scaffolding Repair Press Tool	Proyek Rusun Paspampres – IKN Paspampres Flats Project - IKN
43	Desember December	Bekisting Sistem Mut Mut System Formwork	Operation and Concession Division
44	Desember December	Implementasi Last Planner System (BIM - 9D) - Metode Kerja Kolaboratif Lean Construction Implementation of Last Planner System (BIM - 9D) - Lean Construction Collaborative Working Method	Operation and Concession Division
45	Desember December	Digitalisasi Mandor Digitalization of Foreman	Proyek Rusun Paspampres – IKN Paspampres Flats Project - IKN
46	Desember December	Proteksi Lubang Bored Pile Adjustable Adjustable Bored Pile Hole Protection	Proyek Gedung Wing 1 PUPR - IKN Wing 1 Building Project PUPR - IKN


Company Achievement & Target
Market Coverage : Driving Growth Through Expanded Reach
55.507
410
2008
2012
2014
2016
2017
2023
Capaian Kontrak
RP 934,43 M
RP 7,40 T
RP 8,33 T
Komposisi Kontrak Baru
934,43
934,43



ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Management Discussion and Analysis

Sepanjang tahun 2024, kinerja segmen Industri Modular membukukan realisasi kontrak baru sebesar Rp613,19 miliar, mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp596,73 miliar atau 3.625,73% dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai Rp16,46 miliar.

Throughout 2024, the performance of the Modular Industry segment recorded new contract realization of Rp613.19 billion, a significant increase of Rp596.73 billion or 3,625.73% compared to 2023 which reached Rp16.46 billion.

Tinjauan Perekonomian
Economic Review



JAKARTA INTERNATIONAL VELODROME

TINJAUAN PEREKONOMIAN GLOBAL

Pertumbuhan ekonomi global relatif stagnan dengan inflasi di beberapa negara maju mulai menunjukkan tren penurunan. Volatilitas pasar tetap tinggi seiring ketidakpastian kebijakan ekonomi dan geopolitik yang terus berkembang. Tingginya risiko geopolitik dan berlanjutnya fragmentasi pola perdagangan dunia, bergesernya pola pertumbuhan ekonomi spasial dunia, tingginya suku bunga dan risiko utang, berubahnya pola investasi keuangan dunia, serta cepatnya digitalisasi antarnegara dan meningkatnya risiko operasional (siber). Disisi lain, dampak pemanasan global akibat perubahan iklim menjadi salah satu indikator yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi global.

Pada triwulan IV-2024, perekonomian Amerika Serikat (AS) diprakirakan tumbuh lebih kuat, sedangkan ekonomi Eropa dan Jepang masih lemah. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Tiongkok terakselerasi menjadi sebesar 5,4% *yoy* pada triwulan IV-2024, didorong oleh stimulus ekonomi. Arah kebijakan Pemerintah dan bank sentral AS berpengaruh pada ketidakpastian pasar keuangan global.

Disisi lain, Kementerian Keuangan mengungkapkan penurunan inflasi global secara umum masih berlanjut, meski beberapa negara mengalami kenaikan. Terpilih kembalinya Donald Trump sebagai Presiden AS memberikan sentimen positif pada pasar saham AS, namun meningkatkan risiko dampak rambatan pada pasar negara berkembang. Ekspektasi pasar tentang kondisi *high for longer* yang sempat mereda kembali muncul akibat kebijakan Trump yang dinilai akan berdampak pada progress penurunan inflasi di AS.

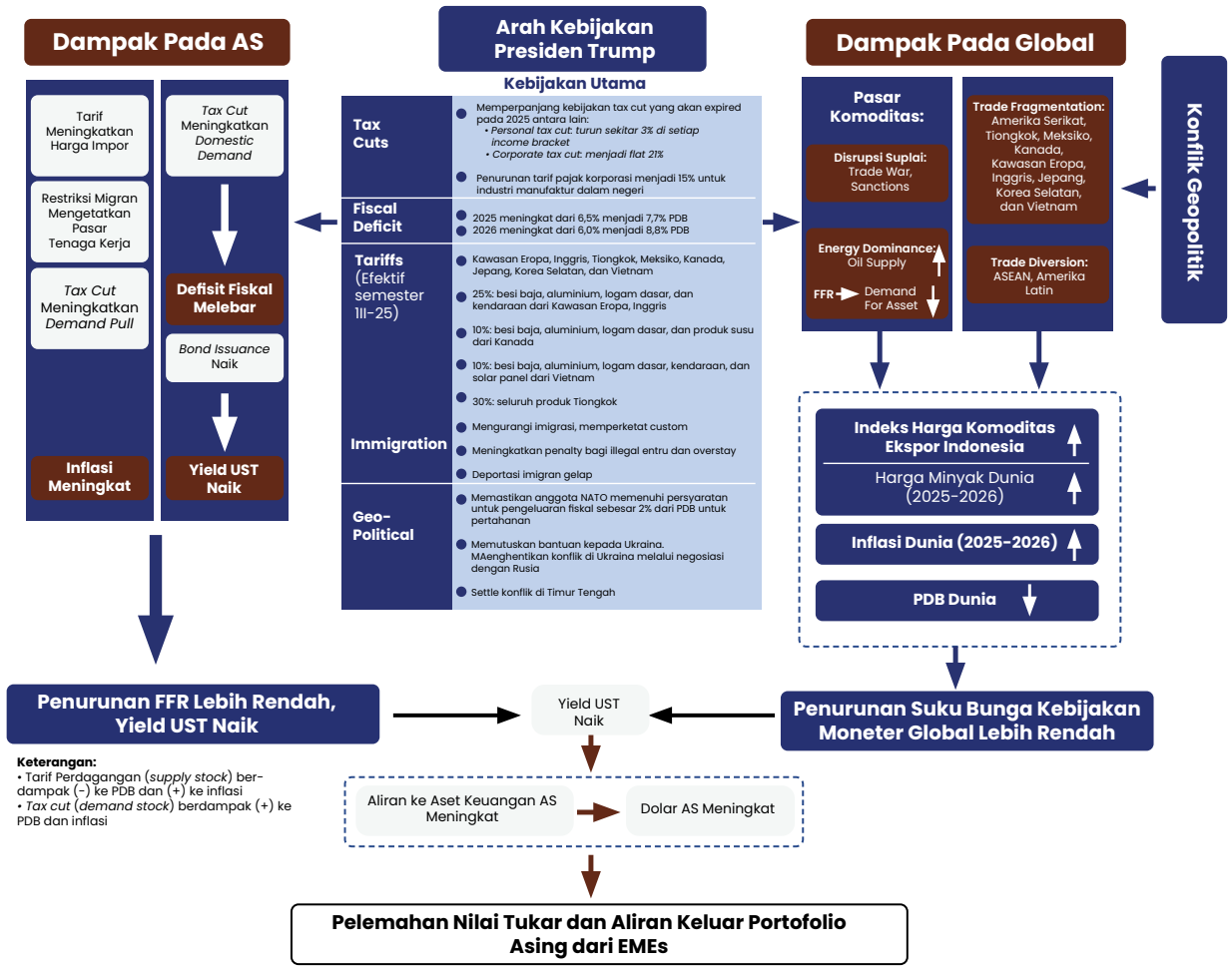
GLOBAL ECONOMIC REVIEW

Global economic growth is relatively stagnant with inflation in several developed countries starting to show a downward trend. Market volatility remains high as economic and geopolitical policy uncertainty continues to grow. High geopolitical risks and continued fragmentation of world trade patterns, shifting global spatial economic growth patterns, high interest rates and debt risks, changing global financial investment patterns, and rapid digitalization between countries and increasing operational (cyber) risks. On the other hand, the impact of global warming due to climate change is one of the indicators that influences global economic growth.

In the fourth quarter of 2024, the economy of the United States (US) is predicted to grow stronger, while the European and Japanese economies are remaining weak. Meanwhile, China's economic growth accelerated to 5.4% yoy in the fourth quarter of 2024, driven by economic stimulus. The direction of the US Government and central bank policies has an impact on global financial market uncertainty.

On the other hand, the Ministry of Finance revealed that the decline in global inflation in general is remaining to continue, despite of several countries that have experienced an increase. The re-election of Donald Trump as the US President has given positive sentiment to the US stock market, but increases the risk of spillover effects to emerging markets. Market expectations about high for longer conditions that had eased have re-emerged due to Trump's policies which are considered to have an impact on the progress of lowering inflation in the US.

Asesmen Awal Dampak Kemenangan Trump terhadap Perekonomian Amerika Serikat dan Global
Initial Assessment of the Impact of a Trump Victory on the U.S. and Global Economy



Sumber: Bank Indonesia
Source: Bank Indonesia

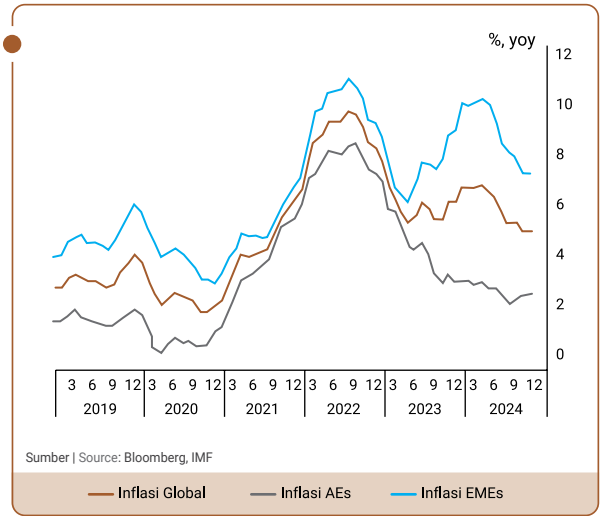
Kuatnya ekonomi AS dengan pasar tenaga kerja yang membaik, serta dampak kebijakan tarif menahan proses disinflasi di AS yang meningkatkan ketidakpastian terhadap ekspektasi penurunan Fed Funds Rate (FFR). Kebijakan fiskal AS yang lebih ekspansif mendorong yield US Treasury tetap tinggi, baik pada tenor jangka pendek maupun panjang. Bersamaan dengan ketegangan politik global yang meningkat, preferensi investor makin besar terhadap aset keuangan AS.

Untuk 2025, IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 stagnan sebesar 3,3% yoy. Di sisi lain, kebijakan Presiden Trump yang diumumkan pasca pelantikan dipandang lebih moderat dibandingkan yang diprakirakan sebelumnya oleh pasar. Perkembangan ini akan terus dipantau ke depan.

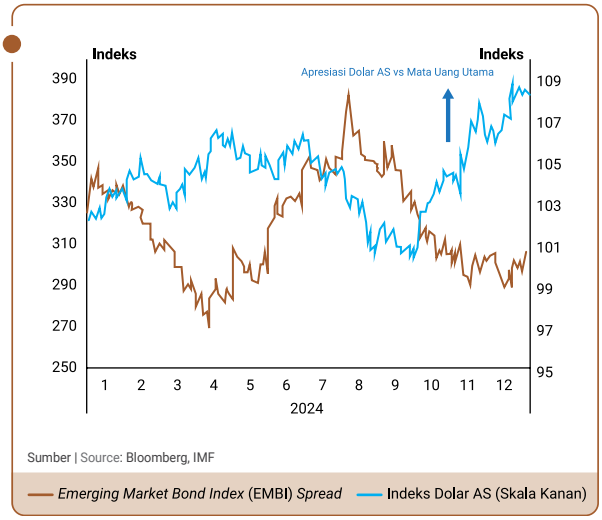
The strength of the US economy with an improving labor market, as well as the impact of tariff policies holding back the disinflation process in the US, has increased uncertainty regarding expectations of a Fed Funds Rate (FFR) cut. A more expansionary US fiscal policy has kept US Treasury yields high, both in short-term and long-term tenors. Along with increasing global political tensions, investor preference is growing for US financial assets.

For 2025, the IMF predicts global economic growth in 2025 will stagnate at 3.3% yoy. On the other hand, President Trump's policies announced after his inauguration are seen as more moderate than previously predicted by the market. This development will continue to be monitored onwards.

Grafik Inflasi Global
Global Inflation Chart



Dolar AS dan Premi Risiko EMEs
US Dollar and EMEs Risk Premium



Tensi geopolitik dan dinamika politik berbagai negara juga menambah risiko bagi stabilitas ekonomi global. Potensi perang dagang dan peningkatan proteksionisme memberikan dampak negatif bagi arus investasi dan perdagangan global. Salah satu satunya berdampak signifikan terhadap pasar valuta asing (*forex*). Ketidakpastian yang tinggi di pasar global mendorong pergerakan nilai tukar mata uang yang tinggi cenderung berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, karena dapat menyebabkan penurunan ekspor neto dan penurunan tingkat produksi.

Selain itu, perubahan iklim menjadi salah satu isu yang paling urgensi yang dihadapi manusia. Perubahan iklim merujuk pada perubahan jangka panjang dalam pola cuaca sehingga menyebabkan peningkatan suhu global, pencairan es dan cuaca ekstrem yang mengakibatkan terjadinya bencana alam kerap mengganggu produksi pangan global, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga pangan serta sektor pariwisata. Seluruh peristiwa tersebut menjadi sangat penting karena mempengaruhi perekonomian global dan memicu krisis ekonomi di suatu negara atau wilayah. Krisis keuangan yang terjadi di suatu negara dapat mempengaruhi kestabilan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi yang masih lemah dibandingkan dengan tingkat sebelum pandemi diakibatkan oleh konflik geopolitik di kawasan regional yang meningkat, yang menyebabkan beberapa negara berkembang mengalami revisi proyeksi pertumbuhan. Selain itu, kebijakan proteksionisme yang meningkat, ketegangan geopolitik, kebijakan moneter yang ketat, volatilitas pasar keuangan, dan perlambatan ekonomi Tiongkok menjadi beberapa risiko negatif tambahan yang menjadi pertimbangan bagi IMF untuk melakukan revisi.

Geopolitical tensions and political dynamics in several countries also increase the risk to global economic stability. The potential for trade wars and increased protectionism have a negative impact on global investment and trade flows. One of them has a significant impact on the foreign exchange market (forex). High uncertainty in the global market drives high currency exchange rates that tend to have a negative impact on economic growth, because they can cause a decrease in net exports and a decrease in production levels.

Furthermore, climate change is one of the most urgent issues encountered by the human nature. Climate change refers to long-term changes in weather patterns that cause an increase in global temperatures, melting ice and extreme weather that results in natural disasters often disrupting global food production, which ultimately drives up food prices and the tourism sector. All of these events are very important because they affect the global economy and trigger an economic crisis in a country or region. A financial crisis that occurs in a country can affect economic stability.

Economic growth is remaining weak compared to pre-pandemic levels due to increasing geopolitical conflicts in the regional area, which has caused several developing countries to revise their growth projections. In addition, increasing protectionist policies, geopolitical tensions, tight monetary policy, financial market volatility, and China's economic slowdown are some of the additional negative risks that the IMF is considering for revision.

TINJAUAN PEREKONOMIAN INDONESIA

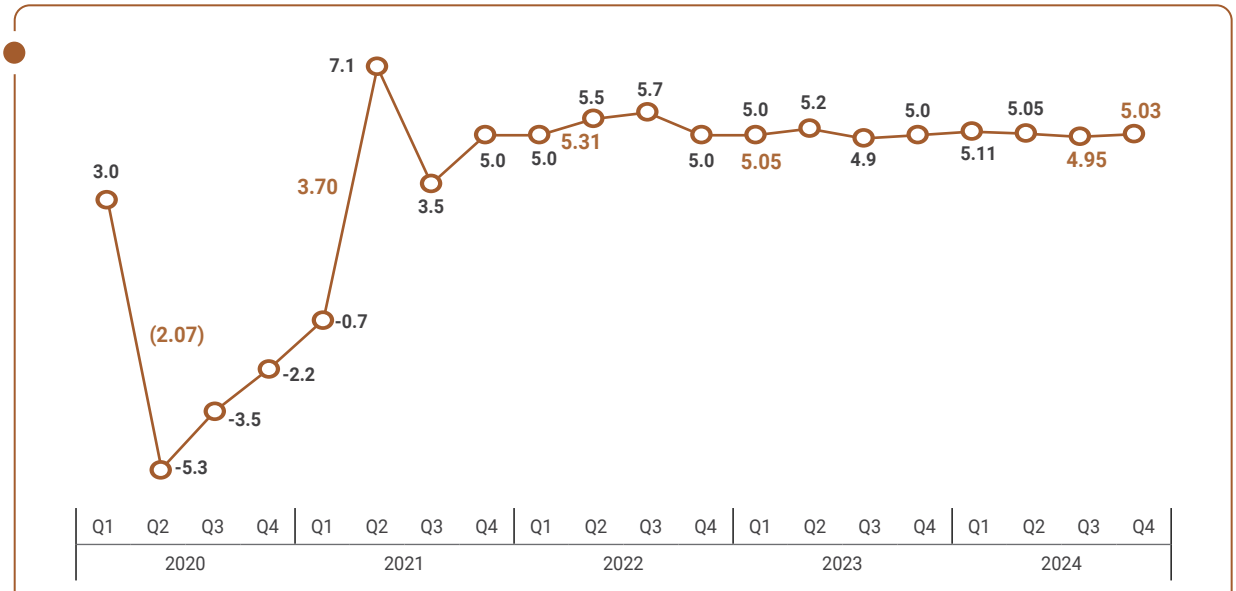
Di tengah sentimen terhadap kondisi perekonomian global, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih resilien dan stabil pada tahun 2024 dengan konsumsi tetap terjaga, serta kinerja investasi dan ekspor menunjukkan tren meningkat. Pertumbuhan ini dicapai di tengah berbagai dinamika yang terjadi di lingkup global, seperti melambatnya ekonomi global, perang dagang, proteksionisme, konflik geopolitik, dan volatilitas harga komoditas.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekonomi pada tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03% (yoy), capaian ini merupakan capaian yang stabil dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun sebelumnya sebesar 5,05% (yoy).

INDONESIAN ECONOMIC REVIEW

Amidst sentiment towards global economic conditions, Indonesia's economic growth is remaining resilient and stable in 2024 with consumption maintained, and investment and export performance showing an increasing trend. This growth was achieved amidst various dynamics occurring in the global scope, such as the slowdown in the global economy, trade wars, protectionism, geopolitical conflicts, and commodity price volatility.

Data from the Central Statistics Agency (BPS) shows that the economy in 2024 will grow by 5.03% (yoy), this achievement is a stable achievement compared to economic growth in the previous year of 5.05% (yoy).



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)
Source: Central Statistics Agency (BPS)

Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan terti nggi adalah Jasa Lainnya sebesar 9,80%; diikuti Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,69%; dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,56%. Sementara itu, Industri Pengolahan yang memiliki peran dominan tumbuh 4,43%. Sedangkan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masing-masing tumbuh sebesar 4,86%dan 0,67%. Pertumbuhan permintaan domestik Indonesia pada 31 Desember 2024 mencapai 4,91% secara tahunan, dengan kontribusi 53,08% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pertumbuhan ini didorong oleh konsumsi rumah tangga yang kuat, serta investasi pemerintah dan swasta, terutama dalam pembangunan infrastruktur.

A growth occurred in all business sectors. The business sectors that experienced the highest growth were Other Services at 9.80%; followed by Transportation and Warehousing at 8.69%; and Provision of Accommodation and Food and Beverage at 8.56%. For the meantime, the Manufacturing Industry, which has a dominant role, grew by 4.43%. Meanwhile, the Wholesale and Retail Trade, Car and Motorcycle Repair, and Agriculture, Forestry, and Fisheries grew by 4.86% and 0.67% respectively. Indonesia's domestic demand growth on December 31, 2024 reached 4.91% annually, with a contribution of 53.08% to Gross Domestic Product (GDP). This growth was driven by strong household consumption, as well as government and private investment, especially in infrastructure development.

Dalam hal inflasi, Indonesia berhasil mengendalikan inflasi dan mampu tumbuh solid sebesar 5,03% (yoy) dengan realisasi inflasi yang terkendali pada rentang 2,5% ±1% yakni 2,61% pada akhir tahun 2024. Namun, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti ketidakpastian geopolitik, perubahan suku bunga moneter dan tekanan eksternal lainnya.

Sementara itu, Pada Desember 2024 terjadi inflasi sebesar 1,57% yoy dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,80. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,90%; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,16%; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,59%; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,04%; kelompok kesehatan sebesar 1,93%; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,17%; kelompok pendidikan sebesar 1,94%; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,48%; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 7,02%. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok transportasi sebesar 0,30% dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,27%.

In terms of inflation, Indonesia has managed to control inflation and is able to grow solidly by 5.03% (yoy) with controlled inflation realization in the range of 2.5% ±1%, namely 2.61% at the end of 2024. However, there are remaining a number of challenges that need to be overcome, such as geopolitical uncertainty, changes in monetary interest rates and other external pressures.

In the meantime, in December 2024 there was inflation of 1.57% yoy with the Consumer Price Index (CPI) of 106.80. Inflation occurred due to an increase in prices indicated by an increase in most expenditure group indices, namely: food, beverages and tobacco group by 1.90%; clothing and footwear group by 1.16%; housing, water, electricity and household fuel group by 0.59%; household equipment, equipment and routine maintenance group by 1.04%; health group by 1.93%; recreation, sports and culture group by 1.17%; education group by 1.94%; food and beverage/restaurant provision group by 2.48%; and personal care and other services group by 7.02%. For the meantime, expenditure groups that experienced a decrease in index were: transportation group by 0.30% and information, communication, and financial services group by 0.27%.

IHK dan Tingkat Inflasi (YoY) Nasional Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2024 (%)
National CPI and Inflation Rate (YoY) by Expenditure Group in 2024 (%)

Kelompok Pengeluaran Expenditure Group	IHK Desember 2024 CPI December 2024	IHK Desember 2023 CPI December 2023
Umum (Headline) General (Headline)	106,80	105,15
Makanan, Minuman & Tembakau Food, Beverages & Tobacco	110,41	108,35
Pakaian dan Alas Kaki Clothing and Footwear	103,38	102,19
Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga Household Housing, Water, Electricity and Fuel	102,60	102,00
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga Household Supplies, Equipment and Routine Maintenance	103,87	102,80
Kesehatan Health	104,64	102,66
Transportasi Transportation	109,48	109,81
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan Information, Communication and Financial Services	99,48	99,75
Rekreasi, Olahraga dan Budaya Recreation, Sports and Culture	104,26	103,05
Pendidikan Education	104,92	102,92
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran Food and Beverage Supply/Restaurants	106,64	104,06
Peralatan Pribadi dan Jasa Lainnya Personal Equipment and Other Services	113,92	105,79

Dalam pengendalian inflasi, BI bersama pemerintah pusat dan daerah bekerja sama melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) diberbagai daerah.

In controlling inflation, BI together with the central and regional governments work in partnership through the National Food Inflation Control Movement (GNPIP) in various regions.

Faktor lainnya yang berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia adalah kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia dengan nilai tukar rupiah yang terkendali dan suku bunga acuan global yang dapat mempengaruhi meningkatnya biaya pinjaman dan mengurangi konsumsi rumah tangga. Secara keseluruhan hingga 31 Desember 2024, Rupiah tercatat di level Rp16.095, melemah 4,34% *yoy* secara *point to point* (*ptp*).

Another factor that influences Indonesia's economic growth is the increase in Bank Indonesia's benchmark interest rate with a controlled rupiah exchange rate and the global benchmark interest rate which can affect increasing borrowing costs and reduce household consumption. Overall, as of December 31, 2024, the Rupiah was recorded at Rp16,095, weakening 4.34% yoy point to point (ptp).

Namun, Pemerintah berupaya untuk menjaga Stabilitas Sistem Keuangan tetap terjaga di tengah divergensi pertumbuhan ekonomi dunia serta ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat. Sepanjang tahun 2024, Pemerintah telah mengeluarkan 2 (dua) kebijakan di tahun 2024 yaitu Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter dimana kedua kebijakan tersebut memiliki dampak yang besar terhadap masyarakat. Pemerintah melakukan optimalisasi pendapatan negara dan efisiensi belanja untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal yang mencakup peningkatan pendapatan negara melalui peningkatan pajak, bea cukai, dan pendapatan lainnya. Kebijakan fiskal lainnya adalah efisiensi belanja untuk mengurangi belanja yang tidak penting dan meningkatkan belanja yang strategis. Efisiensi belanja ini terjadi pada anggaran belanja infrastruktur yang dilakukan pemangkasan *(refocusing)* pada tahun 2025 serta implementasi dari Nawacita yang mengakibatkan anggaran infrastruktur naik dua kali lipat.

However, the Government is trying to maintain Financial System Stability amidst the divergence of world economic growth and increasing uncertainty in the global financial market. Throughout 2024, the Government has issued 2 (two) policies in 2024, namely Fiscal Policy and Monetary Policy, where both policies have a major impact on society. The Government is optimizing state revenues and spending efficiency to support economic growth through fiscal policies that include increasing state revenues through increasing taxes, customs, and other revenues. Another fiscal policy is spending efficiency to reduce unnecessary spending and increase strategic spending. This spending efficiency occurs in the infrastructure spending budget which was cut (refocused) in 2025 and the implementation of Nawacita which resulted in the infrastructure budget doubling.

Adanya kebijakan fiskal pada tahun 2024 tersebut memiliki dampak terhadap masyarakat seperti peningkatan Pendapatan Negara, meningkatkan kemampuan pemerintah untuk membiayai program-program pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, efisiensi belanja serta mengurangi beban biaya hidup masyarakat dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara.

The fiscal policy in 2024 has an impact on society such as increasing State Revenue, increasing the government's ability to finance development programs and improve the quality of life of the community, spending efficiency and reducing the burden of people's living costs and increasing the efficiency of using the state budget.

Kebijakan lainnya adalah terkait dengan kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia guna menjaga stabilitas makro ekonomi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kebijakan ini mencakup pengaturan suku bunga untuk mengendalikan inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi sehingga meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengakses kredit, dan pengaturan likuiditas untuk menjaga stabilitas sistem keuangan untuk mencegah krisis keuangan.

Another policy is related to the monetary policy implemented by Bank Indonesia to maintain macroeconomic stability, thereby encouraging inclusive economic growth. This policy includes regulating interest rates to control inflation and support economic growth so as to increase the community's ability to access credit, and regulating liquidity to maintain the stability of the financial system to prevent a financial crisis.

Tinjauan Industri Konstruksi

Construction Industry Overview

TINJAUAN INDUSTRI KONSTRUKSI

Sektor konstruksi memiliki peranan yang sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi, karena ketersediaan infrastruktur yang andal dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan dunia usaha. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Struktur Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2024 didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 18,98%; diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,07%; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 12,61%; Konstruksi sebesar 10,09%; serta Pertambangan dan Penggalian sebesar 9,15%. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 63,90%.

Sektor konstruksi menjadi salah satu kontributor terbesar keempat dalam tiga tahun terakhir periode 2022 - 2024. Pertumbuhan sektor konstruksi di tahun 2024 mencapai 7,02% yoy dari pencapaian PDB. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 4,91% yoy dengan kontribusi hingga 9,59% terhadap PDB atau setara dengan Rp1.179,99 triliun.

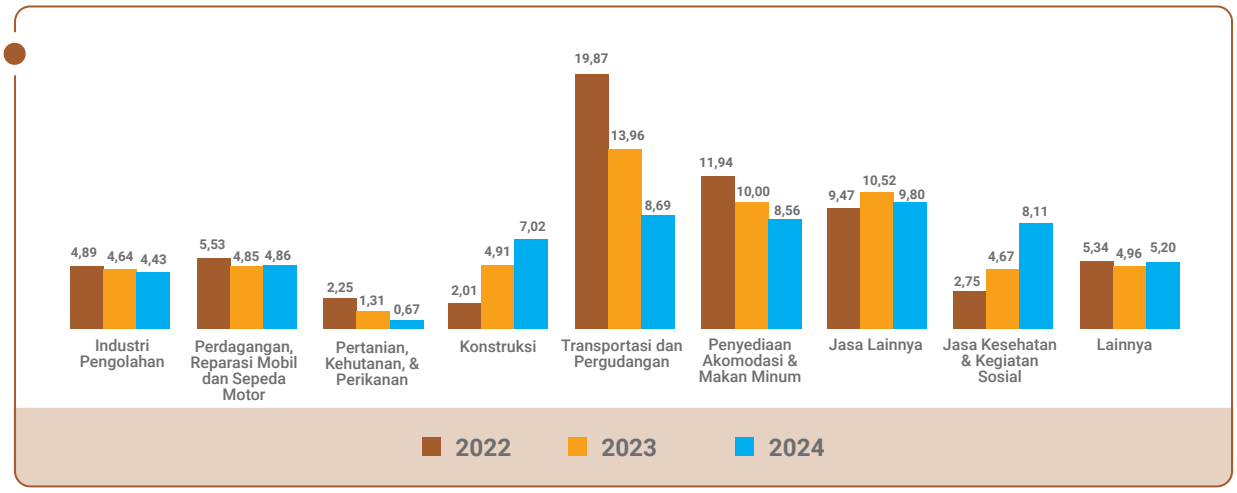
CONSTRUCTION INDUSTRY OVERVIEW

The construction sector plays a very important role in spurring economic growth, because the availability of reliable infrastructure can affect the growth of the business world. Based on data from the Central Statistics Agency (BPS), the structure of Indonesia's Gross Domestic Product (GDP) according to business fields at current prices in 2024 is dominated by the Manufacturing Industry Business Field at 18.98%; followed by Wholesale and Retail Trade, Car and Motorcycle Repair at 13.07%; Agriculture, Forestry, and Fisheries at 12.61%; Construction at 10.09%; and Mining and Quarrying at 9.15%. The role of these five business fields in the Indonesian economy reached 63.90%.

The construction sector is one of the fourth largest contributors in the last three years for the period 2022 - 2024. The growth of the construction sector in 2024 reached 7.02% yoy of GDP achievement. This growth is higher compared to 2023 which reached 4.91% yoy with a contribution of up to 9.59% to GDP or equivalent to Rp1,179.99 trillion.

Grafik Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha (C-to-C) (persen) Tahun 2022-2024

GDP Growth Chart of Several Business Fields (C-to-C) (percent) 2022-2024



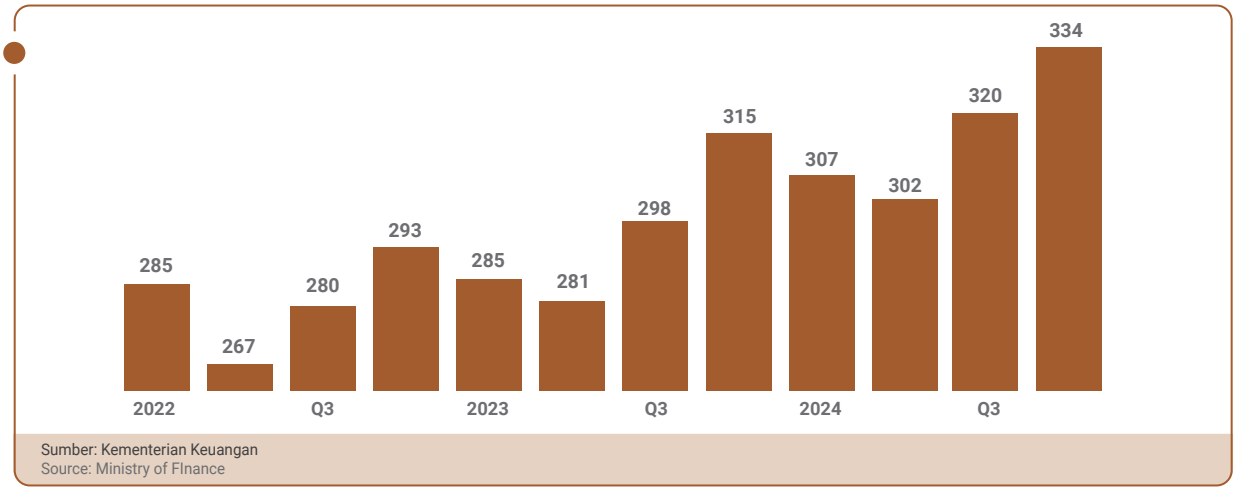
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)
Source: Central Statistics Agency (BPS)

PDB dari Konstruksi di Indonesia meningkat menjadi Rp333.596,80 miliar pada kuartal keempat tahun 2024 dari Rp320.166,50 miliar pada kuartal ketiga tahun 2024. PDB dari Konstruksi di Indonesia rata-rata sebesar Rp238.814,76 miliar dari tahun 2010 hingga 2024, mencapai puncak tertinggi sebesar Rp333.596,80 miliar pada kuartal keempat tahun 2024, dan terendah sebesar Rp149.919,00 miliar pada kuartal pertama tahun 2010.

GDP from Construction in Indonesia increased to Rp333,596.80 billion in the fourth quarter of 2024 from Rp320,166.50 billion in the third quarter of 2024. GDP from Construction in Indonesia averaged Rp238,814.76 billion from 2010 to 2024, reaching a peak of Rp333,596.80 billion in the fourth quarter of 2024, and a low of Rp149,919.00 billion in the first quarter of 2010.

Grafik PDB dari Konstruksi Indonesia Tahun 2022-2024

GDP Chart of Indonesian Construction 2022-2024



Sumber: Kementerian Keuangan
Source: Ministry of FInance

Upaya Pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan sektor konstruksi dilakukan melalui berbagai kebijakan, program dan kolaborasi dari berbagai pihak seperti pemerintah, swasta, dan institusi keuangan. Namun, sejalan dengan pertumbuhan yang solid, sektor konstruksi kerap dihadapkan pada sejumlah tantangan. Pemenuhan layanan dasar bagi seluruh masyarakat menjadi tantangan bagi keberhasilan pembangunan infrastruktur karena diperlukan penyediaan akses terhadap perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau, serta pemenuhan air minum dan sanitasi yang bersih dan berkualitas, dalam menjamin kehidupan masyarakat yang sehat dan produktif.

The Government's efforts to increase the growth of the construction sector are carried out through various policies, programs and collaborations from various parties such as the government, private sector, and financial institutions. However, in conformity with solid growth, the construction sector often faces a number of challenges. Fulfillment of basic services for the entire community is a challenge for the success of infrastructure development because it requires the provision of access to decent, safe, and affordable housing and settlements, as well as the provision of clean and quality drinking water and sanitation, in ensuring a healthy and productive community life.

Disisi lain, infrastruktur konektivitas dan transportasi juga diperlukan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah dan jalan tol dalam rangka pengembangan sistem jaringan jalan nasional, termasuk pengembangan jaringan transportasi (melalui peningkatan kapasitas bandara, fasilitas pelabuhan dan layanan angkutan laut, serta peningkatan prasarana perkeretaapian) yang terintegrasi dalam menghubungkan antar wilayah, serta mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Terlebih dibutuhkan ketersediaan lahan terutama kendala pembebasan lahan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Program Prioritas lainnya.

On the other hand, connectivity and transportation infrastructure also requires acceleration of increasing regional road and toll road connectivity in order to develop the national road network system, including the development of transportation networks (through increasing airport capacity, port facilities and sea transportation services, as well as increasing railway infrastructure) that is integrated in connecting between regions, and supporting the National Tourism Strategic Area (KSPN) and the Indonesian Capital Region (IKN). Moreover, land availability is needed, especially land acquisition constraints for National Strategic Projects (PSN) and other Priority Programs.

Tantangan lainnya adalah percepatan pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) seperti penuntasan infrastruktur digital dan pemanfaatan TIK yang belum sepenuhnya dirasakan masyarakat terutama di daerah 3TP, serta perlu optimalisasi

Another challenge is the acceleration of the development of Information and Communication Technology (ICT) infrastructure such as the completion of digital infrastructure and the use of ICT which has not been fully felt by the community, especially in 3TP areas, and the need

layanan digital yang mendukung ekonomi digital, stabilitas layanan publik dan pemerintahan (SPBE). Terakhir, tantang infrastruktur pada penggunaan energi dan ketenagalistrikan yang belum optimal atas pemenuhan akses, pasokan energi dan tenaga listrik yang merata dan berkelanjutan, serta perlu pengembangan energi baru terbarukan (EBT), dan pemanfaatan energi ramah lingkungan (*green energy*).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan , Pemerintah juga turut mendukung percepatan transformasi ekonomi, penguatan kualitas belanja *(spending better),* mendorong subsidi tepat sasaran, mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan pencapaian lapangan kerja. Pada tahun 2024, anggaran belanja Pemerintah Pusat tumbuh 7,4% untuk mengakselerasi transformasi ekonomi yang mencakup (1) pembangunan IKN, (2) penyediaan anggaran subsidi (energi dan non-energi), (3) kenaikan gaji pokok PNS dan Pensiunan; (4) Penuntasan infrastruktur prioritas (antara lain PSN dan Inpres Jalan Daerah); (5) pelaksanaan Pemilu tahun 2024, serta (6) pembayaran kewajiban Pemerintah.

Pada tahun 2024, anggaran infrastruktur diarahkan untuk mendorong pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar yang difokuskan mendukung transformasi ekonomi untuk pemerataan pembangunan, dengan arah kebijakan yaitu: (1) mempercepat pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi (konektivitas dan transportasi, energi dan ketenagalistrikan, dan pangan); (2) memprioritaskan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan proyek-proyek strategis yang mendukung prioritas pembangunan; (3) mendukung percepatan penyelesaian pembangunan IKN secara bertahap dan berkelanjutan; (4) melakukan pemerataan dan penguatan akses TIK yang mendukung transformasi digital; dan (5) mendorong pemberdayaan partisipasi badan usaha melalui skema KPBU dalam pembangunan infrastruktur.

Anggaran infrastruktur tahun 2024 sebesar Rp423,4 triliun di mana lebih besar 5,8% dibandingkan APBN 2023 yang sebesar Rp399,6 triliun. Fokus utama Pemerintah dalam menentukan penggunaan anggaran tersebut adalah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar serta kebijakan-kebijakan dasar seperti mempercepat pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi (konektivitas dan transportasi, energi dan ketenagalistrikan, dan pangan) memprioritaskan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan proyek-proyek strategis, mendukung percepatan penyelesaian pembangunan IKN secara bertahap dan berkelanjutan, melakukan pemerataan dan penguatan akses TIK yang mendukung transformasi digital dan mendorong pemberdayaan partisipasi badan usaha melalui skema KPBU dalam pembangunan infrastruktur.

to optimize digital services that support the digital economy, stability of public and government services (SPBE). Finally, the challenge of infrastructure in the use of energy and electricity which has not been optimal in fulfilling access, an even and sustainable supply of energy and electricity, and the need to develop new renewable energy (EBT), and the use of environmentally friendly energy (green energy).

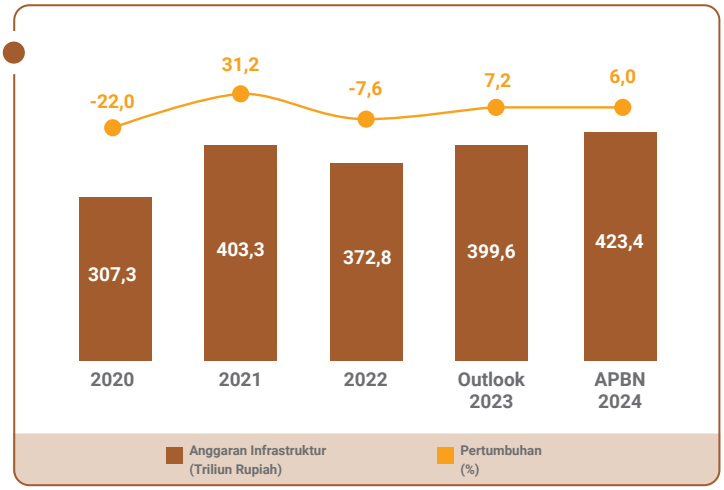
Based on data from the Ministry of Finance, the Government also supports the acceleration of economic transformation, strengthening the quality of spending (spending better), encouraging targeted subsidies, encouraging economic growth, equitable development, and achieving employment. In 2024, the Central Government's spending budget will grow by 7.4% to accelerate economic transformation which includes (1) development of the IKN, (2) provision of subsidy budget (energy and non-energy), (3) increase in basic salaries of civil servants and retirees; (4) Completion of priority infrastructure (including PSN and Presidential Instruction on Regional Roads); (5) implementation of the 2024 General Election, and (6) payment of Government obligations.

In 2024, the infrastructure budget is directed to encourage economic development and basic services that are focused on supporting economic transformation for equitable development, with the following policy directions: (1) accelerating the development of economic driving infrastructure (connectivity and transportation, energy and electricity, and food); (2) prioritizing the provision of basic service infrastructure and strategic projects that support development priorities; (3) supporting the acceleration of the completion of the IKN development in stages and sustainably; (4) equalizing and strengthening ICT access that supports digital transformation; and (5) encouraging the empowerment of business entity participation through the KPBU scheme in infrastructure development.

The 2024 infrastructure budget is Rp423.4 trillion, which is 5.8% larger than the 2023 State Budget of Rp399.6 trillion. The main focus of the Government in determining the use of the budget is to support economic development and basic services and basic policies such as accelerating the development of economic driving infrastructure (connectivity and transportation, energy and electricity, and food) prioritizing the provision of basic service infrastructure and strategic projects, supporting the acceleration of the completion of the IKN development in a gradual and sustainable manner, equalizing and strengthening ICT access that supports digital transformation and encouraging the empowerment of business entity participation through the KPBU scheme in infrastructure development.

Grafik APBN Konstruksi tahun 2020 - 2024

Construction State Budget Chart 2020 - 2024



Sumber: Kementerian Keuangan
Source: Ministry of FInance

Selanjutnya, proyek-proyek strategis yang menjadi prioritas dalam pembangunan infrastruktur tahun 2024 berdasarkan APBN, antara lain:

Furthermore, the strategic projects that are a priority in infrastructure development in 2024 based on the APBN comprise:

Layanan Dasar Pangan
Basic Food Services

- Rumah Susun 5.479 unit dan Rumah Khusus 553 unit;
- Pembangunan, Rehabilitasi, dan Renovasi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah sebanyak 613 unit Sekolah;
- Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan kapasitas 2.571 liter/detik;
- Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan irigasi masing-masing seluas 4.000 Ha dan 38.000 Ha

- 5,479 units of Flats and 553 units of Special Houses;
- Construction, Rehabilitation, and Renovation of Elementary and Secondary Education Facilities and Infrastructure of 613 Schools;
- Drinking Water Supply System (SPAM) with a capacity of 2,571 liters/second;
- Construction and Rehabilitation of Irrigation Networks covering an area of 4,000 Ha and 38,000 Ha respectively

Konektivitas & Transportasi
Connectivity & Transportation

- Jalan baru sepanjang 271,2 km, Jalan Tol Beroperasi 50,8 km dan Konstruksi JTTS sepanjang 182 km;
- Jembatan baru 4.796,2 m dan flyover/underpass/terowongan 2.231,1 m;
- Panjang jalur kereta api kumulatif 7.451 km'sp;
- 21 lokasi bandara baru;
- 36 pelabuhan penyeberangan baru.

- 271.2 km of new roads, 50.8 km of operational toll roads and 182 km of JTTS construction;
- 4,796.2 m of new bridges and 2,231.1 m of flyovers/underpasses/tunnels;
- Cumulative railway length of 7,451 km'sp;
- 21 new airport locations;
- 36 new ferry ports.

Energi dan Ketenagalistrikan
Energy and Electricity

- Pipa Transmisi Gas Bumi Tahap I (Ruas Cirebon – Semarang);
- Pembangunan Bendungan 16 unit ditargetkan selesai;
- Bantuan Pasang Baru Listrik kepada 80.000 rumah tangga.

- Natural Gas Transmission Pipeline Phase I (Cirebon – Semarang Section);
- Construction of 16 Dams targeted for completion;
- Assistance for New Electricity Installations to 80,000 households.

Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
Information and Communication Technology (ICT) Infrastructure

- Digital Broadcasting System (DBS) sebanyak 62 unit;
- Penyediaan 22.709 Titik Akses Internet (Existing);
- Operasi proyek SATRIA (Kapasitas Satelit) sebesar 19 Gbps.

- Digital Broadcasting System (DBS) as many as 62 units;
- Provision of 22,709 Internet Access Points (Existing);
- Operation of the SATRIA project (Satellite Capacity) of 19 Gbps.

Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha

Operational Review per Business Segment



JAKARTA INTERNATIONAL STADIUM (JIS)

SEGMEN USAHA

Pembahasan tinjauan per segmen usaha pada Laporan Tahunan ini disajikan sesuai dengan pembagian segmen yang tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan sesuai PSAK No. 5 tentang Segmen Operasi. Adapun kinerja masing-masing segmen usaha yang dijalankan Perseroan dapat dilihat berdasarkan perolehan kontrak baru dan kontrak yang dihadapi.

Perseroan menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam menilai kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Segmentasi berdasarkan aktivitas dari setiap kegiatan operasi entitas legal di dalam Grup.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

1. Yang terlihat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
2. Hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh kepala operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
3. Tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Berdasarkan hal tersebut, Perseroan mengelompokkan kegiatan usahanya menjadi 4 (empat) segmen sesuai dengan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, yaitu Jasa Konstruksi, Industri, Konsesi, dan Properti.

BUSINESS SEGMENT

The discussion of the review per business segment in this Annual Report is presented in accordance with the division of segments listed in the Company's Consolidated Financial Statements in accord with PSAK No. 5 concerning Operating Segments. The performance of each business segment run by the Company can be seen based on the acquisition of new contracts and contracts faced.

The Company presents operating segments based on financial information used by operational decision makers in assessing segment performance and determining the allocation of its resources. Segmentation is based on the activities of each legal entity's operating activities within the Group.

An operating segment is a component of an entity:

1. Which is visible in business activities that earn revenue and incur expenses (including revenue and expenses related to transactions with other components of the same entity);
2. The results of its operations are reviewed periodically by the head of operations to make decisions about the resources allocated to the segment and assess its performance; and
3. Separate financial information is available.

Based on the matter above, the Company groups its business activities into 4 (four) segments in accordance with the Company's Consolidated Financial Statements, namely Construction Services, Industry, Concession, and Property.

SEGMEN JASA KONSTRUKSI

Segmen jasa konstruksi mencakup kegiatan utama Perseroan di bidang konstruksi bangunan gedung, dari pekerjaan rancang bangun (*design and build*), mulai dari proses perencanaan hingga konstruksi. Lingkup pekerjaan meliputi pembangunan gedung perkantoran, komersial, residensial, serta berbagai fasilitas publik, seperti rumah sakit, sekolah, stadion olahraga, bandara, dan infrastruktur terkait, sesuai Anggaran Dasar Perseroan.

CONSTRUCTION SERVICES SEGMENT

The construction services segment covers the Company's main activities in the field of building construction, from design and build work, starting from the planning process to construction. The scope of work includes the construction of office buildings, commercial, residential, and various public facilities, such as hospitals, schools, sports stadiums, airports, and related infrastructure, in accordance with the Company's Articles of Association.

Produktivitas Segmen Jasa Konstruksi

Construction Services Segment Productivity

Produktivitas Segmen Jasa Konstruksi 2023-2024
Construction Services Segment Productivity 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	2023 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal (Rp-Miliar) Nominal (Rp-Billion)	Persentase (%) Percentage (%)
Kontrak Baru New Contract	2.102,23	5.045,80	(2.943,57)	-58,34% ▼
Kontrak Dihadapi Order Book	8.304,65	11.827,62	(3.522,97)	-29,79% ▼

Sepanjang tahun 2024, kinerja segmen Jasa Konstruksi membukukan realisasi kontrak baru sebesar Rp2.102,23 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp2.943,57 miliar atau 58,34% dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai Rp5.045,80 miliar. Pada periode yang sama, realisasi kontrak dihadapi segmen Jasa Konstruksi tercatat sebesar Rp8.304,65 miliar, turun sebesar Rp3.522,97 miliar atau 29,79% dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai Rp11.827,62 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh faktor ekonomi makro, seperti dampak pemilu, serta kebijakan Perseroan yang lebih selektif dalam memperoleh proyek. Selain itu, beberapa proyek yang berjalan di segmen Konstruksi telah selesai pada tahun 2024.

Throughout 2024, the performance of the Construction Services segment recorded new contract realization of Rp2,102.23 billion, a decrease of Rp2,943.57 billion or 58.34% compared to 2023 which reached Rp5,045.80 billion. In the same period, contract realization faced by the Construction Services segment was recorded at Rp8,304.65 billion, a decrease of Rp3,522.97 billion or 29.79% compared to 2023 which reached Rp11,827.62 billion. This decrease was due to macroeconomic factors, such as the impact of the election, as well as the Company's more selective policy in obtaining projects. In addition, several projects ongoing in the Construction segment have been completed in 2024.

Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Jasa Konstruksi

Construction Services Segment Revenue and Profitability

Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Jasa Konstruksi 2023-2024
Construction Services Segment Revenue and Profitability 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	2023 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal (Rp-Miliar) Nominal (Rp-Billion)	Persentase (%) Percentage (%)
Pendapatan Revenue	3.370,06	3.782,58	(412,52)	-10,91% ▼
Beban Pokok Penjualan Cost of Revenues	(3.092,05)	(3.523,41)	431,36	-12,24% ▼
Laba Kotor Gross Profit	278,01	259,17	18,85	7,27% ▲

Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Jasa Konstruksi 2023-2024
Construction Services Segment Revenue and Profitability 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	2023 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease		
			Nominal (Rp-Miliar) Nominal (Rp-Billion)	Persentase (%) Percentage (%)	
Beban Usaha Operating Expenses	(114,42)	(70,68)	(43,74)	61,89%	▲
Laba Usaha Other Income	163,59	188,49	(24,90)	-13,21%	▼
Beban Pajak Final Final Tax Expense	(89,26)	(100,24)	10,98	-10,95%	▼
Bagian Laba Ventura Bersama Share in Profit on Joint Venture	99,43	9,73	89,70	921,66%	▲
Bagian Laba (Rugi) Entitas Asosiasi Share in Profit (Loss) on Associate	(4,79)	(14,62)	9,83	-67,24%	▼
Pendapatan (Beban) Lain-Lain Other Income (Expenses)	(138,97)	(41,32)	(97,65)	236,33%	▲
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit Before Income Tax	30,00	42,04	(12,03)	-28,63%	▼
Pajak Penghasilan Income Tax	-	-	-	-	-
Laba Bersih Tahun Berjalan Net Profit for the Year	30,00	42,04	(12,03)	-28,63%	▼
Jumlah Aset Total Assets	5.055,26	4.330,98	724,28	16,72%	▲
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	2.801,38	2.108,52	692,86	32,86%	▲

Pada tahun 2024, segmen Jasa Konstruksi mencatatkan pendapatan sebesar Rp3.370,06 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp412,52 miliar atau 10,91% dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai Rp3.782,58 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya perolehan kontrak baru pada 2024 serta adanya proyek berjalan yang tidak seluruhnya dapat diprogres tahun ini dan berlanjut ke tahun berikutnya.

In 2024, the Construction Services segment recorded revenue of Rp3,370.06 billion, a decrease of Rp412.52 billion or 10.91% compared to 2023 which reached Rp3,782.58 billion. This decrease was due to a decrease in the acquisition of new contracts in 2024 and the existence of ongoing projects that could not all be progressed this year and continued into the following year.

Sementara itu, segmen Jasa Konstruksi membukukan laba bersih sebesar Rp30,00 miliar, turun sebesar Rp12,03 miliar atau 28,63% dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai Rp42,04 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya beban usaha dan beban lain-lain.

For the meantime, the Construction Services segment posted a net profit of Rp30.00 billion, a decrease of Rp12.03 billion or 28.63% compared to 2023 which reached Rp42.04 billion. This decrease was due to an increase in operating expenses and other expenses.

SEGMEN INDUSTRI

Segmen Industri mencakup kegiatan usaha Industri Modular. Produk modular yang dihasilkan meliputi MOLI (Modular Lite), WG Flatpack, dan Volumetrik, yang dirancang dengan sistem prefabrikasi berbasis modul untuk dirangkai menjadi bangunan sesuai kebutuhan. Segmen Industri Modular merupakan bagian dari strategi Perseroan dalam penerapan *backward offsite construction*.

INDUSTRY SEGMENT

The Industrial Segment includes the Modular Industry business activities. The modular products produced include MOLI (Modular Lite), WG Flatpack, and Volumetric, which are designed with a module-based prefabrication system to be assembled into buildings according to needs. The Modular Industry Segment is part of the Company's strategy in implementing backward offsite construction.

Produktivitas Segmen Industri Modular

Modular Industry Segment Productivity

Produktivitas Segmen Industri Modular 2023-2024
Modular Industry Segment Productivity 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	2023 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal (Rp-Miliar) Nominal (Rp-Billion)	Persentase (%) Percentage (%)
Kontrak Baru New Contract	613,19	16,46	596,73	3.625,73% ▲
Kontrak Dihadapi Order Book	634,38	189,80	444,58	234,23% ▲

Sepanjang tahun 2024, kinerja segmen Industri Modular membukukan realisasi kontrak baru sebesar Rp613,19 miliar, mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp596,73 miliar atau 3.625,73% dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai Rp16,46 miliar. Pada periode yang sama, realisasi kontrak dihadapi segmen Industri Modular tercatat sebesar Rp634,38 miliar, naik sebesar Rp444,58 miliar atau 234,23% dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai Rp189,80 miliar. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya perolehan proyek-proyek modular, termasuk Hunian Modular TNI-IKN, Hunian Pekerja Konstruksi Tahap 2, serta berbagai proyek modular lainnya.

Throughout 2024, the performance of the Modular Industry segment recorded new contract realization of Rp613.19 billion, a significant increase of Rp596.73 billion or 3,625.73% compared to 2023 which reached Rp16.46 billion. In the same period, contract realization encountered by the Modular Industry segment was recorded at Rp634.38 billion, an increase of Rp444.58 billion or 234.23% compared to 2023 which reached Rp189.80 billion. This increase was due to the increase in the acquisition of modular projects, including TNI-IKN Modular Housing, Phase 2 Construction Worker Housing, and various other modular projects.

Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Industri Modular

Modular Industry Segment Revenue and Profitability

Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Industri Modular 2023-2024
Modular Industry Segment Revenue and Profitability 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	2023 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal (Rp-Miliar) Nominal (Rp-Billion)	Persentase (%) Percentage (%)
Pendapatan Revenue	237,35	131,08	106,27	81,07% ▲
Beban Pokok Penjualan Cost of Revenues	(213,24)	(105,97)	(107,26)	101,22% ▲
Laba Kotor Gross Profit	24,11	25,11	(0,99)	-3,96% ▼
Beban Usaha Operating Expenses	0,00	0,00	0,00	0,00% -
Laba Usaha Other Income	24,11	25,11	(0,99)	-3,96% ▼
Beban Pajak Final Final Tax Expense	(4,27)	(11,55)	7,28	-62,99% ▼
Bagian Laba Ventura Bersama Share in Profit on Joint Venture	0,00	0,45	(0,45)	-100,00% ▼
Bagian Laba (Rugi) Entitas Asosiasi Share in Profit (Loss) on Associate	0,00	0,00	0,00	0,00% -
Pendapatan (Beban) Lain-Lain Other Income (Expenses)	16,18	(12,17)	28,35	232,97% ▲

Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Industri Modular 2023-2024
Modular Industry Segment Revenue and Profitability 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	2023 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal (Rp-Miliar) Nominal (Rp-Billion)	Persentase (%) Percentage (%)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit Before Income Tax	36,02	1,84	34,18	1.857,82% ▲
Pajak Penghasilan Income Tax	-	-	-	- -
Laba Bersih Tahun Berjalan Net Profit for the Year	36,02	1,84	34,18	1.857,82% ▲
Jumlah Aset Total Assets	134,48	213,79	(79,31)	-37,10% ▼
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	21,20	134,73	(113,52)	-84,26% ▼

Pada tahun 2024, segmen Industri Modular mencatatkan pendapatan sebesar Rp237,35 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp106,27 miliar atau 81,07% dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai Rp131,08 miliar. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya perolehan proyek modular serta penyelesaian proyek modular yang dapat diprogres di tahun 2024 ini.

In 2024, the Modular Industry segment recorded revenue of Rp237.35 billion, an increase of Rp106.27 billion or 81.07% compared to 2023 which reached Rp131.08 billion. This increase was due to the increase in the acquisition of modular projects and the completion of modular projects that can be progressed in 2024.

Sementara itu, segmen Industri Modular membukukan laba bersih sebesar Rp36,02 miliar, naik signifikan sebesar Rp34,18 miliar atau 1.857,82% dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai Rp1,84 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan lain-lain dan turunnya beban pajak final.

In the meantime, the Modular Industry segment posted a net profit of Rp36.02 billion, a significant increase of Rp34.18 billion or 1,857.82% compared to 2023 which reached Rp1.84 billion. This increase was mainly due to the increase in other income and the decrease in final tax expense.

SEGMEN KONSESI EN KONESI

Segmen Konsesi mencakup pada pengelolaan aset-aset lahan milik pemerintah serta BUMN/BUMD melalui skema investasi *Public Private Partnership* (PPP) atau Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Tujuan utama dari bisnis ini adalah untuk memperoleh pekerjaan konstruksi, serta menghasilkan pendapatan berulang (*recurring income*). Segmen Konsesi merupakan bagian dari strategi Perseroan dalam penerapan *forward integration*.

Saat ini, Perseroan memiliki dua proyek konsesi, yaitu Hotel De Braga di Bandung, yang dikerjakan bersama partner PT Sarinah dengan skema *Build-Operate-Transfer* (BOT) selama 25 tahun, serta proyek konsesi Graha Mantap di Menteng, Jakarta, yang dikerjakan bersama partner Bank Mandiri Taspen dengan skema BOT selama 30 tahun.

CONCESSION SEGMENT

The Concession Segment covers the management of government-owned land assets and BUMN/BUMD through the Public Private Partnership (PPP) or Government Business Entity Cooperation (KPBU) investment scheme. The main objective of this business is to obtain construction work, as well as generate recurring income. The Concession Segment is part of the Company's strategy in implementing forward integration.

Currently, the Company has two concession projects, namely De Braga Hotel in Bandung, which is being worked on with partner PT Sarinah with a Build-Operate-Transfer (BOT) scheme for 25 years, and Graha Mantap concession project in Menteng, Jakarta, which is being worked on with partner Bank Mandiri Taspen with a BOT scheme for 30 years.

Produktivitas Segmen Konsesi

Concession Segment Productivity

Produktivitas Segmen Konsesi 2023-2024
Concession Segment Productivity 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	2023 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal (Rp-Miliar) Nominal (Rp-Billion)	Persentase (%) Percentage (%)
Kontrak Baru New Contract	0,00	52,50	(52,50)	-100,00% ▼
Kontrak Dihadapi Order Book	57,21	52,50	4,72	8,99% ▲

Sepanjang tahun 2024, kinerja segmen Konsesi tidak mencatatkan realisasi kontrak baru melainkan membukukan kontrak dihadapi sebesar Rp57,21 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp4,72 miliar atau 8,99% dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai Rp52,50 miliar. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya tingkat okupansi Graha Mantap menjadi 100% dan Hotel Braga menjadi 90,87% pada 2024 dibandingkan tahun sebelumnya.

Throughout 2024, the performance of the Concession segment did not record the realization of new contracts but instead recorded contracts faced amounting to Rp57.21 billion, an increase of Rp4.72 billion or 8.99% compared to 2023 which reached Rp52.50 billion. This increase was due to the increase in the occupancy rate of Graha Mantap to 100% and Hotel Braga to 90.87% in 2024 compared to the previous year.

Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Konsesi

Concession Segment Revenue and Profitability

Produktivitas Segmen Konsesi 2023-2024
Concession Segment Productivity 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	2023 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal (Rp-Miliar) Nominal (Rp-Billion)	Persentase (%) Percentage (%)
Pendapatan Revenue	67,10	52,87	14,23	26,91% ▲
Beban Pokok Penjualan Cost of Revenues	(61,84)	(37,56)	(24,28)	64,64% ▲
Laba Kotor Gross Profit	5,26	15,31	(10,05)	-65,65% ▼
Beban Usaha Operating Expenses	0,00	(2,99)	2,99	-100,00% ▼
Laba Usaha Other Income	5,26	12,32	(7,06)	-57,31% ▼
Beban Pajak Final Final Tax Expense	(2,85)	(2,61)	(0,25)	9,49% ▲
Bagian Laba Ventura Bersama Share in Profit on Joint Venture	0,00	0,00	0,00	0,00% -
Bagian Laba (Rugi) Entitas Asosiasi Share in Profit (Loss) on Associate	0,00	0,00	0,00	0,00% -
Pendapatan (Beban) Lain-Lain Other Income (Expenses)	(0,09)	(11,47)	11,38	-99,22% ▼
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit Before Income Tax	2,32	(1,75)	4,07	-232,10% ▲
Pajak Penghasilan Income Tax	-	-	-	- -
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	2,32	(1,75)	4,07	232,10% ▲
Jumlah Aset Total Assets	344,73	286,55	58,17	20,30% ▲
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	318,75	248,93	69,82	28,05% ▲

Pada tahun 2024, segmen Konsesi mencatatkan pendapatan sebesar Rp67,10 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp14,23 miliar atau 26,91% dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai Rp52,87 miliar. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya tingkat okupansi Graha Mantap dan Hotel Braga.

In 2024, the Concession segment recorded revenue of Rp67.10 billion, an increase of Rp14.23 billion or 26.91% compared to 2023 which reached Rp52.87 billion. This increase was due to the increasing occupancy rate of Graha Mantap and Hotel Braga.

Sementara itu, segmen Konsesi membukukan laba bersih sebesar Rp2,32 miliar, naik signifikan sebesar Rp4,07 miliar dibandingkan dengan tahun 2023 yang mengalami kerugian sebesar Rp1,75 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan dan penurunan pada pendapatan lain-lain dan beban lain-lain dengan total keseluruhan sebesar Rp11,38 miliar.

In the meantime, the Concession segment posted a net profit of Rp2.32 billion, a significant increase of Rp4.07 billion compared to 2023 which experienced a loss of Rp1.75 billion. This increase was mainly due to the increase and decrease in other income and other expenses with a total of Rp11.38 billion.

SEGMEN PROPERTI

Segmen Properti mencakup penjualan dan/atau pengelolaan aset properti yang telah dimiliki Perseroan sebelumnya. Properti yang dimiliki Perseroan meliputi Tamansari Tera, Tamansari Mahogany, Tamansari Prospero, Fave Hotel Karawang, serta beberapa properti lainnya. Ke depan, Perseroan tidak lagi berfokus pada bisnis properti.

PROPERTY SEGMENT

The Property segment includes the sale and/or management of property assets previously owned by the Company. The properties owned by the Company include Tamansari Tera, Tamansari Mahogany, Tamansari Prospero, Fave Hotel Karawang, and several other properties. In the future, the Company will no longer focus on the property business.

Produktivitas Segmen Properti

Property Segment Productivity

Produktivitas Segmen Properti 2023-2024
Property Segment Productivity 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	2023 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal (Rp-Miliar) Nominal (Rp-Billion)	Persentase (%) Percentage (%)
Kontrak Baru New Contract	0,00	19,57	(19,57)	-100,00% ▼
Kontrak Dihadapi Order Book	13,24	19,57	(6,33)	-32,34% ▼

Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat kontrak baru dari penjualan dan/atau pengelolaan aset properti, dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai Rp19,57 miliar. Pada periode yang sama, realisasi kontrak dihadapi segmen Properti tercatat sebesar Rp13,24 miliar, turun sebesar Rp6,33 miliar atau 32,34% dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai Rp19,57 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh melemahnya penjualan dan pengelolaan aset properti sepanjang 2024, yang dipengaruhi oleh rendahnya permintaan pasar serta perlambatan sektor properti.

Throughout 2024, there were no new contracts from the sale and/or management of property assets, compared to 2023 which reached Rp19.57 billion. In the same period, the realization of contracts faced by the Property segment was recorded at Rp13.24 billion, down by Rp6.33 billion or 32.34% compared to 2023 which reached Rp19.57 billion. This decline was due to the weakening of sales and management of property assets throughout 2024, which was influenced by low market demand and the slowdown in the property sector.

Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Properti

Property Segment Revenue and Profitability

Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Properti 2023-2024
Property Segment Revenue and Profitability 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	2023 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal (Rp-Miliar) Nominal (Rp-Billion)	Persentase (%) Percentage (%)
Pendapatan Revenue	0,82	16,88	(16,06)	-95,15% ▼
Beban Pokok Penjualan Cost of Revenues	(0,70)	(13,25)	12,54	-94,71% ▼
Laba Kotor Gross Profit	0,12	3,63	(3,52)	-96,78% ▼
Beban Usaha Operating Expenses	0,00	0,00	0,00	0,00% -
Laba Usaha Other Income	0,12	3,63	(3,52)	-96,78% ▼
Beban Pajak Final Final Tax Expense	(0,02)	(0,23)	0,21	-91,31% ▼
Bagian Laba Ventura Bersama Share in Profit on Joint Venture	0,23	0,58	(0,35)	-60,23% ▼
Bagian Laba (Rugi) Entitas Asosiasi Share in Profit (Loss) on Associate	0,00	0,00	0,00	0,00% -
Pendapatan (Beban) Lain-Lain Other Income (Expenses)	(0,71)	0,40	(1,11)	-277,74% ▼
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit Before Income Tax	(0,38)	4,38	(4,76)	-108,68% ▼
Pajak Penghasilan Income Tax	-	-	-	- -
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	(0,38)	4,38	(4,76)	-108,68% ▼
Jumlah Aset Total Assets	453,95	752,71	(298,76)	-39,69% ▼
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	217,87	510,61	(292,74)	-57,33% ▼

Pada tahun 2024, segmen Properti mencatatkan pendapatan sebesar Rp0,82 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp16,06 miliar atau 95,15% dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai Rp16,88 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh melemahnya penjualan dan pengelolaan aset properti.

Sementara itu, segmen Properti membukukan rugi bersih sebesar Rp0,38 miliar, turun sebesar Rp4,76 miliar atau 108,68% dibandingkan dengan tahun 2023 yang membukukan laba bersih sebesar Rp4,38 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya laba ventura bersama serta meningkatnya beban lain-lain.

In 2024, the Property segment recorded revenue of Rp0.82 billion, a decrease of Rp16.06 billion or 95.15% compared to 2023 which reached Rp16.88 billion. This decrease was due to weakening sales and management of property assets.

For the meantime, the Property segment posted a net loss of Rp0.38 billion, a decrease of Rp4.76 billion or 108.68% compared to 2023 which posted a net profit of Rp4.38 billion. This decrease was mainly due to a decrease in joint venture profits and an increase in other expenses.

SEGMEN GEOGRAFIS

Informasi segmen geografis Grup dikelompokkan berdasarkan wilayah kegiatan usaha Perseroan. Pada tahun 2023-2024, kinerja segmen geografis Perseroan seluruhnya berada di Indonesia, terutama dari sisi pendapatan, dengan rincian sebagai berikut:

GEOGRAPHIC SEGMENT

The Group's geographic segment information is grouped based on the Company's business area. In 2023-2024, the Company's geographic segment performance is entirely in Indonesia, especially in terms of revenue, with the following details:

Uraian Description	2024 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	2023 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal (Rp-Miliar) Nominal (Rp-Billion)	Persentase (%) Percentage (%)
Indonesia	3.673,53	3.979,71	(306,19)	-7,69% ▼
Kalimantan	2.178,56	699,83	1.478,73	211,30% ▲
Jawa	939,24	2.341,30	(1.402,05)	-59,88% ▼
DKI Jakarta	184,72	679,39	(494,67)	-72,81% ▼
Banten	180,82	0,00	180,82	100,00% ▲
Sumatera	153,47	0,00	153,47	100,00% ▲
Papua	35,10	0,10	34,99	33.597,00% ▲
Sulawesi	1,48	95,54	(94,07)	-98,45% ▼
Aceh	0,09	0,00	0,09	100,00% ▲
Ambon	0,05	38,48	(38,43)	-99,88% ▼
Nusa Tenggara Barat West Nusa Tenggara	0,00	125,08	(125,08)	-100,00% ▼
Luar Negeri Overseas	0,00	0,00	0,00	0,00% -
Jumlah Total	3.673,53	3.979,71	(306,19)	-7,69% ▼

Kinerja Pendapatan per Segmen Geografis 2023-2024

Kinerja pendapatan per segmen geografis di tahun 2024 mengalami pergeseran signifikan, di mana Kalimantan menjadi wilayah dengan kontribusi terbesar, yaitu Rp2.178,56 miliar atau 59,30% dari total pendapatan sebesar Rp3.673,53 miliar. Sementara itu, pada tahun 2023, kontribusi terbesar berasal dari Jawa, dengan pendapatan sebesar Rp2.341,30 miliar atau 58,83% dari total pendapatan sebesar Rp3.979,71 miliar.

Revenue Performance by Geographic Segment 2023-2024

Revenue performance per geographic segment in 2024 experienced a significant shift, with Kalimantan becoming the region with the largest contribution, namely Rp2,178.56 billion or 59.30% of total revenue of Rp3,673.53 billion. In the meantime, in 2023, the largest contribution came from Java, with revenue of Rp2,341.30 billion or 58.83% of total revenue of Rp3,979.71 billion.

Tinjauan Keuangan
Financial Overview


HUNIAN PEKERJA KONSTRUKSI IKN

Dalam penyusunan analisa dan pembahasan kinerja keuangan dalam Laporan Tahunan ini, Perseroan mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024. Laporan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, dengan auditor Lith Alfansuri (Izin Akuntan Publik: AP.1950) pada 14 Maret 2025.

Berdasarkan hasil audit, Kantor Akuntan Publik menyatakan bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup, kinerja keuangan, serta arus kas konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

In preparing the analysis and discussion of financial performance in this Annual Report, the Company refers to the Consolidated Financial Statements of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk for the year ended December 31, 2024. The report has been audited by the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, with Lith Alfansuri as auditor (Public Accountant License: AP.1950) on March 14, 2025.

Based on the audit results, the Public Accounting Firm stated that the Consolidated Financial Statements of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk present fairly, in all material respects, the Group's consolidated financial position, financial performance, and consolidated cash flows for the fiscal year ended on that date, in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Aset

Assets

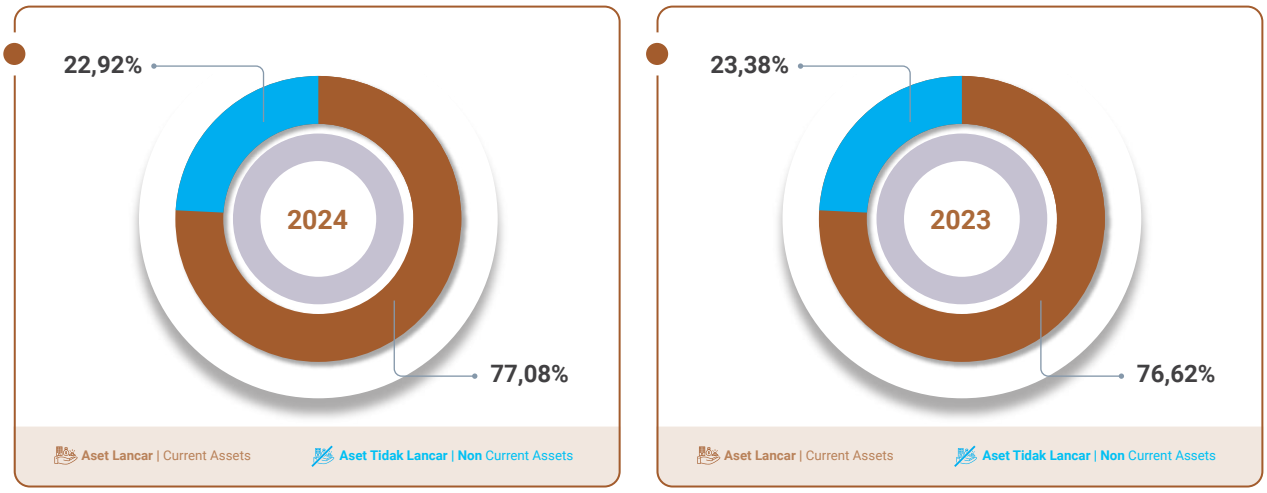
Tabel Aset 2023-2024
Table of Assets 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	2023 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	Persentase (%) Percentage (%)
Aset Lancar Current Assets	4.414,67	4.261,07	153,60	3,60% ▲
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	1.312,60	1.300,46	12,14	0,93% ▲
Jumlah Aset Total Assets	5.727,27	5.561,53	165,74	2,98% ▲

Per 31 Desember 2024, total aset Perseroan tercatat sebesar Rp5.727,27 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp165,74 miliar atau 2,98% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp5.561,53 miliar. Peningkatan ini terutama didorong oleh kenaikan pada aset lancar Perseroan.

As of December 31, 2024, the Company's total assets were recorded at Rp5,727.27 billion, an increase of Rp165.74 billion or 2.98% compared to the previous year of Rp5,561.53 billion. This increase was mainly driven by an increase in the Company's current assets.

Komposisi Aset 2023-2024
Assets Composition 2023-2024



Aset Lancar

Current Assets

Tabel Aset Lancar 2023-2024
Table of Current Assets 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	2023 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease		
			Nominal (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	Persentase (%) Percentage (%)	
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalent	1.030,73	1.036,43	(5,70)	-0,55%	▼
Piutang Usaha - Neto Trade Receivables - Net					
Pihak Berelasi Related Parties	263,20	370,62	(107,42)	-28,98%	▼
Pihak Ketiga Third Parties	281,96	325,30	(43,34)	-13,32%	▼
Piutang Retensi - Neto Retention Receivables - Net					
Pihak Berelasi Related Parties	161,71	146,88	14,83	10,10%	▲
Pihak Ketiga Third Parties	398,24	392,10	6,15	1,57%	▲
Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja Gross Amount Due from Customers					

Tabel Aset Lancar 2023-2024
Table of Current Assets 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	2023 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	Persentase (%) Percentage (%)
Pihak Berelasi Related Parties	195,12	236,86	(41,74)	-17,62% ▼
Pihak Ketiga Third Parties	241,40	299,57	(58,17)	-19,42% ▼
Piutang Yang Belum Ditagih Unbilled Receivables	9,36	3,26	6,10	186,80% ▲
Persediaan Inventories	350,03	401,63	(51,60)	-12,85% ▼
Pajak Dibayar di Muka Prepaid Taxes	331,37	227,42	103,96	45,71% ▲
Uang Muka Advances	124,03	157,09	(33,06)	-21,04% ▼
Biaya Dibayar di Muka Prepaid Expenses	215,02	93,17	121,86	130,79% ▲
Pekerjaan dalam Proses Konstruksi Construction Work in Progress				
Pihak Berelasi Related Parties	374,78	312,03	62,74	20,11% ▲
Pihak Ketiga Third Parties	437,71	258,71	179,00	69,19% ▲
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	4.414,67	4.261,07	153,60	3,60% ▲

Di tahun 2024, Perseroan membukukan jumlah aset lancar sebesar Rp4.414,67 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp153,60 miliar atau 3,60% dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai Rp4.261,07 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan biaya dibayar dimuka, pajak dibayar dimuka dan pekerjaan dalam proses konstruksi.

In 2024, the Company recorded current assets of Rp4,414.67 billion, an increase of Rp153.60 billion or 3.60% compared to 2023 which reached Rp4,261.07 billion. This increase was mainly due to an increase in prepaid expenses, prepaid taxes and work in progress.

Kas dan Setara Kas

Per 31 Desember 2024, Perseroan membukukan kas dan setara kas sebesar Rp1.030,73, mengalami penurunan Rp5,70 atau 0,55% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp1.036,43 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran pinjaman bank dan kewajiban kepada pemasok.

Cash and Cash Equivalents

As of December 31, 2024, the Company recorded cash and cash equivalents of Rp1,030.73, a decrease of Rp5.70 or 0.55% compared to 2023 which was Rp1,036.43 billion. This decrease was mainly due to bank loan payments and obligations to suppliers.

Piutang Usaha

Per 31 Desember 2024, Perseroan membukukan piutang usaha sebesar Rp545,16 miliar, mengalami penurunan Rp150,76 miliar atau 21,66% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp695,92 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pencairan piutang serta pembayaran dari beberapa proyek yang telah selesai.

Accounts Receivable

As of December 31, 2024, the Company recorded accounts receivable of Rp545.16 billion, a decrease of Rp150.76 billion or 21.66% compared to 2023 which amounted to Rp695.92 billion. This decrease was mainly due to the disbursement of receivables and payments from several completed projects.

Persediaan

Per 31 Desember 2024, Perseroan membukukan persediaan sebesar Rp 350,03 miliar, mengalami penurunan Rp51,60 miliar atau 12,85% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp401,63 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya persediaan industri pada barang assembly serta persediaan bahan untuk industri modular.

Inventories

As of December 31, 2024, the Company recorded inventories of Rp350.03 billion, a decrease of Rp51.60 billion or 12.85% compared to 2023 which amounted to Rp401.63 billion. This decrease was mainly due to a decrease in industrial inventories for assembly goods and inventories of materials for the modular industry.

Aset Tidak Lancar

Non-Current Assets

Tabel Aset Tidak Lancar 2023-2024
Table of Non-Current Assets 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	2023 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease		
			Nominal (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	Persentase (%) Percentage (%)	
Piutang Lain-Lain Other Receivables					
Pihak Berelasi Related Parties	165,41	140,61	24,80	17,63%	▲
Pihak Ketiga Third Parties	1,47	2,10	(0,62)	-29,70%	▼
Tanah Akan Dikembangkan Land For Development	46,68	46,68	0,00	0,00%	-
Penyertaan Saham Investment In Shares	3,55	3,55	0,00	0,00%	-
Properti Investasi Investment Property	259,41	259,41	0,00	0,00%	-
Aset Kerja Sama Assets of Co-operation	237,49	248,33	(10,85)	-4,37%	▼
Aset Tetap - Neto Fixed Assets - Net	47,48	71,32	(23,84)	-33,43%	▼
Aset Takberwujud - Neto Intangible Assets - Net	13,53	0,00	13,53	100,00%	▲
Investasi pada Entitas Asosiasi Investment in Associate	18,24	23,03	(4,79)	-20,80%	▼
Investasi pada Ventura Bersama Investment of Joint Ventures	519,35	505,44	13,91	2,75%	▲
Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non Current Assets	1.312,60	1.300,46	12,14	0,93%	▲

Di tahun 2024, Perseroan membukukan jumlah aset tidak lancar sebesar Rp1.312,60 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp12,14 miliar atau 0,93% dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai Rp1.300,46 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan piutang lain-lain, aset takberwujud, dan investasi pada ventura bersama.

In 2024, the Company recorded non-current assets of Rp1,312.60 billion, an increase of Rp12.14 billion or 0.93% compared to 2023 which reached Rp1,300.46 billion. This increase was mainly due to an increase in other receivables, intangible assets, and investments in joint ventures.

Aset Tetap

Per 31 Desember 2024, Perseroan membukukan aset tetap sebesar Rp47,48 miliar, mengalami penurunan Rp23,84 miliar atau 33,43% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp71,32 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya aset peralatan kantor.

Fixed Assets

As of December 31, 2024, the Company recorded fixed assets of Rp47.48 billion, a decrease of Rp23.84 billion or 33.43% compared to 2023 which was Rp71.32 billion. This decrease was mainly due to a decrease in office equipment assets.

Aset Kerja Sama

Per 31 Desember 2024, Perseroan membukukan aset kerja sama sebesar Rp237,49 miliar, mengalami penurunan Rp10,85 miliar atau 4,37% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp248,33 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh meningkatkan nilai akumulasi penyusutan bangunan untuk aset kerja sama operasi.

Investasi Pada Entitas Asosiasi

Per 31 Desember 2024, Perseroan membukukan investasi pada entitas asosiasi sebesar Rp18,24 miliar, mengalami penurunan Rp4,79 miliar atau 20,80% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp23,03 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh rugi bersih atas kinerja PT Wijaya Karya Pracetak Gedung.

Investasi Pada Ventura Bersama

Per 31 Desember 2024, Perseroan membukukan investasi pada ventura bersama sebesar Rp519,35 miliar, mengalami peningkatan Rp13,91 miliar atau 2,75% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp505,44 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan bagian laba tahun berjalan pada proyek KSO ventura bersama.

Liabilitas

Joint Venture Assets

As of December 31, 2024, the Company recorded joint venture assets of Rp237.49 billion, a decrease of Rp10.85 billion or 4.37% compared to 2023 which amounted to Rp248.33 billion. This decrease was mainly due to an increase in the accumulated depreciation value of buildings for joint venture assets.

Investment in Associated Entities

As of December 31, 2024, the Company recorded investment in associated entities of Rp18.24 billion, a decrease of Rp4.79 billion or 20.80% compared to 2023 which was Rp23.03 billion. This decrease was due to a net loss on the performance of PT Wijaya Karya Pracetak Gedung.

Investment in Joint Ventures

As of December 31, 2024, the Company recorded investment in joint ventures of Rp519.35 billion, an increase of Rp13.91 billion or 2.75% compared to 2023 which was Rp505.44 billion. This increase was mainly due to an increase in the portion of profit of the year in the joint venture KSO project.

Liabilities

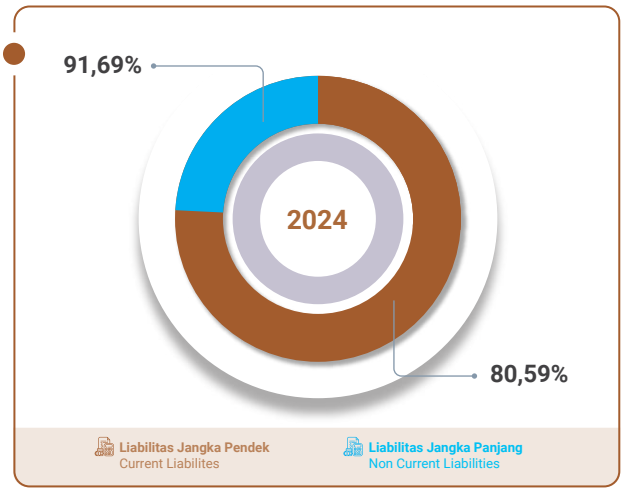
Tabel Liabilitas I 2023-2024
Table of Liabilities 2023-2024

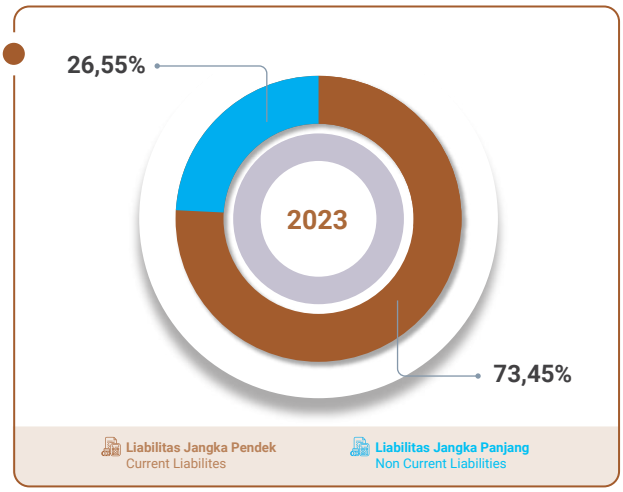
Uraian Description	2024 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	2023 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	Persentase (%) Percentage (%)
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilites	2.515,36	2.205,58	309,78	14,05% ▲
Liabilitas Jangka Panjang Non Current Liabilities	605,95	797,21	(191,26)	-23,99% ▼
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	3.121,30	3.002,79	118,52	3,95% ▲

Per 31 Desember 2024, jumlah liabilitas Perseroan tercatat sebesar Rp3.121,30 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp118,52 miliar atau 3,95% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp3.002,79 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada liabilitas jangka pendek Perseroan.

As of December 31, 2024, the Company's total liabilities were recorded at Rp3,121.30 billion, an increase of Rp118.52 billion or 3.95% compared to the previous year of Rp3,002.79 billion. This increase was mainly due to an increase in the Company's current liabilities.

Komposisi Pendapatan 2023 - 2024
Revenue Composition 2023 - 2024





Liabilitas Jangka Pendek / Current Liabilities

Tabel Liabilitas Jangka Pendek 2023-2024
Table of Current Liabilities 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	2023 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease		
			Nominal (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	Persentase (%) Percentage (%)	
Pinjaman Bank Jangka Pendek Short-term Bank Loans					
Pihak Berelasi Related Parties	350,00	103,00	247,00	239,81%	▲
Pihak Ketiga Third Parties	22,00	26,50	(4,50)	-16,98%	▼
Utang Usaha Trade Payables					
Pihak Berelasi Related Parties	473,87	608,41	(134,54)	-22,11%	▼
Pihak Ketiga Third Parties	1.184,36	836,86	347,51	41,53%	▲
Beban Akrual Accrued Expenses	356,41	439,17	(82,76)	-18,85%	▼
Utang Pajak Tax Payables	8,00	11,34	(3,33)	-29,39%	▼
Liabilitas Pajak Penghasilan Final Final Income Tax Liabilities	47,86	99,06	(51,20)	-51,68%	▼
Liabilitas Jangka Pendek Yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun Current Portion of Long Term Liability					
Uang Muka Pemberi Kerja dan Konsumen Advances from Project Owners and Consumers	15,83	2,07	13,76	664,71%	▲

Tabel Liabilitas Jangka Pendek 2023-2024
Table of Current Liabilities 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	2023 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease		
			Nominal (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	Persentase (%) Percentage (%)	
Pinjaman Bank Bank Loan	9,42	8,94	0,48	5,37%	▲
Utang Lain-lain Other Payables					
Pihak Berelasi Related Parties	36,90	34,89	2,01	5,75%	▲
Pihak Ketiga Third Parties	3,42	3,17	0,25	8,04%	▲
Pendapatan Diterima Di Muka Advances Received	7,28	32,18	(24,90)	-77,39%	▼
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilites	2.515,36	2.205,58	309,78	14,05%	▲

Di tahun 2024, Perseroan membukukan jumlah liabilitas jangka pendek sebesar Rp2.515,36 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp309,78 miliar atau 14,05% dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai Rp2.205,58 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman bank jangka pendek, utang usaha, serta uang muka pemberi kerja dan konsumen.

In 2024, the Company recorded current liabilities of Rp2,515.36 billion, an increase of Rp309.78 billion or 14.05% compared to 2023 which reached Rp2,205.58 billion. This increase was mainly due to an increase in short-term bank loans, trade payables, and advances from employers and consumers.

Pinjaman Bank Jangka Pendek

Per 31 Desember 2024, Perseroan membukukan pinjaman bank jangka pendek sebesar Rp372,00 miliar, mengalami kenaikan Rp242,50 miliar atau 187,26% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp129,50 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh pinjaman bank jangka pendek pihak berelasi untuk bank PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Short-Term Bank Loans

As of December 31, 2024, the Company recorded short-term bank loans of Rp372.00 billion, an increase of Rp242.50 billion or 187.26% compared to 2023 which amounted to Rp129.50 billion. This increase was mainly due to short-term bank loans from related parties for banks from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Utang Usaha

Per 31 Desember 2024, Perseroan membukukan utang usaha sebesar Rp1.658,24 miliar, mengalami kenaikan Rp212,97 miliar atau 14,74% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp1.445,27 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang pemasok, subkontraktor, dan mandor.

Accounts Payable

As of December 31, 2024, the Company recorded accounts payable of Rp1,658.24 billion, an increase of Rp212.97 billion or 14.74% compared to 2023 which was Rp1,445.27 billion. This increase was mainly due to an increase in supplier, subcontractor, and foreman debts.

Liabilitas Jangka Panjang

Non-Current Liabilities

Tabel Liabilitas Jangka Panjang 2023-2024
Table of Non-Current Liabilities 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	2023 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	Persentase (%) Percentage (%)
Liabilitas Jangka Panjang Setelah Dikurangi Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun Long-term Liability Net of Current Maturities				
Uang Muka Pemberi Kerja dan Konsumen Advances from Project Owners and Consumers	507,54	700,26	(192,71)	-27,52% ▼
Pinjaman Bank Bank Loan	75,65	85,06	(9,42)	-11,07% ▼
Liabilitas Imbalan Kerja Employee Benefit Liabilities	22,76	11,89	10,87	91,44% ▲
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Non Current Liabilities	605,95	797,21	(191,26)	-23,99% ▼

Di tahun 2024, Perseroan membukukan jumlah liabilitas jangka panjang sebesar Rp605,95 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp191,26 miliar atau 23,99% dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai Rp797,21 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh uang muka pemberi kerja dan konsumen serta pembayaran pinjaman bank.

In 2024, the Company recorded non-current liabilities of Rp605.95 billion, a decrease of Rp191.26 billion or 23.99% compared to 2023 which reached Rp797.21 billion. This decrease was mainly due to advances from employers and consumers and bank loan payments.

Liabilitas Jangka Panjang Setelah Dikurangi Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun - Uang Muka Pemberi Kerja dan Konsumen

Per 31 Desember 2024, Perseroan membukukan uang muka pemberi kerja dan konsumen untuk jangka panjang sebesar Rp507,54 miliar, mengalami penurunan Rp192,71 miliar atau 27,52% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp700,26 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya uang muka pemberi kerja jasa konstruksi.

Non-Current Liabilities After Deducting Current Maturities - Advances from Employers and Consumer

As of December 31, 2024, the Company recorded long-term advances from project owners and consumers of Rp507.54 billion, a decrease of Rp192.71 billion or 27.52% compared to 2023 of Rp700.26 billion. This decrease was due to a decrease in advances from construction service employers.

Pinjaman Bank Jangka Panjang

Per 31 Desember 2024, Perseroan membukukan pinjaman bank jangka panjang sebesar Rp75,65 miliar, mengalami penurunan Rp9,42 miliar atau 11,07% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp85,06 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran pinjaman bank.

Long-Term Bank Loans

As of December 31, 2024, the Company recorded long-term bank loans of Rp75.65 billion, a decrease of Rp9.42 billion or 11.07% compared to 2023 which amounted to Rp85.06 billion. This decrease was mainly due to bank loan payments.

Ekuitas

Equity

Tabel Ekuitas 2023-2024
Table of Equity 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	2023 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease		
			Nominal (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	Persentase (%) Percentage (%)	
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Equity Attributable to Owner of the Parent Entity					
Modal Saham - Nilai Nominal Rp100. Modal Dasar 38.000.000.000 saham Share Capital - Par Value Rp100. Authorized Capital 38,000,000,000 shares					
Modal ditempatkan dan disetor 9.572.000.000 saham Issued and Paid Up Capital 9,572,000,000 shares	957,20	957,20	0,00	0,00%	-
Tambahan Modal Disetor Additional Paid In Capital	524,08	524,08	0,00	0,00%	-
Saldo Laba Retained Earnings					
Ditentukan Penggunaannya Appropriated	165,53	160,83	4,70	2,92%	▲
Belum Ditentukan Penggunaannya Unappropriated	963,25	909,44	53,81	5,92%	▲
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lainnya Other Comprehensive Income (Loss)	(6,09)	5,26	(11,35)	-215,64%	▼
Sub Jumlah Sub Total	2.603,97	2.556,81	47,15	1,84%	▲
Kepentingan Non Pengendali Non Controlling Interest	2,00	1,93	0,07	3,57%	▲
Jumlah Ekuitas Total Equity	2.605,97	2.558,75	47,22	1,85%	▲

Di tahun 2024, Perseroan membukukan jumlah ekuitas sebesar Rp2.605,97 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp47,22 miliar atau 1,85% dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai Rp2.558,75 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pencapaian laba bersih Perseroan.

In 2024, the Company recorded total equity of Rp2,605.97 billion, an increase of Rp47.22 billion or 1.85% compared to 2023 which reached Rp2,558.75 billion. This increase was mainly due to the Company's net profit achievement.

LAPORAN LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT (LOSS) AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Tabel Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian 2023-2024
Table of Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	2023 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease		
			Nominal (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	Persentase (%) Percentage (%)	
Pendapatan Revenues	3.673,53	3.979,71	(306,19)	-7,69%	▼
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenues	(3.366,03)	(3.676,50)	310,47	-8,44%	▼
Laba Kotor Gross Profit	307,50	303,22	4,28	1,41%	▲
Beban Usaha Operating Expenses	(114,42)	(73,67)	(40,75)	55,31%	▲
Pendapatan Lainnya Other Income	135,06	123,38	11,68	9,47%	▲
Beban Lainnya Other Expenses	(230,45)	(120,75)	(109,70)	90,85%	▲
Beban Keuangan Financial Expense	(28,25)	(66,40)	38,15	-57,45%	▼
Beban Pajak Penghasilan Final Final Income Tax Expenses	(96,41)	(114,63)	18,22	-15,90%	▼
Bagian Laba (Rugi) Entitas Asosiasi Share in Profit (Loss) on Associate	(4,79)	(14,62)	9,83	-67,24%	▼
Bagian Laba Ventura Bersama Share in Profit on Joint Venture	99,66	10,77	88,90	825,74%	▲
Laba (Rugi) Selisih Kurs Foreign Exchange Gain (Loss)	0,06	(0,78)	0,84	107,25%	▲
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit Before Income Tax	67,96	46,50	21,46	46,14%	▲
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expenses	-	-	-	-	-
Laba Neto Tahun Berjalan Net Profit For The Year	67,96	46,50	21,46	46,14%	▲
Laba (Rugi) Komprehensif Lain Setelah Pajak Other Comprehensive Profit (Loss) After Tax					
Pos yang Tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi Item that will Not be Reclassified to Profit or Loss					
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti Remeasurement on Defined Benefit Plans	(11,35)	(4,60)	(6,76)	147,06%	▲
Jumlah Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi Total Item that Will Not Be Reclassified Subsequently to Profit or Loss	(11,35)	(4,60)	(6,76)	147,06%	▲

Tabel Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian 2023-2024
Table of Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	2023 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	Persentase (%) Percentage (%)
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income For The Year	56,60	41,90	14,70	35,08% ▲
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada : Income For The Current Year Attributable to :				
Pemilik Entitas Induk Equity Holders of The Parent Entity	67,89	46,70	21,19	45,36% ▲
Kepentingan Non Pengendali Non Controlling Interest	0,07	(0,20)	0,27	134,15% ▲
Jumlah Total	67,96	46,50	21,46	46,14% ▲
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada : Total Comprehensive Income For The Year Attributable to :				
Pemilik Entitas Induk Equity Holders of The Parent Entity	56,54	42,11	14,43	34,27% ▲
Kepentingan Non Pengendali Non Controlling Interest	0,07	(0,20)	0,27	134,15% ▲
Jumlah Total	56,60	41,90	14,70	35,08% ▲
Laba Bersih Per Saham (Rupiah Penuh) Earnings Per Share (Full Rupiah)	7,09	4,88	2,21	45,36% ▲

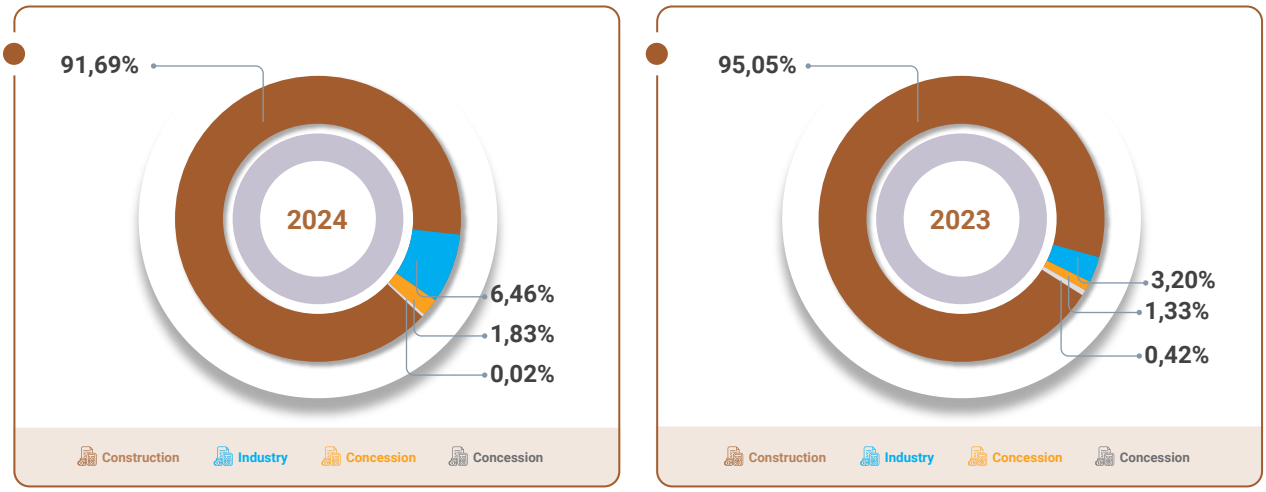
Pendapatan

Revenue

Tabel Pendapatan 2023-2024
Table of Revenue 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	2023 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	Persentase (%) Percentage (%)
Jasa Konstruksi Construction Service	3.368,26	3.782,58	(414,32)	-10,95% ▼
Industri Industry	237,35	127,39	109,96	86,32% ▲
Konsesi Concession	67,10	52,87	14,23	26,91% ▲
Properti Property	0,82	16,88	(16,06)	-95,15% ▼
Jumlah Pendapatan Total Revenue	3.673,53	3.979,71	(306,19)	-7,69% ▼

Oposisi Pendapatan 2023 - 2024
Revenue Composition 2023 - 2024



Per 31 Desember 2024, Perseroan membukukan jumlah pendapatan sebesar Rp3.673,53 miliar, mengalami penurunan Rp306,19 miliar atau 7,69% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp3.979,71 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya pendapatan dari segmen jasa konstruksi dan properti, sementara segmen industri modular dan konsesi mengalami peningkatan.

As of December 31, 2024, the Company recorded revenue of Rp3,673.53 billion, a decrease of Rp306.19 billion or 7.69% compared to 2023 which was Rp3,979.71 billion. This decrease was due to a decrease in revenue from the construction and property services segment, while the modular industry and concession segments increased.

Beban Pokok Pendapatan

Cost of Revenues

Tabel Beban Pokok Pendapatan 2023-2024
Table of Cost of Revenue 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	2023 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease		
			Nominal (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	Persentase (%) Percentage (%)	
Jasa Konstruksi Construction Service	3.090,25	3.523,41	(433,16)	-12,29%	▼
Industri Industry	213,24	102,28	110,96	108,49%	▲
Konsesi Concession	61,84	37,56	24,28	64,64%	▲
Properti Property	0,70	13,25	(12,54)	-94,71%	▼
Jumlah Beban Pokok Pendapatan Total Cost of Revenue	3.366,03	3.676,50	(310,47)	-8,44%	▼

Per 31 Desember 2024, Perseroan membukukan jumlah beban pokok pendapatan sebesar Rp3.366,03 miliar, mengalami penurunan Rp310,47 miliar atau 8,44% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp3.676,50 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya beban pokok pendapatan dari segmen jasa konstruksi dan properti, sementara segmen industri modular dan konsesi mengalami peningkatan.

As of December 31, 2024, the Company recorded a total cost of revenue of Rp3,366.03 billion, a decrease of Rp310.47 billion or 8.44% compared to 2023 which was Rp3,676.50 billion. This decrease was due to a decrease in the cost of revenue from the construction and property services segment, while the modular industry and concession segments increased.

Laba Kotor

Per 31 Desember 2024, Perseroan membukukan jumlah laba kotor sebesar Rp307,50 miliar, mengalami peningkatan Rp4,28 miliar atau 1,41% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp303,22 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh turunnya beban pokok pendapatan pada segmen jasa konstruksi.

Gross Profit

As of December 31, 2024, the Company recorded a gross profit of Rp307.50 billion, an increase of Rp4.28 billion or 1.41% compared to 2023 which was Rp303.22 billion. This increase was mainly due to a decrease in the cost of revenue in the construction services segment.

Beban Usaha

Per 31 Desember 2024, Perseroan membukukan jumlah beban usaha sebesar Rp114,42 miliar, mengalami peningkatan Rp40,75 miliar atau 55,31% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp73,67 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban usaha untuk pegawai dan umum.

Operating Expenses

As of December 31, 2024, the Company recorded total operating expenses of Rp114.42 billion, an increase of Rp40.75 billion or 55.31% compared to 2023 which was Rp73.67 billion. This increase was mainly due to an increase in operating expenses for employees and general.

Beban Keuangan

Per 31 Desember 2024, Perseroan membukukan jumlah beban keuangan sebesar Rp28,25 miliar, mengalami peningkatan Rp38,15 miliar atau 57,45% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp66,40 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban bunga.

Financial Expense

As of December 31, 2024, the Company recorded a total financial expense of Rp28.25 billion, an increase of Rp38.15 billion or 57.45% compared to 2023 which was Rp66.40 billion. This increase was mainly due to an increase in interest expenses.

Bagian Laba Ventura Bersama

Per 31 Desember 2024, Perseroan membukukan jumlah bagian laba ventura bersama sebesar Rp99,66 miliar, mengalami peningkatan Rp88,90 miliar atau 825,74% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp10,77 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya proyek KSO dan perolehan laba yang dicapai.

Sharein Profit on Joint Venture

As of December 31, 2024, the Company recorded a total joint venture profit share of Rp99.66 billion, an increase of Rp88.90 billion or 825.74% compared to 2023 which was Rp10.77 billion. This increase was mainly due to the increase in KSO projects and the profit achieved.

Bagian Laba (Rugi) Entitas Asosiasi

Per 31 Desember 2024, Perseroan membukukan rugi atas entitas asosiasi yaitu PT Wijaya Karya Pracetak Gedung sebesar Rp4,79 miliar, mengalami peningkatan kinerja positif Rp9,83 miliar atau 67,24% dibandingkan dengan tahun 2023 yang rugi sebesar Rp14,62 miliar. Perbaikan ini terutama didorong oleh peningkatan kinerja operasional serta upaya efisiensi biaya yang dilakukan oleh entitas asosiasi.

Share in Profit (Loss) on Associate

As of December 31, 2024, the Company recorded a loss on the associate, namely PT Wijaya Karya Pracetak Gedung, of Rp4.79 billion, experiencing a positive performance increase of Rp9.83 billion or 67.24% compared to 2023 which had a loss of Rp14.62 billion. This improvement was mainly driven by increased operational performance and cost efficiency efforts made by the associate.

Pendapatan Lainnya

Per 31 Desember 2024, Perseroan membukukan pendapatan lainnya sebesar Rp135,06 miliar, mengalami peningkatan Rp11,68 miliar atau 9,47% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp123,38 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan atas pemulihan nilai aset keuangan.

Beban Pajak Penghasilan Final

Per 31 Desember 2024, Perseroan membukukan beban pajak penghasilan final sebesar Rp96,41 miliar, mengalami penurunan Rp18,22 miliar atau 15,90% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp114,63 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya beban pajak penghasilan final yang dibayarkan Perseroan.

Laba Bersih Tahun Berjalan

Per 31 Desember 2024, Perseroan membukukan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp67,96 miliar, mengalami peningkatan Rp21,46 miliar atau 46,14% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp46,50 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan bagian laba ventura bersama, pendapatan lainnya serta penurunan rugi entitas asosiasi.

Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Per 31 Desember 2024, Perseroan membukukan jumlah laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp56,60 miliar, mengalami peningkatan Rp14,70 miliar atau 35,08% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp41,90 miliar. Apabila dibandingkan dengan kinerja laba bersih tahun berjalan, mengalami penurunan yang disebabkan oleh rugi komprehensif lain setelah pajak pada pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi untuk pengukuran kembali atas program imbalan pasti.

Laba Bersih Per Saham

Per 31 Desember 2024, Perseroan membukukan laba bersih per saham sebesar Rp7,09, mengalami peningkatan Rp2,21 atau 45,36% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp4,88. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan laba bersih Perseroan.

Other Income

As of December 31, 2024, the Company recorded other income of Rp135.06 billion, an increase of Rp11.68 billion or 9.47% compared to 2023 which was Rp123.38 billion. This increase was mainly due to an increase in the recovery of the value of financial assets.

Final Income Tax Expenses

As of December 31, 2024, the Company recorded a final income tax expense of Rp96.41 billion, a decrease of Rp18.22 billion or 15.90% compared to 2023 which was Rp114.63 billion. This decrease was mainly due to a decrease in the final income tax expense paid by the Company.

Net Profit for the Year

As of December 31, 2024, the Company recorded a net profit for the current year of Rp67.96 billion, an increase of Rp21.46 billion or 46.14% compared to 2023 which was Rp46.50 billion. This increase was mainly due to an increase in the share of joint venture profits, other income and a decrease in the loss of associated entities.

Total Comprehensive Income for the Year

As of December 31, 2024, the Company recorded a total comprehensive profit for the current year of Rp56.60 billion, an increase of Rp14.70 billion or 35.08% compared to 2023 which was Rp41.90 billion. When compared to the performance of net profit for the current year, there was a decrease due to other comprehensive loss after tax on items that will not be reclassified to profit or loss for the remeasurement of the defined benefit program.

Earnings Per Share

As of December 31, 2024, the Company recorded net income per share of Rp7.09, an increase of Rp2.21 or 45.36% compared to 2023 which was Rp4.88. This increase was due to an increase in the Company's net profit.

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS

Tabel Arus Kas Konsolidasian 2023-2024
Table of Consolidated Cash Flows 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	2023 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	Persentase (%) Percentage (%)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flow from Operating Activities	(256,58)	567,74	(824,32)	-145,19% ▼
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flows from Investing Activities	71,04	18,08	52,95	292,84% ▲
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flow from Financing Activities	179,76	(464,95)	644,71	138,66% ▲
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	(5,79)	120,87	(126,66)	-104,79% ▼
Pengaruh Perubahan Kurs Mata Uang Asing Impact of Exchange Differences	0,09	(0,78)	0,87	111,62% ▲
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year	1.036,43	916,34	120,09	13,10% ▲
Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at End of the Year	1.030,73	1.036,43	(5,70)	-0,55% ▼

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Per 31 Desember 2024, arus kas dari aktivitas operasi Perseroan tercatat mengalami penurunan Rp824,32 miliar atau 145,19% dari tahun 2023 yang sebesar Rp567,74 miliar menjadi negatif Rp256,58 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pembayaran kas kepada pemasok, pajak penghasilan, dan beban usaha.Investasi Pada Ventura Bersama.

Cash Flows from Operating Activities

As of December 31, 2024, the Company's cash flow from operating activities was recorded to have decreased by Rp824.32 billion or 145.19% from Rp567.74 billion in 2023 to negative Rp256.58 billion. This decrease was mainly due to increased cash payments to suppliers, income taxes, and operating expenses.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Per 31 Desember 2024, arus kas dari aktivitas investasi Perseroan tercatat mengalami kenaikan Rp52,95 miliar atau 292,84% dari tahun 2023 yang sebesar Rp18,08 miliar menjadi Rp71,04 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penerimaan kas dari investasi ventura bersama.

Cash Flows from Investing Activities

As of December 31, 2024, the Company's cash flow from investing activities was recorded to have increased by Rp52.95 billion or 292.84% from 2023 which was Rp18.08 billion to Rp71.04 billion. This increase was mainly due to increased cash received from joint venture investments.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Per 31 Desember 2024, arus kas dari aktivitas pendanaan Perseroan tercatat mengalami kenaikan Rp644,71 miliar atau 138,66% dari tahun 2023 yang sebesar negatif Rp464,95 miliar menjadi Rp179,76 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penerimaan kas dari pinjaman bank.

Cash Flows from Financing Activities

As of December 31, 2024, the Company's cash flow from financing activities was recorded to have increased by Rp644.71 billion or 138.66% from 2023 which was negative Rp464.95 billion to Rp179.76 billion. This increase was mainly due to increased cash received from bank loans.

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas

Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas merupakan akumulasi atas arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi serta arus kas dari aktivitas pendanaan. Per 31 Desember 2024, penurunan bersih kas dan setara kas tercatat negatif Rp5,79 miliar, mengalami penurunan Rp126,66 miliar atau 104,79% dibandingkan tahun 2023 sebesar positif Rp120,87 miliar. Hal ini dikarenakan penurunan arus kas dari aktivitas operasi.

Kas Dan Setara Kas Akhir Tahun

Per 31 Desember 2024, Perseroan membukukan kas dan setara kas pada akhir tahun sebesar Rp1.030,73 miliar, mengalami penurunan Rp5,70 miliar atau 0,55% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp1.036,43 miliar. Hal ini disebabkan adanya penurunan arus kas dari aktivitas operasi.

Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents

The net increase (decrease) in cash and cash equivalents is the accumulation of cash flows from operating activities, cash flows from investing activities and cash flows from financing activities. As of December 31, 2024, the net decrease in cash and cash equivalents was recorded at negative of Rp5.79 billion, a decrease of Rp126.66 billion or 104.79% compared to 2023 of positive at Rp120.87 billion. This was due to a decrease in cash flow from operating activities.

Cash and Cash Equivalent at End of Year

As of December 31, 2024, the Company recorded cash and cash equivalents at the end of the year of Rp1,030.73 billion, a decrease of Rp5.70 billion or 0.55% compared to the previous year of Rp1,036.43 billion. This was due to a decrease in cash flow from operating activities.

Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang

Capacity to Pay Debts and Level of Receivable Collectibility

Kemampuan Membayar Utang

Kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh kewajiban, baik jangka pendek maupun jangka panjang dapat diukur melalui rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam melunasi kewajiban jangka pendek, sementara rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh kewajibannya.

Rasio Likuiditas

Dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang akan jatuh tempo, Perseroan menggunakan rasio likuiditas yang diukur menggunakan rasio lancar (*current ratio*), rasio kas (*cash ratio*), dan rasio cepat (*quick ratio*). Rasio lancar merupakan perbandingan antara aset lancar dengan liabilitas jangka pendek, rasio kas dihitung melalui perbandingan antara kas dan setara kas dengan liabilitas jangka pendek, dan rasio cepat dihitung dengan mengurangi persediaan dari aset lancar dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek.

capacity to pay debts

The Company's capacity to meet all obligations, both short-term and long-term, can be measured through the liquidity ratio and solvency ratio. The liquidity ratio is used to measure the Company's ability to pay off short-term obligations, while the solvency ratio is used to measure the Company's ability to meet all its obligations.

Liquidity Ratio

In meeting short-term obligations that will mature, the Company applies a liquidity ratio that is measured using the current ratio, cash ratio, and quick ratio. The current ratio is a comparison between current assets and short-term liabilities, the cash ratio is calculated by comparing cash and cash equivalents with short-term liabilities, and the quick ratio is calculated by subtracting inventory from current assets compared to short-term liabilities.

Tabel Rasio Likuiditas 2023-2024
Table of Liquidity Ratio 2023-2024

Rasio Ratio	2024 (%)	2023 (%)	Perubahan Changes (%)
Rasio Lancar Current Ratio	175,51	193,20	-0,18
Rasio Kas Cash Ratio	40,98	46,99	-0,06
Rasio Cepat Quick Ratio	161,59	174,99	-0,13

Per 31 Desember 2024, rasio lancar Perseroan tercatat sebesar 175,51%, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 193,20%. Rasio kas Perseroan pada tahun 2024 mencapai 40,98%, dengan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 46,99%. Sementara itu, rasio cepat Perseroan pada tahun 2024 tercatat sebesar 161,59%, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 174,99%.

Rasio likuiditas Perseroan pada tahun 2024 mengalami penurunan akibat meningkatnya liabilitas jangka pendek, terutama dari pinjaman bank jangka pendek dan utang usaha untuk mendukung aktivitas operasional.

Meskipun menurun, rasio likuiditas yang di atas 100% dengan kepemilikan kas dan setara kas mencukupi, dapat mencerminkan kondisi keuangan yang sehat serta kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek secara optimal.

As of December 31, 2024, the Company's current ratio was recorded at 175.51%, an decrease compared to 2023 which was 193.20%. The Company's cash ratio in 2024 reached 40.98%, with an decrease compared to the previous year which was 46.99%. In the meantime, the Company's cash ratio in 2024 was recorded at 161,59%, an decrease compared to the previous year which was 174.99%.

The Company's liquidity ratio in 2024 decreased due to increasing current liabilities, especially from short-term bank loans and trade payables to support operational activities.

Although decreasing, the liquidity ratio above 100% with sufficient cash and cash equivalents can reflect a healthy financial condition and the Company's ability to optimally meet short-term obligations..

Rasio Solvabilitas

Perseroan mengukur rasio solvabilitas untuk menilai kemampuan dalam memenuhi seluruh kewajiban, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio ini mencerminkan tingkat kesehatan keuangan serta efektivitas struktur permodalan Perseroan. Komponen utama dalam rasio solvabilitas mencakup rasio utang berbunga terhadap ekuitas serta rasio liabilitas terhadap total aset.

Solvency Ratio

The Company measures the solvency ratio to assess the ability to meet all obligations, both short-term and long-term. This ratio reflects the level of financial health and the effectiveness of the Company's capital structure. The main components of the solvency ratio include the ratio of interest-bearing debt to equity and the ratio of liabilities to total assets.

Tabel Rasio Solvabilitas 2023-2024
Table of Solvency Ratio 2023-2024

Rasio Ratio	2024 (kali | time)	2023 (kali | time)	Perubahan (kali) Changes (time)
Rasio Total Liabilitas terhadap Ekuitas Debt to Equity Ratio	1,20	1,17	0,02
Rasio Total Liabilitas terhadap Aset Debt to Asset Ratio	0,55	0,54	0,01
Rasio Utang Berbunga terhadap Ekuitas Gearing Ratio	0,18	0,09	0,09
Rasio Ekuitas terhadap Total Aset Equity to Asset Ratio	0,45	0,46	-0,01

Per 31 Desember 2024, rasio total liabilitas terhadap ekuitas Perseroan tercatat sebesar 1,20 kali, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 1,17 kali. Rasio total liabilitas terhadap aset Perseroan pada tahun 2024 mencapai 0,55 kali, dengan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 0,54 kali. Rasio ekuitas terhadap total aset Perseroan pada tahun 2024 mencapai 0,45 kali, dengan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 0,46 kali. Sementara itu, rasio utang berbunga terhadap ekuitas Perseroan pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,18 kali, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 0,09 kali.

As of December 31, 2024, the Company's total liabilities to equity ratio was recorded at 1.20 times, an increase compared to 2023 which was 1.17 times. The Company's total liabilities to assets ratio in 2024 reached 0.55 times, with an increase compared to the previous year of 0.54 times. The Company's equity to total assets ratio in 2024 reached 0.45 times, with an decrease compared to the previous year of 0.46 times. For the meantime, the Company's interest-bearing debt to equity ratio in 2024 was recorded at 0.18 times, an increase compared to the previous year of 0.09 times.

Perubahan rasio solvabilitas Perseroan pada tahun 2024 disebabkan oleh peningkatan liabilitas jangka pendek, terutama dari pinjaman bank jangka pendek untuk mendukung aktivitas operasional.

Changes in the Company's solvency ratio in 2024 were due to an increase in current liabilities, especially from short-term bank loans to support operational activities.

Meskipun demikian, tingkat solvabilitas Perseroan tetap terjaga, mencerminkan kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang serta menjaga struktur permodalan yang optimal.

Nevertheless, the Company's solvency level remains maintained, reflecting the ability to meet long-term obligations and maintain an optimal capital structure.

TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Tingkat kolektibilitas piutang mencerminkan efektivitas Perseroan dalam menagih piutang. Semakin pendek periode penagihan, semakin baik kinerja Perseroan dalam mengelola dan mengoptimalkan arus kas dari piutang usaha.

RECEIVABLES COLLECTABILITY LEVEL

The level of receivables collectability reflects the Company's effectiveness in collecting receivables. The shorter the collection period, the better the Company's performance in managing and optimizing cash flow from accounts receivable.

Tabel Tingkat Kolektibilitas Piutang 2023-2024
Table of Receivables Collectibility Level 2023-2024

Uraian Description	2024 (hari | days)	2023 (hari | days)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Selisih (hari) Difference (day)	Persentase Percentage (%)
Periode Penagihan Collection Period	54	64	-10	-15,13

Per 31 Desember 2024, periode penagihan piutang Perseroan mengalami peningkatan sebesar 15,13% dari 64 hari di tahun 2023 menjadi 54 hari. Hal ini menunjukkan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan collection di tahun 2024 lebih pendek dibandingkan tahun 2023, serta menunjukkan penerapan kebijakan Perseroan yang fokus terhadap kas.

As of December 31, 2024, the Company's receivables collection period increased by 15.13% from 64 days in 2023 to 54 days. This shows that the time required to collect in 2024 is shorter than in 2023, and shows the implementation of the Company's policy that focuses on cash.

Umur piutang usaha serta upaya Perseroan dalam pengelolaan piutang dapat dilihat pada tabel berikut.

The age of accounts receivable and the Company's efforts in managing receivables can be seen in the following table.

Tabel Umur Piutang Usaha Berdasarkan Tanggal Jatuh Tempo 2023-2024
Table of Age of Trade Receivables Based on the Due 2023-2024

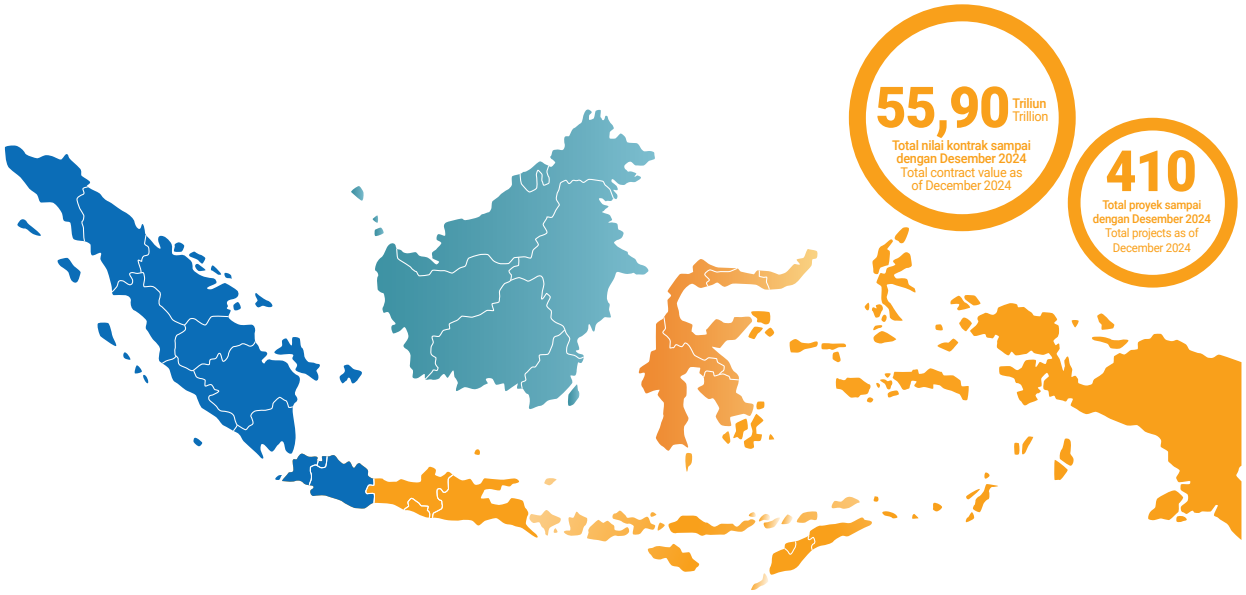
Umur Piutang Usaha Age of Trade Receivables	2024 (Rp-Juta | Rp-Million)	2023 (Rp-Juta | Rp-Million)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal (Rp-Juta) Nominal (Rp-Million)	Persentase Percentage (%)
Sudah jatuh tempo Overdue				
Sampai dengan 1 bulan Up to 1 month	96,45	70,54	25,91	36,73%
>1 s.d. 3 bulan > 1 month up to 3 month	29,88	14,40	15,49	107,54%
>3 bulan s.d. 6 bulan > 3 month up to 6 month	0,51	109,23	(108,72)	-99,53%
>6 bulan s.d. 1 tahun > 6 month up to 1 year	54,68	68,92	(14,23)	-20,65%
>1 tahun > 1 year	468,97	538,88	(69,91)	-12,97%
Sub Jumlah Subtotal	650,50	801,97	(151,47)	-18,89%
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Less: Allowance for Impairment Losses	(105,34)	(106,04)	0,70	-0,66%
Jumlah Piutang Usaha – Bersih Total Trade Receivables - Net	545,16	695,92	(150,76)	-21,66%

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang adalah cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang usaha di kemudian hari.

Management believes that the allowance for impairment losses on receivables is sufficient to cover the possibility of future uncollectible accounts receivable.

Portofolio Kontrak Baru Perusahaan

Company's New Contract Portfolio



PROJECT TYPE

Residensial Residential	Perkantoran Office	Fasilitas Publik Public Facilities	Komersial Commercial
40,19%	17,62%	29,38%	12,81%

OWNER TYPE

Swasta Private	Pemerintah Government	BUMN SOE
44,89%	25,41%	29,70%

EKSTERN/ INTERN

Ekstern Ekstern	Intern Intern
92,53%	7,47%

dari perusahaan berdiri pada Oktober 2008 hingga Desember 2024 | from the company's establishment in October 2008 until December 2024

Perseroan memiliki pengalaman yang luas dalam mengerjakan berbagai jenis proyek pembangunan gedung, dengan sejumlah prestasi yang telah diraih atas hasil karya yang telah diselesaikan. Sejak pendirian Perseroan pada tahun 2008 hingga 2024, Perseroan berhasil memperoleh Kontrak Baru sebanyak 410 proyek dengan total nilai proyek mencapai Rp55,90 triliun. Portofolio proyek kontrak baru Perseroan dikelompokkan berdasarkan pemberi kerja (owner), jenis proyek, serta perolehan proyek dari eksternal dan internal, yang mencerminkan keberagaman dan kapasitas Perseroan dalam memenuhi kebutuhan pasar.

The Company has extensive experience in working on various types of building construction projects, with a number of achievements that have been achieved for the work that has been completed. Since the Company's establishment in 2008 until 2024, the Company has succeeded in obtaining 410 New Contracts with a total project value of Rp55.90 trillion. The Company's new contract project portfolio is grouped based on the employer (owner), project type, and project acquisition from external and internal sources, which reflects the Company's diversity and capacity in meeting market needs.

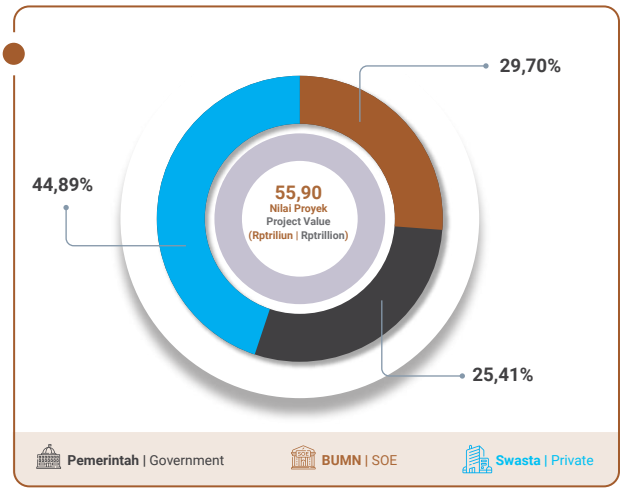
PORTOFOLIO KONTRAK BARU PERUSAHAAN BERDASARKAN PEMBERI KERJA

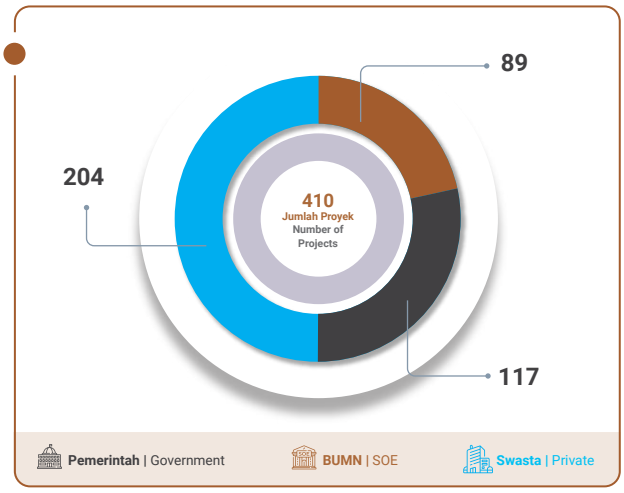
Portofolio kontrak baru Perseroan berdasarkan kategori pemberi kerja (owner) tercatat sebagai berikut: proyek yang berasal dari Pemerintah sebanyak 117 proyek dengan total nilai mencapai Rp14,21 triliun, setara dengan 25,41% dari total nilai proyek. Proyek yang berasal dari BUMN sebanyak 89 proyek dengan total nilai mencapai Rp16,60 triliun, setara dengan 29,70%. Sementara itu, proyek yang berasal dari Swasta tercatat sebanyak 204 proyek dengan total nilai mencapai Rp25,09 triliun, setara dengan 44,89% dari total nilai proyek.

COMPANY'S NEW CONTRACT PORTFOLIO BY EMPLOYER

The Company's new contract portfolio based on the category of owner is recorded as follows: projects originating from the Government amounting to 117 projects with a total value of Rp14.21 trillion, equivalent to 25.41% of the total project value. Projects originating from SOEs amounting to 89 projects with a total value of Rp16.60 trillion, equivalent to 29.70%. Meanwhile, projects originating from the Private Sector are recorded as 204 projects with a total value of Rp25.09 trillion, equivalent to 44.89% of the total project value.

Portofolio Kontrak Baru Perusahaan Berdasarkan Pemberi Kerja (Owner)
Company New Contract Portfolio By Owner





Pemberi Kerja Employer	Nilai Proyek Project Value (Rp-Juta | Rp-Million)	Persentase Proyek (%) Project Percentage (%)	Jumlah Proyek Number of Projects
Pemerintah Government	14.205,71	25,41%	117
BUMN SOE	16.601,48	29,70%	89
Swasta Private	25.090,65	44,89%	204
Jumlah Total	55.897,84	100,00%	410

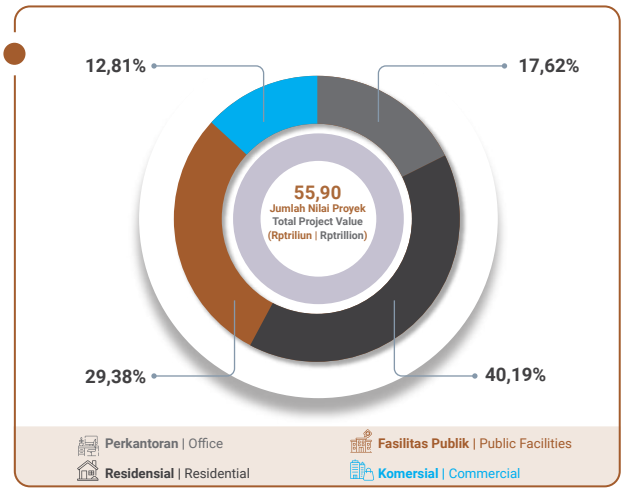
PORTOFOLIO KONTRAK BARU PERUSAHAAN BERDASARKAN JENIS PROYEK

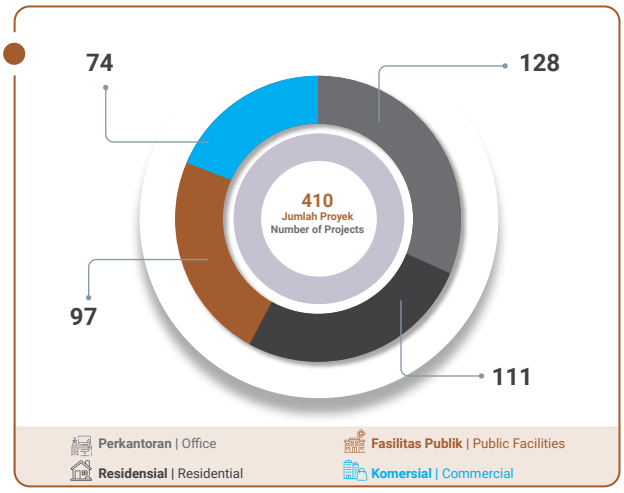
Portofolio kontrak baru Perseroan berdasarkan kategori jenis proyek tercatat sebagai berikut: proyek perkantoran sebanyak 128 proyek dengan total nilai mencapai Rp9,85 triliun, setara dengan 17,62% dari total nilai proyek. Proyek residensial sebanyak 111 proyek dengan total nilai mencapai Rp22,46 triliun, setara dengan 40,19%. Proyek fasilitas publik sebanyak 97 proyek dengan total nilai mencapai Rp16,43 triliun, setara dengan 29,38%. Sementara itu, proyek komersial tercatat sebanyak 74 proyek dengan total nilai mencapai Rp7,16 triliun, setara dengan 12,81% dari total nilai proyek.

COMPANY'S NEW CONTRACT PORTFOLIO BY PROJECT TYPE

The Company's new contract portfolio based on project type category is recorded as follows: 128 office projects with a total value of Rp9.85 trillion, equivalent to 17.62% of the total project value. 111 residential projects with a total value of Rp22.46 trillion, equivalent to 40.19%. 97 public facility projects with a total value of Rp16.43 trillion, equivalent to 29.38%. In the meantime, 74 commercial projects were recorded with a total value of Rp7.16 trillion, equivalent to 12.81% of the total project value.

Portofolio Kontrak Baru Perusahaan Berdasarkan Jenis Proyek
Company's New Contract Portfolio by Project Type





(Dinyatakan dalam Miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain | Expressed in Billions of Rupiah)

Pemberi Kerja (Owner) Employer (Owner)	Nilai Proyek Project Value	Persentase Proyek (%) Project Percentage (%)	Jumlah Proyek Number of Projects
Perkantoran Office	9.846,91	17,62%	128
Residensial Residential	22.464,80	40,19%	111
Fasilitas Publik Public Facilities	16.426,61	29,38%	97
Komersial Commercial	7.159,52	12,81%	74
Jumlah Total	55.897,84	100,00%	410

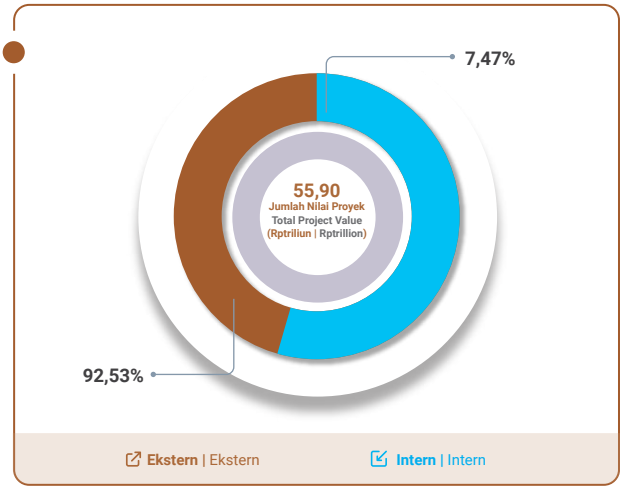
PORTOFOLIO KONTRAK BARU PERUSAHAAN BERDASARKAN PEROLEHAN PROYEK DARI EKSTERNAL DAN INTERNAL

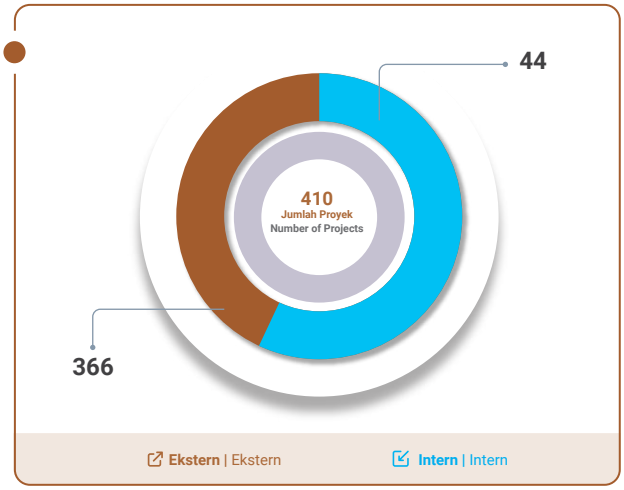
Portofolio kontrak baru Perseroan berdasarkan kategori perolehan proyek dari eksternal dan internal tercatat sebagai berikut: proyek yang berasal dari eksternal sebanyak 366 proyek dengan total nilai mencapai Rp51,72 triliun, setara dengan 92,53% dari total nilai proyek. Sementara itu, proyek yang berasal dari internal tercatat sebanyak 44 proyek dengan total nilai mencapai Rp4,17 triliun, setara dengan 7,47% dari total nilai proyek. Hal ini menggambarkan kemandirian Perseroan sebagai entitas anak dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dalam memperoleh proyek secara mandiri dan menunjukan pertumbuhan yang signifikan.

COMPANY'S NEW CONTRACT PORTFOLIO BASED ON EXTERNAL AND INTERNAL PROJECTS

The Company's new contract portfolio based on the category of external and internal project acquisition is recorded as follows: projects originating from external sources totalled 366 projects with a total value reaching Rp51.72 trillion, equivalent to 92.53% of the total project value. Meanwhile, projects originating from internal sources totalled 44 projects with a total value reaching Rp4.17 trillion, equivalent to 7.47% of the total project value. This demonstrates the Company's independence as a subsidiary of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk in obtaining projects independently and showing significant growth.

Portofolio Kontrak Baru Perusahaan Berdasarkan Perolehan Proyek Dari Eksternal Dan Internal
Company's New Contract Portfolio Based on Project Acquisition from External and Internal





(Dinyatakan dalam Miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain | Expressed in Billions of Rupiah)

Perolehan Proyek Eksternal dan Internal External and Internal Project Acquisition	Nilai Proyek Project Value	Persentase Proyek (%) Project Percentage (%)	Jumlah Proyek Number of Projects
Eksternal External	51.724,42	92,53%	366
Internal Internal	4.173,42	7,47%	44
Jumlah Total	55.897,84	100,00%	410


SKY HOUSE ALAM SUTERA

Struktur Modal

The Capital Structure

RINCIAN STRUKTUR MODAL

Struktur modal Perseroan merupakan kombinasi antara liabilitas dan ekuitas yang digunakan untuk mendanai operasional serta pengembangan usaha secara berkelanjutan. Pengelolaan struktur modal dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara risiko dan profitabilitas guna memastikan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan serta peningkatan nilai bagi pemegang saham.

Pada tahun 2024, struktur modal Perseroan terdiri dari liabilitas sebesar 54,50% dan ekuitas sebesar 45,50%. Komposisi ini mengalami perubahan dibandingkan tahun 2023, yang mencerminkan strategi Perseroan dalam mengelola permodalan secara efektif. Rincian struktur modal Perseroan untuk tahun 2024 dan 2023 disajikan dalam tabel berikut.

DETAILS OF THE CAPITAL STRUCTURE

The Company's capital structure is a combination of liabilities and equity used to fund operations and sustainable business development. Capital structure management is carried out by considering the balance between risk and profitability to ensure sustainable business growth and increased value for shareholders.

In 2024, the Company's capital structure consists of liabilities of 54.50% and equity of 45,50%. This composition has changed compared to 2023, reflecting the Company's strategy in managing capital effectively. Details of the Company's capital structure for 2024 and 2023 are presented in the following table.

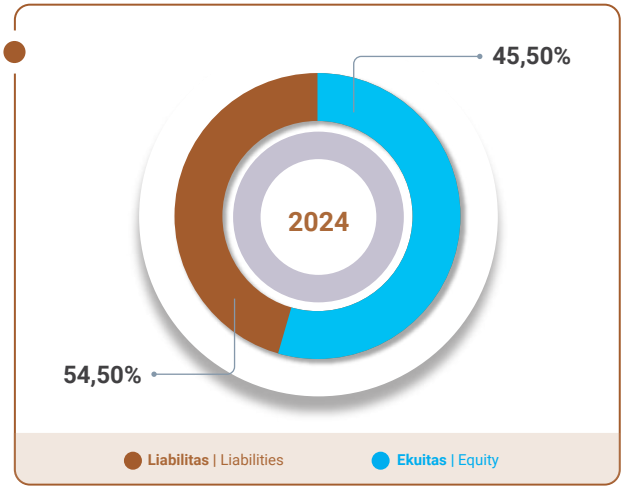
Tabel Komposisi Struktur Modal 2023-2024

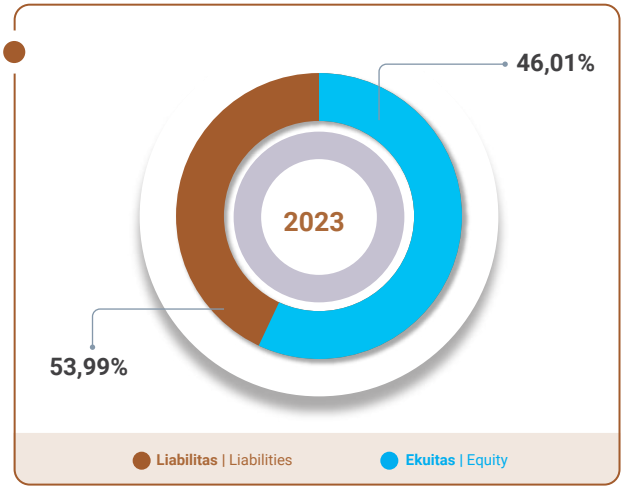
Table of Capital Structure Composition 2023-2024

Uraian Description	2024		2023		Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
	Nominal (Rp-Juta) Nominal (Rp-Million)	Komposisi Composition (%)	Nominal (Rp-Juta) Nominal (Rp-Million)	Komposisi Composition (%)	Nominal (Rp-Juta)	Persentase Percentage (%)
Liabilitas | Liabilities	3.121,30	54,50%	3.002,79	53,99%	118,52	3,95%
Ekuitas | Equity	2.605,97	45,50%	2.558,75	46,01%	47,22	1,85%
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	5.727,27	100,00%	5.561,53	100,00%	165,74	2,98%

Komposisi Struktur Modal 2023-2024

Capital Structure Composition 2023-2024





KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Perseroan mengelola struktur modal secara strategis guna memastikan keberlanjutan usaha serta memaksimalkan nilai bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan. Pengelolaan modal dilakukan dengan mempertahankan rasio keuangan yang sehat, mengoptimalkan penggunaan sumber pendanaan, serta menjaga keseimbangan antara liabilitas dan ekuitas.

MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

The Company manages its capital structure strategically to ensure business sustainability and maximize value for shareholders and stakeholders. Capital management is carried out by maintaining a healthy financial ratio, optimizing the use of funding sources, and maintaining a balance between liabilities and equity.

Sebagai bagian dari strategi keuangan, Perseroan secara berkala menelaah dan menyesuaikan struktur modal agar tetap optimal, sejalan dengan dinamika pasar serta kebutuhan investasi dan operasional. Dengan demikian, Perseroan dapat mempertahankan daya saing dan menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

As part of its financial strategy, the Company periodically reviews and adjusts its capital structure to remain optimal, in conformity with market dynamics and investment and operational needs. As a result, the Company can maintain its competitiveness and create sustainable added value for all stakeholders.

Perseroan memiliki kebijakan untuk menitikberatkan pengguna liabilitas sebagai salah satu sumber modal. Adapun liabilitas jangka pendek Perseroan di tahun 2024 tercatat sebesar Rp2.515,36 miliar dan liabilitas jangka panjang Perseroan sebesar Rp605,95 miliar.

The Company has a policy to emphasize the use of liabilities as one of the sources of capital. The Company's current liabilities in 2024 were recorded at Rp2,515.36 billion and the Company's non-current liabilities were Rp605.95 billion.

DASAR PEMILIHAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

BASIS FOR SELECTING MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

Perseroan menerapkan kebijakan struktur modal yang bertujuan untuk memastikan kelangsungan usaha, memaksimalkan nilai bagi pemegang saham, serta memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya. Dalam kebijakan ini, Perseroan mengoptimalkan keseimbangan antara utang dan ekuitas guna mencapai tingkat pengembalian yang optimal bagi pemegang saham serta menjaga struktur permodalan yang efisien.

The Company implements a capital structure policy that aims to ensure business continuity, maximize value for shareholders, and provide benefits to other stakeholders. In this policy, the Company optimizes the balance between debt and equity in order to achieve an optimal rate of return for shareholders and maintain an efficient capital structure.

Selain itu, kebijakan ini juga dirancang untuk mempertahankan struktur modal yang optimal guna meminimalkan biaya permodalan. Manajemen secara berkala melakukan evaluasi terhadap struktur permodalan dengan mempertimbangkan tingkat biaya modal dan risiko yang terkait.

In addition, this policy is also designed to maintain an optimal capital structure in order to minimize capital costs. Management periodically evaluates the capital structure by considering the level of capital costs and associated risks.

Adapun *gearing ratio* Perseroan untuk tahun 2024 dan 2023 disajikan dalam tabel berikut:

The Company's gearing ratio for 2024 and 2023 is presented in the following table:

Tabel Gearing Ratio 2023-2024
Table of Gearing Ratio 2023-2024

Uraian Description	2024	2023	Perubahan Change
Pinjaman Berbunga (Rp-juta) Interest-bearing debt (Rp-million)	457,06	223,50	233,56
Ekuitas (Rp-juta) Equity (Rp-million)	2.605,97	2.558,75	47,22
Gearing Ratio (kali)	0,18	0,09	0,09

Per 31 Desember 2024, *gearing ratio* Perseroan tercatat sebesar 0,18 kali, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 0,09 kali.

As of December 31, 2024, the Company's gearing ratio was recorded at 0.18 times, an increase compared to 2023 which was 0.09 times.

Struktur modal Perseroan tetap dalam kondisi sehat dan konservatif, dengan komposisi yang seimbang antara liabilitas dan ekuitas. Proporsi utang berbunga terhadap ekuitas yang relatif rendah mencerminkan strategi manajemen dalam menjaga stabilitas keuangan, mengoptimalkan biaya modal, serta memastikan fleksibilitas pendanaan untuk mendukung pertumbuhan usaha secara berkelanjutan.

The Company's capital structure remains healthy and conservative, with a balanced composition between liabilities and equity. The relatively low proportion of interest-bearing debt to equity reflects management's strategy in maintaining financial stability, optimizing capital costs, and ensuring funding flexibility to support sustainable business growth.

Ikatan yang Material untuk Investasi Barang Modal

Material Commitments for Capital Expenditures

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, suatu transaksi dikategorikan sebagai transaksi material apabila nilai transaksi mencapai 20% atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka.

Hingga akhir tahun 2024, Perseroan tidak memiliki ikatan material terkait investasi barang modal.

In accord with Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities, a transaction is categorized as a material transaction if the transaction value reaches 20% or more of the equity of a Public Company.

As of the end of 2024, the Company has no material commitments related to capital expenditure.

Realisasi Investasi Barang Modal

Realization of Capital Expenditures

Investasi Barang Modal (*Capital Expenditure*) merupakan biaya yang dikeluarkan Perseroan untuk mendukung pengembangan bisnis, termasuk implementasi digitalisasi dan peningkatan aset tetap yang diperlukan untuk menunjang operasional dan ekspansi usaha.

JENIS DAN TUJUAN INVESTASI BARANG MODAL

Investasi barang modal dilakukan untuk pengembangan bisnis Perseroan. Jenis investasi barang modal yang dilakukan meliputi program transformasi digital, implementasi teknologi *Construction* 4.0, investasi pada aset tetap, inisiatif *Net Zero Emission*, serta investasi untuk pengembangan usaha yang berkelanjutan.

NILAI INVESTASI BARANG MODAL

Pada tahun 2024, Perseroan merealisasikan investasi barang modal sebesar Rp6.502 juta, yang mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023. Dari total investasi tahun 2024, sebesar Rp5.609 juta dialokasikan untuk program transformasi digital, sementara Rp893 juta digunakan untuk mendukung program *Net Zero Emission*. Sementara itu, pada tahun 2023, total investasi barang modal yang direalisasikan mencapai Rp13.531 juta, dengan alokasi sebesar Rp7.195 juta untuk program transformasi digital dan Rp6.336 juta untuk implementasi teknologi *Construction* 4.0.

Perbandingan antara realisasi investasi barang modal pada tahun 2023 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Capital Expenditure is the cost incurred by the Company to support business development, counting to the implementation of digitalization and increasing fixed assets needed in order to support business operations and expansion.

CAPITAL EXPENDITURE TYPE AND PURPOSE

Capital expenditure is made for the Company's business development. Types of capital expenditure made include digital transformation programs, implementation of Construction 4.0 technology, investment in fixed assets, Net Zero Emission initiatives, and investment for sustainable business development.

VALUE OF THE INVESTMENT OF CAPITAL GOODS

In 2024, the Company realized investment of capital goods amounted to Rp6,502 million, which decreased compared to the realization in 2023. The total investment in 2024 itself, Rp5,609 million was allocated for the digital transformation program, while Rp893 million was made for supporting the Net Zero Emission program. In the meantime, in 2023, the total realized capital goods investment reached by Rp13,531 million, with an allocation of Rp7,195 million for the digital transformation program and Rp6,336 million for the implementation of Construction 4.0 technology.

The comparison between the realization of capital goods investment in 2023 and 2024 is presented as follows.

Nilai Investasi Barang Modal 2023-2024
Value of the Investment of Capital Goods 2023-2024

Uraian Description	**2024 (Rp-Juta)** (Rp-Million)	**2023 (Rp-Juta)** (Rp-Million)	**Kenaikan/Penurunan** Increase/Decrease	
			Selisih (Rp-Juta) Difference (Rp-Million)	**Persentase (%)** Percentage (%)
Realisasi Investasi Barang Modal Realization Of Capital Expenditures	6.502	13.531	(7.029)	(51,95%)

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi setelah Tanggal Laporan Akuntan

Information and Material Facts Occurring After the Accountant's Report Date

Hingga tanggal penyusunan Laporan Tahunan ini, Perseroan tidak memiliki informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan.

As of the date of preparation of this Annual Report, the Company does not have any material information and facts that occurred after the date of the accounting report.

Kebijakan Dividen dan Pembagiannya

Dividend Policy and its Distribution

KEBIJAKAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Kebijakan dividen Perseroan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang telah diadopsi dalam Anggaran Dasar Perseroan terkait Penggunaan Laba Bersih, Pembagian Dividen Interim, dan Pembagian Dividen. Pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS Tahunan mengenai penggunaan dan/atau pembagian laba bersih yang belum dibagi yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang diajukan untuk persetujuan RUPS Tahunan. Berdasarkan keputusan Rapat, Direksi dapat membagi dividen sementara (dividen interim) setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan jika pembagian tersebut tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil daripada modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (dividen interim) tersebut harus diperhitungkan dengan dividen yang dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan. Dividen yang dibayarkan juga memperhatikan kemampuan keuangan Perseroan.

Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.

KRONOLOGIS PEMBAGIAN DAN PEMBAYARAN DIVIDEN

Sebagai bentuk komitmen dalam menciptakan nilai bagi pemegang saham, Perseroan senantiasa menyeimbangkan kebijakan pembagian dividen dengan kebutuhan penguatan modal dan pengembangan bisnis yang berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan pertumbuhan kinerja keuangan, arus kas, serta prospek industri, Perseroan telah melaksanakan pembagian dividen secara konsisten sebagai bagian dari strategi pengelolaan modal yang optimal.

DIVIDEND DISTRIBUTION POLICY

The Company's dividend policy refers to Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies which has been adopted in the Company's Articles of Association regarding the Use of Net Profit, Distribution of Interim Dividends, and Distribution of Dividends. Dividend distribution is carried out based on the decision of the Annual General Meeting of Shareholders (GMS).

In accordance with the Company's Articles of Association, the Board of Directors Meeting shall submit a proposal to the Annual GMS regarding the use and/or distribution of undistributed net profit listed in the balance sheet and profit and loss calculation submitted for approval by the Annual GMS. Based on the decision of the Meeting, the Board of Directors may distribute interim dividends after obtaining the approval of the Board of Commissioners and if the distribution does not cause the Company's net assets to be less than the issued and paid-up capital plus mandatory reserves, provided that the interim dividends must be calculated with dividends distributed based on the decision of the next Annual GMS taken in accordance with the provisions of the Articles of Association by taking into account the provisions of the laws and regulations in force in the Capital Market sector and the regulations of the Stock Exchange where the Company's shares are listed. Dividends paid also take into account the Company's financial capabilities.

In the event that there is a GMS decision regarding the distribution of cash dividends, the Company is obliged to make cash dividend payments to entitled shareholders no later than 30 (thirty) days after the announcement of the summary of the minutes of the GMS which decided on the distribution of cash dividends.

CHRONOLOGY OF DIVIDEND DISTRIBUTION AND PAYMENT

As a commitment to creating value for shareholders, the Company continuously balances the dividend distribution policy with the need for capital strengthening and sustainable business development. By considering the growth of financial performance, cash flow, and industry prospects, the Company has consistently distributed dividends as part of an optimal capital management strategy.

Kronologi pembagian dan pembayaran dividen yang telah dilakukan Perseroan dalam lima tahun terakhir (2020–2024) adalah sebagai berikut:

The chronology of dividend distribution and payments made by the Company in the last five years (2020–2024) is as follows:

Tahun Pembagian Dividen Dividend Distribution Year	2024	2023	2022	2021	2020
Tahun Buku Dividen Dividend Fiscal Year	2023	2022	2021	2020	2019
Pelaksanaan RUPST AGMS Implementation	RUPST Tahun Buku 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2024 AGMS for the 2023 Fiscal Year conducted on May 20, 2024	RUPST Tahun Buku 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2023 AGMS for the 2022 Fiscal Year conducted on May 10, 2023	RUPST Tahun Buku 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2022 AGMS for the 2021 Fiscal Year conducted on April 19, 2022	RUPST Tahun Buku 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2021 AGMS for the 2020 Fiscal Year conducted on May 28, 2021	RUPST Tahun Buku 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2020 AGMS for the 2019 Fiscal Year conducted on March 31, 2020
Laba Bersih Yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Net Profit Attributable to Owners of Parent Entity	Rp46.702.158.528	Rp230.053.686.379	Rp213.880.324.310	Rp153.281.021.021	Rp451.658.136.234
Dividen Kas yang Dibagikan Cash Dividends Distributed	Rp9.380.560.000	Rp23.164.240.000	Rp42.786.840.000	Rp30.726.120.000	Rp112.949.600.000
Jumlah Saham yang Berhak atas Dividen (lembar saham) Number of Shares Entitled to Dividends (shares)	9.572.000.000	9.572.000.000	9.572.000.000	9.572.000.000	9.572.000.000
Dividen per Lembar Saham (Rp) Dividend per Share (Rp)	0,98	2,42	4,47	3,21	11,80
Dividend Pay Out Ratio	20%	10%	20%	20%	25%
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (Recording Date) Date of List of Shareholders Entitled to Dividends (Recording Date)	3 Juni 2024 June 3, 2024	23 Mei 2023 May 23, 2023	9 Mei 2022 May 9, 2022	10 Juni 2021 June 10, 2021	13 April 2020 April 13, 2020
Tanggal Pembayaran Dividen Dividend Payment Date	19 Juni 2024 April 29, 2020	9 Juni 2023 April 29, 2020	20 Mei 2022 April 29, 2020	2 Juli 2021 April 29, 2020	29 April 2020 April 29, 2020

Informasi Tentang Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP)

Information about Employee and/or Management Stock Ownership Programs (ESOP/MSOP)

Selama tahun 2024, Perseroan belum menyelenggarakan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen (ESOP/MSOP). Oleh karena itu, Perseroan tidak menyajikan informasi terkait jumlah saham ESOP/MSOP, realisasinya, jangka waktu program, persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak, serta harga exercise.

Throughout 2024, the Company has not implemented an employee and/or management stock ownership program (ESOP/MSOP). As a result, the Company does not provide information regarding the number of ESOP/MSOP shares, their realization, program period, requirements for eligible employees and/or management, and exercise price.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Realization of Use of Funds From Public Offering

Pada tahun 2017, Perseroan melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering*/IPO) di Bursa Efek Indonesia. Perseroan memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. S-444/D.04/2017 tanggal 20 November 2017. Saham Perseroan kemudian tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 30 November 2017 dengan kode saham WEGE.

In 2017, the Company conducted an Initial Public Offering (IPO) on the Indonesia Stock Exchange. The Company obtained an effective statement based on the Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. S-444/D.04/2017 dated November 20, 2017. The Company's shares were then listed on the Indonesia Stock Exchange on November 30, 2017 with the stock code WEGE.

Dalam IPO tersebut, Perseroan menerbitkan 2.872.000.000 saham biasa atas nama, yang seluruhnya merupakan Saham Baru yang diterbitkan dari portepel Perseroan. Saham tersebut memiliki nilai nominal Rp100,- per saham dan mewakili 30,00% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Harga Penawaran ditetapkan sebesar Rp290,- per saham, sehingga total dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang diperoleh mencapai Rp832.880.000.000. Setelah dikurangi biaya penawaran umum sebesar Rp23.014.188.360, total dana bersih yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah Rp809.865.811.640.

In the IPO, the Company issued 2,872,000,000 registered common shares, all of which were New Shares issued from the Company's portfolio. The shares have a nominal value of Rp100,- per share and represent 30.00% of the issued and fully paid-up capital after the IPO. The Offering Price was set at Rp290,- per share, so as to the total funds obtained from the Initial Public Offering reached Rp832,880,000,000. After deducting the public offering costs of Rp23,014,188,360, the total net proceeds obtained from the Company's Initial Public Offering were Rp809,865,811,640.

Dalam rangka mengoptimalkan strategi bisnis untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan, Perseroan telah melakukan perubahan komposisi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang telah memperoleh persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), sebagai berikut:

1. RUPST 31 Maret 2020
   Perseroan melakukan perubahan komposisi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk mempercepat pertumbuhan Perseroan melalui strategi *forward integration* yang memberikan *multiplier effect* dan strategi pertumbuhan melalui *technology driven*. Perubahan ini telah memperoleh persetujuan dalam RUPST dan dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 31 tanggal 31 Maret 2020, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
2. RUPST 20 Mei 2024.
   Perubahan komposisi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pasar properti yang lesu, dampak kondisi pandemi serta adanya

In order to optimize business strategies to achieve sustainable growth, the Company has made changes to the composition of the use of funds from the Initial Public Offering which have been approved at the Annual General Meeting of Shareholders (AGM), as follows:

1. AGM March 31, 2020
   The Company has changed the composition of the use of funds from the Initial Public Offering to accelerate the Company's growth through a forward integration strategy that provides a multiplier effect and a growth strategy through technology driven. This change has been approved at the AGM and is stated in the Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 31 dated March 31, 2020, made before Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta.
2. AGMS May 20, 2024.
   The change in the composition of the use of funds from the Initial Public Offering was carried out by considering the sluggish property market conditions, the impact of the pandemic and the

rencana penggunaan modal kerja digunakan untuk mendanai proyek strategis nasional. Perubahan ini telah memperoleh persetujuan dalam RUPST dan dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 8 tanggal 20 Mei 2024, yang dibuat di hadapan Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto, S.H., Notaris di Jakarta.

plan to use working capital to fund national strategic projects. This change has been approved at the AGMS and is stated in the Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 8 dated May 20, 2024, made before Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto, S.H., Notary in Jakarta.

Berikut adalah perubahan komposisi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang terakhir serta realisasi penggunaannya hingga tahun 2024.

The following is the change in the composition of the use of funds from the last Initial Public Offering and the realization of its use until 2024.

PERUBAHAN KOMPOSISI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM TERAKHIR
CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE USE OF PROCEEDS FROM THE LAST PUBLIC OFFERING

Rencana Awal (RUPST 31 Maret 2020) Initial Plan (AGMS March 31, 2020)	**Rencana Perubahan (RUPST 20 Mei 2024)** Change Plan (AGMS 20 May 2024)	**Alasan** Reason	**Keterangan** Information
Perseroan bermaksud untuk menggunakan keseluruhan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi dengan biaya emisi yang terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham untuk: The Company intends to use all funds obtained from the Initial Public Offering, after deducting the issuance costs related to the Initial Public Offering, for:	Perseroan bermaksud untuk menggunakan keseluruhan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi dengan biaya emisi yang terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham untuk: The Company intends to use all funds obtained from the Initial Public Offering, after deducting issuance costs related to the Initial Public Offering, to:	Dalam rangka mengoptimalkan bisnis Perseroan, dengan mempertimbangkan kondisi pasar properti yang lesu, dampak kondisi pandemi serta adanya rencana penggunaan modal kerja digunakan untuk mendanai proyek strategis nasional. In order to optimize the Company's business, taking into account the sluggish property market conditions, the impact of the pandemic and the plan to use working capital to fund national strategic projects.	Total Dana Hasil Penawaran Umum sebesar Rp832,880 Miliar, dengan Biaya Penawaran Umum sebesar Rp23,014 Miliar, maka Total Dana Bersih Penawaran Umum sebesar Rp809,866 Miliar. Total Funds from the Public Offering amounted to Rp832.880 billion, with Public Offering Costs amounting to Rp23.014 billion, the Total Net Funds from the Public Offering hence amounted to Rp809.866 billion.
a. Sekitar 73,89% akan digunakan untuk pengembangan usaha dengan rincian sebagai berikut: Around 73.89% will be used for business development with the following details:	a. Sekitar 55,56% akan digunakan untuk pengembangan usaha dengan rincian sebagai berikut: Around 55.56% will be used for business development with the following details:		Per saat ini, untuk kebutuhan dimaksud telah direalisasikan sebesar Rp343,966 Miliar atau sebesar 76,44%, yang terdiri dari: As of now, the amount of the needs in question has been realized at Rp343.966 billion or 76.44%, which consists of:
I Sekitar 50,80% akan digunakan untuk penyediaan ruang pada infrastruktur perkotaan, infrastruktur sosial dan bangunan kepariwisataan; Around 50.80% will be used for the provision of space in urban infrastructure, social infrastructure and tourism buildings;	I Sekitar 32,47% akan digunakan untuk penyediaan ruang pada infrastruktur perkotaan, infrastruktur sosial dan bangunan kepariwisataan; Around 32.47% will be used for the provision of space in urban infrastructure, social infrastructure and tourism buildings;		Penggunaan (I), untuk kebutuhan dimaksud telah direalisasikan sebesar Rp262,980 Miliar atau sebesar 100%. Use (I), for the intended needs has been realized at Rp262.980 billion or 100%.

PERUBAHAN KOMPOSISI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM TERAKHIR
CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE USE OF PROCEEDS FROM THE LAST PUBLIC OFFERING

Rencana Awal (RUPST 31 Maret 2020) Initial Plan (AGMS March 31, 2020)	Rencana Perubahan (RUPST 20 Mei 2024) Change Plan (AGMS 20 May 2024)	Alasan Reason	Keterangan Information
II Sekitar 13,09% akan digunakan untuk investasi berupa pengembangan entitas anak dan usaha konstruksi modular; dan Around 13.09% will be used for investment in the form of developing subsidiary entities and modular construction businesses; and	II Sekitar 13,09% akan digunakan untuk investasi berupa pengembangan entitas anak dan usaha konstruksi modular; dan Around 13.09% will be used for investment in the form of developing subsidiary entities and modular construction businesses; and		Penggunaan (II), hingga saat ini belum ada realisasi. Use (II), until present, there has been no realization.
III Sekitar 10,00% akan digunakan untuk investasi alat produksi konstruksi dan pengembangan sistem teknologi informasi. Approximately 10.00% will be used for investment in construction production equipment and development of information technology systems.	III Sekitar 10,00% akan digunakan untuk investasi alat produksi konstruksi dan pengembangan sistem teknologi informasi. Approximately 10.00% will be used for investment in construction production equipment and development of information technology systems.		Penggunaan (III), untuk kebutuhan dimaksud telah direalisasikan sebesar Rp80,987 Miliar atau sebesar 100%. Use (III), for the intended needs has been realized at Rp80.987 billion or 100%.
b. Sisanya sekitar 26,11% akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan. The remaining 26.11% will be used for the Company's working capital needs.	b. Sisanya sekitar 44,44% akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan. The remaining 44.44% will be used for the Company's working capital needs.		Modal Kerja, untuk kebutuhan dimaksud telah direalisasikan sebesar Rp211,456 Miliar atau sebesar 58,76%. Working Capital, for the intended needs has been realized at Rp211.456 billion or 58.76%.

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM HINGGA TAHUN 2024

No	Jenis Penawaran Umum Types of Public Offerings	Tanggal Efektif Effective Date	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum Realization Value of Public Offering Results			Rencana Penggunaan Dana Berdasarkan Perubahan pada RUPST Tahun Buku 2023 pada tanggal 20 Mei 2024 Plan for Use of Funds Based on Changes at the 2023 Fiscal Year GMS on May 20, 2024				
						Pengembangan Usaha Business Development			Modal Kerja Working capital	
			Jumlah Hasil Penawaran Umum Total Public Offering Proceeds	Biaya Penawaran Umum Public Offering Fees	Hasil Bersih Net Result	Penyediaan Ruang pada Infrastruktur Perkotaan, Infrastruktur Sosial, dan Bangunan Kepariwisataan Provision of Space in Urban Infrastructure, Social Infrastructure, and Tourism Buildings	Investasi berupa Pengembangan Entitas Anak dan Usaha Konstruksi Modular Investment in the form of Development of Subsidiary Entities and Modular Construction Business	Investasi Alat Produksi Konstruksi dan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Investment in Construction Production Equipment and Information Technology System Development		
						(32,47%)	(13,09%)	(10,00%)	(44,44%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Penawaran Umum Perdana Saham (IPO Saham) Initial Public Offering (IPO)	20 November 2017 November 20, 2017	832.880	23.014	809.866	262.980	106.011	80.987	359.888	

Hingga tahun 2024, realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan mencapai Rp703,854 miliar, dengan sisa dana yang belum digunakan sebesar Rp106,011 miliar. Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham sebagai bagian dari kewajiban yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

As of 2024, the realization of the use of funds from the Company's Initial Public Offering reached Rp703.854 billion, with remaining unused funds amounting to Rp106.011 billion. The Company has submitted a Report on the Realization of the Use of Funds from the Initial Public Offering as part of the obligations stipulated in the Financial Services Authority Regulation No. 30/POJK.04/2015 concerning the Report on the Realization of the Use of Funds from the Public Offering.

REPORT ON THE REALIZATION OF THE USE OF FUNDS FROM THE PUBLIC OFFERING UNTIL 2024

dalam Jutaan Rupiah | in Million Rupiah

	Realisasi Penggunaan Dana per tanggal 31 Desember 2024 Realization of Use of Funds as of December 31, 2024				**Total Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum** Total Use of Proceeds from Public Offering	**Sisa Dana Hasil Penawaran Umum** Remaining Funds from Public Offering
	Pengembangan Usaha Business Development			**Modal Kerja** **Working capital**		
	Penyediaan Ruang pada Infrastruktur Perkotaan, Infrastruktur Sosial, dan Bangunan Kepariwisataan Provision of Space in Urban Infrastructure, Social Infrastructure, and Tourism Buildings	**Investasi berupa Pengembangan Entitas Anak dan Usaha Konstruksi Modular** Investment in the form of Development of Subsidiary Entities and Modular Construction Business	**Investasi Alat Produksi Konstruksi dan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi** Investment in Construction Production Equipment and Information Technology System Development		**Total**	
					(11+12	**(6-15)**
	(32,47%)	**(0,00%)**	**(10,00%)**	**(44,44%)**	**+13+14)**	
	11	12	13	14	15	16
	262.980	0	80.987	359.888	703.854	106.011

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan Usaha, Akuisisi, dan/atau Restrukturisasi Utang/Modal

Material Information Regarding Investment, Expansion, Divestment, Business Merger, Acquisition, and/or Debt/Capital Restructuring

Sepanjang tahun 2024, Perseroan tidak melakukan investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan usaha, akuisisi, dan/atau restrukturisasi utang atau modal yang berdampak material terhadap kinerja keuangan dan operasional. Dengan demikian, tidak terdapat informasi yang perlu diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini.

Apabila terdapat informasi material atau kegiatan terkait, Perseroan akan mengungkapkannya sesuai dengan peraturan yang menjadi kewajiban Perseroan sebagai perusahaan publik.

Throughout 2024, the Company did not make any investments, expansions, divestments, mergers, acquisitions, and/or debt or capital restructuring that had a material impact on financial and operational performance. Accordingly, there is no information that requires to be disclosed in this Annual Report.

If there is material information or related activities, the Company will disclose it, in accordance with the regulations that are the Company's obligations as a public company.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Dengan Pihak Afiliasi/Pihak Berelasi

Material Information on Transactions that Contain Conflict of Interest and/or Transactions with Affiliated Parties/Related Parties

KEBIJAKAN MEKANISME REVIEW ATAS TRANSAKSI DAN PEMENUHAN PERATURAN SERTA KETENTUAN TERKAIT

Perseroan memastikan seluruh kegiatan transaksi yang dilakukan, telah melalui prosedur yang memadai dan telah sesuai dengan prinsip transaksi yang wajar (arm's length principle). Perseroan memiliki kebijakan terkait transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi/pihak berelasi. Dalam pelaksanaannya, Perseroan senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum serta mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, serta Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi.

Mekanisme review atas transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi dilakukan melalui proses audit oleh Komite Audit, yang hasilnya kemudian dilaporkan kepada Dewan Komisaris untuk memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Sepanjang tahun 2024, Perseroan tidak mengalami pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan transaksi

POLICY ON REVIEW MECHANISM FOR TRANSACTIONS AND COMPLIANCE WITH RELATED REGULATIONS AND PROVISIONS

The Company ensures that all transaction activities carried out have gone through adequate procedures and are in accordance with the arm's length principle. The Company has a policy regarding material transactions containing conflicts of interest and/or transactions with affiliated parties/related parties. In its implementation, the Company continuously applies the principle of prudence in accordance with generally accepted business practices and complies with Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions, Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities, and Financial Accounting Standards Statement (PSAK) No. 7 concerning Disclosure of Related Parties.

The review mechanism for material transactions containing conflicts of interest and/or transactions with affiliated parties is carried out through an audit process by the Audit Committee, the results of which are then reported to the Board of Commissioners to ensure transparency and compliance with prevailing regulations.

Throughout 2024, the Company did not experience any violations of laws and regulations related to material transactions containing

material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi.

KOMITMEN PERUSAHAAN ATAU MANAJEMEN ATAS TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Dalam pelaksanaan transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi, Direksi memastikan bahwa seluruh proses transaksi telah melalui prosedur yang memadai serta sesuai dengan prinsip transaksi yang wajar (arm's length principle).

Dewan Komisaris dan Komite Audit turut melakukan tinjauan (review) untuk memastikan bahwa transaksi tersebut dilaksanakan berdasarkan praktik bisnis yang berlaku umum, memenuhi prinsip transaksi yang wajar, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan merupakan bagian dari transaksi afiliasi atau transaksi material yang dilakukan Perseroan.

KEBIJAKAN TENTANG PIHAK AFILIASI/PIHAK BERELASI

Transaksi Perseroan yang tercatat pada tahun 2024 dilakukan wajar (*arm's length*) dan sesuai dengan persyaratan komersial normal. Transaksi Perseroan dilakukan atas dasar alasan kebutuhan Perseroan dan bebas dari konflik kepentingan.

Perseroan melakukan transaksi dengan pihak berelasi seperti yang diatur dalam PSAK No. 7 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi dan Peraturan Bapepam dan LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik", yang didefinisikan antara lain:

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Grup (entitas pelapor):

1. Orang atau anggota keluarga terdekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   b. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   c. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);

conflicts of interest and/or transactions with affiliated parties.

COMPANY OR MANAGEMENT COMMITMENT TO MATERIAL TRANSACTIONS CONTAINING CONFLICT OF INTEREST AND/OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATED PARTIES

In the implementation of material transactions containing conflicts of interest and/or transactions with affiliated parties, the Board of Directors ensures that the entire transaction process has gone through adequate procedures and is in accordance with the arm's length principle.

The Board of Commissioners and the Audit Committee also conduct reviews to ensure that the transactions are carried out based on generally accepted business practices, meet the arm's length principle, and are in accordance with prevailing regulations.

Business activities carried out in order to generate business revenue and are carried out routinely, repeatedly, and/or continuously are part of affiliated transactions or material transactions carried out by the Company.

POLICY ON AFFILIATE/RELATED PARTIES

The Company's transactions recorded in 2024 are conducted at arm's length and in accordance with normal commercial requirements. The Company's transactions are conducted based on the Company's needs and are free from conflicts of interest.

The Company conducted transactions with related parties as regulated in PSAK No. 7 concerning Disclosure of Related Parties and Bapepam and LK Regulation No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012 concerning "Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers or Public Companies", which are defined as follows:

Related parties are persons or entities related to the Group (reporting entity):

1. A person or their immediate family member has a relationship with the reporting entity if the person:
   a. Has control or joint control over the reporting entity;
   b. Has significant influence over the reporting entity; or
   c. Is a key management personnel of the reporting entity or the parent entity of the reporting entity.
2. An entity is related to the reporting entity if they meet one of the following:
   a. The entity and the reporting entity are members of the same group (meaning that the parent, subsidiary and subsequent subsidiary are related to each other);

b. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, dimana entitas lain tersebut adalah anggotanya
c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
d. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
e. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasikan dalam nomor (1);
g. Orang yang diidentifikasikan dalam nomor (1) (a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
h. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

b. One entity is an associate or joint venture of another entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
c. The two entities are joint ventures of the same third party;
d. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
e. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is the entity that administers the plan, the sponsoring entity is also related to the reporting entity;
f. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (1);
g. The person identified in (1) (a) has significant influence over the entity or the key management personnel of the entity (or a parent of the entity); or
h. The entity, or a member of a group of which the entity is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to a parent of the reporting entity.

Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah mengacu kepada pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan Pemegang Saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan yang relevan pada laporan keuangan konsolidasian.

A government-related entity is an entity that is controlled, jointly controlled, or influenced by a government. Government refers to governments, government agencies and similar organizations whether local, national or international.

A government-related entity may be an entity that is controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance which is the entity's shareholder, or an entity controlled by the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of State-Owned Enterprises as the shareholder's proxy.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to the consolidated financial statements.

NAMA DAN SIFAT HUBUNGAN PIHAK AFILIASI/PIHAK BERELASI

Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sesuai ketentuan yang berlaku serta prinsip keterbukaan informasi. Pengungkapan ini disampaikan untuk menunjukkan transparansi atas hubungan afiliasi yang dapat mempengaruhi posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

Adapun nama-nama, sifat hubungan dan jenis transaksi yang material dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut :

NAME AND NATURE OF RELATIONSHIP OF AFFILIATED PARTIES/RELATED PARTIES

The Company conducts transactions with related parties in accordance with prevailing provisions and the principle of information transparency. This disclosure is submitted to demonstrate transparency over affiliation that may affect the Company's financial position and results of operations.

The names, nature of the relationship and types of material transactions with related parties are as follows:

TABEL NAMA-NAMA PIHAK YANG BERELASI, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS TRANSAKSI

Pihak Yang Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Transaksi Transaction
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Entitas Berelasi dengan Pemerintah Government Related Entities	Kas dan Setara Kas, Piutang Usaha, Piutang Retensi, Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja, Pekerjaan dalam Proses, Utang Usaha, Pinjaman Bank, dan Pendapatan Cash and Cash Equivalents, Accounts Receivable, Retention Receivables, Gross Due to Clients, Work in Process, Accounts Payable, Bank Loans, and Revenue
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Entitas Berelasi dengan Pemerintah Government Related Entities	Kas dan Setara Kas, Pinjaman Bank dan Utang Usaha Cash and Cash Equivalents, Bank Loans and Accounts Payable
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Entitas Berelasi dengan Pemerintah Government Related Entities	Kas dan Setara Kas dan Utang Usaha Cash and Cash Equivalents and Accounts Payable
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Entitas Berelasi dengan Pemerintah Government Related Entities	Kas dan Setara Kas, Pinjaman Bank, dan Utang Usaha Cash and Cash Equivalents, Bank Loans, and Accounts Payable
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Entitas Berelasi dengan Pemerintah Government Related Entities	Kas dan Setara Kas, Pinjaman Bank dan Utang Usaha Cash and Cash Equivalents, Bank Loans and Accounts Payable
Koperasi Karyawan WIKA	Entitas Berelasi dengan Pemerintah Government Related Entities	Kas dan Setara Kas, Piutang Lain-lain, Utang Usaha dan Utang Lain-lain Cash and Cash Equivalents, Other Receivables, Accounts Payable and Other Payables
Koperasi Karyawan WEGE	Entitas Berelasi dengan Pemerintah Government Related Entities	Piutang Usaha, Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja dan Utang Usaha Accounts Receivable, Gross Due to Employers and Accounts Payable
PT Pertamina (Persero)	Entitas Berelasi dengan Pemerintah Government Related Entities	Piutang Retensi, Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja dan Pekerjaan dalam Proses Retention Receivables, Gross Receivables to Employers and Work in Progress
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	Entitas Berelasi dengan Pemerintah Government Related Entities	Piutang Usaha, Piutang Retensi, Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja, Pekerjaan dalam Proses dan Pendapatan Accounts Receivable, Retention Receivables, Gross Due to Clients, Work in Process and Revenue
PT Kereta Cepat Indonesia China	Kerja Sama Operasi Operational Cooperation	Piutang Usaha, Piutang Retensi, Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja dan Pendapatan Accounts Receivable, Retention Receivables, Gross Due to Employers and Revenue
PT Pertamina Bina Medika	Entitas Berelasi dengan Pemerintah Government Related Entities	Piutang Usaha, Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja dan Pendapatan Accounts Receivable, Gross Due to Employers and Revenue
PT Brantas Abiparaya (Persero)	Entitas Berelasi dengan Pemerintah Government Related Entities	Piutang Retensi, Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja, Pekerjaan dalam Proses dan Pendapatan Retention Receivables, Gross Bills Due to Employers, Work in Progress and Revenue
PT Angkasa Pura I	Entitas Berelasi dengan Pemerintah Government Related Entities	Piutang Usaha, Piutang Retensi, Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja, Pekerjaan dalam Proses dan Pendapatan Accounts Receivable, Retention Receivables, Gross Due to Clients, Work in Process and Revenue
Telkom Property (PT Graha Sarana Duta)	Entitas Berelasi dengan Pemerintah Government Related Entities	Pendapatan Revenue
PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi	Entitas Berelasi dengan Pemerintah Government Related Entities	Piutang Usaha Accounts receivable
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - Mahoni	Kerja Sama Operasi Operational Cooperation	Piutang Usaha, Piutang Retensi, Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja dan Piutang Lain-lain Accounts Receivable, Retention Receivables, Gross Receivables to Employers and Other Receivables
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Mutiara Masyhur Sejahtera	Kerja Sama Operasi Operational Cooperation	Piutang Usaha, Piutang Retensi, Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja, dan Piutang Lain-lain Accounts Receivable, Retention Receivables, Gross Receivables to Employers, and Other Receivables

Pihak Yang Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Transaksi Transaction
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Pemegang Saham Mayoritas Perseroan Majority Shareholders of the Company	Piutang Usaha, Piutang Retensi, Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja, Pekerjaan dalam Proses, Piutang Lain- lain, Utang Usaha, Utang Lain-lain dan Pendapatan Accounts Receivable, Retention Receivables, Gross Due to Clients, Work in Progress, Other Receivables, Accounts Payable, Other Payables and Revenue
PT Wijaya Karya Beton Tbk	Entitas Berelasi dengan Pemerintah Government Related Entities	Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja, Pekerjaan dalam Proses, Utang Usaha dan Pendapatan Gross Billings to Employers, Work in Progress, Accounts Payable and Revenue
PT Wijaya Karya Realty	Entitas Berelasi dengan Pemerintah Government Related Entities	Piutang Usaha, Piutang Retensi, Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja, Pekerjaan dalam Proses, Piutang Lain- lain dan Utang Usaha Accounts Receivable, Retention Receivables, Gross Due to Clients, Work in Progress, Other Receivables and Accounts Payable
PT Kurnia Realty Jaya	Entitas Asosiasi Associated Entities	Piutang Usaha, Piutang Retensi, dan Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja Accounts Receivable, Retention Receivables, and Gross Receivables to Employers
Kementerian BUMN	Entitas Berelasi dengan Pemerintah Government Related Entities	Pekerjaan dalam Proses Work in Progress
PT Biofarma (Persero)	Entitas Berelasi dengan Pemerintah Government Related Entities	Piutang Usaha, Piutang Retensi dan Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja Accounts Receivable, Retention Receivables and Gross Receivables to Employers
PT Patra Jasa	Entitas Berelasi dengan Pemerintah Government Related Entities	Piutang Usaha, Piutang Retensi, Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja, Piutang Lain-lain dan Pendapatan Accounts Receivable, Retention Receivables, Gross Receivables to Employers, Other Receivables and Revenue
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Entitas Berelasi dengan Pemerintah Government Related Entities	Piutang Usaha, Piutang Retensi, Pekerjaan dalam Proses dan Piutang Lain-lain Accounts Receivable, Retention Receivables, Work in Process and Other Receivables
KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Balai Pustaka (Persero)	Kerja Sama Operasi Operational Cooperation	Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja, Pekerjaan dalam Proses dan Piutang Lain-lain Gross Billings to Employers, Work in Progress and Other Receivables
PT Patra Wijaya Realtindo	Afiliasi Affiliation	Piutang Lain-lain Other receivables
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Jakarta Konsultindo	Kerja Sama Operasi Operational Cooperation	Piutang Lain-lain Other receivables
PT Wijaya Karya Industri Energi	Entitas Berelasi dengan Pemerintah Government Related Entities	Utang Usaha Accounts payable
PT Telkom Indonesia	Entitas Berelasi dengan Pemerintah Government Related Entities	Utang Usaha Accounts payable
PT PLN (Persero)	Entitas Berelasi dengan Pemerintah Government Related Entities	Utang Usaha Accounts payable
KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT PP (Persero) Tbk	Kerja Sama Operasi Operational Cooperation	Piutang Usaha, Piutang Retensi dan Pendapatan Accounts Receivable, Retention Receivables and Revenue
PT PP (Persero) Tbk	Entitas Berelasi dengan Pemerintah Government Related Entities	Piutang Usaha, Piutang Retensi, Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja, Piutang Lain-lain dan Pendapatan Accounts Receivable, Retention Receivables, Gross Receivables to Employers, Other Receivables and Revenue
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - Kahuripan Nirwana	Kerja Sama Operasi Operational Cooperation	Piutang Usaha, Piutang Retensi, Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja, Pekerjaan dalam Proses dan Pendapatan Accounts Receivable, Retention Receivables, Gross Due to Clients, Work in Process and Revenue

Pihak Yang Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Transaksi Transaction
KSO PT Wijaya Karya Pracetak Gedung – Hakaaston	Kerja Sama Operasi Operational Cooperation	Piutang Usaha dan Piutang Lain-lain Accounts Receivable and Other Receivables
KSO PT Wijaya Karya Pracetak Gedung - Bringin Karya Sejahtera	Kerja Sama Operasi Operational Cooperation	Piutang Usaha dan Piutang Lain-lain Accounts Receivable and Other Receivables
High Speed Railway Conctractor Consortium	Kerja Sama Operasi Operational Cooperation	Piutang Retensi, Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja, Pekerjaan dalam Proses dan Piutang Lain-lain Retention Receivables, Gross Receivables to Employers, Work in Progress and Other Receivables
KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - Chakra	Kerja Sama Operasi Operational Cooperation	Piutang Retensi Retention Receivables
PT Brantas Abipraya Beton	Entitas Berelasi dengan Pemerintah Government Related Entities	Piutang Retensi Retention Receivables
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Kerja Sama Operasi Operational Cooperation	Piutang Lain-lain Other receivables
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Jaya Konstruksi - PT PP (Persero) Tbk	Kerja Sama Operasi Operational Cooperation	Piutang Lain-lain dan Pendapatan Other Receivables and Revenue
PT Wijaya Karya Krakatau Beton	Entitas Berelasi dengan Pemerintah Government Related Entities	Utang Usaha Accounts payable
PT Waskita Beton Precast	Entitas Berelasi dengan Pemerintah Government Related Entities	Utang Usaha Accounts payable
PT Sarinah (Persero)	Entitas Berelasi dengan Pemerintah Government Related Entities	Utang Usaha Accounts payable
PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi	Entitas Berelasi dengan Pemerintah Government Related Entities	Utang Usaha Accounts payable
KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Kerja Sama Operasi Operational Cooperation	Pendapatan Revenue
PT Bank Mandiri Taspen	Entitas Berelasi dengan Pemerintah Government Related Entities	Kas dan Setara Kas dan Pendapatan Cash and Cash Equivalents and Revenue
KSO WIKA-Hutama-Adipatria	Kerja Sama Operasi Operational Cooperation	Pendapatan Revenue
KSO WIKA - Aneka Dharma Persada	Kerja Sama Operasi Operational Cooperation	Pendapatan Revenue
KSO WIKA - Hutama	Kerja Sama Operasi Operational Cooperation	Pendapatan Revenue
PT Telkom Akses	Entitas Berelasi dengan Pemerintah Government Related Entities	Pendapatan Revenue
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Kerja Sama Operasi Operational Cooperation	Piutang Lain-lain Other receivables
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Shimizu Corporation	Kerja Sama Operasi Operational Cooperation	Piutang Lain-lain Other receivables
PT Wijaya Karya Precast Gedung	Entitas Sepengendali	Piutang Lain-lain dan Utang Usaha Other Receivables and Accounts Payable

Pihak Yang Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Transaksi Transaction
PT Propernas Griya Utama	Entitas Berelasi dengan Pemerintah Government Related Entities	Utang Usaha Accounts payable
PT Bhirawa Steel	Entitas Berelasi dengan Pemerintah Government Related Entities	Utang Usaha Accounts payable
PT Varia Usaha Beton	Entitas Berelasi dengan Pemerintah Government Related Entities	Utang Usaha Accounts payable
PT Krakatau Perbengkelan dan Perawatan	Entitas Berelasi dengan Pemerintah Government Related Entities	Utang Usaha Accounts payable

SIFAT PIHAK AFILIASI/PIHAK BERELASI

Sifat dan jenis transaksi yang material dengan pihak-pihak yang berelasi adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Negara BUMN merupakan pemegang saham mayoritas PT Wijaya Karya (Persero) Tbk yang menjadi pemegang saham Perseroan. Oleh karena itu, secara tidak langsung Perseroan memiliki hubungan afiliasi melalui penyertaan modal pemerintah Republik Indonesia.
2. Perseroan menempatkan dana dan memiliki pinjaman dana pada bank-bank BUMN dengan persyaratan dan tingkat bunga normal sebagaimana yang berlaku untuk nasabah pihak ketiga.
3. Perseroan mengadakan perjanjian dalam rangka usaha Perusahaan dengan BUMN lain maupun entitas anak serta badan dan institusi pemerintah yang berwenang.

NATURE OF AFFILIATED PARTIES/RELATED PARTIES

The nature and type of material transactions with related parties are as follows:

1. The Government of the Republic of Indonesia represented by the Minister of State-Owned Enterprises is the majority shareholder of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk which is the shareholder of the Company. Therefore, indirectly the Company has an affiliated relationship through the capital participation of the government of the Republic of Indonesia.
2. The Company places funds and has loans in state-owned banks with normal terms and interest rates as applicable to third party customers.
3. The Company enters into agreements in the framework of the Company's business with other state-owned enterprises or subsidiaries as well as authorized government agencies and institutions.

REALISASI TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Perseroan melakukan transaksi dengan pihak berelasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun kegiatan transaksi berelasi yang dilakukan Perseroan pada tahun 2023 dan 2024 disajikan dalam tabel berikut:

REALIZATION OF RELATED PARTY TRANSACTIONS

The Company conducts transactions with related parties in accordance with prevailing provisions. The related party transaction activities carried out by the Company in 2023 and 2024 are presented in the following table:

Tabel Realisasi Transaksi Pihak Berelasi Aset dan Liabilitas 2023-2024
Table of Realization of Related Party Transactions of Assets and Liabilities 2023-2024

Jenis Transaksi Type of Transaction	2024		2023		Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease		
	Nominal (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	Persentase terhadap Total Aset/Liabilitas Percentage to Total Assets/Liabilities (%)	Nominal (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	Persentase terhadap Total Aset/Liabilitas Percentage to Total Assets/Liabilities (%)	Nominal (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	Persentase Percentage (%)	
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	1.016,50	17,75%	934,66	16,81%	81,85	0,94%	▲
Piutang Usaha Trade Receivables	263,20	4,60%	370,62	6,66%	(107,42)	-2,06%	▼
Piutang Retensi Retention Receivables	161,71	2,82%	146,88	2,64%	14,83	0,18%	▲

Tabel Realisasi Transaksi Pihak Berelasi Aset dan Liabilitas 2023-2024
Table of Realization of Related Party Transactions of Assets and Liabilities 2023-2024

Jenis Transaksi Type of Transaction	2024		2023		Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease		
	Nominal (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	Persentase terhadap Total Aset/Liabilitas Percentage to Total Assets/Liabilities (%)	Nominal (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	Persentase terhadap Total Aset/Liabilitas Percentage to Total Assets/Liabilities (%)	Nominal (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	Persentase Percentage (%)	
Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja Gross Amount Due from Customers	195,12	3,41%	236,86	4,26%	(41,74)	-0,85%	▼
Pekerjaan dalam Proses Konstruksi Construction Work in Progress	374,78	6,54%	312,03	5,61%	62,74	0,93%	▲
Piutang Lain-lain Other Receivables	165,41	2,89%	140,61	2,52%	24,80	0,37%	▲
Utang Bank Jangka Pendek Short Term Bank Loans	350,00	11,21%	103,00	3,43%	247,00	7,78%	▲
Utang Usaha Trade Payables	473,87	2,57%	608,41	9,62%	(134,54)	-7,05%	▼
Uang Muka Pemberi Kerja dan Konsumen Advances From Projects and Consumers	93,07	2,99%	101,69	3,38%	(8,63)	-0,39%	▼
Utang Lain-lain Other Payables	36,90	1,18%	34,89	1,16%	2,01	0,02%	▲
Bagian Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun Long-term Payables Current Maturity Portion	9,42	0,30%	8,94	0,30%	0,48	0,00%	▲
Bagian Liabilitas Jangka Panjang Long-term Payables	75,65	2,42%	85,06	2,83%	(9,42)	-0,41%	▼

Tabel Realisasi Transaksi Pihak Berelasi Pendapatan 2023-2024
Table of Realization of Related Party Transactions Revenue 2023-2024

Jenis Transaksi Type of Transaction	2024		2023		Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease		
	Nominal (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	Persentase terhadap Total Aset/Liabilitas Percentage to Total Assets/Liabilities (%)	Nominal (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	Persentase terhadap Total Aset/Liabilitas Percentage to Total Assets/Liabilities (%)	Nominal (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	Persentase Percentage (%)	
Pendapatan Revenue	641,97	17,48%	715,62	17,97%	(73,65)	-0,49%	▼

INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI PIHAK AFILIASI

Pelaksanaan transaksi dengan pihak afiliasi oleh Perseroan telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. Adapun transaksi afiliasi yang dilakukan Perseroan sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

INFORMATION REGARDING AFFILIATED PARTIES TRANSACTIONS

The implementation of transactions with affiliated parties by the Company has complied with the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions. The affiliated transactions carried out by the Company throughout 2024 are as follows:

Informasi Mengenai Transaksi Pihak Afiliasi

No	Tanggal Date	Jenis Transaksi Afiliasi Type of Affiliated Transaction	Pihak yang Bertransaksi Transacting Parties	Sifat Hubungan Afiliasi Nature of Affiliated Relationships
1	27 Maret 2024 March 27, 2024	Transaksi afiliasi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk dalam rangka pemberian pinjaman Pemegang Saham kepada PT Wijaya Karya Pracetak Gedung. Affiliated transactions of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk in the context of providing loans from Shareholders to PT Wijaya Karya Pracetak Gedung.	1. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk 2. PT Wijaya Karya Pracetak Gedung	Pihak yang melakukan transaksi terdapat hubungan afiliasi, yaitu Perseroan merupakan salah satu pemegang saham di PT Wijaya Karya Pracetak Gedung dengan kepemilikan sebesar 49%. Selain itu, terdapat hubungan afiliasi dari segi kepengurusan yaitu bapak Akhmadi Tricahyono sebagai Direktur Perseroan juga sebagai Komisaris PT Wijaya Karya Pracetak Gedung. The parties conducting the transaction have an affiliated relationship, namely the Company is one of the shareholders in PT Wijaya Karya Pracetak Gedung with ownership of 49%. In addition, there is an affiliated relationship in terms of management, namely Mr. Akhmadi Tricahyono as Director of the Company and also as Commissioner of PT Wijaya Karya Pracetak Gedung.
2	3 April 2024 April 3, 2024	Transaksi afiliasi peningkatan modal ditempatkan dan disetor pada PT Wijaya Karya Bitumen. Affiliated transactions to increase issued and paid-up capital at PT Wijaya Karya Bitumen.	1. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk 2. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 3. PT Wijaya Karya Bitumen	Pihak yang melakukan transaksi terdapat hubungan afiliasi, yaitu antara Perseroan, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya Bitumen. Perseroan dan PT Wijaya Karya Bitumen yang keduanya sama-sama dikendalikan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebagai pemegang saham mayoritas. Dengan demikian, antara Perseroan dan PT Wijaya Karya Bitumen memiliki hubungan afiliasi secara langsung yang dikendalikan oleh pemegang saham utama yang sama dalam hal ini PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. The parties conducting the transaction have an affiliate relationship, namely between the Company, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk and PT Wijaya Karya Bitumen. The Company and PT Wijaya Karya Bitumen are both controlled by PT Wijaya Karya (Persero) Tbk as the majority shareholder. Hence, between the Company and PT Wijaya Karya Bitumen there is a direct affiliated relationship controlled by the same major shareholder, it is PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Information Regarding Affiliate Transactions

	Nilai Transaksi (Rp) Value of Transaction (Rp)	Penjelasan Mengenai Kewajaran Transaksi Explanation of Transaction Fairness
	Nilai transaksi pinjaman pemegang saham (*shareholder loan*) oleh Perseroan kepada PT Wijaya Karya Pracetak Gedung sebesar Rp36.750.000.000. The value of the shareholder loan transaction by the Company to PT Wijaya Karya Pracetak Gedung is Rp36,750,000,000.	Transaksi afiliasi ini dinyatakan wajar berdasarkan hasil laporan pendapat kewajaran dari Kantor Jasa Penilaian Publik Iskandar dan Rekan sebagaimana dalam laporan No. 00444/2.0118-00/BS/03/0596/1/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023. Transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020. This affiliated transaction is declared fair based on the results of the fairness opinion report from the Iskandar and Rekan Public Assessment Services Office as stated in report No. 00444/2.0118-00/BS/03/0596/1/XII/2023 dated December 12, 2023. This transaction does not contain a conflict of interest as referred to in OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020.
	PT Wijaya Karya Bitumen melakukan peningkatan modal melalui pengeluaran saham dalam simpanan sebanyak-banyaknya sejumlah 101.010 saham atau senilai Rp101.010.101.010 dengan harga nominal saham sebesar Rp1.000.000, dimana porsi saham yang ditawarkan kepada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebesar 100.000 saham dan Perseroan sebesar 1.010 saham. PT Wijaya Karya Bitumen increases its capital by issuing shares in reserves of up to 101,010 shares or worth Rp101,010,101,010 with a nominal share price of Rp1,000,000, where the portion of shares offered to PT Wijaya Karya (Persero) Tbk is 100,000 shares and the Company is 1,010 shares. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham sebanyak 157.862 saham (99,00%) telah menyatakan menerima Hak untuk membeli saham atas bagian saham dalam simpanan sejumlah 100.000 saham, sedangkan Perseroan selaku Pemegang Saham sebanyak 1.594 saham (1,00%) telah menyatakan tidak mengambil Hak untuk membeli saham (*Pre-emptive Rights*) sejumlah 1.010 saham, maka dengan ini jumlah modal disetor yang diterima sebagai peningkatan modal ditempatkan dan disetor adalah sebesar Rp100.000.000.000. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk as the Shareholder of 157,862 shares (99.00%) has stated that it has received the Right to purchase shares for the portion of shares in the deposit of 100,000 shares, while the Company as the Shareholder of 1,594 shares (1.00%) has stated that it does not take the Right to purchase shares (Pre-emptive Rights) of 1,010 shares, therefore the amount of paid-up capital received as an increase in issued and paid-up capital is Rp100,000,000,000. Dengan demikian, terjadi peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari semula 159.456 saham atau senilai Rp159.456.000.000 menjadi 259.456 saham atau senilai Rp259.456.000.000, dengan porsi kepemilikan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk menjadi 257.862 saham atau senilai Rp257.862.000.000 atau mewakili 99,39% dari seluruh saham yang dikeluarkan PT Wijaya Karya Bitumen, sedangkan porsi kepemilikan Perseroan tetap menjadi 1.594 saham atau senilai Rp1.594.000.000 namun terdilusi menjadi 0,61% mewakili dari seluruh saham yang dikeluarkan PT Wijaya Karya Bitumen. Therefore, there was an increase in issued and paid-up capital from the original 159,456 shares or worth Rp159,456,000,000 to 259,456 shares or worth Rp259,456,000,000, with the ownership portion of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk becoming 257,862 shares or worth Rp257,862,000,000 or representing 99.39% of all shares issued by PT Wijaya Karya Bitumen, while the Company's ownership portion remained at 1,594 shares or worth Rp1,594,000,000 but was diluted to 0.61% representing all shares issued by PT Wijaya Karya Bitumen.	Transaksi afiliasi ini termasuk transaksi yang dikecualikan dari Ketentuan Pasal 6 POJK No. 42/POJK.04/2020 karena tidak wajib melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 POJK No. 42/POJK.04/2020. Transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020. This affiliated transaction is a transaction that is exempted from the Provisions of Article 6 of POJK No. 42/POJK.04/2020 because it is not required to carry out the procedures as referred to in Article 3 of POJK No. 42/POJK.04/2020. This transaction does not contain a conflict of interest as referred to in OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020.

INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI MATERIAL

Transaksi material yang dilakukan oleh Perseroan telah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat kegiatan transaksi material yang dilakukan oleh Perseroan.

INFORMATION REGARDING MATERIAL TRANSACTIONS

Material transactions conducted by the Company are in accordance with the provisions set out in the Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities. Throughout 2024, there were no material transaction activities conducted by the Company.

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perusahaan

Changes in Legislation that Have A Significant Impact on the Company

Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan tidak menyajikan informasi terkait peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan serta dampaknya terhadap kinerja dan operasional Perseroan.

Throughout 2024, there were no changes in laws and regulations that had a significant impact on the Company. Therefore, the Company does not present information related to changes in laws and regulations and their impact on the Company's performance and operations.

Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya Terhadap Perusahaan

Changes in Accounting Policies and Their Impact on The Company

Pada tahun 2024, Perseroan telah menyusun kebijakan akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) dan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2024.

Hingga 31 Desember 2024, tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang berdampak terhadap laporan keuangan Perseroan.

In 2024, the Company has prepared accounting policies in accord with Financial Accounting Standards (SAK) issued by the Financial Accounting Standards Board - Indonesian Institute of Accountants (DSAK-IAI) and is effective for the fiscal year starting from January 1, 2024 to December 31, 2024.

As of December 31, 2024, there are no amendments in accounting policies that have an impact on the Company's financial statements.

Dampak Perubahan Harga yang Berpengaruh terhadap Pendapatan dan Kinerja Keuangan Perusahaan

The Impact of Price Changes that Affect the Company's Revenue and Financial PerformancE

Pada tahun 2024, terjadi kenaikan harga beberapa material utama dalam industri konstruksi di Indonesia, seperti semen, pasir, besi beton, baja, dan material lainnya, yang berdampak pada beban pokok pendapatan Perseroan. Fluktuasi harga ini dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, termasuk dinamika pasar global, biaya produksi, serta kebijakan perdagangan.

Untuk mengurangi dampak fluktuasi harga material, Perseroan secara aktif memantau pergerakan harga, menyesuaikan strategi pengadaan, dan mengoptimalkan efisiensi anggaran proyek. Langkah-langkah tersebut diambil guna menjaga stabilitas pendapatan dan kinerja keuangan Perseroan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, informasi mengenai dampak perubahan harga terhadap pendapatan dan kinerja keuangan Perseroan disampaikan dalam Laporan Tahunan ini.

In 2024, there was an increase in the prices of several main materials in the construction industry in Indonesia, such as cement, sand, reinforced concrete, steel, and other materials, which had an impact on the Company's cost of revenue. These price fluctuations were influenced by various external factors, including global market dynamics, production costs, and trade policies.

To reduce the impact of material price fluctuations, the Company actively monitors price movements, adjusts procurement strategies, and optimizes project budget efficiency. These steps were taken to maintain the stability of the Company's revenue and financial performance on an ongoing basis. Therefore, information regarding the impact of price changes on the Company's revenue and financial performance is presented in this Annual Report.

Informasi Tentang Dampak Nilai Tukar Mata Uang Asing

Information on the Impact of Foreign Exchange Rates

Perseroan tidak memiliki transaksi dalam mata uang asing dalam kegiatan operasional dan bisnisnya. Dengan demikian, fluktuasi nilai tukar tidak memiliki dampak material terhadap posisi keuangan maupun kinerja Perseroan. Jika terdapat perubahan dalam kebijakan atau eksposur terhadap mata uang asing di masa mendatang, Perseroan akan menerapkan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan sesuai dengan kebijakan manajemen risiko yang berlaku.

The Company does not have any foreign currency transactions in its operational and business activities. Accordingly, exchange rate fluctuations do not have a material impact on the Company's financial position or performance. If there is a change in policy or exposure to foreign currencies in the future, the Company will implement the necessary mitigation measures in accordance with the prevailing risk management policy.

Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian yang Bersifat Luar Biasa

Financial Information Containing Extraordinary Events

Perseroan menyatakan bahwa sepanjang tahun 2024 tidak terdapat informasi keuangan yang mengandung kejadian luar biasa.

The Company stated that throughout 2024 there was no financial information containing extraordinary events.

Kontribusi Pajak Terhadap Negara

Tax Contribution To The State

Sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan nasional, Perseroan tidak hanya berperan melalui aktivitas bisnis utama di sektor konstruksi bangunan gedung, tetapi juga melalui pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai bentuk tanggung jawab kepada negara. Kontribusi pajak ini mencerminkan komitmen Perseroan dalam mendukung pendapatan negara yang digunakan untuk berbagai program dan kebutuhan pembangunan nasional. Rincian pembayaran pajak yang telah dilakukan Perseroan dalam tiga tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut:

As part of our contribution to national development, the Company does not merely play a role through its main business activities in the building construction sector, but also through the fulfilment of tax obligations as a form of responsibility to the state. The tax contribution reflects the Company's commitment to supporting state revenues used for various national development programs and needs. Details of tax payments made by the Company in the last three years are presented in the following table:

Dinyatakan dalam Rupiah | Stated in Rupiah

Uraian Description	2024	2023	2022
PPH 21	61.596.223.862	49.226.109.016	45.630.371.938
PPH 23	5.111.867.620	5.594.452.798	4.936.471.694
PPH 42	25.907.758.499	25.702.144.410	14.980.684.907
PPNK	352.376.968.386	325.419.065.985	275.139.567.678
PB1	4.134.021.797	2.917.816.649	2.366.834.530
Jumlah Pajak yang Dibayarkan Amount of Tax Paid	444.992.818.367	408.859.588.858	343.053.930.747



Kantin Modular UNPAR

Aspek Pemasaran
Marketing Aspect

STRATEGI PEMASARAN

Untuk menjaga keberlanjutan usaha dan memperkuat posisi Perseroan di industri, strategi pemasaran menjadi aspek fundamental dalam menetapkan langkah-langkah strategis yang akan diimplementasikan. Perseroan tetap berfokus pada bisnis utama di sektor konstruksi bangunan gedung, dengan didukung oleh segmen konstruksi offsite melalui bisnis modular dan pracetak, serta investasi dan konsesi.

Adapun strategi utama Perseroan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
1. Ekspansi ke segmen pasar premium.
2. Fokus pada pasar BUMN, Pemerintah, dan segmen swasta yang selektif, serta BOT & BLT captive market.
3. Pengembangan konstruksi offsite, terutama untuk bisnis modular.
4. Peningkatan digitalisasi dan efisiensi operasional.
5. Penerapan prinsip keberlanjutan dalam operasional bisnis.

Selain itu, Perseroan senantiasa mengutamakan *repeat order* dari pelanggan eksisting dengan tetap memberikan layanan prima kepada pelanggan baru. Kepuasan pelanggan dicapai melalui penyediaan layanan bernilai tambah yang berorientasi pada kualitas dan efisiensi.

Perseroan menyadari bahwa tingginya permintaan pasar diikuti dengan meningkatnya persaingan, terutama dalam aspek harga yang semakin kompetitif. Namun, sebagai entitas yang berorientasi pada kepuasan pelanggan, Perseroan tetap menjadikan kualitas pekerjaan sebagai prioritas utama dalam setiap proyek yang dikerjakan.

PANGSA PASAR

Pangsa pasar Perseroan pada tahun 2024 mencerminkan capaian kontrak. Sepanjang tahun 2024, Perseroan memperoleh 33 proyek baru dengan total nilai Rp2,72 triliun. Dengan tambahan kontrak tersebut, total kontrak dihadapi atas keseluruhan proyek yang dimiliki Perseroan mencapai Rp9,01 triliun.

Kontrak baru yang diperoleh pada tahun 2024 mencapai Rp2,72 triliun, terdiri dari proyek konstruksi senilai Rp2,10 triliun dan proyek modular senilai Rp613,19 miliar. Mayoritas kontrak baru berasal dari proyek Pemerintah dengan nilai Rp1,68 triliun, diikuti oleh proyek BUMN sebesar Rp597,88 miliar, dan proyek swasta sebesar Rp437,89 miliar. Dari sisi jenis proyek, mayoritas berasal dari fasilitas publik senilai Rp1,20 triliun, diikuti oleh perkantoran sebesar Rp817,68 miliar, dan residensial sebesar Rp702,53 miliar.

Capaian ini mencerminkan tingkat kepercayaan pasar yang tinggi terhadap kompetensi Perseroan dalam industri konstruksi bangunan gedung di tengah dinamika dan persaingan industri konstruksi.

MARKETING STRATEGY

In order to maintain business sustainability and strengthen the Company's position in the industry, marketing strategy is a fundamental aspect in stipulating the strategic steps to be implemented. The Company remains focused on its core business in the building construction sector, supported by the offsite construction segment through modular and precast businesses, as well as investment and concessions.

The Company's main strategies in 2024 are as follows:

1. Expansion into the premium market segment.
2. Focus on the BUMN, Government, and selective private segment markets, as well as the BOT & BLT captive market.
3. Development of offsite construction, especially for the modular business.
4. Increasing digitalization and operational efficiency.
5. Implementation of sustainability principles in business operations.

Furthermore, the Company continuously prioritizes repeat orders from the existing customers while continuing to provide excellent service to new customers. Customer satisfaction is achieved through the provision of value-added services that are oriented towards quality and efficiency.

The Company is aware that high market demand is followed by increasing competition, especially in terms of increasingly competitive prices. However, as an entity that is oriented towards customer satisfaction, the Company continues to make work quality a top priority in every project undertaken.

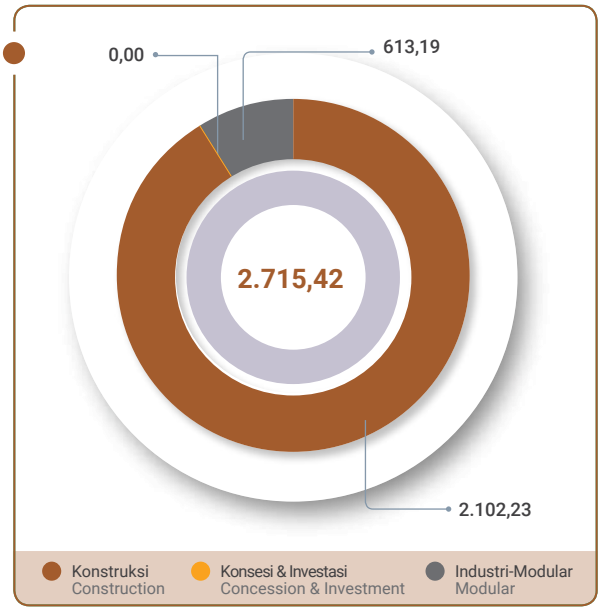
MARKET SEGMENT

The Company's market segment in 2024 reflects contract achievements. Throughout 2024, the Company attained 33 new projects with a total value of Rp2.72 trillion. With the additional contracts, the total order book for all projects owned by the Company reached Rp9.01 trillion.

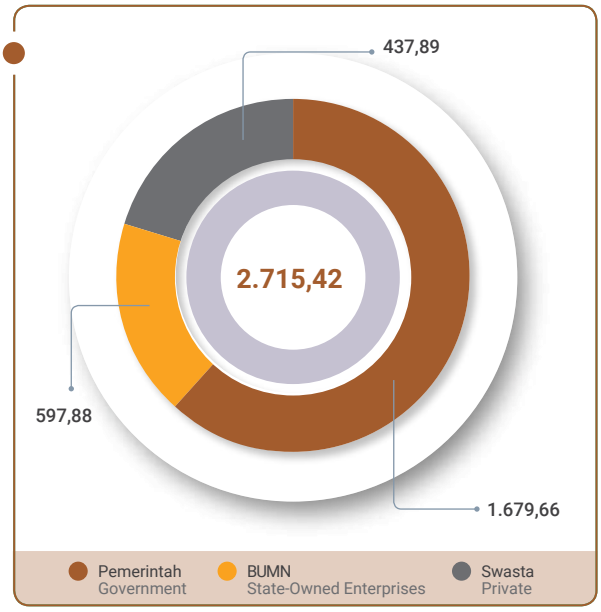
New contracts achieved in 2024 has reached Rp2.72 trillion, consisting of construction projects worth Rp2.10 trillion and modular projects worth Rp613.19 billion. The majority of new contracts derives from government projects with a value of Rp1.68 trillion, followed by state-owned enterprise projects of Rp597.88 billion, and private projects of Rp437.89 billion.In terms of project types, the majority came from public facilities worth Rp1.20 trillion, followed by offices of Rp817.68 billion, and residential of Rp702.53 billion.

This achievement reflects the high level of market confidence in the Company's competence in the building construction industry amidst the dynamics and competition of the construction industry.

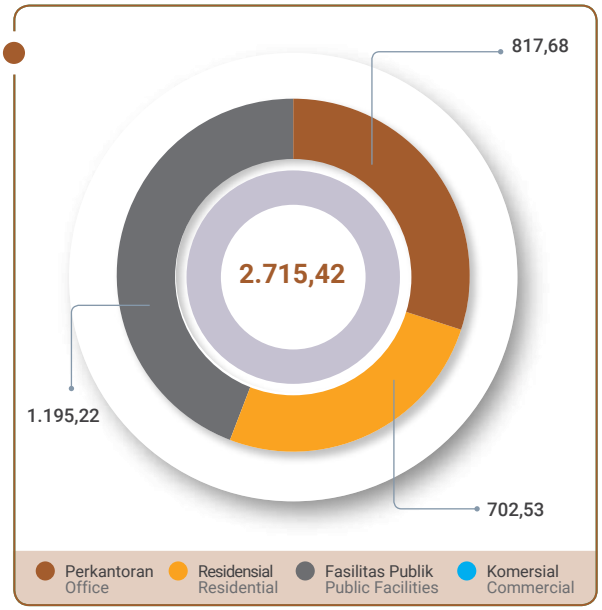
Kontrak Baru Berdasarkan Lini Bisnis (Rp-miliar)
New Contracts by Business Line (Rp-billion)



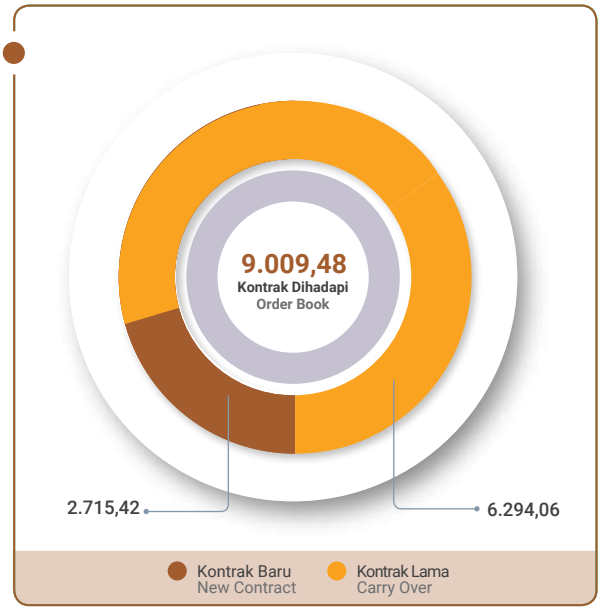
Kontrak Baru Berdasarkan Pemberi Kerja (Owner) (Rp-miliar)
New Contracts by Employer (Owner) (Rp-billion)



Kontrak Baru Berdasarkan Jenis Proyek (Rp-miliar)
New Contracts by Project Type (Rp-billion)



Pencapaian Kontrak Tahun 2024 (Rp-miliar)
Contract Achievement 2024 (Rp-billion)



Perbandingan antara Target dan Realisasi Serta Proyeksi untuk 1 (Satu) Tahun ke Depan

Comparison Between Targets and Realizations and Projections for the Next 1 (One) Year

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) merupakan acuan utama dalam pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sepanjang tahun berjalan. RKAP ini merupakan bentuk implementasi dan penjabaran dari Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).

Dalam RKAP Tahun 2024, Perseroan telah menetapkan sejumlah target yang dirancang dengan mempertimbangkan dinamika kondisi industri dan ekonomi terkini. Berikut ini disajikan perbandingan antara target yang telah ditetapkan dalam RKAP Tahun 2024 dengan capaian realisasi kinerja Perseroan pada tahun buku 2024.

COMPARISON BETWEEN TARGET AND REALIZATION

The Company's Work Plan and Budget (RKAP) is the main reference in implementing the Company's business activities throughout the year. This RKAP is a form of implementation and elaboration of the Company's Long-Term Plan (RJPP).

In the 2024 RKAP, the Company has set a number of targets designed by considering the dynamics of current industrial and economic conditions. The following is a comparison between the targets set in the 2024 RKAP and the Company's performance achievements in the 2024 fiscal year.

(Dinyatakan dalam Miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain | Expressed in Billions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	**Realisasi 2024** Realization 2024	**Target 2024** Target 2024	Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2024 (%) Achievement of Realization to the 2024 Target (%)	
Kontrak Baru/Pemasaran New Contract/Marketing	2.715,42	5.071,99	53,54%	▼
Kontrak Lama Carry Over	6.294,06	8.352,85	75,35%	▼
Kontrak Dihadapi Order Book	9.009,48	13.424,83	67,11%	▼
Total Pendapatan Total Revenue	5.104,87	4.445,61	114,83%	▲
Pendapatan Bersih/Pendapatan Non JO (Joint Operation) Net Revenue/Revenue Non JO (Joint Operation)	3.673,53	3.629,96	101,20%	▲
Laba Bersih Net Profit	67,96	89,13	76,25%	▼
Jumlah Aset Total Assets	5.727,27	5.680,55	100,82%	▲
Struktur Modal Capital Structure				
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	2.515,36	2.067,58	121,66%	▲
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	605,95	957,61	63,28%	▼
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	3.121,30	3.025,19	103,18%	▲
Jumlah Ekuitas Total Equity	2.605,97	2.655,36	98,14%	▼
Belanja Modal Capital Expenditure (Capex)	6,50	254,71	2,55%	▼
Kebijakan Dividen Dividend Policy	20%	Max 30% dari Net Profit	-	-
SDM-Skor Keterlibatan Karyawan HC-Employee Engagement Score	73%	78%	93,59%	▼

Kontrak Baru/Pemasaran

Di tahun 2024, Perseroan berhasil mencatatkan perolehan kontrak baru dari aktivitas pemasaran sebesar Rp2.715,42 miliar atau mencapai 53,54% terhadap target sebesar Rp5.071,99 miliar. Mayoritas pencapaian kontrak baru berasal dari segmen jasa konstruksi serta proyek Pemerintah. Penurunan ini disebabkan oleh faktor ekonomi makro, seperti dampak pemilu, serta kebijakan Perseroan yang lebih selektif dalam memperoleh proyek.

Kontrak Dihadapi

Di tahun 2024, Perseroan berhasil mencatatkan perolehan kontrak dihadapi sebesar Rp9.009,48 miliar atau mencapai 67,11% terhadap target sebesar Rp13.424,83 miliar. Kontrak dihadapi terdiri dari kontrak baru sebesar Rp2.715,42 miliar dan kontrak lama sebesar Rp6.294,06 miliar. Besaran kontrak lama berasal dari perolehan proyek di tahun sebelumnya. Penurunan kontrak dihadapi disebabkan oleh penurunan perolehan kontrak baru, serta terdapat beberapa proyek berjalan segmen jasa konstruksi yang telah selesai pada tahun 2024.

Pendapatan Bersih/Pendapatan Non JO (*Joint Operation*)

Di tahun 2024, Perseroan berhasil mencatatkan pendapatan bersih sebesar Rp3.673,53 miliar atau mencapai 101,20% terhadap target sebesar Rp3.629,96 miliar. Pencapaian melebihi target ini disebabkan oleh selesainya beberapa proyek berjalan, serta meningkatnya perolehan kontrak baru segmen modular.

Laba Bersih

Di tahun 2024, Perseroan berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp67,96 miliar atau mencapai 76,25% terhadap target sebesar Rp89,13 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya perolehan kontrak baru segmen jasa konstruksi, serta meningkatnya beban usaha Perseroan untuk aktivitas operasional. Apabila dibandingkan dengan realisasi laba bersih tahun 2023, tumbuh 46,14% yang disebabkan oleh kenaikan bagian laba ventura bersama, pendapatan lainnya serta penurunan rugi entitas asosiasi.

Jumlah Aset

Di tahun 2024, Perseroan berhasil membukukan jumlah aset sebesar Rp5.727,27 miliar atau mencapai 100,82% terhadap target sebesar Rp5.680,55 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya aset lancar Perseroan.

Jumlah Liabilitas

Di tahun 2024, Perseroan berhasil membukukan jumlah liabilitas sebesar Rp3.121,30 miliar atau mencapai 103,18% terhadap target sebesar Rp3.025,19 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya liabilitas jangka pendek pada pinjaman bank jangka pendek dan utang usaha.

New Contracts/Marketing

In 2024, the Company successfully recorded new contracts from marketing activities amounting to Rp2,715.42 billion or reaching 53.54% of the target of Rp5,071.99 billion. The majority of new contract achievements came from the construction services segment and government projects. This decline was due to macroeconomic factors, such as the impact of the election, as well as the Company's more selective policy in obtaining projects.

Order Book

In 2024, the Company successfully recorded the acquisition of order book of Rp9,009.48 billion or reaching 67.11% of the target of Rp13,424.83 billion. Order book consists of new contracts of Rp2,715.42 billion and carry over of Rp6,294.06 billion. The amount of carry over comes from project acquisitions in the previous year. The decrease in order book was due to a decrease in the acquisition of new contracts, as well as several ongoing projects in the construction services segment that were completed in 2024.

Net Revenue/Non JO (Joint Operation) Revenue

In 2024, the Company successfully recorded net revenue of Rp3,673.53 billion or reached 101.20% of the target of Rp3,629.96 billion. This achievement exceeded the target due to the completion of several ongoing projects, as well as the increase in the acquisition of new contracts in the modular segment.

Net Profit

In 2024, the Company managed to record a net profit of Rp67.96 billion or reaching 76.25% of the target of Rp89.13 billion. This decrease was mainly due to a decrease in the acquisition of new contracts in the construction services segment, as well as an increase in the Company's operating expenses for operational activities. When compared to the realization of net profit in 2023, it grew by 46.14% due to an increase in the portion of joint venture profits, other income and a decrease in losses of associated entities.

Total Assets

In 2024, the Company successfully recorded total assets of Rp5,727.27 billion or reaching 100.82% of the target of Rp5,680.55 billion. This increase was mainly due to the increase in the Company's current assets.

Total Liabilities

In 2024, the Company successfully recorded total liabilities of Rp3,121.30 billion or reaching 103.18% of the target of Rp3,025.19 billion. This increase was mainly due to the increase in current liabilities in short-term bank loans and trade payables.

Jumlah Ekuitas

Di tahun 2024, Perseroan berhasil membukukan jumlah ekuitas sebesar Rp2.605,97 miliar atau mencapai 98,14% terhadap target sebesar Rp2.655,36 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pencapaian laba bersih Perseroan.

Belanja Modal

Di tahun 2024, Perseroan telah merealisasikan belanja modal sebesar Rp6,50 miliar atau mencapai 2,55% terhadap total anggaran sebesar Rp254,71 miliar. Realisasi anggaran belanja modal digunakan untuk investasi pada program transformasi digital dan *net zero emission.*

Kebijakan Dividen

Di tahun 2024, Perseroan membagikan dividen payout ratio sebesar 20% dari laba bersih untuk tahun buku 2023. Kebijakan pembagian dividen maksimal sebesar-besarnya 30% dari laba bersih Perseroan, dengan mempertimbangkan kondisi Perseroan dan sesuai peraturan yang berlaku.

Human Capital-Employee Engagement

Di tahun 2024, hasil survei keterlibatan karyawan (*employee engagement*) Perseroan mencapai skor 73% dari target 78%. Hasil penilaian ini dinilai "*Engaged*" terhadap karyawan Perseroan, serta menjadi landasan dalam menyusun kebijakan strategis yang berorientasi pada peningkatan keterlibatan dan produktivitas karyawan, sekaligus memperkuat daya saing Perseroan di masa depan.

PROYEKSI UNTUK 1 (SATU) TAHUN KE DEPAN

Dalam rangka mencapai sasaran jangka pendek yang sejalan dengan Rencana Jangka Panjang (RJP), Perseroan telah menetapkan target operasional dan keuangan secara terperinci dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025. RKAP disusun secara komprehensif dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi global dan nasional, dinamika industri, isu-isu strategis, serta arah dan prioritas kebijakan strategis Perseroan.

Berikut ini adalah perbandingan antara proyeksi yang telah ditetapkan dalam RKAP Tahun 2025 dan realisasi kinerja Perseroan pada tahun buku 2024.

Total Equity

In 2024, the Company successfully recorded total equity of Rp2,605.97 billion or reaching 98.14% of the target of Rp2,655.36 billion. This increase was mainly due to the Company's net profit achievement.

Capital Expenditure

In 2024, the Company has realized capital expenditure of Rp6.50 billion or reaching 2.55% of the total budget of Rp254.71 billion. The realization of the capital expenditure budget is used for investment in digital transformation and net zero emission programs.

Dividend Policy

In 2024, the Company distributes a dividend payout ratio of 20% of net profit for the 2023 financial year. The maximum dividend distribution policy is 30% of the Company's net profit, taking into account the Company's condition and in accordance with prevailing regulations.

Human Capital-Employee Engagement

In 2024, the results of the Company's employee engagement survey reached a score of 73% of the target of 78%. The results of this assessment are considered "Engaged" towards the Company's employees, and are the basis for formulating strategic policies that are oriented towards increasing employee engagement and productivity, while strengthening the Company's competitiveness in the future.

PROJECTION FOR THE NEXT 1 (ONE) YEAR

In order to achieve short-term targets in line with the Long-Term Plan (RJP), the Company has set detailed operational and financial targets in the 2025 Company Work and Budget Plan (RKAP). The RKAP is prepared comprehensively by considering global and national economic conditions, industry dynamics, strategic issues, and the direction and priorities of the Company's strategic policies.

The following is a comparison between the projections set in the 2025 RKAP and the Company's actual performance in the 2024 fiscal year.

Proyeksi untuk 1 (satu) Tahun ke Depan
annual project

(Dinyatakan dalam Miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain | Expressed in Billions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	Proyeksi 2025 Projection 2025	Proyeksi 2025 Terhadap Realisasi 2024 (%) 2025 Projection to the 2024 Realization (%)	
Kontrak Baru/Pemasaran New Contract/Marketing	3.580,00	131,84%	▲
Kontrak Lama Carry Over	4.444,20	70,61%	▼
Kontrak Dihadapi Order Book	8.024,20	89,06%	▼
Total Pendapatan Total Revenue	4.408,73	86,36%	▼
Pendapatan Bersih/Pendapatan Non JO (Joint Operation) Net Revenue/Revenue Non JO (Joint Operation)	3.432,04	93,43%	▼
Laba Bersih Net Profit	46,35	68,20%	▼
Jumlah Aset Total Assets	5.902,91	103,07%	▲
Struktur Modal Capital Structure			
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	2.379,18	94,59%	▼
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	862,25	142,30%	▲
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	3.241,42	103,85%	▲
Jumlah Ekuitas Total Equity	2.661,49	102,13%	▲
Belanja Modal Capital Expenditure (Capex)	17,57	270,18%	▲
Kebijakan Dividen (Dividen yang akan Dibayarkan di tahun 2025) Dividend Policy (Dividend to be Paid in 2025)	Max 30% dari Net Profit, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan Max 30% of Net Profit, taking into account the Company's financial condition		-
SDM-Skor Keterlibatan Karyawan HC-Employee Engagement Score	74%	101,37%	▲

Kontrak Baru/Pemasaran

Perseroan menetapkan target perolehan kontrak baru tahun 2025 sebesar Rp3.580,00 miliar, atau 131,84% terhadap realisasi tahun 2024. Target tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan menurunnya anggaran infrastruktur, kebijakan selektif dalam memilih proyek yang akan dikerjakan, serta mempertimbangkan dinamika perekonomian global dan arah kebijakan pemerintah.

New Contracts/Marketing

The Company has set a target of obtaining new contracts in 2025 of Rp3,580.00 billion, or 131.84% of the realization in 2024. The target was set by considering the decreasing infrastructure budget, selective policies in choosing projects to be worked on, and considering the dynamics of the global economy and the direction of government policy.

Kontrak Dihadapi

Perseroan menetapkan target kontrak dihadapi tahun 2025 sebesar Rp8.024,20 miliar, atau 89,06% terhadap realisasi tahun 2024. Target tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan target kontrak baru dan kontrak lama yang masih berjalan, dengan memperhatikan berbagai isu strategis dan arah kebijakan yang ditempuh Perseroan.

Order Book

The Company has set a target for order book in 2025 of Rp8,024.20 billion, or 89.06% of the realization in 2024. The target was set by considering new contract targets and ongoing carry over, taking into account various strategic issues and policy directions taken by the Company.

Pendapatan Bersih/Pendapatan Non JO (*Joint Operation*)

Perseroan menetapkan target pendapatan bersih atau pendapatan *non joint operation* tahun 2025 sebesar Rp3.432,04 miliar, atau 93,43%

Net Revenue/Non JO (Joint Operation) Revenue

The Company has set a target of net revenue or non-joint operation revenue in 2025 of Rp3,432.04 billion, or 93.43% of the realization in

terhadap realisasi tahun 2024. Target tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan target kontrak baru dan kontrak lama yang masih berjalan untuk dapat diproduksi menjadi pendapatan Perseroan di tahun 2025.

Laba Bersih

Perseroan menetapkan target laba bersih tahun 2025 sebesar Rp46,35 miliar, atau 68,20% terhadap realisasi tahun 2024. Target tersebut ditetapkan berdasarkan target kontrak dihadapi dan pendapatan Perseroan yang dapat tercapai, dengan mempertimbangan berbagai isu dan langkah strategis yang dilakukan Perseroan.

Jumlah Aset

Perseroan menetapkan target jumlah aset tahun 2025 sebesar Rp5.902,91 miliar, atau 103,07% terhadap realisasi tahun 2024. Target tersebut mengalami peningkatan yang disebabkan oleh naiknya aset lancar, seiring dengan kas dan setara kas Perseroan yang diproyeksikan tetap positif.

Jumlah Liabilitas

Perseroan menetapkan target jumlah liabilitas tahun 2025 sebesar Rp3.241,42 miliar, atau 103,85% terhadap realisasi tahun 2024. Target tersebut mengalami peningkatan yang disebabkan oleh naiknya utang jangka pendek untuk mendukung kebutuhan modal kerja operasional Perseroan, dengan tetap menjaga tingkat likuiditas yang sehat dan struktur permodalan yang seimbang.

Jumlah Ekuitas

Perseroan menetapkan target jumlah ekuitas tahun 2025 sebesar Rp2.661,49 miliar, atau 102,13% terhadap realisasi tahun 2024. Target tersebut mengalami peningkatan yang disebabkan oleh proyeksi pencapaian laba bersih yang positif.

Belanja Modal

Perseroan menetapkan anggaran belanja modal tahun 2025 sebesar Rp17,57 miliar, atau 270,18% terhadap realisasi tahun 2024. Alokasi belanja modal digunakan untuk investasi pada aset tetap dan program transformasi digital

Kebijakan Dividen

Kebijakan Perseroan membagikan dividen maksimal sebesar-besarnya 30% dari laba bersih. Di tahun 2025, Perseroan membagikan atau tidak membagikan dividen dengan mempertimbangkan kondisi Perseroan, serta sesuai peraturan yang berlaku.

Human Capital-Employee Engagement

Perseroan menargetkan employee engagement score sebesar 74% di tahun 2025, atau 101,37% terhadap realisasi tahun 2024. Penetapan target ini bertujuan untuk mengukur tingkat keterlibatan karyawan, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat daya saing sumber daya manusia Perseroan guna mendukung pencapaian tujuan strategis Perseroan

2024. This target was set by considering the target of new contracts and ongoing carry over to be produced into the Company's revenue in 2025.

Net Profit

The Company has set a net profit target for 2025 of Rp46.35 billion, or 68.20% of the realization in 2024. The target is set based on the target of order book and the Company's revenue that can be achieved, by considering various issues and strategic steps taken by the Company.

Total Assets

The Company has set a target for total assets in 2025 of Rp5,902.91 billion, or 103.07% of the realization in 2024. This target has increased due to the increase in current assets, along with the Company's cash and cash equivalents which are projected to remain positive.

Total Liabilities

The Company has set a target for the total liabilities in 2025 of Rp3,241.42 billion, or 103.85% of the realization in 2024. This target has increased due to the increase in short-term debt to support the Company's operational working capital needs, while maintaining a healthy level of liquidity and a balanced capital structure.

Total Equity

The Company has set a target for the total equity in 2025 of Rp2,661.49 billion, or 102.13% of the realization in 2024. This target has increased due to the projection of positive net profit achievement.

Capital Expenditure

The Company has set a capital expenditure budget for 2025 of Rp17.57 billion, or 270.18% compared to the realization in 2024. The allocation of capital expenditure will be used for investments in fixed assets and digital transformation programs.

Dividend Policy

The Company's policy is to distribute a maximum dividend of 30% of net profit. In 2025, the Company will distribute or will not distribute dividends by considering the Company's condition, and in accordance with prevailing regulations.

Human Capital-Employee Engagement

The Company targets an employee engagement score of 74% in 2025, or 101.37% compared to the realization in 2024. The establishment of this target aims to measure the level of employee engagement, increase productivity, and strengthen the competitiveness of the Company's human resources to support the achievement of the Company's strategic goals.

Prospek Usaha

Business Prospects

Tahun 2024 menandai periode awal yang penuh tantangan dalam dunia ekonomi global. International Monetary Fund (IMF) memperkirakan pertumbuhan hanya 3,1%, sedangkan Bank Dunia memprediksi perekonomian global hanya tumbuh 2,4%. Tantangan yang dihadapi kian rumit, merujuk pada sistem ekonomi yang melibatkan ketergantungan interaksi berbagai Negara di seluruh dunia.

Ketidakpastian geopolitik, fluktuasi nilai mata uang, dan perubahan harga komoditas global menjadi faktor utama dari penurunan ekonomi secara global. Masih berlangsungnya perang Rusia - Ukraina juga telah mengganggu rantai pasok global sehingga menimbulkan krisis terutama di sektor pangan dan energi, yang pada akhirnya mengakselerasi laju inflasi dan terjadinya resesi ekonomi global. Konflik yang terjadi antara kedua Negara tersebut menyebabkan pasokan minyak, gas dan gandum mengalami gangguan disertai lonjakan harga di pasar internasional.

Perang antar kedua negara ini juga membawa implikasi terhadap situasi keamanan global. Ketegangan antara kekuatan besar tersebut meningkatkan risiko konflik yang lebih luas, yang dapat mengganggu stabilitas global. Dampak tersebut juga dirasakan oleh Indonesia dalam berbagai aspek mulai dari ekonomi, politik, keamanan hingga diplomasi.

Namun, ditengah kondisi pelemahan ekonomi global tersebut, perekonomian Indonesia tetap tumbuh positif sebesar 5,03%. Pada tahun 2024, pencapaian ini melambat dibanding capaian tahun 2023 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,05%. Keberhasilan Indonesia juga mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas 5% selama beberapa kurun waktu. Hal ini merupakan sebuah prestasi dimana Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara yang berhasil mempertahankan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi serta daya beli masyarakat.

Adapun asumsi-asumsi pertumbuhan ekonomi berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) menurut Kementerian Keuangan dapat dilihat pada tabel berikut:

2024 marked a challenging early period in the global economy. The International Monetary Fund (IMF) estimates growth of only 3.1%, while World Bank predicts the global economy only grew by 2.4%. The challenges encountered are increasingly complex, referring to an economic system that involves the interdependence of interactions between countries around the world.

Geopolitical uncertainty, currency fluctuations, and changes in global commodity prices are the main factors in the global economic downturn. The ongoing Russia-Ukraine war has also disrupted the global supply chain, causing a crisis, especially in the food and energy sectors, which ultimately accelerating the rate of inflation and caused a global economic recession. The conflict between the two countries has disrupted the supply of oil, gas and wheat, accompanied by a spike in prices on the international market.

The war between the two countries also has implications for the global security situation. The tension between the great powers increases the risk of a wider conflict, which could disrupt global stability. This impact is also occurred by Indonesia in various aspects ranging from economics, politics, security to diplomacy.

On the other hand, in the midst of the weakening global economy, the Indonesian economy continues to grow positively by 5.03%. In 2024, this achievement is slower than the record in 2023 which experiences growth of 5.05%. Indonesia's success is also in recording economic growth above 5% for several periods. This is a realization where Indonesia is one of the few countries that has succeeded in maintaining economic growth and stability as well as people's purchasing power.

The assumptions for economic growth based on the Draft State Revenue and Expenditure Budget (RAPBN) according to the Ministry of Finance can be seen in the following table:

Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2024-2025

Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2024-2025

Indikator Indicator	**2024**		**2025**
	APBN State Revenue and Expenditure Budget (APBN)	***Outlook***	**RAPBN** Plane State Revenue and Expenditure Budget (APBN)
Pertumbuhan Ekonomi (%) Economic Growth (%)	5,2	5,1	5,2
Inflasi (%, yoy) Inflation (% yoy)	2,8	2,7	2,5
Suku Bunga SBN 10 Tahun (%, rata-rata) 10-Year Government Bond Yield (%, average)	6,7	6,9	7,1

Indikator Indicator	2024		2025
	APBN State Revenue and Expenditure Budget (APBN)	*Outlook*	RAPBN Plane State Revenue and Expenditure Budget (APBN)
Nilai Tukar (Rp/US$, rata-rata) Average Exchange Rate (IDR/USD)	15.000	16.000	16.100
Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (US$/barel, rata-rata) Indonesian Crude Price/ICP (US$/barrel, average)	82	82	82
Lifting Minyak (rbph) Oil Lifting (thousand barrels per day/kbpd)	635	592	600
Lifting Gas (rbsmph) Gas Lifting (million standard cubic feet per day/MMscfd)	1.033	990	1.005

Sumber: Kementerian Keuangan

RAPBN Tahun Anggaran 2025 disusun dengan mempertimbangkan faktor perekonomian global dan dilandaskan pada bauran kebijakan jangka pendek, menengah dan panjang untuk mendorong pencapaian Visi Indonesia Emas tahun 2045, serta memberikan ruang untuk pelaksanaan program pada pemerintahan selanjutnya. Hal tersebut diperlukan agar peralihan pemerintahan dapat dilakukan secara lancar pada masa transisi.

Sementara itu, Bank Indonesia memperkirakan perekonomian Indonesia tetap tumbuh baik. Bank Indonesia bersama dengan Pemerintah sepakat untuk melanjutkan keberhasilan pencapaian pada tahun 2024 dengan memperkuat sinergi dan koordinasi guna mengendalikan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) agar tetap dalam kisaran sasaran 2,5±1% pada 2025 alam rangka mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional serta Menjaga inflasi harga bergejolak *(Volatile Food)* dalam kisaran 3,0-5,0% dengan cara memperkuat koordinasi pusat dan daerah dengan menetapkan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025-2027.

KEBIJAKAN ANGGARAN INFRASTRUKTUR

Pertumbuhan ekonomi yang berada di level 5,03% berdampak pada prospek bisnis konstruksi yang diyakini dapat berkembang lebih baik, di mana industri jasa konstruksi di Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang positif. Sejalan dengan angka pertumbuhan tersebut, pada tahun 2025, sektor konstruksi diperkirakan mengalami pertumbuhan sebesar 5,48%, hanya untuk proyek gedung dan sipil jalan dan jembatan, bendungan, pelabuhan dan pekerjaan sipil, serta pembangkit listrik. Tumbuhnya bisnis konstruksi tersebut disebabkan banyaknya investor yang melakukan investasi di sektor-sektor seperti transportasi, energi terbarukan, manufaktur dan proyek infrastruktur perumahan.

Namun, dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, terdapat penyesuaian *(refocusing)* anggaran pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah sehingga akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan industri konstruksi kedepannya.

The 2025 State Budget Draft is prepared by taking into account to the global economic factors and is based on a mix of short-, medium- and long-term policies to encourage the achievement of the Golden Indonesia Vision in 2045, as well as providing space for the implementation of programs in the next government. This is essential so as to the transition of government can be carried out decently during the transition period.

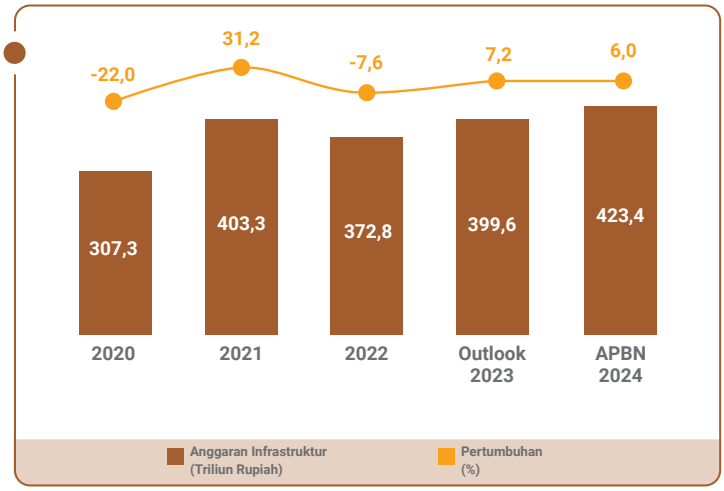
In the meantime, Bank Indonesia estimates the Indonesian economy will continue to grow well. Bank Indonesia together with the Government have agreed to continue the successful achievements in 2024 by strengthening synergy and coordination to control Consumer Price Index (CPI) inflation, it hence remains within the target range of 2.5±1% in 2025 in order to support the acceleration of national economic growth and maintain volatile food inflation in the range of 3.0-5.0% by strengthening central and regional coordination by establishing the 2025-2027 Inflation Control Roadmap.

INFRASTRUCTURE BUDGET POLICY

The economic growth at 5.03% has an impact on the prospects of the construction business which is believed to be able to develop better, where the construction services industry in Indonesia continues to show positive developments. In conformity with this growth figure, in 2025, the construction sector is estimated to experience growth of 5.48%, only for building and civil projects for roads and bridges, dams, ports and civil works, and power plants. The growth of the construction business is due to the large number of investors investing in sectors such as transportation, renewable energy, manufacturing and housing infrastructure projects.

However, with the issuance of Presidential Instruction (Inpres) No. 1 of 2025 concerning Spending Efficiency in the Implementation of the State Revenue and Expenditure Budget and the 2025 Regional Revenue and Expenditure Budget, there is an adjustment (refocusing) of the infrastructure development budget carried out by the government, it hence will have a significant impact on the growth of the construction industry in the future.

GRAFIK PERTUMBUHAN INDUSTRI KONSTRUKSI
CHART OF CONSTRUCTION INDUSTRY GROWTH



Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Source: Directorate General of Treasury (DJPb) of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia

Dengan adanya penyesuaian anggaran infrastruktur tersebut, Pemerintah telah menentukan arah kebijakan infrastuktur yaitu sebagai berikut:

a. Pembangunan jaringan irigasi dan infrastruktur;
b. Pembangunan sekolah unggulan terintegrasi dan renovasi sekolah;
c. Pembangunan rumah sakit berkualitas;
d. Pembangunan infrastruktur jaringan jalan, fasilitas pelabuhan dan bandara, serta konektivitas kereta api untuk menunjang hilirisasi;
e. Pembangunan jalan daerah yang mendorong pusat pertumbuhan;
f. Pemerataan infrastruktur digital dan teknologi;
g. Penyediaan/renovasi rumah bersanitasi baik.

Meski demikian, Kementerian Keuangan memprediksi bahwa sektor infrastruktur akan dihadapkan pada berbagai tantangan pembangunan infrastruktur yang akan mempengaruhi kebijakan yang sudah ditentukan tadi, antara lain:

1. Pemenuhan Layanan Dasar, antara lain penyediaan akses terhadap perumahan dan pemukiman yang layak, aman dan terjangkau, serta pemenuhan air minum, air bersih dan sanitasi yang bersih dan berkualitas, dalam menjamin kehidupan masyarakat yang sehat dan produktif;
2. Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan, antara lain belum optimalnya pemenuhan akses, pasokan energi dan tenaga listrik yang merata dan berkelanjutan, serta perlu pengembangan energi baru terbarukan (EBT), dan pemanfaatan energi ramah lingkungan *(gree energy);*
3. Ketersediaan Lahan, terutama kendala pembebasan lahan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Program Prioritas lainnya;
4. Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), antara lain pemanfaatan teknologi digital yang belum merata terutama di daerah 3TP, serta perlu optimalisasi layanan digital yang mendukung ekonomi digital, stabilitas layanan publik dan pemerintahan (SPBE); dan
5. Infrastruktur konektivitas dan transportasi, antara lain percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah dan jalan tol dalam

With the adjustment of the infrastructure budget, the Government has stipulated the direction of infrastructure policy, namely as follow:

a. Development of irrigation networks and infrastructure;
b. Development of integrated leading schools and school renovation;
c. Development of quality hospitals;
d. Development of road network infrastructure, port and airport facilities, and railway connectivity to support down streaming;
e. Development of regional roads that encourage growth centers;
f. Equal distribution of digital and technology infrastructure;
g. Provision/renovation of well-sanitized houses.

However, the Ministry of Finance predicts that the infrastructure sector will face various challenges in infrastructure development that will affect the policies that have been determined earlier, including:

1. Fulfillment of Basic Services, including providing access to decent, safe and affordable housing and settlements, as well as the provision of clean and quality drinking water, clean water and sanitation, in ensuring a healthy and productive community life;
2. Energy and Electricity Infrastructure, including the less than optimal fulfillment of access, equitable and sustainable energy and electricity supply, and the need for development of new renewable energy (EBT), and utilization of environmentally friendly energy (green energy);
3. Land Availability, especially land acquisition constraints for National Strategic Projects (PSN) and other Priority Programs;
4. Information and communication technology (ICT) infrastructure, including the uneven utilization of digital technology, especially in 3TP areas, and the need for optimization of digital services that support the digital economy, stability of public and government services (SPBE); and
5. Connectivity and transportation infrastructure, including accelerating the increase in connectivity of regional roads

rangka pengembangan sistem jaringan jalan nasional, termasuk pengembangan jaringan transportasi (melalui peningkatan kapasitas bandara, fasilitas pelabuhan dan layanan angkutan laut, serta peningkatan prasarana perkeretaapian) yang terintegrasi dalam menghubungkan antar wilayah, yang mendukung kawasan strategis (KEK, Kawasan Industri, KSPN) dan pusat pertumbuhan ekonomi baru, termasuk Kawasan IKN.

and toll roads in the context of developing the national road network system, including the development of transportation networks (through increasing airport capacity, port facilities and sea transportation services, as well as increasing railway infrastructure) that is integrated in connecting between regions, which supports strategic areas (KEK, Industrial Areas, KSPN) and new economic growth centers, including IKN Area.

Adapun proyek-proyek yang menjadi prioritas dalam penggunaan anggaran infrastruktur tahun 2025, adalah sebagai berikut:

The priority projects for the use of the 2025 infrastructure budget are as follows:

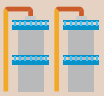
LAYANAN DASAR DAN PANGAN
BASIC SERVICE AND FOOD



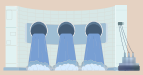
Rumah Susun 3.884 unit, dan Rumah Khusus 596 unit
Apartment Buildings 3,884 units, and
Special Housing 596 units



Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Menengah, dan Tinggi sebanyak 80 unit
Facilities and Infrastructure for Primary, Secondary, and Higher Education totaling 80 units

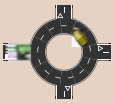


SPAM dengan kapasitas 773 liter/detik
Water Treatment Plant (WTP) with a capacity of 773 liters/second



Jaringan irigasi (Pembangunan seluas 2.000 Ha, dan Rehabilitasi seluas 15.000 Ha)
Irrigation network (Development covering 2,000 Ha, and Rehabilitation covering 15,000 Ha)

KONEKTIVITAS DAN TRANSPORTASI
TRANSPORTATION AND CONNECTION



Jalan Nasional 159.1 km
Jalan TOL 207.8 km
National Roads 159.1 km
Toll Roads 207.8 km



Jembatan baru 4.993,4 m
Flyover/underpass 1.552,0 m
New Bridge 4.993,4
Flayover/under 1.552,0m



Bandar Udara 5 Lokasi
Airport 5 Location

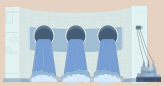


Pelabuhan penyebrangan 10 Lokasi dan Pelabuhan Laut 39 Lokasi
Ferry Ports 10 Locations and
Seaports 39 Locations

ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN
ENERGY AND ELECTRICITY



Jaringan Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon - Semarang
Natural Gas Transmission Pipeline Network, Cirebon - Semarang Section



Pembangunan Bendungan on going 18 unit (akumulatif)
Ongoing Dam Construction:
18 Units (Cumulative)



Bantuan Pasang Baru Listrik kepada 130.000 rumah tangga
New Electricity Connection Assistance for 130,000 households

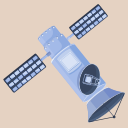
INFRASTRUKTUR TIK
ICT INFRASTRUCTURE



Digital Broadcasting System (DBS) sebanyak 6 lokasi
Digital Broadcasting System (DBS) totaling 6 locations



Penyediaan Akses Internet di 36.830 lokasi layanan publik (akumulatif)
Provision of Internet Access at 36,830 public service locations (cumulative)



Operasional Satelit multifungsi SATRIA - 1 sebesar 150 Gbps
Operation of the SATRIA-1 multipurpose satellite with a capacity of 150 Gbps

Informasi Keberlangsungan Usaha

Information on Business Continuity

HAL-HAL YANG BERPOTENSI BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA

Dalam proses penyusunan rencana strategis, secara berkala manajemen melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kemampuan Perseroan untuk mencapai target dan menjaga keberlangsungan serta pengembangan usaha yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Manajemen terus melakukan pembenahan serta bertransformasi dalam bisnis dan operasionalnya guna memperkuat pengelolaan Perseroan.

Manajemen senantiasa berperan aktif dalam melakukan asesmen dan terus melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan untuk mempertahankan keberlangsungan kegiatan usaha. Hal-hal yang berpengaruh signifikan terhadap keberlangsungan kegiatan usaha di antaranya sumber daya manusia yang berkompeten, infrastruktur yang memadai serta perluasan jaringan bisnis. Infrastruktur Perseroan juga telah teruji mampu mendukung kelangsungan berbagai usaha di industri konstruksi.

Berdasarkan pencapaian kinerja selama tahun 2024, Manajemen menilai bahwa keberlangsungan usaha Perseroan masih sangat baik. Dukungan dari pemegang saham juga menjadi fundamental tersendiri bagi Perseroan dalam menjaga kelangsungan bisnis. Manajemen optimis mampu menghadapi berbagai tantangan dan meraih peluang sebagai dasar pandangan manajemen akan pertumbuhan bisnis Perseroan yang berkelanjutan di masa datang.

ASSESSMENT MANAJEMEN TERHADAP FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KELANGSUNGAN USAHA

Pada tahun 2024, Perseroan telah melakukan evaluasi terhadap kapabilitasnya untuk menjalankan operasi bisnisnya secara berkelanjutan dan yakin bahwa Perusahaan memiliki sumber daya yang memadai untuk meneruskan kegiatan usahanya di masa depan. Selain itu, Manajemen Perseroan tidak menemukan adanya ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Perseroan untuk melanjutkan kegiatan bisnisnya.

Manajemen menilai bahwa keberlangsungan usaha selama tahun buku 2024 didasarkan pada pencapaian kinerja yang memuaskan dengan pencatatan rasio-rasio keuangan dan kesehatan Perseroan yang berada dalam kondisi baik dan mampu mendukung kelangsungan usaha ke depan.

ASUMSI YANG DIGUNAKAN MANAJEMEN DALAM MELAKUKAN ASSESSMENT

Manajemen telah membuat asumsi untuk keberlangsungan usaha Perseroan yang mengacu pada RKAP, di mana asumsi tersebut didasarkan pada berbagai aspek penting dalam keberlangsungan bisnis Perseroan. Beberapa aspek penting dalam pengelolaan perusahaan

MATTERS THAT MAY HAVE A SIGNIFICANT IMPACT ON BUSINESS CONTINUITY

In the process of preparing the strategic plan, management periodically evaluates and assesses the Company's ability to achieve targets and maintain the sustainability and development of the business that has been set out in the Company's Work Plan and Budget (RKAP). Management continues to make improvements and transform its business and operations in order to strengthen the Company's management.

Management constantly plays an active role in conducting assessments and continues to make improvements and refinements to maintain the sustainability of business activities. Things that have a significant impact on the sustainability of business activities include competent human resources, adequate infrastructure and expansion of business networks. The Company's infrastructure has also been proven to be able to support the continuity of various businesses in the construction industry.

Based on the performance achievements throughout 2024, the Management assesses that the sustainability of the Company's business remains to be very decent. The support from shareholders is also fundamental for the Company in maintaining business continuity. Management is optimistic that it will be able to face various challenges and seize opportunities as the basis for management's view of the Company's sustainable business growth in the future.

MANAGEMENT ASSESSMENT OF FACTORS AFFECTING BUSINESS CONTINUITY

In 2024, the Company has evaluated its capabilities to run its business operations sustainably and is confident that the Company has sufficient resources to continue its business activities in the future. In addition, the Company's Management did not find any material uncertainties that could cause significant doubts about the Company's ability to continue its business activities.

The Management assesses that business continuity during the 2024 fiscal year is based on the achievement of satisfactory performance with the recording of financial ratios and the Company's health which are in good condition and able to support business continuity in the future.

ASSUMPTIONS USED BY MANAGEMENT IN CONDUCTING ASSESSMENTS

Management has made assumptions for the Company's business continuity referring to the RKAP, where these assumptions are based on various important aspects in the Company's business continuity. Several important aspects in the management of the Company such as

seperti permodalan, likuiditas, profitabilitas dan pengelolaan proyek yang berkualitas serta pemenuhan aspek *Environmental, Social and Governance (ESG)*.

Parameter penilaian tersebut digunakan untuk mempertahankan kinerja Perseroan di industri konstruksi gedung. Parameter penentuan asumsi lainnya mengacu pada konsep *going concern* di mana konsep tersebut dapat memberikan gambaran yang akurat tentang kondisi finansial Perseroan melalui laporan keuangan, sehingga dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan yang tepat terhadap Perseroan.

capital, liquidity, profitability and quality project management as well as the fulfillment of Environmental, Social and Governance (ESG) aspects.

These assessment parameters are used to maintain the Company's performance in the building construction industry. Other parameters for determining assumptions refer to the going concern concept where this concept can provide an accurate picture of the Company's financial condition through financial reports, it thus can be used by stakeholders to make the right decisions regarding the Company.

Laporan Pemeringkat Perusahaan oleh Lembaga Rating

Company Rating Report by the Rating Agency

WEGE telah melakukan penilaian tingkat kesehatan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, serta Surat PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Nomor: SE.01.01/A.FIN.00134/2024 tanggal 3 Juli 2024 perihal Penyusunan Penilaian Tingkat Kesehatan Entitas Anak WIKA. Penilaian tingkat Kesehatan Entitas Anak dilakukan dengan menggunakan peringkat (rating) yang didasarkan pada pemeringkatan atau metode lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, pada tahun sebelumnya, penilaian tingkat kesehatan WEGE mengacu pada indikator penilaian yang tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara. Penilaian tingkat kesehatan perusahaan menurut Keputusan Menteri BUMN ini mengukur beberapa indikator, yaitu aspek keuangan, operasional, dan administrasi.

Pada tahun buku 2024, Peringkat (rating) yang disampaikan dalam rangka penilaian tingkat kesehatan WEGE adalah pemeringkatan yang dilakukan oleh PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO), yang ditandatangani pada tanggal 24 April 2025 dengan hasil sebagai berikut:

1. Peringkat Berdiri Sendiri (*Standalone Rating*) dengan hasil **idBBB(sa) / *Standalone***.
   Obligor dengan peringkat idBBB memiliki kemampuan yang **memadai** dibandingkan obligor Indonesia lainnya untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya. Walaupun demikian, kemampuan obligor lebih mungkin akan terpengaruh oleh

WEGE has conducted a company soundness assessment in accordance with the provisions of statutory regulations, specifically the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number: PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, as well as the Letter of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Number: SE.01.01/A.FIN.00134/2024 dated July 3, 2024, regarding the Preparation of Soundness Assessment for WIKA's Subsidiaries. The soundness assessment of the Subsidiary Entity is carried out using a rating based on a ranking or other method in accordance with prevailing laws and regulations.

In the meantime, in the previous year, the soundness assessment of WEGE referred to the assessment indicators outlined in the Decree of the Minister of SOEs No. KEP-100/MBU/2002 dated June 4, 2002, concerning the Assessment of the Soundness Level of State-Owned Enterprises. The company's soundness assessment according to this Decree of the Minister of SOEs measures several indicators, namely financial, operational, and administrative aspects.

For the 2024 fiscal year, the rating presented for the purpose of WEGE's soundness assessment is a rating conducted by PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO), signed on April 24, 2025, with the following results:

1. Standalone Rating with a result of **idBBB(sa) / Standalone.**

   An obligor with an idBBB rating has an **adequate** capacity compared to other Indonesian obligors to meet its long-term financial commitments. However, the obligor's ability is more likely to be affected by adverse changes in circumstances and

perubahan buruk keadaan dan kondisi ekonomi. Adapun tanda (sa) menunjukkan bahwa peringkat adalah peringkat berdiri sendiri (*standalone rating*).

2. Peringkat Akhir (*Final Rating*) dengan hasil **idBBB / *Stable Outlook***. Obligor dengan peringkat idBBB memiliki kemampuan yang **memadai** dibandingkan obligor Indonesia lainnya untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya. Walaupun demikian, kemampuan obligor lebih mungkin akan terpengaruh oleh perubahan buruk keadaan dan kondisi ekonomi.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh PEFINDO, tingkat kesehatan WEGE untuk Tahun Buku 2024 dinyatakan dalam kategori "**Sehat**" dan termasuk dalam klasifikasi "***Investment Grade***".

economic conditions. The (sa) notation indicates that the rating is a standalone rating.

2. Final Rating with a result of **idBBB / Stable Outlook.**
An obligor with an idBBB rating has an **adequate** capacity compared to other Indonesian obligors to meet its long-term financial commitments. However, the obligor's ability is more likely to be affected by adverse changes in circumstances and economic conditions.

Therefore, based on the assessment conducted by PEFINDO, WEGE's health level for the 2024 Fiscal Year is stated in the "**Sound**" category and falls into the "**Investment Grade**" classification.

Key Performance Indicator (KPI) Perusahaan

Company Key Performance Indicator (KPI)

Dalam memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi dalam pengelolaan Perseroan, Dewan Komisaris menggunakan dasar yang terukur. Penilaian tersebut antara lain didasarkan pada pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam *Key Performance Indicator* (KPI) Perusahaan untuk tahun 2024.

In assessing the performance of the Board of Directors in managing the Company, the Board of Commissioners uses a measurable basis. The assessment is based, among others, on the achievement of targets that have been set in the Company's Key Performance Indicator (KPI) for 2024.

KEY PERFORMANCE INDICATOR CORPORATE WEGE SCORECARD – TAHUN 2024

No	Indikator Kinerja Performance Indicators	Satuan Unit	Nilai Point	Bobot KPI KPI Weight (%)	Skor (%) Score	
					Rencana Plan	Realisasi Realization
NILAI EKONOMI DAN SOSIAL UNTUK INDONESIA ECONOMIC AND SOCIAL VALUE FOR INDONESIA				**55**	**55,00**	**51,10**
1	EBITDA	Rp	11	9	9,00	9,90
2	ROIC	Rasio Ratio	9	6	6,00	5,40
3	Interest Bearing Debt to Equity	Rasio Ratio	10	7	7,00	7,00
4	Project on time on budget	%	7	7	7,00	4,90
5	Perolehan Kontrak Baru New Contract Acquisition	%	6	7	7,00	4,20
6	Order Book Burn Rate	%	11	7	7,00	7,70
7	Penyelesaian Proyek PSN PSN Project Completion	%	10	6	6,00	6,00
8	Zero Fatality Accident	Jumlah Amount	10	6	6,00	6,00
INOVASI MODEL BISNIS BUSINESS MODEL INNOVATION				**14**	**14,00**	**15,40**
9	Karya Inovasi Innovation Works	Jumlah Amount	11	7	7,00	7,70

KEY PERFORMANCE INDICATOR CORPORATE WEGE SCORECARD – TAHUN 2024

No	Indikator Kinerja Performance Indicators	Satuan Unit	Nilai Point	Bobot KPI KPI Weight (%)	Skor (%) Score	
					Rencana Plan	Realisasi Realization
10	Customer Satisfaction Index	Indeks | Index	11	7	7,00	7,70
KEPEMIMPINAN TEKNOLOGI TECHNOLOGY LEADERSHIP				**15**	**15,00**	**15,50**
11	Project Using BIM	%	10	5	5,00	5,00
12	Project Using ERP	%	11	5	5,00	5,50
13	IT Maturity	Indeks | Index	10	5	5,00	5,00
PENINGKATAN INVESTASI INVESTMENT INCREASE				**8**	**8,00**	**8,80**
14	Risk Maturity Level	Indeks | Index	11	8	8,00	8,80
PENGEMBANGAN TALENTA TALENT DEVELOPMENT				**8**	**8,00**	**8,80**
15	Perempuan Nominated Talent	%	11	4	4,00	4,40
16	Millenial Top Talent (<42 tahun) (Capability)	%	11	4	4,00	4,40
				100	**100,00**	**99,60**

Berdasarkan tabel di atas, *Key Performance Indicator* (KPI) Perseroan untuk tahun 2024 mencatatkan skor sebesar 99,60 dari total bobot 100,00. Pencapaian ini menunjukkan bahwa Manajemen telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, sesuai dengan arahan pemegang saham.

Based on the table above, the Company's Key Performance Indicator (KPI) for 2024 recorded a score of 99.60 out of a total weight of 100.00. This achievement demonstrates that Management has successfully carried out its duties and functions well, in accordance with the direction of the shareholders.

Rencana Jangka Panjang Perusahaan

Company Long Term Plan

Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjadi acuan utama bagi Perseroan dalam menetapkan arah, kebijakan, dan prioritas kegiatan usaha untuk lima tahun mendatang. RJPP disusun dengan mempertimbangkan dinamika industri, tantangan eksternal, serta peluang yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan Perseroan.

Sebagai peta jalan strategis, RJPP mencakup sasaran dan tujuan yang hendak dicapai oleh Perseroan, termasuk langkah-langkah strategis untuk meningkatkan daya saing, menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan, serta memastikan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang.

Untuk periode 2024–2028, RJPP yang telah disusun oleh Perseroan memuat:

1. Profil Organisasi, meliputi Sejarah, Visi dan Misi, Portofolio Bisnis, Struktur Organisasi, Lingkungan Persaingan, Pelanggan Utama, dan Konteks Strategis (Keunggulan dan Tantangan).

The Company's Long-Term Plan (RJPP) is a strategic planning document that serves as the main reference for the Company in determining the direction, policies, and priorities of business activities for the next five years. The RJPP is prepared by considering industry dynamics, external challenges, and opportunities that can be optimized to support the Company's sustainable growth.

As a strategic roadmap, the RJPP includes the targets and objectives to be achieved by the Company, including strategic steps to increase competitiveness, create added value for stakeholders, and ensure long-term business sustainability.

For the period 2024–2028, the RJPP prepared by the Company contains:

1. Organizational Profile, including History, Vision and Mission, Business Portfolio, Organizational Structure, Competitive Environment, Main Customers, and Strategic Context (Advantages and Challenges).

2. Evaluasi Kinerja RJPP Tahun 2019-2023, meliputi Kinerja Kuantitatif, Kinerja Kualitatif, Gap dan Pembelajaran, dan Penghargaan atas Hasil Kinerja.
3. Analisis Lingkungan Usaha, meliputi Analisis Lingkungan Usaha Makro dan Analisis Lingkungan Usaha Industri.
4. Analisis TOWS (*Threats, Opportunities, Weaknesses, Strengths*).
5. Sasaran Utama Rencana Jangka Panjang 2024-2028, meliputi Sasaran Kualitatif, Sasaran Kuantitatif, dan Sasaran Investasi.
6. Matriks Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program Pokok, dan Transformasi Office.
7. Program Pokok dan Skenario Implementasi.
8. Alokasi Sumber Daya Utama.
9. Manajemen Risiko, meliputi Risiko Operasi dan Risiko Kondisi Makro.
10. Proyeksi Keuangan, meliputi Asumsi-Asumsi Penyusunan Proyeksi Keuangan, Proyeksi Laba Rugi, Proyeksi Neraca, Proyeksi Arus Kas, Program Investasi, Proyeksi Rasio Keuangan, dan *Key Performance Indicator*.
11. Kesimpulan.

Perseroan telah menetapkan Rencana Jangka Panjang (RJP) periode 2019–2023 sebagai langkah untuk mencapai tujuan strategis sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Selanjutnya, RJP tersebut diperbarui untuk periode 2024–2028 guna menyesuaikan dengan kondisi terkini dan tantangan yang dihadapi.

2. Evaluation of the 2019-2023 RJPP Performance, including Quantitative Performance, Qualitative Performance, Gaps and Learning, and Awards for Performance Results.
3. Business Environment Analysis, including Macro Business Environment Analysis and Industrial Business Environment Analysis.
4. TOWS (Threats, Opportunities, Weaknesses, Strengths) Analysis.
5. Main Targets of the 2024-2028 Long-Term Plan, including Qualitative Targets, Quantitative Targets, and Investment Targets.
6. Matrix of Targets, Strategies, Policies, Main Programs, and Office Transformation.
7. Main Programs and Implementation Scenarios.
8. Main Resource Allocation.
9. Risk Management, including Operational Risk and Macro Condition Risk.
10. Financial Projections, including Assumptions for Preparing Financial Projections, Profit and Loss Projections, Balance Sheet Projections, Cash Flow Projections, Investment Programs, Financial Ratio Projections, and Key Performance Indicators.
11. Conclusion.

The Company has established a Long-Term Plan (RJP) for the period 2019–2023 as a step to achieve strategic goals in accordance with the established vision and mission. Furthermore, the RJP was updated for the 2024–2028 period to adapt to current conditions and the challenges encountered.

Rumah Transformasi WEGE

WEGE House of Transformation

Dalam rangka mewujudkan visi Perseroan untuk menjadi entitas yang sehat, tumbuh, dan berkelanjutan, Perseroan mengimplementasikan kerangka kerja transformasi yang dikenal dengan sebutan "Rumah Transformasi." Transformasi ini didasarkan pada tiga pilar utama yang menjadi fokus utama Perseroan, yaitu *Cash Focus, Business Execution Excellence,* dan *Sustainable Business Development.*

Cash Focus berfokus pada pengelolaan likuiditas dan modal kerja secara efisien, didukung oleh kebijakan keuangan yang tepat, kemitraan strategis, dan kolaborasi dengan mitra keuangan. *Business Execution Excellence* mengutamakan pengoptimalan operasional melalui penerapan kebijakan bisnis yang kompetitif, sentralisasi *Building Information Modeling* (BIM), serta penggunaan teknologi terkini dalam konstruksi (Construction 4.0). Sementara itu, *Sustainable Business Development* berfokus pada kemitraan jangka panjang dengan pemerintah, BUMN, swasta, dan akademisi, pengelolaan modal kerja yang prudent, serta pengembangan produk modular berkelanjutan melalui *off-site construction,* manajemen konstruksi, dan *building management.*

In order to realize the Company's vision of becoming a healthy, growing, and sustainable entity, the Company is implementing a transformation framework known as the "Transformation House." This transformation is based on three main pillars that are the Company's primary focus: Cash Focus, Business Execution Excellence, and Sustainable Business Development.

Cash Focus is centered on the efficient management of liquidity and working capital, supported by appropriate financial policies, strategic partnerships, and collaboration with financial partners. Business Execution Excellence prioritizes operational optimization through the implementation of competitive business policies, the centralization of Building Information Modeling (BIM), and the use of the latest technology in construction (Construction 4.0). Meanwhile, Sustainable Business Development focuses on long-term partnerships with the government, State-Owned Enterprises (BUMN), the private sector, and academia, prudent working capital management, and the development of sustainable modular products through off-site construction, construction management, and building management

Proses transformasi ini didukung oleh tiga lapis enabler yang memastikan kelancaran dan efektivitas implementasi, yaitu Lean Organization, Teknologi & Data, *dan Risk Management*. *Lean Organization* menciptakan proses bisnis yang ramping dan terintegrasi melalui *Project Management Information System* (PMIS), sementara pemanfaatan Teknologi & Data melalui Big Data, *computing cloud, blockchain*, dan AI mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang akurat. Selain itu, penerapan *Risk Management* berbasis risiko untuk mengidentifikasi, mengukur, dan memitigasi risiko secara proaktif.

This transformation process is supported by three layers of enablers that ensure the smooth and effective implementation, namely Lean Organization, Technology & Data, and Risk Management. Lean Organization creates lean and integrated business processes through the Project Management Information System (PMIS), while the utilization of Technology & Data through Big Data, computing cloud, blockchain, and AI supports accurate data-driven decision-making. In addition, the application of risk-based Risk Management proactively identifies, measures, and mitigates risks.

Seluruh upaya transformasi ini bertumpu pada AKHLAK, yang merupakan nilai inti perusahaan dan menjadi pondasi dari budaya Perseroan yang berfokus pada People sebagai pusat perubahan. Dengan landasan ini, Perseroan berkomitmen untuk membangun karakter yang solid di setiap level organisasi, mendukung tercapainya kinerja yang sehat, berkelanjutan, dan daya saing yang kuat di masa depan

All of these transformation efforts are anchored in AKHLAK, which represents the company's core values and forms the foundation of the Company's culture that focuses on People as the center of change. With this foundation, the Company is committed to building a solid character at every organizational level, supporting the achievement of healthy, sustainable, and strong competitive performance in the future.

WEGE House of Transformation

Goals, Pillar, Enabler & Cornerstone




JAKARTA INTERNATIONAL



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Good Corporate Governance

Pada tahun 2024, Perseroan melaksanakan asesmen terhadap praktik tata kelola perusahaan berdasarkan ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) yang dilakukan oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD), dan memperoleh skor 90,49 dengan predikat "Very Good" atau Level 4.

In 2024, the Company conducted an assessment of corporate governance practices based on the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) conducted by the Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD), by obtaining a score 90.49 with a "Very Good" or Level 4.

Pernyataan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Statement of Corporate Governance Implementation



GEDUNG KEMENKO MARVES IKN

16 tahun beroperasi di industri konstruksi Bangunan Gedung, Perseroan senantiasa menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) dalam seluruh aspek bisnisnya. Perseroan mengimplementasikan Prinsip-prinsip GCG dalam strategi dan nilai-nilai Perseroan untuk membantu menjalankan serta mengarahkan aktivitas bisnis dengan baik dan benar.

Perseroan menerapkan GCG dengan berpedoman pada kerangka tata kelola perusahaan yang menggambarkan struktur serta tugas tanggungjawab dalam pengambilan keputusan. Implementasi GCG dilakukan secara konsisten dan komprehensif sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.

Perseroan secara berkala terus melakukan Perbaikan dan peningkatan berdasarkan rekomendasi Komite dan arahan Dewan Komisaris. Perseroan juga melakukan penyempurnaan GCG diperoleh dari saran pihak-pihak eksternal dan pemangku kepentingan terkait melalui hasil penilaian mandiri GCG.

DASAR HUKUM PENERAPAN TATA KELOLA

Perusahaan senantiasa melakukan penyempurnaan atas regulasi yang relevan, sehingga implementasi GCG dapat diterapkan dengan baik, adapun dasar hukum, pedoman dan regulasi Perusahaan dalam menerapkan GCG sebagai berikut:

Having operated for 16 years in the Building Construction industry, the Company consistently applies the principles of Good Corporate Governance (GCG) in all aspects of its business. The Company implements GCG Principles in its strategies and values to help execute and direct business activities properly and correctly.

The Company applies GCG by adhering to a corporate governance framework that outlines the structure as well as roles and responsibilities in decision-making. Consistent and comprehensive implementation of GCG is very important to maintain trust and create added value for stakeholders.

The Company regularly continues to make improvements and enhancements based on Committee recommendations and the Board of Commissioners' directives. The Company also refines its GCG based on suggestions from external parties and relevant stakeholders through the results of its self-assessment of GCG.

LEGAL BASIS FOR THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE

The Company continuously refines relevant regulations so as to the implementation of GCG can be applied effectively. The legal basis, guidelines, and regulations of the Company in implementing GCG are as follows:

1. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 JO Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 12 B ayat (1) dan ayat (2);
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perundang-undangan No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Ditetapkan dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Undang-undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-412/BL/2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu tanggal 25 November 2009;
6. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
8. Anggaran Dasar Perusahaan;
9. Lainnya:
   a. ASEAN Corporate Governance Scorecard; dan
   b. Pedoman Governansi Korporate Indonesia (PUGKI).

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GCG DAN IMPLEMENTASI GCG PERUSAHAAN

Perusahaan memiliki kerangka Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang berlaku bagi seluruh aktivitas Perusahaan dan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama No. SK. 01.09/WG.419/2021 tentang Panduan Pelaksanaan Corporate Governance PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk pada tanggal 30 September 2021. Dengan pedoman ini seluruh insan Perusahaan diharapkan dapat menerapkan standar kerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Ruang lingkup prinsip-prinsip GCG mencakup ke setiap aktivitas Perusahaan baik operasional bisnis dan seluruh elemen organisasi, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, Article 12 B paragraph (1) and paragraph (2);
2. Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises as amended by Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation and stipulated by Law No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law;
3. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 dated 16 August 2007 concerning Limited Liability Companies;
4. Law of the Republic of Indonesia No. 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure;
5. Decree of the Chairman of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency No. Kep-412/BL/2009 concerning Affiliated Transactions and Conflicts of Interest in Certain Transactions dated November 25, 2009;
6. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
7. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER3/MBU/03/2023 dated March 20, 2023 concerning Organs and Human Capital of State-Owned Enterprises;
8. Company Articles of Association;
9. Others:
   a. ASEAN Corporate Governance Scorecard; and
   b. Indonesian Corporate Governance Guidelines (PUGKI).

APPLICATION OF GCG PRINCIPLES AND IMPLEMENTATION OF GCG IN THE COMPANIES

The Company has a framework of Corporate Governance Guidelines that applies to all of the Company's activities and has been established through a Joint Decree No. SK. 01.09/WG.419/2021 concerning the Implementation Guide for Corporate Governance of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk dated September 30, 2021. With these guidelines, all personnel of the Company are expected to be able to apply work standards that are in accordance with the principles of Good Corporate Governance.

The scope of the GCG principles encompasses every activity of the Company, including both its business operations and all elements of the organization, with the following explanation:

Prinsip-prinsip GCG GCG Principles	Penjelasan Explanation	Penerapan di Lingkungan Perusahaan Implementation in the Company's Environment
Keterbukaan Openness	Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan, mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai Perusahaan. Perusahaan senantiasa memberikan informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). Transparency in implementing the decision-making process, disclosing material and relevant information about the Company. The Company consistently provides correct, accurate and timely information to all stakeholders.	Perseroan telah memiliki situs web perusahaan yang berisikan informasi Perseroan pada https://www.wikagedung.co.id. The Company has a company website containing information about the Company at https://www.wikagedung.co.id.
Akuntabilitas Accountability	Kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif. Seluruh organ tata kelola Perusahaan memiliki prinsip akuntabilitas dengan kejelasan fungsi, struktur, sistem serta pertanggungjawaban yang sistematis. Clarity of function, implementation, and accountability of the organs so as to the Company's management is carried out effectively. All corporate governance organs adhere to the principle of accountability with clear functions, structures, systems, and systematic responsibilities.	Perseroan mewajibkan seluruh pimpinan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar sehingga manajemen telah memiliki rincian peran dan tanggung jawab dari masing-masing organ dan karyawan secara jelas sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi perusahaan. The Company requires all leaders to be transparently and fairly accountable for their performance, hence the management has a clear breakdown of the roles and responsibilities of each organ and employee in accordance with the company's vision, mission, objectives, and strategies.
Pertanggungjawaban Responsibility	Kesesuaian dalam pengelolaan bisnis terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat. Conformity in business management with laws and regulations and sound corporate principles.	Perseroan berkomitmen untuk membangun kesesuaian dan keselarasan terhadap peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat. The Company is committed to building conformity and alignment with prevailing laws and regulations as well as sound corporate principles.
Kemandirian Independence	Pengelolaan Perusahaan yang dilakukan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip korporasi yang sehat. The Company's management is carried out professionally without conflicts of interest and influence from any party that is not in accordance with laws and regulations as well as sound corporate principles.	Dalam proses pengambilan keputusan atau penentuan kebijakan, manajemen Perseroan senantiasa menghasilkan keputusan yang objektif dan bebas dari benturan kepentingan atau tekanan dari pihak manapun. In the decision-making process or policy determination, the Company's management continually produces objective decisions that are free from conflicts of interest or pressure from any party.
Kewajaran Fairness	Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak seluruh pemegang saham berdasarkan prinsip korporasi yang sehat. Fairness and equality in fulfilling the rights of all shareholders based on sound corporate principles.	Tidak melakukan tindakan diskriminatif guna menjamin pemenuhan hak seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Does not engage in the discriminatory actions to ensure the fulfillment of the rights of all shareholders and other stakeholders in accordance with prevailing laws and regulations.

KOMITMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Perseroan berkomitmen secara penuh untuk menerapkan dan memperkuat praktik CGC secara konsisten. Perusahaan meyakini penerapan GCG secara konsisten mampu mendorong meningkatkan kinerja Perusahaan dan memberikan nilai positif bagi seluruh pemangku kepentingan.

Tercermin dalam Visi, Misi dan Nilai Budaya Perseroan, Penerapan GCG di lingkungan Perseroan bukan hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap Peraturan perundangan undangan. Penerapan GCG menjadi budaya serta pedoman perilaku seluruh elemen organisasi. Visi Perseroan untuk menjadi mitra yang terpercaya dalam menciptakan ekosistem konstruksi yang inovatif dan berkelanjutan, diwujudkan dalam Misi Perseroan dengan didasarkan pada nilai Budaya Perseroan.

Komitmen Perseroan juga digambarkan dalam peraturan yang diterbitkan Perusahaan dimana dengan jelas gambaran kerangka pengembangan struktur GCG yang meliputi organ utama dan organ pendukung. Dengan implementasi GCG yang baik, Perusahaan meyakini akan menciptakan kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

Tidak hanya berpedoman pada kebijakan yang sudah ada, Perseroan senantiasa mengikuti perkembangan praktik tata kelola perusahaan yang berlaku nasional maupun internasional.

RUANG LINGKUP PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Ruang lingkup penerapan GCG yang dilakukan sepanjang tahun 2024 sangat luas dan mencakup berbagai aspek pengelolaan perusahaan, mulai dari struktur organisasi hingga perilaku para pemangku kepentingan. Secara umum, GCG diterapkan pada semua lini bisnis dan operasional sehingga dapat mendorong Perseroan untuk menerapkan etika bisnis yang tinggi dan memastikan kepatuhan terhadap perundang-undangan.

Berikut ruang lingkup penerapan GCG Perseroan, yakni:

COMMITMENT TO THE GOOD CORPORATE GOVERNANCE

The Company is fully committed to implementing and strengthening GCG practices consistently. The Company believes that the consistent application of GCG can drive improved Company performance and provide positive value for all stakeholders.

Reflected in the Company's Vision, Mission, and Cultural Values, the implementation of GCG within the Company is not merely a form of compliance with laws and regulations. The implementation of GCG has become a culture and behavioral guideline for all elements of the organization. The Company's Vision to be a trusted partner in creating an innovative and sustainable construction ecosystem is realized in the Company's Mission, based on the Company's Cultural Values.

The Company's commitment is also described in the regulations issued by the Company, which clearly outline the framework for developing the GCG structure, encompassing the main organs and supporting organs. With the proper implementation of GCG, the Company believes it will create long-term business sustainability.

Not only adhering to existing policies, the Company continuously follows the development of corporate governance practices that prevail nationally and internationally.

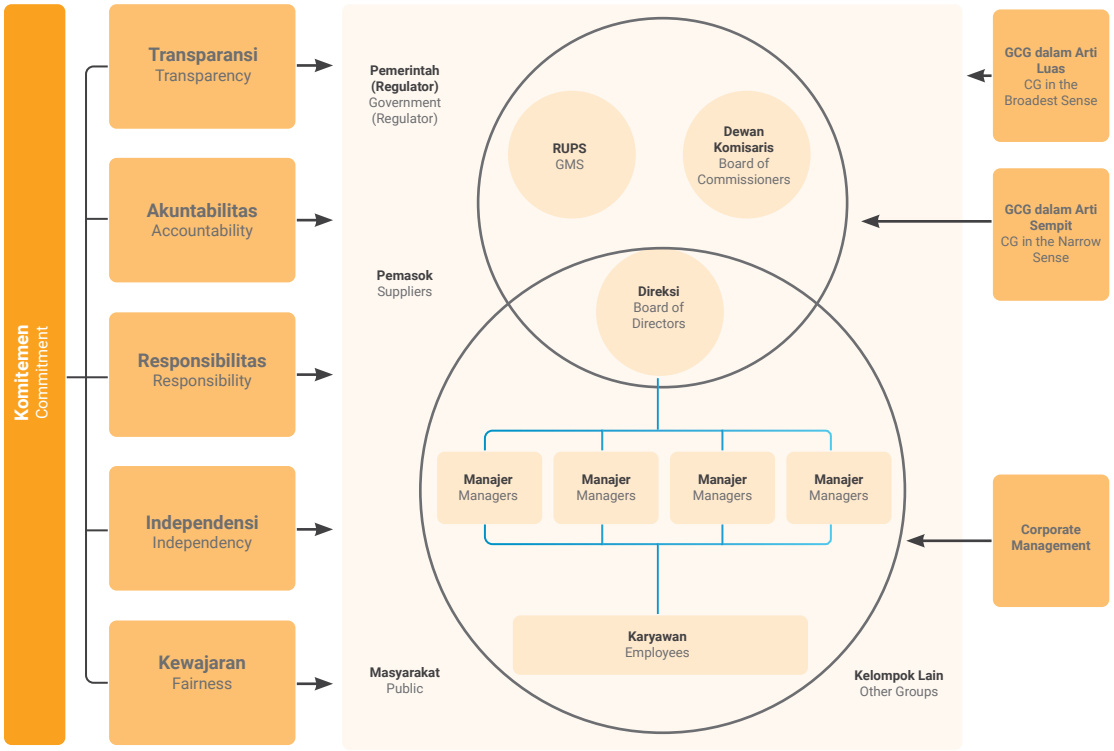
SCOPE OF CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

The scope of GCG implementation carried out throughout 2024 is highly broad and covers various aspects of company management, from organizational structure to stakeholder behavior. In general, GCG is applied to all business and operational lines hence it can encourage the Company to implement high business ethics and ensure compliance with laws and regulations.

The following is the scope of the Company's GCG implementation, namely:

RUANG LINGKUP PENERAPAN GCG WIKA

SCOPE OF WIKA'S GCG IMPLEMENTATION



TUJUAN PENERAPAN GCG

Sebagai anak usaha dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perseroan memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan GCG secara berkesinambungan. Penerapan GCG digambarkan dalam perspektif yang lebih luas dengan tujuan Perseroan sebagai berikut:

a. Memaksimalkan nilai-nilai inti Perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan;
b. Memastikan pengelolaan Perusahaan dilakukan secara profesional, transparan, dan efisien;
c. Mewujudkan kemandirian dalam membuat keputusan sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing pimpinan dalam Perusahaan tersebut;
d. Memastikan setiap karyawan dalam Perusahaan berperan sesuai wewenang dan tanggung jawab yang telah ditetapkan;
e. Mewujudkan praktik bisnis yang sejalan dengan prinsip-prinsip (GCG) secara konsisten.

OBJECTIVES OF GCG IMPLEMENTATION

As a subsidiary of a State-Owned Enterprise (BUMN), the Company has a strong commitment to implement GCG sustainably. The implementation of GCG is described in a broader perspective with the Company's objectives as follows:

a. Maximizing the Company's core values by improving the principles of openness, accountability, trustworthiness and accountability;
b. Ensuring that the Company's management is carried out professionally, transparently and efficiently;
c. Realizing independence in making decisions in accordance with the roles and responsibilities of each leader in the Company;
d. Ensuring that each employee in the Company plays a role in accordance with the authority and responsibility that has been determined;
e. Realizing business practices that are in conformity with the principles of (GCG) consistently.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Secara Berkelanjutan

Implementation of Sustainable Corporate Governance

AKTIVITAS PENINGKATAN PENERAPAN CORPORATE GOVERNANCE TAHUN 2024

GCG merupakan wujud komitmen Perusahaan dalam mengelola aktivitas perusahaan yang berpedoman prinsip-prinsip GCG. Implementasi penerapan GCG Perusahaan sepanjang tahun 2024 dijalankan melalui berbagai kegiatan, sebagai berikut:

1. Penerapan Three Lines Model dalam Tata Kelola:
   a. Manajemen Risiko : Dilakukan peranhkapan organ pengelola risiko wajib mengikuti Three Lines Model, Penerapan Model Tata Kelola Risiko Tiga Lini;
   b. Internal Audit: Menjaga akuntabilitas utama kepada organ pengurus dan independensinya dari pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab manajemen, mengkomunikasikan asuransi dan penasehat yang independen dan objektif, melaporkan penilaian independensi dan objektivitas kepada organ pengurus dan menerapkan pengamanan yang dipersyaratkan;
   c. IT: Melaksanakan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (SMPI) ISO 27001:2022.
2. Peningkatan Kontrol Proyek/Bisnis Berbasis Enterprise Resource Planning (ERP)
   a. Diterapkannya single sistem kontrol level proyek menggunakan Enterprise Resource Planning (ERP);
   b. Integrasi antara ERP dan sistem manajemen proyek (Primavera/Microsoft Project) untuk memastikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan proyek selalu berbasis data yang sama;
   c. Pemantauan real-time terhadap berbagai aspek proyek, seperti pengeluaran, waktu kerja, dan progres fisik proyek serta penggunaan perangkat mobile yang terintegrasi dengan ERP.
3. Penerapan Keberlanjutan
   a. Melaksanakan program-program Strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan;
   b. Melakukan penerapan terhadap target Net Zero Emission;
   c. Penggunaan *Electric Vehicle* sebagai kendaraan dinas pengganti kendaraan BBM.
   d. Parameter keberlanjutan merujuk pada beberapa Lembaga resmi Internasional, antara lain: S&P Global, Sustainalytics, IFRS sustainability, TFCD.
4. Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
   Perseroan telah melakukan Audit Internal dan Audit Eksternal ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan di seluruh Divisi Ruang Lingkup dengan hasil tidak ada temuan major.
5. Whistle Blowing System (WBS)
   Pengaduan Pelanggaran terhadap Code of Conduct (WBS) telah diatur dalam kebijakan Perseroan. Berdasarkan resume hasil pengelolaan WBS sepanjang tahun 2024 tidak terdapat laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan melalui mekanisme WBS.

CORPORATE GOVERNANCE APPLICATION IMPROVEMENT ACTIVITIES IN 2024

GCG is the embodiment of the Company's commitment to managing company activities based on GCG principles. The implementation of the Company's GCG throughout 2024 was carried out through various activities, as follows:

1. Implementation of the Three Lines Model in Governance:
   a. Risk Management: The risk management organ is required to follow the Three Lines Model, Implementation of the Three Lines of Risk Governance Model;
   b. Internal Audit: Maintaining primary accountability to the governing bodies and its independence from the execution of work that is the responsibility of management, communicating independent and objective assurance and advice, reporting the assessment of independence and objectivity to the governing bodies, and implementing required safeguards;
   c. IT: Implementing the Information Security Management System (ISMS) ISO 27001:2022.
2. Improvement of Project/Business Control Based on Enterprise Resource Planning (ERP)
   a. Implementation of a single project-level control system using Enterprise Resource Planning (ERP);
   b. Integration between ERP and project management systems (Primavera/Microsoft Project) to ensure that project planning, execution, and reporting are continually based on the same data;
   c. Real-time monitoring of various project aspects, such as expenses, working hours, and physical project progress, as well as the use of mobile devices integrated with ERP.
3. Sustainability Implementation
   a. Implementing Strategic programs to support sustainable national economic growth;
   b. Implementing targets for Net Zero Emission;
   c. Use of Electric Vehicles as official vehicles to replace fuel-based vehicles;
   d. Sustainability parameters refer to several official International Institutions, including: S&P Global, Sustainalytics, IFRS sustainability, TCFD.
4. Anti-Bribery Management System (ABMS)
   The Company has conducted Internal Audits and External Audits of ISO 37001:2016 on the Anti-Bribery Management System across all Division Scopes with no major findings.
5. Whistle Blowing System (WBS)
   Complaints of Violations of the Code of Conduct (WBS) have been regulated in the Company's policy. Based on the summary of WBS management results throughout 2024, there were no reports of alleged violations reported through the WBS mechanism.

6. Melakukan perbaikan *Portfolio Orderbook* konstruksi dengan fokus pada proyek-proyek yang memiliki pembayaran monthly progress dengan tujuan untuk mengurangi defisit kas dan kebutuhan modal kerja;
7. Melakukan penurunan *Operating Expense* dengan penerapan manning tenaga kerja di proyek berbasis ERP.
8. Pengendalian Gratifikasi
   Pengendalian gratifikasi di Perseroan telah diatur dalam Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan tertanggal 1 Maret 2024. Gratifikasi merupakan pemberian/ penerimaan uang/setara uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya dengan nilai berapa pun, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
9. Tata Kelola Terintegrasi
   Pada tahun 2024, Perseroan telah membentuk Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi.

IMPLEMENTASI 4 (EMPAT) PILAR GOVERNANSI PUGKI

Perseroan menjalankan prinsip-prinsip GCG berdasarkan pengembangan Pedoman Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) pada tahun 2021.

Dalam Pedoman Governansi Korporat Indonesia tahun 2021 menyoroti prinsip-prinsip utama yang terdapat dalam empat pilar governansi korporat, yakni etika perilaku, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan. Pilar-pilar tersebut mencerminkan perkembangan nilai-nilai fundamental yang mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Dengan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip tersebut, Perseroan berkomitmen untuk menerapkan praktik governansi korporat berstandar global yang direkomendasikan terutama untuk korporasi yang terdaftar di pasar modal dan mengelola dana masyarakat guna melindungi kepentingan dan memenuhi harapan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan lain agar tercapai penciptaan nilai korporasi yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

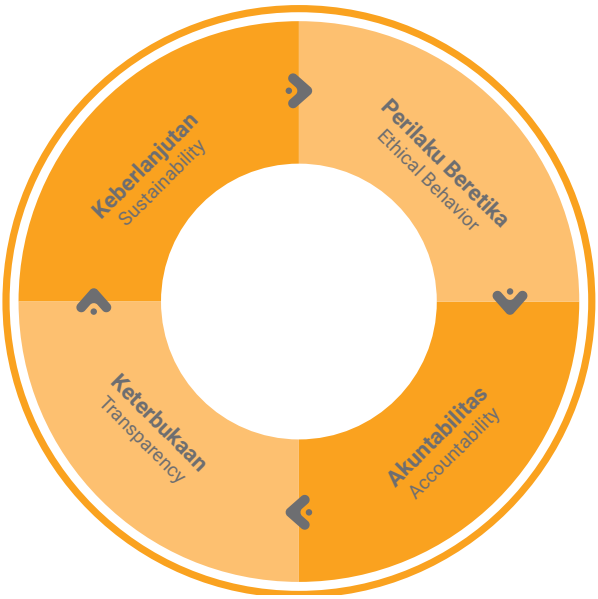
6. Improving the construction Orderbook Portfolio by focusing on projects with monthly progress payments with the aim of reducing cash deficits and working capital needs;
7. Reducing Operating Expenses by implementing ERP-based workforce manning on projects.
8. Gratification Control
   Gratification control at The Company has been regulated in the Anti-Bribery Management System Policy dated March 1, 2024. Gratification is the giving/receiving of money/cash equivalents, goods, rebates (discounts), commissions, interest-free loans, travel tickets, lodging facilities, tourist trips, free medical treatment, and other facilities of any value, whether received domestically or abroad, and carried out using electronic means or without electronic means.
9. Integrated Governance
   In 2024, the Company established an Risk Monitoring and Integrated Governance Committee.

IMPLEMENTATION OF THE 4 (FOUR) PILLARS OF PUGKI GOVERNANCE

The Company implements GCG principles based on the development of the Indonesian Corporate Governance Guidelines (Pedoman Governansi Korporat Indonesia - PUGKI) issued by the National Committee on Governance Policy (Komite Nasional Kebijakan Governansi - KNKG) in 2021.

The 2021 Indonesian Corporate Governance Guidelines highlight the main principles found in the four pillars of corporate governance, namely ethics of conduct, accountability, transparency, and sustainability. These pillars reflect the development of fundamental values that include transparency, accountability, responsibility, independence, as well as fairness and equality. With a strong commitment to these principles, the Company is committed to implementing global standard corporate governance practices recommended especially for corporations listed on the capital market and managing public funds to protect the interests and meet the expectations of shareholders and other stakeholders hence the creation of sustainable long-term corporate value is achieved.

Pillar Governansi Korporat Indonesia
Pillars of Indonesian Corporate Governance



Perseroan memiliki tekad yang kuat untuk konsisten mengimplementasikan empat pilar governansi korporat dengan fokus pada adaptasi terhadap perkembangan terkini, tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta prinsip pembangunan berkelanjutan. Selain itu, Perseroan secara berkala melakukan evaluasi kinerja secara transparan, serta menjaga independensi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. Dengan langkah-langkah ini, Perseroan yakin mampu menciptakan praktik governansi yang lebih baik dan berkelanjutan di lingkungan korporat.

The Company has a strong determination to consistently implement the four pillars of corporate governance with a focus on adapting to the latest developments, social and environmental responsibility, and sustainable development principles. In addition, the Company regularly conducts performance evaluations transparently, as well as maintaining the independence and remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners. With these steps, the Company believes it can create better and more sustainable governance practices within the corporate environment.

IMPLEMENTASI PRAKTIK TATA KELOLA PERUSAHAAN BERDASARKAN ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD
IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE CORPORATE GOVERNANCE

Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*/GCG) merupakan prinsip-prinsip yang diterapkan Perseroan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja dan menjaga keberlanjutan perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Perseroan mengacu pada ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS) sebagai inisiatif untuk meningkatkan standar dan praktik tata kelola korporasi. ACGS merupakan instrumen yang dikembangkan oleh ASEAN *Capital Market Forum* (ACMF) untuk mengevaluasi praktik tata kelola perusahaan di kawasan ASEAN, bertujuan meningkatkan standar dan praktik tata kelola perusahaan publik di ASEAN serta meningkatkan visibilitas perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik di mata investor.

Good Corporate Governance (GCG) is the principles applied by the Company to maximize the company's value, improve performance and maintain the company's sustainability in both the short and long term period of time.

The Company refers to the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) as an initiative to improve corporate governance standards and practices. ACGS is an instrument developed by the ASEAN Capital Market Forum (ACMF) to evaluate corporate governance practices in the ASEAN region, aimed at improving the standards and practices of public company governance in ASEAN and increasing the visibility of companies with good governance in the eyes of investors.

Menurut Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD), tujuan dilakukannya ACGS yaitu:

1. Meningkatkan standar-standar dan praktik-praktik tata kelola korporasi dari perusahaan-perusahaan terbuka di ASEAN;
2. Memperbesar kelayakan global bagi perusahaan-perusahaan terbuka ASEAN dengan tata kelola korporasi yang baik dan menunjukkan kepada mereka (masyarakat global) bahwa perusahaan-perusahaan ini adalah tempat untuk berinvestasi; dan
3. Melengkapi inisiatif-inisiatif ACMF lainnya dan mempromosikan ASEAN sebagai suatu kelompok *asset class*.

ACGS sebagai suatu alat kuantitatif untuk mengukur kepatuhan perusahaan-perusahaan terbuka di ASEAN terhadap pedoman *corporate governance* menurut praktik- praktik keteladanan berbasis standar-standar internasional, khususnya prinsip-prinsip *corporate governance* yang dikeluarkan oleh *the Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dengan pengungkapan, meliputi:

a. Hak-hak dan perlakuan yang setara terhadap para pemegang saham;
b. Keberlanjutan dan ketangguhan;
c. Pengungkapan dan transparansi; dan
d. Tanggung jawab Dewan.

Pada tahun 2024, Perseroan melaksanakan asesmen terhadap praktik tata kelola perusahaan berdasarkan ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) yang dilakukan oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD). Adapun alur proses penilaian kinerja praktik GCG berdasarkan ACGS adalah sebagai berikut:

According to the Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD), the objectives of ACGS are:

1. Improving the standards and practices of corporate governance of public companies in ASEAN;
2. Enhancing the global viability of public companies in ASEAN with good corporate governance and showing them (the global community) that these companies are a place to invest; and
3. Complementing other ACMF initiatives and promoting ASEAN as an asset class group.

ACGS as a quantitative tool to measure the compliance of public companies in ASEAN with corporate governance guidelines according to exemplary practices based on international standards, especially the principles of corporate governance issued by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) with disclosures, including:

a. Equal rights and treatment of shareholders;
b. Sustainability and resilience;
c. Disclosure and transparency; and
d. The Board responsibilities.

In 2024, the Company conducted an assessment of corporate governance practices based on the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) conducted by the Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD). The process flow for assessing the performance of GCG practices based on ACGS is as follows:

Bagan Alur Proses Penilaian & Multiple Checks and Balances Praktik GCG Based on ACGS Tahun Buku 2023 untuk Tahun 2024

Chart Assessment Process Flow and Multiple Checks and Balances of GCG Practices Based on ACGS Fiscal Year 2023 to 2024



Sumber-sumber informasi atau dokumen-dokumen yang dimaksud antara lain sebagai berikut.

a. Laporan Tahunan (*Annual Report*) perusahaan tahun 2023;
b. Laporan Keuangan yang diaudit untuk tahun buku 2023;
c. Anggaran Dasar Perusahaan;
d. Pedoman Kerja Dewan dan Komite-Komite Dewan;
e. Website Perusahaan; serta
f. Informasi-informasi publik relevan lainnya.

The sources of information or documents referred to include the following.

a. The company's 2023 Annual Report;
b. Audited Financial Statements for the 2023 fiscal year;
c. The Company's Articles of Association;
d. Work Guidelines for the Board and Board Committees;
e. Company Website; and
f. Other relevant public information.

HASIL PENILAIAN PRAKTIK TATA KELOLA PERUSAHAAN (GCG) BERDASARKAN ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD

Prinsip A: Hak-Hak dan Perlakuan Setara Kepada Pemegang Saham (Rights Equitable Treatment of Shareholders)

Praktik tata kelola perusahaan yang baik tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan para pemegang saham serta upaya perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk memberikan jaminan perlakuan yang setara terhadap pemegang sahamnya. Sudah seharusnya perusahaan memberi perhatian khusus kepada para pemegang saham melalui dipenuhinya hak-hak mereka untuk ikut melakukan kontrol secara berkelanjutan terhadap jalannya aktivitas operasi perusahaan. Oleh karena itu, OECD menetapkan bahwa hak-hak pemegang saham dan perlakuan setara kepada pemegang saham merupakan prinsip pertama dalam pelaksanaan *Corporate Governance* yang baik oleh perusahaan.

Pada prinsip hak-hak pemegang saham *(Rights and Equitable Treatment of Shareholders)* terdiri dari 9 (sembilan) parameter kunci sebagai berikut:

1. Hak dasar pemegang saham;
2. Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan menggunakan suara dalam RUPS serta hak untuk mendapatkan informasi mengenai aturan-aturan yang berlaku dalam RUPS (termasuk prosedur pemungutan suara);
3. Pasar untuk pengendalian/kontrol perusahaan harus dimungkinkan berfungsi dengan cara yang efisien dan transparan;
4. Pelaksanaan hak kepemilikan pemegang saham, termasuk investor institusi difasilitasi perusahaan;
5. Kepemilikan saham dan hak suara;
6. Panggilan RUPST;
7. Perdagangan orang dalam dan self-dealing abusive (penyalahgunaan wewenang) haruslah dilarang;
8. Transaksi pihak berelasi yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris & Direksi;
9. Perlindungan kepada para pemegang saham minoritas dari tindakan-tindakan abusive.

Prinsip B: Keberlanjutan dan Ketangguhan *(Sustainability and Resilience)*

Pada Prinsip Keberlanjutan dan Ketangguhan *(Sustainability and Resilience)* terdiri atas 7 (tujuh) parameter kunci sebagai berikut.

1. Pengungkapan terkait keberlanjutan harus konsisten, dapat dibandingkan dan dapat diandalkan, serta mencakup materi informasi masa lalu dan masa depan yang wajar dan penting bagi investor dalam membuat keputusan investasi atau menentukan suara;
2. Kerangka tata kelola perusahaan harus memungkinkan adanya dialog antara perusahaan, pemegang saham dan pemangku kepentingan untuk bertukar pandangan mengenai masalah keberlanjutan;

RESULTS OF CORPORATE GOVERNANCE PRACTICE ASSESSMENT (GCG) BASED ON ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD

Principle A: Rights and Equitable Treatment of Shareholders

Good corporate governance practices are inseparable from the involvement of shareholders and the company's undertakings in carrying out its responsibilities to provide guarantees of equal treatment for its shareholders. Companies should pay special attention to shareholders by fulfilling their rights to participate in continuous control over the company's operational activities. Therefore, the OECD stipulates that shareholder rights and equal treatment of shareholders are the first principles in the implementation of good Corporate Governance by companies.

The principle of Rights and Equitable Treatment of Shareholders consists of 9 (nine) key parameters as follows:

1. Basic rights of shareholders;
2. The right to participate effectively and use their votes in the GMS and the right to obtain information regarding the rules applicable in the GMS (including voting procedures);
3. The market for corporate control must be enabled to function in an efficient and transparent manner;
4. The implementation of shareholder ownership rights, including institutional investors, is facilitated by the company;
5. Share ownership and voting rights;
6. Summons for the AGM;
7. Insider trading and abusive self-dealing (abuse of authority) must be prohibited;
8. Related party transactions carried out by members of the Board of Commissioners & Board of Directors;
9. Protection of minority shareholders from abusive actions.

PRINCIPLE B: SUSTAINABILITY AND RESILIENCE

The Principle of Sustainability and Resilience consists of 7 (seven) key parameters as follows.

1. Disclosures related to sustainability must be consistent, comparable and reliable, and include past and future information that is reasonable and important for investors in making investment decisions or determining votes;
2. The corporate governance framework shall allow for dialogue between the company, shareholders and stakeholders to exchange views on sustainability issues;

3. Kerangka tata kelola perusahaan harus memastikan bahwa dewan Direksi secara memadai mempertimbangkan risiko dan peluang keberlanjutan yang material ketika menjalankan perannya dalam menelaah, memantau dan memandu praktik tata kelola, pengungkapan, strategi, sistem manajemen risiko dan pengendalian internal, termasuk yang berkaitan dengan risiko fisik dan transisi terkait perubahan iklim;
4. Hak-hak para pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh UU atau lewat kesepakatan bersama haruslah dihormati dan mendorong kerja sama aktif antara perusahaan dan pemangku kepentingan dalam menciptakan kesejahteraan, lapangan kerja dan keuangan berkelanjutan;
5. Para pemangku kepentingan haruslah memiliki peluang untuk mendapatkan ganti rugi efektif untuk pelanggaran-pelanggaran atas hak-hak mereka;
6. Mekanisme-mekanisme meningkatkan kinerja untuk partisipasi karyawan haruslah dimungkinkan berkembang;
7. Para pemangku kepentingan, termasuk karyawan individu dan badan-badan perwakilan mereka, haruslah dapat secara bebas mengomunikasikan keprihatinan mereka kepada dewan atas praktik-pratik melanggar hukum dan tidak etis, serta hak-hak mereka melakukan ini haruslah dilindungi.

Prinsip C: Pengungkapan dan Transparansi (Disclosure and Transparency)

Pada Prinsip Pengungkapan dan Transparansi *(Disclosure and Transparency*) terdiri atas 10 (sepuluh) parameter kunci sebagai berikut:

1. Transparansi Struktur Kepemilikan;
2. Kualitas Laporan Tahunan;
3. Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
4. Pengungkapan atas Transaksi Hubungan Istimewa;
5. Pengungkapan atas Transaksi Saham Perusahaan yang Dilakukan oleh Para Anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
6. Eksternal Auditor dan Laporan Auditor;
7. Media Komunikasi Perusahaan;
8. Penyampaian Informasi Laporan Keuangan atau Laporan Tahunan secara Tepat Waktu;
9. Website Perusahaan;
10. Hubungan-hubungan Investor.

Prinsip D: Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris (Responsibilities of The Board)

Pada prinsip Tanggung Jawab Dewan Komisaris *(Responsibilities of The Board*) terdiri atas lima parameter kunci/utama, dimana untuk masing-masing parameter terdiri atas beberapa parameter pengukuran yakni sebagai berikut:

3. The corporate governance framework shall ensure that the Board of Directors adequately considers material sustainability risks and opportunities when carrying out its role in reviewing, monitoring and guiding governance practices, disclosures, strategies, risk management systems and internal controls, including those related to physical and transition risks related to climate change;
4. The rights of stakeholders as stipulated by law or through mutual agreements must be respected and encourage an active cooperation between the company and stakeholders in creating sustainable prosperity, jobs and finance;
5. Stakeholders should have the opportunity to obtain effective redress for violations of their rights;
6. Performance-enhancing mechanisms for employee participation should be enabled to develop;
7. Stakeholders, including individual employees and their representative bodies, should be able to freely communicate their concerns to the board about illegal and unethical practices, as well as shall to protect their rights to do so.

Principle C: Disclosure and Transparency

The Disclosure and Transparency Principle consists of 10 (ten) key parameters as follows:

1. Transparency of Shareholding Structure;
2. Quality of Annual Report;
3. Remuneration of Members of the Board of Commissioners and Board of Directors;
4. Disclosure of Related Party Transactions;
5. Disclosure of Company Share Transactions Conducted by Members of the Board of Directors and Board of Commissioners;
6. External Auditor and Auditor's Report;
7. Company Communication Media;
8. Timely Submission of Financial Report or Annual Report Information;
9. Company Website;
10. Investor Relations.

Principle D: Responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners

The principle of Responsibilities of the Board of Commissioners consists of five key/main parameters, where each parameter consists of several measurement parameters, namely as follows:

1. Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris:

   - Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris dan Kebijakan tata kelola harus dinyatakan secara jelas oleh perusahaan; dan
   - Visi dan Misi Perusahaan.

2. Struktur Dewan Komisaris:
   - Kode Etik atau Kode Perilaku;
   - Struktur dan Komposisi Dewan Komisaris;
   - Komite Nominasi;
   - Komite Remunerasi/Komite Kompensasi; dan
   - Komite Audit.

3. Proses Dewan Komisaris:
   - Rapat dan Kehadiran Dewan Komisaris;
   - Akses Informasi;
   - Penunjukkan dan Pemilihan Kembali anggota Dewan Komisaris;
   - Perihal Mengenai Remunerasi;
   - Audit Internal; dan
   - Pengawasan Risiko *(Risk Oversight)*.

4. Individu Dalam Susunan Dewan Komisaris;
   - Komisaris Utama Perusahaan; dan
   - Keahlian dan Kompetensi Dewan Komisaris.

5. Kinerja Dewan Komisaris:
   - Pelatihan/Pengembangan Dewan Komisaris;
   - Penunjukkan dan Penilaian Kinerja Direktur Utama;
   - Penilaian Kinerja Dewan Komisaris;
   - Penilaian Kinerja untuk anggota Dewan Komisaris; dan
   - Penilaian Kinerja untuk Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris.

Berikut rangkuman hasil Penilaian Kinerja Praktik Tata Kelola Perusahaan untuk Penilaian Tingkat 1 (Prinsip A sampai dengan D):

1. Duties and Responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners:
   - Responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners and Governance policies must be clearly stated by the company; and
   - Company Vision and Mission.

2. Structure of the Board of Commissioners:
   - Code of Conduct;
   - Structure and Composition of the Board of Commissioners;
   - Nomination Committee;
   - Remuneration Committee/Compensation Committee; and
   - Audit Committee.

3. Board of Commissioners Process:
   - Meetings and Attendance of the Board of Commissioners;
   - Access to Information;
   - Appointment and Re-election of members of the Board of Commissioners;
   - Matters Concerning Remuneration;
   - Internal Audit; and
   - Risk Oversight.

4. Individuals in the Board of Commissioners;
   - The Company's President Commissioner; and
   - Expertise and Competence of the Board of Commissioners.

5. Performance of the Board of Commissioners:
   - Training/Development of the Board of Commissioners;
   - Appointment and Performance Assessment of the President Director;
   - Performance Assessment of the Board of Commissioners;
   - Performance Assessment for members of the Board of Commissioners; and
   - Performance Assessment for Committees under the Board of Commissioners.

The following is a summary of the results of the Corporate Governance Practices Performance Assessment for Level 1 Assessment (Principles A to D):

Tabel Rangkuman Hasil Penilaian Kinerja Praktik Tata Kelola Perusahaan untuk Penilaian Tingkat 1
Table Summary of Corporate Governance Practice Performance Assessment Results for Level 1 Assessment

Prinsip Principle	**Jumlah Item Penilaian** Number of Assessment Items	**Total item penilaian yang telah dipenuhi (complied)** Total assessment items that have been fulfilled (complied)	**Bobot Penilaian** Assessment Weight	**Skor** Score
A*)	29	22	20%	15,17
B	22	17	15%	11,59
C*)	33	30	25%	22,72
D	63	52	40%	33,01
Level 1 Score	147	121	100%	82,49

*) Pada bagian A terdapat 1 item penilaian yang tidak dinilai sehingga jumlah item penilaian yang dinilai hanya menjadi 29 (dua puluh Sembilan) butir saja, dari seharusnya 30 (tiga puluh) butir item penilaian. Untuk item penilaian yang tidak dinilai lebih disebabkan karena ketentuan penilaian. Selain itu, bagian C juga memiliki item penilaian yang tidak dinilai sehingga jumlah item penilaian yang dinilai hanya menjadi 33 (tiga puluh tiga) butir saja, dari seharusnya 34 (tiga puluh empat) butir item penilaian.
*) In section A there is 1 assessment item that is not assessed so as to the number of assessment items assessed is only 29 (twenty-nine) items, from the supposed 30 (thirty) assessment items. For the assessment items that are not assessed, this is more due to the assessment provisions. In addition, section C also has an assessment item that is not assessed hence the number of assessment items assessed is only 33 (thirty three) items, from the supposed 34 (thirty four) assessment items.

Hasil Pencapaian Total *Corporate Governance Score* perusahaan untuk penilaian tingkat 1 pada ASEAN Corporate Governance Scorecard 2024 mencapai sebesar 82,49 poin.

The results of the company's Total Corporate Governance Score for level 1 assessment on the ASEAN Corporate Governance Scorecard 2024 realized 82.49 points.

BONUS DAN PENALTI

Bonus Poin untuk Praktik GCG Perusahaan

Perseroan memperoleh bonus pada periode penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard tahun 2024 (untuk tahun buku 2023) terdapat 5 (lima) item penilaian berikut ini:

(B) A.1.1: +2 poin. Penggunaan *electronic voting* dalam proses pemungutan suara *(voting)* pada saat penyelenggaraan RUPST untuk setiap agenda atau mata acara rapat.

(B) B.1.1: +2 poin. Adanya pengungkapan mengenai praktik yang telah dijalankan Perseroan dalam pengelolaan risiko dan peluang terkait dengan (perubahan) iklim.

(B) B.1.2: +2 poin. Terdapat pengungkapan yang menyatakan bahwa Laporan Keberlanjutan Perseroan telah ditinjau oleh pihak eksternal.

(B) B.1.3: +2 poin. Perseroan telah mengungkapkan informasi mengenai saluran keterlibatan dengan kelompok pemangku kepentingan, termasuk informasi tentang upaya Perseroan dalam merespon atau menanggapi masalah ESG para pemangku kepentingan.

(B) B.1.4: +1 poin. Perseroan telah memiliki unit/divisi/komite khusus yang mengelola atau bertanggung jawab untuk masalah keberlanjutan yang terdiri dari anggota manajemen.

BONUS AND PENALTY

Bonus Points for Company GCG Practices

The Company received a bonus point during the 2024 ASEAN Corporate Governance Scorecard assessment period (for the 2023 fiscal year) for the following 5 (five) assessment items:

(B) A.1.1: +2 points. Use of electronic voting in the voting process during the AGMS for each agenda or meeting agenda.

(B) B.1.1: +2 points. Disclosure of practices implemented by the Company in managing risks and opportunities related to climate change.

(B) B.1.2: +2 points. Disclosure stating that the Company's Sustainability Report has been reviewed by an external party.

(B) B.1.3: +2 points. The Company has disclosed information regarding engagement channels with stakeholder groups, including information about the Company's undertaking to respond to or address ESG issues of stakeholders.

(B) B.1.4: +1 point. The Company has a special unit/division/committee that manages or is responsible for sustainability issues consisting of management members.

(B) D.6.1: +1 poin. Perseroan memiliki Komite Risiko yang tergabung dengan Komite Audit.

Total poin bonus yang diperoleh Perseroan dalah 10 (sepuluh) poin.

Penalti Poin untuk Praktik GCG Perusahaan

Perseroan memperoleh penyesuaian poin atas pemenuhan dalam melaksanakan praktik tata kelola yang diminta/disyaratkan pada item penilaian berikut;

(P) A.3.2: (2) poin. Poin ini diberikan kepada Perseroan dalam hal Ketua Dewan Komisaris *(Chairman of the Board)*, Ketua seluruh Komite Dewan, dan CEO hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terbaru. Pada saat pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023, seluruh angota Dewan Komisaris hadir dalam Rapat, diantaranya 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris hadir secara fisik dan 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir secara daring.

Total poin penyesuaian yang diperoleh Perseroan adalah (2) atau minus dua poin. Sehingga Skor total untuk Komponen bonus dan penyesuaian (Penilaian Level 2) yang diperoleh Perseroan adalah sebesar 8 (delapan) poin.

(B) D.6.1: +1 point. The Company has a Risk Committee that is integrated with the Audit Committee.

The total bonus points obtained by the Company are 10 (ten) points.

Penalty Points for Corporate GCG Practices

The Company received a point adjustment for fulfilling the implementation of governance practices requested/required in the following assessment items;

(P) A.3.2: (2) points. This point is given to the Company if the Chairman of the Board, Chairmen of all Board Committees, and CEO are present at the most recent General Meeting of Shareholders (GMS). At the time of the 2023 Annual GMS, all members of the Board of Commissioners were present at the Meeting, including 3 (three) members of the Board of Commissioners who were physically present and 1 (one) member of the Company's Board of Commissioners who was present online.

The total adjustment points obtained by the Company are (2) or minus two points. Thus, the total score for the bonus and adjustment components (Level 2 Assessment) obtained by the Company is 8 (eight) points.

Tabel Rangkuman Hasil Penilaian Kinerja Praktik Tata Kelola Perusahaan untuk Penilaian Tingkat 2
Table Summary of Corporate Governance Practice Performance Assessment Results for Level 2 Assessment

Deskripsi Description	Jumlah Item Penilaian Number of Assessment Items	Total Item Penilaian Total Assessment Items	Skor Score
BONUS*) BONUS*)	16	6	10
PENALTI*) PENALTY*)	16	1	(2)
Level 2 Score			8

Hasil pencapaian Total *Corporate Governance Score* perusahaan untuk penilaian tingkat 2 berdasarkan ASEAN Scorecard 2024 adalah sebesar 8 poin. Skor tersebut lebih baik apabila dibandingkan dengan pencapaian skor rata-rata untuk penilaian tingkat 2 pada perusahaan publik (Tbk) atau emiten yang masuk dalam 100 kapitalisasi pasar terbesar di bursa (Big Cap) yang nilainya sebesar 4,98.

The company's Total Corporate Governance Score achievement for level 2 assessment based on the ASEAN Scorecard 2024 is 8 points. This score is better when compared to the average score achievement for level 2 assessment in public companies (Tbk) or issuers included in the 100 largest market capitalizations on the stock exchange (Big Cap) which is 4.98.

Tabel Penilaian Kinerja Praktik Tata Kelola Perusahaan Berdasarkan ASEAN Corporate Governance Scorecard
Table Corporate Governance Practice Performance Assessment Based on ASEAN Corporate Governance Scorecard

No.	Komponen Penilaian Assessment Components	Skor Tertimbang per Prinsip Weighted Score per Principle
1.	Hak-Hak dan Perlakuan Setara Terhadap Pemegang Saham Rights and Equal Treatment of Shareholders	15,17
2.	Keberlanjutan dan Ketangguhan Sustainability and Resilience	11,59
3.	Keterbukaan Dan Transparansi Openness and Transparency	22,72
4.	Tanggung Jawab Dewan Komisaris Responsibilities of the Board of Commissioners	33,01
	Total Skor Penilaian Tingkat 1 Total Score Level 1 Assessment	82,49
5.	Bonus Bonus	10
6.	Penalti Penalty	(2)
	Total Skor Penilaian Tingkat 2 Total Score Level 2 Assessment	8
	Total Skor Tertimbang Total Weighted Score	90,49

Berdasarkan hasil penilaian diatas, menunjukkan bahwa skor keseluruhan tertimbang *(overall score)* WEGE adalah 90,49 poin. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tingkat kepatuhan Perseroan termasuk dalam predikat "Very Good" atau Level 4 (90,00 - 99,99), artinya praktik GCG yang dilakukan Perseroan mengadopsi secara penuh standar internasional.

Perseroan terus menyempurnakan praktik tata kelola di lingkungan perusahaan untuk mengoptimalkan dan menciptakan pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan dengan mengutamakan perlindungan hak-hak dan kepentingan perusahaan serta kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Based on the assessment results above, it shows that the overall weighted score of WEGE is 90.49 points. This indicates that the Company's compliance level performance is included in the predicate "Very Good" or Level 4 (90.00 - 99.99), meaning that the GCG practices carried out by the Company that fully adopt the international standards.

The Company continues to improve governance practices in the company environment to optimize and create sustainable performance growth by prioritizing the protection of the rights and interests of the company as well as the interests of shareholders and stakeholders.

Struktur dan Mekanisme Corporate Governance

Structure and Mechanism of Corporate Governance

STRUKTUR TATA KELOLA DAN MEKANISME HUBUNGAN ANTAR ORGAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan memiliki organ utama mencakup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai sarana komunikasi dengan pemegang saham; Direksi dengan tanggung jawab mengelola Perusahaan serta Dewan Komisaris yang berfungsi melakukan pengawasan atas strategi yang telah dibuat oleh Direksi. Seluruh organ tersebut memiliki wewenang dan tugas tanggung jawab sebagaimana tertera dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Sebagai sebuah perusahaan publik yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), struktur GCG Perseroan juga mengikutsertakan beberapa aspek penting untuk mendukung penguatan kontrol dan pengawasan Perseroan dari komite-komite di bawah Dewan Komisaris maupun Direksi.

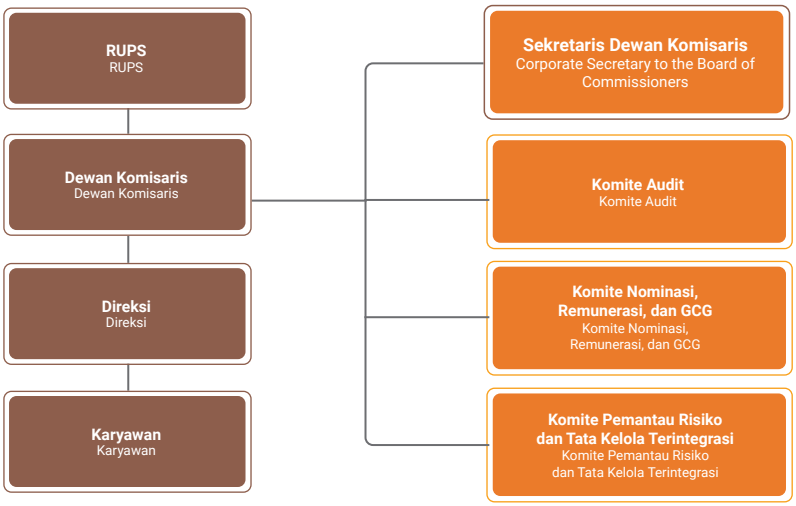
Adapun struktur GCG Perusahaan yang dimaksud dijelaskan pada bagan berikut ini:

GOVERNANCE STRUCTURE AND MECHANISM OF INTER-ORGAN RELATIONSHIPS

Based on Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the Company has main organs including the General Meeting of Shareholders (GMS) as a means of communication with shareholders; the Board of Directors with the responsibility of managing the Company; and the Board of Commissioners which functions to supervise the strategies made by the Board of Directors. All these organs have the authorities and responsibilities as stated in the aforementioned laws and regulations.

As a public company whose shares are listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI), the Company's GCG structure also includes several important aspects to support the strengthening of the Company's control and supervision from committees under the Board of Commissioners and the Board of Directors.

The Company's GCG structure mentioned is explained in the following chart:



MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

Mekanisme tata kelola perusahaan adalah sistem yang mengatur pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Adapun mekanisme tersebut didukung oleh Organ Perseroan seperti RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, dan organ pendukung lainnya mempunyai peran penting dalam pelaksanaan GCG secara efektif. Organ Perusahaan harus menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya untuk kepentingan.

MECHANISM OF THE COMPANY'S GOVERNANCE

The Company governance mechanism is a system that regulates the management of the company in accordance with the principles of GCG. This mechanism is supported by the Company's Organs such as the GMS, Board of Commissioners, Board of Directors, and other supporting organs that have an important role in the effective implementation of GCG. The Company's Organs shall carry out their functions in accordance with prevailing regulations based on the principle that each organ has transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness in carrying out its duties, functions, and responsibilities for the benefit of the company.

RUPS merupakan organ Perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan yang mewakili kepentingan pemegang saham dan mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang atau anggaran dasar Perseroan. Kewenangan RUPS antara lain mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui perubahan Anggaran Dasar, menyetujui laporan tahunan dan menetapkan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta mengambil keputusan terkait tindakan korporasi.

Sementara Dewan Komisaris dan Direksi memiliki tanggung jawab untuk memelihara keberlanjutan usaha Perseroan. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kedua organ tersebut didukung oleh organ pendukung masing-masing. Dewan Komisaris dibantu oleh Organ Pendukung yang berada di bawah Dewan Komisaris yang terdiri dari Komite Audit dan Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG, Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi. Kemudian, Direksi didukung oleh Sekretaris Perusahaan, Internal Audit, Sistem Pengendalian Internal dan organ pendukung lainnya.

SOFT STRUCTURE TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perseroan telah menetapkan kebijakan dan pedoman dengan standar tata kelola yang berlaku untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip GCG di lingkungan Perseroan. Sebagai bagian dari struktur tata kelola, Perseroan juga mengembangkan *soft structure* yang mendukung penerapan GCG secara efektif.

Berikut adalah *soft structure* GCG yang ada di WIKA:

1. Akta Anggaran Dasar PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk;
2. Panduan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Code of GCG)* PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, yang telah dimutakhirkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi yang berlaku;
3. Pedoman Tata Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (Board Manual) PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk yang telah dimutakhirkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama yang berlaku;
4. Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct) PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk yang telah dimutakhirkan berdasarkan Surat Keputusan yang berlaku;
5. Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Perseroan yang telah dimutakhirkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama yang berlaku;
6. Instruksi Kerja Pengendalian Gratifikasi;
7. Instruksi Kerja Pengaduan Pelanggaran terhadap *Code of Conduct (Whistleblowing System);*
8. Piagam Komite;
9. Piagam Satuan Pengendalian Internal;
10. Prosedur Sistem Manajemen Risiko; serta
11. Prosedur Perseroan lainnya.

The GMS is the Company's organ that holds the highest power in the company, representing the interests of shareholders and having authority that is not granted to the Board of Directors or the Board of Commissioners, within the limits specified in the law or the Company's articles of association. The authority of the GMS includes appointing and dismissing members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, evaluating the performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors, approving amendments to the Articles of Association, approving the annual report and determining the amount of remuneration for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, as well as making decisions related to corporate actions.

Meanwhile, the Board of Commissioners and the Board of Directors have the responsibility to maintain the sustainability of the Company's business. The performance of the duties and responsibilities of these two organs is supported by their respective supporting organs. The Board of Commissioners is assisted by Supporting Organs under the Board of Commissioners consisting of the Audit Committee and Nomination, Remuneration, and GCG Committee, and Risk Monitoring and Integrated Governance Committee. Next, the Board of Directors is supported by the Corporate Secretary, Internal Audit, Internal Control System, and other supporting organs.

SOFT STRUCTURE OF THE COMPANY GOVERNANCE

The Company has established policies and guidelines with prevailing governance standards to ensure the implementation of GCG principles within the Company's environment. As part of the governance structure, the Company also develops a soft structure that supports the effective implementation of GCG.

The following is the GCG soft structure in WIKA:

1. Deed of the Articles of Association of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk;
2. Guide of the Implementation for Good Corporate Governance (Code of GCG) of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, which has been updated based on applicable Board of Directors Decrees;
3. Work Guidelines for the Board of Directors and Board of Commissioners (Board Manual) of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk which has been updated based on applicable Joint Decrees;
4. Code of Conduct of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk which has been updated based on applicable Decrees;
5. Guidelines for Handling Conflicts of Interest of the Company which has been updated based on applicable Joint Decrees;
6. Work Instruction for Gratification Control;
7. Work Instruction for Reporting Violations of the Code of Conduct (Whistleblowing System);
8. Committee Charter;
9. Internal Control Unit Charter;
10. Risk Management System Procedures; and
11. Other Company Procedures.

Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting of Shareholders

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ Perusahaan Terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris ata Direksi sebagaimana Dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Perencanaan dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka harus diselenggarakan paling lambat enam bulan setelah akhir tahun fiskal. Perseroan juga dapat menyelenggarakan satu atau lebih Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) setiap saat sepanjang tahun jika dipandang perlu oleh pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi.

Rapat Umum Pemegang Saham juga menjadi wadah bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bisnis dan operasional Perseroan diantara persetujuan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan, pembayaran dividen dan pembagian keuntungan, remunerasi Direksi dan Komisaris, penunjukkan auditor independen, perubahan Anggaran Dasar dan pendelegasian wewenang kepada Dewan untuk menindaklanjuti hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam RUPS.

Sepanjang tahun 2024, Perseroan menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS yang terdiri dari 1 (satu) RUPST di tanggal 20 Mei 2024 dan 1 (satu) RUPSLB di tanggal 29 Februari 2024.

WEWENANG RUPS

Setiap keputusan yang diambil dalam RUPS didasarkan pada kepentingan Perusahaan dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Pemegang Saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Beragam wewenang RUPS yang berlaku di Perseroan sebagai berikut:

1. Memutuskan penyetoran saham dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya, misalnya dalam bentuk benda tidak bergerak;
2. Menyetujui dapat tidaknya pemegang saham dan kreditor lainnya yang mempunyai tagihan terhadap Perusahaan menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham yang telah diambilnya;
3. Menyetujui pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan;
4. Menyetujui penambahan modal Perusahaan;
5. Memutuskan pengurangan modal Perusahaan;
6. Menyetujui rencana kerja yang diajukan oleh Direksi;
7. Memutuskan penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan;

The General Meeting of Shareholders (GMS) is an organ of a Public Company that has authority which is not granted to the Board of Commissioners or the Board of Directors as referred to in the Law concerning limited liability companies and/or the Articles of Association of the Public Company.

As stipulated in OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Holding of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, it must be held no later than six months after the end of the fiscal year. The Company may also hold one or more Extraordinary General Meetings of Shareholders (RUPSLB) at any time throughout the year if deemed necessary by shareholders, the Board of Commissioners, and the Board of Directors.

The General Meeting of Shareholders also serves as a forum for shareholders to make decisions regarding matters related to the Company's business and operations, including the approval of the Company's Financial Statements and Annual Report, dividend payments and profit distribution, remuneration of the Board of Directors and Commissioners, appointment of independent auditors, amendments to the Articles of Association, and delegation of authority to the Board to follow up on matters discussed and agreed upon in the GMS.

Throughout 2024, the Company held 2 (two) GMS, consisting of 1 (one) Annual GMS (AGMS) on May 20, 2024, and 1 (one) Extraordinary GMS (EGMS) on February 29, 2024.

AUTHORITY OF THE GMS

Every resolution made in the GMS is based on the Company's interests in the long term and the short term. Shareholders cannot intervene in the duties, functions, and authority of the Board of Commissioners and the Board of Directors without reducing the authority of the GMS to exercise its rights in accordance with the Articles of Association and prevailing laws and regulations.

The various authorities of the GMS applicable in the Company are as follows:

1. Deciding on the payment of shares in cash and/or in other forms, for example, in the form of immovable property;
2. Approving whether or not shareholders and other creditors who have claims against the Company can use their receivables as compensation for the obligation to pay for the price of shares they have taken;
3. Approving the repurchase of shares that have been issued;
4. Approving the increase of the Company's capital;
5. Deciding on the reduction of the Company's capital;
6. Approving the work plan proposed by the Board of Directors;
7. Deciding on the use of net profit, including determining the amount of appropriation for reserves;

8. Mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke cadangan khusus;
9. Memutuskan tentang penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan agar Perusahaan dinyatakan pailit, perpanjangan waktu berdirinya dan pembubaran Perusahaan;
10. Memutuskan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara Direksi dalam hal Direksi terdiri atas 2 anggota Direksi atau lebih;
11. Mengangkat anggota Dewan Komisaris;
12. Menetapkan ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris;
13. Memutuskan dapat atau tidaknya Dewan Komisaris melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu;
14. Mengangkat Komisaris Independen;
15. Mengangkat anggota Direksi;
16. Memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya;
17. Mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
18. Memutuskan ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi;
19. Memutuskan tentang kewenangan Direksi untuk mewakili Perusahaan dalam hal Direksi lebih dari 1 orang;
20. Menyetujui untuk mengalihkan kekayaan Perusahaan, atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perusahaan, yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perusahaan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak;
21. Menyetujui dapat atau tidaknya Direksi mengajukan permohonan pailit atas Perusahaan kepada Pengadilan Niaga.

JENIS RUPS

Berpedoman kepada POJK tentang pelaksanaan RUPS dan Anggaran Dasar, RUPS Perusahaan terdiri dari RUPS Tahunan (RUPST) dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB), yaitu:

1. RUPS Tahunan, dimana wajib diselenggarakan paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Dalam kondisi tertentu Otoritas dapat menetapkan batas waktu selain ketentuan tersebut dengan mempertimbangkan Perusahaan sebagai sebuah perusahaan publik.
2. RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan.

8. Regulating the procedures for taking dividends that have been included in special reserves;
9. Deciding on mergers, consolidations, acquisitions, or spin-offs, filing for the Company to be declared bankrupt, extending the Company's term of establishment, and dissolving the Company;
10. Deciding on the division of duties and management authority among the Directors if the Board of Directors consists of 2 or more Directors;
11. Appointing members of the Board of Commissioners;
12. Stipulating the amount of remuneration or honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners;
13. Deciding whether or not the Board of Commissioners can take management actions of the Company in certain circumstances for a certain period;
14. Appointing Independent Commissioners;
15. Appointing members of the Board of Directors;
16. Dismissing members of the Board of Directors at any time by stating the reasons;
17. Revoking or affirming the temporary dismissal of members of the Board of Directors that has been determined by the Board of Commissioners;
18. Deciding on the amount of remuneration and allowances for members of the Board of Directors;
19. Deciding on the authority of the Board of Directors to represent the Company if the Board of Directors consists of more than 1 person;
20. Approving the transfer of the Company's assets, or making the Company's assets as collateral for debt, which is more than 50% of the Company's net assets in one or more transactions, whether related to each other or not;
21. Approving whether or not the Board of Directors can file a bankruptcy petition for the Company with the Commercial Court.

TYPES OF GMS

Referring to the OJK Regulation on the implementation of GMS and the Articles of Association, the Company's GMS consists of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS), namely:

1. The Annual General Meeting of Shareholders (AGMS), which must be held no later than 6 months after the end of the fiscal year. Under certain conditions, the Authority may set a deadline other than the aforementioned provision by considering the Company as a public company.
2. The Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) can be held at any time based on the needs for the Company's interests.

KETENTUAN PENYELENGGARAAN RUPS

Ketentuan penyelenggaraan RUPS telah diatur dalam POJK, berikut tata cara penyelenggaraan RUPS perusahaan terbuka:

a. Pemberitahuan
   Paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPST dan RUPSLB, pemberitahuan mata acara RUPST dan RUPSLB wajib disampaikan secara jelas dan rinci kepada OJK.

b. Pengumuman
   - Pengumuman RUPST dan RUPSLB dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPST dan RUPSLB.
   - Pengumuman RUPST dan RUPSLB disampaikan kepada para pemegang saham paling kurang melalui situs eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia (BEI), dan situs web Perseroan. Selain itu, pengumuman RUPST dan RUPSLB dapat dilakukan melalui surat kabar harian berperedaran nasional.
   - Pemegang saham secara individu atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dapat mengusulkan mata acara RUPS. Usulan dari para pemegang saham diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan dan akan dimasukkan ke dalam mata acara RUPS jika memenuhi ketentuan Pasal 16 POJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

c. Pemanggilan
   - Jangka waktu pemanggilan RUPS paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum penyelenggaraan RUPSLB dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan serta tanggal penyelenggaraan RUPSLB. Perseroan juga menyampaikan penjelasan untuk masing-masing mata acara yang memerlukan persetujuan pemegang saham.
   - Pemanggilan RUPST dan RUPSLB dilakukan paling kurang melalui situs eASY.KSEI dimana Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy), situs web Bursa Efek Indonesia (BEI), dan situs web Perseroan. Selain itu, pemanggilan RUPST dan RUPSLB dapat dilakukan melalui surat kabar harian berperedaran nasional.
   - Untuk memudahkan pemegang saham, formulir surat kuasa (proxy) dapat diunduh pada situs web Perseroan bagian Tata Kelola atau dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan yang beralamat Gedung WIKA Tower 1, Lt.7-10, Jl. DI. Panjaitan No.Kav 9, RT.1/RW.11, Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13340

PROVISIONS FOR THE GMS

The provisions for the GMS have been regulated in the OJK Regulation, and the procedures for holding the GMS of a public company are as follows:

a. Notification
   No later than 5 (five) working days before the announcement of the AGMS and EGMS, notification of the agenda items of the AGMS and EGMS must be submitted clearly and in detail to the OJK.

b. Announcement
   - The announcement of the AGMS and EGMS is made no later than 14 (fourteen) days before the convening of the AGMS and EGMS.
   - The announcement of the AGMS and EGMS is conveyed to shareholders at least through the eASY.KSEI website, the Indonesia Stock Exchange (BEI) website, and the Company's website. In addition, the announcement of the AGMS and EGMS can be made through a national daily newspaper.
   - Individual shareholders or more who together represent 1/20 (one-twentieth) or more of the total number of issued shares of the Company with valid voting rights may propose agenda items for the GMS. Proposals from shareholders are received no later than 7 (seven) days before the date of the convening and will be included in the agenda items of the GMS if they meet the provisions of Article 16 of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 dated April 20, 2020, concerning the Planning and Holding of the General Meeting of Shareholders of Public Companies.

c. Convening
   - The deadline for convening the EGMS is no later than 21 (twenty-one) days before the holding of the EGMS, excluding the date of the convening and the date of the EGMS. The Company also provides explanations for each agenda item that requires shareholder approval.
   - The convening of the AGMS and EGMS is carried out at least through the eASY.KSEI website where Shareholders can grant power of attorney electronically (e-Proxy), the Indonesia Stock Exchange (BEI) website, and the Company's website. In addition, the convening of the AGMS and EGMS can be done through a national daily newspaper.
   - To facilitate shareholders, the power of attorney (proxy) form can be downloaded on the Company's website under the Governance section or can be obtained at the Company's Head Office located at WIKA Tower 1 Building, 7th-10th Floors, Jl. DI. Panjaitan No.Kav 9, RT.1/RW.11, Cipinang Cempedak, Jatinegara District, East Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta 13340.

d. Penyelenggaraan
   - Pemegang saham atau wakil pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPST adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 25 April 2024 pukul 16.15 WIB dan pemegang saham atau wakil pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 11 Februari 2024 pukul 16.15 WIB.
   - Untuk RUPST, sesuai dengan Pasal 23 Ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, RUPS adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika para pemegang saham atau wakilnya yang sah, yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan hadir dan/atau diwakili dalam RUPS, kecuali ditentukan lain.
   - Untuk RUPSLB, sesuai dengan pasal Pasal 27 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, RUPSLB adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila para pemegang saham Perseroan yang mewakili paling sedikit 2 /3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah hadir dan/atau diwakili dalam RUPSLB.
   - Setiap saham yang dikeluarkan memiliki 1 (satu) hak suara, ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan tidak terdapat pembagian lebih dari satu kelas saham yang dapat memengaruhi hak suara yang berbeda.
e. Risalah Rapat
   - Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB diumumkan kepada publik melalui situs web Perseroan dalam 1 (satu) hari kerja setelah RUPST dan RUPSLB diselenggarakan serta melalui surat kabar harian berperedaran nasional dan situs web BEI paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPST dan RUPSLB diselenggarakan. Selain itu, Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB dapat diumumkan melalui situs eASY. KSEI.
   - Bukti pengumuman Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.
   - Berita Acara RUPST dan RUPSLB kepada OJK dan BEI disampaikan paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah RUPST dan RUPSLB diselenggarakan. Salinan Berita Acara tersebut dapat diakses dan diunduh oleh publik di situs web Perseroan bagian Tata Kelola.

Penyelenggaraan RUPS secara elektronik, Perseroan berpedoman pada ketentuan OJK dan Anggaran Dasar. Perseroan berkomitmen memenuhi ketentuan pengumuman, pemanggilan dan pengumuman ringkasan melalui situs web penyedia e-RUPS. Situs web bursa efek dan situs web Perseroan.

Ketentuan lebih lengkap terkait penyelenggaraan RUPS dapat dilihat di Anggaran Dasar Perseroan terkini.

d. Implementation
   - Shareholders or their authorized representatives entitled to attend the AGMS are shareholders whose names are recorded in the Shareholder Register on April 25, 2024, at 16:15 WIB, and shareholders or their authorized representatives entitled to attend the EGMS are shareholders whose names are recorded in the Shareholder Register on February 11, 2024, at 16:15 WIB.
   - For the AGMS, in accordance with Article 23 Paragraph 1 of the Company's Articles of Association, the GMS is valid and entitled to make binding decisions if the shareholders or their legal representatives, representing more than ½ (one-half) of the total number of issued shares with valid voting rights of the Company, are present and/or represented in the GMS, unless otherwise specified.
   - For the EGMS, in accordance with Article 27 Paragraph 1 of the Company's Articles of Association, the EGMS is valid and can be held and make binding decisions if the Company's shareholders representing at least 2/3 (two-thirds) of the total number of shares issued by the Company with valid voting rights are present and/or represented in the EGMS.
   - Each issued share has 1 (one) voting right, the provisions in the Company's Articles of Association do not have a division of more than one class of shares that could affect different voting rights.
e. Minutes of Meeting
   - A summary of the Minutes of the AGMS and EGMS is announced to the public through the Company's website within 1 (one) working day after the AGMS and EGMS are held, and through a national daily newspaper and the BEI website no later than 2 (two) working days after the AGMS and EGMS are held. In addition, a Summary of the Minutes of the AGMS and EGMS can be announced through the eASY.KSEI website.
   - Proof of announcement of the Summary of the Minutes of the AGMS and EGMS is submitted to the OJK no later than 2 (two) working days after being announced.
   - The Minutes of the AGMS and EGMS are submitted to the OJK and BEI no later than 30 (thirty) days after the AGMS and EGMS are held. Copies of the Minutes can be accessed and downloaded by the public on the Company's website under the Governance section.

For the GMS electronically, the Company refers to the provisions of the OJK and the Articles of Association. The Company is committed to fulfilling the provisions for announcement, convening, and announcement of the summary through the e-RUPS provider's website, the stock exchange website, and the Company's website.

The more complete provisions regarding the GMS can be seen in the Company's latest Articles of Association.

PENYELENGGARAAN RUPST TAHUN 2024

Kronologis Pelaksanaan RUPST

Pada tahun 2024, Perseroan telah menyelenggarakan RUPS Tahunan (RUPST) pada tanggal 20 Mei 2024 dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 29 Februari 2024. Mata acara beserta ketentuan RUPS lainnya tersedia telah diunggah dalam situs web Perseroan dan tersedia di Divisi Sekretariat Perusahaan Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (AGMS)

Chronology of the RUPST

In 2024, the Company held the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on May 20, 2024, and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on February 29, 2024. The agenda items and other provisions of the GMS have been uploaded to the Company's website and are available at the Company's Corporate Secretary Division, with the following details:

Kegiatan Activities	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Keterangan Description
Pemberitahuan RUPST kepada Regulator Notification of AGMS to Regulators	13 Maret 2024 March 13, 2024	Perseroan telah menyampaikan Pemberitahuan Mata Acara RUPST kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana dalam Surat No. SE.01.01/A. SEKPER.WG.01875/2024. The Company has submitted the Notification of the Agenda of the AGMS to the Financial Services Authority (OJK) as stated in Letter No. SE.01.01/A. SEKPER.WG.01875/2024.
Penundaan RUPST Postponement of the AGMS	13 Maret 2024 March 13, 2024	Perseroan telah menyampaikan Pemberitahuan Penundaan RUPST kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana dalam Surat No SE.01.01/A. SEKPER.WG.02055/2024. The Company has submitted a Notification of Postponement of the AGMS to the Financial Services Authority (OJK) as stated in Letter No. SE.01.01/A. SEKPER.WG.02055/2024.
Pengumuman RUPST Announcement of AGMS	9 April 2024 April 9, 2024	Perseroan menyampaikan Pengumuman RUPST kepada Pemegang Saham pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan. The Company conveys the Announcement of the AGMS to Shareholders on the Indonesia Stock Exchange website, the Indonesian Central Securities Depository website and the Company's website.
Recording Date Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPST Recording Date List of Shareholders entitled to attend the AGMS	25 April 2024 April 25, 2024	Tercatat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan RUPST. Recorded 1 (one) working day before the AGMS Invitation.
Pemanggilan dan informasi penjelasan mata acara RUPST Invitation and information on explanation of the agenda of the AGMS	26 April 2024 April 26, 2024	Perseroan menyampaikan Pemanggilan RUPST kepada Pemegang Saham dan dipublikasikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada, melalui: a. Website Bursa Efek Indonesia 2. Website KSEI b. Website PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk c. Situs web Perusahaan, situs web BEI, dan situs web penyedia e-RUPS dalam aplikasi eASY.KSEI. Publikasi pemanggilan RUPST disertai dengan bahan Rapat lainnya. The Company delivers the Invitation to the Shareholders of the AGMS and publishes it in Indonesian and English on, through: a. Indonesia Stock Exchange Website 2. KSEI Website b. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk Website c. The Company's website, the IDX website, and the e-GMS provider website in the eASY.KSEI application. The publication of the invitation to the AGMS is accompanied by other meeting materials.

Kegiatan Activities	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Keterangan Description
Pelaksanaan RUPST AGMS Implementation	20 Mei 2024 May 20, 2024	Penyelenggaraan RUPST secara elektronik dengan menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan memperhatikan POJK No. 16/POJK.04/2016 serta ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan. Selain itu, Perusahaan juga menyelenggarakan RUPST secara fisik dalam beberapa ruangan. Seluruh peserta yang hadir secara fisik maupun elektronik dapat mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam RUPST. The implementation of the AGMS electronically using the eASY.KSEI Application and observing POJK No. 16/POJK.04/2016 and the provisions of the Company's Articles of Association. In addition, the Company also holds a physical AGMS in several rooms. All participants who are present physically or electronically can attend and actively participate in the AGMS.
Ringkasan Risalah (Hasil) RUPST Summary of Minutes (Results) of the AGMS	22 Mei 2024 May 22, 2024	Perseroan menyampaikan Pemanggilan RUPST kepada Pemegang Saham dan dipublikasikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada, melalui: a. Website Bursa Efek Indonesia 2. Website KSEI b. Website PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk c. Situs web Perusahaan, situs web BEI, dan situs web penyedia e-RUPS dalam aplikasi eASY.KSEI. The Company delivers the Invitation to the AGMS to Shareholders and publishes it in Indonesian and English at, through: a. Indonesia Stock Exchange Website 2. KSEI Website b. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk Website c. The Company's website, the IDX website, and the e-GMS provider website in the eASY.KSEI application.
Akta Risalah RUPST Deed of Minutes of the AGMS	6 Juni 2024 June 6, 2024	Penyampaian Akta Risalah (Berita Acara) RUPST No. 15 yang dibuat oleh Notaris Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto, S.H. Submission of the Deed of Minutes (Minutes) of the AGMS No. 15 made by Notary Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto, S.H.

RUPS Perseroan dilaksanakan luring (hybrid), pemegang saham yang memungkinkan kehadiran fisik dan namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 April 2024 pukul 16.00 WIB atau kuasanya yang sah. Perseroan juga menghimbau pemegang saham untuk hadir secara elektronik dengan menyediakan proxy elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) KSEI yang disediakan oleh KSEI kepada perwakilan independen yang ditunjuk Perseroan sebagai mekanisme proxy elektronik (e-proxy) di dalam Rapat.

The Company's GMS was held offline (hybrid), with shareholders who were able to attend physically and whose names were legally recorded in the Company's Shareholder Register on April 25, 2024, at 4:00 PM WIB, or their legal proxies. The Company also encouraged shareholders to attend electronically by providing an electronic proxy through the Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility provided by KSEI to an independent representative appointed by the Company as an electronic proxy (e-proxy) mechanism in the Meeting.

Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 7.025.634.100 (tujuh miliar dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus) saham atau mewakili 73,398% (tujuh puluh tiga koma tiga ratus sembilan puluh tujuh persen) yang merupakan hak suara yang sah dari total 9.572.000.000 (sembilan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta) saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.

Quorum of Shareholder Attendance

The meeting was attended and represented by 7,025,634,100 (seven billion twenty-five million six hundred thirty-four thousand one hundred) shares or representing 73.398% (seventy-three point three hundred ninety-eight percent) of the valid voting rights out of a total of 9,572,000,000 (nine billion five hundred seventy-two million) shares issued by the Company.

Kehadiran Perseroan

Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut:

Company Attendance

The Meeting was attended by the Company's Board of Commissioners and Board of Directors, as follows:

Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of DIrectors	
Komisaris Independen yang sekaligus merangkap sebagai Pelaksana tugas Komisaris Utama Independent Commissioner concurrently serving as Acting Chief Commissioner	Joseph Prajogo	Direktur Utama President Director	Hadian Pramudita
Komisaris Commissioners	Suli Fatimah	Direktur Operasi I Director of Operations I	Bagus Tri Setyana
Komisaris Independen Independent Commissioners	Taufan Gestoro	DIrektur Operasi II Director of Operations II	Akhmadi Tricahyono
Dewan Komisaris yang mengikuti secara Daring Board of Commissioners who attended Online		Direktur Quality, Health, Safety, Environment dan Pemasaran Director of Quality, Health, Safety, Environment and Marketing	Dwi Purnomo
Komisaris Commissioners	Danis Hidayat Sumadilaga		

Tanya Jawab

Dalam setiap Mata Acara Rapat, Perseroan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk dapat mengjukan Pertanyaan atau pendapatnya dalam sesi Tanya Jawab, paling banyak 3 (tiga) penanya, masing-masing 1 (satu) pertanyaan.

Dalam setiap mata acara RUPST para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk bertanya atau mengajukan pendapat yang berkaitan dengan pembahasan mata acara Rapat. Dari mata acara pertama sampai dengan kedelapan tidak ada pertanyaan dari pemegang saham.

Q&A Session

In each agenda item of the Meeting, the Company provided an opportunity for Shareholders or Proxies of Shareholders to ask questions or express their opinions during the Q&A session, with a maximum of 3 (three) questioners, each with 1 (one) question.

In each agenda item of the AGMS, shareholders were given the opportunity to ask questions or express opinions related to the discussion of the Meeting's agenda items. From the first to the eighth agenda item, there were no questions from shareholders.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, dan tercantum dalam tata tertib RUPS yang dibagikan kepada Pemegang Saham atau kuasanya. Pengambilan keputusan RUPST melalui mekanisme sebagai berikut:

a. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain;
b. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; dan
c. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara dengan ketentuan:
   - Untuk Mata Acara ke-1 sampai dengan Mata Acara ke-4 dan Mata Acara ke-6 sampai dengan Mata Acara ke-8 berdasarkan Pasal 21 ayat (2) angka (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
   - Untuk Mata Acara ke-5 hanya berupa laporan sehingga tidak memerlukan persetujuan Rapat.

Decision-Making Mechanism

In accordance with the Company's Articles of Association and as stated in the rules of procedure for the GMS distributed to Shareholders or their proxies, the decision-making mechanism for the AGMS is as follows:

a. Voting is conducted orally, unless the Chairman of the Meeting determines otherwise;
b. Decisions of the Meeting are taken based on deliberation to reach a consensus; and
c. In the event that a decision based on deliberation to reach a consensus is not achieved, the decision is taken by voting. Abstentions are considered to cast the same vote as the majority of Shareholders who cast their votes, with the following provisions:
   - For Agenda Items 1 through 4 and Agenda Items 6 through 8, based on Article 21 paragraph (2) number (1) letter a of the Company's Articles of Association, the Meeting's decision is valid if approved by more than ½ (one-half) of the total shares with voting rights present at the Meeting.
   - Agenda Item 5 is only a report, so it does not require the Meeting's approval.

Pihak Independen Penghitung Suara dan/atau Validasi Suara

Untuk menghitung dan memvalidasi suara dalam RUPST, Perseroan telah menunjuk pihak-pihak independen yaitu :

a. Notaris Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto, S.H., selaku Notaris Publik; dan
b. PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek

Pihak independen tersebut ditunjuk untuk melakukan penghitungan dan/atau melakukan validasi dan pengambilan suara dalam RUPST.

Keputusan RUPST

Keputusan dan ringkasan risalah RUPST diterbitkan pada tanggal 22 Mei 2024 dan telah dicantumkan dalam situs web Perseroan, pada situs web Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan situs web Bursa Efek Indonesia.

Sesuai Pasal 18 POJK RUPS dan Pasal 19 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan telah menyediakan bahan-bahan terkait dengan mata acara Rapat telah tersedia dan dapat diunduh melalui situs web Perseroan https://investor.wikagedung.co.id/gms.html?lang=id sejak tanggal Pemanggilan Rapat.

Adapun informasi lengkap terkait agenda dan keputusan RUPST tersebut adalah sebagai berikut:

Independent Parties for Counting and/or Validating Votes

To count and validate votes in the AGMS, the Company has appointed independent parties, comprising:

a. Notary Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto, S.H., as Public Notary; and
b. PT Datindo Entrycom as Securities Administration Bureau

The independent parties are appointed to count and/or validate and take votes in the AGMS.

Resolution of the AGMS

The resolution and a summary of the minutes of the AGMS were published on May 22, 2024, and have been included on the Company's website, the Financial Services Authority (OJK) website, and the Indonesia Stock Exchange website.

In accordance with Article 18 of the OJK Regulation on GMS and Article 19 paragraph (12) of the Company's Articles of Association, the Company has provided materials related to the agenda items of the Meeting, which are available and can be downloaded through the Company's website https://investor.wikagedung.co.id/gms.html?lang=id since the date of the Notice of Meeting.

The complete information regarding the agenda and resolution of the AGMS is as follows:

Mata Acara Rapat Pertama First Meeting Agenda	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) Sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga); Approval of the Company's Annual Report including the Board of Commissioners' Supervisory Tasks Report for the Fiscal Year 2023 (two thousand twenty three), as well as Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year ending on 31-12-2023 (thirty first of December two thousand twenty three) as well as Granting Full Settlement and Release from Liability (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors for the Company's Management Actions and the Board of Commissioners for the Company's Supervisory Actions Carried Out During the Fiscal Year 2023 (two thousand twenty three);		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Number of Shareholders Who Asked Questions	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan. No Shareholders asked questions or gave comments.		
Pengambilan Keputusan Decision-Making	Dengan Pemungutan Suara: By Voting:		
	Setuju Agree	**Abstain** Abstain	**Tidak Setuju** Disagree
	7.025.057.100 saham atau 99,9917872% dari yang hadir 7,025,057,100 shares or 99.9917872% of those who were present	331.800 saham atau 0,0047227% dari yang hadir 331,800 shares or 0.0047227% of those who were present	245.200 saham atau 0,0034901% dari yang hadir 245,200 shares or 0.0034901% of those who were present

Keputusan Rapat Resolution of the Meeting	Rapat disetujui dengan dengan suara terbanyak sebesar 99,9965099% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan: 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan sebagaimana dalam Laporannya Nomor: 00296/2.1030/AU.1/03/0501-3/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material", posisi keuangan konsolidasian PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; 2. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan.
	The meeting was approved by a majority vote of 99.9965099% of the total number of votes present at the Meeting and decided: 1. Approved the Company's Annual Report for the 2023 Fiscal Year including the Board of Commissioners' Supervisory Report and ratify the Company's Consolidated Financial Statements for the 2023 Fiscal Year which have been audited by the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar and Rekan as in its Report Number: 00296/2.1030/AU.1/03/0501-3/1/III/2024 dated March 28, 2024 with the opinion "Fair in All Material Respects", the consolidated financial position of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2023, and its consolidated financial performance and cash flows for the year ended on that date in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia; 2. Approved to provide full release and discharge of responsibility (volledig acquit et de charge) to the Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions that have been carried out during the Fiscal Year ending on December 31, 2023, as long as the actions do not constitute a criminal act and the actions are reflected in the Annual Report and Consolidated Financial Statements of the Company.
Status Pelaksanaan Implementation Status	Telah direalisasikan pada tahun 2024. It has been realized in 2024.
Mata Acara Rapat Kedua Second Meeting Agenda	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga); Stipulation of Use of the Company's Net Profit for the 2023 (two thousand twenty three) Fiscal Year;
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Number of Shareholders Who Asked Questions	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan No Shareholders asked questions or gave comments.
Pengambilan Keputusan Decision-Making	Dengan Pemungutan Suara: By Voting:

Setuju Agree	**Abstain** Abstain	**Tidak Setuju** Disagree
7.025.302.100 saham atau 99,9952744% dari yang hadir 7,025,302,100 shares or 99.9952744% of those who were present	331.800 saham atau 0,0047227% dari yang hadir 331,800 shares or 0.0047227% of those who were present	200 saham atau 0,0000028% dari yang hadir 200 shares or 0.0000028% of those who were present

Keputusan Rapat Resolution of the Meeting	Rapat dengan suara terbanyak sebesar 99,9999972 % dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan: 1. Menyetujui menetapkan penggunaan Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp46.702.158.528 (Empat Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Dua Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) ,dengan rincian sebagai berikut: a. Sebesar 20% dari Laba Bersih atau senilai Rp9.380.560.000 (Sembilan Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) ditetapkan sebagai Dividen Tunai Tahun Buku 2023. b. Sebesar 10% dari laba Bersih atau senilai Rp4.700.000.000 (Empat Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah) dialokasikan sebagai Cadangan Wajib dalam rangka memenuhi Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas. c. Sebesar 70% dari Laba Bersih atau senilai Rp32.621.598.528 (Tiga Puluh Dua Miliar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) ditetapkan sebagai Cadangan Lainnya. 2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian Dividen Tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham.
	The meeting with the most votes of 99.9999972% of the total number of votes present at the Meeting decided: 1. Approved to determine the use of Net Profit attributable to the Owners of the Parent Entity of the Company for the Fiscal Year ending on December 31, 2023, which is Rp46,702,158,528 (Forty Six Billion Seven Hundred Two Million One Hundred Fifty Eight Thousand Five Hundred Twenty Eight Rupiah), with the following details: a. Amounting to 20% of Net Profit or an amount of Rp9,380,560,000 (Nine Billion Three Hundred Eighty Million Five Hundred Sixty Thousand Rupiah) was determined as Cash Dividends for the 2023 Fiscal Year. b. Amounting to 10% of Net Profit or an amount of Rp4,700,000,000 (Four Billion Seven Hundred Million Rupiah) was allocated as Mandatory Reserves in order to fulfill Article 70 of the Limited Liability Company Law. c. 70% of Net Profit or Rp32,621,598,528 (Thirty Two Billion Six Hundred Twenty One Million Five Hundred Ninety Eight Thousand Five Hundred Twenty Eight Rupiah) was determined as Other Reserves. 2. Approved to grant authority and power to the Board of Directors with the right of substitution to further regulate the procedures and implementation of the distribution of Cash Dividends in accordance with prevailing provisions, including rounding up for dividend payments per share.
Status Pelaksanaan Implementation Status	Telah direalisasikan pada tahun 2024. It has been realized in 2024.
Mata Acara Rapat Ketiga Third Meeting Agenda	Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024; Stipulation of the Appointment of a Public Accounting Firm (KAP) to Audit the Company's Financial Report for the 2024 Fiscal Year;
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Number of Shareholders Who Asked Questions	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan. No Shareholders asked questions or gave comments.
Pengambilan Keputusan Decision-Making	Dengan Pemungutan Suara: By Voting:

Setuju Agree	**Abstain** Abstain	**Tidak Setuju** Disagree
7.025.302.100 saham atau 99,9952744% dari yang hadir 7,025,302,100 shares or 99.9952744% of those who were present	331.800 saham atau 0,0047227% dari yang hadir 331,800 shares or 0.0047227% of those who were present	200 saham atau 0,0000028% dari yang hadir 200 shares or 0.0000028% of those who were present

Keputusan Rapat Resolution of the Meeting	Rapat dengan suara terbanyak sebesar 99,9999972 % dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan: 1. Menyetujui penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) untuk melakukan jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, audit Laporan Evaluasi Kinerja dan Audit Kepatuhan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; 2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi kantor akuntan publik tersebut; 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Mayoritas untuk memberhentikan dan menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.
	The meeting with the most votes of 99.9999972% of the total number of votes present at the Meeting decided: 1. Approved the reappointment of Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) to perform audit services for the Company's Consolidated Financial Statements, audit of the Performance Evaluation Report and Compliance Audit ending on December 31, 2024; 2. Granted the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of audit service fees, additional scope of work required and other reasonable requirements for the public accounting firm; 3. Granted authority and power to the Company's Board of Commissioners by first obtaining the approval of the Majority Shareholders to dismiss and appoint a replacement Public Accounting Firm in the event that the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) for any reason is unable to complete the audit of the Company's Financial Statements for the 2024 Fiscal Year, including determining the audit service fees and other requirements for the replacement Public Accounting Firm.
Status Pelaksanaan Implementation Status	Telah direalisasikan pada tahun 2024. It has been realized in 2024.
Mata Acara Rapat Keempat Fourth Meeting Agenda	Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Tahun 2024 dan Tantiem atas Kinerja Tahun 2023 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; Stipulation of Remuneration/Honorarium, Allowances and Other Facilities for 2024 and Tantiem for Performance in 2023 for the Company's Board of Directors and Board of Commissioners;
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Number of Shareholders Who Asked Questions	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan. No Shareholders asked questions or gave comments.
Pengambilan Keputusan Decision-Making	Dengan Pemungutan Suara: By Voting:

Setuju Agree	**Abstain** Abstain	**Tidak Setuju** Disagree
7.024.050.700 saham atau 99,9774625% dari yang hadir 7,024,050,700 shares or 99.9774625% of those who were present	1.294.600 saham atau 0,0184268% dari yang hadir 1,294,600 shares or 0.0184268% of those who were present	288.800 saham atau 0,0041107 % dari yang hadir 288,800 shares or 0.0041107% of those who were present

Keputusan Rapat Resolution of the Meeting	Rapat dengan suara terbanyak sebesar 99,9958893 % dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan: 1. Menyetujui memberikan Wewenang dan Kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besarnya Tantiem Tahun Buku 2023, serta menetapkan Honorarium, Tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024; 2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari pemegang saham mayoritas untuk menetapkan besarnya tantiem Tahun Buku 2023, serta menetapkan gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi Direksi untuk Tahun Buku 2024. The meeting with the most votes of 99.9958893% of the total number of votes present at the Meeting decided: 1. Approved to grant Authority and Power to the Majority Shareholders to determine the amount of Tantiem for the 2023 Fiscal Year, as well as to stipulate the Honorarium, Allowances, and facilities for members of the Board of Commissioners for the 2024 Fiscal Year; 2. Approved to grant authority and power to the Board of Commissioners by first obtaining written approval from the majority shareholders to stipulate the amount of Tantiem for the 2023 Fiscal Year, as well as to stipulate the remuneration, allowances, and facilities for the Board of Directors for the 2024 Fiscal Year.
Status Pelaksanaan Implementation Status	Telah direalisasikan pada tahun 2024. It has been realized in 2024.
Mata Acara Rapat Kelima Fifth Meeting Agenda	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum; Report on Realization of the Use of Funds from Public Offering;
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Number of Shareholders Who Asked Questions	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan. No Shareholders asked questions or gave comments.
Pengambilan Keputusan Decision-Making	Dengan Pemungutan Suara: By Voting:

Setuju Agree	**Abstain** Abstain	**Tidak Setuju** Disagree
-	-	-

Keputusan Rapat Resolution of the Meeting	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum merupakan Laporan, sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan dan Direksi Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka sebagaimana dipersyaratkan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.4/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. The Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Public Offering is a Report, hence no decision was taken and the Company's Board of Directors has submitted the Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Public Offering, the Company as a Public Company as required by Article 6 Paragraph (1) of Financial Services Authority Regulation Number 30/POJK.4/2015 concerning the Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Public Offering.
Status Pelaksanaan Implementation Status	Telah direalisasikan pada tahun 2024. It has been realized in 2024.
Mata Acara Rapat Keenam Sixth Meeting Agenda	Perubahan atas Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Changes to the Use of Proceeds from the Public Offering
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Number of Shareholders Who Asked Questions	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan. No Shareholders asked questions or gave comments.

Pengambilan Keputusan Decision-Making	Dengan Pemungutan Suara: By Voting:

Setuju Agree	Abstain Abstain	Tidak Setuju Disagree
7.024.339.300 saham atau 99,9815703% dari yang hadir 7,024,339,300 shares or 99.9815703% of those who were present	1.294.600 saham atau 0,0184268% dari yang hadir 1,294,600 shares or 0.0184268% of those who were present	200 saham atau 0,0000028 % dari yang hadir 200 shares or 0.0000028% of those who were present

Keputusan Rapat
Resolution of the Meeting

Rapat dengan suara terbanyak sebesar 99,9999972 % dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan: Menyetujui perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut menjadi sebagai berikut:

1. Menyetujui untuk kegiatan terkait penyediaan ruang pada infrastruktur perkotaan dan infrastruktur sosial, dan bangunan kepariwisataan yang semula direncanakan sebesar 50,80% atau sebesar Rp411,412 Miliar (Empat Ratus Sebelas Koma Empat Ratus Dua Belas Miliar Rupiah), Perseroan mengusulkan untuk mengubah besarannya menjadi 32,47% atau sebesar Rp262,980 Miliar (Dua Ratus Enam Puluh Dua Koma Sembilan Ratus Delapan Puluh Miliar Rupiah).
2. Menyutujui untuk kegiatan Investasi berupa pengembangan entitas anak, dan usaha konstruksi modular, tetap sesuai rencana awal yaitu sebesar 13,09% atau sebesar Rp106,011 Miliar (Seratus Enam Koma Sebelas Miliar Rupiah).
3. Menyetujui untuk pembelian alat produksi konstruksi dan pengembangan sistem IT, Perseroan tidak memiliki usulan perubahan atau dengan kata lain besarannya tetap sesuai rencana awal, yaitu sebesar 10% atau sebesar Rp80,987 Miliar (Delapan Puluh Koma Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Rupiah).
4. Menyetujui untuk Modal Kerja yang semula direncanakan sebesar 26,11% atau sebesar Rp211,456 Miliar (Dua Ratus Sebelas Koma Empat Ratus Lima Puluh Enam Miliar Rupiah), Perseroan mengusulkan untuk mengubah besarannya menjadi 44,44% atau sebesar Rp359,888 Miliar (Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Miliar Rupiah).

The meeting with the most votes of 99.9999972% of the total number of votes present at the Meeting decided: Approved the change in the use of funds from the Initial Public Offering to be as follows:

1. Approved for activities related to the provision of space in urban infrastructure and social infrastructure, and tourism buildings which were originally planned at 50.80% or Rp411.412 billion (Four Hundred and Eleven Point Four Hundred and Twelve Billion Rupiah), the Company proposed to change the amount to 32.47% or Rp262.980 billion (Two Hundred and Sixty Two Point Nine Hundred and Eighty Billion Rupiah).
2. Approved for investment activities in the form of developing subsidiaries, and modular construction businesses, remaining according to the initial plan, amounted to 13.09% or Rp106.011 Billion (One Hundred Six Point Eleven Billion Rupiah).
3. Agreed for the purchase of construction production equipment and IT system development, the Company did not propose changes or in other words the amount remains according to the initial plan, which is 10% or Rp80.987 Billion (Eighty Point Nine Hundred Eighty Seven Billion Rupiah).
4. Agreed for Working Capital which was originally planned at 26.11% or Rp211.456 Billion (Two Hundred Eleven Point Four Hundred Fifty Six Billion Rupiah), the Company proposed to change the amount to 44.44% or Rp359.888 Billion (Three Hundred Fifty Nine Point Eight Hundred Eighty Eight Billion Rupiah).

Status Pelaksanaan
Implementation Status

Telah direalisasikan pada tahun 2024.
It has been realized in 2024.

Mata Acara Rapat Ketujuh
Seventh Meeting Agenda

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum; Persetujuan Pengukuhan/Ratifikasi Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi serta Pedoman Prinsip Pengelolaan Anak Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk;
Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Public Offering; Approval of the Confirmation/Ratification of the Integrated Governance Policy and Guidelines for the Principles of Subsidiary Management and Integrated Governance of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk;

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Number of Shareholders Who Asked Questions	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan. No Shareholders asked questions or gave comments.
Pengambilan Keputusan Decision-Making	Dengan Pemungutan Suara: By Voting:

Setuju Agree	Abstain Abstain	Tidak Setuju Disagree
7.024.295.700 saham atau 99,9809498% dari yang hadir 7,024,295,700 shares or 99.9809498% of those who were present	1.294.600 saham atau 0,0184268% dari yang hadir 1,294,600 shares or 0.0184268% of those who were present	43.800 saham atau 0,0006234 % dari yang hadir 43,800 shares or 0.0006234% of those who were present

Keputusan Rapat Resolution of the Meeting	Rapat dengan suara terbanyak sebesar 99,9993766 % dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan: 1. Menyetujui mengukuhkan/meratifikasi pemberlakuan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dalam Dokumen Nomor WIKA-SUB-KP.01.01 dan Pedoman Prinsip Pengelolaan Anak Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dalam dokumen Nomor WIKA-SUB-QM.01.01 Rev.01 berikut perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu sebagai Pedoman Tata Kelola Terintegrasi di Perseroan; 2. Menyetujui meminta kepada Dewan Komisaris Perseroan melakukan pengawasan atas penerapan Kebijakan dan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Perseroan yang dilaksanakan oleh Direksi, untuk selanjutnya hasil penerapan untuk dilaporkan kepada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas secara berkala.
	The meeting with the most votes of 99.9993766% of the total number of votes present at the Meeting decided: 1. Approved to confirm/ratify the implementation of the Integrated Governance Policy as stated in Document Number WIKA-SUB-KP.01.01 and the Guidelines for the Principles of Subsidiary Management and Integrated Governance as stated in Document Number WIKA-SUB-QM.01.01 Rev.01 along with its changes from time to time as the Integrated Governance Guidelines in the Company; 2. Approved to request the Company's Board of Commissioners to supervise the implementation of the Company's Integrated Governance Policy and Guidelines implemented by the Board of Directors, for the results of the implementation to be reported to PT Wijaya Karya (Persero) Tbk as the Majority Shareholder periodically.
Status Pelaksanaan Implementation Status	Telah direalisasikan pada tahun 2024. It has been realized in 2024.
Mata Acara Rapat Kedelapan Eighth Meeting Agenda	Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. Approval of Changes to the Composition of the Company's Management.
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Number of Shareholders Who Asked Questions	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan. No Shareholders asked questions or gave comments.
Pengambilan Keputusan Decision-Making	Dengan Pemungutan Suara: By Voting:

Setuju Agree	Abstain Abstain	Tidak Setuju Disagree
7.024.339.300 saham atau 99,9815703% dari yang hadir 7,024,339,300 shares or 99.9815703% of those who were present	1.294.600 saham atau 0,0184268% dari yang hadir 1,294,600 shares or 0.0184268% of those who were present	200 saham atau 0,0000028 % dari yang hadir 200 shares or 0.0000028% of those who were present

Keputusan Rapat Resolution of the Meeting	Rapat dengan suara terbanyak sebesar 99,9999972 % dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan: 1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Sumadi sebagai Komisaris Utama yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 4 Tanggal 16 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto. S.H., di Jakarta Selatan, terhitung sejak tanggal 15 Mei 2024, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan. 2. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Syailendra Ogan sebagai Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 27 tanggal 21 Maret 2019 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta Selatan, terhitung sejak 17 Mei 2024, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Anggota Direksi Perseroan, dan mengesahkan serta menerima segala tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan selama melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko Perseroan terhitung sejak 21 Maret 2019 sampai dengan 17 Mei 2024. 3. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Akhmadi Tricahyono sebagai Direktur Operasi II yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 6 tanggal 21 April 2022, dibuat dihadapan Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto S.H., di Jakarta Selatan terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terimakasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Anggota Direksi Perseroan. 4. Mengalihkan penugasan Sdr. Dwi Purnomo yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 16 Mei 2023, dibuat di hadapan Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto S.H., Notaris di Jakarta dari semula Direktur Quality, Helath, Safety, Environment, dan Pemasaran menjadi Direktur Operasi II, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan berdasarkan RUPS pengangkatan yang bersangkutan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 5. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:
	a. Sdr. Hartanto Kartiraharjo sebagai Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko; b. Sdr. Tomo Dwihasputro sebagai Direktur Quality, Health, Safety, Environment dan Pemasaran terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 6. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, pengalihan, penugasan, dan pengangkatan Anggota Direksi tersebut di atas, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut : Dewan Komisaris: Sdr. Joseph Prajogo sebagai Komisaris Independen sekaligus Plt Komisaris Utama; Suli Fatimah sebagai Komisaris; Danis Hidayat Sumadilaga sebagai Komisaris; Taufan Gestoro sebagai Komisaris Independen; Direksi: Hadian Pramudita sebagai Direktur Utama; Hartanto Kartiraharjo sebagai Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko; Tomo Dwihasputro sebagai Direktur Quality, Health, Safety, Environment dan Pemasaran; Bagus Tri Setyana sebagai Direktur Operasi I; Dwi Purnomo sebagai Direktur Operasi II. 7. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direktur Utama dan/atau Direktur lainnya Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

	The meeting with the most votes of 99.9999972% of the total number of votes present at the Meeting decided: 1. To confirm the honorable dismissal of Mr. Sumadi as President Commissioner who was appointed based on Deed Number 4 dated May 16, 2023, made before Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto. S.H., in South Jakarta, effective May 15, 2024, with gratitude for all contributions of energy and thoughts given by the person concerned during his tenure as President Commissioner of the Company. 2. To confirm the honorable dismissal of Mr. Syailendra Ogan as Director of Finance, Human Capital and Risk Management who was appointed based on Deed Number 27 dated March 21, 2019 made before Fathiah Helmi, S.H., in South Jakarta, effective from May 17, 2024, with gratitude for all contributions of energy and thoughts given by the person concerned during his tenure as a Member of the Company's Board of Directors, and ratifying and accepting all actions that have been taken by the person concerned during the implementation of his duties and responsibilities as Director of Finance, Human Capital, and Risk Management of the Company effective from March 21, 2019 to May 17, 2024. 3. Honorably dismiss Mr. Akhmadi Tricahyono as Director of Operations II who was appointed based on Deed Number 6 dated April 21, 2022, made before Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto S.H., in South Jakarta effective as of the closing of this GMS, with gratitude for all contributions of energy and thoughts given by the person concerned during his tenure as a Member of the Company's Board of Directors. 4. Transferring the assignment of Mr. Dwi Purnomo who was appointed based on Deed Number 4 dated May 16, 2023, made before Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto S.H., Notary in Jakarta from previously Director of Quality, Health, Safety, Environment, and Marketing to Director of Operations II, with a term of office continuing the remaining term of office based on the GMS of the relevant appointment without reducing the right of the GMS to dismiss at any time. 5. Appointing the names below as Members of the Company's Board of Directors as follows: a. Mr. Hartanto Kartiraharjo as Director of Finance, Human Capital and Risk Management; b. Mr. Tomo Dwihasputro as Director of Quality, Health, Safety, Environment and Marketing effective since the closing of this GMS, with a term of office in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, taking into account the Laws and Regulations and without prejudice to the right of the GMS to dismiss at any time.
	6. With the confirmation of the dismissal, termination, transfer, assignment, and appointment of the Members of the Board of Directors mentioned above, the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors is as follows: Board of Commissioners: Mr. Joseph Prajogo as Independent Commissioner and Acting President Commissioner; Suli Fatimah as Commissioner; Danis Hidayat Sumadilaga as Commissioner; Taufan Gestoro as Independent Commissioner; Board of Directors: Hadian Pramudita as President Director; Hartanto Kartiraharjo as Director of Finance, Human Capital, and Risk Management; Tomo Dwihasputro as Director of Quality, Health, Safety, Environment and Marketing; Bagus Tri Setyana as Director of Operations I; Dwi Purnomo as Director of Operations II. 7. Granted power and authority to the President Director and/or other Directors of the Company with the right of substitution to take all necessary actions related to the decisions of this agenda in accordance with prevailing laws and regulations, including to state in a separate Notarial Deed and notify the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners to the Ministry of Law and Human Rights in accordance with prevailing provisions.
Status Pelaksanaan Implementation Status	Telah direalisasikan pada tahun 2024. It has been realized in 2024.

PENYELENGGARAAN RUPSLB TAHUN 2024

Kronologis Pelaksanaan RUPSLB

Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2024 (selanjutnya disebut "Rapat") yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 di WIKA Tower II, Auditorium Lantai 17, Jl. D.I Panjaitan Kav.9-10, Jakarta Timur dan dilaksanakan secara elektronik menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY KSEI).

Adapun tata cara penyelenggaraan RUPSLB perseroan dengan rincian sebagai berikut:

THE 2024 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (EGMS)

Chronology of the Implementation of the RUPSLB

The Company has held the 2024 Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting") which was held on Thursday, February 29, 2024, at WIKA Tower II, Auditorium 17th Floor, Jl. D.I Panjaitan Kav.9-10, East Jakarta, and was conducted electronically using the Electronic General Meeting System KSEI (eASY KSEI) facility.

The procedures for holding the Company's EGMS are as follows:

Kegiatan Activities	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Keterangan Description
Pemberitahuan RUPSLB kepada Regulator Notification of EGMS to Regulators	16 Januari 2024 January 16, 2024	Perseroan telah menyampaikan Pemberitahuan Mata Acara RUPS Luar Biasa kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana dalam Surat No. SE.01.01/A.WG.00305/2024. The Company has submitted the Notification of the Extraordinary GMS Agenda to the Financial Services Authority (OJK) as stated in Letter No. SE.01.01/A.WG.00305/2024.
Pengumuman RUPSLB Announcement of EGMS	23 Januari 2024 January 23, 2024	Perseroan menyampaikan Pengumuman RUPS Luar Biasa kepada Pemegang Saham, melalui: 1. Situs web Bursa Efek Indonesia; 2. Situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan 3. Situs web Perseroan The Company delivers the Announcement of the Extraordinary GMS to Shareholders, through: 1. Indonesia Stock Exchange website; 2. Indonesia Central Securities Depository website; and 3. Company website
Recording Date Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPSLB Recording Date List of Shareholders entitled to attend the EGMS	11 Februari 2024 February 11, 2024	Tercatat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan RUPSLB. Recorded 1 (one) working day before the Summons of the EGMS.
Pemanggilan dan informasi penjelasan mata acara RUPSLB Summons and information on explanation of the agenda of the EGMS	12 Februari 2024 February 12, 2024	Perseroan menyampaikan Pemanggilan RUPSLB kepada Pemegang Saham, melalui: 1. Situs web Bursa Efek Indonesia; 2. Situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan 3. Situs web Perseroan. Pemanggilan RUPSLB dipublikasikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris disertai dengan bahan Rapat lainnya. The Company delivers the Invitation to the EGMS to Shareholders, through: 1. Indonesia Stock Exchange website; 2. Indonesia Central Securities Depository website; and 3. Company website. The Invitation to the EGMS is published in Indonesian and English accompanied by other Meeting materials.

Kegiatan Activities	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Keterangan Description
Pelaksanaan RUPSLB Implementation of the EGMS	29 Februari 2024 February 29, 2024	Penyelenggaraan RUPST secara elektronik dengan menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan memperhatikan POJK No. 16/POJK.04/2016 serta ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan. Selain itu, Perusahaan juga menyelenggarakan RUPST secara fisik dalam beberapa ruangan. Seluruh peserta yang hadir secara fisik maupun elektronik dapat mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam RUPST. The implementation of the AGMS electronically using the eASY.KSEI Application and observing POJK No. 16/POJK.04/2016 and the provisions of the Company's Articles of Association. In addition, the Company also holds a physical AGMS in several rooms. All participants who are present physically or electronically can attend and actively participate in the AGMS.
Ringkasan Risalah (Hasil) RUPSLB Summary of Minutes (Results) of the EGMS	4 Maret 2024 March 4, 2024	Perseroan menyampaikan Ringkasan Risalah RUPSLB kepada Pemegang Saham, melalui: 1. Situs web Bursa Efek Indonesia; 2. Situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan 3. Situs web Perseroan. The Company shall submit the Summary of the Minutes of the EGMS to Shareholders, through: 1. Indonesia Stock Exchange website; 2. Indonesia Central Securities Depository website; and 3. Company website.
Akta Risalah RUPSLB Deed of Minutes of the EGMS	18 Maret 2024 March 18, 2024	Akta RUPS No. 6 yang dibuat di hadapan Notaris Diah Guntari L. Soemarwoto S.H. Deed of GMS No. 6 made before Notary Diah Guntari L. Soemarwoto S.H.

RUPS Perseroan dilaksanakan luring (hybrid), pemegang saham yang memungkinkan kehadiran fisik dan namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 Februari 2024 pukul 16.00 WIB atau kuasanya yang sah.

The Company's GMS was held offline (hybrid), with shareholders who were able to attend physically and whose names were legally recorded in the Company's Shareholder Register on February 11, 2024, at 4:00 PM WIB, or their legal proxies.

Perseroan juga menghimbau pemegang saham untuk hadir secara elektronik dengan menyediakan proxy elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) KSEI yang disediakan oleh KSEI kepada perwakilan independen yang ditunjuk Perseroan sebagai mekanisme proxy elektronik (e-proxy) di dalam Rapat.

The Company also encouraged shareholders to attend electronically by providing an electronic proxy through the Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility provided by KSEI to an independent representative appointed by the Company as an electronic proxy (e-proxy) mechanism in the Meeting.

Kehadiran Perseroan

Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut:

Company Attendance

The meeting was attended by the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company, as follows:

Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of DIrectors	
Komisaris Utama Chief Commissioner	Sumadi	Direktur Utama President Director	Hadian Pramudita
Komisaris Commissioners	Suli Fatimah	Direktur Operasi I Director of Operations I	Bagus Tri Setyana
Komisaris Independen Independent Commissioners	Joseph Prajogo	DIrektur Operasi II Director of Operations II	Akhmadi Tricahyono
Dewan Komisaris yang mengikuti secara Daring Board of Commissioners who attended Online		Direktur Quality, Health, Safety, Environment dan Pemasaran Director of Quality, Health, Safety, Environment and Marketing	Dwi Purnomo
Komisaris Commissioners	Danis Hidayat Sumadilaga	Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko Director of Finance, Human Capital, and Risk Management	

Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 7.099.253.200 (tujuh miliar sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus) saham atau mewakili 74,167% (tujuh puluh empat koma seratus enam puluh tujuh persen) yang merupakan hak suara yang sah dari total 9.572.000.000 (sembilan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta) saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.

Adapun persentase persetujuan atas setiap mata acara RUPSLB akan dijelaskan terpisah bersama agenda dan keputusan RUPSLB.

Tanya Jawab

Dalam setiap Mata Acara Rapat, Perseroan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk dapat mengjukan Pertanyaan atau pendapatnya dalam sesi Tanya Jawab, paling banyak 3 (tiga) penanya, masing-masing 1 (satu) pertanyaan.

Dalam setiap mata acara RUPST para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk bertanya atau mengajukan pendapat yang berkaitan dengan pembahasan mata acara Rapat. Dari mata acara pertama sampai dengan kedelapan tidak ada pertanyaan dari pemegang saham.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Semua keputusan yang diambil dalam RUPSLB berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Pihak Independen Penghitung Suara dan/atau Validasi Suara

Untuk menghitung dan memvalidasi suara dalam RUPST dan RUPSLB, Perseroan Telah menunjuk pihak-pihak independen yaitu:

a. Notaris Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto, S.H., selaku Notaris Publik; dan
b. PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek

Pihak independen tersebut ditunjuk untuk melakukan penghitungan dan/atau melakukan validasi dan pengambilan suara dalam RUPST.

Keputusan RUPSLB

Keputusan dan ringkasan risalah RUPST diterbitkan pada tanggal 4 Maret 2024 dan telah dicantumkan dalam situs web Perseroan, pada situs web Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan situs web Bursa Efek Indonesia.

Seluruh keputusan RUPSLB telah dimuat dalam Akta No. 6 tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat oleh dan di hadapan Diah Guntari L. Soemarwoto, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta.

Adapun informasi lengkap terkait agenda dan keputusan RUPSLB tersebut adalah sebagai berikut:

Shareholders' Attendance Quorum

The meeting was attended and represented by 7,099,253,200 (seven billion ninety-nine million two hundred fifty-three thousand two hundred) shares or representing 74.167% (seventy-four point one hundred sixty-seven percent) which is the valid voting rights of the total 9,572,000,000 (nine billion five hundred seventy-two million) shares issued by the Company.

The percentage of approval for each agenda item of the EGMS will be explained separately along with the agenda and decisions of the EGMS.

Questions and Answers

In each Agenda of the Meeting, the Company provides an opportunity for Shareholders or Shareholders' Proxies to submit questions or give their opinions in the Questions and Answers session, with a maximum of 3 (three) questioners, each with 1 (one) question.

In each agenda of the AGMS, shareholders have been given the opportunity to ask questions or submit opinions related to the discussion of the agenda of the Meeting. From the first to the eighth agenda, there were no questions from shareholders.

Decision Making Mechanism

All resolutions made in the EGMS are based on deliberation and consensus. In the event that a resolution based on deliberation for consensus is not reached, the resolution is made by voting.

Independent Parties for Vote Counting and/or Vote Validation

To count and validate votes in the AGMS and EGMS, the Company has appointed independent parties, namely:

a. Notary Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto, S.H., as Public Notary; and
b. PT Datindo Entrycom as Securities Administration Bureau

The independent parties are appointed to count and/or validate and take votes in the AGMS.

EGMS Resolution

The resolution and summary of the minutes of the EGMS were published on March 4, 2024 and have been included on the Company's website, the Financial Services Authority (OJK) website, and the Indonesia Stock Exchange website.

All EGMS resolutions have been included in Deed No. 6 dated February 29, 2024, made by and before Diah Guntari L. Soemarwoto, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta.

The complete information regarding the agenda and resolutions of the EGMS is as follows:

Mata Acara Rapat Pertama First Meeting Agenda	Perubahan Pengurus Perseroan. Changes to the Company's Management.
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Number of Shareholders Who Asked Questions	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan. No Shareholders asked questions or gave comments.
Pengambilan Keputusan Decision-Making	Dengan Pemungutan Suara: By Voting:

Setuju Agree	**Abstain** Abstain	**Tidak Setuju** Disagree
7.099.253.100 saham atau 99,9999986% dari yang hadir 7,099,253,100 shares or 99.9999986% of those who were present	0 saham atau 0,0000000% dari yang hadir 0 shares or 0.0000000% of those who were present	100 saham atau 0,0000014 % dari yang hadir 100 shares or 0.0000014% of those who were present

Keputusan Rapat
Resolution of the Meeting

Rapat dengan suara terbanyak sebesar 99,9999986 % dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:

i. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Ance sebagai Komisaris Independen Perseroan yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 15 Januari 2021 terhitung sejak tanggal 5 Desember 2023, dengan ucapan terimakasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan dan pemberian pembebasan tanggung jawab secara penuh (*acquit et de charge*) akan diberikan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya sesuai dengan masa jabatan yang bersangkutan;

ii. Mengangkat Sdr. Taufan Gestoro sebagai Komisaris Independen sejak ditutupnya RUPS ini dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan dibidang Pasar Modal serta apabila di kemudian hari ada keputusan lain dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;

iii. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:
Sdr. Sumadi sebagai Komisaris Utama;
Sdri. Suli Fatimah sebagai Komisaris;
Sdr. Danis Hidayat Sumadilaga sebagai Komisaris;
Sdr. Joseph Prajogo sebagai Komisaris Independen;
Sdr. Taufan Gestoro sebagai Komisaris Independen.

Direksi:
Sdr. Hadian Pramudita sebagai Direktur Utama;
Sdr. Bagus Tri Setyana sebagai Direktur Operasi I;
Sdr. Akhmadi Tricahyono sebagai Direktur Operasi II;
Sdr. Syailendra Ogan sebagai Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko;
Sdr. Dwi Purnomo sebagai Direktur Quality, Health, Safety, Environment dan Pemasaran.

iv. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direktur Utama atau Direktur WIKA Gedung lainnya dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

The Meeting with a vote of 99.9999986% of the total votes present at the Meeting, decided:

I. To ratify the honorable dismissal of Mr. Ance as Independent Commissioner of the Company, who was appointed based on the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated January 15, 2021, effective as of December 5, 2023, with gratitude for all the contributions of energy and thought given by the concerned party during his tenure as Independent Commissioner of the Company, and the granting of full release and discharge (acquit et de charge) will be given at the next Annual General Meeting of Shareholders in accordance with his term of office;

II. To appoint Mr. Taufan Gestoro as Independent Commissioner effective from the closing of this GMS with a term of office in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, taking into account the Capital Market regulations and if in the future there is another decision and without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any time;

III. With the ratification of the dismissal and the appointment of the Members of the Board of Commissioners, the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company is as follows:

Board of Commissioners:
Mr. Sumadi as President Commissioner;
Ms. Suli Fatimah as Commissioner;
Mr. Danis Hidayat Sumadilaga as Commissioner;
Mr. Joseph Prajogo as Independent Commissioner;
Mr. Taufan Gestoro as Independent Commissioner.

Board of Directors:
Mr. Hadian Pramudita as President Director;
Mr. Bagus Tri Setyana as Director of Operations I;
Mr. Akhmadi Tricahyono as Director of Operations II;
Mr. Syailendra Ogan as Director of Finance, Human Capital, and Risk Management;
Mr. Dwi Purnomo as Director of Quality, Health, Safety, Environment and Marketing.

IV. To grant power and authority to the President Director or other Directors of WIKA Gedung with the right of substitution to take all necessary actions related to the decisions of this agenda item in accordance with prevailing laws and regulations, including to state it in a separate Notarial Deed and to notify the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company to the Ministry of Law and Human Rights 1 in accordance with the prevailing regulations.

PENYELENGGARAAN RUPST TAHUN 2023 UNTUK TAHUN BUKU 2022

Kronologis Pelaksanaan RUPST

Perusahaan menyelenggarakan RUPS Tahunan (RUPST) pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 jam (Waktu Indonesia Barat) pukul 14.48-16.26 yang berlokasi WIKA Tower II, Auditorium Lantai 17, Jl. D.I Panjaitan Kav.9-10, Jakarta Timur dan dilaksanakan secara elektronik menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY KSEI).

Sebelum menyelenggarakan RUPST tersebut, Perusahaan melakukan pengumuman melalui situs website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), situs web Perusahaan (www. wikagedung.co.id) dan situs website eASY.KSEI melalui (https://akses.ksei.co.id) pada tanggal 13 Maret 2023. Selanjutnya, pada tanggal 27 Maret 2023, Perusahaan perubahan jadwal RUPST dari jadwal semula tanggal 27 Maret 2023 menjadi 17 April 2023.

Perubahan jadwal RUPST tersebut menyebabkan jadwal pemanggilan RUPST juga berubah dari tanggal 28 Maret 2023 menjadi 18 April 2023 melalui media yang sama. Dalam pemanggilan RUPST tersebut, Perusahaan menyajikan informasi terkait 7 (tujuh) mata acara RUPST beserta informasi lain beserta prosedur penyelenggaraan RUPST secara elektronik kepada pemegang saham. Selain itu, Perusahaan, melalui web site-nya, juga menyediakan soft copy surat kuasa RUPST dan CV calon pengurus baru.

Tahapan RUPST secara lengkap adalah sebagai berikut:

THE IMPLEMENTATION OF THE 2023 AGMS FOR THE 2022 FISCAL YEAR

Chronology of the AGMS Implementation

The Company held its Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on Wednesday, May 10, 2023, from 14:48 to 16:26 (Western Indonesian Time), located at WIKA Tower II, Auditorium, 17th Floor, Jl. D.I Panjaitan Kav. 9-10, East Jakarta, and conducted electronically using the Electronic General Meeting System KSEI (eASY KSEI) facility.

Prior to the AGMS implementation, the Company made an announcement through the Indonesia Stock Exchange website (www.idx.co.id), the Company's website (www.wikagedung.co.id), and the eASY.KSEI website via (https://akses.ksei.co.id) on March 13, 2023. Subsequently, on March 27, 2023, the Company changed the AGMS schedule from the original date of March 27, 2023, to April 17, 2023.

This change in the AGMS schedule also caused the schedule for the AGMS summons to change from March 28, 2023, to April 18, 2023, through the same media. In the AGMS summons, the Company presented information regarding the 7 (seven) agenda items of the AGMS along with other information and the procedures for the AGMS implementation electronically to the shareholders. In addition, the Company, through its website, also provided a soft copy of the AGMS proxy form and the CVs of new candidate management members.

The complete stages of the AGMS are as follows:

Kegiatan Activities	**Tanggal Pelaksanaan** Date of Implementation	**Keterangan** Description
Pemberitahuan RUPST kepada Regulator Notification of AGMS to Regulators	27 Maret 2023 March 27, 2023	• Penyampaian kepada OJK dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI). • Dilakukan 5 (lima) hari kerja sebelum Pengumuman RUPST. • Submission to OJK and PT Bursa Efek Indonesia (BEI). • Conducted 5 (five) working days before the Announcement of the AGMS.
Pengumuman RUPST Announcement of AGMS	3 April 2023 April 3, 2023	• Dipublikasikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada situs web Perusahaan dan BEI serta situs web KSEI melalui Aplikasi eASY. KSEI di https://easy.ksei.co.id. • Laporan pengumuman disampaikan ke OJK dan BEI pada hari yang sama (hardcopy dan e-reporting via SPE-OJK & IDX-net). • Dilakukan 14 (empat belas) hari sebelum iklan panggilan dengan tidak memperhitungkan tanggal iklan pemanggilan dan tanggal pengumuman RUPST. • Published in Indonesian and English on the Company's and IDX's websites and the KSEI's website via the eASY. KSEI Application at https://easy.ksei.co.id. • The announcement report is submitted to OJK and IDX on the same day (hardcopy and e-reporting via SPE-OJK & IDX-net). • Conducted 14 (fourteen) days before the invitation advertisement excluding the date of the invitation advertisement and the date of the AGMS announcement.

Kegiatan Activities	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Keterangan Description
Recording Date Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPST Recording Date List of Shareholders entitled to attend AGMS	17 April 2023 April 17, 2023	Tercatat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan RUPST. Recorded 1 (one) working day before the AGMS Invitation.
Pemanggilan dan informasi penjelasan mata acara RUPST Invitation and information on explanation of the agenda of the AGMS	18 April 2023 April 18, 2023	• Dilakukan 21 (dua puluh satu) hari sebelum pelaksanaan RUPST, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan Pelaksanaan RUPST. • Dipublikasikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada Situs web Perusahaan, situs web BEI, dan situs web penyedia e-RUPS dalam aplikasi eASY.KSEI. • Conducted 21 (twenty one) days prior to the implementation of the AGMS, excluding the date of the AGMS Invitation and Implementation. • Published in Indonesian and English on the Company's Website, the IDX website, and the e-GMS provider website in the eASY.KSEI application.
Perubahan Pengumuman RUPST Changes to the Announcement of the AGMS	18 April 2023 April 18, 2023	• Dipublikasikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada situs web Perusahaan dan BEI serta situs web KSEI melalui Aplikasi eASY. KSEI di https://easy.ksei.co.id. • Laporan pengumuman disampaikan ke OJK dan BEI pada hari yang sama (IDX-net). • Published in Indonesian and English on the Company's and IDX's websites and the KSEI's website via the eASY. KSEI Application at https://easy.ksei.co.id. • The announcement report is submitted to the OJK and IDX on the same day (IDX-net).
Pelaksanaan RUPST Implementation of the AGMS	10 Mei 2023 May 10, 2023	Penyelenggaraan RUPST secara elektronik dengan menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan memperhatikan POJK No. 16/POJK.04/2016 serta ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan. Selain itu, Perusahaan juga menyelenggarakan RUPST secara fisik dalam beberapa ruangan. Seluruh peserta yang hadir secara fisik maupun elektronik dapat mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam RUPST. The implementation of the AGMS electronically using the eASY.KSEI Application and observing POJK No. 16/POJK.04/2016 and the provisions of the Company's Articles of Association. In addition, the Company also holds a physical AGMS in several rooms. All participants who are present physically or electronically can attend and actively participate in the AGMS.
Ringkasan Risalah (Hasil) RUPST Summary of Minutes (Results) of the AGMS	12 Mei 2023 May 12, 2023	Penyampaian Ringkasan Risalah (Hasil) RUPST, termasuk hasil pemungutan suara setiap agenda, ke OJK dan BEI selambat-lambatnya 2 (dua) hari bursa setelah RUPST. Submission of the Summary of Minutes (Results) of the AGMS, including the voting results for each agenda, to the OJK and BEI no later than 2 (two) trading days after the AGMS.
	12 Mei 2023 May 12, 2023	Publikasi Ringkasan Risalah (Hasil) RUPST diunggah dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris di situs web Perusahaan, web BEI, dan situs eASY.KSEI. Publication of the Summary of Minutes (Results) of the AGMS is uploaded in Indonesian and English on the Company's website, the IDX website, and the eASY.KSEI website.
Akta Risalah RUPST Deed of Minutes of the AGMS	9 Juni 2023 June 9, 2023	Penyampaian Akta Risalah (Berita Acara) RUPST ke OJK dan BEI 30 hari kerja setelah Pelaksanaan RUPST. Submission of the Deed of Minutes (Minutes) of the AGMS to the OJK and BEI 30 working days after the AGMS is held.

Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 7.371.885.108 saham atau mewakili 77,015% yang merupakan hak suara yang sah dari total 9.572.000.000 saham yang dikeluarkan oleh Perseroan. Adapun persentase persetujuan atas setiap mata acara RUPST akan dijelaskan terpisah bersama agenda dan keputusan RUPST di tabel berikut.

Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapatnya dalam sesi Tanya Jawab, paling banyak 3 (tiga) penanya, masing-masing 1 (satu) pertanyaan. Dalam setiap mata acara RUPST para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk bertanya atau mengajukan pendapat yang berkaitan dengan pembahasan mata acara Rapat. Dari mata acara pertama sampai dengan ketujuh tidak ada pertanyaan dari pemegang saham.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan RUPST melalui mekanisme sebagai berikut:

a. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain;
b. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; dan
c. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara dengan ketentuan :
    - Untuk Mata Acara ke-1 sampai dengan ke-4, dan Mata Acara ke-7, berdasarkan Pasal 21 Ayat (2) angka (1) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat dinyatakan sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
    - • Untuk Mata Acara ke-6, berdasarkan Pasal 21 Ayat (2) angka (4) huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat dinyatakan sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Quorum of the Shareholders Attendance

The Meeting was attended and represented by 7,371,885,108 shares or 77.015% of the total 9,572,000,000 shares issued by the Company, which constitute valid voting rights. The percentage of approval for each agenda item of the AGM will be explained separately along with the agenda and resolutions of the AGM in the following table.

Question and Answer Session

Prior to the decision-making on the Meeting Agenda Items, the Chairman of the Meeting gave the Shareholders or Proxies of Shareholders the opportunity to ask questions or express their opinions in a Question and Answer session, with a maximum of 3 (three) questioners, each with 1 (one) question. During each agenda item of the AGMS, shareholders were given the opportunity to ask questions or express opinions related to the discussion of the Meeting agenda item. From the first to the seventh agenda item, there were no questions from the shareholders.

Decision-Making Mechanism

The decision-making process for the AGMS follows the mechanism below:

a. Voting is conducted orally, unless the Chairman of the Meeting determines otherwise;
b. Resolutions of the Meeting are taken based on deliberation to reach a consensus; and
c. In the event that a decision based on deliberation to reach a consensus is not achieved, the resolution is made by voting. Abstentions are considered to cast the same vote as the majority of the Shareholders who cast their votes, with the following provisions:
    - For Agenda Items 1 through 4, and Agenda Item 7, based on Article 21 Paragraph (2) number (1) letter (c) of the Company's Articles of Association, the Meeting's decision is declared valid if approved by more than 1/2 (one-half) of the total shares with voting rights present at the Meeting.
    - For Agenda Item 6, based on Article 21 Paragraph (2) number (4) letter (b) of the Company's Articles of Association, the Meeting's decision is declared valid if approved by more than 2/3 (two-thirds) of the total shares with voting rights present at the Meeting.

Pihak Independen Penghitung Suara

Perusahaan telah menunjuk pihak-pihak independen yaitu (i) Notaris Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto, S.H., selaku Notaris Publik dan (ii) PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan penghitungan dan/atau melakukan validasi dan pengambilan suara dalam RUPST.

Independent Parties for the Vote Counting

The Company has appointed independent parties, namely (i) Notary Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto, S.H., as Public Notary and (ii) PT Datindo Entrycom as the Securities Administration Bureau to calculate and/or validate and take votes in the AGMS.

Keputusan RUPST

Seluruh keputusan RUPST telah dimuat dalam Akta No. 2 tanggal 10 Mei 2023 yang dibuat oleh dan di hadapan Diah Guntari L. Soemarwoto, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, dan keputusan tentang persetujuan atas perubahan pengurus Perusahaan dalam Akta No. 4 tanggal 16 Mei 2023. Selain itu, keputusan tentang persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar (AD) Perusahaan juga telah dinyatakan kembali dan disusun seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan tersebut dalam Akta No. 3 tanggal 16 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Notaris tersebut dan telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-0027786.AH.01.02. tanggal 22 Mei 2023.

Resolutions of the AGMS

All resolutions of the AGMS have been recorded in Deed No. 2 dated May 10, 2023, drawn up by and before Diah Guntari L. Soemarwoto, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, and the resolution regarding the approval of changes to the Company's management in Deed No. 4 dated May 16, 2023. Furthermore, the resolution regarding the approval of amendments to the Company's Articles of Association (AoA) has also been restated, and all provisions of the Company's Articles of Association have been compiled in Deed No. 3 dated May 16, 2023, drawn up before the aforementioned Notary and has received notification of receipt from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Letter No. AHU-0027786. AH.01.02 dated May 22, 2023.

Adapun informasi lengkap terkait agenda dan keputusan RUPST tersebut adalah sebagai berikut:

The complete information regarding the agenda and resolutions of the AGMS is as follows:

Mata Acara Rapat Pertama First Meeting Agenda	Persetujuan atas Laporan Tahunan, termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2022 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; Approval of the Annual Report, including the Company's Activity Report, the Report on the Implementation of Supervisory Duties of the Company's Board of Commissioners for the 2022 Fiscal Year and Ratification of the Company's Financial Report ending on December 31, 2022;		
Pengambilan Keputusan Decision-Making	Dengan Pemungutan Suara: By Voting:		
	Setuju Agree	Abstain Abstain	Tidak Setuju Disagree
	7.370.805.185 saham atau 99,9853508% dari yang hadir 7,370,805,185 shares or 99.9853508% of those who were present	1.079.923 saham atau 0,0146492% dari yang hadir 1,079,923 shares or 0.0146492% of those who were present	0 saham atau 0% dari yang hadir 0 shares or 0% of those who were present

Keputusan Rapat Resolutions of the Meeting	Rapat disetujui dengan dengan suara bulat sebesar 100% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan: 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan sebagaimana pokok-pokoknya telah disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya kegiatan Perseroan pada Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, yang didalamnya memuat Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada Tahun Buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan sebagaimana dalam Laporannya No.00131/2.1030/AU.1/03/0501-2/1/III/2023 tanggal 7 Maret 2023 dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material"; 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan. The meeting was unanimously approved by 100% of the total number of votes present at the Meeting and decided: 1. Approved the Company's Annual Report as the main points have been submitted by the Board of Directors regarding the condition and progress of the Company's activities in the Fiscal Year ending on December 31, 2022, which includes the Report on the Implementation of the Board of Commissioners' Supervisory Duties during the Fiscal Year ending on December 31, 2022, and to ratify the Company's Financial Report ending in the Fiscal Year 2022 which has been audited by the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar and Rekan as in its Report No. 00131/2.1030/AU.1/03/0501-2/1/III/2023 dated March 7, 2023 with the opinion "Fair in All Material Respects"; 2. Granted full release and discharge of responsibility (volledig acquit et de charge) to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision actions carried out during the Fiscal Year ending on December 31, 2022, as long as such actions do not constitute a criminal act and such actions are reflected in the Company's Annual Report and Consolidated Financial Statements.
Status Pelaksanaan Implementation Status	Telah direalisasikan pada tahun 2023. It has been realized in 2023.
Mata Acara Rapat Kedua Second Meeting Agenda	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022; Stipulation of Use of the Company's Net Profit for the 2022 Fiscal Year;
Pengambilan Keputusan Decision-Making	Dengan Pemungutan Suara: By Voting:

Setuju Agree	Abstain Abstain	Tidak Setuju Disagree
7.371.630.008 saham atau 99,9965396% dari yang hadir 7,371,630,008 shares or 99.9965396% of those who were present	255.100 saham atau 0,0034604% dari yang hadir 255,100 shares or 0.0034604% of those who were present	0 saham atau 0% dari yang hadir 0 0 shares or 0% of those who were present 0

Keputusan Rapat Resolutions of the Meeting	Rapat disetujui dengan dengan suara bulat sebesar 100% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan: 1. Menyetujui: c. Menyetujui sebesar 10% dari Laba Bersih atau senilai Rp 23.164.240.000 ditetapkan sebagai Dividen Tunai Tahun Buku 2022; d. Menyetujui sebesar 10% dari laba Bersih atau senilai Rp 23.164.240.000 dialokasikan sebagai Cadangan Wajib dalam rangka memenuhi Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas; e. Menyetujui sebesar 80% dari Laba Bersih atau senilai Rp 183.725.206.379 ditetapkan sebagai Cadangan Lainnya; 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian Dividen Tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham. The meeting was unanimously approved by 100% of the total number of votes present at the Meeting decided: 1. Approved: a. Approved that 10% of Net Profit or equivalent to Rp23,164,240,000 be determined as Cash Dividends for the 2022 Fiscal Year; b. Approved that 10% of Net Profit or equivalent to Rp23,164,240,000 be allocated as Mandatory Reserves in order to fulfill Article 70 of the Limited Liability Company Law; c. Approved that 80% of Net Profit or equivalent to Rp183,725,206,379 be determined as Other Reserves; 2. Granted authority and power to the Board of Directors with substitution rights to further regulate the procedures and implementation of the distribution of Cash Dividends in accordance with prevailing provisions, including rounding up for dividend payments per share.
Status Pelaksanaan Implementation Status	Telah direalisasikan pada tahun 2023. It has been realized in 2023.
Mata Acara Rapat Ketiga Third Meeting Agenda	Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2023. Appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm for Audit of Financial Statements for Fiscal Year 2023.
Pengambilan Keputusan Decision-Making	Dengan Pemungutan Suara: By Voting:

Setuju Agree	Abstain Abstain	Tidak Setuju Disagree
7.156.332.008 saham atau 97,0760111% dari yang hadir 7,156,332,008 shares or 97.0760111% of those who were present	255.100 saham atau 0,0034604% dari yang hadir 255,100 shares or 0.0034604% of those who were present	215.298.000 saham atau 2,9205284% dari yang hadir 215,298,000 shares or 2.9205284% of tthose who were present

Keputusan Rapat Resolutions of the Meeting	Rapat dengan suara terbanyak sebesar 97,0794716% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan: 1. Menyetujui menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) untuk melakukan jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, audit Laporan Evaluasi Kinerja dan Audit Kepatuhan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; 2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi kantor akuntan publik tersebut; 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Mayoritas untuk memberhentikan dan menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut. The meeting with the most votes of 97.0794716% of the total number of votes present at the Meeting decided: 1. Approved to reappoint Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) to perform audit services for the Company's Consolidated Financial Statements, audit of the Performance Evaluation Report and Compliance Audit ending on December 31, 2023; 2. Granted the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of audit service fees, additional scope of work required and other reasonable requirements for the public accounting firm; 3. Granted authority and power to the Company's Board of Commissioners by first obtaining approval from the Majority Shareholders to dismiss and appoint a replacement Public Accounting Firm in the event that the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) for any reason is unable to complete the audit of the Company's Financial Statements for the 2023 Fiscal Year, including determining the audit service fees and other requirements for the replacement Public Accounting Firm.
Status Pelaksanaan Implementation Status	Telah direalisasikan pada tahun 2023. It has been realized in 2023.
Mata Acara Rapat Keempat Fourth Meeting Agenda	Penetapan Tantiem untuk Tahun Buku 2022, Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun 2023. Stipulation of Tantiem for the 2022 Fiscal Year, Remuneration/Honorarium and Other Allowances for the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for 2023.
Pengambilan Keputusan Decision-Making	Dengan Pemungutan Suara: By Voting:

Setuju Agree	Abstain Abstain	Tidak Setuju Disagree
7.371.305.008 saham atau 99,9921309% dari yang hadir 7,371,305,008 shares or 99.9921309% of those who were present	255.100 saham atau 0,0034604% dari yang hadir 255,100 shares or 0.0034604% of those who were present	325.000 saham atau 0,0044086% dari yang hadir 325,000 shares or 0.0044086% of those who were present

Keputusan Rapat Resolutions of the Meeting	Rapat dengan suara terbanyak sebesar 99,9955914% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan: 1. Memberikan Wewenang dan Kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besarnya Tantiem untuk Tahun Buku 2022, serta menetapkan Honorarium, Tunjangan, dan Fasilitas Lainnya bagi Angota Dewan Komisaris Tahun 2023; 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari pemegang saham mayoritas untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun 2022, serta menetapkan gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi Direksi untuk Tahun 2023. The meeting with the most votes of 99.9955914% of the total number of votes present at the Meeting decided: 1. Granted Authority and Power to the Majority Shareholders to determine the amount of Tantiem for the 2022 Fiscal Year, as well as stipulated the Honorarium, Allowances, and Other Facilities for Members of the Board of Commissioners in 2023; 2. Granted authority and power to the Board of Commissioners by first obtaining written approval from the majority shareholders to determine the amount of Tantiem for the 2022 Fiscal Year, as well as stipulated the remuneration, allowances, and other facilities for the Board of Directors for the 2023 Fiscal Year.
Status Pelaksanaan Implementation Status	Telah direalisasikan pada tahun 2023. It has been realized in 2023.
Mata Acara Rapat Kelima Fifth Meeting Agenda	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Report on Realization of the Use of Funds from Public Offering
Pengambilan Keputusan Decision-Making	Dengan Pemungutan Suara: By Voting:

Setuju Agree	Abstain Abstain	Tidak Setuju Disagree
-	-	-

Keputusan Rapat Resolutions of the Meeting	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum merupakan Laporan, sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan Direksi Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka sebagaimana dipersyaratkan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.4/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. The Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Public Offering is a Report, hence no decision-making is carried out. The Company's Board of Directors has submitted the Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Public Offering, the Company as a Public Company as required by Article 6 Paragraph (1) of Financial Services Authority Regulation Number 30/POJK.4/2015 concerning the Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Public Offering.
Status Pelaksanaan Implementation Status	Telah direalisasikan pada tahun 2023. It has been realized in 2023.
Mata Acara Rapat Keenam Sixth Meeting Agenda	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Changes to the Company's Articles of Association
Pengambilan Keputusan Decision-Making	Dengan Pemungutan Suara: By Voting:

	Setuju Agree	Abstain Abstain	Tidak Setuju Disagree
	7.371.305.008 saham atau 99,9921309% dari yang hadir 7,371,305,008 shares or 99.9921309% of those who were present	255.100 saham atau 0,0034604% dari yang hadir 255,100 shares or 0.0034604% of those who were present	325.000 saham atau 0,0044086% dari yang hadir 325,000 shares or 0.0044086% of those who were present
Keputusan Rapat Resolutions of the Meeting	Rapat disetujui dengan dengan suara bulat sebesar 100% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan: 1. Menyetujui penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dalam matriks yang ditayangkan; 2. Menyetujui untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Perubahan atau Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada Butir 1 di atas; 3. Menyetujui menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian dimaksud; 4. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direktur Utama Perseroan atau salah satu anggota Direksi Perseroan lainnya dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang dilakukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini ke dalam suatu akta notaris, termasuk namun tidak terbatas pada mengajukan permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan/ atau melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/ atau perubahan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang. The meeting was unanimously approved by 100% of the total number of votes present at the Meeting decided: 1. Approved the adjustment of Article 3 of the Company's Articles of Association as in the matrix displayed; 2. Approved to compile and restate all provisions in the Company's Articles of Association in connection with the Changes or Adjustments as referred to in Point 1 above; 3. Approved to compile and restate all provisions in the Company's Articles of Association in connection with the adjustments referred to; 4. Approved to grant power and authority to the Company's President Director or one of the other members of the Company's Board of Directors with the right of substitution to carry out all actions taken in connection with the decision of this Meeting Agenda into a notarial deed, including but not limited to submitting an application for approval of changes to the Articles of Association to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and/or doing anything deemed necessary and useful for such purposes with none being excluded, including to make additions and/or changes to Article 3 of the Company's Articles of Association if such is required by the authorized agency.		
Status Pelaksanaan Implementation Status	Telah direalisasikan pada tahun 2023. It has been realized in 2023.		
Mata Acara Rapat Ketujuh Seventh Meeting Agenda	Perubahan Pengurus Perseroan. Changes to the Company's Management.		

Pengambilan Keputusan
Decision-Making

Dengan Pemungutan Suara:
By Voting:

Setuju Agree	Abstain Abstain	Tidak Setuju Disagree
7.371.305.008 saham atau 99,9921309% dari yang hadir 7,371,305,008 shares or 99.9921309% of those who were present	255.100 saham atau 0,0034604% dari yang hadir 255,100 shares or 0.0034604% of those who were present	325.000 saham atau 0,0044086% dari yang hadir 325,000 shares or 0.0044086% of those who were present

Keputusan Rapat
Resolutions of the Meeting

Rapat dengan suara terbanyak sebesar 96,7945792 % dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Hananto Aji sebagai Komisaris Utama Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 09 September 2021 terhitung sejak tanggal 24 Maret 2023, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan sebagai berikut :
   a. Sdr. Bambang Pramujo sebagai Komisaris yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 28 Juli 2020;
   b. Sdr. Yulianto sebagai Direktur Quality, Health, Safety, Environment dan Pemasaran yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 tanggal 28 Mei 2021. terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Pengurus Perusahaan.
3. Menyetujui untuk mengalihkan penugasan Sdr. Sumadi yang diangkat berdasarkan RUPS Tahunan tangal 19 April 2022, dari semula Komisaris menjadi Komisaris Utama, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana dalam RUPS Tahunan tanggal 19 April 2022 tersebut.
4. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai pengurus Perseroan sebagai berikut: Sdri. Suli Fatimah Komisaris; Sdr. Danis Hidayat Sumadilaga Komisaris; Sdr. Dwi Purnomo Direktur Quality, Health, Safety, Environment dan Pemasaran Sejak ditutupnya RUPS ini dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta apabila di kemudian hari ada keputusan lain dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
5. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, pengalihan, penugasan, dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

   Dewan Komisaris:
   Sdr. Sumadi: Komisaris Utama
   Sdri. Suli Fatimah: Komisaris
   Sdr. Danis Hidayat Sumadilaga: Komisaris
   Sdr. Joseph Prajogo: Komisaris Independen
   Sdr. Ance: Komisaris Independen

   Direksi:
   Sdr. Hadian Pramudita: Direktur Utama
   Sdr. Bagus Tri Setyana: Direktur Operasi I
   Sdr. Akhmadi Tricahyono: Direktur Operasi II
   Sdr. Syailendra Ogan: Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko
   Sdr. Dwi Purnomo: Direktur Quality Health Safety & Environment dan Pemasaran

6. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

	The meeting with the most votes of 96.7945792% of the total number of votes present at the Meeting decided: 1. Confirmed the honorable dismissal of Mr. Hananto Aji as the Company's President Commissioner who was appointed based on the Decision of the Extraordinary GMS dated September 9, 2021, effective as of March 24, 2023, with gratitude for all contributions of energy and thoughts given by the person concerned during his tenure as the Company's President Commissioner. 2. Honorably dismissed the names below as the Company's Management as follows: a. Mr. Bambang Pramujo as Commissioner who was appointed based on the Decision of the Extraordinary GMS dated July 28, 2020; b. Mr. Yulianto as Director of Quality, Health, Safety, Environment and Marketing who was appointed based on the Decision of the Annual GMS for the 2020 Fiscal Year dated May 28, 2021. effective as of the closing of this Meeting, with gratitude for all contributions of energy and thoughts given by the person concerned during his tenure as the Company's Management. 3. Approved to transfer the assignment of Mr. Sumadi who was appointed based on the Annual GMS dated April 19, 2022, from Commissioner to President Commissioner, with a term of office continuing the remaining term of office as stated in the Annual GMS dated April 19, 2022. 4. Appointed the names below as the Company's management as follows: Ms. Suli Fatimah Commissioner; Mr. Danis Hidayat Sumadilaga Commissioner; Mr. Dwi Purnomo Director of Quality, Health, Safety, Environment and Marketing Since the closing of this GMS with a term of office in accordance with the provisions of the Articles of Association of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, taking into account the Laws and Regulations in the Capital Market sector and if in the future there are other decisions and without reducing the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any time. 5. With the confirmation of the dismissal, dismissal, transfer, assignment, and appointment of Members of the Board of Commissioners and Board of Directors, the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors is as follows: Board of Commissioners: Mr. Sumadi: President Commissioner Mrs. Suli Fatimah: Commissioner Mr. Danis Hidayat Sumadilaga: Commissioner Mr. Joseph Prajogo: Independent Commissioner Mr. Ance: Independent Commissioner Board of Directors: Mr. Hadian Pramudita: President Director Mr. Bagus Tri Setyana: Director of Operations I Mr. Akhmadi Tricahyono: Director of Operations II Mr. Syailendra Ogan: Director of Finance, Human Capital, and Risk Management Mr. Dwi Purnomo: Director of Quality Health Safety & Environment and Marketing 6. Granted power and authority to the Company's Board of Directors with the right of substitution to take all necessary actions related to the decisions of this agenda in accordance with prevailing laws and regulations, including to state in a separate Notarial Deed and notify the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners to the Ministry of Law and Human Rights in accordance with prevailing provisions.
Status Pelaksanaan Implementation Status	Telah direalisasikan pada tahun 2023. It has been realized in 2023.

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Piagam Dewan Komisaris mengatur tugas dan tanggung jawab dari Dewan Komisaris serta hubungan kerja sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Dalam struktur GCG, Dewan Komisaris merupakan Organ Perseroan yang bertugas dan bertanggung jawab mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi termasuk memastikan bahwa Perseroan melaksanakan tata kelola Perusahaan yang baik.

Dewan Komisaris harus berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan sampai dengan pemberhentian sementara.

Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
    1) Tidak pernah dinyatakan pailit;
    2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
    3) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
    4) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
        i. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan; dan
        ii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggung jawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
e. Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

The Board of Commissioners Charter regulates the duties and responsibilities of the Board of Commissioners as well as working relationships in accordance with Good Corporate Governance (GCG) principles. Within the GCG structure, the Board of Commissioners is a Company Organ who is in charge and responsible for supervising and advising the Board of Directors, including ensuring that the Company implements good corporate governance.

The Board of Commissioners shall have integrity and the capability to perform its functions effectively. The supervisory and advisory functions of the Board of Commissioners encompass preventive and corrective actions, up to and including temporary dismissal.

Criteria for Members of the Board of Commissioners

Individuals who can be appointed as members of the Board of Commissioners are natural persons who meet the following requirements at the time of appointment and during their tenure:

a. Possess good character, morals, and integrity;
b. Be legally competent to perform legal acts;
c. Within the 5 (five) years prior to appointment and during their tenure:
    1) Have never been declared bankrupt;
    2) Have never been a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners who was found guilty of causing a company to be declared bankrupt;
    3) Have never been convicted of a criminal act that harmed state finances and/or is related to the financial sector; and
    4) Have never been a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners who, during their tenure:
        i. Failed to convene an annual General Meeting of Shareholders (RUPS); and
        ii. Whose accountability as a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners was not accepted by the GMS or who failed to provide accountability as a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners to the GMS; and
d. Have a commitment to comply with the prevailing laws and regulations.
e. In addition to meeting the criteria referred to in paragraph (4), the appointment of members of the Board of Commissioners shall be carried out by considering integrity, dedication, understanding of company management issues related to one of the management functions, adequate knowledge in the Company's business sector, and the ability to allocate sufficient time to perform their duties, as well as other requirements based on prevailing laws and regulations.

Seleksi dan Nominasi Dewan Komisaris

Proses seleksi calon Dewan Komisaris dan Direksi pada perusahaan afiliasi terkonsolidasi BUMN menggunakan sistem sebagaimana pengusulan Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan melalui *Talent & Succession Management* sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/06/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

Masa Jabatan

Berdasarkan *Board manual*, masa jabatan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Namun anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan alasan:
    a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
    b. Tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
    c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara;
    d. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan/atau
    e. Mengundurkan diri.
2. Di samping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) di atas, anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.
3. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) a, b, dan c di atas diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. Pemberhentian dengan alasan sebagaimana butir c dan d di atas merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.
4. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka RUPS diselenggarakan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah terjadi lowongan tersebut.
5. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila;
    a. Meninggal dunia;
    b. Masa jabatan berakhir;
    c. Diberhentikan berdasarkan RUPS; dan/atau
    d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selection and Nomination of the Board of Commissioners

The selection process for candidates for the Board of Commissioners and the Board of Directors in consolidated State-Owned (BUMN) affiliated companies uses a system similar to the proposal process for the Board of Commissioners and the Board of Directors of Subsidiaries through Talent & Succession Management, as regulated in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-04/MBU/06/2020 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-03/MBU/2012 concerning Guidelines for the Appointment of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners of Subsidiaries of State-Owned Enterprises

Term of Office

Based on Board manual, the term of office for the Board of Commissioners is as follows:

1. The term of office for members of the Board of Commissioners is set at 5 (five) years and they may be reappointed for 1 (one) additional term. However, members of the Board of Commissioners may be dismissed by a decision of the General Meeting of Shareholders (GMS) for the following reasons:
    a. Failure to perform their duties properly;
    b. Failure to comply with statutory regulations and/or the provisions of the Articles of Association;
    c. Involvement in actions that are detrimental to the Company and/or the State;
    d. Being found guilty by a court decision that has permanent legal force; and/or
    e. Resignation.
2. In addition to the reasons for dismissal of a member of the Board of Commissioners as referred to in point 1 (one) above, a member of the Board of Commissioners may be dismissed by the GMS for other reasons deemed appropriate by the GMS in the best interests and objectives of the Company.
3. A dismissal decision for the reasons referred to in points 1 (one) a, b, and c above shall be taken after the person concerned is given an opportunity to defend themselves. Dismissal for the reasons referred to in points c and d above constitutes a dishonorable dismissal.
4. If, for any reason, a position on the Board of Commissioners becomes vacant, the GMS shall be convened no later than 3 (three) days after the vacancy occurs.
5. The term of office of a member of the Board of Commissioners ends if:
    a. They pass away;
    b. Their term of office expires;
    c. They are dismissed by the GMS; and/or
    d. They no longer meet the requirements to be a member of the Board of Commissioners based on the Articles of Association and other statutory regulations.

6. Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggung jawabannya oleh RUPS.

6. Members of the Board of Commissioners who leave office before or after their term expires, except in the case of death, remain responsible for their actions for which accountability has not yet been accepted by the GMS.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Perseroan berpedoman pada Piagam Dewan Komisaris sehingga Dewan Komisaris dapat menjalankan fungsinya secara efektif. Isi dari pedoman kerja Dewan Komisaris berpedoman pada POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Anggaran Dasar Perusahaan, peraturan terkait BUMN dan perusahaan terbuka serta peraturan-peraturan lain yang relevan serta praktik-praktik terbaik GCG.

Pedoman Dewan Komisaris secara umum mengatur tentang:

a. Tugas, wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris;
b. Hak Dewan Komisaris;
c. Masa Jabatan Dewan Komisaris;
d. Program Pengenalan atau Orientasi Dewan Komisaris;
e. Etika Jabatan Dewan Komisaris;
f. Rapat Dewan Komisaris;
g. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris;
h. Benturan Kepentingan Dewan Komisaris;
i. Hubungan Kerja dengan Direksi;
j. Komite yang membantu Dewan Komisaris; serta
k. Sekretaris Dewan Komisaris.

Hal-hal yang diatur dalam pedoman tata kerja Dewan Komisaris yang terakhir ditetapkan dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi dengan Nomor SK.02.01/A.KOM.WG.05533/2023 Tentang Perubahan Board Manual PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk pada tanggal 11 September 2023.

Pedoman dan tata tertib Dewan Komisaris diperbarui secara berkala. Untuk rincian lebih lanjut tentang pedoman dan tata tertib Dewan Komisaris Perseroan, silakan kunjungi situs web Perseroan di https://www.wikagedung.co.id/gcg/pedoman-gcg

Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

Benturan kepentingan atau konflik kepentingan (Conflict of Interest) merupakan situasi dimana terdapat konflik kepentingan dengan memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimiliki untuk kepentingan individual. Perseroan berupaya menghindari adanya benturan kepentingan antara Perseroan dengan anggota Dewan Komisaris.

Board Manual of the Board of Commissioners

In carrying out the duties and responsibilities of the Board of Commissioners, the Company adheres to the Board of Commissioners' Board Manual to ensure they can perform its functions effectively. The content of Board Manual of the Board of Commissioners is based on OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, the Company's Articles of Association, regulations related to State-Owned Enterprises and public companies, other relevant regulations, and best practices in Good Corporate Governance (GCG).

In general, the Board of Commissioners' Board Manual regulates:

a. Duties, authorities, and obligations of the Board of Commissioners;
b. Rights of the Board of Commissioners;
c. Term of Office of the Board of Commissioners;
d. Introduction or Orientation Program for the Board of Commissioners;
e. Ethics of the Board of Commissioners' Position;
f. Meetings of the Board of Commissioners;
g. Performance Evaluation of the Board of Commissioners;
h. Conflicts of Interest of the Board of Commissioners;
i. Working Relationship with the Board of Directors;
j. Committees assisting the Board of Commissioners; and
k. Secretary of the Board of Commissioners.

The matters regulated in the latest Board Manual of the Board of Commissioners was stipulated and signed by the Board of Commissioners and the Board of Directors under Number SK.02.01/A.KOM.WG.05533/2023 concerning Amendments to the Board Manual of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk on September 11, 2023.

The guidelines and rules of procedure for the Board of Commissioners are updated periodically. For further details regarding the Company's Board Manual of the Board of Commissioners, please visit the Company's website at https://www.wikagedung.co.id/gcg/pedoman-gcg.

Management of Conflicts of Interest of the Board of Commissioners

Conflict of interest is a situation where a conflict of interest arises from exploiting one's position and authority for personal gain. The Company strives to avoid any conflicts of interest between the Company and members of the Board of Commissioners.

Untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan dan implikasi lanjutan yang sering ditimbulkannya, Dewan Komisaris bertanggung jawab membuat aturan dan memastikan setiap konflik yang timbul ditangani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun prinsip-prinsip Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris selalu menghindari adanya benturan kepentingan di dalam melaksanakan tugasnya. Dewan Komisaris tidak akan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang atau pihak lain yang terkait.
2. Dewan Komisaris harus menghindari setiap aktivitas yang dapat mempengaruhi independensinya dalam tugas pengawasan Perusahaan.
3. Dewan Komisaris berkewajiban mengisi Daftar Khusus yang berisikan kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada perusahaan lain.
4. Apabila terjadi benturan kepentingan, maka harus diungkapkan, dan Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan Perseroan.

Pernyataan mengenai benturan kepentingan Dewan Komisaris tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Mekanisme Pengunduran Diri Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari Board Manual sebelum tanggal pengunduran dirinya. Apabila dalam surat pengunduran diri disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal surat diterima, maka dianggap tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran dirinya.

Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan, atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri, tidak ada keputusan dari RUPS, maka anggota Dewan Komisaris tersebut berhenti dengan sendirinya pada tanggal yang diminta tersebut di atas atau dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima tanpa memerlukan persetujuan RUPS.

Independensi Dewan Komisaris Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris bertindak secara independen dan tidak memiliki kepentingan apapun. Perseroan terus berupaya menjaga independensi Dewan Komisaris dan dalam implementasinya Dewan Komisaris tidak berhubungan dengan Direksi terkait implementasi tugas dan tanggung jawab masing-masing merupakan hubungan yang bersifat formal.

In order to prevent conflicts of interest and their potential further implications, the Board of Commissioners is responsible for establishing rules and ensuring that any conflicts that arise are handled in accordance with prevailing laws and regulations.

The principles of the Company's Board of Commissioners are as follows:

1. The Board of Commissioners shall continually avoid any conflicts of interest in carrying out its duties. Members of the Board of Commissioners shall not exploit their position for personal gain or for the benefit of other related individuals or parties.
2. The Board of Commissioners shall avoid any activities that could affect their independence in overseeing the Company.
3. The Board of Commissioners is obliged to complete a Special Register containing details of their share ownership and/or that of their family members in other companies.
4. If a conflict of interest arises, it must be disclosed, and the Board member involved shall not participate in the Company's decision-making process.

Statements regarding conflicts of interest of the Board of Commissioners are included in the Company's Work Plan and Articles of Association.

Mechanism of Resignation for the Board of Commissioners

Members of the Board of Commissioners have the right to resign from their position by submitting a written notification of their intention to the Company, with copies to the Shareholders, other members of the Board of Commissioners, and the Board of Directors, no later than 30 (thirty) days before their intended resignation date, as stated in the Board Manual. If the resignation letter specifies an effective date less than 30 (thirty) days from the date the letter is received, then no effective resignation date shall be deemed to have been specified.

If, by the date requested by the member of the Board of Commissioners concerned, or within 30 (thirty) days from the date the resignation letter is received, there is no decision from the General Meeting of Shareholders (GMS), then the member of the Board of Commissioners shall automatically resign on the aforementioned requested date or upon the expiration of 30 (thirty) days from the date the resignation letter was received, without requiring the approval of the GMS.

Independence of the Board of Commissioners in Performing Supervisory Functions

In carrying out its functions, the Board of Commissioners acts independently and has no vested interests. The Company continuously strives to maintain the independence of the Board of Commissioners, and in its implementation, the relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors regarding the execution of their respective duties and responsibilities is formal in nature.

Perlu disadari Dewan Komisaris merupakan pihak yang melakukan pengawasan atas kinerja Direksi Untuk itu, independensi sangat dibutuhkan agar Dewan Komisaris mampu memberikan nasihat secara bebas dan professional tanpa adanya benturan kepentingan.

It should be noted that the Board of Commissioners is the party that oversees the performance of the Board of Directors. Therefore, independence is crucial to ensure that the Board of Commissioners can provide advice freely and professionally without any conflicts of interest.

Adapun kriteria independensi Dewan Komisaris Perseroan, sebagai berikut :

The independence criteria for the Company's Board of Commissioners are as follows:

Aspek Independensi Independence Aspect	Joseph Prayogo	Suli Fatimah	Danis Hidayat Sumadilaga	Taufan Gestoro
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Perseroan, anak perusahaan maupun perusahaan afiliasi Does not have any management relationship in the Company, subsidiaries or affiliated companies	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perseroan Does not have any share ownership relationship in the Company	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham, Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Dewan Komisaris Does not have family relationships with shareholders, the Board of Commissioners, the Board of Directors, and/or fellow members of the Board of Commissioners	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham, Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Direksi Does not have any financial relationship with shareholders, Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow members of the Board of Directors	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Does not serve as a political party administrator, official or government official	√	√	√	√

Etika Jabatan

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris berpedoman pada Pedoman tata kerja dimana tertuang prinsip-prinsip berikut ini:

1. Anggota Dewan Komisaris harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perusahaan, Panduan *Good Corporate Governance, Code of Conduct*, serta kebijakan Perusahaan yang telah ditetapkan.
2. Anggota Dewan Komisaris tidak boleh merangkap jabatan rangkap sebagai jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik, dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, dan/atau jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
3. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perseroan selain honorarium dan tunjangan serta fasilitas sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditentukan RUPS.

Ethics of the Position

In carrying out their duties and functions, the Board of Commissioners adheres to the Board Manual, which outline the following principles:

1. Members of the Board of Commissioners must comply with prevailing laws and regulations, Company's Articles of Association, Good Corporate Governance Guidelines, Code of Conduct, and Company's established policies.
2. Members of the Board of Commissioners may not hold concurrent positions as other roles in violation of statutory regulations, be administrators of political parties, and/or candidates/members of legislative bodies and/or Regional Heads/Deputy Regional Heads, and/or other positions that may create a conflict of interest.
3. Members of the Board of Commissioners are prohibited from taking personal advantage of the Company's activities other than the honorarium, allowances, and facilities as members of the Board of Commissioners determined by the General Meeting of Shareholders (RUPS).

4. Anggota Dewan Komisaris dilarang untuk memberikan, menawarkan, atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga secara ekonomis kepada klien atau rekanan perusahaan maupun pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya dengan maksud yang sama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Anggota Dewan Komisaris menjauhi tindakan-tindakan yang dapat merusak hubungan kerja di antara Komisaris dengan Direksi.
6. Anggota Dewan Komisaris harus mampu menjadikan dirinya sebagai teladan yang baik bagi Direksi dan karyawan Perusahaan.
7. Anggota Dewan Komisaris wajib menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan.
8. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris harus tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2024, Perseroan memastikan bahwa pembentukan Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, antara lain:

1. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) emiten atau perusahaan publik lain dan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) emiten atau perusahaan publik lain.
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) emiten atau perusahaan publik lain.
3. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak 5 (lima) komite di emiten atau perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris. Namun demikian, rangkap jabatan sebagai anggota komite hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, maka ketentuan yang berlaku adalah ketentuan yang mengatur lebih ketat.

4. Members of the Board of Commissioners are prohibited from giving, offering, or receiving, directly or indirectly, anything of economic value to clients or business partners of the Company or to Government officials to influence or as a reward for what they have done and other actions with the same intent, in accordance with prevailing laws and regulations.
5. Members of the Board of Commissioners shall refrain from actions that could harm the working relationship between the Commissioners and the Board of Directors.
6. Members of the Board of Commissioners must be able to set a good example for the Board of Directors and Company employees.
7. Members of the Board of Commissioners are obligated to maintain the confidentiality of Company information.
8. Confidential information obtained while serving as a member of the Board of Commissioners must remain confidential in accordance with prevailing laws and regulations.

Multiple Positions Held by the Board of Commissioners

Throughout 2024, the Company ensured that the formation of the Board of Commissioners complied with the provisions of OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, including the following:

1. Members of the Board of Commissioners may concurrently hold positions as members of the Board of Directors in a maximum of 2 (two) other issuers or public companies and as members of the Board of Commissioners in a maximum of 2 (two) other issuers or public companies.
2. In the event that a member of the Board of Commissioners does not concurrently serve as a member of the Board of Directors, the member of the Board of Commissioners concerned may concurrently hold positions as a member of the Board of Commissioners in a maximum of 4 (four) other issuers or public companies.
3. Members of the Board of Commissioners may concurrently serve as members of a maximum of 5 (five) committees in issuers or public companies where they also serve as a member of the Board of Directors or the Board of Commissioners. However, holding multiple positions as a committee member is only permissible as long as it does not conflict with other statutory regulations.

In the event that other statutory regulations govern the provisions regarding multiple positions held that differ from the provisions of the Company's Articles of Association, the stricter provisions shall prevail.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Komisaris bertanggung jawab mengawasi pengurusan Perseroan oleh Direksi dan memastikan tata kelola perusahaan telah dijalankan dengan benar.

Peran Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan secara berkala terutama terkait pelaksanaan rencana kerja jangka panjang serta anggaran Perseroan.

Sebagaimana diatur dalam *Board Manual*, Dewan Komisaris menjalankan tugas dan Tanggung Jawab mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Memeriksa buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;
2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris;
6. Mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan Komisaris;
7. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
8. Membentuk Komite Audit, Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG, Komite Pemantauan Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi, dan komite lainnya jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan termasuk mengangkat dan memberhentikan anggota komite tersebut;
9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu dan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
10. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
11. Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian struktur organisasi satu tingkat dibawah Direksi termasuk Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern;
12. Menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal yang dibicarakan;
13. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

As stipulated in the Company's Articles of Association and prevailing laws and regulations, the Board of Commissioners is responsible for overseeing the management of the Company by the Board of Directors and ensuring that good corporate governance has been properly implemented.

The role of the Board of Commissioners in conducting oversight and providing advice is carried out periodically, particularly concerning the implementation of the long-term work plan and the Company's budget.

As regulated in the Board Manual, the duties and responsibilities of the Board of Commissioners include the following:

1. Examining books, letters, and other documents, inspecting cash for verification purposes and other securities, and examining the Company's assets;
2. Entering the premises, buildings, and offices used by the Company;
3. Requesting explanations from the Board of Directors and/or other officials regarding all matters concerning the management of the Company;
4. Being informed of all policies and actions that have been and will be carried out by the Board of Directors;
5. Requesting the Board of Directors and/or other officials subordinate to the Board of Directors, with the knowledge of the Board of Directors, to attend meetings of the Board of Commissioners;
6. Appointing and dismissing a Secretary of the Board of Commissioners;
7. Temporarily suspending members of the Board of Directors in accordance with the provisions of the Articles of Association;
8. Establishing an Audit Committee, a Nomination, Remuneration and GCG Committee, a Risk Monitoring and Integrated Governance Committee, and other committees if deemed necessary, taking into account the Company's capabilities, including appointing and dismissing members of these committees;
9. Utilizing experts for specific matters and for a specific period at the Company's expense, if deemed necessary and in accordance with prevailing regulations;
10. Taking management actions of the Company in certain circumstances for a specific period in accordance with the provisions of these Articles of Association;
11. Approving the appointment and dismissal of organizational structure one level below the Board of Directors, including the Corporate Secretary and/or the Head of Internal Audit Unit;
12. Attending Board of Directors meetings and providing views on the matters discussed;
13. Exercising other supervisory authorities as long as they do not conflict with statutory regulations, the Articles of Association, and/or the GMS resolution.

Komposisi Dewan Komisaris

Berdasarkan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 mengenai jumlah anggota Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Komposisi Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan ini yang berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri dari: 1 (satu) Komisaris Independen sekaligus pelaksana tugas Komisaris Utama, 2 (dua) Komisaris dan 1 (satu) Komisaris Independen, dengan komposisi sebagai berikut:

Composition of the Board of Commissioners

Based on the Financial Services Authority Regulation (OJK) No. 33/POJK.04/2014 regarding the number of members of the Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, the composition of the Company's Board of Commissioners has met these requirements, totaling 4 (four) individuals, consisting of: 1 (one) Independent Commissioner who is also the acting President Commissioner, 2 (two) Commissioners, and 1 (one) Independent Commissioner, with the following composition:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Joseph Prajogo	Komisaris Independen sekaligus Pelaksana tugas Komisaris Utama Independent Commissioner and Acting President Commissioner	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 28 Juli 2020 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 51 tanggal 28 Juli 2020. Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) dated July 28, 2020 and confirmed in Deed Number 51 dated July 28, 2020.
Suli Fatimah	Komisaris Commissioner	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 10 Mei 2023 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 2 tanggal 10 Mei 2023. Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) dated May 10, 2023 and confirmed in Deed Number 2 dated May 10, 2023.
Danis Hidayat Sumadilaga	Komisaris Commissioner	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 10 Mei 2023 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 2 tanggal 10 Mei 2023. Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) dated May 10, 2023 and confirmed in Deed Number 2 dated May 10, 2023.
Taufan Gestoro	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 29 Februari 2024 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 6 tanggal 29 Februari 2024. Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) dated February 29, 2024 and confirmed in Deed Number 6 dated February 29, 2024.

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama

Untuk meningkatkan efektivitas kerja Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap Perseroan, Perseroan telah menentukan tugas dan tanggung jawab Komisaris Utama sebagai koordinator Dewan Komisaris, sebagai berikut:

1. Memberikan perintah tertulis untuk pemberian tugas khusus kepada anggota Dewan Komisaris sesuai dengan keputusan rapat Dewan Komisaris, yang menerangkan:
   a. Nama anggota Dewan Komisaris yang diberi tugas;
   b. Sifat dan lingkup pekerjaan;
   c. Tujuan dan sasaran pekerjaan;
   d. Waktu penugasan; dan
   e. Hal-hal administratif yang berkaitan dengan tugas khusus tersebut.
2. Melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.
3. Memimpin Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi.

Duties and Responsibilities of the President Commissioner

To improve the effectiveness of the Board of Commissioners in supervising the Company, the Company has stipulated the duties and responsibilities of the President Commissioner as the coordinator of the Board of Commissioners, as follows:

1. Providing written orders for the assignment of special duties to members of the Board of Commissioners in accordance with the decisions of the Board of Commissioners meeting, which explain:
   a. Name of the member of the Board of Commissioners who is given the task;
   b. Nature and scope of work;
   c. Objectives and targets of the work;
   d. Time of assignment; and
   e. Administrative matters relating to the special duties.
2. Conducting summons for the Board of Commissioners' Meetings.
3. Lead Board of Commissioners' Meetings and Board of Commissioners and Board of Directors' Meetings.

Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Anggota Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perseroan yang dilakukan Direksi. Pembagian tugas masing-masing anggota Komisaris dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris.

Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Duties and Responsibilities of Each Member of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners is in charge with supervising the Company's management policies carried out by the Board of Directors. The division of duties of each member of the Board of Commissioners is carried out by the Board of Commissioners assisted by the Secretary of the Board of Commissioners.

The duties and responsibilities of each member of the Board of Commissioners are as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Penugasan Field of Assignment
Joseph Prajogo	Komisaris Independen sekaligus Pelaksana tugas Komisaris Utama Independent Commissioner and Acting President Commissioner	Komisaris Utama: 1. Mengkoordinasikan kegiatan terkait tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris; 2. Melakukan pengawasan dan penasihatan Bidang Direktorat Utama; 3. Melakukan koordinasi lintas sektoral dan hubungan antar lembaga untuk kepentingan Perusahaan. President Commissioner: 1. Coordinating activities related to the duties carried out by the Board of Commissioners; 2. Overseeing and advising the Main Directorate; 3. Coordinating across sectors and manages inter-institutional relationships for the benefit of the Company. Komisaris Independen: 1. Melakukan koordinasi lintas sektoral dan hubungan antar lembaga untuk kepentingan Perusahaan; 2. Melakukan pengawasan dan penasihatan Direktorat QHSE dan Pemasaran; 3. Mengkoordinasikan kegiatan Komite Audit dan Risiko; 4. Melaporkan kepada Komisaris Utama segala upaya, pekerjaan dan kegiatannya. Independent Commissioner: 1. Coordinating across sectors and manages inter-institutional relationships for the benefit of the Company; 2. Overseeing and advising the QHSE (Quality, Health, Safety, and Environment) and Marketing Directorates; 3. Coordinating the activities of the Audit and Risk Committee; 4. Reporting all undertakings, work, and activities to the President Commissioner.
Suli Fatimah	Komisaris Commissioner	1. Melakukan koordinasi lintas sektoral dan hubungan antar lembaga untuk kepentingan Perusahaan; 2. Melakukan pengawasan dan penasihatan Bidang Direktorat Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko; 3. Melaporkan kepada Komisaris Utama segala upaya, pekerjaan dan kegiatannya 1. Coordinating across sectors and manages inter-institutional relationships for the benefit of the Company; 2. Overseeing and advising the Finance, Human Capital, and Risk Management Directorates; 3. Reporting all undertakings, work, and activities to the President Commissioner.

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Penugasan Field of Assignment
Danis Hidayat Sumadilaga	Komisaris Commissioner	1. Melakukan koordinasi lintas sektoral dan hubungan antar lembaga untuk kepentingan Perusahaan; 2. Melakukan pengawasan dan penasihatan Bidang Direktorat Operasi II; 3. Mengkoordinasikan kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi; 4. Melaporkan kepada Komisaris Utama segala upaya, pekerjaan dan kegiatannya. 1. Coordinating across sectors and manages inter-institutional relationships for the benefit of the Company; 2. Overseeing and advising the Operations Directorate II; 3. Coordinating the activities of the Nomination and Remuneration Committee; 4. Reporting all undertakings, work, and activities to the President Commissioner.
Taufan Gestoro	Komisaris Independen Independent Commissioner	1. Melakukan koordinasi lintas sektoral dan hubungan antar lembaga untuk kepentingan Perusahaan; 2. Melakukan pengawasan dan penasihatan Bidang Direktorat Operasi I; 3. Melakukan pengawasan dan penasihatan terkait kepatuhan dan penerapan GCG; 4. Melaporkan kepada Komisaris Utama segala upaya, pekerjaan, dan kegiatannya. 1. Coordinating across sectors and manages inter-institutional relationships for the benefit of the Company; 2. Overseeing and advising the Operations Directorate I; 3. Overseeing and advising on compliance and the implementation of GCG (Good Corporate Governance); 4. Reporting all undertakings, work, and activities to the President Commissioner.

Pembagian tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris Perseroan tidak membebaskan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

The division of duties and responsibilities within the Company's Board of Commissioners does not release the Board of Commissioners from their collective responsibility as stipulated in Article 114 of Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

Mekanisme Pengambilan Keputusan Dewan Komisaris

Mekanisme pengambilan keputusan Dewan Komisaris dilakukan melalui Rapat Dewan Komisaris dan dilakukan secara sirkuler. Pembahasan mengenai keputusan Dewan Komisaris tercantum pada Anggaran Dasar, *Board Manual, Code of Corporate Governance*. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi dan Rapat internal Dewan Komisaris. Keputusan dapat pula diambil di luar rapat.

Decision-Making Mechanism of the Board of Commissioners

The decision-making mechanism of the Board of Commissioners is carried out through Board of Commissioners' Meetings and also through circular resolutions. Discussions regarding the decisions of the Board of Commissioners are outlined in the Articles of Association, Board Manual, and Code of Corporate Governance. All decisions of the Board of Commissioners are made in Joint Meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors and internal meetings of the Board of Commissioners. Decisions can also be made outside of formal meetings.

Hal-hal yang memerlukan keputusan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Pengesahan Rencana dan Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP);
2. Pengesahan Rencana Kerja Jangka Panjang Perusahaan (RJPP);
3. Aksi Korporasi;
4. Kebijakan Strategis Perusahaan;
5. Implementasi GCG;
6. Pengambilan keputusan lainnya yang terkait dengan fungsi pengawasan Dewan Komisaris.

Matters requiring a decision from the Board of Commissioners are as follows:

1. Ratification of the Company's Work Plan and Budget (RKAP);
2. Ratification of the Company's Long-Term Work Plan (RJPP);
3. Corporate Actions;
4. Strategic Company Policies;
5. Implementation of GCG (Good Corporate Governance);
6. Other decision-making related to the supervisory function of the Board of Commissioners.

Usulan yang akan disampaikan dalam rapat Dewan Komisaris terlebih dahulu disampaikan kepada Direksi secara tertulis disertai dengan seluruh dokumen pendukung secara lengkap.

Proposals to be submitted at a meeting of the Board of Commissioners shall first be submitted to the Board of Directors in writing, accompanied by all complete supporting documents.

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris telah melakukan pengambilan 12 (dua belas) kali keputusan pada saat rapat Dewan Komisaris termasuk dalam persetujuan secara sirkuler.

Throughout 2024, the Board of Commissioners made 12 (twelve) decisions during Board of Commissioners meetings, including approvals via circular resolutions.

Informasi Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris

Rapat Internal Dewan Komisaris

Sebagaimana diatur dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Perseroan menetapkan kebijakan penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris diantaranya sebagai berikut:

- Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan yang dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota dewan Komisaris.
- Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Jika berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh salah seorang Komisaris yang dipilih oleh anggota Komisaris yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat tersebut.

Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat.

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 12 (dua belas) kali rapat, dengan rincian sebagai berikut:

Information on the Attendance Level of Members of the Board of Commissioners in Board of Commissioners' Meetings

Internal Meeting of the Board of Commissioners

As stipulated in the Board of Commissioners Board Manual, the Company has established a policy for holding Board of Commissioners meetings, including the following:

- Board of Commissioners' meetings must be held at least 1 (one) time in 2 (two) months which can be held if attended by the majority of all members of the Board of Commissioners.
- Board of Commissioners' meeting is chaired by the President Commissioner. If unable to attend, the meeting is chaired by one of the Commissioners selected by the members of the Board of Commissioners who are present and/or represented at the Meeting.

The Board of Commissioners' meeting is valid and has the right to make binding decisions if more than ½ (one half) of the total number of Board of Commissioners is present or represented at the Meeting.

Throughout 2024, the Board of Commissioners has held 12 (twelve) meetings, with the following details:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Rapat Internal** Internal Meeting		
		Jumlah Rapat (kali) Number of Meetings (times)	**Jumlah Kehadiran (kali)** Number of Attendance (times)	**Tingkat Kehadiran (%)** Attendance Level (%)
Menjabat hingga akhir tahun buku 2024 Serving until the end of the 2024 fiscal year				
Joseph Prajogo	Komisaris Independen sekaligus Pelaksana tugas Komisaris Utama Independent Commissioner and Acting President Commissioner	12	12	100
Suli Fatimah	Komisaris Commissioner	12	12	100
Danis Hidayat Sumadilaga	Komisaris Commissioner	12	12	100
Taufan Gestoro	Komisaris Independen Independent Commissioner	10	10	100
Digantikan sebelum tahun buku 2024 berakhir Replaced before the end of the 2024 fiscal year				
Sumadi	Komisaris Utama President Commissioner	4	4	100

Risalah Rapat

Adapun risalah dan daftar Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat internal Dewan Komisaris yang dilaksanakan sepanjang tahun buku 2024 adalah sebagai berikut:

Minutes of Meetings

The minutes and list of members of the Board of Commissioners who attended the Board of Commissioners' internal meetings held throughout the 2024 fiscal year are as follows:

No	Tanggal Date	Agenda Agenda	No. Risalah Rapat No. Minutes of Meeting	Peserta Participant
1	19 Januari 2024 January 19, 2024	1. Pembahasan Kinerja Hasil Usaha Perseroan sampai dengan Desember 2023 2. Pembahasan GCG dan rencana Pengesahan RJPP dan RKAP 2024 3. Usulan agenda rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi 1. Discussion on the Company's Business Performance up to December 2023 2. Discussion on GCG and the plan for Ratification of the RJPP (Long-Term Work Plan) and RKAP (Work Plan and Budget) for 2024 3. Proposed agenda for the joint meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors	001	a. Sumadi b. Suli Fatimah c. Danis H. Sumadilaga d. Joseph Prajogo
2	27 Februari 2024 February 27, 2024	1. Pembahasan Kinerja Hasil Usaha Perseroan sampai dengan Januari 2024 2. Pembahasan Pemenuhan PER-01/MBU/2023 3. Usulan agenda rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi 1. Discussion on the Company's Business Performance up to January 2024 2. Discussion on the Fulfillment of PER-01/MBU/2023 3. Proposed agenda for the joint meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors	002	a. Sumadi b. Suli Fatimah c. Danis H. Sumadilaga d. Joseph Prajogo
3	25 Maret 2024 March 25, 2024	1. Pembahasan Kinerja Hasil Usaha Perseroan sampai dengan Februari 2024 2. Pembahasan Komite NRG dan Lain-lain 3. Usulan agenda rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi 1. Discussion on the Company's Business Performance up to February 2024 2. Discussion on the NRC (Nomination and Remuneration Committee) and Other Matters 3. Proposed agenda for the joint meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors	003	a. Sumadi b. Suli Fatimah c. Danis H. Sumadilaga d. Joseph Prajogo e. Taufan Gestoro
4	29 April 2024 April 29, 2024	1. Pembahasan Kinerja Hasil Usaha Perseroan sampai dengan Maret 2024 2. Progres tindak lanjut rekomendasi hasil review penerapan GCG dan NR 3. Usulan agenda rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi 1. Discussion on the Company's Business Performance up to March 2024 2. Progress on the follow-up to recommendations from the GCG and NR (Nomination and Remuneration) implementation review 3. Proposed agenda for the joint meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors	004	a. Suli Fatimah b. Danis H. Sumadilaga c. Joseph Prajogo d. Taufan Gestoro

No	Tanggal Date	Agenda Agenda	No. Risalah Rapat No. Minutes of Meeting	Peserta Participant
5	28 Mei 2024 May 28, 2024	1. Pembahasan Kinerja Hasil Usaha Perseroan sampai dengan April 2024 2. Pembahasan pengukuran GCG dan Tata Kelola Terintegrasi 3. Usulan agenda rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi 1. Discussion on the Company's Business Performance up to April 2024 2. Discussion on the measurement of GCG (Good Corporate Governance) and Integrated Governance 3. Proposed agenda for the joint meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors	005	a. Suli Fatimah b. Danis H. Sumadilaga c. Joseph Prajogo d. Taufan Gestoro
6	26 Juni 2024 June 26, 2024	1. Pembahasan Kinerja Hasil Usaha Perseroan sampai dengan Mei 2024 2. Pembahasan kemungkinan roadshow Direksi-Dekom ke kreditur Perbankan WEGE 3. Pembahasan berkala fungsi yang ada dalam organisasi WIKA Gedung (Biro Keuangan) 4. Usulan agenda rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi 1. Discussion on the Company's Business Performance up to May 2024 2. Discussion on the possibility of a Director-Commissioner roadshow to WEGE's Banking creditors 3. Periodic discussion on functions within the WIKA Gedung organization (Finance Bureau) 4. Proposed agenda for the joint meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors	006	a. Suli Fatimah b. Danis H. Sumadilaga c. Joseph Prajogo d. Taufan Gestoro
7	24 Juli 2024 July 24, 2024	1. Pembahasan Kinerja Hasil Usaha Perseroan sampai dengan Juni 2024 2. Pembahasan berkala fungsi yang ada dalam organisasi WIKA Gedung (Biro IT) 3. Usulan agenda rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi 1. Discussion on the Company's Business Performance up to June 2024 2. Periodic discussion on functions within the WIKA Gedung organization (IT Bureau) 3. Proposed agenda for the joint meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors	007	a. Suli Fatimah b. Danis H. Sumadilaga c. Joseph Prajogo d. Taufan Gestoro
8	28 Agustus 2024 August 28, 2024	1. Pembahasan Kinerja Hasil Usaha Perseroan sampai dengan Juli 2024 2. Pembahasan kesiapan ERP dan SAP WIKA Gedung 3. Usulan agenda rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi 1. Discussion on the Company's Business Performance up to July 2024 2. Discussion on the ERP and SAP readiness of WIKA Gedung 3. Proposed agenda for the joint meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors	008	a. Suli Fatimah b. Danis H. Sumadilaga c. Joseph Prajogo d. Taufan Gestoro

No	Tanggal Date	Agenda Agenda	No. Risalah Rapat No. Minutes of Meeting	Peserta Participant
9	25 September 2024 September 25, 2024	1. Pembahasan Kinerja Hasil Usaha Perseroan sampai dengan Agustus 2024 2. Pembahasan pengelolaan data WIKA Gedung 3. Usulan agenda rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi 1. Discussion on the Company's Business Performance up to August 2024 2. Discussion on WIKA Gedung's data management 3. Proposed agenda for the joint meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors	009	a. Suli Fatimah b. Danis H. Sumadilaga c. Joseph Prajogo d. Taufan Gestoro
10	25 Oktober 2024 October 25, 2024	1. Pembahasan Kinerja Hasil Usaha Perseroan sampai dengan September 2024 2. Pembahasan Pengendalian Intern Tata Kelola Divisi Engineering WIKA Gedung 3. Usulan agenda rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi 1. Discussion on the Company's Business Performance up to September 2024 2. Discussion on the Internal Control of the Governance of the Engineering Division of WIKA Gedung 3. Proposed agenda for the joint meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors	010	a. Suli Fatimah b. Danis H. Sumadilaga c. Joseph Prajogo d. Taufan Gestoro
11	21 November 2024 November 21, 2024	1. Pembahasan Kinerja Hasil Usaha Perseroan sampai dengan Oktober 2024 2. Pembahasan Draft RKA Dekom Tahun 2025 3. Usulan agenda rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi 1. Discussion on the Company's Business Performance up to October 2024 2. Discussion on the Draft Work Plan and Budget of the Board of Commissioners for 2025 (Draft RKA Dekom Tahun 2025) 3. Proposed agenda for the joint meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors	011	a. Suli Fatimah b. Danis H. Sumadilaga c. Joseph Prajogo d. Taufan Gestoro
12	23 Desember 2024 December 23, 2024	1. Pembahasan dan Masukan Dewan Komisaris atas Hasil Kinerja WIKA Gedung dan Anak Perusahaan sampai dengan Bulan November 2024 dan Prognosa Desember 2024 2. Pembahasan Hasil Rakor Tata Kelola Terintegrasi bulan Desember 2024 3. Usulan agenda rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi 1. Discussion and Input from the Board of Commissioners on the Performance Results of WIKA Gedung and its Subsidiaries up to November 2024 and the December 2024 Forecast 2. Discussion on the Results of the Integrated Governance Coordination Meeting in December 2024 3. Proposed agenda for the joint meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors	012	a. Suli Fatimah b. Danis H. Sumadilaga c. Joseph Prajogo d. Taufan Gestoro

Keputusan rapat dicatat dan didokumentasikan dengan baik dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan salah seorang anggota Dewan Komisaris. Risalah tersebut didistribusikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, baik yang menghadiri rapat maupun yang tidak. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat, hal tersebut turut dicantumkan dalam risalah rapat disertai dengan alasan di balik perbedaan pendapat.

Meeting decisions are recorded and well-documented in the minutes of the meeting, which are signed by the chairperson of the meeting and one member of the Board of Commissioners. These minutes are distributed to all members of the Board of Commissioners, both those who attended and those who did not. In the event of dissenting opinions, these are also included in the minutes of the meeting, along with the reasons behind the differences in opinion.

Program Orientasi Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris baru mengikuti program orientasi sebagai bentuk pengenalan terhadap Perseroan. Program Pengenalan ini dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke area operasional Perseroan atau program lainnya.

Tujuannya agar anggota baru Dewan Komisaris dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Dewan Komisaris dengan baik. Program Pengenalan tersebut meliputi:

- Prinsip-prinsip dan implementasi GCG
- Gambaran Perusahaan secara lengkap
- Penjelasan terkait kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta komite audit
- Penjelasan terkait tugas dan tanggung jawab Komisaris dan Direksi
- Berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perusahaan

Pada tahun 2024, terdapat 1 (satu) kali pelaksanaan program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yakni Taufan Gestoro.

Orientation Program for the Board of Commissioners

New members of the Board of Commissioners participate in an orientation program as a form of introduction to the Company. This Introduction Program can take the form of presentations, meetings, visits to the Company's operational areas, or other programs.

The aim is to enable new members of the Board of Commissioners to perform their duties and responsibilities as members of the Board of Commissioners effectively. The Introduction Program includes:

- Principles and implementation of GCG (Good Corporate Governance)
- A complete overview of the Company
- Explanation regarding delegated authorities, internal and external audits, internal control systems and policies, and the audit committee
- Explanation regarding the duties and responsibilities of the Commissioners and the Board of Directors
- Various prevailing laws and regulations as well as Company policies

In 2024, the orientation program was conducted once for a member of the Board of Commissioners, namely Taufan Gestoro.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Sebagaimana diatur dalam *Board Manual*, Perseroan melaksanakan program pengembangan kompetensi bagi anggota Dewan Komisaris sepanjang tahun 2024. Program ini dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik Dewan Komisaris dan kebutuhan strategis Perseroan, sehingga materi dan agenda yang disusun relevan untuk mendukung peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam pengawasan dan pemberian arahan strategis.

Adapun program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Dewan Komisaris selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Training and Competency Development for the Board of Commissioners

As stipulated in the Board Manual, the Company implemented competency development programs for members of the Board of Commissioners throughout 2024. These programs were designed considering the specific needs of the Board of Commissioners and the Company's strategic requirements, ensuring that the materials and agendas developed were relevant to support the role and responsibilities of the Board of Commissioners in oversight and providing strategic direction.

The training and competency development programs attended by the Board of Commissioners during 2024 were as follows:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi** Training and Competency Development		
		Nama Name	**Waktu** Time	**Penyelenggara** Organizer
Menjabat hingga akhir tahun buku 2024 Served until the end of the 2024 fiscal year				
Joseph Prajogo	Komisaris Independen sekaligus Pelaksana Tugas Komisaris Utama Independent Commissioner and Acting President Commissioner	Pelatihan dan Sertifikasi Qualified Risk Governance Professional Qualified Risk Governance Professional Certification Training	10-12 September 2024 September 10-12, 2024	PPM Manajemen
Suli Fatimah	Komisaris Commissioner	Strengthening Leadership for Transformation	20 Agustus 2024 August 20, 2024	PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk dan PT Wijaya Karya Beton Tbk

Nama Name	Jabatan Position	Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Training and Competency Development		
		Nama Name	Waktu Time	Penyelenggara Organizer
Danis Hidayat Sumadilaga	Komisaris Commissioner	-	-	-
Taufan Gestoro	Komisaris Independen Independent Commissioner	Pelatihan dan Sertifikasi Qualified Risk Governance Professional Qualified Risk Governance Professional Certification Training	10-12 September 2024 September 10-12, 2024	PPM Manajemen
Menjabat sebelum tahun 2024 berakhir Taking office before the end of 2024				
Sumadi	Komisaris Utama President Commissioner	-	-	-

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungnya sesuai dengan pedoman tata kerja. Secara berkala Dewan Komisaris memberikan nasihat kepada Direksi atas pencapaian target bisnis dengan tetap memperhatikan pengelolaan risiko dengan prinsip kehati-hatian serta mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Melalui Rapat internal, Dewan Komisaris memberikan beragam rekomendasi dan masukan kepada Direksi, sebagai berikut:

- Pemberian nasihat kepada Direksi mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, serta Ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;
- Pemberian nasihat yang dilakukan untuk kepentingan Perusahaan yang sejalan dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan keputusan RUPS;
- Pertanggungjawaban kepada RUPS;
- Pemenuhan tanggung jawab untuk melakukan analisa dan meninjau laporan tahunan yang disiapkan Direksi;
- Bertanggung jawab terhadap evaluasi kinerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Di samping itu, Dewan Komisaris bersama Direksi melakukan kunjungan ke proyek dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan atas pembangunan proyek konstruksi bangunan selama tahun 2024; dan
- Memberikan rekomendasi dan masukan lainnya.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris Serta Dasar Penilaiannya

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite di bawah Dewan Komisaris, yaitu:

1. Komite Audit
2. Komite Nominasi, Remunerasi & GCG
3. Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi

Implementation of the Duties of the Board of Commissioners in 2024

Throughout 2024, the Board of Commissioners carried out its duties and responsibilities in accordance with the Board Manual. Periodically, the Board of Commissioners provided advice to the Board of Directors on the achievement of business targets while remain considering risk management with the principle of prudence and complying with prevailing regulations and provisions.

Through internal meetings, the Board of Commissioners provided various recommendations and input to the Board of Directors, as follows:

- Providing advice to the Board of Directors regarding the Company's Long-Term Plan, Work Plan and Budget, as well as the provisions of the Articles of Association and decisions of the General Meeting of Shareholders (GMS), and applicable laws and regulations;
- Providing advice that is in the best interest of the Company and in line with the Company's aims and objectives;
- Implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors in accordance with the provisions in the Articles of Association and decisions of the GMS;
- Accountability to the GMS;
- Fulfillment of the responsibility to analyze and review the annual report prepared by the Board of Directors;
- Being responsible for evaluating the performance of committees under the Board of Commissioners. In addition, the Board of Commissioners, together with the Board of Directors, conducted site visits to projects to carry out the supervisory function over building construction projects during 2024; and
- Providing other recommendations and input.

Performance Assessment of Committees Under the Board of Commissioners and its Assessment Basis

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners is assisted by Committees under the Board of Commissioners, namely:

1. Audit Committee
2. Nomination, Remuneration & GCG Committee
3. Risk Monitoring and Integrated Governance Committee

Dewan Komisaris secara berkala mengevaluasi kinerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris secara berkala setiap triwulan. Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris.

Komite yang memiliki peran aktif salah satunya adalah Komite Audit. Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam hal pengawasan pengelolaan Perseroan dengan baik. Hal ini dapat mengacu kepada pemenuhan 8 (delapan) butir dalam Piagam Komite Audit yang mencerminkan pelaksanaan tugas dan kegiatan komite tersebut.

Untuk mengoptimalkan fungsi organ Pendukung Dewan Komisaris, Perseroan membentuk Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK.02.01/A.KOM.00001.WEGE/2024 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk dan No. SK.02.01/A.KOM.wg.07816/2024 tentang Penetapan Organ Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, dimana tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi memberikan evaluasi dan analisa secara berkala terhadap fungsi kepatuhan serta mengevaluasi kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko.

Komite Nominasi, Remunerasi & GCG juga mampu menjalankan fungsi membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dengan baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan 8 (delapan) butir dalam Piagam Komite Nominasi, Remunerasi & GCG di terkait pelaksanaan tugas dan kegiatan komite tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Dewan Komisaris dinilai juga mampu menjalankan tugasnya dengan baik dalam membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi dan efektivitas peran Dewan Komisaris, khususnya di bidang administrasi. Penilaian atas kinerja berpedoman pada pemenuhan tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris sebagaimana yang diatur dalam dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/ MBU/2012 diantaranya terkait penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris dan pembuatan risalah dari rapat tersebut.

The Board of Commissioners periodically evaluates the performance of the committees under the Board of Commissioners every quarter. In carrying out its supervisory function, the Board of Commissioners is assisted by the Secretary of the Board of Commissioners.

One committee with an active role is the Audit Committee. The Audit Committee assists the Board of Commissioners in the effective oversight of the Company's management. This can be seen in the fulfillment of the 8 (eight) points in the Audit Committee Charter, which reflect the implementation of the committee's duties and activities.

To optimize the function of the Board of Commissioners' Supporting Organs, the Company established the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee through the Decree of the Board of Commissioners No. SK.02.01/A.KOM.00001.WEGE/2024 concerning the Charter of the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk and No. SK.02.01/A.KOM.wg.07816/2024 concerning the Determination of the Risk Monitoring and Integrated Governance Organ of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, where the duties and responsibilities of the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee include providing periodic evaluations and analyses of the compliance function and evaluating the adequacy of the risk management identification, measurement, monitoring, control, and management information system processes.

The Nomination, Remuneration & GCG Committee is also able to effectively assist the Board of Commissioners in carrying out its supervisory function. This is reflected in the fulfillment of the 8 (eight) points in the Charter of the Nomination, Remuneration & GCG Committee related to the implementation of the committee's duties and activities.

Meanwhile, the Secretary of the Board of Commissioners is also assessed to be performing their duties well in assisting and supporting the smooth implementation of the functions and effectiveness of the Board of Commissioners' role, particularly in the administrative field. The performance assessment is based on the fulfillment of the duties and responsibilities of the Secretary of the Board of Commissioners as regulated in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-12/MBU/2012, including those related to the organization of Board of Commissioners meetings and the preparation of the minutes of these meetings.

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan tertuang dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris, dijelaskan bahwa Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham sehingga dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

Komisaris Independen mengambil keputusan secara objektif dan independen tanpa adanya tekanan dan kepentingan pihak mana pun.

Jumlah dan Komposisi Komisaris Independen
Perusahaan telah memenuhi ketentuan tersebut dimana dari jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 4 (empat) orang, 2 diantaranya adalah Komisaris Independen. Secara persentase jumlah anggota Komisaris Independen adalah 50,0% dari total anggota Dewan Komisaris. Anggota Komisaris Independen Perusahaan adalah Joseph Prajogo dan Taufan Gestoro. Penjelasan terkait profil Komisaris Independen dijelaskan di bab Profil Perusahaan bagian Profil Dewan Komisaris.

Masa jabatan
Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.

Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

Kriteria Komisaris Independen
Dalam menentukan Komisaris Independen, Perseroan berpedoman pada Pasal 21 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Landasan Perseroan dalam mengangkat Komisaris Independen memiliki beberapa kriteria, sebagai berikut:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perusahaan pada periode berikutnya;
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan;
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perusahaan;

As regulated in the Financial Services Authority Regulation (OJK) No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies and stated in the Board of Commissioners' Work Guidelines, an Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who comes from outside the Issuer or Public Company and has no financial, management, share ownership, and/or family relationship with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and/or shareholders that could affect their ability to act independently.

Independent Commissioner makes decisions objectively and independently without any pressure or interests from any party.

Number and Composition of Independent Commissioners
The Company has complied with these provisions, where out of a total of 4 (four) members of the Board of Commissioners, 2 (two) are Independent Commissioners. In percentage terms, the number of Independent Commissioners is 50.0% of the total members of the Board of Commissioners. The Company's Independent Commissioners are Joseph Prajogo and Taufan Gestoro. An explanation regarding the profiles of the Independent Commissioners is provided in the Company Profile chapter, under the section on the Board of Commissioners' Profiles.

Term of Office
An Independent Commissioner who has served for 2 (two) terms of office may be reappointed for the subsequent term as long as the Independent Commissioner declares themselves to remain independent to the General Meeting of Shareholders (GMS).

In the event that an Independent Commissioner serves on the Audit Committee, the Independent Commissioner concerned may only be reappointed to the Audit Committee for 1 (one) subsequent term of office of the Audit Committee.

Criteria for Independent Commissioner
In determining Independent Commissioner, the Company adheres to Article 21 of OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies. The Company's basis for appointing Independent Commissioner includes several criteria, as follows:

1. Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of the Issuer or Public Company within the last 6 (six) months, except for reappointment as an Independent Commissioner of the Company in the following period;
2. Does not have shares, either directly or indirectly, in the Company;
3. Does not have an affiliation with the Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Company's major shareholders;

4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan utama Perusahaan.

Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Terkait dengan aspek independensi, Komisaris Independen Perusahaan telah memenuhi persyaratan independensi sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan. Pernyataan independensi masing-masing Komisaris Independen selaras dengan yang tertuang dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, sebagai berikut:

4. Does not have a direct or indirect business relationship related to the Company's main activities.

Statement of Independence of the Independent Commissioners

Regarding the aspect of independence, the Company's Independent Commissioners have met the independence requirements as stipulated in the Company's Articles of Association. The statement of independence of each Independent Commissioner is in line with the provisions of Article 25 paragraph (1) of OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, as follows:

Persyaratan Independensi Requirements for Independence	Joseph Prajogo	Taufan Gestoro
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perusahaan pada periode berikutnya. Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of the Issuer or Public Company within the last 6 (six) months, except for reappointment as an Independent Commissioner of the Company in the following period.	√	√
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan. Does not have shares, either directly or indirectly, in the Company.	√	√
Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perusahaan. Does not have an affiliation with the Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Company's major shareholders.	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan utama Perusahaan. Does not have a direct or indirect business relationship related to the Company's main activities.	√	√

Organ Pendukung Dewan Komisaris

Supporting Organs of the Board of Commissioners

Dalam rangka membantu Dewan komisaris dan sebagai penunjang tugas pengawasan, Dewan Komisaris membentuk organ pendukung dibawah Dewan Komisaris. Organ-organ pendukung ini dibentuk dan bertanggung jawab dalam melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan Perseroan.

Berpedoman pada Anggaran Dasar Perusahaan dan pedoman kerja Perseroan, Dewan Komisaris telah membentuk beberapa organ antara lain:

1. Sekretaris Dewan Komisaris;
2. Komite Audit;
3. Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG;
4. Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi; serta
5. Komite-komite lain, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan.

Seluruh organ tersebut memiliki hubungan yang saling terkait satu dengan lainnya dan bekerja berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang berlaku.

To assist the Board of Commissioners and to support its supervisory duties, the Board of Commissioners forms supporting organs under its authority. These supporting organs are established and responsible for carrying out the supervisory and guidance functions of the Company.

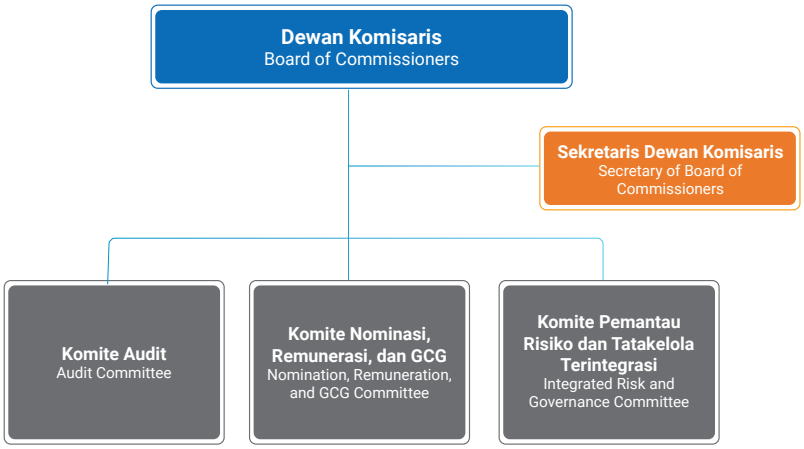
Based on the Company's Articles of Association and the Company's work guidelines, the Board of Commissioners has formed several organs, including:

1. Secretary of the Board of Commissioners;
2. Audit Committee;
3. Nomination, Remuneration and GCG (Good Corporate Governance) Committee;
4. Risk Monitoring and Integrated Governance Committee; and
5. Other committees, if deemed necessary by considering the Company's capabilities.

All of these organs have an interrelated relationship to one another and operate based on prevailing corporate governance principles.

Bagan Organ Pendukung Dewan Komisaris

Organizational Chart of Supporting Organs to the Board of Commissioners



SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Sekretaris Dewan Komisaris berperan sebagai bagian penting yang mendukung Dewan Komisaris dalam memastikan kelancaran administrasi serta efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Organ ini dibentuk untuk mengoptimalkan fungsi administrasi dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris.

Piagam Kerja Sekretaris Dewan Komisaris

- Pedoman Tata Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (Board Manual) WEGE;
- Panduan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* WEGE ; dan

SECRETARY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Secretary of the Board of Commissioners performs an important role in supporting the Board of Commissioners to ensure the efficient administration and effective implementation of its duties and responsibilities. This organ was established to optimize the administrative function in the decision-making and supervisory processes carried out by the Board of Commissioners.

Charter of Secretary of the Board of Commissioners

- Board Manual of Board of Directors and Board of Commissioners of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk;
- Good Corporate Governance Implementation Guidelines of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk; and

- Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Dewan Komisaris WEGE Tahun 2024.

Kriteria Sekretaris Dewan Komisaris

Sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, Nomor: PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, Sekretaris Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan:

1. Memahami sistem pengelolaan, pengawasan dan pembinaan BUMN;
2. Memiliki integritas yang baik;
3. Memahami fungsi kesekretariatan;
4. Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik.

Masa Jabatan Sekretaris Dewan Komisaris

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, menyatakan bahwa masa jabatan Sekretaris Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) tahun pada periode yang sama, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

- Work Plan and Budget Plan of the Board of Commissioners of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk for 2024.

Criteria for Secretary of Board of Commissioners

As refer to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia, Number: PER-3/MBU/03/2023 issued on March 20, 2023 regarding Organs and Human Capital of State-Owned Enterprises, the Secretary of the Board of Commissioners is required to fulfill the following requirements:

1. Familiar with the system of management, supervision and guidance of SOEs;
2. Possess good integrity;
3. Comprehensive of secretarial functions;
4. Capable of communicating and coordinating well.

Term of Office of the Secretary of the Board of Commissioners

As required by the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-3/MBU/03/2023 issued on March 20, 2023 regarding Organs and Human Capital of State-Owned Enterprises, the term of office of the Secretary of the Board of Commissioners is stipulated by the Board of Commissioners for a period of 3 (three) years and shall be reappointed for 2 (two) years in the same period, regardless of the right of the Board of Commissioners to dismiss him/her at any time.

Profil Sekretaris Dewan Komisaris
Profile of Secretary of the Board of Commissioners



Apridio Rizak Karunia

Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary of the Board of Commissioners

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Usia Age	32 tahun pada akhir tahun buku 2024 32 years at the end of the 2024 fiscal year
Riwayat Pendidikan Educational Background	S1 Akuntansi – Universitas Airlangga Bachelor of Accounting – Universitas Airlangga
Pengalaman Kerja Professional Experience	• Vice President of Finance Division PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2024 – saat ini | present) • Senior Manager of Strategic Finance & Planning PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2023 – 2024) • Portfolio Manager PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2022 – 2023) • Portfolio Coordinator PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2021 – 2022) • Finance Section Head PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2019 – 2021)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk Nomor SK.02.01/A.KOM.03022/2023 The Decree of the Board of Commissioners of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk with the number SK.02.01/A.KOM.03022/2023

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris meliputi:

1. Sekretaris Dewan Komisaris bertugas melakukan kegiatan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya berupa:
   a. Menyiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris;
   b. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan anggaran dasar Perusahaan;
   c. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
   d. Menyusun rancangan rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris;
   e. Menyusun rancangan laporan-laporan Dewan Komisaris; dan
   f. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.
2. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris Dewan Komisaris selaku pimpinan Sekretariat Dewan Komisaris melakukan tugas lain berupa:
   a. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
   b. Mengkoordinasikan anggota komite, jika diperlukan, dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris; dan
   c. Sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain.
3. Dalam rangka tertib administrasi dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, Sekretaris Dewan Komisaris harus memastikan dokumen penyelenggaraan kegiatan tersimpan dengan baik di Perseroan.

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Dewan Komisaris

Untuk mendukung efektivitas fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris, Perseroan memberikan perhatian terhadap pengembangan kompetensi Sekretaris Dewan Komisaris. Perseroan memfasilitasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang mendukung kelancaran operasional serta memperkuat pelaksanaan tugas pengawasan. Dukungan ini bertujuan untuk memastikan Sekretaris Dewan Komisaris memiliki keahlian yang memadai dalam menjalankan peran secara optimal.

Adapun program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Sekretaris Dewan Komisaris selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Duties and Responsibilities of Secretary of the Board of Commissioners

Duties and responsibilities of Secretary of the Board of Commissioners include:

1. Secretary of the Board of Commissioners is responsible to organize activities that will assist the Board of Commissioners in performing its duties consist of:
   a. Arranging meetings, as well as briefing sheets for the Board of Commissioners;
   b. Providing minutes of meetings of the Board of Commissioners in line with the Company's articles of association;
   c. Managing documents of the Board of Commissioners, consisting of incoming letters, outgoing letters, minutes of meetings and other documents;
   d. Arranging draft of work plan and budget of the Board of Commissioners;
   e. Arranging draft reports of the Board of Commissioners; and
   f. Carrying out other duties of the Board of Commissioners.
2. Apart from performing the duties as referred to above, the Secretary of the Board of Commissioners as the head of the Secretariat of the Board of Commissioners shall perform other duties consist of:
   a. Ensuring the Board of Commissioners complies with laws and regulations and applies the principles of good corporate governance;
   b. Coordinating committee members, if required, in order to expedite the duties of the Board of Commissioners; and
   c. Serving as a liaison officer of the Board of Commissioners with other parties.
3. As part of the orderly administration and implementation of good corporate governance, the Secretary of the Board of Commissioners shall ensure that the documents related to the activities are properly organized in the Company.

Competency Development of the Secretary of the Board of Commissioners

As a support the effectiveness of the supervisory function by the Board of Commissioners, the Company focuses on the development of the competence of the Secretary of the Board of Commissioners. The Company facilitates in upgrading of knowledge and skills that enhance operational efficiency and strengthen the implementation of supervisory duties. This support aims to ensure that the Secretary of the Board of Commissioners has adequate expertise in carrying out the role optimally.

The training and competency development programs attended by the Secretary of the Board of Commissioners throughout 2024 are as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Training and Competency Development		
		Nama Kegiatan Name of Activity	Penyelenggara Organizer	Waktu Date
Apridio Rizak Karunia	Sekretaris Dewan Komisaris Secretary of Board of Commissioners	Peningkatan Kapabilitas Manajer Madya Middle Manager Capabilities Improvement	Internal HC	2024
		Individual Development Program		
		Corporate Finance		
		BUMN School of Excellence Masterclass	BSE	

Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, Sekretaris Dewan Komisaris telah berperan aktif dalam memastikan tercapainya tujuan-tujuan strategis Dewan Komisaris dengan melaksanakan fungsi pendukung yang esensial. Dalam pelaksanaannya, Sekretaris Dewan Komisaris terlibat dalam dua kategori kegiatan utama, yaitu Kegiatan Rutin dan Kegiatan Non-Rutin. Berikut adalah penjabaran lebih lanjut mengenai masing- masing kegiatan tersebut:

1. Kegiatan Rutin Sekretaris Dewan Komisaris meliputi:
   a. Kegiatan Rapat Dewan Komisaris:
      - Penyiapan Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris;
      - Penyiapan Risalah Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi.
   b. Kegiatan Penyiapan dan Dukungan Kegiatan Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris:
      - Penyiapan Bahan Rapat Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris;
      - Penyiapan Dukungan Kegiatan Perjalanan Dinas Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris;
      - Penyiapan Dukungan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris serta Komite Dewan Komisaris;
      - Penyiapan Konsep Dokumen Persuratan untuk Kebutuhan Dewan Komisaris dan/atau Organ Pendukung Dewan Komisaris;
      - Administrasi Surat Masuk dan Surat Keluar Dewan Komisaris;
      - dan lain-lain.
2. Kegiatan Penyiapan dan Dukungan Kegiatan Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris:
   a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan serta kegiatan lainnya yang diberikan sesuai arahan dan kebutuhan Dewan Komisaris;
   b. Penyusunan Konsep Standard Operating Procedure (SOP) atas kegiatan yang dilakukan di lingkungan Dewan Komisaris dan Organ Pendukungnya.

Duties Implementation Report in 2024

Throughout 2024, the Secretary of the Board of Commissioners has contributed in ensuring the achievement of the Board of Commissioners' strategic objectives by performing essential support functions. In its implementation, the Secretary of the Board of Commissioners was involved in two main categories of activities, including routine activities and non-routine activities. The following is a further description of each of these activities:

1. Routine Activities of the Secretary of the Board of Commissioners include:
   a. Board of Commissioners Meeting Activities:
      - Minutes of Internal Meetings of the Board of Commissioners;
      - Minutes of Meetings of the Board of Commissioners that Include the Board of Directors.
   b. Preparation and Support Activities of the Board of Commissioners and Committees of the Board of Commissioners:
      - Materials Preparation for Board of Commissioners and Board of Commissioners Committee Meetings
      - Provision of Support for Official Travel Activities of the Board of Commissioners and Committees of the Board of Commissioners
      - Providing Support for Education and Training Activities of the Board of Commissioners and Committees of the Board of Commissioners;
      - Preparing drafts of correspondence documents for supporting organs of the Board of Commissioners and/or Board of Commissioners;
      - Administration of Incoming and Outgoing Letters of the Board of Commissioners;
      - and others.
2. Preparation and Support Activities of the Board of Commissioners and Committees of the Board of Commissioners:
   a. Education and Training Activities and other activities provided in compliance with the direction and requirements of the Board of Commissioners;
   b. Drafting Standard Operating Procedure (SOP) for activities carried out within the Board of Commissioners and its Supporting Organs.

Evaluasi dan Penilaian Kinerja Sekretaris Dewan Komisaris oleh Dewan Komisaris

Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kinerja Sekretaris Dewan Komisaris untuk memastikan fungsi kesekretariatan berjalan dengan efektif dan dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan secara optimal.

Penilaian kinerja Sekretaris Dewan Komisaris dilakukan langsung oleh Dewan Komisaris. Proses evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kinerja Sekretaris sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban, antara lain:

1. Menjalankan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan yang berkaitan dengan seluruh kegiatan Dewan Komisaris;
2. Seluruh Rapat Dewan Komisaris, baik rapat Internal Dewan Komisaris maupun Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi, dan rapat Dewan Komisaris khusus dihadiri oleh Sekretaris Dewan Komisaris atau pejabat lain yang ditunjuk sebagai Notulis, kecuali Rapat Khusus yang hanya boleh dihadiri oleh Dewan Komisaris dan/atau Direksi;
3. Bertanggung jawab atas terdistribusinya berbagai informasi yang terkait dengan agenda yang akan dibahas Sekretaris Dewan Komisaris juga bertanggung jawab terhadap pembuatan, pengadministrasian, dan pendistribusian Risalah Rapat Dewan Komisaris;
4. Merencanakan teknis program Pengenalan dan Pelatihan bagi Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat bersama dengan corporate secretary.

Berdasarkan 4 (empat) hal di atas, kinerja Sekretaris Dewan Komisaris telah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta mencapai target yang telah direncanakan pada Rencana Kegiatan tahun 2024. Berikut hasil kinerja yang telah dilakukan Sekretaris Dewan Komisaris di tahun 2024:

1. Melakukan penyelenggaraan Rapat Internal Dewan Komisaris sebanyak 12 (dua belas) kali;
2. Melakukan penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris yang menyertakan Direksi sebanyak 11 (sebelas) kali;
3. Melakukan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan yang berkaitan dengan seluruh kegiatan Dewan Komisaris sepanjang tahun 2024.

Performance Evaluation and Assessment of Secretary of the Board of Commissioners by the Board of Commissioners

The Board of Commissioners periodically evaluates the performance of the Secretary of the Board of Commissioners to ensure that the secretarial function runs effectively and optimally supports the implementation of supervisory duties.

The performance evaluation of the Secretary of the Board of Commissioners is conducted directly by the Board of Commissioners. This evaluation process aims to ensure that the performance of the Secretary is in compliance with the duties and responsibilities assigned, as follows:

1. Carrying out administrative and secretarial functions related to all activities of the Board of Commissioners;
2. Ensuring all meetings of the Board of Commissioners, both internal meetings of the Board of Commissioners and Coordination Meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors, and special meetings of the Board of Commissioners are attended by the Secretary of the Board of Commissioners or other officials appointed as Notary, excluding Special Meetings which may only be attended by the Board of Commissioners and/or the Board of Directors;
3. Being responsible on the distribution of various information related to the agenda to be discussed. The Secretary of the Board of Commissioners is also responsible to prepare, administer, and distribute the Minutes of the Board of Commissioners Meeting;
4. Arranging the technical introduction and training program for newly appointed members of the Board of Commissioners along with the corporate secretary.

Based on the 4 (four) things above, the performance of the Secretary of the Board of Commissioners has been in compliance with its duties and responsibilities, and has achieved the targets planned in the 2024 Activity Plan. The following performance results have been carried out by the Secretary of the Board of Commissioners in 2024:

1. Organizing Internal Meetings of the Board of Commissioners for 12 (twelve) times;
2. Organizing Meetings of the Board of Commissioners that include the Board of Directors for 11 (eleven) times;
3. Performing administrative and secretarial functions related to all activities of the Board of Commissioners throughout 2024.

KOMITE AUDIT

Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite pendukung yang dibentuk untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan serta pembinaan terhadap pengelolaan Perseroan. Komite-komite tersebut bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris, meliputi Komite Audit, Komite Nominasi, Remunerasi, *Good Corporate Governance* (GCG), dan Komite Pemantau Risiko dan

AUDIT COMMITTEE

Board of Commissioners is assisted by supporting committees established to ensure the effectiveness of the implementation of supervisory duties and functions as well as coaching for the management of the Company. These committees are directly responsible to the Board of Commissioners, including the Audit Committee, Nomination, Remuneration, Good Corporate Governance

Tata Kelola Terintegrasi. Apabila diperlukan, Dewan Komisaris dapat membentuk komite-komite tambahan sesuai dengan kebutuhan strategis Perseroan, dengan tetap memperhatikan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki.

Selain dukungan dari komite-komite tersebut, Dewan Komisaris juga didukung oleh Sekretaris Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris memiliki peran strategis dalam menjamin kelancaran komunikasi antara Dewan Komisaris dan manajemen, mendukung pelaksanaan fungsi administratif, serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Pedoman Kerja Komite Audit

Komite Audit Perseroan telah memiliki Pedoman Kerja atau Piagam Komite Audit yang diperbarui dan disahkan terakhir pada 13 November 2023 berdasarkan Keputusan Direksi Nomor SK.02.01/A.KOM.WG.07670/2023. Pedoman ini disusun secara selaras dan sinergis dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, serta Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-3/MBU/03/2023 yang ditetapkan pada 20 Maret 2023 mengenai Organ dan Sumber Daya Manusia di BUMN.

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit Perseroan juga berpedoman pada Board Manual, yang telah diperbarui dan disahkan terakhir pada 11 September 2023. Pedoman ini memberikan landasan operasional yang sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

Jumlah, Komposisi dan Susunan Komite Audit

Pada tahun 2024, Komite Audit Perseroan terdiri dari sejumlah anggota yang dipilih berdasarkan kualifikasi, keahlian, dan pengalaman yang relevan dalam bidang keuangan dan audit. Komposisi dan susunan anggota Komite Audit disusun secara hati-hati untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, serta efektivitas sistem pengendalian internal Perseroan. Hal ini dilakukan sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* yang menjadi landasan operasional Perseroan.

Komite Audit dibentuk dengan memperhatikan keragaman keahlian di berbagai bidang, termasuk akuntansi, audit, dan tata kelola perusahaan, guna memastikan bahwa pengawasan terhadap pelaporan keuangan, audit internal, dan audit eksternal dilakukan secara independen dan objektif. Penunjukan anggota Komite Audit dilakukan melalui proses seleksi yang transparan, dengan mempertimbangkan kompetensi, integritas, serta kontribusi strategis yang dapat diberikan oleh masing-masing anggota.

(GCG) Committee, and Risk Monitoring and Integrated Governance Committee. If necessary, the Board of Commissioners may establish additional committees in accordance with the Company's strategic needs, while remain considering the capacity and capabilities possessed.

In addition to support from these committees, the Board of Commissioners is also supported by the Secretary to the Board of Commissioners. The Secretary to the Board of Commissioners has a strategic role in ensuring smooth communication between the Board of Commissioners and management, supporting the implementation of administrative functions, and ensuring compliance with the principles of good corporate governance.

Board Manual of The Audit Committee

The Company's Audit Committee has a Board Manual or Audit Committee Charter which was updated and last ratified on November 13, 2023 based on the Decree of the Board of Directors Number SK.02.01/A.KOM.WG.07670/2023. This guideline is prepared in harmony and synergy with the Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Implementation of the Audit Committee, as well as the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) Number PER-3/MBU/03/2023 stipulated on March 20, 2023 concerning Organs and Human Capital in BUMN.

In carrying out its duties, the Company's Audit Committee is also guided by the Board Manual, which was updated and last ratified on September 11, 2023. This guideline provides an operational basis in accordance with the principles of good corporate governance.

Number, Composition and Structure of The Audit Committee

In 2024, the Company's Audit Committee consists of a number of members selected based on their qualifications, expertise, and relevant experience in finance and auditing. The composition and composition of the Audit Committee members are carefully arranged to support the implementation of the supervisory function of financial statements, compliance with prevailing regulations, and the effectiveness of the Company's internal control system. This is undertaken in accordance with the principles of Good Corporate Governance which are the basis of the Company's operations.

The Audit Committee was established by considering the diversity of expertise in various fields, including accounting, auditing, and corporate governance, to ensure that supervision of financial reporting, internal audits, and external audits is carried out independently and objectively. The appointment of Audit Committee members is carried out through a transparent selection process, taking into account the competence, integrity, and strategic contributions that can be provided by each member.

Susunan Komite Audit
Audit Committee Composition

1. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Nomor : SK.02.01/A.KOM.WG.01837/2024 tentang Pergantian Organ Komite Audit PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk tanggal 13 Maret 2024.
Based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Number: SK.02.01/A.KOM. WG.01837/2024 concerning the Replacement of the Audit Committee Organs of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk dated March 13, 2024.

Nama Name	Jabatan Position
Joseph Prajogo	Ketua merangkap Anggota Komite Audit Chairman and Member of the Audit Committee
Taufan Gestoro	Anggota Komite Audit Member of the Audit Committee
Darawati	Anggota Komite Audit Member of the Audit Committee

2. Perubahan Nomenklatur
Change of Nomenclature
Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Nomor : SK.02.01/A.KOM.WG.07815/2024 tentang Penetapan Organ Komite Audit PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk tanggal 11 Juni 2024.
Based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Number: SK.02.01/A.KOM. WG.07815/2024 concerning the Appointment of the Audit Committee Organ of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk dated June 11, 2024.

Nama Name	Jabatan Position
Joseph Prajogo	Ketua merangkap Anggota Komite Audit Chairman and Member of the Audit Committee
Taufan Gestoro	Anggota Komite Audit Member of the Audit Committee
Darawati	Anggota Komite Audit Member of the Audit Committee

Nama Name	Jabatan Position	Keterangan Information	Keahlian Expertise	Periode Jabatan Term of Office
Menjabat hingga akhir tahun buku 2024 Served until the end of the 2024 fiscal year				
Joseph Prajogo	Ketua Komite Audit merangkap anggota Chairman of the Audit Committee and concurrently served as member	Komisaris Independen Independent Commissioner	• Akuntansi (*Accounting*) • Keuangan (*Finance*) • Audit • Manajemen Risiko (*Risk Management*) • Manajemen (*Management*)	13 Maret 2024 s/d Des 2024 March 13 to December 2024
Taufan Gestoro	Anggota Komite Audit Member of the Audit Committee	Komisaris Independen Independent Commissioner	• Risk Management • Strategic Intelligence and Security • Risk Assessment and Mitigation • Conflict Resolution	13 Maret 2024 s/d Des 2024 March 13 to December 2024

Nama Name	Jabatan Position	Keterangan Information	Keahlian Expertise	Periode Jabatan Term of Office
Darawati	Anggota Komite Audit Member of the Audit Committee	Pihak Independen Independent Party	• Operasi • Administrasi Bisnis • Audit • Manajemen Risiko • Operations • Business Administration • Audit • Risk Management	13 Maret 2024 s/d Des 2024 March 13 to December 2024

Profil Komite Audit
Profile of Audit Committee



Joseph Prajogo
Ketua merangkap Anggota Komite Audit
Chairman and Member of the Audit Committee

Dasar Hukum Pengangkatan
Legal Basis of Appointment

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Nomor : SK.02.01/A.KOM.WG.07815/2024 tentang Penetapan Organ Komite Audit PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk tanggal 11 Juni 2024.
Based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Number: SK.02.01/A.KOM.WG.07815/2024 concerning the Appointment of the Audit Committee Organ of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk dated June 11, 2024

Dalam pelaksanaan tugas Komite Audit, beliau ditunjuk sebagai Ketua yang merangkap sebagai Anggota Komite Audit. Adapun profil beliau dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Dewan Komisaris di dalam Laporan Tahunan ini.
In performing the duties of the Audit Committee, he is appointed as Chairman as well as Member of the Audit Committee. His profile can be found in the Company Profile Chapter in the section of the Board of Commissioners' Profile within this Annual Report.



Taufan Gestoro
Anggota Komite Audit
Member of the Audit Committee

Dasar Hukum Pengangkatan
Legal Basis of Appointment

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Nomor : SK.02.01/A.KOM.WG.07815/2024 tentang Penetapan Organ Komite Audit PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk tanggal 11 Juni 2024.
Based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Number: SK.02.01/A.KOM.WG.07815/2024 concerning the Appointment of the Audit Committee Organ of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk dated June 11, 2024.

Dalam pelaksanaan tugas Komite Audit, beliau memiliki peran sebagai Anggota Komite Audit. Adapun profil beliau dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Dewan Komisaris di dalam Laporan Tahunan ini.
In performing the duties of the Audit Committee, he has a role as a Member of the Audit Committee. His profile can be found in the Company Profile Chapter in the section of the Board of Commissioners' Profile within this Annual Report.



Darawati

Anggota Komite Audit
Member of the Audit Committee

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Usia Age	59 tahun pada akhir tahun buku 2024 59 years of age at the end of the 2024 financial year
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Teknik Sipil dari Politeknik Universitas Indonesia, Depok (1987) Bachelor's degree in Civil Engineering from the Polytechnic University of Indonesia, Depok (1987)
Pengalaman Kerja Professional Experience	• Manajer Komersial Operasi DBG WIKA (2007) • Kepala Bagian Komersial WEGE (2011) • Manajer Bidang Komersial Risiko Wilayah I WEGE (2014) • Manajer Biro Evaluasi Hasil Usaha (2016) • WIKA DBG Operations Commercial Manager (2007) • Head of WEGE Commercial Division (2011) • WEGE Area I Commercial Risk Manager (2014) • Business Results Evaluation Bureau Manager (2016)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Nomor : SK.02.01/A.KOM.WG.07815/2024 tentang Penetapan Organ Komite Audit PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk tanggal 11 Juni 2024. Based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Number: SK.02.01/A.KOM.WG.07815/2024 concerning the Establishment of the Audit Committee Organ of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk dated June 11, 2024.

Rapat Komite Audit

Pada tahun 2024, Komite Audit Perseroan telah menyelenggarakan rapat sebanyak 32 kali. Setiap rapat membahas berbagai agenda strategis, termasuk evaluasi laporan keuangan, pengawasan atas pelaksanaan audit internal dan eksternal, serta peninjauan atas kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku. Tingkat kehadiran anggota dalam setiap rapat adalah sebagai berikut:

Meeting Of The Audit Committee

In 2024, the Company's Audit Committee held 32 meetings. Each meeting discussed various strategic agendas, including evaluation of financial reports, supervision of internal and external audit implementation, and review of compliance with prevailing regulations and policies. The level of member attendance at each meeting was as follows:

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Presence			
			Joseph Prajogo	Danis H Sumadilaga	Taufan Gestoro	Darawati
1	19 Januari 2024 January 19, 2024	Rapat Internal Dewan Komisaris dan Komite komite : Paparan Komite Audit dan Komite NRG. Internal Meeting of the Board of Commissioners and Committees: Presentation of the Audit Committee and NRG Committee.	√	√	-	√
2	25 Januari 2024 January 25, 2024	Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors	√	√	-	√
3	26 Februari 2024 February 26, 2024	Rapat Pembahasan progress Audit Eksternal KAP RSM atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT WIka Gedung Tbk tahun buku s/d Des 2023 Meeting to discuss the progress of the External Audit of KAP RSM on the Consolidated Financial Statements of PT WIka Gedung Tbk for the fiscal year up to December 2023	√	√	X	√

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Presence			
			Joseph Prajogo	Danis H Sumadilaga	Taufan Gestoro	Darawati
4	27 Februari 2024 February 27, 2024	Rapat Internal Dewan Komisaris dan Komite Komite : Paparan Komite Audit, Komite NRG. Internal Meeting of the Board of Commissioners and Committees: Presentation of the Audit Committee, NRG Committee.	√	√	-	√
5	6 Maret 2024 March 6, 2024	Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors	√	√	X	√
6	25 Maret 2024 March 25, 2024	Rapat Internal Dewan Komisaris dan Komite komite : Paparan Komite Audit, Komite NRG. Internal Meeting of the Board of Commissioners and Committees: Presentation of the Audit Committee, NRG Committee.	√	-	√	√
7	1 April 2024 April 1, 2024	Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors	√	-	√	√
8	3 April 2024 April 3, 2024	Closing Meeting Audit Eksternal KAP RSM atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Wika Gedung Tbk tahun buku s/d Des 2023 Closing Meeting of External Audit of KAP RSM on Consolidated Financial Statements of PT Wika Gedung Tbk for fiscal year up to December 2023	√	-	√	√
9	29 April 2024 April 29, 2024	Rapat Internal Dewan Komisaris dan Komite komite : Paparan Komite Audit, Komite NRG Internal Meeting of the Board of Commissioners and Committees: Presentation of the Audit Committee, NRG Committee	√	-	√	√
10	8 Mei 2024 May 8, 2024	Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors	√	-	√	√
11	15 Mei 2024 May 15, 2024	Pembahasan progress Audit SPI hingga bulan April-Mei 2024 Discussion of SPI Audit progress until April-May 2024	√	-	√	√
12	11 Juni 2024 June 11, 2024	Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors	√	-	√	√
13	25 Juni 2024 June 25, 2024	Pembahasan progress Audit SPI hingga bulan Juni 2024 Discussion of SPI Audit progress until June 2024	√	-	√	√
14	26 Juni 2024 June 26, 2024	Rapat Dewan Komisaris dan Komite komite: Paparan Komite Audit, Komite NRG. Board of Commissioners and Committee Meetings: Presentation of the Audit Committee, NRG Committee.	√	-	√	√
15	10 Juli 2024 July 10, 2024	Rapat Dewan Komisaris dan Direksi (Rakomdir) Board of Commissioners and Board of Directors Meeting	√	-	√	√
16	24 Juli 2024 July 24, 2024	Rapat Dewan Komisaris dan Komite komite : Paparan Komite Audit, Komite NRG. Board of Commissioners and Committee Meetings: Presentation of the Audit Committee, NRG Committee.	√	-	√	√

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Presence			
			Joseph Prajogo	Danis H Sumadilaga	Taufan Gestoro	Darawati
17	31 Juli 2024 July 31, 2024	Pembahasan progress Audit SPI hingga bulan Juli 2024 Discussion of SPI Audit progress until July 2024	√	-	√	√
18	6 Agustus 2024 August 6, 2024	Rapat Dewan Komisaris dan Direksi (Rakomdir). Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors.	√	-	√	√
19	27 Agustus 2024 August 27, 2024	Pembahasan progress Audit SPI hingga bulan Juli 2024 Discussion of SPI Audit progress until July 2024	√	-	√	√
20	28 Agustus 2024 August 28, 2024	Rapat Dewan Komisaris dan Komite komite : Paparan Komite Audit dan , Komite NRG Board of Commissioners and Committee Meetings: Presentation of the Audit Committee and the NRG Committee	√	-	√	√
21	18 September 2024 September18, 2024	Rapat Dewan Komisaris dan Direksi (Rakomdir). Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors	√	-	√	√
22	25 September 2024 September25, 2024	Rapat Dewan Komisaris dan Komite komite : Paparan Komite Audit dan Komite NRG Board of Commissioners and Committee Meetings: Presentation of the Audit Committee and NRG Committee	√	-	√	√
23	30 September 2024 September30, 2024	Pembahasan progress Audit SPI hingga bulan September 2024 Discussion of SPI Audit progress until September 2024	√	-	√	√
24	9 Oktober 2024 October 9, 2024	Rapat Dewan Komisaris dan Direksi (Rakomdir) Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors	√	-	√	√
25	25 Oktober 2024 October 25, 2024	Rapat Dewan Komisaris dan Komite komite : Paparan Komite Audit dan Komite NRG Board of Commissioners and Committee Meetings: Presentation of the Audit Committee and NRG Committee	√	-	√	√
26	6 November 2024 November 6, 2024	Kick Off Meeting Audit External KAP RSM atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Wika Gedung Tbk tahun buku hingga 31 Desember 2024 Kick Off Meeting of External Audit of KAP RSM on Consolidated Financial Statements of PT Wika Gedung Tbk for the fiscal year up to December 31, 2024	√	-	√	√
27	7 November 2024 November 7, 2024	Rapat Dewan Komisaris dan Direksi (Rakomdir). Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors	√	-	√	√
28	20 November 2024 November 20, 2024	Pembahasan progress Audit SPI hingga bulan Oktober-November 2024 Discussion of SPI Audit progress until October-November 2024	√	-	√	√

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Presence			
			Joseph Prajogo	Danis H Sumadilaga	Taufan Gestoro	Darawati
29	21 November 2024 November 21, 2024	Rapat Dewan Komisaris dan Komite : Paparan Komite Audit, Komite NRG Board of Commissioners and Committee Meetings: Presentation of Audit Committee, NRG Committee	√	-	√	√
30	29 November 2024 November 29, 2024	Rapat Dewan Komisaris dan Direksi (Rakomdir) dan RKAP 2025 Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors and 2025 RKAP	√	-	√	√
31	23 Desember 2024 December 23, 2024	Rapat Dewan Komisaris dan Komite : Paparan Komite Audit, Komite NRG Board of Commissioners and Committee Meetings: Presentation of Audit Committee, NRG Committee	√	-	√	√
32	30 Desember 2024 December 30, 2024	Rapat Dewan Komisaris dan Direksi (Rakomdir) Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors	√	-	√	√

Rekapitulasi Kehadiran Rapat Komite Audit

Rekapitulasi kehadiran anggota Komite Audit dalam setiap rapat yang diselenggarakan sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Recapitulation of the Audit Committee's Meeting Attendance

The recapitulation of the attendance of Audit Committee's members at each meeting held throughout 2024 is as follows:

Nama Name	Posisi Position	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	% Kehadiran %Presence
Menjabat hingga akhir tahun buku 2024 Served until the end of the 2024 fiscal year				
Joseph Prajogo	Ketua merangkap anggota Komite Audit Chairman and member of the Audit Committee	32	32	100 %
Danis H Sumadilaga	Anggota Komite Audit Member of the Audit Committee	5	5	100 %
Taufan Gestoro	Anggota Komite Audit Member of the Audit Committee	27	27	100 %
Darawati	Anggota Komite Audit Member of the Audit Committee	32	32	100 %

Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Perseroan menyediakan program peningkatan kompetensi untuk anggota Komite Audit, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan komite dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Perseroan oleh Direksi. Program ini bertujuan agar Komite Audit dapat lebih efektif dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya, seiring dengan perubahan regulasi dan penerapan praktik terbaik di industri.

Pada tahun 2024, program peningkatan kompetensi yang diikuti oleh Komite Audit adalah sebagai berikut:

Competency Development of The Audit Committee

The Company provides a competency improvement program for members of the Audit Committee, which aims to improve the committee's ability to carry out its supervisory function over the management of the Company by the Board of Directors. This program aims to make the Audit Committee more effective in carrying out its roles and responsibilities, in line with changes in regulations and the implementation of best practices in the industry.

In 2024, the competency improvement program followed by the Audit Committee is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Program Pendidikan/ Pelatihan Education/Training Program	Waktu Time	Penyelenggara Organizer
Joseph Prajogo	Ketua merangkap anggota Komite Audit Chairman and member of the Audit Committee	Pelatihan dan Sertifikasi Qualified Risk Governance Professional Qualified Risk Governance Professional Training and Certification	10-12 September 2024 September 10-12, 2024	PPM Manajemen
Taufan Gestoro	Anggota Komite Audit Member of the Audit Committee	Pelatihan dan Sertifikasi Qualified Risk Governance Professional (QRGP) Qualified Risk Governance Professional (QRGP) Training and Certification	10 - 12 September 2024 September 10 - 12, 2024	PPM Manajemen
Darawati	Anggota Komite Audit Member of the Audit Committee	Sosialisasi Petunjuk Teknis ICOFR BUMN Socialization of BUMN ICOFR Technical Instructions	18 November 2024 November 18, 2024	Kementerian BUMN Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko. Ministry of State-Owned Enterprises Deputy for Finance and Risk Management.

Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Komite Audit Tahun 2024

Komite Audit telah melaksanakan berbagai tugas dan kegiatan sepanjang tahun 2024, yang bertujuan untuk memastikan pengawasan yang efektif atas pengelolaan keuangan dan operasional Perseroan. Adapun tugas dan kegiatan yang dilakukan oleh Komite Audit pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Implementation of The Audit Committee's Duties and Activities In 2024

The Audit Committee has carried out various duties and activities throughout 2024, which aim to ensure effective supervision of the Company's financial and operational management. The duties and activities carried out by the Audit Committee in 2024 are as follows:

No	Butir-Butir dalam Piagam Komite Audit Items in the Audit Committee Charter	Realisasi Kegiatan Realization of Activities
1	Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lain terkait dengan informasi keuangan Perusahaan. Conducting a review of the financial information that the Company will release to the public and/or authorities, including financial reports, projections and other reports related to the Company's financial information.	1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan / atau pihak otoritas jasa keuangan atas : a. Draft Laporan Keuangan Konsolidasian PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk 31 Desember 2023 pada tanggal 23 Januari 2024. b. Draft Laporan Keuangan Konsolidasi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk 31 Maret 2024 pada tanggal 24 April 2024 c. Draft Laporan Keuangan Konsolidasi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk 30 Juni 2024 pada tanggal 22 Juli 2024 d. Draft Laporan Keuangan Konsolidasi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk 30 September 2024 pada tanggal 23 Oktober 2024. 1. Conducting a review of the financial information that will be issued by the Company to the public and/or financial services authorities on: a. Draft of the Consolidated Financial Statements of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk December 31, 2023 on January 23, 2024. b. Draft of the Consolidated Financial Statements of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk March 31, 2024 on April 24, 2024 c. Draft of the Consolidated Financial Statements of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk June 30, 2024 on July 22, 2024 d. Draft Consolidated Financial Statements of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk September 30, 2024 on October 23, 2024.

No	Butir-Butir dalam Piagam Komite Audit Items in the Audit Committee Charter	Realisasi Kegiatan Realization of Activities
2	Melakukan penelaahan atas ketaatan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk terhadap peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan kegiatan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. Conducting a review of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk's compliance with laws and regulations relating to the activities of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.	Dari hasil telaahan dapat disimpulkan bahwa PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk telah taat terhadap peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan kegiatan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. Conducting a review of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk's compliance with laws and regulations relating to the activities of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
3	Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk dan Auditor Eksternal/ Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya. Providing independent opinions in the event of differences of opinion between the management of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk and the External Auditor/Public Accountant regarding the services provided.	1. KAP telah menugaskan tim yang memiliki keahlian dan pengalaman baik selama pelaksanaan proses audit, baik dari awal sampai dengan akhir penugasan, tidak ada benturan kepentingan antara AP dan/ atau KAP dengan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. Dalam melaksanakan penugasannya, AP dan/atau KAP telah menerapkan keahlian profesionalnya secara cermat dan seksama. 2. Waktu pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP cukup memadai, dimana proses audit telah dimulai sejak 01 November 2023 dalam batas waktu yang ditentukan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk yaitu pada tanggal 28 Maret 2024 serta telah memenuhi ketentuan/peraturan publikasi laporan keuangan dan penyampaian laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, 3. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP telah menyampaikan kepada PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk beberapa masukan dan rekomendasi KAP terkait dengan berbagai kelemahan dalam area pengendalian intern dan area signifikan lainnya dalam bentuk *management letter*. 1. The KAP has assigned a team that has good expertise and experience during the implementation of the audit process, both from the beginning to the end of the assignment, there is no conflict of interest between the AP and/or KAP and PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. In carrying out its assignment, the AP and/or KAP have applied its professional expertise carefully and thoroughly. 2. The audit implementation time by the AP and/or KAP is sufficient, where the audit process has started since November 1, 2023 within the time limit determined by PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, namely on March 28, 2024 and has complied with the provisions/regulations for the publication of financial reports and submission of financial reports to the Financial Services Authority and the Indonesia Stock Exchange, 3. Recommendations for improvement provided by the AP and/or KAP have submitted to PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk several inputs and recommendations from the KAP related to various weaknesses in the internal control area and other significant areas in the form of a management letter.
4	Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Auditor Eksternal/Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of External Auditors/Public Accountants based on independence, scope of assignment, and fees.	Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk yang berakhir 31 Desember 2024 sesuai surat Nomor : MJ.05.00/A.KOM.WG.06752/2024 tertanggal 02 Mei 2024. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto Mawar and Rekan (RSM Indonesia) to conduct an audit of the Consolidated Financial Statements of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk ending December 31, 2024 in accordance with letter Number: MJ.05.00/A.KOM.WG.06752/2024 dated May 2, 2024.

No	Butir-Butir dalam Piagam Komite Audit Items in the Audit Committee Charter	Realisasi Kegiatan Realization of Activities
5	Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan audit SPI. Conducting a review of the implementation of audits by the Internal Audit Unit (SPI) and supervising the implementation of follow-up actions by the Board of Directors on SPI audit findings.	Memberikan rekomendasi kepada Internal Audit atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan saat rapat koordinasi antara Internal Audit dan Komite Audit. Selama tahun 2024, Komite Audit telah melaksanakan 6 (enam) kali rapat koordinasi, yaitu pada: • 15 Mei 2024 • 25 juni 2024 • 31 Juli 2024 • 27 Agustus 2024 • 30 September 2024 • 30 november 2024 Providing recommendations to Internal Audit on the Audit Result Report conducted during the coordination meeting between Internal Audit and the Audit Committee. During 2024, the Audit Committee has held 6 (six) coordination meetings, namely on: • May 15, 2024 • June 25, 2024 • July 31, 2024 • August 27, 2024 • September 30, 2024 • November 30, 2024
6	Melakukan penelaahan dan Analisis serta memberikan rekomendasi kepada Perusahaan melalui Dewan Komisaris atas *Executive Summary* bulanan . Conducting reviews and analyses and providing recommendations to the Company through the Board of Commissioners on the monthly Executive Summary.	Melakukan penelaahan dan memberikan saran dan rekomendasi kepada Perusahaan melalui Komisaris Utama atas *Executive Summary* bulanan sebanyak 12 (dua belas) surat rekomendasi dan tanggapan sebagai berikut : 1. Laporan *Executive Summary* bulan Desember 2023 melalui nomor surat MJ.05.00/A.KOM.WG.00412/2024 tertanggal 18 Januari 2024. 2. Laporan *Executive Summary* bulan Januari 2024 melalui nomor surat MJ.05.00/A.KOM.WG.01325/2024 tertanggal 23 Februari 2024. 3. Laporan *Executive Summary* bulan Februari 2024 melalui nomor surat MJ.05.00/A.KOM.WG.02186/2024 tertanggal 22 Maret 2024. 4. Laporan *Executive Summary* bulan Maret 2024 melalui nomor surat MJ.05.00/A.KOM.WG.06585/2024 tertanggal 26 April 2024. 5. Laporan *Executive Summary* bulan April 2024 melalui nomor surat MJ.05.00/A.KOM.WG.07292/2024 tertanggal 22 Mei 2024. 6. Laporan *Executive Summary* bulan Mei 2024 melalui nomor surat MJ.05.00/A.KOM.WG.08367/2024 tertanggal 21 Juni 2024. 7. Laporan *Executive Summary* bulan Juni 2024 melalui nomor surat MJ.05.00/A.KOM.WG.09604/2024 tertanggal 22 Juli 2024. 8. Laporan *Executive Summary* bulan Juli 2024 melalui nomor surat MJ.05.00/A.KOM.WG.10726/2024 tertanggal 26 Agustus 2024. 9. Laporan *Executive Summary* bulan Agustus 2024 melalui nomor surat MJ.05.00/A.KOM.WG.11568/2024 tertanggal 23 September 2024. 10. Laporan *Executive Summary* bulan September 2024 melalui nomor surat MJ.05.00/A.KOM.WG.12626/2024 tertanggal 23 Oktober 2024. 11. Laporan *Executive Summary* bulan Oktober 2024 melalui nomor surat DK.01.00/A.KOM.00001/WEGE/182024 tertanggal 18 November 2024. 12. Laporan *Executive Summary* bulan November 2024 melalui nomor surat DK.01.00/A.KOM.00005/WEGE/2024 tertanggal 23 Desember 2024.

No	Butir-Butir dalam Piagam Komite Audit Items in the Audit Committee Charter	Realisasi Kegiatan Realization of Activities
		Conducting a review and providing suggestions and recommendations to the Company through the Main Commissioner regarding the monthly Executive Summary of 12 (twelve) recommendation letters and responses as follows: 1. Executive Summary Report for December 2023 through letter number MJ.05.00/A.KOM.WG.00412/2024 dated January 18, 2024. 2. Executive Summary Report for January 2024 through letter number MJ.05.00/A.KOM.WG.01325/2024 dated February 23, 2024. 3. Executive Summary Report for February 2024 through letter number MJ.05.00/A.KOM.WG.02186/2024 dated March 22, 2024. 4. Executive Summary Report for March 2024 through letter number MJ.05.00/A.KOM.WG.06585/2024 dated April 26, 2024. 5. Executive Summary Report for April 2024 through letter number MJ.05.00/A.KOM.WG.07292/2024 dated May 22, 2024. 6. Executive Summary Report for May 2024 through letter number MJ.05.00/A.KOM.WG.08367/2024 dated June 21, 2024. 7. Executive Summary Report for June 2024 through letter number MJ.05.00/A.KOM.WG.09604/2024 dated July 22, 2024. 8. Executive Summary Report for July 2024 through letter number MJ.05.00/A.KOM.WG.10726/2024 dated August 26, 2024. 9. Executive Summary Report for August 2024 through letter number MJ.05.00/A.KOM.WG.11568/2024 dated September 23, 2024. 10. Executive Summary Report for September 2024 through letter number MJ.05.00/A.KOM.WG.12626/2024 dated October 23, 2024. 11. Executive Summary Report for October 2024 through letter number DK.01.00/A.KOM.00001/WEGE/182024 dated November 18, 2024. 12. Executive Summary Report for November 2024 through letter number DK.01.00/A.KOM.00005/WEGE/2024 dated December 23, 2024.

Rencana Program Kerja Komite Audit Tahun 2025

Pada tahun 2025, kegiatan Komite Audit akan dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu Kegiatan Rutin dan Kegiatan Non-Rutin.

Kegiatan Rutin Komite Audit yang direncanakan meliputi:

1. Penelaahan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI), yang akan ditindaklanjuti dengan Rapat Koordinasi antara Komite Audit dan SPI.
2. Pengawasan atas capaian kinerja auditor eksternal (KAP), yang akan diikuti dengan Rapat Koordinasi antara Komite Audit, Manajemen WIKA, SPI, dan KAP.
3. Penelaahan terhadap hasil capaian kinerja Perseroan, yang akan ditindaklanjuti dengan Rapat Internal Komite Audit, serta kontribusi Komite Audit dalam Rapat Internal Dewan Komisaris atau Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.
4. Penelaahan terhadap pelaksanaan dan efektivitas Sistem Pengendalian Internal yang diterapkan oleh Perseroan.
5. Penelaahan terhadap sistem manajemen risiko yang ada, serta evaluasi atas pelaksanaannya.
6. Penelaahan terhadap Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) untuk tahun 2026, serta kesesuaiannya dengan Rencana Jangka Panjang Perseroan 2024-2028.

2025 Work Program Plan Of The Audit Committee

In 2025, the Audit Committee's activities will be divided into two main categories, namely Routine Activities and Non-Routine Activities.

The planned Routine Activities of the Audit Committee include:

1. Review of the Audit Result Report conducted by the Internal Audit Unit (SPI), which will be followed up with a Coordination Meeting between the Audit Committee and SPI.
2. Supervision of the performance achievements of external auditors (KAP), which will be followed by a Coordination Meeting between the Audit Committee, WIKA Management, SPI, and KAP.
3. Review of the Company's performance achievements, which will be followed up with an Internal Audit Committee Meeting, as well as the Audit Committee's contribution to the Internal Meeting of the Board of Commissioners or Joint Meeting of the Board of Commissioners and Directors.
4. Review of the implementation and effectiveness of the Internal Control System implemented by the Company.
5. Review of the existing risk management system, as well as evaluation of its implementation.
6. Review of the Draft Company Work Plan and Budget (RKAP) for 2026, and its conformity with the Company's Long-Term Plan 2024-2028.

Kegiatan Non-Rutin Komite Audit antara lain meliputi:

1. Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Komite Audit dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan evaluasi yang mendalam terhadap aspek-aspek tertentu dari pengelolaan Perseroan.
2. Program pendidikan dan pelatihan yang disusun khusus untuk anggota Komite Audit, guna memperkuat kompetensi dan kapasitas dalam menjalankan fungsi pengawasan serta memastikan penerapan praktik tata kelola yang baik di Perseroan.

Non-Routine Activities of the Audit Committee comprise:

1. Business trips carried out by the Audit Committee in order to carry out in-depth supervision and evaluation duties on certain aspects of the Company's management.
2. Education and training programs specifically designed for members of the Audit Committee, in order to strengthen their competence and capacity in carrying out their supervision functions and ensure the implementation of good governance practices in the Company.

No	Nama Kegiatan Activity Name	Rencana Plan
1	Kunjungan ke Proyek-proyek Projects Visits	
	a Proyek yang di audit SPI Projects audited by SPI	TBA
	b Proyek yang di audit KAP Projects audited by KAP	TBA
2	Analisis Laporan Kinerja Bulanan (*Executive Summary*) Monthly Performance Report Analysis	12 kali 12 times
3	Review Laporan Keuangan Triwulanan Quarterly Financial Report Review	4 kali 4 times
4	Penyusunan Rencana Kerja Komite Audit tahun 2025 Preparation of the Audit Committee Work Plan for 2025	1 kali 1 time
5	Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan audit SPI, serta memberikan masukan atas Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) untuk tahun 2026. Conducting a review of the implementation of the audit by the Internal Audit Unit (SPI) and supervising the implementation of follow-up actions by the Board of Directors on the SPI audit findings, as well as providing input on the Annual Audit Work Program (PKPT) for 2026.	7 kali 7 times
6	Melakukan penelaahan dengan manajemen dan Auditor Eksternal/Akuntan Publik terkait dengan semua hal yang diharuskan untuk dikomunikasikan oleh Auditor Eksternal/Akuntan Publik kepada Komite Audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik. Conducting reviews with management and the External Auditor/Public Accountant regarding all matters required to be communicated by the External Auditor/Public Accountant to the Audit Committee in accordance with the Public Accountant Professional Standards.	3 kali 3 times

KOMITE NOMINASI, REMUNERASI DAN GCG

Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite pendukung yang dibentuk untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan serta pembinaan terhadap pengelolaan Perseroan. Komite-komite tersebut bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris, meliputi Komite Audit, Komite Nominasi, Remunerasi, *Good Corporate Governance* (GCG), dan Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi. Apabila diperlukan, Dewan Komisaris dapat membentuk komite-komite tambahan sesuai dengan kebutuhan strategis Perseroan, dengan tetap memperhatikan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki.

NOMINATION, REMUNERATION, GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) COMMITTEE

The Board of Commissioners is assisted by supporting committees established to ensure the effectiveness of the implementation of supervisory duties and functions as well as coaching for the management of the Company. These committees are directly responsible to the Board of Commissioners, including the Audit Committee, Nomination, Remuneration, Good Corporate Governance (GCG) Committee, and Risk Monitoring and Integrated Governance Committee. If necessary, the Board of Commissioners may establish additional committees in accordance with the Company's strategic needs, while remain considering the capacity and capabilities possessed.

Selain dukungan dari komite-komite tersebut, Dewan Komisaris juga didukung oleh Sekretaris Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris memiliki peran strategis dalam menjamin kelancaran komunikasi antara Dewan Komisaris dan manajemen, mendukung pelaksanaan fungsi administratif, serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Pedoman Kerja Komite Nominasi, Remunerasi, *Good Corporate Governance (GCG)*

Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* (GCG) PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. telah menetapkan pedoman kerja yang disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: SK.02.01/A.KOM.WG.08250/2023 tentang Piagam Komite Nominasi, Remunerasi, dan GCG.

Sebagai bagian dari upaya untuk memastikan tata kelola perusahaan yang baik, Komite Nominasi, Remunerasi, dan GCG juga mengacu pada Board Manual PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. yang diterbitkan pada tanggal 11 September 2023, serta mengikuti ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: 34/POJK.04/2014 mengenai Komite Nominasi dan Remunerasi untuk Emiten atau Perusahaan Publik.

Jumlah, Komposisi Dan Susunan Komite Nominasi, Remunerasi, *Good Corporate Governance* (GCG)

Pada tahun 2024, Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* (GCG) Perseroan terdiri dari sejumlah anggota yang dipilih berdasarkan kualifikasi, keahlian, dan pengalaman yang relevan dalam bidang tata kelola perusahaan, manajemen sumber daya manusia, serta kebijakan remunerasi. Komposisi dan susunan anggota Komite Nominasi, Remunerasi, dan GCG disusun secara hati-hati untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan nominasi, kebijakan remunerasi, dan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Perseroan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Komite Nominasi, Remunerasi, dan GCG dibentuk dengan memperhatikan keberagaman keahlian di berbagai bidang, termasuk manajemen sumber daya manusia, tata kelola perusahaan, dan remunerasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengawasan terhadap kebijakan nominasi, kebijakan remunerasi, serta implementasi prinsip GCG dilakukan secara independen, objektif, dan transparan. Penunjukan anggota Komite Nominasi, Remunerasi, dan GCG dilakukan melalui proses seleksi yang transparan dan mempertimbangkan kompetensi, integritas, serta kontribusi strategis yang dapat diberikan oleh masing-masing anggota dalam mendukung penguatan tata kelola perusahaan yang baik dan pengembangan sumber daya manusia Perseroan.

In addition to support from these committees, the Board of Commissioners is also supported by the Secretary to the Board of Commissioners. The Secretary to the Board of Commissioners has a strategic role in ensuring smooth communication between the Board of Commissioners and management, supporting the implementation of administrative functions, and ensuring compliance with the principles of good corporate governance.

Board Manual of The Nomination, Remuneration, Good Corporate Governance (GCG) Committee

The Nomination, Remuneration, and Good Corporate Governance (GCG) Committee of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. has established board manual that have been ratified through the Decree of the Board of Commissioners Number: SK.02.01/A.KOM.WG.08250/2023 concerning the Nomination, Remuneration, and GCG Committee Charter.

As part of undertaking to ensure good corporate governance, the Nomination, Remuneration, and GCG Committee also refers to the Board Manual of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. issued on September 11, 2023, and follows the provisions contained in the Financial Services Authority (OJK) Regulation Number: 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee for Issuers or Public Companies.

Number, Composition and Structure of The Nomination, Remuneration, Good Corporate Governance (GCG) Committee

In 2024, the Company's Nomination, Remuneration, and Good Corporate Governance (GCG) Committee consists of a number of members selected based on relevant qualifications, expertise, and experience in the fields of corporate governance, human resource management, and remuneration policy. The composition and structure of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee members are carefully arranged to support the implementation of the supervisory function of the nomination policy, remuneration policy, and the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles within the Company, in accordance with prevailing regulations.

The Nomination, Remuneration, and GCG Committee was established by considering the diversity of expertise in various fields, including human resource management, corporate governance, and remuneration. This aims to ensure that supervision of the nomination policy, remuneration policy, and implementation of GCG principles is carried out independently, objectively, and transparently. The appointment of members of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee is carried out through a transparent selection process and takes into account the competence, integrity, and strategic contributions that can be provided by each member in supporting the strengthening of good corporate governance and the development of the Company's human capital.

Susunan Komite Nominasi, Remunerasi, Good Corporate Governance (GCG)
Composition of the Nomination, Remuneration, Good Corporate Governance (GCG) Committee

1. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Nomor: SK.02.01/A.KOM.WG.00205/2024 tentang Pergantian Organ Komite Nominasi, Remunerasi, *Good Corporate Governance* (GCG) PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk tanggal 15 Januari 2024.
   Based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Number: SK.02.01/A.KOM. WG.00205/2024 concerning the Replacement of the Nomination, Remuneration, Good Corporate Governance (GCG) Committee Organs of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk dated January 15, 2024.

Nama Name	Jabatan Position
Joseph Prajogo	Ketua Komite Nominasi, Remunerasi, *Good Corporate Governance* (GCG) Chairman of the Nomination, Remuneration, Good Corporate Governance (GCG) Committee
Suli Fatimah	Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, *Good Corporate Governance* (GCG) Member of the Nomination, Remuneration, Good Corporate Governance (GCG) Committee
Diah Sulistiorini	Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, *Good Corporate Governance* (GCG) Member of the Nomination, Remuneration, Good Corporate Governance (GCG) Committee
Mohamad Fadila	Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, *Good Corporate Governance* (GCG) Member of the Nomination, Remuneration, Good Corporate Governance (GCG) Committee

2. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Nomor : SK.02.01/A.KOM.WG.01773/2024 tentang Pergantian Organ Komite Nominasi, Remunerasi, *Good Corporate Governance* (GCG) PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk tanggal 13 Maret 2024.
   Based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Number: SK.02.01/A.KOM. WG.01773/2024 concerning the Replacement of the Nomination, Remuneration, Good Corporate Governance (GCG) Committee Organs of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk dated March 13, 2024.

Nama Name	Jabatan Position
Taufan Gestoro	Ketua merangkap Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, *Good Corporate Governance* (GCG) Chairman and Member of the Nomination, Remuneration, Good Corporate Governance (GCG) Committee
Suli Fatimah	Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, *Good Corporate Governance* (GCG) Member of the Nomination, Remuneration, Good Corporate Governance (GCG) Committee
Danis H. Sumadilaga	Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, *Good Corporate Governance* (GCG) Member of the Nomination, Remuneration, Good Corporate Governance (GCG) Committee
Diah Sulistiorini	Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, *Good Corporate Governance* (GCG) Member of the Nomination, Remuneration, Good Corporate Governance (GCG) Committee
Mohamad Fadila	Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, *Good Corporate Governance* (GCG) Member of the Nomination, Remuneration, Good Corporate Governance (GCG) Committee

3. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Nomor: SK.02.01/A.KOM.WG.07817/2024 tentang Penetapan Organ Komite Nominasi, Remunerasi, *Good Corporate Governance* (GCG) PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk tanggal 11 Juni 2024.
   Based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Number: SK.02.01/A.KOM. WG.07817/2024 concerning the Establishment of the Nomination, Remuneration, Good Corporate Governance (GCG) Committee Organ of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk dated June 11, 2024.

Nama Name	Jabatan Position
Taufan Gestoro	Ketua merangkap Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, *Good Corporate Governance* (GCG) Chairman and Member of the Nomination, Remuneration, Good Corporate Governance (GCG) Committee
Suli Fatimah	Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, *Good Corporate Governance* (GCG) Member of the Nomination, Remuneration, Good Corporate Governance (GCG) Committee
Diah Sulistiorini	Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, *Good Corporate Governance* (GCG) Member of the Nomination, Remuneration, Good Corporate Governance (GCG) Committee
Mohamad Fadila	Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, *Good Corporate Governance* (GCG) Member of the Nomination, Remuneration, Good Corporate Governance (GCG) Committee

Nama Name	Jabatan Position	Keterangan Information	Keahlian Skill	Periode Jabatan Term of Office
Menjabat hingga akhir tahun buku 2024 Serving until the end of the 2024 fiscal year				
Joseph Prajogo	Ketua Chairman	Komisaris Independen Independent Commissioner	• Akuntansi • Keuangan • Audit • Manajemen Risiko • Manajemen • Accounting • Finance • Audit • Risk Management • Management	1 Januari s.d 12 Maret 2024 January 1 to March 12, 2024
Taufan Gestoro	Ketua Chairman	Komisaris Independen Independent Commissioner	• Risk Management • Strategic Intelligence and Security • Risk Assessment and Mitigation • Conflict Resolution	13 Maret s.d 31 Desember 2024 March 13 to December 31, 2024
Danis H. Sumadilaga	Anggota Member	Komisaris Commissioner	• Manajemen • Komunikasi Publik • Teknik Sipil • SDM • Management • Public Communication • Civil Engineering • HR	13 Maret s.d 10 Juni 2024 March 13 to June 10, 2024
Suli Fatimah	Anggota Member	Komisaris Commissioner	• Psikologi • SDM • Psychology • HR	1 Januari s.d 31 Desember 2024 January 1 to December 31, 2024
Diah Sulistiorini	Anggota Member	Pihak Independen Independent Party	• Akuntansi • Manajemen Risiko • Audit • Accounting • Risk Management • Audit	1 Januari s.d 31 Desember 2024 January 1 to December 31, 2024
Mohamad Fadila	Anggota Member	Internal Perusahaan Internal Company	• SDM • Pengembangan Organisasi • HR • Organizational Development	1 Januari s.d 31 Desember 2024 January 1 to December 31, 2024

Profil Komite Nominasi, Remunerasi, Good Corporate Governance (GCG)
Profile of The Nomination, Remuneration, Good Corporate Governance (GCG) Committee



Taufan Gestoro
Ketua merangkap Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, Good Corporate Governance (GCG)
Chairman and Member of the Nomination, Remuneration, Good Corporate Governance (GCG) Committee

Dasar Hukum Pengangkatan
Legal Basis of Appointment

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Nomor: SK.02.01/A.KOM.WG.07817/2024 tentang Penetapan Organ Komite Nominasi, Remunerasi, Good Corporate Governance (GCG) PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk tanggal 11 Juni 2024.
Based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Number: SK.02.01/A.KOM.WG.07817/2024 concerning the Establishment of the Nomination, Remuneration, Good Corporate Governance (GCG) Committee Organ of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk dated June 11, 2024

Dalam pelaksanaan tugas Komite Nominasi, Remunerasi, Good Corporate Governance, beliau di tunjuk sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, Good Corporate Governance (GCG). Adapun profil beliau dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Dewan Komisaris di dalam Laporan Tahunan ini.
In performing the duties of the Nomination, Remuneration, Good Corporate Governance Committee, he is appointed as Chairman and Member of the Nomination, Remuneration, Good Corporate Governance (GCG) Committee. His profile can be found in the Company Profile Chapter in the section of the Board of Commissioners' Profile within this Annual Report.



Suli Fatimah
Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, Good Corporate Governance (GCG)
Member of the Nomination, Remuneration, Good Corporate Governance (GCG) Committee

Dasar Hukum Pengangkatan
Legal Basis of Appointment

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Nomor: SK.02.01/A.KOM.WG.07817/2024 tentang Penetapan Organ Komite Nominasi, Remunerasi, Good Corporate Governance (GCG) PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk tanggal 11 Juni 2024.
Based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Number: SK.02.01/A.KOM.WG.07817/2024 concerning the Establishment of the Nomination, Remuneration, Good Corporate Governance (GCG) Committee Organ of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk dated June 11, 2024

Dalam pelaksanaan tugas Komite Nominasi, Remunerasi, Good Corporate Governance, beliau ditunjuk sebagai Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, Good Corporate Governance (GCG). Adapun profil beliau dapat dilihat pada Bab Profil di dalam Laporan Tahunan ini.
In performing the duties of the Nomination, Remuneration, Good Corporate Governance Committee, he is appointed as Member of the Nomination, Remuneration, Good Corporate Governance (GCG) Committee. His profile can be found in the Profile Chapter within this Annual Report.



Diah Sulistiorini

Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, Good Corporate Governance (GCG)
Member of the Nomination, Remuneration, Good Corporate Governance (GCG) Committee

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Usia Age	65 tahun pada akhir tahun buku 2024 65 years of age at the end of the 2024 financial year
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Indonesia (1987) Bachelor of Economics, majoring in Accounting, University of Indonesia (1987)
Pengalaman Kerja Professional Experience	• Fungsional Auditor dan Konsultan GCG, KPI, Manajemen Risiko di BPKP (1993-2017) • Komite Audit PT Jakarta Propertindo (2007) • Pengajar Akuntansi di Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi (2000-2006) • Pengajar Auditing di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2003-2004) • Pengajar Diklat BNI dan Perum Pegadaian mata ajaran Pengantar Akuntansi, Anggaran, Perpajakan di Lembaga Management Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2000-2004) • Functional Auditor and Consultant of GCG, KPI, and Risk Management at BPKP (1993-2017) • Audit Committee at PT Jakarta Propertindo (2007) • Accounting Lecturer at the College of Risk Management and Insurance (2000-2006) • Auditing Lecturer at the Faculty of Economics at the University of Indonesia (2003-2004) • BNI and Perum Pegadaian Training Lecturer in Introduction to Accounting, Budgeting, and Taxation at the Management Institute, Faculty of Economics, University of Indonesia (2000- 2004)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Nomor: SK.02.01/A.KOM.WG.07817/2024 tentang Penetapan Organ Komite Nominasi, Remunerasi, Good Corporate Governance (GCG) PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk tanggal 11 Juni 2024. Based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Number: SK.02.01/A.KOM.WG.07817/2024 concerning the Establishment of the Nomination, Remuneration, Good Corporate Governance (GCG) Committee Organ of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk dated June 11, 2024.



Mohamad Fadila

Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, Good Corporate Governance (GCG)
Member of the Nomination, Remuneration, Good Corporate Governance (GCG) Committee

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Nomor: SK.02.01/A.KOM.WG.07817/2024 tentang Penetapan Organ Komite Nominasi, Remunerasi, Good Corporate Governance (GCG) PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk tanggal 11 Juni 2024. Based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Number: SK.02.01/A.KOM.WG.07817/2024 concerning the Establishment of the Nomination, Remuneration, Good Corporate Governance (GCG) Committee Organ of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk dated June 11, 2024

Dalam pelaksanaan tugas Komite Nominasi, Remunerasi, Good Corporate Governance, beliau ditunjuk sebagai Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, Good Corporate Governance (GCG). Adapun profil beliau dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Pejabat Eksekutif di dalam Laporan Tahunan ini.
In performing the duties of the Nomination, Remuneration, Good Corporate Governance Committee, he is appointed as Member of the Nomination, Remuneration, Good Corporate Governance (GCG) Committee. His profile can be found in the Company Profile Chapter in the section of the Executive Officers' Profile within this Annual Report.

Rapat Komite Nominasi, Remunerasi, Good Corporate Governance (GCG)

Pada tahun 2024, Komite Nominasi, Remunerasi, dan Good Corporate Governance (GCG) Perseroan menyelenggarakan rapat sebanyak 13 kali. Dalam rapat tersebut, Komite membahas berbagai agenda strategis, seperti evaluasi kebijakan nominasi dan remunerasi, pengawasan terhadap implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), serta peninjauan atas kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku.

Pelaksanaan rapat dilakukan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mendukung penguatan tata kelola perusahaan yang baik serta selaras dengan strategi dan visi jangka panjang Perseroan.

Adapun tingkat kehadiran anggota dalam setiap rapat adalah sebagai berikut:

Meeting Of The Nomination, Remuneration, Good Corporate Governance (GCG) Committee

In 2024, the Company's Nomination, Remuneration, and Good Corporate Governance (GCG) Committee held 13 meetings. In these meetings, the Committee discussed various strategic agendas, such as evaluating nomination and remuneration policies, supervising the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles, and reviewing compliance with prevailing regulations and policies.

The meetings were held by prioritizing the principles of transparency and accountability to ensure that every decision taken supports the strengthening of good corporate governance and is in conformity with the Company's long-term strategy and vision.

The level of member attendance at each meeting is as follows:

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Attendance					
			Taufan Gestoro	Joseph Prajogo	Danis H. Sumadilaga	Suli Fatimah	Diah Sulistiorini	Mohamad Fadila
1	19 Januari 2024 January 19, 2024	1. Tindak lanjut hasil Rapat Internal Dewan Komisaris sebelumnya; 2. Pembahasan kinerja Hasil Usaha Perseroan s.d Desember 2023; 3. Pembahasan GCG; 4. Pembahasan rencana pengesahan RJPP dan RKAP 2024; 5. Lain-lain. 1. Follow-up to the results of the previous Internal Meeting of the Board of Commissioners; 2. Discussion of the Company's Business Results performance until December 2023; 3. Discussion of GCG; 4. Discussion of the plan to ratify the RJPP and RKAP 2024; 5. Others.		√		√	√	√

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Attendance					
			Taufan Gestoro	Joseph Prajogo	Danis H. Sumadilaga	Suli Fatimah	Diah Sulistiorini	Mohamad Fadila
2	22 Januari 2024 January 22, 2024	Sosialisasi Kebijakan serta Pedoman Prinsip Pengelolaan Anak Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi Socialization of Policies and Guidelines for the Principles of Subsidiary Management and Integrated Governance		√		√	√	√
3	27 Februari 2024 February 27, 2024	1. Tindak lanjut hasil Rapat Internal Dewan Komisaris sebelumnya; 2. Pembahasan kinerja Hasil Usaha Perseroan s.d Januari 2024; 3. Pembahasan pemenuhan PER-02/MBU/2023; 4. Lain-lain. 1. Follow-up to the results of the previous Internal Meeting of the Board of Commissioners; 2. Discussion of the Company's Business Results performance until January 2024; 3. Discussion of the fulfilment of PER-02/MBU/2023; 4. Others.		√		√	√	√
4	25 Maret 2024 March 25, 2024	1. Tindak lanjut hasil Rapat Internal Dewan Komisaris sebelumnya; 2. Pembahasan kinerja Hasil Usaha Perseroan s.d Februari 2024; 3. Pembahasan rencana Pengecekan Proyek tahun 2024; 4. Lain-lain. 1. Follow-up to the results of the previous Internal Meeting of the Board of Commissioners; 2. Discussion of the Company's Business Results performance until February 2024; 3. Discussion of the 2024 Project Check plan; 4. Others.	√	-	√	√	√	√

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Attendance					
			Taufan Gestoro	Joseph Prajogo	Danis H. Sumadilaga	Suli Fatimah	Diah Sulistiorini	Mohamad Fadila
5	29 April 2024 April 29, 2024	1. Tindak lanjut hasil Rapat Internal Dewan Komisaris sebelumnya; 2. Pembahasan kinerja Hasil Usaha Perseroan s.d Maret 2024; 3. Progres tindaklanjut rekomendasi hasil reviu penerapan GCG; 4. Pembahasan rencana Pengecekan Proyek IKN; 5. Lain-lain. 1. Follow-up to the results of the previous Internal Meeting of the Board of Commissioners; 2. Discussion of the Company's Business Results performance until March 2024; 3. Progress of follow-up to recommendations from the results of the GCG implementation review; 4. Discussion of the IKN Project Inspection plan; 5. Others.	√	-	√	√	√	√
6	28 Mei 2024 May 28, 2024	1. Tindak lanjut hasil Rapat Internal Dewan Komisaris sebelumnya; 2. Pembahasan kinerja Hasil Usaha Perseroan s.d April 2024; 3. Pembahasan Perubahan Organisasi; 4. Lain-lain. 1. Follow-up to the results of the previous Internal Meeting of the Board of Commissioners; 2. Discussion of the Company's Business Results performance until April 2024; 3. Discussion of Organizational Changes; 4. Others.	√	-	√	√	√	√

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Attendance					
			Taufan Gestoro	Joseph Prajogo	Danis H. Sumadilaga	Suli Fatimah	Diah Sulistiorini	Mohamad Fadila
7	26 Juni 2024 June 26, 2024	1. Tindak lanjut hasil Rapat Internal Dewan Komisaris sebelumnya; 2. Pembahasan kinerja Hasil Usaha Perseroan s.d Mei 2024; 3. Pembahasan permohonan perubahan standar logo Perusahaan dan pengaplikasinnya; 4. Lain-lain. 1. Follow-up to the results of the previous Internal Meeting of the Board of Commissioners; 2. Discussion of the Company's Business Results performance until May 2024; 3. Discussion of the request for changes to the Company's logo standards and its application; 4. Others.	√	-	-	√	√	√
8	24 Juli 2024 July 24, 2024	1. Tindak lanjut hasil Rapat Internal Dewan Komisaris sebelumnya; 2. Pembahasan kinerja Hasil Usaha Perseroan s.d Juni 2024; 3. Reviu pengendalian intern di Biro HC terkait tata kelola SDM Tahun 2024; 4. Lain-lain. 1. Follow-up to the results of the previous Internal Meeting of the Board of Commissioners; 2. Discussion of the Company's Business Results performance until June 2024; 3. Review of internal control in the HC Bureau related to HC governance in 2024; 4. Others.	√	-	-	√	√	√

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Attendance					
			Taufan Gestoro	Joseph Prajogo	Danis H. Sumadilaga	Suli Fatimah	Diah Sulistiorini	Mohamad Fadila
9	28 Agustus 2024 August 28, 2024	1. Tindak lanjut hasil Rapat Internal Dewan Komisaris sebelumnya; 2. Pembahasan kinerja Hasil Usaha Perseroan s.d Juli 2024; 3. Update Pelaksanaan RUPLSB WEGE; 4. Reviu Pengendalian Intern terkait Tata Kelola Divisi SCM Tahun 2024; 5. Lain-lain. 1. Follow-up to the results of the previous Internal Meeting of the Board of Commissioners; 2. Discussion of the Company's Business Results performance until July 2024; 3. Update on the Implementation of the WEGE RUPLSB; 4. Review of Internal Control related to the Governance of the SCM Division in 2024; 5. Others.	√	-	-	√	√	√
10	25 September 2024 September 25, 2024	1. Tindak lanjut hasil Rapat Internal Dewan Komisaris sebelumnya; 2. Pembahasan kinerja Hasil Usaha Perseroan s.d Agustus 2024; 3. Reviu pengendalian intern tata kelola Keuangan dan Akuntansi; 4. Lain-lain. 1. Follow-up to the results of the previous Internal Meeting of the Board of Commissioners; 2. Discussion of the Company's Business Results performance until August 2024; 3. Review of internal control of Financial and Accounting governance; 4. Others.	√	-	-	√	√	√

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Attendance					
			Taufan Gestoro	Joseph Prajogo	Danis H. Sumadilaga	Suli Fatimah	Diah Sulistiorini	Mohamad Fadila
11	25 Oktober 2024 October 25, 2024	1. Tindak lanjut hasil Rapat Internal Dewan Komisaris sebelumnya; 2. Pembahasan kinerja Hasil Usaha Perseroan s.d September 2024; 3. Pembahasan hasil Rakor Tata Kelola Terintegrasi TWIII 2024; 4. Reviu pengendalian intern terkait tata kelola Divisi Engineering; 5. Lain-lain. 1. Follow-up to the results of the previous Internal Meeting of the Board of Commissioners; 2. Discussion of the Company's Business Results performance until September 2024; 3. Discussion of the results of the Integrated Governance Coordination Meeting TWIII 2024; 4. Review of internal control related to the governance of the Engineering Division; 5. Others.	√	-	-	√	√	√
12	21 November 2024 November 21, 2024	1. Tindak lanjut hasil Rapat Internal Dewan Komisaris sebelumnya; 2. Pembahasan kinerja Hasil Usaha Perseroan s.d Oktober 2024; 3. Pembahasan Draft RKA Dekom 2025; 4. Lain-lain. 1. Follow-up to the results of the previous Internal Meeting of the Board of Commissioners; 2. Discussion of the Company's Business Results performance until October 2024; 3. Discussion of the Draft RKA of BOC 2025; 4. Others.	√	-	-	√	√	√

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Attendance					
			Taufan Gestoro	Joseph Prajogo	Danis H. Sumadilaga	Suli Fatimah	Diah Sulistiorini	Mohamad Fadila
13	23 Desember 2024 December 23, 2024	1. Tindak lanjut hasil Rapat Internal Dewan Komisaris sebelumnya; 2. Pembahasan kinerja Hasil Usaha Perseroan s.d November 2024 dan Prognosa Desember 2024; 3. Reviu pengendalian intern terkait tata kelola pada Divisi PMO dan Risk Management serta Divisi Operasi dan Konsesi; 4. Lain-lain. 1. Follow-up to the results of the previous Internal Meeting of the Board of Commissioners; 2. Discussion of the Company's Business Results performance until November 2024 and the Prognosis for December 2024; 3. Review of internal controls related to governance in the PMO and Risk Management Divisions and the Operations and Concessions Division; 4. Others.	√	-	-	√	√	√

Rekapitulasi Kehadiran Rapat Komite Nominasi, Remunerasi, *Good Corporate Governance* (GCG)

Rekapitulasi kehadiran anggota Komite Nominasi, Remunerasi, *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap rapat yang diselenggarakan sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Recapitulation Of Meeting Attendance of The Nomination, Remuneration, Good Corporate Governance (GCG) Committee

The recapitulation of the attendance of members of the Nomination, Remuneration, Good Corporate Governance (GCG) Committee in every meeting held throughout 2024 is as follows:

Nama Name	Posisi Position	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	% Kehadiran % Attendance
Menjabat hingga akhir tahun buku 2024 Served until the end of the 2024 fiscal year				
Taufan Gestoro	Ketua, Komisaris Independen Chairman, Independent Commissioner	10	10	100%
Suli Fatimah	Anggota, Komisaris Member, Commissioner	13	13	100%
Diah Sulistiorini	Anggota, Pihak Independen Members, Independent Parties	13	13	100%
Mohamad Fadila	Anggota, Internal Perusahaan Member, Internal Company	13	13	100%
Digantikan sebelum tahun buku 2024 berakhir Replaced before the end of the 2024 fiscal year				
Joseph Prajogo	Ketua, Komisaris Independen Chairman, Independent Commissioner	3	3	100%
Danis H. Sumadilaga	Anggota, Komisaris Member, Commissioner	3	3	100%

Pengembangan Kompetensi Komite Nominasi, Remunerasi, *Good Corporate Governance* (GCG)

Perseroan menyediakan program peningkatan kompetensi bagi anggota Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* (GCG) untuk mendukung efektivitas mereka dalam membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan oleh Direksi. Program ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan Komite dalam memberikan rekomendasi strategis terkait kebijakan nominasi, remunerasi, dan penerapan prinsip-prinsip GCG, serta memastikan bahwa Komite dapat beradaptasi dengan perubahan regulasi dan praktik terbaik yang berlaku di industri.

Pada tahun 2024, program peningkatan kompetensi yang diikuti oleh Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* (GCG) antara lain:

Competency Development of The Nomination, Remuneration, Good Corporate Governance (GCG) Committee

The Company provides a competency development program for members of the Nomination, Remuneration, and Good Corporate Governance (GCG) Committee to support their effectiveness in assisting the Board of Commissioners in performing their supervisory duties regarding the management of the company by the Board of Directors. This program aims to strengthen the Committee's ability to provide strategic recommendations regarding nomination policies, remuneration, and the implementation of GCG principles, as well as ensuring that the Committee can adapt to regulatory changes and best practices applicable in the industry.

In 2024, the competency improvement program followed by the Nomination, Remuneration, and Good Corporate Governance (GCG) Committee includes:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Program Pendidikan/ Pelatihan** Education/Training Program	**Waktu** Time	**Penyelenggara** Organizer
Taufan Gestoro	Ketua, Komisaris Independen Chairman, Independent Commissioner	Pelatihan dan Sertifikasi Qualified Risk Governance Professional (QRGP) Qualified Risk Governance Professional (QRGP) Training and Certification	10 - 12 September 2024 September 10 - 12, 2024	PPM Manajemen
Suli Fatimah	Anggota, Komisaris Member, Commissioner	Strengtening Leadership for Transformation	20 Agustus 2024 August 20, 2024	PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk dan PT Wijaya Karya Beton Tbk
Diah Sulistiorini	Anggota, Pihak Independen Members, Independent Parties	-	-	-
Mohamad Fadila	Anggota, Internal Perusahaan Member, Internal Company	-	-	-

Pelaksanaan Tugas Dan Kegiatan Komite Nominasi, Remunerasi, *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2024

Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* (GCG) telah melaksanakan berbagai tugas dan kegiatan sepanjang tahun 2024 untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, termasuk di bidang nominasi, remunerasi, dan pengawasan terhadap implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di Perseroan. Adapun tugas dan kegiatan yang dilakukan oleh Komite Nominasi, Remunerasi, dan GCG pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Implementation of The Duties and Activities of The Nomination, Remuneration, Good Corporate Governance (GCG) Committee In 2024

The Nomination, Remuneration, and Good Corporate Governance (GCG) Committee has carried out various duties and activities throughout 2024 to ensure the implementation of good governance principles, including in the areas of nomination, remuneration, and supervision of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in the Company. The duties and activities performed by the Nomination, Remuneration, and GCG Committee in 2024 are as follows:

No	Butir-Butir dalam Piagam Komite Nominasi, Remunerasi, Good Corporate Governance (GCG) Points in the Charter of the Nomination, Remuneration, Good Corporate Governance (GCG) Committee	Realisasi Kegiatan Realization of Activities
1	Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi tahun 2023. Conducting an evaluation of the 2023 remuneration policy.	Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas remunerasi untuk tahun 2024 berdasarkan hasil kinerja 2023. Providing input to the Board of Commissioners on remuneration for 2024 based on 2023 performance results.
2	Melakukan kajian, evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penerapan *Good Corporate Governance* di PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. Conducting studies, evaluations and recommendations to the Board of Commissioners on the implementation of Good Corporate Governance at PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.	Memberikan usulan kepada Dewan Komisaris mengenai langkah-langkah untuk menindaklanjuti *area of improvement* hasil *self-assessment* GCG 2023 dan penerapan GCG 2024. Provide proposals to the Board of Commissioners regarding steps to follow up on areas of improvement resulting from the 2023 GCG self-assessment and the implementation of GCG 2024.
3	Memberikan pendapat dan/atau masukan yang obyektif, profesional dan independen atas hal-hal yang memerlukan perhatian, tindak lanjut, atau hal-hal lainnya yang dapat membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris berkaitan dengan praktik GCG. Providing objective, professional and independent opinions and/or input on matters requiring attention, follow-up or other matters that may assist in the implementation of the Board of Commissioners' duties relating to GCG practices.	Melakukan evaluasi atas pelaksanaan pengendalian intern dengan mereviu: penerapan SOP, pengorganisasian unit kerja, sinergi fungsi-fungsi terkait dalam mananjemen proyek, pengintegrasian data terkait antar unit kerja, penerapan manajemen risiko, program kerja unit kerja dan realisasi pelaksanaannya, laporan hasil audit internal dan eksternal. Conducting an evaluation of the implementation of internal control by reviewing: application of SOPs, organization of work units, synergy of related functions in project management, integration of related data between work units, application of risk management, work unit work programs and their implementation realization, internal and external audit result reports.
4	Menyusun *self-assessment tool* dan melakukan *self assessment* terhadap kinerja Komite dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris. Preparing self-assessment tools and conducting self-assessment of the Committee's performance and report it to the Board of Commissioners.	Mengusulkan penilaian kinerja individu Komisaris 2024. Proposing individual performance assessment of Commissioners 2024.
5	Mengevaluasi kebijakan tentang GCG terkait Standar Etika. Evaluating policies on GCG related to Ethical Standards.	Mereviu dan menyempurnakan Kode Etik Perusahaan. Reviewing and refining the Company's Code of Conducts.
6	Melakukan kajian/evaluasi atas restrukturisasi organisasi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, berikut mekanisme kerja, kriteria jabatan dan program diklat. Conducting a study/evaluation of the organizational restructuring of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, including work mechanisms, job criteria and training programs.	Melakukan kajian perubahan organisasi berupa analisa terhadap kondisi eksisting, tujuan perubahan, analisa risiko dan dampak perubahan organisasi, dibahas dalam Rapat Direksi Terbatas, dilanjutkan pengesahan perubahan organisasi disertai pembaharuan terhadap Uraian Jabatan. Conducting studies on a change of organization in the form of analysis of existing conditions, the objectives of the change, risk analysis and impact on the change of organization, discussed in a Limited Board of Directors Meeting, followed by ratification of the change of organization accompanied by updates to Job Descriptions.

No	Butir-Butir dalam Piagam Komite Nominasi, Remunerasi, Good Corporate Governance (GCG) Points in the Charter of the Nomination, Remuneration, Good Corporate Governance (GCG) Committee	Realisasi Kegiatan Realization of Activities
7	Evaluasi capaian KPI individu Direksi, Vice President/pejabat satu level di bawah Direksi dan pegawai lainnya. Evaluation of individual KPI achievements of the Board of Directors, Vice Presidents/officials one level below the Board of Directors and other employees.	Melakukan evaluasi terhadap capaian target dalam kontrak manajemen per Direktorat dan capaian target dalam Kesepakatan Karya untuk Vice President/pejabat satu level dibawah Direksi dan pegawai lainnya. Evaluasi dilakukan mulai dari keselarasan program kerja, target kinerja antar unit kerja terkait terhadap target korporat, sinergi antar unit kerja terkait dalam manajemen proyek. Evaluasi kinerja dilakukan melalui rapat koordinasi dan *Management Review* secara berkala. Conducting evaluations of target achievements in management contracts per Directorate and target achievements in the Work Agreement for Vice Presidents/officials one level below the Board of Directors and other employees. Evaluations are carried out starting from the alignment of work programs, performance targets between related work units against corporate targets, synergy between related work units in project management. Performance evaluations are carried out through coordination meetings and periodic Management Reviews.
8	Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris berikut Rencana Kerja Organ Dewan Komisaris. Preparing the Work Plan and Budget of the Board of Commissioners and the Work Plan of the Board of Commissioners Organs.	Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris berikut Rencana Kerja Organ Dewan Komisaris 2025. The Board of Commissioners' Work Plan and Budget including the Board of Commissioners' Work Plan for 2025.
9	Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris. Carrying out other duties assigned by the Board of Commissioners.	Membantu persiapan *assessment* GCG tahun buku 2024. Assisting in the preparation of GCG assessment for the 2024 fiscal year.

Rencana Program Kerja Komite Nominasi, Remunerasi, *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2025

Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* (GCG) Perseroan telah menyusun program kerja untuk tahun 2025 yang mencakup berbagai kegiatan strategis yang bertujuan untuk memperkuat penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) serta mendukung pengelolaan perusahaan yang efektif dan transparan. Adapun rencana program kerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Rapat Internal Komite Nominasi, Remunerasi, dan GCG bersama Manajemen, dengan agenda sebagai berikut:
   a. Reviu terhadap ketentuan internal, termasuk *Standard Operating Procedures* (SOP), Pedoman Pelaksanaan Kegiatan, dan dokumen terkait lainnya;
   b. Kajian atas pelaksanaan sistem manajemen di lingkungan perusahaan, mencakup Sistem Manajemen Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Manajemen Risiko, Manajemen Informasi, SDM, Akuntansi, dan Pengadaan;
   c. Kajian atas aksi korporasi yang dilakukan oleh Perseroan;
   d. Kajian terhadap penyesuaian *Board Manual*;
   e. Monitoring kegiatan penyelesaian piutang yang membutuhkan perhatian khusus;
   f. Penelaahan atas aspek GCG dalam laporan kinerja perusahaan;

Work Program Plan of The Nomination, Remuneration, Good Corporate Governance (GCG) Committee In 2025

The Company's Nomination, Remuneration, and Good Corporate Governance (GCG) Committee has prepared a work program for 2025 that includes various strategic activities aimed at strengthening the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles and supporting effective and transparent company management. The work program plans to be implemented are as follows:

1. Internal Meeting of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee with Management, with the following agenda:
   a. Review of internal provisions, including Standard Operating Procedures (SOP), Activity Implementation Guidelines, and other related documents;
   b. Review of the implementation of the management system in the company environment, including the Quality Management System, Occupational Safety and Health, Risk Management, Information Management, HC, Accounting, and Procurement;
   c. Review of corporate actions taken by the Company;
   d. Review of adjustments to the Board Manual;
   e. Monitoring of receivables settlement activities that require special attention;
   f. Review of GCG aspects in the company's performance report;

g. Penelaahan atas aspek GCG dalam rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan serta kesesuaiannya dengan rencana jangka panjang perusahaan;
h. Pengusulan kepada Dewan Komisaris terkait penetapan gaji dan tantiem bagi Direksi dan Dewan Komisaris;
i. Me-reviu rencana suksesi calon Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan pada RUPS dan Pemegang Saham;
j. Monitoring kegiatan perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG melalui pemberian masukan, nasehat, rekomendasi, atau saran atas permohonan persetujuan dari Direksi;
k. Evaluasi kinerja perusahaan, dengan fokus pada kepatuhan terhadap keputusan RKAP Tahun 2025 dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan 2024-2028;
l. Mempersiapkan *assessment* GCG untuk tahun buku 2025.

2. Penyusunan rencana kerja Komite Nominasi, Remunerasi, dan GCG untuk tahun 2026.
3. Penugasan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
4. Penyusunan Laporan Tahunan Komite untuk tahun 2025.
5. Pelaksanaan diklat, workshop, atau seminar terkait implementasi *Good Corporate Governance* (GCG).

KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Tata Kelola Terintegrasi merupakan suatu tata kelola yang menerapkan suatu prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independensi dan kewajaran secara integrasi dalam grup entitas induk. Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi (TKT) dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan Dewan Komisaris dalam bidang penerapan Manajemen Risiko dan TKT yang bekerja secara kolektif, bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Dasar Hukum Pembentukan Komite

Dasar hukum pembentukan Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi, yaitu:

1. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-06/MBU/04/2021 tanggal 13 April 2021 tentang atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-12/MBU/20212 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
2. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara;

g. Review of GCG aspects in the draft of the company's work plan and budget and its compliance with the company's long-term plan;
h. Proposal to the Board of Commissioners regarding the determination of salaries and bonuses for the Board of Directors and Board of Commissioners;
i. Reviewing the succession plan for candidates for the Board of Directors and Board of Commissioners to be submitted to the GMS and Shareholders;
j. Monitoring company activities to ensure compliance with GCG principles by providing input, advice, recommendations, or suggestions upon request for approval from the Board of Directors;
k. Evaluation of company performance, with a focus on compliance with the 2025 RKAP decisions and the Company's 2024-2028 Long-Term Plan;
l. Preparing the GCG assessment for the 2025 financial year.

2. Preparation of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee's work plan for 2026.
3. Other assignments given by the Board of Commissioners.
4. Preparation of the Committee's Annual Report for 2025.
5. Implementation of training, workshops, or seminars related to the implementation of Good Corporate Governance (GCG).

RISK MONITORING AND INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE

Integrated Governance is a system of governance that applies the principles of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness in an integrated manner within the parent group. The Risk Monitoring and Integrated Governance Committee (TKT) was established by the Board of Commissioners in order to support the effective implementation of the duties and supervisory responsibilities of the Board of Commissioners in the implementation of Risk Management and TKT practices that work collectively, are independent both in the implementation of their duties and in reporting and are directly responsible to the Board of Commissioners.

Legal Basis of Establishment Of The Committee

The legal basis for the establishment of the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee, are as follows:

1. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-06/MBU/04/2021 on April 13, 2021 regarding the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number Per-12/MBU/20212 on Supporting Organs of the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises;
2. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-01/MBU/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises;

3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi signifikan BUMN;
4. Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU.0027786.AH.01.02 tanggal 22 Mei 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, AKta Nomor 3 tanggal 16 Mei 2023
5. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk Nomor 15 tanggal 27 Mei 2024, dibuat dihadapan Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.
6. Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. Nomor SK.02.01/A.KOM.00001.WEGE/2024 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

3. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-2/MBU/03/2023 dated March 3, 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs;
4. Decree of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU.0027786.AH.01 .02 dated May 22, 2023 concerning Approval of Amendments to the Articles of Association of Limited Liability Company PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, Deed Number 3 dated May 16, 2023
5. Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk Number 15 dated May 27, 2024, drawn up before Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto, S.H., Notary in South Jakarta.
6. Decree of the Board of Commissioners of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. Number SK.02.01/A.KOM.00001.WEGE/2024 concerning the Charter of the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

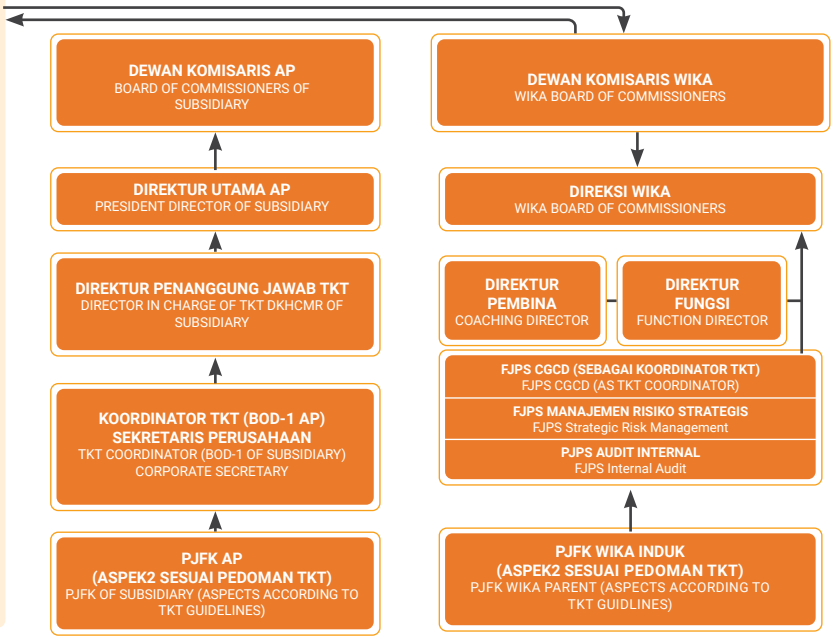
FRAMEWORK TATA KELOLA TERINTEGRASI WIKA GROUP
WIKA Group Integrated Governance Framework

Ketua | Chairman
Komisaris Utama Induk
President Commissioners of the Parent Company

Wakil Ketua | Vice Chairman
(merangkap anggota)
(also member)
Komisaris Independen Induk
Independent Commissioners of the Parent Company

Anggota | Members
- Komisaris Induk
  President Commissioner of the Parent Company
- Komisaris Utama Anak Perusahaan
  President Commissioner of the Subsidiary
- Profesional
  Professional

- Komisaris Utama Anak Perusahaan menjadi Anggota Komite Bidang Tata Kelola Terintegrasi WIKA
- DKHCMR Anak Perusahaan menjadi Penanggung Jawab TKT di Anak Perusahaan
- Sekretaris Anak Perusahaan menjadi Koordinator TKT di Anak Perusahaan
- Masing-masing BOD-1 Anak Perusahaan menjadi counterpart PIC TKT WIKA di setiap aspek
- President Commissioner of Subsidiary becomes a Member of Integrated Governance Committee of WIKA
- DKHCMR o Subsidiary becomes the Person in Charge of TKT in the Subsidiary
- Secretary of Subsidiary becomes the Coordinator of TKT in the Subsidiary
- Each BPD-1 of Subsidiary becomes the counterpart of PIC TKT WIKA in every aspect



PT WIjaya Karya (Persero) Tbk sebagai entitas induk memilki Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Nomor WIKA-SUB-KP-01.01 tanggal 13 November 2023 dan Pedoman Prinsip Pengelolaan Anak Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi Nomor WIKA-SUB-QM-01.01. Program Kerja Tata Kelola Terintegrasi entitas induk antara lain sebagai berikut:

1. Aspek Internal Audit;
2. Aspek Manajemen Risiko;
3. Aspek Keuangan;
4. Aspek Finance;
5. Aspek Sinergi Bisnis;
6. Aspek Pengadaan;
7. Aspek Human Capital;
8. Aspek SMAP, WBS, Benturan Kepentingan dan TJSL;
9. Aspek Hukum dan Kepatuhan;
10. Aspek Quality, Health, Safety, dan Environment;
11. Aspek Information Technology.

Perseroan sebagai bagian dari anak perusahaan BUMN yang memiliki hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian memiliki komitmen untuk terus menciptakan nilai-nilai konglomerasi secara terukur, terarah dan efektif. Tidak hanya dengan entitas induk, Perseroan juga menerapkan tata kelola terintegrasi dengan anak perusahaan PT WEGE Solusi Proklamasi.

Tujuan Pembentukan Komite TKT

Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengawasi, mengevaluasi dan memastikan agar penerapan Manajemen Risiko TKT di Perseroan tetap memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko serta memastikan tata kelola yang dilakukan memenuhi prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, professional dan kewajaran secara integritas dengan induk dari Perseroan agar berjalan dengan baik.

Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk Nomor: SK.02.01/A.KOM.0001.WEGE//2024 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi yang disahkan pada tanggal 14 Mei 2024 dan Board Manual Perseroan.

Ketentuan Masa Jabatan Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, sebagaimana telah dikukuhkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah dikukuhkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, pada tanggal 20 Mei 2023.

PT WIjaya Karya (Persero) Tbk as the parent entity has an Integrated Governance Policy Number WIKA-SUB-KP-01.01 on November 13, 2023 and Guidelines for Subsidiary Management Principles and Integrated Governance Number WIKA-SUB-QM-01.01. The Integrated Governance Work Program of the parent entity includes the following:

1. Internal Audit Aspect;
2. Risk Management Aspect;
3. Treasury Aspect;
4. Finance Aspect;
5. Business Synergy Aspect;
6. Procurement Aspect;
7. Human Capital Aspect;
8. SMAP, WBS, Conflict of Interest and TJSL Aspect;
9. Legal and Compliance Aspect;
10. Quality, Health, Safety, and Environment Aspect;
11. Information Technology Aspect.

The Company as part of SOE subsidiaries with ownership and/or control relationships has a commitment to continuously create conglomerate values in a measurable, targeted and effective manner. Apart from the parent entity, the Company also implements integrated governance with its subsidiary PT WEGE Solusi Proklamasi.

Purpose of the Establishment of TKT Committee

The Risk Monitoring and Integrated Governance Committee was established to assist the Board of Commissioners in performing its duties and responsibilities in supervising, evaluating and to ensure that the implementation of TKT Risk Management in the Company remains in compliance with the elements of the adequacy of risk management procedures and methodologies and to assure that the governance carried out complies with the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, professionalism and fairness in integrity with the parent of the Company in order to be properly executed.

Board Manual of The Risk Monitoring and Integrated Governance Committee

Based on the Decree of the Board of Commissioners of PT WIjaya Karya Bangunan Gedung Tbk Number: SK.02.01/A.KOM.0001.WEGE//2024 on the Establishment of Risk Monitoring and Integrated Governance Organs which was ratified on May 14, 2024 and the Company's Board Manual.

Terms of Office of The Risk Monitoring and Integrated Governance Committee

In compliance with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs, as confirmed by the General Meeting of Shareholders of the Company and Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-3/MBU/03/2023 on Organs and Human Capital of State-Owned Enterprises, as confirmed by the General Meeting of Shareholders of the Company, on May 20, 2023.

Tugas Dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi

Sebagaimana diatur dalam Pedoman Kerja, Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengevaluasi secara berkala sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, untuk mengawasi dan memastikan kecukupan kebijakan Manajemen Risiko dan memberikan pendapat saran dan/atau rekomendasi Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi kepada Dewan Komisaris untuk perbaikan kerangka kerja dan kebijakan Manajemen Risiko;
2. Menganalisis dan mengevaluasi laporan Manajemen Risiko, laporan profil risiko maupun laporan lainnya terkait manajemen risiko Perseroan;
3. Memantau dan mengevaluasi kecukupan identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko Perseroan;
4. Mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan tugas kepatuhan (compliance) Perseroan dalam penerapan manajemen risiko;
5. Mengevaluasi secara berkala dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris untuk persetujuan kebijakan TKT dalam lingkup Perseroan;
6. Memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kebijakan TKT Perseroan;
7. Melaksanakan tugas-tugas lain diberikan Dewan Komisaris dari waktu ke waktu sesuai kewenangan yang berlaku

Wewenang Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi

Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi mempunyai wewenang antara lain:

1. Memperoleh informasi yang relevan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya dari pihak internal maupun eksternal;
2. Melakukan komunikasi dengan kepala unit kerja dan pihak lain dalam Perseroan untuk memperoleh informasi dan data, mendapatkan klarifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang diperlukan;
3. Memberi pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka peningkatan pengelolaan risiko Perseroan;
4. Memberi pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka peningkatan efektifitas manajemen risiko yang dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi manajemen risiko;
5. Melakukan pemantauan dan penelaahan terhadap laporan manajemen risiko Perseroan
6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hal yang mendukung efektifitas penerapan manajemen risiko dan kesesuaian dengan kebijakan Perseroan;
7. Mendapat masukan dari tenaga ahli baik dari pihak internal Perseroan maupun dari pihak eksternal Perseroan;
8. Melakukan koordinasi dengan Komite Audit serta Komite nominasi, Remunerasi dan Good Corporate Governance.

Duties And Responsibilities of The Risk Monitoring and Integrated Governance Committee

As stipulated in the Board Manual, the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee has the following duties and responsibilities:

1. Evaluating periodically in compliance with the prevailing provisions and procedures, to monitor and ensure the adequacy of Risk Management policies and provide the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee's opinions and/or recommendations to the Board of Commissioners for the improvement of Risk Management framework and policies;
2. Analyzing and evaluating Risk Management reports, risk profile reports and other reports related to the Company's risk management;
3. Monitoring and evaluating the adequacy of the Company's risk management identification, measurement, monitoring, control and information systems;
4. Evaluating and analyzing the implementation of the Company's compliance duties in the implementation of risk management;
5. Evaluating periodically and providing input to the Board of Commissioners for the approval of the TKT policy within the scope of the Company;
6. Monitoring and evaluating the suitability of the implementation of the Company's TKT policy;
7. Carrying out other duties assigned by the Board of Commissioners periodically in compliance with the prevailing authority.

Authority of The Risk Monitoring and Integrated Governance Committee

The Risk Monitoring and Integrated Governance Committee has the authority, including:

1. Obtaining relevant information related to the implementation of its duties from internal and external parties;
2. Communicating with the head of the work unit and other parties in the Company to obtain information and data, receive clarification and request the required documents and reports;
3. Providing opinions and recommendations to the Board of Commissioners to improve the Company's risk management;
4. Providing opinions and recommendations to the Board of Commissioners to improve the effectiveness of risk management implemented by the work unit in charge of risk management;
5. Monitoring and reviewing the Company's risk management report;
6. Providing recommendations to the Board of Commissioners on issues that encourage the effective implementation of risk management and compliance with the Company's policies;
7. Obtaining input from experts from both internal and external parties of the Company; and
8. Coordinating with the Audit Committee and the Nomination, Remuneration and Good Corporate Governance Committee.

Jumlah, Komposisi Dan Susunan Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2024

Berpedoman pada Anggaran Dasar Perusahaan, Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota. Komposisi komite ini terdiri dari 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris, sebagai ketua dan 2 (dua) orang anggota. Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi berasal dari:

a. Anggota Dewan Komisaris;
b. Pihak yang berasal dari luar;
c. Pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi Manajemen Risiko dan TKT.

Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi yang kedudukannya sebagai anggota Dewan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite.

Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi yang bukan anggota Dewan Komisaris tidak boleh merangkap sebagai anggota Komite lain di lingkungan Perseroan pada periode yang sama.

Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi dibentuk pada tahun 2024 yang dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini:

Number, Composition, and Structure of The Risk Monitoring and Integrated Governance Committee In 2024

Based on the Company's Articles of Association, the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee consists of no less than 3 (three) members. The composition of this committee consists of 1 (one) member of the Board of Commissioners as chairman, and 2 (two) members. Members of the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee are derived from:

a. Members of the Board of Commissioners;
b. External parties;
c. Parties who hold managerial positions under the Board of Directors in charge of Risk Management and TKT.

The member of the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee whose position as an Independent member of the Board of Commissioners acts as the Chairman of the Committee.

Members of the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee who are not members of the Board of Commissioners may not concurrently serve as members of other Committees within The Company during the same period.

The Risk Monitoring and Integrated Governance Committee was established in 2024 and is described in the following table:

Jabatan Position	Nama Name
Ketua merangkap anggota Chairman and member	Joseph Prajogo
Anggota Member	Danish S. Sumadilaga
Anggota Member	Apridio Rizak K.

Nama Name	Jabatan Position	Keterangan Description	Keahlian Expertise	Periode Jabatan Term of Office
Joseph Prajogo	Ketua Chairman	Komisaris Independen sekaligus Pelaksana Tugas Komisaris Utama Independent Commissioner and Acting President Commissioner	Keuangan dan Manajemen Finance and Management	Mengikuti Periode Jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris Following the Period of Service as a Member of the Board of Commissioners
Danish S. Sumadilaga	Anggota Member	Komisaris Commissioner	Strategi Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Human Capital Management and Development Strategy	Mengikuti Periode Jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris Following the Period of Service as a Member of the Board of Commissioners
Apridio Rizak K.	Anggota Member	Pihak Independen Independent Party	Akuntansi dan Manajemen Risiko Accounting and Risk Management	Periode ke-1 1st Period

Profil Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi

Adapun profil anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai berikut: Profil Joseph Prajogo dan Danish S. Sumadilaga sebagai anggota Dewan Komisaris dapat dilihat di bab Profil Perusahaan dari laporan tahunan ini.

Profile of The Risk Monitoring and Integrated Governance Committee

The profile of the members of the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee are as follows: The profiles of Joseph Prajogo and Danish S. Sumadilaga as members of the Board of Commissioners are available in the Company Profile chapter of this annual report.

Profil Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi
Profile of The Risk Monitoring and Integrated Governance Committee



Joseph Prajogo

Ketua merangkap anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi
Chairman and member of the Integrated Risk Monitoring and Governance Committee

Dasar Hukum Pengangkatan
Legal Basis of Appointment

Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Bangunan Gedung No. SK.02.01/A.KOM.WG.07816/2024 Tentang Penetapan Organ Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk tanggal 11 Juni 2024.
Decision of the Board of Commissioners of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung No. SK.02.01/A.KOM. WG.07816/2024 Concerning the Establishment of the Integrated Risk Monitoring and Governance Organ of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk dated June 11, 2024

Dalam pelaksanaan tugas Komite, beliau ditunjuk sebagai Ketua merangkap anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi. Adapun profil beliau dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Dewan Komisaris di dalam Laporan Tahunan ini.
In performing the duties of the Audit Committee, he is appointed as Chairman and member of the Integrated Risk Monitoring and Governance Committee. His profile can be found in the Company Profile Chapter in the section of the Board of Commissioners' Profile within this Annual Report.



Danish S. Sumadilaga

Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi
Member of Risk Monitoring and Integrated Governance Committee

Dasar Hukum Pengangkatan
Legal Basis of Appointment

Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Bangunan Gedung No. SK.02.01/A.KOM.WG.07816/2024 Tentang Penetapan Organ Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk tanggal 11 Juni 2024.
Decision of the Board of Commissioners of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung No. SK.02.01/A.KOM. WG.07816/2024 Concerning the Establishment of the Integrated Risk Monitoring and Governance Organ of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk dated June 11, 2024

Dalam pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi, beliau ditunjuk sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi. Adapun profil beliau dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Dewan Komisaris di dalam Laporan Tahunan ini.
In performing the duties of the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee, he is appointed as Member of Risk Monitoring and Integrated Governance Committee. His profile can be found in the Company Profile Chapter in the section of the Board of Commissioners' Profile within this Annual Report.



Apridio Rizak K.

Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi
Member of Risk Monitoring and Integrated Governance Committee

Dasar Hukum Pengangkatan
Legal Basis of Appointment

Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Bangunan Gedung No. SK.02.01/A.KOM.WG.07816/2024 Tentang Penetapan Organ Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk tanggal 11 Juni 2024.
Decision of the Board of Commissioners of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung No. SK.02.01/A.KOM. WG.07816/2024 Concerning the Establishment of the Integrated Risk Monitoring and Governance Organ of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk dated June 11, 2024

Dalam pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi, beliau ditunjuk sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi. Adapun profil beliau dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan di bagian Sekretaris Dewan Komisaris di dalam Laporan Tahunan ini.
In performing the duties of the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee, he is appointed as Member of Risk Monitoring and Integrated Governance Committee. His profile can be found in the Good Corporate Governance Chapter in the section of Secretary of the Board of Commissioners within this Annual Report.

Independensi Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi

Seluruh Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/ atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

Independency of The Risk Monitoring and Integrated Governance Committee

All members of the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee from independent parties have no financial, management, share ownership and/or family relationships with the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Controlling Shareholders or relationships with the Company, that could affect their ability to be independent.

Persyaratan Independensi Independency Requirement	Joseph Prajogo	Danish S. Sumadilaga	Apridio Rizak K.
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi No financial relationship with the Board of Commissioners and Directors	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi No management relationship in the company, subsidiaries, or affiliated companies	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perseroan No shareholding relationship in the Company	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi No family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow members of the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik dan/atau pejabat Pemerintah Refrain from serving as an administrator of a political party and/or Government official	√	√	√

Rapat Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi

Penyelenggaraan Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi harus memenuhi persyaratan diantaranya sebagai berikut:

- Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi sekurang-kurangnya mengadakan rapat sekali dalam 3 (tiga) bulan untuk menyelesaikan Program Kerja Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi;
- Jika dipandang perlu, Komite dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat dengan sepengetahuan anggota Direksi terkait;
- Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite. Apabila Ketua Komite berhalangan hadir maka rapat dipimpin oleh anggota yang paling senior dalam Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi, bilamana rapat tidak dapat dihadiri oleh Ketua dan atau anggota senior rapat dianggap batal;

- Pemanggilan rapat dilakukan oleh Ketua Komite;

- Pemanggilan rapat dilakukan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari dan dalam hal mendesak minimum 2 (dua) hari sebelum tanggal rapat, dengan mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan agenda rapat yang akan dibicarakan dan diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain di wilayah RI yang disepakati;
- Keputusan rapat Komite yang menurut ketua rapat bersifat strategis baru berlaku efektif jika telah diputuskan oleh rapat Dewan Komisaris;
- Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Komite termasuk pendapat yang berbeda (dissenting opinions), dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir, sebagai bukti yang sah atas keputusan yang diambil dalam rapat;
- Setiap anggota Komite diberi kebebasan seluas-luasnya untuk menyampaikan pendapat profesionalnya dalam pembahasan setiap agenda rapat tanpa intervensi siapapun;
- Setiap anggota Komite berhak menerima salinan Risalah Rapat meskipun yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat tersebut;

- Kehadiran anggota Komite dalam rapat, dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan Komite;
- Jumlah rapat serta jumlah kehadiran masing-masing anggota Komite dalam rapat serta laporan singkat Komite yang memuat isu-isu penting yang dibicarakan oleh Komite harus diungkapkan dalam Laporan Tahunan (Annual Report);
- Tata tertib Rapat Komite tertuang dalam aturan tersendiri.

Meetings of The Risk Monitoring and Integrated Governance Committee

The implementation of the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee shall fulfill the following requirements:

- Risk Monitoring and Integrated Governance Committee shall hold a meeting no less than once every 3 (three) months to complete the Work Program of the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee;
- If necessary, the Committee may invite other parties related to the meeting material to attend the meeting with the knowledge of the relevant members of the Board of Directors;
- The Committee meeting is led by the Chairman of the Committee. If the Chairman of the Committee is absent, the meeting shall be led by the most senior member of the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee, if the meeting is not attended by the Chairman and/or senior member, the meeting shall be canceled;
- Invitation to the meeting shall be made by the Chairman of the Committee;
- Invitation to the meeting shall be made No. less than 7 (seven) days and in case of urgency at least 2 (two) days prior to the date of the meeting, by stating the day, date, hour, place and agenda of the meeting to be discussed and conducted at the domicile of the Company or at any other place in the territory of Republic of Indonesia as agreed;
- Decisions of the Committee meeting that are strategic shall only be effectively implemented if approved by the Board of Commissioners meeting;
- Everything discussed and decided in the Committee meeting, including dissenting opinions, is included in the Minutes of Meeting signed by all attending Committee members, as legitimate evidence of the decisions taken in the meeting;

- Each Committee member is given the widest possible freedom to express his/her professional opinion in the discussion of each meeting agenda without any intervention;
- Each Committee member is entitled to receive a copy of the Minutes of Meeting regardless of his/her absence from the meeting;
- Attendance of Committee members in meetings is reported in the quarterly report and annual report of the Committee;
- The number of meetings and the attendance of each Committee member in the meeting as well as a brief report of the Committee containing important issues discussed by the Committee shall be disclosed in the Annual Report;
- The rules of procedure for Committee Meetings are stipulated in separate rules.

Sepanjang tahun 2024, Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi menyelenggarakan rapat sebanyak 1 (satu) kali dengan agenda dan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Throughout 2024, the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee conducted 1 (one) meeting with the following agenda and attendance rate:

No	Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Attendance		
			Joseph Prajogo	Danish Sumadilaga	Apridio Rizak
1	17 Oktober 2024 October 17, 2024	• Arahan Komisaris Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi • Pemaparan Kinerja anak perusahaan • Pelaksanaan TKT Entitas Induk dan anak perusahaan • Briefing from the President Commissioner of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk as Chairman of the Integrated Governance Committee • Exposure of subsidiary performance • Implementation of TKT of Parent Entity and subsidiaries	√	√	√

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi

Perusahaan menyediakan program peningkatan kompetensi bagi Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi. Hal ini bertujuan supaya dapat meningkatkan kemampuan komite ini dalam menjalankan fungsi pengawasan atas pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi.

Training and Competency Development of The Risk Monitoring and Integrated Governance Committee

The Company provides a competence upgrade program for the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee. This is intended to strengthen the committee's ability to perform its supervisory function over the management of the Company by the Board of Directors.

Adapun program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

The training and competency development programs attended by the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee in 2024 are as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Training and Competency Development		
		Nama Name	Waktu Date	Penyelenggara Organizer
Joseph Prajogo	Ketua merangkap Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Chairman and Member of the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee	Pelatihan dan Sertifikasi Qualified Risk Governance Professional Qualified Risk Governance Professional Training and Certification	10-12 September 2024 September 10-12, 2024	PPM Manajemen
Danis Hidayat Sumadilaga	Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Member of Risk the Monitoring and Integrated Governance Committee	-	-	-
Apridio Rizak Karunia	Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Member of the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee	-	-	-

Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Komite Pemantau Risiko Dan Tata Kelola Terintegrasi

Beragam tugas dan kegiatan yang dilakukan oleh Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi atas Pedoman Pengelolaan Tata Kelola Terintegrasi Perseroan dan hasilnya disampaikan kepada manajemen;
2. Melakukan sosialisasi Pedoman Prinsip Pengelolaan Tata Kelola Terintegrasi Perseroan;
3. Melakukan pemantauan implementasi Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi untuk aspek kinerja/operasional, manajemen risiko, tata kelola Perusahaan, dan hukum melalui rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Evaluasi Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi

Evaluasi terhadap kinerja Komite Pemantau Risiko dan TKT secara individual maupun secara kolektif dilakukan setiap 1 (satu) tahun secara *self assessment* menggunakan metode evaluasi dengan indikator sebagai berikut:

1. Penilaian tingkat kehadiran pada rapat;
2. Penilaian kontribusi dalam penyampaian usulan pemberian nasihat kepada Dewan Komisaris dalam rapat;
3. Penilaian kualitas usulan pemberian nasihat kepada Dewan Komisaris.

Rencana Program Kerja Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2025

Perseroan membentuk Komite Pemantau Risiko dan TKT pada tahun 2024 dengan menerbitkan Pedoman Kerja pada tanggal 14 Mei 2024. Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko dan TKT saat ini masih dalam pengembangan pelaksanaan Tata Kelola Integrasi terhadap anak perusahaan.

Duties And Acitivities of the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee's Performance

The various duties and activities carried out by the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee in 2024 are as follows:

1. Evaluating the Company's Integrated Governance Management Guidelines and submitted the results to the management;
2. Conducting socialization of the Company's Integrated Governance Management Principle Guidelines;
3. Monitoring the implementation of Integrated Governance Policy for performance/operational, risk management, corporate governance, and legal aspects through Integrated Governance Committee meetings.

Evaluation of The Risk Monitoring and Integrated Governance Committee

Evaluation of performance of the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee individually and collectively is carried out every 1 (one) year on a self-assessment basis by using an evaluation method with the following indicators:

1. Assessment of attendance rate at meetings;
2. Assessment of contribution in submitting advisory proposals to the Board of Commissioners in meetings;
3. Assessment of the quality of proposals for providing advice to the Board of Commissioners.

Work Program Plan of The Risk Monitoring and Integrated Governance Committee

The Company established the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee in 2024 by issuing the Board Manual on May 14, 2024. The duties and responsibilities of Risk Monitoring and Integrated Governance Committee are currently under development for the implementation of Integration Governance towards subsidiaries.

Komite Lain di Bawah Dewan Komisaris

Other Committees under The Board of Commissioners

Hingga akhir tahun 2024, Dewan Komisaris memiliki 3 (tiga) komite, yakni Komite Audit, Komite Nominasi, Remunerasi, *Good Corporate Governance* (GCG), dan Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi. Pembentukan komite-komite ini dirancang untuk memperkuat pengawasan dan pengelolaan Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya komite-komite ini, Dewan Komisaris diharapkan dapat menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya dengan lebih efektif dalam memastikan tata kelola yang transparan dan berkelanjutan.

As of the end of 2024, the Board of Commissioners had 3 (three) committees: Audit Committee, Nomination, Remuneration, and Good Corporate Governance (GCG) Committee, and Risk Monitoring and Integrated Governance Committee. The establishment of these committees is designed to strengthen the supervision and management of the Company in accordance with prevailing regulations. With these committees in place, the Board of Commissioners is expected to carry out its functions, duties, and responsibilities more effectively in ensuring transparent and sustainable governance.



Direksi
Board of DIrector

Menjadi organ utama dalam struktur GCG, Direksi memiliki tugas dan tanggungjawab dalam menetapkan dan mengelola Perseroan melalui berbagai strategi perusahaan. Anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun tugas dan tanggung jawab terkait Perseroan tetap menjadi tanggung jawab bersama.

Direksi juga berwenang mewakili Perseroan di depan umum termasuk di pengadilan atas seluruh kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perusahaan dan/atau Keputusan RUPS. Direksi bertanggung jawab dalam menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

KRITERIA ANGGOTA DIREKSI

Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
   1) Tidak pernah dinyatakan pailit;
   2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
   3) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
   4) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      i) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan; dan
      ii) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggung jawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
e. Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

As the main organ in the GCG structure, the Board of Directors has the duty and responsibility to establish and manage the Company through various corporate strategies. Members of the Board of Directors may carry out their duties and make decisions in accordance with the distribution of their duties and authorities. However, duties and responsibilities related to the Company remain a shared responsibility.

The Board of Directors is also authorized to represent the Company before the public, including in court, for all events with limitations as stipulated in laws and regulations, the Company's Articles of Association, and/or decisions of the General Meeting of Shareholders (GMS). The Board of Directors is responsible for carrying out all actions related to the management of the Company for the benefit of the Company and in accordance with the Company's intent and purpose.

CRITERIA FOR MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Individuals who may be appointed as members of the Board of Commissioners must be natural persons who, at the time of appointment and throughout their tenure, meet the following requirements:

a. Possessing good character, morals, and integrity;
b. Being capable of performing legal acts;
c. Within the 5 (five) years prior to appointment and during their tenure:
   1) Have never been declared bankrupt;
   2) Have never been a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners found guilty of causing a company to be declared bankrupt;
   3) Have never been convicted of a criminal act that harmed state finances and/or related to the financial sector; and
   4) Have never been a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners who, during their tenure:
      i) Failed to convene an annual General Meeting of Shareholders (AGMS); and
      ii) Whose accountability as a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners was not accepted by the GMS or who failed to provide accountability as a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners to the GMS; and
d. Have a commitment to comply with laws and regulations.
e. In addition to meeting the criteria as referred to in paragraph (4), the appointment of members of the Board of Commissioners shall be carried out by considering integrity, dedication, understanding of company management issues related to one of the management functions, having adequate knowledge in the Company's business field, and being able to provide sufficient time to carry out their duties, as well as other requirements based on laws and regulations.

SELEKSI DAN NOMINASI DIREKSI

Proses seleksi calon Dewan Komisaris dan Direksi pada perusahaan afiliasi terkonsolidasi BUMN menggunakan sistem sebagaimana pengusulan Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan melalui *Talent & Succession Management* sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/06/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

MASA JABATAN

Berdasarkan POJK No. 33/POJK.04/2014 dan *Board manual*, masa jabatan Direksi adalah sebagai berikut:

1. Anggota Direksi dapat diangkat dan diberhentikan oleh RUPS;
2. Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali;
3. 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan.

PEDOMAN KERJA DIREKSI

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Direksi, Perseroan berpedoman pada Piagam Dewan Komisaris sehingga Dewan Komisaris dapat menjalankan fungsinya secara efektif. Isi dari pedoman kerja Dewan Komisaris berpedoman pada POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Anggaran Dasar Perusahaan, peraturan terkait BUMN dan perusahaan terbuka serta peraturan-peraturan lain yang relevan serta praktik-praktik terbaik GCG.

Pedoman Direksi secara umum mengatur tentang:

a. Tugas, wewenang dan Kewajiban Direksi;
b. Komposisi dan Pembagian Tugas Antar Direksi;
c. Penetapan Kebijakan Perusahaan oleh Direksi;
d. Pelimpahan Tugas dan Kewenangan Direksi;
e. Kriteria dan Pengangkatan Direksi;
f. Program Pengenalan atau Orientasi Direksi;
g. Pengembangan Direksi;
h. Etika Jabatan Direksi;
i. Pengelolaan Keuangan Perusahaan
j. Rapat Direksi;
k. Evaluasi Kinerja Direksi;
l. Benturan Kepentingan Direksi;
m. Hubungan Kerja dengan Dewan Komisaris;

SELECTION AND NOMINATION OF DIRECTORS

The selection process for candidates for the Board of Commissioners and Board of Directors in consolidated affiliate companies of State-Owned Enterprises (BUMN) uses a system similar to the proposal of the Board of Commissioners and Directors of Subsidiaries through Talent & Succession Management, as regulated in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-04/MBU/06/2020 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-03/MBU/2012 concerning Guidelines for the Appointment of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners of Subsidiaries of State-Owned Enterprises.

TERM OF OFFICE

Based on POJK No. 33/POJK.04/2014 and the Board Manual, the term of office for the Board of Directors is as follows:

1. Members of the Board of Directors can be appointed and dismissed by the General Meeting of Shareholders (GMS);
2. Members of the Board of Directors are appointed for a specific term and can be reappointed;
3. One term of office for a member of the Board of Directors is set at 5 (five) years or until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) at the end of 1 (one) term of office.

BOARD MANUAL OF THE BOARD OF DIRECTORS

In carrying out the duties and responsibilities of the Board of Directors, the Company refers to the Board of Commissioners Charter so that the Board of Commissioners can carry out its functions effectively. The contents of the Board of Commissioners' board manual adhere to POJK No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, the Company's Articles of Association, regulations related to BUMNs and public companies, and other relevant regulations, as well as best practices of GCG.

In general, the Board of Directors Guidelines regulate:

a. Duties, Authorities, and Obligations of the Board of Directors;
b. Composition and Division of Duties Among Directors;
c. Determination of Company Policies by the Board of Directors;
d. Delegation of Duties and Authorities of the Board of Directors;
e. Criteria and Appointment of Directors;
f. Introduction or Orientation Program for Directors;
g. Development of Directors;
h. Code of Conduct for the Position of Director;
i. Management of Company Finances
j. Board of Directors Meetings;
k. Evaluation of the Performance of the Board of Directors;
l. Conflicts of Interest of Directors;
m. Working Relationship with the Board of Commissioners;

n. Sistem Pengendalian Internal;
o. Pemberhentian dan Pengunduran Diri Anggota Direksi;
p. Jabatan Anggota Direksi Lowong;
q. Berakhirnya Jabatan Direksi.

Hal-hal yang diatur dalam pedoman tata kerja Direksi yang terakhir ditetapkan dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi dengan Nomor SK.02.01/A.KOM.WG.05533/2023 Tentang Perubahan Board Manual PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk pada tanggal 11 September 2023.

Pedoman dan tata tertib Dewan Komisaris diperbarui secara berkala. Untuk rincian lebih lanjut tentang pedoman dan tata tertib Dewan Komisaris Perseroan, silakan kunjungi situs web Perseroan di https://www.wikagedung.co.id/gcg/pedoman-gcg

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DIREKSI

Perseroan menerapkan beberapa prinsip untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan dan implikasi lanjutan dengan langkah -langkah sebagai berikut:

1. Direksi harus menghindari adanya potensi benturan kepentingan di dalam melaksanakan tugasnya. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut Direksi perlu memenuhi beberapa prinsip, yaitu:
   a. Direksi wajib menyelenggarakan dan mengisi Daftar Khusus yang berisikan kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada perusahaan lain secara benar dan akurat;
   b. Direksi harus menghindari setiap aktivitas yang dapat mempengaruhi independensi nya dalam pengambilan keputusan;
   c. Tidak boleh berpartisipasi dalam setiap kegiatan pengadaan yang melibatkan suatu Perseroan di mana yang bersangkutan atau keluarganya mempunyai kepemilikan saham yang signifikan atau mempunyai kepentingan finansial atas transaksi tersebut;
2. Direksi wajib membuat pernyataan mengenai benturan kepentingan terhadap hal-hal yang termaktub dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. Apabila terjadi sesuatu hal, di mana kepentingan Perseroan berbenturan dengan kepentingan salah seorang anggota Direksi, maka dengan persetujuan Komisaris, Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya. Apabila benturan kepentingan tersebut menyangkut semua anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris; dan
3. Dalam hal tidak ada Dewan Komisaris, maka Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut di atas.

n. Internal Control System;
o. Dismissal and Resignation of Members of the Board of Directors;
p. Vacancy of a Director's Position;
q. End of the Term of Office of the Board of Directors.

The matters regulated in the guidelines for the work procedures of the Board of Directors were last determined and signed by the Board of Commissioners and the Board of Directors with Number SK.02.01/A.KOM.WG.05533/2023 concerning Amendments to the Board Manual of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk on September 11, 2023.

The guidelines and rules of procedure for the Board of Commissioners are updated periodically. For more details on the guidelines and rules of procedure of the Company's Board of Commissioners, please visit the Company's website at https://www.wikagedung.co.id/gcg/pedoman-gcg

MANAGING CONFLICTS OF INTEREST FOR THE BOARD OF DIRECTORS

The Company implements several principles to avoid conflicts of interest and their subsequent implications, with the following steps:

1. Directors shall avoid any potential conflicts of interest in carrying out their duties. To prevent this from occurring, Directors shall adhere to several principles, namely:
   a. Directors are obliged to organize and complete a Special Register containing their share ownership and/or that of their family in other companies correctly and accurately;
   b. Directors shall avoid any activity that could affect their independence in decision-making;
   c. They may not participate in any procurement activities involving a Company in which they or their family have significant share ownership or have a financial interest in the transaction;
2. Directors are obliged to make a statement regarding conflicts of interest in matters contained in the Company's Work Plan and Budget. If something occurs where the Company's interest conflict with the interests of one of the Directors, then with the approval of the Commissioners, the Company will be represented by another member of the Board of Directors. If the conflict of interest involves all members of the Board of Directors, then the Company will be represented by the Board of Commissioners or a person appointed by the Board of Commissioners; and
3. In the event that there is no Board of Commissioners, the General Meeting of Shareholders appoints one or more persons to represent the Company in carrying out the aforementioned duties.

MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Mekanisme pengunduran diri dan pemberhentian Direksi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS/Menteri dengan menyebutkan alasannya.

2. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
   a. Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam Kontrak Manajemen dan/atau kontrak manajemen tahunan Direksi;
   b. Adanya perubahan strategi bisnis;
   c. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
   d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan dan/atau keuangan Negara;
   e. Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar;
   f. Telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa oleh pihak yang berwenang dalam tindakan yang merugikan perusahaan dan/atau keuangan Negara;
   g. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan;
   h. Melakukan tindakan yang melanggar kode etik Direksi;
   i. Dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
   j. Berhalangan tetap, termasuk sakit keras/sakit berkepanjangan.
3. Selain alasan pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota Direksi BUMN dapat diberhentikan berdasarkan alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS/Menteri demi kepentingan dan tujuan perusahaan.

4. Selain alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pemberhentian Direksi memperhatikan alasan pemberhentian sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perusahaan yang bersangkutan.
5. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
   a. Meninggal dunia;
   b. Masa jabatannya berakhir;
   c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS/Menteri; dan/atau
   d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan termasuk rangkap jabatan yang dilarang.
6. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS;

MECHANISM FOR RESIGNATION AND DISMISSAL OF THE BOARD OF DIRECTORS

The mechanism for resignation and dismissal of the Board of Directors can be described as follows:

1. Members of the Board of Directors can be dismissed at any time by a decision of the General Meeting of Shareholders (GMS)/Minister, stating the reasons.
2. The reasons for dismissing members of the Board of Directors as referred to in paragraph (1) are as follows:
   a. Failure to fulfill obligations agreed upon in the Management Contract and/or the Board of Directors' annual management contract;
   b. Changes in business strategy;
   c. Inability to perform duties properly;
   d. Involvement in actions detrimental to the company and/or state finances;
   e. Violation of statutory regulations and/or the articles of association;
   f. Being named a suspect or defendant by the authorities in actions detrimental to the company and/or state finances;
   g. Actions that violate ethics and/or propriety;
   h. Actions that violate the Board of Directors' Code of Conduct;
   i. Being found guilty by a court decision with permanent legal force; or
   j. Permanent incapacity, including serious/prolonged illness.
3. In addition to the reasons for dismissal of the Board of Directors as referred to in paragraph (2), members of the Board of Directors of State-Owned Enterprises (BUMN) can be dismissed for other reasons deemed appropriate by the GMS/Minister for the sake of the company's interests and objectives.
4. In addition to the reasons for dismissal as referred to in paragraphs (2) and (3), the dismissal of the Board of Directors shall take into account the reasons for dismissal as stipulated in the company's articles of association.
5. The position of a member of the Board of Directors ends when:
   a. They pass away;
   b. Their term of office expires;
   c. They are dismissed by a decision of the GMS/Minister; and/or
   d. They no longer meet the requirements to serve as a Director based on the provisions of the articles of association and statutory regulations, including prohibited dual positions.
6. For members of the Board of Directors who resign before or after their term of office ends, except in the case of death, they are obliged to provide accountability for actions for which accountability has not been accepted by the GMS;

7. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan atau terdapat indikasi melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
   a. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Direksi;
   b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut;
   c. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
   d. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara dimaksud Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut;
   e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal;
   f. Pembatasan kewenangan pada huruf c ayat ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
      i) Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan ataumembatalkan Pemberhentian sementara pada huruf d ayat ini; atau
      ii) Lampaunya jangka waktu pada huruf d ayat ini.
   g. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;
   h. Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan alasan yang sama, apabila pemberhentian sementara dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini;
   i. Apabila RUPS membatalkan pemberhentian sementara atau terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya;
   j. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya;
   k. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS setelah dipanggil secara tertulis, maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara

7. Members of the Board of Directors may be temporarily dismissed at any time by the Board of Commissioners, stating the reasons, if they act contrary to the Company's Articles of Association, or there are indications of actions detrimental to the Company, or neglect of their duties, or there are urgent reasons for the Company, with due observance of the following provisions:
   a. The temporary dismissal must be notified in writing to the Director concerned, along with the reasons for such action, with a copy to the Board of Directors;
   b. The notification as referred to in point a must be submitted no later than 2 (two) working days after the temporary dismissal is decided;
   c. A temporarily dismissed Director has no authority to manage the Company for the Company's interests in accordance with the Company's intent and purpose, nor to represent the Company in or out of court;
   d. Within a maximum of 90 (ninety) days after the temporary dismissal, the Board of Commissioners shall convene a GMS to revoke or affirm the temporary dismissal decision;
   e. If the GMS is not held within the period as referred to in point d, or the GMS is unable to make a decision, the temporary dismissal is nullified;
   f. The limitation of authority in point c of this paragraph applies from the decision of temporary dismissal by the Board of Commissioners until:
      i) There is a GMS decision that affirms or revokes the temporary dismissal in point d of this paragraph; or
      ii) The period in point d of this paragraph expires.
   g. In the GMS as referred to in point d of this paragraph, the Board of Director concerned is given the opportunity to defend themselves;
   h. A temporary dismissal cannot be extended or reinstated for the same reason if the temporary dismissal is declared null and void as referred to in point e of this paragraph;
   i. If the GMS revokes the temporary dismissal or the situation in point e of this paragraph occurs, the Director concerned is obliged to resume their duties as before;
   j. If the GMS affirms the temporary dismissal decision, the Board of Director concerned is dismissed permanently;
   k. If the temporarily dismissed Board of Director is absent from the GMS after being summoned in writing, the temporarily dismissed member of the Board of Director is deemed to have waived their

tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS dan telah menerima keputusan RUPS;

l. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK mengenai:
   i) Keputusan pemberhentian sementara; dan
   ii) Hasil penyelenggaraan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut sebagaimana tersebut pada huruf d ayat ini, atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf e ayat ini, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.

right to defend themselves in the GMS and to have accepted the GMS decision;

l. The Company is obliged to disclose information to the public and submit it to the Financial Services Authority (OJK) regarding:
   i) The temporary dismissal decision; and
   ii) The results of the GMS to revoke or affirm the temporary dismissal decision as referred to in point d of this paragraph, or information regarding the nullification of the temporary dismissal by the Board of Commissioners due to the GMS not being held until the expiry of the period as referred to in point e of this paragraph, no later than 2 (two) working days after the occurrence of the event.

INDEPENDENSI DIREKSI DALAM PENGELOLAAN PERUSAHAAN

Sebagaimana tertuang dalam pedoman kerja Direksi, Perseroan telah menetapkan hal-hal yang perlu dijaga bagi Direksi dalam mengelola Perseroan, diantaranya dalam hal:

1. Direksi wajib mengambil kebijakan atau keputusan atas suatu permasalahan yang timbul berdasarkan pertimbangan independen;
2. Setiap hubungan Direksi dengan Dewan Komisaris dalam rangka tugas dan tanggung jawab masing-masing di dalam pengelolaan Perseroan merupakan hubungan yang bersifat formal atau harus senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka menjaga independensi Direksi sebagai salah satu Organ Perusahaan.

INDEPENDENCE OF THE BOARD OF DIRECTORS IN COMPANY MANAGEMENT

As stated in the Board of Directors' board manual, the Company has established matters that need to be maintained by the Board of Directors in managing the Company, including the following:

1. Board of Directors are obliged to make policies or decisions on any issues that arise based on independent considerations.
2. Every relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners in the context of their respective duties and responsibilities in the management of the Company is a formal relationship or shall continuously be based on a mechanism or correspondence that can be accounted for in order to maintain the independence of the Board of Directors as one of the Company's organs.

Aspek Independensi Aspects of Independency	**Hadian Pramudita**	**Hartanto Karti Raharjo**	**Tomo Dwihasputro**	**Dwi Purnomo**	**Bagus Tri Setyana**
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perseroan Does not have a shareholding relationship in the Company	√	-	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham, Dewan Komisaris, Direksi dan/ atau sesama anggota Direksi Does not have a family relationship with shareholders, the Board of Commissioners, the Board of Directors, and/or fellow members of the Board of Directors.	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham, Dewan Komisaris, Direksi dan/ atau sesama anggota Direksi Does not have a financial relationship with shareholders, the Board of Commissioners, the Board of Directors, and/or fellow members of the Board of Directors	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Does not hold a position as an official in a political party, government, or public office	√	√	√	√	√

ETIKA JABATAN

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Direksi berpedoman pada Pedoman tata kerja Direksi dimana tertuang prinsip-prinsip berikut ini:

1. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan;
2. Direksi harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perusahaan, Panduan *Good Corporate Governance, Code of Conduct* serta kebijakan Perusahaan yang telah ditetapkan;
3. Direksi dilarang untuk memberikan, menawarkan atau menerima baik langsung maupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada klien atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan selain gaji, tunjangan dan kompensasi berbasis saham yang diterimanya sebagai anggota direksi berdasarkan keputusan RUPS;
5. Setiap Direksi wajib menghormati hak, tugas dan wewenang Direksi lainnya;
6. Direksi menjauhi tindakan-tindakan yang dapat merusak hubungan kerja di antara Direksi dan hubungan kerja dengan Komisaris;
7. Direksi harus mampu menjadikan dirinya sebagai teladan yang baik bagi karyawan Perusahaan, baik dari segi integritas, moral maupun kecakapan;
8. Direksi bertanggung jawab kepada Perusahaan untuk menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan;
9. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Direksi harus tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam pedoman kerja Direksi.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Direksi mempunyai hak dan wewenang antara lain:

1. Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan Perseroan;

ETHICS OF THE POSITION

In carrying out their duties and functions, the Board of Directors adheres to the Board of Directors' work guidelines, which outline the following principles:

1. Each member of the Board of Directors is obliged to carry out their duties in good faith and with full responsibility for the interests and business of the Company;
2. Board of Directors shall comply with prevailing laws and regulations, the Company's Articles of Association, Good Corporate Governance guidelines, the Code of Conduct, and established Company policies;
3. Board of Directors are prohibited from giving, offering, or accepting, either directly or indirectly, anything of value to a client or a government official to influence or as a reward for what they have done, and other actions that contravene prevailing laws and regulations;
4. Board of Directors are prohibited from taking personal advantage of Company activities other than the salary, allowances, and share-based compensation they receive as members of the board of directors based on decisions of the General Meeting of Shareholders;
5. Each Board of Director is obliged to respect the rights, duties, and authority of other Directors;
6. Board of Directors shall refrain from actions that could damage working relationships among Directors and working relationships with Commissioners;
7. Board of Directors must be able to set a good example for Company employees, both in terms of integrity, morality, and competence;
8. Board of Directors are responsible to the Company for maintaining the confidentiality of Company information;
9. Confidential information obtained while serving as a member of the Board of Directors shall remain confidential in accordance with prevailing laws and regulations.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors is responsible for carrying out all actions related to management for the benefit of the Company, in accordance with the Company's intent and purpose, and for representing the Company both in and out of court in all matters and events, with the limitations as stipulated in the Board of Directors' board manual.

In carrying out these duties, the Board of Directors has the rights and authority, among others, to:

1. Determine policies deemed appropriate in the management of the Company;

2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang yang ditunjuk untuk itu termasuk karyawan Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan/atau badan lain;
3. Mengatur ketentuan tentang karyawan termasuk penetapan upah, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengangkat dan memberhentikan karyawan Perseroan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan;
5. Mengangkat atau memberhentikan Sekretaris Perusahaan atau Kepala Satuan Pengawas Intern dengan persetujuan Dewan Komisaris;
6. Menghapusbukukan piutang macet dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan;
7. Tidak menagih lagi piutang bunga, denda, ongkos dan piutang lainnya di luar pokok yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian piutang serta melakukan perbuatan lain dalam rangka penyelesaian piutang perusahaan dengan kewajiban melaporkan kepada Dewan Komisaris yang ketentuan dan tata cara pelaporannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris;

8. Melakukan segala Tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar serta keputusan RUPS

2. Regulate the delegation of the Board of Directors' authority to represent the Company in and out of court to one or more persons appointed for that purpose, including Company employees, individually or jointly, and/or other bodies;
3. Regulate provisions concerning employees, including the determination of wages, pensions or old-age benefits, and other income for Company workers based on prevailing laws and regulations;
4. Appoint and dismiss Company employees based on Company labor regulations and laws and regulations;

5. Appoint or dismiss the Corporate Secretary or Head of the Internal Audit Unit with the approval of the Board of Commissioners;

6. Write off bad debts in accordance with the provisions stipulated in these Articles of Association, which are subsequently reported to the Board of Commissioners and further reported and accounted for in the Annual Report;
7. Not pursue interest, penalties, costs, and other receivables beyond the principal amount, which are carried out in the context of debt restructuring and/or settlement, and to take other actions in the context of resolving company receivables, with the obligation to report to the Board of Commissioners, the provisions and procedures for which are determined by the Board of Commissioners;
8. Take all actions and other actions regarding the management and ownership of the Company's assets, bind the Company with other parties and/or other parties with the Company, and represent the Company in and out of court in all matters and events with limitations as stipulated in laws and regulations, the Articles of Association, and decisions of the General Meeting of Shareholders.

KOMPOSISI DIREKSI

Komposisi dan jumlah Direksi Perseroan kini telah memenuhi peraturan yang berlaku yakni Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik pasal 2 ayat 1 dimana Direksi Emiten atau Perusahaan Publik paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi. Komposisi Direksi Perusahaan telah memenuhi ketentuan ini yang berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari: 1 (satu) Direktur Utama dan 4 (empat) direktur. Penjelasan terkait dengan komposisi Direksi telah dijelaskan pada tabel di bawah ini:.

COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

The current composition and number of the Company's Board of Directors meet the prevailing regulations, namely OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, Article 2 paragraph 1, where the Board of Directors of an Issuer or Public Company consists of at least 2 (two) members of the Board of Directors. The composition of the Company's Board of Directors meets these provisions, totaling 5 (five) people, consisting of: 1 (one) President Director and 4 (four) directors. An explanation regarding the composition of the Board of Directors is provided in the table below:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Hadian Pramudita	Direktur Utama President Director	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 19 April 2022 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 5 tanggal 19 April 2022.
Hartanto Karti Raharjo	Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko Director of Finance, Human Capital and Risk Management	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 20 Mei 2024 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 8 tanggal 20 Mei 2024. Decision of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) dated April 19, 2022, and confirmed in Deed Number 5 dated April 19, 2022.
Tomo Dwi Hasputro	Direktur Quality, Health, Safety, Environment dan Pemasaran Director of Quality, Health, Safety, Environment, and Marketing	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 20 Mei 2024 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 8 tanggal 20 Mei 2024. Decision of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) dated May 20, 2024, and confirmed in Deed Number 8 dated May 20, 2024.
Bagus Tri Setyana	Direktur Operasi I Operations Director I	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 28 Juli 2020 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 51 tanggal 28 Juli 2020. Decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) dated July 28, 2020, and confirmed in Deed Number 51 dated July 28, 2020.
Dwi Purnomo	Direktur Operasi II Operations Director II	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 10 Mei 2023 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 2 tanggal 10 Mei 2023. Decision of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) dated May 10, 2023, and confirmed in Deed Number 2 dated May 10, 2023.

PEMBAGIAN TUGAS DIREKSI DAN NOMENKLATUR JABATAN

Seperti yang tertuang dalam Pedoman Kerja Direksi, Perseroan telah menetapkan komposisi Perusahaan terdiri dari Direktur Utama, Direktur Operasi I, Direktur Operasi II, Direktur Quality, Health, Safety, Environment dan Pemasaran, serta Direktur keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko.

Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan No. SK.01.01/A.DIR.WG.09838/2024 tanggal 1 Agustus 2024 tentang Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi PT WIjaya Karya Bangunan Gedung Tbk yang dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

DIVISION OF DUTIES OF THE BOARD OF DIRECTORS AND JOB TITLES

As stated in the Board of Directors' Board Manual, the Company has established a composition consisting of the President Director, Operations Director I, Operations Director II, Director of Quality, Health, Safety, Environment, and Marketing, as well as Director of Finance, Human Capital, and Risk Management.

The division of duties and authorities of the members of the Board of Directors is determined based on the Decree No. SK.01.01/A.DIR.WG.09838/2024 dated August 1, 2024, concerning the Division of Duties and Responsibilities of the Board of Directors of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, which is explained in the following table:

Nama Name	Jabatan Name	Bidang Penugasan Area of Assignment
Hadian Pramudita	Direktur Utama President Director	• Mengkoordinasikan dan mengoptimalkan peran serta fungsi di antara anggota Direksi, mengelola, mengembangkan, dan menumbuhkan usaha Perseroan sesuai dengan visi, misi rencana strategis dan target Perseroan, serta senantiasa mengupayakan peningkatan sinergi sumber daya yang dimiliki Perseroan secara efisien dan efektif; dan • Melakukan pengurusan dan pembinaan untuk fungsi di bawahnya, dalam hal ini Sekretariat Perseroan dan Pengawas Intern. • Coordinating and optimizing the roles and functions among members of the Board of Directors, managing, developing, and growing the Company's business in accordance with the Company's vision, mission, strategic plans, and targets, and continuously striving to improve the synergy of the Company's resources efficiently and effectively; and • Conducting management and development for the functions under their responsibility, in this case, the Company Secretariat and Internal Audit.

Nama Name	Jabatan Name	Bidang Penugasan Area of Assignment
Bagus Tri Setyana	Direktur Operasi I Operations Director I	Melakukan pengurusan dan pembinaan untuk fungsi di bawahnya, dalam hal ini *Operation Division, Operation and Modular Division* serta Pembinaan Anak Perusahaan Perseroan dan Entitas Asosiasi Perseroan yaitu PT Patra Wijaya Realtindo. Conducting management and development for the functions under their responsibility, in this case, the Operation Division, Operation and Modular Division, and the development of the Company's Subsidiaries and Associated Entities, namely PT Patra Wijaya Realtindo.
Dwi Purnomo	Direktur Operasi II Operations Director II	Melakukan pengurusan dan pembinaan untuk fungsi di bawahnya, dalam hal ini *Operation* and *Concession Division, Transformation and Business Portfolio Development Division, Information Technology Division* serta Pembinaan Anak Perusahaan dan Entitas Asosiasi Perseroan, yakni PT Wijaya Karya Pracetak Gedung, PT WEGE Solusi Proklamasi dan PT Wijaya Karya Bitumen. Conducting management and development for the functions under their responsibility, in this case, the Operation and Concession Division, Transformation and Business Portfolio Development Division, Information Technology Division, and the development of the Company's Subsidiaries and Associated Entities, namely PT Wijaya Karya Pracetak Gedung, PT WEGE Solusi Proklamasi, and PT Wijaya Karya Bitumen.
Tomo Dwi Hasputro	Direktur Quality, Health, Safety, Environment dan Pemasaran Director of Quality, Health, Safety, Environment, and Marketing	Melakukan pengurusan dan pembinaan untuk fungsi di bawahnya, dalam hal ini Quality, Safety, Health and Environment Division, Supply Chain Management Division, Engineering Division serta *Marketing Division.* *Conducting management and development for the functions under their responsibility, in this case, the Quality, Safety, Health and Environment Division, Supply Chain Management Division, Engineering Division, and Marketing Division.*
Hartanto Karti Raharjo	Direktur Keuangan, *Human Capital* dan Manajemen Risiko Director of Finance, Human Capital, and Risk Management	Melakukan pengurusan dan pembinaan untuk fungsi dibawahnya, dalam hal ini *Finance Division, Human Capital Division* dan *Project Management Office and Risk Management Division* serta *Legal and Contract Management Division.* *Conducting management and development for the functions under their responsibility, in this case, the Finance Division, Human Capital Division, and Project Management Office and Risk Management Division, as well as the Legal and Contract Management Division.*

JENIS KEPUTUSAN YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN DIREKSI

Pedoman Tata Kelola dan Pedoman kerja Perseroan memiliki beberapa keputusan yang membutuhkan persetujuan Direksi diantaranya sebagai berikut:

1. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
2. Rencana Kerja Jangka Panjang Perusahaan (RJPP);
3. Struktur Organisasi Perusahaan;
4. Penyertaan modal dan pelepasan penyertaan modal;
5. Pendirian Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan;
6. Penerimaan pinjaman jangka menegah atau panjang;
7. Pemberian pinjaman jangka pendek/menengah/panjang yang tidak bersifat operasional, kecuali pinjaman kepada Anak Perusahaan;
8. Aksi Korporasi;
9. Kebijakan Strategis Perusahaan;
10. Pengambilan keputusan lainnya yang terkait dengan fungsi pengelolaan Perusahaan.

TYPES OF DECISIONS REQUIRING APPROVAL FROM THE BOARD OF DIRECTORS

The Corporate Governance Guidelines and Company's Board Manual outline several decisions that require approval from the Board of Directors, including the following:

1. Company Work Plan and Budget (RKAP);
2. Company Long-Term Work Plan (RJPP);
3. Company Organizational Structure;
4. Capital investment and divestment;
5. Establishment of Subsidiaries and Joint Ventures;
6. Acceptance of medium-term or long-term loans;
7. Granting of short-term/medium-term/long-term loans that are non-operational, except for loans to Subsidiaries;
8. Corporate Actions;
9. Company Strategic Policies;
10. Other decision-making related to the Company's management function.

RAPAT DIREKSI

Rapat Direksi merupakan pertemuan yang dilakukan oleh Direksi Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya untuk membuat berbagai keputusan bisnis, mengevaluasi kinerja Perusahaan dan menetapkan berbagai kebijakan dalam pengurusan Perusahaan.

Sesuai dengan Pedoman Kerja Direksi, Perseroan menetapkan kebijakan penyelenggaraan rapat Direksi diantaranya sebagai berikut:

- Rapat Direksi wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh Direktur Utama atau oleh seorang atau lebih anggota Direksi lainnya atau atas permintaan dari Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama atau bilamana berhalangan hadir, Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang Direktur yang dipilih oleh para anggota Direksi yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat Direksi.
- Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.

Sepanjang tahun 2024, Perseroan telah menyelenggarakan sebanyak 7 (tujuh) Kali rapat Direksi. Frekuensi dan tingkat kehadiran Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors' Meetings are meetings held by the Company's Board of Directors related to their duties and functions to make various business decisions, evaluate Company performance, and establish various policies in the management of the Company.

In accordance with the Board of Directors' Board Manual, the Company establishes policies for holding Board of Directors' meetings, including the following:

- Board of Directors' meetings must be held regularly at least once (1) in each month or at any time deemed necessary by the President Director or by one or more other members of the Board of Directors or at the request of the Board of Commissioners or at the written request of one (1) or more shareholders who together represent 1/10 (one-tenth) of the total number of shares with valid voting rights.
- Board of Directors' meetings are chaired by the President Director or, if they are unable to attend, the Board of Directors' meeting will be chaired by one of the Board of Directors selected by the members of the Board of Directors present and or represented at the Board of Directors meeting.
- Board of Directors' meetings are valid and have the right to make binding decisions if more than ½ (one-half) of the total number of the Board of Directors are present or represented at the meeting.

Throughout 2024, the Company held a total of 7 (seven) Board of Directors meetings. The frequency and attendance rate of the Company's Board of Directors are as follows:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Rapat Internal** Internal Meeting		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	**Jumlah Kehadiran** Number of Attendance	**Tingkat Kehadiran (%)** Attendance Level (%)
Menjabat hingga akhir tahun buku 2024 Serving until the end of the 2024 fiscal year				
Hadian Pramudita	Direktur Utama President Director	7	7	100
Bagus Tri Setyana	Direktur Operasi I Operations Director I	7	7	100
Dwi Purnomo	Direktur Operasi II Operations Director II	7	7	100
Tomo Dwi Hasputro	Direktur Quality, Health, Safety, Environment dan Pemasaran Director of Quality, Health, Safety, Environment and Marketing	7	7	
Hartanto Karti Raharjo	Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko Director of Finance, Human Capital and Risk Management	7	7	100

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Internal Internal Meeting		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Tingkat Kehadiran (%) Attendance Level (%)
Digantikan sebelum tahun buku 2024 berakhir Replaced before the end of the 2024 fiscal year				
Syailendra Ogan	Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko Director of Finance, Human Capital and Risk Management	-	-	-
Akhmadi Tricahyono	Direktur Operasi II Operations Director II	-	-	-

RISALAH RAPAT

Mengacu pada pedoman kerja, hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan wajib didokumentasikan dengan baik sesuai dengan ketentuan regulasi terkait. Perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* yang terjadi dalam Rapat Direksi, wajib dicantumkan secara tertulis dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah terhadap semua anggota Direksi dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi di Rapat. Risalah dan daftar Direksi yang hadir dalam rapat internal Direksi yang dilaksanakan sepanjang tahun buku 2024 adalah sebagai berikut:

MINUTES OF MEETING

Referring to the board manual, the results of the Board of Directors' meetings must be recorded in the Minutes of Meeting, which are signed by all members of the Board of Directors present and must be well-documented in accordance with relevant regulatory provisions. Differences of opinion (dissenting opinions) that occur in the Board of Directors meetings must be stated in writing in the Minutes of Meeting along with the reasons for the differences of opinion.

The Board of Directors' Meeting Minutes are valid evidence for all members of the Board of Directors and third parties regarding decisions and all matters that occur at the Meeting. The minutes and list of Directors present at the internal Board of Directors meetings held throughout the 2024 fiscal year are as follows:

No	Tanggal Date	No. Risalah Rapat Number of the Minutes of Meeting	Agenda Agenda	Peserta Participant
1	12 Agustus 2024 August 12, 2024	RIS.05/A.DIR. WG.10117/2024	1. Patra Wijaya Realtindo 2. Pembahasan Progress Pengurusan BAST Kedua Proyek Pullman 3. Perkembangan Pengurusan Termin Proyek Park Mall Semarang & Kendari 4. Pembahasan Progess Proyek Lamongan 1. Patra Wijaya Realtindo 2. Discussion of the Progress of Handling the Second Acceptance Certificate (BAST) of the Pullman Project 3. Development of the Handling of the Park Mall Semarang & Kendari Project Installments 4. Discussion of the Progress of the Lamongan Project	Hadian Pramudita Hartanto Karti Raharjo Tomo Dwi Hasputro Bagus Tri Setyana Dwi Purnomo
2	12 Agustus 2024 August 12,2024	RIS.05/A.DIR. WG.10230/2024	CSR Grand Design	Hadian Pramudita Hartanto Karti Raharjo Tomo Dwi Hasputro Bagus Tri Setyana Dwi Purnomo

No	Tanggal Date	No. Risalah Rapat Number of the Minutes of Meeting	Agenda Agenda	Peserta Participant
3	19 Agustus 2024 August 19, 2024	RIS.05/A.DIR. WG.10385/2024	1. Pembagian Wilayah Operasi & Direktorat Operasi Proyek Berjalan 2. Pembagian Tugas Direksi Pembinaan Perusahaan Anak dan Asosiasi 1. Division of Operational Areas & Directorate of Ongoing Project Operations 2. Division of Duties of the Board of Directors for the Development of Subsidiaries and Associations	Hadian Pramudita Hartanto Karti Raharjo Tomo Dwi Hasputro Bagus Tri Setyana Dwi Purnomo
4	21 Agustus 2024 August 21, 2024	Nomor: RIS.05/A.DIR. WG.10524/2024	Pembahasan Aset Lahan dan Konsesi Discussion of Land Assets and Concessions	Hadian Pramudita Hartanto Karti Raharjo Tomo Dwi Hasputro Bagus Tri Setyana Dwi Purnomo
5	4 September 2024 September 4, 2024	Nomor: RIS.05/A.DIR. WG.10955/2024	Pembahasan GOR Jakarta Timur Discussion of the East Jakarta Sports Hall	Hadian Pramudita Hartanto Karti Raharjo Tomo Dwi Hasputro Bagus Tri Setyana Dwi Purnomo
6	26 November 2024 November 26, 2024	Nomor: MJ.01.00/A. DIR.00002. WEGE/2024	1. Pembahasan Program Tiga Juta Rumah 2. Migrasi SAP WEGE 1. Discussion of the Three Million 2. Houses Program	Hadian Pramudita Hartanto Karti Raharjo Tomo Dwi Hasputro Bagus Tri Setyana Dwi Purnomo
7	4 Desember 2024 December 4, 2024	Nomor: MJ.01.00/A. DIR.00004. WEGE/2024	Pembahasan Visi dan Misi Perusahaan Discussion of the Company's Vision and Mission	Hadian Pramudita Hartanto Karti Raharjo Tomo Dwi Hasputro Bagus Tri Setyana Dwi Purnomo

PROGRAM ORIENTASI DIREKSI

Perseroan mengikutsertakan anggota Direksi Baru dalam program orientasi untuk memberikan pemahaman tentang Perseroan sehingga anggota Direksi baru tersebut dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi dengan sebaik-baiknya.

Program orientasi ini dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke fasilitas Perseroan, atau program lainnya. Program Pengenalan tersebut meliputi :

- Prinsip-prinsip dan implementasi GCG
- Gambaran Perusahaan secara lengkap
- Penjelasan terkait kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta komite audit
- Penjelasan terkait tugas dan tanggung jawab Komisaris dan Direksi
- Berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perusahaan

Pada tahun 2024, Perseroan menyelenggarakan sebanyak 1 (satu) kali program orientasi bagi anggota Direksi baru yaitu Hartanto Karti Raharjo dan Tomo Dwi Hasputro.

ORIENTATION PROGRAM OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Company includes the new members of the Board of Directors in an orientation program to provide an understanding of the Company so as to these new members of the Board of Directors can carry out their duties and responsibilities as members of the Board of Directors as well as possible.

This orientation program can take the form of presentations, meetings, visits to Company facilities, or other programs. The introduction program includes:

- Principles and implementation of GCG
- A complete overview of the Company
- Explanation of delegated authority, internal and external audits, internal control systems and policies, and the audit committee
- Explanation of the duties and responsibilities of the Commissioners and Directors
- Various prevailing laws and regulations and Company policies

In 2024, the Company held an orientation program for new members of the Board of Directors, namely Hartanto Karti Raharjo and Tomo Dwi Hasputro, once (1) time.

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI

Sebagaimana diatur dalam *Board Manual*, anggota Direksi perlu secara konsisten menambah dan memperbarui pengetahuan untuk mendukung pelaksanaan tugas pengurusan dan pengelolaan Perseroan. Untuk mendukung hal tersebut, Perseroan menyediakan program pengembangan diri bagi Direksi dengan agenda dan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik Direksi serta kebutuhan strategis Perseroan.

Program pengembangan ini mengintegrasikan berbagai metode, termasuk self-study, workshop, seminar dan konferensi. Pendekatan tersebut dirancang untuk memberikan wawasan yang relevan dan meningkatkan efektivitas Direksi dalam melaksanakan fungsi kepemimpinan dan pengelolaan perusahaan secara optimal.

Adapun program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Direksi selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Training and Competency Development of the Board of Directors

As stipulated in the Board Manual, members of the Board of Directors need to consistently increase and update their knowledge to support the implementation of the Company's management and administration duties. To support this, the Company provides self-development programs for the Board of Directors with agendas and materials tailored to the specific needs of the Directors and the Company's strategic needs.

This development program integrates various methods, including self-study, workshops, seminars, and conferences. This approach is designed to provide relevant insights and enhance the effectiveness of the Board of Directors in carrying out their leadership and corporate management functions optimally.

The training and competency development programs attended by the Board of Directors during 2024 are as follows:

Nama Name	**Jabatan** Position		**Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi** Training and Competency Development		
	RUPSLB 29 Februari 2024 EGMS February 29, 2024	**RUPST 20 Mei 2024** AGMS May 20, 2024	**Nama** Name	**Waktu** Time	**Penyelenggara** Organizer
Menjabat Hingga Akhir Tahun 2024 Serving Until the End of 2024					
Hadian Pramudita	Direktur Utama President Director	Direktur Utama President Director	-	-	-
Bagus Tri Setyana	Direktur Operasi I Operations Director I	Direktur Operasi I Operations Director I	-	-	-
Dwi Purnomo*	Direktur Quality, Health, Safety, Environment dan Pemasaran Director of Quality, Health, Safety, Environment and Marketing	Direktur Operasi II Operations Director II	-	-	-
Hartanto Kartiraharjo	-	Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko Director of Finance, Human Capital, and Risk Management	Pelatihan dan Sertifikasi Certified Risk Governance Professional Training and Certification for Certified Risk Governance Professional	12-15 November 2024 November 12-15, 2024	PT Risk and Advisory Performance (RAP)
Tomo Dwihasputro	-	Direktur Quality, Health, Safety, Environment dan Pemasaran Director of Quality, Health, Environment and Marketing	Seminar Bulan K3 OSH Month Seminar	13 Februari 2024 February 13, 2024	QSHE Division PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

Nama Name	Jabatan Position		Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Training and Competency Development		
	RUPSLB 29 Februari 2024 EGMS February 29, 2024	RUPST 20 Mei 2024 AGMS May 20, 2024	Nama Name	Waktu Time	Penyelenggara Organizer
Digantikan Sebelum Tahun 2024 Berakhir Replaced Before the End of 2024					
Akhmadi Tricahyono	Direktur Operasi II Operations Director II	-	-	-	-
Syailendra Ogan	Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko Director of Finance, Human Capital, and Risk Management	-	-	-	-

PELAKSANAAN TUGAS DIREKSI TAHUN 2024

Sepanjang tahun 2024, Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai pedoman kerja dalam mengelola Perseroan, beberapa aktivitas yang telah dilakukan Direksi terdiri dari:

1. Penyusunan perencanaan Perseroan;
2. Pemenuhan target kinerja Perseroan;
3. Pengelolaan aset dan Keuangan;
4. Penyelenggaraan rapat Direksi selama tahun 2024 telah dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali Rapat Direksi;
5. Menghadiri Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi (Rakomdir);
6. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, di mana pada tahun 2024 terdapat 2 (dua) kali Rapat Umum Pemegang Saham yang terdiri dari 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada bulan Mei 2024 dan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada bulan Januari 2024;
7. Pengawasan dan perbaikan proses bisnis internal;
8. Penerapan dan pengawasan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha;
9. Penerapan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
10. Penyusunan Kebijakan dan Pedoman terkait Tata Kelola Terintegrasi;
11. Pelaksanaan tugas lainnya terkait pengurusan Perseroan.

IMPLEMENTATION OF THE BOARD OF DIRECTORS' DUTIES IN 2024

Throughout 2024, the Board of Directors has carried out its duties and responsibilities in accordance with the board manual for managing the Company. Some of the activities undertaken by the Board of Directors encompass:

1. Formulation of the Company's planning;
2. Fulfillment of the Company's performance targets;
3. Management of assets and finances;
4. Conducting the Board of Directors' meetings, with 7 (seven) Board of Directors' meetings conducted during 2024;
5. Attending Board of Commissioners Meetings involving the Board of Directors (Rakomdir);
6. Conducting General Meetings of Shareholders, where in 2024 there were 2 (two) General Meetings of Shareholders consisting of 1 (one) Annual General Meeting of Shareholders in May 2024 and 1 (one) Extraordinary General Meeting of Shareholders in January 2024;
7. Supervision and improvement of internal business processes;
8. Implementation and supervision of Good Corporate Governance in every business activity;
9. Implementation of ISO 37001:2016 concerning the Anti-Bribery Management System;
10. Formulation of Policies and Guidelines related to Integrated Governance;
11. Carrying out other duties related to the management of the Company.

Organ Pendukung Direksi

Supporting Organs of The Board of Directors

CORPORATE SECRETARY

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary)* merupakan orang perseorangan atau penanggung jawab dari unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan. Dalam rangka meningkatkan keterbukaan, layanan dan komunikasi kepada para pemangku kepentingan sebagai penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, peran *Corporate Secretary* sangat penting memastikan kelancaran komunikasi antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemangku kepentingan.

Landasan Hukum

Pembentukan *Corporate Secretary* Perseroan mengacu pada beberapa peraturan baik internal maupun eksternal, yakni:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35 /POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Publik atau Emiten;
2. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN pasal 29, sebagaimana telah diubah dengan PER-09/MBU/2012;
3. Pedoman Tata Kelola Perseroan;
4. Pedoman Kerja *(Board Manual).*

Struktur Organ Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan Perseroan berada langsung dibawah Direktur Utama dimana dalam setiap pelaksanaan fungsinya secara langsung dipertanggungjawabkan kepada Direktur Utama. Struktur organisasi Sekretaris Perusahaan mengacu kepada struktur organisasi Perusahaan yang dijelaskan di bab Profil Perusahaan.

Struktur Organisasi *Corporate Secretariat* Perseroan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK.01.01/A.DIR. WG.00802/2024 yang diterbitkan pada tanggal 18 Maret 2024.

CORPORATE SECRETARY

Corporate Secretary is an individual or the person in charge of the work unit that performs the functions of the corporate secretary. In order to enhance transparency, service, and communication with stakeholders as an implementation of the principles of good corporate governance by the Company, the role of the Corporate Secretary is very important in ensuring the smooth communication between the Issuer or Public Company and stakeholders.

Legal Basis

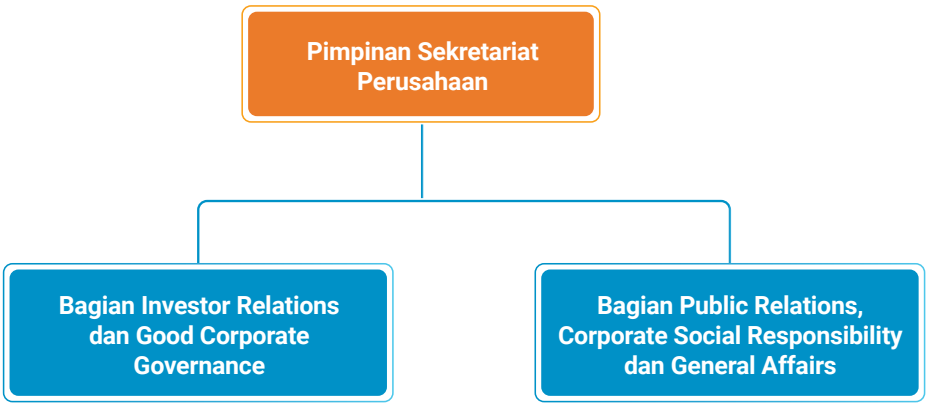
The establishment of the Company's Corporate Secretary refers to several internal and external regulations, namely:

1. Financial Services Authority Regulation No. 35/POJK.04/2014 concerning Corporate Secretaries of Public Companies or Issuers;
2. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises article 29, as amended by PER-09/MBU/2012;
3. Company Governance Guidelines;
4. Board Manual.

Organizational Structure of the Corporate Secretary

The Company's Corporate Secretary is directly under the President Director, to whom they are directly responsible for the performance of their functions. The organizational structure of the Corporate Secretary refers to the Company's organizational structure as described in the Company Profile chapter.

The Organizational Structure of the Company's Corporate Secretariat is determined based on the Decree of the Board of Directors No. SK.01.01/A.DIR.WG.00802/2024 issued on March 18, 2024.



Profil *Corporate Secretary*

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.02.01/A.DIR.WG.6328/2022 efektif sejak tanggal 27 Juli 2022, *Corporate Secretary* Perseroan dijabat oleh Purba Yudha Tama. Profil ringkas *Corporate Secretary* dapat dilihat di bab profil Perusahaan dari laporan tahunan ini .

Corporate Secretary Profile

Based on the Decree of the Board of Directors Number SK.02.01/A.DIR.WG.6328/2022 effective from July 27, 2022, the Company's Corporate Secretary is held by Purba Yudha Tama. A brief profile of the Corporate Secretary can be seen in the Company profile chapter of this annual report.

Profil Corporate Secretary
Profile of Corporate Secretary



Purba Yudha Tama
Corporate Secretary
Corporate Secretary

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Usia Age	41 tahun pada akhir tahun buku 2024 41 years at the end of the 2024 fiscal year
Riwayat Pendidikan Educational Background	Magister Applied Finance dari Universitas Binus, Jakarta (2023) Master of Applied Finance from Binus University, Jakarta (2023)
Pengalaman Kerja Professional Experience	• General Manager Investor Relations WIKA (2020- 2022) • Manajer Investor Relations WIKA (2019-2020) • Ahli Madya 2 Investor Relations WIKA (2018-2019). • General Manager Investor Relations WIKA (2020- 2022) • Manager Investor Relations WIKA (2019-2020) • Associate Expert 2 Investor Relations WIKA (2018-2019).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak 27 Juli 2022 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : SK.02.01/A.DIR.WG.6328/2022 Served as Corporate Secretary since July 27, 2022 based on the Decree of the Board of Directors Number: SK.02.01/A.DIR.WG.6328/2022.

Tugas dan Tanggung Jawab *Corporate Secretary*

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK.01.01/A.DIR.WG.00802/2024 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Perusahaan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk tanggal 18 Maret 2024, tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran Proyek (RKAP) Perseroan;
2. Terlaksananya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan *(Good Corporate Governance)*;
3. Terlaksananya publisitas perusahaan, protokoler serta komunikasi baik internal maupun eksternal;
4. Terwakilinya kepentingan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan nasional maupun internasional yang dapat meningkatkan citra perusahaan;
5. Penyelenggaran rapat tingkat perusahaan dan penyusunan risalah rapat perusahaan (Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Komisaris - Direksi, Rapat Direksi);

Duties and Responsibilities of the Corporate Secretary

Based on the Decree of the Board of Directors No. SK.01.01/A.DIR.WG.00802/2024 concerning the Organizational Structure of the Secretariat of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk dated March 18, 2024, the duties and responsibilities of the Corporate Secretary are as follows:

1. Preparation of the Company's Work Plan and Project Budget (RKAP);
2. Implementation of the principles of Good Corporate Governance;
3. Implementation of company publicity, protocol, and internal and external communication;
4. Representation of the company's interests in national and international activities that can enhance the company's image;
5. Organization of company-level meetings and preparation of company meeting minutes (General Meeting of Shareholders, Board of Commissioners - Board of Directors' Meeting, Board of Directors' Meeting);

6. Mengelola hubungan dan mengkomunikasikan berbagai aspek saham dan kinerja perusahaan serta laporan keuangan kepada pihak-pihak terkait seperti investor, calon investor, analis, *fund manager* dan masyarakat pasar modal pada umumnya;
7. Terlaksananya Sistem Manajemen Anti Penyuapan di lingkungan Perseroan;
8. Terintegrasinya pelayanan, bantuan, saran, dukungan dan audit (SASAA) di seluruh unit kerja/organ perusahaan lingkup Sekretariat Perusahaan;
9. Terlaksananya tertib administrasi termasuk didalamnya laporan bulanan, semesteran, tahunan sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya;
10. Terlaksananya pembinaan fungsi di lingkungannya dan Human Capital yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan arah perkembangan perusahaan;
11. Melakukan proses pembinaan terhadap profesionalisme/keahlian bagi personil yang memiliki sertifikasi keahlian;
12. Terlaksananya penerapan Sistem Manajemen Perseroan beserta turunannya dalam setiap aktivitas pekerjaan di lingkungan kerjanya;
13. Terlaksananya digitalisasi proses bisnis di Perseroan;
14. Melaksanakan aktivitas *Coaching* dan *Mentoring* secara aktif terhadap minimal personil satu level di bawahnya; dan
15. Melakukan proses penyiapan kader "pengganti" (suksesi) pada satu level di bawahnya dan ahli.

Sedangkan, berdasarkan POJK No. 35/POJK.04/2014, *Corporate Secretary* memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
   a. keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
   b. penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
   c. penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
   d. penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
   e. pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

6. Managing relations and communicating various aspects of shares and company performance as well as financial reports to related parties such as investors, potential investors, analysts, fund managers and the capital market community in general;
7. Implementation of the Anti-Bribery Management System within the Company;
8. Integration of service, assistance, advice, support and audit (SASAA) in all work units/company organs within the scope of the Company Secretariat;
9. Implementation of orderly administration including monthly, semi-annual, annual reports in accordance with the scope of responsibilities;
10. Implementation of functional development in its environment and Human Capital that is the responsibility in accordance with the direction of company development;
11. Conducting a coaching process towards professionalism/ expertise for personnel who have expertise certification;
12. Implementation of the Company's Management System and its derivatives in every work activity in its work environment;
13. Implementation of business process digitalization in the Company;
14. Actively carrying out Coaching and Mentoring activities towards at least one level below its personnel; and,
15. Conducting the process of preparing "replacement" cadres (succession) at one level below and experts.

Meanwhile, based on POJK No. 35/POJK.04/2014, the Corporate Secretary has the following duties and responsibilities:
1. Monitoring the development of the Capital Market, especially the prevailing laws and regulations in the field of Capital Market;
2. Providing input to the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies to comply with the provisions of laws and regulations in the field of Capital Market;
3. Assisting the Board of Directors and Board of Commissioners in the implementation of corporate governance which includes:
   a. disclosure of information to the public, including the availability of information on the Issuer's or Public Company's Website;
   b. timely submission of reports to the Financial Services Authority;
   c. organization and documentation of the General Meeting of Shareholders;
   d. organization and documentation of the Board of Directors and/or Board of Commissioners meetings; and
   e. implementation of orientation programs for the company for the Board of Directors and/or Board of Commissioners.
4. As a liaison between the Issuer or Public Company and the shareholders of the Issuer or Public Company, the Financial Services Authority, and other stakeholders.

Pelatihan Dan Pengembangan Kompetensi *Corporate Secretariat*

Perseroan menyediakan program peningkatan kompetensi bagi *Corporate Secretary* dan personel di bawah koordinasi *Corporate Secretary.* Program ini dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara optimal, selaras dengan kebutuhan strategis dan dinamika perkembangan Perseroan.

Adapun program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang diikuti oleh *Corporate Secretary* serta personel di bawah koordinasi *Corporate Secretary* selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Training And Competency Development Of The Corporate Secretariat

The Company provides competency improvement programs for the Corporate Secretary and personnel under the coordination of the Corporate Secretary. This program is designed to support the implementation of duties and responsibilities optimally, in line with the strategic needs and dynamic development of the Company.

The training and competency development programs attended by the Corporate Secretary and personnel under the coordination of the Corporate Secretary during 2024 are as follows:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Pelatihan Dan Pengembangan Kompetensi Corporate Secretariat** Training and Competency Development of the Corporate Secretariat		
		Nama Name	**Waktu** Time	**Penyelenggara** Organizer
Purba Yudha Tama	Corporate Secretary	Seminar Bulan K3 Occupational Safety and Health Month Seminar	13 Februari 2024 February 13, 2024	QSHE Division Pt Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk
		Pelatihan Environmental, Social and Governance (ESG) Awareness Environmental, Social and Governance (ESG) Awareness Training	15 Maret 2024 March 15, 2024	PT DGI Levner Consulting
Firlan	Manager Of Public Relations, CSR And General Affair Department	Assessment Soft Competency 10-12 Januari 2024 Assessment Soft Competency 10-12 Januari 2024	10-12 Januari 2024 January 10-12, 2024	PPM MANAJEMEN
		Seminar Bulan K3 Occupational Safety and Health Month Seminar	13 Februari 2024 February 13, 2024	QSHE Division PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk
		Feed Forward Assessment Soft Competency	26-29 Februari 2024 February 26-29, 2024	PPM MANAJEMEN
		Pelatihan Environmental, Social and Governance (ESG) Awareness Environmental, Social and Governance (ESG) Awareness Training	15 Maret 2024 March 15, 2024	PT DGI Levner Consulting
Adimas Anggoro P	Manager Of Investor Relation And Good Corporate Governance Department	Assessment Soft Competency 10-12 Januari 2024	10-12 Januari 2024 January 10-12, 2024	PPM Manajemen
		Seminar Bulan K3 Occupational Safety and Health Month Seminar	13 Februari 2024 February 13, 2024	QSHE Division PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk
		Feed Forward Assessment Soft Competency	26-29 Februari 2024 February 26-29, 2024	PPM MANAJEMEN
		Pelatihan Environmental, Social and Governance (ESG) Awareness Environmental, Social and Governance (ESG) Awareness Training	15 Maret 2024 March 15, 2024	PT DGI Levner Consulting
		Pelatihan Dan Sertifikasi Certified Securities Analyst Training and Certified Securities Analyst	3 Agustus-5 Oktober 2024 August 3 - October 5, 2024	CSA Institute

Nama Name	Jabatan Position	Pelatihan Dan Pengembangan Kompetensi Corporate Secretariat Training and Competency Development of the Corporate Secretariat		
		Nama Name	Waktu Time	Penyelenggara Organizer
Saidul Ulum	Junior Expert Public Relations, Csr And General Affair Department	Talkshow Bulan K3 Occupational Safety and Health Month Talkshow	13 Februari 2024 February 13, 2024	Qshe Division Pt Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk
		Pelatihan How To Be An Attractive MC How To Be An Attractive MC Training	7 Maret 2024 March 7, 2024	Sekretariat Perusahaan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
		Assessment Soft Competency Experd Juli Assessment Soft Competency Experd July	22-31 Juli 2024 July 22-31, 2024	Experd Consultant
		Pelatihan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan Awareness SNI ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System Awareness Training	15 Agustus 2024 August 15, 2024	PT SUCOFINDO
Rafli Dinansah	Junior Expert Investor Relation And Good Corporate Governance Department	Pelatihan How To Be An Attractive MC How To Be An Attractive MC Training	7 Maret 2024 March 7, 2024	Sekretariat Perusahaan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
		Uji Keahlian Internal Hard Competency Internal Hard Competency Test	4-12 Juni 2024 June 4-12, 2024	PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
		Menggiatkan Kompetensi Unggul Investor Relations Encouraging Superior Competence of Investor Relations	18 September 2024 September 18, 2024	Asosiasi Emiten Indonesia
		Pelatihan Basic Financial Modeling Basic Financial Modeling Training	16-30 November 2024 November 16-30, 2024	PPA FEB UI
Hendika Darma Listianto	Junior Expert Investor Relation And Good Corporate Governance Department	Pelatihan How To Be An Attractive MC How To Be An Attractive MC Training	7 Maret 2024 March 7, 2024	Sekretariat Perusahaan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
		Uji Keahlian Internal Hard Competency Internal Hard Competency Test	4-12 Juni 2024 June 4-12, 2024	PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
		Pelatihan Basic Financial Modeling Basic Financial Modeling Training	16-30 November 2024 November 16-30, 2024	PPA FEB UI
Ratih Perwita Sari	Staff Of Public Relations, CSR and General Affair Department	Assessment Soft Competency Experd Oktober Assessment Soft Competency Experd October	28 Oktober 2024 October 28, 2024	Experd
		Feed Forward Assessment Soft Competency Internal	9-20 Desember 2024 December 9-20, 2024	PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

Nama Name	Jabatan Position	Pelatihan Dan Pengembangan Kompetensi Corporate Secretariat Training and Competency Development of the Corporate Secretariat		
		Nama Name	Waktu Time	Penyelenggara Organizer
Yuniarmas	Staff Of Public Relations, Csr And General Affair Department	Pelatihan How To Be An Attractive MC How To Be An Attractive MC Training	7 Maret 2024 March 7, 2024	Sekretariat Perusahaan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
		Assessment Soft Competency Experd Oktober Assessment Soft Competency Experd October	28 Oktober 2024 October 28, 2024	Experd
		Feed Forward Assessment Soft Competency Internal	9-20 Desember 2024 December 9-20, 2024	PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk
Reny Agtriani	Staff Of Investor Relation And Good Corporate Governance Department	Talkshow Bulan K3 Occupational Safety and Health Month Talkshow	13 Februari 2024 February 13, 2024	QSHE Division PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk
		Pelatihan Environmental, Social and Governance (ESG) Awareness Environmental, Social and Governance (ESG) Awareness Training	15 Maret 2024 March 15, 2024	PT DGI Levner Consulting
		Pelatihan Supervisory Skill Skill Supervisory Training	5-15 Maret 2024 March 5-15, 2024	PT Wijaya Karya (PERSERO) Tbk.
		Assessment Soft Competency PPM Oktober Assessment Soft Competency PPM October	29 Juli-9 Agustus 2024 July 29 - August 9, 2024	PPM MANAJEMEN

Uraian Singkat Pelaksanaan Tugas Tahun 2024

Corporate Secretary bertugas untuk memastikan hubungan Perseroan dengan para pemangku kepentingan. Secara fungsional, *Corporate Secretary* melaporkan segala aktivitasnya kepada Direktur Utama. *Corporate Secretary* mempunyai kewenangan mewakili Direksi untuk mewakili Perseroan.

Pada tahun 2024, dalam pelaksanaan tugasnya, *Corporate Secretary* dibantu oleh fungsi-fungsi bagian dibawahnya. Adapun aktivitas yang dilaksanakan diantaranya sebagai berikut:

1. Fungsi Bagian Investor Relation & *Good Corporate Governance*
   a. Tersusunnya susunan kebijakan Perseroan dan kebijakan pokok serta anggaran perusahaan lingkup Investor Relations & Good Corporate Governance;
   b. Terbinanya hubungan baik dengan regulator, pemegang saham, perusahaan sekuritas, *asset management/fund manager*;
   c. Tersusunnya perencanaan dan terlaksananya Rapat Umum Pemegang Saham, beserta dokumentasi aktif terkait pelaksanaannya;
   d. Tersusunnya standar dan terlaksananya penyusunan *Annual Report* Perseroan dengan bidang-bidang terkait;

Brief Description of Duties Implementation in 2024

The Corporate Secretary is responsible for ensuring the Company's relationship with stakeholders. Functionally, the Corporate Secretary reports all its activities to the President Director. The Corporate Secretary has the authority to represent the Board of Directors to represent the Company.

In 2024, in carrying out its duties, the Corporate Secretary is assisted by the functions of the sections below it. The activities carried out include:

1. Investor Relations & Good Corporate Governance Section Function
   a. Preparation of the Company's policy structure and main policies as well as the company's budget within the scope of Investor Relations & Good Corporate Governance;
   b. Fostering good relations with regulators, shareholders, securities companies, asset management/fund managers;
   c. Preparation and implementation of the General Meeting of Shareholders, along with active documentation related to its implementation;
   d. Preparation of standards and implementation of the preparation of the Company's Annual Report with related fields;

e. Tersusunnya analisa strategis dalam upaya meningkatkan citra perusahaan dalam kaitannya dengan peningkatan nilai saham Perseroan;
f. Tersusunnya standar presentasi Perseroan *(Corporate Presentation)* dalam lingkup *Corporate Secretary*;

g. Tersusunnya perencanaan dan terselenggaranya kepatuhan pelaksanaan peraturan *Good Corporate Governance (GCG)*;
h. Terlaksananya kendali terhadap kepatuhan kepatuhan undang-undang, peraturan dan etika berusaha diseluruh unit kerja Perseroan;
i. Terlaksananya Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di tingkat Perseroan
j. Terintegrasinya pelayanan, bantuan, saran, dukungan dan audit (SASAA) di seluruh unit kerja/organ perusahaan lingkup Sekretariat Perusahaan;
k. Terlaksananya tertib administrasi termasuk didalamnya laporan bulanan, semesteran, tahunan sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya;
l. Terlaksananya pembinaan fungsi di lingkungannya dan Human Capital yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan arah perkembangan perusahaan;
m. Melakukan proses pembinaan terhadap profesionalisme/ keahlian bagi personil yang memiliki sertifikasi keahlian;
n. Terlaksananya Penerapan Sistem Manajemen Perseroan beserta turunannya dalam setiap aktivitas pekerjaan di lingkungan kerjanya; dan
o. Terlaksananya Digitalisasi proses bisnis di Perseroan.

2. Fungsi Bagian Public Relations, Corporate Secretary (CSR) dan General Affairs
   a. Terselenggaranya komunikasi intern dan ekstern perusahaan, publisitas perusahaan secara efektif dan efisien;
   b. Merencanakan dan melaksanakan program tata kelola keberlanjutan perusahaan;
   c. Melakukan evaluasi dan mengembangkan program keberlanjutan perusahaan serta melakukan improvement terhadap sistem tata kelola keberlanjutan perusahaan;
   d. Menyusun, mereview, mengevaluasi dan meningkatkan kualitas laporan keberlanjutan sebagai salah satu strategi komunikasi perusahaan;
   e. Tersusunnya perencanaan dan pengendalian pembinaan usaha kecil dan koperasi serta pembinaan lingkungan, dalam rangka menjalankan fungsi *Corporate Social Responsibility,* serta pengendalian biaya unis usaha PKBL;

   f. Mengembangkan kinerja CSR/Program PKBL sesuai konsep keberlanjutan dan pertimbangan efisiensi biaya dan efektifitas program, merespon isu global serta meminimalkan risiko perusahaan;

e. Preparation of strategic analysis in an effort to enhance the company's image in relation to increasing the Company's share value;
f. Preparation of the Company's presentation standards (Corporate Presentation) within the scope of the Corporate Secretary;
g. Preparation of planning and implementation of compliance with Good Corporate Governance (GCG) regulations;
h. Implementation of control over compliance with laws, regulations and business ethics in all work units of the Company;
i. Implementation of the Anti-Bribery Management System (SMAP) at the Company level
j. Integration of service, assistance, advice, support and audit (SASAA) in all work units/company organs within the scope of the Company Secretariat;
k. Implementation of orderly administration including monthly, semi-annual, annual reports in accordance with the scope of its responsibilities;
l. Implementation of functional development in its environment and Human Capital that is its responsibility in accordance with the direction of company development;
m. Conducting a coaching process towards professionalism/ expertise for personnel who have expertise certification;
n. Implementation of the Company's Management System and its derivatives in every work activity in its work environment; and
o. Implementation of business process digitalization in the Company.

2. Public Relations, Corporate Secretary (CSR) and General Affairs Section Function
   a. Implementation of internal and external company communication, effective and efficient company publicity;
   b. Planning and implementing company sustainability governance programs;
   c. Evaluating and developing company sustainability programs and making improvements to the company's sustainability governance system;
   d. Preparing, reviewing, evaluating and improving the quality of sustainability reports as one of the company's communication strategies;
   e. Preparation of planning and control of small business and cooperative development as well as environmental development, in order to carry out the Corporate Social Responsibility function, as well as control of PKBL business unit costs;
   f. Developing CSR/PKBL Program performance in accordance with the concept of sustainability and consideration of cost efficiency and program effectiveness, responding to global issues and minimizing company risk;

g. Tersusunnya kebijakan perusahaan dan kebijakan pokok serta anggaran perusahaan lingkup Hubungan Masyarakat, Kesekretariatan dan Umum;
h. Kendali administrasi dokumen masuk dan keluar perusahaan, pelayanan kesekretariatan tingkat perusahaan, upacara terkait dengan protokoler perusahaan;
i. Terselenggaranya Kesekretariatan dan Umum secara efektif dan efisien;
j. Terlaksananya tugas-tugas keprotokolan bagi pihak intern dan ekstern. Acara-acara perusahaan dan rapat perusahaan, serta jasa pelayanan akomodasi;
k. Terlaksananya peredaran dan pengarsipan dokumen/surat-surat masuk/keluar secara tertib dan tepat waktu secara efektif dan efisien;
l. Terlaksananya pembinaan, pengembangan dan koordinasi terhadap Sekretaris Direksi untuk mengoptimalkan dalam mendukung kegiatan operasional Direksi;
m. Terlaksananya pelayanan yang terkait dengan penyedia alat tulis kantor (ATK), ruang rapat, konsumsi rapat, protokoler acara perusahaan, air conditioner (AC), telepon, listrik, air bersih, lift, keamanan dan ruang kerja;
n. Terlaksananya pelayanan, bantuan, saran, dukungan dan audit (SASAA) diseluruh unit kerja/organ perusahaan lingkup Sekretariat Perusahaan;
o. Terintegrasinya pelayanan, bantuan, saran dukungan dan audit (SASAA) di seluruh unit kerja/organ perusahaan lingkup Sekretariat Perusahaan;
p. Terlaksananya tertib administrasi termasuk didalamnya laporan bulanan, semesteran, tahunan sesuai dengan lingkup Sekretariat Perusahaan;
q. Terlaksananya pembinaan fungsi di lingkungannya dan Human Capital yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan arah perkembangan perusahaan;
r. Melakukan proses pembinaan fungsi di lingkungannya dan Human Capital yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan arah perkembangan perusahaan;
s. Terlaksananya penerapan Sistem Manajemen Perseroan beserta turunannya dalam setiap aktivitas pekerjaan di lingkungan kerjanya;
t. Terlaksananya digitalisasi proses bisnis di Perseroan.

HUBUNGAN INVESTOR

Dalam menjalankan tugasnya, *Corporate Secretary* Perseroan juga menangani fungsi Hubungan Investor atau sebagai penghubung Perseroan dengan investor maupun potential investor, pemegang saham, broker institusi, manajer investasi dan para analis.

g. Preparation of company policies and main policies as well as company budget within the scope of Public Relations, Secretariat and General Affairs;
h. Control of incoming and outgoing company documents, company-level secretariat services, ceremonies related to company protocol;
i. Implementation of Secretariat and General Affairs effectively and efficiently;
j. Implementation of protocol duties for internal and external parties. Company events and company meetings, as well as accommodation services;
k. Implementation of the circulation and filing of incoming/outgoing documents/letters in an orderly and timely manner effectively and efficiently;
l. Implementation of guidance, development and coordination of the Board of Directors' Secretary to optimize support for the Board of Directors' operational activities;
m. Implementation of services related to the provision of office stationery (ATK), meeting rooms, meeting consumption, company event protocol, air conditioners (AC), telephones, electricity, clean water, elevators, security and workspaces;
n. Implementation of service, assistance, advice, support and audit (SASAA) in all work units/company organs within the scope of the Company Secretariat;
o. Integration of service, assistance, advice, support and audit (SASAA) in all work units/company organs within the scope of the Company Secretariat;
p. Implementation of orderly administration including monthly, semi-annual, annual reports in accordance with the scope of the Company Secretariat;
q. Implementation of functional development in its environment and Human Capital that is the responsibility in accordance with the direction of company development;
r. Conducting the development of functions in its environment and Human Capital which is its responsibility in accordance with the direction of company development;
s. Implementing the application of the Company's Management System and its derivatives in every work activity in its work environment;
t. Implementing the digitalization of business processes in the Company.

INVESTOR RELATIONS

In carrying out its duties, the Company's Corporate Secretary also handles the Investor Relations function or acts as a liaison between the Company and investors or potential investors, shareholders, institutional brokers, investment managers and analysts.

Hubungan Investor berfungsi sebagai fungsi media komunikasi khususnya dengan analis hingga pasar modal untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang urusan Perseroan sehingga dapat membantu Perseroan dalam membuat keputusan yang tepat bagi investor yang akan berinvestasi di Perseroan.

Secara praktiknya aktivitas hubungan investor tetap memperhatikan prinsip kerahasiaan maupun perlakuan setara *(equal treatment)* bagi semua investor. Perseroan telah menyediakan informasi di website yang dapat diakses oleh semua investor atau calon investor dengan mengakses link ini, https://investor.wikagedung.co.id/?q=about_us.html. Selain itu, Perseroan juga menyediakan sarana surat menyurat perusahaan kepada masyarakat atau sebaliknya melalui email Investor Relation: investorrelations@wikagedung.id.

Adapun kegiatan Hubungan Investor Tahun 2024 secara ringkas adalah sebagai berikut:

Investor Relations functions as a communication media function, especially with analysts to the capital market to obtain accurate information about the Company's affairs so that it can assist the Company in making appropriate decisions for investors who will invest in the Company.

In practice, investor relations activities still observe the principles of confidentiality and equal treatment for all investors. The Company has provided information on the website that can be accessed by all investors or potential investors by accessing this link, https://investor.wikagedung.co.id/?q=about_us.html. In addition, the Company also provides a means of correspondence between the company and the public or vice versa through the Investor Relation email: investorrelations@wikagedung.id.

Investor Relations activities in 2024 in brief are as follows:

No.	Jenis Kegiatan Type of Activity	Realisasi Kegiatan Realization of Activity
1	Investor & Analyst One on One Meeting	63 kali / times
2	Investor & Analyst Group Meeting	2 kali / times
3	Investor & Analyst Visit ke salah satu proyek WEGE	1 kali / times
4	Investor Event Event dalam bentuk Podcast/Talk Show/Webinar bersama dengan pihak Sekuritas/Lembaga lain, untuk menyampaikan informasi WEGE kepada Investor/Calon Investor/Nasabah Sekuritas baik Perorangan maupun Institusi (Domestic maupun Asing) Event in the form of Podcast/Talk Show/Webinar with Securities/Other Institutions, to convey WEGE information to Investors/Potential Investors/Securities Customers both Individuals and Institutions (Domestic and Foreign)	5 kali / times
5	Public Expose	1 kali / times
6	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdiri dari Pelaksanaan RUPST dan RUPSLB General Meeting of Shareholders (GMS) consisting of the Implementation of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS)	2 kali / times
7	Compliance	100%
8	Annual Report	1 kali / times
9	Analyst Report	10 kali / times

Laporan tahunan Perseroan berhasil memperoleh 6 (enam) penghargaan dari LACP Visions Awards Tahun 2023, yakni:

1. Platinum Award
2. Top 100 Reports Worldwide
3. Top 100 Report Asia Pacific Region
4. Top 20 Indonesia Reports
5. Best Letter to Stakeholders
6. Technical Achievement Award

The Company's annual report won 6 (six) awards from the 2023 LACP Visions Awards, comprise:

1. Platinum Award
2. Top 100 Reports Worldwide
3. Top 100 Report Asia Pacific Region
4. Top 20 Indonesia Reports
5. Best Letter to Stakeholders
6. Technical Achievement Award



LACP VISION AWARDS 2023
ANNUAL REPORT COMPETITION LACP WINNER

1. Platinum Award
2. Top 100 Reports Worldwide
3. Top 100 Report Asia-Pasific Region
4. Top 20 Indonesia Reports
5. Best Letter to Shareholders
6. Technical Achievement Award

LACP (League Of American Communications Professionals)

2024



21 Agustus 2024 | August 21, 2024

Investor dan Analyst Grup Meeting: Pemaparan Kinerja dan Strategi WEGE
Investor and Analyst Group Meeting: WEGE Performance and Strategy Presentation



29 November 2024 | November 29, 2024

Investor & Analyst Meeting dan Site Visit di ITB Innovation Park
Investor & Analyst Meeting and Site Visit at the ITB Innovation Park



30 Agustus 2024 | August 30, 20241

Public Expose Live 2024
Public Expose Live 2024 Sources and related content

AUDIT INTERNAL

Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dengan membentuk Internal Audit guna memastikan efektivitas sistem pengendalian internal serta kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi yang berlaku.

Internal Audit menjalankan fungsi audit secara independen untuk mengamankan aset dan kepentingan perusahaan melalui evaluasi serta peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola perusahaan. Dengan pendekatan berbasis risiko, Internal Audit mengidentifikasi potensi perbaikan dan memberikan rekomendasi strategis guna mendukung pencapaian tujuan bisnis secara berkelanjutan.

Landasan Hukum

Pembentukan Internal Audit perusahaan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Bab VI.
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56 /POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
4. Surat Keputusan Direksi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk No. SK.01.01/A.DIR.WG.09365/2024 tanggal 31 Juli 2024 tentang Susunan Organisasi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
5. Pedoman Teknis Penilaian Mandiri Kapabilitas SPI Korporasi Tahun 2018 (IACM 2018).

Piagam Internal Audit

Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) merupakan landasan legal formal bagi Internal Audit dalam menjalankan tugasnya, yang memuat visi, misi dan tujuan, struktur dan kedudukan, tugas dan tanggung jawab, peranan, wewenang, kode etik, kompetensi, independensi, pertanggungjawaban serta mengatur hubungan kerja antara Internal Audit dengan Manajemen, Komite Audit dan Auditor Eksternal.

Visi dan Misi Internal Audit

VISI

Menjadi Auditor Internal yang profesional dan berperan aktif di bidang pengawasan yang berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dalam rangka mendukung kemajuan perusahaan.

MISI

1. Membantu perusahaan dalam memastikan efektifitas pencapaian tujuan Perusahaan secara berkelanjutan, melalui pelaksanaan dan evaluasi terhadap proses pengendalian kegiatan operasi, pengelolaan risiko dan tata kelola perusahaan yang baik (GCG), melalui penerapan *risk based audit*.
2. Meningkatkan dan melindungi nilai organisasi dengan menjalankan peran dan fungsi *assurance* dan *consulting* dengan memberikan rekomendasi yang independent, objektif, inovatif dan konstruktif

INTERNAL AUDIT

The company is committed to implementing good corporate governance by establishing an Internal Audit to ensure the effectiveness of the internal control system and compliance with prevailing policies and regulations.

Internal Audit performs the audit function independently to secure the company's assets and interests through evaluation and improvement of the effectiveness of risk management, internal control, and corporate governance. With a risk-based approach, Internal Audit identifies potential improvements and provides strategic recommendations to support the achievement of business goals in a sustainable manner.

Legal Basis

The establishment of the company's Internal Audit is based on:

1. Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises Chapter VI.
2. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.
3. Regulation of the Financial Services Authority No. 56/ POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Preparation of the Internal Audit Unit Charter.
4. Decree of the Board of Directors of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk No. SK.01.01/A.DIR.WG.09365/2024 dated July 31, 2024, concerning the Organizational Structure of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
5. Technical Guidelines for the Self-Assessment of the Corporate Internal Control Capability in 2018 (IACM 2018).

Internal Audit Charter

The Internal Audit Charter is the formal legal basis for Internal Audit in carrying out its duties, which includes the vision, mission and objectives, structure and position, duties and responsibilities, roles, authorities, code of conduct, competence, independence, accountability, and regulates the working relationship between Internal Audit and Management, the Audit Committee and External Auditors.

Vision and Mission of Internal Audit

VISION

To become a professional Internal Auditor and play an active role in supervision based on the principles of good corporate governance (GCG) in order to support the company's progress.

MISSION

1. To assist the company in ensuring the effectiveness of the achievement of the Company's objectives in a sustainable manner, through the implementation and evaluation of the control process of operating activities, risk management and good corporate governance (GCG), through the implementation of risk-based audit.
2. To enhance and protect the organization's value by carrying out assurance and consulting roles and functions by providing independent, objective, innovative and constructive

serta memberikan nilai tambah dengan menggunakan teknologi informasi terkini.
3. Mengembangkan kompetensi auditor secara berkesinambungan.
4. Meningkatkan sinergi fungsi audit intern dan eksternal audit.
5. Mengelola aktivitas internal audit secara efektif dan efisien.

Tujuan Internal Audit

Memberikan kontribusi strategis kepada manajemen melalui jasa *assurance* dan *consulting* yang bersifat independen dan objektif dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperbaiki operasional perusahaan melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola perusahaan dengan melaksanakan pemeriksaan dalam lingkup audit operasional, keuangan, *compliance*, dan khusus (Investigasi atas perintah Direktur Utama)

Kegiatan *assurance* adalah pemeriksaan dalam lingkup audit operasional, keuangan, kepatuhan (*compliance*), audit tujuan tertentu/khusus atas perintah Direktur Utama maupun penugasan Internal Audit untuk melaksanakan tugas yang bersifat khusus sesuai dengan urgensinya, termasuk evaluasi dan penilaian atas internal control, penerapan manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan.

Kegiatan *consulting* adalah diskusi dan *brainstorming* untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang terbaik sesuai dengan penilaian manfaat dan risiko atas permasalahan yang dikonsultasikan, mencakup efektivitas operasional, manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola perusahaan.

Ruang Lingkup Internal Audit

Ruang lingkup kegiatan internal audit mencakup semua unit kerja di PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, entitas anak dan afiliasi, serta sesuai dengan implementasi tata kelola terintegrasi Internal Audit PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., dengan berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Struktur Organisasi Internal Audit

Susunan Organisasi Internal Audit per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

recommendations and providing added value by using the latest information technology.
3. To develop auditor competence continuously.
4. To improve the synergy of internal and external audit functions.
5. To manage internal audit activities effectively and efficiently.

Objectives Of Internal Audit

To provide strategic contributions to management through assurance and consulting services that are independent and objective with the aim of increasing added value and improving company operations through a systematic approach, by increasing the effectiveness of risk management, internal control, and company governance processes by conducting audits in the scope of operational, financial, compliance, and special audits (Investigations on the orders of the President Director).

Assurance activities are audits in the scope of operational, financial, compliance, specific purpose/special audits on the orders of the President Director or Internal Audit assignments to carry out duties that are specific according to their urgency, including evaluation and assessment of internal control, implementation of risk management, and corporate governance.

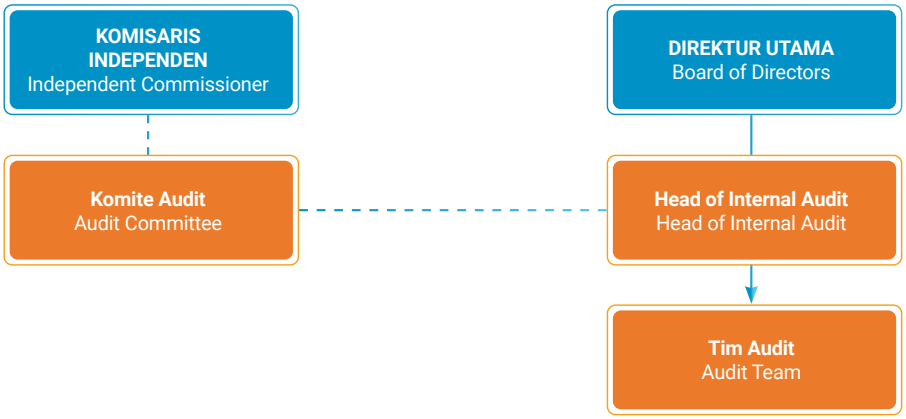
Consulting activities are discussions and brainstorming to obtain the best possible conclusion in accordance with the assessment of benefits and risks of the issues consulted, covering operational effectiveness, risk management, internal control, and company governance processes.

Scope Of Internal Audit

The scope of internal audit activities covers all work units in PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, its subsidiaries and affiliates, and is in accordance with the implementation of integrated governance of the Internal Audit of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., based on the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

Internal Audit Organizational Structure

The Internal Audit Organizational Structure as of December 31, 2024 is as follows:



Kedudukan Internal Audit Dalam Struktur Organisasi

Hal-hal yang diatur terkait dengan kedudukan Internal Audit dalam struktur organisasi Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Organisasi Internal Audit dipimpin oleh seorang Head of Internal Audit, yang kedudukan dalam organisasi perusahaan setingkat dengan "Vice President" dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama serta membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan.
2. Head of Internal Audit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit, dan setiap pengangkatan, pergantian dan pemberhentian Head of Internal Audit diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
3. Untuk mendukung berjalannya fungsi pengawasan perusahaan dibantu oleh Auditor Intern yang terdiri dari Head of Auditor dan Auditor.
4. Kedudukan Internal Audit sebagai organ yang membantu Direktur Utama harus ditempatkan dalam struktur organisasi yang setara dengan peran dan tanggung jawabnya, dalam pengungkapan pandangan dan pemikiran yang tidak dapat dipengaruhi ataupun ditekan dari manajemen dan pihak lain.
5. Internal Audit menjalankan fungsi sebagai organ internal audit terintegrasi dalam rangka penerapan tata kelola terintegrasi dalam konglomerasi konstruksi.

Tugas dan Tanggung Jawab Internal Audit

Internal Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyusun Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dengan berbasis risiko yang direview secara berkala terhadap perubahan bisnis perusahaan termasuk perhitungan anggaran biayanya yang berkaitan dengan sifat audit dan jumlah unit kerja yang diprogramkan akan diperiksa pada tingkat entitas maupun tingkat operasional perusahaan.
2. Melakukan pemeriksaan rutin sesuai dengan jadwal yang telah dituangkan dalam PKPT, dengan menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian dan manajemen risiko sesuai dengan sistem, prosedur dan kebijakan operasi perusahaan yang dilaksanakan secara berkesinambungan.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas, minimal namun tidak terbatas pada bidang Akuntansi, Keuangan, Operasional, *Human Capital*, Pemasaran, *Engineering*, Produktifitas, Teknologi Informatika dan melakukan evaluasi atas sistem, prosedur dan kebijakan operasi perusahaan yang dilakukan secara berkesinambungan.
4. Menyiapkan dan mendokumentasikan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP).
5. Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
6. Membuat "draft" surat Tindak Lanjut Direktur Utama yang difokuskan kepada permasalahan utama dan perlu mendapatkan penanganan yang segera dari pimpinan unit kerja yang diperiksa

Position Of Internal Audit In The Organizational Structure

The matters regulated relating to the position of Internal Audit in the Company's organizational structure are as follows:

1. The Internal Audit organization is led by a Head of Internal Audit, whose position in the company's organization is equivalent to a "Vice President" and is directly responsible to the President Director and assists the Board of Commissioners in carrying out the supervisory function to realize the company's vision and mission.
2. Head of Internal Audit is appointed and dismissed by the President Director after obtaining approval from the Board of Commissioners, taking into account the recommendations of the Audit Committee, and every appointment, change and dismissal of the Head of Internal Audit is notified to the Financial Services Authority.
3. To support the company's supervisory function, Internal Auditors consisting of the Head of Auditor and Auditors assist.
4. Position of Internal Audit as an organ that assists the President Director must be placed in an organizational structure that is equivalent to its role and responsibilities, in disclosing views and thoughts that cannot be influenced or suppressed by management and other parties.
5. Internal Audit carries out its function as an integrated internal audit organ in the context of implementing integrated governance in a construction conglomerate.

Duties And Responsibilities Of Internal Audit

Internal Audit has the following duties and responsibilities:

1. Preparing the Annual Audit Work Program (PKPT) on a risk-based approach that is reviewed periodically against changes in the company's business, including the calculation of its budget related to the nature of the audit and the number of work units programmed to be audited at the entity level and the company's operational level.
2. Conducting routine audits according to the schedule outlined in the PKPT, by testing and evaluating the implementation of controls and risk management in accordance with the company's operating systems, procedures and policies that are implemented continuously.
3. Conducting audits and assessments of efficiency and effectiveness, including but not limited to the areas of Accounting, Finance, Operations, Human Capital, Marketing, Engineering, Productivity, Information Technology and conduct evaluations of the company's operating systems, procedures and policies that are carried out continuously.
4. Preparing and documenting the Audit Working Papers (KKP).
5. Preparing an Audit Result Report (LHP) and submit the report to the President Director and the Board of Commissioners through the Audit Committee.
6. Preparing a "draft" of the President Director's Follow-Up letter focused on the main issues and requiring immediate handling from the head of the audited work unit, and the President Director will

dan Direktur Utama akan menandatangani surat Tindak Lanjut tersebut bilamana telah sesuai dengan pandangannya.

7. Memantau Tindak Lanjut dari LHP yang disampaikan kepada pimpinan tertinggi unit kerja sesuai dengan disposisi dari Direktur Utama.
8. Memantau tindak lanjut hasil audit dari auditor/konsultan eksternal.
9. Meningkatkan kompetensi dan kemampuan personil IA melalui pendidikan/pelatihan dan Sertifikasi Keahlian Profesi seperti Qualified Internal Auditor (QIA), Certified Forensic Auditor (Cfra) dan lain-lain yang berkelanjutan baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha perusahaan.
10. Menyusun dan melakukan program jaminan mutu kegiatan audit internal sesuai dengan prosedur pengawasan internal berupa:
    a. Melakukan supervisi rutin dalam penugasan pemeriksaan.
    b. Melakukan penilaian mandiri kualitas internal audit minimum setahun sekali.
    c. Melakukan eksternal asesmen paling sedikit tiga tahun sekali oleh pihak independen.
11. Memberikan pendapat, masukan dan pertimbangan maupun jasa konsultasi yang objektif kepada manajemen dan unit kerja lainnya berkaitan dengan fungsi pengawasan.
12. Bekerja sama dengan Komite Audit.
13. Melakukan Audit Khusus apabila diperlukan.
14. Dalam hal ditugaskan untuk bekerja sama dengan organ pendukung Dewan Komisaris selain Komite Audit akan ditetapkan dalam surat penugasan tersendiri.
15. Memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak eksternal untuk aktifitas pengawasan intern yaitu terselenggaranya transfer pengetahuan antara pihak eksternal kepada anggota Internal Audit. Penggunaan jasa pihak eksternal tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas fungsi Internal Audit dan pihak eksternal mematuhi piagam audit intern perusahaan
16. Dalam rangka pelaksanaan fungsi Internal Audit terintegrasi, tugas dan tanggung jawab Internal Audit mengacu pada pedoman tata kelola terintegrasi:
    a. Menentukan strategi pelaksanaan audit intern dengan entitas anak dan afiliasi, merumuskan prinsip audit intern yang mencakup metodologi audit dan langkah pelaksanaan pengendalian mutu.
    b. Memantau pelaksanaan audit intern pada masing-masing entitas anak dan afiliasi dalam konglomerasi konstruksi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
    c. Dapat melaksanakan audit pada entitas anak dan atau afiliasi baik secara individual, audit bersama atau berdasarkan laporan dari Internal Audit entitas anak.
    d. Terkait hubungan antara induk perusahaan dengan anak perusahaan wajib menyampaikan laporan berikut ke induk secara berkala;
        - Laporan Pelaksanaan dan Pokok Hasil Audit Intern.

sign the Follow-Up letter when it is in accordance with his views.

7. Monitoring the Follow-Up of the LHP submitted to the highest leader of the work unit in accordance with the disposition of the President Director.
8. Monitoring the follow-up of audit results from external auditors/consultants.
9. Improving the competence and ability of IA personnel through education/training and Professional Skills Certification such as Qualified Internal Auditor (QIA), Certified Forensic Auditor (Cfra) and others that are continuous both domestically and abroad in accordance with the development of the complexity and business activities of the company.
10. Preparing and implementing a quality assurance program for internal audit activities in accordance with internal control procedures in the form of:
    a. Conducting routine supervision in audit assignments.
    b. Conducting a self-assessment of the quality of internal audit at least once a year.
    c. Conducting an external assessment at least every three years by an independent party.
11. Providing opinions, input and considerations as well as objective consulting services to management and other work units related to the supervisory function.
12. Cooperating with the Audit Committee.
13. Conducting Special Audits when needed.
14. In the event of being assigned to cooperate with supporting organs of the Board of Commissioners other than the Audit Committee, it will be stipulated in a separate assignment letter.
15. Ensuring that in the event of the use of external party services for internal control activities, there is a transfer of knowledge between the external party and Internal Audit members. The use of external party services does not affect the independence and objectivity of the Internal Audit function and the external party complies with the company's internal audit charter.
16. In order to implement the integrated Internal Audit function, the duties and responsibilities of the Internal Audit refer to the integrated governance guidelines:
    a. Determine the strategy for implementing internal audits with subsidiaries and affiliates, formulate internal audit principles that include audit methodology and quality control implementation steps.
    b. Monitor the implementation of internal audits in each subsidiary and affiliate in the construction conglomerate of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
    c. Be able to carry out audits at subsidiaries and or affiliates either individually, joint audits or based on reports from the Internal Audit of the subsidiary.
    d. Regarding the relationship between the parent company and subsidiaries, it is mandatory to submit the following reports to the parent company on a regular basis;
        - Report on the Implementation and Main Results of the Internal Audit.

- Laporan Tindak Lanjut Audit Intern, BPK, BPKP, dan Auditor Independen.
- Laporan pengangkatan atau pemberhentian Head of Internal Audit (jika ada).
- Laporan khusus mengenai temuan yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha.
- Laporan hasil kaji ulang pihak eksternal yang independen (Quality Assurance Review).

17. Memberikan layanan penjaminan (assurance) yang dilaksanakan seperti:Audit Kepatuhan (*compliance auditing*), self *assessment* GCG, Audit tujuan tertentu, dan kegiatan *assurance* lainnya.

Peran Internal Audit

Dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan, Internal Audit memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan efektivitas pengendalian internal dan tata kelola perusahaan yang baik. Adapun peran Internal Audit adalah sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direktur Utama dalam pengurusan dan pengelolaan perusahaan.
2. Membantu Direktur Utama dalam memastikan kecukupan dan mengadakan penilaian sistem pengendalian manajemen perusahaan pada semua level operasional perusahaan.
3. Membantu Direktur Utama agar dapat secara efektif mengamankan aset perusahaan.
4. Melakukan analisa dan evaluasi efektivitas sistem dan prosedur pada semua lini dalam organisasi perusahaan.
5. Sebagai mitra pengawasan unit kerja dalam menjalankan operasional perusahaan.
6. Membantu mensosialisasikan dan melaksanakan kebijakan perusahaan.
7. Membantu menciptakan sistem peringatan dini bagi manajemen guna mengambil tindakan korektif atas penyimpangan yang mungkin akan/atau telah terjadi.
8. Sebagai organ pendorong perubahan untuk menciptakan budaya bersih dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Wewenang Internal Audit

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Internal Audit memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Menyusun, mengubah dan melaksanakan kebijakan audit internal termasuk antara lain menentukan prosedur dan lingkup pelaksanaan pekerjaan audit.
2. Memasuki seluruh areal perusahaan dan meninjau tempat usaha, lingkungan kerja dan lokasi aset Perseroan.
3. Meminta keterangan dan penjelasan kepada seluruh jajaran manajemen dan karyawan dalam rangka pemeriksaan.
4. Dalam hal melakukan pemeriksaan/audit dan memiliki kepentingan yang masih berkaitan dengan pemeriksaan, maka auditor dapat memiliki akses atas seluruh informasi, aset, semua dokumen, pencatatan, dan personil perusahaan.
5. Meminta bantuan tenaga auditor dari dalam perusahaan, dalam hal tidak tersedianya kompetensi personil Internal Audit dan dari luar perusahaan jika dipandang perlu dengan beban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

- Internal Audit Follow-Up Report, BPK, BPKP, and Independent Auditor.
- Report on the appointment or dismissal of the Head of Internal Audit (if any).
- Special report on findings that are estimated to endanger business continuity.
- Report on the results of an independent external review (Quality Assurance Review).

17. Provide assurance services such as: Compliance auditing, GCG self-assessment, Specific purpose audits, and other assurance activities.

Role of Internal Audit

In supporting the achievement of the company's objectives, Internal Audit has a very important role in ensuring the effectiveness of internal control and good corporate governance. The roles of Internal Audit are as follows:

1. Providing input to the President Director in the management and administration of the company.
2. Assisting the President Director in ensuring the adequacy and conducting assessments of the company's management control system at all operational levels of the company.
3. Assisting the President Director in effectively securing company assets.
4. Conducting analysis and evaluation of the effectiveness of systems and procedures in all lines of the company's organization.
5. Acting as a supervisory partner of work units in carrying out company operations.
6. Assisting in socializing and implementing company policies.
7. Assisting in creating an early warning system for management to take corrective action on deviations that may or have occurred.
8. Acting as an agent of change to create a clean culture and comply with applicable laws and regulations.

Authority of Internal Audit

In carrying out its duties and responsibilities, Internal Audit has the following authority:

1. Prepare, amend and implement internal audit policies including, among other things, determining audit work procedures and scope.4
2. Enter all areas of the company and inspect business premises, work environment and locations of the Company's assets.
3. Request information and explanations from all levels of management and employees in the context of audits.
4. In the event of conducting an audit/audit and having interests still related to the audit, the auditor can have access to all information, assets, all documents, records, and company personnel.
5. Request assistance from auditors from within the company, in the event of unavailability of Internal Audit personnel competence and from outside the company if deemed necessary with the burden being the responsibility of the Company.

6. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.
7. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.
8. Melakukan Joint Audit pada Anak Perusahaan dalam lingkup PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Head of Internal Audit Perusahaan wajib melakukan koordinasi dengan kepala Internal Audit Anak Perusahaan untuk meminta keterangan dan dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan kaedah pengawasan dan menyelaraskan program Internal Audit PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk. dengan Internal Audit Anak Perusahaan dalam rangka untuk memastikan berjalannya aspek pengendalian pada Anak Perusahaan, dan Internal Audit PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk. dapat melakukan pemeriksaan ke Anak Perusahaan bersama Internal Audit Perusahaan Anak dan atau Internal Audit entitas lain yang mempunyai kepemilikan bersama pada Anak Perusahaan dengan penugasan oleh Direktur Utama PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk.
   b. Atas hasil pemeriksaan Internal Audit PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk. dilaporkan secara langsung kepada Komisaris Utama Anak Perusahaan dengan tembusan kepada Direktur Utama PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk. dan Direktur Anak Perusahaan.
9. Dapat mengikuti rapat-rapat manajemen yang bersifat strategis.
10. Melakukan pemilihan Sumber Daya Manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas Internal Audit.
11. Melakukan aktivitas investigasi terhadap kasus/masalah pada setiap aspek dan unsur kegiatan yang terindikasi *fraud* dan pelanggaran kode etik (*code of conduct*).

Kode Etik Internal Audit

Untuk mengatur perilaku dan kepatuhan auditor internal, termasuk Head of Internal Audit dan Auditor, Perseroan menetapkan prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas. Kode Etik Internal Audit bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu dalam Internal Audit menjalankan tugas dengan integritas, objektivitas, dan independensi yang tinggi. Adapun prinsip dasar yang dijadikan panduan selama pelaksanaan tugas adalah sebagai berikut:

1. Auditor Internal wajib bersikap jujur, obyektif, hati-hati, bijaksana, bertanggung jawab, berani dan memiliki integritas yang tinggi serta harus mampu bertindak secara independen dalam menjalankan tugas maupun kewajibannya dan harus mampu memelihara kepercayaan yang diberikan oleh Direktur Utama dan/atau Head of Internal Audit.
2. Auditor Internal harus mampu memelihara kepercayaan yang diberikan dalam rangka tugas pemeriksaan.
3. Auditor Internal harus menggunakan semua kemampuannya untuk memperoleh bukti-bukti yang memadai guna mendukung pernyataannya.
4. Audit Internal harus berusaha untuk meningkatkan keahlian dalam melakukan pekerjaannya dengan memelihara kompetensi jabatan, moralitas dan menjunjung tinggi kehormatan korps.

6. Communicate directly with the Board of Directors, Board of Commissioners and/or Audit Committee and members of the Board of Directors, Board of Commissioners and/or Audit Committee.
7. Coordinate its activities with the activities of external auditors.
8. Conduct Joint Audits at Subsidiaries within the scope of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk with the following provisions:
   a. The Company's Head of Internal Audit is required to coordinate with the head of Internal Audit of the Subsidiary to request information and documents needed in accordance with supervisory principles and align the Internal Audit program of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk. with the Internal Audit of the Subsidiary in order to ensure the functioning of control aspects at the Subsidiary, and the Internal Audit of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk. can conduct audits at Subsidiaries together with the Subsidiary's Internal Audit and or Internal Audit of other entities that have joint ownership in the Subsidiary with an assignment by the President Director of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk.
   b. The results of the Internal Audit of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk. are reported directly to the Main Commissioner of the Subsidiary with a copy to the President Director of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk. and the Director of the Subsidiary.
9. Be able to attend strategic management meetings.
10. Conduct the selection of competent Human Capital in accordance with the needs in carrying out Internal Audit duties.
11. Carry out investigation activities on cases/problems in every aspect and element of activities that indicate fraud and violations of the code of conduct.

Internal Audit Code of Conduct

To regulate the behavior and compliance of internal auditors, including the Head of Internal Audit and Auditors, the Company establishes basic principles that serve as guidelines in carrying out their duties. The Internal Audit Code of Conduct aims to ensure that every individual in Internal Audit performs their duties with high integrity, objectivity, and independence. The basic principles that serve as guidelines during the performance of duties are as follows:

1. Internal Auditors must be honest, objective, careful, wise, responsible, courageous and have high integrity and must be able to act independently in carrying out their duties and obligations and must be able to maintain the trust given by the President Director and/or Head of Internal Audit.
2. Internal Auditors must be able to maintain the trust given in the context of audit assignments.
3. Internal Auditors shall use all their abilities to obtain adequate evidence to support their statements.
4. Internal Audit must strive to improve their skills in carrying out their work by maintaining job competence, morality and upholding the honor of the corps.

5. Audit Internal harus membangun komunikasi yang intens dengan sesame pemeriksa dan auditor eksternal, untuk kepentingan perusahaan dalam rangka pelaksanaan tugas yang diembannya.
6. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Auditor Internal harus berpedoman kepada norma-norma pemeriksaan dan prosedur umum pemeriksaan oleh Internal Audit dan Tindak Lanjut PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk.
7. Auditor Internal harus menghindarkan diri untuk mengambil bagian dalam aktivitas illegal atau yang tidak sepantasnya dilakukan.
8. Auditor Internal berusaha untuk tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan maupun prasangka yang dapat meragukan kemampuannya untuk bertindak secara independen.
9. Dalam menerima penugasan diluar kegiatan pemeriksaan dan operasional perusahaan, Auditor Internal wajib menanggalkan identitas dan atributnya selaku Auditor Internal.
10. Head of Internal Audit dan tim Auditor Internal dilarang untuk merangkap tugas secara langsung dalam kegiatan operasional perusahaan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk.

5. Internal Audit must build intensive communication with fellow auditors and external auditors, for the benefit of the company in carrying out its duties.
6. In carrying out their duties as Internal Auditors, they shall adhere to audit norms and general audit procedures by the Internal Audit and Follow-Up of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk.
7. Internal Auditors shall refrain from participating in illegal or inappropriate activities.
8. Internal Auditors strive not to engage in activities that may create conflicts of interest or biases that may cast doubt on their ability to act independently.
9. In accepting assignments outside of audit and company operational activities, Internal Auditors are required to remove their identity and attributes as Internal Auditors.
10. The Head of Internal Audit and the Internal Audit team are prohibited from holding concurrent positions directly in the operational activities of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk.

Profil Pejabat Internal Audit

Internal Audit diketuai oleh Head of Internal Audit berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: SK.02.01/A.DIR.WG.09593/2024. Profil dari pejabat Internal Audit dapat dilihat di bab Profil Perseroan dari laporan tahunan ini. Jumlah pegawai yang tergabung dalam unit Internal Audit sebanyak 7 (tujuh) orang per 31 Desember 2024.

Internal Audit Official Profile

Internal Audit is headed by the Head of Internal Audit based on the Decree of the Board of Directors Number: SK.02.01/A.DIR.WG.09593/2024. The profile of the Internal Audit official can be seen in the Company Profile chapter of this annual report. The number of employees in the Internal Audit unit is 7 (seven) people as of December 31, 2024.

Profil Pejabat Internal Audit
Internal Audit Official Profile



Andi Sugiarto
Kepala Satuan Pengawas Internal
Head of Internal Audit Unit

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Usia Age	52 tahun pada akhir tahun buku 2024 52 years of age at the end of the 2024 financial year
Riwayat Pendidikan Educational Background	Ahli Madya Akuntansi dari Universitas Diponegoro, Semarang (1994) Associate Expert in Accounting from Diponegoro University, Semarang (1994)
Pengalaman Kerja Professional Experience	• Kepala Satuan Pengawas Internal WIKA Rekayasan Konstruksi (2019) • Kepala Pemeriksa Satuan Pengawas Internal WIKA (2019) • Manajer Bidang Keuangan dan Human Capital Proyek Pembangunan Pipa Trasmisi Gas dari Gresik Semarang Divisi Industrial Plant WIKA (2015). • Head of Internal Supervisory Unit of WIKA Rekayasan Konstruksi (2019) • Head of Internal Supervisory Unit of WIKA (2019) • Manager of Finance and Human Capital for Gas Transmission Pipeline Construction Project from Gresik Semarang Industrial Plant Division of WIKA (2015).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Kepala Satuan Pengawas Internal sejak 2 Juni 2021 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : SK.02.01/A. DIR.WG.3603/2021 Head of Internal Audit Unit since June 2, 2021, based on the Board of Directors' Decree Number: SK.02.01/A.DIR.WG.3603/2021

Sertifikasi Kompetensi Internal Audit

Seluruh pegawai Internal Audit diwajibkan untuk memiliki sertifikasi yang relevan guna menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan. Sebagai bagian dari komitmen Perseroan untuk meningkatkan kompetensi, Perseroan mengikutsertakan pegawai Internal Audit dalam program sertifikasi profesi, khususnya yang terkait dengan auditor internal. Per 31 Desember 2024, sertifikasi profesi yang dimiliki oleh pegawai Internal Audit adalah sebagai berikut:

Internal Audit Competency Certification

All Internal Audit employees are required to have relevant certifications in order to create sustainable added value. As part of the Company's commitment to improving competence, the Company includes Internal Audit employees in professional certification programs, especially those related to internal auditors. As of December 31, 2024, the professional certifications held by Internal Audit employees are as follows:

No	Nama Name	Jabatan Position	Sertifikasi Certification
1	Andi Sugiarto	Head of Internal Audit	QIA (Qualified Internal Auditor)
2	Ardi Novianto	Head of Auditor	CRMP (Certified Risk Management Professional) Pre – Qualified Internal Audit
3	Bopriari Kusumawijaya	Head of Auditor	---
4	Ferdian Aprim Nugroho	Auditor	QIA (Qualified Internal Auditor)
5	Muhamad Iqbal	Auditor	Pre – Qualified Internal Audit
6	Martin Ulpan	Auditor	---
7	Dedi Zaenudin	Auditor	---

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTERNAL AUDIT

Perseroan menyediakan program pengembangan kompetensi bagi personel Internal Audit guna mendukung pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal secara efektif dan profesional.

Adapun program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Internal Audit selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

INTERNAL AUDIT COMPETENCY TRAINING AND DEVELOPMENT

The Company provides competency development programs for Internal Audit personnel to support the implementation of the Internal Audit Work Unit's duties effectively and professionally.

The training and competency development programs followed by Internal Audit during 2024 are as follows:

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi internal Audit 2024
Internal Audit Training and Competency Development in 2024

Nama Name	Jabatan Position	Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Training and Competency Development		
		Nama Name	Waktu Time	Penyelenggara Organizer
Andi Sugiarto	Head of Internal Audit	Seminar Bulan K3 K3 Month Seminar	13 Februari 2024 Februari 13, 2024	QSHE Division PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk
Ardi Novianto	Head of Auditor	End User Training Sap All Modul	21-25 Oktober 2024 October 21-25, 2024	Information Technology Division PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk
		Sertifikasi Qualified Internal Auditor (QIA) Tingkat Dasar Qualified Internal Auditor (QIA) Basic Level Certification	4-16 November 2024 November 4-16, 2024	YPIA
Bopriari Kusumawijaya	Head of Auditor	Assessment Soft Competency PPM Juli	29 Juli-9 Agustus 2024 July 29 – August 9, 2024	PPM Manajemen
		Feed Forward Assessment Soft Competency	19-20 Desember 2024 December 19-20, 2024	PPM Manajemen
Ferdian Aprim Nugroho	Junior Expert of Auditor	End User Training Sap All Modul	21-25 Oktober 2024 October 21-25, 2024	Information Technology Division PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk
		Pelatihan Professional Pitch Deck Presentation Batch 1 Professional Pitch Deck Presentation Training Batch 1	15-16 Januari 2024 January 15-16, 2024	Bengkel Slide

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi internal Audit 2024
Internal Audit Training and Competency Development in 2024

Nama Name	Jabatan Position	Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Training and Competency Development		
		Nama Name	Waktu Time	Penyelenggara Organizer
		Sosialisasi QMSL Fungsi SCM QMSL Socialization SCM Function	20 Februari 2024 February 20, 2024	QSHE Division PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk
		Uji Keahlian Internal Hard Competency Internal Hard Competency Test	4-12 Juni 2024 Juni 4-12, 2024	PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
		Pelatihan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan Awareness SNI ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System Awareness Training	15 Agustus 2024 August 15, 2024	PT Sucofindo
Dedi Zaenudin	Auditor	Pelatihan Refreshment Fungsi Komersial Dan Fungsi Keuangan Batch 2 Refreshment Training of Commercial Functions and Financial Functions Batch 2	15-16 Februari 2024 February 15-16, 2024	PMO and Risk Management Division PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk
		Pelatihan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan Awareness SNI ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System Awareness Training	15 Agustus 2024 August 15, 2024	PT Sucofindo
Martin Ulpan	Auditor	Pelatihan Business Presentation And Data Visualization Business Presentation and Data Visualization Training	4-5 Maret 2024 March 4-5, 2024	Bengkel Slide
		Pelatihan How To Be An Attractive MC How To Be An Attractive MC Training	7 Maret 2024 March 7, 2024	Sekretariat Perusahaan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. Corporate Secretariat PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
		Pelatihan Sni Iso 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan Awareness SNI ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System Awareness Training	15 Agustus 2024 August 15, 2024	PT Sucofindo
		Workshop Kontrak Manajemen Management Contract Workshop	11-12 November 2024 November 11-12, 2024	School of Quantity Surveying
Muhammad Ikbal	Auditor	Talkshow Bulan K3 K3 Month Talkshow	13 Februari 2024 February 13, 2024	QSHE Division PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk
		Assessment Soft Competency Experd Juli	22-31 Juli 2024 July 22-31, 2024	Experd Consultant

Laporan Pelaksanaan Tugas Internal Audit Tahun 2024

Pada tahun 2024, Internal Audit telah menjalankan tugas dengan baik dimana, realisasi pelaksanaan sebanyak 21 obyek pemeriksaan sesuai dengan review, yang terdiri dari:

1. Divisi 6 unit kerja
2. Proyek 14 unit kerja
3. Pabrik 1 unit kerja

Selain melaksanakan kegiatan audit, Internal Audit juga melaksanakan pendampingan Audit KAP untuk audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2024.

Duties Implementation Report of Internal Audit 2024

In 2024, Internal Audit has carried out its duties well where the realization of implementation is 21 audit objects according to the review, consisting of:

1. Division 6 work units
2. Project 14 work units
3. Factory 1 work unit

In addition to carrying out audit activities, Internal Audit also provided assistance to the Public Accounting Firm (KAP) Audit for the 2024 Fiscal Report audit.

Komite di bawah Direksi

Committee Under the Board of Directors

Hingga 31 Desember 2024, Direksi Perseroan tidak memiliki komite dibawah Direksi. Direksi menimbang bahwa dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, Direksi telah dibantu oleh fungsi penunjang lainnya seperti Corporate Secretary, Internal Audit, Sistem Pengendalian Internal, Manajemen Risiko dan fungsi strategis lainnya.

As of December 31, 2024, the Company's Board of Directors did not have any committees reporting directly to it. The Board of Directors considered that in carrying out its functions, duties, and responsibilities, it has been assisted by other supporting functions such as the Corporate Secretary, Internal Audit, Internal Control System, Risk Management, and other strategic functions.

Transparansi Informasi Terkait Dewan Komisaris dan Direksi

Information on Transparency Related to The Board of Commissioners and The Board of Directors

HUBUNGAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki independensi. Hal ini bertujuan untuk menghindari segala bentuk benturan kepentingan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Oleh karena itu, mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 Bab X Pasal 63, prinsip-prinsip yang diterapkan Perseroan untuk menjaga hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris, sebagai berikut:

- Dalam rangka menjaga independensi masing-masing organ Perseroan, setiap hubungan Direksi dengan Dewan Komisaris dalam rangka tugas dan tanggung jawab masing-masing di dalam pengelolaan Perseroan merupakan hubungan yang bersifat formal, dalam arti harus senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Hubungan yang bersifat informal dapat saja dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris, namun tidak dapat dipakai sebagai kebijakan formal sebelum melalui mekanisme atau korespondensi yang dapat dipertanggung jawabkan.
- Direksi menghormati fungsi dan peranan Dewan Komisaris dalam pengawasan Perseroan sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan Berbagai hal yang menyangkut hubungan kerja sehari-hari antara Direksi dengan Dewan Komisaris, yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, Panduan *Good Corporate Governance, Code of Conduct,* serta dokumen ini akan diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan dilandasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance.*
- Direksi akan memberikan informasi secara lengkap kepada Dewan Komisaris sesuai kebutuhan Dewan Komisaris di dalam melaksanakan tugasnya.

WORKING RELATIONSHIP BETWEEN THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

In carrying out their respective functions, duties, and responsibilities, members of the Board of Commissioners and the Board of Directors shall maintain independence. This aims to avoid any form of conflict of interest, whether for personal or group interests. Therefore, referring to the Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.03/2016 Chapter X Article 63, the principles applied by the Company to maintain the working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners are as follows:

- To maintain the independence of each Company organ, every relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners in the context of their respective duties and responsibilities in the management of the Company is a formal relationship. This means it must continually be based on an accountable mechanism or correspondence. Informal relationships may occur between individual members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, but they cannot be used as formal policy before going through an accountable mechanism or correspondence.
- The Board of Directors respects the function and role of the Board of Commissioners in supervising the Company as stipulated in the Company's Articles of Association. Various matters concerning the day-to-day working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners that are not yet regulated by prevailing laws and regulations, the Company's Articles of Association, the Good Corporate Governance Guidelines, the Code of Conduct, and this document will be further regulated by mutual agreement between the Board of Directors and the Board of Commissioners, based on the principles of Good Corporate Governance.
- The Board of Directors will provide complete information to the Board of Commissioners in accordance with the Board of Commissioners' needs in carrying out their duties.

RAPAT GABUNGAN

Sesuai dengan Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi, POJK 33 Tahun 2014, rapat gabungan Dewan Komisaris dan DIreksi diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) bulan. Pemanggilan rapat dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris yang berhak, atau orang yang khusus ditunjuk untuk bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis dan disampaikan secara elektronik paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat, kecuali rapat mengenai sesuatu hal penting yang mendesak.

Hasil rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2024, rapat gabungan Perseroan terselenggara 11 (sebelas) kali rapat. Adapun realisasi dari Rapat Koordinasi Direksi dengan Komisaris yang diselenggarakan di sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

JOINT MEETING

In accordance with the Board Manual of the Board of Commissioners and the Board of Directors, POJK 33 of 2014, joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors are held at least once every 2 (two) months. The meeting is convened by a authorized member of the Board of Commissioners, or a person specifically appointed to act for and on behalf of the Board of Commissioners. The meeting notice of the Board of Commissioners is submitted in writing and electronically no later than 3 (three) days before the meeting is held, excluding the date of the notice and the date of the meeting. The meeting notice shall include the day, date, time, place, and agenda of the meeting, except for meetings regarding urgent important matters.

The minutes of the joint meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors must be recorded, signed by the attending members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, and distributed to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

Throughout 2024, the Company held 11 (eleven) joint meetings. The realization of the Coordination Meetings between the Board of Directors and the Commissioners held throughout 2024 is as follows:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Rapat Internal** Internal Meeting		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	**Jumlah Kehadiran** Number of Attendance	**Tingkat Kehadiran (%)** Attendance Level (%)
Menjabat Hingga Akhir Tahun 2024 Serving Until the End of 2024				
Joseph Prajogo	Komisaris Independen sekaligus Pelaksana Tugas Komisaris Utama Independent Commissioner also serving as Acting President Commissioner	11	11	100
Suli Fatimah	Komisaris Commissioner	11	11	100
Danis Hidayat Sumadilaga	Komisaris Commissioner	11	11	100
Taufan Gestoro	Komisaris Independen Independent Commissioner	10	10	100
Hadian Pramudita	Direktur Utama President Director	11	11	100
Bagus Tri Setyana	Direktur Operasi I Operations Director I	11	11	100
Dwi Purnomo	Direktur Operasi II Operations Director II	11	11	100
Tomo Dwi Hasputro	Direktur Quality, Health, Safety, Environment dan Pemasaran Director of Quality, Health, Safety, Environment, and Marketing	7	7	100

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Internal Internal Meeting		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Tingkat Kehadiran (%) Attendance Level (%)
Hartanto Karti Raharjo	Direktur Keuangan, *Human Capital* dan Manajemen Risiko Director of Finance, Human Capital, and Risk Management	7	7	100
Digantikan sebelum tahun buku 2024 berakhir Replaced before the end of the 2024 fiscal year				
Sumadi	Komisaris Utama President Commissioner	4	4	100
Syailendra Ogan	Direktur Keuangan, *Human Capital* dan Manajemen Risiko Director of Finance, Human Capital, and Risk Management	4	4	100
Akhmadi Tricahyono	Direktur Operasi II Operations Director II	4	4	100

Adapun risalah dan daftar hadir dalam Rapat Koordinasi Direksi dengan Komisaris yang dilaksanakan sepanjang tahun buku 2024 adalah sebagai berikut:

The minutes and attendance lists of the Coordination Meetings between the Board of Directors and the Commissioners held throughout the 2024 fiscal year are as follows:

No	Tanggal Date	Agenda Agenda	No. Risalah Rapat No. Minutes of Meeting	Peserta Participants
1.	25 Januari 2024 January 25, 2024	RIS.01/A.DIR.WG.01628/2024	1. Tindak Lanjut Hasil Rakomdir sebelumnya; 2. Pembahasan dan Masukan Dekom atas Hasil Kinerja WIKA Gedung dan AP sampai dengan bulan Desember 2023; 3. Pembahasan Rencana Pemberian Shareholder (SHL) WIKA Gedung kepada WPG; 4. Pembahasan berkala Fungsi yang ada didalam Organisasi WIKA Gedung (Fungsi Penanganan Piutang dan Penanganan Proyek IKN); 5. Lain-lain. 1. Follow-up on Previous Board of Directors and Board of Commissioners Coordination Meeting (Rakomdir) Results; 2. Discussion and Input from the Board of Commissioners (Dekom) on the Performance Results of WIKA Gedung and AP up to December 2023; 3. Discussion on the Plan for Granting WIKA Gedung Shares (SHL) to WPG; 4. Periodic Discussion on Functions within the WIKA Gedung Organization (Receivables Handling Function and IKN Project Handling Function); 5. Others.	Dewan Komisaris: Board of Commissioners: Sumadi Suli Fatimah Danis H. Sumadilaga Joseph Prajogo Direksi: Board of Directors: Hadian Pramudita Syailendra Ogan Dwi Purnomo Bagus Tri Setyana Akhmadi Tricahyono

No	Tanggal Date	Agenda Agenda	No. Risalah Rapat No. Minutes of Meeting	Peserta Participants
2.	3 Maret 2024 March 3, 2024	RIS.01/A.KOM. WG.02195/2024	1. Tindak Lanjut Hasil Rakomdir sebelumnya; 2. Pembahasan dan Masukan Dekom atas Hasil Kinerja WIKA Gedung dan AP sampai dengan bulan Januari 2024; 3. Pembahasan berkala Fungsi yang ada didalam Organisasi WIKA Gedung (Fungsi Perencanan Usaha dan Pemasaran); 4. Lain-lain. 1. Follow-up on Previous Board of Directors and Board of Commissioners Coordination Meeting (Rakomdir) Results; 2. Discussion and Input from the Board of Commissioners (Dekom) on the Performance Results of WIKA Gedung and AP up to January 2024; 3. Periodic Discussion on Functions within the WIKA Gedung Organization (Business Planning and Marketing Functions); 4. Others.	Dewan Komisaris: Board of Commissioners: Sumadi Suli Fatimah Danis H. Sumadilaga Joseph Prajogo Taufan Gestoro Direksi: Board of Directors: Hadian Pramudita Syailendra Ogan Dwi Purnomo Bagus Tri Setyana Akhmadi Tricahyono
3.	1 April 2024 April 1, 2024	RIS.01/A.KOM. WG.06738/2024	1. Tindak Lanjut Hasil Rakomdir sebelumnya; 2. Pembahasan dan Masukan Dekom atas Hasil Kinerja WIKA Gedung dan AP sampai dengan bulan Februari 2024; 3. Pembahasan berkala Fungsi yang ada didalam Organisasi WIKA Gedung (Fungsi Pemasaran); 4. Lain-lain. 1. Follow-up on Previous Board of Directors and Board of Commissioners Coordination Meeting (Rakomdir) Results; 2. Discussion and Input from the Board of Commissioners (Dekom) on the Performance Results of WIKA Gedung and AP up to February 2024; 3. Periodic Discussion on Functions within the WIKA Gedung Organization (Marketing Function); 4. Others.	Dewan Komisaris: Board of Commissioners: Sumadi Suli Fatimah Danis H. Sumadilaga Joseph Prajogo Taufan Gestoro Direksi: Board of Directors: Hadian Pramudita Syailendra Ogan Dwi Purnomo Bagus Tri Setyana Akhmadi Tricahyono
4.	8 Mei 2024 May 8, 2024	RIS.01/A.KOM. WG.07107/2024	1. Tindak Lanjut Hasil Rakomdir sebelumnya; 2. Pembahasan dan Masukan Dekom atas Hasil Kinerja WIKA Gedung dan AP sampai dengan bulan Maret 2023; 3. Pembahasan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2024; 4. Pembahasan berkala Fungsi yang ada didalam Organisasi WIKA Gedung (Divisi Operasi); 5. Lain-lain. 1. Follow-up on Previous Board of Directors and Board of Commissioners Coordination Meeting (Rakomdir) Results; 2. Discussion and Input from the Board of Commissioners (Dekom) on the Performance Results of WIKA Gedung and AP up to March 2023; 3. Discussion on the Stipulation of Net Profit Usage for the 2024 Fiscal Year; 4. Periodic Discussion on Functions within the WIKA Gedung Organization (Operations Division); 5. Others.	Dewan Komisaris: Board of Commissioners: Sumadi Suli Fatimah Danis H. Sumadilaga Joseph Prajogo Taufan Gestoro Direksi: Board of Directors: Hadian Pramudita Syailendra Ogan Dwi Purnomo Bagus Tri Setyana Akhmadi Tricahyono

No	Tanggal Date	Agenda Agenda	No. Risalah Rapat No. Minutes of Meeting	Peserta Participants
5	11 Juni 2024 June 11, 2024	RIS.01/A.KOM. WG.08735/2024	1. Tindak Lanjut Hasil Rakomdir sebelumnya; 2. Pembahasan dan Masukan Dekom atas Hasil Kinerja WIKA Gedung dan AP sampai dengan bulan April 2024; 3. Pembahasan Pengukuran GCG dan Tata Kelola Terintegrasi; 4. Pembahasan berkala Fungsi yang ada didalam Organisasi WIKA Gedung (Tim Task Force Piutang - Legal); 5. Lain-lain. 1. Follow-up on Previous Board of Directors and Board of Commissioners Coordination Meeting (Rakomdir) Results; 2. Discussion and Input from the Board of Commissioners (Dekom) on the Performance Results of WIKA Gedung and AP up to April 2024; 3. Discussion on the Measurement of GCG (Good Corporate Governance) and Integrated Governance; 4. Periodic Discussion on Functions within the WIKA Gedung Organization (Receivables Task Force - Legal Team); 5. Others.	Dewan Komisaris: Board of Commissioners: Joseph Prajogo Suli Fatimah Danis H Sumadilaga Taufan Gestoro Direksi: Board of Directors: Hadian Pramudita Hartanto Karti Raharjo Bagus Tri Setyana Dwi Purnomo Tomo Dwihasputro
6.	10 Juli 2024 July 10, 2024	RIS.01/A.KOM. WG.09635/2024	1. Tindak Lanjut Hasil Rakomdir sebelumnya; 2. Pembahasan dan Masukan Dekom atas Hasil Kinerja WIKA Gedung dan AP sampai dengan bulan Mei 2024; 3. Pembahasan Kemungkinan Roadshow Direksi-Dekom ke Kreditur Perbankan; 4. Pembahasan berkala Fungsi yang ada didalam Organisasi WIKA Gedung (Biro Keuangan); 5. Lain-lain. 1. Follow-up on Previous Board of Directors and Board of Commissioners Coordination Meeting (Rakomdir) Results; 2. Discussion and Input from the Board of Commissioners (Dekom) on the Performance Results of WIKA Gedung and AP up to May 2024; 3. Discussion on the Possibility of a Roadshow by the Board of Directors and Board of Commissioners to Banking Creditors; 4. Periodic Discussion on Functions within the WIKA Gedung Organization (Finance Bureau); 5. Others.	Dewan Komisaris: Board of Commissioners: Joseph Prajogo Suli Fatimah Danis H Sumadilaga Taufan Gestoro Direksi: Board of Directors: Hadian Pramudita Hartanto Karti Raharjo Bagus Tri Setyana Dwi Purnomo Tomo Dwihasputro
7.	6 Agustus 2024 August 6, 2024	RIS.01/A.KOM. WG.10794/2024	1. Tindak Lanjut Hasil Rakomdir sebelumnya; 2. Pembahasan dan Masukan Dekom atas Hasil Kinerja WIKA Gedung dan AP sampai dengan bulan Juni 2024; 3. Pembahasan berkala Fungsi yang ada didalam Organisasi WIKA Gedung (IT Division); 4. Lain-lain. 1. Follow-up on Previous Board of Directors and Board of Commissioners Coordination Meeting (Rakomdir) Results; 2. Discussion and Input from the Board of Commissioners (Dekom) on the Performance Results of WIKA Gedung and AP up to June 2024; 3. Periodic Discussion on Functions within the WIKA Gedung Organization (IT Division); 4. Others.	Dewan Komisaris: Board of Commissioners: Joseph Prajogo Suli Fatimah Danis H Sumadilaga Taufan Gestoro Direksi: Board of Directors: Hadian Pramudita Hartanto Karti Raharjo Bagus Tri Setyana Dwi Purnomo Tomo Dwihasputro

No	Tanggal Date	Agenda Agenda	No. Risalah Rapat No. Minutes of Meeting	Peserta Participants
8.	18 September 2024 September 18, 2024	RIS.01/A.KOM.WG.11862/2024	1. Tindak Lanjut Hasil Rakomdir sebelumnya; 2. Pembahasan dan Masukan Dekom atas Hasil Kinerja WIKA Gedung dan AP sampai dengan bulan Juli 2024; 3. Pembahasan berkala Fungsi yang ada didalam Organisasi WIKA Gedung (Task Force Piutang - Litigasi); 4. Lain-lain. 1. Follow-up on Previous Board of Directors and Board of Commissioners Coordination Meeting (Rakomdir) Results; 2. Discussion and Input from the Board of Commissioners (Dekom) on the Performance Results of WIKA Gedung and AP up to July 2024; 3. Periodic Discussion on Functions within the WIKA Gedung Organization (Receivables Task Force - Litigation); 4. Others.	Dewan Komisaris: Board of Commissioners: Joseph Prajogo Suli Fatimah Danis H Sumadilaga Taufan Gestoro Direksi: Board of Directors: Hadian Pramudita Hartanto Karti Raharjo Bagus Tri Setyana Dwi Purnomo Tomo Dwihasputro
9.	9 Oktober 2024 October 9, 2024	SE.01.03/A.KOM.00002.WEGE/2024	1. Tindak Lanjut Hasil Rakomdir sebelumnya; 2. Pembahasan dan Masukan Dekom atas Hasil Kinerja WIKA Gedung dan AP sampai dengan bulan Agustus 2024; 3. Pembahasan Pengelolaan Data WIKA Gedung; 4. Lain-lain (Penerapan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi). 1. Follow-up on Previous Board of Directors and Board of Commissioners Coordination Meeting (Rakomdir) Results; 2. Discussion and Input from the Board of Commissioners (Dekom) on the Performance Results of WIKA Gedung and AP up to August 2024; 3. Discussion on WIKA Gedung Data Management; 4. Others (Implementation of Law Number 27 of 2022 Concerning Personal Data Protection).	Dewan Komisaris: Board of Commissioners: Joseph Prajogo Suli Fatimah Danis H Sumadilaga Taufan Gestoro Direksi: Board of Directors: Hadian Pramudita Hartanto Karti Raharjo Bagus Tri Setyana Dwi Purnomo Tomo Dwihasputro
10	7 November 2024 November 7, 2024	SE.01.03/A.KOM.00001.WEGE/2024	1. Tindak Lanjut Hasil Rakomdir sebelumnya; 2. Pembahasan dan Masukan Dekom atas Hasil Kinerja WIKA Gedung dan AP sampai dengan bulan September 2024; 3. Pengendalian Intern Tata Kelola Divisi Engineering WIKA Gedung; 4. Pembahasan Isu-isu Hasil Rakor Tata Kelola Terintegrasi; 5. Lain-lain. 1. Follow-up on Previous Board of Directors and Board of Commissioners Coordination Meeting (Rakomdir) Results; 2. Discussion and Input from the Board of Commissioners (Dekom) on the Performance Results of WIKA Gedung and AP up to September 2024; 3. Internal Control of the Governance of the Engineering Division of WIKA Gedung; 4. Discussion on Issues from the Integrated Governance Coordination Meeting (Rakor); 5. Others.	Dewan Komisaris: Board of Commissioners: Joseph Prajogo Suli Fatimah Danis H Sumadilaga Taufan Gestoro Direksi: Board of Directors: Hadian Pramudita Hartanto Karti Raharjo Bagus Tri Setyana Dwi Purnomo Tomo Dwihasputro

No	Tanggal Date	Agenda Agenda	No. Risalah Rapat No. Minutes of Meeting	Peserta Participants
11	30 Desember 2024 December 30, 2024	SE.01.03/A. KOM.00001. WEGE/2024	1. Tindak Lanjut Hasil Rapat Dewan Komisaris yang menyertakan Direksi (Rakomdir) sebelumnya; 2. Pembahasan dan Masukan Dewan Komisaris atas Hasil Kinerja WIKA Gedung dan Anak Perusahaan sampai dengan bulan November dan Prognosa Desember 2024; 3. Pembahasan Hasil Rakor Tata Kelola Terintegrasi Bulan Desember 2024; 4. Lain-lain. 1. Follow-up on Previous Board of Commissioners Meeting Including the Board of Directors (Rakomdir) Results; 2. Discussion and Input from the Board of Commissioners on the Performance Results of WIKA Gedung and its Subsidiaries up to November and Forecast for December 2024; 3. Discussion on the Results of the Integrated Governance Coordination Meeting (Rakor) in December 2024; 4. Others.	Dewan Komisaris: Board of Commissioners: Joseph Prajogo Suli Fatimah Danis H Sumadilaga Taufan Gestoro Direksi: Board of Directors: Hadian Pramudita Hartanto Karti Raharjo Bagus Tri Setyana Dwi Purnomo Tomo Dwihasputro

PENGUNGKAPAN HUBUNGAN AFILIASI ANTARA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ATAU PENGENDALI

Profil dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah diungkapkan di bab Profil Perusahaan dari laporan tahunan ini yang juga menjelaskan hubungan afiliasi antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pemegang Saham Pengendali. Terkait dengan hal tersebut, tabel di bawah ini adalah ringkasan dari hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali.

DISCLOSURE OF AFFILIATION BETWEEN BOARF OF DIRECTORS, BOARD OF COMMISSIONERS, AND MAJOR AND/OR CONTROLLING SHAREHOLDERS

The profiles of each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors have been disclosed in the Company Profile chapter of this annual report, which also explains the affiliation between the Board of Directors, Board of Commissioners, and Major and/or the Controlling Shareholders. In relation to this, the table below is a summary of the affiliation with the controlling shareholder.

REKAPITULASI HUBUNGAN AFILIASI ANTARA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM MAYORITAS

RECAP OF AFFILIATION BETWEEN BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF COMMISSIONERS, AND MAJOR SHAREHOLDERS AND/OR MAJORITY SHAREHOLDERS

Dewan Komisaris / Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Afiliasi Keuangan Dengan Financial Affiliation With					
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Utama/ Pengendali Major/Controlling Shareholders	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Joseph Prajogo	Komisaris Independen sekaligus Pelaksana Tugas Komisaris Utama Independent Commissioner and Acting President Commissioner	-	√	-	√	-	√
Suli Fatimah	Komisaris Commissioner	-	√	-	√	-	√
Danis Hidayat Sumadilaga	Komisaris Commissioner	-	√	-	√	-	√
Taufan Gestoro	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	√	-	√	-	√

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Afiliasi Keluarga Dengan Familial Affiliation With					
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Utama/ Pengendali Major/Controlling Shareholders	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Joseph Prajogo	Komisaris Independen sekaligus Pelaksana Tugas Komisaris Utama Independent Commissioner and Acting President Commissioner	-	√	-	√	-	√
Suli Fatimah	Komisaris Commissioner	-	√	-	√	-	√
Danis Hidayat Sumadilaga	Komisaris Commissioner	-	√	-	√	-	√
Taufan Gestoro	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	√	-	√	-	√

Direksi **Board of Directors**

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Afiliasi Keuangan Dengan Financial Affiliation With					
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Utama/ Pengendali Major/Controlling Shareholders	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Hadian Pramudita	Direktur Utama President Director	-	√	-	√	-	√
Hartanto Karti Raharjo	Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko Director of Finance, Human Capital, and Risk Management	-	√	-	√	-	√
Tomo Dwi Hasputro	Direktur Quality, Health, Safety, Environment dan Pemasaran Director of Quality, Health, Safety, Environment, and Marketing	-	√	-	√	-	√
Bagus Tri Setyana	Direktur Operasi I Operations Director I	-	√	-	√	-	√
Dwi Purnomo	Direktur Operasi II Operations Director II	-	√	-	√	-	√

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Afiliasi Keluarga Dengan Familial Affiliation With					
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Utama/ Pengendali Major/Controlling Shareholders	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Hadian Pramudita	Direktur Utama President Director	-	√	-	√	-	√
Hartanto Karti Raharjo	Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko Director of Finance, Human Capital, and Risk Management	-	√	-	√	-	√
Tomo Dwi Hasputro	Direktur Quality, Health, Safety, Environment dan Pemasaran Director of Quality, Health, Safety, Environment, and Marketing	-	√	-	√	-	√
Bagus Tri Setyana	Direktur Operasi I Operations Director I	-	√	-	√	-	√
Dwi Purnomo	Direktur Operasi II Operations Director II	-	√	-	√	-	√

PENGUNGKAPAN RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Ketentuan terkait rangkap jabatan Dewan Komisaris dan Direksi diatur secara jelas dalam POJK No. 21/.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan SEOJK No. No. 32/ SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Perusahaan berkomitmen memenuhi ketentuan tersebut dan kesesuaian dengan peraturan tersebut dijelaskan pada tabel berikut ini.

DISCLOSURE OF CONCURRENT POSITIONS HELD BY THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

The provisions regarding concurrent positions held by the Board of Commissioners and Board of Directors are clearly stipulated in POJK No. 21/POJK.04/2015 concerning the Implementation of Guidelines for Good Corporate Governance of Public Companies and SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Good Corporate Governance of Public Companies.

The Company is committed to fulfilling these provisions, and the compliance with these regulations is explained in the following table.

REKAPITULASI RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

RECAP OF CONCURRENT POSITIONS HELD BY THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Nama Name	**Jabatan** Position	**Kepengurusan pada Perusahaan/Institusi Lain** Positions Held in Other Companies/Institutions		
		Sebagai Anggota Dewan Komisaris As a Member of the Board of Commissioners	**Sebagai Anggota Direksi** As a Member of the Board of Directors	**Jabatan Lainnya** Other Positions
Joseph Prajogo	Komisaris Independen sekaligus Pelaksana Tugas Komisaris Utama Independent Commissioner and Acting President Commissioner	Komisaris Utama PT Berdikari Manajemen Investasi President Commissioner of PT Berdikari Manajemen Investasi	Direktur PT Petro Inovasi Indonesia Director of PT Petro Inovasi Indonesia	-
Suli Fatimah	Komisaris Commissioner	-	Senior Vice President of Human Capital Division PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	-
Danis Hidayat Sumadilaga	Komisaris Commissioner	-		• Pelaksana Tugas Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN (Otoritas Ibu Kota Nusantara • Widyaiswara Ahli Utama Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Acting Deputy for Facilities and Infrastructure, Ibu Kota Nusantara Authority (OIKN) • Principal Expert Instructor in Human Resource Development, Ministry of Public Works and Housing
Taufan Gestoro	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-	-
Hadian Pramudita	Direktur Utama President Director			
Hartanto Karti Raharjo	Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko Director of Finance, Human Capital, and Risk Management	-	-	-

Nama Name	Jabatan Position	Kepengurusan pada Perusahaan/Institusi Lain Positions Held in Other Companies/Institutions		
		Sebagai Anggota Dewan Komisaris As a Member of the Board of Commissioners	Sebagai Anggota Direksi As a Member of the Board of Directors	Jabatan Lainnya Other Positions
Tomo Dwi Hasputro	Direktur Quality, Health, Safety, Environment dan Pemasaran Director of Quality, Health, Safety, Environment, and Marketing	-	-	-
Bagus Tri Setyana	Direktur Operasi I Operations Director I	-	Komisaris PT Wege Solusi Proklamasi (Entitas Anak) Commissioner of PT Wege Solusi Proklamasi (Subsidiary Entity)	-
Dwi Purnomo	Direktur Operasi II Operations Director II	-	-	-

Informasi mengenai rincian rangkap jabatan Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilihat di bab Profil Perusahaan dari laporan tahunan.

Information regarding the details of concurrent positions held by the Board of Commissioners and Board of Directors can be found in the Company Profile chapter of this annual report.

Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Remuneration of The Board of Commissioners and Board Of Directors

KEBIJAKAN DAN MEKANISME PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Perseroan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-3/MBU/03/2023 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN, serta Instruksi Kerja Usulan dan Penetapan Penghasilan Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Asosiasi Nomor: MJ.05.00/A.DIR.WG.03435/2023 tanggal 3 Juli 2020. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan pemberian remunerasi dilakukan secara adil, kompetitif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Proses penetapan remunerasi melibatkan tahapan yang meliputi penyusunan, analisis, pengajuan, dan penetapan. Komite Nominasi & Remunerasi berperan dalam menyusun kebijakan dan memberikan rekomendasi berdasarkan kondisi keuangan perusahaan, skala usaha, tingkat inflasi, dan faktor relevan lainnya. Rekomendasi ini kemudian diajukan kepada Dewan Komisaris untuk dibahas lebih lanjut sebelum diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi mencakup komponen tetap, seperti gaji atau honorarium, tunjangan, dan fasilitas, serta komponen variabel berupa tantiem atau insentif kinerja. Penetapan komponen tetap didasarkan pada skala usaha, kompleksitas bisnis, dan kondisi keuangan perusahaan. Sementara itu, tantiem atau insentif kinerja diberikan berdasarkan pencapaian kinerja perusahaan yang diukur melalui merit rating dan evaluasi kinerja individu.

Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam kebijakan remunerasi termasuk kemampuan keuangan perusahaan, tingkat inflasi, kepatuhan terhadap regulasi, dan kondisi pasar industri. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan remunerasi yang kompetitif sehingga mampu mendukung motivasi dan kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.

POLICY AND MECHANISM FOR STIPULATING REMUNERATION FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

The Company establishes a remuneration policy for the Board of Commissioners and Board of Directors based on the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-3/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Stipulating the Remuneration of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of BUMN, as well as Work Instructions for Proposals and Stipulation of Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Subsidiaries/Associated Companies Number: MJ.05.00/A.DIR.WG.03435/2023 dated July 3, 2020. This policy is designed to ensure that remuneration is provided fairly, competitively, and in accordance with prevailing regulations.

The remuneration stipulation process involves stages that include preparation, analysis, submission, and determination. The Nomination & Remuneration Committee plays a role in formulating policies and providing recommendations based on the company's financial condition, business scale, inflation rate, and other relevant factors. These recommendations are then submitted to the Board of Commissioners for further discussion before being decided at the General Meeting of Shareholders (GMS).

The remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors includes fixed components, such as salary or honorarium, allowances, and facilities, as well as variable components in the form of bonuses or performance incentives. The stipulation of fixed components is based on the scale of the business, the complexity of the business, and the financial condition of the company. Meanwhile, bonuses or performance incentives are given based on the achievement of company performance as measured through merit ratings and individual performance evaluations.

Factors considered in the remuneration policy include the company's financial capacity, inflation rate, regulatory compliance, and industry market conditions. This approach aims to ensure competitive remuneration that can support the motivation and performance of the Board of Commissioners and Board of Directors in carrying out their duties and responsibilities.

Dengan kebijakan yang komprehensif dan berbasis kinerja, Perseroan berkomitmen untuk memberikan penghargaan yang sesuai atas kontribusi Dewan Komisaris dan Direksi dalam mendukung pencapaian tujuan strategis perusahaan.

With a comprehensive and performance-based policy, the Company is committed to providing appropriate rewards for the contribution of the Board of Commissioners and Board of Directors in supporting the achievement of the company's strategic goals.

STRUKTUR REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Struktur remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/05/2019 serta Instruksi Kerja Usulan dan Penetapan Penghasilan Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Asosiasi No. WIKA-HCE-IK-06.10, yang berlaku sejak 3 Juli 2020.

Komponen remunerasi ini dirancang untuk mencerminkan tanggung jawab, kinerja, dan kontribusi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam mendukung pencapaian tujuan strategis Perseroan. Adapun struktur remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

REMUNERATION STRUCTURE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

The remuneration structure of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors is stipulated based on the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-01/MBU/05/2019 and the Work Instruction for the Proposal and Stipulation of Remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries/Associated Companies No. WIKA-HCE-IK-06.10, which has been effective since July 3, 2020.

This remuneration component is designed to reflect the responsibilities, performance, and contributions of each member of the Board of Commissioners and Board of Directors in supporting the achievement of the Company's strategic objectives. The remuneration structure of the Board of Commissioners and Board of Directors for 2024 is as follows:

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris
Board of Commissioners' Remuneration Structure

Dewan Komisaris Board of Commissioner	**Jabatan** Position	**Masa Menjabat di Tahun 2024** Term of Office in 2024	**Penghasilan per Bulan** Income per Month		**Jumlah Penghasilan per Bulan** Amount of Remuneration per Month	
			Honorarium	**Tunjangan Transportasi** Transportation Allowance		
			(Rp)	**(Rp)**	**(Rp)**	
Sumadi*	Komisaris Utama President Commissioner	4	57,060,000	0	57,060,000	
Joseph Prajogo	Komisaris Independen yang sekaligus merangkap sebagai Pelaksana Tugas Komisaris Utama Independent Commissioner who also serves as Acting President Commissioner	12	53,095,500	10,619,100	63,714,600	
Suli Fatimah	Komisaris Commissioner	12	53,095,500	0	53,095,500	
Danis Hidayat Sumadilaga	Komisaris Commissioner	8	53,095,500	10,619,100	63,714,600	
Taufan Gestoro**	Komisaris Independen Independent Commissioner	8	53,095,500	10,619,100	63,714,600	
Jumlah Total			269,442,000	31,857,300	301,299,300	

*Pengunduran Diri efektif tanggal 15 Mei 2024. Mengukuhkan pemberhentian Sdr. Sumadi sebagai Komisaris Utama Perseroan dilakukan melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk Tahun Buku 2023 yang diselenggarakan pada tanggal 20 Mei 2024.
* Resignation effective in May 15, 2024. Confirming the dismissal of Mr. Sumadi as President Commissioner of the Company was carried out through the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk for the 2023 Fiscal Year held on May 20, 2024.

	Jumlah Penghasilan per Tahun Total Remuneration per Year	**Tunjangan Hari Raya** Holiday Allowance	**Pajak Remunerasi yang Ditanggung Perusahaan** Remuneration Tax Borne by the Company	**Asuransi Purna Jabatan** Post-Employment Insurance	**Jumlah Remunerasi Tahun 2024** Remuneration Amount in 2024
	(Rp)	**(Rp)**	**(Rp)**	**(Rp)**	**(Rp)**
	228,240,000	0	60,671,392	0	228,240,000
	764,575,200	51,354,000	229,407,300	132,109,968	948,039,168
	637,146,000	0	169,367,916	0	637,146,000
	509,716,800	51,354,000	152,253,064	106,191,000	667,261,800
	509,716,800	51,354,000	152,938,200	88,181,000	649,251,800
	2,649,394,800	154,062,000	764,637,872	326,481,968	3,129,938,768

**Menjabat sebagai Komisaris Independen berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada tanggal 29 Februari 2024.
** Served as Independent Commissioner based on the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) held on February 29, 2024.

Struktur Remunerasi Direksi
Board of Directors' Remuneration Structure

Direksi Directors	**Jabatan** Position	**Masa Menjabat di Tahun 2024** Term of Office in 2024	**Penghasilan per Bulan** Income per Month		**Jumlah Penghasilan per Bulan** Amount of Remuneration per Month	
			Honorarium	**Tunjangan Transportasi** Transportation Allowance		
			(Rp)	**(Rp)**	**(Rp)**	
Hadian Pramudita	Direktur Utama President Director	12	131,100,000	0	131,100,000	
Bagus Tri Setyana	Direktur Operasi I Director of Operations I	12	111,435,000	14,500,000	125,935,000	
Akhmadi Tricahyono**	Direktur Operasi II Director of Operations II	5	107,780,000	0	107,780,000	
Dwi Purnomo***	Direktur Quality, Health, Safety, Environment dan Pemasaran menjadi Direktur Operasi II Director of Quality, Health, Safety, Environment and Marketing becomes Director of Operations II	12	111,435,000	0	111,435,000	
Syailendra Ogan*	Direktur Keuangan, Human Capital & Manajemen Risiko Director of Finance, Human Capital & Risk Management	5	107,780,000	0	107,780,000	
Hartanto Kartiraharjo****	Direktur Keuangan, Human Capital & Manajemen Risiko Director of Finance, Human Capital & Risk Management	7	111,435,000	14,500,000	125,935,000	
Tomo Dwihasputro*****	Direktur Quality, Health, Safety, Environment dan Pemasaran Director of Quality, Health, Safety, Environment and Marketing	7	111,435,000	14,500,000	125,935,000	
Jumlah Total			792,400,000	43,500,000	835,900,000	

*Mengukuhkan pemberhentian Sdr. Syailendra Ogan sebagai Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko Perseroan dilakukan melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk Tahun Buku 2023 yang diselenggarakan pada tanggal 20 Mei 2024.
*Confirming the dismissal of Mr. Syailendra Ogan as Director of Finance, Human Capital, and Risk Management of the Company through the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk for the 2023 Fiscal Year held on May 20, 2024.
**Mengukuhkan pemberhentian Sdr. Akhmadi Tricahyono sebagai Direktur Operasi II Perseroan dilakukan melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk Tahun Buku 2023 yang diselenggarakan pada tanggal 20 Mei 2024.
**Confirming the dismissal of Mr. Akhmadi Tricahyono as Director of Operations II of the Company through the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk for the 2023 Fiscal Year held on May 20, 2024.
***Mengalihkan penugasan Sdr. Dwi Purnomo sebagai Direktur Quality, Health, Safety, Environment dan Pemasaran menjadi Direktur Operasi II melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk Tahun Buku 2023 yang diselenggarakan pada tanggal 20 Mei 2024.
***Transferring the assignment of Mr. Dwi Purnomo as Director of Quality, Health, Safety, Environment and Marketing to Director of Operations II through the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk for the 2023 Fiscal Year held on May 20, 2024.

	Jumlah Penghasilan per Tahun Total Remuneration per Year	Tunjangan Hari Raya Holiday Allowance	Pajak Remunerasi yang Ditanggung Perusahaan Remuneration Tax Borne by the Company	Asuransi Purna Jabatan Post-Employment Insurance	Jumlah Remunerasi Tahun 2024 Remuneration Amount in 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	1,573,200,000	173,698,630	706,976,604	342,926,136	2,089,824,766
	1,511,220,000	145,648,648	683,581,176	188,860,264	1,845,728,912
	538,900,000	145,648,648	216,681,910	116,414,980	800,963,628
	1,337,220,000	145,648,648	619,225,008	188,860,264	1,671,728,912
	538,900,000	145,648,648	216,681,910	79,344,965	763,893,613
	881,545,000	0	398,755,686	110,168,429	991,713,429
	881,545,000	0	419,267,814	110,168,429	991,713,429
	7,262,530,000	756,293,222	3,261,170,108	1,136,743,467	9,155,566,689

****Mengangkat Sdr. Hartanto Kartiraharjo sebagai Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko Perseroan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk Tahun Buku 2023 yang diselenggarakan pada tanggal 20 Mei 2024.
****Appointing Mr. Hartanto Kartiraharjo as Director of Finance, Human Capital, and Risk Management of the Company based on the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk for the 2023 Fiscal Year held on May 20, 2024.
*****Mengangkat Sdr. Tomo Dwihasputro sebagai Direktur Quality, Health, Safety, Environment dan Pemasaran Perseroan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk Tahun Buku 2023 yang diselenggarakan pada tanggal 20 Mei 2024.
*****Appointed Mr. Tomo Dwihasputro as Director of Quality, Health, Safety, Environment and Marketing of the Company based on the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk for the 2023 Financial Year held on May 20, 2024.

RASIO GAJI/HONORARIUM

Struktur gaji/honorarium Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan prinsip kewajaran, transparansi, serta kesesuaian dengan tanggung jawab dan peran masing-masing jabatan. Penetapan rasio ini bertujuan untuk mendukung motivasi, kinerja, dan sinergi antara Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka guna mencapai tujuan strategis Perseroan.

Adapun rasio gaji/honorarium tahun 2024 adalah sebagai berikut:

REMUNERATION/HONORARIUM RATIO

The remuneration/honorarium structure of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners has been prepared based on prevailing provisions and taking into account the principles of fairness, transparency, and suitability with the responsibilities and roles of each position. The stipulation of this ratio aims to support motivation, performance, and synergy between the Board of Directors and Board of Commissioners in carrying out their duties and responsibilities in order to achieve the Company's strategic objectives.

The remuneration/honorarium ratio for 2024 is as follows:

Rasio Gaji/Honorarium
Remuneration/Honorarium Ratio

No	Perihal About	2024	2023
1	Direktur Utama terhadap Direktur President Director to Director	Direktur Utama: 100% Direktur: 85% dari Direktur Utama President Director: 100% Director: 85% of President Director	Direktur Utama: 100% Direktur: 85% dari Direktur Utama President Director: 100% Director: 85% of President Director
2	Direktur Utama terhadap Komisaris Utama President Director to President Commissioner	Komisaris Utama: 45% dari Direktur Utama President Commissioner: 45% of President Director	Komisaris Utama: 45% dari Direktur Utama President Commissioner: 45% of President Director
3	Komisaris Utama terhadap Anggota Dewan Komisaris President Commissioner to Members of the Board of Commissioners	Komisaris Utama: 45% Komisaris: 90% dari Komisaris Utama President Commissioner: 45% Commissioner: 90% of President Commissioner	Komisaris Utama: 45% Komisaris: 90% dari Komisaris Utama President Commissioner: 45% Commissioner: 90% of President Commissioner

Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi

Diversity of The Board of Commissioners and Board of Directors

Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi merupakan variasi dalam komposisi anggota dewan. Perseroan secara konsisten mengedepankan prinsip keberagaman dalam pembentukan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi, yang mengacu pada pedoman yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

The Diversity of the Board of Commissioners and the Board of Directors represents the variation in the composition of the board members. The Company consistently prioritizes the principle of diversity in forming the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors, which refers to the guidelines stipulated in the Financial Services Authority Circular Letter Number 32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Good Corporate Governance of Public Companies.

Kebijakan ini menekankan pentingnya keberagaman dalam struktur organisasi, dengan tujuan agar Dewan Komisaris dan Direksi dapat berfungsi secara efektif dan memberikan pengawasan serta nasihat yang tepat. Keberagaman yang dimaksud meliputi keberagaman dalam keahlian, pengetahuan, dan pengalaman para anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Perseroan secara berkala memantau dan mengevaluasi komposisi Dewan Komisaris dan Direksi serta efektivitas dari kebijakan keberagaman tersebut.

This policy emphasizes the importance of diversity in the organizational structure, with the aim that the Board of Commissioners and the Board of Directors can function effectively and provide appropriate oversight and advice. The diversity referred to includes variety in the expertise, knowledge, and experience of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors. The Company periodically monitors and evaluates the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors as well as the effectiveness of the diversity policy.

Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi di Perseroan merujuk pada latar belakang anggota dewan tersebut, seperti pendidikan, pengalaman kerja, usia, etnis dan jenis kelamin. Implementasi keberagaman di Perseroan berperan penting untuk meningkatkan kinerja perusahaan karena dapat menghasilkan pemikiran yang lebih beragam disertai dengan pengambilan keputusan yang lebih baik.

The diversity of the Board of Commissioners and the Board of Directors at the Company refers to the background of the board members, such as education, work experience, age, ethnicity, and gender. The implementation of diversity at the Company plays an important role in improving company performance because it can generate more diverse thinking accompanied by better decision-making.

Perseroan memiliki komisaris yang memiliki pengalaman di hukum, ekonomi dan manajemen. Selain itu, Perseroan juga memiliki satu komisaris perempuan, di antara 4 (empat) komisaris laki-laki lainnya. Keberagaman anggota Dewan Komisaris dan Direksi tercermin pada tabel di bawah ini.

The Company has commissioners with experience in law, economics, and management. In addition, the Company also has one female commissioner among 4 (four) other male commissioners. The diversity of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors is reflected in the table below.

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

DIVERSITY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS' COMPOSITION

Riwayat Pendidikan Educational Background	Kapabilitas anggota Dewan Komisaris Perusahaan didukung oleh latar belakang yang terdiversifikasi dari Teknik Sipil, Akuntansi, Manajemen Perusahaan, dan Psikologi dari level S1 hingga S3. Gelar akademik tersebut diperoleh dari dalam dan luar negeri. Latar belakang yang beragam tersebut sangat diperlukan dalam menjalankan fungsi pengawasan atas pengelolaan Perusahaan oleh Dewan Komisaris dari berbagai sudut pandang. Capabilities of the Company's Board of Commissioners are supported by a diversified background in Civil Engineering, Accounting, Corporate Management, and Psychology, ranging from Bachelor's to Doctoral degrees. These academic qualifications were obtained both domestically and internationally. This diverse background is essential in carrying out the supervisory function over the Company's management by the Board of Commissioners from various perspectives.
Usia Age	Anggota Dewan Komisaris Perusahaan berusia antara 50-63 tahun pada akhir tahun buku 2024. Cakupan umur tersebut menunjukkan kematangan dan merefleksikan rekam jejak yang lama di dunia usaha khususnya di industri konstruksi. Members of the Company's Board of Commissioners ranged in age from 50 to 63 years old at the end of the 2024 fiscal year. This age range indicates maturity and reflects a long track record in the business world, particularly in the construction industry.

Karir dan Pengalaman Career and Experience	Anggota Dewan Komisaris Perusahaan sebagian besar memiliki rekam jejak karir dan pengalaman kerja di industri konstruksi dengan pernah bekerja di entitas induk Perusahaan. Kapabilitas tersebut diperkuat dengan anggota Dewan Komisaris lainnya yang pernah bekerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan IKN – PUPR. Selain itu, diversifikasi karir dan pengalam juga diperkaya oleh pengalaman anggota Dewan Komisaris yang pernah berkarir di sektor jasa dan perusahaan non-BUMN. Majority of the Company's Board of Commissioners members have career track records and work experience in the construction industry, having previously worked at the Company's parent entity. This capability is strengthened by other Board members who have worked at the Ministry of Public Works and Housing and as the Head of the IKN (Ibu Kota Nusantara) Development Implementation Task Force – PUPR. In addition, the diversification of careers and experience is also enriched by the experience of Board members who have worked in the service sector and non-SOE companies.
Jenis Kelamin Gender	Perusahaan mengakomodir kesetaraan gender dengan tetap mempertahankan kualitas dan kapabilitas individu untuk menduduki posisi tertentu termasuk sebagai anggota Dewan Komisaris. Meski bergerak di industri konstruksi bangunan, Perusahaan mengangkat salah satu anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang bergender perempuan menjadi salah satu komisaris Perusahan. Secara persentase, keterwakilan perempuan dalam Dewan Komisaris Perusahaan mencapai 20%. The Company accommodates gender equality while maintaining the quality and capability of individuals to hold certain positions, including as members of the Board of Commissioners. Despite operating in the building construction industry, the Company has appointed one female member to the Board of Commissioners. In terms of percentage, female representation on the Company's Board of Commissioners reaches 20%.

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DIREKSI

DIVERSITY OF THE BOARD OF DIRECTORS' COMPOSITION

Riwayat Pendidikan Educational Background	Komposisi Direksi Perusahaan sebagian besar berasal dari Teknik Sipil sesuai dengan karakteristik usaha Perusahaan di industri konstruksi gedung. Namun demikian, mengingat aspek pengelolaan Perusahaan juga mencakup aspek lainnya seperti keuangan, maka Direksi Perusahaan juga diisi oleh individu yang memiliki rekam jejak pendidikan dari bidang keuangan dan manajemen. Gelar akademik yang diperoleh anggota Direksi adalah S1 hingga S2 dari universitas di dalam dan luar negeri. Composition of the Company's Board of Directors is predominantly from Civil Engineering backgrounds, aligning with the Company's business characteristics in the building construction industry. However, considering that the management aspects of the Company also include other areas such as finance, the Board of Directors also includes individuals with educational backgrounds in finance and management. The academic degrees held by the Board of Directors range from Bachelor's to Master's degrees from universities both domestically and internationally.
Usia Age	Anggota Direksi berusia antara 43-62 tahun pada akhir tahun buku 2024. Cakupan umur tersebut menunjukkan kematangan dan merefleksikan rekam jejak yang lama di dunia usaha khususnya di industri konstruksi disamping mengakomodir suksesi dari usia muda tetapi didukung dengan rekam jejak dan prestasi yang mendukung pencapaian Perusahaan. Members of the Board of Directors ranged in age from 43 to 62 years old at the end of the 2024 fiscal year. This age range indicates maturity and reflects a long track record in the business world, particularly in the construction industry, while also accommodating succession from a younger age group supported by a track record and achievements that contribute to the Company's success.
Karir dan Pengalaman Career and Experience	Semua anggota Direksi memiliki rekam jejak yang panjang dan teruji di industri konstruksi serta berkarir di Group Wijaya Karya. Hal ini menunjukkan suksesi kepemimpinan yang berhasil dari internal Group. All members of the Board of Directors have a long and proven track record in the construction industry and have built their careers within Wijaya Karya Group. This demonstrates successful leadership succession from within the Group.
Jenis Kelamin Gender	Komposisi Direksi Perusahaan semuanya berjenis kelamin laki-laki terkait dengan karakteristik usaha di bidang konstruksi. Namun demikian, Perusahaan tetap menghargai dan mengakomodasi kesetaraan gender dalam kegiatan operasionalnya. Composition of the Company's Board of Directors is entirely male, which is related to the characteristics of the business in the construction sector. However, the Company remains values and accommodates gender equality in its operational activities.

Penilaian Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris

Performance Assessment of The Board of Commissioners and Board of Directors

Penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan berdasarkan kriteria evaluasi yang telah disepakati dalam perjanjian penunjukan mereka. Proses evaluasi dilakukan setiap tahun melalui RUPS, dengan mengacu pada kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Hasil dari evaluasi tersebut menjadi acuan dalam pengambilan keputusan terkait penunjukkan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi, baik secara kolektif maupun individu. Selain berpengaruh pada keputusan penunjukan kembali, hasil evaluasi juga berperan penting dalam penentuan struktur remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Kinerja Dewan Komisaris dan anggota Dewan Komisaris akan dievaluasi setiap tahun oleh Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris oleh RUPS

Secara umum, kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. maupun amanat Pemegang Saham. Kriteria evaluasi formal disampaikan secara terbuka kepada Dewan Komisaris sejak pengangkatannya. Hasil evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan dan kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris secara individual akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif bagi Dewan Komisaris.

Hasil evaluasi kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris secara individual merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham untuk pemberhentian dan/atau menunjuk kembali anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja Dewan Komisaris baik selaku Dewan maupun individu merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas Dewan Komisaris.

Prosedur Pelaksanaan Assessment Kinerja Dewan Komisaris

Kinerja Dewan Komisaris dilaporkan kepada Pemegang Saham melalui RUPS berdasarkan Board Manual dan Rencana Kerja Tahunan Dewan Komisaris.

Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan kriteria kinerja Dewan Komisaris maupun individu anggota Dewan Komisaris. Kriteria evaluasi kinerja individu Dewan Komisaris antara lain meliputi:

The performance evaluation of the Board of Commissioners and the Board of Directors is conducted based on evaluation criteria agreed upon in their appointment agreements. This evaluation process takes place annually through the General Meeting of Shareholders (GMS), referencing pre-determined criteria. The outcomes of this evaluation serve as a basis for decisions regarding the reappointment of individual and collective members of the Board of Commissioners and Board of Directors. Beyond influencing reappointment decisions, the evaluation results are also crucial in stipulating the remuneration structure for the Board of Commissioners and Board of Directors.

ASSESSMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS' PERFORMANCE

The performance of the Board of Commissioners and individual members of the Board of Commissioners will be evaluated annually by the Shareholders in the General Meeting of Shareholders.

Assessment of the Board of Commissioners' Performance by the GMS

In general, the performance of the Board of Commissioners is determined based on the duties and obligations stipulated in the prevailing laws and regulations and the Articles of Association of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, as well as the mandates of the Shareholders. Formal evaluation criteria are disclosed to the Board of Commissioners upon their appointment. The results of the evaluation of the overall performance of the Board of Commissioners and the individual performance of each member of the Board of Commissioners will be an integral part of the compensation and incentive scheme for the Board of Commissioners.

The individual performance evaluation results of each member of the Board of Commissioners serve as one of the bases for the Shareholders' consideration in the dismissal and/or reappointment of the relevant Board member. The performance evaluation results of the Board of Commissioners, both as a Board and as individuals, serve as a means of assessment and improvement of the Board's effectiveness.

Procedure for Implementing the Assessment of the Board of Commissioners' Performance

The performance of the Board of Commissioners is reported to the Shareholders through the GMS based on the Board Manual and Annual Work Plan of the Board of Commissioners.

Criteria of Evaluation of the Board of Commissioners' Performance

The General Meeting of Shareholders determines the criteria for the performance of the Board of Commissioners and individual members of the Board of Commissioners. The criteria of performance evaluation for individual of the Board of Commissioners include, but are not limited to:

1. Tingkat kehadirannya dalam Rapat Dewan Komisaris maupun rapat dengan komite-komite yang ada;
2. Kontribusinya dalam proses pengawasan Perseroan;
3. Keterlibatannya dalam penugasan tertentu;
4. Komitmennya dalam memajukan kepentingan Perusahaan; dan
5. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perusahaan.

Pihak yang Melakukan Assessment
Pihak yang melakukan assessment atas kinerja Dewan Komisaris yaitu Pemegang Saham dalam RUPS.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Untuk Tahun 2024, Dewan Komisaris telah menyusun rencana kerja tahunan Dewan Komisaris dengan memperhatikan tugas, wewenang dan kewajiban Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris telah menggunakan rencana kerja tahunan Dewan Komisaris tersebut sebagai perdoman kerja bagi setiap anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan Perseroan.

Dewan Komisaris memastikan untuk terus berperan aktif dalam memantau dan mengevaluasi kinerja Direksi dengan memberikan arahan yang konstruktif untuk menjaga keberlanjutan dan keberhasilan operasional Perseroan.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Kinerja Direksi dan anggota Direksi akan dievaluasi setiap tahun oleh Pemegang Saham dalam RUPS.

Penilaian Kinerja Direksi oleh RUPS

Secara umum, kinerja Direksi ditentukan berdasarkan target kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), tugas kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan, serta amanat Pemegang Saham. Kriteria evaluasi formal disampaikan secara terbuka kepada Direksi sejak pengangkatannya. Hasil evaluasi terhadap kinerja Direksi secara keseluruhan dan kinerja masing masing anggota Direksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pemberian skema kompensasi bagi Direksi.

Hasil evaluasi kinerja masing-masing anggota Direksi merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham untuk memberhentikan dan/atau menunjuk kembali anggota Direksi yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja Direksi baik selaku Dewan maupun individu juga merupakan sarana penilaian serta peningkatan

1. Level of attendance at Board of Commissioners meetings and meetings with existing committees;
2. Contribution to the Company's oversight process;
3. Involvement in specific assignments;
4. Commitment to advancing the Company's interests; and
5. Compliance with prevailing laws and regulations as well as Company policies.

Parties Conducting the Assessment
The party conducting the assessment of the performance of the Board of Commissioners is the Shareholders in the GMS.

Results of the Assessment of the Board of Commissioners' Performance
For the Year 2024, the Board of Commissioners has prepared an annual work plan for the Board of Commissioners by considering the duties, authorities, and responsibilities of the Board of Commissioners in accordance with prevailing laws and regulations. Throughout 2024, the Board of Commissioners has used this annual work plan as a working guideline for each member of the Board of Commissioners in carrying out the Company's oversight duties.

The Board of Commissioners ensures that it continues to play an active role in monitoring and evaluating the performance of the Board of Directors by providing constructive direction to maintain the sustainability and operational success of the Company.

ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE

The performance of the Board of Directors and individual members of the Board of Directors will be evaluated annually by the Shareholders in the GMS.

Assessment of the Board of Directors' Performance by the GMS

In general, the performance of the Board of Directors is determined based on the performance targets outlined in the Company's Work Plan and Budget (RKAP), the duties and obligations stipulated in the prevailing laws and regulations and the Company's Articles of Association, as well as the mandates of the Shareholders. Formal evaluation criteria are disclosed to the Board of Directors upon their appointment. The results of the evaluation of the overall performance of the Board of Directors and the individual performance of each member of the Board of Directors are an integral part of the compensation scheme for the Board of Directors.

The individual performance evaluation results of each member of the Board of Directors serve as one of the bases for the Shareholders' consideration in the dismissal and/or reappointment of the relevant Director. The performance evaluation results of the Board of Directors, both as a Board and as individuals, also serve as a means of

efektivitas Direksi. Direksi menyusun dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai pencapaian kinerja masing-masing Direktorat berdasarkan target-target dalam Kontrak Manajemen didalam RKAP sebagai kinerja masing-masing Direksi secara tepat waktu.

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Direksi

Kinerja Direksi dilaporkan kepada Pemegang Saham melalui RUPS berdasarkan Board Manual dan RKAP.

Kriteria Evaluasi Kinerja Direksi

RUPS menetapkan kriteria kinerja Direksi maupun individu anggota Direksi. Kriteria evaluasi kinerja individu anggota Direksi antara lain meliputi:

1. Tingkat kehadiran dalam Rapat Direksi maupun Rapat Koordinasi Direksi dengan Komisaris;
2. Kesiapannya dengan materi yang akan dibahas dalam rapat;
3. Partisipasinya dalam pembahasan masalah maupun dalam pengambilan keputusan;
4. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan perusahaan;
5. Pencapaian target yang tertuang dalam Kontrak Manajemen pada RKAP; dan
6. Komitmennya terhadap keputusan bersama yang telah dibuat.

Pihak yang Melakukan Assessment

Penilaian kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris serta RUPS. Dasar penilaian kinerja mengacu kepada indikator kinerja kunci (KPI). Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta pencapaian kinerja pada periode 2024 akan disampaikan dan dipertanggungjawabkan di dalam RUPS.

Hasil Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian kinerja Direksi dilakukan secara berkelanjutan dan biasanya diintegrasikan dengan proses RUPS. Di tahun 2024, Direksi telah membawa perubahan yang positif untuk keberlangsungan bisnis Perseroan. Direksi berfokus pada pendekatan strategis yang terencana dan terarah melalui implementasi kebijakan yang telah ditetapkan, memonitor dan mengevaluasi setiap langkah yang diambil untuk memastikan tercapainya tujuan jangka panjang Perseroan.

assessment and improvement of the Board's effectiveness. The Board of Directors prepares and submits to the Board of Commissioners/ Board of Supervisors regarding the performance achievements of each Directorate based on the targets in the Management Contract within the RKAP as the individual performance of each Board of Director in a timely manner.

Procedure for Implementing the Assessment of the Board of Directors' Performance

The performance of the Board of Directors is reported to the Shareholders through the GMS based on the Board Manual and the RKAP.

Criteria of Evaluation of the Board of Directors' Performance

The GMS determines the performance criteria for the Board of Directors and individual members of the Board of Directors. The individual performance evaluation criteria for the members of the Board of Directors include, but are not limited to:

1. Level of attendance at Board of Directors meetings and Coordination Meetings between the Board of Directors and the Commissioners;
2. Preparedness with the materials to be discussed in meetings;
3. Participation in problem discussions and decision-making;
4. Compliance with prevailing laws and regulations and company policies;
5. Achievement of targets outlined in the Management Contract within the RKAP; and
6. Commitment to joint decisions that have been made.

Parties Conducting the Assessment

Performance assessment of the Board of Directors is conducted by the Board of Commissioners and the GMS. The basis for performance assessment refers to key performance indicators (KPIs). The implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors, as well as performance achievements in the 2024 period, will be presented and accounted for in the GMS.

Results of the Assessment of the Board of Directors' Performance

Performance assessment of the Board of Directors is carried out continuously and is usually integrated with the GMS process. In 2024, the Board of Directors has brought positive changes for the sustainability of the Company's business. The Board of Directors focused on a planned and directed strategic approach through the implementation of established policies, monitoring and evaluating every step taken to ensure the achievement of the Company's long-term goals.

Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

DASAR HUKUM

Sistem Pengendalian Internal Perseroan telah diatur dalam:

1. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/ MBU/-03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

2. Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 06 Juni 2012 tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara parameter No. 107, Direksi harus menetapkan suatu sistem pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perusahaan.

Dengan adanya Sistem Pengendalian Internal diharapkan dapat menumbuhkan awareness dalam upaya mengendalikan risiko yang kerap dihadapi Perusahaan.

LEGAL BASIS

The Company's Internal Control System is regulated in:

1. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-02/MBU/-03/2023 on March 24, 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

2. Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 on June 06, 2012 on Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises parameter No. 107, the Board of Directors is required to establish an effective internal control system to secure the Company's investments and assets.

The Internal Control System is expected to foster awareness in controlling the risks that are often encountered by the Company.

STRUKTUR ORGANISASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem Pengendalian Internal dilaksanakan secara berkesinambungan oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh organ Perusahaan. Dipimpin oleh Head of Internal Audit sistem Pengendalian Internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Internal Audit telah diuraikan secara rinci pada Sub-Bab Internal Audit.

ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Internal Control System is implemented continuously by the Board of Commissioners, Board of Directors, and all organs of the Company. It is led by the Head of Internal Audit, who is directly responsible to the President Director. The duties, responsibilities, and authority of Internal Audit have been described in detail in the Internal Audit Sub-Chapter.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PERUSAHAAN

Sebagaimana diatur dalam Pedoman Kerja, ruang lingkup Sistem Pengendalian Risiko Perusahaan mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian internal dalam Perusahaan yang disiplin dan terstruktur, yang terdiri dari:
   a. Integritas, nilai etika, dan kompetensi pegawai.
   b. Filosofi dan gaya manajemen.
   c. Cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab.
   d. Pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia.
   e. Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.

THE COMPANY'S INTERNAL CONTROL SYSTEM

As stipulated in the Work Guidelines, the scope of the Company's Risk Control System includes the following matters:

1. A disciplined and structured internal control environment within the Company, consisting of:
   a. Integrity, ethical values, and employee competence.
   b. Management philosophy and style.
   c. The method adopted by management in exercising authority and responsibility.
   d. Organization and development of human resources.
   e. Attention and direction given by the Board of Directors.

2. Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha, yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan mengelola risiko usaha yang relevan.
3. Aktivitas pengendalian yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan Perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas dan keamanan terhadap aset Perusahaan.
4. Sistem informasi dan komunikasi yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, dan ketaatan atas ketentuan dan peraturan yang berlaku pada Perusahaan.
5. Monitoring yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal, termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit struktur organisasi Perusahaan, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal, dengan ketentuan bahwa penyimpangan yang terjadi dilaporkan kepada Direksi dan tembusannya disampaikan kepada Komite Audit.
6. Untuk membantu Direksi dalam melakukan perencanaan, pengendalian, koordinasi dalam pengawasan, penilaian atas sistem pengendalian manajemen dan pelaksanaan seluruh kegiatan perusahaan serta memberikan saran-saran perbaikan dibentuk fungsi Internal Audit.
7. Internal Audit dipimpin oleh Head of Internal Audit melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Penjabaran lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Internal Audit diatur dengan Keputusan Direksi.

Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Sistem Pengendalian Internal melibatkan seluruh organ Perusahaan dan sesuai dengan visi misi Perusahaan. Proses pengendalian dilaksanakan secara terus menerus oleh Direksi, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan Perusahaan.

2. Business risk assessment and management, as a process to identify, analyze, assess, and manage relevant business risks.
3. Control activities, including measures taken in a process of controlling the Company's activities at every level and unit in the Company's organizational structure, regarding authority, authorization, verification, assessment of work performance, division of duties and security of the Company's assets.
4. Information and communication system, including a process of presenting reports on operational, financial, and compliance with the provisions and regulations prevailing in the Company.
5. Monitoring is the process of assessing the quality of the internal control system, including the internal audit function at each level and unit of the Company's organizational structure, in order to be implemented optimally, provided that deviations that occur are reported to the Board of Directors and a copy is submitted to the Audit Committee.
6. Assisting the Board of Directors in planning, controlling, coordinating in supervising, assessing the management control system and the implementation of all company activities and providing suggestions for improvement, the Internal Audit function is established.
7. The Internal Audit is under the supervision of the Head of Internal Audit and is responsible to the President Director. Further elaboration of the duties and functions of the Internal Audit is regulated by Decree of the Board of Directors.

The effectiveness of the implementation of duties and responsibilities of the Internal Control System involves all organs of the Company and is in accord with the Company's vision and mission. The control process is carried out continuously by the Board of Directors, Structural Officials, Functional Officials and Executives designed to provide adequate assurance of the achievement of the Company's Vision, Mission, Goals and Objectives.

ASPEK KEUANGAN DAN OPERASIONAL DALAM PENGENDALIAN INTERNAL

Setiap jabatan dalam Perusahaan membutuhkan Sistem Pengendalian Internal karena mencakup aspek pengendalian keuangan dan operasional. Pengendalian internal atas proses bisnis menjadi pilar penting dalam menjalankan kegiatan usaha.

Sepanjang tahun 2024, Pengendalian internal atas proses bisnis yang berjalan menunjukkan bahwa kesadaran untuk menjalankan tugas sesuai dengan koridor yang sudah ditetapkan dan disepakati serta telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KOMITMEN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL OLEH MANAJEMEN DAN KARYAWAN

Perusahaan memandang Sistem Pengendalian Internal berperan penting dalam implementasi praktik tata kelola perusahaan yang baik. Untuk itu, Perusahaan berkomitmen unttuk fokus dalam penerapan Sistem Pengendalian Internal sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Sistem Pengendalian Internal Perusahaan.

Sistem Pengendalian Internal Perusahaan secara aktif diikuti oleh seluruh organ Perusahaan dengan komponen sebagai berikut:

1. Membangun lingkungan pengendalian yang mendukung efektifitas penerapan komponen pengendalian internal lainnya.
2. Melakukan penilaian risiko dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
3. Menyusun dan melaksanakan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa arahan Direksi dilaksanakan sebaik-baiknya.
4. Mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, guna memudahkan aktifitas pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban.

FINANCIAL AND OPERATIONAL ASPECTS OF THE INTERNAL CONTROL

Every position in the Company requires an Internal Control System as it covers both financial and operational control aspects. Internal control over business processes is an important pillar in carrying out business activities.

Throughout 2024, the internal control over the business processes indicated that the awareness to carry out duties in accord with the corridors that have been stipulated and agreed upon and have complied with the prevailing laws and regulations.

COMMITMENT TO THE IMPLEMENTATION OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM BY MANAGEMENT AND EMPLOYEES

The Company believes that the Internal Control System has an important role in the implementation of good corporate governance practices. Therefore, the Company is committed to focus on the implementation of the Internal Control System as stipulated in the General Guidelines for the Company's Internal Control System.

The Company's Internal Control System is effectively followed by all organs of the Company with the following components:

1. Creating a control environment that supports the effective implementation of other internal control components.
2. Conducting risk assessments in performing their duties and functions.
3. Developing and implement policies and procedures to ensure that the Board of Directors' directives are properly implemented.
4. Identifying, recording and communicating information related to the implementation of the main duties and functions, to facilitate implementation, control and accountability activities.

5. Menilai kualitas Sistem Pengendalian Internal Perusahaan melalui pemantauan yang berkelanjutan atas semua kegiatan usaha yang berjalan dan pelaksanaan evaluasi yang menyeluruh dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern atau pihak independen yang ditunjuk oleh Direktur Utama.

Perusahaan memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki risiko yang akan terjadi. Komitmen penerapan sistem pengendalian internal Perusahaan antara lain:

1. Penerapan Manajemen *lean construction*.
2. Penerapan Prinsip Tata Kelola Terintegrasi (TKT)
3. Penetapan, Monitoring, Evaluasi, dan Efektivitas Risiko Strategis dan Operasional serta Self-Assessment Risk Maturity Level (SARML).
4. Melaksanakan Reviu Reguler Prosedur & IK (instruksi kerja) secara berkala.
5. Melaporkan Evaluasi Hasil Usaha setiap periodik melalui *Executive Summary*.
6. Menjadi *Counterpart* Audit Internal dan Eksternal perusahaan.
7. Penerapan transformasi digital dengan implementasi ERP & SAP WEGE.

KESESUAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DENGAN KERANGKA YANG DIAKUI SECARA INTERNASIONAL

Komponen utama dalam penerapan sistem pengendalian internal Perusahaan dilakukan dengan menggunakan metode standar *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) – *Internal Control Framework* yang meliputi:

5. Assessing the quality of the Company's Internal Control System through continuous monitoring of all ongoing business activities and the implementation of a comprehensive evaluation conducted by the Internal Audit Unit or an independent party appointed by the President Director.

The Company is committed to comply with the prevailing laws and regulations and adopt measures to mitigate the risks that may occur. The commitment to implementing the Company's internal control system includes:

1. Implementation of lean construction management.
2. Implementation of Integrated Governance Principles (TKT).
3. Determination, Monitoring, Evaluation, and Effectiveness of Strategic and Operational Risks and Self-Assessment Risk Maturity Level (SARML).
4. Conducting regular review of procedures & work instructions (IK) on a regular basis.
5. Reporting Business Result Evaluation periodically through Executive Summary.
6. Providing counterpart to the company's Internal and External Audit.
7. Implementation of digital transformation with ERP & SAP WEGE implementation.

COMPLIANCE OF INTERNAL CONTROL SYSTEM WITH INTERNATIONAL RECOGNIZED FRAMEWORK

The main components in the implementation of the Company's internal control system are carried out using the standard method of the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) - Internal Control Framework as follows:

NO	Komponen Pengendalian Internal WEGE Sejalan Dengan COSO Internal Control Integrated Framework WEGE Internal Control Components align with COSO Internal Control Integrated Framework	Penerapan Tahun 2024 2024 Implementation
1	**Lingkungan Pengendalian** Control Environment Merupakan dasar komponen pengendalian internal yang menyediakan arahan bagi organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian dari orang-orang yang ada di dalam Perusahaan. Beberapa faktor yang berpengaruh di dalam *Control Environment* antara lain integritas dan nilai etik, komitmen terhadap kompetensi, Direksi dan Komite Audit, gaya manajemen dan gaya operasi, struktur organisasi, pemberian wewenang dan tanggung jawab, praktik dan kebijakan SDM. It is the basic component of internal control that provides direction for the organization and influences the control awareness of the people in the Company. Some of the influential factors in the Control Environment are integrity and ethical values, commitment to competence, Board of Directors and Audit Committee, management style and operating style, organizational structure, delegation of authority and responsibility, HR practices and policies.	Selama tahun 2024 dalam berbagai macam aktivitas pelaksanaan tugas internal audit, telah melakukan evaluasi kebijakan dan prosedur untuk memastikan kecukupan dalam mengatasi risiko, mengidentifikasi dan menganalisis risiko, serta merekomendasikan peningkatan kontrol internal berdasarkan temuan audit, memberikan dukungan yang kuat untuk pelatihan staf mengenai kepatuhan dan pengendalian internal serta memantau kepatuhan prosedur dan peraturan yang berlaku, dst. Throughout 2024, in the course of various internal audit activities, it has evaluated policies and procedures to ensure adequacy in addressing risks, identified and analyzed risks, and recommended internal control improvements based on audit findings, provided strong support for staff training on compliance and internal control, and monitored compliance with prevailing procedures and regulations, and so on.
2	**Penilaian Risiko** Risk Assessment Menganalisa risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya dan membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Analyze risks relevant to achieve its objectives and form a basis to decide how risks should be managed.	Terdapat upaya untuk meningkatkan efektivitas penilaian risiko yang berkaitan dengan penjadwalan dan pengelolaan proyek yang menyebabkan terganggunya produksi. Yang dilakukan dengan *improvement* sistem penilaian risiko yang sudah berjalan, khususnya dalam mengintegrasikan jadwal pengadaan dengan proyek yang berlangsung. Attempts were made to improve the effectiveness of risk assessment related to the scheduling and management of projects that cause production disruptions. An improvement was made to the existing risk assessment system, especially in integrating procurement schedules with ongoing projects.

NO	Komponen Pengendalian Internal WEGE Sejalan Dengan COSO Internal Control Integrated Framework WEGE Internal Control Components align with COSO Internal Control Integrated Framework	Penerapan Tahun 2024 2024 Implementation
3	**Aktivitas Pengendalian** Control Activities Memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi risiko dalam pencapaian tujuan Perusahaan. Tindakan yang dilakukan untuk mengatasi risiko terdiri dari tindakan preventif dan tindakan mitigasi. Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum kejadian yang berisiko berlangsung, sedangkan tindakan mitigasi adalah tindakan yang dilakukan setelah kejadian berisiko berlangsung. Ensuring that the necessary actions are taken to address risks in achieving the Company's objectives. Actions taken to address risks consist of preventive actions and mitigation actions. Preventive action applies to actions taken before a risky event takes place, while mitigation action applies to actions taken after a risky event has taken place.	Aktivitas pengendalian diperkuat dengan penerapan kontrol yang lebih ketat terhadap proses pengadaan dan kontrak, yang merupakan upaya untuk peningkatan tindakan mitigasi risiko dan pengawasan proyek dalam hal meminimalisir gangguan terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Control activities are reinforced by the implementation of tighter controls over procurement and contracting processes, resulting in enhanced risk mitigation measures and project oversight to minimize disruption to the achievement of company objectives.
4	**Informasi dan Komunikasi** Information and Communication Menyediakan informasi yang relevan dalam pelaporan keuangan meliputi sistem akuntansi berisi metode untuk mengidentifikasikan, menggabungkan, menganalisa, mengklasikasi, mencatat dan melaporkan transaksi serta menjaga akuntabilitas aset dan kewajiban. Informasi tersebut harus diidentifikasi, tergambar dan terkomunikasi dalam sebuah form dan *time frame* yang memungkinkan orang-orang menjalankan tanggung jawabnya. Providing relevant information in financial reporting involves an accounting system containing methods to identify, aggregate, analyze, classify, record and report transactions and maintain accountability for assets and liabilities. The information is required to be identified, described and communicated in a form and time frame that enables people to carry out their responsibilities.	Upaya untuk peningkatan komunikasi dan informasi terkait pelaporan keuangan telah dilakukan melalui penyajian laporan keuangan yang berintegritas. Undertakings to improve communication and information related to financial reporting have been made through the presentation of financial reports with integrity.

NO	Komponen Pengendalian Internal WEGE Sejalan Dengan COSO Internal Control Integrated Framework WEGE Internal Control Components align with COSO Internal Control Integrated Framework	Penerapan Tahun 2024 2024 Implementation
5	**Pemantauan Pengendalian Internal** Internal Control Monitoring Merupakan proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Pemantauan meliputi penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, evaluasi secara terpisah, atau dengan berbagai kombinasi dari keduanya. Dalam hal ini Audit Internal Perusahaan memberikan kontribusi dalam memantau aktivitas Perusahaan. Monitoring is a process that defines quality of internal control performance over time. Monitoring consists of assessing the design and operation of controls in a timely manner and taking corrective action. It is conducted through ongoing activities, separate evaluations, or some combination thereof. The Company's Internal Audit contributes to monitoring the Company's activities.	Proses pemantauan internal telah menunjukkan hasil yang memadai, dimana peningkatan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa tindakan perbaikan diimplementasikan secara efektif dan kelemahan yang sama tidak terulang di masa depan. The internal monitoring process has shown adequate results, where continuous improvement is required to ensure that corrective actions are implemented effectively and the same weaknesses are not reoccurred in the future.

TINJAUAN HASIL EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Dalam pelaksanaannya Audit Internal bertugas melakukan pengawasan atas proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal. Pengawasan dan penilaian tersebut berupa penyajian laporan kegiatan operasional, finansial dan legal secara periodik setiap triwulan agar dapat dilaksanakan secara optimal.

Internal Audit selanjutnya melaporkan hasil pengawasan dan penilaian kepada Direksi Perusahaan. Dalam hal ini Direksi bertanggung jawab untuk memastikan penerapan sistem pengendalian internal telah memenuhi tujuan. Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit dan Komite Tata Kelola Terintegrasi juga bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas penyelenggaraan sistem pengendalian internal.

Internal Audit melakukan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas implementasi Sistem Pengawasan Intern secara menyeluruh yang dilakukan untuk mendukung keputusan dan kebijakan Direksi tentang efektivitas Sistem Pengendalian Internal perusahaan yang telah diterapkan.

Sepanjang tahun 2024, Komite Audit Perusahaan telah melakukan penelahaan secara mendalam mengenai kecukupan dan efektifitas penerapan Sistem Pengendalian Internal dan menilai bahwa Sistem Pengendalian Internal Perusahaan telah berjalan efektif.

EVALUATION REVIEW OF INTERNAL CONTROL SYSTEM

In its implementation, Internal Audit is in charge of supervising the process of assessing the quality of the internal control system. The supervision and assessment is in the form of periodic presentation of operational, financial and legal activity reports every quarter in order to be executed optimally.

Furthermore, Internal Audit reports the results of supervision and assessment to the Company's Board of Directors. The Board of Directors is responsible for ensuring that the implementation of the internal control system has met its objectives. The Board of Commissioners assisted by the Audit Committee and Integrated Governance Committee is also responsible for supervising the implementation of the internal control system.

Internal Audit evaluates the adequacy and effectiveness of the implementation of the Internal Control System as a whole, which is carried out to support the decisions and policies of the Board of Directors regarding the effectiveness of the company's Internal Control System that has been implemented.

Throughout the year, the Company's Audit Committee has conducted an in-depth review of the adequacy and effectiveness of the implementation of the Internal Control System and assessed that the Company's Internal Control System has been running effectively.

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAS KECUKUPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PERUSAHAAN

Direksi dan/atau Dewan Komisaris menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal yang telah diimplementasikan di sepanjang tahun 2024 telah berjalan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan, dan bertanggung jawab untuk menetapkan dan memelihara suatu struktur pengendalian internal dan prosedur pelaporan keuangan yang memadai, dan pernyataan atas efektivitas struktur pengendalian internal dan prosedur pelaporan keuangan.

DECLARATION OF THE BOARD OF DIRECTORS AND/OR BOARD OF COMMISSIONERS ON THE ADEQUACY OF THE COMPANY'S INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Board of Directors and/or Board of Commissioners declare that the Internal Control System that has been implemented throughout 2024 has been running in accord with the needs of the Company and is responsible for establishing and maintaining an adequate internal control structure and financial reporting procedures, and a statement on the effectiveness of the internal control structure and financial reporting procedures.

Manajemen Risiko
Risk Management

Dalam menjalankan setiap bisnisnya, Perseroan tidak terlepas dari risiko yang kemungkinan akan terjadi. Perseroan menyadari pentingnya pengelolaan risiko yang dilakukan secara proaktif untuk meminimalisir dampak dari berbagai risiko yang mungkin timbul. Oleh karena itu, Perseroan mengelola dan memitigasi risiko diharapkan mampu menangani, menciptakan atau menghasilkan peluang dalam memastikan sasaran maupun tujuan tercapai.

In carrying out its business, the Company is exposed to potential risks. The Company recognizes the importance of proactive risk management to minimize the impact of various potential risks. Therefore, the Company manages and mitigates risks, expecting to handle, create, or generate opportunities to ensure targets and objectives are achieved.

Manajemen risiko dalam proyek konstruksi merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, menilai dan mengendalikan potensi risiko yang dapat mempengaruhi pelaksanaan proyek. Perseroan berupaya untuk melakukan identifikasi potensi risiko yang muncul pada proyek Perseroan, mulai dari keterlambatan pasokan material, cuaca ekstrem, hingga risiko keselamatan pekerja.

Risk management in construction projects is a systematic process to identify, assess, and control potential risks that may affect project execution. The Company strives to identify potential risks that arise in the Company's projects, from delays in material supply, extreme weather, to worker safety risks.

DASAR PELAKSANAAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Sebagaimana diatur dalam Pedoman Kerja Perseroan telah mengatur tentang kebijakan sistem manajemen. Sistem manajemen risiko merupakan kunci untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan bisnis di tengah ketidakpastian. Dengan mengenali, menganalisis dan mengelola risiko secara efektif, Perseroan dapat melindungi asetnya, meminimalkan kerugian, dan memanfaatkan peluang baru.

BASIS FOR IMPLEMENTING RISK MANAGEMENT SYSTEM

As regulated in the Company's Board Manual, the policy on the management system is established. The risk management system is key to maintaining business stability and sustainability amidst uncertainty. By effectively recognizing, analyzing, and managing risks, the Company can protect its assets, minimize losses, and capitalize on new opportunities.

Dalam menerapkan manajemen risiko, Perseroan telah mengembangkan Sistem Manajemen Risiko yang terintegrasi di tingkat korporasi dengan melibatkan masing masing satuan kerja. Pengembangan Sistem Manajemen Risiko merupakan bagian tak terpisahkan dari strategi jangka panjang yang bertujuan untuk mengidentifikasi semua risiko dan mengelola posisi risiko sesuai dengan kebijakan dan risk appetite Perseroan.

In implementing risk management, the Company has developed a Risk Management System integrated at the corporate level, involving each work unit. The development of the Risk Management System is an integral part of the long-term strategy that aims to identify all risks and manage risk positions in accordance with the Company's policies and risk appetite.

Perseroan juga telah melakukan penyempurnaan Prosedur Sistem Manajemen Risiko pada tanggal 21 Mei 2024 dengan diterbitkannya Prosedur Sistem Manajemen Risiko Perseroan No.Dok: WG-ERM-PM-01, No.Rev: 06 dengan disetujui oleh seluruh Direksi serta disahkan oleh Direktur Utama. Perubahan prosedur sistem manajemen risiko tersebut dengan mengacu kepada ISO 31000:2018. Atas penyempurnaan prosedur tersebut, Perseroan menerbitkan kebijakan Manajemen Risiko pada tanggal 3 Januari 2024 dimana kebijakan ini ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip GCG dan kerangka kerja ISO 31000:2018.

The Company also revised the Risk Management System Procedures on May 21, 2024, with the issuance of the Company's Risk Management System Procedures No. Dok: WG-ERM-PM-01, No. Rev: 06, approved by all Directors and ratified by the President Director. The changes to the risk management system procedures refer to ISO 31000:2018. Based on the revised procedures, the Company issued a Risk Management Policy on January 3, 2024, where this policy is established based on the principles of GCG and the ISO 31000:2018 framework.

Sebagai panduan Manajemen Risiko, Perseroan mengantisipasi segala dampak negatif dari ketidakpastian dan peluang pada hasil yang diharapkan terhadap sasaran dan tujuan yang berlandaskan pada ISO 9001:2015, ISO 27001:2013, ISO 37001:2016 dan ISO 31000:2018.

As a Risk Management guide, the Company anticipates all negative impacts of uncertainty and opportunities on the expected results of targets and objectives based on ISO 9001:2015, ISO 27001:2013, ISO 37001:2016 and ISO 31000:2018.

STRUKTUR ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO

Proses manajemen risiko dilaksanakan oleh Project Management Office dan Risk Management Division. Fungsi dalam proses bisnis yang disesuaikan dengan konteks risiko dalam lingkungan masing-masing, yakni:

a. Project Management Office Enterprise Department yang bertugas mengkaji anggaran Perseroan, merencanakan usaha tahunan tingkat perusahaan, menyajikan laporan tentang kinerja perusahaan dan laporan hasil usaha kepada pihak-pihak terkait dalam rangka menunjang optimalisasi hasil usaha perusahaan dengan menerapkan Sistem Manajemen Perseroan yang berlaku;
b. Project Management Office Operation Department yang bertugas memastikan ketercapaian kinerja hasil usaha proyek untuk mendukung pencapaian visi, misi dan keberlanjutan perusahaan dengan menerapkan Sistem Manajemen Perseroan yang berlaku.
c. Risk Management Department yang bertugas memastikan berjalannya penerapan, pengembangan, pengendalian, implementasi sistem dan prosedur terkait manajemen risiko di tingkat perusahaan yang terintegrasi dari semua fungsi manajemen, untuk mendukung keberlanjutan perusahaan dengan menerapkan Sistem Manajemen Perseroan.

Adapun struktur manajemen risiko Perseroan dijelaskan pada bagan berikut ini:

RISK MANAGEMENT ORGANIZATIONAL STRUCTURE

The risk management process is carried out by the Project Management Office and the Risk Management Division. The functions in the business process are adapted to the risk context in their respective environments, namely:

a. Project Management Office Enterprise Department, which is responsible for reviewing the Company's budget, planning annual corporate-level business, presenting reports on company performance and business results reports to related parties in order to support the optimization of company business results by implementing the applicable Company Management System;
b. Project Management Office Operation Department, which is responsible for ensuring the achievement of project business results performance to support the achievement of the company's vision, mission and sustainability by implementing the applicable Company Management System.
c. Risk Management Department, which is responsible for ensuring the implementation, development, control, implementation of systems and procedures related to risk management at the corporate level that are integrated from all management functions, to support company sustainability by implementing the Company Management System.

The Company's risk management structure is explained in the following chart:

Struktur Organisasi Project Management Office and Risk Management Division
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

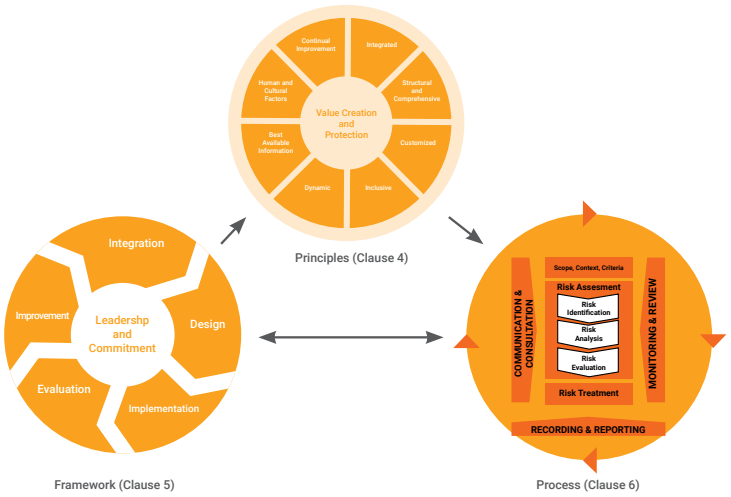


SISTEM MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN

Dalam penerapan Manajemen Risiko merujuk kepada ISO 31000:2018 terdiri dari prinsip, kerangka kerja dan proses seperti gambar skematis dibawah ini: meliputi prinsip manajemen risiko, kerangka manajemen risiko dan proses manajemen risiko yang mengacu kepada ISO 31000:2018. Ketiga hal tersebut disajikan dalam bagan berikut ini:

COMPANY RISK MANAGEMENT SYSTEM

Implementation of Risk Management refers to ISO 31000:2018 and consists of principles, framework and processes as shown in the schematic diagram below: covering risk management principles, risk management framework and risk management processes that refer to ISO 31000:2018. These three things are presented in the following chart:

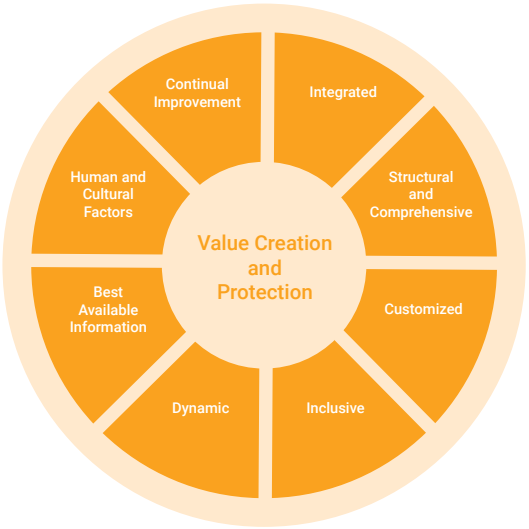


PRINSIP MANAJEMEN RISIKO

Prinsip manajemen risiko Perseroan terdiri dari 8 prinsip yang menjadi dasar penerapan manajemen risiko dan harus menjadi pertimbangan dalam mengembangkan kerangka kerja manajemen risiko Perseroan dan seluruh tahapan proses bisnisnya.

RISK MANAGEMENT PRINCIPLES

The Company's risk management principles consist of 8 principles that form the basis for the implementation of risk management and must be considered in developing the Company's risk management framework and all stages of its business processes.



Berikut prinsip Manajemen Risiko berdasar pada ISO 31000:2018:

1. Terintegrasi
   Manajemen risiko merupakan bagian yang terintegrasi di dalam seluruh aktivitas proses bisnis Perseroan.
2. Terstruktur dan Komprehensif
   Perseroan melakukan pendekatan yang terstruktur dan komprehensif sehingga memberikan hasil yang konsisten dan dapat dibandingkan.
3. Dapat Menyesuaikan
   Kerangka kerja manajemen risiko dan prosesnya dapat disesuaikan dan menyesuaikan dengan konteks eksternal dan internal Perseroanterkait sasarannya.
4. Inklusif
   Kesesuaian waktu dan keterlibatan dari setiap pemangku kepentingan terkait dengan pengetahuan, pandangan, persepsi harus selalu dipertimbangkan.
5. Dinamis
   Penerapan manajemen risiko mengantisipasi, mendeteksi, mengakui, dan merespon terhadap perubahan dan peristiwa dengan cara yang sesuai dan tepat waktu.
6. Informasi Terbaik yang Tersedia
   Informasi Manajemen risiko mempertimbangkan segala batasan dan ketidakpastian yang terkait dengan informasi. Informasi harus tepat waktu, jelas, dan tersedia untuk pemangku kepentingan terkait.
7. Faktor Manusia dan Budaya
   Perilaku manusia dan faktor budaya secara signifikan mempengaruhi semua aspek Manajemen Risiko Perseroan pada setiap tingkatan dan tahapan.
8. Perbaikan Berkesinambungan
   Manajemen Risiko Perseroan secara terus ditingkatkan melalui pembelajaran dan pengalaman

Kerangka Manajemen Risiko

Kerangka manajemen risiko bertujuan membantu Perseroan dalam mengintegrasikan risiko ke dalam aktivitas proses bisnis. Efektivitas manajemen risiko bergantung pada integrasinya ke dalam manajemen organisasi, termasuk pengambilan keputusan. Ini membutuhkan dukungan dari pemangku kepentingan, khususnya manajemen puncak.

Pengembangan kerangka kerja mencakup pengintegrasian, perancangan, penerapan, evaluasi, dan peningkatan manajemen risiko di seluruh organisasi. Untuk pelaksanaan kelima aspek tersebut dibutuhkan kepemimpinan dan komitmen.

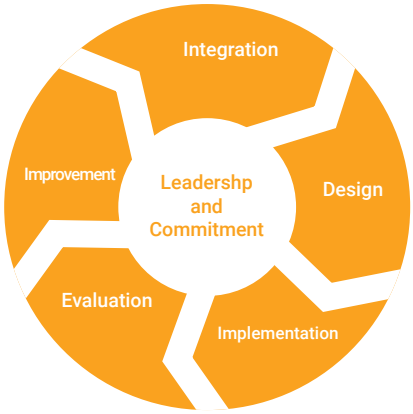
The following are the Risk Management principles based on ISO 31000:2018:

1. Integrated
   Risk management is an integrated part of all the Company's business process activities.
2. Structured and Comprehensive
   The Company takes a structured and comprehensive approach so as to provide consistent and comparable results.
3. Customizable
   The risk management framework and processes can be customized and adapted to the Company's external and internal context related to its objectives.
4. Inclusive
   The timeliness and involvement of each stakeholder related to knowledge, views, perceptions shall continually be considered.
5. Dynamic
   The implementation of risk management anticipates, detects, recognizes, and responds to changes and events in an appropriate and timely manner.
6. Best Available Information
   Risk Management information considers all limitations and uncertainties associated with the information. Information must be timely, clear, and available to relevant stakeholders.
7. Human and Cultural Factors
   Human behavior and cultural factors significantly influence all aspects of the Company's Risk Management at every level and stage.
8. Continuous Improvement
   The Company's Risk Management is continuously improved through learning and experience.

RISK MANAGEMENT FRAMEWORK

Risk management framework aims to assist the Company in integrating risk into business process activities. The effectiveness of risk management depends on its integration into organizational management, including decision making. This requires support from stakeholders, especially top management.

Framework development includes integrating, designing, implementing, evaluating, and improving risk management throughout the organization. The implementation of these five aspects requires leadership and commitment.



Framework (Clause 5)

a. Integrasi
Parameter integrasi dalam komitmen dan kepemimpinan wajib memenuhi kriteria yang ditentukan Perseroan.

b. Perencanaan
Dalam menyusun rencana Kerangka Manajemen Risiko, Perseroan harus mempertimbangkan beberapa hal seperti
- Pemahaman konteks organisasi, baik kondisi internal maupun eksternal Perseroan;
- Mengartikulasikan bentuk komitmen terkait Manajemen Risiko;
- Menetapkan peran, wewenang, tanggung jawab dan akuntabilitas;
- Mengalokasi sumber daya yang sesuai; dan
- Membangun proses komunikasi dan konsultasi.

c. Penerapan
menerapkan kerangka Manajemen Risiko dengan cara:
- Mengembangkan rencana yang sesuai dengan waktu dan sumber daya;
- Mengidentifikasi dimana, kapan dan bagaimana berbagai jenis keputusan dibuat di seluruh level organisasi, dan oleh siapa;
- Memodifikasi proses pembuatan dan atau pengambilan keputusan yang berlaku;
- Memastikan bahwa pengaturan seluruh level organisasi untuk mengelola Risiko dipahami dan diterapkan dengan jelas.

d. Evaluasi
Dalam penerapan evaluasi efektifitas dari kerangka kerja maka Perseroan harus mengukur kemajuan penerapan kerangka kerja Manajemen Risiko secara berkala sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, rencana, indikator dan budaya yang diharapkan serta memastikan kerangka kerja tetap sesuai dalam mendukung pencapaian sasaran Perseroan.

e. Penyempurnaan
Proses kegiatan penyempurnaan proses Manajemen Risiko dilakukan melalui adaptasi atau penyesuaian kerangka kerja dan

a. Integration
Integration parameters in commitment and leadership shall meet the criteria set by the Company.

b. Planning
In preparing the Risk Management Framework plan, the Company shall consider several things such as:
- Understanding the organizational context, both the Company's internal and external conditions;
- Articulating the form of commitment related to Risk Management;
- Establishing roles, authorities, responsibilities and accountabilities;
- Allocating appropriate resources; and
- Building communication and consultation processes.

c. Implementation
Implementing the Risk Management framework by:
- Developing plans that are appropriate to time and resources;
- Identifying where, when and how various types of decisions are made at all levels of the organization, and by whom;
- Modifying applicable decision-making processes;
- Ensuring that arrangements at all levels of the organization to manage risk are clearly understood and implemented.

d. Evaluation
In implementing the effectiveness evaluation of the framework, the Company shall measure the progress of implementing the Risk Management framework regularly in accordance with the stated objectives, plans, indicators and expected culture and ensure the framework remains appropriate in supporting the achievement of the Company's targets.

e. Improvement
The process of improving the Risk Management process is carried out through adaptation or adjustment of the framework

perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kesesuaian, kecukupan dan efektivitas kerangka kerja Manajemen Risiko dan cara proses Manajemen Risiko yang terintegrasi.

and continuous improvement to enhance the suitability, adequacy and effectiveness of the Risk Management framework and how the Risk Management process is integrated.

PROSES MANAJEMEN RISIKO

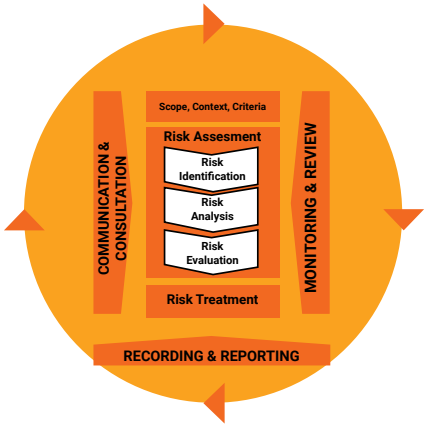
Penerapan manajemen risiko melibatkan secara sistematis seluruh kebijakan, prosedur, dan instruksi kerja sebagai aktivitas proses komunikasi dan konsultasi, ketetapan konteks dan penilaian, penanganan, pemantauan, peninjauan, pencatatan, dan pelaporan risiko.

Proses manajemen risiko harus menjadi bagian dari manajemen dan atau proses pembuatan dan atau pengambilan keputusan yang terintegrasi ke dalam struktur, operasi dan proses organisasi. Proses ini diterapkan di seluruh level dan di tingkatan strategis, tingkat operasional, unit usaha atau proyek.

RISK MANAGEMENT PROCESS

The implementation of risk management systematically involves all policies, procedures, and work instructions as activities of communication and consultation, determination of context and assessment, handling, monitoring, reviewing, recording, and risk reporting.

The risk management process must be part of management and or the process of making and or taking decisions that are integrated into the structure, operations and organizational processes. This process is applied at all levels and at the strategic level, operational level, business unit or project level.



Proses manajemen risiko mempertimbangkan beberapa aspek risiko, sebagai berikut:

Komunikasi dan Konsultasi
Komunikasi dan konsultasi dengan pemangku kepentingan eksternal dan internal erat antara keduanya harus memfasilitasi pertukaran informasi yang objektif, faktual, tepat waktu, relevan, akurat dan dapat dipahami, dengan mempertimbangkan kerahasiaan dan integritas informasi serta hak privasi individu.

Menentukan Konteks, Lingkup dan Kriteria
Tujuan dari penetapan ruang lingkup, konteks dan kriteria adalah untuk menyesuaikan proses Manajemen Risiko, memungkinkan penilaian Risiko yang efektif dan perlakuan Risiko yang tepat. Ruang lingkup, konteks dan kriteria melibatkan pendefinisian ruang lingkup proses, dan pemahaman konteks eksternal dan internal.

Risk management processes consider several risk aspects, as follows:

Communication and Consultation
Communication and consultation with external and internal stakeholders are closely linked; both should facilitate the exchange of objective, factual, timely, relevant, accurate and understandable information, considering the confidentiality and integrity of information as well as individual privacy rights.

Determining Context, Scope and Criteria
The purpose of establishing scope, context and criteria is to tailor the Risk Management process, enabling effective Risk assessment and appropriate Risk treatment. Scope, context and criteria involve defining the scope of the process, and understanding the external and internal context.

Penilaian Risiko
Keseluruhan kegiatan dari proses identifikasi risiko, Analisa risiko, dan evaluasi risiko yang dilakukan secara sistematis, iteratif, dan kolaboratif berdasarkan pengetahuan dan pandangan para pemangku kepentingan serta menggunakan informasi terbaik yang dilengkapi dengan penyelidikan lebih lanjut jika diperlukan.

Perlakuan Risiko
Dilakukan proses ecara berulang sehingga diharapkan tidak timbul risiko yang tersisa diantaranya dengan perumusan perlakuan risiko dan penilaian efektivitas perlakuan risiko yang dipilih.

Pemantauan dan Peninjauan
Proses pemantauan dan peninjauan perlakuan risiko dipenuhi diantaranya dengan pelaksanaan di semua tahapan proses manajemen risiko.

Pendokumentasian dan Pelaporan
Hasil proses manajemen risiko harus didokumentasikan dan dilaporkan melalui mekanisme yang sesuai.

Risk Assessment
The entire activity of the risk identification, risk analysis, and risk evaluation process is carried out systematically, iteratively, and collaboratively based on the knowledge and views of stakeholders and using the best available information supplemented with further investigation if necessary.

Risk Treatment
The process is carried out repeatedly so that it is expected that no residual risk arises, including formulating risk treatment and assessing the effectiveness of the selected risk treatment.

Monitoring and Review
The process of monitoring and reviewing risk treatment is fulfilled, among other things, by implementation at all stages of the risk management process.

Documentation and Reporting
The results of the risk management process must be documented and reported through appropriate mechanisms.

Matriks Risiko Strategis Terhadap Aspek Makro Ekonomi
Risiko-risiko yang dihadapi Perusahaan serta upaya untuk mitigasi risiko tersebut adalah sebagai berikut:

Strategic Risk Matrix Against Macroeconomic Aspects
The risks encountered by the Company and undertakings to mitigate these risks are as follows:

No.	Aspek Makro Ekonomi Macroeconomic Aspect	Risiko Risk	Penyebab Cause	Potensi Dampak Potential Impact
1	Pertumbuhan Ekonomi Economic Growth	1. Berkurangnya alokasi anggaran infrastruktur 2. Penurunan permintaan proyek konstruksi 3. Penundaan atau pembatalan investasi baru 1. Reduced infrastructure budget allocation 2. Decrease in demand for construction projects 3. Delay or cancellation of new investments	1. Perlambatan pertumbuhan ekonomi global maupun domestik 2. Ketidakpastian politik dan regulasi, sehingga investor menahan belanja modal 3. Keterbatasan pembiayaan bagi pemerintah dan swasta 1. Slowdown in global and domestic economic growth 2. Political and regulatory uncertainty, hence investors hold back on capital expenditure 3. Financing limitations for government and private sector	1. Penurunan backlog proyek 2. Potensi idle resources (mesin, tenaga kerja) 3. Turunnya pendapatan dan profitabilitas Perseroan 1. Reduction in project backlog 2. Potential idle resources (machinery, labor) 3. Decrease in the Company's revenue and profitability

No.	Aspek Makro Ekonomi Macroeconomic Aspect	Risiko Risk	Penyebab Cause	Potensi Dampak Potential Impact
2	Inflasi Inflation	1. Kenaikan biaya produksi (material, upah tenaga kerja, transportasi) 2. Penurunan margin keuntungan, terutama pada proyek dengan fixed- price contract 3. Melemahnya daya beli masyarakat (berkurangnya potensi pasar) 1. Increased production costs (materials, labor wages, transportation) 2. Decrease in profit margins, especially on projects with fixed-price contracts 3. Weakening of people's purchasing power (reduced market potential)	1. Kenaikan harga bahan baku (material impor dan domestik) 2. Peningkatan biaya energi dan transportasi 3. Jumlah uang beredar yang tinggi, melebihi pertumbuhan produksi barang/jasa 1. Increase in raw material prices (imported and domestic materials) 2. Increase in energy and transportation costs 3. High money supply, exceeding the growth in production of goods/ services	1. Penurunan profitabilitas proyek 2. Peningkatan risiko keterlambatan penyelesaian proyek (karena biaya melonjak) 3. Kemungkinan renegosiasi 4. kontrak atau pembengkakan biaya tambahan (cost overrun) 1. Decrease in project profitability 2. Increased risk of project completion delays (due to soaring costs) 3. Possible renegotiation 4. additional contracts or cost overruns
3	Suku Bunga Interest Rate	1. Kenaikan biaya pinjaman modal kerja dan investasi 2. Penurunan minat investor dalam proyek jangka panjang 3. Beban bunga lebih tinggi yang dapat mengurangi arus kas 1. Increase in working capital and investment borrowing costs 2. Declining investor interest in long-term projects 3. Higher interest expenses that can reduce cash flow	1. Kebijakan moneter ketat oleh Bank Indonesia (peningkatan suku bunga acuan) 2. Tekanan inflasi yang mendorong penyesuaian suku bunga 3. Volatilitas pasar keuangan global 1. Tight monetary policy by Bank Indonesia (increase in benchmark interest rates) 2. Inflationary pressures driving interest rate adjustments 3. Volatility in global financial markets	1. Peningkatan biaya pendanaan (interest expenses) 2. Penundaan proyek baru karena biaya investasi lebih mahal 3. Penurunan laba bersih Perseroan 1. Increase in funding costs (interest expenses) 2. Delay of new projects due to higher investment costs 3. Decrease in the Company's net profit
4	Volatilitas Nilai Tukar Exchange Rate Volatility	1. Peningkatan biaya impor material dan alat berat 2. Fluktuasi laba/rugi akibat selisih kurs pada transaksi internasional 3. Kesulitan melakukan perencanaan anggaran jangka panjang. 1. Increase in cost of importing materials and heavy equipment 2. Fluctuations in profit/loss due to exchange rate differences in international transactions 3. Difficulty in planning long-term budgets.	1. Perubahan sentimen pasar terhadap mata uang (capital inflow/ outflow) 2. Perbedaan suku bunga antarnegara 3. Ketergantungan pada bahan baku impor 1. Changes in market sentiment towards currency (capital inflow/ outflow) 2. Differences in interest rates between countries 3. Dependence on imported raw materials	1. Peningkatan total biaya proyek (terutama proyek dengan komponen impor besar) 2. Tergerusnya margin keuntungan 3. Keterlambatan pengadaan material karena penyesuaian anggaran 1. Increase in total project costs (especially projects with large import components) 2. Eroded profit margins 3. Delays in material procurement due to budget adjustments

No.	Aspek Makro Ekonomi Macroeconomic Aspect	Risiko Risk	Penyebab Cause	Potensi Dampak Potential Impact
5	Kebijakan Fiskal Fiscal Policy	1. Perubahan alokasi anggaran infrastruktur (pemotongan/ pengal ihan dana) 2. Perubahan tarif pajak atau regulasi konstruksi yang dapat meningkatkan biaya 3. Penundaan pembayaran pemerintah pada proyek-proyek yang didanai APBN/ APBD 1. Changes in infrastructure budget allocation (fund cuts/ redirections) 2. Changes in tax rates or construction regulations that could increase costs 3. Delays in government payments for projects funded by the State Budget/Regional Budget	1. Perubahan prioritas pemerintah dalam APBN/APBD (misalnya pemotongan hingga 50% pada kementerian/lembaga) 2. Program transformasi ekonomi (misalnya fokus pada ketahanan pangan/energi) yang menggeser alokasi dana infrastruktur 3. Kebijakan pengendalian defisit fiskal yang membatasi belanja modal 1. Changes in government priorities in the APBN/APBD (e.g. cuts of up to 50% in ministries/institutions) 2. Economic transformation programs (e.g. focusing on food/energy security) that shift the allocation of infrastructure funds 3. Fiscal deficit control policies that limit capital spending	1. Ketidakpastian dalam perencanaan proyek dan penundaan investasi 2. Turunnya volume proyek konstruksi dari sisi pemerintah 3. Potensi cash flow mismatch akibat tertundanya pembayaran 1. Uncertainty in project planning and investment delays 2. Decrease in the volume of construction projects from the government side 3. Potential cash flow mismatch due to delayed payments

Strategi Mitigasi Risiko

Untuk mengantisipasi dampak negatif dari dinamika makro ekonomi, Perseroan telah menyusun serangkaian strategi mitigasi yang komprehensif. Dalam menghadapi risiko pertumbuhan ekonomi yang menurun akibat berkurangnya alokasi anggaran infrastruktur dan penurunan permintaan proyek, Perseroan melakukan diversifikasi portofolio proyek dengan menggali peluang di sektor swasta, memperkuat kemitraan finansial, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya guna menghindari *idle resources*.

Untuk mengurangi dampak inflasi yang menyebabkan kenaikan biaya produksi dan penurunan margin keuntungan, Perseroan menyertakan klausul perlindungan inflasi dalam kontrak, mengoptimalkan proses pengadaan melalui negosiasi harga, serta mencari alternatif material lokal sebagai pengganti bahan impor. Dalam konteks kenaikan suku bunga yang dapat meningkatkan biaya pinjaman, Perseroan mengupayakan diversifikasi sumber pendanaan, memanfaatkan instrumen keuangan seperti *hedging*, serta menegosiasikan syarat pinjaman yang lebih kompetitif untuk menjaga arus kas.

Selain itu, dalam menghadapi volatilitas nilai tukar yang berpotensi menambah beban biaya impor material dan alat berat, Perseroan menerapkan strategi *hedging* mata uang, melakukan negosiasi kontrak multi valuta, dan mengoptimalkan penggunaan material lokal guna meredam dampak fluktuasi kurs.

Terakhir, untuk mengantisipasi perubahan kebijakan fiskal yang menimbulkan ketidakpastian perencanaan proyek dan penundaan pembayaran, Perseroan meningkatkan pemantauan dan analisis regulasi, memperluas portofolio proyek ke sektor swasta, menyusun

Risk Mitigation Strategies

In order to anticipate the negative impacts of macro-economic dynamics, the Company has developed a comprehensive series of mitigation strategies. In facing the risk of declining economic growth due to reduced infrastructure budget allocation and decreased project demand, the Company is undertaking project portfolio diversification by exploring opportunities in the private sector, strengthening financial partnerships, and optimizing the use of resources to avoid idle resources.

To reduce the impact of inflation that causes increases in production costs and decreased profit margins, the Company includes inflation protection clauses in contracts, optimizes the procurement process through price negotiation, and seeks alternative local materials to replace imported materials. In the context of increasing interest rates that can raise loan costs, the Company is striving to diversify funding sources, utilize financial instruments such as hedging, and negotiate more competitive loan terms to maintain cash flow.

In addition, to face exchange rate volatility that potentially increases the burden of import costs for materials and heavy equipment, the Company is implementing currency hedging strategies, conducting multi-currency contract negotiations, and optimizing the use of local materials to reduce the impact of exchange rate fluctuations.

Finally, to anticipate changes in fiscal policies that create uncertainty in project planning and payment delays, the Company is enhancing monitoring and analysis of regulations, expanding its project portfolio to the private sector, developing contracts with payment flexibility, and

kontrak dengan fleksibilitas pembayaran, serta mengelola likuiditas secara ketat. Melalui serangkaian strategi mitigasi ini, Perseroan berupaya menjaga keberlangsungan operasional dan meningkatkan daya saingnya di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi makro.

tightly managing liquidity. Through this series of mitigation strategies, the Company is endeavoring to maintain operational sustainability and increase its competitiveness amidst the uncertainty of macro-economic conditions.

IMPLEMENTASI PROSES MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2024

Sepanjang tahun 2024, Perseroan telah mengimplementasikan manajemen risiko dengan berpedoman pada SNI ISO 31000:2018. Pengaplikasian pedoman ini dapat disesuaikan pada lini bisnis Perseroan untuk pengelolaan segala jenis risiko.

IMPLEMENTATION OF THE RISK MANAGEMENT PROCESS IN 2024

Throughout 2024, the Company has implemented risk management based on SNI ISO 31000:2018. The application of these guidelines can be adapted to the Company's business lines for the management of all types of risk.

Auditor Eksternal
External Auditor

Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan badan usaha yang berwenang memberikan jasa audit atas laporan keuangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, Akuntan Publik (AP) adalah individu yang memiliki izin resmi untuk memberikan jasa audit dan jasa profesional lainnya di bidang akuntansi, berdasarkan kompetensi dan standar etika profesi.

A Public Accounting Firm (KAP) is a business entity authorized to provide audit services on financial statements, in accordance with the provisions of prevailing laws and regulations. Meanwhile, a Public Accountant (AP) is an individual who holds an official license to provide audit services and other professional services in the field of accounting, based on competence and professional ethics standards.

Penerapan praktik terbaik dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) di lingkungan Perseroan tidak terlepas dari peran KAP dan AP. Melalui audit eksternal yang dilakukan secara periodik terhadap laporan keuangan Perseroan, KAP dan AP memberikan penilaian independen atas kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

The implementation of best practices in Good Corporate Governance (GCG) principles within the Company's environment is inseparable from the role of the KAP and AP. Through external audits conducted periodically on the Company's financial statements, the KAP and AP provide an independent assessment of the fairness of the presentation of the financial statements in accordance with applicable Financial Accounting Standards.

Audit eksternal ini juga berperan penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap integritas laporan keuangan Perseroan.

This external audit also plays an important role in enhancing transparency, accountability, and stakeholder confidence in the integrity of the Company's financial statements.

KEBIJAKAN PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK

Akuntan Publik, sebagai pihak independen dari luar Perseroan, memiliki peran penting dalam memberikan opini profesional atas kewajaran penyajian laporan keuangan Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Penunjukan Akuntan Publik dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), berdasarkan rekomendasi Dewan Komisaris setelah mempertimbangkan hasil evaluasi dari Komite Audit.

POLICY ON THE APPOINTMENT OF PUBLIC ACCOUNTANTS

Public Accountants, as an independent party from outside the Company, have an important role in providing a professional opinion on the fairness of the presentation of the Company's financial statements in accordance with the applicable Financial Accounting Standards (SAK) in Indonesia. The appointment of Public Accountants is carried out through the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS), based on the recommendation of the Board of Commissioners after considering the evaluation results from the Audit Committee.

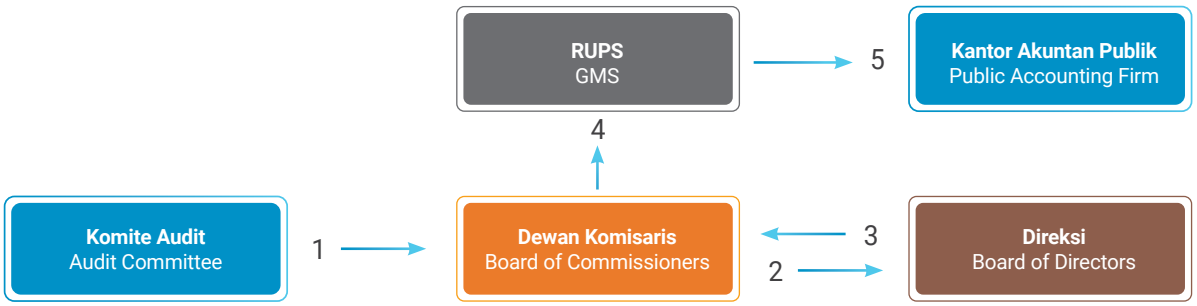
Proses pemilihan Akuntan Publik dilakukan sesuai dengan prosedur pengadaan barang dan jasa yang berlaku, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan objektivitas. Untuk menjamin independensi dan integritas hasil audit, Auditor Eksternal yang ditunjuk tidak diperkenankan memiliki hubungan yang menimbulkan benturan kepentingan dengan Perseroan.

Dasar penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, serta Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance/CoCG) dan *Board Manual* Perseroan. Seluruh ketentuan tersebut menjadi acuan dalam memastikan bahwa proses penunjukan dilaksanakan secara profesional, independen, dan sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG).

The selection process of the Public Accountants is carried out in accordance with the prevailing goods and services procurement procedures, while upholding the principles of transparency, accountability, and objectivity. To ensure the independence and integrity of the audit results, the appointed External Auditor is not allowed to have relationships that create a conflict of interest with the Company.

The basis for the appointment of the Public Accounting Firm and/or Public Accountant refers to the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Regulation Number 9 of 2023 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firm Services in Financial Services Activities, as well as the Company's Corporate Governance Guidelines (Code of Corporate Governance/CoCG) and Board Manual. All these provisions serve as a reference in ensuring that the appointment process is carried out professionally, independently, and in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG).

Proses Penunjukkan Akuntan Publik
Process for Appointing Public Accountant



1 Komite Audit Audit Comittee	2 Dewan Komisaris Board of Commissioners	3 Direksi Board of Directors
Komite Audit melakukan evaluasi atas pelaksanaan KAP tahun sebelumnya dan kemudian mengadakan rapat pembahasan pengadaan jasa audit KAP. Hasil evaluasi KAP kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris dan memberikan saran terkait pengadaan jasa audit KAP berdasarkan rapat Komite Audit.	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk melakukan proses pengadaan Jasa Audit KAP berdasarkan hasil evaluasi KAP dan sesuai dengan ketentuan.	Melakukan proses pengadaan. Carry out the procurement process.

4 Dewan Komisaris Board of Comissioners	5 RUPS GMS
Mengajukan usulan jasa Audit KAP kepada RUPS. Submit KAP Audit service proposal to the GMS.	Menetapkan jasa audit KAP. Determine the KAP audit service.

TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT DALAM PEMBERIAN REKOMENDASI ATAS PENUNJUKAN DAN PEMBERHENTIAN AUDITOR EKSTERNAL

Komite Audit telah melaksanakan tanggung jawab dalam memberikan rekomendasi atas penunjukan dan/atau pemberhentian auditor eksternal berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik. Selanjutnya, Komite Audit memberikan rekomendasi dalam Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) untuk melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024. Rekomendasi ini dituangkan secara resmi dalam Laporan Komite Audit tertanggal 2 Mei 2024.

AUDIT COMMITTEE'S RESPONSIBILITY IN PROVIDING RECOMMENDATIONS FOR THE APPOINTMENT AND DISMISSAL OF EXTERNAL AUDITORS

Audit Committee has carried out its responsibility in providing recommendations for the appointment and/or dismissal of external auditors based on the evaluation results of the audit service provision on the annual historical financial information by the Public Accountant and/or Public Accounting Firm. Subsequently, the Audit Committee provided a recommendation for the Appointment of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) to conduct the audit of the Consolidated Financial Statements of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk for the period ending December 31, 2024. This recommendation was officially stated in the Audit Committee Report dated May 2, 2024.

PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERNAL

Penerapan fungsi Audit Eksternal yang ditunjuk oleh Perseroan mengacu pada standar dan pedoman yang telah ditetapkan, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, pasal 7 ayat 1. Peraturan ini menyebutkan bahwa bank umum, emiten, dan perusahaan publik wajib membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari Akuntan Publik yang sama untuk 7 (tujuh) tahun kumulatif.

Perseroan secara konsisten berkomunikasi untuk memastikan bahwa proses audit dilaksanakan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan dan mematuhi perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang telah ditetapkan. Selain itu, Perseroan juga memastikan bahwa proses audit diselesaikan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan audit, pertemuan rutin diselenggarakan guna membahas perkembangan, kendala, serta kebutuhan koordinasi lainnya selama masa audit berlangsung.

IMPLEMENTATION OF THE EXTERNAL AUDIT FUNCTION

The implementation of the External Audit function appointed by the Company refers to the established standards and guidelines, namely the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Regulation Number 9 of 2023 dated July 11, 2023, concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firm Services in Financial Services Activities, Article 7 paragraph 1. This regulation states that commercial banks, issuers, and public companies are required to limit the use of audit services on annual historical financial information from the same Public Accountant for 7 (seven) cumulative years.

The Company consistently communicates to ensure that the audit process is carried out in accordance with Professional Accountant Standards and complies with the work agreement and the established audit scope. In addition, the Company also ensures that the audit process is completed according to the predetermined timeline. In order to support the smooth implementation of the audit, regular meetings are held to discuss progress, obstacles, and other coordination needs during the audit period.

NAMA DAN TAHUN KANTOR AKUNTAN PUBLIK SERTA AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN AUDIT LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN SELAMA 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR

Merujuk pada hasil keputusan RUPS Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2024, Perseroan telah menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) untuk melakukan jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Penunjukan ini dilakukan dengan memperhatikan aspek independensi dan kualitas hasil pemeriksaan, di mana Akuntan Publik yang ditunjuk diwajibkan untuk tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan.

NAME AND YEAR OF THE PUBLIC ACCOUNTING FIRM AND PUBLIC ACCOUNTANT WHO AUDITED THE ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS FOR THE LAST 5 (FIVE) YEARS

Referring to the results of the Annual General Meeting of Shareholders held on May 20, 2024, the Company has approved the appointment of the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) to perform audit services on the Company's Consolidated Financial Statements for the year ending December 31, 2024. This appointment was made by considering the aspects of independence and the quality of the audit results, whereby the appointed Public Accountant is required to have no conflict of interest with the Company.

Akuntan Publik Tahun 2024
Public Accountant for the year 2024

Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Public Accountant and Public Accounting Firm		
Kantor Akuntan Publik (KAP) Public Accounting Firm	:	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Akuntan Publik (AP) Public Accountant	:	Lith Alfansuri
Tahun Audit Audit Year	:	2024
Periode Penugasan Engagement Period	:	2024
Jasa Yang Diberikan Services Provided	:	Audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024. General Audit of the Consolidated Financial Statements of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk for the Fiscal Year ending December 31, 2024
Jasa Lain yang Diberikan Other Services Provided	:	1. Melakukan prosedur *Assurance* atas Laporan Penilaian Tingkat Pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI) untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024. 2. Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern sebagai wujud penerapan Pernyataan Standar Auditing (PSA) No.62 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024. 1. Performing Assurance Procedures on the Assessment Report of Key Performance Indicator (KPI) Achievement Levels for the Fiscal Year ending December 31, 2024. 2. Compliance Audit of Laws and Regulations and Internal Control as a manifestation of the implementation of Auditing Standard Statement (PSA) No. 62 for the year ending December 31, 2024.
Biaya Jasa (*Fee*) Service Fee	:	Rp470.000.000

Informasi mengenai Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) yang melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan selama 5 (lima) tahun terakhir dapat diuraikan sebagai berikut:

Information regarding the Public Accounting Firm (KAP) and Public Accountant (AP) who audited the Company's Consolidated Financial Statements for the last 5 (five) years can be described as follows:

Tahun Year	Kantor Akuntan Publik (KAP) Public Accounting Firm		Akuntan Publik (AP) Public Accounting Firm		Jasa Services	Jasa Lainnya Other Services	Biaya Jasa (Rp) Service Fee
	Nama Name	Izin KAP Public Accounting Firm License	Nama Name	Nomor Izin AP Public Accountant License Number			
2024	KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners Public Accounting Firm	KEP-477/ KM.1/2015	Lith Alfansuri	AP.1950	Audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024. General Audit of the Consolidated Financial Statements of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk for the Fiscal Year ending December 31, 2024	1. Melakukan prosedur *Assurance* atas Laporan Penilaian Tingkat Pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI) untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024. 2. Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024. 1. Performing Assurance Procedures on the Assessment Report of Key Performance Indicator (KPI) Achievement Levels for the Fiscal Year ending December 31, 2024. 2. Compliance Audit of Laws and Regulations and Internal Control for the year ending December 31, 2024.	Rp470.000.000

Tahun Year	Kantor Akuntan Publik (KAP) Public Accounting Firm		Akuntan Publik (AP) Public Accounting Firm		Jasa Services	Jasa Lainnya Other Services	Biaya Jasa (Rp) Service Fee
	Nama Name	Izin KAP Public Accounting Firm License	Nama Name	Nomor Izin AP Public Accountant License Number			
2023	KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners Public Accounting Firm	KEP-477/ KM.1/2015	Rudi Hartono Purba	AP.0501	Audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023. General Audit of the Consolidated Financial Statements of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk for the Fiscal Year ending December 31, 2023.	1. Review atas Evaluasi Kinerja PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023. 2. Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023. 1. Review of the Performance Evaluation of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk for the Fiscal Year ending December 31, 2023. 2. Compliance Audit of Laws and Regulations and Internal Control for the year ending December 31, 2023.	Rp455.803.906

Tahun Year	Kantor Akuntan Publik (KAP) Public Accounting Firm		Akuntan Publik (AP) Public Accounting Firm		Jasa Services	Jasa Lainnya Other Services	Biaya Jasa (Rp) Service Fee
	Nama Name	Izin KAP Public Accounting Firm License	Nama Name	Nomor Izin AP Public Accountant License Number			
2022	KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners Public Accounting Firm	KEP-477/ KM.1/2015	Rudi Hartono Purba	AP.0501	Audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2022. General Audit of the Consolidated Financial Statements of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk for the Fiscal Year ending December 31, 2022	1. Review atas Evaluasi Kinerja PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2022. 2. Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022. 1. Review of the Performance Evaluation of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk for the Fiscal Year ending December 31, 2022. 2. Compliance Audit of Laws and Regulations and Internal Control for the year ending December 31, 2022.	Rp393.984.375

Tahun Year	Kantor Akuntan Publik (KAP) Public Accounting Firm		Akuntan Publik (AP) Public Accounting Firm		Jasa Services	Jasa Lainnya Other Services	Biaya Jasa (Rp) Service Fee
	Nama Name	Izin KAP Public Accounting Firm License	Nama Name	Nomor Izin AP Public Accountant License Number			
2021	KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners Public Accounting Firm	KEP-477/ KM.1/2015	Rudi Hartono Purba	AP.0501	Audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2021. General Audit of the Consolidated Financial Statements of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk for the Fiscal Year ending December 31, 2021.	1. Review atas Evaluasi Kinerja PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2021. 2. Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021. 1. Review of the Performance Evaluation of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk for the Fiscal Year ending December 31, 2021. 2. Compliance Audit of Laws and Regulations and Internal Control for the year ending December 31, 2021.	Rp384.375.000

Tahun Year	Kantor Akuntan Publik (KAP) Public Accounting Firm		Akuntan Publik (AP) Public Accounting Firm		Jasa Services	Jasa Lainnya Other Services	Biaya Jasa (Rp) Service Fee
	Nama Name	Izin KAP Public Accounting Firm License	Nama Name	Nomor Izin AP Public Accountant License Number			
2020	KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners Public Accounting Firm	KEP-477/ KM.1/2015	Rusli Munir	AP.0572	Audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2020. General Audit of the Consolidated Financial Statements of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk for the Fiscal Year ending December 31, 2020.	1. Review atas Evaluasi Kinerja PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2020. 2. Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020. 1. Review of the Performance Evaluation of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk for the Fiscal Year ending December 31, 2020. 2. Compliance Audit of Laws and Regulations and Internal Control for the year ending December 31, 2020	Rp375.000.000

JASA LAIN YANG DIBERIKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DAN AKUNTAN PUBLIK SELAIN JASA AUDIT LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN PADA TAHUN BUKU TERAKHIR

Selain melaksanakan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik juga memberikan jasa profesional lainnya yang tetap mengacu pada prinsip independensi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun jasa lain yang diberikan selama tahun buku 2024 meliputi:

1. Melakukan prosedur Assurance atas Laporan Penilaian Tingkat Pencapaian Key Performance Indicators (KPI) untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024.
2. Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern sebagai wujud penerapan Pernyataan Standar Auditing (PSA) No.62 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024.

Ruang lingkup pekerjaan, baik untuk jasa audit atas laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir maupun jasa lainnya, diatur dalam Perjanjian Kerja antara PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk dan Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, Nomor: TP.02.02/A.DIR.WG.07658/2024 tanggal 3 Juni 2024, tentang Pekerjaan Jasa Audit Laporan Keuangan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk dan Konsolidasian Tahun Buku 2024.

Seluruh jasa tersebut diberikan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi, objektivitas, serta profesionalisme, sebagai bagian dari komitmen Perseroan dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.

OTHER SERVICES PROVIDED BY THE PUBLIC ACCOUNTING FIRM AND PUBLIC ACCOUNTANT BESIDES THE ANNUAL FINANCIAL STATEMENT AUDIT IN THE LAST FISCAL YEAR

In addition to conducting the general audit of the Consolidated Financial Statements of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk for the fiscal year ending December 31, 2024, the Public Accounting Firm and/or Public Accountant also provided other professional services that remain adhered to the principle of independence and were in accordance with prevailing regulations.

The other services provided during the 2024 fiscal year included:

1. Performing Assurance Procedures on the Assessment Report of Key Performance Indicator (KPI) Achievement Levels for the Fiscal Year ending December 31, 2024.
2. Compliance Audit of Laws and Regulations and Internal Control as a manifestation of the implementation of Auditing Standard Statement (PSA) No. 62 for the year ending December 31, 2024.

The scope of work, both for the audit services of the annual financial statements in the last fiscal year and other services, is regulated in the Work Agreement between PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk and the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, Number:TP.02.02/A.DIR.WG.07658/2024 dated June 3, 2024, concerning Audit Services for the Financial Statements of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk and Consolidated for the 2024 Fiscal Year.

All of these services were provided while upholding the principles of independence, objectivity, and professionalism, as part of the Company's commitment to implementing good corporate governance.

Perkara Hukum yang Berdampak Material yang Dihadapi oleh Perusahaan, Entitas Anak, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris

Material Legal Matters Faced by the Company, Subsidiaries, Members of the Board of Directors, and Members of the Board of Commissioners.

PERMASALAHAN HUKUM

Hingga 31 Desember 2024, Perseroan tidak memiliki atau sedang menghadapi permasalahan hukum yang berdampak material terhadap keberlangsungan usaha. Informasi mengenai jenis perkara, baik yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap maupun yang masih dalam proses penyelesaian, disajikan dalam tabel berikut:

LEGAL ISSUES

As of December 31, 2024, the Company did not have or was not facing any legal issues that would have a material impact on the sustainability of its business. Information regarding the types of cases, both those that have reached a final and binding legal decision and those that are remaining in the process of resolution, is presented in the following table:

Status Status	Jenis Perkara Type of Case			
	Perdata Civil	Pidana Criminal	Perpajakan Taxation	Hubungan Industri Industrial Relations
Telah selesai (berkekuatan hukum tetap) Completed (legally binding)	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian In the process of resolution	-	-	-	-
Jumlah Total	-	-	-	-

Rincian permasalahan hukum yang dihadapi oleh Perseroan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Details of legal issues faced by the Company throughout 2024 are as follows:

No	Nomor Perkara Case Number	Posisi BCA BCA Position	Pokok Gugatan Subject Matter of Lawsuit	Status Perkara Case Status	Risiko Bagi Perusahaan Risks for the Company
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-

Sepanjang tahun 2024, Perseroan meyakini bahwa setiap hasil keputusan dari perkara-perkara yang dihadapi tidak akan berdampak material terhadap kondisi usaha maupun keuangan Perseroan. Selain itu, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang sedang menjabat tidak pernah terlibat atau tersangkut dalam perkara penting, baik pidana maupun perdata.

Throughout 2024, the Company believes that the outcome of any legal cases it faced will not have a material impact on the Company's business or financial condition. Furthermore, all serving members of the Board of Directors and the Board of Commissioners have never been involved in or implicated in any significant legal matters, whether criminal or civil.

Adapun jumlah perkara penting yang dihadapi oleh anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi serta entitas anak selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

The number of significant legal cases faced by members of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors, as well as subsidiaries, during 2024 is as follows:

Keterangan Description	Perkara Penting Yang Dihadapi Significant Legal Cases Faced
Anggota Dewan Komisaris Member of the Board of Commissioners	-
Anggota Direksi Member of the Board of Directors	-
Entitas Anak Subsidiary	-

Permasalahan Hukum Entitas Anak

Rincian permasalahan hukum, baik perdata maupun pidana, yang dihadapi oleh entitas anak sepanjang tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Legal Issues of Subsidiaries

Details of legal issues, both civil and criminal, faced by subsidiaries throughout 2024 are presented as follows:

Entitas Anak Subsidiary	Status Perkara Case Status	Jumlah Perkara Perdata Number of Civil Cases	Jumlah Perkara Pidana Number of Criminal Cases
-	-	-	-
-	-	-	-

PENGUNGKAPAN SANKSI ADMINISTRASI OLEH OTORITAS TERKAIT

Sepanjang tahun 2024, Perseroan, entitas anak, serta anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak menerima sanksi administratif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), maupun Kementerian BUMN yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.

DISCLOSURE OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS BY RELATED AUTHORITIES

Throughout 2024, the Company, its subsidiaries, as well as members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, did not receive any administrative sanctions from Financial Services Authority (OJK), Indonesia Stock Exchange (BEI), or Ministry of State-Owned Enterprises (BUMN) that could affect the Company's business continuity.

PERKARA PENTING DI LUAR ASPEK HUKUM

Sepanjang tahun 2024, Perseroan tidak menghadapi atau terlibat dalam perkara penting di luar aspek hukum yang melibatkan Perseroan sebagai organisasi, entitas anak, Dewan Komisaris, maupun Direksi.

SIGNIFICANT MATTERS OUTSIDE OF LEGAL ASPECTS

Throughout 2024, the Company did not face or become involved in any significant matters outside of legal aspects involving the Company as an organization, its subsidiaries, the Board of Commissioners, or the Board of Directors.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

Access to Company Information and Data

Perseroan memandang keterbukaan informasi sebagai aspek penting dalam membangun hubungan yang konstruktif dan berkelanjutan dengan seluruh pemangku kepentingan. Sejalan dengan hal tersebut, Perseroan secara konsisten menyediakan akses yang mudah, terbuka, dan setara terhadap informasi serta data yang relevan, baik bagi pihak internal maupun eksternal.

The Company views information transparency as an important aspect in building constructive and sustainable relationships with all stakeholders. In line with this, the Company consistently provides easy, open, and equal access to relevant information and data for both internal and external parties.

Komitmen terhadap keterbukaan informasi tidak hanya mencerminkan tanggung jawab Perseroan kepada pemegang saham dan publik, tetapi juga merupakan bagian dari strategi jangka panjang dalam membangun reputasi yang positif serta menumbuhkan kepercayaan pemangku kepentingan. Perseroan meyakini bahwa citra yang kuat hanya dapat dibentuk melalui komunikasi yang transparan, jujur, dan berkesinambungan.

The commitment to information transparency does not only reflect the Company's responsibility to shareholders and the public but is also part of a long-term strategy to build a positive reputation and foster stakeholder trust. The Company believes that a strong image can only be formed through transparent, honest, and continuous communication.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk menyediakan situs web resmi yang memuat informasi dan data yang relevan mengenai kegiatan usaha, kinerja keuangan, aksi korporasi, serta keterbukaan informasi lainnya. Situs web ini disiapkan agar dapat diakses oleh publik secara luas, guna memastikan keterbukaan informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh pemegang saham serta masyarakat umum.

As stipulated in the Financial Services Authority Regulation No. 8/POJK.04/2015 concerning the Websites of Issuers or Public Companies, the Company has fulfilled its obligation to provide an official website containing relevant information and data regarding business activities, financial performance, corporate actions, and other information disclosures. This website is prepared to be widely accessible to the public, ensuring information transparency that can be easily accessed by shareholders and the general public.

Di samping itu, Perseroan juga menjunjung tinggi prinsip perlindungan data perusahaan. Perseroan mengimplementasikan kebijakan perlindungan data yang ketat dan mematuhi standar keamanan informasi untuk melindungi data sensitif perusahaan dari potensi risiko penyalahgunaan, kebocoran, serta akses yang tidak sah. Langkah-langkah perlindungan ini merupakan bagian dari komitmen Perseroan untuk menjaga integritas dan kepercayaan pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa setiap data yang diperoleh dan dipublikasikan tetap terjaga kerahasiaannya.

In addition, the Company also upholds the principle of company data protection. The Company implements strict data protection policies and adheres to information security standards to protect sensitive company data from potential risks of misuse, leakage, and unauthorized access. These protection measures are part of the Company's commitment to maintaining the integrity and trust of stakeholders, as well as ensuring that all data obtained and published remains confidential.

Sebagai wujud dari komitmen tersebut, Perseroan menyediakan berbagai informasi yang dapat diakses oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan, antara lain:

As a manifestation of this commitment, the Company provides various information that can be accessed by shareholders and stakeholders, including:

1. MEDIA ELEKTRONIK

Perseroan menyadari pentingnya pemanfaatan media elektronik dalam mendukung penyampaian informasi kepada publik, baik internal maupun eksternal. Dalam upaya memenuhi kebutuhan komunikasi yang efisien dan efektif, Perseroan memastikan aksesibilitas data melalui berbagai media elektronik yang terus berkembang.

1. ELECTRONIC MEDIA

The Company recognizes the importance of utilizing electronic media in supporting the dissemination of information to the public, both internal and external. In an effort to meet efficient and effective communication needs, the Company ensures data accessibility through various evolving electronic media.

Sebagai bagian dari keterbukaan informasi, Perseroan menyediakan akses informasi melalui platform-platform berikut:

Situs Web: www.wikagedung.co.id
Instagram: @ptwikagedungid
Facebook: @ptwikagedungID
Twitter/X: @ptwikagedungID
LinkedIn: @ptwikagedungid
YouTube: @ptwikagedungid
TikTok: @ptwikagedungID
Spotify: WEGE Podcast

Selain itu, Perseroan juga memanfaatkan media komunikasi internal untuk memastikan kelancaran penyampaian informasi di dalam perusahaan. Beberapa media komunikasi internal yang digunakan antara lain:

- Majalah Space for Life, yang memberikan informasi terkait aktivitas dan pencapaian Perseroan.
- Dashboard WG, yang berisi informasi terbaru tentang aktivitas dan kinerja Perseroan.
- Group WhatsApp, sebagai media komunikasi langsung dan cepat dalam menyampaikan informasi.
- TV Plasma, yang tersedia di setiap lantai kantor pusat WEGE yang menampilkan informasi terbaru terkait kegiatan dan kinerja Perseroan.
- E-mail Blast, yang digunakan untuk distribusi informasi secara luas kepada karyawan dan stakeholder internal.
- Dan berbagai saluran lainnya yang mendukung kelancaran komunikasi internal.

As part of information disclosure, the Company provides access to information through the following platforms:

Website: www.wikagedung.co.id
Instagram: @ptwikagedungid
Facebook: @ptwikagedungID
Twitter/X: @ptwikagedungID
LinkedIn: @ptwikagedungid
YouTube: @ptwikagedungid
TikTok: @ptwikagedungID
Spotify: WEGE Podcast

In addition, the Company also utilizes internal communication media to ensure the smooth flow of information within the company. Some of the internal communication media used include:

- Space for Life Magazine, which provides information related to the Company's activities and achievements.
- WG Dashboard, which contains the latest information about the Company's activities and performance.
- WhatsApp Group, as a direct and fast communication medium for conveying information.
- Plasma TVs, available on each floor of the WEGE head office displaying the latest information related to the Company's activities and performance.
- E-mail Blast, used for the wide distribution of information to employees and internal stakeholders.
- And various other channels that support smooth internal communication.

2. SIARAN PERS

Sebagai bentuk transparansi dan komitmen, Perseroan secara rutin menyampaikan *update* informasi melalui berbagai saluran komunikasi. Selama tahun 2024, informasi yang disampaikan oleh Perseroan kepada publik, termasuk melalui media dalam bentuk siaran pers yang membahas beragam hal terkait dengan Perseroan, adalah sebagai berikut:

2. PRESS RELEASES

As a transparency and commitment, the Company routinely provides information updates through various communication channels. Throughout 2024, the information conveyed by the Company to the public, including through the media in the form of press releases discussing various matters related to the Company, is as follows:

No	Tanggal Date	Siaran Pers Press Releases
1	11 Januari 2024 January 11, 2024	Dukung Net Zero Emission, VOLTRON Hadirkan SPKLU di Properti Milik WEGE Supporting Net Zero Emission, VOLTRON Presents EV Charging Stations at WEGE-Owned Properties
2	30 Januari 2024 January 30, 2024	WEGE Revitalisasi Kafetaria Kampus UNPAR Berbasis Modular WEGE Revitalizes UNPAR Campus Cafeteria with Modular Concept
3	31 Januari 2024 January 31, 2024	WEGE Raih Kontrak Gedung Sistem Peringatan Dini Bencana BMKG di Jakarta dan Bali WEGE Secures Contract for BMKG Disaster Early Warning System Buildings in Jakarta and Bali

No	Tanggal Date	Siaran Pers Press Releases
4	2 Februari 2024 February 2, 2024	Optimalisasi Peringatan Dini Tsunami, WEGE Bangun Gedung Indonesia Tsunami Early Warning System (inaTEWS) Optimizing Tsunami Early Warning, WEGE Builds the Indonesia Tsunami Early Warning System (inaTEWS) Building
5	2 Februari 2024 February 2, 2024	WEGE Berikan Edukasi Higienitas dan Penanggulangan Kebakaran kepada Pelaku UMKM Teras Braga WEGE Provides Hygiene and Fire Prevention Education to SMEs in Teras Braga
6	12 Februari 2024 February 12, 2024	WEGE Rehabilitasi dan Renovasi Stadion Teladan Medan WEGE Rehabilitates and Renovates Teladan Stadium Medan
7	22 Februari 2024 February 22, 2024	WEGE dan Parongpong RAW Lab Kolaborasi dalam Pembuatan Paviliun Berkelanjutan di ARCH:ID 2024 WEGE and Parongpong RAW Lab Collaborate on Sustainable Pavilion at ARCH:ID 2024
8	23 Februari 2024 February 23, 2024	WEGE Hadirkan Solusi Konstruksi Inovatif Berkelanjutan di ARCH:ID 2024 WEGE Presents Innovative Sustainable Construction Solutions at ARCH:ID 2024
9	24 Februari 2024 February 24, 2024	Groundbreaking Stadion Surajaya Lamongan, Markas Baru Persela Lamongan, Desain Modern Berstandar FIFA Groundbreaking of Surajaya Stadium Lamongan, New Home of Persela Lamongan, Modern FIFA Standard Design
10	27 Februari 2024 February 27, 2024	Kolaborasi ITS dan WIKA Gedung dalam Misi Nol Emisi: Inovasi Modular untuk Bangunan Ramah Lingkungan ITS and WIKA Gedung Collaboration in Zero Emission Mission: Modular Innovation for Environmentally Friendly Buildings
11	29 Februari 2024 February 29, 2024	RUPSLB WEGE Tahun 2024 Tetapkan Bapak Taufan Gestoro Sebagai Komisaris Independen WEGE's Extraordinary General Meeting of Shareholders 2024 Appoints Mr. Taufan Gestoro as Independent Commissioner
12	8 Maret 2024 March 8, 2024	Komitmen Konstruksi Berkelanjutan, WEGE Tanam Bibit Pohon Langka dan Buah di WIKASATRIAN Commitment to Sustainable Construction, WEGE Plants Rare and Fruit Tree Saplings at WIKASATRIAN
13	24 Maret 2024 March 24, 2024	CSR WEGE Gelar Workshop Melon Hidroponik untuk Pemberdayaan Masyarakat WEGE CSR Holds Hydroponic Melon Workshop for Community Empowerment
14	25 Maret 2024 March 25, 2024	WEGE dan BMKG Resmikan Gedung STMKG, Bangunan Hijau Pertama di Kota Tangerang WEGE and BMKG Inaugurate STMKG Building, the First Green Building in Tangerang City
15	27 Maret 2024 March 27, 2024	WIKA Beton dan WIKA Gedung Gelar Acara Berbuka Puasa Bersama Anak Yatim dan Panti Asuhan WIKA Beton and WIKA Gedung Hold Joint Iftar Event with Orphans and Orphanages
16	27 Maret 2024 March 27, 2024	Tinjau Kesiapan PON di Aceh, Menko PMK Minta Pembangunan Arena Dipercepat Reviewing PON Readiness in Aceh, Coordinating Minister for Human Development and Culture Asks for Acceleration of Arena Construction
17	5 April 2024 April 5, 2024	WEGE Dukung "Mudik Asyik Bersama BUMN" WEGE Supports "Joyful Homecoming with SOEs"
18	5 April 2024 April 5, 2024	Bandara Internasional Dhoho Kediri Mahakarya WEGE Resmi Beroperasi Dhoho Kediri International Airport, a WEGE Masterpiece, Officially Operates
19	25 April 2024 April 25, 2024	WEGE Raih Penghargaan BIM 5D TBQ dari Glodon Technical Indonesia WEGE Wins BIM 5D TBQ Award from Glodon Technical Indonesia
20	30 April 2024 April 30, 2024	Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Tinjau Progres Pembangunan Venue PON XXI di Aceh Director General of Human Settlements of the Ministry of Public Works and Housing Reviews Progress of PON XXI Venue Construction in Aceh
21	6 Mei 2024 May 6, 2024	Kunjungan Kerja Menteri PUPR ke Proyek Pembangunan Rusun Paspampres IKN Working Visit of the Minister of Public Works and Housing to the Construction Project of Paspampres Housing in IKN
22	9 Mei 2024 May 9, 2024	WEGE Sharing Knowledge "Sustainable Construction" mengenai Teknologi Modular WEGE Sharing Knowledge on "Sustainable Construction" Regarding Modular Technology
23	13 Mei 2024 May 13, 2024	WEGE dan UNPAR Kembangkan Kafetaria Berbasis Modular WEGE and UNPAR Develop Modular-Based Cafeteria
24	15 Mei 2024 May 15, 2024	WEGE Tandatangani Kontrak KSO Pembangunan Gedung Fasilitas Telkom WEGE Signs KSO Contract for the Construction of Telkom Facility Building

No	Tanggal Date	Siaran Pers Press Releases
25	18 Mei 2024 May 18, 2024	Menpora Dito Ariotedjo Tinjau Venue PON XXI Aceh, WEGE Optimis Penyelesaian Tepat Waktu Minister of Youth and Sports Dito Ariotedjo Reviews PON XXI Aceh Venue, WEGE Optimistic About Timely Completion
26	20 Mei 2024 May 20, 2024	WEGE Bagi Dividen 20% dari Laba dan Rombak Jajaran Direksi WEGE Distributes 20% Dividend from Profit and Reshuffles Board of Directors
27	27 Mei 2024 May 27, 2024	WIKA Gedung KSO Groundbreaking Gedung Facility Support Telkomsel Smart Office (FSTSO) WIKA Gedung KSO Holds Groundbreaking for Telkomsel Smart Office (FSTSO) Facility Support Building
28	29 Mei 2024 May 29, 2024	WEGE Raih Predikat "Platinum" di Ajang Penghargaan Transparansi dan Penurunan Emisi Karbon 2024 WEGE Achieves "Platinum" Predicate at the 2024 Carbon Emission Reduction and Transparency Awards
29	31 Mei 2024 May 31, 2024	Kunjungan Pabrik Modular WEGE: Menginspirasi Inovasi dalam Konstruksi WEGE Modular Factory Visit: Inspiring Innovation in Construction
30	6 Juni 2024 June 6, 2024	Kunjungan Kerja Komisaris dan Direksi WEGE ke Ibu Kota Nusantara (IKN) Working Visit of WEGE Commissioners and Directors to Ibu Kota Nusantara (IKN)
31	7 Juni 2024 June 7, 2024	WEGE Resmikan Gedung Geomaritim PIP Makassar: Komitmen Terhadap Kualitas dan Inovasi WEGE Inaugurates Geomaritim PIP Makassar Building: Commitment to Quality and Innovation
32	30 Juli 2024 July 30, 2024	WEGE Raih Dua Penghargaan Prestisius dalam TJSL & CSR Award 2024 WEGE Wins Two Prestigious Awards at the 2024 TJSL & CSR Award
33	2 Agustus 2024 August 2, 2024	WEGE KSO Selesaikan Proyek Hunian Modular TNI-IKN Tercepat, Raih Dua Rekor MURI WEGE KSO Completes TNI-IKN Modular Housing Project Fastest, Achieves Two MURI Records
34	5 Agustus 2024 August 5, 2024	WEGE dan Risland Capai Tonggak Penting dengan Topping Off Tower Castilla - Sky House Alam Sutera WEGE and Risland Reach Milestone with Topping Off of Tower Castilla - Sky House Alam Sutera
35	10 Agustus 2024 August 10, 2024	WEGE Gelar Pelatihan Pengelolaan Sampah B1 & B2 untuk Dukung Proklim dan Net Zero Emission WEGE Holds B1 & B2 Waste Management Training to Support Proklim and Net Zero Emission
36	26 Agustus 2024 August 26, 2024	WEGE Raih Penghargaan "Innovator of the Year" di ASEAN Autodesk Award 2024 WEGE Wins "Innovator of the Year" Award at the ASEAN Autodesk Award 2024
37	29 Agustus 2024 August 29, 2024	The Bridge International Kunjungi Jasmine Integrated Farming - CSR Binaan WEGE The Bridge International Visits Jasmine Integrated Farming - WEGE's Foster CSR Program
38	6 September 2024 September 6, 2024	WIKA-WEGE Sukses Bangun RS Vertikal Katastropik Pertama & Terbesar di Indonesia, Jokowi: Setara Hotel Bintang Lima! WIKA-WEGE Successfully Builds Indonesia's First & Largest Catastrophic Vertical Hospital, Jokowi: Equivalent to a Five-Star Hotel!
39	9 September 2024 September 9, 2024	Grand Opening Rammah Food Collective: Kafetaria Modular Pertama di Kampus UNPAR Bandung Grand Opening of Rammah Food Collective: The First Modular Cafeteria at UNPAR Bandung Campus
40	9 September 2024 September 9, 2024	Presiden Jokowi Renovasi dan Pembangunan Kembali 12 Venue PON XXI 2024 Karya WEGE President Jokowi Renovates and Reconstructs 12 PON XXI 2024 Venues by WEGE
41	20 September 2024 September 20, 2024	WEGE Raih Silver Winner di Media Relations Award SPS 2024 WEGE Wins Silver Winner at the SPS 2024 Media Relations Award
42	1 Oktober 2024 October 1, 2024	WEGE Semakin Berprestasi di Kancah Global dengan Raihan Enam Penghargaan di LACP Vision Awards 2023 WEGE Achieves More Globally with Six Awards at the 2023 LACP Vision Awards
43	2 Oktober 2024 October 2, 2024	Perkuat Kedaulatan NKRI, PLBN Terpadu Karya WEGE Diresmikan oleh Presiden Jokowi Strengthening the Sovereignty of the Republic of Indonesia, Integrated Border Crossing Post by WEGE Inaugurated by President Jokowi
44	3 Oktober 2024 October 3, 2024	WEGE Gelar Sertifikasi Pekerja: Wujud Komitmen pada Kualitas dan Keselamatan Kerja WEGE Holds Worker Certification: A Manifestation of Commitment to Quality and Work Safety
45	10 Oktober 2024 October 10, 2024	Kontribusi terhadap SDG dan ESG, WEGE Resmikan Taman Bermain & Tanam Pohon Langka di KWPLH Beruang Madu Balikpapan Contribution to SDGs and ESG, WEGE Inaugurates Playground & Plants Rare Trees at KWPLH Beruang Madu Balikpapan
46	18 Oktober 2024 October 18, 2024	Bandara Dhoho Kediri, Karya WEGE Resmi Beroperasi Dhoho Kediri Airport, a WEGE Creation, Officially Operates

No	Tanggal Date	Siaran Pers Press Releases
47	22 Oktober 2024 October 22, 2024	Desa Margakaya Menuju Sentra Mangga Ki Ojay Berkat Workshop Teknologi Pertanian dari WEGE Margakaya Village Towards Ki Ojay Mango Center Thanks to Agricultural Technology Workshop from WEGE
48	24 Oktober 2024 October 24, 2024	WEGE Raih Penghargaan di CSR Awards 2024 Berkat Inovasi Teras Braga dan Co-Working Space WEGE Wins Award at the 2024 CSR Awards Thanks to Teras Braga and Co-Working Space Innovations
49	8 November 2024 November 8, 2024	Komitmen Utamakan Keselamatan Kerja, Proyek WEGE di IKN Raih Penghargaan dari Kementerian PU Commitment to Prioritize Work Safety, WEGE Project in IKN Receives Award from the Ministry of Public Works and Housing
50	20 November 2024 November 20, 2024	WEGE Gelar Topping Off Gedung Operasional BMKG InaTEWS Jakarta WEGE Holds Topping Off Ceremony for BMKG InaTEWS Operational Building Jakarta
51	21 November 2024 November 21, 2024	WEGE Dorong Inovasi dan Keberlanjutan Melalui Pembangunan ITB Innovation Park Bandung WEGE Encourages Innovation and Sustainability Through the Development of ITB Innovation Park Bandung
52	26 November 2024 November 26, 2024	WEGE Tandatangani Kontrak Pembangunan Gedung Pusat Onkologi RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten WEGE Signs Contract for the Construction of the Oncology Center Building at dr. Soeradji Tirtonegoro Hospital Klaten
53	28 November 2024 November 28, 2024	WEGE Raih Penghargaan Platinum ISDA 2024 Berkat Inovasi Modular untuk Infrastruktur Berkelanjutan WEGE Wins Platinum Award at ISDA 2024 Thanks to Modular Innovation for Sustainable Infrastructure
54	6 Desember 2024 December 6, 2024	Inovasi WEGE Raih Penghargaan Gold di Ajang TKMPN XXVIII 2024 WEGE's Innovation Wins Gold Award at the XXVIII TKMPN 2024
55	18 Desember 2024 December 18, 2024	PMJ Land Tower Capai Topping Off, Wujud Komitmen WEGE KSO untuk Infrastruktur Berkelanjutan PMJ Land Tower Reaches Topping Off, A Manifestation of WEGE KSO's Commitment to Sustainable Infrastructure
56	20 Desember 2024 December 20, 2024	WEGE Bangun Basilika Pertama di Indonesia di Ibu Kota Nusantara WEGE Builds the First Basilica in Indonesia in Ibu Kota Nusantara
57	22 Desember 2024 December 22, 2024	WEGE Gelar Topping Off Gedung FSTSO: Bangunan Inovatif dan Berkelanjutan untuk Masa Depan WEGE Holds Topping Off Ceremony for FSTSO Building: Innovative and Sustainable Building for the Future
58	23 Desember 2024 December 23, 2024	WEGE Komitmen Penyelesaian Tepat Waktu, Wapres RI Gibran Rakabuming Raka Berkunjunga ke Proyek Stadion Teladan Medan WEGE Committed to Timely Completion, Indonesian Vice President Gibran Rakabuming Raka Visits Teladan Stadium Medan Project

Tata Kelola Teknologi Informasi

Information Technology Governance

Sebagai anak Perusahaan BUMN yang bergerak dibidang konstruksi bangunan gedung, Teknologi Informasi memiliki peran kunci dalam menunjang proses bisnis internal dan pembangunan proyek konstruksi gedung. Keberadaan Teknologi Informasi yang berkualitas menjadi salah satu hal yang wajib dimiliki Perseroan untuk dapat bersaing di era digital saat ini. Oleh karena itu, Perseroan secara berkesinambungan meningkatkan kapasitas Teknologi Informasi dalam rangka mendukung produktivitas kerja yang optimal.

Seiring dengan pertumbuhan digitalisasi yang berkembang sangat pesat, Perseroan terus mengoptimalkan penerapan aspek tata kelola teknologi informasi Perseroan. Penjelasan lebih lengkap terkait, tata kelola teknologi informasi dapat dilihat di bab tinjauan pendukung bisnis dari laporan tahunan ini.

As a subsidiary of a State-Owned Enterprise engaged in building construction, Information Technology plays a key role in supporting internal business processes and building construction projects. The existence of quality Information Technology is a mandatory requirement for the Company to compete in today's digital era. Therefore, the Company continuously enhances its Information Technology capacity to support optimal work productivity.

In line with the very rapid growth of digitalization, the Company continues to optimize the implementation of aspects of the Company's information technology governance. A more complete explanation regarding information technology governance can be found in the business support review chapter of this annual report.

Kode Etik

Code of Conduct

Perseroan memiliki komitmen untuk mengimplementasikan GCG secara konsisten salah satunya dilakukan melalui Pedoman Etika Perusahaan (Code of Conduct). Hal ini menjadi dasar perilaku bagi seluruh insan bertindak dan mengambil keputusan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, Responsibilitas, Independen dan Fairness.

Pedoman Etika Perusahaan sebagaimana yang terakhir telah disahkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 11 September 2023.

Pedoman Etika Perseroan menjadi pedoman dalam meningkatkan hubungan dengan konsumen, pemegang saham, pemasok/rekanan, pemerintah serta masyarakat di tempat kita berada.

DASAR HUKUM

Penyusunan Pedoman Etika Perseroan berpedoman pada peraturan dan ketentuan terkait sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

The Company is committed to consistently implementing GCG, one of which is done through the Company's Code of Conduct. This serves as the basis of behavior for all personnel to act and make decisions in accordance with the GCG principles of Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness.

The Company's Code of Conduct was last ratified by the Board of Commissioners and the Board of Directors on September 11, 2023.

The Company's Code of Conduct serves as a guideline in enhancing relationships with consumers, shareholders, suppliers/partners, the government, and the communities where we operate.

LEGAL BASIS

The drafting of the Company's Code of Conduct is based on the following related regulations and provisions:

1. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
2. Law (UU) Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes;
3. Law (UU) Number 14 of 2008 concerning Freedom of Information;
4. Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises;

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
10. Surat Edaran OJK No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
11. Surat Menteri BUMN No S- 35/MBU/91/2020 Tanggal 10 Januari 2020 perihal Implementasi Sistem Manajemen Anti Suap di BUMN;
12. Anggaran Dasar Perseroan dan perubahannya;
13. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 03 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
14. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara; dan
15. Anggaran Dasar PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Pasal 17 ayat 5 mengenai Kode Etik Perseroan.

POKOK-POKOK KODE ETIK

Pedoman Etika Perusahaan memuat penjelasan mengenai Perseroan dalam menghadapi bisnis yang beretika dan bersikap untuk menyeimbangkan antara kepentingan Perseroan dengan kepentingan pemangku kepentingan. Dalam penerapannya, Perseroan berpedoman pada Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk No. SK.01.01/A.DIR.00001.WEGE/2025 dan No. DK.01.01/A.KOM.00001.WEGE/2025 tentang Pedoman Etika dan Perilaku *(Code of Conduct)* PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk tanggal 15 Januari 2025.

Beberapa aspek kebijakan yang diatur dalam Pedoman Etika Perseroan, sebagai berikut:

1. Kebijakan Perseroan Mengenai Etika dan Perilaku
   a. Integritas dalam aktivitas bisnis dan pekerjaan;
   b. Manajemen Risiko;
   c. Sistem Pemasaran;
   d. Sistem Pengadaan dan Kontrak Kerja;
   e. Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pegawai;
   f. Pengelolaan Lingkungan;

5. Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies;
6. Financial Services Authority Regulation Number 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies;
7. Financial Services Authority Regulation Number 35/POJK.04/2014 concerning the Corporate Secretary of Issuers or Public Companies;
8. Financial Services Authority Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Good Corporate Governance for Public Companies;
9. Financial Services Authority Regulation Number 21/POJK.04/2015 concerning the Implementation of Guidelines for Good Corporate Governance of Public Companies;
10. OJK Circular Letter No. 30/SEOJK.04/2016 concerning the Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies;
11. Letter of the Minister of State-Owned Enterprises No. S-35/MBU/91/2020 dated January 10, 2020, concerning the Implementation of Anti-Bribery Management Systems in State-Owned Enterprises;
12. The Company's Articles of Association and its amendments;
13. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-2/MBU/03/2023 dated March 3, 2023, concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
14. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-3/MBU/03/2023 concerning the Organs and Human Capital of State-Owned Enterprises; and
15. Articles of Association of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Article 17 paragraph 5 concerning the Company's Code of Conduct.

KEY POINTS OF THE CODE OF CONDUCT

The Company's Code of Conduct contains an explanation regarding the Company in conducting ethical business and striving to balance the interests of the Company with the interests of its stakeholders. In its implementation, the Company adheres to the Joint Decree of the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk No. SK.01.01/A.DIR.00001.WEGE/2025 and No. DK.01.01/A.KOM.00001.WEGE/2025 concerning the Guidelines for Ethics and Behavior (Code of Conduct) of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk dated January 15, 2025.

Several aspects of the policies regulated in the Company's Code of Conduct are as follows:

1. Company Policy Regarding Ethics and Conduct
   a. Integrity in business activities and work;
   b. Risk Management;
   c. Marketing System;
   d. Procurement and Work Contract System;
   e. Employee Occupational Health and Safety;
   f. Environmental Management;

g. Keterlibatan dalam Politik;
h. Pernyataan Palsu, Klaim Palsu, dan Konspirasi;
i. Benturan Kepentingan;
j. Etika usaha Anti KKN dan Kebijakan tentang Larangan Suap;
k. Kebijakan tentang Hadiah, Imbalan, dan Sumbangan yang tidak dibenarkan;
l. Data Perusahaan dan Kerahasiaan Informasi;
m. Keterbukaan Informasi; Penyelewengan dan Penyimpangan Sejenisnya;
n. Perlindungan Aset Perseroan;
o. Integritas Keuangan;
p. Insider Trading;
q. Penggunaan Aplikasi Sosial Media Di Kantor;
r. Integritas Penggunaan Sosial Media dan Citra Perusahaan;
s. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

2. Etika Dengan Pemangku Kepentingan
   a. Hubungan dengan Pemegang Saham;
   b. Hubungan dengan Kreditur;
   c. Hubungan dengan Pemberi Kerja (Klien);
   d. Hubungan dengan Rekanan;
   e. Hubungan dengan Pengguna Akhir;
   f. Hubungan dengan Pegawai (Industrial);
   g. Hubungan dengan Pejabat Negara;
   h. Hubungan dengan Masyarakat.

3. Mekanisme Pelaporan dan Penegakan Etika
   a. Sistem Pelaporan dan Penegakan Etika dan Perilaku;
   b. Mekanisme Penegakan Kepatuhan terhadap Code Of Conduct

g. Involvement in Politics;
h. False Statements, False Claims, and Conspiracy;
i. Conflict of Interest;
j. Anti-Corruption, Collusion, and Nepotism Business Ethics and Policy on Bribery Prohibition;
k. Policy on Unauthorized Gifts, Rewards, and Donations;
l. Company Data and Confidentiality of Information;
m. Disclosure of Information; Misappropriation and Similar Deviations;
n. Protection of Company Assets;
o. Financial Integrity;
p. Insider Trading;
q. Use of Social Media Applications in the Office;
r. Integrity of Social Media Use and Company Image;
s. Intellectual Property Rights (IPR)

2. Ethics with Stakeholders
   a. Relationship with Shareholders;
   b. Relationship with Creditors;
   c. Relationship with Employers (Clients);
   d. Relationship with Partners;
   e. Relationship with End Users;
   f. Relationship with Employees (Industrial);
   g. Relationship with State Officials;
   h. Relationship with the Community

3. Ethics Reporting and Enforcement Mechanism
   a. Ethics and Conduct Reporting and Enforcement System;
   b. Mechanism for Enforcing Compliance with the Code Of Conduct

TIM PENGADUAN PELANGGARAN

Adapun susunan Tim Pengaduan Pelanggaran adalah sebagai berikut:

1. Tim Kepatuhan
   Tim Kepatuhan adalah tim yang dibentuk oleh Perseroan yang bertanggung jawab untuk menerima dan menindaklanjuti laporan tentang pelanggaran dan/atau penyimpangan terhadap Code of Conduct, serta menyampaikannya kepada Tim Pencari Fakta.

2. Tim Pencari Fakta.
   Tim yang dibentuk atau direkomendasikan oleh Tim Kepatuhan dan disetujui oleh Direksi untuk mencari serta menyelidiki indikasi penyelewengan terhadap pelaksanaan kepatuhan Code of Conduct. Tim Pencari Fakta dapat dibentuk sesuai kewenangan Direksi dari ahli terkait dan independen di luar fungsi dan/atau organisasi.

3. Majelis Kehormatan Pegawai
   Majelis Kehormatan Pegawai adalah Pejabat dan/atau Pegawai yang diberi wewenang untuk melakukan penegakan pelaksanaan serta pemeriksaan terhadap Pegawai yang dilaporkan/diduga melanggar peraturan/Code of Conduct.

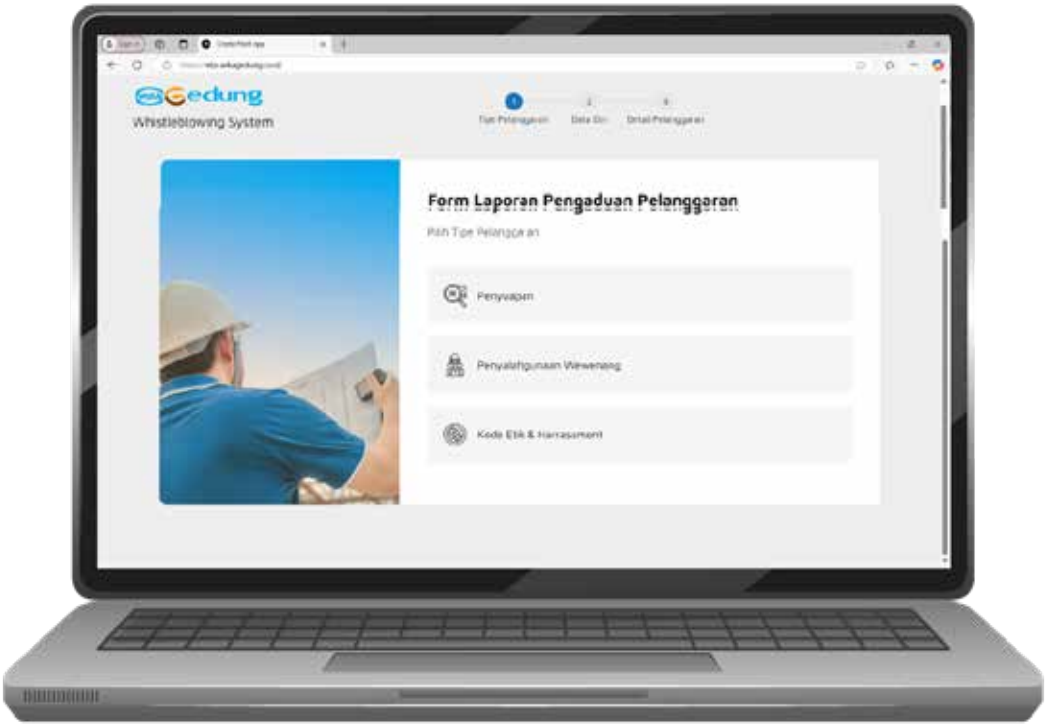
VIOLATION COMPLAINTS TEAM

The structure of the Violation Complaints Team is as follows:

1. Compliance Team
   The Compliance Team is a team formed by the Company responsible for receiving and following up on reports of violations and/or deviations from the Code of Conduct, as well as submitting them to the Fact-Finding Team.

2. Fact-Finding Team
   A team formed or recommended by the Compliance Team and approved by the Board of Directors to seek and investigate indications of irregularities in the implementation of Code of Conduct compliance. The Fact-Finding Team can be formed according to the authority of the Board of Directors from relevant and independent experts outside the function and/or organization.

3. Employee Honorary Council
   The Employee Honorary Council consists of Officials and/or Employees authorized to enforce and examine Employees reported/alleged to have violated regulations/the Code of Conduct.



https://wbs.wikagedung.co.id/

PERNYATAAN KOMITMEN PELAKSANAAN KODE ETIK OLEH DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Sebagai bagian dari anak Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pedoman Etika dan Perilaku menjadi landasan utama dalam mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik dan sebagai salah satu Perusahaan Publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia serta salah satu kelengkapan perusahaan dalam memenuhi ASEAN Corporate Governance Scorecard.

Kepatuhan ini memiliki peran penting bagi Perseroan dalam menjaga reputasi Perseroan terkait integritas, keadilan, akuntabilitas dan rasa hormat terhadap orang lain, yang merupakan hal mendasar bagi keberlanjutan bisnis.

Pemberlakuan pedoman akan dituangkan resmi melalui peraturan Direksi dan telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan melalui saluran keterbukaan informasi perusahaan baik situs web perusahaan, media komunikasi internal sedemikian sehingga semua pemangku kepentingan akan memahami keberadaan dan kepatuhan perusahaan terkait penerapan etika dan perilaku bagi seluruh jajaran dan insan Perusahaan.

STATEMENT OF COMMITMENT TO THE IMPLEMENTATION OF THE CODE OF CONDUCT BY THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

As part of a subsidiary of a State-Owned Enterprise (BUMN), the Guidelines for Ethics and Behavior serve as the primary foundation for implementing good corporate governance and as one of the requirements for a Public Company listed on the Indonesia Stock Exchange, as well as a component for the company to meet the ASEAN Corporate Governance Scorecard.

This compliance plays an essential role for the Company in maintaining its reputation related to integrity, fairness, accountability, and respect for others, which are fundamental to business sustainability.

The enforcement of these guidelines will be officially formalized through a Board of Directors regulation and has been socialized to all employees through the company's information disclosure channels, including the company website and internal communication media, ensuring that all stakeholders understand the existence and the company's commitment to the implementation of ethics and behavior for all levels and personnel of the Company.

Apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kode etik Perseroan, maka melanggar akan dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

Selain itu, kesediaan atas kepatuhan terhadap Kode Etik juga diwujudkan dengan penandatangan surat pernyataan komitmen. Hal ini juga berfungsi sebagai pakta integritas yang disetujui oleh setiap insan Perusahaan untuk patuh terhadap Kode Etik Perusahaan.

In the event of a violation or non-compliance with the Company's Code of Conduct, the violator will be subject to sanctions in accordance with the severity of the violation.

Furthermore, the willingness to comply with the Code of Conduct is also demonstrated by the signing of a statement of commitment. This also serves as an integrity pact agreed upon by every member of the Company to adhere to the Company's Code of Conduct.



PERNYATAAN KOMITMEN PELAKSANAAN PENERAPAN PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU (*CODE OF CONDUCT/COC*)

STATEMENT OF COMMITMENT FOR THE IMPLEMENTATION OF THE CODE OF CONDUCT (COC)

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG TBK

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) merupakan wujud kepatuhan Perusahaan terhadap Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tanggal 03 Maret 2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Koporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, yang telah diberlakukan di PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, selaku Anak Perusahaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. melalui pengakuhan/ ratifikasi pemberlakuan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Nomor WIKA-SUB-KP.01.01 dan Pedoman Prinsip Pengelolaan Anak Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi Nomor WIKA-SUB-QM.01.01 Rev. 01, berikut perubahan - perubahannya dari waktu ke waktu, melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 pada tanggal 20 Mei 2024.

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) is a form of the Company's compliance with the Ministry of State Owned Enterprise Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 dated March 03, 2023 concerning Governance Guideline and Significant Corporate Activities of State Owned Enterprises, which has been implemented at PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, as a Subsidiary of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, based on the ratification on the implementation of Integrated Governance Policy Number WIKA-SUB-QM.01.01 Rev. 01, including its recent amendments, through the Annual General Meeting of Shareholders of 2023 Fiscal Year on May 20, 2024.

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WIKA Gedung) menyadari arti pentingnya implementasi GCG akan tercampak positif bagi lingkungan internal maupun eksternal Perusahaan dengan harapan:

1. Mengoptimalkan nilai-nilai Perusahaan agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan daya saing berkelanjutan

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk realizes the significance of GCG implementation that will positively impact the Company's internal and external environment with the following expectations:

1. *Optimizing the Company's values for competitive benefits, both nationally and internationally, so as to maintain its*



2. Mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Perusahaan.
3. Meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan tidak hanya bagi Pemilik Modal namun juga untuk segenap Pemangku Kepentingan.
4. Mendorong agar Organ Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial terhadap Pemangku Kepentingan maupun pelestarian lingkungan di sekitar Perusahaan.
5. Berkontribusi bagi peningkatan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

existence and sustainable competitiveness.

2. *Encouraging the management of the Company in a professional, efficient, and effective manner, as well as empowering the functions and increasing the independence of the Company, empowering functions and increasing the Company's independence.*
3. *Increasing the value and long-term business growth in a sustainable manner, not only for Shareholders but also for all Stakeholders.*
4. *Encouraging the Company's organs to make decisions and carry out actions based on high moral values and compliance with Laws and Regulations, as well as the awareness of social responsibility to Stakeholders and the preservation of the environment around the Company and the preservation of the environment around the Company.*
5. *Contributing to the improvement of a conducive climate for the development of national investment.*

Seiring dengan komitmen kami, maka pada hari ini Dewan Komisaris dan Direksi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk menyatakan berkomitmen untuk melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai standar mosi yang tinggi dengan mengacu pada praktik terbaik (*best practice*) serta Pedoman Etika dan Perilaku (COC).

In line with our commitment, as of today, the Board of Commissioners and Directors of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk are committed to implementing Good Corporate Governance with high moral standards by referring to best practices and the Code of Conduct (COC).





BENTUK SOSIALISASI KODE ETIK DAN UPAYA PENEGAKAN

Kode etik Perseroan berlaku tanpa kecuali bagi setiap karyawan dalam Perseroan hingga ke level Direksi. Agar seluruh informasi yang tertuang dalam kode etik dapat diterima dengan baik oleh seluruh insan, Perseroan melakukan sosialisasi, implementasi dan evaluasi terhadap Kode Etik secara berkesinambungan. Pemantauan implementasi kode etik Perseroan dilakukan oleh Tim Kepatuhan GCG yang diketuai oleh Direktur yang bertanggung jawab terhadap implementasi GCG Perseroan.

Perseroan telah melaksanakan sosialisasi kode etik kepada seluruh karyawan melalui beberapa cara, yakni:

a. Situs web Perseroan;
b. Surat Keputusan Bersama
c. Aplikasi MyWG Mobile
d. Aplikasi Whatsapp Karyawan tanggal 14 Februari 2025

FORMS OF SOCIALIZATION OF THE CODE OF CONDUCT AND THE ENFORCEMENT UNDERTAKINGS

The Company's Code of Conduct applies without exception to every employee within the Company, up to the Board of Directors level. To ensure that all information contained in the Code of Conduct is well-received by all personnel, the Company conducts continuous socialization, implementation, and evaluation of the Code of Conduct. Monitoring the implementation of the Company's Code of Conduct is carried out by the GCG Compliance Team, chaired by the Director responsible for the implementation of the Company's GCG.

The Company has socialized the Code of Conduct to all employees through several means, namely:

a. The Company's website;
b. Joint Decree
c. The MyWG Mobile application
d. Employee WhatsApp application dated February 14, 2025

Melalui sosialisasi diharapkan akan melahirkan pemahaman, kesadaran dan kontribusi aktif seluruh jajaran dan insan Perseroan dalam membangun proses bisnis dan kultur kerja yang mengedepankan penerapan tata kelola perusahaan yang baik serta etika bisnis. Sosialisasi tidak hanya dilakukan pada forum-forum yang bersifat tatap muka melainkan juga dilakukan kepada seluruh media komunikasi dan keterbukaan yang tersedia di lingkungan Perseroan.

Through socialization, it is hoped that understanding, awareness, and active contribution from all levels and personnel of the Company will emerge in building business processes and a work culture that prioritizes the implementation of good corporate governance and business ethics. Socialization is not only carried out in face-to-face forums but also through all available communication and disclosure media within the Company's environment.

SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Setiap Insan Perseroan yang terbukti melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut adalah pelanggaran terhadap Kode Etik:

1. Sanksi bagi Pegawai yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh Atasan Langsung atau Direksi sesuai dengan tingkat kesalahannya setelah mendapat laporan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai yang bersangkutan;
2. Direksi memberikan arahan atas tindakan pembinaan, sanksi disiplin dan/atau tindakan lainnya serta pencegahan yang harus dilaksanakan oleh Atasan Langsung di lingkungan masing-masing;
3. Sanksi bagi Direksi yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh Dewan Komisaris;
4. Sanksi bagi Dewan Komisaris yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh Pemegang Saham;
5. Bila Mitra Kerja atau Stakeholders yang melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Apabila terkait dengan tindak pidana dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib.

SANCTIONS FOR VIOLATIONS OF THE CODE OF CONDUCT

Every Personnel of the Company proven to have committed a violation will be subject to sanctions in accordance with the prevailing policies and laws and regulations. The following are violations of the Code of Conduct:

1. Sanctions for Employees who commit violations are decided by their Direct Supervisor or the Board of Directors according to the severity of the offense, after receiving a report on the violation committed by the Employee concerned;
2. The Board of Directors provides direction on coaching actions, disciplinary sanctions, and/or other actions, as well as prevention measures that must be implemented by Direct Supervisors within their respective environments;
3. Sanctions for Members of the Board of Directors who commit violations are decided by the Board of Commissioners;
4. Sanctions for Members of the Board of Commissioners who commit violations are decided by the Shareholders;
5. If Business Partners or Stakeholders commit violations, the provisions stipulated in the contract will apply. If it involves a criminal act, it can be forwarded to the authorities.

JENIS SANKSI UNTUK MASING-MASING JENIS PELANGGARAN YANG DIATUR DALAM KODE ETIK

Menurut Perjanjian Kerja Bersama antara Perseroan dan Serikat Karyawan WEGE, bahwa terhadap karyawan yang telah melalui proses pemeriksaan dan dinyatakan bersalah, Perseroan berhak memberikan sanksi yang mungkin meliputi:

1. Peringatan Lisan;
2. Peringatan Tertulis I, II, dan III;
3. Pemotongan Gaji;
4. Penurunan Grade;
5. Pemberhentian dari jabatan;
6. Pemutusan Hubungan Kerja.

TYPES OF SANCTIONS FOR EACH TYPE OF VIOLATION REGULATED IN THE CODE OF CONDUCT

According to the Collective Labor Agreement between the Company and the WEGE Employee Union, employees who have gone through the investigation process and are found guilty, the Company has the right to impose sanctions that may include:

1. Verbal Warning;
2. Written Warning I, II, and III;
3. Salary Deduction;
4. Grade Demotion;
5. Dismissal from Position;
6. Termination of Employment.

JUMLAH PELANGGARAN KODE ETIK BESERTA SANKSI YANG DIBERIKAN PADA TAHUN BUKU TERAKHIR

Sepanjang tahun 2024, Perseroan melaporkan tidak terdapat pelanggaran atas Kode Etik. Dengan tidak adanya pelanggaran atas kode etik tersebut serta adanya penandatanganan komitmen pernyataan kepatuhan terhadap kode etik menunjukkan kualitas penerapan kode etik yang lebih baik.

NUMBER OF CODE OF CONDUCT VIOLATIONS AND SANCTIONS IMPOSED IN THE LAST FISCAL YEAR

Throughout 2024, the Company reported no violations of the Code of Conduct. The absence of violations of the Code of Conduct and the signing of commitment statements of compliance with the code of conduct demonstrate a better quality of implementation of the code of conduct.

Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja Kepada Manajemen dan/atau Karyawan Antara Lain Berupa Program Kepemilikan Saham Oleh Manajemen (Management Stock Ownership Program/MSOP) dan/atau Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan (Employee Stock Ownership Program/ ESOP)

Policy on Granting Long-Term Performance-Based Compensation to Management and/or Employees, Including in the Form of a Management Stock Ownership Program (MSOP) and/or an Employee Stock Ownership Program (ESOP).

Hingga Tahun Buku 2024, Perseroan belum melaksanakan program kepemilikan saham oleh Karyawan (*Employee Stock Option Program*/ ESOP) dan/atau Kepemilikan Saham oleh Manajemen (*Management Stock Option Program*/MSOP).

Hingga Tahun Buku 2024, Perseroan belum melaksanakan program kepemilikan saham oleh Karyawan (*Employee Stock Option Program*/ ESOP) dan/atau Kepemilikan Saham oleh Manajemen (*Management Stock Option Program*/MSOP).

Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Paling Lambat 3 (Tiga) Hari Kerja Setelah Terjadinya Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan atas Saham Perusahaan Terbuka

Share Ownership of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners No Later Than 3 (Three) Business Days After the Occurrence of Ownership or Any Change in Ownership of the Public Company's Shares

Hingga Tahun Buku 2024, Perseroan belum melaksanakan program kepemilikan saham oleh Karyawan (*Employee Stock Option Program*/ ESOP) dan/atau Kepemilikan Saham oleh Manajemen (*Management Stock Option Program*/MSOP).

Hingga Tahun Buku 2024, Perseroan belum melaksanakan program kepemilikan saham oleh Karyawan (*Employee Stock Option Program*/ ESOP) dan/atau Kepemilikan Saham oleh Manajemen (*Management Stock Option Program*/MSOP).

Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

Information Technology Governance

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan, khususnya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Perusahaan. Perseroan merancang suatu mekanisme untuk dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko penyuapan serta untuk mencegah, mendeteksi dan merespon penyuapan.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Perseroan dalam mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjalankan bisnis Perseroan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG), serta mematuhi *code of conduct* melalui penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang efektif.

Dasar Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Implementasi dan penerapan SMAP Perseroan dilaksanakan berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan dan peraturan internal Perseroan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
2. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
3. Surat Menteri BUMN Nomor S-35/MBU/01/2020 tanggal 10 Januari 2020 perihal Implementasi Sistem Manajemen Anti Suap di BUMN sebagai Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
4. Surat Menteri BUMN Nomor S-17/S.MBU/02/2020 tanggal 17 Februari 2020 perihal Sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan di BUMN;
5. Pedoman SNI ISO 37000:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Persyaratan dengan Panduan Pengguna;

In order to increase stakeholder trust, particularly in efforts to prevent and eradicate corruption, collusion and nepotism in the Company's environment. The Company has designed a mechanism to identify and evaluate the risk of bribery and to prevent, detect and respond to bribery.

This is undertaken as a form of the Company's commitment to comply with all prevailing laws and regulations, run the Company's business based on the principles of good corporate governance (GCG), and comply with the code of conduct through the implementation of an effective Anti-Bribery Management System (SMAP).

Basis for Implementing an Anti-Bribery Management System

The implementation and application of the Company's SMAP is carried out based on several laws and regulations and the Company's internal regulations, including:

1. Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1999 Number 140, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3874) as amended by Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2001 Number 134, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4150), as amended by Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2002 Number 137, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4250) as amended several times, most recently by Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission Criminal Acts of Corruption, as partially revoked by Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (State Gazette of the Republic of Indonesia 2023 Number 1, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6842);
2. Presidential Instruction Number 10 of 2016 concerning Action to Prevent and Eradicating Corruption;
3. Letter of the Minister of SOEs Number S-35/MBU/01/2020 dated January 10, 2020 concerning the Implementation of the Anti-Bribery Management System in SOEs as the Implementation of Presidential Regulation Number 54 of 2018 concerning the National Strategy for Corruption Prevention;
4. Letter of the Minister of SOEs Number S-17/S.MBU/02/2020 dated February 17, 2020 concerning ISO 37001 Certification of Anti-Bribery Management Systems in SOEs;
5. Guidelines for SNI ISO 37000:2016 concerning Anti-Bribery Management Systems - Requirements with User Guide;

6. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, No. SK.01.01/A.DIR. WG.06516/2024 tanggal 21 Mei 2024 tentang Struktur Organisasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk;
7. Prosedur Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) No. WG-GEA-PM-02 yang diberlakukan tanggal 28 Oktober 2024; dan
8. Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Perseroan telah menetapkan Kebijakan SMAP yang disahkan pada tanggal 18 Desember 2024. Kebijakan tersebut disusun berdasarkan standar internasional SNI ISO 37001:2016 sebagai acuan utama. Penetapan kebijakan ini merupakan wujud komitmen Perseroan dalam menerapkan prinsip integritas serta pencegahan terhadap segala bentuk penyuapan di seluruh lini kegiatan usaha.

Perseroan berkomitmen untuk mewujudkan Perusahaan yang bersih dan berintegritas serta mendukung upaya pencegahan korupsi, dengan:

a. Melarang dan mencegah penyuapan dalam bentuk apapun oleh dan/atau kepada karyawan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
b. Menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan sesuai dengan persyaratan ISO 37001:2016 dengan mematuhi peraturan dan perundangan yang berlaku tentang suap dan korupsi dengan melibatkan seluruh pegawai dalam mendeteksi dan menaggapi penyuapan serta melakukan peningkatan secara berkelanjutan.
c. Menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan, meninjau dan mencapai sasaran Anti Penyuapan, mendorong peningkatan kepercayaan tanpa rasa takut terhadap pembalasan serta memberikan kepuasan kepada pelanggan/pihak-pihak yang berkepentingan.
d. Menetapkan wewenang dan kemandirian Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan serta konsekuensinya apabila terdapat ketidaksesuaian dengan kebijakan anti penyuapan ini.

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk senantiasa meningkatkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan secara berkelanjutan berdasarkan pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang berlaku.

6. Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, No. SK.01.01/A.DIR. WG.06516/2024 dated May 21, 2024 concerning the Organizational Structure of SNI ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk;
7. Anti-Bribery Management System Procedure (SMAP) No. WG-GEA-PM-02 which came into effect on October 28, 2024; and
8. Anti-Bribery Management System Policy of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

Anti-Bribery Management System Policy

The Company has established an SMAP Policy which was ratified on December 18, 2024. The policy is based on the international standard SNI ISO 37001:2016 as the main reference. The establishment of this policy is a manifestation of the Company's commitment to implementing the principle of integrity and preventing all forms of bribery in all lines of business activities.

The Company is committed to realizing a clean and integrated Company and supporting undertakings to prevent corruption, by:

a. Prohibiting and preventing bribery in any form by and/or to employees of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
b. Implementing an Anti-Bribery Management System in accordance with the requirements of ISO 37001:2016 by complying with prevailing laws and regulations on bribery and corruption by involving all employees in detecting and responding to bribery and making continuous improvements.
c. Providing a framework for establishing, reviewing and achieving Anti-Bribery targets, encouraging increased trust without fear of retaliation and providing satisfaction to customers/interested parties.
d. Determining the authority and independence of the Anti-Bribery Compliance Function and the consequences if there is a non-compliance with this anti-bribery policy.

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk continuously improves the Anti-Bribery Management System based on the principles of Good Corporate Governance, laws and regulations and other prevailing requirements.

Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk
Anti-Bribery Management System Policy PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk



KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN
ANTI BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM
PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk.

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk., berkomitmen untuk mewujudkan Perusahaan yang bersih dan berintegritas serta mendukung upaya pencegahan korupsi, dengan:
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk., committed to creating a clean and integrity company and supporting efforts to prevent corruption, by:

a. Melarang dan mencegah penyuapan dalam bentuk apapun oleh dan/atau kepada karyawan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
Prohibiting and preventing bribery in any form by and/or the employees of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

b. Menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan sesuai dengan persyaratan ISO 37001:2016 dengan memenuhi peraturan dan perundangan yang berlaku tentang suap dan korupsi dengan melibatkan seluruh pegawai dalam mendeteksi dan merespons penyuapan serta melakukan peningkatan secara berkelanjutan.
Implementing an Anti-Bribery Management System in accordance with the requirements of ISO 37001:2016 by complying with the applicable laws and regulations regarding bribery and corruption by involving all employees in detecting and responding to bribery and making continuous improvements.

c. Menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan, meninjau dan mencapai sasaran Anti- Penyuapan, mendorong peningkatan kepercayaan tanpa rasa takut terhadap pemalsuan serta memberikan kepuasan kepada pelanggan/pihak-pihak yang berkepentingan.
Providing a framework for setting, reviewing and achieving Anti-Bribery objectives, encouraging free-from trust in relevation and providing satisfaction to customers/concerned parties.

d. Menetapkan wewenang dan kemandirian Fungsi Kepatuhan Anti penyuapan serta konsekuensinya apabila terdapat ketidaksesuaian dengan kebijakan anti penyuapan ini.
Establishing authority and independence of the Anti-Bribery Compliance Function and its consequences in cases of non-compliance with this anti-bribery policy.

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk., senantiasa meningkatkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan secara berkelanjutan berdasarkan pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang berlaku.
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk., always improve Anti-Bribery Management System continually improving based on the principles of Good Corporate Governance, laws and other applicable regulations.

Kebijakan ini untuk disosialisasikan dan dipublikasikan kepada semua pihak terkait dan memiliki konsekuensi hukum sesuai prosedur perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku.
This policy is to be informed and published to all interested parties and carries legal consequences in accordance with company procedures and applicable laws and regulations.

Ditetapkan di / *Issued in* : Jakarta / *Jakarta*
Pada tanggal / *On the date of* : 18 Desember 2024 / *December 18, 2024*

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk

Dewan Komisaris,
Board of Commissioners

Joseph Prajogo
Komisaris Independen merangkap
Pt. Komisaris Utama/
Independent Commissioner/
Concurrently President

Direksi,
Directors

Hadian Pramudita
Direktur Utama/
President Director

Struktur Organisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Struktur Organisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk Nomor SK.01.01/A.DIR.WG.06516/2024 tanggal 21 Mei 2024.

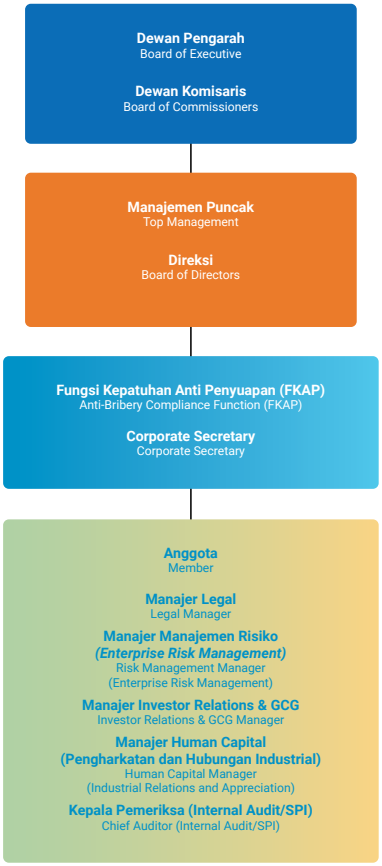
Adapun struktur organisasi SMAP Perseroan adalah sebagai berikut:

Organizational Structure of the Anti-Bribery Management System

The Organizational Structure of the Anti-Bribery Management System (SMAP) of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk is stipulated based on the Joint Decree of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk Number SK.01.01/A.DIR.WG.06516/2024 dated May 21, 2024.

The organizational structure of the Company's SMAP is as follows:

Struktur Organisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk
Organizational Structure of Anti-Bribery Management System PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk



Ruang Lingkup Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Ruang lingkup penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di lingkungan Perseroan mengacu pada standar SNI ISO 37001:2016, yang mencakup seluruh aktivitas bisnis dan operasional Perseroan. Implementasi SMAP ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh fungsi organisasi, baik di tingkat strategis maupun operasional, menerapkan prinsip-prinsip antisuap secara efektif dan berkelanjutan.

Adapun ruang lingkup implementasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Perseroan meliputi klausul-klausul utama sebagai berikut:

Scope of Implementation of the Anti-Bribery Management System

The scope of implementation of the Anti-Bribery Management System (SMAP) in the Company's environment refers to the SNI ISO 37001:2016 standard, which covers all of the Company's business and operational activities. The implementation of the SMAP is designed to ensure that all organizational functions, both at the strategic and operational levels, apply anti-bribery principles effectively and sustainably.

The scope of the implementation of the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (SMAP) in the Company includes the following main clauses:

Ruang Lingkup Implementasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Perseroan The scope of the implementation of the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (SMAP) in the Company	**Penerapan ISO 37001:2016** Implementation of ISO 37001:2016
a. **Klausul 4 – Konteks Organisasi**, meliputi: • **Klausul 4.1 – Memahami Organisasi dan Konteksnya** Organisasi harus menentukan isu internal dan eksternal yang relevan dengan tujuannya dan yang dapat berpengaruh pada kemampuannya untuk mencapai sasaran hasil yang diinginkan dari sistem manajemen anti penyuapan. Isu ini akan meliputi, tanpa Batasan, faktor berikut: a) Ukuran, struktur dan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan dari organisasi; b) Lokasi dan sektor dimana organisasi itu beroperasi atau antisipasi pengoperasian; c) Sifat, skala dan kompleksitas dari aktivitas dan operasi organisasi; d) Model bisnis organisasi; e) Entitas di mana organisasi mempunyai kendali dan entitas yang menerapkan kendali terhadap organisasi; f) Rekan bisnis organisasi; g) Sifat dan jangkauan interaksi dengan pejabat public; h) Peraturan perundang-undangan, regulasi kontrak serta kewajiban dan tugas profesional.	**Klausul 4 – Diterapkan** **Clause 4 - Implemented**
a. **Clause 4 – Organizational Context, including:** • **Clause 4.1 – Understanding the Organization and its Context** The organization shall determine the internal and external issues that are relevant to its objectives and that may affect its ability to achieve the intended outcomes of the anti-bribery management system. These issues shall include, without limitation, the following factors: a) The size, structure and delegation of decision-making authority of the organization; b) The locations and sectors in which the organization operates or anticipates operating; c) The nature, scale and complexity of the organization's activities and operations; d) The organization's business model; e) The entities which the organization has control and entities that exercise control over the organization; f) The organization's business partners; g) The nature and extent of interactions with public officials; h) Legislation, contractual regulations as well as professional obligations and duties.	
• **Klausul 4.2 – Memahami Kebutuhan dan Harapan Pemangku Kepentingan** Organisasi harus menentukan: a) Pemangku kepentingan yang relevan terhadap sistem manajemen anti penyuapan; b) Persyaratan yang relevan dari pemangku kepentingan.	
• **Clause 4.2 – Understanding Stakeholder Needs and Expectations** The organization shall determine: a) The stakeholders that are relevant to the anti-bribery management system; b) The relevant requirements of stakeholders.	
• **Klausul 4.3 – Menentukan Ruang Lingkup Sistem Manajemen Anti Penyuapan** Organisasi harus menentukan batas dan penerapan dari sistem manajemen anti penyuapan untuk menetapkan lingkupnya. Ketika menentukan lingkup ini, organisasi harus mempertimbangkan: a) Isu internal dan eksternal yang dimaksud dalam klausul 4.1; b) Persyaratan yang dimaksud dalam klausul 4.2; c) Hasil dari penilaian risiko penyuapan yang dimaksud dalam klausul 4.5.	

Ruang Lingkup Implementasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Perseroan The scope of the implementation of the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (SMAP) in the Company	Penerapan ISO 37001:2016 Implementation of ISO 37001:2016
• **Clause 4.3 – Determining the Scope of the Anti-Bribery Management System** The organization shall determine the boundaries and application of the anti-bribery management system to establish its scope. When determining this scope, the organization shall consider: a) The internal and external issues referred to in clause 4.1; b) The requirements referred to in clause 4.2; c) The results of the bribery risk assessment referred to in clause 4.5.	
• **Klausul 4.4 – Sistem Manajemen Anti Penyuapan** Organisasi harus menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan, memelihara dan secara berkelanjutan meninjau, dan jika diperlukan, meningkatkan sistem manajemen anti penyuapan, termasuk proses dan interaksinya yang diperlukan, sesuai dengan persyaratan standar ini. Sistem manajemen anti penyuapan harus memuat tindakan yang dirancang untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko dari, dan untuk mencegah, mendeteksi dan menanggapi terhadap penyuapan.	
• **Clause 4.4 – Anti-Bribery Management System** The organization shall establish, document, implement, maintain and continually review, and as necessary, improve, an anti-bribery management system, including its processes and interactions, in accordance with the requirements of this standard. The anti-bribery management system shall include measures designed to identify and evaluate risks from, and to prevent, detect and respond to, bribery.	
• **Klausul 4.5 – Penilaian Risiko Penyuapan**, meliputi: 1. Klausul 4.5.1: Organisasi harus melaksanakan penilaian risiko penyuapan secara teratur, yang harus: a) Mengidentifikasi risiko penyuapan organisasi yang wajar untuk antisipasi faktor yang tercantum pada klausul 4.1. b) Menganalisa, menilai dan memprioritaskan risiko penyuapan yang teridentifikasi; c) Mengevaluasi kesesuaian dan keefektifan dari kendali yang ada di organisasi untuk mengurangi risiko penyuapan yang dinilai. 2. Klausul 4.5.2: Organisasi harus menetapkan kriteria untuk mengecaluasi tingkat risiko penyuapan, dan harus mempertimbangkan kebijakan dan sasaran organisasi. 3. Klausul 4.5.3: Penilaian risiko penyuapan harus ditinjau: a) Secara teratur sehingga perubahan dan informasi baru dapat dinilai secara tepat berdasarkan waktu dan frekuensi yang ditentukan oleh organisasi; b) Pada saat perubahan penting terhadap struktur atau aktivitas organisasi. 4. Klausul 4.5.4: Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi untuk memperagakan bahwa penilaian risiko penyuapan telah dilaksanakan dan digunakan untuk merancang atau meningkatkan sistem manajemen anti penyuapan.	
• **Clause 4.5 – Bribery Risk Assessment,** including: 1. Clause 4.5.1: The organization shall conduct a regular bribery risk assessment, which shall: a) Identifying the organization's reasonable bribery risks in light of the factors listed in clause 4.1. b) Analyzing, assessing and prioritizing the identified bribery risks; c) Evaluating the suitability and effectiveness of the organization's existing controls to mitigate the assessed bribery risks. 2. Clause 4.5.2: The organization shall establish criteria for evaluating the level of bribery risk, and shall take into account the organization's policies and objectives. 3. Clause 4.5.3: The bribery risk assessment shall be reviewed: a) Regularly so that changes and new information can be appropriately assessed at a time and frequency determined by the organization; b) When significant changes occur to the organization's structure or activities. 4. Clause 4.5.4: The organization shall retain documented information to demonstrate that a bribery risk assessment has been carried out and is used to design or improve the anti-bribery management system.	

Ruang Lingkup Implementasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Perseroan The scope of the implementation of the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (SMAP) in the Company	Penerapan ISO 37001:2016 Implementation of ISO 37001:2016
b. **Klausul 5 – Kepemimpinan**, meliputi: • **Klausul 5.1 – Kepemimpinan dan Komitmen**, meliputi: 1. Klausul 5.1.1: Dewan pengarah. Bila organisasi mempunyai dewan pengarah, dewan ini harus memperagakan kepemimpinan dan komitmen terhadap sistem manajemen anti penyuapan dengan: a) Menyetujui kebijakan anti penyuapan organisasi; b) Memastikan bahwa strategi dan kebijakan anti penyuapan organisasi sejalan; c) Menerima dan meninjau informasi tentang isi dan operasi dari sistem manajemen anti penyuapan pada waktu yang direncanakan; d) Membutuhkan sumber daya yang cukup dan tepat yang diperlukan untuk operasi sistem manajemen anti penyuapan dialokasikan dan ditentukan; e) Melaksanakan pengawasan yang wajar terhadap penerapan dan keefektifan sistem manajemen anti penyuapan di organisasi oleh manajemen puncak. Aktivitas ini harus dilaksanaan oleh manajemen puncak, jika organisasi tidak mempunyai dewan pengarah.	**Klausul 5 – Diterapkan** **Clause 5 - Implemented**
2. Klausul 5.1.2: Manajemen Puncak Manajemen puncak harus memperagakan kepemimpinan dan komitmen terhadap sistem manajemen anti penyuapan dengan: a) Memastikan sistem manajemen anti penyuapan, termasuk kebijakan dan sasaran, ditetapkan secara cukup yang dimaksudkan untuk mengatasi risiko penyuapan pada organisasi; b) Memastikan integrasi persyaratan sistem manajemen anti penyuapan kedalam proses organisasi; c) Menyediakan sumber daya yang cukup dan tepat untuk operasi yang efektif dari sistem manajemen anti penyuapan; d) Mengkomunikasikan kebijakan anti penyuapan secara internal dan eksternal; e) Mengkomunikasikan secara internal pentingnya manajemen anti penyuapan yang efektif dan memenuhi persyaratan sistem manajemen anti penyuapan; f) Memastikan sistem manajemen anti penyuapan dirancang secara tepat untuk mencapai sasarannya; g) Mengarahkan dan mendukung personel untuk berkontribusi pada keefektifan sistem manajemen anti penyuapan; h) Mempromosikan budaya anti penyuapan yang sesuai di organisasi; i) Mempromosikan peningkatan berkelanjutan; j) Mendukung peran manajemen yang relevan lainnya untuk memperagakan kepemimpinannya dalam mencegah dan mendeteksi penyuapan yang terjadi di bidang tanggung jawab mereka; k) Mendorong penggunaan prosedur pelaporan untuk penyuapan yang dicurigai dan actual (lihat klausul 8.9); l) Memastikan tidak ada personel yang menderita tindakan pembalasan, diskriminasi atau disipliner (lihat klausul 7.2.2.1 d) terhadap laporan yang dibuat dengan itikad baik atau atas dasar keyakinan yang wajar terhadap pelanggaran atau pelanggaran yang dicurigai dari kebijakan anti penyuapan organisasi, atau menolak terlibat dalam penyuapan walaupun penolakan ini dapat mengakibatkan hilangnya bisnis organisasi (kecuali jika ada partisipasi individu dalam pelanggaran ini); m) Pada waktu yang direncanakan, melaporkan ke dewan pengarah (jika ada) mengenai isi dan operasi dari sistem manajemen anti penyuapan dan atas tuduhan serius atau penyuapan tersturktur.	

Ruang Lingkup Implementasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Perseroan The scope of the implementation of the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (SMAP) in the Company	Penerapan ISO 37001:2016 Implementation of ISO 37001:2016
b. **Clause 5 – Leadership,** including: • Clause 5.1 – Leadership and Commitment, including: 1. Clause 5.1.1: Governing board. If the organization has a governing board, the board shall demonstrate leadership and commitment to the anti-bribery management system by: a) Approving the organization's anti-bribery policy; b) Ensuring that the organization's anti-bribery strategy and policy are aligned; c) Receiving and reviewing information on the content and operation of the anti-bribery management system in a timely manner; d) Requiring sufficient and appropriate resources necessary for the operation of the anti-bribery management system to be allocated and determined; e) Exercising reasonable oversight of the implementation and effectiveness of the anti-bribery management system in the organization by top management. These activities shall be carried out by top management, if the organization does not have a governing board.	
2. Clause 5.1.2: Top Management Top management shall demonstrate leadership and commitment to the anti-bribery management system by: a) Ensuring that the anti-bribery management system, including policies and objectives, is adequately defined to address the risks of bribery in the organization; b) Ensuring the integration of the anti-bribery management system requirements into the organization's processes; c) Providing sufficient and appropriate resources for the effective operation of the anti-bribery management system; d) Communicating the anti-bribery policy internally and externally; e) Communicating internally the importance of effective anti-bribery management and meeting the anti-bribery management system requirements; f) Ensuring that the anti-bribery management system is appropriately designed to achieve its objectives; g) Directing and supporting personnel to contribute to the effectiveness of the anti-bribery management system; h) Promoting an appropriate anti-bribery culture in the organization; i) Promoting continual improvement; j) Supporting other relevant management roles to demonstrate leadership in preventing and detecting bribery occurring in their areas of responsibility; k) Encouraging the use of reporting procedures for suspected and actual bribery (see clause 8.9); l) Ensuring that no personnel suffer retaliation, discrimination or disciplinary action (see clause 7.2.2.1 d) for reporting in good faith or on the basis of a reasonable belief of a violation or suspected violation of the organization's anti-bribery policy, or refusing to engage in bribery even if this refusal may result in a loss of business for the organization (except where there is individual participation in the violation); m) Reporting to the board (if any) on a timely basis on the content and operation of the anti-bribery management system and on allegations of serious or structured bribery.	

Ruang Lingkup Implementasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Perseroan The scope of the implementation of the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (SMAP) in the Company	Penerapan ISO 37001:2016 Implementation of ISO 37001:2016
• **Klausul 5.2 – Kebijakan Anti Penyuapan** Manajemen puncak harus menetapkan, memelihara dan meninjau kebijakan anti penyuapan yang: a) Melarang penyuapan; b) Mensyaratkan kepatuhan dengan peraturan perundang-undangan anti penyuapan yang berlaku pada organisasi; c) Sesuai dengan tujuan organisasi; d) Menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan, meninjau dan mencapai sasaran anti penyuapan; e) Termasuk komitmen untuk memenuhi persyaratan sistem manajemen anti penyuapan; f) Mendorong peningkatan kepedulian dengan itikad baik, atau atas dasar keyakinan yang wajar, tanpa takut tindakan balasan; g) Termasuk komitmen untuk peningkatan berkelanjutan dari sistem manajemen anti penyuapan; h) Menjelaskan wewenang dan kemandirian dari fungsi kepatuhan anti penyuapan; i) Menjelaskan konsekuensi jika tidak sesuai dengan kebijakan anti penyuapan. Kebijakan anti penyuapan harus: - Tersedia sebagai informasi terdokumentasi; - Dikomunikasikan dalam bahasa yang sesuai didalam organisasi dan kepada rekan bisnis yang memiliki risiko penyuapan di atas batas rendah; - Tersedia untuk pemangku kepentingan yang relevan, jika sesuai.	
• **Clause 5.2 – Anti-Bribery** Policy Top Management shall establish, maintain and review an anti-bribery policy that: a) Prohibits bribery; b) Requires compliance with anti-bribery laws and regulations applicable to the organization; c) Is consistent with the organization's objectives; d) Provides a framework for establishing, reviewing and achieving anti-bribery objectives; e) Includes a commitment to comply with the requirements of the anti-bribery management system; f) Encourages raising concerns in good faith, or in the reasonable belief, without fear of reprisal; g) Includes a commitment to continual improvement of the anti-bribery management system; h) Describes the authority and independence of the anti-bribery compliance function; i) Describes the consequences of non-compliance with the anti-bribery policy. The anti-bribery policy shall: - Be available as documented information; - Be communicated in appropriate languages within the organization and to business partners who have a bribery risk above a low threshold; - Be available to relevant stakeholders, as appropriate.	

Ruang Lingkup Implementasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Perseroan The scope of the implementation of the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (SMAP) in the Company	Penerapan ISO 37001:2016 Implementation of ISO 37001:2016

- **Klausul 5.3 – Peran, Tanggung Jawab, dan Wewenang Organisasi**, meliputi:
  1. Klausul 5.3.1: Peran dan Tanggung Jawab
     Manajemen puncak harus mempunyai seluruh tanggung jawab untuk penerapan atas dan kepatuhan dengan sistem manajemen anti penyuapan seperti yang dijelaskan dalam klausul 5.1.2.
     Manajemen puncak harus memastikan bahwa tanggung jawab dan wewenang untuk peran yang relevan ditentukan dan dikomunikasikan di dalam dan menyeluruh ke setiap tingkatan dari organisasi.
     Manajer pada setiap tingkatan harus bertanggung jawab untuk meminta bahwa persyaratan sistem manajemen anti penyuapan diaplikasikan dan dipenuhi pada departemen atau fungsi mereka.
     Dewan pengarah (jika ada), manajemen puncak dan seluruh personel lain harus bertanggung jawab untuk pemahaman, pemenuhan, dan penerapan persyaratan sistem manajemen anti penyuapan, sebagaimana terkait terhadap perannya didalam organisasi.
  2. Klausul 5.3.2: Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan
     Manajemen puncak harus menugaskan pada fungsi kepatuhan anti penyuapan tanggung jawab dan wewenang untuk:
     a) Mengawasi rancangan dan penerapan sistem manajemen anti penyuapan organisasi;
     b) Menyediakan petunjuk dan panduan untuk personel atas sistem manajemen anti penyuapan dan isu terkait penyuapan;
     c) Memastikan sistem manajemen anti penyuapan sesuai dengan persyaratan standar ini;
     d) Melaporkan kinerja sistem manajemen anti penyuapan kepada dewan pengarah (jika ada) dan manajemen puncak dan fungsi kepatuhan lainnya, jika sesuai.
     Fungsi kepatuhan anti penyuapan harus mempunyai kecukupan sumber daya dan ditugaskan pada orang (kelompok) yang mempunyai kesesuaian kompetensi, status, tanggung jawab dan mandiri.
     Fungsi kepatuhan anti penyuapan harus mempunyai akses langsung dan cepat kepada dewan pengarah (jika ada) dan pada manajemen puncak ketika ada isu atau kepedulian yang diperlukan untuk diketahui terkait dengan penyuapan atau sistem manajemen anti penyuapan.
     Manajemen puncak dapat menugaskan beberapa atau seluruh fungsi kepatuhan anti penyuapan kepada orang diluar organisasi. Jika hal ini terjadi, manajemen puncak harus memastikan personel khusus mempunyai tanggung jawab dan kewenanganan terhadap penugasan eksternal yang merupakan bagian dari fungsi.
  3. Klausul 5.3.3: Pengambilan Keputusan yang Didelegasikan
     Ketika manajemen puncak mendelegasikan wewenang kepada personel untuk membuat keputusan terkait dengan terdapatnya risiko penyuapan di atas batas rendah, organisasi harus menetapkan dan memelihara suatu proses pengambilan keputusan atau mensyaratkan kendali yang diperlukan untuk proses keputusan dan tingkat kewenangan dari pengambil keputusan yang tepat dan bebas dari konflik kepentingan yang actual atau potensial. Manajemen puncak harus memastikan proses ini ditinjau secara berkala sebagai bagian dari peran dan tanggung jawabnya untuk penerapan dan kepatuhan dengan sistem manajemen anti penyuapan yang dijelaskan pada klausul 5.3.1.

Ruang Lingkup Implementasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Perseroan The scope of the implementation of the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (SMAP) in the Company	Penerapan ISO 37001:2016 Implementation of ISO 37001:2016
• Clause 5.3 – Organizational Roles, Responsibilities and Authorities, including: 1. Clause 5.3.1: Roles and Responsibilities Top management shall have overall responsibility for the implementation of and compliance with the anti-bribery management system as described in clause 5.1.2. Top management shall ensure that the responsibilities and authorities for relevant roles are defined and communicated within and across all levels of the organization. Managers at all levels shall be responsible for ensuring that the anti-bribery management system requirements are implemented and met in their departments or functions. The board of directors (if any), top management and all other personnel shall be responsible for understanding, meeting and implementing the anti-bribery management system requirements, as they relate to their roles within the organization. 2. Clause 5.3.2: Anti-Bribery Compliance Function Top Management shall assign to the anti-bribery compliance function the responsibility and authority to: a) Oversee the design and implementation of the organization's anti-bribery management system; b) Provide guidance and direction to personnel on the anti-bribery management system and bribery-related issues; c) Ensure that the anti-bribery management system complies with the requirements of this standard; d) Report on the performance of the anti-bribery management system to the board of directors (if any) and top management and other compliance functions, as appropriate. The anti-bribery compliance function shall be adequately resourced and assigned to a person (or group) with appropriate competence, status, responsibility and independence. The anti-bribery compliance function shall have direct and prompt access to the board of directors (if any) and to top management when issues or concerns arise that need to be addressed relating to bribery or the anti-bribery management system. Top management may delegate some or all of the anti-bribery compliance function to persons outside the organization. If this occurs, top management must ensure that specific personnel have responsibility and authority for external assignments that are part of the function. 3. Clause 5.3.3: Delegated Decision Making When top management delegates authority to personnel to make decisions regarding the existence of bribery risks above the low threshold, the organization shall establish and maintain a decision-making process or require controls necessary for the decision process and the level of authority of the decision maker that is appropriate and free from actual or potential conflicts of interest. Top management shall ensure that this process is periodically reviewed as part of its role and responsibilities for the implementation of and compliance with the anti-bribery management system described in clause 5.3.1.	
c. **Klausul 6 – Perencanaan**, meliputi: • **Klausul 6.1 – Tindakan yang Ditujukan pada Risiko dan Peluang** Ketika merencanakan sistem manajemen anti penyuapan, organisasi harus mempertimbangkan isu yang mengacu pada klausul 4.1, persyaratan yang mengacu pada klausul 4.2, identifikasi risiko pada klausul 4.5, dan peluang peningkatan yang ditujukan untuk: a) Memberi kepastian yang wajar bahwa sistem manajemen anti penyuapan dapat mencapai sasaran yang dimaksud; b) Mencegah, atau mengurangi, pengaruh yang tidak diinginkan yang relevan dengan kebijakan dan sasaran anti penyuapan; c) Memantau keefektifan sistem manajemen anti penyuapan; d) Mencapai peningkatan keberlanjutan. Organisasi harus merencanakan: - Tindakan untuk mengatasi risiko penyuapan dan peluang untuk peningkatan; - Bagaimana untuk mengintegrasikan dan menerapkan tindakan ini pada proses sistem manajemen anti penyuapan; dan mengevaluasi keefektifan dari tindakan tersebut.	**Klausul 6 – Diterapkan** **Clause 6 – Implemented**

Ruang Lingkup Implementasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Perseroan The scope of the implementation of the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (SMAP) in the Company	Penerapan ISO 37001:2016 Implementation of ISO 37001:2016
c. **Clause 6 – Planning,** including: • **Clause 6.1 – Actions Addressed to Risks and Opportunities** When planning the anti-bribery management system, the organization shall consider the issues referred to in clause 4.1, the requirements referred to in clause 4.2, the risks identified in clause 4.5, and opportunities for improvement aimed at: a) Providing reasonable assurance that the anti-bribery management system will achieve its intended objectives; b) Preventing, or mitigating, undesirable effects relevant to the anti-bribery policy and objectives; c) Monitoring the effectiveness of the anti-bribery management system; d) Achieving continued improvement. The organization shall plan: - Actions to address bribery risks and opportunities for improvement; - How to integrate and apply these actions to the anti-bribery management system processes; and evaluate the effectiveness of these actions.	
• **Klausul 6.2 – Sasaran Anti Penyuapan dan Perencanaan untuk Mencapainya** Organisasi harus menetapkan sasaran sistem manajemen anti penyuapan pada fungsi dan tingkat yang relevan. Sasaran sistem manajemen anti penyuapan harus: a) Konsisten dengan kebijakan anti penyuapan; b) Terukur (jika sesuai); c) Memperhitungkan faktor yang berlaku didalam klausul 4.1, persyaratan didalam klausul 4.2, dan risiko penyuapan yang teridentifikasi didalam klausul 4.5. d) Dapat dicapai; e) Dipantau; f) Dikomunikasikan sesuai dengan klausul 7.4; g) Diperbaharui jika sesuai. Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi dari sasaran sistem manajemen anti penyuapan. Ketika merencanakan bagaimana untuk mencapai sasaran sistem manajemen anti penyuapan, organisasi harus menetapkan: - Apa yang akan dikerjakan; - Sumber daya apa yang dipersyaratkan; - Siapa yang akan bertanggung jawab; - Kapan sasaran akan dicapai; - Bagaimana hasil akan dievaluasi dan dilaporkan; - Siapa yang akan menjatuhkan sanksi atau hukuman.	
• **Clause 6.2 – Anti-Bribery Objectives and Planning to Achieve Them** The organization shall establish anti-bribery management system objectives at relevant functions and levels. The anti-bribery management system objectives shall: a) Be consistent with the anti-bribery policy; b) Be measurable (if applicable); c) Take into account the applicable factors in clause 4.1, the requirements in clause 4.2, and the bribery risks identified in clause 4.5. d) Be achievable; e) Be monitored; f) Be communicated in accordance with clause 7.4; g) Be updated as appropriate. The organization shall retain documented information on the anti-bribery management system objectives. When planning how to achieve the anti-bribery management system objectives, the organization shall determine: - What will be done; - What resources will be required; - Who will be accountable; - When the objectives will be achieved; - How results will be evaluated and reported; - Who will impose sanctions or punishments.	

Ruang Lingkup Implementasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Perseroan The scope of the implementation of the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (SMAP) in the Company	Penerapan ISO 37001:2016 Implementation of ISO 37001:2016
d. **Klausul 7 – Dukungan**, meliputi: • **Klausul 7.1 – Sumber Daya** Organisasi harus menentukan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk penetapan, penerapan, pemeliharaan dan peningkatan keberlanjutan dari sistem manajemen anti penyuapan.	**Klausul 7 - Diterapkan** **Clause 7 – Implemented**
d. **Clause 7 – Support,** including: • Clause 7.1 – Resources The organization shall determine and provide the resources necessary for the establishment, implementation, maintenance and continuous improvement of the anti-bribery management system.	
• **Klausul 7.2 – Kompetensi**, meliputi: 1. Klausul 7.2.1: Umum Organisasi harus: a) Menentukan kompetensi yang cukup bagi orang yang melaksanakan pekerjaan dibawah kendali organisasi yang berpengaruh pada kinerja anti penyuapan; b) Memastikan orang ini kompeten berdasarkan Pendidikan, pelatihan, atau pengalaman yang memadai; c) Jika bisa diterapkan, mengambil tindakan untuk memperoleh dan mempertahankan kompetensi yang diperlukan, dan mengevaluasi keefektifan dari tindakan yang diambil; d) Menyimpan informasi terdokumentasi yang tepat sebagai bukti dari kompetensi. 2. Klausul 7.2.2: Proses mempekerjakan a) Dalam hubungannya terhadap semua personel, organisasi harus menerapkan prosedur sebagaimana diatur dalam ISO 37001:2016. (klausul 7.2.2.1) b) Suhubungan dengan semua posisi yang terkena risiko penyuapan di atas batas rendah sebagaimana ditentukan dalam penilaian risiko penyuapan (klausul 4.5), dan untuk fungsi kepatuhan anti penyuapan, organisasi harus menerapkan prosedur yang isinya sebagaimana diatur dalam ISO 37001:2016. (klausul 7.2.2.2)	
• **Clause 7.2 – Competence,** including: 1. Clause 7.2.1: General The organization shall: a) Determine the adequate competence of persons performing work under the organization's control that has an impact on anti-bribery performance; b) Ensure that these persons are competent based on adequate education, training or experience; c) If applicable, take action to obtain and maintain the necessary competence, and evaluate the effectiveness of the action taken; d) Retain appropriate documented information as evidence of competence. 2. Clause 7.2.2: Hiring process a) In relation to all personnel, the organization shall implement the procedures as set out in ISO 37001:2016. (clause 7.2.2.1) b) In relation to all positions exposed to bribery risks above the low threshold as determined in the bribery risk assessment (clause 4.5), and for the anti-bribery compliance function, the organization shall implement procedures that contain the following: (clause 7.2.2.2)	
• **Klausul 7.3 - Kepedulian dan Pelatihan**. Organisasi harus memberikan kepedulian anti penyuapan yang cukup dan sesuai serta pelatihan untuk personel. Pelatihan tersebut harus menunjukkan isu berikut yang sesuai, dengan mempertimbangkan hasil penilaian risiko penyuapan (lihat klausul 4.5), sebagaimana diatur dalam ISO 37001:2016. Personel harus dilengkapi dengan kepedulian anti penyuapan dan pelatihan secara teratur (pada selang waktu terencana ditentukan oleh organisasi) yang sesuai untuk peran mereka, risiko penyuapan di lingkungan mereka berada, dan setiap keadaan yang berubah. Program kepedulian dan pelatihan akan diperbarui secara berkala jika diperlukan untuk mencerminkan informasi baru yang relevan. Memperhitungkan risiko penyuapan teridentifikasi (lihat klausul 4.5), organisasi harus menerapkan prosedur yang ditujukan pada kepedulian dan pelatihan anti penyuapan untuk rekan bisnis yang bertindak atas nama atau untuk keuntungannya yang dapat menimbulkan risiko penyuapan di atas batas rendah untuk organisasi. Prosedur ini harus mengidentifikasi rekan bisnis dimana kepedulian dan pelatihan seperti itu diperlukan, isinya, dan sarana pelatihan harus disediakan.	

Ruang Lingkup Implementasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Perseroan The scope of the implementation of the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (SMAP) in the Company	Penerapan ISO 37001:2016 Implementation of ISO 37001:2016
• **Clause 7.3 - Awareness and Training.** The organization shall provide adequate and appropriate anti-bribery awareness and training for personnel. Such training shall address the following issues as appropriate, taking into account the results of the bribery risk assessment (see clause 4.5), as defined in ISO 37001:2016. Personnel shall be provided with anti-bribery awareness and training on a regular basis (at planned intervals determined by the organization) that is appropriate to their role, the bribery risks in the environment in which they operate, and any changing circumstances. The awareness and training program shall be updated periodically as necessary to reflect new, relevant information. Taking into account identified bribery risks (see clause 4.5), the organization shall implement procedures aimed at anti-bribery awareness and training for business associates acting on its behalf or for its benefit who may pose a bribery risk above the low threshold for the organization. These procedures shall identify the business associates for whom such awareness and training is required, its content, and the means by which training shall be provided.	
• **Klausul 7.4 – Komunikasi**, meliputi: 1. Klausul 7.4.1: Organisasi harus menentukan komunikasi internal dan eksternal yang relevan dengan sistem manajemen anti penyuapan. 2. Klausul 7.4.2: Kebijakan anti penyuapan harus dibuat tersedia untuk seluruh personel organisasi dan rekan bisnis, dikomunikasikan secara langsung baik pada personel dan rekan bisnis yang dapat menimbulkan risiko penyuapan di atas batas rendah, dan harus dipublikasikan melalui saluran komunikasi internal dan eksternal jika sesuai.	
• **Clause 7.4 – Communication,** including: 1. Clause 7.4.1: The organization shall determine internal and external communications relevant to the anti-bribery management system. 2. Clause 7.4.2: The anti-bribery policy shall be made available to all personnel of the organization and business associates, communicated directly to both personnel and business associates who may pose a bribery risk above the low threshold, and shall be published through internal and external communication channels where appropriate.	
• **Klausul 7.5 – Informasi terdokumentasi,** meliputi: 1. Klausul 7.5.1: Umum. Sistem manajemen anti penyuapan organisasi harus mencakup: a) Informasi terdokumentasi yang disyaratkan oleh standar ini; b) Informasi terdokumentasi yang ditentukan oleh organisasi yang diperlukan untuk keefektifan sistem manajemen anti penyuapan. 2. Klausul 7.5.2: Membuat dan memperbaharui. Ketika membuat dan memperbaharui informasi terdokumentasi, organisasi harus memastikan kesesuaian: a) Identifikasi dan deskripsi (missal judul, tanggal, penulis, atau nomor refefensi); b) Format (missal bahasa, versi piranti lunak, grafik) dan media (missal kertas, elektronik); c) Tinjauan dan persetujuan untuk kesesuaian dan kecukupan. 3. Klausul 7.5.3: Pengendalian informasi terdokumentasi. Informasi terdokumentasi yang dipersyaratkan oleh sistem manajemen anti penyuapan dan oleh dokumen ini harus dikendalikan untuk memastikan: a) Tersedia dan sesuai untuk digunakan, kapan dan dimana jika diperlukan; b) Dilindungi secara cukup (missal dari kehilangan kerahasiaan, penggunaan yang tidak sesuai, atau kehilangan integritas).	

Ruang Lingkup Implementasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Perseroan The scope of the implementation of the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (SMAP) in the Company	Penerapan ISO 37001:2016 Implementation of ISO 37001:2016
• **Clause 7.5 – Documented information,** including: 1. Clause 7.5.1: General. The organization's anti-bribery management system shall include: a) Documented information required by this International Standard; b) Documented information determined by the organization to be necessary for the effectiveness of the anti-bribery management system. 2. Clause 7.5.2: Creating and updating. When creating and updating documented information, the organization shall ensure the conformity of the: a) Identification and description (e.g. title, date, author, or reference number); b) Format (e.g. language, software version, graphics) and media (e.g. paper, electronic); c) Review and approval for suitability and adequacy. 3. Clause 7.5.3: Control of documented information. The documented information required by the anti-bribery management system and by this International Standard shall be controlled to ensure that: a) It is available and suitable for use, when and where needed; b) Adequately protected (e.g. from loss of confidentiality, inappropriate use, or loss of integrity).	
e. **Klausul 8 Operasi**, meliputi: • **Klausul 8.1 – Perencanaan dan Pengendalian Operasi** Organisasi harus merencanakan, menerapkan, meninjau dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan sistem manajemen anti penyuapan, dan untuk menerapkan tindakan yang ditentukan dalam klausul 6.1, ketentuan sebagaimana diatur dalam ISO 37001:2016.	**Klausul 8 - Diterapkan** **Clause 8 – Implemented**
e. **Clause 8 Operations,** including: • Clause 8.1 – Planning and Controlling Operations The organization shall plan, implement, review and control the processes necessary to meet the requirements of the anti-bribery management system, and to implement the actions specified in clause 6.1, as set out in ISO 37001:2016.	
• **Klausul 8.2 – Uji Kelayakan** Bila penilaian risiko penyuapan di organisasi dilaksanakan sesuai klausul 4.5, telah dinilai risiko penyuapan di atas batas rendah yang berhubungan dengan: a) Kategori spesifik dari transaksi, proyek atau aktivitas; b) Hubungan terencana atau yang sedang berjalan dengan kategori spesifik dari rekan bisnis; atau c) Kategori spesifik dari personel pada posisi tertentu (lihat klausul 7.2.2.2).	
• **Clause 8.2 – Due Diligence** When the organization's bribery risk assessment is carried out in accordance with clause 4.5, the bribery risk has been assessed to be above the lower threshold in relation to: a) Specific categories of transactions, projects or activities; b) Planned or ongoing relationships with specific categories of business partners; or c) Specific categories of personnel in specific positions (see clause 7.2.2.2).	
• **Klausul 8.3 – Pengendalian Keuangan** Organisasi harus menerapkan pengendalian keuangan yang mengelola risiko penyuapan.	
• **Clause 8.3 – Financial Controls** The organization shall implement financial controls that manage the risk of bribery.	
• **Klausul 8.4 – Pengandalian Non Keuangan** Organisasi harus menerapkan pengendalian non keuangan untuk mengelola risiko penyuapan yang berhubungan dengan area seperti aktivitas pengadaan, operasional, penjualan, komersial, sumber daya manusia, hukum dan regulasi.	
• **Clause 8.4 – Non-Financial Controls** The organization shall implement non-financial controls to manage the risk of bribery relating to areas such as procurement, operations, sales, commercial, human capital, legal and regulatory activities.	

Ruang Lingkup Implementasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Perseroan The scope of the implementation of the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (SMAP) in the Company	Penerapan ISO 37001:2016 Implementation of ISO 37001:2016
• **Klausul 8.5 – Penerapan Pengendalian Anti Penyuapan yang Dikendalikan Organisasi dan Rekan Bisnisnya** - Klausul 8.5.1: Organisasi harus menerapkan prosedur yang disyaratkan untuk organisasi lainnya yang dikendalikan untuk: a) Menerapkan sistem manajemen anti penyuapan; atau b) Menerapkan pengendalian anti penyuapan mereka sendiri. - Klausul 8.5.2: Sehubungan dengan rekan bisnis yang tidak dikendalikan oleh organisasi yang penilaian risiko penyuapan (lihat klausul 4.5) atau uji kelayakan (lihat klausul 8.2) telah mengidentifikasi risiko penyuapan di atas batas rendah, dan dimana kendali anti penyuapan dilaksanakan oleh rekan bisnis akan membantu mengurangi risiko penyuapan yang relevan, organisasi harus menerapkan prosedur sebagai berikut: a) Organisasi harus menentukan apakah rekan bisnis telah mempunyai pengendalian anti penyuapan yang mengelola risiko penyuapan yang relevan; b) Di mana rekan bisnis tidak mempunyai pengendalian anti penyuapan, atau tidak mungkin untuk memeriksa apakah pengendalian sudah ada: 1) Bila dapat diterapkan, organisasi harus mensyaratkan rekan bisnis melaksanakan pengendalian anti penyuapan sehubungan dengan transaksi, proyek atau aktivitas yang relevan, atau 2) Jika tidak dapat diterapkan, mensyaratkan rekan bisnis melaksanakan pengendalian anti penyuapan, hal ini harus menjadi faktor yang diperhitungkan dalam mengevaluasi risiko penyuapan yang berhubungan dengan rekan bisnis ini (lihat klausul 4.5 dan 8.2) dan cara di mana organisasi mengelola risiko tersebut (lihat klausul 8.3, 8.4 dan 8.5).	
• **Clause 8.5 – Implementation of Anti-Bribery Controls Controlled by the Organization and its Business Associates** - Clausul 8.5.1: The organization shall implement the procedures required for other organizations it controls to: a) Implement an anti-bribery management system; or b) Implement their own anti-bribery controls. - Clause 8.5.2: With respect to business associates not controlled by the organization for which a bribery risk assessment (see clause 4.5) or due diligence (see clause 8.2) has identified a bribery risk above the low threshold, and where anti-bribery controls implemented by the business associate would help reduce the relevant bribery risk, the organization shall implement the following procedures: a) The organization shall determine whether the business associate has anti-bribery controls in place that manage the relevant bribery risk; b) Where a business associate does not have anti-bribery controls, or it is not possible to verify whether controls are in place: 1) Where practicable, the organization shall require the business associate to implement anti-bribery controls in relation to the relevant transaction, project or activity, or 2) Where practicable, require the business associate to implement anti-bribery controls. This shall be a factor taken into account in evaluating the bribery risks associated with this business associate (see clauses 4.5 and 8.2) and the manner in which the organization manages those risks (see clauses 8.3, 8.4 and 8.5).	
• **Klausul 8.6 – Komitmen Anti Penyuapan** Untuk rekan bisnis yang menimbulkan risiko penyuapan di atas batas rendah, organisasi harus melaksanakan prosedur yang mensyaratkan, hal itu sedapat mungkin: a) Rekan bisnis berkomitmen untuk mencegah penyuapan oleh atau atas nama atau untuk keuntungan rekan bisnis sehubungan dengan transaksi, proyek, aktivitas, atau hubungan yang relevan; b) Organisasi mampu untuk mengakhiri hubungan dengan rekan bisnis di mana ada penyuapan oleh atau atas nama atau untuk keuntungan rekan bisnis sehubungan dengan transaksi, proyek, aktivitas, atau hubungan yang relevan.	

Ruang Lingkup Implementasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Perseroan The scope of the implementation of the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (SMAP) in the Company	Penerapan ISO 37001:2016 Implementation of ISO 37001:2016
• **Clause 8.6 – Anti-Bribery Commitment** For business partners that pose a bribery risk above the low threshold, the organization shall implement procedures that require, to the extent possible: a) The business partner commits to preventing bribery by or on behalf of or for the benefit of the business partner in connection with the relevant transaction, project, activity or relationship; b) The organization is able to terminate the relationship with the business partner where there is bribery by or on behalf of or for the benefit of the business partner in connection with the relevant transaction, project, activity or relationship.	
• **Klausul 8.7 – Hadiah, Kemurahan Hati, Sumbangan dan Keuntungan Serupa** Organisasi harus menerapkan prosedur yang dirancang untuk mencegah tawaran, penyediaan atau penerimaan hadiah, kemurahan hati, sumbangan dan keuntungan serupa, di mana tawaran, penyediaan atau penerimaan adalah atau layak dapat dianggap sebagai penyuapan.	
• **Clause 8.7 – Gifts, Favors, Donations and Similar Advantages** The organization shall implement procedures designed to prevent the offer, provision or acceptance of gifts, favors, donations and similar advantages, where the offer, provision or acceptance is or could reasonably be considered to constitute bribery.	
• **Klausul 8.8 – Mengelola Ketidakcukupan Pengendalian Anti Penyuapan** Ketika uji kelayakan (lihat klausul 8.2) dilakukan pada transaksi, proyek, aktivitas tertentu atau hubungan dengan rekan bisnis menentukan bahwa risiko penyuapan tidak dapat dikelola oleh pengendalian anti penyuapan yang ada, dan organisasi tidak dapat atau tidak ingin menerapkan tambahan atau peningkatan pengendalian anti penyuapan atau mengambil tindakan yang tepat lainnya (seperti mengubah sifat transaksi, proyek, aktivitas atau hubungan agar organisasi dapat mengelola risiko penyuapan yang relevan), sebagaimana diatur dalam ISO 37001:2016.	
• **Clause 8.8 – Managing Inadequate Anti-Bribery Controls** When due diligence (see clause 8.2) performed on a particular transaction, project, activity or relationship with a business partner determines that the bribery risks cannot be managed by existing anti-bribery controls, and the organization is unable or unwilling to implement additional or enhanced anti-bribery controls or take other appropriate action (such as changing the nature of the transaction, project, activity or relationship to enable the organization to manage the relevant bribery risks), as defined in ISO 37001:2016.	
• **Klausul 8.9 – Meningkatkan Kepedulian** Organisasi harus menerapkan prosedur sebagaimana di atur dalam ISO 37001:2016. Organisasi juga harus memastikan bahwa semua personel peduli tentang prosedur pelaporan, dan mampu menggunakannya, dan peduli akan hak dan perlindungan sesuai prosedur.	
• **Clause 8.9 – Rising Awareness** The organization shall implement the procedures as set out in ISO 37001:2016. The organization shall also ensure that all personnel are aware of the reporting procedures, are able to use them, and are aware of their rights and protections under the procedures.	
• **Klausul 8.10 – Investigasi dan Penanganan Penyuapan** Organisasi harus menerapkan prosedur sebagaimana di atur dalam ISO 37001:2016. Investigasi harus dilaksanakan oleh, dan dilaporkan kepada, personel yang bukan bagian dari peran atau fungsi yang sedang diinvestigasi. Organisasi dapat menunjuk rekan bisnis untuk melaksanakan investigasi dan melaporkan hasilnya kepada personel yang bukan bagian dari peran atau fungsi yang sedang diinvestigasi.	
• **Clause 8.10 – Bribery Investigations and Responses** The organization shall implement the procedures as set out in ISO 37001:2016. Investigations shall be carried out by, and reported to, personnel who are not part of the role or function being investigated. The organization may appoint a business partner to carry out the investigation and report the results to personnel who are not part of the role or function being investigated.	
f. **Klausul 9 – Evaluasi Kinerja**, meliputi: • **Klausul 9.1 – Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi** Organisasi harus menentukan: a) Apa yang dibutuhkan untuk dipantau dan diukur; b) Siapa yang bertanggung jawab untuk pemantauan; c) Metode untuk pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi, jika berlaku, untuk memastikan hasil yang valid; d) Kapan pemantauan dan pengukuran harus dilakukan; e) Kapan hasil dari pemantauan dan pengukuran harus dianalisis dan dievaluasi; f) Kepada siapa dan bagaimana informasi ini harus dilaporkan.	**Klausul 9 - Diterapkan** **Clause 9 – Implemented**

Ruang Lingkup Implementasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Perseroan The scope of the implementation of the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (SMAP) in the Company	Penerapan ISO 37001:2016 Implementation of ISO 37001:2016
f. **Clause 9 – Performance Evaluation, including:** • Clause 9.1 – Monitoring, Measurement, Analysis and Evaluation The organization shall determine: a) What needs to be monitored and measured; b) Who is responsible for monitoring; c) Methods for monitoring, measurement, analysis and evaluation, if applicable, to ensure valid results; d) When monitoring and measurement shall be carried out; e) When the results of monitoring and measurement shall be analyzed and evaluated; f) To whom and how this information shall be reported.	
• **Klausul 9.2 – Audit Internal** - Klausul 9.2.1: Organisasi harus melaksanakan audit internal pada rentang waktu yang direncanakan untuk menyediakan informasi apakah sistem manajemen anti penyuapan: a) Memenuhi untuk: 1) Persyaratan organisasi itu sendiri untuk sistem manajemen anti penyuapan; 2) Persyaratan dari standar ini. b) Secara efektif diterapkan dan dipelihara.	
- Klausul 9.2.2: Organisasi harus: a) Merencanakan, menetapkan, menerapkan dan memeliharan program audit, termasuk frekuensi, metode, tanggung jawab, persyaratan perencanaan dan pelaporan, yang harus mempertimbangkan pentingnya proses dimaksud dan hasil dari audit sebelumnya; b) Menentukan kriteria dan lingkup audit untuk setiap audit; c) Memilih auditor yang kompeten dan melaksanakan audit untuk memastikan objektivitas dan ketidak berpihakan dari proses audit; d) Memastikan hasil audit dilaporkan pada manajemen yang relevan, fungsi kepatuhan anti penyuapan, manajemen puncak, jika sesuai, dewan pengarah (jika ada); e) Menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti penerapan program audit dan hasil audit.	
- Klausul 9.2.3: Audit harus wajar, proporsional dan berbasis risiko. Audit ini harus terdiri dari proses audit internal atau prosedur lain yang meninjau prosedur, pengendalian dan sistem untuk: a) Penyuapan atau dugaan penyuapan; b) Pelanggaran terhadap kebijakan anti penyuapan atau persyaratan sistem manajemen anti penyuapan; c) Kegagalan rekan bisnis untuk memenuhi persyaratan anti penyuapan yang berlaku di organisasi; dan d) Kelemahan dalam, atau peluang untuk peningkatan pada sistem manajemen anti penyuapan.	
- Klausul 9.2.4: Untuk memastikan objektivitas dan ketidak berpihakan dari program audit, organisasi harus memastikan audit dilaksanakan oleh: a) Fungsi yang mandiri atau penerapan personel atau yang ditunjuk untuk proses ini; atau b) Fungsi kepatuhan anti penyuapan (kecuali lingkup audit mencakup evaluasi sistem manajemen anti penyuapan itu sendiri, atau pekerjaan serupa dimana fungsi kepatuhan anti penyuapan bertanggung jawab); atau c) Orang yang tepat dari departemen atau fungsi yang lain dari yang sedang diaudit; atau d) Pihak ketiga yang sesuai; atau e) Suatu grup yang terdiri dari a) sampai d). Organisasi harus memastikan tidak ada auditor yang mengaudit lingkup kerjanya sendiri.	
• Clause 9.2 – Internal Audit - Clause 9.2.1: The organization shall conduct internal audits at planned intervals to provide information on whether the anti-bribery management system: a) Meets: 1) The organization's own requirements for an anti-bribery management system; 2) The requirements of this International Standard. b) Is effectively implemented and maintained.	

Ruang Lingkup Implementasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Perseroan The scope of the implementation of the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (SMAP) in the Company	Penerapan ISO 37001:2016 Implementation of ISO 37001:2016
- Clause 9.2.2: The organization shall: a) Plan, establish, implement and maintain an audit programme, including frequency, methods, responsibilities, planning and reporting requirements, which shall take into account the importance of the process and the results of previous audits; b) Determine the audit criteria and scope for each audit; c) Select competent auditors and conduct audits to ensure the objectivity and impartiality of the audit process; d) Ensure that the results of the audits are reported to relevant management, the anti-bribery compliance function, top management and, where appropriate, the board of directors (if any); e) Retain documented information as evidence of the implementation of the audit programme and the results of the audits.	
- Clause 9.2.3: The audit shall be reasonable, proportionate and risk-based. The audit shall consist of an internal audit process or other procedures that review procedures, controls and systems for: a) Bribery or suspected bribery; b) Violations of the anti-bribery policy or anti-bribery management system requirements; c) Failure of business partners to comply with the organization's applicable anti-bribery requirements; and d) Weaknesses in, or opportunities for improvement in, the anti-bribery management system.	
- Clause 9.2.4: To ensure the objectivity and impartiality of the audit programme, the organization shall ensure that the audit is carried out by: a) An independent function or personnel implementing or designated for this process; or b) An anti-bribery compliance function (unless the scope of the audit includes an evaluation of the anti-bribery management system itself, or similar work for which the anti-bribery compliance function is responsible); or c) An appropriate person from a department or function other than that being audited; or d) An appropriate third party; or e) A group consisting of a) to d). The organization shall ensure that no auditor audits its own scope of work.	
• **Klausul 9.3 – Tinjauan Manajemen** - Klausul 9.3.1: Tinjauan Manajemen Puncak. Manajemen puncak harus meninjau sistem manajemen anti penyuapan organisasi, pada rentang waktu terencana, untuk memastikan keberlanjutan, kesesuaian, kecukupan dan keefektifan. Tinjauan manajemen puncak harus mencakup pertimbangan dari: a) Status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya; b) Perubahan dalam isu internal dan eksternal yang relevan dengan sistem manajemen anti penyuapan; c) Informasi pada kinerja sistem manajemen anti penyuapan, termasuk kecenderungan dalam: 1) Ketidak sesuaian dan tindakan korektif; 2) Hasil pemantauan dan pengukuran; 3) Hasil audit; 4) Laporan penyuapan; 5) Penyelidikan; 6) Sifat dan tingkat risiko penyuapan yang dihadapi oleh organisasi. d) Keefektifan tindakan yang diambil untuk menunjukkan risiko penyuapan; e) Peluang peningkatan keberlanjutan dari sistem manajemen anti penyuapan, seperti yang diacu pada klausul 10.2. Keluaran tinjauan manajemen puncak harus mencakup keputusan terkait dengan peluang peningkatan keberlanjutan dan setiap kebutuhan untuk perubahan pada sistem manajemen anti penyuapan. Ringkasan hasil tinjauan manajemen puncak harus dilaporkan kepada dewan pengarah (jika ada).	

Ruang Lingkup Implementasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Perseroan The scope of the implementation of the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (SMAP) in the Company	Penerapan ISO 37001:2016 Implementation of ISO 37001:2016
- Klausul 9.3.2: Tinjauan Dewan Pengarah. Dewan pengarah (jika ada) harus melakukan tinjauan secara berkala sistem manajemen anti penyuapan berdasarkan informasi yang diberikan oleh manajemen puncak dan fungsi kepatuhan anti penyuapan dan setiap informasi lain yang diminta atau diperoleh dewan pengarah.	
• **Clause 9.3 – Management Review** - Clause 9.3.1: Top Management Review. Top management shall review the organization's anti-bribery management system, at planned intervals, to ensure its continuity, suitability, adequacy and effectiveness. The top management review shall include consideration of: a) The status of actions from previous management reviews; b) Changes in internal and external issues relevant to the anti-bribery management system; c) Information on the performance of the anti-bribery management system, including trends in: 1) Non-conformities and corrective actions; 2) Monitoring and measurement results; 3) Audit results; 4) Bribery reports; 5) Investigations; 6) The nature and extent of bribery risks faced by the organization. d) The effectiveness of actions taken to address bribery risks; e) Opportunities for continued improvement of the anti-bribery management system, as referred to in clause 10.2. The output of the top management review shall include decisions regarding opportunities for continued improvement and any need for changes to the anti-bribery management system. A summary of the results of the top management review shall be reported to the board of directors (if any).	
- Clause 9.3.2: Board of Directors Review. The board of directors (if any) shall conduct a periodic review of the anti-bribery management system based on information provided by top management and the anti-bribery compliance function and any other information requested or obtained by the board.	
• **Klausul 9.4 – Tinjauan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan** Fungsi kepatuhan anti penyuapan harus menilai secara berkelanjutan apakah sistem manajemen anti penyuapan: a) Cukup secara efektif mengelola risiko penyuapan yang dihadapi oleh organisasi; b) Diterapkan secara efektif. Fungsi kepatuhan anti penyuapan harus melaporkan pada rentang waktu terencana dan pada panitia tidak tetap, jika sesuai, kepada dewan pengarah (jika ada) dan manajemen puncak, atau komite yang sesuai dari dewan pengarah atau manajemen puncak, pada kecukupan dan penerapan dari sistem manajemen anti penyuapan, termasuk hasil investigasi dan audit.	
• **Clause 9.4 – Review of Anti-Bribery Compliance Function** The anti-bribery compliance function shall assess on an ongoing basis whether the anti-bribery management system: a) Is adequate to effectively manage the bribery risks faced by the organization; b) Is effectively implemented. The anti-bribery compliance function shall report at planned intervals and to a standing committee, as appropriate, to the board (if any) and top management, or an appropriate committee of the board or top management, on the adequacy and implementation of the anti-bribery management system, including the results of investigations and audits.	

Ruang Lingkup Implementasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Perseroan The scope of the implementation of the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (SMAP) in the Company	Penerapan ISO 37001:2016 Implementation of ISO 37001:2016
g. **Klausul 10 - Peningkatan**, meliputi: • **Klausul 10.1 – Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif** Ketika ketidak sesuaian terjadi, organisasi harus: a) Segera bereaksi terhadap ketidak sesuaian, dan jika berlaku: 1) Mengambil tindakan untuk mengendalikan dan mengoreksinya; 2) Sepakat terhadap konsekuensi. b) Mengevaluasi kebutuhan untuk tindakan menghilangkan penyebab ketidak sesuaian, agar hal ini tidak terulang kembali atau terjadi ditempat lain, dengan: 1) Meninjau ketidak sesuaian; 2) Menentukan penyebab ketidak sesuaian; 3) Menentukan jika ketidaksesuaian serupa pernah ada, atau dapat secara potensial terjadi. c) Menerapkan setiap tindakan yang diperlukan; d) Meninjau keefektifan dari setiap tindakan korektif yang diambil; e) Membuat perubahan terhadap sistem manajemen anti penyuapan, bila diperlukan. Tindakan korektif harus sesuai dengan efek dari ketidak sesuaian yang ditemui.	**Klausul 10 - Diterapkan** **Clause 10 – Implemented**
g. **Clause 10 - Improvement,** including: • Clause 10.1 – Nonconformities and Corrective Action When a nonconformity occurs, the organization shall: a) React promptly to the nonconformity, and where applicable to: 1) Take action to control and correct it; 2) Agree on the consequences. b) Evaluate the need for action to eliminate the causes of the nonconformity, so that it does not recur or occur elsewhere, by: 1) Reviewing the nonconformity; 2) Determining the causes of the nonconformity; 3) Determining if similar nonconformities have existed, or could potentially occur. c) Implement any necessary action; d) Review the effectiveness of any corrective action taken; e) Make changes to the anti-bribery management system, where necessary. Corrective action shall be appropriate to the effects of the nonconformities encountered.	
• **Klausul 10.2 – Peningkatan Berkelanjutan** Organisasi harus secara terus menerus meningkatkan kesesuaian, kecukupan dan keefektifan sistem manajemen anti penyuapan.	
• **Clause 10.2 – Continual Improvement** The organization shall continually improve the suitability, adequacy and effectiveness of the anti-bribery management system.	

Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Perseroan telah melaksanakan audit Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) atas implementasi selama tahun buku 2024, yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi PT Sucofindo pada tanggal 6–7 Februari 2025. Sertifikasi ini merupakan bagian dari komitmen Perseroan untuk memastikan penerapan SMAP berjalan secara efektif, sesuai dengan standar ISO 37001:2016, serta sebagai bentuk kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

Melalui proses sertifikasi ini, Perseroan berupaya meningkatkan integritas operasional, mencegah terjadinya praktik penyuapan, serta memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap sistem pengendalian internal yang diterapkan.

Anti-Bribery Management System Certification

The Company has conducted an Anti-Bribery Management System (SMAP) audit on the implementation during the 2024 financial year, conducted by the PT Sucofindo Certification Institute on February 6-7, 2025. This certification is part of the Company's commitment to ensure that the implementation of SMAP runs effectively, in accordance with the ISO 37001:2016 standard, and as a form of compliance with the principles of good corporate governance (GCG).

Through this certification process, the Company seeks to improve operational integrity, prevent bribery practices, and strengthen stakeholder trust in the internal control system implemented.

Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk
Anti-Bribery Management System Certification PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk



Peningkatan Berkelanjutan

Perseroan secara berkelanjutan melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan penerapan SMAP. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi peluang perbaikan serta memastikan bahwa penerapan SMAP tetap memenuhi persyaratan yang berlaku.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran karyawan serta mendorong peran aktif dalam pencegahan praktik penyuapan, Perseroan secara berkala melaksanakan kegiatan sosialisasi. Selain melalui kegiatan tatap muka, upaya peningkatan berkelanjutan juga dilakukan melalui pengiriman pesan singkat (blast *WhatsApp*) kepada seluruh karyawan, kampanye melalui media sosial, serta penyampaian himbauan dari jajaran Direksi kepada seluruh pegawai dan pemangku kepentingan.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, Perseroan turut menyediakan saluran pelaporan *Whistleblowing System* (WBS) yang dapat dimanfaatkan oleh karyawan maupun pihak eksternal. Penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme dan pelaksanaan WBS disampaikan pada bagian tersendiri dalam Laporan Tahunan ini.

Continuous Improvement

The Company continuously identifies and evaluates the suitability, adequacy, and effectiveness of the implementation of SMAP. This evaluation aims to identify opportunities for improvement and ensure that the implementation of SMAP continues to meet prevailing requirements.

In order to increase employee awareness and encourage an active role in preventing bribery practices, the Company periodically carries out socialization activities. In addition to face-to-face activities, continuous improvement undertakings are also carried out by sending short messages (WhatsApp blasts) to all employees, campaigns via social media, and conveying appeals from the Board of Directors to all employees and stakeholders.

As part of its commitment to transparency and accountability, the Company also provides a Whistleblowing System (WBS) reporting channel that can be utilized by employees and external parties. Further explanation regarding the mechanism and implementation of WBS is presented in a separate section of this Annual Report.

Kebijakan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*)

Whistleblowing System Policy

Kebijakan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System/WBS*) diterapkan sebagai bagian dari komitmen Perseroan dalam memperkuat kualitas implementasi tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan ini dirancang untuk memudahkan seluruh pihak, baik pimpinan maupun karyawan, dalam melaporkan setiap bentuk pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perseroan.

Tujuan utama dari kebijakan ini adalah menciptakan lingkungan kerja yang aman dan kondusif, di mana setiap individu didorong untuk berperan aktif dalam menjaga integritas Perseroan. Melalui mekanisme pelaporan yang terbuka, aman, dan transparan, Perseroan berharap dapat menangani setiap pelanggaran secara cepat dan tepat, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan keberlanjutan praktik tata kelola perusahaan yang baik.

Pelaporan pelanggaran di Perseroan diatur dalam Prosedur Pengaduan Pelanggaran Terhadap *Code of Conduct* (*Whistle Blower)* No. Dok: WG-GEA-PM-07, No. Rev: 02, tanggal 31 Juli 2024. Prosedur ini mencakup mekanisme pelaporan, tindak lanjut atas laporan, hingga perlindungan bagi pelapor guna memastikan setiap pengaduan diproses secara profesional dan rahasia.

Dengan penerapan kebijakan ini, Perseroan berkomitmen untuk terus menjaga integritas, memperkuat budaya anti-fraud dan anti-penyuapan, serta meningkatkan kepercayaan seluruh pemangku kepentingan.

PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN

Perseroan telah menyediakan kanal pelaporan pelanggaran melalui platform *Whistleblowing System* yang dapat diakses melalui wbs.wikagedung.co.id. Mekanisme penyampaian laporan dapat dilakukan oleh seluruh organ Perseroan atas dugaan pelanggaran secara aman dan bertanggung jawab.

Setiap laporan yang diterima melalui kanal WBS akan ditindaklanjuti oleh Tim Kepatuhan GCG. Dalam prosesnya, Tim Kepatuhan dapat berkoordinasi atau bekerja sama dengan organ terkait di lingkungan Perseroan. Seluruh organ Perseroan wajib memberikan dukungan penuh guna memastikan bahwa proses tindak lanjut laporan berjalan efektif dan profesional.

Policy on the Whistleblowing System/WBS is implemented as part of the Company's commitment to strengthening the quality of good corporate governance implementation. This policy is designed to make it easier for all parties, both management and employees, to report any form of violation that occurs within the Company's environment.

The main objective of this policy is to create a safe and conducive working environment where every individual is encouraged to play an active role in maintaining the Company's integrity. Through an open, secure, and transparent reporting mechanism, the Company hopes to handle every violation quickly and appropriately, increase accountability, and ensure the sustainability of good corporate governance practices.

Whistleblowing System within the Company is regulated in the Procedure for Reporting Violations Against the Code of Conduct (Whistle Blower) Doc. No.: WG-GEA-PM-07, Rev. No.: 02, dated July 31, 2024. This procedure includes the reporting mechanism, follow-up on reports, and protection for whistleblowers to ensure that every complaint is processed professionally and confidentially.

By implementing this policy, the Company is committed to continuously maintaining integrity, strengthening the anti-fraud and anti-bribery culture, and increasing the trust of all stakeholders.

SUBMISSION OF VIOLATION REPORTS

The Company has provided a whistleblowing system channel through the Whistleblowing System platform, which can be accessed via wbs.wikagedung.co.id. The mechanism for submitting reports can be carried out by all Company organs regarding alleged violations safely and responsibly.

Every report received through the WBS channel will be followed up by the GCG Compliance Team. In the process, the Compliance Team may coordinate or collaborate with related organs within the Company. All Company organs are required to provide full support to ensure that the report follow-up process runs effectively and professionally.

Dalam menerapkan kebijakan terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam menerapkan Sistem Pelaporan Pelanggaran, antara lain:

1. Pada prinsipnya semua Pelapor harus mengungkapkan identitasnya dengan jelas.
2. Penggunaan surat yang tidak beridentitas (surat kaleng) akan diperlakukan sebatas sebagai informasi awal dimana tindak-lanjutnya tergantung kepada tingkat keyakinan atas kebenaran substansi masalah yang dilaporkan.
3. Tidak ada hukuman yang dijatuhkan kepada pihak pelapor manakala pelanggaran tersebut benar terjadi, kecuali apabila yang bersangkutan juga terlibat dalam pelanggaran atas penerapan *Code of Conduct* ini. Dalam hal ini pengungkapan hal tersebut dapat merupakan faktor yang meringankan. Apabila pelanggaran tersebut benar terjadi dan pihak pelapor tidak terlibat di dalamnya, maka kepada pihak pelapor akan diberikan penghargaan yang sesuai.
4. Tim Kepatuhan GCG akan berpegang pada azas praduga tak bersalah.

PERLINDUNGAN BAGI WHISTLEBLOWER

Perseroan mewajibkan pelapor *(whistleblower)* untuk menyertakan identitas lengkap akan tetapi kerahasiaan pelapor akan dijaga oleh Perseroan agar pelapor merasa aman. Perlindungan bagi pelapor dimaksudkan pula untuk mendorong setiap karyawan Perseroan berani melaporkan tindak pelanggaran yang terjadi. Perseroan menetapkan perlindungan bagi Pelapor kecuali apabila pengungkapan tersebut:

1. Diperlukan dalam kaitan dengan laporan atau penyidikan yang dilakukan oleh Pemerintah,
2. Diperlukan dan sejalan dengan kepentingan Perseroan serta tujuan dari panduan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
3. Diperlukan Biro Hukum untuk mempertahankan posisi Perseroan di depan hukum.

Perseroan menjamin perlindungan bagi pelapor terkait dengan ancaman/tindakan yang didapat akibat laporan pelanggaran serta merahasiakan dan memberikan perlindungan yang layak kepada pelapor dan/atau menjadi saksi atas pelanggaran serta tindak pidana yang terjadi di internal Perseroan. Perlindungan terhadap pelapor juga berlaku bagi para pengelola sistem pelaporan pelanggaran, pihak yang melaksanakan investigasi, maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan tersebut.

In implementing the policy, there are several important matters that must be considered in applying the Whistleblowing System, including:

1. In principle, all Whistleblowers shall clearly disclose their identity.
2. The use of anonymous letters (poison-pen letters) will be treated merely as initial information where follow-up depends on the level of confidence in the truth of the reported issue's substance.
3. No punishment will be imposed on the reporting party if the violation actually occurred, unless the person is also involved in the violation of this Code of Conduct. In this case, the disclosure may be a mitigating factor. If the violation actually occurred and the reporting party was not involved, the reporting party will be given appropriate appreciation.
4. The GCG Compliance Team will adhere to the presumption of innocence.

PROTECTION FOR WHISTLEBLOWERS

The Company requires the whistleblowers to include complete identification, but the confidentiality of the whistleblower will be maintained by the Company to ensure the whistleblower feels safe. Protection for whistleblowers is also intended to encourage every Company employee to dare to report any violations that occur. The Company establishes protection for Whistleblowers unless the disclosure:

1. Is required in connection with reports or investigations conducted by the Government;
2. Is necessary and in line with the Company's interests and the objectives of the Good Corporate Governance implementation guidelines;
3. Is required by the Legal Bureau to defend the Company's position in court.

The Company guarantees protection for whistleblowers regarding threats/actions received as a result of reporting violations and will keep confidential and provide appropriate protection to whistleblowers and/or witnesses of violations and criminal acts that occur within the Company. Protection for whistleblowers also applies to managers of the whistleblowing system, parties conducting investigations, and parties providing information related to the complaint.

PIHAK YANG MENGELOLA PENGADUAN

Pengelolaan laporan pelanggaran di lingkungan Perseroan dilaksanakan oleh Tim Kepatuhan GCG. Tim ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pengaduan diproses secara objektif, profesional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Adapun tugas Tim Kepatuhan GCG mencakup:

1. Menyusun laporan dugaan pelanggaran yang berasal pengaduan dari karyawan atau rekanan bisnis.
2. Menilai dan menyeleksi laporan dugaan pelanggaran untuk diproses lebih lanjut.
3. Menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
4. Merekomendasikan dibentuknya Tim Pencari Fakta untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut;
5. Menyampaikan laporan kepada Majelis Kehormatan atas setiap dugaan pelanggaran yang diterima, untuk kemudian ditindaklanjuti dengan rekomendasi Majelis Kehormatan yang disampaikan kepada Manajemen Puncak, yaitu Direksi Perseroan; dan
6. Mendokumentasikan setiap laporan dugaan pelanggaran yang diterima.

MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN

Sebagai bagian dari komitmen terhadap penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Perseroan telah mengembangkan mekanisme pengaduan pelanggaran (Whistleblowing System) yang terstruktur dan transparan. Sistem ini memberikan ruang bagi seluruh insan Perseroan maupun pemangku kepentingan eksternal untuk menyampaikan laporan atas dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkungan kerja. Melalui mekanisme ini, Perseroan memastikan setiap pengaduan ditangani secara profesional, rahasia, dan objektif guna menjaga integritas serta menciptakan budaya perusahaan yang berlandaskan etika dan akuntabilitas.

ALUR PROSES PENGADUAN PELANGGARAN

Berikut adalah alur proses pengaduan pelanggaran yang diterapkan oleh Perseroan untuk memastikan laporan diterima, diproses, dan ditindaklanjuti dengan penuh tanggung jawab:

PARTIES MANAGING COMPLAINTS

The management of whistleblowing system within the Company is carried out by the GCG Compliance Team. This team is responsible for ensuring that every complaint is processed objectively, professionally, and in accordance with the principles of good corporate governance. The duties of the GCG Compliance Team include:

1. Preparing reports of alleged violations originating from complaints from employees or business partners.
2. Assessing and selecting reports of alleged violations for further processing.
3. Maintaining the confidentiality of the whistleblower's identity.
4. Recommending the formation of a Fact-Finding Team to conduct further investigation;
5. Submitting reports to the Board of Ethics on every alleged violation received, to be followed up with recommendations from the Board of Ethics submitted to Top Management, namely the Company's Board of Directors; and
6. Documenting every report of alleged violations received.

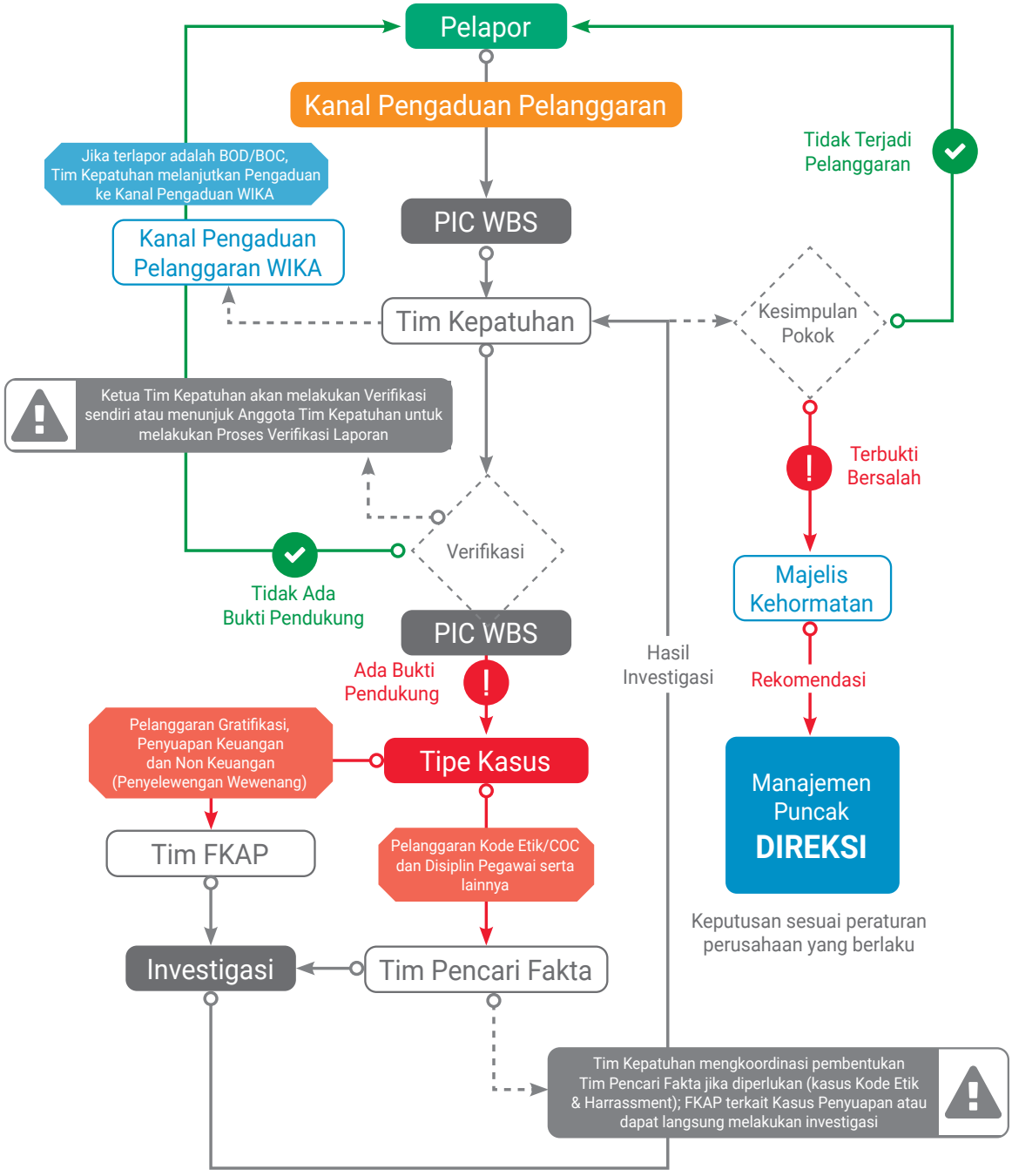
MECHANISM FOR HANDLING VIOLATION COMPLAINTS

As our commitment to the implementation of Good Corporate Governance principles, the Company has developed a structured and transparent whistleblowing system mechanism. This system provides a space for all Company personnel and external stakeholders to submit reports of alleged violations that occur in the work environment. Through this mechanism, the Company ensures that every complaint is handled professionally, confidentially, and objectively to maintain integrity and create a corporate culture based on ethics and accountability.

FLOW OF VIOLATION COMPLAINT PROCESS

The following is the violation complaint process flow implemented by the Company to ensure reports are received, processed, and followed up responsibly:

Alur Proses Pengaduan Pelanggaran PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk



PENANGANAN PENGADUAN TAHUN 2024

Sepanjang tahun 2024, Perseroan melaporkan bahwa tidak terdapat pelaporan kasus pelanggaran yang disampaikan melalui mekanisme Whistleblowing System. Oleh karena itu, Perseroan tidak menyajikan data terkait jumlah pengaduan yang masuk, pengaduan yang ditindaklanjuti, maupun hasil penyelesaiannya dalam periode pelaporan.

Meskipun tidak terdapat pengaduan yang masuk, Perseroan tetap secara aktif melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan pelaporan pelanggaran. Hal ini merupakan bagian dari upaya Perseroan untuk memastikan sistem pengaduan berjalan optimal, menjamin perlindungan terhadap pelapor, serta menjaga budaya integritas dan kepatuhan di seluruh lini organisasi.

HANDLING OF COMPLAINTS IN 2024

Throughout 2024, the Company reported that there were no reported cases of violations submitted through the Whistleblowing System mechanism. Therefore, the Company does not present data regarding the number of complaints received, complaints followed up, or the results of their resolution in the reporting period.

Despite the absence of incoming complaints, the Company actively continues to monitor and evaluate the effectiveness of the implementation of the violation reporting policy. This is part of the Company's efforts to ensure the complaint system runs optimally, guarantees protection for whistleblower, and maintains a culture of integrity and compliance throughout the organization.

Kebijakan Anti Korupsi

Anti-Corruption Policy

Perseroan terus berkomitmen untuk mencegah dan menghindari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sebagai bagian dari penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Langkah ini mencakup serangkaian tindakan strategis yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan Perseroan berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga integritas organisasi, namun juga untuk melindungi Perseroan dari potensi kerugian yang dapat timbul akibat praktik yang tidak etis.

Dalam setiap pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan, Perseroan senantiasa mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan individu, keluarga, maupun kelompok tertentu. Oleh karena itu, Perseroan mengacu pada kebijakan anti-korupsi yang sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagai bentuk komitmen manajemen terhadap penerapan kebijakan ini, seluruh manajemen diwajibkan untuk menandatangani pakta integritas. Hal ini mencerminkan keseriusan Perseroan dalam menegakkan standar etika yang tinggi dan mencegah terjadinya praktik korupsi di setiap aspek operasional perusahaan.

The Company is continuously committed to preventing and avoiding the practices of Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN) as part of the implementation of Good Corporate Governance principles. This step includes a series of strategic actions aimed at ensuring that every activity carried out by the Company is conducted transparently, accountably, and in accordance with prevailing regulations. This policy does not only aim to maintain the integrity of the organization but also to protect the Company from potential losses that may arise from unethical practices.

In every decision-making process and policy formulation, the Company continually prioritizes the interests of the company over the interests of individuals, families, or certain groups. Therefore, the Company refers to an anti-corruption policy that is in conformity with the provisions stipulated in Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law No. 31 of 1999 regarding the Eradication of Corruption Crimes.

As management's commitment to the implementation of this policy, all management is required to sign an integrity pact. This reflects the Company's seriousness in upholding high ethical standards and preventing corrupt practices in every aspect of the company's operations.

PROGRAM DAN PROSEDUR YANG DILAKUKAN DALAM MENGATASI PRAKTIK KORUPSI, BALAS JASA (KICKBACKS), FRAUD, SUAP DAN/ATAU GRATIFIKASI DALAM PERUSAHAAN

1. Prosedur Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) No. WG-GEA-PM-02 yang diberlakukan tanggal 28 Oktober 2024;
2. Prosedur Pengaduan Pelanggaran Terhadap *Code of Conduct* (*Whistle Blower)* No. Dok: WG-GEA-PM-07, No. Rev: 02, tanggal 31 Juli 2024;
3. Prosedur Pengendalian Gratifikasi Nomor: WG-GEA-PM-06, No. Rev: 04 tanggal 2 Desember 2024;
4. Pedoman Etika Dan Perilaku (*Code of Conduct*) Nomor: SK.01.01/A.DIR.00001.WEGE/2025 tanggal 15 Januari 2025;
5. Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Nomor: DK.01.01/A.KOM.00001.WEGE/2024 dan Nomor: SK.01.01/A.DIR.00001.WEGE/2024 tanggal 19 Desember 2024;
6. Panduan Pelaksanaan Good Corporate Governance Nomor: SK.01.09/WG.419/2021 tanggal 30 September 2021;
7. Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk;
8. Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk;
9. Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Penerapan Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) oleh Direksi dan Dewan Komisaris;
10. Penandatanganan Bebas Benturan Kepentingan oleh Direksi dan Dewan Komisaris; dan
11. Penandatanganan Pakta Integritas oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

PELATIHAN/SOSIALISASI ANTI-KORUPSI KEPADA KARYAWAN

Selama tahun 2024, Perseroan berkomitmen untuk terus memperkuat upaya pencegahan korupsi dengan memberikan pelatihan dan sosialisasi yang menyeluruh kepada seluruh karyawan. Melalui Corporate Secretary, Perseroan telah melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi yang mencakup informasi terkait praktik suap dan gratifikasi, baik secara rutin maupun insidentil, guna mewujudkan lingkungan yang bebas dari korupsi. Beberapa kegiatan tersebut antara lain sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Pengendalian Gratifikasi, *Code of Conduct*, *Whistleblowing System* (WBS), serta penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* baik di kantor pusat maupun di seluruh unit operasional. Hal ini menunjukkan komitmen kuat Perseroan dalam menciptakan budaya yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, serta memastikan bahwa setiap individu di dalam organisasi memahami dan menerapkan standar etika yang tinggi.

PROGRAMS AND PROCEDURES IMPLEMENTED IN ADDRESSING PRACTICES OF CORRUPTION, KICKBACKS, FRAUD, BRIBERY AND/OR GRATIFICATIONS WITHIN THE COMPANY

1. Anti-Bribery Management System (SMAP) Procedure No. WG-GEA-PM-02, effective October 28, 2024;
2. Procedure for Reporting Violations of the Code of Conduct (Whistle Blower) Doc. No.: WG-GEA-PM-07, Rev. No.: 02, dated July 31, 2024;
3. Gratification Control Procedure Number: WG-GEA-PM-06, Rev. No.: 04, dated December 2, 2024;
4. Ethical Conduct and Code of Conduct Number: SK.01.01/A.DIR.00001.WEGE/2025 dated January 15, 2025;
5. Guidelines for Handling Conflicts of Interest Number: DK.01.01/A.KOM.00001.WEGE/2024 and Number: SK.01.01/A.DIR.00001.WEGE/2024 dated December 19, 2024;
6. Guidelines for the Implementation of Good Corporate Governance Number: SK.01.09/WG.419/2021 dated September 30, 2021;
7. Anti-Bribery Management System Policy of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk;
8. Integrated Governance Policy of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk;
9. Signing of the Commitment to Implement the Ethical Conduct and Code of Conduct by the Board of Directors and Board of Commissioners;
10. Signing of the Declaration of Freedom from Conflicts of Interest by the Board of Directors and Board of Commissioners; and
11. Signing of the Integrity Pact by the Board of Directors and Board of Commissioners.

ANTI-CORRUPTION TRAINING/SOCIALIZATION FOR EMPLOYEES

Throughout 2024, the Company was committed to continuously strengthening corruption prevention efforts by providing comprehensive training and socialization to all employees. Through the Corporate Secretary, the Company has carried out various socialization activities that include information related to bribery and gratification practices, both routinely and incidentally, to create a corruption-free environment. Several of these activities include the socialization of the Anti-Bribery Management System (SMAP), Gratification Control, Code of Conduct, Whistleblowing System (WBS), as well as the implementation of Good Corporate Governance principles both at the head office and in all operational units. This demonstrates the Company's strong commitment to creating a transparent, accountable, and corruption-free culture, and to ensuring that every individual within the organization understands and applies high ethical standards.

Pengendalian Gratifikasi

Whistleblowing System Policy

Pengendalian gratifikasi yang dilakukan Perseroan telah diatur dalam Prosedur Pengendalian Gratifikasi No. Dok: WG-GEA-PM-06 No. Rev: 04 yang berlaku pada tanggal 2 Desember 2024. Gratifikasi merupakan pemberian/ penerimaan uang/setara uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya dengan nilai berapa pun, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Untuk mencegah terjadinya gratifikasi bagi karyawan, Perseroan terus melakukan sosialisasi atas pentingnya mencegah praktik gratifikasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran karyawan.

PENGELOLAAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Perseroan memberikan batasan pemberian yang diperbolehkan, yaitu:

1. Pemberian hadiah/cenderamata dan/atau jamuan, makan dan/ atau hiburan diperbolehkan sepanjang pemberian tersebut dimaksudkan untuk membina hubungan baik dalam batas batas kewajaran dan memperhatikan hubungan yang setara (seperti antar teman dan antar tetangga), saling menghormati dan tidak bertujuan untuk menyuap pihak yang bersangkutan dengan maksud memberikan sesuatu hal kepada Perseroan yang tidak menjadi hak Perseroan secara hukum serta frekuensi pemberian tersebut tidak boleh terlalu sering karena dapat menimbulkan dugaan dari seseorang bahwa ada sesuatu di balik pemberian tersebut;
2. Pemberian hadiah/cenderamata berupa barang yang dimaksudkan untuk promosi Perseroan wajib menggunakan logo Perseroan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari barang dimaksud (logo Perseroan pada barang dimaksud tidak dapat dihilangkan) yang nilainya;
3. Pemberian honorarium rapat kepada Pihak Ketiga, diperbolehkan sebagai apresiasi atas sumbangan pemikiran dan keahlian yang telah diberikan kepada Perseroan atas undangan resmi dari Perseroan, sepanjang ketentuan mengenai honorarium tersebut tidak dilarang dalam kode etik atau peraturan internal instansi dari Pihak Ketiga tersebut;
4. Formulir laporan penolakan/penerimaan/ pemberian/permintaan gratifikasi yang dianggap suap dan gratifikasi terkait kedinasan, dicatat dalam form yang diisi oleh pegawai yang bersangkutan sebagai pihak pemberi dan diketahui oleh Atasan Langsung dan Corporate Secretary;
5. Setiap pemberian yang dilakukan, dicatat dan form yang diisi oleh pegawai yang bersangkutan sebagai pihak pemberi dan diketahui oleh atasan langsung dan Corporate Secretary.

The Company's gratification control is governed by the Gratification Control Procedure No. Dok: WG-GEA-PM-06 No. Rev: 04, effective as of December 2, 2024. Gratification refers to the giving/receiving of money/cash equivalents, goods, rebates (discounts), commissions, interest-free loans, travel tickets, lodging facilities, travel tours, free medical treatment, and other facilities of any value, whether received domestically or abroad, and whether conducted electronically or non-electronically.

In order to prevent gratification among employees, the Company continuously socializes the importance of preventing gratification practices aimed at increasing employee understanding and awareness.

GRATIFICATION CONTROL MANAGEMENT

The Company sets permissible limits for giving, as follows:

1. Giving gifts/souvenirs and/or hospitality, meals, and/or entertainment is permitted as long as the giving is intended to foster good relations within reasonable limits and respects equal relationships (such as between friends and neighbors), mutual respect, and is not intended to bribe the recipient to provide something to the Company that is not legally entitled to the Company, and the frequency of such giving should not be too frequent as it may raise suspicion that there is something behind the giving;
2. Giving gifts/souvenirs in the form of goods intended for Company promotion must use the Company's logo as an inseparable part of the goods (the Company's logo on the goods cannot be removed) with the following value;
3. Payment of meeting honorariums to Third Parties is permitted as appreciation for the contribution of thoughts and expertise provided to the Company upon official invitation from the Company, as long as the provisions regarding such honorariums are not prohibited by the code of conduct or internal regulations of the Third Party's institution;
4. The form for reporting the rejection/acceptance/giving/request of gratification deemed as bribery and gratification related to official duties shall be recorded in a form filled out by the employee concerned as the giver and acknowledged by their Immediate Supervisor and the Corporate Secretary;
5. Every instance of giving shall be recorded in a form filled out by the employee concerned as the giver and acknowledged by their immediate supervisor and the Corporate Secretary.

Perseroan memberikan batasan penerimaan yang diperbolehkan, yaitu:

1. Menerima hadiah/cenderamata dan/atau jamuan, makan dan/atau hiburan, dalam batas-batas yang wajar, dengan frekuensi penerimaan yang tidak terlalu sering sehingga patut diduga tidak bertujuan untuk menyuap;
2. Menerima hadiah/cenderamata yang mencantumkan logo/nama perusahaan pemberi, dengan batasan-batasan yang harus dipenuhi seluruhnya sebagai berikut:
   a. Logo, nama perseroan/pihak yang memberikan benda-benda dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan/promosi perseroan pemberi;
   b. Nilai hadiah/cinderamata yang wajar (mengacu pada Peraturan KPK No. 2 Tahun 2019);
   c. Bukan berupa pemberian yang melanggar kesusilaan dan hukum.
3. Setiap penerimaan dicatat dalam form yang diisi oleh pegawai yang bersangkutan sebagai pihak penerima dan diketahui oleh Atasan Langsung dan Corporate Secretary;
4. Menerima honorarium sebagai pembicara, narasumber yang diundang secara resmi oleh pihak ketiga diperbolehkan sebagai apresiasi atas sumbangan pemikiran dan keahlian yang telah diberikan, sepanjang pemberian tersebut patut diduga tidak bermaksud untuk mempengaruhi pegawai yang bersangkutan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya dan tidak dilarang dalam kode etik atau peraturan internal Perseroan;
5. Menerima hiburan yang masih dalam batas kewajaran diperbolehkan jika:
   a. Hiburan tidak dilakukan secara terus-menerus;
   b. Tidak melakukan pembayaran yang membiayai keluarga atau teman;
   c. Tidak melakukan pembayaran untuk biaya liburan;
   d. Membatasi pembayaran untuk kepentingan perjalanan, akomodasi, biaya makan yang terkait dengan rencana perjalanan yang wajar;
   e. Tidak terdapat konflik kepentingan terhadap hubungan bisnis secara institusi antara Perseroan dengan Pihak Ketiga yang menawarkan Hiburan;
   f. Tidak mengganggu waktu kerja pegawai yang bersangkutan;
   g. Tidak melakukan pembicaraan mengenai pemberian informasi internal Perseroan penyebab kecurangan/fraud dan benturan kepentingan.
6. Apabila terdapat penerimaan hadiah/cenderamata dan atau hiburan di luar batasan yang sudah diatur Perseroan, maka karyawan wajib melaporkan hal tersebut melalui:
   a. Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya wajib melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dalam jangka waktu paling

The Company sets permissible limits for receiving, as follows:

1. Receiving gifts/souvenirs and/or hospitality, meals, and/or entertainment, within reasonable limits, with a frequency of receipt that is not too frequent hence it can be reasonably assumed that it is not intended as bribery;
2. Receiving gifts/souvenirs bearing the logo/name of the providing company, with the following limitations that must be fully met:
   a. The logo, name of the company/party providing the items is an inseparable part of the providing company's policy/promotion;
   b. The value of the gift/souvenir is reasonable (referring to KPK Regulation No. 2 of 2019);
   c. It is not a gift that violates decency and the law.
3. Every instance of receiving shall be recorded in a form filled out by the employee concerned as the recipient and acknowledged by their Immediate Supervisor and the Corporate Secretary;
4. Receiving honorariums as a speaker or resource person officially invited by a third party is permitted as appreciation for the contribution of thoughts and expertise provided, as long as it can be reasonably assumed that the giving is not intended to influence the employee concerned to do and/or not do something related to their position/office and is not prohibited by the Company's code of conduct or internal regulations;
5. Receiving entertainment that is remaining within reasonable limits is permitted if:
   a. The entertainment is not continuous.
   b. It does not involve payments that finance family or friends.
   c. It does not involve payments for vacation expenses.
   d. Payments for travel, accommodation, and meal expenses related to reasonable travel plans are limited.
   e. There is no conflict of interest regarding the institutional business relationship between the Company and the Third Party offering the entertainment.
   f. It does not interfere with the working hours of the employee concerned.
   g. It does not involve discussions about providing internal Company information that could lead to fraud and conflicts of interest.
6. If there is receipt of gifts/souvenirs and/or entertainment beyond the limits already regulated by the Company, employees are required to report it through:
   a. The Gratification Control Unit (UPG): Gifts related to positions and contrary to obligations or duties must be reported to the Gratification Control Unit (UPG) within a maximum of 10 (ten) working days from the date of receipt. The UPG is

lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan. Kemudian UPG wajib meneruskan laporan Gratifikasi kepada KPK dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan.

b. Sistem Pelaporan Pelanggaran/Whistleblowing System Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran/ Whistleblowing System dilakukan apabila pelapor adalah karyawan Perseroan atau pihak-pihak lainnya (Pelanggan, Mitra Kerja dan Masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui Gratifikasi di Perseroan yang memiliki potensi untuk terjadinya penyalahgunaan wewenang/jabatan. Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran/Whistleblowing System dilaksanakan sesuai dengan mekanisme tersendiri yang mengatur mengenai Sistem Pelaporan Pelanggaran/Whistleblowing System.

c. Formulir laporan penolakan/penerimaan/pemberian/ permintaan gratifikasi yang dianggap suap dan gratifikasi terkait kedinasan, dicatat dalam form yang diisi oleh pegawai yang bersangkutan sebagai pihak penerima dan diketahui oleh Atasan Langsung dan Corporate Secretary.

7. Dalam kondisi tertentu, di mana personil Perseroan tanpa sepengetahuannya tidak dapat menghindar untuk menerima pemberian dari Mitra Kerja dan/ataupada posisi dimana barang/ uang/setara uang atau dalam bentuk apapun, pemberian tersebut sudah ada disuatu tempat yang dititipkan kepada atau melalui orang lain tanpa sepengetahuan personil Perseroan tersebut, maka yang bersangkutan wajib melaporkan ke UPG;
8. Terkait gratifikasi yang berbentuk barang yang mudah rusak/busuk atau kadaluarsa (misalnya makanan, minuman, buah-buahan), maka barang tersebut harus diserahkan kepada UPG untuk ditentukan pemanfaatannya dan menyimpan bukti penyerahannya. Pemanfaatan penyaluran dapat disalurkan langsung ke Panti Asuhan, Panti Sosial lainnya dan/atau perorangan maupun kelompok yang tidak memiliki Benturan Kepentingan dengan Pelapor. Jika barang yang diterima telah rusak/busuk atau memasuki kadaluarsa maka UPG berhak melakukan pemusnahan terhadap barang tersebut.

SANKSI ATAS PELANGGARAN

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Prosedur Pengendalian Gratifikasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perseroan dan dapat dikenakan sanksi Pidana sesuai dengan Pasal 12 B ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan dalam Pasat 12 B ayat (1) tidak berlaku jika penerima melaporkan penerimaan (gratifikasi) yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

then obliged to forward the Gratification report to the KPK (Corruption Eradication Commission) within a maximum of 10 (ten) working days from the date of receipt.

b. The Whistleblowing System: Reporting through the Whistleblowing System is carried out if the reporter is a Company employee or other parties (Customers, Business Partners, and the Public) who are not directly involved but are aware of Gratification within the Company that has the potential for abuse of authority/position. Reporting through the Whistleblowing System is carried out in accordance with a separate mechanism governing the Whistleblowing System.

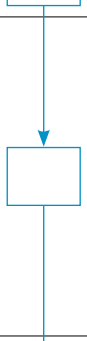
c. The form for reporting the rejection/acceptance/giving/ request of gratification deemed as bribery and gratification related to official duties shall be recorded in a form filled out by the employee concerned as the recipient and acknowledged by their Immediate Supervisor and the Corporate Secretary.

7. In certain conditions, where the Company personnel unknowingly cannot avoid receiving gifts from Business Partners and/or in a position where goods/money/cash equivalents or in any form, the gift has been placed in a location entrusted to or through another person without the knowledge of the Company personnel, the person concerned is obliged to report it to the UPG.
8. Regarding gratification in the form of perishable or expired goods (e.g., food, beverages, fruits), these goods must be submitted to the UPG to determine their utilization and to keep proof of submission. Utilization and distribution can be directly channeled to orphanages, other social institutions, and/or individuals or groups who do not have a Conflict of Interest with the Reporter. If the received goods are damaged/rotten or have expired, the UPG has the right to destroy the goods.

SANCTIONS FOR VIOLATIONS

Violations of the provisions in this Gratification Control Procedure will be subject to sanctions in accordance with the prevailing regulations and provisions within the Company and may be subject to criminal sanctions in accordance with Article 12 B paragraph (1) and paragraph (2) of Law No. 31 of 1999 Jo Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption. The provisions in Article 12 B paragraph (1) do not apply if the recipient reports the received gratification to the Corruption Eradication Commission (KPK).

Diagram Alir Urutan Kerja & Tanggaung Jawab Memberi Hadiah/Bingkisan/Cinderamata/Hiburan

No.	Alur Proses	Uraian Kegiatan	Matriks Penanggung Jawab					Input	Output
			R	A	S	C	I		
A		Pemberian Hadiah/ Bingkisan/Cinderamata/ Hiburan							
1		Pelaporan kepada atasan langsung maksimal 7 hari setelah pemberian	Pelapor		Atasan Langsung				
2		Pelaporan kepada Pimpinan PjFs terkait maksimal 2 hari kerja	Atasan Langsung Pelapor		Pimpinan PjFs				
3		Penerimaan Laporan	Pelapor (Pegawai)		UPG				
4		Pemberian ke pihak ketiga dikabulkan UPG yang dikembalikan ke atasan langsung untuk dikembalikan kepada pemberi dan bukti pengiriman pemberian diberikan ke Pimpinan PjFs terkait, Finance Division, Corporate Secretariat dan Direktur Keuangan, HC dan Manajemen Risiko	UPG	Atasan Langsung Pelapor	Pimpinan PjFk Finance, Corporate Secretary		DKHCMR		Bukti Pengiriman
5		Pemberian ke pihak ketiga tidak dikabulkan UPG juga dikembalikan ke atasan langsung	UPG	Atasan Langsung Pelapor	Pimpinan PjFk Finance, Corporate Secretary		DKHCMR		
6		Pengiriman (untuk gratifikasi yang dikabulkan)	Pelapor (Pegawai)	Atasan Langsung Pelapor			UPG		
7		Penyerahan Bukti Pengiriman	Pelapor (Pegawai)	Atasan Langsung Pelapor			UPG		

R (Responsible) : adalah pihak yang melaksanakan kegiatan
A (Accountable) : adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap kegiatan
S (Support) : adalah pihak yang mendukung kegiatan
I (Inform) : adalah pihak yang diinformasikan terhadap perkembangan kegiatan

LAPORAN PENGELOLAAN GRATIFIKASI TAHUN 2024

Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat laporan penerimaan gratifikasi yang diterima oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). Perseroan terus berupaya untuk melakukan pelaporan terkait gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

REPORT OF GRATIFICATION MANAGEMENT IN 2024

Throughout 2024, there were no reports of gratification received by the Gratification Control Unit (UPG). The Company continues to strive to report on gratification in a transparent and accountable manner in accordance with the prevailing laws and regulations.

Hubungan dengan Kreditur

Relationship with Creditors

Sebagai bentuk penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, Perseroan senantiasa menjaga hubungan yang profesional dan transparan dengan para kreditur. Perseroan memandang bahwa hubungan yang dilandasi oleh kepercayaan, keterbukaan informasi, dan kepatuhan terhadap perjanjian merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas keuangan dan mendukung kelangsungan usaha jangka panjang.

Kebijakan terkait dengan hubungan dengan kreditur adalah sebagai berikut:

1. Perseroan memiliki kebijakan mengenai hak-hak dan kewajiban Perusahaan kepada kreditur antara lain adalah pemenuhan kewajiban kepada kreditur sesuai perjanjian, pengungkapan informasi secara transparan, akurat dan tepat waktu, baik pada saat permintaan maupun penggunaan pinjaman, covenant yaitu jaminan Perusahaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk melindungi kepentingan kreditur.
2. Tidak terjadi mismatch/ penyimpangan dalam penggunaan dan penyediaan dana serta pendapatan operasional yang digunakan untuk melakukan pembayaran bunga dan pokok hutang jangka panjang.
3. Perseroan memberikan informasi yang akurat kepada kreditur sesuai dengan perjanjian, secara lengkap dan tepat waktu.

Informasi mengenai prinsip-prinsip hubungan dengan kreditur tercantum dalam Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct) Perseroan, sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris WEGE Nomor: SK.01.01/A.DIR.00001. WEGE/2025 tanggal 15 Januari 2025. Komitmen atas penerapan pedoman tersebut diperkuat melalui penandatanganan Pernyataan Komitmen Pelaksanaan Pedoman Etika dan Perilaku oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada tanggal yang sama.

Perseroan berkomitmen untuk terus membina hubungan yang sehat dan berkelanjutan dengan seluruh kreditur dalam rangka mendukung pertumbuhan usaha dan menjaga kepercayaan pemangku kepentingan.

As a form of implementing the principles of good corporate governance, the Company consistently maintains professional and transparent relationships with its creditors. The Company views relationships based on trust, information disclosure, and adherence to agreements as critical factors in maintaining financial stability and supporting long-term business sustainability.

The policies related to the relationship with creditors are as follows:

1. The Company has policies regarding the rights and obligations of the Company towards creditors, which include fulfilling obligations to creditors in accordance with agreements, transparently, accurately, and timely disclosing information both upon request and during the loan utilization period, as well as covenants, which are the Company's guarantees to take or refrain from taking certain actions to protect the interests of creditors.
2. There are no mismatches or deviations in the use and provision of funds, as well as operational income used for the payment of interest and long-term debt principal.
3. The Company provides accurate information to creditors in accordance with the agreement, completely and on time.

Information regarding the principles of the relationship with creditors is outlined in the Company's Ethical Conduct and Code of Conduct , as stated in the Joint Decree of the Board of Directors and the Board of Commissioners of WEGE Number: SK.01.01/A.DIR.00001.WEGE/2025 dated January 15, 2025. The commitment to the implementation of these guidelines is reinforced through the signing of a Statement of Commitment to the Implementation of the Ethical Conduct and Code of Conduct by all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners on the same date.

The Company is committed to continuously fostering healthy and sustainable relationships with all creditors in order to support business growth and maintain the trust of stakeholders.

Tata Kelola Pengadaan dan Kemitraan

Relationship with Creditors

Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Komitmen ini diperkuat melalui aturan dan pedoman baku yang mengatur pelaksanaan pengadaan di lingkungan Perseroan, termasuk ketentuan yang dituangkan dalam Code of Conduct bagi seluruh pemasok dan mitra usaha.

Komitmen tersebut diimplementasikan melalui prosedur pengadaan yang berlaku secara konsisten di seluruh lini operasional. Upaya ini dilakukan untuk mendorong praktik pengadaan yang berintegritas, serta mendukung terciptanya clean governance dalam setiap tahapan proses pengadaan.

Perseroan menetapkan pemberian pekerjaan kepada mitra kerja didasarkan atas kriteria yang mencakup antara lain:

1. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial dalam bidang usaha yang dapat dibuktikan dengan kualifikasi yang dikeluarkan asosiasi yang bersangkutan;
2. Memiliki sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
3. Memiliki track record yang baik dan memadai;
4. Tidak pernah membuat pernyataan yang tidak benar tentang kualifikasi yang dimilikinya; dan
5. Kerja sama yang saling menguntungkan.

Perseroan memahami bahwa pengadaan barang dan jasa mempunyai peran penting dalam mendukung kelancaran operasional dan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Agar tujuan dari pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka Perseroan senantiasa mengacu pada filosofi pengadaan barang/jasa, tunduk kepada etika dan norma yang berlaku, serta mengikuti prinsip-prinsip, metode dan proses pengadaan barang dan jasa yang baku.

PRINSIP-PRINSIP PENGADAAN BARANG DAN JASA

Kebijakan peningkatan kemampuan pemasok bertujuan untuk memastikan bahwa rantai pasokan berjalan dengan efisien, wajar, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dibutuhkan Perseroan dalam menjalankan bisnisnya karena kemampuan pemasok dalam memenuhi barang atau jasa yang dibutuhkan Perseroan akan mempengaruhi kualitas *output* Perseroan.

Adapun pedoman nilai dan prinsip dasar dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa yang harus dipenuhi oleh semua pemasok, adalah sebagai berikut:

1. Efisien, pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;

The Company is committed to conducting the procurement process for goods and services in a transparent, accountable manner, and in accordance with the principles of good corporate governance. This commitment is reinforced through standard rules and guidelines that govern the implementation of procurement within the Company, including provisions outlined in the Code of Conduct for all suppliers and business partners.

This commitment is implemented through procurement procedures that are consistently applied across all operational lines. These efforts are undertaken to promote ethical procurement practices and support the creation of clean governance at every stage of the procurement process.

The Company establishes the awarding of work to business partners based on criteria that include, among others:

1. Possesses the expertise, experience, technical and managerial capabilities in the relevant business field, verifiable through qualifications issued by the relevant association.
2. Has the necessary resources for the execution of the work
3. Has a good and adequate track record
4. Has never made untrue statements about their qualifications
5. Mutually beneficial cooperation.

The Company understands that the procurement of goods and services plays a crucial role in supporting smooth operations and the achievement of national development goals. To ensure that the objectives of this procurement are best realized, the Company consistently refers to the philosophy of goods/services procurement, adheres to applicable ethics and norms, and follows standard principles, methods, and processes for the procurement of goods and services.

PRINCIPLES OF GOODS AND SERVICES PROCUREMENT

The supplier capability improvement policy aims to ensure that the supply chain operates efficiently, fairly, transparently, and accountability. This is essential for the Company in conducting its business because the ability of suppliers to fulfill the Company's needs for goods or services will impact the quality of the Company's output.

The guidelines for core values and basic principles in the procurement of goods and services that must be adhered to by all suppliers are as follows:

1. Efficient, The procurement of goods/services must be carried out by utilizing limited funds and resources to achieve the established targets in the shortest possible time and be accountable;

2. Efektif, pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;

3. Terbuka dan bersaing, pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat dan memenuhi syarat/ kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;

4. Transparan, ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat dan masyarakat umum;

5. Adil dan tidak diskriminatif, memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;

6. Akuntabel, mencapai sasaran keuangan dan manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/ jasa.

KEGIATAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP PEMASOK

Perseroan secara berkala melakukan evaluasi proses pengadaan barang atau jasa untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan dengan efektif dan telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024, Perseroan melaksanakan kegiatan tanggung jawab terhadap pemasok sebagai berikut:

1. Melaksanakan proses kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Perusahaan sesuai dengan prosedur yang berlaku;

2. Proses kualifikasi dilakukan dengan adil dan sama rata, terukur, dan sudah melalui sistem aplikasi (dppm.wikagedung.co.id) dan evaluasi kinerja vendor serta pembinaan;

3. Pemberdayaan UMKM dalam pelaksanaan belanja barang dalam nilai-nilai dan aspek tertentu sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

4. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri (TKDN) difokuskan untuk memperluas kesempatan kerja, memperkuat industri nasional, dan mendorong daya saing serta ketahanan ekonomi;

2. Effective, the procurement of goods/services must align with the established needs and provide the greatest possible benefit in accordance with the determined targets;

3. Open and Competitive, the procurement of goods/services must be open to goods/services providers who meet the requirements and conducted through healthy competition, fulfilling specific conditions/criteria based on clear provisions and procedures;

4. Transparent, the provisions and information regarding the procurement of goods/services, including the technical and administrative requirements of the procurement, evaluation procedures, and the determination of potential goods/services providers, are open to interested participating goods/services providers and the general public;

5. Fair and Non-Discriminatory: providing equal treatment to all potential goods/services providers and not aiming to provide advantages to any particular party, in any way or for any reason;

6. Accountable: achieving financial targets and benefits for the smooth execution of general government duties and public services in accordance with the applicable principles and provisions in the procurement of goods/services.

COMPANY RESPONSIBILITY ACTIVITIES TOWARDS SUPPLIERS

The Company periodically evaluates the goods or services procurement process to ensure that the process is running effectively and has met the established requirements. In 2024, the Company carried out the following responsibility activities towards suppliers:

1. Conducting the procurement process for goods and services within the Company in accordance with applicable procedures;

2. The qualification process is conducted fairly and equitably, is measurable, and has gone through an application system (dppm.wikagedung.co.id) as well as vendor performance evaluation and development;

3. Empowering SMEs in the implementation of goods procurement within certain values and aspects in accordance with applicable regulations;

4. Increasing the use of domestic products (TKDN) is focused on expanding employment opportunities, strengthening national industry, and promoting competitiveness and economic resilience;

5. Optimalisasi Proses Pengadaan barang jasa dilakukan dengan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik untuk nilai-nilai tertentu sesuai ketentuan yang tertuang dalam prosedur Perseroan;

6. Sistem kualifikasi Mitra Kerja telah terintegrasi dengan sistem pembuatan kontrak dan dalam hal proses pembayaran sudah terintegrasi dengan sistem keuangan;

7. Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di masing-masing unit kerja/divisi sebagai proses transparansi kegiatan pengadaan;

8. Menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/ jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;

9. Sebagai wujud keterikatan dengan Mitra Kerja, Perseroan menyelenggarakan acara Vendor Gathering setiap tahunnya. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan kemitraan, meningkatkan sinergi, serta berbagi informasi terkait perkembangan dan inovasi dalam pengadaan barang dan jasa;

10. Mitra kerja tetap dipantau kinerjanya secara periodik untuk menjaga kualitas pekerjaan dan kualitas penerapan HSE. Dari penilaian ini Perseroan dapat menyaring Mitra Kerja loyal terbaik dan Mitra Kerja yang tidak memiliki kredibilitas dalam mendukung kinerja Perseroan. Secara keseluruhan Mitra Kerja telah mencapai angka resume index lebih dari yang diharapkan;

11. Mitra Kerja dapat dengan mudah melakukan penilaian terhadap kinerja Perseroan sebagai kontraktor, dilihat dari sisi keterbukaan, fairness, dan komitmen pembayaran. Dari hasil penilaian kepuasan Mitra Kerja pada Tahun 2024, Perseroan memiliki komitmen untuk dapat memenuhi kepuasan pelanggan terutama dalam segi komitmen pembayaran yang menjadi aspek dalam Prioritas Utama Kepuasan Mitra Kerja;

12. Perseroan telah menyediakan platform web untuk menerima keluhan dari stakeholders dan mitra kerja, sebagai bagian dari implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016. Hal ini mencerminkan komitmen Perseroan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap aspek operasional; dan

13. Mitra Kerja dapat melakukan perbandingan kualitas kinerja Perseroan dengan kontraktor lainnya, baik BUMN maupun swasta, melalui penilaian Vendor Satisfaction Index yang dilaksanakan setiap enam bulan sekali. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan mitra kerja dan mendorong perbaikan berkelanjutan dalam layanan dan kinerja Perseroan.

5. Optimizing the procurement process for goods and services is done through the use of information technology and electronic transactions for certain values in accordance with the provisions outlined in the Company's procedures;

6. The Partner Qualification system has been integrated with the contract creation system, and the payment process is integrated with the financial system;

7. In the implementation of goods/services procurement in each work unit/division as a process of procurement activity transparency;

8. Maintaining the confidentiality of goods/services procurement documents that, by their nature, must be kept secret to prevent irregularities in the procurement of goods/services;

9. As a form of engagement with Business Partners, the Company holds a Vendor Gathering event annually. This activity aims to strengthen partnership relationships, enhance synergy, and share information regarding developments and innovations in the procurement of goods and services;

10. The performance of business partners is regularly monitored to maintain the quality of work and the quality of HSE implementation. From this assessment, the Company can identify the best loyal business partners and those who lack credibility in supporting the Company's performance. Overall, the business partners have achieved a resume index higher than expected;

11. Business Partners can easily assess the Company's performance as a contractor, viewed from the aspects of transparency, fairness, and payment commitment. Based on the results of the Business Partner satisfaction assessment in 2024, the Company is committed to meeting customer satisfaction, especially in terms of payment commitment, which is a key aspect in the Business Partner Satisfaction Priority;

12. The Company has provided a web platform to receive complaints from stakeholders and business partners, as part of the implementation of the Anti-Bribery Management System ISO 37001:2016. This reflects the Company's commitment to transparency, accountability, and integrity in every aspect of its operations; and

13. Business Partners can easily compare the Company's performance quality with other contractors, both State-Owned and private, through the Vendor Satisfaction Index assessment conducted every six months. This assessment aims to measure the level of business partner satisfaction and encourage continuous improvement in the Company's services and performance.

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan Perusahaan

Transparency of The Company's Financial and Non-Financial Condition

Perseroan senantiasa menginformasikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya dengan mempublikasikan laporan secara transparan dan akuntabel melalui situs web Perseroan dan paparan publik baik untuk periode tahunan maupun triwulan. Perseroan menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

The Company consistently informs shareholders and other stakeholders about its financial and non-financial condition by transparency and accountability publishing reports through the Company's website and public presentations for both annual and quarterly periods. The Company prepares and presents these reports in accordance with the procedures, types, and scope stipulated by the Financial Services Authority regulations.

Berikut beberapa informasi terkait transparansi kondisi keuangan dan keuangan Perseroan sepanjang tahun 2024 yang dapat diakses melalui situs web Perseroan:

The following is some information regarding the transparency of the Company's financial and non-financial condition throughout 2024, which can be accessed through the Company's website:

No.	Jenis Informasi Types of information	Periode Penerbitan Publication Period	Pelaporan Reporting	Isi pengungkapan Content of Disclosure
Informasi Keuangan Financial statements				
1	Laporan Publikasi Public Report	Triwulanan Quarterly	Otoritas Jasa Keuangan Bursa Efek Indonesia Financial Services Authority Indonesia Stock Exchange (IDX)	Ringkasan Kinerja keuangan sesuai persyaratan yang berlaku Summary of Financial Performance in Accordance with Applicable Requirements
2	Laporan Publikasi Public Report	Tahunan Annual	Otoritas Jasa Keuangan Bursa Efek Indonesia Financial Services Authority Indonesia Stock Exchange (IDX)	Ringkasan Kinerja keuangan sesuai persyaratan yang berlaku Summary of Financial Performance in Accordance with Applicable Requirements
Informasi Non Keuangan Non-Financial Information				
1	Lini Bisnis Business Segments	Insidentil incidental	-	Jika terdapat informasi mengenai perubahan lini bisnis perusahaan atas produk dan jasa Information about any alterations to the company's business lines related to products and services
2	Kepengurusan Management	Insidentil incidental	-	Jika terdapat informasi perubahan manajemen
3	Kepemilikan Ownership	Bulanan monthly	-	Informasi mengenai struktur kepemilikan saham In the event of information about changes in management, Information regarding the shareholding structure

Keterlibatan dalam Aktivitas Politik

Involvement In Political Activities

Perseroan memiliki kebijakan yang mengharuskan Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen dan Pegawai yang mewakili Perseroan dalam setiap urusan pemerintah dan politik, untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur keterlibatan Perseroan dalam urusan publik.

Perseroan mengakui hak setiap pegawai untuk menyalurkan aspirasi politik sesuai dengan keyakinannya. Oleh karena itu, Perseroan tidak memperbolehkan seorang pun melakukan pemaksaan kepada orang lain sehingga membatasi hak individu yang bersangkutan untuk menyalurkan hak-hak politiknya sesuai aspirasinya.

Perseroan memiliki kebijakan untuk meminta pegawai yang aktif dalam partai politik dan/atau menjadi calon dari partai politik dalam pemilu atau pemilihan kepala daerah agar mengundurkan diri dari Perseroan sebagai mana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan juga tidak memperbolehkan pemberian sumbangan dalam bentuk apapun kepada partai politik manapun sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang.

Praktik yang diterapkan Perseroan dalam kaitannya dengan keterlibatan dengan politik diantaranya menyatakan Perseroan tidak akan memberikan dana, aset, atau fasilitas Perseroan untuk kepentingan partai politik, seorang atau lebih calon anggota legislatif, eksekutif dan yudikatif kecuali dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

The Company has a policy requiring the Board of Commissioners, Board of Directors, Management, and Employees representing the Company in any governmental and political affairs to comply with the laws and regulations governing the Company's involvement in public matters.

The Company recognizes the right of every employee to express their political aspirations in accordance with their beliefs. Therefore, the Company does not allow anyone to coerce others, thereby limiting the individual's right to exercise their political rights according to their aspirations.

The Company has a policy to require employees who are active in political parties and/or become candidates of political parties in general elections or regional head elections to resign from the Company in accordance with prevailing laws and regulations.

The Company also prohibits the provision of contributions in any form to any political party as stipulated by law.

The practices implemented by the Company in relation to political involvement include stating that the Company will not provide funds, assets, or the Company's facilities for the benefit of political parties, one or more candidates for legislative, executive, and judicial positions, unless carried out in accordance with the provisions of prevailing laws and regulations.

Pencegahan Transaksi Orang dalam (Insider Trading)

Prevention of Insider Trading

Sebagai bagian dari komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), Perseroan memberikan kemudahan akses terhadap data dan informasi strategis bagi karyawan yang memiliki kewenangan, guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara optimal.

Namun demikian, Perseroan juga menetapkan pengaturan yang ketat terkait batasan akses dan penggunaan informasi tersebut. Perseroan memberlakukan ketentuan bahwa setiap karyawan dilarang untuk menggunakan dan menyebarluaskan data serta informasi strategis kepada pihak-pihak yang tidak berwenang, khususnya apabila hal tersebut berpotensi memengaruhi keputusan investasi atau mengarah pada praktik transaksi berdasarkan informasi orang dalam (*insider trading*).

As part of its commitment to the implementation of Good Corporate Governance, the Company provides easy access to strategic data and information for authorized employees to support the optimal execution of their duties and responsibilities.

However, the Company also establishes strict regulations regarding the limitation of access and the use of such information. The Company enforces provisions stating that all employees are prohibited from using and disseminating strategic data and information to unauthorized parties, especially if it has the potential to influence investment decisions or lead to insider trading practices.

Untuk mencegah terjadinya *insider trading*, *Code of Conduct* Perseroan telah mencakup kebijakan khusus mengenai pengelolaan informasi material dan strategis. Di dalamnya diatur bahwa setiap informasi harus diperoleh melalui cara-cara yang sah serta digunakan dan dijaga sesuai dengan prinsip-prinsip etika, integritas, dan tanggung jawab. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan ini dipandang sebagai tindakan serius yang dapat merugikan Perseroan maupun pemegang saham lainnya.

In order to prevent insider trading, the Company's Code of Conduct includes a specific policy regarding the management of material and strategic information. It stipulates that all information must be obtained through legitimate means and used and maintained in accordance with the principles of ethics, integrity, and responsibility. Any violation of these provisions is considered a serious act that may harm the Company and other shareholders.

Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Involvement In Political Activities

PRINSIP DASAR LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) merupakan bentuk komitmen Perseroan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi serta sebagai wujud penerapan tata kelola perusahaan yang baik. LHKPN juga merupakan program pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, termasuk di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana yang diatur dalam:

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.
2. Peraturan Menteri BUMN No. PER - 01 /MBU/2011 tentang Penerapan GCG Pada BUMN. Pasal 41 dari Peraturan Menteri BUMN tersebut menjelaskan bahwa Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan pejabat tertentu BUMN yang ditunjuk oleh Direksi, wajib menyampaikan laporan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia No. 2 Tahun 2020; sebagai Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 7 Tahun 2016.
5. Peraturan Internal Perseroan terkait LHKPN.

BASIC PRINCIPLES OF STATE ADMINISTRATORS WEALTH REPORTS

Management of State Administrator Wealth Report (LHKPN) is a form of the Company's commitment to preventing and eradicating corruption and as a form of implementing good corporate governance. LHKPN is also a government program to create a clean government, including in the State-Owned Enterprises (BUMN) environment as regulated in:

1. Law No. 28 of 1999 concerning Clean State Administrator Free from Corruption, Collusion and Nepotism.
2. Regulation of the Minister of BUMN No. PER - 01/MBU/2011 concerning the Implementation of GCG in BUMN. Article 41 of the Regulation of the Minister of BUMN explains that Members of the Board of Directors, Members of the Board of Commissioners/ Supervisory Board and certain BUMN officials appointed by the Board of Directors are required to submit a wealth report in accordance with the provisions of laws and regulations.
3. Regulation of the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia No. 3 of 2024 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Corruption Eradication Commission No. 07 of 2016 concerning Procedures for Registration, Announcement and Examination of State Administrator Wealth.
4. Regulation of the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia No. 2 of 2020; as an Amendment to the Regulation of the Corruption Eradication Commission No. 7 of 2016.
5. Internal Company Regulations regarding LHKPN.

LHKPN merupakan salah satu instrumen pencegahan korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN) yang dimiliki oleh Komite Pemberantasan Korupsi. Pemeriksaan LHKPN yang disampaikan kepada KPK bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang mentaati asas-asas umum penyelenggara negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.

Setiap Penyelenggara Negara dituntut untuk melaporkan kekayaannya melalui formulir LHKPN yang telah disediakan KPK untuk diisi secara jujur, benar dan lengkap, agar KPK dapat menganalisis, mengevaluasi, serta menilai atas seluruh jumlah, jenis dan nilai Harta Kekayaan yang dilaporkan, secara benar, cepat, tepat, akurat dan bertanggung jawab.

Ketentuan terkait tata cara penyampaian LHKPN di lingkup Perseroan, diatur sendiri dalam Surat Keputusan Direksi No. SK.01.09/A.DIR.01739/2023.

Adapun pejabat Perseroan yang diwajibkan menyampaikan LHKPN atau wajib lapor adalah sebagai berikut:
1. Dewan Komisaris;
2. Direksi;
3. Vice President atau BOD-1.

LHKPN is one of the instruments for preventing corruption, collusion and nepotism (KKN) owned by the Corruption Eradication Committee. The examination of LHKPN submitted to the KPK aims to realize State Officials which comply with the general principles of state officials which are free from corrupt practices, collusion and nepotism, and other reprehensible acts.

Every State Official is required to report their wealth through the LHKPN form provided by the KPK to be filled in honestly, correctly and completely, so as to the KPK can analyze, evaluate, and assess the entire amount, type and value of the reported Assets, correctly, quickly, precisely, accurately and responsibly.

Provisions related to the procedure for submitting LHKPN within the Company are regulated in the Decree of the Board of Directors No. SK.01.09/A.DIR.01739/2023.

The Company officials who are required to submit LHKPN or are obliged to report are as follows:
1. Board of Commissioners;
2. Board of Directors;
3. Vice President or BOD-1.

TRANSPARANSI LHKPN PEJABAT PERUSAHAAN TAHUN 2024

Perseroan melaporkan transparansi kepatuhan penyampaian LHKPN oleh pejabat Perseroan untuk tahun 2024 sebagai berikut:

TRANSPARENCY OF LHKPN OF COMPANY OFFICIALS IN 2024

The Company reports the transparency of compliance with the submission of LHKPN by the Company's officials for 2024 as follows:

No	Pejabat Officials	Jumlah Wajib Lapor Number of Mandatory Report	Jumlah yang Telah Melaporkan Number of Reported	
			Jumlah Total	%
1	Dewan Komisaris Board of Commissioners	4	4	100%
2	Direksi Board of Directors	5	5	100%
3	Vice President atau BOD -1 Vice President or BOD -1	15	15	100%
Jumlah Total		24	24	100%

Pada tahun 2024, Perseroan telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN Pejabat Perusahaan kepada KPK untuk tahun buku 2024 sebagai bagian dari implementasi praktik terbaik GCG di lingkungan Perseroan.

In 2024, the Company has fulfilled its obligation to submit LHKPN of Company Officials to the Corruption Eradication Committee for the 2024 fiscal year as part of the implementation of GCG best practices within the Company.

Transparansi Praktik Bad Governance

Involvement In Political Activities

TRANSPARANSI TERHADAP PRAKTIK *BAD CORPORATE GOVERNANCE*

Perseroan menyadari bahwa keberadaan praktik *Bad Corporate Governance* dapat mengganggu penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan berdampak negatif terhadap kinerja, reputasi, serta keberlanjutan usaha Perseroan.

Sebagai bentuk komitmen terhadap penerapan GCG secara konsisten dan berintegritas, Perseroan secara proaktif melakukan evaluasi internal terhadap potensi praktik yang menyimpang dari prinsip-prinsip tata kelola yang berlaku.

Sepanjang tahun 2024, Perseroan tidak melakukan tindakan maupun menerapkan kebijakan yang termasuk dalam kategori *Bad Corporate Governance*, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

TRANSPARENCY TOWARDS BAD CORPORATE GOVERNANCE PRACTICES

The Company is aware that the existence of Bad Corporate Governance practices can disrupt the implementation of good corporate governance (GCG) principles and have a negative impact on the Company's performance, reputation, and business sustainability.

As a commitment to implementing GCG consistently and with integrity, the Company proactively conducts internal evaluations of potential practices that deviate from prevailing governance principles.

Throughout 2024, the Company did not take actions or implement policies that fall into the category of Bad Corporate Governance, as shown in the following table:

No	Praktik Practice	Keterangan Description
1	Laporan atas aktivitas Perseroan yang mencemari lingkungan. Report on the Company's activities that pollute the environment.	Tidak terdapat laporan atau indikasi pencemaran lingkungan oleh Perseroan. There are no reports or indications of environmental pollution by the Company.
2	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh Perseroan, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat tidak diungkapkan dalam Laporan Tahunan. Important matters currently being faced by the Company, subsidiaries, members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners who are in office are not disclosed in the Annual Report.	Seluruh perkara material telah diungkapkan sesuai ketentuan yang berlaku. All material matters have been disclosed in accordance with prevailing regulations.
3	Ketidakpatuhan dalam pengungkapan pemenuhan kewajiban perpajakan. Non-compliance in disclosure of fulfillment of tax obligations.	Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan sesuai peraturan. The Company has fulfilled all tax obligations in a timely manner and in accordance with regulations.
4	Ketidaksesuaian penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dengan peraturan yang berlaku dan SAK. Non-conformity of presentation of Annual Report and Financial Report with prevailing regulations and SAK.	Penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan telah sesuai dengan peraturan dan SAK. The presentation of the Annual Report and Financial Statements is in accordance with regulations and SAK.
5	Tidak terdapat pengungkapan segmen operasi pada Laporan Keuangan. There is no disclosure of operating segments in the Financial Statements.	Pengungkapan segmen operasi telah disajikan sesuai ketentuan yang berlaku. Disclosure of operating segments has been presented in accordance with prevailing provisions.
6	Kasus terkait buruh dan karyawan. Cases related to laborers and employees.	Tidak terdapat kasus perselisihan hubungan industrial atau pelanggaran ketenagakerjaan sepanjang tahun berjalan. There are no cases of industrial relations disputes or labor violations throughout the year.
7	Ketidaksesuaian antara Buku Laporan Tahunan dengan Laporan Tahunan Digital. Mismatch between Annual Report Book and Digital Annual Report.	Laporan Tahunan versi cetak dan digital telah disajikan secara konsisten dan sesuai. The printed and digital versions of the Annual Report have been presented consistently and appropriately.

Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Implementation of Aspects and Principles of Good Corporate Governance in Accordance with the Regulations of the Financial Services Authority.

Perseroan senantiasa menjalankan praktik GCG dengan mematuhi standar yang telah ditetapkan serta menjadikan kepatuhan terhadap regulasi sebagai prioritas utama dalam setiap aspek operasional. Komitmen ini menjadi landasan Perseroan dalam menciptakan struktur pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab, guna meningkatkan nilai perusahaan secara berkelanjutan.

The Company continuously implements GCG practices by complying with established standards and making compliance with regulations a top priority in every operational aspect. This commitment is the Company's foundation in creating a transparent, accountable, and responsible management structure, in order to increase the company's value sustainably.

Sebagai wujud konkret dari komitmen tersebut, Perseroan berupaya secara konsisten untuk memenuhi seluruh rekomendasi dan pedoman yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 21/POJK.04/2015 tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka serta Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

As a concrete manifestation of this commitment, the Company consistently strives to fulfill all recommendations and guidelines contained in the Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 21/POJK.04/2015 concerning Guidelines for the Implementation of Public Company Governance and OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Public Company Governance.

No.	Rekomendasi Recommendation	Tanggapan Response	Penerapan Implementation
Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan RUPS Increasing the Value of GMS			
1.	Perseroan memiliki metode atau prosedur teknis untuk mengumpulkan suara *(voting)* baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan Pemegang Saham. The Company has technical methods or procedures for collecting votes, both openly and secretly, which prioritize the independence and interests of Shareholders.	Diterapkan Implemented	a. Perseroan telah memiliki prosedur teknis pengumpulan suara yang terdapat dalam tata tertib RUPS. b. Perusahaan melibatkan pihak ketiga yakni Notaris dan Biro Administrasi Efek untuk menjaga indepensi dan kepentingan Pemegang Saham dalam penghitungan suara di RUPS. a. The Company has a technical procedure for collecting votes contained in the rules of procedure of the GMS. b. The Company involves third parties, namely Notaries and Securities Administration Bureaus to maintain the independence and interests of Shareholders in counting votes at the GMS.
2.	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan. All members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Public Company are present at the Annual GMS.	Diterapkan Implemented	Semua anggota pengurus Perseroan hadir dalam RUPS Tahunan. All members of the Company's management were present at the Annual GMS.
3.	Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun. A summary of the minutes of the GMS is available on the Public Company's website for at least 1 (one) year.	Diterapkan Implemented	Perseroan telah menyediakan ringkasan risalah RUPS dalam situs web resmi Perusahaan pada bagian Hubungan Investor dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. The Company has provided a summary of the minutes of the GMS on the Company's official website in the Investor Relations section in Indonesian and English.
Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor Improving the Quality of Public Company Communication with Shareholders or Investors			
4.	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. Public Companies have a communication policy with shareholders or investors.	Diterapkan Implemented	Perseroan memiliki wadah komunikasi kepada pemegang saham melalui Paparan Publik, Siaran Pers dan email pada situs web resmi Perusahaan. The Company has a means of communication with shareholders through Public Exposes, Press Releases and emails on the Company's official website.

No.	Rekomendasi Recommendation	Tanggapan Response	Penerapan Implementation
5.	Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam situs web. Public Companies disclose their communication policies with shareholders or investors on their websites.	Diterapkan Implemented	Perseroan menyediakan akses keterbukaan informasi melalui situs web resmi Perusahaan. The Company has a means of communication with shareholders through Public Exposes, Press Releases and emails on the Company's official website.
Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris Strengthening the Membership and Composition of the Board of Commissioners			
6.	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka. Determination of the number of members of the Board of Commissioners takes into account the conditions of the Public Company.	Diterapkan Implemented	Perseroan memiliki Jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan adalah 5 (lima) orang atau melebihi ketentuan minimal terdiri dari 2 (dua) orang, Jumlah tersebut sudah sesuai dengan berdasarkan POJK No. 33/POJK.04/2014. The Company has a total of 5 (five) members of the Company's Board of Commissioners or exceeding the minimum requirement of 2 (two) people. This number is in accordance with POJK No. 33/POJK.04/2014.
7.	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka. Determination of the number of members of the Board of Directors takes into account the conditions of the Public Company.	Diterapkan Implemented	Perseroan telah memenuhi ketentuan yang berlaku bagi Perseroan berdasarkan POJK No. 33/POJK.04/2014. Jumlah anggota Direksi Perusahaan adalah 5 (lima) orang atau melebihi ketentuan minimal terdiri dari 2 (dua) orang. The Company has complied with the provisions applicable to the Company based on POJK No. 33/POJK.04/2014. The number of members of the Company's Board of Directors is 5 (five) people or exceeds the minimum requirement of 2 (two) people.
8.	Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Determining the composition of the members of the Board of Commissioners takes into account the diversity of expertise, knowledge and experience required.	Diterapkan Implemented	Perseroan telah memenuhi ketentuan yang berlaku bagi Perusahaan berdasarkan POJK No. 33/POJK.04/2014. Keberagaman anggota Dewan Komisaris telah dijelaskan di bab GCG dari laporan tahunan ini. The Company has complied with the provisions applicable to the Company based on POJK No. 33/POJK.04/2014. The diversity of the Board of Commissioners members has been explained in the GCG chapter of this annual report.
9.	Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Determining the composition of the Board of Directors members takes into account the diversity of skills, knowledge and experience required.	Diterapkan Implemented	Perseroan telah memenuhi ketentuan yang berlaku bagi Perseroan berdasarkan POJK No. 33/POJK.04/2014. Keberagaman anggota Direksi telah dijelaskan di bab GCG dari laporan tahunan ini. The Company has complied with the provisions applicable to the Company based on POJK No. 33/POJK.04/2014. The diversity of the Board of Directors members has been explained in the GCG chapter of this annual report.

No.	Rekomendasi Recommendation	Tanggapan Response	Penerapan Implementation
10.	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. Members of the Board of Directors who oversee the accounting or finance sector have expertise and/or knowledge in the accounting sector.	Diterapkan Implemented	Perseroan telah memenuhi ketentuan yang berlaku bagi Perusahaan berdasarkan POJK No. 33/POJK.04/2014. Perusahaan memiliki seorang anggota Direksi yang menjabat sebagai Direktur Keuangan dengan latar belakang Pendidikan Akuntansi sebagaimana telah dijelaskan di bab Profil Perusahaan. The Company has complied with the provisions applicable to the Company based on POJK No. 33/POJK.04/2014. The Company has a member of the Board of Directors who serves as the Finance Director with an Accounting Education background as explained in the Company Profile chapter.
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi Improving the Quality of Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners and Board of Directors			
11.	Dewan Komisaris memiliki kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. The Board of Commissioners has its own self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners.	Diterapkan Implemented	Perseroan telah memiliki Kebijakan Assessment Dewan Komisaris sebagaimana yang dijelaskan di Board Manual Dewan Komisaris bagian Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris. The Company has a Board of Commissioners Assessment Policy as explained in the Board Manual for the Board of Commissioners, section on Board of Commissioners Performance Evaluation.
12.	Direksi memiliki kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) untuk menilai kinerja Direksi. The Board of Directors has its own self-assessment policy to assess the performance of the Board of Directors.	Diterapkan Implemented	Perseroan telah memiliki Kebijakan Assessment Direksi sebagaimana yang dijelaskan di Board Manual Direksi bagian Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris. The Company has a Board of Directors Assessment Policy as explained in the Board Manual for the Board of Directors, section on Board of Commissioners' Performance Evaluation.
13.	Kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. The self-assessment policy that evaluates the performance of the Board of Commissioners, is disclosed through the Annual Report of the Public Company.	Diterapkan Implemented	Kebijakan dan implementasi penilaian kinerja Dewan Komisaris telah diungkapkan di bab GCG bagian Transparansi Informasi Terkait Dewan Komisaris dan Direksi. The policy and implementation of the Board of Commissioners' performance assessment have been disclosed in the GCG chapter on Transparency of Information Related to the Board of Commissioners and Board of Directors.
14.	Kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. The self-assessment policy for assessing the performance of the Board of Directors is disclosed in the Annual Report of the Public Company.	Diterapkan Implemented	Kebijakan dan implementasi penilaian kinerja Direksi telah diungkapkan di bab GCG bagian Transparansi Informasi Terkait Dewan Komisaris dan Direksi. The policy and implementation of the Board of Directors' performance assessment have been disclosed in the GCG chapter on Transparency of Information Related to the Board of Commissioners and Board of Directors.

No.	Rekomendasi Recommendation	Tanggapan Response	Penerapan Implementation
15.	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of members of the Board of Commissioners if they are involved in financial crimes.	Diterapkan Implemented	Board Manual Dewan Komisaris mengatur ketentuan bahwa anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya termasuk di dalamnya terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau Negara. The Board Manual for the Board of Commissioners stipulates that members of the Board of Commissioners may be dismissed at any time based on a decision of the GMS by stating the reasons, including involvement in actions that are detrimental to the Company and/or the State.
16	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. The Board of Directors has a policy regarding the resignation of members of the Board of Directors if they are involved in financial crimes.	Diterapkan Implemented	Board Manual Direksi mengatur ketentuan bahwa anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya termasuk di dalamnya terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau Negara. The Board Manual of the Board of Directors stipulates that members of the Board of Directors may be dismissed at any time based on a decision of the GMS by stating the reasons, including involvement in actions that are detrimental to the Company and/or the State.
17.	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi. The Board of Commissioners or the Committee that carries out the Nomination and Remuneration function prepares a succession policy in the nomination process for members of the Board of Directors.	Diterapkan Implemented	Perseroan telah memiliki kebijakan suksesi dan nominasi untuk calon anggota Direksi. The Company has a succession and nomination policy for prospective members of the Board of Directors.
Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan Improving Corporate Governance Aspects through Stakeholder Participation			
18.	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*. Public Companies have policies to prevent insider trading.	Diterapkan Implemented	Perseroan memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading* sebagaimana diatur di dalam *Code of Conduct* Perusahaan. The Company has a policy to prevent insider trading as regulated in the Company's Code of Conduct.
19.	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan antikorupsi dan *anti-fraud*. Public Companies have anti-corruption and anti-fraud policies.	Diterapkan Implemented	Perseroan memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya antikorupsi dan anti-fraud sebagaimana diatur di dalam *Code of Conduct* Perusahaan. The Company has a policy to prevent anti-corruption and anti-fraud as regulated in the Company's Code of Conduct.
20.	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor. Public Companies have policies regarding the selection and improvement of supplier or vendor capabilities.	Diterapkan Implemented	Perseroan memiliki kebijakan kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor sebagaimana diatur di dalam Code of Conduct Perusahaan. The Company has policies regarding the selection and improvement of supplier or vendor capabilities as regulated in the Company's Code of Conduct.
21.	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur. Public Companies have policies regarding the fulfillment of creditors' rights.	Diterapkan Implemented	Perseroan memiliki kebijakan kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur sebagaimana diatur di dalam *Code of Conduct* Perusahaan. The Company has policies regarding the fulfillment of creditors' rights as stipulated in the Company's Code of Conduct.

No.	Rekomendasi Recommendation	Tanggapan Response	Penerapan Implementation
22.	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem whistleblowing. Public Companies have a whistleblowing system policy.	Diterapkan Implemented	Perseroan memiliki kebijakan sistem pelaporan pelanggaran sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini. The Company has a violation reporting system policy as disclosed in this Annual Report.
23.	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan. Public Companies have a policy of providing long-term incentives to Directors and employees.	Diterapkan Implemented	Perseroan memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan sebagaimana secara teknik diungkapkan didalam Prosedur Perseroan. The Company has a policy of providing long-term incentives to Directors and employees as technically disclosed in the Company's Procedures.
Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Improving the Implementation of Information Transparency			
24.	Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi. Public companies utilize information technology more widely in addition to websites as a medium for information disclosure.	Diterapkan Implemented	Perseroan menggunakan media sosial, situs web resmi Perusahaan, situs BEI, dan situs website eASY.KSEI sebagai pemenuhan aspek keterbukaan informasi. The Company uses social media, the Company's official website, the IDX website, and the eASY.KSEI website to fulfill the aspect of information disclosure.
25.	Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali. The Annual Report of a Public Company discloses the ultimate beneficial owners in the ownership of shares of the Public Company of at least 5% (five percent), in addition to disclosure of the ultimate beneficial owners in the ownership of shares of the Public Company through major and controlling shareholders.	Diterapkan Implemented	Perseroan mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan ini. The Company discloses the ultimate beneficial owners of the Company's share ownership as stated in this Annual Report.


DROPBOX
Gedung
WEGE CARES
Gedung



KEBERLANJUTAN
Sustainability

Perseroan menjalankan empat program Tanggung Jawab Sosial yang bertujuan untuk memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan, sebagai bagian dari komitmen WEGE terhadap pembangunan berkelanjutan.

The Company undertakes four Social Responsibility programs with the purpose of making a positive contribution to the society and environment, as part of WEGE's commitment to sustainable development.

Komitmen dan Kebijakan Pelaksanaan Program Keberlanjutan di Lingkup Perusahaan

Commitment and Policy for Implementing Sustainability Programs in the Company



WEGE HIJAU

Program keberlanjutan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) dilaksanakan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, sebagai bagian dari komitmen Perseroan terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Implementasi program ini bertujuan untuk memberikan manfaat yang seimbang di bidang ekonomi, sosial, lingkungan, serta hukum dan tata kelola. Dengan pendekatan yang terintegrasi, terarah, dan terukur, program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan WEGE tidak hanya memperhatikan dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari strategi bisnis Perseroan.

WEGE memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan, dengan senantiasa mempertimbangkan keberlanjutan usaha yang selaras dengan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penerapan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban WEGE kepada seluruh pemangku kepentingan, serta bagian dari upaya menjaga dan meningkatkan kualitas hidup secara berkesinambungan.

Sebagai entitas anak BUMN, WEGE berkomitmen untuk menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan secara berkesinambungan dengan mengacu pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), serta mematuhi hukum dan norma yang berlaku. WEGE juga mengedepankan prinsip-prinsip praktik usaha yang baik,

The sustainability program of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) is implemented through Social and Environmental Responsibility program, as part of the Company's commitment to the sustainable development. The implementation of this program aims to provide balanced benefits in the economic, social, environmental, and legal and governance sectors. With an integrated, targeted, and measurable approach, WEGE's Social and Environmental Responsibility program not merely pays attention to the positive impact on society and the environment, but can also be accounted for as part of the Company's business strategy.

WEGE has a strong commitment to making a positive contribution to society and the environment, by continuously considering business sustainability that is in conformity with economic, social, and environmental aspects. The implementation of the Social and Environmental Responsibility program is a form of WEGE's accountability to all stakeholders, as well as part of an initiative to maintain and improve the quality of life sustainably.

As a subsidiary of a BUMN, WEGE is committed to implementing the Social and Environmental Responsibility program sustainably by referring to the Sustainable Development Goals (SDGs), and complying with prevailing laws and norms. WEGE also prioritizes the principles of good business practices, social justice, environmental justice, and

keadilan sosial, keadilan lingkungan, dan tata kelola perusahaan yang transparan, guna mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik dari generasi ke generasi.

Dalam pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, WEGE memastikan bahwa tujuan dan target yang ditetapkan selaras dengan pencapaian SDGs dan pedoman ISO 26000: Guidance on Social Responsibility. Program ini juga mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan, dengan tujuan untuk menciptakan dampak positif yang luas, tidak hanya untuk kepentingan perusahaan, tetapi juga bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah operasional maupun secara nasional.

transparent corporate governance, in order to manifest a better quality of life from generation to generation.

In implementing the Social and Environmental Responsibility program, WEGE ensures that the goals and targets set are in conformity with the achievement of SDGs and ISO 26000 guidelines: Guidance on Social Responsibility. This program also integrates sustainability principles, with the aim of creating a broad positive impact, not only for the benefit of the company, but also for the community and environment nearby the operational area and nationally.

Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility Program

Perseroan menjalankan empat program Tanggung Jawab Sosial yang bertujuan untuk memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan, sebagai bagian dari komitmen WEGE terhadap pembangunan berkelanjutan. Adapun program-program tersebut adalah sebagai berikut:

1. WEGE Pintar
   Program ini fokus pada pemberian bantuan di bidang pendidikan. WEGE Pintar bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui pemberian beasiswa, bantuan sertifikasi kompetensi, serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Dengan program ini, Perseroan berupaya mendukung peningkatan akses dan kualitas pendidikan di berbagai daerah.

The Company undertakes four Social Responsibility programs with the purpose of making a positive contribution to the society and environment, as part of WEGE's commitment to sustainable development. The programs are as follows:

1. WEGE Pintar
   This program focuses on providing assistance in the field of education. WEGE Pintar aims to improve the quality of public education through the provision of scholarships, competency certification assistance, and the provision of educational facilities and infrastructure. With this program, the Company seeks to support increased access to and quality of education in various regions.



Bazar Cahaya Ramadan
4 April 2024

2. WEGE Sehat
Program ini fokus pada pemberian bantuan di bidang kesehatan. WEGE Sehat bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui penyediaan alat kesehatan, pengobatan gratis, serta program-program kesehatan lainnya yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kurang mampu, guna menciptakan lingkungan yang lebih sehat.

2. WEGE Sehat
This program focuses on providing assistance in the field of health. WEGE Sehat aims to improve the quality of public health through the provision of medical devices, free medical treatment, and other health programs designed to meet the needs of the less fortunate, in order to create a healthier environment.



Donor Darah dalam Rangka HUT ke-16 WIKA Gedung
16 Oktober 2024

3. WEGE Peduli
Program ini fokus pada pengentasan kemiskinan melalui pemberian bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. WEGE Peduli mencakup bantuan untuk korban bencana alam, santunan untuk fakir miskin, serta dukungan kepada anak-anak yatim piatu. Melalui program ini, Perseroan berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial.

3. WEGE Peduli
This program focuses on poverty alleviation by providing direct assistance to people in need. WEGE Peduli includes assistance for victims of natural disasters, compensation for the poor, and support for orphans. Through this program, the Company seeks to improve the quality of life of the community and reduce social inequality.



Santunan dan Buka Bersama Anak Yatim
28 Maret 2024

4. WEGE Hijau
   Program ini fokus pada pelestarian lingkungan melalui kegiatan penghijauan dan penanaman pohon. WEGE Hijau bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mengurangi dampak perubahan iklim dengan meningkatkan jumlah ruang hijau di berbagai wilayah, baik di sekitar area operasi perusahaan maupun di tempat-tempat lain yang membutuhkan.

4. Green WEGE
   This program focuses on environmental preservation through reforestation and tree planting activities. Green WEGE aims to maintain ecosystem balance and reduce the impact of climate change by increasing the number of green spaces in various areas, both around the company's operational areas and in other places that need it.



Panen Tanaman Pangan, Jasmine Integrated Farming, Kelurahan Antapani Tengah, Kota Bandung
5 Juni 2024

Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs)



Pilar Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Pillars of Social and Environmental Responsibility

4 PILAR TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

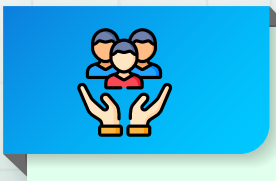
4 PILLARS OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY



Topik Pembangunan Keberlanjutan

Sustainable Development Topic

3 TOPIK PEMBANGUNAN KEBERLANJUTAN
3 TOPIC OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT



TOPIK SOSIAL
SOCIAL TOPICS

- Kepegawaian Kesehatan dan Keselamatan Kerja
- Pendidikan dan Pelatihan Karyawan

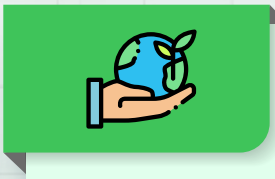
- Employment Occupational Health and Safety
- Employee Training and Education



TOPIK EKONOMI
ECONOMIC TOPICS

- Kinerja Ekonomi
- Dampak Ekonomi Tidak Langsung
- Praktik Pengadaan

- Economic Performance
- Indirect Economic Impacts
- Procurement Practices



TOPIK LINGKUNGAN
ENVIRONMENTAL TOPICS

- Material/Bahan Baku
- Air dan Air Limbah
- Energi
- Emisi
- Limbah

- Material/Raw Material
- Water and Wastewater
- Energy
- Emission
- Waste

Realisasi Penggunaan Dana Corporate Social Responsibility

Realization of The Use of Corporate Social Responsibility Funds

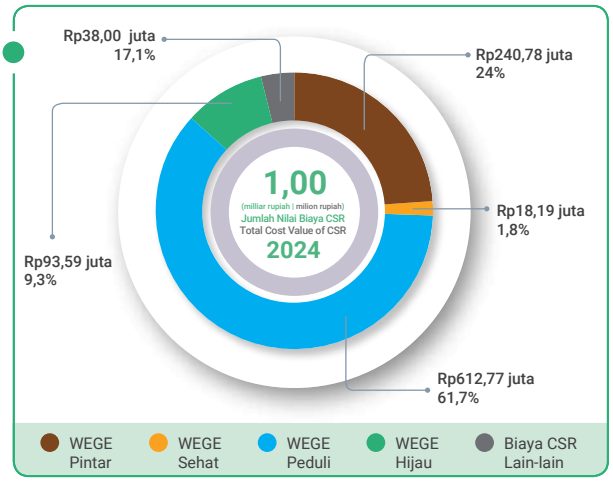
Perseroan secara berkelanjutan mengalokasikan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai bagian dari komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. Alokasi dana CSR ini bertujuan untuk mendukung berbagai inisiatif program-program yang memberikan manfaat positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan nilai-nilai perusahaan.

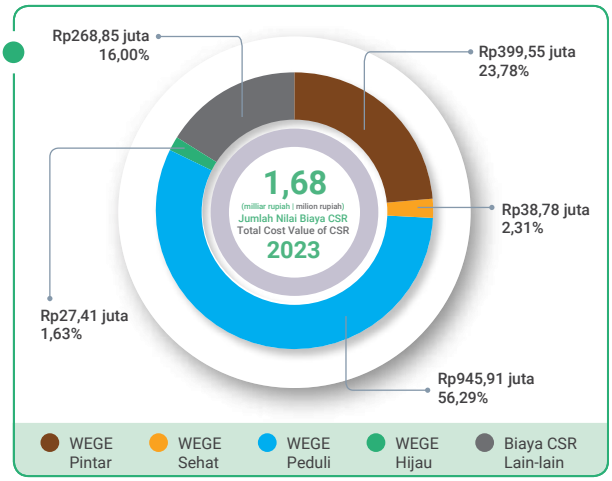
Realisasi penggunaan dana CSR untuk tahun 2024 terhadap program-program yang telah dijalankan adalah sebagai berikut:

The Company continuously allocates Corporate Social Responsibility (CSR) funds as part of its commitment to the social and environmental responsibility. The allocation of CSR funds aims to support various program initiatives that provide positive benefits to the community and the surrounding environment, in conformity with the principles of sustainability and company values.

The realization of the use of CSR funds for 2024 for programs that have been implemented is as follows:

Realisasi Penggunaan Dana CSR 2023-2024
Realization of CSR Fund Use 2023-2024





(Dalam Rupiah | In Rupiah)

Realisasi Dana Program CSR Realization of CSR Program Funds	2024		2023	
WEGE Pintar	240.785.000	24,00%	399.552.545	23,78%
WEGE Sehat	18.194.000	1,81%	38.785.000	2,31%
WEGE Peduli	612.776.000	61,07%	945.913.200	56,29%
WEGE Hijau	93.591.500	9,335	27.412.150	1,63%
Biaya CSR Lain-lain	38.000.000	3,79%	268.850.000	16,00%
Jumlah Realisasi Dana CSR	1.003.346.500	100,00%	1.680.512.895	100,00%

Laporan Keberlanjutan Tahun 2024 telah disusun dan diungkapkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, serta mengacu pada Indeks Standar GRI (Global Reporting Initiative), panduan ISO 26000: Guidance on Social Responsibility, Sustainable Development Goals (SDGs), dan prinsip-prinsip ESG (Environmental, Social, Governance).

The 2024 Sustainability Report has been prepared and disclosed in accordance with Financial Services Authority Regulation Number: 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, Financial Services Authority Circular Letter Number: 16/SEOJK.04/2021 concerning the Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies, and refers to the GRI (Global Reporting Initiative) Standard Index, ISO 26000 guidelines: Guidance on Social Responsibility, Sustainable Development Goals (SDGs), and ESG (Environmental, Social, Governance) principles.

"Informasi terkait upaya WEGE dalam mewujudkan keberlanjutan disajikan secara lengkap dalam Laporan Keberlanjutan Tahun 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini."
"Information related to WEGE's initiatives to realize sustainability is presented in full in the 2024 Sustainability Report, which is an integral part of this Annual Report."

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank





LAPORAN KEUANGAN
Financial Report

Laporan Keuangan Konsolidasian WEGE tahun 2024 telah disusun sesuai PSAK dan diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, dengan opini laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material.

The 2024 WEGE Consolidated Financial Statements have been prepared in accordance with PSAK (Indonesian Financial Accounting Standards) and audited by KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (a Public Accounting Firm), with the opinion that the consolidated financial statements present fairly, in all material respects.

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk
DAN ENTITAS ANAK

Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk
AND SUBSIDIARY

Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023

Daftar Isi

Halaman/ *Pages*

Table of Contents

Surat Pernyataan Direksi		***Directors' Statement Letter***
Laporan Auditor Independen		***Independent Auditor's Report***
Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023		***Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2024 and 2023***
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1	*Consolidated Statements of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3	*Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4	*Consolidated Statements of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5	*Consolidated Statements of Cash Flows*
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	6	*Notes to the Consolidated Financial Statements*

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk
Jl. DI Panjaitan Kav. 9, WIKA Tower I, 7th - 10th Floor, Jakarta 13340
corsec@wikagedung.co.id
+6221 8590 8862
www.wikagedung.co.id

SURAT PERNYATAAN DIREKSI ATAS TANGGUNG JAWAB UNTUK LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK
No. KU.02.09/A.DIR.00001.WEGE/2025

THE DIRECTORS' STATEMENT OF THE RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2024 AND 2023 PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk AND ITS SUBSIDIARIES

No. KU.02.09/A.DIR.00001.WEGE/2025

Kami yang bertanda tangan di bawah ini: / *We the undersigned:*

1.	Nama	Hadian Pramudita	*Name*
	Alamat Kantor	Gedung WIKA Lt.8-10, Jl.D.I. Panjaitan Kav 9 Cipinang Cimpedak Jatinegara Jakarta Timur	*Office Address*
	Alamat domisili sesuai KTP	Jl. Kemang Utara VIII No 46 ZZ RT. 05 RW. 04 Jakarta Selatan - 12730	*Domicile as Stated in ID Card*
	Nomor Telepon	021 - 80679200	*Phone Number*
	Jabatan	Direktur Utama/*President Director*	*Title*
2.	Nama	Hartanto Karti Raharjo	*Name*
	Alamat Kantor	Gedung WIKA Lt.8-10, Jl.D.I. Panjaitan Kav 9 Cipinang Cimpedak Jatinegara Jakarta Timur	*Office Address*
	Alamat domisili sesuai KTP	Timoho Regency No. C 5 Miliran UH 2 Umbulharjo, Kota Yogyakarta	*Domicile as Stated in ID Card*
	Nomor Telepon	081289177654	*Phone Number*
	Jabatan	Direktur/ *Director*	*Title*

Menyatakan bahwa: / *Declare that:*

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasiaan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk ("Perseroan") dan entitas anak ("bersama-sama disebut Grup"); / *We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk ("the Company") and its subsidiaries (together the "Group");*
2. Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia; / *The Group's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with generally accepted accounting standards in Indonesia;*
3. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup telah dimuat secara lengkap dan akurat; / *All information published in the Group's consolidated financial statements are complete and accurate;*
4. Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi yang tidak benar, dan kami tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup; / *The Group's consolidated financial statements do not contain misleading information, and we have not omitted any information or facts that would be material to the Group's consolidated financial statements;*
5. Kami bertanggung jawab atas pengendalian internal Grup. / *We are responsible for the Group's internal control.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. / *This statement letter is made truthfully.*

Atas Nama dan Mewakili Direksi/*For and on Behalf of the Directors*

Jakarta, 14 Maret 2025/*March 14, 2025*



Hadian Pramudita	**Hartanto Karti Raharjo**
Direktur Utama/*President Director*	Direktur/ *Director*

RSM

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

RSM Indonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340
F +62 21 5140 1350

www.rsm.id

Nomor/*Number* : 00182/2.1030/AU.1/03/1950-1/1/III/2025

Laporan Auditor Independen/ *Independent Auditor's Report*

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi/
The Shareholders, Board of Commissioners and Directors

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk dan entitas anaknya ("Grup") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk and its subsidiaries ("the Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at December 31, 2024 and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, consolidated changes in equity, and consolidated cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of material accounting policies.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at December 31, 2024, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, Registered Public Accountants is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

Licence: KMK No.477/KM.1/2015
Registered at the Indonesia Financial Services Authority (OJK)

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Jumlah Terpulihkan Nilai Pos Pekerjaan Dalam Proses Konstruksi (PDPK)

PDPK merupakan biaya yang terjadi dalam memenuhi kontrak dengan pelanggan yang diakui sebagai aset, yang berhubungan langsung dengan kontrak dimana Grup dapat mengidentifikasi secara spesifik, menghasilkan atau meningkatkan sumber daya Grup yang akan digunakan dalam memenuhi (atau terus memenuhi) kewajiban pekerjaan dalam masa depan dan diharapkan dapat dipulihkan. Grup menelaah jumlah terpulihkan PDPK setiap kali peristiwa atau perubahan keadaan menunjukkan bahwa nilai tercatat mungkin dapat diperoleh kembali. Grup membandingkan jumlah terpulihkan dengan nilai tercatat untuk mengukur penurunan nilai PDPK. Grup menelaah estimasi terpulihkan PDPK berdasarkan kondisi masing-masing proyek dengan mempertimbangkan data historis, asumsi atau ekspektasi kondisi masa depan. Perubahan probabilitas kegagalan untuk mengklaim dapat berdampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup mencatat PDPK sebesar Rp812.486.857.359.

Pengungkapan Grup mengenai PDPK dijelaskan dalam Catatan 2.n, 3, 13 dan 39 atas laporan keuangan konsolidasian.

Kami merespon hal audit utama dengan melakukan:

- Kami memperoleh pemahaman atas pengendalian dan proses manajemen untuk menentukan jumlah terpulihkan PDPK dan menilai risiko salah saji material yang melekat dengan mempertimbangkan tingkat ketidakpastian estimasi dan pertimbangan yang digunakan dalam menentukan asumsi yang akan diterapkan;
- Kami fokus pada pos PDPK terbesar dengan nilai pengujian lebih dari 55%;

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Recoverable Amount of Construction Work in Process (CWIP)

CWIP represents costs incurred in fulfilling contract with customers which recognised as an asset, that relate directly to a contract that the Group can specifically identify, generate or enhance resources of the Group that will be used in satisfying (or continuing to satisfy) performance obligations in the future and are expected to be recovered. The Group reviews the CWIP for recoverable amount whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may be recoverables. The Group compares the recoverable amount with the carrying amount to measure the impairment of CWIP. The Group reviews the estimated recoverable of CWIP based on the conditions of each project by considering historical data, assumptions or expectations of future conditions. The changes in the probability of failure to claim could have a material impact on the Group's consolidated financial statements.

On December 31, 2024, the Group recorded CWIP amounting to Rp812,486,857,359.

The Group's disclosures regarding CWIP are described in Notes 2.n, 3, 13 and 39 to the consolidated financial statements.

We addressed the key audit matter by performing:

- *We obtained an understanding on the management's controls and processes in determining the recoverable amount of CWIP and assessed inherent risk of material misstatement by considering the degree of estimation uncertainty and the judgement involved in determining assumptions to be applied;*
- *We focused on the highest CWIP balances with a test amount of more than 55%;*

- Berdasarkan uji petik, kami memeriksa dokumen pendukung PDPK;
- Untuk estimasi nilai terpulihkan, kami mengevaluasi asumsi yang diterapkan oleh manajemen berdasarkan pengalaman gagal klaim masa lalu.

Hal Lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk dan entitas anak tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan 31 Desember 2024, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan catatan atas investasi pada entitas anak (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang diasjikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

Informasi Lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan konsolidasian dan laporan auditor kami. Laporan tahunan tahun 2024 diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

- *Based on the sampling test, we examined the documents for obtaining the CWIP;*
- *For the estimation of recoverable amount, we evaluated the assumption from management based on past experience of failed claims.*

Other Matter

Our audit of the accompanying consolidated financial statements of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk and its subsidiary as of December 31, 2024 and for the year then ended was performed for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying financial information of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (parent entity), which comprises the statements of financial position as of December 31, 2024 and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended and notes on investment in subsidiary (collectively referred to as the "Parent Entity Financial Information"), which are presented as supplementary information to the above-mentioned consolidated financial statements, are presented for the purposes of additional analysis and are not required part of the above-mentioned consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information are the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the above-mentioned consolidated financial statements. The Parent Entity Financial Information have been subjected to the auditing procedures applied in the audit of the above-mentioned consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, the Parent Entity Financial Information is fairly stated, in all material respects, in relation to the above-mentioned consolidated financial statements taken as a whole.

Other Information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information contained in the annual finance report, but does not include the consolidated financial statements and our auditor's report thereon. The 2024 annual report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

Ketika kami membaca laporan tahunan tahun 2024, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat yang akan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

When we read the 2024 annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions based on the applicable laws and regulations, or Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

Sebagai bagian dan suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Lith Alfansuri
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1950/
Public Accountant License Number: AP.1950

Jakarta, 14 Maret 2025/*March 14, 2025*

00182

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Per 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk
AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS
OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2024 and 2023
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2024 Rp	2023 Rp	
ASET				***ASSETS***
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Kas dan Setara Kas	4, 39	1,030,732,161,959	1,036,429,035,233	*Cash and Cash Equivalent*
Piutang Usaha - Neto	5			*Trade Receivables - Net*
Pihak Berelasi	39	263,199,908,162	370,621,581,551	*Related Parties*
Pihak Ketiga		281,960,718,345	325,301,885,017	*Third Parties*
Piutang Retensi - Neto	6			*Retention Receivables - Net*
Pihak Berelasi	39	161,712,929,070	146,882,552,088	*Related Parties*
Pihak Ketiga		398,243,281,899	392,096,257,279	*Third Parties*
Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja	7			*Gross Amount Due from Customers*
Pihak Berelasi	39	195,121,768,325	236,857,959,026	*Related Parties*
Pihak Ketiga		241,398,057,671	299,572,229,472	*Third Parties*
Piutang Yang Belum Ditagih	8	9,360,579,793	3,263,782,490	*Unbilled Receivables*
Persediaan	9	350,027,596,576	401,632,058,715	*Inventories*
Pajak Dibayar di Muka	10.a	331,372,454,133	227,416,152,185	*Prepaid Taxes*
Uang Muka	11	124,034,728,295	157,090,267,991	*Advances*
Biaya Dibayar di Muka	12	215,023,413,531	93,166,783,879	*Prepaid Expenses*
Pekerjaan dalam Proses Konstruksi	13			*Construction Work in Progress*
Pihak Berelasi	39	374,776,508,359	312,033,165,810	*Related Parties*
Pihak Ketiga		437,710,349,000	258,706,741,504	*Third Parties*
Jumlah Aset Lancar		**4,414,674,455,118**	**4,261,070,452,240**	***Total Current Assets***
ASET TIDAK LANCAR				***NON-CURRENT ASSETS***
Piutang Lain-Lain	14			*Other Receivables*
Pihak Berelasi	39	165,407,608,905	140,612,553,689	*Related Parties*
Pihak Ketiga		1,472,904,624	2,095,250,645	*Third Parties*
Tanah Akan Dikembangkan	9	46,677,650,000	46,677,650,000	*Land For Development*
Penyertaan Saham	15	3,546,062,692	3,546,062,692	*Investment In Shares*
Properti Investasi	16	259,413,425,000	259,413,425,000	*Investment Property*
Aset Kerja Sama	17	237,488,457,311	248,334,690,059	*Assets of Co-operation*
Aset Tetap - Setelah Dikurangi Akumulasi Penyusutan	18	47,475,979,663	71,317,226,363	*Fixed Assets - Net of Accumulated Depreciation*
Aset Takberwujud- Setelah Dikurangi Akumulasi Amortisasi	19	13,527,567,059	--	*Intangible Assets - Net of Accumulated Amortization*
Investasi pada Entitas Asosiasi	20	18,236,878,682	23,027,110,013	*Investment in Associate*
Investasi pada Ventura Bersama	21	519,352,569,206	505,439,414,782	*Investment of Joint Ventures*
Jumlah Aset Tidak Lancar		**1,312,599,103,142**	**1,300,463,383,243**	***Total Non Current Assets***
JUMLAH ASET		**5,727,273,558,260**	**5,561,533,835,483**	***TOTAL ASSETS***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Per 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk
AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (Continued)
As of December 31, 2024 and 2023
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2024 Rp	2023 Rp	
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITES AND EQUITY***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PENDEK				***CURRENT LIABILITIES***
Pinjaman Bank Jangka Pendek	22			*Short-term Bank Loans*
Pihak Berelasi	39	350,000,000,000	103,000,000,000	*Related Parties*
Pihak Ketiga		22,000,000,000	26,500,000,000	*Third Parties*
Utang Usaha	23			*Trade Payables*
Pihak Berelasi	39	473,871,107,934	608,412,227,195	*Related Parties*
Pihak Ketiga		1,184,364,168,681	836,855,771,209	*Third Parties*
Beban Akrual	24	356,409,528,252	439,171,874,071	*Accrued Expenses*
Utang Pajak	10.b	8,004,172,611	11,336,389,129	*Tax Payables*
Liabilitas Pajak Penghasilan Final	10.c	47,860,115,224	99,056,659,752	*Final Income Tax Liabilities*
Liabilitas Jangka Pendek Yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun				*Current Portion of Long Term Liability -*
Uang Muka Pemberi Kerja dan Konsumen	25	15,829,560,667	2,070,019,625	*Advances from Project Owners and Consumers*
Pinjaman Bank	27, 39	9,417,600,000	8,938,000,000	*Bank Loan*
Utang Lain-lain	26			*Other Payables*
Pihak Berelasi	39	36,899,710,813	34,892,272,952	*Related Parties*
Pihak Ketiga		3,422,504,884	3,167,690,037	*Third Parties*
Pendapatan Diterima Di Muka		7,277,128,245	32,178,399,042	*Advances Received*
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		**2,515,355,597,311**	**2,205,579,303,012**	***Total Current Liabilites***
LIABILITAS JANGKA PANJANG				***NON CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas Jangka Panjang Setelah Dikurangi Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun				*Long-term Liability Net of Current Maturities*
Uang Muka Pemberi Kerja dan Konsumen	25	507,541,582,961	700,255,181,034	*Advances from Project Owners and Consumers*
Pinjaman Bank	27, 39	75,646,000,000	85,063,600,000	*Bank Loan*
Liabilitas Imbalan Kerja	28	22,759,500,319	11,888,656,207	*Employee Benefit Liabilities*
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		**605,947,083,280**	**797,207,437,241**	***Total Non Current Liabilities***
JUMLAH LIABILITAS		**3,121,302,680,591**	**3,002,786,740,253**	***TOTAL LIABILITES***
EKUITAS				***EQUITY***
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk				***Equity Attributable to Owner of the Parent Entity***
Modal Saham - Nilai Nominal Rp100				*Share Capital-par value Rp100*
Modal Dasar 38.000.000.000 saham				*Authorized Capital 38,000,000,000 shares*
Modal ditempatkan dan disetor - 9.572.000.000 saham	29	957,200,000,000	957,200,000,000	*Issued and Paid Up Capital 9,572,000,000 shares*
Tambahan Modal Disetor	30	524,082,899,858	524,082,899,858	*Additional Paid In Capital*
Saldo Laba				*Retained Earnings*
Ditentukan Penggunaannya	31	165,528,527,000	160,828,527,000	*Appropriated*
Belum Ditentukan Penggunaannya	31	963,245,785,686	909,438,080,813	*Unappropriated*
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lainnya	28	(6,088,098,420)	5,264,809,090	*Other Comprehensive Income (Loss)*
Subjumlah		2,603,969,114,124	2,556,814,316,761	*Subtotal*
Kepentingan Non Pengendali	33	2,001,763,545	1,932,778,469	*Non Controlling Interest*
JUMLAH EKUITAS		**2,605,970,877,669**	**2,558,747,095,230**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**5,727,273,558,260**	**5,561,533,835,483**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / *Notes*	2024 Rp	2023 Rp	
PENDAPATAN	34	3,673,527,175,483	3,979,714,569,719	***REVENUES***
BEBAN POKOK PENDAPATAN	35	(3,366,025,710,507)	(3,676,495,523,697)	***COST OF REVENUES***
LABA BRUTO		**307,501,464,976**	**303,219,046,022**	***GROSS PROFIT***
Beban Usaha	36	(114,423,879,780)	(73,673,030,567)	*Operating Expenses*
Pendapatan Lainnya	37	135,058,450,113	123,376,660,331	*Other Income*
Beban Lainnya	37	(230,447,912,801)	(120,749,400,901)	*Other Expenses*
Beban Keuangan	38	(28,254,570,874)	(66,403,042,574)	*Financial Expense*
Beban Pajak Penghasilan Final	10.c	(96,407,074,797)	(114,629,509,354)	*Final Income Tax Expenses*
Bagian Rugi Entitas Asosiasi	20	(4,790,231,331)	(14,624,400,396)	*Share in Loss on Associate*
Bagian Laba Ventura Bersama	21	99,664,321,780	10,765,889,081	*Share in Profit on Joint Venture*
Laba (Rugi) Selisih Kurs	40	56,682,663	(782,061,194)	*Foreign Exchange Gain (Loss)*
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		**67,957,249,949**	**46,500,150,448**	***PROFIT BEFORE INCOME TAX***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	10.d	**--**	**--**	***INCOME TAX EXPENSES***
LABA NETO TAHUN BERJALAN		**67,957,249,949**	**46,500,150,448**	***NET PROFIT FOR THE YEAR***
RUGI KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK				***OTHER COMPREHENSIVE LOSS AFTER TAX***
Pos yang Tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi				***Item that will Not be Reclassified to Profit or Loss***
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti	28	(11,352,907,510)	(4,595,188,378)	*Remeasurement on Defined Benefit Plans*
Jumlah Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		**(11,352,907,510)**	**(4,595,188,378)**	***Total Item that Will Not Be Reclassified Subsequently to Profit or Loss***
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**56,604,342,439**	**41,904,962,070**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				***INCOME FOR THE CURRENT YEAR ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik Entitas Induk		67,888,264,873	46,702,158,528	*Equity Holders of The Parent Entity*
Kepentingan Non Pengendali	33	68,985,076	(202,008,080)	*Non Controlling Interest*
JUMLAH		**67,957,249,949**	**46,500,150,448**	***TOTAL***
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik Entitas Induk		56,535,357,363	42,106,970,150	*Equity Holders of The Parent Entity*
Kepentingan Non Pengendali	33	68,985,076	(202,008,080)	*Non Controlling Interest*
JUMLAH		**56,604,342,439**	**41,904,962,070**	***TOTAL***
LABA BERSIH PER SAHAM	32	**7.09**	**4.88**	***NET INCOME PER SHARE***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / *Notes*	Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk / *Attributable to Owners of the Parent*									
				Saldo Laba / *Retained Earnings*		Penghasilan Komprehensif Lain / *Other Comprehensive Income*					
		Modal Ditempatkan dan Disetor / *Subscribed and Paid-In Capital* Rp	Tambahan Modal Disetor / *Additional Paid-in Capital* Rp	Ditentukan Penggunaannya / *Appropriated* Rp	Belum Ditentukan Penggunaannya / *Unappropriated* Rp	Keuntungan (Kerugian) Aktuarial atas Program Imbalan Pasti / *Actuarial Gain (Loss) of Defined Benefits Plans* Rp	Keuntungan Atas Nilai Pasar Saham / *Gain on Share Market Value* Rp	Jumlah / *Total* Rp	Kepentingan Non Pengendali / *Non Controlling Interest* Rp	Jumlah Ekuitas / *Total Equity* Rp	
Saldo per 31 Desember 2022		**957,200,000,000**	**524,082,899,858**	**137,664,287,000**	**909,064,402,285**	**9,644,510,534**	**215,486,934**	**2,537,871,586,611**	**2,134,786,549**	**2,540,006,373,160**	***Balance as of December 31, 2022***
Dividen	31	--	--	--	(23,164,240,000)	--	--	(23,164,240,000)	--	(23,164,240,000)	*Dividends*
Cadangan	31	--	--	23,164,240,000	(23,164,240,000)	--	--	--	--	--	*Reserve*
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan		--	--	--	46,702,158,528	(4,595,188,378)	--	42,106,970,150	(202,008,080)	41,904,962,070	*Total Comprehensive Income for the Current Year*
Saldo per 31 Desember 2023		**957,200,000,000**	**524,082,899,858**	**160,828,527,000**	**909,438,080,813**	**5,049,322,156**	**215,486,934**	**2,556,814,316,761**	**1,932,778,469**	**2,558,747,095,230**	***Balance as of December 31, 2023***
Dividen	31	--	--	--	(9,380,560,000)	--	--	(9,380,560,000)	--	(9,380,560,000)	*Dividends*
Cadangan	31	--	--	4,700,000,000	(4,700,000,000)	--	--	--	--	--	*Reserve*
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan		--	--	--	67,888,264,873	(11,352,907,510)	--	56,535,357,363	68,985,076	56,604,342,439	*Total Comprehensive Income for the Current Year*
Saldo per 31 Desember 2024		**957,200,000,000**	**524,082,899,858**	**165,528,527,000**	**963,245,785,686**	**(6,303,585,354)**	**215,486,934**	**2,603,969,114,124**	**2,001,763,545**	**2,605,970,877,669**	***Balance as of December 31, 2024***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS
KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk
AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS
OF CASH FLOWS
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / *Notes*	2024 Rp	2023 Rp	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan Kas dari Pelanggan		3,438,249,913,161	3,806,752,913,466	*Cash Received from Customers*
Pembayaran Kas kepada Pemasok		(3,357,436,333,564)	(3,074,324,066,846)	*Cash Payments to Suppliers*
Pembayaran Pajak Penghasilan		(222,969,376,324)	(91,861,198,820)	*Payment For Income Tax*
Pembayaran Beban Usaha		(114,423,879,780)	(71,130,491,661)	*Payments for Operating Expenses*
Pembayaran Beban Lain-lain		--	(1,699,654,400)	*Payments for Other Expenses*
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi		**(256,579,676,507)**	**567,737,501,739**	***Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Pengurangan Investasi Ventura Bersama	21	78,441,800,867	51,304,037,443	*Deduction of Investment in Joint Ventures*
Penambahan Investasi Ventura Bersama	21	(13,525,941,367)	(32,042,728,639)	*Addition of Investment in Joint Ventures*
Pendapatan Bunga		11,066,906,027	13,889,936,325	*Interest Income*
Penambahan Aset Tetap	18	(2,587,808,524)	(15,680,029,859)	*Fixed Assets Acquisition*
Penambahan Aset Takberwujud	19	(3,020,977,696)	--	*Intangible Assets Acquisition*
Pengurangan Investasi Lainnya		662,959,464	611,878,055	*Deductions in Other Investments*
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Investasi		**71,036,938,771**	**18,083,093,325**	***Net Cash Provided by Investing Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan Pinjaman Bank	22, 41	463,186,818,225	362,500,000,000	*Receipts of Bank Loan*
Pembayaran Pinjaman Bank	22, 41	(220,686,818,225)	(733,000,000,000)	*Payments of Bank Loan*
Pembayaran Pinjaman Bank Jangka Panjang	27, 41	(8,938,000,000)	(7,030,500,000)	*Payments of Long term - Bank Loan*
Penerimaan Pinjaman Induk	39, 41	1,828,139,889	2,144,497,475	*Receipts of Parent's Loan*
Pinjaman kepada Entitas Asosiasi	14, 39	(18,000,000,000)	--	*Loan to Associates*
Pembayaran Dividen	31	(9,380,560,000)	(23,164,240,000)	*Payment of Dividends*
Pembayaran Bunga Pinjaman		(28,254,570,874)	(66,403,042,574)	*Interest Payments*
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		**179,755,009,015**	**(464,953,285,099)**	***Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities***
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS		**(5,787,728,721)**	**120,867,309,965**	***NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENT***
PENGARUH PERUBAHAN KURS VALUTA ASING KAS DAN SETARA KAS		**90,855,447**	**(782,061,194)**	***EFFECT OF FOREIGN EXCHANGES RATES IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		**1,036,429,035,233**	**916,343,786,462**	***CASH AND CASH EQUIVALENT AT BEGINNING OF YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	4	**1,030,732,161,959**	**1,036,429,035,233**	***CASH AND CASH EQUIVALENT AT END OF YEAR***

Lihat Catatan 41 atas laporan keuangan untuk pengungkapan informasi tambahan arus kas

See Note 41 to the financial statement for supplemental disclosures of cash flow information

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole

1. Umum

a. Pendirian Perusahaan

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk ("Perusahaan") berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta No. 43 tanggal 24 Oktober 2008 yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian ini telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-92223.AH.01.01 tanggal 1 Desember 2008.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir terkait dengan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 3 tanggal 16 Mei 2023 yang dibuat dihadapan Diah Guntari L. Soemarwoto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 22 Mei 2023 No. AHU-0092341.AH.01.11.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan sebagai berikut:

a. industri konstruksi dan engineering;
b. jasa pemborongan dengan pola progress termin maupun *turnkey/build-operate transfer*;
c. pengelolaan dan penyewaan gedung/kawasan niaga terpadu;
d. perdagangan dan pemeliharaan peralatan serta material konstruksi;
e. layanan peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi dan *engineering* pada khususnya sesuai dengan prinsip perseroan terbatas;
f. sebagai pengembang realti;
g. sebagai pengembang properti;
h. industri pendukung konstruksi bangunan gedung;
i. sebagai investor baik langsung maupun melalui penyertaan saham pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
j. penyediaan ruang pada sarana infrastruktur transportasi bandar udara, pelabuhan, transportasi masal, dan infrastruktur sosial; dan
k. pembangunan dan pengembangan kawasan.

1. General

a. The Company's Estabilishment

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk ("the Company") is domicile in South Jakarta, established by Deed No. 43, dated October 24, 2008 made in the presence of Imas Fatimah, S.H., Notary in Jakarta. The Deed of Establishment has been approved by Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with its Decision Letter No. AHU-92223.AH.01.01 on December 1, 2008.

The Company's Articles of Association was amended several times, the latest amendment related to the Company's changes in Article 3 of Association as set forth in the Deed No. 3 dated May 16, 2023 made in the presence of Diah Guntari L. Soemarwoto, S.H., Notary in Jakarta, which recorded in the Legal Administration System database of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its letter dated May 22, 2023 No. AHU-0092341.AH.01.11.

According to Article 3 of the Company's Article of Association, aims and objectives and business activities of the Company are as follows:

a. construction and engineering;
b. contractor service with terms, turnkey, or build-operate-transfer pattern;
c. management and rental of business district;
d. trading and maintaining construction material;
e. improvement service on construction and engineering according to company principles;
f. realty developer;
g. property developer;
h. supporting industry of building construction;
i. as direct investor or indirect investor through share ownership and/or joint venture;
j. section provider on infrastructure of airports, ports, mass transportation, and social infrastructure; and
k. construction and development of district.

Kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan saat ini adalah jasa konstruksi, properti dan pracetak.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk merupakan entitas induk terakhir dari Perusahaan.

Kantor Pusat Perusahaan beralamat di Jl. DI Panjaitan Kav.9, Jakarta Timur, dengan lokasi kegiatan utama di seluruh Indonesia. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2009.

Penawaran Umum Perdana Perusahaan
Penawaran umum perdana Perusahaan sejumlah 2.872.000.000 saham biasa kepada masyarakat telah dinyatakan efektif sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. S-444/D.04/2017 tanggal 20 November 2017, dan selanjutnya saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 November 2017.

The current business activities of the Company are in construction services, real estate (developer) and precast.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk is the ultimate parent company of the Company.

The Company's head office is located at Jl. DI Panjaitan Kav. 9, East Jakarta, with the main activities located throughout Indonesia. The Company started its operational activities commercially in 2009.

The Company's Initial Public Offering
The Company's initial public offering of 2,872,000,000 shares was declared effective by the Board of Commissioners of the Financial Services Authority in his Decree No. S-444/D.04/2017 dated November 20, 2017, and listed in the Indonesian Stock Exchange on November 30, 2017.

b. Susunan Pengurus
Dewan Komisaris dan Direksi
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas No. 15 tanggal 27 Mei 2024 dan No. 3 tanggal 16 Mei 2023, dibuat di hadapan Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0207454 tanggal 29 Mei 2024 dan No. AHU-0092341.AH.01.11 tanggal 22 Mei 2023, susunan pengurus Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, sebagai berikut:

b. Management of the Company
Board of Commisioners and Directors
According to the Deed of the General Meeting of Company No. 15 dated May 27, 2024 and No. 3 dated May 16, 2023, made in the presence of Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto, S.H., the Notary in Jakarta which notice has been approved by the Ministry of Law and Human Right Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.09-0207454 dated May 29, 2024 and No. AHU-0092341.AH.01.11 dated May 22, 2023, the composition of the board of the Company on December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024	2023	
Dewan Komisaris:			***Board of Commisioners:***
Komisaris Utama*	Joseph Prajogo	Sumadi	*President Commissioner*
Komisaris Independen	Joseph Prajogo	Joseph Prajogo	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Taufan Gestoro	Ance	*Independent Commissioner*
Komisaris	Suli Fatimah	Suli Fatimah	*Commissioner*
Komisaris	Danis Hidayat Sumadilaga	Danis Hidayat Sumadilaga	*Commissioner*
Dewan Direksi:			***Board of Directors:***
Direktur Utama	Hadian Pramudita	Hadian Pramudita	*President Director*
Direktur QHSE dan Pemasaran	Tomo Dwi Hasputro W.	Dwi Purnomo	*Director of QSHE and Marketing*
Direktur Operasi 1	Bagus Tri Setyana	Bagus Tri Setyana	*Director of Operations 1*
Direktur Operasi 2	Dwi Purnomo	Akhmadi Tricahyono	*Director of Operations 2*
Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko	Hartanto Karti Raharjo	Syailendra Ogan	*Director of Finance, Human Capital and Risk Management*

*Plt Komisaris Utama

**Acting President Commissioner*

Jumlah Remunerasi Direksi dan Komisaris Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Commissioners and Directors Remuneration for the years ended December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Komisaris			***Commissioners***
Imbalan Kerja Jangka Pendek	4,946,388,404	5,249,569,184	*Short Term Benefit*
Imbalan Pascakerja	326,971,562	473,470,699	*Post-employment Benefit*
Jumlah	**5,273,359,966**	**5,723,039,883**	***Total***
Direksi			***Directors***
Imbalan Kerja Jangka Pendek	11,238,346,184	9,678,348,720	*Short Term Benefit*
Imbalan Pascakerja	828,312,521	1,350,734,213	*Post-employment Benefit*
Jumlah	**12,066,658,705**	**11,029,082,933**	***Total***

Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.SK.02.01/A.KOM.WG.01837/2024 tanggal 13 Maret 2024 dan No.SK.02.01/A.KOM.WG.02888/2023 tanggal 7 Juni 2023 tentang Pengangkatan Penggantian Organ Komite Audit Perusahaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Audit Committee

Based on the Decree of Board of Commissioners No.SK.02.01/A.KOM.WG. 01387/2024 dated March 13, 2024 and No.SK.02.01/A.KOM.WG.02888/2023 dated June 7, 2023 regarding the Appointment of Replacement of the Company's Audit Committee as of December 31, 2024 and 2023 are as follow:

	2024	2023	
Ketua	Joseph Prajogo	Joseph Prajogo	*Chairman*
Anggota	Taufan Gestoro	Danis H. Sumadilaga	*Member*
Anggota	Darawati	Darawati	*Member*

Audit Internal

Dalam memastikan operasional Perusahaan berjalan sesuai dengan Prosedur Operasi Standar, diperlukan fungsi Audit Internal yang bekerja secara independen membantu Direktur Utama dalam pengawasan dan pengendalian. Fungsi audit internal Perusahaan dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern ("SPI").

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.SK.02.01/A.DIR.WG.3603/2021 tanggal 21 Mei 2021 kepala SPI per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Andi Sugiarto.

Internal Audit

To ensure that the Company's operational activities comply with the Standard Operating Procedure requires the SPI functions that independently assist the President Director in supervision and control. Internal Audit function carried out by the Internal Audit Unit ("SPI").

Based on a Decree of Board of Directors No.SK.02.01/A.DIR.WG.3603/2021 dated May 21, 2021 head of SPI as of December 31, 2024 and 2023 is Andi Sugiarto.

Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan No.SK.02.01/A.DIR.WG.6328/2022 tanggal 27 Juli 2022 tentang Penempatan dan Pengangkatan Pejabat-pejabat di Lingkungan Perusahaan, sekretaris perusahaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Purba Yudha Tama.

Corporate Secretary

Based on the Decree of the Company's Board of Directors No.SK.02.01/A.DIR.WG.6328/2022 dated July 27, 2022 regarding on Placement and Appointment of the Officials of the Company, the corporate secretary as of December 31, 2024 and 2023 is Purba Yudha Tama.

Personalia
Jumlah pegawai (tidak diaudit) Perusahaan dan entitas anak per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebanyak 500 dan 525.

Employees
The number of employees (unaudited) of the Company and subsidiary as of December 31, 2024 and 2023 amounted to 500 and 525, respectively.

c. Entitas Anak
Perusahaan memiliki secara langsung lebih dari 50% saham entitas anak, yaitu:

c. Subsidiaries
The Company directly owned more than 50% shares on subsidiary as follows:

Entitas Anak / *Subsidiary*	Jenis Usaha / *Type of Business*	Tahun Mulai Beroperasi Komersial / *Start of Commercial Operations*	Persentase Kepemilikan / *Percentage of Ownership* 2024 %	Persentase Kepemilikan / *Percentage of Ownership* 2023 %	Jumlah Aset (Sebelum Eliminasi) / *Total Assets (Before Elimination)* 2024 Rp	Jumlah Aset (Sebelum Eliminasi) / *Total Assets (Before Elimination)* 2023 Rp
Kepemilikan Langsung/ *Direct Ownership*						
PT Wege Solusi Proklamasi (WSP)	Konsesi/ *Concession*	2019	90	90	157,866,279,953	164,292,421,749

PT Wege Solusi Proklamasi ("WSP")
PT Wege Solusi Proklamasi untuk selanjutnya disebut dengan WSP, didirikan di Jakarta dengan Akta No. 85 tanggal 28 Mei 2019 ("Akta No. 85"), dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

PT Wege Solusi Proklamasi ("WSP")
PT Wege Solusi Proklamasi hereinafter referred to a WSP established in Jakarta based on Deed No.85 on May 28, 2019 ("Deed No. 85"), made in the presence of Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta.

WSP mulai beroperasi secara komersial tahun 2019.

WSP started its operational activities commercially in 2019.

Berdasarkan Anggaran Dasar WSP, struktur permodalan dan susunan pemegang saham WSP adalah sebagai berikut:

According to WSP Articles of Association, the capital structure and shareholders of WSP are as follows:

Pemegang Saham/ *Shareholders*	Saham/ *Shares*	Rupiah Penuh/ *Full Rupiah*	%
Modal Dasar/*Authorized Capital*	100,000	100,000,000,000	
Modal ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Paid-in Capital* :			
- PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	22,500	22,500,000,000	90.00
- PT Wijaya Karya Pracetak Gedung	2,500	2,500,000,000	10.00
Jumlah / *Total*	**25,000**	**25,000,000,000**	**100.00**
Saham dalam Portepel / *Portofolio Stock*	75,000	75,000,000,000	

Ikhtisar Data Keuangan / ***Summary of Financial Information***

	2024 Rp	2023 Rp	
Jumlah Aset	157,866,279,953	164,292,421,749	*Total Assets*
Jumlah Liabilitas	137,314,562,101	144,430,554,659	*Total Liabilities*
Jumlah Ekuitas	20,551,717,852	19,861,867,090	*Total Equity*

Perusahaan dan Entitas Anak, selanjutnya disebut sebagai "Grup".

The Company and Subsidiary, hereinafter reffered as "The Group".

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material / *2. Material Accounting Policies Information*

a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI), serta peraturan Pasar Modal yang berlaku antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan, keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik.

a. Compliance with the Financial Accounting Standards (SAK)

The consolidated financial statements prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standard Board – Indonesian Institute of Accountant (DSAK – IAI), and regulations in the Capital Market including Regulations of Financial Sevices Authority/Capital Market and Supervisory Board and Financial Institution (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 regarding guidelines for the presentation of financial statements, decree of Chairman of Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 regarding presentation and disclosure of financial statements of the issuer or public company.

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

Laporan arus kas konsolidasian disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan.

Untuk tujuan laporan arus kas konsolidasian, kas mencakup kas, bank dan investasi jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang, setelah dikurangi cerukan dan tidak dijaminkan.

Laporan keuangan konsolidasian dinyatakan dalam mata uang Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Grup.

b. The Basis of Preparation of Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements have been prepared and presented based on going concern assumption and accrual basis of accounting, except for the consolidated statements of cash flows. Basis of measurement in preparation of these consolidated financial statements is the historical costs concept, except for certain accounts, which have been prepare based on other measurements as described in their respective policies. Historical cost based on the fair value of the consideration given in exchange for assets.

The consolidated statements of cash flows are prepared based on direct method and classified into operating, investing, and financing activities.

For the purpose of the consolidated statement of cash flows, cash includes cash on hand, cash in banks and short-term investments of maturity of three months or less from the date of placement, net of overdrafts and not pledged as a collateral.

The consolidated financial statements are denominated in Rupiah currency, which is the functional currency of Group.

c. Prinsip-prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Grup seperti disebutkan pada Catatan 1.c.

Entitas anak adalah suatu entitas dimana Perusahaan memiliki pengendalian. Perusahaan mengendalikan entitas lain ketika perusahaan terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas.

Entitas anak dikonsolidasikan secara penuh sejak tanggal pengendalian dialihkan kepada Perusahaan. Entitas anak tidak dikonsolidasikan sejak tanggal Perusahaan kehilangan pengendalian.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Ketika pengendalian atas entitas anak hilang, bagian kepemilikan yang tersisa di entitas tersebut diukur kembali pada nilai wajarnya dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.

Kebijakan akuntansi yang dipakai dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian telah diterapkan secara konsisten oleh entitas anak, kecuali dinyatakan secara khusus.

Seluruh transaksi, saldo keuntungan dan kerugian Perusahaan dan entitas anak yang belum direalisasikan dan material, dieliminasi.

Perusahaan mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan non pengendali memiliki saldo defisit. Perusahaan menyajikan kepentingan non pengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Jika Perusahaan kehilangan pengendalian, maka Perusahaan:

(a) Menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;

c. The Principles of Consolidation

The consolidated financial statements include the financial statements of Group as described in Note 1.c.

Subsidiary is an entity over which the Company has control. The Company controls an entity when the Company is exposed or has the rights to variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity.

Subsidiary is fully consolidated since the date when the control transferred to the Company. Subsidiary is no consolidated anymore from the date when that control ceases.

Changes in the ownership of the parent entity in the subsidiary that do not result in loss of control is accounted for as equity transactions. When control over a previous subsidiary is lost, the remaining interest in entity is remeasured at fair value and the resulting gain or loss are recognized directly in equity and attributed to the owners of the parent.

The accounting policies used in preparing the consolidated financial statements are consistently applied by the subsidiary, unless otherwise stated.

All material intercompany transaction, unrealized surplus or deficits on transaction between the Company and its subsidiary, are eliminated.

The Company attributed the profit or loss and each component of other comprehensive income to the owners of the parent and non-controlling interest even though this results in the non controlling interests having a deficit balance. The Company presents non controlling interest in equity in the consolidated statement of financial position, separately from the equity owners of the parent.

If the Company loses control, the Company:

(a) Derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts at the date when control is lost;

(b) Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan non pengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan non pengendali);
(c) Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
(d) Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;
(e) Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak;
(f) Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.

(b) Derecognizes the carrying amount of any non controlling interests in the former subsidiary at the date when control is lost (including any components of other comprehensive income attributable to them);
(c) Recognizes the fair value of the consideration received, if any, from the transaction, event or circumstances that resulted in the loss of control;
(d) Recognizes any investment retained in the former subsidiary at fair value at the date when control is lost;
(e) Reclassifies to profit or loss, or transfer directly to retained earnings if required by other SAKs, the amount recognized in other comprehensive income in relation to the subsidiary;
(f) Recognizes any resulting difference as a gain or loss in the profit or loss attributable to the parent entity.

d. Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Amendemen dan revisi atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan tentang Kewajiban Diklasifikasikan Sebagai Jangka Pendek atau Panjang;
- Amendemen PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan tentang Liabilitas Jangka Panjang Dengan Kovenan;
- Amendemen PSAK 116: Liabilitas Sewa dalam Jual dan Sewa – Balik;
- Amendemen PSAK 207: Laporan Arus Kas dan PSAK 107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Pengaturan Pembiayaan Pemasok;
- Revisi PSAK 401: Penyajian Laporan Keuangan Syariah; dan
- Revisi PSAK 409: Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah

Implementasi dan standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

d. New and Revised Statements and Interpretation of Financial Accounting Standards Effective in the Current Year

Amendment and revised to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2024, with early adoption is permitted, are as follows:

- *Amendments PSAK 201: Presentation of Financial Statements regarding Classification of Liabilities as Current or Non-current*
- *Amendments PSAK 201: Presentation of Financial Statements related to Non-Current Liabilities with Covenants;*
- *Amendment to PSAK 116: Lease Liability in a Sale and Leaseback;*
- *Amendments PSAK 207: Statement of Cash Flows and PSAK 107: Financial Instrument: Disclosure regarding Supplier Finance Agreement;*
- *Revised PSAK 401: Presentation of Shariah Financial Statements; and*
- *Revised PSAK 409: Accounting of Zakah, Infaq, and Sadaqah.*

The implementation of the above standards had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial years.

e. Transaksi dan Saldo Dalam Valuta Asing

Transaksi dalam valuta asing dicatat dalam mata uang Rupiah dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi.

Saldo aset dan liabilitas moneter dalam valuta asing pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal posisi keuangan. Selisih kurs yang terjadi dicatat sebagai laba (rugi) selisih kurs tahun yang bersangkutan.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 nilai kurs yang digunakan adalah sebagai berikut:

e. Foreign Currency Transactions and Balances

Transactions in foreign currencies recorded in Rupiah at the prevailing rate at the time of transactions.

At the date of the consolidated statement of financial position, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies adjusted to reflect the exchange prevailing middle rates of Bank Indonesia at such date. The resulting exchange differences recorded as gain (loss) on foreign exchange for the year.

As of December 31, 2024 and 2023 the exchange rates used are as rate follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
1 Dolar Amerika Serikat (USD)	16,162	15,416	*1 United States Dollar*

f. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor.

1) Orang atau anggota keluarga terdekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   b. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   c. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
2) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak saling berelasi dengan entitas lainnya);
   b. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, dimana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
   c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
   d. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;

f. Transactions with Related Parties

Related parties is the person or entity that is related to the reporting entity.

1) A person or a close members to the persons family is related to the reporting entity if that person:
   a. Has control or joint control over the reporting entity;
   b. Has significant influence over the reporting entity; or
   c. Is a member of the key management personnel of the reporting entity or the parent entity of the reporting entity.
2) An entity is related to the reporting entity if any of the following condition applies:
   a. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary, and fellow subsidiaries is related to the others);
   b. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);
   c. Both of these entities are joint ventures of the same third party;
   d. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;

e. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasikan dalam nomor (1);
g. Orang yang diidentifikasikan dalam nomor (1) (a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
h. Entitas, atau anggota dari kelompok dimana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

e. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;
f. The number is controlled or jointly controlled by a person who identified in the (1);
g. A person identified in point (1) (a) has significant influence over the entity or the key management personnel of the entity (or the entity's parent entity); or
h. The entity, or any members of the group which it is a part, provides key management personnel service to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah mengacu kepada pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan pemegang saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan yang relevan.

A government-related entity is an entity that is controlled, jointly controlled or significant influence by a government. Government refers to government, government agencies and similar bodies whether local, national or international.

Government related entity could be an entity, which is controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance that represents the shareholders of the entity or an entity controlled by the Government of Republic of Indonesia, represented by the Ministry of SOE as a shareholder's representative.

All significant transactions and balances with related parties are disclose in the relevant notes.

g. Kas dan Setara Kas
Kas dan Setara Kas termasuk kas, kas di bank (rekening giro), dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

g. Cash and Cash Equivalents
Cash and Cash Equivalent are cash on hand, cash in banks (demand deposits), and time deposits with maturity periods of 3 months or less at the time of placement that are not use as collateral or are not restricted.

h. Piutang Retensi
Piutang retensi merupakan piutang Grup kepada pemberi kerja yang akan dilunasi setelah penyelesaian kontrak atau pemenuhan kondisi yang ditentukan kontrak. Piutang retensi dicatat pada saat pemotongan sejumlah

h. Retention Receivable
Retention receivable represents receivable of the Group from owner of the project which will be settled after the completion of the contract or fulfillment of the contractual terms. Retention receivable is recorded when certain percentage

persentase tertentu dari setiap tagihan termin untuk ditahan oleh pemberi kerja sampai suatu kondisi setelah penyelesaian kontrak dipenuhi.

deduction is applied in every billing which retained by the owner of project up to certain condition after completion of the contract has been met.

i. Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja

Tagihan bruto kepada pemberi kerja merupakan piutang Grup yang berasal dari pekerjaan kontrak konstruksi yang dilakukan namun pekerjaan yang dilakukan masih dalam pelaksanaan. Tagihan bruto disajikan sebesar selisih antara biaya yang terjadi ditambah laba yang diakui dikurangi dengan kerugian yang diakui dan termin.

i. Gross Amount Due from Customer

Gross amount due from customers represents the receivables of the Group originated from construction of contract in progress. Gross amount due from customers is presented as the net amount of costs incurred plus recognized profits, less the sum of recognized losses and progress billings.

Tagihan bruto kepada pemberi kerja diakui sebagai pendapatan sesuai dengan metode persentase penyelesaian yang dinyatakan dalam berita acara penyelesaian pekerjaan, dimana faktur belum dapat ditagihkan karena perbedaan antara tanggal berita acara kemajuan (*progress*) fisik dengan pengajuan penagihan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Gross amount due from customers is recognized as revenue based on the percentage of completion method which is stated on the certificate of work completion, while the invoice is still unbilled due to the difference between the date of physical progress certificates and the submission of billing on the consolidated statement of financial position date.

j. Persediaan

Persediaan disajikan sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai bersih yang dapat direalisasikan.

j. Inventories

Inventories are recognized at the lower of cost and realizable value.

Persediaan Bahan untuk Konstruksi

Bahan yang dibeli dicatat sebagai persediaan bahan untuk konstruksi, setiap pengambilan bahan (dengan Bon Pemakaian Bahan) dicatat sebagai biaya bahan pada periode yang bersangkutan dengan menggunakan metode harga rata-rata bergerak. Setiap akhir periode Grup melakukan *stock opname* persediaan dan diadakan penyesuaian bila terjadi selisih antara nilai buku dan fisik.

Inventory of Construction Materials

Materials purchased for construction projects are recorded as project's material inventories, each use of material (with Material Consumption Voucher) are recorded as project's material expenses for the relevant period using moving average method. At end of period the Group does inventory taking, and will adjust differences between inventory records and physical existence.

Persediaan Aset Real Estat

Aset real estat terdiri dari tanah belum dikembangkan yang dinyatakan sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah.

Real Estate Assets Inventory

Real estate assets consists of undeveloped land that stated at cost and net realizable value, whichever is lower.

Biaya perolehan tanah yang belum dikembangkan meliputi biaya pra-perolehan dan perolehan tanah. Biaya perolehan akan dipindahkan ke tanah yang sedang dikembangkan pada saat pengembangan tanah akan dimulai atau dipindahkan ke bangunan yang sedang dikonstruksi pada saat tanah tersebut siap dibangun.

The cost of land for development consists of pre-acquisition costs and land acquisition. Cost will be transferred to the land that is being developed at the time of development of the land has started or moved to a building under construction at the time the land is ready for development.

Pembayaran atas pembelian tanah yang masih dalam proses dicatat dalam akun uang muka pada aset lancar. Biaya perolehan bangunan yang sedang dikonstruksi meliputi biaya perolehan tanah yang dikembangkan ditambah biaya konstruksi, biaya lainnya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pengembangan real estat serta biaya pinjaman dan akan dipindahkan ke bangunan yang siap dijual pada saat selesai sepenuhnya dan siap untuk dijual.	*Payment for the purchase of land, which is still in the process recorded in advance on current assets. The cost of buildings under construction include the cost of land development plus construction costs, other costs that are attributable to real estate development activities as well as the cost of the loan and will be transferred to the building ready for sale when fully completed and ready for sale.*
Biaya aktivitas pengembangan real estat yang dikapitalisasi ke proyek pengembangan real estat termasuk biaya tanah pra-akuisisi, biaya pembebasan tanah, biaya yang secara langsung terkait dengan proyek, biaya yang berkaitan dengan aktivitas pengembangan real estat dan biaya pinjaman.	*The cost of real estate development activities are capitalized to real estate development projects including pre-acquisition cost of land, land acquisition costs, costs that are directly related to the project, the costs associated with real estate development activities and the cost of borrowing.*
Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan kegiatan pengembangan dikapitalisasi ke proyek-proyek pembangunan. Kapitalisasi berhenti ketika proyek pembangunan tertunda/ ditunda atau secara substansial siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya.	*Borrowing costs that are directly attributable to development activities are capitalized to development projects. Capitalization stopped when the construction project is delayed/ postponed or substantially ready for their intended use.*
Biaya yang dialokasikan sebagai beban proyek termasuk biaya pra-perolehan tanah yang tidak berhasil diperoleh, biaya kelebihan yang diperoleh dari hasil pembangunan fasilitas publik yang diperdagangkan, dijual atau dialihkan, sehubungan dengan penjualan unit.	*Costs that are allocated as expenses including the cost of pre-project land acquisition which is not successfully obtained, the cost advantages gained from the construction of public facilities are traded, sold or transferred, in connection with the sale of units.*
Grup masih mencatat akumulasi biaya untuk biaya proyek pembangunan meskipun realisasi pendapatan pada masa mendatang lebih rendah dari nilai tercatat proyek. Namun terkait dengan perbedaan yang terjadi, Grup membuat penyisihan secara periodik. Jumlah penyisihan akan mengurangi nilai tercatat proyek dan dibebankan pada laporan laba rugi tahun berjalan komprehensif. Biaya yang telah dikapitalisasi ke proyek pengembangan real estat dialokasikan ke setiap unit real estat dengan identifikasi yang unik didasarkan pada area yang luas.	*The Group posted an accumulated charge for the cost of development projects despite the realization of future revenues is lower than the carrying value of the project. Due to the differences, the Group performs periodic provisions. The amount of the allowance will reduce the carrying value of the project and charged to the statement of comprehensive income for the year. Costs that have been capitalize to real estate development projects is allocate to each unit of real estate with a unique identification, which is base on a large area.*
Penilaian terhadap estimasi biaya dan alokasi dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan sampai proyek selesai secara substansial. Dalam hal perubahan mendasar terjadi, Grup akan merevisi dan mengalokasikan kembali biayanya. Beban yang diakui adalah biaya yang tidak berhubungan dengan proyek real estat.	*Assessment of the estimated costs and the allocation done at the end of each reporting period until the project is substantially completed. If fundamental change occur, the Group will revise and re-allocate the costs. Expense recognized are expenses that are not relate to real estate development.*

k. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka terdiri dari biaya tidak langsung, biaya sewa dan asuransi.

Untuk biaya tidak langsung akan dibebankan secara proporsional dengan pendapatan yang diakui selama periode pelaksanaan proyek.

Biaya sewa dan asuransi diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

k. Prepaid Expenses

Prepaid expenses include indirect cost, rent and insurance expense.

The indirect cost is charge proportionally to recognized income during projects construction.

The rent and insurance expense are amortize during their benefit period on straight-line method.

l. Aset Kerja Sama

Aset kerjasama operasi merupakan aset atas kerjasama dengan pihak ketiga dengan sistem Bangun Kelola Serah dan Bangun Sewa Serah, Perusahaan mencatat aset kerjasama sebesar harga perolehan pada saat melakukan pembangunan. Aset tersebut dilakukan penyusutan selama masa perjanjian kerjasama.

l. Asset of Co-operation

The operating asset is an asset of the merger with a third party under the Build Operate Transfer system and Build Lease Transfer, the Company records the operating asset at cost at the time of construction. The asset is depreciated during the term of the cooperation agreement.

m. Aset Takberwujud

Aset takberwujud diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Nilai perolehan aset takberwujud yang diperoleh dari kombinasi bisnis pada awalnya diakui sesuai nilai wajar pada tanggal akuisisi. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada nilai perolehan dikurangi, akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Umur manfaat aset takberwujud dinilai apakah terbatas atau tidak terbatas.

Aset takberwujud dengan umur tidak terbatas tidak diamortisasi. Masa manfaat asset takberwujud dengan umur tidak terbatas ditinjau setiap tahun untuk menentukan apakah masa manfaat masih mendukung dan terdapat suatu indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin mengalami penurunan nilai.

m. Intangible Assets

Intangible assets are measured on initial recognition at cost. The cost of intangible assets acquired from business combinations is initially recognized at fair value as at the date of acquisition. Following initial recognition, intangible assets are carried at cost less any accumulated amortization and if any, accumulated impairment loss. The useful lives of intangible assets are assessed to be either finite or indefinite.

Intangible assets with indefinite life are not amortized. The useful life of an intangible asset with an indefinite useful life is reviewed annually to determine whether the useful life assessment continues to be supportable and when circumstances indicate that the carrying amount may be impaired.

n. Pekerjaan dalam Proses Konstruksi (PDPK)

Pekerjaan Dalam Proses merupakan biaya yang terjadi dalam memenuhi kontrak dengan pelanggan yang diakui sebagai aset, yang berhubungan langsung dengan kontrak dimana Grup dapat mengidentifikasi secara spesifik, menghasilkan atau meningkatkan sumber daya Grup yang akan digunakan dalam memenuhi (atau terus memenuhi) kewajiban pekerjaan dalam masa depan dan diharapkan dapat dipulihkan. Grup menelaah penurunan nilai Pekerjaan Dalam Proses setiap kali peristiwa atau perubahan keadaan menunjukkan bahwa nilai tercatat mungkin tidak dapat diperoleh kembali.

n. Construction Work in Progress (CWIP)

Work In Progress represents costs incurred in fulfilling contract with customers which recognized as an asset, that relate directly to a contract that the Group can specifically identify, generate or enhance resources of the Group that will be used in satisfying (or continuing to satisfy) performance obligations in the future and are expected to be recovered. The Group reviews the Work In Progress for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable.

o. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomik masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal.

Properti investasi pada awal nya diukur sebesar biaya perolehan, meliputi biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, properti investasi Grup diukur pada nilai wajar untuk tujuan pelaporan keuangan. Dalam mengestimasi nilai wajar, Grup menugaskan penilai independen untuk melakukan penilaian. Penilaian tersebut didasarkan pada pendekatan data pasar.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya, sedangkan pemugaran dan penambahan dikapitalisasi.

Grup mengalihkan properti ke, atau dari properti investasi jika, dan hanya jika, ketika properti memenuhi, atau berhenti memenuhi, definisi properti investasi dan terdapat bukti atas perubahan penggunaan, mencakup:

a. Dimulainya penggunaan oleh pemilik, atau pengembangan untuk pemilik, untuk pengalihan dari properti investasi menjadi properti yang digunakan sendiri;
b. Dimulainya pengembangan untuk dijual, untuk pengalihan dari properti investasi menjadi persediaan;
c. Berakhirnya pemakaian oleh pemilik, untuk dijual, untuk pengalihan dari properti yang digunakan sendiri menjadi properti investasi;
d. Insepsi sewa operasi kepada pihak lain, untuk pengalihan dari persediaan menjadi properti investasi.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau

o. Investment Properties

Investment properties are properties (land or a building or part of a building or both) held by the owner or the lessee under a finance lease to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes; or sale in the daily business activities.

Investment property is recognized as an asset when, and only when it is probable that the future economic benefits that are associated with the investment property will flow to the entity and the cost of the investment property can be measured reliably.

Investment properties are measured initially at its cost, including transaction costs. Subsequent to initial recognition, the Group's investment property was measured at fair value for financial reporting purposes. In estimating the fair value, the Group engaged independent valuers to perform the valuation. Such valuation was based on market data approach.

Maintenance and repairment costs are charged to profit or loss as incurred, while renewals and betterments are capitalized.

The Group shall transfer a property, to, or from investment property when, and only when, the property meets, or ceases to meet, the definition of investment property and there is evidence of the change in use, including:

a. Commencement of owner-occupation, or of development with a view to owner occupation, for a transfer from investment property to owner-occupied property;
b. Commencement of development with a view to sell, for a transfer from investment property to inventories;
c. End of owner-occupation, for a transfer from owner-occupied property to investment property; and
d. Inception of an operating lease to another party, for a transfer from inventory to investment property.

An investment property is derecognized on disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from its disposal. Gains or losses arising from the retirement or disposal are determined as the

pelepasan ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset, and are recognized in profit or loss in the period of the retirement or disposal.

Tanah dan bangunan disajikan dengan metode nilai wajar dan tidak disusutkan.

Land and building are measured using fair value model and is not depreciated.

p. Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

p. Fixed Assets

Fixed assets are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any cost directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended.

Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut.

When applicable, the cost may also comprises the initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located, the obligation for which an entity incurs either when the item is acquired or as a consequence of having used the item during a particular period for purposes other than to produce inventories during that period.

Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali tanah dan bangunan dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

After initial recognition fixed assets except land and building, are carry at its cost less any accumulated depreciation, and any accumulated impairment losses.

Aset tetap bangunan disusutkan menggunakan metode garis lurus *(straight line method),* sedangkan untuk peralatan kantor dan peralatan proyek menggunakan presentase tetap dari nilai buku metode angka *tahun (sum of the year method)* dengan presentase penyusutan sebagai berikut:

Buildings are depreciated using the straight line method, while the office equipment and project equipment are depreciated using sum of the year method at the following rates of depreciation:

Jenis Aset Tetap / *Fixed Assets*	Metode Penyusutan / *Depreciation Method*	Masa Manfaat / *Useful Lives*
Bangunan Gedung / *Buildings*	Garis Lurus / *Straight Line*	20 Tahun / *Years*
Peralatan Kantor / *Office Equipments*	Garis Lurus / *Straight Line*	4 Tahun / *Years*
Peralatan Proyek / *Project Equipment*	Angka Tahun / *Sum of the Year*	3 - 8 Tahun / *Years*
Kendaraan / *Vehicles*	Garis Lurus / *Straight Line*	5 Tahun / *Years*

Pada akhir tahun buku pelaporan, Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis aset, nilai residu, metode penyusutan dan sisa umur pemakaian berdasarkan kondisi teknis.

At the end of reporting year, the Group periodically reviews the useful life of the assets, asset's residual value, depreciation method and the remaining usage expectation based on technical conditions.

Aset tetap pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian ditelaah untuk mengetahui apakah telah terjadi kerugian akibat penurunan nilai bilamana terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengidentifikasikan bahwa nilai tercatat aset tersebut tidak dapat diperoleh kembali. Kerugian akibat penurunan

Fixed assets and other non-current assets, including intangible assets reviewed to look for whether there is loss caused by impairment, when there are events or changes in circumstances indicating that carrying amount may not be recoverable. An impairment of value is recognized at the difference between carrying

nilai diakui sebesar selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut. Nilai yang dapat diperoleh kembali adalah nilai yang lebih tinggi diantara harga jual bersih dan nilai pakai aset.

values of the assets with recoverable value of the assets. The recoverable values are the higher value between net sale value and value in use of the assets.

q. Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan kecuali *Goodwill*

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, Grup mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan ditentukan atas suatu aset individual, dan jika tidak memungkinkan, Grup menentukan jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas dari aset tersebut.

q. Impairment of Nonfinancial Assets except Goodwill

At the end of each reporting period, the Group assesses whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the Group shall estimate the recoverable amount of the asset. Recoverable amount is determined for an individual asset, if it is not possible; the Group determines the recoverable amount of the asset's cash-generating unit.

Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Nilai pakai adalah nilai kini dari arus kas yang diharapkan akan diterima dari aset atau unit penghasil kas.

The recoverable amount is the higher of fair value less costs to sell and its value in use. Value in use is the present value of the estimated future cash flows of the asset or cash generating unit.

Nilai kini dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset atau unit yang penurunan nilainya diukur.

Present values are compute using pre-tax discount rates that reflect the time value of money and the risks specific to the asset or unit whose impairment measured.

Jika, dan hanya jika, jumlah terpulihkan aset lebih kecil dari jumlah tercatatnya, maka jumlah tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Penurunan tersebut adalah rugi penurunan nilai dan segera diakui dalam laba rugi.

If, and only if, the recoverable amount of an asset is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset shall be reduce to its recoverable amount. The reduction is an impairment loss and is recognize immediately in profit or loss.

Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui.

An impairment loss recognized in prior period for an asset other than goodwill reversed if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized.

Jika demikian, jumlah tercatat aset dinaikan ke jumlah terpulihkannya. Kenaikan ini merupakan suatu pembalikan rugi penurunan nilai.

If this is the case, the carrying amount of the asset shall be increase to its recoverable amount. That increase is a reversal of an impairment loss.

r. Uang Muka Pemberi Kerja dan Konsumen

r. Advances from Project Owners and Customers

Uang muka pemberi kerja merupakan uang muka yang diterima atas proyek yang dikerjakan serta atas penjualan barang dicatat sebagai pendapatan diterima di muka dan akan diperhitungkan pada saat proyek diselesaikan atau terjadinya transaksi penjualan.

Advances from project owner represents advances, which are received for projects in progress and for the sales of goods, are being recognized as unearned income and would calculated when the projects are finished or when the goods have been sold.

Uang muka konsumen properti merupakan uang muka yang diterima dari konsumen sehubungan dengan penjualan apartemen.

Advance from customers of property represents advances received from consumers in connection with the sale of apartments.

s. Pendapatan dan Beban

Dalam menentukan pengakuan pendapatan, Grup melakukan analisa transaksi melalui lima langkah analisa berikut:

1. Mengindentifikasi kontrak dengan pelanggan, dengan kriteria sebagai berikut:
   - Kontrak telah disetujui oleh pihak-pihak terkait dalam kontrak
   - Grup bisa mengidentifikasi hak dari pihak-pihak terkait dan jangka waktu pembayaran dari barang atau jasa yang akan dialihkan
   - Kontrak memiliki substansi komersial
   - Besar kemungkinan entitas akan menerima imbalan atas barang atau jasa yang dialihkan
2. Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak, untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik yang berbeda ke pelanggan.
3. Menentukan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan, pajak penjualan barang mewah, pajak pertambahan nilai dan pungutan ekspor, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan.
4. Mengalokasikan harga transaksi kepada setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual dari setiap barang atau jasa yang dijanjikan di kontrak.
5. Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi (sepanjang waktu atau pada suatu waktu tertentu).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

- Suatu waktu tertentu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- Sepanjang waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam sepanjang waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Suatu kewajiban pelaksanaan dipenuhi pada suatu waktu tertentu kecuali jika memenuhi salah satu kriteria berikut, dalam hal ini dipenuhi sepanjang waktu:

s. Revenues and Expenses

In determining revenue recognition, the Group performs analysis transaction through the following five steps of assessment:

1. *Identify contracts with customers with certain criteria as follows:*
   - *The contract has been agreed by the parties involved in the contract*
   - *The Group can identify the rights of relevant parties and the term of payment for the goods or services to be transferred*
   - *The contract has commercial substance*
   - *It is probable that the Group will receive benefits for the goods or services transferred*
2. *Identify the performance obligations in the contract, to transfer distinctive goods or services to the customer.*
3. *Determine the transaction price, net of discounts, returns, sales incentives, luxury sales tax, value added tax and export duty, which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer.*
4. *Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the selling prices of each goods or services promised in the contract.*
5. *Recognize revenue when performance obligation is satisfied (over time or at a point in time).*

A performance obligation may be satisfied at the following:

- *A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or*
- *Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognized as the performance obligation is satisfied.*

A performance obligation is satisfied at a point in time unless it meets one of the following criteria, in which case it is satisfied over time:

- Pelanggan secara bersamaan menerima dan menggunakan manfaat yang diberikan oleh pelaksanaan Grup sebagaimana yang dilakukan Grup;
- Pelaksanaan Grup menciptakan atau meningkatkan aset yang dikendalikan pelanggan saat aset itu dibuat atau ditingkatkan; dan
- Pelaksanaan Grup tidak menciptakan aset dengan penggunaan alternatif untuk Grup dan Grup memiliki hak yang dapat diberlakukan atas pembayaran untuk pelaksanaan yang diselesaikan hingga saat ini.

- *The customer simultaneously receives and consumes the benefits provided by the Group's performance as the Group performs;*
- *The Group's performance creates or enhances an asset that the customer controls as the asset is created or enhanced; and,*
- *The Group's performance does not create an asset with an alternative use to the Group and the Group has an enforceable right to payment for performance completed to date.*

Kriteria berikut juga harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui.

The following recognition criteria must also be met before revenue is recognized.

Pendapatan Konstruksi dan Beban Konstruksi
Pendapatan yang berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui sepanjang waktu yang dicatat dengan menggunakan metode persentase penyelesaian. Dengan metode ini, pendapatan yang diakui setara dengan estimasi terbaru dari total nilai kontrak dikalikan dengan tingkat penyelesaian sebenarnya yang ditentukan dengan mengacu pada keadaan fisik kemajuan pekerjaan.

Construction Revenues and Construction Costs
Revenues related to construction contracts are recognized over time which accounted for using the percentage of completion method. Under this method, the revenue recognized equals the latest estimate of the total value of the contract multiplied by the actual completion rate determined by reference to the physical state of progress of the works.

Pendapatan kontrak terdiri dari jumlah pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak dan penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim, dan pembayaran insentif sepanjang hal ini memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan dan dapat diukur dengan andal.

Contract revenue comprises the initial amount of revenue that agreed in the contract and variations in contract work, claims, and incentive payments to the extent that is probable that it will result in revenue and can be realiably measured.

Jika adanya kemungkinan bahwa kontrak akan menghasilkan kerugian pada saat penyelesaian kontrak, penyisihan atas kerugian yang diperkirakan hingga penyelesaian kontrak diakui sebagai penyisihan kini pada laporan keuangan konsolidasian. Kerugian diakui secara penuh ketika dapat diukur secara andal, terlepas dari tingkat penyelesaian.

If it is regarded as probable that a contract will generate a loss on completion, a provision for expected losses to completion is recognized as a current provision in the consolidated financial statements. The loss is provided for in full as soon as it is can be reliably measured, irrespective of the completion rate.

Biaya kontrak yang tidak mungkin dipulihkan diakui segera sebagai beban tahun berjalan pada laba rugi.

Contract costs that are not probable of being recovered are recognized as current year expenses in profit or loss.

Biaya yang secara langsung berhubungan dengan kontrak, menghasilkan sumber daya untuk memenuhi kontrak ("biaya untuk memenuhi") atau penambahan untuk mendapatkan kontrak ("biaya untuk memperoleh") dan diharapkan dapat dipulihkan. Beban tersebut dengan demikian memenuhi syarat kapitalisasi berdasarkan PSAK 115:

The costs that directly relate to the contract generate resources to satisfy the contract ("cost to fulfill") or is incremental on obtaining a contract ("cost to obtain") and are expected to be recovered. These costs are therefore eligible for capitalization under PSAK 115: Revenue from Contracts with Customers and recognized as other current assets. Such cost will be

Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dan dicatat sebagai aset lancar lainnya. Beban tersebut diamortisasi dengan cara sistematis sejalan dengan penyerahan barang atau jasa yang terkait dengan aset tersebut.

amortized on a systematic basis that is consistent with the transfer of the goods or services to which such asset relates.

Beban langsung dan beban tidak langsung proyek yang dapat dialokasikan ke suatu proyek tertentu, diakui sebagai beban pada proyek yang bersangkutan, sedangkan beban yang tidak dapat didistribusikan atau tidak dapat dialokasikan ke aktivitas proyek menjadi beban non proyek (beban usaha).

Direct and indirect costs of projects which can be allocated to a particular project, are recognized as an expense on the related projects, while the expenses that cannot be distributed or cannot be allocated to the project activities are recognized as non-project expenses (operating expenses).

Real Estat
Grup memperoleh pendapatan real estatnya dari penjualan unit kondominium. Pendapatan dari penjualan proyek real estat ini diakui pada saat ketika Grup telah mengalihkan risiko dan manfaat kepemilikan yang biasa kepada pembeli dalam suatu transaksi yang secara substansi adalah penjualan dan tidak memiliki keterlibatan berkelanjutan yang substansial. dengan properti.

Real Estate
The Group derives its real estate revenue from sale of condominium units. Revenues from the sale of these real estate projects are recognized at point in time which is when the Group has already transferred to the buyer the usual risks and rewards of ownership in a transaction that is in substance a sale and does not have a substantial continuing involvement with the property.

Pengakuan Beban
Beban diakui pada saat terjadinya (metode akrual), kecuali merupakan aset yang terkait dengan aktivitas kontrak masa depan.

Expense Recognition
Expenses are recognized as incurred (accrual basis), unless they create an asset related to future contract activity.

Biaya yang secara langsung berhubungan dengan kontrak, menghasilkan sumber daya untuk memenuhi kontrak ("biaya untuk memenuhi") atau penambahan untuk mendapatkan kontrak ("biaya untuk memperoleh") dan diharapkan dapat dipulihkan. Beban tersebut dengan demikian memenuhi syarat kapitalisasi berdasarkan PSAK 115: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dan dicatat sebagai aset lancar lainnya. Beban tersebut diamortisasi dengan cara sistematis sejalan dengan penyerahan barang atau jasa yang terkait dengan aset tersebut.

The costs that directly relate to the contract generate resources to satisfy the contract ("cost to fulfill") or is incremental on obtaining a contract ("cost to obtain") and are expected to be recovered. These costs are therefore eligible for capitalization under PSAK 115: Revenue from Contracts with Customers and recognized as other current assets. Such cost will be amortized on a systematic basis that is consistent with the transfer of the goods or services to which such asset relates.

t. Pajak Penghasilan
Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

t. Income Tax
The tax expense is the combined amount of current tax and deferred tax which calculated in determining profit or loss in the period. Current tax and deferred tax is recognized in profit or loss, except for income tax arising from transactions or events that are recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is recognized in other comprehensive income or equity, respectively.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihannya diakui sebagai aset.

Current tax for current and prior periods shall, to the extent unpaid, be recognized as a liability. If the amount already paid in respect of current and prior periods exceeds the amount due for those periods, the excess shall be recognized as an asset.

Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods shall be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Benefits relating to tax loss that can be carried back to recover current tax of prior periods is recognized as an asset. Deferred tax asset is recognized for the carryforward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang timbul dari:

a) Pengakuan awal *goodwill;* atau
b) Pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang:
   (i) bukan kombinasi bisnis;
   (ii) pada saat transaksi tidak memengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak); dan
   (iii) pada saat transaksi, tidak menimbulkan perbedaan temporer kena pajak dan perbedaan temporer dapat dikurangkan dalan jumlah yang sama.

A deferred tax liability shall be recognized for all taxable temporary differences, except to the extent that the deferred tax liability arises from:

a) The initial recognition of goodwill; or
b) At the time of initial recognition of an asset or liability in a transaction which is:
   (i) not business combination;
   (ii) at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit (tax loss); and
   (iii) at the time of the transaction, does not give rise to equal taxable and deducted temporary difference.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud kecuali jika pengakuan awal asset dari transaksi yang:

(i) bukan kombinasi bisnis;
(ii) pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak); dan

A deferred tax asset shall be recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilized at the time of initial recognition of an asset in a transaction which is:

(i) not business combination;
(ii) at the time of the transaction affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss) and at the time of the transaction; and

(iii) pada saat transaksi, tidak menimbulkan perbedaan temporer kena pajak dan perbedaan temporer dapat dikurangkan dalam jumlah yang sama.

(iii) it does not give rise to taxable temporary differences and the temporary differences can be deducted in the same amount.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

The measurement of deferred tax liabilities and deferred tax assets shall reflect the tax consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Grup mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

The carrying amount of a deferred tax asset reviewed at the end of each reporting period. The Group shall reduce the carrying amount of a deferred tax asset to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilised. Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable profit will be available.

Grup melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:

a) Grup memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
b) Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:
    i. entitas kena pajak yang sama; atau
    ii. entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

The Group offsets deferred tax assets and deferred tax liabilities if, and only if:

a) The Group has a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities; and

b) The deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either:

    i. the same taxable entity; or
    ii. different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

Grup melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, Grup:
a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
b) bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

The Group offsets current tax assets and current tax liabilities if, and only if, the Group:

a) has legally enforceable right to set off the recognized amounts; and

b) intends either to settle on a net basis, or to realize the assets and settle liabilities simultaneously.

Pajak Penghasilan Final
Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 2022 yang diundangkan pada tanggal 21 Februari 2022 yang merupakan perubahan (revisi) atas Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 2008 yang telah diundangkan tanggal 23 Juli 2008 tentang Pajak atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi sebagai pengganti Peraturan Pemerintah RI No. 140 Tahun 2000, Perusahaan sebagai pelaksana konstruksi sesuai Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2022 dikenakan tarif pajak final sebesar 2,65% untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak yang terhitung sejak peraturan pemerintah ini berlaku.

Final Income Tax
Due to the enactment of Government Regulation Republic of Indonesia No. 9 Year 2022, which was enacted on February 21, 2022 which is the change (revision) of Government Regulation RI No. 51 Year 2008, which was passed July 23, 2008 on Tax on Income From Construction Services as a substitute Government Regulation RI No. 140 Year 2000, the Company as the contractor in accordance with Article 3 of Government Regulation No. 9 Year 2022 is charged at 2.65% final tax for contract payments or parts of contract which received after this regulation becomes effective.

Pemerintah menurunkan pajak penghasilan (PPh) final atas penjualan tanah dan bangunan non subsidi dari 5% menjadi 2,5% berlaku efektif per tanggal 7 September 2016 atau 30 hari sejak diundangkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/ atau bangunan, dan Perjanjian Peningkatan Jual Beli Atas Tanah dan/ atau Bangunan Beserta Perubahannya.

The Government lowered the income tax (PPh) final over the sale of land and buildings other non subsidy from 5% became 2.5% effective on September 7, 2016 or 30 days from the enactment of Government Regulation (PP) No. 34 Year 2016 about Income Taxes on the Income from the Transfer of Land Rights and/or Building, and an Increase in the Sale of Land and/ or Buildings Along with the Revised Document.

u. Imbalan Kerja

Imbalan Kerja Jangka Pendek
Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut.

Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif.

Imbalan Pensiun
Grup memiliki program pensiun manfaat pasti dan pensiun iuran pasti.

Program iuran pasti adalah program pensiun dimana Grup membayar iuran tetap kepada sebuah entitas yang terpisah.

u. Employee Benefits

Short Term Employee Benefit
Short-term employee benefits recognized when an employee has rendered service during accounting period, at the undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for that service.

Short-term employee benefits include wages, salaries, bonus and incentive.

Pension Benefits
The Group has a defined benefit and a defined contribution pension plan.

A defined contribution plan is a pension plan under which the Group pays fixed contributions into a separate entity.

Seluruh karyawan tetap yang dipekerjakan sebelum tahun 2007 diikutsertakan pada program pensiun manfaat pasti yang dikelola oleh Dana Pensiun Wijaya Karya 1.

All permanent employees who hired before 2007 covered by a defined benefit plan managed by Dana Pensiun Wijaya Karya 1.

Seluruh karyawan tetap yang dipekerjakan mulai tahun 2007 dan seterusnya diikutsertakan pada program pensiun iuran pasti yang dikelola oleh Dana Pensiun Wijaya Karya 2.

All permanent employees who hired on year 2007 onwards covered by a defined contribution plan managed by Dana Pensiun Wijaya Karya 2.

Imbalan Pascakerja
Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 2023.

Post-employment Benefits
Post-employment benefits such as post-retirement, severance and service payments are calculated based on Omnibus Law No. 6 Year 2023.

Grup mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

The Group recognizes the amount of the net defined benefit liability at the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets which calculated by independent actuaries using the Projected Unit Credit method. Present value benefit obligation determine by discounting the benefit.

Grup mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas.

The Group accounts not only for its legal obligation under the formal terms of a defined benefit plan, but also for any constructive obligation that arises from the entity's informal practices.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

Current service cost, past service cost and gain or loss on settlement, and net interets on the net defined benefit liability (asset) are recognize in profit or loss.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

The remeasurement of the net defined benefit liability (assets) comprises actuarial gains and losses, return on plan assets, and any change in effect of the asset ceiling are recognize in other comprehensive income.

Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya
Imbalan jangka panjang lain seperti cuti berimbalan jangka panjang diukur dengan menggunakan metode yang sama dengan imbalan pascakerja, kecuali untuk pengukuran kembali liabilitas diakui dalam laba rugi.

Other Long Term Employee Benefits
Other long-term benefits such as long service leave measured using the same method as post-employment benefits, except for the remeasurement of the liability recognized in profit or loss.

v. Segmen Operasi
Grup menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam menilai kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Segmetasi berdasarkan aktivitas dari setiap kegiatan operasi entitas legal di dalam Grup.

v. Operating Segment
The Group presented operating segments based on the financial information used by the chief operating decision maker in assessing the performance of segments and in the allocation of resources. The segments based on the activities of each of the operating legal entities within the Group.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:
- yang terlihat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh kepala operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

An operating segment is a component of the entity:
- *that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to the transactions with other components of the same entity);*
- *whose operating results are regularly reviewed by chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assesses its performance; and*
- *separate financial information is available.*

w. Instrumen Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Grup mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Grup mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut.

Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Aset keuangan Grup diklasifikasikan sebagai berikut: aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

i. Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi ketika kedua kondisi berikut terpenuhi:

(1) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual saja; dan

w. Financial Instrument

Initial Recognition and Measurement

The Group recognizes a financial asset or a financial liability in the consolidated statement of financial position when, and only when, it becomes a party to the contractual provisions of the instrument. At initial recognition, the Group measures all financial assets and financial liabilities at its fair value. In the case of a financial asset or financial liability not at fair value through profit or loss, fair value plus or minus with the transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of the financial asset or financial liability.

Transaction costs incurred on acquisition of a financial asset and issue of a financial liability classified at fair value through profit or loss are expensed immediately.

Subsequent Measurement of Financial Assets

The financial assets of the Group are classified into the following specified categories: financial assets at amortized costs, financial assets at fair value through other comprehensive income, and financial assets at fair value through profit or loss.

i. Financial Assets Measured at Amortized Costs

Financial assets are measured at amortized costs if both of the following conditions are met:

(1) The financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and

(2) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest* - SPPI) dari jumlah pokok terutang.

(2) The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal ("SPPI") and interest on the principal amount outstanding.

Aset keuangan ini diukur pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan dikurangi dengan pembayaran pokok, kemudian dikurangi atau ditambah dengan jumlah amortisasi kumulatif atas perbedaan jumlah pengakuan awal dengan jumlah pada saat jatuh tempo, dan penurunan nilainya.

The financial asset is measured at the amount recognized at initial recognition minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization of any difference between that initial amount and the maturity amount, and any loss allowance.

Pendapatan keuangan dihitung dengan metode menggunakan suku bunga efektif dan diakui di laba rugi. Perubahan pada nilai wajar diakui di laba rugi ketika aset dihentikan atau direklasifikasi.

Interest income is calculated using the effective interest method and is recognized in profit or loss. Changes in fair value are recognized in profit or loss when the asset is derecognized or reclassified.

Aset keuangan yang diklasifikasikan menjadi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dapat dijual ketika terdapat peningkatan risiko kredit. Penghentian untuk alasan lain diperbolehkan namun jumlah penjualan tersebut harus tidak signifikan jumlahnya atau tidak sering.

Financial assets classified to amortized cost may be sold where there is an increase in credit risk. Disposals for other reasons are permitted but such sales should be insignificant in value or infrequent in nature.

ii. <u>Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain ("FVTOCI")</u>

ii. <u>Financial Assets Measured at Fair Value Through Other Comprehensive Income ("FVTOCI")</u>

Aset keuangan diukur pada FVTOCI jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

The financial assets are measured at FVTOCI if both of the following conditions are met:

(1) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
(2) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest* - SPPI) dari jumlah pokok terutang.

(1) The financial asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling financial assets; and
(2) The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding.

Aset keuangan tersebut diukur sebesar nilai wajar, dimana keuntungan atau kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, diakui pada laba rugi. Ketika aset keuangan tersebut dihentikan

The financial assets are measured at fair value. The changes in fair value are recognized initially in other comprehensive income (OCI), except for impairment gains and losses, and a portion of foreign exchange gains and losses, which are recognized in profit or loss. When such

pengakuannya atau direklasifikasi, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

iii. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi ("FVTPL")

Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau untuk diukur FVTOCI.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

Aset keuangan berupa derivatif dan investasi pada instrumen ekuitas tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau kriteria untuk diukur pada FVTOCI, sehingga diukur pada FVTPL. Namun demikian, Grup dapat menetapkan pilihan yang tidak dapat dibatalkan saat pengakuan awal atas investasi pada instrumen ekuitas yang bukan untuk diperjualbelikan dalam waktu dekat (*held for trading*) untuk diukur pada FVTOCI. Penetapan ini menyebabkan semua keuntungan atau kerugian disajikan di penghasilan komprehensif lain, kecuali pendapatan dividen tetap diakui di laba rugi. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke saldo laba tidak melalui laba rugi.

Pengukuran Selanjutnya Liabilitas Keuangan

Grup mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan sehingga setelah pengakuan awal liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali:

(a) Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas dimaksud, termasuk derivatif yang merupakan liabilitas, selanjutnya akan diukur pada nilai wajar.
(b) Liabilitas keuangan yang timbul Ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan.

financial asset is derecognized or reclassified, changes in fair value previously recognized in other comprehensive income and accumulated in equity are reclassified from equity to profit or loss as reclassification adjustment.

iii. Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss ("FVTPL")

Financial assets measured at FVTPL are those which do not meet the criteria to be measured at amortized costs or to be measured at FVTOCI.

After initial recognition, FVTPL financial assets are measured at fair value. Gain or loss arising from changes in fair value of the financial assets are recognized in profit or loss.

Financial assets in the form of derivatives and investment in equity instrument do not meet the criteria to be measured at amortized costs or to be measured at FVTOCI, therefore, these are measured at FVTPL. However, the Group may irrevocably designate an investment in an equity instrument which is not held for trading in the near future to be measured at FVTOCI. This designation will result to gains and losses to be presented in other comprehensive income, except for dividend income on a qualifying investment which is continuous to be recognized in profit or loss. Cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified through retained earnings, not through profit or loss.

Subsequent Measurement of Financial Liabilities

The Group shall classify all financial liabilities as subsequently measured at amortized cost, except for:

(a) Financial liabilities at fair value through profit or loss. Such liabilities, including derivatives that are liabilities, shall be subsequently measured at fair value.
(b) Financial liabilities that arise when a transfer of a financial asset does not qualify for derecognition or when the continuing involvement approach applies.

(c) Kontrak jaminan keuangan dan komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga dibawah pasar. Setelah pengakuan awal, penerbit kontrak dan penerbit komitmen selanjutnya mengukur kontrak tersebut sebesar jumlah yang lebih tinggi antara:
   (i) Jumlah penyisihan kerugian; dan
   (ii) Jumlah yang pertama kali diakui dikurangi dengan, jika sesuai, jumlah kumulatif dari penghasilan yang diakui sesuai dengan prinsip PSAK 115.

(d) Imbalan kontijensi yang diakui oleh pihak pengakusisi dalam kombinasi bisnis ketika PSAK 103 diterapkan. Imbalan kontijensi selanjutnya diukur pada nilai wajar dan selisihnya dalam laba rugi.

(c) Financial guarantee contracts and commitments to provide a loan at a below-market interest rate. After initial recognition, an issuer of such a contract and an issuer of such a commitment shall subsequently measure it at the higher of:

   (i) The amount of the loss allowance; and
   (ii) The amount initially recognized less, when appropriate, the cumulative amount of income recognized in accordance with the principles of PSAK 115.

(d) Contingent consideration recognized by an acquirer in a business combination to which PSAK 103 applies. Such contingent consideration shall subsequently be measured at fair value with changes recognized in profit or loss.

Saat pengakuan awal Grup dapat membuat penetapan yang takterbatalkan untuk mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika diizinkan oleh standar atau jika penetapan akan menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena:
(a) Mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkosistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai "*accounting mismatch*") yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda beda; atau
(b) Sekelompok liabilitas keuangan atau aset keuangan dan liabilitas keuangan dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai manajemen risiko atau strategi investasi yang terdokumentasi, dan informasi dengan dasar nilai wajar dimaksud atas kelompok tersebut disediakan secara internal untuk personil manajemen kunci Grup.

An entity may, at initial recognition, irrevocably designate a financial liability as measured at fair value through profit or loss when permitted by the standard or when doing so results in more relevant information, because either:

(a) Eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency (sometimes referred to as "an accounting mismatch") that would otherwise arise from measuring assets or liabilities or recognizing the gains and losses on them on different bases; or

(b) A group of financial liabilities or financial assets and financial liabilities is managed and its performance is evaluated on a fair value basis, in accordance with a documented risk management or investment strategy, and information about the group is provided internally on that basis to the Grup's key management personnel.

Metode Suku Bunga Efektif
Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan.

The Effective Interest Method
The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset or a financial liability (or group of financial assets or financial liabilities) and of allocating the interest income or interest expense over the relevant period.

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen

The effective interest rate is the rate that exactly discount estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter period

keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

to the net carrying amount of the financial asset or financial liability.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Grup mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian takterpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.

When calculating the effective interest rate, the Group estimates cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, for example, prepayment, call and similar option, but shall not consider future credit losses. The calculation includes all fees and points paid or received between parties to the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.

Reklasifikasi

Grup mereklasifikasi aset keuangan ketika Grup mengubah tujuan model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan sehingga penilaian sebelumnya menjadi tidak dapat diterapkan.

Reclassification

The Group reclassifies a financial asset if and only if the Group's business model objective for its financial assets changes therefore its previous model assessment would no longer apply.

Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan, maka Grup menerapkan reklasifikasi secara prospektif dari tanggal reklasifikasi. Grup tidak menyajikan kembali keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai), atau bunga yang diakui sebelumnya.

If the Group reclassifies its financial assets, it is required to apply the reclassification prospectively from the reclassification date. The Group does not restate previously recognized gains, losses (including impairment gains or losses) or interest.

Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori FVTPL, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi. Pada saat Grup melakukan reklasifikasi sebaliknya, yaitu dari aset keuangan kategori FVTPL menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi, maka nilai wajar pada tanggal reklasifikasi menjadi jumlah tercatat bruto yang baru.

When the Group reclassifies its financial asset out of the amortized cost measurement category into FVTPL measurement category, its fair value is measured at reclassification date. Any gains or losses arising from the difference between the previous amortized cost of the financial asset and its fair value is recognized in profit or loss. Otherwise, if the Group reclassifies its financial asset out of the FVTPL measurement category into amortized cost measurement category, its fair value at the date of reclassification becomes new gross carrying amount.

Pada saat Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori FVTOCI, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi. Ketika Grup

When the Group reclassifies its financial asset out of the amortized cost measurement category into FVTOCI measurement category, its fair value is measured at the reclassification date. Any gains or losses resulted from the difference between previous amortized cost of the financial asset and the fair value is recognized in other comprehensive income. The effective interest rate and the measurement of expected credit loss are not adjusted as a result of the reclassification. Otherwise, when the Group

mereklasifikasi aset keuangan sebaliknya, yaitu keluar dari kategori FVTOCI menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan direklasifikasi pada nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi. Akan tetapi keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi. Akibatnya, pada tanggal reklasifikasi aset keuangan diukur seperti halnya jika aset keuangan tersebut selalu diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Penyesuaian ini memengaruhi penghasilan komprehensif lain tetapi tidak memengaruhi laba rugi, dan karenanya bukan merupakan penyesuaian reklasifikasi. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.

reclassifies its financial asset out of the FVTOCI measurement category into amortized cost measurement category, the financial asset is reclassified at its fair value at the reclassification date. However, any cumulative gain or loss previously recognized in other comprehensive income is removed from equity and adjusted against the fair value of the financial asset at the reclassification date. As a result, the financial asset is measured at the reclassification date as if it had always been measured at amortized cost. This adjustment affects other comprehensive income but does not affect profit or loss and therefore is not a reclassification adjustment. The effective interest rate and the measurement of expected credit losses are not adjusted as a result of the reclassification.

Pada saat Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran FVTPL menjadi kategori pengukuran FVTOCI, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Sama halnya, ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori FVTOCI menjadi kategori pengukuran FVTPL, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada tanggal reklasifikasi.

When the Group reclassifies its financial asset out of the FVPTL measurement category into FVTOCI measurement category, the financial asset continues to be measured at fair value. Similarly, when the Group reclassifies its financial asset out of the FVTOCI measurement category into FVPTL measurement category, the financial asset continues to be measured at fair value. The cumulative gain or loss previously recognized in other comprehensive income is reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment at the reclassification date.

Grup tidak mereklasifikasi liabilitas keuangan.

The Group does not reclassify any financial liability.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Impairment of Financial Assets

Grup mengakui kerugian kredit ekspektasian untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada FVTOCI.

The Group recognizes expected credit loss for its financial assets measured at amortized costs and financial assets measured at FVTOCI.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Namun, jika risiko kredit instrumen keuangan tersebut tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, maka mengakui sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.

At the end of each reporting date, the Group calculates any impairment provision in financial instruments based on its lifetime expected credit loss if the credit risk of the financial instruments has increased significantly since its initial recognition. However, if credit risk has not increased significantly since initial recognition, then a 12-months expected credit loss is recognized.

Grup menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

The Group applied a simplified approach to measure such expected credit loss for trade receivables and contract assets without significant financing component.

Grup menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pihak ketiga tidak mampu membayar kewajiban kreditnya kepada Grup secara penuh. Periode maksimum yang dipertimbangkan ketika memperkirakan kerugian kredit ekspektasian adalah periode maksimum kontrak dimana Grup terekspos terhadap risiko kredit.

The Group considers a financial asset to be in default when the counterparty is unlikely to pay its credit obligations to the Group in full. The maximum period considered when estimating expected credit loss is the maximum contractual period over which the Group is exposed to credit risk.

Penyisihan kerugian diakui sebagai pengurang jumlah tercatat aset keuangan kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada FVTOCI yang penyisihan kerugiannya diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Sedangkan jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) diakui dalam laba rugi, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

Impairment losses are recognized as a deduction in financial assets' carrying amount, except for financial assets measured at FVTOCI where its impairment is recognized in other comprehensive income. The expected credit loss (or recovery of credit loss) is recognized in profit or loss, as gains or losses of financial asset impairment.

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dilakukan dengan suatu cara yang mencerminkan:

i. Jumlah yang tidak bias dan rata-rata probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian kemungkinan yang dapat terjadi;
ii. Nilai waktu uang; dan
iii. Informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

The expected credit loss of financial intruments are conducted by a means which reflect:

i. An unbiased and probability-weighted amount that reflects a range of possible outcomes;

ii. Time value of money; and
iii. Reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort about past events, current conditions and forecasts of future conditions.

Aset keuangan dapat dianggap tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal jika aset keuangan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan. Risiko kredit pada instrumen keuangan dianggap rendah ketika aset keuangan tersebut memiliki risiko gagal bayar yang rendah, peminjam memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya dalam jangka waktu dekat dan memburuknya kondisi ekonomi dan bisnis dalam jangka waktu panjang mungkin, namun tidak selalu, menurunkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya. Untuk menentukan apakah aset keuangan memiliki risiko kredit rendah, Grup

Financial assets may be considered to not having significant increase in credit risk since initial recognition if the financial assets have a low credit risk at the reporting date. Credit risk on financial instrument may be considered be low if there is a low risk of default, the borrower has a strong capacity to meet its contractual cash flow obligations in the near term and adverse changes in economic and business conditions in the longer term may, but will not necessarily, reduce the ability of the borrower to fulfil its contractual cash flow obligations. To determine whether a financial asset has a low credit risk, the Group may use internal credit risk rating or external assessment. For example, a financial asset with "investment grade" according to

dapat menggunakan peringkat risiko kredit internal atau penilaian eksternal. Misal, aset keuangan dengan peringkat "*investment grade*" berdasarkan penilaian eksternal merupakan instrumen yang memiliki risiko kredit yang rendah, sehingga tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal.

external assessment has a low credit risk rating, thus it does not experience an increase in significant credit risk since initial recognition.

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan
Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan, jika dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berintensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Offsetting a Financial Asset and a Financial Liability
A financial asset and financial liability shall be offset if and only if, the Group currently has a legally enforceable right to set off the recognized amount; and intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Pengukuran Nilai Wajar
Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Fair Value Measurement
Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

Nilai wajar aset dan liabillitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

(i) Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1);
(ii) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2);
(iii) Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

Fair values are categorised into different levels in a fair value hierarchy based on the degree to which the inputs to the measurement are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety:

(i) Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date (Level 1);
(ii) Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly or indirectly (Level 2);
(iii) Unobservable inputs for the assets or liabilities (Level 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Grup sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Group uses market observable data to the extent possible. If the fair value of an asset or a liability is not directly observable, the Group uses valuation techniques that appropriate in the circumstances and maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

Perpindahan antara level hierarki nilai wajar diakui oleh Grup pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

Transfers between levels of the fair value hierarchy are recognized by the Group at the end of the reporting period during which the change occurred.

x. Sewa

Pada tanggal insepsi suatu kontrak, Grup menilai apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Untuk menilai apakah suatu kontrak memberikan hak untuk mengendalikan suatu aset identifikasian, Perusahaan menilai apakah:

a. Kontrak melibatkan penggunaan suatu aset identifikasian – ini dapat ditentukan secara eksplisit atau implisit dan secara fisik dapat dibedakan atau mewakili secara substantial seluruh kapasitas aset yang secara fisik dapat dibedakan. Jika pemasok memiliki hak substitusi substantif, maka aset tersebut tidak teridentifikasi;
b. Grup memiliki hak untuk memperoleh secara substansial seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan aset selama periode penggunaan; dan
c. Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Perusahaan memiliki hak ini ketika hak pengambilan keputusan yang paling relevan untuk mengubah bagaimana dan untuk tujuan apa aset tersebut digunakan. Dalam kondisi tertentu dimana semua keputusan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya, Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset tersebut jika:
   - Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset; atau
   - Grup mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan.

Pada tanggal insepsi atau pada saat penilaian kembali suatu kontrak yang mengandung suatu komponen sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam indeks utang sewa meliputi: pembayaran sewa tetap, sewa variabel yang bergantung pada indeks, jumlah yang akan dibayarkan dalam jaminan nilai residu dan harga eksekusi opsi beli, opsi

x. Lease

At inception of a contract, the Group assesses whether a contract is, or contains, a lease. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration. To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group assesses whether:

a. The contract involves the use of an identified asset – this may be specified explicitly or implicitly and should be physically distinct or represent substantially all of the capacity of a physically distinct asset. If the supplier has the substantive substitution right, then the asset is not identified;
b. The Group has the right to obtain substantially all of the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and
c. The Group has the right to direct the use of the identified asset. The Group has this right when it has the decision-making rights that are most relevant to changing how and for what purpose the asset is used. In certain circumstances where all the decisions about how and for what purpose the asset is used are predetermined, the Group has the right to direct the use of the asset if either:
   - *The Group has the right to operate the asset; or*
   - *The Group designed the asset in a way that predetermines how and for what purpose the asset will be used.*

At inception date or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Group allocates consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following: fixed payments, variable lease payments that depend on an index, amounts expected to be payable under a residual value guarantee and the

perpanjangan atau penalti penghentikan jika Grup cukup pasti akan mengeksekusi opsi tersebut.

exercise price under a purchase option, optional renewal period or penalties for early termination of a lease unless the Group is reasonably certain not to terminate early.

Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa pada tanggal dimulainya sewa. Aset hak-guna awalnya diukur pada biaya perolehan, yang terdiri dari jumlah pengukuran awal dari liabilitas sewa disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan, dan estimasi biaya untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar atau tempat di mana aset berada, dikurangi insentif sewa yang diterima

The Group recognizes a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or before the commencement date, plus any initial direct costs incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset or the site on which it is located, less any lease incentives received.

Setelah tanggal permulaan, Grup mengukur aset hak-guna dengan menerapkan model biaya.

After commencement date, the Group shall measure the right-of-use assets applying a cost model.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan penyewa akan mengeksekusi opsi beli, maka penyewa menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Periode penyusutan untuk aset hak-guna dengan opsi beli yang dieksekusi tersebut mengacu pada ketentuan masa manfaat aset tetap.

If the lease transfers the ownership of the underlying asset at the end of the lease term, then the asset will be depreciated from the beginning of the lease term to the end of the underlying asset's useful life. The depreciation periods for the right-of-use assets with buy options executed should refer to the policy for the fixed assets useful life time.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini atas pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau, jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, digunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup. Umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai suku bunga diskonto.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not yet paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, the Group incremental borrowing rate. Generally, The Group uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

Setelah tanggal permulaan, Grup mengukur liabilitas dengan:

a. meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa;
b. mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar; dan
c. mengukur kembali jumlah tercatat untuk merefleksikan penilaian kembali atau modifikasi sewa atau untuk merefleksikan pembayaran sewa tetap secara substansi revisian.

After the commencement date, the Group shall measure the lease liability by:

a. increasing the carrying amount to reflect interest on the lease liability;
b. reducing the carrying amount to reflect the lease payments made; and
c. remeasuring the carrying amount to reflect any reassessment or lease modifications, or to reflect revised in-substance fixed lease payments.

Liabilitas sewa diukur kembali ketika ada perubahan pembayaran sewa masa depan yang timbul dari perubahan indeks atau suku bunga, jika ada perubahan estimasi Grup atas jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan nilai residual, atau jika Grup mengubah penilaiannya apakah akan mengeksekusi opsi beli, perpanjangan atau penghentian.

It is remeasured when there is a change in future lease payments arising from a change in an index or rate, if there is a change in the Group estimates of the amount expected to be payable under a residual value guarantee, or if the Group changes its assessment of whether it will exercise a purchase, extension or termination option.

Ketika liabilitas sewa diukur kembali dengan cara ini, penyesuaian terkait dilakukan terhadap jumlah tercatat aset hak-guna, atau dicatat dalam laba rugi jika jumlah tercatat aset hak-guna telah berkurang menjadi nol.

When the lease liability is remeasured in this way, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right-of-use assets, or is recorded in profit or loss if the carrying amount of the right-of-use asset has been reduced to zero.

Grup menerapkan pengecualian untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah berdasarkan sewa-per-sewa.

The Group applies the exemption for low-value assets on a lease-by-lease basis; and for all other leases of low value asset.

Selanjutnya, pembayaran atas kontrak yang termasuk ke dalam pengecualian, yakni pembayaran atas sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah diakui pada metode garis lurus dan dibebankan pada laba rugi. Pembayaran sewa terkait dengan sewa yang dikecualikan tersebut diakui sebagai beban dengan menggunakan metode garis lurus selama masa sewa.

Furthermore, payments associated with contracts included in the exception, which are payments associated with all short-term leases and certain leases of all low-value assets are recognized on a straight-line basis as an expense in profit or loss. The lease payments associated with those leases will be recognized as an expense on a straight-line basis over the lease term.

Sewa jangka pendek adalah sewa dengan masa sewa kurang dari atau sama dengan 12 bulan. Sewa aset bernilai rendah adalah sewa untuk perlengkapan umum seperti komputer, laptop, telepon genggam, dan perlengkapan kantor lainnya, serta aset lain yang harga barunya tidak lebih dari plafon nilai rendah yang ditetapkan oleh Grup.

Short-term leases are leases with a lease term of 12 months or less. Low-value assets are those of general equipments which comprise of computers, tablets, mobile phones and small items of office supplies, and other assets which have value less than the maximum amount of low value set in the Group's policy.

y. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Pengaturan Bersama

Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah entitas dimana Grup memiliki kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee*, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut (pengaruh signifikan).

y. Investments in Associates and Joint Arrangement

Associates

Associates are entities in which the Group has the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee but has no control or jointly control over those policies (significant influence).

Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, pengakuan awal investasi diakui sebesar biaya perolehan dan jumlah tercatat ditambah atau dikurang bagian atas laba rugi investee setelah tanggal perolehan. Bagian atas laba rugi *investee* diakui dalam laba rugi. Penerimaan distribusi dari *investee* akan mengurangi nilai tercatat investasi. Penyesuaian

Investment in associates is accounted for using the equity method. Under the equity method, the investment in an associate is initially recognized at cost and the carrying amount is added or subtracted by the investor's share of the profit or loss of the investee after the date of acquisition. The investor's share of the profit or loss of the investee is recognized in profit or loss. Distributions received from an investee will

terhadap jumlah tercatat tersebut juga mungkin dibutuhkan untuk perubahan dalam proporsi bagian investor atas investee yang timbul dari penghasilan komprehensif lain, termasuk perubahan yang timbul dari revaluasi aset tetap dan selisih penjabaran valuta asing. Bagian investor atas perubahan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

reduce the carrying amount of the investment. Adjustments to the carrying amount may also be necessary for changes in the investor's proportionate interest in the investee arising from changes in the investee's other comprehensive income, including those arising from the revaluation of property, plant and equipment and from foreign exchange translation differences. The investor's share of those changes is recognized in other comprehensive income.

Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal ketika investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi sebagai berikut:

The Group discontinues the use of the equity method from the date when its investment ceases to be an associate as follows:

i. Jika investasi menjadi entitas anak, Grup mencatat investasinya sesuai dengan PSAK 103 dan PSAK 110;

i. If the investment becomes a subsidiary, the Group accounts for its investment in accordance with PSAK 103 and PSAK 110;

ii. Jika sisa kepentingan dalam entitas asosiasi merupakan aset keuangan, maka Grup mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar; dan

ii. If the retained interest in the former associate is a financial asset, the Group measures the retained interest at fair value; and

iii. Ketika Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas, Grup mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan investasi tersebut menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika investee telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas terkait.

iii. When the Group discontinues the use of the equity method, the Group accounts for all amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that investment on the same basis as would have been required if the investee had directly disposed of the related assets or liabilities.

Jika bagian Grup atas rugi entitas asosiasi atau ventura bersama-sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi atau ventura bersama, maka Grup menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi lebih lanjut. Kepentingan pada entitas asosiasi atau ventura bersama adalah jumlah tercatat investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama yang ditentukan dengan menggunakan metode ekuitas ditambah dengan setiap kepentingan jangka panjang yang secara substansi membentuk bagian investasi neto Grup pada entitas asosiasi atau ventura bersama. Kerugian yang diakui dengan menggunakan metode ekuitas atas selisih lebih investasi Grup pada saham biasa diterapkan untuk komponen lain dari bagian Grup pada entitas asosiasi atau ventura bersama dalam urutan terbalik dengan tingkat senioritasnya (yaitu prioritas dalam likuidasi).

If the Group's share of losses of an associate or a joint venture equals or exceeds its carrying value in the associate or joint venture, the Group discontinues recognizing its share of further losses. The interest in an associate or a joint venture is the carrying amount of the investment in the associate or joint venture determined using the equity method together with any long-term interests that, in substance, form part of the Group's net investment in the associate or joint venture. Losses recognized using the equity method in excess of the Group's investment in ordinary shares are applied to the other components of the Group's interest in an associate or a joint venture in the reverse order of their seniority (i.e. priority in liquidation).

Setelah kepentingan Grup dikurangkan menjadi nol, tambahan kerugian dicadangkan, dan liabilitas diakui, hanya sepanjang Grup memiliki

After the Group's carrying value is reduced to zero, additional losses are provided for, and a liability is recognized, only to the extent that the

kewajiban konstruktif atau hukum atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi atau ventura bersama. Jika entitas asosiasi atau ventura bersama kemudian melaporkan laba, maka Grup mulai mengakui bagiannya atas laba tersebut hanya setelah bagiannya atas laba tersebut sama dengan bagian atas rugi yang belum diakui.

Group has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate or joint venture. If the associate or joint venture subsequently reports profits, the Group resumes recognizing its share of those profits only after its share of the profits equals the share of losses not recognized.

Grup mengakui kelebihan rugi tersebut sebagai pengurang kepentingan jangka panjang pada entitas asosiasi tersebut.

The Group recognizes the excess as a deduction of long-term interest in the associate entity.

Pengaturan Bersama

Pengaturan bersama adalah pengaturan atas dua atau lebih pihak yang memiliki pengendalian bersama, yaitu persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang hanya ada ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

Joint Arrangement

Joint arrangement is an arrangement of which two or more parties have joint control, i.e. the contractually agreed sharing of control of an arrangement, which exist only when decisions about the relevant activities require the unanimous consent of the parties sharing control.

Grup mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai:

The Group classifies joint arrangement as:

1) Operasi Bersama
   Merupakan pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas, terkait dengan pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut operator bersama.

   Operator bersama mengakui hal berikut terkait dengan kepentingannya dalam operasi bersama:
   (a) Aset, mencakup bagiannya atas setiap aset yang dimiliki bersama;
   (b) Liabilitas, mencakup bagiannya atas liabilitas yang terjadi bersama;
   (c) Pendapatan dari penjualan bagiannya atas output yang dihasilkan dari operasi bersama;
   (d) Bagian atas pendapatan dari penjualan output oleh operasi bersama; dan
   (e) Beban, mencakup bagiannya atas setiap beban yang terjadi secara bersama-sama.

1) *Joint Operation*
   Represents joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement *have rights to the assets, and obligations for the liabilities, relating to the arrangement. Those parties are called joint operator.*

   A joint operator recognizes in relation to its interest in a joint operation:

   (a) Its assets, including its share of any assets held jointly;
   (b) Its liabilities, including its share of any liabilities incurred jointly;
   (c) Its revenue from the sale of its share of the output arising from the joint operation;
   (d) Its share of the revenue from the sale of the output by the joint operation; and
   (e) Its expenses, including its share of any expenses incurred jointly.

2) Ventura Bersama
   Grup mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai ventura bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut sebagai venturer bersama.

2) *Joint Venture*
   The Group classifies joint arrangement as a joint venture whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the net assets of the arrangement. Those parties are called joint venturers.

Venturer bersama mengakui kepentingannya dalam ventura bersama sebagai investasi dan mencatat investasi tersebut dengan menggunakan metode ekuitas.

A joint venturer recognizes its interest in a joint venture as an investment and account for that investment using the equity method.

z. Biaya Emisi Obligasi dan Saham

Biaya emisi obligasi merupakan biaya transaksi yang harus dikurangkan langsung dari hasil emisi dalam rangka menentukan hasil emisi bersih obligasi. Selisih antara hasil emisi bersih dengan nilai nominal merupakan diskonto atau premium dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi yang bersangkutan.

Biaya emisi saham disajikan sebagai pengurang dari tambahan modal disetor dan tidak diamortisasi.

z. Bond and Shares Issuance Costs

Bond issuance costs are transaction costs to be deducted from the proceeds in order to determine the net proceeds of bonds. The difference between the net proceeds and the nominal value is a discount or premium and will be amortized over the term of the bonds.

Share issuance costs are presented as a deduction of additional paid-in capital and not amortized.

aa. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam suatu periode.

Untuk tujuan penghitungan laba per saham dilusian, Grup menyesuaikan laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar, atas dampak dari seluruh instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif.

aa. Earnings per Share

Basic earnings per share is computed by dividing the profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period.

For the purpose of calculation diluted earnings per share, the Group shall adjust profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity, and the weighted average number of shares outstanding, for the effect of all dilutive potential ordinary shares.

3. Pertimbangan Akuntansi Kritis dan Sumber Ketidakpastian Estimasi

3. Critical Accounting Judgments and Source of Estimates Uncertainty

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Grup, Direksi diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi periode saat ini dan masa depan.

In the application of the Group accounting policies, the Directors are required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Di bawah ini adalah pertimbangan kritis, selain dari estimasi yang telah diatur, dimana Direksi telah membuat suatu proses penerapan kebijakan akuntansi Grup dan memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

Kepentingan dalam Pengaturan Bersama

Pertimbangan diperlukan untuk menentukan ketika Grup memiliki pengendalian bersama, yang membutuhkan penilaian mengenai aktivitas yang relevan dan ketika keputusan yang berkaitan dengan aktivitas tersebut membutuhkan persetujuan dengan suara bulat. Grup menentukan bahwa aktivitas yang relevan untuk pengaturan bersama adalah aktivitas yang berkaitan dengan keputusan keuangan, operasional dan modal dari pengaturan tersebut.

Pertimbangan juga diperlukan untuk mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai pengendalian bersama atau ventura bersama. Pengklasifikasian pengaturan tersebut mengharuskan Grup untuk menilai hak dan kewajiban yang timbul dari pengaturan tersebut. Secara khusus, Grup mempertimbangkan:

- Struktur dari pengaturan bersama, apakah dibentuk melalui kendaraan terpisah

- Ketika pengaturan tersebut terstruktur melalui kendaraan terpisah, Grup juga mempertimbangkan hak dan kewajiban yang timbul dari:
  a. Bentuk legal dari kendaraan terpisah;
  b. Persyaratan dari perjanjian kontraktual; dan
  c. Fakta dan kondisi lainnya, jika relevan.

Penilaian ini sering membutuhkan pertimbangan yang signifikan. Kesimpulan yang berbeda mengenai pengendalian bersama dan apakah suatu pengaturan adalah sebuah operasi bersama atau ventura bersama, dapat memiliki dampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Grup memiliki pengaturan bersama yang terstruktur melalui ventura bersama. Struktur dan persyaratan dari perjanjian kontraktual mengindikasikan bahwa Grup memiliki hak atas aset bersih dari pengaturan bersama tersebut. Grup menilai fakta dan kondisi lain yang

Critical Judgments in Applying Accounting Policies

Below are the critical judgments, apart from those involving estimations, that the Directors have made in the process of applying the Group accounting policies and that have the most significant effect on the amounts recognized in the consolidated financial statements.

Interests in Joint Arrangements

Judgement is required to determine when the Group has joint control, which requires an assessment of the relevant activities and when the decisions in relation to those activities require unanimous consent. The Group has determined that the relevant activities for its joint arrangements are those relating to the financial, operating and capital decisions of the arrangement.

Judgement is also required to classify a joint arrangement as either a joint operation or a joint venture. Classifying the arrangement requires the Group to assess its rights and obligations arising from the arrangement. Specifically, it considers:

- *The structure of the joint arrangement - whether it is structured through a separate vehicle*
- *When the arrangement is structured through a* separate *vehicle, the Group also considers the rights and obligations arising from:*
  a. The legal form of the separate vehicle;
  b. The terms of the contractual arrangement; and
  c. Other relevant facts and circumstances.

This assessment often requires significant judgement. A different conclusion on joint control and also whether the arrangement is a joint operation or a joint venture, may materially impact the consolidated financial statements.

The Group has joint arrangements which are structured through joint ventures. These structures and the terms of the contractual arrangement indicate that the Group has rights to the net assets of the arrangement. The Group also assessed the other facts and

berkaitan dengan pengaturan ini dan menyimpulkan bahwa pengaturan tersebut merupakan sebuah ventura bersama.

circumstances relating to these arrangements and concluded that the arrangements are joint ventures.

Sumber Ketidakpastian Estimasi
Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini:

Sources of Estimation Uncertainty
The key assumptions concerning future and other key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are discussed below:

Pengakuan Pendapatan Konstruksi dan Beban Pokok Pendapatan
Grup mengakui pendapatan konstruksi dan beban pokok pendapatan dari proyek yang masih dalam progress pembangunan berdasarkan metode persentase penyelesaian. Asumsi yang penting diperlukan adalah dalam menentukan tahap penyelesaian (persentase penyelesaian) dan jumlah estimasi pendapatan dan jumlah biaya pembangunan. Dalam membuat asumsi, Grup mengevaluasinya berdasarkan pengalaman di waktu yang lampau dan bantuan dari spesialis. Jumlah pendapatan konstruksi dan beban pokok pendapatan yang terkait disajikan di Catatan 34 dan 35.

Construction Revenue and Cost of Revenue Recognition
The Group recognizes revenues from construction and cost of revenues from the construction and project in development stage based on percentage of completion method. Important assumption is required in determining the stage completion (percentage of completion) and the amount of estimated income and total development cost. In making assumptions, the Group evaluates them based on past experience and with the assistance of specialist. Total construction revenues and related cost of revenues are presented in Notes 34 and 35.

Rugi Penurunan Nilai pada Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan yang Diamortisasi
Grup menilai penurunan nilai pada aset keuangan dengan biaya perolehan yang diamortisasi pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laba rugi, manajemen harus mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan. Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan *roll rate* dan *discounted cash flow* untuk menilai piutang usaha, piutang retensi, tagihan bruto dan piutang lain-lain. Nilai tercatat aset keuangan telah diungkapkan dalam Catatan 4, 5, 6, 7, 8 dan 14.

Impairment Loss on Financial Asset Measured at Amortized Cost

The Group assesses its financial assets measured at amortized cost for impairment at each reporting date. In determining whether an impairment loss should be recorded in profit or loss, management makes a judgement as to whether there is reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort about past events, current conditions and forecasts of future conditions. The Group applies simplified approach using roll rate dan discounted cash flow to measuring account receivable, retention receivable, gross amount due from customers and other receivables. The carrying mounts of financial assets are disclosed in Notes 4, 5, 6, 7, 8 and 14.

Penyisihan Penurunan Pekerjaan dalam Proses Konstruksi (PDPK)
Rugi penurunan nilai diakui sebesar nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkannya. Perhitungan manajemen atas estimasi penurunan nilai PDPK melibatkan estimasi dan pertimbangan yang signifikan. Grup membandingkan jumlah terpulihkan dengan

Allowance Impairment for Construction Work in Progress (CWIP)
An impairment loss is recognized at the carrying amount of the asset in excess of its recoverable amount. Management's calculation of the estimated impairment of CWIP involves significant estimation and judgment. The Group compares the recoverable amount with the

nilai tercatat untuk mengukur penurunan nilai PDPK. Grup menelaah estimasi penurunan nilai PDPK berdasarkan kondisi masing-masing proyek dengan mempertimbangkan data historis, asumsi atau ekspektasi kondisi masa depan. Nilai tercatat pekerjaan dalam proses konstruksi diungkapkan dalam Catatan 13.

carrying amount to measure the impairment of CWIP. The Group reviews the estimated impairment of CWIP based on the conditions of each project by considering historical data, assumptions or expectations of future conditions. The carrying amount of construction work in progress is disclosed in Note 13.

Penyisihan Penurunan Keusangan Persediaan

Penyisihan penurunan keusangan persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Penyisihan dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi. Nilai tercatat persediaan diungkapkan dalam Catatan 9.

Allowance Impairment for Obsolescence of Inventories

Allowance for impairment for obsolescence of inventories is estimated based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the inventories' own physical conditions, their market selling prices, estimated costs of completion and estimated costs to be incurred for their sales. The allowance is reevaluated and adjusted as additional information received affects the amount estimated. The carrying amount of inventories is disclosed in Note 9.

Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Tetap

Masa manfaat setiap aset tetap Grup ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi di masa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Estimated Useful Lives of Fixed Assets

The useful life of each of the Group's fixed assets is determined based on the expected use of the assets. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tersebut. Nilai tercatat aset tetap diungkapkan dalam Catatan 18.

A change in the estimated useful life of any item of fixed assets would affect the recorded depreciation expense and decrease in the carrying amounts of these assets. The carrying amounts of fixed assets are disclosed in Note 18.

Pengukuran Nilai Wajar untuk Properti Investasi

Properti investasi Grup diukur pada nilai wajar untuk tujuan pelaporan keuangan. Dalam mengestimasi nilai wajar, Grup menugaskan penilai independen untuk melakukan penilaian. Penilaian tersebut didasarkan pada pendekatan pendapatan, biaya, dan data pasar. Nilai tercatat properti investasi diungkapkan dalam Catatan 16.

Fair Value Measurements of Investment Properties

The Group's investment properties was measured at fair value for financial reporting purposes. In estimating the fair value, the Group engaged independent valuers to perform the valuation. Such valuation was based on income, cost, and market data approaches. The carrying amount of the investment properties are disclosed in Note 16.

Imbalan Kerja

Employee Benefits

Penentuan liabilitas imbalan pascakerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Realisasi aktual yang berbeda dari asumsi Grup akibatnya akan berpengaruh terhadap jumlah biaya yang diakui di laba rugi dan penghasilan komprehensif lain serta liabilitas yang diakui di masa mendatang. Walaupun asumsi Grup dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada kenyataannya atau perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap liabilitas imbalan pascakerja Grup. Nilai tercatat liabilitas imbalan pascakerja diungkapkan dalam Catatan 28.

The determination of employee benefits obligation is dependent on selection of certain assumptions used by actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rate and rate of salary increase. Actual results that differ from the Group's assumptions generally affect the recognized expense in profit or loss and other comprehensive income and recorded obligation in future periods. While it is believed that the Group's assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual results or significant changes in assumptions may materially affect the Group's employee benefit liabilites. The carrying amounts of employee benefits liabilites are disclosed in Note 28.

4. Kas dan Setara Kas / *4. Cash and Cash Equivalents*

	2024 Rp	2023 Rp
Kas/ *Cash on Hand*	2,451,780,735	2,827,650,865
Kas di Bank/ *Cash in Bank*	882,318,243,856	722,545,989,025
Deposito Berjangka/ *Time Deposits*	145,962,137,368	311,055,395,343
Jumlah/ *Total*	**1,030,732,161,959**	**1,036,429,035,233**

Rincian kas di bank dan setara kas berdasarkan bank adalah sebagai berikut:

Details of cash in bank and cash equivalents based on bank are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp
Kas di Bank/ *Cash in Bank*		
Pihak Berelasi/ *Related Parties* (Catatan/*Note* 39)	**870,542,726,079**	**633,601,918,199**
Pihak Ketiga/ *Third Parties*		
Rupiah		
PT Bank DKI	10,124,360,039	86,771,990,536
PT Bank Central Asia Tbk	848,843,021	1,209,186,540
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	654,338,321	37,223,678
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	77,831,993	79,025,707
PT Bank CIMB Niaga Tbk	63,027,153	841,171,021
PT Bank Nationalnobu Tbk	7,117,250	--
PT Bank Mega Tbk	--	5,473,344
Sub Jumlah/ *Sub Total*	**11,775,517,777**	**88,944,070,826**
Jumlah Kas di Bank/ *Total Cash in Bank*	**882,318,243,856**	**722,545,989,025**

	2024 Rp	2023 Rp
Deposito Berjangka/ *Time Deposits*		
Pihak Berelasi/ *Related Parties*		
Pihak Berelasi/ *Related Parties* (Catatan/*Note* 39)	**145,962,137,368**	**301,055,395,343**
Pihak Ketiga/ *Third Parties*		
PT Bank DKI	--	10,000,000,000
Sub Jumlah/ *Sub Total*	**--**	**10,000,000,000**
Jumlah Deposito Berjangka/ *Total Time Deposits*	**145,962,137,368**	**311,055,395,343**
Jangka Waktu Deposito Berjangka/ *Time Deposits Period*	1-3 bulan/ *months*	1-3 bulan/ *months*
Tingkat Bunga Deposito Berjangka/ *Time Deposits Interest Rate*		
Rupiah	2,25% - 4,25%	2,25% - 6,00%

5. Piutang Usaha – Neto / *5. Trade Receivables – Net*

Piutang usaha berdasarkan jenis usaha adalah sebagai berikut:

Trade receivables by type of business are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Jasa Konstruksi	548,167,264,415	598,018,852,624	*Construction*
Konsesi	20,013,224,630	1,180,590,879	*Concession*
Properti	82,286,552,484	21,770,392,326	*Property*
Industri	31,826,906	180,996,090,514	*Industry*
Subjumlah	**650,498,868,435**	**801,965,926,343**	***Subtotal***
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(105,338,241,928)	(106,042,459,775)	*Less: Allowance for Impairment Losses*
Jumlah Piutang Usaha - Neto	**545,160,626,507**	**695,923,466,568**	***Total Trade Receivables - Net***

Piutang usaha seluruhnya merupakan transaksi dalam mata uang Rupiah.

All trade receivables are transactions in Rupiah currency.

Rincian piutang usaha berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

Details of trade receivables based on customer are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp
Pihak Berelasi/ *Related Parties* (Catatan/ *Note* 39)	**264,426,455,139**	**388,014,643,135**
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Less: Allowance for Impairment Losses*	(1,226,546,977)	(17,393,061,584)
Jumlah Pihak Berelasi - Bersih/ *Total Related Parties - Net*	**263,199,908,162**	**370,621,581,551**
Pihak Ketiga/ *Third Parties*	**386,072,413,296**	**413,951,283,208**
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Less: Allowance for Impairment Losses*	(104,111,694,951)	(88,649,398,191)
Jumlah Pihak Ketiga - Bersih/ *Total Third Parties - Net*	**281,960,718,345**	**325,301,885,017**
Jumlah Piutang Usaha - Bersih/ *Total Trade Receivables - Net*	**545,160,626,507**	**695,923,466,568**

Rincian umur piutang usaha berdasarkan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

The details of the age of trade receivables based on the due date are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Sudah Jatuh Tempo:			*Overdue:*
Sampai dengan 1 Bulan	96,453,676,883	70,544,537,838	*Up to 1 Month*
>1 s.d 3 Bulan	29,884,376,112	14,398,999,337	*> 1 Month - 3 Month*
>3 bulan s.d 6 Bulan	508,718,875	109,229,087,752	*> 3 Month - 6 Month*
>6 Bulan s.d 1 Tahun	54,683,049,763	68,916,556,573	*> 6 Month - 1 Year*
>1 Tahun	468,969,046,802	538,876,744,843	*> 1 Year*
Subjumlah	**650,498,868,435**	**801,965,926,343**	***Subtotal***
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(105,338,241,928)	(106,042,459,775)	*Less: Allowance for Impairment Losses*
Jumlah Piutang Usaha - Bersih	**545,160,626,507**	**695,923,466,568**	***Total Trade Receivables - Net***

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:

Movements in allowance for impairment loss of trade receivable are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Saldo Awal Tahun	106,042,459,775	100,636,295,931	*Balance at Beginning of the Year*
Penurunan Nilai Tahun Berjalan	67,851,023,353	58,438,525,091	*Impairment During the Year*
Pemulihan Tahun Berjalan	(68,555,241,200)	(53,032,361,247)	*Recovery During the Year*
Saldo Akhir Tahun	**105,338,241,928**	**106,042,459,775**	***Balance at End of the Year***

Manajemen berpendapat bahwa kerugian penurunan nilai piutang cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang tersebut.

Management believes that allowance for impairment losses on receivables is adequate to cover possible losses from uncollectible accounts.

Per 31 Desember 2024 dan 2023, piutang usaha masing-masing sebesar Rp254.801.970.779 dan Rp427.208.754.248 telah dijaminkan atas pinjaman bank dan lembaga keuangan lainnya (Catatan 27 dan 43).

As of December 31, 2024 and 2023, trade receivables amounting to Rp254,801,970,779 and Rp427,208,754,248, respectively, were secured as collateral for loans to banks and other financial institutions (Notes 27 and 43).

Jumlah piutang usaha mencukupi untuk memenuhi persyaratan penjaminan piutang usaha atas fasilitas pinjaman yang diterima.

The total amount of trade receivables satisfies guarantee receivable provisions of loan facilities granted to the Company.

6. Piutang Retensi – Neto / *6. Retention Receivables – Net*

Rincian piutang retensi berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

Details of retention receivables based on customers are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp
Pihak Berelasi/ *Related Parties* (Catatan/*Note* 39)	**164,883,573,491**	**154,205,139,125**
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Less: Allowance for Impairment Losses*	(3,170,644,421)	(7,322,587,037)
Jumlah Pihak Berelasi - Bersih/ *Total Related Parties - Net*	**161,712,929,070**	**146,882,552,088**

	2024 Rp	2023 Rp
Pihak Ketiga/ *Third Parties*	**465,058,788,254**	**445,239,424,290**
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Less: Allowance for Impairment Losses*	(66,815,506,355)	(53,143,167,011)
Jumlah Pihak Ketiga - Bersih/ *Total Third Parties - Net*	**398,243,281,899**	**392,096,257,279**
Jumlah Piutang Retensi - Bersih/ *Total Retention Receivables - Net*	**559,956,210,969**	**538,978,809,367**

Rincian umur piutang retensi berdasarkan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

The details of the age of retention receivables based on the due date are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Sudah Jatuh Tempo:			*Overdue:*
Sampai dengan 1 Bulan	8,783,810,867	6,718,074,129	*Up to 1 Month*
>1 s.d 3 Bulan	31,378,251,950	22,638,047,823	*> 1 Month - 3 Month*
>3 bulan s.d 6 Bulan	10,246,569,407	31,115,421,776	*> 3 Month - 6 Month*
>6 Bulan s.d 1 Tahun	26,626,072,056	81,375,226,422	*> 6 Month - 1 Year*
>1 Tahun	552,907,657,465	457,597,793,265	*> 1 Year*
Subjumlah	**629,942,361,745**	**599,444,563,415**	***Subtotal***
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(69,986,150,776)	(60,465,754,048)	*Less: Allowance for Impairment Losses*
Jumlah Piutang Retensi - Bersih	**559,956,210,969**	**538,978,809,367**	***Total Retention Receivables - Net***

Piutang retensi seluruhnya merupakan transaksi dalam mata uang Rupiah.

All retention receivables are transactions in Rupiah currency.

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang retensi adalah sebagai berikut:

Movements in allowance for impairment loss of retention receivables are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Saldo Awal Tahun	60,465,754,048	66,813,288,511	*Balance at Beginning of the Year*
Penurunan Nilai Tahun Berjalan	39,111,880,761	27,327,806,006	*Impairment During the Year*
Pemulihan Tahun Berjalan	(29,591,484,033)	(33,675,340,469)	*Recovery During the Year*
Saldo Akhir Tahun	**69,986,150,776**	**60,465,754,048**	***Balance at End of the Year***

Manajemen berpendapat bahwa kerugian penurunan nilai piutang retensi cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang retensi tersebut.

Management believes that allowances for impairment losses on retention receivables are adequate to cover possible losses from uncollectible of retention receivables.

7. Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja – Neto / *7. Gross Amount Due from Customers – Net*

Rincian tagihan bruto kepada pemberi kerja berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

Details of gross amount due from customers based on customers are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp
Tagihan Bruto ke Pemberi Kerja/ *Gross Amount Due from Customers*		
Pihak Berelasi/ *Related Parties* (Catatan/ *Note* 39)	**195,252,862,245**	**240,297,648,130**
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Less: Allowance for Impairment Losses*	(131,093,920)	(3,439,689,104)
Subjumlah Pihak Berelasi - Bersih/ *Subtotal Related Parties - Net*	**195,121,768,325**	**236,857,959,026**
Pihak Ketiga/ *Third Parties*	**266,326,847,260**	**324,149,484,799**
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Less: Allowance for Impairment Losses*	(24,928,789,589)	(24,577,255,327)
Subjumlah Pihak Ketiga - Bersih/ *Subtotal Third Parties - Net*	**241,398,057,671**	**299,572,229,472**
Total Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja-Bersih/ *Gross Amount Due from Customers-Net*	**436,519,825,996**	**536,430,188,498**

Tagihan bruto kepada pemberi kerja seluruhnya merupakan transaksi dalam mata uang Rupiah.

All gross amount due from customers are transactions in Rupiah.

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai tagihan bruto kepada pemberi kerja adalah sebagai berikut:

Movements in allowance for impairment loss on gross amount due from customers are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Saldo Awal Tahun	28,016,944,431	31,460,538,992	*Balance at Beginning of the Year*
Penurunan Nilai Tahun Berjalan	23,689,574,204	17,330,487,943	*Impairment During the Year*
Pemulihan Tahun Berjalan	(26,646,635,126)	(20,774,082,504)	*Recovery During the Year*
Saldo Akhir Tahun	**25,059,883,509**	**28,016,944,431**	***Balance at End of the Year***

Rincian umur tagihan bruto berdasarkan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

The details of the age of gross amount based on the due date are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Sudah Jatuh Tempo:			*Overdue:*
Sampai dengan 1 Bulan	160,941,125,440	96,992,784,562	*Up to 1 Month*
>1 s.d 3 Bulan	28,005,781,506	121,353,045,983	*> 1 Month - 3 Month*
>3 bulan s.d 6 Bulan	14,656,101,601	64,280,189,747	*> 3 Month - 6 Month*
>6 Bulan s.d 1 Tahun	1,683,316,330	18,689,533,779	*> 6 Month - 1 Year*
>1 Tahun	256,293,384,628	263,131,578,858	*> 1 Year*
Subjumlah	**461,579,709,505**	**564,447,132,929**	***Subtotal***
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(25,059,883,509)	(28,016,944,431)	*Less: Allowance for Impairment Losses*
Jumlah Tagihan Bruto - Bersih	**436,519,825,996**	**536,430,188,498**	***Total Gross Amount - Net***

Manajemen berpendapat bahwa kerugian penurunan nilai tagihan bruto cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya tagihan bruto tersebut.

The Management believes that allowance for impairment losses on gross amount are adequate to cover possible losses from uncollectible of gross amount accounts.

8. Piutang Yang Belum Ditagih / *8. Unbilled Receivables*

	2024 Rp	2023 Rp
Piutang yang Belum Ditagih/ *Unbilled Receivables*		
Pelanggan/ *Customer* KSO WG - ABIPRAYA	3,854,695,314	--
Pelanggan/ *Customer* Kokar WG	2,404,915,651	2,404,915,652
Pelanggan/ *Customer* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2,328,828,828	--
Pelanggan/ *Customer* KSO WG - APIK	640,240,000	--
Pelanggan/ *Customer* PT Hutama Karya (Persero) Tbk	106,400,000	106,400,000
Pelanggan/ *Customer* PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	25,500,000	25,500,000
Pelanggan/ *Customer* PT Situasi Enak Sekali	--	726,966,838
Total Piutang Yang Belum Ditagih/ *Unbilled Receivables*	**9,360,579,793**	**3,263,782,490**

Akun ini merupakan piutang usaha yang belum ditagihkan selain dari aktivitas pelaksanaan proyek.

This account represents unbilled account receivables arising from activities other than project construction activities.

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang yang belum ditagih adalah sebagai berikut:

The movements of allowance for impairment loss on unbilled receivables are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Saldo Awal Tahun	--	89,028,503	*Balance at Beginning of the Year*
Penurunan Nilai Tahun Berjalan	--	7,857,991	*Impairment During the Year*
Pemulihan Tahun Berjalan	--	(96,886,494)	*Recovery During the Year*
Saldo Akhir Tahun	**--**	**--**	***Balance at End of the Year***

Manajemen berpendapat bahwa kerugian penurunan nilai piutang yang belum ditagih cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang yang belum ditagih tersebut.

Management believes that allowances for impairment losses on unbilled receivables are adequate to cover possible losses from uncollectible of unbilled receivables accounts.

9. Persediaan / *9. Inventories*

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	2024 Rp	2023 Rp	
Persediaan Lancar			***Current Inventory***
Persediaan Jasa Konstruksi			***Inventory of Construction***
Persediaan Bahan untuk Konstruksi	142,121,081,520	155,588,691,302	*Inventory of Construction Materials*
Persediaan Properti			***Inventory of Property***
Bangunan Jadi	203,344,170,119	204,007,129,583	*Building*
Persediaan Industri			***Inventory of Industry***
Barang *Assembly*	3,306,510,915	24,755,064,017	*Assembly Goods*
Persediaan Bahan untuk Industri	1,255,834,022	17,281,173,813	*Inventory of Industry Materials*
Jumlah Persediaan Lancar	**350,027,596,576**	**401,632,058,715**	***Total Current Inventory***
Persediaan Tidak Lancar			***Non Current Inventory***
Tanah akan Dikembangkan	46,677,650,000	46,677,650,000	*Land for Development*
Jumlah Persediaan	**396,705,246,576**	**448,309,708,715**	***Total Inventory***

Persediaan bahan untuk konstruksi merupakan persediaan material dan perlengkapan proyek yang tersedia di gudang proyek yang dimiliki oleh Perusahaan.

Inventories of construction materials are projects materials inventory stored at project warehouses owned by the Company.

Tingkat penyelesaian bangunan telah mencapai 100% dari nilai kontrak serta tidak ada biaya pinjaman yang dikapitalisasi.

The progress of the buildings has reached 100% of the contract value and no borrowing costs capitalized.

Persediaan bangunan jadi terdiri dari:

Inventories of building consist of:

	2024 Rp	2023 Rp	
Tamansari Tera	93,028,841,611	93,691,801,075	*Tamansari Tera*
Tamansari Mahogany	74,486,487,635	74,486,487,635	*Tamansari Mahogany*
Apartemen Bale Hinggil	17,222,727,273	17,222,727,273	*Bale Hinggil Apartment*
Apartemen Sentra Land	15,606,113,600	15,606,113,600	*Sentra Land Apartment*
Apartemen Sudirman Hill	3,000,000,000	3,000,000,000	*Sudirman Hill Apartment*
Jumlah	**203,344,170,119**	**204,007,129,583**	***Total***

Tamansari Tera
Persediaan Tamansari Tera merupakan persediaan bangunan jadi yang terletak di atas tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 764 seluas 2.149 m^2 atas nama Perusahaan yang berlokasi di Jalan Tera No. 28, Kelurahan Braga, Bandung, sesuai dengan Akta Memorandum Kesepakatan tanggal 1 Maret 2013 antara Perusahaan dengan Tuan Andi Ahsan Nasrudin. Persediaan bangunan jadi terdiri dari 62 unit apartemen dan 17 unit komersial.

Tamansari Tera
Tamansari Tera is a finished building inventory located on the land with right of use certificate (HGB) letter No. 764 covering an area of 2,149 sqm on behalf of the Company, located at Tera No. 28, Braga, Bandung, in accordance with the Deed of Memorandum of Understanding dated March 1, 2013 between the Company with Mr. Andi Ahsan Nasrudin. Finished building inventories consist of 62 apartment units and 17 commercial units.

Persediaan bangunan dalam konstruksi seluruhnya telah menjadi persediaan bangunan jadi.

Building in construction inventories have all become finished building inventories.

Tamansari Mahogany
Persediaan Tamansari Mahogany merupakan persediaan bangunan jadi yang berlokasi di Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Persediaan bangunan jadi terdiri dari 119 unit apartemen dan 9 unit komersial.

Tamansari Mahogany
Tamansari Mahogany is a finished building inventory located in Margakaya Village, Teluk Jambe District, Karawang Regency, West Java Province. Finished building inventories consist of 119 apartment units and 9 commercial units.

Apartemen Bale Hinggil
Persediaan Apartemen Bale Hinggil sebanyak 99 unit yang terletak di Jalan Dr. Sukarno, Kelurahan Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Surabaya.

Bale Hinggil Apartment
Inventories of Apartment Bale Hinggil are 99 units located in Jalan Dr. Sukarno, Medokan Semampir Sub-district, Sukolilo District, Surabaya.

Apartemen Bale Hinggil diperoleh dari Pihak Pengembang *(Developer*) yaitu PT Tlatah Gema Anugrah sesuai dengan Perjanjian Pokok Jual Beli Unit Khusus Atas Unit Satuan Rumah Susun "Apartemen Bale Hinggil" No: 060/MKHT-IH/TGA/15- III/2013 tanggal 1 Maret 2013, dimana Perusahaan sebagai kontraktor atas pembangunan apartemen tersebut.

Bale Hinggil Apartment was obtained from developer PT Tlatah Gema Anugrah in accordance with the principal Agreement of Sale and Purchase Special Unit on Apartment Units "Apartment Bale Hinggil" No: 060/MKHT-IH/TGA/15-III/2013 dated March 1, 2013, where the Company is a contractor on the construction of the apartments.

Apartemen Sentra Land
Persediaan Apartemen Sentra Land sebanyak 30 unit yang terletak di Jalan Ki Mangunsarkoro No. 36, Semarang.

Apartemen Sentra Land diperoleh dari Kerjasama Usaha (KSU) antara Perum Perumnas dan PT Propernas Griya Utama sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Apartemen nomor: 014/PPJB-SL/PGU/III/2014 tanggal 7 Maret 2014, dimana Perusahaan sebagai kontraktor atas pembangunan apartemen tersebut.

Sentra Land Apartment
Inventory Sentra Land Apartment consists of 30 units located in Jalan Ki Mangunsarkoro No. 36, Semarang.

Sentra Land Apartment was acquired from Kerjasama Usaha (KSU) Perum Perumnas and PT Propernas Griya Utama in accordance with the Sale and Purchase Agreement Unit Apartment number: 014/PPJB- SL/PGU/III/2014 dated March 7, 2014, where the Company is a contractor on the apartment building.

Apartemen Sudirman Hill
Persediaan Apartemen Sudirman Hill sebanyak 1 unit seluas 120 meter persegi yang terletak di Jalan Karet Pasar Baru Barat, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Apartemen Sudirman Hill diperoleh berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Apartemen nomor: PPJB.256/SH-APT/XI/2022 tanggal 17 November 2022.

Sudirman Hill Apartment
Inventory Sudirman Hill Apartment consists of 1 unit 120 meter square wide located at Jalan Karet Pasar Baru Barat, Tanah Abang, Central Jakarta.

Sudirman Hill Apartment was acquired in accordance with the Sale and Purchase Agreement Unit Apartment number: PPJB.256/SH-APT/XI/2022 dated November 17, 2022.

Tanah akan Dikembangkan
Tanah HGB No. 3320 atas nama Perusahaan seluas 11.556 m^2 yang berada di Jalan MT. Haryono, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, senilai Rp36.307.450.000.

Tanah HGB No.394 seluas 592 m^2 yang berada di Kampung Pasir Luhur RT.001 RW.010, Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat senilai Rp281.200.000.

Tanah HGB No. 01198 seluas 2.200 m^2 dan HGB No. 01343 seluas 54 m^2 atas nama Perusahaan yang berada di Kelurahan Gambut Barat, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan senilai Rp10.089.000.000 yang direklasifikasi dari aset tetap pada tahun 2023 (Catatan 18).

Berdasarkan penelaahan terhadap kondisi persediaan, manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak diperlukan penyisihan atas penurunan nilai persediaan dan tidak ada penghapusan persediaan yang rusak atau usang.

Land for Development
Land HGB No. 3320 on behalf of the Company of 11,556 sqm that is located in MT. Haryono, Air Putih Sub-Destrict, Samarinda Ulu District, Samarinda City, Province East Kalimantan worth Rp36,307,450,000.

Land HGB No.394 covering an area of 592 sqm wide located at Kampung Pasir Luhur RT.001 RW.010, Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Cibiru, Bandung, West Java amounted to Rp281,200,000.

Land HGB No. 01198 covering an area of 2,200 meter square wide and HGB No. 01343 54 sqm wide located at Kelurahan Gambut Barat, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan amounted to Rp10,089,200,000 that was reclassified from fixed assets in year 2023 (Note 18).

Based on the review on the condition of the inventories, the Company's management believes that no alowance for impairment of inventories is necessary and there is no removal of damaged or obsolete inventory.

10. Perpajakan / *10. Taxation*

a. Pajak Dibayar di Muka / *a. Prepaid Taxes*

	2024 Rp	2023 Rp	
Perusahaan			***The Company***
PPN-Masukan	301,002,925,044	186,175,435,702	*VAT-In*
PPh Final	29,641,816,275	37,918,144,606	*Final Income Tax*
Subjumlah	330,644,741,319	224,093,580,308	***Subtotal***
Entitas Anak			***Subsidiary***
PPN-Masukan	--	2,652,772,804	*VAT-In*
PPh Final	727,712,814	669,799,073	*Final Income Tax*
Subjumlah	727,712,814	3,322,571,877	***Subtotal***
Jumlah Pajak Dibayar Dimuka	**331,372,454,133**	**227,416,152,185**	***Total Prepaid Taxes***

b. Utang Pajak / *b. Tax Payable*

	2024 Rp	2023 Rp	
Perusahaan			***The Company***
PPh Pasal 4 (2)	4,704,989,809	4,533,450,907	*Tax Article 4 (2)*
PPh Pasal 21	2,016,164,529	4,453,929,155	*Tax Article 21*
PPh Pasal 23	343,187,480	1,062,242,341	*Tax Article 23*
PB-1	419,404,055	780,661,038	*PB-1*
PPh Final	378,174,564	488,784,002	*Final Income Tax*
Subjumlah	7,861,920,437	11,319,067,443	***Subtotal***
Entitas Anak			***Subsidiary***
PPN Keluaran	85,632,944	--	*VAT-Out*
PPh Pasal 21	21,553,694	9,470,673	*Tax Article 21*
PPh Pasal 23	25,156,585	7,623,113	*Tax Article 23*
PPh Pasal 4 (2)	9,908,951	227,900	*Tax Article 4 (2)*
Subjumlah	142,252,174	17,321,686	***Subtotal***
Jumlah Utang Pajak	**8,004,172,611**	**11,336,389,129**	***Total Tax Payable***

c. Pajak Penghasilan Final / *c. Final Income Tax*

Liabilitas Pajak Penghasilan Final / *Final Income Tax Liabilities*

	2024 Rp	2023 Rp	
PPh Final	47,860,115,224	99,056,659,752	*Final Income Tax*
Jumlah Liabilitas Pajak Penghasilan Final	**47,860,115,224**	**99,056,659,752**	***Total Final Income Tax Liability***

Beban Pajak Final / *Final Tax Expense*

	2024 Rp	2023 Rp	
Perusahaan	93,554,137,222	112,023,938,732	*The Company*
Entitas Anak	2,852,937,575	2,605,570,622	*Subsidiary*
Jumlah Beban Pajak Final	**96,407,074,797**	**114,629,509,354**	***Total Final Tax Expense***

11. Uang Muka / *11. Advances*

Akun ini terdiri dari: / *This account consist of:*

	2024 Rp	2023 Rp	
Uang Muka Pemasok	97,363,610,656	106,166,852,045	*Advances to Suppliers*
Uang Muka Subkontraktor	21,712,715,414	40,234,220,390	*Advances to Subcontractors*
Persekot Pekerjaan	4,958,402,225	10,689,195,556	*Advances to Employee*
Jumlah	**124,034,728,295**	**157,090,267,991**	***Total***

Uang muka kepada pemasok merupakan uang muka yang diberikan kepada pemasok sehubungan dengan pengadaan bahan baku dan material konstruksi di proyek.

Advances to suppliers are advances given to the suppliers in connection with the procurement of raw materials and construction materials for the project.

Uang muka kepada subkontraktor merupakan uang muka yang diberikan kepada subkontraktor sehubungan dengan kontrak pelaksanaan pekerjaan proyek, subkontraktor akan mengangsur kepada Perusahaan pada saat pembayaran prestasi kerja.

Advances to subcontractors represents advances given to the subcontractor in connection with the execution of the contract project work, the subcontractor will repay the Company at the time of payment of work performance.

Persekot pekerjaan merupakan uang muka yang diberikan kepada karyawan untuk kegiatan operasional proyek.

Advances to employees are advances given to employees for project operational activities.

12. Biaya Dibayar di Muka / *12. Prepaid Expense*

Biaya dibayar di muka merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan usaha perusahaan seperti biaya pelaksanaan proyek dan biaya usaha lainnya.

Prepaid expenses are expenses to be incurre in connection with business activities such as the project implementation cost and other business expenses.

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	2024 Rp	2023 Rp	
Biaya Proyek	214,555,656,116	92,981,667,648	*Project Expense*
Biaya Sewa	467,757,415	185,116,231	*Rent Expense*
Jumlah	**215,023,413,531**	**93,166,783,879**	***Total***

Biaya proyek dibayar di muka merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan proyek yang belum dapat diperhitungkan dengan pendapatan usaha karena pada tanggal laporan posisi keuangan, berita acara kemajuan fisik belum dapat ditandatangani pengawas lapangan dan atau berita acara penyerahan barang belum ditandatangani.

Prepaid project expenses are related to costs to be incurred for project purposes that are not yet accounted for with operating revenue because as of the date of the statement of financial position, the minutes of physical progress are not yet signed by the field supervisor and or the delivery of goods has not been signed.

Biaya sewa dibayar dimuka merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk sewa mess karyawan.

Prepaid rent expenses are related to costs to be incurred for rental of employee's housing.

13. Pekerjaan dalam Proses Konstruksi / *13. Construction Work in Progress*

	2024 Rp	2023 Rp
Pekerjaan Dalam Proses/ *Work In Progress*		
Pihak Berelasi/ *Related Parties* (Catatan/ *Note* 39)	**374,776,508,359**	**312,033,165,810**
Pihak Ketiga/ *Third Parties*	**437,710,349,000**	**258,706,741,504**
Jumlah Pekerjaan dalam Proses Konstruksi/ *Total Construction Work in Progress*	**812,486,857,359**	**570,739,907,314**

Akun pekerjaan dalam proses merupakan klaim atas pekerjaan yang masih dalam proses addendum kontrak kerja, proses arbitrase dan proses mediasi.

The work in progress account represents claims for work that is still in the addendum process on the work contract, arbitration process, and mediation process.

Rincian umur pekerjaan dalam proses berdasarkan tanggal pengeluaran sampai dengan tanggal laporan keuangan adalah sebagai berikut:

The details of the age of work in progress based on the issuance date up to date of financial statements are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Sudah Jatuh Tempo:			*Overdue:*
Sampai dengan 1 Bulan	140,585,804,690	169,448,431,647	*Up to 1 Month*
>1 s.d 3 Bulan	206,314,498,227	27,866,928,090	*> 1 Month - 3 Month*
>3 bulan s.d 6 Bulan	81,872,115,118	18,283,630,086	*> 3 Month - 6 Month*
>6 Bulan s.d 1 Tahun	13,324,029,329	52,985,918,496	*> 6 Month - 1 Year*
>1 Tahun	370,390,409,995	302,154,998,995	*> 1 Year*
Jumlah Pekerjaan dalam Proses - Bersih	**812,486,857,359**	**570,739,907,314**	***Total Work in Progress - Net***

14. Piutang Lain-lain / *14. Other Receivables*

	2024 Rp	2023 Rp
Pihak Berelasi/ *Related Parties* (Catatan/ *Note* 39)	**165,407,608,905**	**140,612,553,689**
Pihak Ketiga/ *Third Parties*	**6,481,549,963**	**6,204,360,101**
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Less: Allowance for Impairment Losses*	(5,008,645,339)	(4,109,109,456)
Jumlah Pihak Ketiga - Bersih/ *Total Third Parties - Net*	**1,472,904,624**	**2,095,250,645**
Jumlah/ *Total*	**166,880,513,529**	**142,707,804,334**

Mutasi cadangan kerugian penurunan piutang lain-lain adalah sebagai berikut:

Movements in allowance for impairment loss on other receivables are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Saldo Awal Tahun	4,109,109,456	2,869,390,123	*Balance at Beginning of the Year*
Penurunan Nilai Tahun Berjalan	1,014,498,098	1,239,719,333	*Impairment During the Year*
Pemulihan Tahun Berjalan	(114,962,215)	--	*Recovery During the Year*
Saldo Akhir Tahun	**5,008,645,339**	**4,109,109,456**	***Balance at End of the Year***

15. Penyertaan Saham / *15. Investment in Shares*

Penyertaan Saham/ *Investment in Shares*	Saldo Awal/ *Beginning Balance* Rp	Penambahan/ *Addition* Rp	Pengurangan/ *Deduction* Rp	Reklasifikasi/ *Reclassification* Rp	Saldo Akhir/ *Ending Balance* Rp
2024					
PT Patra Wijaya Realtindo	1,250,000,000	--	--	--	1,250,000,000
PT Wijaya Karya Bitumen	2,296,062,692	--	--	--	2,296,062,692
Jumlah/ *Total*	**3,546,062,692**	**--**	**--**	**--**	**3,546,062,692**
2023					
PT Patra Wijaya Realtindo	125,000,000,000	--	--	(123,750,000,000)	1,250,000,000
PT Wijaya Karya Bitumen	2,296,062,692	--	--	--	2,296,062,692
Jumlah/ *Total*	**127,296,062,692**	**--**	**--**	**(123,750,000,000)**	**3,546,062,692**

PT Patra Wijaya Realtindo

Perusahaan memiliki investasi kepada PT Patra Wijaya Realtindo berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang diaktakan oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dengan akta No. 67 tanggal 7 Agustus 2019. PT Patra Wijaya Realtindo bergerak dalam bidang Pembangunan, Pengembangan dan Properti di Jakarta Selatan dengan kepemilikan sebanyak 1.250 saham atau 10% dari saham yang beredar dengan harga sebesar Rp1.250.000.000.

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Para Pemegang Saham tanggal 16 Desember 2019, pemegang saham PT Patra Wijaya Realtindo sepakat untuk melakukan penambahan penyertaan saham. Atas kesepakatan tersebut Perusahaan akan menambahkan penyertaan saham di PT Patra Wijaya Realtindo sebesar Rp123.750.000.000.

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Para Pemegang Saham tanggal 22 November 2023, pemegang saham PT Patra Wijaya Realtindo sepakat untuk melakukan pengakhiran kesepakatan bersama atas uang muka setoran saham. Atas kesepakatan tersebut Perusahaan akan mendapatkan pengembalian uang atas setoran modal. Saldo penyertaan saham sebesar Rp123.750.000.000 direklasifikasi menjadi piutang lain-lain (Catatan 14 dan 48).

Saldo penyertaan saham PT Patra Wijaya Realtindo pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.250.000.000.

PT Wijaya Karya Bitumen

Perusahaan memiliki investasi kepada PT Wijaya Karya Bitumen yang bergerak dalam bidang eksplorasi dan pengolahan batuan aspal di kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara.

PT Patra Wijaya Realtindo

The Company has investments in PT Patra Wijaya Realtindo based on a Deed of Establishment of a Limited Company that has deed by Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, with deed No. 67 dated August 7, 2019. PT Patra Wijaya Realtindo which is engaged in Construction, Development and Property in South Jakarta with ownership of 1,250 shares or 10% of the outstanding shares amounting to Rp1,250,000,000.

Based on the Minutes of Shareholders' Agreement dated December 16, 2019, PT Patra Wijaya Realtindo's shareholders agreed to increase their investment in shares. Based on this agreement, the Company will increase its investment in shares amounting to Rp123,750,000,000.

Based on the Minutes of Shareholders' Agreement dated November 22, 2023, PT Patra Wijaya Realtindo's shareholders agreed to terminate the mutual agreement regarding the advance payment for shares. Based on this agreement, the Company will receive a refund of the share investment. The balance of investment in shares amounting to Rp123,750,000,000 was reclassified to other receivables (Note 14 and 48).

The balance of investment in shares of PT Patra Wijaya Realtindo as of December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp1,250,000,000.

PT Wijaya Karya Bitumen

The Company has investments in PT Wijaya Karya Bitumen which is engaged in the exploration and processing of asphalt rock in Buton district, Southeast Sulawesi.

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Wijaya Karya Bitumen yang telah diaktakan oleh Sri Ismiyati, S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Jakarta, dengan akta No. 112 tanggal 31 Agustus 2018, diputuskan bahwa menyetujui untuk melakukan peningkatan modal dasar PT Wijaya Karya Bitumen yaitu sebanyak 637 saham atau sebesar Rp637.000.000 kepada Perusahaan.

According to the extraordinary general meeting of shareholder of PT Wijaya Karya Bitumen that was notarized by Sri Ismiyati, S.H., the Notary and Land Deed Official (PPAT) in Jakarta with deed No. 112 dated August 31, 2018 decided that the Company agreed to increase the capital of PT Wijaya Karya Bitumen as much as 637 shares or amounting to Rp637,000,000 to the Company.

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Diluar Rapat PT Wijaya Karya Bitumen yang telah diaktakan oleh Ryan Bayu Candra, S.H. M.Kn., Notaris di Jakarta, dengan akta No. 102 tanggal 30 November 2020, diputuskan bahwa menyetujui untuk melakukan peningkatan modal dasar PT Wijaya Karya Bitumen yaitu sebanyak 757 saham atau sebesar Rp757.575.758 kepada Perusahaan. Akta ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0082483.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 10 Desember 2020.

According to the extraordinary general meeting of shareholder of PT Wijaya Karya Bitumen that was notarized by Ryan Bayu Candra, S.H. M.Kn., a Notary in Jakarta with deed No. 102 dated November 30, 2020 decided that it agreed to increase the authorized capital of PT Wijaya Karya Bitumen as much as 757 shares or amounting to Rp757,575,758 to the Company. This deed has been approved by the Ministry of Justice and Human Rights of Republic of Indonesia No. AHU-0082483.AH.01.02.TAHUN 2020 dated December 10, 2020.

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Wijaya Karya Bitumen yang telah diaktakan oleh Ryan Bayu Candra, S.H. Mkn., Notaris di Jakarta dengan akta No. 72 tanggal 22 Desember 2021, diputuskan bahwa menyetujui untuk melakukan peningkatan modal dasar PT Wijaya Karya Bitumen yaitu sebanyak 150 saham atau sebesar Rp150.000.000.

According to the extraordinary general meeting of shareholder of PT Wijaya Karya Bitumen that was notarized by Ryan Bayu Candra, S.H. M.Kn., a Notary in Jakarta with deed No. 72 dated December 22, 2021 decided that it agreed to increase the authorized capital of PT Wijaya Karya Bitumen as much as 150 shares or amounting to Rp150,000,000.

Berdasarkan Laporan Penilaian Saham PT Wijaya Karya Bitumen per 30 Juni 2020 KJPP Iskandar dan Rekan No. 00384/2.0118-00/BS/03/0520/1/IX/2020 tanggal 4 September 2020, nilai pasar saham per 30 Juni 2020 sebesar Rp1.486.193 per saham. Berdasarkan laporan tersebut, terdapat kenaikan nilai sebesar Rp486.193 per saham. Kenaikan nilai per saham ini telah dicatat dalam penghasilan komprehensif lain.

Based on the PT Wijaya Karya Bitumen Share Valuation Report as of June 30, 2020 KJPP Iskandar and Rekan No. 00384/2.0118-00/BS/03/0520/1/IX/2020 dated September 4, 2020, the market value of shares as of June 30, 2020 was Rp1,486,193 per share. Based on this report, there was gain amounted to of Rp486,193 per share. The gain was recorded in other comprehensive income.

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Wijaya Karya Bitumen yang telah diaktakan oleh Ryan Bayu Candra, S.H. Mkn., Notaris di Jakarta dengan akta No. 28 tanggal 19 April 2024, diputuskan bahwa menyetujui untuk melakukan peningkatan modal dasar PT Wijaya Karya Bitumen yaitu sebanyak 100.000 saham atau sebesar Rp1.000.000.000.

According to the extraordinary general meeting of shareholder of PT Wijaya Karya Bitumen that was notarized by Ryan Bayu Candra, S.H. M.Kn., a Notary in Jakarta with deed No. 28 dated April 19, 2024 decided that it agreed to increase the authorized capital of PT Wijaya Karya Bitumen as much as 100,000 shares or amounting to Rp1,000,000,000.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 saldo kepemilikan masing-masing sebanyak 1.594 lembar saham atau 0,61% dan 1% dari saham yang beredar masing-masing sebesar Rp2.296.062.692.

As of December 31, 2024 and 2023, the balance of ownership is 1,594 shares or 0.61% and 1% of the shares outstanding amounting to Rp2,296,062,692.

16. Properti Investasi / *16. Investment Properties*

	2024					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance* Rp	Penambahan / *Additions* Rp	Pengurangan / *Deductions* Rp	Perubahan Nilai Wajar/ *Change in Fair Value* Rp	Saldo Akhir/ *Ending Balance* Rp	
Nilai Wajar						***Fair Value***
Tanah	170,006,625,000	--	--	--	170,006,625,000	*Land*
Bangunan	89,406,800,000	--	--	--	89,406,800,000	*Building*
Jumlah	**259,413,425,000**	**--**	**--**	**--**	**259,413,425,000**	***Total***

	2023					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance* Rp	Penambahan / *Additions* Rp	Pengurangan / *Deductions* Rp	Perubahan Nilai Wajar/ *Change in Fair Value* Rp	Saldo Akhir/ *Ending Balance* Rp	
Nilai Wajar						***Fair Value***
Tanah	169,195,000,000	--	--	811,625,000	170,006,625,000	*Land*
Bangunan	88,993,600,000	--	--	413,200,000	89,406,800,000	*Building*
Jumlah	**258,188,600,000**	**--**	**--**	**1,224,825,000**	**259,413,425,000**	***Total***

Properti Investasi terdiri dari tanah di Jalan Ngagel, Surabaya sebesar Rp170.006.625.000 dan Rp169.195.000.000 per 31 Desember 2024 dan 2023, dan bangunan Fave Hotel Karawang masing-masing dengan saldo Rp89.406.800.000 dan Rp88.993.600.000 per 31 Desember 2024 dan 2023.

Investment Properties consist of land on Jalan Ngagel, Surabaya amounting to Rp170,006,625,000 and Rp169,195,000,000 as of December 31, 2024 and 2023, respectively, and Fave Hotel Karawang building, each with a balance of Rp89,406,800,000 and Rp88,993,600,000 as of December 31, 2024 and 2023, respectively.

Tanah terletak di Jalan Ngagel No. 155-157, Kelurahan Ngagel, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

The land is located at Jalan Ngagel No. 155-157, Kelurahan Ngagel, Wonokromo District, Surabaya City, East Java Province.

Tanah tersebut merupakan reklasifikasi dari tanah yang sedang dikembangkan. Tanah tersebut memiliki nilai perolehan sebesar Rp99.577.897.051 dan setelah dinilai oleh kantor penilai independen memiliki nilai wajar sebesar Rp170.006.625.000.

The land is a reclassification of the land under development. The land has an acquisition value of Rp99,577,897,051 and after being assessed by an independent appraisal office, it has a fair value of Rp170,006,625,000.

Berdasarkan penilaian dari penilai independen KJPP Mushofah Mono Igfirly & Rekan dalam laporannya pada tanggal 7 Februari 2024 No.00074/2.0132-01/PI/03/0353/1/II/2024 dan No.00072/2.0132-00/PI/07/0353/3/II/2024 sesuai dengan peraturan Bapepam-LK No. VIII.C.4 mengenai pedoman penilaian dan penyajian laporan penilaian properti di pasar modal. Kenaikan nilai wajar properti investasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.224.825.000 (Catatan 37).

Based on the assessment of of the independent appraiser KJPP Mushofah Mono Igfirly & Partners in its report on February 7, 2024 with No.00074/2.0132-01/PI/03/0353/1/II/2024 and No.00072/2.0132-00/PI/07/0353/3/II/2024 in accordance with Bapepam-LK regulations No. VIII.C.4 regarding guidelines for valuation and presentation of property valuation reports on the capital market. The increase of investment property's fair value as of December 31, 2023 amounted to Rp1,224,825,000 (Note 37).

Pendekatan yang digunakan dalam menentukan nilai wajar properti adalah pendekatan pasar dan pendapatan. Metode yang digunakan adalah perbandingan data pasar dan arus kas terdiskonto. Nilai wajar properti investasi tersebut telah didukung oleh bukti pasar.

The approach used in determining the fair value of the property is market and income approach. Methods used are market comparison and discounted cash flows. The fair value of the investment property has been supported by market evidence.

17. Aset Kerja Sama / *17. Assets of Co-operation*

	2024				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance* Rp	Penambahan / *Additions* Rp	Pengurangan / *Deductions* Rp	Saldo Akhir/ *Ending Balance* Rp	
Harga Perolehan					***Acquisition Cost***
Bangunan	443,479,118,632	--	--	443,479,118,632	*Building*
Jumlah	**443,479,118,632**	**--**	**--**	**443,479,118,632**	***Total***
Akumulasi Penyusutan					***Accumulated Depreciation***
Bangunan	195,144,428,573	10,846,232,748	--	205,990,661,321	*Building*
Jumlah	**195,144,428,573**	**10,846,232,748**	**--**	**205,990,661,321**	***Total***
Nilai Tercatat	**248,334,690,059**			**237,488,457,311**	***Carrying Value***

	2023				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance* Rp	Penambahan / *Additions* Rp	Pengurangan / *Deductions* Rp	Saldo Akhir/ *Ending Balance* Rp	
Harga Perolehan					***Acquisition Cost***
Bangunan	443,479,118,632	--	--	443,479,118,632	*Building*
Jumlah	**443,479,118,632**	**--**	**--**	**443,479,118,632**	***Total***
Akumulasi Penyusutan					***Accumulated Depreciation***
Bangunan	95,613,414,073	99,531,014,500	--	195,144,428,573	*Building*
Jumlah	**95,613,414,073**	**99,531,014,500**	**--**	**195,144,428,573**	***Total***
Nilai Tercatat	**347,865,704,559**			**248,334,690,059**	***Carrying Value***

Aset kerja sama operasi bangunan merupakan bangunan hotel De Braga. Hotel De Braga terletak diatas tanah HGB No. 649, atas nama PT Sarinah (Persero) seluas 1.763 m^2 di Jalan Braga No. 10, Bandung, Jawa Barat, pembangunan hotel tersebut merupakan kerjasama operasi antara Perusahaan dengan PT Sarinah (Persero), yang tertuang dalam Perjanjian Bangun, guna, serah (*Build, Operate And Transfer / BOT*) yang telah diaktakan dengan akta No.1, tanggal 10 Maret 2016, oleh Yunita Permatasari, S.H., Notaris di Jakarta (Catatan 43).

Asset of joint operation building consists of the De Braga Hotel. De Braga Hotel is located on HGB land No. 649, on behalf of PT Sarinah (Persero) covering an area of 1,763 sqm on Jalan Braga No. 10, Bandung, West Java, the construction of the hotel is a joint operation between the Company and PT Sarinah (Persero), which is stated in the Build, Operate And Transfer (BOT) agreement which was notarized with deed No.1, dated March 10, 2016, by Yunita Permatasari, S.H., Notary in Jakarta (Note 43).

Bangunan Graha Mantap merupakan aset kerjasama operasi antara WSP dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang diaktakan dengan akta No. 85 tanggal 28 Mei 2019, oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan Perjanjian Pendelegasian Pekerjaan Pengembangan Lahan Mandiri Proklamasi Nomor: HK.02.09/A.DIR.WG.6445/2019 tanggal 2 Agustus 2019. Bangunan tersebut dilakukan di atas tanah dengan luas lebih kurang 4.428 m^2, dengan Sertifikat Hak Milik, No. 787 atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang terletak di kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta (Catatan 43).

Building Graha Mantap is an asset of joint cooperation between WSP with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk notarized by deed No. 85 dated May 28, 2019, by Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta and Agreement on the Delegation of Land Development Work for Mandiri Proklamasi Number: HK.02.09/A.DIR.WG.6445/2019 dated August 2, 2019. The building was carried out on land with an area of approximately 4,428 sqm, with Certificate of Ownership, No. 787 on behalf of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, located in Pegangsaan, Menteng District, Central Jakarta City, DKI Jakarta (Note 43).

Bangunan Pertamina Mandalika International Street Circuit merupakan aset kerjasama dengan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau ITDC. Perjanjian Kerjasama ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Kerja No.

The Pertamina Mandalika International Street Circuit building is a collaboration asset with PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) or ITDC. The Cooperation Agreement is determined based on the Work Order No.

318/DIR/ITDC.01/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021 termasuk lampiran-lampirannya ("SPK"). Bangunan tersebut terletak di ITDC Mandalika Tourism Complex, Kuta, Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (Catatan 43).

318/DIR/ITDC.01/X/2021 dated October 7, 2021, including the attachments ("SPK"). The building is located at ITDC Mandalika Tourism Complex, Kuta, Pujut, Central Lombok Regency, West Nusa Tenggara (Note 43).

18. Aset Tetap / *18. Fixed Assets*

	2024					
	Saldo Awal / *Beginning Balance* Rp	Penambahan / *Additions* Rp	Pengurangan/ *Deductions* Rp	Reklasifikasi/ *Reclassification* Rp	Saldo Akhir / *Ending Balance* Rp	
Nilai Perolehan						***Acquisition Cost***
Tanah	19,348,292,500	--	--	--	19,348,292,500	*Land*
Bangunan Gedung	21,543,145,188	--	--	--	21,543,145,188	*Building*
Peralatan Kantor	35,714,130,136	2,587,808,524	--	(17,579,303,813)	20,722,634,847	*Office Equipment*
Peralatan Proyek	219,031,976,397	--	--	--	219,031,976,397	*Project Equipment*
Jumlah	**295,637,544,221**	**2,587,808,524**	**--**	**(17,579,303,813)**	**280,646,048,932**	***Total***
Akumulasi Penyusutan						***Accumulated Depreciation***
Bangunan Gedung	7,177,681,394	1,077,157,705	--	--	8,254,839,099	*Building*
Peralatan Kantor	14,083,591,212	4,984,616,627	--	(4,166,617,301)	14,901,590,538	*Office Equipment*
Peralatan Proyek	203,059,045,252	6,954,594,380	--	--	210,013,639,632	*Project Equipment*
Jumlah	**224,320,317,858**	**13,016,368,712**	**--**	**(4,166,617,301)**	**233,170,069,269**	***Total***
Nilai Tercatat	**71,317,226,363**				**47,475,979,663**	***Carrying Value***

	2023					
	Saldo Awal / *Beginning Balance* Rp	Penambahan / *Additions* Rp	Pengurangan/ *Deductions* Rp	Reklasifikasi/ *Reclassification* Rp	Saldo Akhir / *Ending Balance* Rp	
Nilai Perolehan						***Acquisition Cost***
Tanah	29,437,292,500	--	--	(10,089,000,000)	19,348,292,500	*Land*
Bangunan Gedung	21,543,145,188	--	--	--	21,543,145,188	*Building*
Peralatan Kantor	20,034,100,277	15,680,029,859	--	--	35,714,130,136	*Office Equipment*
Peralatan Proyek	219,031,976,397	--	--	--	219,031,976,397	*Project Equipment*
Jumlah	**290,046,514,362**	**15,680,029,859**	**--**	**(10,089,000,000)**	**295,637,544,221**	***Total***
Akumulasi Penyusutan						***Accumulated Depreciation***
Bangunan Gedung	6,100,524,338	1,077,157,056	--	--	7,177,681,394	*Building*
Peralatan Kantor	8,696,413,518	5,387,177,694	--	--	14,083,591,212	*Office Equipment*
Peralatan Proyek	182,218,584,974	20,840,460,278	--	--	203,059,045,252	*Project Equipment*
Jumlah	**197,015,522,830**	**27,304,795,028**	**--**	**--**	**224,320,317,858**	***Total***
Nilai Tercatat	**93,030,991,532**				**71,317,226,363**	***Carrying Value***

Pembebanan penyusutan aset tetap adalah sebagai berikut:

Depreciation expenses of fixed assets are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Beban Pokok Pendapatan (Catatan 35)	13,016,368,712	26,983,468,236	*Cost of Revenue (Note 35)*
Beban Usaha (Catatan 36)	--	321,326,792	*Operating Expense (Note 36)*
Jumlah	**13,016,368,712**	**27,304,795,028**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Grup memiliki aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan masing-masing sebesar Rp144.295.949.207 dan Rp132.367.819.294.

As of December 31, 2024 and 2023, the Group has fixed assets which are fully depreciated and are still used with cost amounting to Rp144,295,949,207 and Rp132,367,819,294, respectively.

Jumlah aset tetap di atas telah dijaminkan atas fasilitas pinjaman dari Bank (Catatan 43).

The total fixed assets mentioned above are pledged as collaterals for credit facilities from banks (Note 43).

Aset tanah milik Perusahaan terletak di Cibungur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, dengan luas tanah 26.490 m^2 dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 0068 dan No. 0069 tanggal 30 April 2019.

Land assets owned by the Company are located in Cibungur, Purwakarta, West Java, covering an area of 26,490 sqm with certificate of (HGB) No. 0068 and No. 0069 dated April 30, 2019.

Aset tanah milik Perusahaan terletak di Gambut, Banjar, Kalimantan Selatan, dengan luas tanah 4.316 m^2 dengan pelepasan setifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 01197, 01198, 01343, 01547 dan 01553.

Land assets owned by the Company are located in Gambut, Banjar, South Kalimantan, covering an area of 4,316 sqm. With the release of certificate of (HGB) No. 01197, 01198, 01343, 01547 and 01553.

Pada 31 Desember 2024, Grup melakukan reklasifikasi atas aset tetap menjadi aset takberwujud berupa perangkat lunak sebesar Rp17.579.303.813 (Catatan 19).

As of December 31, 2024, the Group reclassified fixed assets into intangible assets in the form of software amounted to Rp17,579,303,813 (Note 19).

Pada 31 Desember 2023, Tanah HGB No. 01198 seluas 2.200 m^2 dan HGB No. 01343 seluas 54 m^2 direklasifikasi ke tanah akan dikembangkan senilai Rp10.089.000.000 sesuai perubahan intensi manajemen atas tanah tersebut (Catatan 9).

As of December 31, 2023, Land HGB No. 01198 2,200 meter square wide and HGB No. 01343 54 meter square wide were reclassified to land for development amounted to Rp10,089,000,000 due to change of management's usage intention (Note 9).

Aset tetap peralatan telah diasuransikan dengan polis standar kebakaran di Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

The equipment fixed assets were insured with a standard fire policy in Indonesia with details as follows:

2024				
Perusahaan Asuransi / *Insurance Company*	**Jenis Aset / *Type of Assets***	**Nomor Polis / *Policy Number***	**Jangka Waktu / *Period***	**Nilai / *Amount* Rp**
PT Asuransi Asei Indonesia	Peralatan / *Equipment*	C020905062400002	1/8/24 - 1/8/25	88,960,950,000
Jumlah/ *Total*				**88,960,950,000**

2023				
Perusahaan Asuransi / *Insurance Company*	**Jenis Aset / *Type of Assets***	**Nomor Polis / *Policy Number***	**Jangka Waktu / *Period***	**Nilai / *Insurance* Rp**
PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk	Peralatan / *Equipment*	0213082200002	1/4/23 - 1/4/24	99,775,500,000
Jumlah/ *Total*				**99,775,500,000**

Sifat hubungan perusahaan asuransi dengan Perusahaan merupakan pihak ketiga.

The relationship of the Company with the insurance company is third parties.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Management believes that the insurance coverage is adequate to cover all possible losses on the assets insured.

Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset tetap, sehingga manajemen tidak melakukan penyisihan penurunan nilai aset tetap pada 31 Desember 2024 dan 2023.

Based on the management's review, there are no events or changes in circumstances, which indicated impairment on the carrying amount of the fixed assets, therefore management did not provide allowance of impairment on fixed assets as of December 31, 2024 and 2023.

19. Aset Takberwujud / *19. Intangible Assets*

	2024					
	Saldo Awal / *Beginning Balance* Rp	Penambahan / *Additions* Rp	Pengurangan/ *Deductions* Rp	Reklasifikasi/ *Reclassification* Rp	Saldo Akhir / *Ending Balance* Rp	
Nilai Perolehan						***Acquisition Cost***
Perangkat Lunak	--	3,020,977,696	--	17,579,303,813	20,600,281,509	*Software*
Jumlah	**--**	**3,020,977,696**	**--**	**17,579,303,813**	**20,600,281,509**	***Total***
Akumulasi Amortisasi						***Accumulated Amortization***
Perangkat Lunak	--	2,906,097,149	--	4,166,617,301	7,072,714,450	*Software*
Jumlah	**--**	**2,906,097,149**	**--**	**4,166,617,301**	**7,072,714,450**	***Total***
Nilai Tercatat	**--**				**13,527,567,059**	***Carrying Value***

Pada 31 Desember 2024, Grup melakukan reklasifikasi atas aset tetap menjadi aset takberwujud berupa perangkat lunak sebesar Rp17.579.303.813 (Catatan 18).

As of December 31, 2024, the Group reclassified fixed assets into intangible assets in the form of software amounted to Rp17,579,303,813 (Note 18).

Beban amortisasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebesar Rp2.906.097.149 dialokasikan pada beban pokok pendapatan (Catatan 35).

Amortization expenses for the year ended December 31, 2024 amounted to Rp2,906,097,149 is allocated to cost of revenue (Note 35).

20. Investasi pada Entitas Asosiasi / *20. Investment in Associate*

	2024			
Nama Entitas Asosiasi/ *Name of Associate*	Porsi Kepemilikan/ *Portion of Ownership* %	Saldo Awal/ *Beginning Balance* Rp	Bagian Laba (Rugi) Tahun Berjalan/ *Share in Income (Loss) on Current Year* Rp	Saldo Akhir/ *Ending Balance* Rp
PT Wijaya Karya Pracetak Gedung	49.00	23,027,110,013	(4,790,231,331)	18,236,878,682
Jumlah/ *Total*	**49.00**	**23,027,110,013**	**(4,790,231,331)**	**18,236,878,682**

	2023			
Nama Entitas Asosiasi/ *Name of Associate*	Porsi Kepemilikan/ *Portion of Ownership* %	Saldo Awal/ *Beginning Balance* Rp	Bagian Laba (Rugi) Tahun Berjalan/ *Share in Income (Loss) on Current Year* Rp	Saldo Akhir/ *Ending Balance* Rp
PT Wijaya Karya Pracetak Gedung	49.00	37,651,510,409	(14,624,400,396)	23,027,110,013
Jumlah/ *Total*	**49.00**	**37,651,510,409**	**(14,624,400,396)**	**23,027,110,013**

PT Wijaya Karya Pracetak Gedung

PT Wijaya Karya Pracetak Gedung (WPG) didirikan di Jakarta dengan Akta No. 142 tanggal 23 Desember 2016 ("Akta No. 142"), dibuat dihadapan Sri Ismiyati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU- 0001918.AH.01.01 tahun 2017 tanggal 17 Januari 2017. Berdasarkan susunan pemegang saham, Perusahaan memiliki 51% kepemilikan dengan nilai penyertaan saham sebesar Rp25.500.000.000.

PT Wijaya Karya Pracetak Gedung

PT Wijaya Karya Pracetak Gedung (WPG) established in Jakarta based on Deed No. 142 dated December 23, 2016 ("Deed No. 142"), made in the presence of Sri Ismiyati, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, and have been approved by the Minister of Law and Human Rights No. AHU-0001918.AH.01.01 year 2017 dated January 17, 2017. According to composition of shareholders, the Company owns 51% of ownership with share investment value amounted to Rp25,500,000,000.

Pada tanggal 25 Juli 2022, Perusahaan melakukan penjualan kepemilikan WPG sebesar 2% kepada PT Wijaya Karya Beton Tbk, entitas sepengendali, dan telah diaktakan berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT Wijaya Karya Pracetak Gedung oleh Fatma, S.H., M.Kn., M.H. Notaris di Jakarta dengan akta No. 13. Sisa penyertaan saham WPG milik Perusahaan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp24.500.000.000 atau setara dengan kepemilikan 49% dan mencatat transaksi investasi tersebut sebagai investasi pada entitas asosiasi. Nilai tercatat WPG pada saat penjualan adalah sebesar Rp37.736.667.141 dan jumlah tercatat bagian yang dilepas adalah Rp1.479.869.299. Selisih antara imbalan yang diterima dan jumlah tercatat bagian yang dilepas adalah sebesar Rp1.220.130.700 (Catatan 30).

On July 25, 2022, the Company sold 2% of WPG ownership to PT Wijaya Karya Beton Tbk, an entity under common control, and has been notarized based on Deed of Share Trade PT Wijaya Karya Pracetak Gedung by Fatma, S.H., M,Kn., M.H. notary in Jakarta No. 13. The remainder of Company's investment on WPG as of December 31, 2022 amounted to Rp24,500,000,000 or equivalent to 49% of ownership and record the investment transaction as investment in associate. WPG's carrying amount at the time of sale was Rp37,736,667,141 and the carrying amount of the part disposed of was Rp1,479,869,299. The difference between the consideration received and the carrying amount of the part disposed of is Rp1,220,130,700 (Note 30).

Jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan laba (rugi) entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

Total assets, liabilities, revenues and net income (loss) of the associate entity are as follows:

	2024	2023	
Aset	339,984,258,803	347,605,938,925	*Assets*
Liabilitas	302,754,327,164	300,611,836,858	*Liabilities*
Pendapatan	262,433,783,344	226,780,558,802	*Revenue*
Laba (Rugi)	(9,775,982,309)	(29,840,167,519)	*Profit (Loss)*

21. Investasi pada Ventura Bersama / *21. Investment in Joint Ventures*

Nama Ventura Bersama/ *Name of Joint Venture*	Proyek/ *Project*	2024 Saldo Awal/ *Beginning Balance* Rp	2024 Bagian Laba (Rugi) Tahun Berjalan/ *Share in Income (Loss) on Current Year* Rp	2024 Penambahan (Pengurangan)/ *Addition (Deduction)* Rp	2024 Saldo Akhir/ *Ending Balance* Rp
Investasi pada Ventura Bersama/ *Investment in Joint Ventures*					
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Mutiara Masyhur Sejahtera	Tamansari Prospero Konstruksi	182,660,583,147	230,742,243	538,251,323	183,429,576,713
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - Pemprov DKI (Gedung Sekolah 1)	Gedung Sekolah Paket 1	96,805,832,611	--	--	96,805,832,611
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - Pemprov DKI (Gedung Sekolah 5)	Gedung Sekolah Paket 5	53,066,145,652	--	--	53,066,145,652
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Mahoni Citra Persada	Tamansari Mahogany Konstruksi	36,948,615,930	--	--	36,948,615,930
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Nindya Karya	KSO Venue PON Aceh	8,031,000	24,118,500,429	3,965,591,838	28,092,123,267
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Adhi	KSO Pembangunan Hunian Pekerja Konstruksi (IKN)	24,472,222,880	--	1,867,171,008	26,339,393,888
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - Pemprov DKI (Gedung Sekolah 2)	Gedung Sekolah Paket 2	26,993,528,262	--	--	26,993,528,262
KSO PT Wijaya Karya Tbk - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	Paket 3 Pembangunan AGLC, ASLC, IFFLC UGM	14,921,008,110	--	585,608,969	15,506,617,079
KSO PT Wijaya Karya Tbk - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	KSO RSUPT Vertikal Surabaya	22,292,235,197	19,549,336,822	(28,555,493,512)	13,286,078,507
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	KSO BMKG 2	3,696,838	8,891,376,074	2,748,964,715	11,644,037,627
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Apik	KSO PEMBANGUNAN HUNIAN PEKERJA KONSTRUKSI 2 (IKN)	--	23,950,003,211	(12,632,267,802)	11,317,735,409
KSO PT Wijaya Karya Tbk - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	Pembangunan SGLC & ERIC UGM	11,875,817,786	--	83,804,688	11,959,622,474
KSO PT Wijaya Karya Tbk - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	BI Manokwari	3,045,383,075	4,445,979,209	792,095,986	8,283,458,270
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Brantas Abipraya	KSO PEMBANGUNAN HUNIAN PEKERJA TNI (IKN)	--	10,281,901,965	(4,231,351,850)	6,050,550,115
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Jaya Konstruksi	KSO PMJ Land	4,276,840	2,746,505,120	841,893,200	3,592,675,160
KSO PT Wijaya Karya Tbk - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	Rumah Dinas Prajurit TNI AD	5,631,920,929	--	79,599,655	5,711,520,584
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Pembangunan Perumahan	Perluasan Bandara Banjarmasin	3,071,416,829	--	--	3,071,416,829

2024

Nama Ventura Bersama/ *Name of Joint Venture*	Proyek/ *Project*	Saldo Awal/ *Beginning Balance* Rp	Bagian Laba (Rugi) Tahun Berjalan/ *Share in Income (Loss) on Current Year* Rp	Penambahan (Pengurangan)/ *Addition (Deduction)* Rp	Saldo Akhir/ *Ending Balance* Rp
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Pelitamaju Multiswakarsa	KSO TELKOM LANDMARK TOWER	--	1,281,194,195	1,156,272,945	2,437,467,140
KSO PT Wijaya Karya Tbk - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	Proyek Pembangunan Gedung 1 dan 2 ITB Innovation Park (IIP) Bandung Teknopolis	745,656,540	1,305,502,845	271,242,923	2,322,402,308
KSO PT Wijaya Karya Tbk - PT Shimizu Corporation	KSO Benhil Hotel Service Apartement	539,520,038	1,423,741,479	220,411,189	2,183,672,706
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Adhi	KSO DKUT GRESIK	--	1,771,870,014	347,738,313	2,119,608,327
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Brantas Abipraya	KSO GEREJA BASILIKA	--	--	27,294,615	27,294,615
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Jaya Konstruksi - PT Pembangunan Perumahan	Pembangunan Jakarta Internasional Stadium	25,442,842,769	--	(25,442,842,769)	--
KSO PT Wijaya Karya Gedung Tbk - PT Jaya Konstruksi	Proyek Pengembangan RSUD Kalideres	3,766,635,862	(332,331,826)	(3,434,304,036)	--
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Wijaya Karya Tbk	Pembangunan Hotel T3	1,774,680,293	--	(1,774,680,293)	--
KSO PT Wijaya Karya Tbk - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	UIN Serang	1,512,583,993	--	(1,512,583,993)	--
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Brantas Abipraya	Renovasi Gedung Sekolah Paket 1 Mamuju	858,276,612	--	(858,276,612)	--
Subjumlah/ *Subtotal*		516,440,911,193	99,664,321,780	(64,915,859,500)	551,189,373,473
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Less: Allowance for Impairment Losses*		(11,001,496,411)	--	(20,835,307,856)	(31,836,804,267)
Jumlah/ *Total*		**505,439,414,782**	**99,664,321,780**	**(85,751,167,356)**	**519,352,569,206**

2023

Nama Ventura Bersama/ *Name of Joint Venture*	Proyek/ *Project*	Saldo Awal/ *Beginning Balance* Rp	Bagian Laba (Rugi) Tahun Berjalan/ *Share in Income (Loss) on Current Year* Rp	Penambahan (Pengurangan)/ *Addition (Deduction)* Rp	Saldo Akhir/ *Ending Balance* Rp
Investasi pada Ventura Bersama/ *Investment in Joint Ventures*					
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Mutiara Masyhur Sejahtera	Tamansari Prospero Konstruksi	181,921,443,551	580,119,223	159,020,373	182,660,583,147
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - Pemprov DKI (Gedung Sekolah 1)	Gedung Sekolah Paket 1	96,805,832,611	--	--	96,805,832,611
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - Pemprov DKI (Gedung Sekolah 5)	Gedung Sekolah Paket 5	54,249,469,555	20,762,982	(1,204,086,885)	53,066,145,652
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Jaya Konstruksi - PT Pembangunan Perumahan	Pembangunan Jakarta Internasional Stadium	58,543,997,983	--	(33,101,155,214)	25,442,842,769
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Mahoni Citra Persada	Tamansari Mahogany Konstruksi	36,948,615,930	--	--	36,948,615,930
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - Pemprov DKI (Gedung Sekolah 2)	Gedung Sekolah Paket 2	26,993,775,761	(247,499)	--	26,993,528,262
KSO PT Wijaya Karya Tbk - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	Paket 3 Pembangunan AGLC, ASLC, IFFLC UGM	12,937,736,707	--	1,983,271,403	14,921,008,110
KSO PT Wijaya Karya Tbk - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	Pembangunan SGLC & ERIC UGM	3,739,131,199	--	8,136,686,587	11,875,817,786
KSO PT Wijaya Karya Tbk - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	KSO RSUPT Vertikal Surabaya	10,496,262,037	8,859,699,152	2,936,274,008	22,292,235,197
KSO PT Wijaya Karya Gedung Tbk - PT Jaya Konstruksi	Proyek Pengembangan RSUD Kalideres	11,036,612,418	150,894,197	(7,420,870,753)	3,766,635,862
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Adhi	KSO Pembangunan Hunian Pekerja Konstruksi (IKN)	8,037,609,555	453,245,128	15,981,368,197	24,472,222,880
KSO PT Wijaya Karya Tbk - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	Rumah Dinas Prajurit TNI AD	5,600,254,627	--	31,666,302	5,631,920,929
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Pembangunan Perumahan	Perluasan Bandara Banjarmasin	3,071,416,828	--	1	3,071,416,829
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - Jakarta Konsultindo	PKP Ciracas	6,627,369,715	--	(6,627,369,715)	--
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Brantas Abipraya	Renovasi Gedung Sekolah Paket 1 Mamuju	2,187,103,315	450,244,458	(1,779,071,161)	858,276,612
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Wijaya Karya Tbk	Pembangunan Hotel T3	1,775,380,293	--	(700,000)	1,774,680,293
KSO PT Wijaya Karya Tbk - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	UIN Serang	1,915,355,766	226	(402,771,999)	1,512,583,993
KSO PT Wijaya Karya Tbk - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	BI Manokwari	--	246,945,985	2,798,437,090	3,045,383,075
KSO PT Wijaya Karya Tbk - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	Proyek Pembangunan Gedung 1 dan 2 ITB Innovation Park (IIP) Bandung Teknopolis	1,075,314,285	--	(329,657,745)	745,656,540
KSO PT Wijaya Karya Tbk - PT Shimizu Corporation	KSO Benhil Hotel Service Apartement	973,648,780	4,225,229	(438,353,971)	539,520,038
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Jaya Konstruksi	KSO PMJ Land	--	--	4,276,840	4,276,840
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Nindya Karya	KSO Venue PON Aceh	--	--	8,031,000	8,031,000
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	KSO BMKG 2	--	--	3,696,838	3,696,838
Subjumlah/ *Subtotal*		524,936,330,916	10,765,889,081	(19,261,308,804)	516,440,911,193
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Less: Allowance for Impairment Losses*		--	--	(11,001,496,411)	(11,001,496,411)
Jumlah/ *Total*		**524,936,330,916**	**10,765,889,081**	**(30,262,805,215)**	**505,439,414,782**

Jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan laba (rugi) entitas Ventura Bersama adalah sebagai berikut:

Total assets, liabilities, revenues and net income (loss) of Joint Venture entities are as follows:

	2024			
	Aset/ *Assets*	**Liabilitas/ *Liabilities***	**Pendapatan/ *Revenue***	**Laba (Rugi)/ *Income (Loss)***
KSO PT Wika Gedung - PT Mutiara Masyhur Sejahtera (Prospero)	257,265,284,611	201,497,222,549	1,244,031,553	384,570,406
KSO PT Wika Gedung - PT Mahoni Citra Persada (Mahogany)	55,240,954,575	55,240,954,575	--	--
KSO PT Wika Gedung - Pemprov DKI (Gedung Sekolah 1)	107,951,133,276	90,048,596,223	--	--
KSO PT Wika Gedung - Pemprov DKI (Gedung Sekolah 2)	49,249,472,524	35,208,810,888	--	--
KSO PT Wika Gedung - Pemprov DKI (Gedung Sekolah 5)	96,662,767,592	79,617,162,145	--	--
KSO PT Wika Gedung - PT Pembangunan Perumahan (Bandara BDJ)	340,786,308,746	340,786,308,746	--	--
KSO PT Wika Gedung - PT WIKA (Persero) (Hotel T3)	4,060,905,941	4,060,905,941	--	--
KSO PT Wika Gedung - PT WIKA (Persero) (UGM Paket 3)	300,063,584,358	29,744,191,426	--	--
KSO PT Wika Gedung - PT WIKA (Persero) (UIN Serang)	14,062,941	14,062,941	396,274,257,826	251,103,587
KSO PT Wika Gedung - PT WIKA (Persero) (UGM Paket 1)	58,071,733,493	58,071,733,493	--	--
KSO PT Wika Gedung - PT WIKA (Persero) (Rumdis TNI AD)	14,331,957,567	3,267,670,857	--	--
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Brantas Abipraya (Sekolah Mamuju)	10,218,107	10,218,107	70,713,692,658	2,116,451,406
KSO PT Wika Gedung - PT Shimizu Corporation (Benhil)	21,477,585,709	15,754,142,535	87,483,684,535	5,723,443,174
KSO PT Wika Gedung - PT Jaya Konstruksi (RSUD Kalideres)	486,823,942	486,823,942	--	(604,239,683)
KSO PT Wika Gedung - PT WIKA (Persero) (Vertikal SBY)	346,306,991,338	281,142,535,261	563,915,742,716	65,164,456,077
KSO PT Wika Gedung - PT WIKA (Persero) (ITB)	94,042,384,125	91,866,546,050	240,249,201,244	2,175,838,075
KSO PT Wika Gedung - PT Adhi Karya (Hunian IKN)	124,582,632,536	122,652,957,501	84,050,740,000	4,429,657,035
KSO PT Wijaya Karya Tbk - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (BI Manokwari)	106,875,563,501	105,884,540,126	171,044,144,124	7,409,965,349
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Jaya Konstruksi (PMJ Land)	57,738,707,146	52,745,061,475	121,238,424,974	4,993,645,671
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Nindya Karya (PON Aceh)	72,541,013,511	28,689,194,550	499,457,494,594	43,851,818,961
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (BMKG 2)	155,393,071,440	145,513,764,691	238,900,474,067	9,879,306,749
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Pelitamaju Multiswakarsa	38,360,060,717	36,529,783,296	40,161,177,000	1,830,277,421
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Brantas Abipraya (Hunian Pekerja TNI (IKN)	58,949,538,222	50,703,620,818	208,194,705,071	15,818,310,715
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Adhi Karya (DKUT Gresik)	124,582,632,536	122,652,957,501	84,050,740,000	4,429,675,035
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Abadi Prima Inti Karya	182,759,030,929	16,979,442,07	342,142,904,950	34,214,290,275

	2023			
	Aset/ *Assets*	**Liabilitas/ *Liabilities***	**Pendapatan/ *Revenue***	**Laba (Rugi)/ *Income (Loss)***
KSO PT Wika Gedung - PT Mutiara Masyhur Sejahtera (Prospero)	258,606,310,494	203,222,818,838	2,926,564,698	966,865,369
KSO PT Wika Gedung - PT Mahoni Citra Persada (Mahogany)	55,240,954,575	55,240,954,575	--	--
KSO PT Wika Gedung - Jakarta Konsultindo (PKP Ciracas)	17,658,551,039	11,492,422,957	--	--
KSO PT Wika Gedung - Pemprov DKI (Gedung Sekolah 1)	106,780,224,651	88,877,687,598	--	--
KSO PT Wika Gedung - Pemprov DKI (Gedung Sekolah 2)	49,277,222,524	35,236,560,888	--	--
KSO PT Wika Gedung - Pemprov DKI (Gedung Sekolah 5)	96,662,767,592	79,617,162,145	--	--
KSO PT Wika Gedung - PT Pembangunan Perumahan (Bandara BDJ)	174,068,895,755	34,510,019,817	--	--
KSO PT Wika Gedung - PT WIKA (Persero) (Hotel T3)	23,734,354,096	19,998,185,057	2,433,126,357	--
KSO PT Wika Gedung - PT Jaya Konstruksi - PT Pembangunan Perumahan (JIS)	103,012,330,583	53,124,403,583	--	--
KSO PT Wika Gedung - PT WIKA (Persero) (UGM Paket 3)	30,287,405,411	29,968,012,479	--	--
KSO PT Wika Gedung - PT WIKA (Persero) (UIN Serang)	48,152,417,351	47,901,313,764	--	238
KSO PT Wika Gedung - PT WIKA (Persero) (UGM Paket 1)	65,225,293,373	64,971,537,969	--	--
KSO PT Wika Gedung - PT WIKA (Persero) (Rumdis TNI AD)	32,360,261,952	21,295,975,242	--	--
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Brantas Abipraya (Sekolah Mamuju)	2,366,699,007	250,247,597	16,271,376,892	450,244,458
KSO PT Wika Gedung - PT Shimizu Corporation (Benhil)	73,978,452,413	73,000,814,169	7,239,260,512	14,084,094
KSO PT Wika Gedung - PT Jaya Konstruksi (RSUD Kalideres)	42,395,001,075	35,546,572,202	3,199,557,658	274,353,085
KSO PT Wika Gedung - PT WIKA (Persero) (Vertikal SBY)	602,524,422,143	543,149,445,236	711,420,687,013	29,532,330,507
KSO PT Wika Gedung - PT WIKA (Persero) (ITB)	103,533,462,384	103,533,462,384	137,528,919,125	--
KSO PT Wika Gedung - PT Adhi Karya (Hunian IKN)	176,273,632,750	175,306,817,054	100,364,243,047	662,948,699
KSO PT Wijaya Karya Tbk - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (BI Manokwari)	134,744,041,319	134,332,464,677	22,886,469,448	411,576,642
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Jaya Konstruksi (PMJ Land)	4,276,840	--	--	--
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Nindya Karya (PON Aceh)	8,031,000	--	--	--
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (BMKG 2)	3,696,838	--	--	--

Perjanjian kerjasama tersebut adalah sebagai berikut:

Cooperation agreements are as follows:

	Porsi Kepemilikan/ ***Portion of Ownership***	**Status/** ***Status***	
Investasi, Pengembangan dan Pembangunan, Property dan Fasilitasnya di Jl. Ateri Karawang Barat No. 8 PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk : PT Mahoni Citra Persada	60% : 40%	Berjalan/*in Progress*	*Investment, Development and Construction, Property and Facilities in Arteri West Karawang No. 8* *PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk Mahoni Citra Persada*
Investasi, Pengembangan dan Pembangunan, Property dan Fasilitasnya di Jl. Kahuripan Raya Kavling 23, 25 dan 27 Sidoarjo, Jawa Timur PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk : PT Mutiara Masyhur Sejahtera	60% : 40%	Berjalan/*in Progress*	*Investment, Construction, Property and Facilities in Kahuripan Raya Kavling and 27 Sidoarjo, East Java* *PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk PT Mutiara Masyur Sejahtera*
Proyek pembangunan Gedung Sekolah, di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk : PT Pemprov DKI (Gedung Sekolah Paket 1)	49.5% : 50.5%	Selesai/*Finished*	*The Construction Project of School Building North Jakarta and Kepulauan Seribu.* *PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk Pemprov DKI (Gedung Sekolah Paket 1)*
Proyek pembangunan Gedung Sekolah, di Jakarta Barat. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk : PT Pemprov DKI (Gedung Sekolah Paket 2)	49.5% : 50.5%	Selesai/*Finished*	*The Construction Project of School Building West Jakarta.* *PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk Pemprov DKI (Gedung Sekolah Paket 2)*
Proyek pembangunan Gedung Sekolah, di Jakarta Pusat dan Jakarta Timur II. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk : PT Pemprov DKI (Gedung Sekolah Paket 5)	49.5% : 50.5%	Selesai/*Finished*	*The Construction Project of School Building Central Jakarta and East Jakarta II.* *PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk Pemprov DKI (Gedung Sekolah Paket 5)*
Proyek pembangunan perluasan Bandara Banjarmasin, di Banjarmasin. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk : PT Pembangunan perumahan	47.5% : 52.5%	Selesai/*Finished*	*The Construction Project of Banjarmasin Airport expansion, Banjarmasin.* *PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk PT Pembangunan perumahan*
Paket 3 Pembangunan AGLC, ASLC, IFFLC UGM KSO PT Wijaya Karya, Tbk - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	50.5% : 49.5%	Selesai/*Finished*	*The Construction Project of Packet 3 AGLC, ASLC, IFFLC UGM* *KSO PT Wijaya Karya, Tbk PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk*
Paket 1 Pembangunan Gedung Smart And Green Learning Center(SGLC) dan Engineering Research Innovation Center (ERIC) KSO PT Wijaya Karya, Tbk : PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	51% : 49%	Berjalan/*in Progress*	*Construction of the Smart And Green Learning Center Building (SGLC) and the Engineering Research Innovation Center (ERIC)* *KSO PT Wijaya Karya Tbk PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk*
Rumah Dinas TNI AD KSO PT Wijaya Karya, Tbk : PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	49% : 51%	Selesai/*Finished*	*The Construction Project of TNI AD Official House* *KSO PT Wijaya Karya Tbk PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk*
Benhil Hotel Service Apartement KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Shimizu Corporation	30% : 70%	Berjalan/*in Progress*	*Hotel Service Apartement* *KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Shimizu Corporation*
Proyek Pengembangan RSUD Kalideres KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Jaya Konstruksi	55% : 45%	Berjalan/*in Progress*	*Kalideres Hospital Development Project* *KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Jaya Konstruksi*
Proyek Pembangunan Gedung 1 Dan 2 ITB Innovation Park (IIP) Bandung Teknopolis KSO PT Wijaya Karya, Tbk : PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	40% : 60%	Selesai/*Finished*	*ITB Innovation Park (IIP) Bandung Teknopolis Building 1 and 2 Construction Projects* *KSO PT Wijaya Karya, Tbk - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk*
KSO Pembangunan Hunian Pekerja Konstruksi (IKN) PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk : PT Adhi Karya	60% : 40%	Selesai/*Finished*	*Construction Worker Residential Development (IKN)* *PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Adhi Karya*
Proyek RSUPT Vertikal Surabaya KSO PT Wijaya Karya, Tbk : PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	70% : 30%	Selesai/*Finished*	*Surabaya Vertical General Hospital Project* *KSO PT Wijaya Karya, Tbk - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk*
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Manokwari PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	60% : 40%	Berjalan/*in Progress*	*Representative Office of Bank Indonesia Manokwari* *PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk*
KSO PMJ Land KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Jaya Konstruksi	55% : 45%	Berjalan/*in Progress*	*KSO PMJ Land* *KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Jaya Konstruksi*
KSO Venue PON Aceh KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Nindya Karya	55% : 45%	Berjalan/*in Progress*	*KSO Venue PON Aceh* *KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Nindya Karya*

	Porsi Kepemilikan/ *Portion of Ownership*	**Status/ *Status***	
KSO BMKG 2 KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	90% : 10%	Berjalan/*in Progress*	*KSO BMKG 2* *KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk*
KSO Telkom Landmark Tower KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Pelitamaju Multiswakarsa	70% : 30%	Berjalan/*in Progress*	*KSO Telkom Landmark Tower* *KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Pelitamaju Multiswakarsa*
KSO DKUT Gresik KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Adhi Karya	40% : 60%	Berjalan/*in Progress*	*KSO DKUT Gresik* *KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Adhi Karya*
KSO Pembangunan Hunian Pekerja Konstruksi 2 (IKN) KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Abadi Prima Inti Karya	70% : 30%	Berjalan/*in Progress*	*KSO Pembangunan Hunian Pekerja Konstruksi 2 (IKN)* *KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Abadi Prima Inti Karya*
KSO Gereja Basilika KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Brantas Abipraya	60% : 40%	Berjalan/*in Progress*	*KSO Gereja Basilika* *KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Brantas Abipraya*

22. Pinjaman Bank Jangka Pendek / *22. Short-term Bank Loans*

	2024 Rp	**2023 Rp**
Pihak Berelasi/ *Related Parties* (Catatan/ *Note* 39)	**350,000,000,000**	**103,000,000,000**
Pihak Ketiga/ *Third Parties*		
PT Bank DKI		
Cash Loan	22,000,000,000	26,500,000,000
Subjumlah/ *Subtotal*	**22,000,000,000**	**26,500,000,000**
Jumlah/ *Total*	**372,000,000,000**	**129,500,000,000**

Informasi fasilitas utang bank disajikan di Catatan 43.

Information on bank loan facilities is presented in Note 43.

23. Utang Usaha / *23. Trade Payables*

Rincian utang usaha adalah sebagai berikut:

Details of trade payables are as follows:

	2024 Rp	**2023 Rp**	
Pemasok	588,359,136,381	466,905,952,106	*Supplier*
Mitra	463,888,520,336	645,996,548,310	*Partners*
Subkontraktor	429,280,766,688	240,794,825,114	*Subcontractor*
Mandor	175,319,892,213	89,465,794,237	*Foremen*
Usaha Lain	1,386,960,997	2,104,878,637	*Other Trade*
Jumlah Utang Usaha	**1,658,235,276,615**	**1,445,267,998,404**	***Total Trade Payable***

Utang usaha seluruhnya merupakan transaksi dalam mata uang Rupiah.

All trade payable transactions are in Rupiah.

Rincian utang pemasok, utang subkontraktor, utang mandor dan utang usaha lain adalah sebagai berikut:

Details of supplier payable, subcontractor payable, foreman payable, other trade payable and partners payable are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp
Pihak Berelasi/*Related Parties* (Catatan/*Note* 39)	**473,871,107,934**	**608,412,227,195**
Pihak Ketiga/*Third Parties*	**1,143,509,090,324**	**781,847,748,149**
Utang Mitra Pihak Ketiga/ *Third Parties Partners Payable*		
PT Bank DKI		
Non Cash Loan	40,855,078,357	54,380,877,123
PT Bank CIMB Niaga Tbk		
Non Cash Loan	--	627,145,937
Subjumlah/*Subtotal*	**40,855,078,357**	**55,008,023,060**
Jumlah Pihak Ketiga - Bersih/ *Total Third Parties - Net*	**1,184,364,168,681**	**836,855,771,209**
Total/ *Total*	**1,658,235,276,615**	**1,445,267,998,404**

Jumlah utang usaha berdasarkan umur:

Total trade payable based on aging:

	2024 Rp	2023 Rp
Sampai dengan 1 Bulan/ *Up to 1 Month*	386,112,795,404	504,548,524,033
> 1 - 3 Bulan/ *Month*	573,085,383,031	452,925,061,735
> 3 - 6 Bulan/ *Month*	337,493,202,878	313,563,465,401
> 6 Bulan/ *Month* - 1 Tahun/ *Year*	107,894,364,795	71,907,444,777
> 1 Tahun/ *Year*	253,649,530,507	102,323,502,458
Jumlah/ *Total*	**1,658,235,276,615**	**1,445,267,998,404**

Utang pemasok merupakan utang kepada pemasok atas pengadaan bahan bangunan sehubungan dengan pelaksanaan suatu proyek.

Supplier payable is payable to suppliers for procurement of building materials in connection with the implementation of a project.

Utang subkontraktor merupakan utang kepada subkontraktor berdasarkan berita acara *progress* fisik pekerjaan sehubungan dengan pelaksanaan proyek.

Subcontractor payable is payable to subcontractors based on the minutes of the physical progress of work in connection with the implementation of the project.

Utang kepada mandor merupakan upah mandor yang pada akhir periode laporan belum dibayar.

Foreman payable is salary of the foreman at the end of the reporting period that has not been paid.

Utang usaha lain merupakan utang atas sewa alat, pemeliharaan dan perbaikan proyek.

Other trade payable is payable on rent equipment, maintenance and repair projects.

Utang usaha mitra merupakan utang atas fasilitas *Non Cash Loan* Perusahaan kepada bank mitra (Catatan 43).

Partners payables are payable on the Company's Non Cash Loan facility to partner banks (Note 43).

24. Beban Akrual / *24. Accrued Expenses*

Akun ini merupakan beban yang masih harus dibayar dengan rincian sebagai berikut:

This account is an expense incurred but not yet paid with details as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Pekerjaan Proyek	321,671,870,991	393,725,116,680	*Project Work*
Bonus dan Tantiem	34,737,657,261	45,446,757,391	*Bonus and Tantiem*
Jumlah	**356,409,528,252**	**439,171,874,071**	***Total***

Pekerjaan proyek merupakan pencadangan biaya tahun berjalan yang akan dikeluarkan pada masa pemeliharaan proyek dan pembelian barang yang dibutuhkan untuk proyek yang belum dibayar pada tanggal laporan posisi keuangan.

Project works are allowance for current year maintenance expenses disbursable at project maintenance period and purchase of goods required for the projects that are not yet paid as of the date of the statement of financial position.

Bonus dan tantiem merupakan pencadangan bonus karyawan serta tantiem Direksi dan Komisaris.

Bonus and tantiem are allowances for bonuses of employee and for members of the Directors and Commissioners.

25. Uang Muka Pemberi Kerja dan Konsumen / *25. Advances From Projects Owners and Consumers*

Merupakan saldo uang muka dari pemberi kerja dan konsumen per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Represents advances from project owners and customers as of December 31, 2024 and 2023 with the following details:

	2024 Rp	2023 Rp	
Uang Muka Pemberi Kerja (Jasa Konstruksi)	507,541,582,961	691,789,685,266	*Advances from Project Owners (Construction Service)*
Uang Muka Konsumen (Properti)	15,829,560,667	10,535,515,393	*Advances from Consumers (Property)*
Jumlah	**523,371,143,628**	**702,325,200,659**	***Total***

Rincian uang muka pemberi kerja berdasarkan waktu jatuh tempo adalah sebagai berikut:

Details of advance from project owner and customer based on maturity are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Jatuh Tempo dalam Satu Tahun			*Maturity within One Year*
Uang Muka Konsumen (Properti)	15,829,560,667	2,070,019,625	*Advances from Consumers (Property)*
Subjumlah	**15,829,560,667**	**2,070,019,625**	***Subtotal***
Jatuh Tempo Lebih dari Satu Tahun			*Due in More than One Year*
Uang Muka Pemberi Kerja (Jasa Konstruksi)	494,420,693,754	691,789,685,266	*Advances from Project Owners (Construction Service)*
Uang Muka Konsumen (Properti)	13,120,889,207	8,465,495,768	*Advances from Consumers (Property)*
Subjumlah	**507,541,582,961**	**700,255,181,034**	***Subtotal***
Jumlah	**523,371,143,628**	**702,325,200,659**	***Total***

Uang muka pemberi kerja merupakan uang muka yang diterima dari pemberi kerja atau pemilik proyek atas pekerjaan konstruksi yang memiliki jangka waktu penyelesaian proyek lebih dari satu tahun. Jumlah tersebut secara proporsional akan dikompensasikan dengan tagihan yang didasarkan atas kemajuan fisik yang telah dicapai dengan rincian proyek sebagai berikut:

Advance from project owners consist of advance received from project owners and consumers regarding construction project that have completion date more than a year. The amount will be proportionally compensated with billings made based on physical progress with the following project detail:

	2024 Rp	2023 Rp
Proyek dari Pihak Berelasi/ *Projects from Related Parties* (Catatan/ *Note* 38)	**93,067,556,515**	**101,694,045,349**
Proyek dari Pihak Ketiga/ *Projects from Third Parties*		
Apartemen Puncak Merr	65,122,549,870	65,122,549,870
RSUD KLATEN	49,686,400,000	--
Proyek Pembangunan Bangunan Pendukung Kawasan Bank Indonesia di Karawang (PK-12)	45,075,000,000	--
Gedung Bank Mandiri Cabang Masjid Agung	38,501,486,487	--
Cental Business District Surabaya	26,483,980,422	26,483,980,422
Kantor PUPR Wing 1 IKN	25,633,063,885	--
Rusun Paspampres IKN	24,741,807,764	244,437,424,459
Apartemen Nayumi	21,363,636,364	21,363,636,364
Pembangunan Hunian Terjangkau Tower B Nuansa Cilangkap	20,979,729,730	--
BI Modern Office	18,895,896,110	59,662,050,000
BI Papua Barat	14,508,000,000	22,320,000,000
The MAJ Collections Hotel & Residences	14,005,160,000	14,005,160,000
Gedung Kemenko IKN	--	60,865,728,795
Sky House	--	14,392,717,719
Apartemen Suncity Residence	--	13,776,872,725
Lain-lain (Di Bawah Rp10 Miliar)/ *Others (Below Rp10 Billion)*	65,306,876,481	58,201,034,956
Subjumlah/ *Subtotal*	**430,303,587,113**	**600,631,155,310**
Jumlah/ *Total*	**523,371,143,628**	**702,325,200,659**

26. Utang Lain-Lain / *26. Other Payables*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	2024 Rp	2023 Rp
Pihak Berelasi/ *Related Parties* (Catatan/ *Note* 39)	**36,899,710,813**	**34,892,272,952**
Pihak Ketiga/ *Third Parties*		
Iuran Hari Tua Dana Pensiun	1,904,018,677	1,901,819,879
Asuransi BPJS Ketenagakerjaan	97,695,637	276,956,389
Lain-lain/ *Others*	1,420,790,570	988,913,769
Jumlah Pihak Ketiga/ *Total Third Parties*	**3,422,504,884**	**3,167,690,037**
Jumlah/ *Total*	**40,322,215,697**	**38,059,962,989**

27. Pinjaman Bank / *27. Bank Loans*

Akun ini merupakan pinjaman bank atas fasilitas kredit investasi Perusahaan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Catatan 43). Saldo pinjaman bank per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

This account represents bank loan of credit investment facilities of the Company to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Note 43). The balance of bank loans as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	85,063,600,000	94,001,600,000	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Jumlah	**85,063,600,000**	**94,001,600,000**	***Total***
Bagian Jangka Pendek	(9,417,600,000)	(8,938,000,000)	*Short Term Portion*
Bagian Jangka Panjang	**75,646,000,000**	**85,063,600,000**	***Long Term Portion***

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit untuk modal kerja Nomor: CBG.CB2/SCD.SPPK.074/2020 tanggal 16 September 2020 dan Akta No. 28 tanggal 25 September 2020 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dengan persyaratan sebagai berikut:

Limit Kredit	Rp116.000.000.000
Jangka Waktu	Sampai 24 September 2030 termasuk masa penarikan dan *grace period* pokok selama 6 bulan setelah penandatanganan perjanjian kredit
Tingkat Bunga	9,5 % per tahun
Provisi	1% per tahun dari limit kredit
Annual Servicing Fee	1% per tahun dari limit kredit
Biaya Administrasi	Rp50.000.000 dibayarkan sebelum penandatanganan perjanjian
Commitment Fee	2% dari jumlah porsi yang belum ditarik sampai dengan masa penarikan
Agunan	Sebesar Rp145.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut: - Gadai Rekening Penampung Pendapatan dan *Debt Service Account* (Rekening *Escrow*) - Fidusia Piutang Sewa dan Piutang Proyek Graha Mantap - Fidusia Hasil Klaim Asuransi atas Bangunan Proyek Graha Mantap - Fidusia Hasil Klaim Bank Garansi atas Bangunan Proyek Graha Mantap

Pelunasan fasilitas kredit dilakukan dengan cara mengangsur pada setiap tanggal 23 untuk setiap triwulan.

Debitur wajib menjaga rasio keuangan yaitu *current ratio* minimal 100%, *leverage* maksimal 500% dan EBITDA to *Interest* minimal sebesar 200%.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Based on Letter of Credit Offering for working capital Number: CBG.CB2/SCD.SPPK.074/2020 dated September 16, 2020 and Deed No. 28 dated September 25, 2020 made before Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta terms and conditions:

Credit Limit	*Rp116,000,000,000*
Time Period	*Until September 24, 2030, including the principal drawdown period and grace period of 6 months after signing the credit agreement*
Interest Rate	*9.5% per annum*
Provision	*1% per annum of credit limit*
Annual Servicing Fee	*1% per annum of credit limit*
Administration Fee	*Rp50,000,000 paid before signing of agreement*
Commitment Fee	*2% of the undisbursed portion of the portion until the withdrawal period*
Collateral	*Amounted to Rp145,000,000,000 with the details are as follows:* - *Revenue Accounts and Debt Service Accounts (Escrow Account)* - *Rent and Receivables for the Graha Mantap Project* - *Rent and Receivables for the Graha Mantap Project* - *Bank Guarantee Claims on Graha Mantap Building Projects*

Repayment of credit facilities is made in installments on the 23rd for each of the quarterly.

Debtors are required to maintain financial ratios, namely a minimum current ratio of 100%, a maximum leverage of 500% and a minimum EBITDA to Interest of 200%.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

As of December 31, 2024, the Company has complied with the terms and conditions of the loans.

Saldo pinjaman bank per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp85.063.600.000 dan Rp94.001.600.000.

Balance of bank loan as of December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp85,063,600,000 and Rp94,001,600,000, respectively.

Pembayaran pokok pinjaman bank yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp8.938.000.000 dan Rp7.030.500.000.

Payments made for bank loan facility principal for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp8,938,000,000 and Rp7,030,500,000, respectively.

28. Liabilitas Imbalan Kerja / *28. Employee Benefits Liabilities*

	2024 Rp	2023 Rp	
Imbalan Pascakerja	18,374,374,295	5,381,146,904	*Post-employment Benefits*
Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya	4,385,126,024	6,507,509,303	*Other Long-term Employee Benefits*
Jumlah	**22,759,500,319**	**11,888,656,207**	***Total***

Imbalan Pascakerja / *Post-employment Benefits*

Grup menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti untuk karyawan tetap, berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa kerja karyawan.

The Group established defined benefit pension plan for permanent employees, based on years of service and salaries of the employees.

Liabilitas imbalan kerja yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

The employee benefits liabilities recognized in the statements of financial position are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Nilai Kini dari Kewajiban	30,060,355,982	22,386,443,490	*Present Value of Obligations*
Nilai Wajar dari Aset Program	(11,685,981,687)	(17,005,296,586)	*Fair Value of Plan Assets*
Jumlah	**18,374,374,295**	**5,381,146,904**	***Total***

Mutasi liabilitas imbalan kerja yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

The movements of employee benefits liabilities recognized in the statements of financial position are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Pada Awal Tahun	22,386,443,490	19,465,237,834	*At Beginning of The Year*
Biaya Jasa Kini	1,247,337,984	967,588,390	*Current Service Cost*
Biaya Bunga	1,589,437,488	1,362,566,648	*Interest Cost*
Pembayaran Manfaat	(307,618,791)	(4,043,266,401)	*Benefits Paid*
Kerugian Aktuarial Bersih yang Diakui Selama Tahun Berjalan	5,144,755,811	4,716,898,655	*Net Actuarial Losses Recognised During the Year*
Efek Transfer Karyawan	--	(82,581,636)	*Effect Employee Transfer*
Jumlah	**30,060,355,982**	**22,386,443,490**	***Total***

Mutasi nilai wajar aset program adalah sebagai berikut:

The movements in the fair value of plan assets are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Pada Awal Tahun	17,005,296,586	18,767,157,409	*At Beginning of The Year*
Transfer Aset	--	631,567,438	*Asset Transfer*
Hasil Aset Program yang Diharapkan	1,196,455,591	1,280,779,435	*Expected Return on Plan Assets*
(Keuntungan) Kerugian Aktuarial Bersih Diakui Selama Tahun Berjalan	(6,208,151,699)	121,710,277	*Net Actuarial (Gains) Losses Recognized During the Year*
Pembayaran Manfaat	(307,618,791)	(3,795,917,973)	*Benefit Payment*
Jumlah	**11,685,981,687**	**17,005,296,586**	***Total***

Biaya bersih yang diakui dalam laba rugi adalah sebagai berikut:

Net expenses recognized in the profit or loss are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Biaya Jasa Kini	1,247,337,984	967,588,390	*Current Service Cost*
Biaya Bunga - Neto	392,981,897	81,787,214	*Interest Cost - Net*
Kerugian Aktuarial Bersih yang Diakui Selama Tahun Berjalan	11,352,907,510	4,595,188,378	*Net Actuarial Losses Recognised During the Year*
Jumlah	**12,993,227,391**	**5,644,563,982**	***Total***

Rekonsiliasi keuntungan (kerugian) aktuaria dari program imbalan pasca kerja yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya sebagai berikut:

Reconciliation of profit (loss) of the actuarial program post-employee benefits are recognized in other comprehensive income are following:

	2024 Rp	2023 Rp	
Penghasilan Komprehensif Lain Awal Tahun	(5,049,322,156)	(9,644,510,534)	*Other Comprehensive Income - Beginning of Year*
Kerugian Aktuarial Bersih yang yang Diakui Selama Tahun Berjalan	11,352,907,510	4,595,188,378	*Net Actuarial Losses During the Year*
Jumlah (Penghasilan) Rugi Komprehensif Lain Akhir Tahun	**6,303,585,354**	**(5,049,322,156)**	***Total Other Comprehensive (Income) Loss - Ending of Year***

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted pension benefit are as follows:

	2024				
	Dalam 1 Tahun/ *Within 1 Years* Rp	2 - 5 Tahun/ *2 - 5 Years* Rp	5 - 10 Tahun/ *5 - 10 Years* Rp	Di atas 10 Tahun/ *Over 10 Years* Rp	
Manfaat Pasti	2,328,016,495	1,270,509,338	2,984,956,647	51,730,970,007	*Defined Benefit*

Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Other Long-term Employee Benefits

Grup memberikan imbalan kerja jangka Panjang lainnya berupa tunjangan cuti besar dan satya karya.

The Group provides other long-term benefit in form of long service leave and long service award.

Grup memberikan ekstra hari cuti dan ekstra uang cuti untuk karyawan aktif setiap kelipatan 5 tahun masa kerja. Grup memberikan penghargaan satya karya kepada karyawan yang telah mencapai masa kerja tertentu.

The Group provides extra leave and extra leave allowance for active employee every 5 years of service. The Group provides long leave award to employee that reached certain year of service.

Liabilitas imbalan kerja panjang lainnya yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

Other long-term employee benefits liabilities recognized in the statements of financial position are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Pada Awal Tahun	6,507,509,303	7,248,134,944	*At Beginning of The Year*
Biaya Jasa Kini	652,952,374	476,819,711	*Current Service Cost*
Biaya Bunga	438,280,752	507,369,446	*Interest Cost*
Pembayaran Manfaat	(1,214,859,112)	(1,555,756,466)	*Benefits Paid*
Keuntungan Aktuarial Bersih			*Net Actuarial Gains*
yang Diakui Selama Tahun Berjalan	(1,998,757,293)	(146,647,880)	*Recognised During the Year*
Efek Transfer Karyawan	--	(22,410,452)	*Effect Employee Transfer*
Jumlah	**4,385,126,024**	**6,507,509,303**	***Total***

Biaya bersih yang diakui dalam laba rugi adalah sebagai berikut:

Net expenses recognized in the profit or loss are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Biaya Jasa Kini	652,952,374	476,819,711	*Current Service Cost*
Biaya Bunga - Neto	438,280,752	507,369,446	*Interest Cost - Net*
Keuntungan Aktuarial Bersih			*Net Actuarial Gains*
Diakui Selama Tahun Berjalan	(1,998,757,293)	(146,647,880)	*Recognised During the Year*
Jumlah	**(907,524,167)**	**837,541,277**	***Total***

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted pension benefit are as follows:

	2024				
	Dalam 1 Tahun/ *Within 1 Years* Rp	2 - 5 Tahun/ *2 - 5 Years* Rp	5 - 10 Tahun/ *5 - 10 Years* Rp	Di atas 10 Tahun/ *Over 10 Years* Rp	
Manfaat Pasti	792,536,704	1,118,001,126	9,629,325,241	15,347,863,438	*Defined Benefit*

Program pensiun imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lainnya memberikan eksposur Grup terhadap risiko aktuarial seperti risiko investasi, risiko tingkat bunga, risiko harapan hidup dan risiko gaji.

The post-employment benefits and other long-term benefits typically expose the Group to actuarial risks such as: investment risk, interest rate risk, longevity risk and salary risk.

Risiko Investasi
Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbal hasil obligasi pemerintah berkualitas tinggi; jika pengembalian aset program di bawah tingkat tersebut, hal itu akan mengakibatkan defisit program. Saat ini program tersebut memiliki investasi yang relatif seimbang pada efek ekuitas, deposito dan emas. Karena sifat jangka panjang dari liabilitas program, dewan dana pensiun perlu menetapkan bahwa bagian wajar dari aset program harus diinvestasikan pada efek ekuitas dan real estat untuk meningkatkan imbal hasil yang dihasilkan oleh dana.

Investment Risk
The present value of the defined benefit plan liability is calculated using a discount rate determined by reference to high quality government bond yields; if the return on plan asset is below this rate, it will create a plan deficit. Currently the plan has a relatively balanced investment in equity securities, time deposit and gold. Due to the long-term nature of the plan liabilities, the board of the pension fund considers it appropriate that a reasonable portion of the plan assets should be invested in equity securities and in real estate to leverage the return generated by the fund.

Risiko Tingkat Bunga
Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program; namun, sebagian akan di-*offset* (saling hapus) oleh peningkatan imbal hasil atas investasi instrumen utang.

Interest Risk
A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability; however, this will be partially offset by an increase in the return on the plan's debt investments

Risiko Harapan Hidup
Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada estimasi terbaik dari mortalitas peserta program baik selama kontrak kerja. Peningkatan harapan hidup peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

Longevity Risk
The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the best estimate of the mortality of plan participants during their employment. An increase in the life expectancy of the plan participants will increase the plan's liability.

Risiko Gaji
Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Salary Risk
The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

Analisis Sensitivitas

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Analisis sensitivitas dibawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi yang lain konstan.

Sensitivity Analysis

Significant actuarial assumptions for the determination of the present value of defined benefit obligation are discount rate and expected salary increase. The sensitivity analysis below have been determined based on reasonable possible changes of the respective assumptions occurring at the of the reporting period, while holding all other assumptions constant.

	2024 Rp	2023 Rp	
Tingkat Diskonto Awal	34,445,482,006	28,893,952,792	*Initial Discount Rate*
Tingkat Diskonto +1%	32,074,974,553	26,905,496,645	*Discount Rate + 1%*
Tingkat Diskonto -1%	37,055,809,780	31,083,577,761	*Discount Rate - 1%*
Tingkat Gaji Awal	34,445,482,006	28,893,952,792	*Initial Salary Rate*
Tingkat Gaji +1%	36,970,588,982	31,012,091,877	*Salary rate +1%*
Tingkat Gaji -1%	31,423,403,566	26,358,938,424	*Salary rate -1%*

Berdasarkan perhitungan imbalan kerja yang dilakukan oleh aktuaris KKA Tubagus Syafrial & Amran Nangasan dan KKA Azwir Arifin dan Rekan aktuaris independen dengan laporannya No. 077/ IPK/KKA TBA /II 2025 tanggal 11 Februari 2025 dan No732/II/22/KKA-RM tanggal 20 Februari 2024 dengan asumsi-asumsi yang digunakan sebagai berikut:

Based on the calculation of employee benefits performed by the actuary of KKA Tubagus Syafrial & Amran Nangasan and KKA Azwir Arifin and Partners, an independent actuary with its reports No. 077/ IPK/KKA TBA /II 2025 dated February 11, 2025 and No732/II/22/KKA-RM dated February 20, 2024 with the following assumptions used:

	2024	2023	
Mortalita	100% TMI IV	100% TMI IV	*Mortality*
Usia Pensiun	55/56/57/58 tahun/ *years*	55/56/57/58 tahun/ *years*	*Pension Age*
Tingkat Cacat	5% TMI IV	5% TMI IV	*Disability Rate*
Tingkat Diskonto	6.70% - 7.13% per tahun / *per year*	6.37% - 7.10% per tahun / *per year*	*Discount Rate*
Kenaikan Gaji	6.0% per tahun / *per year*	6.0% per tahun / *per year*	*Future Salary Increase*
Tingkat Pengunduran Diri			*Resignation Rate*
Usia < 35 tahun	1% per tahun / *per year*	1% per tahun / *per year*	*Age <35 years*
Usia 45-55 tahun	0% per tahun / *per year linear*	0% per tahun / *per year linear*	*Age 45-55 years*

29. Modal Saham / *29. Share Capital*

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The composition of the shareholders of the Company as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

Pemegang Saham/ *Shareholders*	Jumlah Saham/ *Total Stock*	Kepemilikan/ *Ownership* %	Nilai Nominal/ *Par Value* Rp
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	6,633,000,000	69.30	663,300,000,000
Koperasi Karyawan WIKA	67,000,000	0.70	6,700,000,000
Publik/ *Public*	2,872,000,000	30.00	287,200,000,000
Jumlah/ *Total*	**9,572,000,000**	**100.00**	**957,200,000,000**

30. Tambahan Modal Disetor / *30. Additional Paid-In Capital*

	2024 Rp	2023 Rp	
Kelebihan Penerimaan di atas Nilai Nominal Saham	545,876,957,519	545,876,957,519	*Excess of Proceeds from Issuance of Share Capital over Par Value*
Biaya Emisi Saham	(23,014,188,361)	(23,014,188,361)	*Share Issuance Costs*
Selisih Nilai Transaksi Entitas Sepengendali	1,220,130,700	1,220,130,700	*Difference in Restructuring Transaction of Entity under Common Control*
Tambahan Modal Disetor - Bersih	**524,082,899,858**	**524,082,899,858**	***Additional Paid in Capital - Net***

Biaya emisi saham merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penawaran saham perdana tahun 2017.

Share issuance costs represent costs incurred for initial public offering activity in 2017.

Selisih nilai transaksi entitas sepengendali merupakan selisih antara nilai imbalan yang diterima Perusahaan dengan jumlah tercatat pada saat penjualan kepemilikan saham WPG oleh Perusahaan (Catatan 1.c).

The difference in restructuring transaction of entities under common control is the difference between the value of the compensation received by the Company and the carrying amount at the time of the sale of WPG share ownership by the Company (Note 1.c).

31. Saldo Laba / *31. Retained Earnings*

	2024 Rp	2023 Rp	
Ditentukan Penggunaannya:			*Appropriated:*
Saldo Awal	160,828,527,000	137,664,287,000	*Beginning Balance*
Cadangan	4,700,000,000	23,164,240,000	*Reserve*
Saldo Akhir	**165,528,527,000**	**160,828,527,000**	***Ending Balance***
Belum Ditentukan Penggunaannya:			*Unappropriated:*
Saldo Laba Awal	909,438,080,813	909,064,402,285	*Beginning Balance*
Penambahan (Pengurangan):			*Increase (Decrease):*
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	67,888,264,873	46,702,158,528	*Comprehensive Income for the Year*
Cadangan	(4,700,000,000)	(23,164,240,000)	*Reserve*
Dividen Tunai	(9,380,560,000)	(23,164,240,000)	*Cash Dividends*
Saldo Akhir	**963,245,785,686**	**909,438,080,813**	***Ending Balance***

Berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk No. 8 tanggal 20 Mei 2024, dibuat dihadapan Diah Guntari L. Soemarwoto, S.H., Notaris di Jakarta, bahwa dari laba bersih Perusahaan pada tahun buku 2023 sebesar Rp46.702.158.528 akan digunakan sebesar 20% dari laba bersih sebagai dividen tahun buku 2023, sebesar Rp9.380.560.000 atau 10% dari laba bersih akan dialokasikan sebagai Cadangan Wajib dalam rangka memenuhi Pasal 70 Undang-undang Perseroan Terbatas dan sebesar 70% akan ditetapkan sebagai cadangan lainnya.

In accordance with Deed of the Annual General Meeting of Shareholders PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk No. 8 dated May 20, 2024, made in the presence of Diah Guntari L. Soemarwoto, S.H., the Notary in Jakarta that from the Company's net profit for the financial year 2023 of Rp46,702,158,528, 20% of the net profit will be used as dividends for the fiscal year 2023, Rp9,380,560,000 or 10% of the net profit will be allocated as Mandatory Reserves in order to comply with Article 70 of the Limited Liability Company Law and 70% will be set as other reserves.

Berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk No. 2 tanggal 10 Mei 2023, dibuat dihadapan Diah Guntari L. Soemarwoto, S.H., Notaris di Jakarta, bahwa dari laba bersih Perusahaan pada tahun buku 2022 sebesar Rp230.053.686.379 akan digunakan sebesar 10% dari laba bersih sebagai dividen tahun buku 2022, sebesar Rp23.164.240.000 atau 10% dari laba bersih akan dialokasikan sebagai Cadangan Wajib dalam rangka memenuhi Pasal 70 Undang-undang Perseroan Terbatas dan sebesar 80% akan ditetapkan sebagai cadangan lainnya.

In accordance with Deed of the Annual General Meeting of Shareholders PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk No. 2 dated May 10, 2023, made in the presence of Diah Guntari L. Soemarwoto, S.H., the Notary in Jakarta that from the Company's net profit for the financial year 2022 of Rp230,053,686,379, 10% of the net profit will be used as dividends for the fiscal year 2022, Rp23,164,240,000 or 10% of the net profit will be allocated as Mandatory Reserves in order to comply with Article 70 of the Limited Liability Company Law and 80% will be set as other reserves.

Perusahaan menetapkan pembagian dividen Perusahaan untuk tahun buku 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

The Company declared dividend for the financial year December 31, 2023 and 2022 as follows:

	Tanggal Dideklarasikan/ *Date Declared*	Tanggal Pembayaran/ *Date Paid*	Saham (nilai penuh)/ *Dividend Per Share (Full amount)*	Jumlah/ *Total* Rp	
Dividen tahun buku 2023	20 Mei/*May* 2024	13 Juni/*June* 2024	0.98	9,380,560,000	*Dividends for the financial year 2023*
Dividen tahun buku 2022	10 Mei/*May* 2023	8 Juni/*June* 2023	2.42	23,164,240,000	*Dividends for the financial year 2022*

32. Laba per Saham / *32. Earnings per Share*

Laba per saham dihitung dengan membagi laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Earning per share is calculated by dividing income for the year attributable to owners of the parent by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year.

	2024 Rp	2023 Rp	
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	67,888,264,873	46,702,158,528	*Income for the Current Year Attributable to Owners of the Parent Entity*
Rata-rata Tertimbang Saham untuk Perhitungan Laba per Saham Dasar	9,572,000,000	9,572,000,000	*Weighted Average Number Shares for the Computation of Earnings per Share*
Laba per Saham	**7.09**	**4.88**	***Earnings per Share***

33. Kepentingan Non Pengendali / *33. Non Controlling Interests*

	2024 Rp	2023 Rp	
Kepentingan Non Pengendali atas Aset Bersih Entitas Anak			*Non Controlling Interest in Net Assets of Subsidiary*
PT Wege Solusi Proklamasi	2,001,763,545	1,932,778,469	*PT Wege Solusi Proklamasi*
Total	**2,001,763,545**	**1,932,778,469**	***Total***
Kepentingan Non Pengendali atas Jumlah Penghasilan Komprehensif Entitas Anak			*Non Controlling Interest in Subsidiary's Total Comprehensive Income*
PT Wege Solusi Proklamasi	68,985,076	202,008,080	*PT Wege Solusi Proklamasi*
Total	**68,985,076**	**202,008,080**	***Total***

34. Pendapatan / *34. Revenue*

Pendapatan usaha untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari:

Revenue for the years ended December 31, 2024 and 2023 consist of:

	2024 Rp	2023 Rp
Jasa Konstruksi/ *Construction Service*	3,368,260,613,129	3,782,577,584,065
Industri/ *Industry*	237,349,044,669	127,385,403,309
Konsesi/ *Concession*	67,099,233,183	52,872,096,895
Properti/ *Property*	818,284,502	16,879,485,450
Jumlah Pendapatan Usaha/ *Total Revenue*	**3,673,527,175,483**	**3,979,714,569,719**

Rincian pendapatan usaha dengan jumlah pendapatan kumulatifnya melebihi 10% dari jumlah pendapatan usaha untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari:

Details of revenue with cumulative total revenues exceeding 10% of total revenues for the years ended December 31, 2024 and 2023 consists of:

	2024 Rp	2023 Rp
Pihak Berelasi/ *Related Parties* (Catatan/ *Note* 39)	**641,971,263,951**	**715,616,704,993**
Pihak Ketiga/ *Third Parties*		
Kementrian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat	2,474,685,268,117	412,447,414,204
PT Surya Dhoho Investama	36,804,884,473	1,192,770,816,575
Lain-lain di bawah 10 Persen Jumlah Pendapatan/ *Others below 10 Percent Total Revenue*	520,065,758,942	1,658,879,633,947
Jumlah Pihak Ketiga - Bersih/ *Total Third Parties - Net*	**3,031,555,911,532**	**3,264,097,864,726**
Jumlah/ *Total*	**3,673,527,175,483**	**3,979,714,569,719**

35. Beban Pokok Pendapatan / *35. Cost of Revenue*

Beban pokok pendapatan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari:

Cost of revenue for the years ended December 31, 2024 and 2023 consists of:

	2024 Rp	2023 Rp	
Jasa Konstruksi	3,090,248,186,125	3,523,411,293,565	*Construction Service*
Industri	213,236,943,944	102,278,438,501	*Industry*
Konsesi	61,839,280,602	37,559,648,559	*Concession*
Properti	701,299,836	13,246,143,072	*Property*
Jumlah	**3,366,025,710,507**	**3,676,495,523,697**	***Total***

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 tidak terdapat transaksi pembelian dari pemasok dengan jumlah pembelian kumulatifnya melebihi 10% dari jumlah pendapatan usaha.

For the years ended December 31, 2024 and 2023 there are no purchase transactions from suppliers with cumulative total purchases exceeding 10% of total revenues.

Beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dicatat pada beban jasa konstruksi senilai Rp15.922.465.861 dan Rp26.983.468.236.

Depreciation expense for the years ended December 31, 2024 and 2023, is recorded in construction service cost of revenue amounted to Rp15,922,465,861 and Rp26,983,468,236, respectively.

36. Beban Usaha / *36. Operating Expenses*

Beban usaha untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari:

Operating expenses for the years ended December 31, 2024 and 2023 consists of:

	2024 Rp	2023 Rp	
Pegawai	85,702,649,013	57,219,115,014	*Employees*
Umum	28,172,483,118	15,772,099,786	*General Administrative Expenses*
Pemasaran	548,747,649	360,488,975	*Marketing Expenses*
Penyusutan	--	321,326,792	*Depreciation Expenses*
Jumlah	**114,423,879,780**	**73,673,030,567**	***Total***

Beban umum merupakan pengeluaran-pengeluaran untuk alat tulis kantor, listrik, telepon, pengembangan pegawai, biaya perjalanan dinas dan biaya lainnya.

General expenses represent expenses for stationery, electricity and phone bill, human resources development, business trip and other costs.

37. Pendapatan Lainnya / *37. Other Income*

	2024 Rp	2023 Rp	
Pendapatan Lainnya			***Other Income***
Pemulihan Nilai Aset Keuangan	124,877,924,162	108,261,899,006	*Recovery of Impairment on Financial Assets*
Bunga Deposito dan Jasa Giro	10,180,525,951	13,889,936,325	*Interest on Time Deposit and Current Account*
Selisih Nilai Wajar Properti Investasi (Catatan 16)	--	1,224,825,000	*Different on Fair Value Investment Property (Note 16)*
Jumlah	**135,058,450,113**	**123,376,660,331**	***Total***

	2024 Rp	2023 Rp	
Beban Lainnya			***Other Expenses***
Penurunan Nilai Aset Keuangan	(152,470,218,330)	(115,345,892,775)	*Impairment of Financial Assets*
Tanggung Jawab Sosial	(1,003,346,500)	(1,680,512,895)	*Corporate Social Responsibility*
Lain-lain	(76,974,347,971)	(3,722,995,231)	*Others*
Jumlah	**(230,447,912,801)**	**(120,749,400,901)**	***Total***

38. Beban Keuangan / *38. Financial Expense*

Beban keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari:

Financial expense for the years ended December 31, 2024 and 2023 consist of:

	2024 Rp	2023 Rp	
Beban Bunga	(28,254,570,874)	(66,403,042,574)	*Interest Expenses*
Jumlah	**(28,254,570,874)**	**(66,403,042,574)**	***Total***

39. Saldo dan Sifat Transaksi Pihak Berelasi / *39. Balance and Nature of Related Parties Transactions*

Sifat dan jenis transaksi yang material dengan pihak-pihak yang berelasi adalah sebagai berikut:

a. Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Negara BUMN merupakan pemegang saham mayoritas PT Wijaya Karya (Persero) Tbk yang menjadi pemegang saham Perusahaan. Oleh karena itu secara tidak langsung Perusahaan memiliki hubungan afiliasi melalui penyertaan modal pemerintah Republik Indonesia.
b. Perusahaan menempatkan dana dan memiliki pinjaman dana pada bank-bank BUMN dengan persyaratan dan tingkat bunga normal sebagaimana yang berlaku untuk nasabah pihak ketiga.
c. Perusahaan mengadakan perjanjian dalam rangka usaha Perusahaan dengan BUMN lain maupun entitas anak serta badan dan institusi pemerintah yang berwenang.

The characteristic and type of significant transactions with related parties are as follows:

a. The Government of the Republic of Indonesia which was represented by Minister of State Owned Enterprise is the majority shareholder of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk which becomes the shareholders of the Company. Therefore, indirectly other companies an affiliate connection through the inclusion of government capital of the Indonesia.
b. The Company puts funds and gets loans from the State Owned Enterprise banks at normal terms and interest rates equal to other third party customers.
c. The Company enters into agreements in relation to the Company's operations with other State Owned Enterprise and subsidiary and with other authorized government bodies and institutions.

Rincian, sifat hubungan dan jenis transaksi yang material dengan pihak - pihak yang berelasi adalah, sebagai berikut:

The following are details of characteristic of the relationship and types of significant transactions with the related parties:

Pihak-pihak yang Berelasi/ *Related Parties*	Sifat Hubungan/ *Nature of Relationship*	Transaksi/ *Transaction*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / *Government Related Entity*	Kas dan Setara Kas, Piutang Usaha, Piutang Retensi, Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja, Pekerjaan dalam Proses, Utang Usaha, Pinjaman Bank, dan Pendapatan / *Cash and Cash Equivalent, Accounts Receivable, Retention Receivables, Gross Amount Due from Customers, Work in Progress, Trade Payables, Bank Loans and Revenue*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / *Government Related Entity*	Kas dan Setara Kas, Pinjaman Bank dan Utang Usaha / *Cash and Cash Equivalent, Bank Loans and Trade Payables*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / *Government Related Entity*	Kas dan Setara Kas dan Utang Usaha / *Cash and Cash Equivalent and Trade Payables*

Pihak-pihak yang Berelasi/ ***Related Parties***	**Sifat Hubungan/** ***Nature of Relationship***	**Transaksi/** ***Transaction***
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / *Government Related Entity*	Kas dan Setara Kas, Piutang Usaha, Piutang Retensi, Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja, Pekerjaan dalam Proses, Utang Usaha, Pinjaman Bank, dan Pendapatan / *Cash and Cash Equivalent, Accounts Receivable, Retention Receivables, Gross Amount Due from Customers, Work in Progress, Trade Payables, Bank Loans and Revenue*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / *Government Related Entity*	Kas dan Setara Kas, Pinjaman Bank dan Utang Usaha / *Cash and Cash Equivalent, Bank Loans and Trade Payables*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / *Government Related Entity*	Kas dan Setara Kas dan Utang Usaha / *Cash and Cash Equivalent and Trade Payables*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / *Government Related Entity*	Kas dan Setara Kas, Pinjaman Bank, dan Utang Usaha / *Cash and Cash Equivalent, Bank Loans, and Trade Payables*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / *Government Related Entity*	Kas dan Setara Kas, Pinjaman Bank dan Utang Usaha/ *Cash and Cash Equivalent, Bank Loans and Trade Payables*
Koperasi Karyawan WIKA	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / *Government Related Entity*	Kas dan Setara Kas, Piutang Lain-lain, Utang Usaha dan Utang Lain-lain/ *Cash and Cash Equivalent, Other Receivables, Trade Payables and Other Payables*
Koperasi Karyawan WEGE	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / *Government Related Entity*	Piutang Usaha, Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja dan Utang Usaha / *Trade Receivables, Gross Amount Due from Customers and Trade Payables*
PT Pertamina (Persero) Tbk	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / *Government Related Entity*	Piutang Retensi, Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja dan Pekerjaan dalam Proses/ *Retention Receivables, Gross Amount Due from Customers and Work in Progress*
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / Government Related Entity	Piutang Usaha, Piutang Retensi, Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja, Pekerjaan dalam Proses dan Pendapatan/ *Account Receivables, Retention Receivables, Gross Amount Due from Customers, Work in Progress and Revenue*
PT Kereta Cepat Indonesia China	Kerja Sama Operasi / *Joint Venture*	Piutang Usaha, Piutang Retensi, Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja dan Pendapatan/ *Account Receivables, Retention Receivables, Gross Amount Due from Customers and Revenue*
PT Pertamina Bina Medika	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / *Government Related Entity*	Piutang Usaha, Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja dan Pendapatan/ *Account Receivables, Gross Amount Due From Customers and Revenue*
PT Brantas Abiparaya (Persero)	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / *Government Related Entity*	Piutang Retensi, Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja, Pekerjaan dalam Proses dan Pendapatan/ *Retention Receivables, Gross Amount Due from Customers, Work in Progress and Revenue*
PT Angkasa Pura I	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / *Government Related Entity*	Piutang Usaha, Piutang Retensi, Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja, Pekerjaan dalam Proses dan Pendapatan/ *Account Receivables, Retention Receivables, Gross Amount Due from Customers, Work in Progress and Revenue*
Telkom Property (PT Graha Sarana Duta)	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / Government Related Entity	Pendapatan / *Revenue*
PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / *Government Related Entity*	Piutang Usaha / *Account Receivables*
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - Mahoni	Kerja Sama Operasi / *Joint Venture*	Piutang Usaha, Piutang Retensi, Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja dan Piutang Lain-lain/ *Account Receivables, Retention Receivables, Gross Amount Due from Customers and Other Receivables*
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Mutiara Masyhur Sejahtera	Kerja Sama Operasi / *Joint Venture*	Piutang Usaha, Piutang Retensi, Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja, dan Piutang Lain-lain / *Account Receivables, Retention Receivables, Gross Amount Due from Customers, and Other Receivables*
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Pemegang Saham Mayoritas Perseroan / *Ultimate Shareholder*	Piutang Usaha, Piutang Retensi, Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja, Pekerjaan dalam Proses, Piutang Lain-lain, Utang Usaha, Utang Lain-lain dan Pendapatan/ *Accounts Receivable, Retention Receivables, Gross Amount Due from Customers, Work in Progress, Other Receivables, Trade Payables, Other Payables and Revenue*
PT Wijaya Karya Beton Tbk	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / *Government Related Entity*	Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja, Pekerjaan dalam Proses, Utang Usaha dan Pendapatan/ *Gross Amount Due from Customers, Work in Progress, Trade Payables and Revenue*
PT Wijaya Karya Realty	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / *Government Related Entity*	Piutang Usaha, Piutang Retensi, Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja, Pekerjaan dalam Proses, Piutang Lain-lain dan Utang Usaha/ *Account Receivables, Retention Receivables, Gross Amount Due from Customers, Work in Progress, Other Receivables and Trade Payables*
PT Kurnia Realty Jaya	Entitas Asosiasi / *Associate Entity*	Piutang Usaha, Piutang Retensi, dan Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja / *Account Receivables, Retention Receivables, and Gross Amount Due from Customers*
Kementerian BUMN	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / *Government Related Entity*	Pekerjaan dalam Proses / *Work in Progress*
PT Biofarma (Persero)	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / *Government Related Entity*	Piutang Usaha, Piutang Retensi dan Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja/ *Accounts Receivable, Retention Receivables and Gross Amount Due from Customers*
PT Patra Jasa	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / *Government Related Entity*	Piutang Usaha, Piutang Retensi, Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja, Piutang Lain-lain dan Pendapatan/ *Account Receivables, Retention Receivables, Gross Amount Due from Customers, Other Receivables and Revenue*
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / *Government Related Entity*	Piutang Usaha, Piutang Retensi, Pekerjaan dalam Proses dan Piutang Lain-lain / *Account Receivables, Retention Receivables, Work in Progress and Other Receivables*
KSU PT Wika (Persero) Tbk - PT Balai Pustaka (Persero)	Kerja Sama Operasi / *Joint Venture*	Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja, Pekerjaan dalam Proses dan Piutang Lain-lain / *Gross Amount Due from Customers, Work in Progress and Other Receivables*
PT Patra Wijaya Realtindo	*Afiliasi / Affiliated*	Piutang Lain-lain / *Other Receivables*
KSO PT Wika Bangunan Gedung - PT Jakarta Konsultindo	Kerja Sama Operasi / *Joint Venture*	Piutang Lain-lain / *Other Receivables*
PT Wika Industri Energi	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / *Government Related Entity*	Utang Usaha / *Trade Payables*
PT Telkom Indonesia	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / *Government Related Entity*	Utang Usaha / *Trade Payables*
PT PLN (Persero)	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / *Government Related Entity*	Utang Usaha / *Trade Payables*
KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT PP (Persero)	Kerja Sama Operasi / *Joint Venture*	Piutang Usaha, Piutang Retensi dan Pendapatan/ *Accounts Receivable, Retention Receivables and Revenue*
PT PP (Persero) Tbk	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / *Government Related Entity*	Piutang Usaha, Piutang Retensi, Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja, Piutang Lain-lain dan Pendapatan/ *Accounts Receivable, Retention Receivables, Gross Amount Due from Customers, Other Receivables and Revenue*
KSO Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - Kahuripan Nirwana	Kerja Sama Operasi / *Joint Venture*	Piutang Usaha, Piutang Retensi, Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja, Pekerjaan dalam Proses dan Pendapatan/ *Accounts Receivable, Retention Receivables, Gross Amount Due from Customers, Work in Progress and Revenue*
KSO PT Wijaya Karya Pracetak Gedung Tbk - Hakaaston	Kerja Sama Operasi / *Joint Venture*	Piutang Usaha dan Piutang Lain-lain/ *Accounts Receivable and Other Receivables*

Pihak-pihak yang Berelasi/ ***Related Parties***	**Sifat Hubungan/** ***Nature of Relationship***	**Transaksi/** ***Transaction***
KSO PT Wijaya Karya Pracetak Gedung Tbk-Bringin Karya Sejahtera	Kerja Sama Operasi / *Joint Venture*	Piutang Usaha dan Piutang Lain-lain/ *Accounts Receivable and Other Receivables*
High Speed Railway Conctractor Consortium	Kerja Sama Operasi / *Joint Venture*	Piutang Retensi, Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja, Pekerjaan dalam Proses dan Piutang Lain-lain/ *Retention Receivables, Gross Amount Due from Customers, Work in Progress and Other Receivables*
KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - Chakra	Kerja Sama Operasi / *Joint Venture*	Piutang Retensi/ *Retention Receivables*
PT Brantas Abipraya Beton	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / *Government Related Entity*	Piutang Retensi/ *Retention Receivables*
KSO PT Wika Gedung - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Kerja Sama Operasi / *Joint Venture*	Piutang Lain-lain / *Other Receivables*
KSO PT Wika Gedung - PT Jaya Konstruksi - PT PP (Persero) Tbk	Kerja Sama Operasi / *Joint Venture*	Piutang Lain-lain dan Pendapatan/ *Other Receivables and Revenue*
PT Wijaya Karya Krakatau Beton	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / *Government Related Entity*	Utang Usaha / *Trade Payables*
PT Waskita Beton Precast	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / *Government Related Entity*	Utang Usaha / *Trade Payables*
PT Sarinah (Persero)	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / *Government Related Entity*	Utang Usaha / *Trade Payables*
PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / *Government Related Entity*	Utang Usaha / *Trade Payables*
KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Adhi Karya	Kerja Sama Operasi / *Joint Venture*	Pendapatan / *Revenue*
PT Bank Mandiri Taspen	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / *Government Related Entity*	Kas dan Setara Kas dan Pendapatan / *Cash and Cash Equivalents and Revenue*
KSO Wika-Hutama-Adipatria	Kerja Sama Operasi / *Joint Venture*	Pendapatan / *Revenue*
KSO Wika - Aneka Dharma Persada	Kerja Sama Operasi / *Joint Venture*	Pendapatan / *Revenue*
KSO Wika-Hutama	Kerja Sama Operasi / *Joint Venture*	Pendapatan / *Revenue*
PT Telkom Akses	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / *Government Related Entity*	Pendapatan / *Revenue*
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Adhi Karya	Kerja Sama Operasi / *Joint Venture*	Piutang Lain-lain/ *Other Receivables*
KSO PT Wika Gedung - PT Shimizu Corporation	Kerja Sama Operasi / *Joint Venture*	Piutang Lain-lain/ *Other Receivables*
PT Wijaya Karya Precast Gedung	Entitas Sepengendali/ *Entity under Common Control*	Piutang Lain-lain dan Utang Usaha/ *Other Receivables and Trade Payables*
PT Propernas Griya Utama	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / *Government Related Entity*	Utang Usaha / *Trade Payables*
PT Bhirawa Steel	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / *Government Related Entity*	Utang Usaha / *Trade Payables*
PT Varia Usaha Beton	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / *Government Related Entity*	Utang Usaha / *Trade Payables*
PT Krakatau Perbengkelan dan Perawatan	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / *Government Related Entity*	Utang Usaha / *Trade Payables*

Tidak ada perbedaan kebijakan harga dan syarat transaksi antara pihak-pihak berelasi dan pihak ketiga.

There are no differences in pricing policy and terms of transaction between related parties and third parties.

Rincian akun yang terkait dengan transaksi pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The following is the breakdown of transactions with related parties as follows:

	2024 **Rp**	**2023** **Rp**	**Persentase dari Total Aset/Liabilitas /** ***Percentage from Total Assets/Liabilities*** **2024** **%**	**2023** **%**
ASET/ ***ASSET***				
Kas dan Setara Kas/ ***Cash and Cash Equivalents***				
Bank/ ***Cash in Banks***				
Rupiah				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	283,838,661,891	267,715,205,698	4.96	4.81
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	279,208,821,238	286,599,180,646	4.88	5.15
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	165,770,391,660	32,768,203,959	2.89	0.59
PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk	139,667,629,022	34,918,530,917	2.44	0.63
PT Bank Mandiri Taspen	757,735,498	--	0.01	--
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	72,152,248	10,429,188,379	--	0.19
Dolar Amerika Serikat/ ***United States Dollar***				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1,227,334,522	1,171,608,600	0.02	0.02
Sub Jumlah/ ***Sub Total***	**870,542,726,079**	**633,601,918,199**	**15.20**	**11.39**
Deposito Berjangka/ ***Time Deposits***				
Rupiah				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	75,000,000,000	74,143,777,057	1.31	1.33
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	40,500,000,000	121,000,000,000	0.71	2.18
Koperasi Karyawan WIKA	30,462,137,368	35,911,618,286	0.53	0.65
PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk	--	70,000,000,000	--	1.26
Sub Jumlah/ ***Sub Total***	**145,962,137,368**	**301,055,395,343**	**2.55**	**5.42**
Jumlah/ ***Total***	**1,016,504,863,447**	**934,657,313,542**	**17.75**	**16.81**

	2024 Rp	2023 Rp	Persentase dari Total Aset/Liabilitas / *Percentage from Total Assets/Liabilities* 2024 %	2023 %
Piutang Usaha/ *Trade Receivables*				
PT Kurnia Realty Jaya	62,168,542,981	62,168,542,981	1.09	1.12
KSO PT Wijaya Karya Bangunang Gedung Tbk - Abadi Prima Inti Karya	53,575,052,241	--	0.94	--
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - High Speed Railway	42,389,137,398	57,190,354,281	0.74	1.03
PT Wijaya Karya Realty	27,907,003,333	29,909,908,077	0.49	0.54
PT Pertamina Bina Medika	21,161,820,000	11,000,000	0.37	--
PT Biofarma (Persero)	17,493,104,000	51,444,865,416	0.31	0.93
KSO PT Wijaya Karya Bangunang Gedung Tbk - Brantas Abipraya	13,798,707,641	--	0.24	--
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	6,054,073,716	5,251,931,216	0.11	0.09
Koperasi Karyawan WEGE	4,522,402,500	4,522,402,500	0.08	0.08
High Speed Railway Conctractor Consortium	3,644,438,339	3,644,438,339	0.06	0.07
PT Hotel Karya Indonesia	3,225,283,268	3,225,283,268	0.06	0.06
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - Adhi Karya	2,197,012,030	2,197,012,030	0.04	0.04
PT Patra Jasa	1,999,250,000	1,049,925,000	0.03	0.02
PT PP (Persero) Tbk	1,546,813,251	2,243,617,661	0.03	0.04
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	1,268,735,586	164,405,930,699	0.02	2.96
PT Bukit Asam Tbk	1,016,369,723	--	0.02	--
KSO PT Wijaya Karya Bangunang Gedung Tbk - Jaya Konstruksi	185,962,081	--	--	--
KSO PT Wijaya Karya Bangunang Gedung Tbk - Nindya Karya	103,235,550	--	--	--
KSO PT Wijaya Karya - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	91,670,908	20,625,000	--	--
PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi	57,806,667	57,806,667	--	--
KSO PT Wijaya Karya Bangunang Gedung Tbk - Pelitamaju Multiswakarsa	20,033,926	--	--	--
KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT PP (Persero)	--	671,000,000	--	0.01
Jumlah/ *Total*	**264,426,455,139**	**388,014,643,135**	**4.62**	**6.98**
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Less: Allowance for Impairment Loss*	(1,226,546,977)	(17,393,061,584)	(0.02)	(0.31)
Jumlah Pihak Berelasi - Bersih/ *Total Related Parties - Net*	**263,199,908,162**	**370,621,581,551**	**4.60**	**6.66**
Piutang Retensi/ *Retention Receivables*				
High Speed Railway Conctractor Consortium	44,747,001,122	41,825,115,409	0.78	0.75
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	33,013,507,921	33,013,507,921	0.58	0.59
PT Biofarma (Persero)	27,259,265,964	18,731,850,431	0.48	0.34
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	23,425,123,718	23,425,123,718	0.41	0.42
PT Wijaya Karya Realty	20,127,548,485	20,127,548,485	0.35	0.36
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung - Mutiara Masyhur	8,338,583,159	8,338,583,159	0.15	0.15
PT Kurnia Realty Jaya	3,201,979,464	3,201,979,464	0.06	0.06
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung - Kahuripan Nirwarna	2,656,900,000	2,656,900,000	0.05	0.05
PT Bukit Asam Tbk	978,074,561	--	0.02	--
PT Hotel Karya Indonesia	885,280,538	885,280,538	0.02	0.02
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	250,308,559	--	--	--
PT Patra Jasa	--	1,999,250,000	--	0.04
Jumlah/ *Total*	**164,883,573,491**	**154,205,139,125**	**2.88**	**2.77**
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Less: Allowance for Impairment Loss*	(3,170,644,421)	(7,322,587,037)	(0.06)	(0.13)
Jumlah Pihak Berelasi - Bersih/ *Total Related Parties - Net*	**161,712,929,070**	**146,882,552,088**	**2.82**	**2.64**
Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja/ *Gross Amount Due from Customers*				
PT Wijaya Karya Realty	78,935,043,254	78,935,043,254	1.38	1.42
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	76,222,877,492	76,222,877,492	1.33	1.37
PT Biofarma (Persero)	15,259,227,630	1,368,431,999	0.27	0.02
PT Bukit Asam Tbk	8,256,774,156	--	0.14	0.00
High Speed Railway Conctractor Consortium	6,051,185,905	63,522,559,595	0.11	1.14
KSO PT Wika Gedung - PT Mutiara Masyhur Sejahtera	5,208,168,022	5,208,168,022	0.09	0.09
PT Pertamina Bina Medika	3,570,972,973	13,291,954,955	0.06	0.24
KSO Wika Gedung - Kahuripan Nirwarna	1,748,612,813	1,748,612,813	0.03	0.03
Jumlah/ *Total*	**195,252,862,245**	**240,297,648,130**	**3.41**	**4.32**
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Less: Allowance for Impairment Loss*	(131,093,920)	(3,439,689,104)	--	(0.06)
Jumlah Pihak Berelasi - Bersih/ *Total Related Parties - Net*	**195,121,768,325**	**236,857,959,026**	**3.41**	**4.26**
Pekerjaan dalam Proses Konstruksi/ *Construction Work in Progress*				
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	205,213,598,795	205,213,598,794	3.58	3.69
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	66,097,936,440	70,399,105,751	1.15	1.27
High Speed Railway Conctractor Consortium	51,748,995,621	--	0.90	--
PT Wijaya Karya Realty	18,994,597,105	18,994,597,105	0.33	0.34
KSO WIKA Gedung - Kahuripan Nirwarna	12,989,404,560	12,989,404,560	0.23	0.23
PT Biofarma (Persero)	6,436,615,787	--	0.11	--
PT Bukit Asam Tbk	6,048,704,782	--	0.11	--
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2,851,992,755	--	0.05	--
PT Pertamina (Persero)	2,783,901,849	2,825,698,935	0.05	0.05
PT Hotel Karya Indonesia	1,610,760,665	1,610,760,665	0.03	0.03
Jumlah/ *Total*	**374,776,508,359**	**312,033,165,810**	**6.54**	**5.61**

	2024 Rp	2023 Rp	Persentase dari Total Aset/Liabilitas / *Percentage from Total Assets/Liabilities* 2024 %	2023 %
Piutang Lain-lain/ *Other Receivables*				
PT Patra Wijaya Realtindo	126,527,777,950	126,527,777,950	2.21	2.28
PT Wijaya Karya Precast Gedung	18,112,500,000	112,500,000	0.32	--
PT Patra Jasa	8,500,000,000	8,500,000,000	0.15	0.15
PT Wijaya Karya Realty	3,054,710,366	3,054,710,366	0.05	0.05
Building Management Tamansari Mahogany	2,875,578,766	1,309,022,844	0.05	0.02
KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	1,753,708,676	150,000,000	0.03	--
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Jaya Konstruksi Tbk	1,690,564,374	--	0.03	--
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Abadi Prima Intikarya	1,562,293,099	--	0.03	--
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Brantas Abipraya (Persero)	1,121,599,075	--	0.02	--
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Pelita	182,126,600	--	--	--
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	26,749,999	--	--	--
KSO Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk-Kahuripan Nirwana	--	476,932,529	--	0.01
KSO PT Wika Gedung - PT Shimizu Corporation	--	481,610,000	--	0.01
Jumlah/ *Total*	**165,407,608,905**	**140,612,553,689**	**2.89**	**2.52**
LIABILITAS/ *LIABILITIES*				
Utang Bank Jangka Pendek/				
Short Term Bank Loans				
Rupiah/ *Indonesian Rupiah*				
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk				
Cash Loan	200,000,000,000	--	6.41	--
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk				
Cash Loan	95,000,000,000	--	3.04	--
PT Bank Syariah Indonesia Tbk				
Cash Loan	55,000,000,000	103,000,000,000	1.76	3.43
Jumlah/ *Total*	**350,000,000,000**	**103,000,000,000**	**11.21**	**3.43**
Utang Usaha/ *Trade Payables*				
Pemasok Subkontraktor dan Mandor/				
Supplier Subcontractor and Foreman				
PT Wijaya Karya Beton Tbk	25,639,180,264	3,534,534,868	0.82	0.12
PT Solusi Bangun Beton	5,962,669,075	3,340,530,232	0.19	0.11
Koperasi Karyawan WIKA	4,264,764,233	203,993,731	0.14	0.01
PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi	3,520,595,896	--	0.11	--
PT Wijaya Karya Realty	2,239,114,576	146,140,000	0.07	--
PT Wijaya Karya Pracetak Gedung	1,691,788,405	1,881,318,489	0.05	0.06
PT Wika Industri Energi	1,523,364,485	--	0.05	--
Koperasi Karyawan WEGE	1,452,758,046	1,558,084,299	0.05	0.05
PT Propernas Griya Utama	1,267,680,282	1,267,680,282	0.04	0.04
PT Varia Usaha Beton	856,639,550	333,507,000	0.03	0.01
PT Bhirawa Steel	766,269,798	431,818,301	0.02	0.01
PT Semen Indonesia Beton	682,637,500	--	0.02	--
PT Adhi Karya (Persero)	401,000,000	--	0.01	--
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	208,800,000	--	0.01	--
PT BGR Logistik Indonesia	206,500,000	--	0.01	--
PT Pos Logistik Indonesia	103,747,525	--	--	--
PT Krakatau Perbengkelan dan Perawatan	26,500,000	26,500,000	--	--
PT PLN (Persero)	23,656,320	--	--	--
PT Waskita Beton Precast Tbk	--	2,401,923,085	--	0.08
PT Sarinah (Persero)	--	2,265,450,036	--	0.08
PT Wijaya Karya Krakatau Beton	--	19,621,622	--	--
Sang Hyang Seri Persero (Pertani)	--	12,600,000	--	--
Sub Jumlah/ *Sub Total*	**50,837,665,955**	**17,423,701,945**	**1.62**	**0.57**
Utang Mitra (Catatan 42)/ *Partners Payables (Note 42)*				
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk				
Non Cash Loan	296,115,025,456	106,118,021,368	9.49	3.53
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk				
Non Cash Loan	51,244,775,498	92,141,225,959	1.64	3.07
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk				
Non Cash Loan	45,929,158,120	120,772,520,801	1.47	4.02
PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk				
Non Cash Loan	29,333,064,905	250,569,890,723	0.94	8.34
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk				
Non Cash Loan	411,418,000	21,386,866,399	0.01	0.71
Sub Jumlah/ *Sub Total*	**423,033,441,979**	**590,988,525,250**	**0.95**	**9.05**
Jumlah/ *Total*	**473,871,107,934**	**608,412,227,195**	**2.57**	**9.62**
Uang Muka Pemberi Kerja dan Konsumen/				
Advances From Projects and Consumers				
Proyek Tamansari Emerald Surabaya	34,275,100,845	34,275,100,845	1.10	1.14
Proyek Biofarma 2 Bandung	19,892,025,150	45,021,412,768	0.64	1.50
Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Area Gresik (Mandiri Gresik)	17,557,324,325	--	0.56	--
Proyek Tamansari Cendekia - Semarang	16,919,802,195	16,919,802,200	0.54	0.56
Perluasan Bangunan dan Jaringan Kelistrikan Gardu Hubung PT BIO FARMA	2,180,544,000	--	0.07	--
Tamansari Prospero	1,742,760,000	--	0.06	--
Ofiice Benhill Central	500,000,000	--	0.02	--
Proyek Stasiun Kereta Cepat Halim	--	4,277,057,535	--	0.14
Proyek Stasiun KCIC Karawang	--	1,200,672,001	--	0.04
Jumlah/ *Total*	**93,067,556,515**	**101,694,045,349**	**2.99**	**3.38**

	2024 Rp	2023 Rp	Persentase dari Total Aset/Liabilitas / *Percentage from Total Assets/Liabilities* 2024 %	2023 %
Utang Lain-lain/ *Other Payables*				
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	33,364,986,194	31,536,846,305	1.07	1.05
Koperasi Karyawan WIKA	3,534,724,619	3,355,426,647	0.11	0.11
Jumlah/ *Total*	**36,899,710,813**	**34,892,272,952**	**1.18**	**1.16**
Bagian Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun/ *Long-term Payables Current Maturity Portion*				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	9,417,600,000	8,938,000,000	0.30	0.30
Bagian Liabilitas Jangka Panjang/ *Long-term Payables Long-term Portion :*				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	75,646,000,000	85,063,600,000	2.42	2.83
Jumlah/ *Total*	**85,063,600,000**	**94,001,600,000**	**2.72**	**3.13**

	2024 Rp	2023 Rp	Persentase dari Total Penjualan Neto/ Beban / *Percentage from Total Net Sales/ Expenses* 2024 %	2023 %
Pendapatan/ *Revenue*				
PT Biofarma (Persero)	184,035,013,721	175,359,463,537	5.01	4.41
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	125,077,886,911	125,077,886,911	3.40	3.14
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Abadi Prima Inti Karya	110,811,240,000	--	3.02	--
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Abipraya	74,088,574,000	--	2.02	--
PT Pertamina Bina Medika	58,127,504,504	13,291,954,955	1.58	0.33
PT Bank Mandiri Taspen	28,611,325,452	26,154,327,633	0.78	0.66
PT Bukit Asam Tbk	27,818,265,269	--	0.76	--
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	21,820,882,882	--	0.59	--
Koperasi Karyawan WEGE	2,404,915,651	2,404,915,651	0.07	0.06
PT Hutama Karya (Persero)	2,128,000,000	2,128,000,000	0.06	0.05
PT Brantas Abipraya (Persero)	1,771,000,000	1,771,000,000	0.05	0.04
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	1,161,310,000	1,161,310,000	0.03	0.03
High Speed Railway Conctractor Consortium	966,340,561	367,488,846,306	0.03	9.23
KSO Wika-Minarta-Karta Utama	837,000,000	--	0.02	--
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Jaya Konstruksi Tbk	720,000,000	--	0.02	--
KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Jaya Konstruksi	640,000,000	--	0.02	--
KSO PT PP (Persero) - WAA	461,000,000	461,000,000	0.01	0.01
SRBGC - PT Wijaya Karya (Persero) - PT Adhi Karya JO	318,000,000	318,000,000	0.01	0.01
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Nindya Karya (Persero)	93,005,000	--	--	--
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	80,000,000	--	--	--
Jumlah/ *Total*	**641,971,263,951**	**715,616,704,993**	**17.48**	**17.97**

40. (Laba) Rugi Selisih Kurs / *40. Foreign Exchange (Gain) Loss*

Akun ini merupakan rugi selisih kurs untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

This account represents loss on exchanges rate for the years ended December 31, 2024 and 2023 as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
(Laba) Rugi Selisih Kurs	56,682,663	(782,061,194)	*(Gain) Loss on Exchanges Rate*
Jumlah	**56,682,663**	**(782,061,194)**	***Total***

41. Informasi Tambahan Arus Kas / *41. Supplemental Cash Flow Information*

Rekonsiliasi Liabilitas yang Timbul dari Aktivitas Pendanaan
Tabel di bawah ini menunjukkan rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari pendanaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023:

Reconciliation of Liabilities Arising from Financing Activities
The table below sets out a reconciliation of liabilities arising from financing activities for the years ended December 31, 2024 and 2023:

	Saldo Awal/ *Beginning Balance* Rp	Arus Kas/ *Cash Flows* Penerimaan/ *Receipt* Rp	Arus Kas/ *Cash Flows* Pembayaran/ *Payment* Rp	Saldo Akhir/ *Ending Balance* Rp	
2024					***2024***
Pinjaman Bank Jangka Pendek	129,500,000,000	463,186,818,225	(220,686,818,225)	372,000,000,000	*Short-term Bank Loan*
Pinjaman Bank Jangka Panjang	94,001,600,000	--	(8,938,000,000)	85,063,600,000	*Long-term Bank Loan*
Utang Lain-lain Pihak Berelasi	31,536,846,305	1,828,139,889	--	33,364,986,194	*Other Payables - Related Party*
Total Liabilitas dari Aktivitas Pendanaan	**255,038,446,305**	**465,014,958,114**	**(229,624,818,225)**	**490,428,586,194**	***Total Liabilities from Financing Activities***
2023					***2023***
Pinjaman Bank Jangka Pendek	500,000,000,000	362,500,000,000	(733,000,000,000)	129,500,000,000	*Short-term Bank Loan*
Pinjaman Bank Jangka Panjang	101,032,100,000	--	(7,030,500,000)	94,001,600,000	*Long-term Bank Loan*
Utang Lain-lain Pihak Berelasi	29,392,348,830	2,144,497,475	--	31,536,846,305	*Other Payables - Related Party*
Total Liabilitas dari Aktivitas Pendanaan	**630,424,448,830**	**364,644,497,475**	**(740,030,500,000)**	**255,038,446,305**	***Total Liabilities from Financing Activities***

42. Informasi Segmen / *42. Segment Information*

a. Segmen Operasi / *a. Operation Segment*

Segmen operasi Grup dikelompokkan berdasarkan jenis usaha/ produk yang dihasilkan.

The operating segments of the Group classified based on type of business/products.

Informasi segmen berdasarkan jenis usaha/ produk adalah sebagai berikut:

Segment information based on type of business/ product are as follows:

	2024						
	Konstruksi/ *Construction* Rp	Properti/ *Property* Rp	Konsesi/ *Concession* Rp	Modular/ *Modular* Rp	Eliminasi/ *Elimination* Rp	Jumlah/ *Total* Rp	
Pendapatan Bersih	3,370,060,829,345	818,284,502	67,099,233,183	237,349,044,669	(1,800,216,216)	3,673,527,175,483	***Revenue***
Beban pokok penjualan	(3,092,048,402,341)	(701,299,836)	(61,839,280,602)	(213,236,943,944)	1,800,216,216	(3,366,025,710,507)	***Cost Of Revenue***
Laba Kotor	278,012,427,004	116,984,666	5,259,952,581	24,112,100,725	--	307,501,464,976	***Gross Profit***
Beban Usaha	(114,423,879,780)	--	--	--	--	(114,423,879,780)	***Operating Expenses***
LABA USAHA	163,588,547,224	116,984,666	5,259,952,581	24,112,100,725	--	193,077,585,196	***OPERATING INCOME***
Beban Pajak Final	(89,258,906,248)	(20,270,863)	(2,852,937,575)	(4,274,960,111)	--	(96,407,074,797)	*Final tax expenses*
Bagian Laba Ventura Bersama	99,433,579,537	230,742,243	--	--	--	99,664,321,780	*Profit from joint venture*
Bagian Laba Entitas Asosiasi	(4,790,231,331)	--	--	--	--	(4,790,231,331)	*Profit from association entity*
Pendapatan (Beban) lain-lain	(138,970,161,247)	(707,382,571)	(89,568,863)	16,179,761,782	--	(123,587,350,899)	*Other (expense) income*
Laba sebelum pajak Penghasilan	30,002,827,935	(379,926,525)	2,317,446,143	36,016,902,396	--	67,957,249,949	***Profit before income tax***
Pajak Penghasilan	--	--	--	--	--	--	*Income tax*
Laba Tahun Berjalan Bersih	30,002,827,935	(379,926,525)	2,317,446,143	36,016,902,396	--	67,957,249,949	*Profit after income tax*
Kepentingan Non Pengendali atas Laba (Rugi) Bersih Entitas Anak	--	--	--	--	(68,985,076)	(68,985,076)	***Non Controlling interest of net profit or loss subsidiary***
Laba Bersih Kepemilikan Entitas Induk	**30,002,827,935**	**(379,926,525)**	**2,317,446,143**	**36,016,902,396**	**(68,985,076)**	**67,888,264,873**	***Net Income to Owners of the Parent***
Aset segmen	5,055,257,286,604	453,953,466,763	344,726,591,314	134,479,553,175	(22,500,000,000)	5,965,916,897,856	*Asset Segment*
Liabilitas segmen	2,801,381,896,910	217,869,727,184	318,753,600,521	21,201,741,097	--	3,359,206,965,712	*Liabilities Segment*

	2023						
	Konstruksi/ *Construction* Rp	Properti/ *Property* Rp	Konsesi/ *Concession* Rp	Modular/ *Modular* Rp	Eliminasi/ *Elimination* Rp	Jumlah/ *Total* Rp	
Pendapatan Bersih	3,782,577,584,065	16,879,485,450	52,872,096,895	131,079,933,309	(3,694,530,000)	3,979,714,569,719	***Revenue***
Beban pokok penjualan	(3,523,411,293,565)	(13,246,143,072)	(37,559,648,559)	(105,972,968,501)	3,694,530,000	(3,676,495,523,697)	***Cost Of Revenue***
Laba Kotor	259,166,290,500	3,633,342,378	15,312,448,336	25,106,964,808	--	303,219,046,022	***Gross Profit***
Beban Usaha	(70,680,448,625)	--	(2,992,581,942)	--	--	(73,673,030,567)	***Operating Expenses***
LABA USAHA	188,485,841,875	3,633,342,378	12,319,866,394	25,106,964,808	--	229,546,015,455	***OPERATING INCOME***
Beban Pajak Final	(100,238,305,978)	(233,251,114)	(2,605,570,622)	(11,552,381,640)	--	(114,629,509,354)	*Final tax expenses*
Bagian Laba Ventura Bersama	9,732,524,731	580,119,222	--	453,245,128	--	10,765,889,081	*Profit from joint venture*
Bagian Laba Entitas Asosiasi	(14,624,400,396)	--	--	--	--	(14,624,400,396)	*Profit from association entity*
Pendapatan (Beban) lain-lain	(41,318,996,077)	397,978,902	(11,468,641,113)	(12,168,186,050)	--	(64,557,844,338)	*Other (expense) income*
Laba sebelum pajak Penghasilan	42,036,664,155	4,378,189,388	(1,754,345,341)	1,839,642,246	--	46,500,150,448	***Profit before income tax***
Pajak Penghasilan	--	--	--	--	--	--	*Income tax*
Laba Tahun Berjalan Bersih	42,036,664,155	4,378,189,388	(1,754,345,341)	1,839,642,246	--	46,500,150,448	*Profit after income tax*
Kepentingan Non Pengendali atas Laba (Rugi) Bersih Entitas Anak	--	--	--	--	202,008,080	202,008,080	***Non Controlling interest of net profit or loss subsidiary***
Laba Bersih Kepemilikan Entitas Induk	**42,036,664,155**	**4,378,189,388**	**(1,754,345,341)**	**1,839,642,246**	**202,008,080**	**46,702,158,528**	***Net Income to Owners of the Parent***
Aset segmen	4,330,979,037,087	752,713,730,375	286,554,928,098	213,786,139,923	(22,500,000,000)	5,561,533,835,483	*Asset Segment*
Liabilitas segmen	2,108,516,959,455	510,611,230,004	248,933,536,769	134,725,014,025	--	3,002,786,740,253	*Liabilities Segment*

b. Segmen Geografis

Informasi segmen geografis Grup dikelompokkan berdasarkan daerah geografis, yaitu berdasarkan wilayah kegiatan usaha adalah sebagai berikut:

b. Geographical Segment

The Group's geographical segment information is grouped based on geographic area, which is based on the area of business activities as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Pendapatan			***Revenue***
Kalimantan	2,178,558,047,720	699,826,946,096	*Kalimantan*
Jawa	939,242,220,694	2,341,296,568,869	*Jawa*
DKI Jakarta	184,719,872,030	679,389,560,901	*DKI Jakarta*
Banten	180,821,872,219	--	*Nusa Tenggara Timur*
Sumatera	153,467,885,143	--	*Sumatera*
Papua	35,098,795,200	104,160,000	*Papua*
Sulawesi	1,477,477,477	95,543,109,890	*Sulawesi*
Aceh	93,005,000	--	*Bali*
Ambon	48,000,000	38,476,337,052	*Ambon*
Nusa Tenggara Barat	--	125,077,886,911	*Nusa Tenggara Barat*
Jumlah	**3,673,527,175,483**	**3,979,714,569,719**	***Total***

43. Perjanjian dan Komitmen / *43. Agreements and Commitments*

Perjanjian Kegiatan Konstruksi

Perusahaan mempunyai komitmen untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi, diantaranya adalah sebagai berikut:

Construction Activities Agreements

The Company has commitments to carry out the following construction works:

Perjanjian kerjasama operasi

a. Hotel De Braga

Perusahaan melakukan perjanjian Bangun, Guna, Serah *(Bulid, Operate, and Transfer/BOT)* dengan PT Sarinah (Persero) tentang Pengembangan Properti di Jalan Braga No. 10 Bandung - Jawa Barat. Pembangunan tersebut tertuang dalam sertifikat Hak Guna Bangunan dengan Nomor: 649 seluas 1.763 m^2, sedangkan Perusahaan sebagai investornya.

Untuk melakukan kerjasama dengan Perusahaan, PT Sarinah (Persero) telah memperoleh persetujuan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara seperti tertuang dalam Rapat Umum Pemegang Saham No. S-89/MBU/01/2016 tertanggal 25 Januari 2016 tentang Persetujuan Pendayagunaan Aset Milik PT Sarinah (Persero) di Jl. Braga No. 10, Bandung Jawa barat. Sedangkan Perusahaan telah memperoleh persetujuan dari para Pemegang Saham yang tertuang dalam Keputusan Pemegang Saham di luar Rapat PT Wijaya Karya Gedung Tbk No: MJ.01.00/PS.WG.037/2015 tertanggal 13 November 2015.

Coorporation agreements between operation

a. Hotel De Braga

The Company has entered into a Build, Operate, and Transfer / BOT agreement with PT Sarinah (Persero) regarding the development of Property in Jalan Braga No. 10 Bandung - West Java. The development is contained in Building Use Right Certificate No. 649 covering an area of 1,763 sqm, while the Company as its investor.

To have cooperation with the Company, PT Sarinah (Persero) obtained approval from the Ministry of State-Owned Enterprise as stated in the General Meeting of Shareholders Letter No. S-89 / MBU/01 / 2016 dated January 25, 2016 regarding the Approval for the Utilization Assets Owned by PT Sarinah (Persero) in Jl. Braga No. 10, Bandung West Java. Whereas the Company has obtained approval from the shareholders as stated in the Decision of Shareholders of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk outside meeting No: MJ.01.00 / PS.WG.037 / 2015 dated November 13, 2015.

Perusahaan telah merencanakan jumlah investasi yang akan ditanamkan untuk membangun hotel dan fasilitas penunjang dengan investasi awal sebesar Rp115.479.780.769 dengan jangka waktu pengelolaan selama 25 tahun. Sedangkan PT Sarinah (Persero) berhak atas pembayaran sewa lahan sebesar 3,33% dari nilai NJOP tanah setiap tahunnya sebagaimana tertera dalam Peraturan Kementrian Keuangan No.33/PMK.06/2012 dan berhak mendapatkan ruang komersial seluas 132 m^2 selama masa berlakunya perjanjian kerjasama tanpa dikenakan biaya sewa ruang dan *service charge*.

The Company has planned the amount of investments that will be injected to build hotel and supporting facilities with an initial investment amounting to Rp115,479,780,769, with a management terms of 25 years. Whereas PT Sarinah (Persero) is entitled to land rental payments of 3.33% of the value of land based on NJOP every year as stated in the Ministry of Finance Regulation No.33/PMK.06/2012 and is entitled to receive commercial space of 132 sqm during the validity period of the cooperation agreement not subject to rent space fees and service charges.

Perusahaan berkewajiban menyerahkan kembali dan mengalihkan obyek BOT pada tanggal pengalihan bangunan dan penyerahan kembali tanah tanpa kewajiban PT Sarinah (Persero) untuk memberikan ganti rugi kepada Perusahaan sebagai bentuk penyerahan dan atau transfer, yang timbul dalam perjanjian kerjasama ini.

The Company is obligated to turnover and transfer the objects of BOT on the date of transfer of the buildings and handover of the land without obligation from PT Sarinah (Persero) to pay compensation to the Company as a form of the turnover and or transfer arising in the cooperation agreement.

b. Graha Mantap
Akta Perjanjian BOT

Berdasarkan Akta No. 78 tanggal 28 Desember 2018 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta Perusahaan melakukan perjanjian Bangun, Guna, Serah (Bulid, Operate, and Transfer/BOT) dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk mengoptimalkan fungsi dan kegunaan tanah milik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk di Jalan Proklamasi Nomor 31, Jakarta Pusat SHGB Nomor 295/Pegangsaan seluas 4.482 m^2 tanggal 31 Agustus 2009.

b. Graha Mantap
BOT Agreement Deed

Based on Deed No. 78 dated December 28, 2018 made before Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta, the Company entered into a Build, Operate, and Transfer (BOT) agreement with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. to optimize the functions and uses of the land owned by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk at Jalan Proklamasi No. 31, Central Jakarta, SHGB Number 295/Pegangsaan covering an area of 4,482 sqm dated August 31, 2009.

Perusahaan telah merencanakan jumlah investasi sehubungan dengan persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian konstruksi gedung sekurang-kurangnya sebesar Rp172.224.325.971.

The Company has planned that the total investment related to the preparation, execution, and completion of the construction of the building amounted to at least Rp172,224,325,971.

Jangka waktu BOT maksimal 30 tahun sejak tanggal efektif yang meliputi jangka waktu pembangunan, jangka waktu pengoperasian hingga gedung diserahkan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jangka waktu pembangunan maksimal 24 bulan sejak tanggal efektif dan dibuktikan dengan Berita Acara Penyelesaian Pembangunan Gedung. Jangka waktu pengoperasian gedung terhitung sejak tanggal penyelesaian pembangunan dan dibuktikan dengan BAST kesiapan gedung sampai dengan berakhirnya jangka waktu BOT.

BOT period is for a maximum of 30 years from the effective date, which includes the construction period and the operating period until the building is handed over to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The maximum construction period is 24 months from the effective date and proven by Minutes of Building Construction Completion. The building operation period starts from the date and is proven by the BAST of the readiness of the building until the end of the BOT period.

Luas area gedung yang disewakan kepada umum adalah sisa area yang telah disewakan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tarif sewa dan *service charge* kepada umum tidak boleh sama atau lebih rendah daripada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

The area of the building rented to the public is the remaining area that has been rented to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Rent charges and service charges to the public cannot be the same or lower than PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Perusahaan diperkenankan membentuk badan hukum untuk melaksanakan sebagian atau seluruh hak, kewajiban dan/atau kewenangan Perusahaan, dimana Perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas dan pengendali yang disebut dengan *Special Purpose Vehicle* (“SPV”).

The Company is allowed to establishing a legal entity to perform part or all of the rights, obligations and/or authorities of the Company, in which the Company is the majority and controlling shareholder, which is called a Special Purpose Vehicle ("SPV").

Perusahaan wajib menyediakan *sinking fund* dalam rekening *escrow* yang dibayarkan di Bulan Desember setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian dengan total sebesar Rp13.243.625.584.

The Company is required to provide sinking funds in an escrow account which is paid in December each year during the operating period for a total amount of Rp13,243,625,584.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berhak menerima kompensasi yang dibayarkan di Bulan Desember setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian dengan total sebesar Rp49.200.000.000 dan *signing fee* sebesar Rp1.000.000.000 paling lambat 30 hari kalender sejak ditandatanganinya perjanjian.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk is entitled to receive compensation payment in December each year during the operating period with a total amounting to Rp49,200,000,000 and signing fee amounting to Rp1,000,000,000 no later than 30 calendar days after the signing of the agreement.

Perjanjian Pendelegasian BOT
Berdasaran Perjanjian Pendelegasian Pekerjaan Pengembangan Lahan Mandiri Proklamasi Nomor: HK.02.09/A.DIR.WG.6445/ 2019 tanggal 2 Agustus 2019, Perusahaan menyerahkan hak, kewenangan, dan kewajiban Perusahaan terkait pekerjaan BOT terhadap PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada WSP sebagai SPV, selama Jangka Waktu Pembangunan serta Pengoperasian Gedung di atas Tanah oleh dan sepenuhnya atas biaya WSP sesuai ketentuan Perjanjian dan Perjanjian BOT, meliputi penyerahan Tanah dan Gedung, pembiayaan Pembangunan Gedung, Pengoperasian Gedung, termasuk penarikan manfaat dari hasil Pengoperasian Gedung, hingga Penyerahan Gedung kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk saat Jangka Waktu BOT berakhir, baik langsung maupun melalui Perusahaan.

BOT Delegation Agreement
Based on the Agreement on the Delegation of Land Development Work for Mandiri Proklamasi Number: HK.02.09 / A.DIR.WG.6445 / 2019 dated August 2, 2019, the Company handed over the rights, authorities, and obligations of the Company regarding BOT work for PT Bank Mandiri (Persero) Tbk to WSP as SPV, during the Construction Period and Operation of the Building on the Land by and fully at the expense of WSP in accordance with the provisions of the BOT Agreement and Agreement, including the surrender of Land and Buildings, financing for Building Construction, Building Operations, including the withdrawal of benefits from the results Building Operations, to the Handover of the Building to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk when the BOT Period ends, either directly or through the Company.

Lingkup Pekerjaan BOT yang telah dilaksanakan Perusahaan, termasuk biaya yang telah dan akan dikeluarkan, diambilalih dan dilanjutkan oleh WSP.

The scope of BOT work that has been carried out by the Company, including costs that have been and will be incurred, is taken over and continued by WSP.

Pelaksanaan Pembangunan Gedung tetap menjadi tanggung jawab Perusahaan selaku Kontraktor Pelaksana.

Execution of Building Construction remains the responsibility of the Company as the Executor Contractor.

Perusahaan berhak melakukan pengawasan, evaluasi, memberikan masukan dan instruksi guna mendukung terlaksananya perjanjian BOT oleh WSP sekaligus memastikan kewajiban Perusahaan terhadap PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

The Company has the right to supervise, evaluate, provide input and instructions to support the implementation of the BOT agreement by WSP while ensuring the Company's obligations to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Perjanjian ini telah diberitahukan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melalui surat No. SE.01.01/A.DP.WG.4415/2019 tanggal 21 Agustus 2019 tentang Pendelegasian Pelaksanaan Pekerjaan BOT Graha Mantap.

This agreement has been notified to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk through letter No. SE.01.01/A.DP.WG.4415/2019 dated August 21, 2019 concerning Delegation of BOT Graha Mantap.

c. Pertamina Mandalika International Street Circuit

c. Pertamina Mandalika International Street Circuit

Perusahaan melakukan perjanjian Bangun, Sewa, Serah (*Build, Lease, and Transfer/BLT*) dengan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) (ITDC) tentang Pembangunan *Paddock* di ITDC Mandalika Tourism Complex, Kuta, Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dengan nilai kerjasama sebesar Rp155.775.011.892.

The Company entered into a Build, Lease, and Transfer (BLT) agreement with PT Pembangunan Wisata Indonesia (Persero) (ITDC) regarding Paddock Development at ITDC Mandalika Tourism Complex, Kuta, Pujut, Central Lombok Regency, West Nusa Tenggara with the value of cooperation is Rp155,775,011,892.

Untuk melakukan kerjasama dengan Perusahaan, ITDC telah menetapkan Perusahaan sebagai mitra Kerja Sama berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 318/DIR/ITDC.01/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021.

To cooperate with the Company, ITDC has appointed the Company as a Cooperation partner based on the Work Order No. 318/DIR/ITDC.01/X/2021 dated October 7, 2021.

Perusahaan telah menyelesaikan pembangunan obyek kerjasama tersebut yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima, pada tanggal 24 Desember 2021 dan ITDC memulai masa sewa atas Obyek Kerjasama tersebut hingga 30 Juni 2023.

The Company has completed the construction of the object of cooperation as evidenced by the Minutes of Handover, on December 24, 2021, and ITDC started the lease period for the object of cooperation until June 30, 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2023, obyek kerjasama belum diserahkan kepada ITDC karena pembayaran termin terakhir dari nilai kerjasama belum dilunasi.

As of December 31, 2023, the object of cooperation has not yet transferred to ITDC due to outstanding receivable terms.

Pada akhir Periode Sewa dan setelah ITDC melakukan pembayaran penuh atas Nilai Kerjasama, maka kepemilikan atas obyek kerjasama akan secara otomatis beralih ke ITDC.

At the end of the Lease Period and after ITDC makes full payment of the Cooperation Value, the ownership of the object of cooperation will automatically transfer to ITDC.

Pada tanggal 31 Desember 2024, obyek kerjasama belum diserahkan kepada ITDC karena pembayaran termin terakhir dari nilai kerjasama belum dilunasi.

As of December 31, 2024, the object of cooperation has not yet transferred to ITDC due to outstanding receivable terms.

Perjanjian Pinjaman Entitas Anak
WSP
Berdasarkan Perjanjian Pemegang Saham Perusahaan dengan WSP No. KU.09.09/ A.DIR.WG.6498/2020 dan No. KU.09.09/ A.WSP.275/2020 tanggal 28 September 2020, Perusahaan memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada WSP. Pinjaman tersebut adalah kredit terusan berupa kredit investasi milik Perusahaan sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor 28 tanggal 25 September 2020 antara Perusahaan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Limit kredit pinjaman sebesar Rp116.000.000.000 dengan tingkat bunga 2% di atas Suku Bunga Kredit Investasi tersebut dan berjangka waktu 10 tahun sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan 27 September 2030.

Subsidiaries' Loan Agreements
WSP
Based on the Company's Shareholders Agreement with WSP No. KU.09.09/A.DIR.WG.6498/2020 and No. KU.09.09/A.WSP.275/2020 dated September 28, 2020, the Company provided a Financing Facility to WSP. The loan is a continuous credit in the form of an investment credit owned by the Company in accordance with the Investment Credit Agreement Deed Number 28 dated September 25, 2020 between the Company and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Credit limit amounting to Rp116,000,000,000 with an interest rate of 2% above the Investment Credit Interest Rate and a term of 10 years from September 28, 2020 to September 27, 2030.

Perjanjian Fasilitas Kredit
Perusahaan
Perusahaan memiliki perjanjian fasilitas kredit kepada bank mitra diantaranya sebagai berikut:

PT Bank CIMB Niaga Tbk
Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank CIMB Niaga Tbk sesuai dengan Perubahan ke-XIV tanggal 13 Juli 2023 atas Perjanjian Kredit No. 19 tanggal 10 Januari 2011. Ketentuan perjanjian sebagai berikut:

a. Fasilitas *Cash Loan*

Limit Kredit:	Rp5.000.000.000
Jangka Waktu:	13 Juli 2023 – 16 Maret 2024
Tingkat Bunga:	8 % per tahun
Tujuan Penggunaan:	Modal Kerja

b. Fasilitas *Non Cash Loan*

Limit Kredit:	Rp245.000.000.000
Jangka Waktu:	13 Juli 2023 – 16 Maret 2024
Tujuan:	Bank Garansi (BG), Letter of Credit (L/C) dan Penggunaan SKBDN.

Selama masa pembiayaan Perusahaan wajib memberitahukan apabila melakukan perubahan anggaran dasar dan melaporkan peristiwa atau keadaaan yang dapat mempengaruhi keadaan, harta kekayaan, jalannya usaha atau keuangan debitur.

Credit Facility Agreements
The Company
The Company has credit facility agreements to partner banks are as follows:

PT Bank CIMB Niaga Tbk
The Company obtained a credit facility from PT Bank CIMB Niaga Tbk in accordance with the fourteenth Amendment dated July 13, 2023 of Credit Agreement No. 19 dated January 10, 2011. Subject to the following conditions are as follows:

a. Cash Loan Facility

Credit Limit	*Rp5,000,000,000*
Time Period:	*July 13, 2023 to March 16, 2024*
Interest Rate:	*8 % per year*
Intended Use:	*Working capital*

b. Non Cash Loan Facility

Credit Limit	*Rp245,000,000,000*
Time Period:	*July 13, 2023 to March 16, 2024*
Intended Use:	*Bank Guarantee (BG), Letter of Credit (L/C) and SKBDN.*

During the financing period, the Company is obliged to notify if there are amendments in the articles of association and report the events or circumstances that may affect the circumstances, assets, business operations or financials of the debtor.

Saldo *cash loan* per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar nihil.

Balance of cash loan as of December 31, 2024 and 2023 amounted to nil.

Saldo *non cash loan* per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar nihil dan Rp627.145.937.

Balance of non cash loan as of December 31, 2024 and 2023 amounted to nil and Rp627,145,937, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan tidak melakukan perpanjangan atas fasilitas kredit dari PT Bank CIMB Niaga Tbk.

As of December 31, 2024, the Company didn't extend the credit facility from PT Bank CIMB Niaga Tbk.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Berdasarkan perjanjian nomor R.II.297-CRO/COD/LAD/11/2024 tertanggal 21 November 2024, Perusahaan mendapatkan persetujuan Perpanjangan fasilitas Kredit Modal Kerja dan perpanjangan fasilitas *Non Cash Loan* dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan persyaratan kredit sebagai berikut:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Based on the agreement number number R.II.297-CRO/COD/LAD/11/2024 dated November 21, 2024, the Company have approved of the Extension of Working Capital Credit facility and extension of Non Cash Loan facility from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk with the following credit terms:

Fasilitas *Non Cash Loan*	
Limit Kredit:	Rp800.000.000.000
Batas Akhir Pendaftaran:	30 November 2024 s/d 30 November 2025
Tujuan Penggunaan:	Bank Garansi, LC/SKBDN dan Comercial Line Penggunaan (*Forfeiting*)
Agunan:	Agunan terkait fasilitas KMK Konstruksi.

Non Cash Loan Facility	
Credit Limit:	*Rp800,000,000,000*
Registration Deadline:	*November 30, 2024 until November 30, 2025*
Intended Use:	*Bank Guarantee, LC/SKBDN and Commercial Line (Forfeiting)*
Collateral:	*Collateral related to KMK facilities Construction.*

Selama masa pembiayaan, hal-hal yang tidak boleh dilakukan terkait perjanjian yaitu mengajukan permohonan pailit debitur kepada pengadilan niaga dan mengadakan transaksi dengan pihak yang berafiliasi maupun pihak ketiga diluar aspek kewajaran.

During the loan period, there are matters not allowed to be carried on as stated in the covenants namely, declaration of bankruptcy of the debtor to the Commercial Court and enter into transactions with affiliated parties and third parties outside the aspect of fairness.

Saldo *cash loan* per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar nihil.

Balance of cash loan as of December 31, 2024 and 2023 amounted to nil, respectively.

Pembayaran fasilitas *cash loan* yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar nihil.

Payments made of cash loan facility for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to nil, respectively.

Saldo *non cash loan* per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp296.115.025.456 dan Rp106.118.021.368.

Balance of non cash loan as of December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp296,115,025,456 and Rp106,118,021,368, respectively.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Pinjaman Bank Jangka Pendek
Berdasarkan Addendum perjanjian kredit Modal Kerja No. CBG.CB5/SIC2.SPPK.269/2024 tanggal 7 Juni 2024 Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dengan persyaratan sebagai berikut:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Short-term Bank Loans
Based on Addendum Credit Working Capital agreement No. CBG.CB5/SIC2.SPPK.269/2024 dated June 7, 2024 the Company obtain credit facility with the following terms and conditions:

a.	Fasilitas KMK Transaksional		*a.*	*Transactional of Working Capital Facility*
	Limit Kredit:	Rp95.000.000.000		*Credit Limit:* *Rp95,000,000,000*
	Jangka Waktu:	7 Juni 2024 sampai dengan 10 Juni 2025		*Time Period:* *June 7, 2024 until June 10, 2025*
	Tingkat Bunga:	8,50% per tahun		*Interest Rate:* *8.50% per year*
	Tujuan Penggunaan:	Tambahan modal kerja		*Intended Use:* *Additional working capital*
b.	Fasilitas *Non Cash Loan*		*b.*	*Non Cash Loan Facility*
	Limit Kredit:	Rp700.000.000.000		*Credit Limit:* *Rp700,000,000,000*
	Jangka Waktu:	7 Juni 2024 sampai dengan 10 Juni 2025		*Time Period:* *June 7, 2024 until June 10, 2025*
	Tujuan Penggunaan:	Bank Garansi *and Letter of Credit* (L/C)		*Intended Use:* *Bank Guarantee and Letter of Credit (L/C)*
c.	*Supplier Financing*		*c.*	*Supplier Financing*
	Limit Kredit:	Rp400.000.000.000		*Credit Limit:* *Rp400,000,000,000*
	Jangka Waktu:	7 Juni 2024 sampai dengan 10 Juni 2025		*Time Period:* *June 11, 2024 until June 10, 2025*
	Tujuan Penggunaan:	Pembiayaan Pemasok *Financing* untuk Pemasok/ Subkontraktor atas dasar Akseptasi *Invoice* secara *without recourse*		*Intended Use:* *Financing Supplier Financing for Supplier / Sub. Contractor on the basis of acceptance of invoices without recourse*
d.	*Invoice Financing*		*d.*	*Invoice Financing*
	Limit Kredit:	Rp300.000.000.000		*Credit Limit:* *Rp300,000,000,000*
	Jangka Waktu:	11 Juni 2023 sampai dengan 10 Juni 2024 dan tidak diperpanjang		*Time Period:* *June 11, 2023 until June 10, 2024 and not extended*
	Tujuan Penggunaan:	Mempercepat penerimaan dana hasil penjualan atas proyek IKN, Bank Indonesia, dan Bank BUMN.		*Intended Use:* *Accelerating receipts and revenue earned for project IKN, Central Bank of Indonesia, and SOE Banks.*

Joint collateral dan *cross default* dengan seluruh fasilitas kredit PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Joint collateral and cross default with all credit facilities PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk in PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Selama masa pembiayaan Perusahaan wajib menjaga rasio keuangan yaitu *current ratio* minimal sebesar 100%, *leverage* maksimal 500% dan EBITDA to *interest* minimal sebesar 200%. Memberitahukan secara tertulis kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atas perubahan modal kerja dan penggantian pengurus.

During the period of financing, the Company is required to maintain the financial ratio of the current ratio of at least 100%, maximum leverage of 500% and EBITDA to interest at least 200%. Notify in writing to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk upon changes in working capital and change of management.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

As of December 31, 2024, the Company has complied with the terms and conditions of the loans.

Saldo *cash loan* per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp95.000.000.000 dan nihil.

Balance of cash loan as of December 31, 2024 and 2023 is amounted to Rp95,000,000,000 and nil, respectively.

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, masing-masing sebesar Rp53.000.000.000 dan Rp118.000.000.000.

Payments made for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp53,000,000,000 and Rp118,000,000,000, respectively.

Saldo *non cash loan* per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp45.929.158.120 dan Rp120.772.520.801.

Balance of non cash loan as of December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp45,929,158,120 and Rp120,772,520,801, respectively.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan perjanjian Kredit Modal Kerja Transaksional No. 108 tanggal 30 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan persetujuan perpanjangan Fasilitas Kredit Modal Kerja Transaksional No. COB3/4/057/R tanggal 28 Mei 2024 Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dengan persyaratan sebagai berikut:

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Based on Transactional of Working Capital Capital Agreement No. 108 dated May 30, 2016 made in the presence of Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, and approval of the Extension of Transactional of Working Capital Capital Facility No. COB3/4/057/R dated May 28, 2024 the Company obtained credit facility from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, with the following conditions:

a. Fasilitas *Cash Loan*

Plafon:	Rp200.000.000.000
Jangka Waktu:	1 (satu) tahun, Periode tanggal 30 Mei 2024 s/d 29 Mei 2025
Tingkat Bunga:	9,75% per tahun
Jaminan:	Atas piutang usaha, tagihan bruto dan tagihan termin yang telah diikat secara *Cessie*.

a. Cash Loan Facility

Plafond:	*Rp200,000,000,000*
Time Period:	*1 (one) year period from May 30, 2024 until May 29, 2025*
Interest:	*9.75% per annum*
Warranty:	*The accounts receivable, gross amount due from customers, and installment receivables projects in Connective is Cessie.*

b. Fasilitas *Non Cash Loan*

Plafon:	Rp550.000.000.000
Jangka Waktu:	1 (satu) tahun, Periode tanggal 30 Mei 2024 s/d 29 Mei 2025
Tingkat Bunga:	9,75% per tahun
Jaminan:	Atas piutang usaha, tagihan bruto dan tagihan termin yang telah diikat secara *Cessie*.

b. Non Cash Loan Facility

Plafond:	*Rp550,000,000,000*
Time Period:	*1 (one) year period from May 30, 2024 until May 29, 2025*
Interest:	*9.75% per year*
Warranty:	*The accounts receivable, gross amount due from customers, and installment receivables projects in Connective is Cessie.*

Selama masa pembiayaan Perusahaan wajib mengusahakan kinerja keuangan dengan indikator sebagai berikut: *Current Ratio* minimal 1 kali, *Debt Equity Ratio* (DER) maksimal 4 kali dan *Debt Service Coverage* minimal 100%.

The Company shall maintain financial performance indicators as follows: Current Ratio of at least 1 time; Debt to Equity Ratio (DER) maximum of 4 times and Debt Service Coverage of at least 100%.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

As of December 31, 2024, the Company has complied with the terms and conditions of the loans.

Saldo *cash loan* per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp200.000.000.000 dan nihil

Balance of cash loan as of December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp200,000,000,000 and nil, respectively.

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, masing-masing sebesar nihil dan Rp170.000.000.000.

Payments made for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to nil and Rp170,000,000,000, respectively.

Saldo *non cash loan* per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp51.244.775.498 dan Rp92.141.225.959.

Balance of non cash loan as of December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp51,244,775,498 and Rp92,141,225,959, respectively.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Berdasarkan Addendum perjanjian kredit No. 231/JKC/COM/CSMU/IV/2018 tanggal 25 April 2018, Perusahaan menerima fasilitas kredit *Non Cash Loan* dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut sebagai berikut:

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Based on Addendum credit agreement No. 231/JKC/COM/CSMU/IV/2018 dated April 25, 2018, the Company received Non-Cash Loan credit facility from PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk with the following terms and conditions:

Fasilitas *Non Cash Loan*	
Limit Kredit:	Rp700.000.000.000
Batas Akhir Pendaftaran:	sampai dengan 31 Januari 2023 dan tidak diperpanjang
Tujuan Penggunaan:	Bank Garansi (*Bid bond*), *Advance Payment* Penggunaan *Bond*, *Performance Bond* dan *Maintenance Bond*
Agunan:	*Cessie* atas tagihan/ piutang usaha
	Cash Collateral/ minimal dana tersedia pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Non Cash Loan Facility	
Credit Limit:	*Rp700,000,000,000*
Registration Deadline:	*until January 31, 2023 and not extended*
Intended Use:	*Bank Guarantee (Bid bond), Advance Payment Bond, Performance Bond and Maintenance Bond*
Collateral:	*Cessie on accounts receivables*
	Cash Collateral/ minimum fund available in PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Perusahaan dapat mendaftarkan proyek yang akan menggunakan fasilitas *non cash loan* sebelum batas akhir pendaftaran. Setelah batas akhir pendaftaran, Perusahaan melakukan pembayaran atas fasilitas yang digunakan tersebut.

The Company may register projects that will utilise non cash loan facilities before the registration deadline. After the registration deadline, the Company makes payments for the facilities used.

Selama masa pembiayaan Perusahaan wajib mengusahakan kinerja keuangan dengan indikator sebagai berikut: *Current Ratio* minimal 1 kali, *Debt Equity Ratio* (DER) maksimal 4 kali dan *Debt Service Coverage* minimal 100% serta memberitahukan secara tertulis kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atas perubahan modal kerja dan penggantian pengurus.

The Company shall maintain financial performance indicators as follows: Current Ratio of at least 1 time; Debt to Equity Ratio (DER) maximum of 4 times and Debt Service Coverage of at least 100% and notifying in writing to PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk of changes working capital and replacement of management.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

As of December 31, 2024, the Company has complied with the terms and conditions of the loans.

Saldo *non cash loan* per 31 Desember 2024 dan 2023, masing-masing sebesar Rp411.418.000 dan Rp21.386.866.399.

Balance of non cash loan as of December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp411,418,000 and Rp21,386,866,399, respectively.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Berdasarkan perjanjian kredit No. B 102 S-CBD/0518 tanggal 11 Mei 2018 dan perubahan atas Perjanjian Kredit No. B.348/ARO/EB/0723 tanggal 22 Juli 2023, Perusahaan menerima fasilitas kredit *Non Cash Loan* dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Based on credit agreement No. B 102 S-CBD/0518 dated May 11, 2018 and amendment of Credit Agreement No. B.348/ARO/EB/0723 dated July 22, 2023, Company received Non-Cash Loan credit facility from PT Bank Danamon Indonesia Tbk with terms and conditions as follows:

Fasilitas *Non Cash Loan*	
Limit Kredit:	Rp80.000.000.000
Jangka Waktu:	sampai dengan 22 Agustus 2023 dan tidak diperpanjang
Tujuan Penggunaan:	Untuk kebutuhan modal kerja perusahaan melalui pembiayaan terhadap supplier dari obligor
Agunan:	*Cessie* atas tagihan/ piutang usaha Rasio kecukupan nilai jaminan setiap saat harus bernilai 125% dari jumlah fasilitas terhutang pada bank

Cash Non Loan Facility	
Credit Limit:	*Rp80,000,000,000*
Time Period:	*until August 22, 2023 and not extended*
Intended Use:	*For the company's working capital needs through financing the obligor supplier*
Collateral:	*Cessie on accounts receivables* *The adequacy ratio of the collateral value must be worth 125% of the total facility owed to the bank at any time*

Selama masa pembiayaan Perusahaan wajib memberitahukan secara tertulis kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atas perubahan modal kerja dan penggantian pengurus.

During the financing period, the Company is obliged to notify PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk in writing to the change of working capital and the replacement of the management.

Saldo *non cash loan* per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar nihil.

Balance of non cash loan as of December 31, 2024 and 2023 amounted to nil, respectively.

PT Bank DKI

Berdasarkan SPPK No 1763/SPPK/925/XI/2023 tanggal 6 November 2023, Perusahaan menerima fasilitas kredit *Cash Loan* dan *Non Cash Loan* dari PT Bank Bank DKI dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PT Bank DKI

Based on SPPK No 1763/SPPK/925/XI/2023 dated November 6, 2023, the Company received Cash Loan and Non-Cash Loan credit facility from PT Bank DKI with the following terms and conditions:

a. Fasilitas *Non Cash Loan*:

Limit Kredit:	Rp200.000.000.000
Jangka Waktu:	7 November 2023 – 7 November 2025
Tujuan Penggunaan:	Untuk kebutuhan modal kerja Perusahaan melalui pembiayaan terhadap supplier dari obligor
Agunan:	Rasio kecukupan nilai jaminan setiap saat harus bernilai 100% dari jumlah fasilitas terutang pada bank

a. Non Cash Loan Facility:

Credit Limit:	*Rp200,000,000,000*
Time Period:	*November 7, 2023 until November 7, 2025*
Intended Use:	*For the Company's working capital needs through financing the obligor supplier*
Collateral:	*The adequacy ratio of the collateral value must be worth 100% of the total facility owed to the bank at any time*

b. Fasilitas *Cash Loan* :

Limit Kredit:	Rp50.000.000.000
Jangka Waktu:	7 November 2023 – 7 November 2025
Tingkat Bunga:	9,25% p.a
Provisi:	0,50% p.a
Tujuan Penggunaan:	Untuk kebutuhan modal kerja Perusahaan melalui pembiayaan terhadap supplier dari obligor

Selama masa pembiayaan Perusahaan wajib mengusahakan kinerja keuangan dengan indikator sebagai berikut: *Current Ratio* minimal 1 kali, *Debt Equity Ratio* (DER) maksimal 4 kali dan *Debt Service Coverage* minimal 100%.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

Saldo *cash loan* per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp22.000.000.000 dan Rp26.500.000.000.

Pembayaran fasilitas *cash loan* yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp47.800.000.000 dan nihil.

Saldo *non cash loan* per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp40.855.078.357 dan Rp54.380.877.123.

PT Bank Permata Tbk

Berdasarkan surat No. 390/BP/LOO/CRC-JKT/WB/VII/2021 Tanggal 16 Juli 2021. Perusahaan menerima fasilitas kredit *Cash Loan* dan *Non Cash Loan* dari PT Bank Permata Tbk dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

a. Fasilitas *Non Cash Loan*:

Limit Kredit:	Rp200.000.000.000
Jangka Waktu:	Sampai 19 Juli 2023 dan tidak diperpanjang
Tujuan Penggunaan:	Untuk kebutuhan modal kerja Perusahaan melalui pembiayaan terhadap supplier dari obligor

b. Fasilitas *Cash Loan* :

Limit Kredit:	Rp50.000.000.000
Jangka Waktu:	Sampai 19 Juli 2023 dan tidak diperpanjang
Tujuan Penggunaan:	Untuk kebutuhan modal kerja Perusahaan melalui pembiayaan terhadap supplier dari obligor

b. *Cash Loan Facility:*

Credit Limit:	*Rp50,000,000,000*
Time Period:	*November 7, 2023 until November 7, 2025*
Interest:	*9.25% p.a*
Provision:	*0.50% p.a*
Intended Use:	*For the Company's working capital needs through financing the obligor supplier*

The Company required to maintain financial performance indicators as follows: Current Ratio of at least 1 time; Debt to Equity Ratio (DER) maximum of 4 times and Debt Service Coverage of at least 100%.

As of December 31, 2024, the Company has complied with the terms and conditions of the loans.

Balance of cash loan as of December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp22,000,000,000 and Rp26,500,000,000.

Payments made for cash loan for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp47,800,000,000 and nil, respectively.

Balance of non cash loan as of December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp40,855,078,357 and Rp54,380,877,123, respectively.

PT Bank Permata Tbk

Based on letter No. 390/BP/LOO/CRC-JKT/WB/VII/2021 dated July 16, 2021. the Company received Cash Loan and Non-Cash Loan credit facility from PT Bank Permata Tbk with terms and conditions as follows:

a. *Non Cash Loan Facility:*

Credit Limit:	*Rp200,000,000,000*
Time Period:	*Until July 19, 2023 and not extended*
Intended Use:	*For the Company's working capital needs through financing the obligor supplier*

b. *Cash Loan Facility:*

Credit Limit:	*Rp50,000,000,000*
Time Period:	*Until July 19, 2023 and not extended*
Intended Use:	*For the Company's working capital needs through financing the obligor supplier*

Selama masa pembiayaan Perusahaan wajib mengusahakan kinerja keuangan dengan indikator sebagai berikut: *Leverage Ratio* maksimal 3 kali, *Interest Service Coverage Ratio (ISCR)* minimal 1,5 kali dan *Current Ratio* minimal 1 kali.

The Company required to maintain financial performance indicators as follows: Leverage Ratio maximum of 3 times; Interest Service Coverage Ratio (ISCR) of at least 1.5 times and Current Ratio of at least 1 time.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

As of December 31, 2024, the Company has complied with the terms and conditions of the loans.

Saldo *cash loan* per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar nihil.

Balance of cash loan as of December 31, 2024 and 2023 amounted to nil, respectively.

Pembayaran fasilitas *cash loan* yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar nihil.

Payments made of cash loan for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to nil, respectively.

Saldo *non cash loan* per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar nihil.

Balance of non cash loan as of December 31, 2024 and 2023 amounted to nil, respectively.

PT Bank BTPN Tbk

Berdasarkan surat No. SMBCI/NS/0556 Tanggal 30 Oktober 2018. Perusahaan menerima fasilitas kredit *Cash Loan* dan *Non Cash Loan* dari PT Bank BTPN Tbk dan telah mengalami perubahan terakhir 27 Oktober 2021, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PT Bank BTPN Tbk

Based on letter No. SMBCI/NS/0556 *dated October 30, 2018. the Company received Cash Loan and Non-Cash Loan credit facility from PT Bank BTPN Tbk and has undergone the latest amendment October 27, 2021 with terms and conditions as follows:*

a. Fasilitas *Non Cash Loan*:

Limit Kredit:	Rp200.000.000.000
Jangka Waktu:	Sampai dengan 31 Oktober 2023 dan tidak diperpanjang
Tujuan Penggunaan:	Untuk kebutuhan modal kerja Perusahaan melalui pembiayaan terhadap supplier dari obligor

a. Non Cash Loan Facility:

Credit Limit:	*Rp200,000,000,000*
Time Period:	*Until October 31, 2023 and not extended*
Intended Use:	*For the Company's working capital needs through financing the obligor supplier*

b. Fasilitas *Cash Loan*:

Limit Kredit:	Rp70.000.000.000
Jangka Waktu:	Sampai dengan 31 Oktober 2023 dan tidak diperpanjang
Tujuan Penggunaan:	Untuk kebutuhan modal kerja Perusahaan melalui pembiayaan terhadap *supplier* dari *obligor*

b. Cash Loan Facility:

Credit Limit:	*Rp70,000,000,000*
Time Period:	*Until October 31, 2023 and not extended*
Intended Use:	*For the Company's working capital needs through financing the obligor supplier*

Saldo *cash loan* per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar nihil.

Balance of cash loan as of December 31, 2024 and 2023 amounted to nil.

Pembayaran fasilitas *cash loan* yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar nihil.

Payments made for cash loan facility for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to nil.

Saldo *non cash loan* per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar nihil.

Balance of non cash loan as of December 31, 2024 and 2023 amounted to nil.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Berdasarkan Surat No. 04/130-3/SP3/CB2 Tanggal 23 Oktober 2024 Perusahaan menerima fasilitas kredit *Non Cash Loan* dari PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

a. Fasilitas *Non Cash Loan*:

Limit Kredit:	Rp 400.000.000.000
Jangka Waktu:	Sampai 23 Oktober 2026
Tujuan Penggunaan:	Untuk kebutuhan modal kerja Perusahaan melalui pembiayaan terhadap supplier dari obligor

b. Fasilitas *Cash Loan*:

Limit Kredit	Rp300.000.000.000
Jangka Waktu	Sampai dengan 23 Oktober 2026
Tujuan Penggunaan	Untuk kebutuhan modal kerja Perusahaan melalui pembiayaan terhadap supplier dari obligor

Selama masa pembiayaan Perusahaan wajib mengusahakan kinerja keuangan dengan indikator sebagai berikut: Current Ratio minimal 100%, *Debt Equity Ratio* (DER) maksimal 300%, dan *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) min 100%.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

Saldo *cash loan* per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp55.000.000.000 dan Rp103.000.000.000.

Saldo *non cash loan* per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp29.333.064.905 dan Rp250.569.890.723.

Pembayaran fasilitas cash loan yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp119.886.818.225 dan Rp445.000.000.000.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Based on Letter No. 04/130-3/SP3/CB2 dated October 23, 2024 the Company received Non-Cash Loan credit facility from PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk Tbk with terms and conditions as follows:

a. Non Cash Loan Facility:

Credit Limit:	*Rp400,000,000,000*
Time Period:	*until October 23, 2026*
Intended Use:	*For the Company's working capital needs through financing the obligor supplier*

b. Cash Loan Facility:

Credit Limit	*Rp300,000,000,000*
Time Period	*Until October 23, 2026*
Intended Use	*For the Company's working capital needs through financing the obligor supplier*

The Company required to maintain financial performance indicators as follows: Current Ratio of at least 100%, Debt to Equity Ratio (DER) maximum of 300% and Debt Service Coverage Ratio (DSCR) minimum 100%.

As of December 31, 2024, the Company has complied with the terms and conditions of the loans.

Balance of cash loan as of December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp55,000,000,000 and Rp103,000,000,000, respectively.

Balance of non cash loan as of December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp29,333,064,905 and Rp250,569,890,723, respectively.

Payments made for cash loan for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp119,886,818,225 and Rp445,000,000,000, respectively.

44. Kontinjensi / *44. Contingencies*

Gugatan Perusahaan kepada PT Maju Gemilang Serpong terkait Wanprestasi melalui BANI

Perusahaan membuat, menandatangani dan mengajukan Permohonan Mengadakan Arbitrase dan/atau Permohonan Arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") Jakarta terhadap PT Maju Gemilang Serpong, sehubungan dengan tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh PT Maju Gemilang Serpong atas Surat Perjanjian Kerja No. B-Residence-040/SPK/MGS/III/17 tanggal 6 April 2017 tentang Proyek Apartemen B Residence, Serpong atas Pekerjaan Struktur dan *Plumbing.*

Adapun terhadap Permohonan Arbitrase sebagaimana dimaksud di atas, telah diputus yang pada intinya menyatakan Pekerjaan Perseroan telah selesai dan menghukum Termohon Arbritase untuk mengganti kerugian Perusahaan sebesar Rp15.000.990.733.

Selanjutnya, terhadap Putusan Arbritase sebagaimana pada Paragraf 2 di atas, PT Maju Gemilang Serpong mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase BANI No.43031/V/ARB-BANI/2020 tertanggal 6 April 2021, sebagaimana perkara No: 444/Pdt.Sus.Arbi/2021/PN.Jkt.Brt, yang mana pada intinya menguatkan Putusan BANI tersebut ("Putusan Pembatalan").

Selanjutnya, berdasarkan penetapan No.42/Eks.Arb/2022/PN.Jkt.Brt tanggal 25 Agustus 2023, Pengadilan Negeri Tangerang sedang dalam proses sita eksekusi dan pelelangan atas aset PT Maju Gemilang Serpong.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan masih menunggu putusan atas proses sita eksekusi dan pelelangan atas asset PT Maju Gemilang Serpong.

The Company's lawsuit against PT Maju Gemilang Serpong regarding Default through BANI

The Company made, signed and submitted an Request for Arbitration and / or Statement of Claim at the Indonesian National Arbitration Board ("BANI") Jakarta against PT Maju Gemilang Serpong, in connection with the default action committed by PT Maju Gemilang Serpong on the Work Agreement Letter No. B-Residence-040 / SPK / MGS / III / 17 dated April 6, 2017 concerning the B Residence Apartment Project, Serpong for Structural and Plumbing Work.

As for the request of arbitration stated above, a verdict has been issued. The verdict states that the Company has already completed the project and punishes the defendant to pay the Company Rp15.000.990.733 worth of loss.

Furthermore, regarding Arbitrary Verdict stated in the second paragraph above, PT Maju Gemilang Serpong submitted verdict revocation against BANI No.43031/V/ARB-BANI/2020 dated April 6, 2021, as for the case No: 444/Pdt.Sus.Arbi/2021/PN.Jkt.Brt, that affirms the BANI verdict ("Revocation Verdict").

Furthermore, regarding resolution No.42/Eks.Arb/2022/PN.Jkt.Brt dated August 25, 2023, Civil Court of Tangerang is in process of seizure and auction of assets belong to PT Maju Gemilang Serpong.

For the year ended December 31, 2024, the Company is still waiting for the verdict on the process of seizure and auction of assets belong to PT Maju Gemilang Serpong.

Gugatan Perusahaan kepada PT Trans Retail Indonesia terkait penyelesaian *outstanding* piutang melalui PKPU

Perusahaan telah mengajukan permohonan PKPU terhadap PT Trans Retail Indonesia pada tanggal 15 Februari 2022 sehubungan dengan tindakan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan No. 29/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst.

Pada tanggal 1 April 2022, Perusahaan mencabut permohonan PKPU tersebut dan menyepakati skema penyelesaian piutang yang diajukan oleh

The Company's lawsuit against PT Trans Retail Indonesia related to the settlement of outstanding receivables through PKPU

The Company has submitted a PKPU application against PT Trans Retail Indonesia on February 15, 2022 in connection with the postponement of the obligation to pay debts with No. 29/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst.

On April 1, 2022, the Company withdrew the PKPU application and agreed to the receivables settlement scheme proposed by PT Trans Retail

PT Trans Retail Indonesia. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, PT Trans Retail Indonesia telah menyelesaikan sebagian besar kewajibannya kepada Perusahaan.

Indonesia. For the year ended December 31, 2023, PT Trans Retail Indonesia has completed most of its obligations to the Company.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, PT Trans Retail Indonesia telah menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Perusahaan.

As of publishment date of consolidated financial statements, PT Trans Retail Indonesia has completed all its obligations to the Company.

Gugatan Perusahaan kepada PT Alumindo Cipta Persada terkait Wanprestasi
Pada 3 Maret 2023, Perusahaan menggugat PT Alumindo Cipta Persada kepada PN Jakarta Selatan atas wanprestasi yang dilakukan pemberi kerja dengan nilai tagihan sebesar Rp14.535.482.220. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan masih dalam proses persidangan.

The Company's lawsuit against PT Alumindo Cipta Persada related to Contract Default
In March 3, 2023, the Company filed lawsuit against PT Alumindo Cipta Persada to South Jakarta Civil Court regarding default of contract from project owner with due amount of Rp14,535,482,220. For the year ended December 31, 2023, the Company is still conducting court session.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, PT Alumindo Cipta Persada mengajukan kasasi dan Perusahaan masih dalam proses menunggu hasil putusan dari pengadilan.

For the year ended December 31, 2024, PT Alumindo Cipta Persada filed a cassation and the Company is still in the process of waiting for the verdict from the court.

Pemberi Kerja yang Berstatus Pailit
Pada tanggal 31 Oktober 2024, PT Dago Trisinergi Properti (“PT DTP”) selaku pengembang proyek The Maj Collections telah resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Keputusan ini diambil menyusul gugatan yang diajukan oleh PT Bank Jabar Banten Syariah (BJB Syariah).

Bankruptcy of PT Dago Trisinergi Properti
On October 31, 2024, PT Dago Trisinergi Properti (“PT DTP”), the developer of The Maj Collections project, was officially declared bankrupt by the Commercial Court at the Central Jakarta District Court. This decision was a result of a lawsuit filed by PT Bank Jabar Banten Syariah (BJB Syariah).

Sehubungan dengan Putusan Pailit tersebut, Perusahaan telah mengajukan tagihan kepada PT DTP, dan tagihan dimaksud telah diverifikasi pada tanggal 12 Desember 2024.

In connection with the bankruptcy ruling, the Company has submitted a claim against PT DTP, which was verified on December 12, 2024.

Adapun tindak lanjut atas verifikasi tersebut adalah mengenai Rapat seluruh Kreditur PT Dago Trisinergi Propery yang jadwalnya akan diinformasikan kemudian.

Following this verification, a meeting of all creditors of PT Dago Trisinergi Properti is scheduled, with details to be announced later.

Proses-proses ini pun merupakan bagian dari upaya manajemen untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan terkait kepailitan dimaksud terlaksana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

These processes are part of management's efforts to ensure that all activities related to the bankruptcy are carried out in accordance with applicable legal provisions.

Sengketa Perusahaan kepada PT Indraco terkait Wanprestasi
Perusahaan membuat, menandatangani dan mengajukan Gugatan Rekonvensi di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”) Surabaya terhadap PT Indraco, sehubungan dengan Permohonan Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase yang diajukan oleh PT Indraco atas

The Company's lawsuit against PT Indraco regarding Default
The Company has prepared, signed, and submitted a Counterclaim to the Indonesian National Board of Arbitration (“BANI”) Surabaya against PT Indraco in relation to the Request for Dispute Resolution through Arbitration filed by PT Indraco concerning the Construction Contract Agreement for the

Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Proyek Pembangunan Suncity Residence Apartemen No. 0302/LGL/IDR-SCP/SDA/V/2019 tanggal 17 Mei 2019.

Suncity Residence Apartment Project, No. 0302/LGL/IDR-SCP/SDA/V/2019 dated May 17, 2019.

Adapun terhadap Gugatan Rekonvensi sebagaimana dimaksud di atas, telah diputus oleh BANI Surabaya pada tanggal 25 Maret 2022 yang pada intinya menyatakan bahwa Perusahaan berhak atas nilai pembayaran dan menghukum Termohon Rekonvensi untuk melakukan pembayaran total sebesar Rp50.062.530.255.

With respect to the Counterclaim as mentioned above, BANI Surabaya rendered its decision on March 25, 2022, essentially stating that the Company is entitled to the payment amount and ordering the Respondent in the Counterclaim to make a total payment of Rp50,062,530,255.

Selanjutnya, terhadap Putusan BANI sebagaimana pada Paragraf 2 di atas, PT Indraco mengajukan permohonan pembatalan Putusan BANI No. 56/ARB/BANI-SBY/V/2021 tertanggal 25 Maret 2022 ("Putusan BANI"), sebagaimana perkara Nomor: 283/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim, yang mana pada intinya Pengadilan Negeri Jakarta Timur membatalkan Putusan BANI tersebut ("Putusan Pembatalan").

Subsequently, with respect to the BANI Decision as mentioned in Paragraph 2 above, PT Indraco filed a request for the annulment of BANI Decision No. 56/ARB/BANI-SBY/V/2021 dated March 25, 2022 ("BANI Decision"), as registered under Case No. 283/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim, which the East Jakarta District Court ultimately annulled the BANI Decision ("Annulment Decision").

Selanjutnya, terhadap Putusan Pembatalan tersebut, Perusahaan mengajukan Permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana perkara No.258 B/Pdt.Sus-Arbt/2023, yang pada intinya membatalkan Putusan Pembatalan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan menguatkan Putusan BANI.

Subsequently, in response to the Annulment Decision, the Company filed a Petition for Cassation with the Supreme Court of the Republic of Indonesia, registered under Case No. 258 B/Pdt.Sus-Arbt/2023, which ultimately annulled the Annulment Decision from East Jakarta District Court and upheld the BANI Decision.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, PT Indraco masih dalam proses menyelesaikan kewajibannya kepada Perusahaan.

As of publishment date of consolidated financial statements, PT Indraco is still in the process of settling its obligations to the Company.

45. Manajemen Risiko Keuangan / *45. Financial Risk Management*

Grup memandang bahwa risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari operasional usaha. Seiring bahwa keberhasilan usaha juga ditentukan oleh efektivitas pengelolaan risiko, Grup terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan manajemen risiko melalui pendekatan yang proaktif.

The Group perceives that risk is by nature an indivisible part of business operation. Realizing that business success is also determined on the effectivity of risk management, therefore the Group continually strives to improve its risk management capability through proactive and systematic approach.

Grup telah mengidentifikasi risiko keuangan utama yang dihadapi Grup adalah sebagai berikut:

The Group identified the main financial risk facing the Group as follows:

Risiko Kredit
Risiko kredit mengacu pada risiko rekanan gagal dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian keuangan bagi Grup.

Credit Risk
Credit risk refers to the risk that a counterparty will default on its contractual obligation resulting in financial loss to the Group.

Risiko kredit Grup terutama melekat pada rekening bank, tagihan bruto pemberi kerja, piutang usaha,

The Group's credit risk is primarily attributed to its cash in banks, gross amount due from customers

piutang retensi dan piutang lain-lain. Grup menempatkan saldo bank pada institusi keuangan yang layak serta terpercaya. Piutang usaha dilakukan dengan pihak ketiga terpercaya dan pihak berelasi.

trade, retention receivables and other accounts receivable. The Group places its bank balances with credit worthy financial institutions. Trade accounts receivable are entered with respected and credit worthy third parties and related parties.

Eksposur Grup dan pihak lawan dimonitor secara terus menerus dan nilai agregat transaksi terkait tersebar di antara pihak lawan yang telah disetujui. Eksposur kredit dikendalikan oleh batasan pihak lawan yang di reviu dan disetujui oleh komite manajemen risiko secara tahunan.

The Group's exposure and its counterparties are continuously monitored and the aggregate value of transactions concluded is spread amongst approved counterparties. Credit exposure is controlled by counterparty limits that are reviewed and approved by the risk management committee annually.

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan konsolidasian setelah dikurangi dengan cadangan kerugian mencerminkan eksposur Grup terhadap risiko kredit.

The carrying amount of financial assets recorded in the consolidated financial statements, net of any allowance for losses represents the Group's exposure to credit risk.

Risiko nilai tukar mata uang asing
Sebagian besar kewajiban dalam mata uang Rupiah, karena itu Grup tidak terekspos secara signifikan.

Foreign exchange risk
Most of the liabilities are denominated in rupiah, thus the Group is not expose significantly.

Grup menggunakan bahan baku dalam negeri serta mengerjakan dan akan terus mengembangkan proyek berlokasi di dalam negeri, sehingga dengan demikian pengaruh dari selisih nilai tukar mata uang asing tidak signifikan.

The Group use local raw materials as well as work and continue to develop projects that are located in the country, thus the effect of changes in foreign exchange rates are not significant.

Risiko tingkat suku bunga
Risiko suku bunga atas arus kas merupakan suatu risiko dimana arus kas masa datang suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur yang ada saat ini terutama berasal dari utang bank yang digunakan untuk modal kerja dan investasi. Kebijakan yang diambil oleh manajemen dalam mengantisipasi risiko suku bunga yaitu dengan mengevaluasi secara periodik perbandingan tingkat suku bunga dengan perubahan suku bunga yang relevan di pasar. Manajemen juga melakukan survey diperbankan untuk mendapatkan perkiraan mengenai suku bunga yang relevan.

Interest rate risk
Interest rate risk of the cash flows is a risk that the future cash flows of a financial instrument will fluctuates due to changes in market interest rates. Current exposure mainly comes from bank loans, which are use for working capital and investment. Policies taken by management in anticipation of interest rate risk is to evaluate periodically the interest rate with the change in relevant interest rates in the market. Management also conducted a survey in bank in to get an estimate of the relevant interest rates.

Rincian utang bank per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The details of bank loan payable as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Pinjaman Bank	457,063,600,000	223,501,600,000	*Bank Loan*

Dampak fluktuasi suku bunga 100 basis poin terhadap laba sebelum pajak dengan semua variabel lain tetap:

Effect of interest rates fluctuation of 100 basis points to income before tax with all other variables constant:

	2024 Rp	2023 Rp	
Naik 100 bps	4,570,636,000	2,235,016,000	*Increase 100 bps*
Turun 100 bps	(4,570,636,000)	(2,235,016,000)	*Decrease 100 bps*

Risiko Kenaikan Harga Dan Ketersediaan Bahan Baku
Dalam pembuatan Rencana Anggaran Biaya untuk suatu proyek, estimasi biaya mengacu kepada informasi dari pemasok dan juga proyek sejenis yang pernah ditangani.

The Price Increase Risk And Availability of Materials
In the Budget Plan for the project, the estimated costs refer to the information from suppliers as well as similar projects handled.

Hal ini tidak menjamin bahwa estimasi tersebut tepat. Risiko kenaikan harga bahan baku akan mempengaruhi peningkatan beban pokok penjualan yang jika tidak diimbangi efisiensi maka dapat berakibat secara negatif pada laba kotor Grup.

This does not guarantee that the estimate is correct. The risk of increase in prices of raw material will affect the increase in cost of revenue which if not offset with efficiency it could result negatively on the Group's gross profit.

Risiko Likuiditas
Risiko likuiditas merupakan risiko Grup tidak dapat memenuhi liabilitasnya pada saat jatuh tempo.

Liquidity Risk
Liquidity risk is the risk when the Group is unable to meet liabilities as they fall due.

Grup memonitor secara ketat arus kas masuk dan arus kas keluar untuk memastikan tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan pembayaran liabilitas yang jatuh tempo.

The Group closely monitors cash inflows and outflows to ensure the availability of funds to meet the needs of liability payments that are due.

Berikut ini adalah ikhtisar umur liabilitas keuangan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan:

The following is the summary of aging of financial liabilities based on undiscounted contractual payments:

	2024			
	<1 tahun/ *year*	>1 tahun/ *year*	Jumlah/ *Total*	
Pinjaman Bank Jangka Pendek	372,000,000,000	--	372,000,000,000	*Short Term Bank Loans*
Utang Usaha	1,404,585,746,108	253,649,530,507	1,658,235,276,615	*Trade Payables*
Beban Akrual	356,409,528,252	--	356,409,528,252	*Accrued Expenses*
Utang Lain-lain	40,322,215,697	--	40,322,215,697	*Other Payable*
Pinjaman Bank Jangka Panjang	9,417,600,000	75,646,000,000	85,063,600,000	*Long-term Bank Loans*

	2023			
	<1 tahun/ *year*	>1 tahun/ *year*	Jumlah/ *Total*	
Pinjaman Bank Jangka Pendek	129,500,000,000	--	129,500,000,000	*Short Term Bank Loans*
Utang Usaha	1,342,944,495,946	102,323,502,458	1,445,267,998,404	*Trade Payables*
Beban Akrual	439,171,874,071	--	439,171,874,071	*Accrued Expenses*
Utang Lain-lain	38,059,962,989	--	38,059,962,989	*Other Payable*
Pinjaman Bank Jangka Panjang	8,938,000,000	85,063,600,000	94,001,600,000	*Long-term Bank Loans*

Risiko Pengelolaan Modal
Tujuan utama pengelolaan modal Grup adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Capital Management
The primary objective of the capital management of the Group is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value.

Grup disyaratkan untuk memelihara tingkat permodalan tertentu oleh perjanjian pinjaman. Persyaratan permodalan eksternal tersebut telah dipenuhi oleh entitas, Selain itu, Grup juga dipersyaratkan oleh Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas untuk mengalokasikan sampai dengan 20% dari modal saham diterbitkan dan dibayar penuh ke dalam dana cadangan. Persyaratan permodalan eksternal tersebut telah dipertimbangkan oleh Perusahaan serta telah diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

The Group required under its respective loan agreements to maintain the level of existing share capital. This externally imposed capital requirement has been complied with by the relevant entities, In addition, the Group is also required by the Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Entities to allocate and maintain a reserve fund until the said reserve reaches 20% of the issued and fully paid share capital. This externally imposed capital requirements are considere by the Company decided at the Annual General Meeting of Shareholders (RUPS).

Grup mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, bila diperlukan, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, atau mengusahakan pendanaan melalui pinjaman. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses selama tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023.

The Group manages its capital structure and adjusts it, if necessary, in light of changes in economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the dividend payments to shareholders, issue new shares or raise debt financing. No change made in the objectives, policies or processes during the years ended December 31, 2024 and 2023.

Grup mengawasi modal dengan menggunakan rasio pengungkit *(gearing ratio),* dengan membagi total pinjaman berdampak bunga dengan total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Kebijakan Grup adalah menjaga rasio pengungkit dalam kisaran dari Perusahaan terkemuka di Indonesia untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang rasional. Termasuk dalam total pinjaman berdampak bunga adalah pinjaman bank jangka pendek.

The Group monitors its capital using gearing ratios, by dividing interest-bearing loan to total equity attributable to owners of the parent. The Group's policy is to maintain its gearing ratio within the range of gearing ratios of the leading companies in Indonesia in order to secure access to finance at a reasonable cost. Including in interest bearing loan are short-term bank loans.

Rasio *gearing* pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The gearing ratios as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Pinjaman	457,063,600,000	223,501,600,000	*Loan*
Jumlah Ekuitas	2,558,747,095,230	2,558,747,095,230	*Total Equity*
Rasio *Gearing*	**17.86%**	**8.73%**	***Gearing Ratio***

46. Aset dan Liabilitas Keuangan

46. Financial Asset and Liabilities

Grup memiliki berbagai aset keuangan seperti kas dan setara kas, piutang usaha, piutang retensi, tagihan bruto pemberi kerja piutang yang belum ditagih, penyertaan saham dan piutang lain-lain. Liabilitas keuangan pokok Perusahaan terdiri dari pinjaman bank, utang usaha, beban akrual dan utang lain-lain.

The Group has various financial assets such as cash and cash equivalents, trade receivables, retention receivables, gross amount due from customers, unbilled receivables, investment in shares and other receivables. Basic financial liabilities company consisting of bank loans, trade payables, accrued expenses and other payables.

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat dan taksiran nilai wajar dari instrumen keuangan Grup yang dicatat di laporan posisi keuangan:

The following table sets forth the carrying values and estimates fair value of The Group's financial instruments that are carried in the consolidated statement of financial position:

	2024		2023		
	Nilai Tercatat/ *Carrying Amount* Rp	Nilai Wajar/ *Fair Value* Rp	Nilai Tercatat/ *Carrying Amount* Rp	Nilai Wajar/ *Fair Value* Rp	
Aset Keuangan Lancar					***Current Financial Assets***
Kas dan setara kas	1,030,732,161,959	1,030,732,161,959	1,036,429,035,233	1,036,429,035,233	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha - neto	545,160,626,507	545,160,626,507	695,923,466,568	695,923,466,568	*Trade receivable - net*
Piutang retensi - neto	559,956,210,969	559,956,210,969	538,978,809,367	538,978,809,367	*Retention receivable - net*
Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja	436,519,825,996	436,519,825,996	536,430,188,498	536,430,188,498	*Gross Amount Due From Custoemers*
Piutang Yang Belum Ditagih	9,360,579,793	9,360,579,793	3,263,782,490	3,263,782,490	*Unbilled Receivables*
Jumlah aset keuangan lancar	**2,581,729,405,224**	**2,581,729,405,224**	**2,811,025,282,156**	**2,811,025,282,156**	***Total Current Financial Assets***
Aset Keuangan Tidak Lancar					***Non Current Financial Assets***
Penyertaan saham	3,546,062,692	3,546,062,692	127,296,062,692	127,296,062,692	*Investment in Shares*
Piutang lain-lain - neto	166,880,513,529	166,880,513,529	18,957,804,334	18,957,804,334	*Other Receivable - net*
Jumlah aset keuangan tidak lancar	**170,426,576,221**	**170,426,576,221**	**146,253,867,026**	**146,253,867,026**	***Total Non Current Financial Assets***
Jumlah Aset Keuangan	**2,752,155,981,445**	**2,752,155,981,445**	**2,957,279,149,182**	**2,957,279,149,182**	***Total Financial Assets***
Liabilitas keuangan jangka pendek					***Short-term Financial Liabilities***
Pinjaman Bank Jangka Pendek	372,000,000,000	372,000,000,000	129,500,000,000	129,500,000,000	*Short Term Bank Loans*
Utang Usaha	1,658,235,276,615	1,658,235,276,615	1,445,267,998,404	1,445,267,998,404	*Trade Payable*
Beban Akrual	356,409,528,252	356,409,528,252	439,171,874,071	439,171,874,071	*Accrued Expenses*
Utang Lain Lain	40,322,215,697	40,322,215,697	38,059,962,989	38,059,962,989	*Other Payable*
Jumlah liabilitas keuangan jangka pendek	**2,426,967,020,564**	**2,426,967,020,564**	**2,051,999,835,464**	**2,051,999,835,464**	***Total Short-term Financial Liabilities***
Liabilitas keuangan jangka panjang					***Long-term Financial Liabilities***
Pinjaman Bank Jangka Panjang	85,063,600,000	85,063,600,000	94,001,600,000	94,001,600,000	*Long Term Bank Loans*
Jumlah liabilitas keuangan jangka panjang	**85,063,600,000**	**85,063,600,000**	**94,001,600,000**	**94,001,600,000**	***Total Long-term Financial Liabilities***
Jumlah Liabilitas Keuangan	**2,512,030,620,564**	**2,512,030,620,564**	**2,146,001,435,464**	**2,146,001,435,464**	***Total Financial Liabilities***

Metode dan asumsi berikut ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk setiap kelompok instrumen keuangan yang praktis untuk memperkirakan nilai tersebut:

The following methods and assumptions were used to estimate the fair value of each class of financial instrument which is practicable to estimate such value:

Aset dan liabilitas keuangan jangka pendek

- Instrumen keuangan jangka pendek dengan jatuh tempo satu tahun atau kurang (kas dan setara kas, piutang usaha, piutang pihak berelasi, aset tidak lancar lainnya, pinjaman jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain dan beban akrual). Instrumen keuangan ini sangat mendekati nilai tercatat mereka karena jatuh tempo mereka dalam jangka pendek.

Short-term financial assets and liabilities:

- *Short-term financial instruments with remaining maturities of one year or less (cash and cash equivalens, trade receivables, due from related parties, other non-current assets, short term loan, trade payables, other payables and accrued expenses). These financial instruments approximate to their carrying amounts largely due to their short-term maturities.*

Aset dan liabilitas keuangan jangka panjang

- Liabilitas keuangan jangka panjang dengan suku bunga tetap dan variabel (liabilitas jangka panjang yang tidak dikuotasikan).
  Nilai wajar liabilitas keuangan ini ditentukan dengan mendiskontokan arus kas masa datang dengan menggunakan suku bunga yang berlaku dari transaksi pasar yang dapat diamati untuk instrumen dengan persyaratan, risiko kredit dan jatuh tempo yang sama.
- Aset keuangan jangka panjang lainnya (piutang lain-lain).
  Estimasi nilai wajar didasarkan pada nilai diskonto dari arus kas masa datang yang disesuaikan untuk mencerminkan risiko pihak

Long-term financial assets and liabilities:

- *Long-term fixed-rate and variable-rate financial liabilities (unquoted long-term liabilities).*

  The fair value of these financial liabilities is determined by discounting future cash flows using applicable rates from observable current market transactions for instruments with similar terms, credit risk and remaining maturities.

- *Other long-term financial assets (other receivables).*
  Estimated fair value is based on discounted value of future cash flows adjusted to reflect counterparty risk (for financial assets) and the

lawan (untuk aset keuangan) dan risiko kredit Grup (untuk liabilitas keuangan) dan menggunakan suku bunga bebas risiko *(risk-free rates)* dari instrumen yang serupa.

Group's own credit risk (for financial liabilities) and using risk-free rates for similar instruments.

Kas dan setara kas, piutang retensi, piutang lain-lain dan aset lain-lain, seluruh aset keuangan tersebut merupakan aset keuangan jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sehingga nilai tercatat aset keuangan tersebut telah mencerminkan nilai wajar dari aset keuangan tersebut.

Cash and cash equivalents, retention receivables, other receivables and other assets, all financial assets are short- term financial assets that will mature in 12 months so that the carrying value of financial assets reflected in the fair value of financial assets.

Utang usaha, biaya yang masih harus dibayar dan utang lain- lain, seluruh kewajiban keuangan tersebut merupakan kewajiban jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sehingga nilai tercatat aset keuangan tersebut telah mencerminkan dari kewajiban keuangan.

Trade payables, accrued expenses and other payables, all noted that financial liability is a short-term obligations that will mature in 12 months so that the carrying value of financial assets has been reflected from the financial obligations.

Pengukuran Nilai Wajar
Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Fair Value Measurement
Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

Berikut hierarki nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang pada akhir tahun/ periode dicatat menggunakan nilai wajar, yaitu:

The following is the fair value hierarchy of financial assets measured at fair value through other comprehensive income which at the end of the year/ period is recorded using fair value, namely:

	2024 Rp	Tingkat I/ *Level I* Rp	Tingkat II/ *Level II* Rp	Tingkat III/ *Level III* Rp
Aset Keuangan yang Diukur Dengan Penghasilan Komprehensif Lain/ *Financial Assets Through Other Comprehensive Income*				
Penyertaan Saham/ *Investment in Shares*				
PT Patra Wijaya Realtindo	125,000,000,000	--	--	125,000,000,000
PT Wijaya Karya Bitumen	2,296,062,692	--	--	2,296,062,692

47. Standar Akuntansi dan Interpretasi Standar yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif

47. New Accounting Standard and Interpretation of Standards Issued but Not Yet Effective

Standar baru dan amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

New standards and amendments to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2025, with early adoption is permitted, are as follows:

- PSAK 117: Kontrak Asuransi;
- Amendemen PSAK 117: Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 117 dan PSAK 109 – Informasi Komparatif; dan
- Amendemen PSAK 221: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing tentang kekurangan ketertukaran.

- *PSAK 117: Insurance Contract;*
- *Amendments PSAK 117: Insurance Contract regarding Initial Application of PSAK 117 and PSAK 109 – Comparative Information; and*
- *Amendments PSAK 221: Foreign Exchange Rate regarding lack of exchangeability.*

Beberapa PSAK juga diamendemen yang merupakan amendemen konsekuensial karena berlakunya PSAK 117: Kontrak Asuransi, yaitu:
- PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan;
- PSAK 207: Laporan Arus Kas;
- PSAK 240: Properti Investasi ;
- PSAK 228: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama;
- PSAK 216: Aset Tetap;
- PSAK 238: Aset Takberwujud;
- PSAK 103: Kombinasi Bisnis;
- PSAK 219: Imbalan Kerja;
- PSAK 236: Penurunan Nilai Aset;
- PSAK 232: Instrumen Keuangan Penyajian;
- PSAK 237: Provisi, Liabilitas Kontijensi dan Aset Kontijensi;
- PSAK 105: Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan;
- PSAK 107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan;
- PSAK 109: Instrumen Keuangan; dan
- PSAK 115: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan.

Several PSAKs were also amended which were consequential amendments due to the enactment of PSAK 117: Insurance Contracts, as follows:
- *PSAK 201: Presentation of Financial Statements;*
- *PSAK 207: Statement of Cash Flows;*
- *PSAK 240: Investment Property;*
- *PSAK 228: Investment in Associated Entities and Joint Ventures;*
- *PSAK 216: Fixed Assets;*
- *PSAK 238: Intangible Assets;*
- *PSAK 103: Business Combinations;*
- *PSAK 219: Employee Benefits;*
- *PSAK 236: Impairment of Asset;*
- *PSAK 232: Financial Instruments: Presentation;*
- *PSAK 237: Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets;*
- *PSAK 105: Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations;*
- *PSAK 107: Financial Instruments: Disclosures;*
- *PSAK 109: Financial Instruments; and*
- *PSAK 115: Income from Contracts with Customers.*

Hingga tanggal laporan keuangan konsolidasian ini diotorisasi, Grup masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru, amandemen standar dan interpretasi standar tersebut.

Until the date of the consolidated financial statements is authorized, the Group is still evaluating the potential impact of the adoption of new standards, amendments to standards and interpretations of these standards.

DSAK-IAI juga mengesahkan perubahan penomoran PSAK dan ISAK yang berlaku efektif pada 1 Januari 2024, dimana perubahan ini tidak memengaruhi substansi pengaturan dalam masing-masing PSAK dan ISAK tersebut.

DSAK-IAI also ratified changes to the numbering of PSAK and ISAK which will be effective on January 1, 2024. This ratification does not affect the substance of the requirements in each PSAK and ISAK.

48. Reklasifikasi / *48. Reclassification*

Dalam rangka penyesuaian dengan informasi terkini, Grup telah melakukan reklasifikasi laporan posisi keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023

In connection with the adjustment of the latest information, the Group has reclassified consolidated statements of financial position for the year ended December 31, 2023.

	Sebelum Reklasifikasi/ *Before Reclassification* Rp	Reklasifikasi/ *Reclassification* Rp	Setelah Reklasifikasi/ *After Reclassification* Rp	
ASET TIDAK LANCAR				***NON-CURRENT ASSETS***
Piutang Lain-lain				*Other Receivables*
Pihak Berelasi	16,862,553,689	123,750,000,000	140,612,553,689	*Related Parties*
Penyertaan Saham	127,296,062,692	(123,750,000,000)	3,546,062,692	*Investment in Shares*
Jumlah	**144,158,616,381**	**--**	**144,158,616,381**	***Total***

49. Informasi Keuangan Tambahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Informasi keuangan Perusahaan (entitas induk) terlampir (Lampiran 1-6), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk") yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian yang diharuskan menurut Standar akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian.

49. Supplementary of Financial Information on The Consolidated Financial Statements

The accompanying financial information (Attachments 1-6) of the Company (parent), which comprises the statements of financial position as of December 31, 2024 and 2023, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes equity, and statements of cash flows for the years ended December 31, 2024 and 2023, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information (collectively referred to as the "Parent Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the consolidated financial statements, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the consolidated financial statements.

50. Pertanggungjawaban Manajemen atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian yang diotorisasi untuk terbit oleh Direksi pada tanggal 14 Maret 2025.

50. Management Responsibility for The Consolidated Financial Statements

Management of the Company is responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements that were authorized by the Directors for issuance on March 14, 2025.

LAMPIRAN 1 | ***ATTACHMENT 1***

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk
(INDUK)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk
(PARENT)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2024 and 2023
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

	2024 Rp	2023 Rp	
ASET			***ASSETS***
ASET LANCAR			***CURRENT ASSETS***
Kas dan Setara Kas	1,025,417,332,744	1,033,394,394,681	*Cash and Cash Equivalent*
Piutang Usaha - Neto			*Trade Receivables - Net*
Pihak Berelasi	263,199,908,162	369,630,563,942	*Related Parties*
Pihak Ketiga	281,933,265,667	326,271,721,941	*Third Parties*
Piutang Retensi - Neto			*Retention Receivables - Net*
Pihak Berelasi	161,712,929,070	145,997,271,550	*Related Parties*
Pihak Ketiga	398,243,281,899	392,981,537,817	*Third Parties*
Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja			*Gross Amount Due from Customers*
Pihak Berelasi	195,121,768,324	236,857,959,026	*Related Parties*
Pihak Ketiga	241,398,057,672	299,572,229,472	*Third Parties*
Piutang Yang Belum Ditagih	9,360,579,793	3,263,782,490	*Unbilled Receivables*
Persediaan	350,027,596,576	401,632,058,715	*Inventories*
Pajak Dibayar di Muka	330,644,741,319	224,093,580,308	*Prepaid Taxes*
Uang Muka	124,034,728,295	157,090,267,991	*Advances*
Biaya Dibayar di Muka	213,923,413,531	92,166,783,879	*Prepaid Expenses*
Pekerjaan dalam Proses Konstruksi			*Construction Work in Progress*
Pihak Berelasi	393,238,453,533	310,422,405,145	*Related Parties*
Pihak Ketiga	419,248,403,826	260,317,502,169	*Third Parties*
Jumlah Aset Lancar	**4,407,504,460,411**	**4,253,692,059,126**	***Total Current Assets***
ASET TIDAK LANCAR			***NON-CURRENT ASSETS***
Piutang Lain-Lain			*Other Receivables*
Pihak Berelasi	284,729,225,791	267,085,207,295	*Related Parties*
Pihak Ketiga	20,952,979	1,618,318,116	*Third Parties*
Tanah Akan Dikembangkan	46,677,650,000	46,677,650,000	*Land For Development*
Penyertaan Saham	3,546,062,692	3,546,062,692	*Investment in Shares*
Properti Investasi	259,413,425,000	259,413,425,000	*Investment Property*
Aset Kerja Sama	86,792,172,065	91,897,593,953	*Assets of Co-operation*
Aset Tetap - Setelah Dikurangi			*Fixed Assets - Net of*
Akumulasi Penyusutan	47,475,979,663	71,317,226,363	*Accumulated Depreciation*
Aset Takberwujud- Setelah Dikurangi			*Intangible Assets - Net of*
Akumulasi Penyusutan	13,527,567,059	--	*Accumulated Depreciation*
Investasi pada Entitas Asosiasi	40,736,878,682	45,527,110,013	*Investment in Associate*
Investasi pada Ventura Bersama	519,352,569,206	505,439,414,782	*Investment of Joint Ventures*
Jumlah Aset Tidak Lancar	**1,302,272,483,137**	**1,292,522,008,214**	***Total Non Current Assets***
JUMLAH ASET	**5,709,776,943,548**	**5,546,214,067,340**	***TOTAL ASSETS***

LAMPIRAN 2 | ***ATTACHMENT 2***

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk
(INDUK)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
(Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk
(PARENT)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
(Continued)
As of December 31, 2024 and 2023
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

	2024 Rp	2023 Rp	
LIABILITAS DAN EKUITAS			***LIABILITES AND EQUITY***
LIABILITAS			***LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PENDEK			***CURRENT LIABILITIES***
Pinjaman Bank Jangka Pendek			*Short-term Bank Loans*
Pihak Berelasi	350,000,000,000	103,000,000,000	*Related Parties*
Pihak Ketiga	22,000,000,000	26,500,000,000	*Third Parties*
Utang Usaha			*Trade Payables*
Pihak Berelasi	473,717,438,934	608,412,227,195	*Related Parties*
Pihak Ketiga	1,184,125,934,472	861,629,676,273	*Third Parties*
Beban Akrual	344,781,876,171	428,647,086,383	*Accrued Expenses*
Utang Pajak	7,861,920,437	11,319,067,443	*Tax Payables*
Liabilitas Pajak Penghasilan Final	47,860,115,224	99,056,659,752	*Final Income Tax Liabilities*
Liabilitas Jangka Pendek Yang			
Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun			*Current Portion of Long Term Liability -*
Uang Muka Pemberi Kerja dan			*Advances from Project*
Konsumen	15,823,599,517	10,524,217,693	*Owners and Consumers*
Pinjaman Bank	9,417,600,000	8,938,000,000	*Bank Loan*
Utang Lain-lain			*Other Payables*
Pihak Berelasi	36,899,710,813	34,892,272,952	*Related Parties*
Pihak Ketiga	3,422,504,884	3,167,690,036	*Third Parties*
Pendapatan Diterima Di Muka	--	25.480.408.325	*Advances Received*
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**2,495,910,700,452**	**2,196,086,897,727**	***Total Current Liabilites***
LIABILITAS JANGKA PANJANG			***NON CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas Jangka Panjang Setelah Dikurangi			*Long-term Liability Net of*
Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun			*Current Maturities*
Uang Muka Pemberi Kerja dan			*Advances from Project*
Konsumen	507,541,582,961	691,789,685,266	*Owners and Consumers*
Pinjaman Bank	75,645,999,999	85,063,600,000	*Bank Loan*
Liabilitas Imbalan Kerja	22,759,500,319	11,888,656,207	*Employee Benefit Liabilities*
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**605,947,083,279**	**788,741,941,473**	***Total Non Current Liabilities***
JUMLAH LIABILITAS	**3,101,857,783,731**	**2,984,828,839,200**	***TOTAL LIABILITES***
EKUITAS			***EQUITY***
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada			***Equity Attributable to***
Pemilik Entitas Induk			***Owner of the Parent Entity***
Modal Saham - Nilai Nominal Rp100			*Share Capital-par value Rp100*
Modal Dasar 38.000.000.000 saham			*Authorized Capital 38,000,000,000 shares*
Modal ditempatkan dan disetor -			*Issued and Paid Up Capital*
9.572.000.000 saham	957,200,000,000	957,200,000,000	*9,572,000,000 shares*
Tambahan Modal Disetor	524,082,899,858	524,082,899,858	*Additional Paid In Capital*
Saldo Laba			*Retained Earnings*
Ditentukan Penggunaannya	165,528,527,000	160,828,527,000	*Appropriated*
Belum Ditentukan Penggunaannya	967,195,831,379	914,008,992,192	*Unappropriated*
Penghasilan Komprehensif Lainnya	(6,088,098,420)	5,264,809,090	*Other Comprehensive Income*
JUMLAH EKUITAS	**2,607,919,159,817**	**2,561,385,228,140**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**5,709,776,943,548**	**5,546,214,067,340**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

LAMPIRAN 3 | ***ATTACHMENT 3***

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk
(INDUK)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk
(PARENT)
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

	2024 Rp	2023 Rp	
PENDAPATAN	3,644,557,606,685	3,953,236,079,429	***REVENUES***
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(3,340,566,164,159)	(3,665,105,310,142)	***COST OF REVENUES***
LABA BRUTO	**303,991,442,526**	**288,130,769,287**	***GROSS PROFIT***
Beban Usaha	(114,423,879,780)	(70,680,448,625)	*Operating Expenses*
Pendapatan Lainnya	135,900,363,473	123,342,693,543	*Other Income*
Beban Lainnya	(231,322,592,048)	(121,599,270,999)	*Other Expenses*
Beban Keuangan	(28,254,570,874)	(54,862,864,680)	*Financial Expense*
Beban Pajak Penghasilan Final	(93,554,137,222)	(112,023,938,732)	*Final Income Tax Expenses*
Bagian Rugi Entitas Asosiasi	(4,790,231,331)	(14,624,400,396)	*Share in Loss on Associate*
Bagian Laba Ventura Bersama	99,664,321,780	10,765,889,081	*Share in Profit on Joint Venture*
Laba (Rugi) Selisih Kurs	56,682,663	(782,061,194)	*Foreign Exchange Gain (Loss)*
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**67,267,399,187**	**47,666,367,285**	***PROFIT BEFORE INCOME TAX***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	**--**	**--**	***INCOME TAX EXPENSES***
LABA NETO TAHUN BERJALAN	**67,267,399,187**	**47,666,367,285**	***NET PROFIT FOR THE YEAR***
RUGI KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK			***OTHER COMPREHENSIVE LOSS AFTER TAX***
Pos yang Tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi			***Item that will Not be Reclassified to Profit or Loss***
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti	(11,352,907,510)	(4,595,188,378)	*Remeasurement on Defined Benefit Plans*
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**55,914,491,677**	**43,071,178,907**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***

LAMPIRAN 4

ATTACHMENT 4

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk (INDUK)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk (PARENT)
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal Ditempatkan dan Disetor / *Subscribed and Paid-In Capital* Rp	Tambahan Modal Disetor / *Additional Paid-in Capital* Rp	Saldo Laba / *Retained Earnings*		Penghasilan Komprehensif Lain / *Other Comprehensive Income*		Jumlah Ekuitas / *Total Equity* Rp	
			Ditentukan Penggunaannya / *Appropriated* Rp	Belum Ditentukan Penggunaannya / *Unappropriated* Rp	Keuntungan (Kerugian) Aktuarial atas Program Imbalan Pasti / *Actuarial Gain (Loss) of Defined Benefits Plans* Rp	Keuntungan Atas Nilai Pasar Saham / *Gain on Share Market Value* Rp		
Saldo per 31 Desember 2022	**957,200,000,000**	**524,082,899,858**	**137,664,287,000**	**911,817,240,946**	**9,644,510,534**	**215,486,934**	**2,540,624,425,272**	***Balance as of December 31, 2022***
Dividen	--	--	–	(23,164,240,000)	–	--	(23,164,240,000)	*Dividends*
Cadangan	--	--	23,164,240,000	(23,164,240,000)	–	--	--	*Reserve*
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	--	--	–	48,520,231,246	(4,595,188,378)	--	43,925,042,868	*Total Comprehensive Income for the Current Year*
Saldo per 31 Desember 2023	**957,200,000,000**	**524,082,899,858**	**160,828,527,000**	**914,008,992,192**	**5,049,322,156**	**215,486,934**	**2,561,385,228,140**	***Balance as of December 31, 2023***
Dividen	--	--	–	(9,380,560,000)	–	--	(9,380,560,000)	*Dividends*
Cadangan	--	--	4,700,000,000	(4,700,000,000)	–	--	--	*Reserve*
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	--	--	–	67,267,399,187	(11,352,907,510)	--	55,914,491,677	*Total Comprehensive Income for the Current Year*
Saldo per 31 Desember 2024	**957,200,000,000**	**524,082,899,858**	**165,528,527,000**	**967,195,831,379**	**(6,303,585,354)**	**215,486,934**	**2,607,919,159,817**	***Balance as of December 31, 2024***

LAMPIRAN 5 | ***ATTACHMENT 5***

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk
(INDUK)
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk
(PARENT)
STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

	2024 Rp	2023 Rp	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan Kas dari Pelanggan	3,438,249,913,161	3,806,752,913,466	*Cash Received from Customers*
Pembayaran Kas kepada Pemasok	(3,362,751,162,779)	(3,074,324,066,846)	*Cash Payments to Suppliers*
Pembayaran Pajak Penghasilan	(222,969,376,324)	(91,861,198,820)	*Payment For Income Tax*
Pembayaran Beban Usaha	(114,423,879,780)	(71,130,491,661)	*Payments for Operating Expenses*
Pembayaran Beban Lain-lain	--	(1,699,654,400)	*Payments for Other Expenses*
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	**(261,894,505,722)**	**567,737,501,739**	***Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Pengurangan Investasi Ventura Bersama	78,441,800,867	51,304,037,443	*Deduction of Investment in Joint Ventures*
Penambahan Investasi Ventura Bersama	(13,525,941,367)	(32,042,728,639)	*Addition of Investment in Joint Ventures*
Pendapatan Bunga	11,066,906,027	13,889,936,325	*Interest Income*
Penambahan Aset Tetap	(2,587,808,524)	(15,680,029,859)	*Fixed Assets Acquisition*
Penambahan Aset Takberwujud	(3,020,977,696)	--	*Intangible Assets Acquisition*
Pengurangan Investasi Lainnya	662,959,464	611,878,055	*Deductions in Other Investments*
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Investasi	**71,036,938,771**	**18,083,093,325**	***Net Cash Provided by Investing Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan Pinjaman Bank	463,186,818,225	362,500,000,000	*Receipts of Bank Loan*
Pembayaran Pinjaman Bank	(220,686,818,225)	(733,000,000,000)	*Payments of Bank Loan*
Pembayaran Pinjaman Bank Jangka Panjang	(8,938,000,000)	(7,030,500,000)	*Payments of Long term - Bank Loan*
Penerimaan (Pembayaran) Pinjaman Induk	1,828,139,889	2,144,497,475	*Receipts (Payments) of Parent's Loan*
Pinjaman kepada Entitas Asosiasi	(18,000,000,000)	--	*Loan to Associates*
Pembayaran Dividen	(9,380,560,000)	(23,164,240,000)	*Payment of Dividends*
Pembayaran Bunga Pinjaman	(28,254,570,874)	(66,403,042,574)	*Interest Payments*
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	**179,755,009,015**	**(464,953,285,099)**	***Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities***
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	**(11,102,557,936)**	**120,867,309,965**	***NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENT***
PENGARUH PERUBAHAN KURS VALUTA ASING KAS DAN SETARA KAS	**90,855,447**	**(782,061,194)**	***EFFECT OF FOREIGN EXCHANGES RATES IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**1,036,429,035,233**	**916,343,786,462**	***CASH AND CASH EQUIVALENT AT BEGINNING OF YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**1,025,417,332,744**	**1,036,429,035,233**	***CASH AND CASH EQUIVALENT AT END OF YEAR***

LAMPIRAN 6 | ***ATTACHMENT 6***

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk (INDUK)
PENGUNGKAPAN LAINNYA
Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk (PARENT)
OTHER DISCLOSURE
Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

1. Laporan Keuangan Tersendiri / *1. Separate Financial Statements*

Berdasarkan PSAK 227, Perusahaan memilih untuk menyajikan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas entitas induk sebagai laporan keuangan tersendiri yang merupakan informasi tambahan atas laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan tersendiri adalah adalah laporan keuangan yang disajikan oleh entitas induk yang mencatat investasi pada entitas anak berdasarkan kepemilikan ekuitas langsung, bukan berdasarkan pelaporan hasil dan aset neto *investee*.

In accordance with PSAK 227, the Company elected to present the statements of financial position, statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows of the parent entity as a separate financial statements which represents additional information to the consolidated financial statements. Separate financial statements are those presented by parent entity which recorded investments in subsidiary on direct equity ownership basis rather than basis of reported results and investee's net asset.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan informasi keuangan entitas induk adalah sama dengan kebijakan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup sebagaimana diungkapkan pada Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk penyertaan pada entitas anak.

Accounting policies adopted in the preparation of the parent entity's financial information are same as the accounting policies adopted in the preparation of the Group's consolidated financial statements as disclosed in Note 2 to the consolidated financial statements, except for investments in subsidiary.

Sesuai dengan PSAK 227, Perusahaan mencatat penyertaan pada entitas anak dengan menggunakan metode biaya.

In accordance with PSAK 227, the Company records investment in subsidiary using cost method.

2. Daftar Investasi pada Entitas Anak / *2. Schedule of Investment in Subsidiaries*

Entitas Anak/ *Subsidiaries*	Lokasi/ *Domicile*	Harga Perolehan/ *Acquisition Cost*	
		2024 Rp	2023 Rp
PT WEGE Solusi Proklamasi	Indonesia	22,500,000,000	22,500,000,000
Jumlah/ *Total*		**22,500,000,000**	**22,500,000,000**

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank


Gedung
Gedung
Gedung

KRITERIA PENGUNGKAPAN KETERBUKAAN INFORMASI

Criteria for Information Disclosure



Pengungkapan informasi disusun sesuai dengan ketentuan kriteria Otoritas Jasa Keuangan (OJK), standar ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS), Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI), serta kriteria penilaian Annual Report Award, sebagai bentuk komitmen Perseroan terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi dan akuntabilitas kepada pemegang saham maupun seluruh pemangku kepentingan.

The information disclosure is prepared in accordance with the provisions of the Financial Services Authority (OJK) criteria, the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) standards, the General Guidelines for Good Corporate Governance in Indonesia (PUGKI), as well as the assessment criteria of the Annual Report Award, as a form of the Company's commitment to the implementation of Good Corporate Governance in order to realize information transparency and accountability to shareholders and all stakeholders.

Kriteria SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021 Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik

Seojk Criteria Number 16/SEOJK.04/2021 Regarding the Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies

Keterangan	Description	Hal Page
I. Ketentuan Umum | General Terms		
1. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:	1. In this Circular Letter of the Financial Services Authority, referred to as:	
a. Laporan Tahunan adalah laporan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap Emiten atau perusahaan publik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku kepada rapat umum pemegang saham yang disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Laporan Tahunan Emiten atau perusahaan publik.	a. Annual Report is the accountability report of the Board of Directors and the Board of Commissioners in conducting management and supervision of the Issuer or public company within 1 (one) fiscal year to the general meeting of shareholders prepared based on the provisions in the Financial Services Authority Regulation regarding the Annual Report of the Issuer or public company.	92-93
b. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum.	b. Issuer is a party conducting a public offering.	230-231
c. Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	c. Public Company is a company whose shares are owned by at least 300 (three hundred) shareholders and has a paid-up capital of at least Rp3,000,000,000.00 (three billion rupiah) or a number of shareholders and paid-up capital determined by the Financial Services Authority.	207
d. Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik.	d. Public Company means an Issuer that has conducted a public offering of equity securities or a Public Company.	50
e. Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu lembaga jasa keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan.	e. Sustainability Report is a report announced to the public that contains the economic, financial, social, and environmental performance of a financial service institution, Issuer, and Public Company in running a sustainable business.	Perseroan telah menerbitkan Laporan Keberlanjutan yang terpisah dalam Laporan Tahunan
f. Direksi:	f. Board of Directors:	459-473
i) bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan	i) for Issuers or Public Companies in the form of a limited liability company is the Board of Directors as referred to in the Financial Services Authority Regulation regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies; and	
ii) bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang melaksanakan pengurusan badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang undangan mengenai badan hukum tersebut.	ii) for Issuers or Public Companies in the form of legal entity other than a limited liability company is the organ that carries out the management of such legal entity as referred to in the laws and regulations regarding such legal entity	
g. Dewan Komisaris:	g. Board of Commissioners:	397-413
i) bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan	i) for Issuers or Public Companies in the form of a limited liability company is the Board of Commissioners as referred to in the Financial Services Authority Regulation regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies; and	

Keterangan	Description	Hal Page
ii) bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang melakukan pengawasan badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai badan hukum tersebut.	ii) for Issuers or Public Companies in the form of legal entity other than a limited liability company is the organ that supervises the legal entity as referred to in the laws and regulations regarding the legal entity.	397-413
h. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS:	h. General Meeting of Shareholders, hereinafter abbreviated as GMS:	
i) bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan	i) for Issuer or Public Company in the form of limited liability company is GMS as referred to in the Financial Services Authority Regulation regarding the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Company; and	365-413
ii) bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada organ yang melaksanakan fungsi pengurusan dan fungsi pengawasan, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar yang mengatur badan hukum tersebut.	ii) for an Issuer or Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company is an organ that has authority that is not granted to organs that carry out the management function and supervisory function, within the limits specified in the laws and regulations and/or articles of association governing the legal entity.	
2. Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik merupakan sumber informasi penting bagi investor atau pemegang saham sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dan sarana pengawasan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik.	2. The Annual Report of the Issuer or Public Company is an important source of information for investors or shareholders as one of the basic considerations in making investment decisions and a medium of supervision of the Issuer or Public Company.	Diterapkan
3. Seiring dengan perkembangan pasar modal dan meningkatnya kebutuhan investor atau pemegang saham atas keterbukaan informasi, Direksi dan Dewan Komisaris dituntut untuk menyajikan informasi yang berkualitas, akurat, dan akuntabel melalui Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.	3. Along with the development of the capital market and the increasing needs of investors or shareholders for information disclosure, the Board of Directors and Board of Commissioners are required to present quality, accuracy and accountability information through the Annual Report of the Issuer or Public Company.	Diterapkan
4. Laporan Tahunan yang disusun secara teratur dan informatif dapat memberikan kemudahan bagi investor atau pemegang saham dan pemangku kepentingan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.	4. An Annual Report that is prepared in an organized and informative manner shall provide convenience for investors or shareholders and stakeholders in obtaining the required information.	Diterapkan
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan pedoman bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang wajib diterapkan dalam menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan.	5. This Circular Letter of the Financial Services Authority is a guideline for Issuers or Public Companies that shall be applied in preparing the Annual Report and Sustainability Report.	Diterapkan
II. Bentuk Laporan Tahunan | Format of The Annual Report		
1. Laporan Tahunan disajikan dalam bentuk dokumen cetak dan dokumen elektronik.	1. The Annual Report is presented in the form of printed documents and electronic documents.	Diterapkan
2. Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen cetak,dicetak pada kertas yang berwarna terang, berkualitas baik, berukuran A4, dijilid, dan dapat diperbanyak dengan kualitas yang baik.	2. The Annual Report presented in the form of printed documents, printed on light-colored paper, good quality, A4 size, bound, and can be reproduced with good quality.	Diterapkan
3. Laporan Tahunan dapat menyajikan informasi berupa gambar, grafik, tabel, dan/atau diagram dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas, sehingga mudah dibaca dan dipahami.	3. The Annual Report may present information in the form of images, graphs, tables, and/or diagrams by including clear titles and/or captions, so that they are easy to read and understand.	Diterapkan

Keterangan	Description	Hal Page
4. Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen elektronik merupakan Laporan Tahunan yang dikonversi dalam portable document format (PDF).	4. The Annual Report presented in the form of electronic documents is an Annual Report converted in portable document format (PDF).	Diterapkan
III. Isi Laporan Tahunan | Contents of The Annual Report		
1. Laporan Tahunan paling sedikit memuat:	1. The Annual Report shall contain at least:	
a. ikhtisar data keuangan penting;	a. overview of important financial data;	38 - 49
b. informasi saham (jika ada);	b. stock information (if any);	50
c. laporan Direksi;	c. report of the Board of Directors;	
d. laporan Dewan Komisaris;	d. report of the Board of Commissioners	59-73
e. profil Emiten atau Perusahaan Publik;	e. profile of the Issuer or Public Company	75-90
f. analisis dan pembahasan manajemen;	f. management analysis and discussion	52 -344
g. tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik;	g. management of the Issuer or Public Company;	347
h. tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atauPerusahaan Publik;	h. social and environmental responsibility of the Issuer or Public Company;	601
i. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan	i. audited annual financial statements; and	614
j. surat pernyataan anggota Direksi dan anggota DewanKomisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan.	j. statement letter of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners regarding responsibility for the Annual Report.	92 - 93
2. Uraian Isi Laporan Tahunan	2. Description of Annual Report Content	
a. Ikhtisar Data Keuangan Penting | Summary of key financial data		
Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat:	Summary of key financial data contains financial information presented in comparative form for 3 (three) financial years or since commencement of business if the Issuer or Public Company has been in business for less than 3 (three) years, including at least:	
1. pendapatan/penjualan;	1. revenue/sales;	38-40
2. laba bruto;	2. gross profit;	38-40
3. laba (rugi);	3. profit (loss);	38-40
4. jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepadapemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;	4. total profit (loss) attributable to owners of the parent entity and non-controlling interest;	38-40
5. total laba (rugi) komprehensif;	5. total comprehensive income (loss);	38-40
6. jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikankepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali;	6. total comprehensive income (loss) attributable to owners of the parent entity and non-controlling interests;	38-40
7. laba (rugi) per saham;	7. earnings (loss) per share;	38-40
8. jumlah aset;	8. total assets;	38-40
9. jumlah liabilitas;	9. total liabilities;	41-42
10. jumlah ekuitas;	10. total equity;	41-42
11. rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset;	11. ratio of profit (loss) to total assets;	44-45
12. rasio laba (rugi) terhadap ekuitas;	12. ratio of profit (loss) to equity;	44-45
13. rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan;	13. ratio of profit (loss) to revenue/sales;	44-45
14. rasio lancar;	14. current ratio;	44-45
15. rasio liabilitas terhadap ekuitas;	15. ratio of liabilities to equity;	44-45

Keterangan	Description	Hal Page
16. rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan	16. ratio of liabilities to total assets; and	44-45
17. informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya.	17. other financial information and ratios relevant to the Issuer or Public Company and its industry.	44-45
b. Informasi Saham | Stock Information		
Informasi saham bagi Perusahaan Terbuka paling sedikit memuat:	Stock information for Public Listed Companies shall at least contain:	
1. saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit memuat:	1. shares issued for each quarterly period presented in a comparative form for the last 2 (two) fiscal years, at least containing:	51
a. jumlah saham yang beredar;	a. number of shares outstanding;	
b. kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan;	b. market capitalization based on the price on the stock exchange where the shares are listed;	
c. harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; dan	c. the highest, lowest, and closing share price based on the price on the stock exchange where the shares are listed; and	
d. volume perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan.	d. trading volume on the stock exchange where the shares are listed.	
Informasi dalam huruf b), huruf c) dan huruf d) hanya diungkapkan jika sahamnya tercatat di bursa efek;	Information in letter b), letter c) and letter d) is only disclosed if the shares are listed on the stock exchange;	
2. dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai:	2. in the event of corporate actions that cause changes to the shares, such as stock splits, reverse stock mergers, stock dividends, bonus shares, changes in par value of shares, issuance of convertible securities, and capital increases and decreases, the information on shares as referred to in point 1) shall be added with explanations at least regarding:	54
a. tanggal pelaksanaan aksi korporasi;	a. date of implementation of the corporate action;	
b. rasio pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham;	b. the ratio of stock split, reverse stock merger, stock dividend, bonus shares, number of convertible securities issued, and change in par value of shares;	
c. jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi;	c. the number of shares outstanding before and after the corporate action;	
d. jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada); dan	d. number of convertible securities exercised (if any); and	
e. harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi;	e. the share price before and after the corporate e;	
3. dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatansaham (delisting) dalam tahun buku, dijelaskan alasanpenghentian sementara perdagangan saham (suspension)dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting)tersebut; dan	3. in the event of suspension and/or delisting during the financial year, the reasons for the suspension and/or delisting; and	54

Keterangan	Description	Hal Page
4. dalam hal penghentian sementara perdagangan saham(suspension) sebagaimana dimaksud pada angka 3)dan/atau proses pembatalan pencatatan saham (delisting)masih berlangsung hingga akhir periode LaporanTahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untukmenyelesaikan penghentian sementara perdagangansaham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatansaham (delisting) tersebut.	4. in the event that the suspension as referred to in point 3) and/or delisting process is still ongoing by the end of the Annual Report period, the actions taken to resolve the suspension and/or delisting are explained.	54
c. Laporan Direksi | Report of the Board of Directors		
Laporan Direksi paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:	The report of the Board of Directors shall at least contain a brief description of:	
1. kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	1. performance of the Issuer or Public Company, including at least:	75-90
a. strategi dan kebijakan strategis Emiten atauPerusahaan Publik;	a. strategic strategies and policies of the Issuer or Public Company;	
b. peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik;	b. the role of the Board of Directors in the formulation of strategic strategies and policies of the Issuer or Public Company;	
c. proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik;	c. process undertaken by the Board of Directors to ensure the implementation of the Issuer's or Public Company's strategy;	
d. perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Emiten atau Perusahaan Publik; dan	d. comparison between the results achieved and those targeted by the Issuer or Public Company; and	
e. kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik;	e. obstacles faced by the Issuer or Public Company;	
2. gambaran tentang prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik; dan	2. description of the business prospects of the Issuer or Public Company; and	
3. penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.	3. implementation of management of the Issuer or Public Company.	
d. Laporan Dewan Komisaris | Report of the Board of Commissioners		
Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:	The Board of Commissioners' report shall at least contain a brief description of:	
1. penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh Direksi;	1. assessment of the performance of the Board of Directors regarding the management of the Issuer or Public Company, including the supervision of the Board of Commissioners in the formulation and implementation of the strategy of the Issuer or Public Company carried out by the Board of Directors;	59-73
2. pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi; dan	2. views on the business prospects of the Issuer or Public Company prepared by the Board of Directors; and	
3. pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.	3. views on the implementation of management of the Issuer or Public Company.	
e. Profil Emiten atau Perusahaan Publik | Profile of Issuer or Public Company		
Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat informasi:	Profile of Issuer or Public Company at least contains information on:	
1. nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku;	1. name of the Issuer or Public Company, including if there is a change of name, the reason for the change, and the effective date of the change of name in the financial year;	96

Keterangan	Description	Hal Page
2. akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi:	2. access to the Issuer or Public Company including branch offices or representative offices that enable the public to obtain information about the Issuer or Public Company, including:	96-97
a. alamat;	a. address	
b. nomor telepon;	b. telephone number	
c. alamat surat elektronik; dan	c. electronic mail address; and	
d. alamat situs web;	d. website address;	
3. riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik;	3. brief history of the Issuer or Public Company;	98-101
4. visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik serta budaya perusahaan (corporate culture) atau nilai-nilai perusahaan;	4. vision and mission of the Issuer or Public Company and corporate culture or corporate values;	104-105
5. kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan;	5. business activities according to the latest articles of association, business activities carried out in the financial year, and types of goods and/or services produced;	109-112
6. wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik; wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan.	6. operational area of the Issuer or Public Company; operational area is the area or region where operational activities are carried out or the scope of the company's operational activities.	114-115
7. struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan;	7. organizational structure of the Issuer or Public Company in the form of a chart, at least up to a structure of 1 (one) level below the Board of Directors including committees under the Board of Directors (if any) and committees under the Board of Commissioners, accompanied by names and positions;	118-119
8. daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan;	8. membership list of industry associations both on a national and international scale related to the implementation of sustainable finance;	116
9. profil Direksi, paling sedikit memuat:	9. profile of the Board of Directors, at least containing:	136-149
a. nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dantanggung jawab;	a. name and position in accordance with duties and responsibilities;	
b. foto terbaru;	b. recent photograph;	
c. usia;	c. age;	
d. kewarganegaraan;	d. nationality;	
e. riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi;	e. education and/or certification history;	
f. riwayat jabatan, meliputi informasi:	f. history of position, including information on:	
i) dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;	i) legal basis for appointment as a member of the Board of Directors at the relevant Issuer or Public Company;	
ii) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan	ii) concurrent positions, either as member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, and/or member of committee and other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. In the event that the members of the Board of Directors do not have concurrent positions, then disclose the matter; and	

Keterangan	Description	Hal Page
iii) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	iii) work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	136-149
g. hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; dan	g. affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controllers either directly or indirectly up to the individual owner, including the name of the affiliated party. In the event that a member of the Board of Directors has no affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose the same; and	499-501
h. perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	h. changes in the composition of members of the Board of Directors and the reasons for the changes. In the event that there is no change in the composition of members of the Board of Directors, then disclose the matter;	146
10. profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	10. profile of the Board of Commissioners, shall at least contain:	122-132
a. nama dan jabatan;	a. name and position;	
b. foto terbaru;	b. recent photograph;	
c. usia;	c. age;	
d. kewarganegaraan;	d. nationality;	
e. riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi;	e. education and/or certification history;	
f. riwayat jabatan, meliputi informasi:	f. history of position, including information on:	
i) dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris;	i) legal basis for appointment as a member of the Board of Commissioners;	
ii) dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;	ii) legal basis for first appointment as a member of the Board of Commissioners who is an independent commissioner of the relevant Issuer or Public Company;	
iii) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan	iii) concurrent positions, either as member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or member of committee and other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. In the event that the member of the Board of Commissioners does not have concurrent positions, then disclose the matter; and	
iv) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	iv) work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	
g. hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi; Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut;	g. affiliation with other members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controllers either directly or indirectly up to the individual owner, including the name of the affiliated party; In the event that members of the Board of Commissioners do not have any affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose the same;	122 - 132
h. pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode; dan	a. statement of independence of independent commissioners in the event that independent commissioners have served more than 2 (two) periods; and	414-415

Keterangan	Description	Hal Page
i. perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	i. changes in the composition of the Board of Commissioners and the reasons for the changes. In the event that there is no change in the composition of members of the Board of Commissioners, then disclose the matter;	146
11. dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya;	11. in the event that there is a change in the composition of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners that occurs after the end of the fiscal year up to the deadline for submitting the Annual Report, the composition included in the Annual Report is the last and previous composition of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;	150
12. jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.	12. number of employees by gender, position, age, education level, and employment status (permanent/ contract) in the fiscal year; Disclosure of information shall be presented in the form of a table.	195-200
13. nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai:	13. names of shareholders and percentage of ownership at the beginning and end of the fiscal year, consisting of information regarding:	203-209
a. pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen)atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik;	a. shareholders who own 5% (five percent) or more of the Issuer's or Public Company's shares;	
b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yangmemiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik.Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/ atau seluruhanggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham,maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan	b. members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who own shares of the Issuer or Public Company. In the event that all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners do not own shares, such information shall be disclosed; and	
c. kelompok pemegang saham masyarakat, yaitukelompok pemegang saham yang masing-masingmemiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emitenatau Perusahaan Publik;Informasi di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel.	c. groups of public shareholders, i.e. groups of shareholders who each own less than 5% (five percent) of the Issuer's or Public Company's shares; the above information may be presented in the form of a table.	
14. persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	14. percentage of indirect ownership of shares of the Issuer or Public Company by members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners at the beginning and end of the financial year, including information on shareholders registered in the register of shareholders for the benefit of indirect ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners; in the event that all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners do not have indirect ownership of shares of the Issuer or Public Company, then disclose the matter.	204-206
15. jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi:	15. number of shareholders and percentage of ownership as of the end of the financial year based on classification:	207
a. kepemilikan institusi lokal;	a. local institutional ownership;	
b. kepemilikan institusi asing;	b. foreign institutional ownership	
c. kepemilikan individu lokal; dan	c. local individual ownership; and	
d. kepemilikan individu asing;	d. foreign individual ownership;	

Keterangan	Description	Hal Page
16. informasi mengenai pemegang saham utama danpengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsungmaupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu,yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan;	16. information on major shareholders and controlling shareholders of the Issuer or Public Company, either directly or indirectly, up to individual owners, presented in the form of scheme or chart;	210
17. nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama; Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut.	17. name of subsidiaries, associated companies, joint venture companies where the Issuer or Public Company has joint control of the entity (if any), along with percentage of share ownership, line of business, total assets, and operating status of the subsidiaries, associated companies, joint venture companies; For subsidiaries, information on the address of the subsidiaries should be added.	211-19
18. kronologis pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada);	18. chronological listing of shares, number of shares, nominal value, and offering price from the beginning of the listing up to the end of the fiscal year and the name of the stock exchange where the shares of the Issuer or Public Company are listed, including stock splits, reverse stock combinations, stock dividends, bonus shares, and changes in nominal value of shares, implementation of convertible securities, implementation of capital increase and reduction (if any);	221-221
19. informasi pencatatan efek lainnya selain efek sebagaimana dimaksud pada angka 18), yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/ imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada);	19. information on the listing of other securities other than the securities as referred to in point 18), which have not matured in the fiscal year, at least containing the name of the securities, year of issuance, interest rate/yield, maturity date, offering value, and securities rating (if any);	221
20. informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/ asosiasi/aliansinya meliputi:	20. information on the use of services of public accountants (AP) and public accounting firms (KAP) and their networks/associations/alliances including:	222
a. nama dan alamat;	a. name and address;	
b. periode penugasan;	b. period of assignment;	
c. informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan;	c. information on audit and/or non-audit services provided;	
d. biaya jasa (fee) audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; dan	d. audit and/or non-audit fees for each assignment provided during the fiscal year; and	
e. dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/ aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut; dan Pengungkapan informasi penggunaan jasa AP dan KAP beserta jaringan/ asosiasi/aliansinya dapat disajikan dalam bentuk tabel.	e. in the event that the appointed AP and KAP along with its network/association/alliance do not provide non-audit services, the information shall be disclosed; and Disclosure of information on the use of AP and KAP services along with its network/association/alliance may be presented in tabular form.	
21. nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP.	21. names and addresses of capital market supporting institutions and/or professionals other than AP and KAP.	222 - 224

Keterangan	Description	Hal Page
f. Analisis dan Pembahasan Manajemen | Management's Discussion and Analysis		
Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat:	Management's discussion and analysis contains analysis and discussion of financial statements and other important information with emphasis on material changes that occurred during the fiscal year, which includes at least:	
1. tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	1. review of operations per business segment in accord with the type of industry of the Issuer or Public Company, at least regarding:	
a. produksi, yang meliputi proses, kapasitas, danperkembangannya;	a. production, including process, capacity, and development;	274-282
b. pendapatan/penjualan; dan	b. revenue/sales; and	
c. profitabilitas;	c. profitability;	
2. kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai:	2. comprehensive financial performance that includes a comparison of financial performance in the last 2 (two) fiscal years, an explanation of the causes of changes and the impact of such changes, at least regarding:	
a. aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset;	a. current assets, non-current assets, and total assets;	283-298
b. liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang,dan total liabilitas;	b. short-term liabilities, long-term liabilities, and total liabilities;	
c. ekuitas;	c. equity;	
d. pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi),penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi)komprehensif; dan	d. revenue/sales, expenses, profit (loss), other comprehensive income, and total comprehensive income (loss); and	
e. arus kas;	e. cash flow;	
3. kemampuan membayar utang atau kewajibandengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;	3. ability to pay debts or liabilities by presenting relevant ratio calculations;	299-300
4. tingkat kolektibilitas piutang Emiten atau PerusahaanPublik dengan menyajikan perhitungan rasio yangrelevan;	4. collectibility of receivables of the Issuer or Public Company by presenting relevant ratio calculation;	300-301
5. struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud;	5. capital structure and management policy on the capital structure, along with the basis for determining the policy;	306-307
6. bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit memuat:	6. discussion of material ties for investment in capital goods with an explanation containing at least:	
a. tujuan dari ikatan tersebut;	a. the purpose of the bond;	308
b. sumber dana yang diharapkan untuk memenuhiikatan tersebut;	b. the expected source of funds to fulfill the bond;	
c. mata uang yang menjadi denominasi; dan	c. currency of denomination; and	
d. langkah yang direncanakan Emiten atau PerusahaanPublik untuk melindungi risiko dari posisi mata uangasing yang terkait;	d. measures planned by the Issuer or Public Company to protect the risk of the related foreign currency position;	
7. bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit memuat:	7. discussion on investment in capital goods realized in the last fiscal year, at least containing:	
a. jenis investasi barang modal;	a. type of investment in capital goods;	308
b. tujuan investasi barang modal; dan	b. purpose of investment in capital goods; and	
c. nilai investasi barang modal yang dikeluarkan;	c. value of capital goods investment incurred;	

Keterangan	Description	Hal Page
8. informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggallaporan akuntan (jika ada);	8. information and material facts occurring after the date of the accountant's report (if any);	309
9. prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya;	9. business prospects of the Issuer or Public Company in relation to the condition of the industry, the economy in general and international markets accompanied by quantitative supporting data from reliable data sources;	336-339
10. perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai:	10. comparison between targets/projections at the beginning of the financial year and the results achieved (realization), regarding:	331-333
a. pendapatan/penjualan;	a. revenue/sales;	
b. laba (rugi);	b. profit (loss);	
c. struktur modal (capital structure); atau	c. capital structure; or	
d. hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atauPerusahaan Publik;	d. other matters considered important for the Issuer or Public Company;	
11. target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang,mengenai:	11. target/projection to be achieved by the Issuer or Public Company for the next 1 (one) year, regarding:	333-339
a. pendapatan/penjualan;	a. revenue/sales;	
b. laba (rugi);	b. profit (loss)	
c. struktur modal (capital structure);	c. capital structure	
d. kebijakan dividen; atau	d. dividend policy; or	
e. hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atauPerusahaan Publik;	e. other matters consideredmportant for the Issuer or Public Company;	
12. aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar;	12. marketing aspects of goods and/or services of the Issuer or Public Company, at least regarding marketing strategy and market share;	329-330
13. uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit:	13. description of dividends for the last 2 (two) fiscal years, at least:	309-310
a. kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih;	a. dividend policy, including information on the percentage of total dividends distributed to net profit;	
b. tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggaldistribusi dividen non kas;	b. cash dividend payment dates and/or non-cash dividend distribution dates;	
c. jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan	c. the amount of dividends per share (cash and/or non-cash); and	
d. jumlah dividen per tahun yang dibayar; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak membagikan dividen dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	d. total dividends paid per year; disclosure of information may be presented in tabular form. In the event that the Issuer or Public Company has not paid dividends in the last 2 (two) years, it shall disclose the same.	
14. realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, dengan ketentuan:	14. realization of the use of proceeds from public offering, provided that:	311-315
a. dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan	a. in the event that during the fiscal year, the Issuer has an obligation to submit a report on the realization of the use of proceeds, the realization of the use of proceeds from public offering shall be disclosed cumulatively up to the end of the fiscal year; and	

Keterangan	Description	Hal Page
b. dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut;	b. in the event that there is a change in the use of proceeds as stipulated in the Financial Services Authority Regulation regarding the report on the realization of the use of proceeds from public offering, the Issuer shall explain such change;	
15. informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/ peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/ modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, paling sedikit memuat:	15. material information (if any), among others regarding investment, expansion, divestment, merger/ consolidation, acquisition, debt/capital restructuring, material transactions, affiliated transactions, and conflict of interest transactions, which occurred during the fiscal year, at least containing:	
a. tanggal, nilai, dan objek transaksi;	a. date, value, and object of the transaction;	
b. nama pihak yang melakukan transaksi;	b. the name of the party conducting the transaction;	
c. sifat hubungan afiliasi (jika ada);	c. the nature of the affiliated relationship (if any);	
d. penjelasan mengenai kewajaran transaksi;	d. explanation of the fairness of the transaction;	
e. pemenuhan ketentuan terkait; dan	e. fulfillment of related provisions; and	
f. dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksuddalam huruf a) sampai dengan huruf e), Emiten atauPerusahaan Publik juga mengungkapkan informasi:	f. in the event of an affiliated relationship, in addition to disclosing the information as referred to in letters a) to e), the Issuer or Public Company shall also disclose:	
i) pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (armslength principle); dan	i) statement of the Board of Directors that the affiliated transaction has gone through adequate procedures to ensure that the affiliated transaction is carried out in accord with generally accepted business practices, among others, by fulfilling the armslength principle; and	316 - 324
ii) peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (armslength principle);	ii) the role of the Board of Commissioners and audit committee in conducting adequate procedures to ensure that related party transactions are carried out in accord with generally accepted business practices, among others, by fulfilling the armslength principle;	
g. untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan; Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut.	g. for affiliated transactions or material transactions which are business activities carried out in the context of generating business income and carried out regularly, repeatedly, and/or continuously, an explanation is added that the affiliated transaction or material transaction is a business activity carried out in the context of generating business income and carried out regularly, repeatedly, and/or continuously; In the event that the affiliated transaction or material transaction has been disclosed in the annual financial report, information is added regarding the reference to the disclosure in the annual financial report.	

Keterangan	Description	Hal Page
h. untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/ atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut;	h. for the disclosure of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions that are the result of the implementation of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions that have been approved by independent shareholders, information is added regarding the date of the GMS that approved the affiliated transactions and/or conflict of interest transactions;	
i. dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/ atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	i. in the event that there are no affiliated transactions and/or conflict of interest transactions, then disclose the matter;	326
16. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan	16. changes in laws and regulations that significantly affect the Issuer or Public Company and its impact on the financial statements (if any); and	326
17. perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada).	17. changes in accounting policies, reasons and impacts on financial statements (if any).	327
g. Tata Kelola Perusahaan | Good Corporate Governance		
Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:	The governance of the Issuer or Public Company must at least contain a brief description of:	
1. RUPS, paling sedikit memuat:	1. GMS, at least contain:	365-396
a. Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi:	a. Information regarding GMS decisions in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year including:	
i) keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku; dan	i) GMS decisions in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year that are realized in the fiscal year; and	
ii) keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu)tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan;	i) GMS decisions in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year that have not been realized along with the reasons for not being realized;	
b. dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	b. in the event that the Issuer or Public Company uses an independent party in the implementation of the GMS to calculate votes, then this matter must be disclosed;	
2. Direksi, paling sedikit memuat:	2. Board of Directors, at least contain:	
a. tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel.	a. duties and responsibilities of each member of the Board of Directors; Information regarding the duties and responsibilities of each member of the Board of Directors is described and can be presented in tabular form.	465
b. pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (charter) Direksi;	b. a statement that the Board of Directors has guidelines or a charter for the Board of Directors;	460
c. kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi,rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama DewanKomisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuktabel.	c. policies and implementation of the frequency of Board of Directors meetings, Board of Directors meetings with the Board of Commissioners, and the level of attendance of Board of Directors members in these meetings including attendance at the GMS; Information on the level of attendance of members of the Board of Directors in Board of Directors meetings, Board of Directors meetings with the Board of Commissioners, or GMS can be presented in the form of a table.	370, 382 dan 469
d. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi:	d. training and/or improvement of the competence of members of the Board of Directors:	

Keterangan	Description	Hal Page
i) kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada); dan	i) training and/or improvement policies for members of the Board of Directors, including orientation programs for newly appointed members of the Board of Directors (if any); and	472
ii) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada);	ii) training and/or improvement of the competence attended by members of the Board of Directors in the financial year (if any);	
e. penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat:	e. the Board of Directors' assessment of the performance of committees that support the implementation of the Board of Directors' duties in the financial year must contain at least:	493
i) prosedur penilaian kinerja; dan	i) performance assessment procedures; and	
ii) kriteria yang digunakan seperti capaian kinerjaselama tahun buku, kompetensi dan kehadirandalam rapat; dan	ii) criteria used such as performance achievements during the financial year, competence and attendance at meetings; and	
f. dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	f. in the event that the Issuer or Public Company does not have a committee that supports the implementation of the Board of Directors' duties, this must be disclosed.	493
3. Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	3. Board of Commissioners, must contain at least:	
a. tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;	a. duties and responsibilities of the Board of Commissioners;	403
b. pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (charter) Dewan Komisaris;	b. a statement that the Board of Commissioners has guidelines or a charter for the Board of Commissioners;	399
c. kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel.	c. policies and implementation of the frequency of Board of Commissioners meetings, Board of Commissioners meetings with the Board of Directors and the level of attendance of members of the Board of Commissioners in these meetings including attendance at GMS; Information on the level of attendance of members of the Board of Commissioners in meetings of the Board of Commissioners, meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors, or GMS can be presented in the form of a table.	370, 382 dan 407-410
d. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris:	d. training and/or improvement of the competence of members of the Board of Commissioners:	411
i) kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada); dan	i) training and/or improvement policies for the competence of members of the Board of Commissioners, including orientation programs for newly appointed members of the Board of Commissioners (if any); and	
ii) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada);	ii) training and/or improvement of the competence attended by members of the Board of Commissioners in the financial year (if any);	
e. penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	e. performance assessment of the Board of Directors and Board of Commissioners and each member of the Board of Directors and member of the Board of Commissioners, at least contains:	513-515
i) prosedur pelaksanaan penilaian kinerja;	i) performance assessment implementation procedures;	
ii) kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan	ii) criteria used such as performance achievements during the financial year, competence and attendance at meetings; and	

Keterangan	Description	Hal Page
iii) pihak yang melakukan penilaian; dan	iii) parties conducting the assessment; and	
f. penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi:	f. assessment of the Board of Commissioners on the performance of the Committees supporting the implementation of the Board of Commissioners' duties in the financial year including:	412-413
i) prosedur penilaian kinerja; dan	i) performance assessment procedures; and	
ii) kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat;	ii) criteria used such as performance achievements during the financial year, competence and attendance at meetings;	
4. Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	4. Nomination and remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners, at least contains:	504
a. prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan	a. nomination procedures, including a brief description of the policy and nomination process for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; and	
b. prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi danDewan Komisaris, antara lain:	b. procedures and implementation of remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners, including:	505-509
i) prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris;	i) procedures for determining remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners;	
ii) struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji tunjangan,tantiem/ bonus dan lainnya; dan	ii) remuneration structure of the Board of Directors and Board of Commissioners such as salary, allowances, bonuses and others; and	
iii) besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.	iii) the amount of remuneration for each member of the Board of Directors and Board of Commissioners; Disclosure of information can be presented in tabular form.	
5. Dewan pengawas syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat:	5. Sharia supervisory board, for Issuers or Public Companies that carry out business activities based on sharia principles as stated in the articles of association, at least contains:	WEGE tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah
a. nama;	a. name;	
b. dasar hukum pengangkatan dewan pengawas syariah;	b. legal basis for the appointment of the sharia supervisory board;	
c. periode penugasan dewan pengawas syariah;	c. period of assignment of the sharia supervisory board;	
d. tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah;dan	d. duties and responsibilities of the sharia supervisory board; and	
e. frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah dipasar modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik;	e. frequency and method of providing advice and suggestions as well as supervision of the fulfillment of sharia principles in the capital market for Issuers or Public Companies;	
6. Komite audit, paling sedikit memuat:	6. Audit committee, at least contains:	422-424
a. nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	a. name and position in the committee membership;	
b. usia;	b. age;	
c. kewarganegaraan;	c. citizenship;	
d. riwayat pendidikan;	d. educational history;	
e. riwayat jabatan, meliputi informasi:	e. job history, including information:	

Keterangan	Description	Hal Page
i) dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;	i) legal basis for appointment as a committee member;	
ii) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	ii) concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or member of the committee and other positions (if any); and	
iii) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	iii) work experience and time period both inside and outside the Issuer or Public Company;	
f. periode dan masa jabatan anggota komite audit;	f. period and term of office of audit committee members;	422
g. pernyataan independensi komite audit;	g. statement of independence of the audit committee;	422
h. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada);	h. training and/or competency improvement that has been attended in the financial year (if any);	427
i. kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut; dan	i. policy and implementation of the frequency of audit committee meetings and the level of attendance of audit committee members in such meetings; and	424-427
j. pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (charter) komite audit;	j. implementation of audit committee activities in the financial year in accordance with those stated in the audit committee guidelines or charter;	428
7. komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	7. the committee or nomination and remuneration function of the Issuer or Public Company, at least contains:	
a. nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	a. name and position in the committee membership;	
b. usia;	b. age;	
c. kewarganegaraan;	c. citizenship;	
d. riwayat pendidikan;	d. educational history;	
e. riwayat jabatan, meliputi informasi:	e. job history, including information on:	436-437
i) dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;	i) legal basis for appointment as a committee member;	
ii) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	ii) concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, a member of the Board of Directors, and/or a member of the committee and other positions (if any); and	
iii) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	iii) work experience and time periods both within and outside the Issuer or Public Company;	
f. periode dan masa jabatan anggota komite;	f. period and term of office of committee members;	434-435
g. pernyataan independensi komite;	g. statement of committee independence;	434-435
h. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada);	h. training and/or competency improvement that has been attended in the financial year (if any);	445
i. uraian tugas dan tanggung jawab;	i. description of duties and responsibilities;	445
j. pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter);	j. a statement that it has guidelines or a charter;	433
k. kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut;	k. policies and implementation of meeting frequency and level of member attendance at the meeting;	438-444
l. uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan	l. a brief description of the implementation of activities in the financial year; and	445

Keterangan	Description	Hal Page
m. dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan:	m. in the event that a nomination and remuneration committee is not formed, the Issuer or Public Company is sufficient to disclose the information as referred to in letters i) to l) and disclose:	n/a
i) alasan tidak dibentuknya komite; dan	i) the reasons for not forming the committee; and	
ii) pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi;	ii) the party carrying out the nomination and remuneration function;	
8. komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	8. other committees owned by the Issuer or Public Company in order to support the functions and duties of the Board of Directors (if any) and/or committees that support the functions and duties of the Board of Commissioners, at least containing:	448
a. nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	a. name and position in the committee membership;	453
b. usia;	b. age;	
c. kewarganegaraan;	c. citizenship;	
d. riwayat pendidikan;	d. educational history;	
e. riwayat jabatan, meliputi informasi:	e. job history, including information:	
i) dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;	i) legal basis for appointment as a committee member;	
ii) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	ii) concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, a member of the Board of Directors, and/or a member of the committee and other positions (if any); and	
iii) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	iii) work experience and time period both inside and outside the Issuer or Public Company;	
f. periode dan masa jabatan anggota komite;	f. period and term of office of committee members;	452
g. pernyataan independensi komite;	g. statement of committee independence;	454
h. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan	h. training and/or competency improvement that has been followed in the financial year (if any); and	456
i. uraian tugas dan tanggung jawab;	i. description of duties and responsibilities;	451
j. pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) komite;	j. statement that has had committee guidelines or charter;	450
k. kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komitedan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut; dan	k. policy and implementation of committee meeting frequency and level of attendance of committee members in such meetings; and	455
l. uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite padatahun buku;	l. brief description of implementation of committee activities in the financial year;	457
9. Sekretaris perusahaan, paling sedikit memuat:	9. Corporate secretary, at least contains:	475
a. nama;	a. name;	
b. domisili;	b. domicile;	
c. riwayat jabatan, meliputi:	c. job history, including:	
i) dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan; dan	i) legal basis for appointment as corporate secretary; and	
ii) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	ii) work experience and time period both inside and outside the Issuer or Public Company;	

Keterangan	Description	Hal Page
d. riwayat pendidikan;	d. education history;	475
e. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; dan	e. training and/or competency improvement that has been followed in the financial year; and	477-479
f. uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku;	f. brief description of implementation of corporate secretary duties in the financial year;	479-481
10. Unit audit internal, paling sedikit memuat:	10. Internal audit unit, at least contains:	490
a. nama kepala unit audit internal;	a. name of the head of the internal audit unit;	
b. riwayat jabatan, meliputi:	b. job history, including:	
i) dasar hukum penunjukan sebagai kepala unit audit internal; dan	i) legal basis for appointment as head of the internal audit unit; and	
ii) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	ii) work experience and time period both inside and outside the Issuer or Public Company;	
c. kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada);	c. qualifications or certification as an internal audit profession (if any);	491
d. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku;	d. training and/or competency improvement followed in the financial year;	492
e. struktur dan kedudukan unit audit internal;	e. structure and position of the internal audit unit;	486
f. uraian tugas dan tanggung jawab;	f. description of duties and responsibilities;	486-488
g. pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) unit audit internal; dan	g. statement that it has guidelines or charter for the internal audit unit; and	484
h. uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit;	h. brief description of the implementation of the internal audit unit's duties in the financial year including policies and implementation of the frequency of meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or audit committee;	492
11. uraian mengenai sistem pengendalian internal (internal control) yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	11. description of the internal control system implemented by the Issuer or Public Company, at least containing:	516-523
a. pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya;	a. financial and operational control, and compliance with other laws and regulations;	
b. tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal; dan	b. review of the effectiveness of the internal control system; and	
c. pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal;	c. statement from the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the adequacy of the internal control system;	
12. sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	12. risk management system implemented by the Issuer or Public Company, at least containing:	524-533
a. gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik;	a. general description of the Issuer or Public Company's risk management system;	
b. jenis risiko dan cara pengelolaannya;	b. types of risks and how they are managed;	
c. tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; dan	a. review of the effectiveness of the Issuer or c Company's risk management system; and	
d. pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko;	d. statement from the Board of Directors and/or Board of Commissioners or audit committee on the adequacy of the risk management system;	
13. perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), paling sedikit memuat:	13. legal cases with material impacts faced by the Issuer or Public Company, subsidiaries, members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners (if any), at least containing:	543-544

Keterangan	Description	Hal Page
a. pokok perkara/gugatan;	a. subject matter/lawsuit;	
b. status penyelesaian perkara/gugatan; dan	b. status of settlement of the case/lawsuit; and	
c. pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik;	c. its impact on the condition of the Issuer or Public Company;	
14. informasi tentang sanksi administratif/sanksi yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada);	14. information on administrative sanctions/sanctions imposed on the Issuer or Public Company, members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, by the Financial Services Authority and other authorities in the fiscal year (if any);	524
15. informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi:	15. information on the code of ethics of the Issuer or Public Company including:	550-556
a. pokok-pokok kode etik;	a. the main points of the code of ethics;	
b. bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan	b. the form of socialization of the code of ethics and efforts to enforce it; and	
c. pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi ggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik;	c. a statement that the code of ethics applies to members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Issuer or Public Company;	
16. uraian singkat mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan yang dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/ESOP);Dalam hal pemberian kompensasi berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (management stockownership program/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/ESOP), informasi yang diungkapkan paling sedikit memuat:	16. a brief description of the policy for providing long-term performance-based compensation to management and/or employees owned by the Issuer or Public Company (if any), including in the form of a management stock ownership program (MSOP) and/or an employee stock ownership program (ESOP); In the case of compensation in the form of a management stock ownership program (MSOP) and/or an employee stock ownership program (ESOP), the information disclosed must at least include:	557
a. jumlah saham dan/atau opsi;	a. the number of shares and/or options;	
b. jangka waktu pelaksanaan;	b. the implementation period;	
c. persyaratan karyawan dan/atau manajemen yangberhak; dan	c. the requirements for employees and/or management who are entitled; and	
d. harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan;	d. the implementation price or determination of the implementation price;	
17. uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan informasi mengenai:	17. a brief description of the policy for disclosing information regarding:	557
a. kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka; dan	a. share ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners no later than 3 (three) working days after the occurrence of ownership or any change in ownership of shares of the Public Company; and	
b. pelaksanaan atas kebijakan dimaksud;	b. implementation of the intended policy;	
18. uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) di Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	18. description of the whistleblowing system in the Issuer or Public Company, at least containing:	
a. cara penyampaian laporan pelanggaran;	a. method of submitting reports of violations;	580
b. perlindungan bagi pelapor;	b. protection for the reporter;	581
c. penanganan pengaduan;	c. handling of complaints;	582
d. pihak yang mengelola pengaduan; dan	d. party managing complaints; and	582

Keterangan	Description	Hal Page
e. hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit:	e. results of handling complaints, at least:	
i) jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan	i) number of complaints received and processed in the fiscal year; and	
ii) tindak lanjut pengaduan;Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system), maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	ii) follow-up to complaints; In the event that the Issuer or Public Company does not have a whistleblowing system, then this matter is disclosed.	584
19. uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	19. description of the anti-corruption policy of the Issuer or Public Company, at least containing:	
a. program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (kickbacks),fraud, suap dan/atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik; dan	a. programs and procedures carried out in overcoming corrupt practices, kickbacks, fraud, bribery and/or gratification in the Issuer or Public Company; and	584-585
b. pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik; Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak dimilikinya kebijakan dimaksud.	b. anti-corruption training/socialization for employees of the Issuer or Public Company; In the event that the Issuer or Public Company does not have an anti-corruption policy, then the reasons for not having the policy are explained.	
20. penerapan atas pedoman tata kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi:	20. implementation of the guidelines for governance of Public Companies for Issuers issuing equity securities or Public Companies, including:	
a. pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau	a. statements regarding recommendations that have been implemented; and/or	348
b. penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternative pelaksanaannya (jika ada). Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuktabel.	b. explanations of recommendations that have not been implemented, accompanied by reasons and alternatives for implementation (if any). Disclosure of information can be presented in tabular form.	353
h. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik | Social and Environmental Responsibility of Issuers or Public Companies		
1. Informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa KeuanganNomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	1. Information disclosed in the social and environmental responsibility section is a Sustainability Report as referred to in Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, which at least contains:	
a. penjelasan strategi keberlanjutan;	a. explanation of sustainability strategy;	Merujuk Kepada Laporan Keberlanjutan WEGE yang disusun secara terpisah
b. ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup);	b. overview of sustainability aspects (economic, social, and environmental);	
c. profil singkat Emiten atau Perusahaan Publik;	c. brief profile of the Issuer or Public Company;	
d. penjelasan Direksi;	d. explanation of the Board of Directors;	
e. tata kelola keberlanjutan;	e. sustainability governance;	
f. kinerja keberlanjutan;	f. sustainability performance;	
g. verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada;	g. written verification from an independent party, if any;	
h. lembar umpan balik (feedback) untuk pembaca, jika ada; dan	h. feedback sheet for readers, if any; and	
i. tanggapan Emiten atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya;	i. response from the Issuer or Public Company to feedback on the previous year's report;	

Keterangan	Description	Hal Page
2. Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1), harus disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;	2. The Sustainability Report as referred to in number 1) must be prepared in accordance with the Technical Guidelines for the Preparation of Sustainability Reports for Issuers and Public Companies as stated in Attachment II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter;	Merujuk Kepada Laporan Keberlanjutan WEGE yang disusun secara terpisah
3. informasi Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) pada angka 1) dapat:	3. Sustainability Report information in number 1) may:	Merujuk Kepada Laporan Keberlanjutan WEGE yang disusun secara terpisah
a. diungkapkan pada bagian lain yang relevan di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti penjelasan Direksi terkait Laporan Keberlanjutan diungkapkan dalam bagian terkait Laporan Direksi;dan/atau	a. be disclosed in other relevant sections outside the social and environmental responsibility section, such as the Board of Directors' explanation regarding the Sustainability Report disclosed in the relevant section of the Board of Directors' Report; and/or	
b. merujuk pada bagian lain di luar bagian tanggungjawab sosial dan lingkungan dengan tetap mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, seperti profil Emiten atau Perusahaan Publik;	b. refer to other sections outside the social and environmental responsibility section while still referring to the Technical Guidelines for the Preparation of Sustainability Reports for Issuers and Public Companies as stated in Attachment II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter, such as the profile of the Issuer or Public Company;	
4. Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan namun dapat disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan;	4. The Sustainability Report as referred to in number 1) is an integral part of the Annual Report but may be presented separately from the Annual Report;	Merujuk Kepada Laporan Keberlanjutan WEGE yang disusun secara terpisah
5. Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan dimaksud harus:	5. In the event that the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, the information disclosed in the Sustainability Report must:	Merujuk Kepada Laporan Keberlanjutan WEGE yang disusun secara terpisah
a. memuat seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1); dan	a. contain all information as referred to in number 1); and	
b. disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;	b. prepared in accordance with the Technical Guidelines for the Preparation of Sustainability Reports for Issuers and Public Companies as stated in Attachment II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular;	
6. Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, maka dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan memuat informasi bahwa informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan; dan	6. In the event that the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, the social and environmental responsibility section contains information that information regarding social and environmental responsibility has been disclosed in the Sustainability Report presented separately from the Annual Report; and	Merujuk Kepada Laporan Keberlanjutan WEGE yang disusun secara terpisah
7. Penyampaian Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) yang disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.	7. Submission of the Sustainability Report presented separately from the Annual Report must be submitted together with the submission of the Annual Report.	Merujuk Kepada Laporan Keberlanjutan WEGE yang disusun secara terpisah

Keterangan	Description	Hal Page
i. Laporan Keuangan Tahunan Yang Telah Di Audit | Audited Annual Financial Report Companies		
Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan keuangan tahunan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai laporan berkala perusahaan efek dalam hal Emiten merupakan perusahaan efek.	The annual financial statements contained in the Annual Report are prepared in accordance with financial accounting standards in Indonesia and have been audited by a public accountant registered with the Financial Services Authority. The annual financial statements include statements regarding accountability for the financial statements as regulated in the Financial Services Authority Regulation regarding the responsibility of the Board of Directors for financial statements or laws and regulations in the capital market sector that regulate periodic reports of securities companies in the case of the Issuer being a securities company.	614
j. Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan | Statement Letter of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners regarding Responsibility for the Annual Report		
Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.	The statement letter of the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners regarding responsibility for the Annual Report is prepared in accordance with the format of the Statement Letter of the Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners regarding Responsibility for the Annual Report as stated in Attachment I which is an integral part of this Circular Letter of the Financial Services Authority.	92-93

Penerapan Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS)

Implementation of Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS)

LEVEL 1

A. Hak dan Perlakuan yang Adil terhadap Pemegang Saham

Bagian ini merupakan gabungan dari Bagian A dan B sebelumnya dari ASEAN Corporate Governance Scorecard tahun 2017.

LEVEL 1

A. Rights and Equitable Treatment of Shareholders

This section is a combination of the previous Parts A and B of the 2017 ASEAN Corporate Governance Scorecard

	Prinsip Principle	
A.1	**Hak Dasar Pemegang Saham** Basic Shareholder Rights	
A.1.1	Apakah perusahaan membayar dividen (interim dan final/tahunan) secara adil dan tepat waktu; yaitu, semua pemegang saham diperlakukan sama dan dibayar dalam waktu 30 hari setelah (i) diumumkan untuk dividen interim dan (ii) disetujui oleh pemegang saham pada rapat umum untuk dividen final? Jika perusahaan telah menawarkan dividen Scrip, apakah perusahaan membayar dividen dalam waktu 60 hari. Does the company pay (interim and final/annual) dividends in an equitable and timely manner; that is, all shareholders are treated equally and paid within 30 days after being (i) declared for interim dividends and (ii) approved by shareholders at general meetings for final dividends? In case the company has offered Scrip dividend, did the company paid the dividend within 60 days.	
A.2	**Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham dan harus diberitahu tentang peraturan, termasuk prosedur pemungutan suara, yang mengatur rapat umum pemegang saham.** Right to participate effectively in and vote in general shareholder meetings and should be informed of the rules, including voting procedures, that govern general shareholder meetings.	
A.2.1	Apakah pemegang saham memiliki kesempatan, dibuktikan dengan agenda rapat, untuk menyetujui remunerasi (biaya, tunjangan, manfaat dalam bentuk barang dan tunjangan lainnya) atau kenaikan remunerasi bagi direktur non-eksekutif/ komisaris? Do shareholders have the opportunity, evidenced by an agenda item, to approve remuneration (fees, allowances, benefit-in-kind and other emoluments) or any increases in remuneration for the non-executive directors/commissioners?	
A.2.2	Apakah perusahaan memberikan hak kepada pemegang saham non-pengendali untuk mencalonkan kandidat untuk dewan direksi/komisaris? Does the company provide non-controlling shareholders a right to nominate candidates for board of directors/ commissioners?	
A.2.3	Apakah perusahaan memperbolehkan pemegang saham untuk memilih direktur/komisaris secara individual? Does the company allow shareholders to elect directors/commissioners individually?	
A.2.4	Apakah perusahaan mengungkapkan prosedur pemungutan suara yang digunakan sebelum dimulainya rapat? Does the company disclose the voting procedures used before the start of meeting?	

Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): II.A. Hak dasar pemegang saham harus mencakup hak untuk: 6) berbagi keuntungan perusahaan. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): II.A. Basic shareholder rights should include the right to: 6) share in the profits of the corporation.	309-310
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): II.C.5. Partisipasi pemegang saham yang efektif dalam keputusan tata kelola perusahaan yang penting, seperti pencalonan dan pemilihan anggota dewan, harus difasilitasi. Pemegang saham harus dapat menyampaikan pandangan mereka, termasuk melalui pemungutan suara pada rapat pemegang saham, mengenai remunerasi anggota dewan dan/atau eksekutif utama, sebagaimana berlaku. Komponen ekuitas dari skema kompensasi untuk anggota dewan dan karyawan harus tunduk pada persetujuan pemegang saham. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): II.C.5. Effective shareholder participation in key corporate governance decisions, such as the nomination and election of board members, should be facilitated. Shareholders should be able to make their views known, including through votes at shareholder meetings, on the remuneration of board members and/or key executives, as applicable. The equity component of compensation schemes for board members and employees should be subject to shareholder approval.	375 378-378 378-379
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): II.C. Pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham, dan harus diberi tahu tentang peraturan, termasuk prosedur pemungutan suara, yang mengatur rapat umum pemegang saham. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): II.C. Shareholders should have the opportunity to participate effectively and vote in general shareholder meetings, and should be informed of the rules, including voting procedures, that govern general shareholder meetings.	367-368

Prinsip Principle	
A.2.5 Apakah risalah Rapat Umum Tahunan terakhir mencatat bahwa para pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham serta jawaban yang diberikan dicatat? Do the minutes of the most recent AGM record that the shareholders were given the opportunity to ask questions and the questions raised by shareholders and answers given recorded?	
A.2.6 Apakah perusahaan mengungkapkan hasil pemungutan suara termasuk suara menyetujui, tidak setuju, dan abstain untuk semua resolusi/setiap agenda Rapat Umum Tahunan terakhir? Does the company disclose the voting results including approving, dissenting, and abstaining votes for all resolutions/each agenda item for the most recent AGM?	

Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
ICGN (2021) PRINSIP 10: 10.4 Tata cara rapat Perusahaan harus menerbitkan tata cara rapat (baik secara langsung, melalui kuasa, atau melalui sarana elektronik virtual) bersamaan dengan penerbitan Pemberitahuan Rapat Umum Tahunan. Hal ini harus mencakup informasi tentang format rapat, pendaftaran, akses, identifikasi peserta, verifikasi kepemilikan saham, opsi pemungutan suara, dan pendekatan untuk mengajukan/ menjawab pertanyaan. Semua hal dalam surat suara harus dipilih melalui pemungutan suara dan pemungutan suara dengan 'mengangkat tangan' tidak diperbolehkan. ICGN (2021) PRINCIPLE 10: 10.4 Meeting procedures Companies should publish meeting procedures (either in person, by proxy or by virtual electronic means) alongside the publication of the AGM Notice. This should include information on the meeting format, registration, access, participant identification, shareholding verification, voting options and the approach to asking/ answering questions. All matters on the ballot should be voted by poll and voting by a 'show of hands' should not be permitted.	
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): II.C.4. Pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada dewan, termasuk mengenai audit eksternal tahunan, untuk menempatkan item pada agenda rapat umum, dan untuk mengusulkan resolusi, dengan batasan yang wajar. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): II.C.4. Shareholders should have the opportunity to ask questions to the board, including on the annual external audit, to place items on the agenda of general meetings, and to propose resolutions, subject to reasonable limitations.	365-396
ICGN (2021) PRINSIP 10: 10.10 Pengungkapan suara Dewan direksi harus memastikan bahwa suara yang diberikan secara langsung atau tidak langsung memiliki pengaruh yang sama dan semua suara harus dihitung dan dicatat dengan benar melalui pemungutan suara. Hasil pemungutan suara, instruksi pemungutan suara (dilaporkan secara terpisah untuk, menentang, atau abstain) dan tingkat pemungutan suara untuk setiap resolusi harus dipublikasikan segera setelah rapat di situs web perusahaan. Jika resolusi yang didukung dewan direksi ditentang oleh sebagian besar suara (misalnya, 20% atau lebih), perusahaan harus menjelaskan selanjutnya tindakan apa yang diambil untuk memahami dan menanggapi kekhawatiran yang menyebabkan pemegang saham memberikan suara menentang rekomendasi dewan direksi. Pada Rapat Umum Tahunan berikutnya, dewan direksi harus melaporkan bagaimana pandangan dari pemegang saham dipertimbangkan untuk mengatasi kekhawatiran tersebut dan tindakan apa pun yang diambil. ICGN (2021) PRINCIPLE 10: 10.10 Vote disclosure The board should ensure that equal effect is given to votes whether cast in person or in absentia and all votes should be properly counted and recorded via ballot. The outcome of the vote, the vote instruction (reported separately for, against or abstain) and voting levels for each resolution should be published promptly after the meeting on the company website. If a board-endorsed resolution has been opposed by a significant proportion of votes (e.g., 20% or more), the company should explain subsequently what actions were taken to understand and respond to the concerns that led shareholders to vote against the board's recommendation. At the following AGM, the board should report how the views from shareholders were considered to address the concern and any actions taken.	365-396

	Prinsip Principle	
A.2.7	Apakah perusahaan mengungkapkan daftar anggota dewan yang hadir pada Rapat Umum Tahunan terakhir? Does the company disclose the list of board members who attended the most recent AGM?	
A.2.8	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa semua anggota dewan dan CEO (jika dia bukan anggota dewan) menghadiri Rapat Umum Tahunan terakhir? Does the company disclose that all board members and the CEO (if he is not a board member) attended the most recent AGM?	
A.2.9	Apakah perusahaan memperbolehkan pemungutan suara secara tidak langsung? Does the company allow voting in absentia?	
A.2.10	Apakah perusahaan memberikan suara melalui jajak pendapat (bukan dengan mengangkat tangan) untuk semua resolusi pada Rapat Umum Tahunan terakhir? Did the company vote by poll (as opposed to by show of hands) for all resolutions at the most recent AGM?	
A.2.11	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa mereka telah menunjuk pihak independen (pemeriksa/inspektur) untuk menghitung dan/atau memvalidasi suara pada Rapat Umum Tahunan? Does the company disclose that it has appointed an independent party (scrutineers/inspectors) to count and/or validate the votes at the AGM?	
A.2.12	Apakah perusahaan mengumumkan kepada publik hasil pemungutan suara yang dilakukan pada Rapat Umum Tahunan/ Rapat Umum Luar Biasa terakhir untuk semua keputusan paling lambat pada hari kerja berikutnya? Does the company make publicly available by the next working day the result of the votes taken during the most recent AGM/ EGM for all resolutions?	
A.2.13	Apakah perusahaan memberikan pemberitahuan setidaknya 21 hari untuk semua Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa? Does the company provide at least 21 days' notice for all AGMs and EGMs?	
A.2.14	Apakah perusahaan menyampaikan dasar pemikiran dan penjelasan setiap mata acara yang memerlukan persetujuan pemegang saham dalam pengumuman RUPS/sirkuler dan/atau pernyataan yang menyertainya? Does the company provide the rationale and explanation for each agenda item which require shareholders' approval in the notice of AGM/circulars and/or the accompanying statement?	
A.2.15	Apakah perusahaan memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk memasukkan item/mata acara dalam agenda rapat umum dan/atau meminta diselenggarakannya rapat umum dengan persentase tertentu? Does the company give the opportunity for shareholders to place item/s on the agenda of general meetings and/or to request for general meetings subject to a certain percentage?	

Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): II.C.4. Pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada dewan, termasuk mengenai audit eksternal tahunan, untuk menempatkan item pada agenda rapat umum, dan untuk mengusulkan resolusi, dengan batasan yang wajar. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): II.C.4. Shareholders should have the opportunity to ask questions to the board, including on the annual external audit, to place items on the agenda of general meetings, and to propose resolutions, subject to reasonable limitations.	372
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): II.C.6. Pemegang saham harus dapat memberikan suara secara langsung atau tidak hadir, dan efek yang sama harus diberikan pada suara yang diberikan baik secara langsung maupun tidak hadir. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): II.C.6. Shareholders should be able to vote in person or in absentia, and equal effect should be given to votes whether cast in person or in absentia.	367
ICGN (2021) PRINSIP 10: 10.9 Pelaksanaan pemungutan suara Dewan direksi harus mengumumkan dengan jelas tanggal di mana pemegang saham harus memberikan instruksi pemungutan suara mereka. Praktik pemblokiran saham atau persyaratan untuk kepemilikan saham jangka panjang harus dihentikan. Perusahaan harus memastikan keakuratan pelacakan dan rekonsiliasi suara awal yang diterima sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan suara langsung yang diberikan selama Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan itu sendiri.	369
ICGN (2021) PRINCIPLE 10: 10.9 Vote execution The board should clearly publicize a date by which shareholders should cast their voting instructions. The practice of share blocking or requirements for lengthy shareholdings should be discontinued. Companies should ensure accuracy of tracking and reconciling any advance votes received pre-AGM with any live votes cast during the AGM itself.	371
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): II.C.1. Pemegang saham harus diberikan informasi yang cukup dan tepat waktu mengenai tanggal, format, lokasi, dan agenda rapat umum, serta informasi yang terperinci dan tepat waktu mengenai isu-isu yang akan diputuskan dalam rapat. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): II.C.1. Shareholders should be furnished with sufficient and timely information concerning the date, format, location and agenda of general meetings, as well as fully detailed and timely information regarding the issues to be decided at the meeting.	369
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): II.C.4. Pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada dewan, termasuk mengenai audit eksternal tahunan, untuk menempatkan item pada agenda rapat umum, dan untuk mengusulkan resolusi, dengan batasan yang wajar. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): II.C.4. Shareholders should have the opportunity to ask questions to the board, including on the annual external audit, to place items on the agenda of general meetings, and to propose resolutions, subject to reasonable limitations.	374

	Prinsip Principle	
A.3	**Pasar untuk pengendalian perusahaan harus dibiarkan berfungsi secara efisien dan transparan.** Markets for corporate control should be allowed to function in an efficient and transparent manner.	
A.3.1	Dalam hal terjadi penggabungan, akuisisi, dan/atau pengambilalihan yang memerlukan persetujuan pemegang saham, apakah direksi/komisaris perusahaan menunjuk pihak independen untuk menilai kewajaran harga transaksi? In cases of mergers, acquisitions and/or takeovers requiring shareholders' approval, does the board of directors/ commissioners of the company appoint an independent party to evaluate the fairness of the transaction price?	
A.4	**Pelaksanaan hak kepemilikan oleh semua pemegang saham, termasuk investor institusional, harus difasilitasi.** The exercise of ownership rights by all shareholders, including institutional investors, should be facilitated.	
A.4.1	Apakah perusahaan mengungkapkan praktiknya untuk mendorong pemegang saham terlibat dengan perusahaan di luar rapat umum? Does the company disclose its practices to encourage shareholders to engage with the company beyond general meetings?	

Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): II.H.1. Aturan dan prosedur yang mengatur perolehan kendali perusahaan di pasar modal, transaksi luar biasa seperti merger, dan penjualan sebagian besar aset perusahaan, harus dijabarkan dan diungkapkan dengan jelas sehingga investor memahami hak dan jalan keluar mereka. Transaksi harus terjadi pada harga yang transparan dan dalam kondisi yang wajar yang melindungi hak semua pemegang saham sesuai dengan golongannya. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): II.H.1. The rules and procedures governing the acquisition of corporate control in capital markets, extraordinary transactions such as mergers, and sales of substantial portions of corporate assets, should be clearly articulated and disclosed so that investors understand their rights and recourse. Transactions should occur at transparent prices and under fair conditions that protect the rights of all shareholders according to their class.	316-326
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): II.D. Pemegang saham, termasuk pemegang saham institusional, harus diizinkan untuk berkonsultasi satu sama lain mengenai isu-isu yang menyangkut hak-hak dasar pemegang saham mereka sebagaimana didefinisikan dalam Prinsip, dengan pengecualian untuk mencegah penyalahgunaan. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): II.D. Shareholders, including institutional shareholders, should be allowed to consult with each other on issues concerning their basic shareholder rights as defined in the Principles, subject to exceptions to prevent abuse. ICGN (2021) PRINSIP 1: 1.4 Dialog Dewan direksi, khususnya ketua, direktur independen utama (atau senior) dan ketua komite, harus terlibat secara konstruktif dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan terkait (terutama tenaga kerja) untuk dialog yang bermakna. Hal ini menyiratkan komunikasi dua arah antara perusahaan dan pemegang saham/pemangku kepentingan dan bukan presentasi sepihak dari satu pihak saja. Dialog tersebut harus mencakup semua hal yang relevan secara material dengan tata kelola, strategi, inovasi, manajemen risiko dan kinerja perusahaan serta kebijakan dan praktik lingkungan dan sosial. ICGN (2021) PRINCIPLE 1: 1.4 Dialogue The board, particularly the chair, lead (or senior) independent director and committee chairs, should constructively engage with shareholders and relevant stakeholders (particularly the workforce) for meaningful dialogue. This infers two-way communication between companies and shareholders/ stakeholders and not a unilateral presentation from just one party. Such dialogue should encompass all matters of material relevance to a company's governance, strategy, innovation, risk management and performance as well as environmental and social policies and practices.	365-396 545-546

	Prinsip Principle	
A.5	**Saham dan hak suara** Shares and voting rights	
A.5.1	Jika perusahaan memiliki lebih dari satu jenis saham, apakah perusahaan mengumumkan hak suara yang melekat pada setiap jenis saham (misalnya melalui situs web perusahaan/laporan/bursa efek/situs web regulator)? Where the company has more than one class of shares, does the company publicize the voting rights attached to each class of shares (e.g. through the company website/reports/the stock exchange/the regulator's website)?	
A.6	**Pemberitahuan Rapat Umum Tahunan** Notice of AGM	
A.6.1	Apakah masing-masing resolusi yang diajukan pada rapat umum tahunan terakhir hanya membahas satu item, yaitu tidak ada penggabungan beberapa item ke dalam resolusi yang sama? Does each of the resolutions tabled at the most recent annual general meeting deal with only one item, i.e., there is no bundling of several items into the same resolution?	
A.6.2	Apakah pemberitahuan perusahaan mengenai Rapat Umum Tahunan/surat edaran terkini diterjemahkan sepenuhnya ke dalam bahasa Inggris dan diterbitkan pada tanggal yang sama dengan versi bahasa lokal? Are the company's notice of the most recent AGM/circulars fully translated into English and published on the same date as the local- language version?	

Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): II.E. Semua pemegang saham dari seri yang sama dalam satu kelas harus diperlakukan sama. Semua investor harus dapat memperoleh informasi tentang hak-hak yang melekat pada semua seri dan kelas saham sebelum mereka membeli. Setiap perubahan dalam hak ekonomi atau hak suara harus tunduk pada persetujuan dari kelas-kelas saham yang terkena dampak negatif. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): II.E. All shareholders of the same series of a class should be treated equally. All investors should be able to obtain information about the rights attached to all series and classes of shares before they purchase. Any changes in economic or voting rights should be subject to approval by those classes of shares which are negatively affected. ICGN (2021) PRINSIP 9: 9.1. Kelas saham Saham biasa atau biasa harus memiliki satu suara untuk setiap saham. Penyimpangan dari standar 'satu saham, satu suara' yang memberikan pemegang saham tertentu kekuasaan atau kendali yang tidak proporsional dengan kepentingan ekonomi mereka harus dihindari atau jika ada kelas seperti itu, harus diungkapkan dan dijelaskan dan mekanisme penghentian harus diberlakukan. Struktur saham kelas ganda harus dicegah, dan jika ada, harus ditinjau dan harus disertai dengan perlindungan ekstra yang sepadan bagi pemegang saham minoritas, terutama jika terjadi tawaran pengambilalihan. Dewan direksi harus mengungkapkan informasi yang cukup tentang atribut material dari semua kelas dan seri saham perusahaan secara tepat waktu. ICGN (2021) PRINCIPLE 9: 9.1. Share classes Ordinary or common shares should feature one vote for each share. Divergence from a 'one-share, one-vote' standard which gives certain shareholders power or control disproportionate to their economic interests should be avoided or in the event of the existence of such classes, they should be disclosed and explained and sunset mechanisms should be put into place. Dual class share structures should be discouraged, and where they are in place kept under review and should be accompanied by commensurate extra protections for minority shareholders, particularly in the event of a takeover bid. The board should disclose sufficient information about the material attributes of all of the company's classes and series of shares on a timely basis.	51
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): II.C. Pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham, dan harus diberi tahu tentang peraturan, termasuk prosedur pemungutan suara, yang mengatur rapat umum pemegang saham. II.C.1. Pemegang saham harus diberikan informasi yang cukup dan tepat waktu mengenai tanggal, format, lokasi, dan agenda rapat umum, serta informasi yang terperinci dan tepat waktu mengenai masalah yang akan diputuskan dalam rapat. II.C.2. Proses, format, dan prosedur untuk rapat umum pemegang saham harus memungkinkan perlakuan yang adil bagi semua pemegang saham. Prosedur perusahaan tidak boleh mempersulit atau membuat pemungutan suara menjadi mahal.	365-396
II.C.5. Partisipasi pemegang saham yang efektif dalam keputusan tata kelola perusahaan yang penting, seperti pencalonan dan pemilihan anggota dewan, harus difasilitasi. II.C.6. Pemegang saham harus dapat memberikan suara secara langsung atau tidak langsung, dan efek yang sama harus diberikan pada suara yang diberikan secara langsung atau tidak langsung.	365-396

Prinsip Principle	
Apakah pemberitahuan Rapat Umum Tahunan/surat edaran memiliki rincian berikut ini: Does the notice of AGM/circulars have the following details:	
A.6.3	Apakah profil direktur/komisaris (setidaknya usia, kualifikasi akademik, tanggal pengangkatan pertama, pengalaman, dan jabatan direktur di perusahaan tercatat lainnya) yang akan dipilih/dipilih kembali disertakan? Are the profiles of directors/commissioners (at least age, academic qualification, date of first appointment, experience, and directorships in other listed companies) in seeking election/re-election included?
A.6.4	Apakah auditor yang mencari pengangkatan/pengangkatan kembali diidentifikasi dengan jelas? Are the auditors seeking appointment/re-appointment clearly identified?
A.6.5	Apakah dokumen proksi dibuat tersedia dengan mudah? Were the proxy documents made easily available?
A.6.1	Apakah masing-masing resolusi yang diajukan pada rapat umum tahunan terakhir hanya membahas satu item, yaitu tidak ada penggabungan beberapa item ke dalam resolusi yang sama? Does each of the resolutions tabled at the most recent annual general meeting deal with only one item, i.e., there is no bundling of several items into the same resolution?
A.6.2	Apakah pemberitahuan perusahaan mengenai Rapat Umum Tahunan/surat edaran terkini diterjemahkan sepenuhnya ke dalam bahasa Inggris dan diterbitkan pada tanggal yang sama dengan versi bahasa lokal? Are the company's notice of the most recent AGM/circulars fully translated into English and published on the same date as the local- language version?
Apakah pemberitahuan Rapat Umum Tahunan/surat edaran memiliki rincian berikut ini: Does the notice of AGM/circulars have the following details:	
A.6.3	Apakah profil direktur/komisaris (setidaknya usia, kualifikasi akademik, tanggal pengangkatan pertama, pengalaman, dan jabatan direktur di perusahaan tercatat lainnya) yang akan dipilih/dipilih kembali disertakan? Are the profiles of directors/commissioners (at least age, academic qualification, date of first appointment, experience, and directorships in other listed companies) in seeking election/re-election included?
A.6.4	Apakah auditor yang mencari pengangkatan/pengangkatan kembali diidentifikasi dengan jelas? Are the auditors seeking appointment/re-appointment clearly identified?
A.6.5	Apakah dokumen proksi dibuat tersedia dengan mudah? Were the proxy documents made easily available?

Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): Shareholders should have the opportunity to participate effectively and vote in general shareholder meetings, and should be informed of the rules, including voting procedures, that govern general shareholder meetings. Shareholders should be furnished with sufficient and timely information concerning the date, format, location and agenda of general meetings, as well as fully detailed and timely information regarding the issues to be decided at the meeting. Processes, format and procedures for general shareholder meetings should allow for equitable treatment of all shareholders. Company procedures should not make it unduly difficult or expensive to cast votes. II.C.5. Effective shareholder participation in key corporate governance decisions, such as the nomination and election of board members, should be facilitated. II.C.6. Shareholders should be able to vote in person or in absentia, and equal effect should be given to votes whether cast in person or in absentia.	365-396
ICGN (2021) PRINSIP 3: Komposisi dan pengangkatan Dewan direksi harus terdiri dari campuran direktur yang memadai dengan pengetahuan, independensi, kompetensi, pengalaman industri, dan keberagaman perspektif yang relevan untuk menghasilkan tantangan, diskusi, dan pengambilan keputusan yang efektif dan objektif yang sejalan dengan tujuan perusahaan, strategi jangka panjang, dan pemangku kepentingan yang relevan. 3.7 Proses pemilihan direktur Direktur harus dipilih menjadi anggota dewan direksi, sebaiknya setiap tahun, atau dipilih setiap tiga tahun sekali, dan bertanggung jawab kepada pemegang saham dengan persetujuan mayoritas saham yang memberikan suara mendukung pada setiap resolusi. Dewan direksi harus mengungkapkan proses pemilihan/pemilihan ulang direktur beserta informasi tentang kandidat dewan direksi yang meliputi: a) identitas anggota dewan direksi dan alasan pengangkatan; b) kompetensi inti, kualifikasi, dan latar belakang profesional; c) mandat dewan direksi dan manajemen terkini di perusahaan lain, serta peran penting di organisasi nirlaba/amal; d) faktor yang memengaruhi independensi, termasuk hubungan dengan pemegang saham pengendali; e) lamanya masa jabatan; g) kepemilikan saham apa pun di perusahaan. 9.2 Keputusan-keputusan utama Dewan direksi harus memastikan bahwa pemegang saham memiliki hak untuk memberikan suara pada keputusan-keputusan utama yang dapat mengubah sifat perusahaan tempat mereka berinvestasi. Hak-hak tersebut harus dijelaskan secara jelas dalam dokumen tata kelola perusahaan dan mencakup: a) mengangkat atau memberhentikan seorang direktur, dengan atau tanpa alasan, berdasarkan suara terbanyak yang diberikan; ICGN (2021) PRINCIPLE 3: Composition and appointment The Board should comprise a sufficient mix of directors with relevant knowledge, independence, competence, industry experience and diversity of perspectives to generate effective challenge, discussion and objective decision-making in alignment with the company's purpose, long-term strategy and relevant stakeholders. 3.7 Director election process Directors should be elected to the board preferably on an annual basis, or stand for election once every three years, and be accountable to shareholders by approval of a majority of shares voted in favor on each resolution. Boards should disclose the process for director election / re-election along with information about board candidates which includes: board member identities and rationale for appointment; core competencies, qualifications, and professional background; recent and current board and management mandates at other companies, as well as significant roles on non-profit/charitable organizations; factors affecting independence, including relationship/s with controlling shareholders; length of tenure; g) any shareholdings in the company. 9.2 Major decisions The board should ensure that shareholders have the right to vote on major decisions which may change the nature of the company in which they have invested. Such rights should be clearly described in the company's governing documents and include: a) appoint or remove a director, with or without cause, by a majority of votes cast;	365-396

	Prinsip Principle	
A.7	**Perdagangan orang dalam dan praktik jual-beli kepentingan pribadi yang merugikan harus dilarang.** Insider trading and abusive self-dealing should be prohibited.	
A.7.1	Apakah direktur/komisaris diharuskan melaporkan transaksi mereka dalam saham perusahaan dalam waktu 3 hari kerja? Are the directors/commissioners required to report their dealings in company shares within 3 business days?	
A.8	**Transaksi pihak berelasi oleh direktur dan eksekutif kunci.** Related party transactions by directors and key executives.	
A.8.1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mengharuskan suatu komite direktur/komisaris independen untuk meninjau RPT material guna menentukan apakah RPT tersebut sesuai dengan kepentingan terbaik perusahaan dan pemegang saham? Does the company have a policy requiring a committee of independent directors/commissioners to review material RPTs to determine whether they are in the best interests of the company and shareholders?	
A.8.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mengharuskan anggota dewan (direktur/komisaris) untuk abstain dari berpartisipasi dalam diskusi dewan mengenai agenda tertentu ketika mereka sedang berkonflik? Does the company have a policy requiring board members (directors/commissioners) to abstain from participating in the board discussion on a particular agenda when they are conflicted?	
A.8.3	Apakah perusahaan memiliki kebijakan mengenai pinjaman kepada direktur dan komisaris yang melarang praktik ini atau memastikan bahwa pinjaman tersebut dilakukan secara wajar dan pada suku bunga pasar? Does the company have policies on loans to directors and commissioners either forbidding this practice or ensuring that they are being conducted at arm's length basis and at market rates?	

Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023) III.E. Perdagangan orang dalam dan manipulasi pasar harus dilarang dan aturan yang berlaku harus ditegakkan. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023) III.E. Insider trading and market manipulation should be prohibited and the applicable rules enforced. ICGN (2021) PRINSIP 4: 4.4 Transaksi saham oleh karyawan Dewan direksi harus mengembangkan aturan yang jelas mengenai perdagangan apa pun oleh direktur dan karyawan dalam sekuritas milik perusahaan. Individu tidak boleh memperoleh keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari pengetahuan yang tidak tersedia secara umum di pasar. ICGN (2021) PRINCIPLE 4: 4.4 Employee share dealing The board should develop clear rules regarding any trading by directors and employees in the company's own securities. Individuals should not benefit directly or indirectly from knowledge which is not generally available to the market.	595
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): II.F. Transaksi dengan pihak terkait harus disetujui dan dilakukan dengan cara yang memastikan pengelolaan konflik kepentingan yang tepat dan melindungi kepentingan perusahaan dan pemegang sahamnya. II.F.1. Konflik kepentingan yang melekat dalam transaksi dengan pihak terkait harus ditangani. II.F.2. Anggota dewan dan eksekutif utama harus diminta untuk mengungkapkan kepada dewan apakah mereka, secara langsung, tidak langsung atau atas nama pihak ketiga, memiliki kepentingan material dalam setiap transaksi atau masalah yang secara langsung memengaruhi perusahaan. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): Related party transactions should be approved and conducted in a manner that ensures proper management of conflicts of interest and protects the interests of the company and its shareholders. Conflicts of interest inherent in related party transactions should be addressed. Members of the board and key executives should be required to disclose to the board whether they, directly, indirectly or on behalf of third parties, have a material interest in any transaction or matter directly affecting the corporation.	403 dan 465
ICGN (2021) PRINSIP 9: 9.3 Konflik kepentingan Dewan direksi harus memastikan bahwa kebijakan dan prosedur mengenai konflik kepentingan ditetapkan, dipahami, dan dilaksanakan oleh direktur, manajemen, pekerja, dan pihak terkait lainnya, termasuk anggota kelompok usaha terkait. Jika seorang direktur memiliki kepentingan dalam suatu masalah yang sedang dipertimbangkan oleh dewan direksi, maka direktur tersebut harus segera menyatakan kepentingan tersebut dan dilarang memberikan suara pada masalah tersebut atau memberikan pengaruh. Penggunaan perjanjian hubungan dengan pemegang saham pengendali didorong untuk memastikan bahwa konflik kepentingan yang nyata atau potensial dapat dihindari atau dikurangi dan harus memastikan bahwa transaksi yang melibatkan pihak yang berkonflik akan didasarkan pada ketentuan pasar yang lazim. ICGN (2021) PRINCIPLE 9: 9.3 Conflicts of interest The board should ensure that policies and procedures on conflicts of interest are established, understood and implemented by directors, management, workers and other relevant parties, including members of related business groups. If a director has an interest in a matter under consideration by the board, then the director should promptly declare such an interest and be precluded from voting on the subject or exerting influence. The use of relationship agreements with controlling shareholders are encouraged to ensure that real or potential conflicts of interest are avoided or mitigated and should confirm that transactions involving conflicted parties will be based on customary market terms.	Board Manual Dewan Komisaris dan Direksi mengatur ketentuan ini.

Prinsip Principle	
A.9	**Melindungi pemegang saham minoritas dari tindakan yang merugikan** Protecting minority shareholders from abusive actions
A.9.1	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa RPT dilakukan sedemikian rupa untuk memastikan bahwa RPT tersebut adil dan tidak melanggar prinsip kewajaran? Does the company disclose that RPTs are conducted in such a way to ensure that they are fair and at arms' length?

Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
9.4 Transaksi pihak terkait Dewan direksi harus mengembangkan, mengadopsi, dan mengungkapkan Kebijakan Transaksi Pihak Terkait (RPT) dan memiliki proses yang kuat untuk menyetujui, meninjau, dan memantau RPT dan setiap konflik kepentingan yang melekat. Ini termasuk membentuk komite direktur independen, baik sebagai komite terpisah, atau komite yang sudah ada yang terdiri dari direktur independen, misalnya komite audit. Komite harus meninjau transaksi pihak terkait yang signifikan untuk menentukan apakah transaksi tersebut merupakan kepentingan terbaik perusahaan dan, jika demikian, untuk menentukan ketentuan apa yang adil dan wajar. Kesimpulan dari pertimbangan komite tentang transaksi pihak terkait yang signifikan harus diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan kepada pemegang saham. 9.4 Related party transactions The board should develop, adopt and disclose a related party transactions (RPT) Policy and have a robust process for approving, reviewing and monitoring RPTs and any inherent conflicts of interest. This includes establishing a committee of independent directors, either as a separate committee, or an existing committee comprised of independent directors, for example the audit committee. The committee should review significant related party transactions to determine whether they are in the best interests of the company and, if so, to determine what terms are fair and reasonable. The conclusion of committee deliberations on significant related party transactions should be disclosed in the company's annual report to shareholders.	
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): II.E. Semua pemegang saham dari seri yang sama dalam satu kelas harus diperlakukan sama. Semua investor harus dapat memperoleh informasi tentang hak-hak yang melekat pada semua seri dan kelas saham sebelum mereka membeli. Setiap perubahan dalam hak ekonomi atau hak suara harus tunduk pada persetujuan dari kelas-kelas saham yang terkena dampak negatif. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): II.E. All shareholders of the same series of a class should be treated equally. All investors should be able to obtain information about the rights attached to all series and classes of shares before they purchase. Any changes in economic or voting rights should be subject to approval by those classes of shares which are negatively affected. II.F. Transaksi dengan pihak terkait harus disetujui dan dilakukan dengan cara yang memastikan pengelolaan konflik kepentingan yang tepat dan melindungi kepentingan perusahaan dan pemegang sahamnya. II.G. Pemegang saham minoritas harus dilindungi dari tindakan penyalahgunaan oleh, atau demi kepentingan, pemegang saham pengendali yang bertindak baik secara langsung maupun tidak langsung, dan harus memiliki sarana pemulihan yang efektif. Tindakan penyalahgunaan terhadap diri sendiri harus dilarang. II.F. Related party transactions should be approved and conducted in a manner that ensures proper management of conflicts of interest and protects the interests of the company and its shareholders. II.G. Minority shareholders should be protected from abusive actions by, or in the interest of, controlling shareholders acting either directly or indirectly, and should have effective means of redress. Abusive self-dealing should be prohibited.	316 - 326

Prinsip Principle	

A.9.2	Dalam hal transaksi pihak terkait yang memerlukan persetujuan pemegang saham, apakah keputusan diambil oleh pemegang saham yang tidak berkepentingan? In case of related party transactions requiring shareholders' approval, is the decision made by disinterested shareholders?	

Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
ICGN (2021) PRINSIP 9: 9.3 Konflik kepentingan Dewan direksi harus memastikan bahwa kebijakan dan prosedur mengenai konflik kepentingan ditetapkan, dipahami, dan dilaksanakan oleh direktur, manajemen, pekerja, dan pihak terkait lainnya, termasuk anggota kelompok usaha terkait. Jika seorang direktur memiliki kepentingan dalam suatu masalah yang sedang dipertimbangkan oleh dewan direksi, maka direktur tersebut harus segera menyatakan kepentingan tersebut dan dilarang memberikan suara pada masalah tersebut atau memberikan pengaruh. Penggunaan perjanjian hubungan dengan pemegang saham pengendali didorong untuk memastikan bahwa konflik kepentingan yang nyata atau potensial dapat dihindari atau dikurangi dan harus memastikan bahwa transaksi yang melibatkan pihak yang berkonflik akan didasarkan pada ketentuan pasar yang lazim. ICGN (2021) PRINCIPLE 9: 9.3 Conflicts of interest The board should ensure that policies and procedures on conflicts of interest are established, understood and implemented by directors, management, workers and other relevant parties, including members of related business groups. If a director has an interest in a matter under consideration by the board, then the director should promptly declare such an interest and be precluded from voting on the subject or exerting influence. The use of relationship agreements with controlling shareholders are encouraged to ensure that real or potential conflicts of interest are avoided or mitigated and should confirm that transactions involving conflicted parties will be based on customary market terms. 9.4 Transaksi pihak terkait Dewan direksi harus mengembangkan, mengadopsi, dan mengungkapkan Kebijakan Transaksi Pihak Terkait (RPT) dan memiliki proses yang kuat untuk menyetujui, meninjau, dan memantau RPT dan setiap konflik kepentingan yang melekat. Ini termasuk membentuk komite direktur independen, baik sebagai komite terpisah, atau komite yang sudah ada yang terdiri dari direktur independen, misalnya komite audit. Komite harus meninjau transaksi pihak terkait yang signifikan untuk menentukan apakah transaksi tersebut merupakan kepentingan terbaik perusahaan dan, jika demikian, untuk menentukan ketentuan apa yang adil dan wajar. Kesimpulan dari pertimbangan komite tentang transaksi pihak terkait yang signifikan harus diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan kepada pemegang saham. 9.4 Related party transactions The board should develop, adopt and disclose a related party transactions (RPT) Policy and have a robust process for approving, reviewing and monitoring RPTs and any inherent conflicts of interest. This includes establishing a committee of independent directors, either as a separate committee, or an existing committee comprised of independent directors, for example the audit committee. The committee should review significant related party transactions to determine whether they are in the best interests of the company and, if so, to determine what terms are fair and reasonable. The conclusion of committee deliberations on significant related party transactions should be disclosed in the company's annual report to shareholders.	
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): II.G. Pemegang saham minoritas harus dilindungi dari tindakan penyalahgunaan oleh, atau demi kepentingan, pemegang saham pengendali yang bertindak baik secara langsung maupun tidak langsung, dan harus memiliki sarana pemulihan yang efektif. Tindakan penyalahgunaan terhadap diri sendiri harus dilarang. ICGN (2021) PRINSIP 9: 9.5 Persetujuan pemegang saham atas RPT Pemegang saham harus memiliki hak untuk menyetujui RPT yang signifikan di atas ambang materialitas yang sesuai, dan ini harus didasarkan pada persetujuan mayoritas pemegang saham yang tidak memihak. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): II.G. Minority shareholders should be protected from abusive actions by, or in the interest of, controlling shareholders acting either directly or indirectly, and should have effective means of redress. Abusive self-dealing should be prohibited. ICGN (2021) PRINCIPLE 9: 9.5 Shareholder approval of RPTs Shareholders should have the right to approve significant RPTs above an appropriate materiality threshold, and this should be based on the approval of a majority of disinterested shareholders.	316-326

Prinsip Principle	

B. Keberlanjutan dan Ketahanan

B. Sustainability and Resilience

Prinsip Principle	
B.1	**Pengungkapan yang terkait dengan keberlanjutan harus konsisten, sebanding, dan dapat diandalkan, serta mencakup informasi material retrospektif dan berwawasan ke depan yang akan dianggap penting oleh investor yang wajar dalam membuat keputusan investasi atau pemungutan suara.** Sustainability-related disclosure should be consistent, comparable and reliable, and include retrospective and forward-looking material information that a reasonable investor would consider important in making an investment or voting decision
Informasi terkait Keberlanjutan Material harus ditentukan Material Sustainability-related information should be specified	
B.1.1	Apakah perusahaan mengidentifikasi/melaporkan topik ESG yang material terhadap strategi organisasi? Does the company identify/report ESG topics that are material to the organization's strategy?

Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
9.7 Kesetaraan dan ganti rugi Dewan direksi harus memastikan bahwa pemegang saham dari seri atau kelas yang sama diperlakukan sama dan diberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan atau penyelewengan modal yang mereka berikan karena perilaku dewan direksi perusahaan, manajemennya, atau pemegang saham pengendali, termasuk manipulasi pasar, informasi palsu atau menyesatkan, kelalaian material, dan perdagangan orang dalam. Pemegang saham minoritas harus dilindungi dari tindakan penyalahgunaan oleh, atau demi kepentingan, pemegang saham pengendali yang bertindak baik secara langsung maupun tidak langsung, dan harus memiliki sarana ganti rugi yang efektif. Pemulihan dan aturan prosedural yang tepat harus ditetapkan untuk membuat perlindungan efektif dan terjangkau. Jika pemulihan hukum nasional tidak diberikan, dewan direksi didorong untuk memastikan bahwa perlindungan pemegang saham yang memadai diberikan dalam anggaran dasar perusahaan. 9.7 Equality and redress The board should ensure that shareholders of the same series or class are treated equally and afforded protection against misuse or misappropriation of the capital they provide due to conduct by the company's board, its management or controlling shareholder, including market manipulation, false or misleading information, material omissions and insider trading. Minority shareholders should be protected from abusive actions by, or in the interest of, controlling shareholders acting either directly or indirectly, and should have effective means of redress. Proper remedies and procedural rules should be put in place to make the protection effective and affordable. Where national legal remedies are not afforded the board is encouraged to ensure that sufficient shareholder protections are provided in the company's bylaws.	

Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): VI.A.1. Informasi terkait keberlanjutan dapat dianggap material jika informasi tersebut dapat secara wajar diharapkan memengaruhi penilaian investor terhadap nilai, investasi, atau keputusan pemungutan suara perusahaan. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): VI.A.1. Sustainability-related information could be considered material if it can reasonably be expected to influence an investor's assessment of a company's value, investment or voting decisions.	Merujuk pada Laporan Keberlanjutan yang disusun secara terpisah dari Laporan Tahunan ini

Prinsip Principle	

B.1.2	Apakah perusahaan mengidentifikasi perubahan iklim sebagai masalah? Does the company identify climate change as an issue?

B.1.3	Apakah perusahaan mengadopsi kerangka pelaporan atau standar keberlanjutan yang diakui secara internasional (yaitu GRI, Pelaporan Terpadu, SASB, Standar Pengungkapan Keberlanjutan IFRS)? Does the company adopt an internationally recognized reporting framework or standard for sustainability (i.e. GRI, Integrated Reporting, SASB, IFRS Sustainability Disclosure Standards)?

Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
ICGN (2021) PRINSIP 7: 7.7 Materialitas dan keberlanjutan Pengungkapan keberlanjutan harus berfokus pada faktor-faktor yang relevan secara material, dengan banyak faktor lingkungan dan sosial yang bersifat khusus untuk setiap sektor, yang terkait dengan pengelolaan perusahaan atas modal alam dan manusianya. Jika memungkinkan, pelaporan terkait keberlanjutan juga harus berupaya mengatasi "materialitas ganda", untuk pelaporan tentang dampak eksternal perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan, serta dampak internal terhadap kinerja keuangan perusahaan itu sendiri. Selain itu, dewan direksi harus membangun kesadaran akan "materialitas dinamis", dengan menyadari bahwa materialitas berkembang seiring waktu seiring dengan faktor-faktor seperti teknologi yang sedang berkembang, inovasi produk, dan perkembangan peraturan. ICGN (2021) PRINCIPLE 7: 7.7 Materiality and sustainability Sustainability disclosures should focus on materially relevant factors, with many environmental and social factors being sector specific, linked to the company's management of its natural and human capital. Where possible, sustainability related reporting should also seek to address "double materiality", for reporting on the company's external impacts on society and the environment, as well as internal impacts on the company's own financial performance. Moreover, boards should build an awareness of "dynamic materiality", recognizing that materiality evolves over time alongside factors including emerging technology, product innovation and regulatory developments.	
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): VI Investor semakin mempertimbangkan pengungkapan tentang bagaimana perusahaan menilai, mengidentifikasi, dan mengelola perubahan iklim yang material serta risiko dan peluang keberlanjutan lainnya, termasuk untuk manajemen sumber daya manusia. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): VI Investors are increasingly considering disclosures about how companies assess, identify and manage material climate change and other sustainability risks and opportunities, including for human capital management. ICGN (2021) PRINSIP 7: 7.5 Perubahan iklim Dewan direksi harus menilai dampak perubahan iklim terhadap model bisnis perusahaan dan bagaimana model tersebut akan disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi nol emisi sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Hal ini mencakup penetapan dan pengungkapan target untuk mengurangi emisi karbon dan periode pencapaian. Jika risiko perubahan iklim, baik fisik maupun transisi, diidentifikasi sebagai material dan relevan, pelaporan harus mencakup pembahasan tentang proses uji tuntas, strategi, metrik, target, dan inisiatif yang digunakan untuk mengelola risiko. Pengungkapan seputar tindakan ini akan membantu investor memahami ketahanan perusahaan yang menghadapi risiko perubahan iklim dan menilai kemajuan dalam mencapai target nol emisi. ICGN (2021) PRINCIPLE 7: 7.5 Climate change The board should assess the impact of climate change on the company business model and how it will be adapted to meet the needs of a net zero economy as part of a long-term strategy. This includes setting and disclosing targets to reduce carbon emissions and a period for achievement. Where climate change risks, whether physical or transitional, are identified as material and relevant, reporting should include discussion of the diligence process, strategy, metrics, targets and initiatives used to manage the risks. Disclosure around these actions would help investors understand the resilience of companies facing climate change risks and to assess progress towards achieving net zero targets.	Merujuk pada Laporan Keberlanjutan yang disusun secara terpisah dari Laporan Tahunan ini
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): VI.A.3. Pengungkapan masalah keberlanjutan, pelaporan keuangan, dan informasi lainnya harus saling terkait. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): VI.A.3. Disclosure of sustainability matters, financial reporting and other information should be connected.	Merujuk pada Laporan Keberlanjutan yang disusun secara terpisah dari Laporan Tahunan ini

Prinsip Principle	

Jika sebuah perusahaan menetapkan tujuan atau target terkait keberlanjutan secara publik, kerangka pengungkapan harus memastikan bahwa metrik yang a
If a company publicly sets a sustainability-related goal or target, the disclosure framework should provide that reliable metrics are regularly disclosed in an easi

B.1.4 Apakah perusahaan mengungkapkan target keberlanjutan kuantitatif?
Does the company disclose quantitative sustainability target?

B.1.5 Apakah perusahaan mengungkapkan kemajuan kinerja terkait keberlanjutan dalam kaitannya dengan target yang ditetapkan sebelumnya?
Does the company disclose sustainability-related performance progress in relation to its previously set targets?

	Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
	Kerangka kerja pengungkapan perusahaan, termasuk standar pelaporan keuangan dan persyaratan pelaporan peraturan (misalnya prospektus penawaran umum), harus memiliki tujuan yang sama untuk menyediakan informasi yang dianggap penting oleh investor yang wajar dalam membuat keputusan investasi dan pemungutan suara. Oleh karena itu, informasi yang dipahami sebagai material dalam laporan terkait keberlanjutan juga harus dipertimbangkan dan dinilai dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Tingkat ketelitian yang sama yang diterapkan pada pengukuran dan pelaporan informasi keuangan harus diterapkan pada pengukuran dan pelaporan informasi terkait keberlanjutan. Corporate disclosure frameworks, including financial reporting standards and regulatory filing requirements (e.g. public offering prospectuses), should have the same goal of providing information that a reasonable investor would consider important in making an investment and voting decision. It follows that information understood as material in a sustainability-related report should also be considered and assessed in the preparation and presentation of the financial statements. The same level of rigor applied to the measurement and reporting of financial information should be applied to the measurement and reporting of sustainability-related information.	
ndal diungkapkan secara berkala dalam bentuk yang mudah diakses. ly accessible form		
	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): VI.A.4. Jika perusahaan menetapkan tujuan atau target terkait keberlanjutan secara publik, kerangka pengungkapan harus memastikan bahwa metrik yang andal diungkapkan secara berkala dalam bentuk yang mudah diakses untuk memungkinkan investor menilai kredibilitas dan kemajuan dalam mencapai tujuan atau target yang diumumkan. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): VI.A.4. If a company publicly sets a sustainability-related goal or target, the disclosure framework should provide that reliable metrics are regularly disclosed in an easily accessible form to allow investors to assess the credibility and progress toward meeting the announced goal or target.	Merujuk pada Laporan Keberlanjutan yang disusun secara terpisah dari Laporan Tahunan ini
	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): VI.A.4. Jika perusahaan menetapkan tujuan atau target terkait keberlanjutan secara publik, kerangka pengungkapan harus memastikan bahwa metrik yang dapat diverifikasi diungkapkan untuk memungkinkan investor menilai kredibilitas dan kemajuan dalam mencapai tujuan atau target yang diumumkan. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): VI.A.4. If a company publicly sets a sustainability-related goal or target, the disclosure framework should ensure that verifiable metrics are disclosed to allow investors to assess the credibility and progress toward meeting the announced goal or target. ICGN (2021) PRINSIP 7: 7.4 Laporan keberlanjutan Dewan direksi harus menyediakan pelaporan keberlanjutan untuk mencerminkan kompleksitas yang melekat dalam bisnis kontemporer dengan memadukan pertimbangan modal finansial, manusia, dan alam dalam konteks arah strategis perusahaan saat ini dan masa depan. Pengungkapan tersebut harus: a. menempatkan kinerja historis dalam konteks, dan menggambarkan risiko, peluang, dan prospek perusahaan di masa depan; b. menjelaskan indikator kinerja utama untuk mengukur kemajuan dalam mencapai target terkait keberlanjutan; ICGN (2021) PRINCIPLE 7: 7.4 Sustainability reports The board should provide sustainability reporting to reflect the complexities inherent in a contemporary business by blending financial, human and natural capital considerations in the context of a company's current and future strategic direction. Such disclosures should: a. put historical performance into context, and portray the risks, opportunities and prospects for the company in the future; b. explains key performance indicators to measure progress towards achieving sustainability related targets;	Merujuk pada Laporan Keberlanjutan yang disusun secara terpisah dari Laporan Tahunan ini

Prinsip Principle	
B.1.6	Apakah perusahaan mengonfirmasi bahwa Laporan/Pelaporan Keberlanjutannya ditinjau dan/atau disetujui oleh Dewan atau Komite Dewan? Does the company confirm that its Sustainability Report/Reporting is reviewed and /or approved by the Board or Board Committee?
B.2	**Kerangka tata kelola perusahaan harus memungkinkan terjadinya dialog antara perusahaan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan untuk bertukar pandangan tentang masalah keberlanjutan.** Corporate governance frameworks should allow for dialogue between a company, its shareholders and stakeholders to exchange views on sustainability matters
B.2.1	Apakah perusahaan melibatkan pemangku kepentingan internal untuk bertukar pandangan dan mengumpulkan umpan balik tentang masalah keberlanjutan yang penting bagi bisnis perusahaan? Does the company engage internal stakeholders to exchange views and gather feedback on sustainability matters that are material to the business of the company?

Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): VI.A.3. Pengungkapan masalah keberlanjutan, pelaporan keuangan, dan informasi lainnya harus saling terkait. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): VI.A.3. Disclosure of sustainability matters, financial reporting and other information should be connected. Kerangka kerja pengungkapan perusahaan, termasuk standar pelaporan keuangan dan persyaratan pelaporan peraturan (misalnya prospektus penawaran umum), harus memiliki tujuan yang sama untuk menyediakan informasi yang dianggap penting oleh investor yang wajar dalam membuat keputusan investasi dan pemungutan suara. Oleh karena itu, informasi yang dipahami sebagai material dalam laporan terkait keberlanjutan juga harus dipertimbangkan dan dinilai dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Tingkat ketelitian yang sama yang diterapkan pada pengukuran dan pelaporan informasi keuangan harus diterapkan pada pengukuran dan pelaporan informasi terkait keberlanjutan. Corporate disclosure frameworks, including financial reporting standards and regulatory filing requirements (e.g. public offering prospectuses), should have the same goal of providing information that a reasonable investor would consider important in making an investment and voting decision. It follows that information understood as material in a sustainability-related report should also be considered and assessed in the preparation and presentation of the financial statements. The same level of rigor applied to the measurement and reporting of financial information should be applied to the measurement and reporting of sustainability-related information.	Merujuk pada Laporan Keberlanjutan yang disusun secara terpisah dari Laporan Tahunan ini
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): VI.A.1: Penentuan informasi mana yang material dapat berubah dari waktu ke waktu, dan sesuai dengan konteks lokal, keadaan khusus perusahaan, dan persyaratan yurisdiksi. Penilaian informasi material juga dapat mempertimbangkan masalah keberlanjutan yang penting bagi tenaga kerja perusahaan dan pemangku kepentingan utama lainnya. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): VI.A.1: The determination of which information is material may vary over time, and according to the local context, company-specific circumstances, and jurisdictional requirements. The assessment of material information may also consider sustainability matters that are critical to a company's workforce and other key stakeholders. Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): VI.B: Kerangka tata kelola perusahaan harus memungkinkan terjadinya dialog antara perusahaan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan untuk bertukar pandangan tentang masalah keberlanjutan yang relevan bagi strategi bisnis perusahaan dan penilaiannya tentang masalah apa yang harus dianggap material. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): VI.B: Corporate governance frameworks should allow for dialogue between a company, its shareholders and stakeholders to exchange views on sustainability matters as relevant for the company's business strategy and its assessment of what matters ought to be considered material.	Merujuk pada Laporan Keberlanjutan yang disusun secara terpisah dari Laporan Tahunan ini

Prinsip Principle	
B.2.2 Apakah perusahaan melibatkan pemangku kepentingan eksternal untuk bertukar pandangan dan mengumpulkan umpan balik tentang masalah keberlanjutan yang penting bagi bisnis perusahaan? Does the company engage external stakeholders to exchange views and gather feedback on sustainability matters that are material to the business of the company?	
B.3 Kerangka tata kelola perusahaan harus memastikan bahwa dewan direksi mempertimbangkan risiko dan peluang keberlanjutan yang material secara memadai ketika menjalankan fungsi utama mereka dalam meninjau, memantau, dan membimbing praktik tata kelola, pengungkapan, strategi, manajemen risiko, dan sistem pengendalian internal, termasuk yang berkaitan dengan risiko fisik dan transisi yang terkait dengan iklim. The corporate governance framework should ensure that boards adequately consider material sustainability risks and opportunities when fulfilling their key functions in reviewing, monitoring and guiding governance practices, disclosure, strategy, risk management and internal control systems, including with respect to climate- related physical and transition risks	
Dewan direksi harus menilai apakah struktur modal perusahaan sesuai dengan tujuan strategis dan selera risiko yang terkait untuk memastikan ketahanan pe Boards should assess whether the company's capital structure is compatible with its strategic goals and its associated risk appetite to ensure it is resilient to di	
B.3.1 Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa dewan meninjau setiap tahun bahwa struktur modal dan utang perusahaan sesuai dengan tujuan strategis dan selera risiko terkait? Does the company disclose that the board reviews on an annual basis that the company's capital and debt structure is compatible with its strategic goals and its associated risk appetite?	

Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): VI.A.1: Informasi terkait keberlanjutan dapat dianggap material jika informasi tersebut dapat secara wajar diharapkan memengaruhi penilaian investor terhadap nilai, investasi, atau keputusan pemungutan suara suatu perusahaan. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): VI.A.1: Sustainability-related information could be considered material if it can reasonably be expected to influence an investor's assessment of a company's value, investment or voting decisions. Penentuan informasi yang mana material dapat berubah dari waktu ke waktu, dan sesuai dengan konteks lokal, keadaan khusus perusahaan, dan persyaratan yurisdiksi. Penilaian informasi material juga dapat mempertimbangkan masalah keberlanjutan yang penting bagi tenaga kerja perusahaan dan pemangku kepentingan utama lainnya. The determination of which information is material may vary over time, and according to the local context, company-specific circumstances, and jurisdictional requirements. The assessment of material information may also consider sustainability matters that are critical to a company's workforce and other key stakeholders. Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): VI.B: Kerangka tata kelola perusahaan harus memungkinkan terjadinya dialog antara perusahaan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan untuk bertukar pandangan tentang masalah keberlanjutan yang relevan bagi strategi bisnis perusahaan dan penilaiannya tentang masalah apa yang harus dianggap material. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): VI.B: Corporate governance frameworks should allow for dialogue between a company, its shareholders and stakeholders to exchange views on sustainability matters as relevant for the company's business strategy and its assessment of what matters ought to be considered material.	Merujuk pada Laporan Keberlanjutan yang disusun secara terpisah dari Laporan Tahunan ini
erusahaan terhadap berbagai skenario. ifferent scenarios	
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): VI.C.2. Dewan direksi harus menilai apakah struktur modal perusahaan sesuai dengan tujuan strategis dan selera risiko terkait untuk memastikan ketahanan perusahaan terhadap berbagai skenario. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): VI.C.2. Boards should assess whether the company's capital structure is compatible with its strategic goals and its associated risk appetite to ensure it is resilient to different scenarios. Manajemen dan anggota dewan direksi merupakan pihak yang paling tepat untuk memutuskan apakah struktur modal suatu perusahaan sesuai dengan tujuan strategis dan selera risiko terkait, dalam batasan yang ditetapkan oleh pemegang saham. Untuk memastikan kesehatan keuangan perusahaan, dewan direksi harus memantau struktur modal dan kecukupan modal dengan mempertimbangkan berbagai skenario, termasuk skenario dengan probabilitas rendah tetapi berdampak tinggi. The management and board members are best placed to decide if the capital structure of a company is compatible with the strategic goals and its associated risk appetite, within existing restrictions established by shareholders. In order to ensure the company's financial soundness, the board should monitor the capital structure and capital sufficiency with due consideration to different scenarios, including those with low probability but high impact.	Merujuk pada Laporan Keberlanjutan yang disusun secara terpisah dari Laporan Tahunan ini

	Prinsip Principle	
B.4	**Kerangka tata kelola perusahaan harus mengakui hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh undang-undang atau melalui kesepakatan bersama dan mendorong kerja sama aktif antara perusahaan dan pemangku kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan keberlanjutan perusahaan yang sehat secara finansial.** The corporate governance framework should recognize the rights of stakeholders established by law or through mutual agreements and encourage active co-operation between corporations and stakeholders in creating wealth, jobs, and the sustainability of financially sound enterprises.	
Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan dan praktik yang membahas: Does the company disclose a policy and practices that address:		
B.4.1	Adanya dan ruang lingkup upaya perusahaan dalam memenuhi kesejahteraan pelanggan? The existence and scope of the company's efforts to address customers' welfare?	
B.4.2	Prosedur pemilihan pemasok/kontraktor? Supplier/contractor selection procedures?	
B.4.3	Upaya perusahaan untuk memastikan bahwa rantai nilainya ramah lingkungan atau konsisten dengan mempromosikan pembangunan berkelanjutan? The company's efforts to ensure that its value chain is environmentally friendly or is consistent with promoting sustainable development?	
B.4.4	Upaya perusahaan untuk berinteraksi dengan masyarakat tempat mereka beroperasi? The company's efforts to interact with the communities in which they operate?	
B.4.5	Program dan prosedur antikorupsi perusahaan? The company's anti-corruption programs and procedures?	
B.4.6	Bagaimana hak-hak kreditor dilindungi? How creditors' rights are safeguarded?	
B.4.7	Apakah perusahaan memiliki laporan/bagian terpisah yang membahas upayanya dalam isu lingkungan/ekonomi dan sosial? Does the company have a separate report/section that discusses its efforts on environment/economy and social issues?	
B.5	**Jika kepentingan pemangku kepentingan dilindungi oleh hukum, pemangku kepentingan seharusnya memiliki kesempatan untuk memperoleh ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka.** Where stakeholder interests are protected by law, stakeholders should have the opportunity to obtain effective redress for violation of their rights.	
B.5.1	Apakah perusahaan menyediakan rincian kontak melalui situs web perusahaan atau Laporan Tahunan yang dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan (misalnya pelanggan, pemasok, masyarakat umum, dll.) untuk menyuarakan keprihatinan dan/atau keluhan mereka atas kemungkinan pelanggaran hak-hak mereka? Does the company provide contact details via the company's website or Annual Report which stakeholders (e.g. customers, suppliers, general public etc.) can use to voice their concerns and/or complaints for possible violation of their rights?	

Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): VI.D.1: Hak-hak pemangku kepentingan sebagian besar ditetapkan oleh hukum (misalnya undang-undang ketenagakerjaan, bisnis, komersial, lingkungan, dan kepailitan) atau oleh hubungan kontraktual yang harus dihormati oleh perusahaan. Di beberapa yurisdiksi, perusahaan wajib melaksanakan uji tuntas hak asasi manusia dan lingkungan. Namun demikian, bahkan di area di mana kepentingan pemangku kepentingan tidak diatur dalam undang-undang atau ditetapkan melalui kontrak, banyak perusahaan membuat komitmen tambahan kepada pemangku kepentingan, mengingat bahwa perhatian terhadap reputasi perusahaan dan kinerja perusahaan sering kali memerlukan pengakuan kepentingan yang lebih luas. Di beberapa yurisdiksi, hal ini dapat dicapai oleh perusahaan yang menggunakan Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional dan standar uji tuntas terkait untuk uji tuntas berbasis risiko guna mengidentifikasi, mencegah, dan mengurangi dampak buruk aktual dan potensial dari bisnis mereka, serta memperhitungkan bagaimana dampak ini ditangani. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): VI.D.1: The rights of stakeholders are to a large extent established by law (e.g. labor, business, commercial, environmental, and insolvency laws) or by contractual relations that companies must respect. In some jurisdictions, it is mandatory for companies to carry out human rights and environmental due diligence. Nevertheless, even in areas where stakeholder interests are not legislated or established by contract, many companies make additional commitments to stakeholders, given that concern over corporate reputation and corporate performance often requires the recognition of broader interests. This may in some jurisdictions be achieved by companies using the OECD Guidelines for Multinational Enterprises and associated due diligence standards for risk-based due diligence to identify, prevent and mitigate actual and potential adverse impacts of their businesses, and account for how these impacts are addressed.	Merujuk pada Laporan Keberlanjutan yang disusun secara terpisah dari Laporan Tahunan ini
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): VI.D.2: Kerangka hukum dan proses harus transparan dan tidak menghalangi kemampuan pemangku kepentingan untuk berkomunikasi dan memperoleh ganti rugi atas pelanggaran hak dengan biaya yang wajar dan tanpa penundaan yang berlebihan. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): VI.D.2: The legal framework and process should be transparent and not impede the ability of stakeholders to communicate and to obtain redress for the violation of rights at a reasonable cost and without excessive delay.	Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perusahaan tercantum dalam situs web

	Prinsip Principle	
B.6	**Mekanisme untuk partisipasi karyawan harus diizinkan untuk berkembang.** Mechanisms for employee participation should be permitted to develop.	
B.6.1	Apakah perusahaan secara eksplisit mengungkapkan kebijakan dan praktik mengenai kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan karyawannya? Does the company explicitly disclose the policies and practices on health, safety and welfare for its employees?	
B.6.2	Apakah perusahaan secara eksplisit mengungkapkan kebijakan dan praktik mengenai program pelatihan dan pengembangan bagi karyawannya? Does the company explicitly disclose the policies and practices on training and development programs for its employees?	
B.6.3	Apakah perusahaan memiliki kebijakan penghargaan/kompensasi yang memperhitungkan kinerja perusahaan di luar ukuran keuangan jangka pendek? Does the company have a reward/compensation policy that accounts for the performance of the company beyond short-term financial measures?	
B.7	**Para pemangku kepentingan, termasuk karyawan perorangan dan badan perwakilan mereka, harus dapat dengan bebas mengomunikasikan keprihatinan mereka tentang praktik ilegal atau tidak etis kepada dewan dan hak-hak mereka tidak boleh dikompromikan karena melakukan hal ini.** Stakeholders including individual employee and their representative bodies, should be able to freely communicate their concerns about illegal or unethical practices to the board and their rights should not be compromised for doing this.	
B.7.1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan whistleblowing yang mencakup prosedur pengaduan oleh karyawan dan pemangku kepentingan lainnya mengenai dugaan perilaku ilegal dan tidak etis dan memberikan rincian kontak melalui situs web perusahaan atau laporan tahunan? Does the company have a whistle blowing policy which includes procedures for complaints by employees and other stakeholders concerning alleged illegal and unethical behavior and provide contact details via the company's website or annual report	
B.7.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan atau prosedur untuk melindungi karyawan/orang yang mengungkapkan dugaan perilaku ilegal/tidak etis dari pembalasan? Does the company have a policy or procedures to protect an employee/person who reveals alleged illegal/unethical behavior from retaliation?	

Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): VI.D.3: Tingkat partisipasi karyawan dalam tata kelola perusahaan bergantung pada undang-undang dan praktik nasional, dan dapat bervariasi dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Dalam konteks tata kelola perusahaan, mekanisme partisipasi dapat menguntungkan perusahaan secara langsung maupun tidak langsung melalui kesiapan karyawan untuk berinvestasi dalam keterampilan khusus perusahaan. Contoh mekanisme partisipasi karyawan meliputi representasi karyawan di dewan direksi dan proses tata kelola seperti dewan kerja yang mempertimbangkan sudut pandang karyawan dalam keputusan penting tertentu. Konvensi internasional dan norma nasional juga mengakui hak karyawan atas informasi, konsultasi, dan negosiasi. Sehubungan dengan mekanisme peningkatan kinerja, rencana kepemilikan saham karyawan atau mekanisme pembagian keuntungan lainnya dapat ditemukan di banyak yurisdiksi. Komitmen pensiun juga sering kali menjadi elemen hubungan antara perusahaan dan karyawannya di masa lalu dan saat ini. Jika komitmen tersebut melibatkan pembentukan dana independen, wali amanatnya harus independen dari manajemen perusahaan dan mengelola dana tersebut demi kepentingan semua penerima manfaat. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): VI.D.3: The degree to which employees participate in corporate governance depends on national laws and practices, and may vary from company to company as well. In the context of corporate governance, mechanisms for participation may benefit companies directly as well as indirectly through the readiness by employees to invest in firm specific skills. Examples of mechanisms for employee participation include employee representation on boards and governance processes such as works councils that consider employee viewpoints in certain key decisions. International conventions and national norms also recognize the rights of employees to information, consultation and negotiation. With respect to performance enhancing mechanisms, employee stock ownership plans or other profit sharing mechanisms can be found in many jurisdictions. Pension commitments are also often an element of the relationship between the company and its past and present employees. Where such commitments involve establishing an independent fund, its trustees should be independent of the company's management and manage the fund in the interest of all beneficiaries.	
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): VI.D.5. Praktik tidak etis dan ilegal yang dilakukan oleh pejabat perusahaan tidak hanya dapat melanggar hak-hak pemangku kepentingan, tetapi juga dapat merugikan perusahaan dalam hal reputasi. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menetapkan kebijakan pengungkapan pelanggaran rahasia dengan prosedur dan tempat berlindung yang aman untuk pengaduan oleh pekerja, baik secara pribadi maupun melalui badan perwakilan mereka, dan pihak lain di luar perusahaan, mengenai perilaku ilegal dan tidak etis. Dewan direksi harus didorong untuk melindungi individu dan badan perwakilan ini serta memberi mereka akses langsung yang rahasia kepada seseorang yang independen di dewan direksi, yang sering kali merupakan anggota komite audit atau komite etik. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): VI.D.5. Unethical and illegal practices by corporate officers may not only violate the rights of stakeholders but also be detrimental to the company in terms of reputational effects. It is therefore important for companies to establish a confidential whistleblowing policy with procedures and safe-harbors for complaints by workers, either personally or through their representative bodies, and others outside the company, concerning illegal and unethical behavior. The board should be encouraged to protect these individuals and representative bodies and to give them confidential direct access to someone independent on the board, often a member of an audit or an ethics committee.	

C. Pengungkapan dan Transparansi

C. Disclosure and Transparency

	Prinsip Principle	
C.1	**Struktur kepemilikan yang transparan** Transparent ownership structure	
C.1.1	Apakah informasi mengenai kepemilikan saham mengungkapkan identitas pemilik manfaat, yang memegang 5% saham atau lebih? Does the information on shareholdings reveal the identity of beneficial owners, holding 5% shareholding or more?	
C.1.2	Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham langsung dan tidak langsung (dianggap) dari pemegang saham utama dan/atau substansial? Does the company disclose the direct and indirect (deemed) shareholdings of major and/or substantial shareholders?	
C.1.3	Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham langsung dan tidak langsung (dianggap) dari direktur (komisaris)? Does the company disclose the direct and indirect (deemed) shareholdings of directors (commissioners)?	
C.1.4	Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham langsung dan tidak langsung (dianggap) dari manajemen senior? Does the company disclose the direct and indirect (deemed) shareholdings of senior management?	
C.1.5	Apakah perusahaan mengungkapkan rincian mengenai perusahaan induk/induk, anak perusahaan, perusahaan asosiasi, usaha patungan, dan perusahaan/kendaraan bertujuan khusus (SPE)/(SPV)? Does the company disclose details of the parent/holding company, subsidiaries, associates, joint ventures and special purpose enterprises/ vehicles (SPEs)/ (SPVs)?	

Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): IV.A. Pengungkapan harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada, informasi material tentang: IV.4. Kepemilikan saham utama, termasuk pemilik manfaat, dan hak suara. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): IV.A. Disclosure should include, but not be limited to, material information on: IV.4. Major share ownership, including beneficial owners, and voting rights.	203
Salah satu hak dasar investor adalah untuk mendapatkan informasi tentang struktur kepemilikan perusahaan dan hak-hak mereka terhadap hak-hak pemilik lainnya. Hak atas informasi tersebut juga harus mencakup informasi tentang struktur suatu kelompok perusahaan dan hubungan intra-kelompok. Pengungkapan tersebut harus membuat tujuan, sifat, dan struktur kelompok tersebut menjadi transparan. Pengungkapan data kepemilikan harus diberikan setelah ambang batas kepemilikan tertentu terlampaui. Di pasar ekuitas yang dicirikan oleh struktur kepemilikan yang tersebar di mana kepemilikan saham kecil dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap suatu perusahaan, ambang batas ini dapat ditetapkan lebih rendah. Pengungkapan tersebut dapat mencakup data tentang pemegang saham utama dan pihak lain yang, secara langsung atau tidak langsung, dapat secara signifikan memengaruhi atau mengendalikan perusahaan melalui, misalnya, hak suara khusus, perjanjian pemegang saham, kepemilikan saham pengendali atau saham dalam jumlah besar, penggunaan struktur perusahaan induk yang melibatkan pelapisan perusahaan atau hubungan kepemilikan saham silang yang signifikan dan jaminan silang. Di beberapa yurisdiksi, pengungkapan kepemilikan saham direktur, termasuk non-eksekutif, juga diwajibkan atau dianggap sebagai praktik yang baik, dan merupakan praktik yang baik bahwa pengungkapan tersebut dilakukan secara berkelanjutan.	203
One of the basic rights of investors is to be informed about the ownership structure of the company and their rights vis-a-vis the rights of other owners. The right to such information should also extend to information about the structure of a group of companies and intra-group relations. Such disclosures should make the objectives, nature and structure of the group transparent. Disclosure of ownership data should be provided once certain thresholds of ownership are passed. In equity markets characterized by dispersed ownership structures where small shareholdings may exert significant influence over a company, these thresholds could be set lower. Such disclosure might include data on major shareholders and others that, directly or indirectly, may significantly influence or control the company through, for example, special voting rights, shareholder agreements, the ownership of controlling or large blocks of shares, the use of holding company structures involving layering of companies or significant cross-shareholding relationships and cross guarantees. It is also required or considered good practice in some jurisdictions to disclose shareholdings of directors, including non-executives, and it is good practice that such disclosure is made on an ongoing basis.	204
Khususnya untuk tujuan penegakan hukum, dan untuk mengidentifikasi potensi konflik kepentingan, transaksi pihak terkait, perdagangan orang dalam, dan manipulasi pasar, informasi tentang kepemilikan catatan perlu dilengkapi dengan informasi terkini tentang kepemilikan manfaat. Semakin banyak yurisdiksi menggunakan registri nasional terpusat sementara yang lain mungkin memerlukan registri tingkat perusahaan untuk memfasilitasi akses ke informasi terkini dan akurat tentang kepemilikan manfaat. Dalam kasus di mana registri tersebut tidak tersedia, informasi tentang pemilik manfaat harus dapat diperoleh setidaknya oleh lembaga regulasi dan penegakan hukum dan/atau melalui proses peradilan. Selain itu, panduan yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas Aksi Keuangan dan IMF yang menganjurkan pendekatan multi-cabang untuk memastikan ketersediaan informasi tentang kepemilikan manfaat dapat berguna dalam hal ini.	204-208
For enforcement purposes in particular, and to identify potential conflicts of interest, related party transactions, insider trading, and market manipulation information about record ownership needs to be complemented with current information about beneficial ownership. An increasing number of jurisdictions use a centralized national registry while others may require a company-level registry to facilitate access to up-to-date and accurate information on beneficial ownership. In cases where such registries are not available, information about the beneficial owners should be obtainable at least by regulatory and enforcement agencies and/or through the judicial process. In addition, guidance issued by the Financial Action Task Force and the IMF that advocates a multi-pronged approach to ensure availability of information on beneficial ownership can be useful in this regard.	211-218

Prinsip Principle	
C.2 Kualitas Laporan Tahunan Quality of Annual Report	
Apakah laporan tahunan perusahaan mengungkapkan hal-hal berikut: Does the company's annual report disclose the following items:	
C.2.1 Tujuan perusahaan Corporate objectives	
C.2.2 Indikator kinerja keuangan Financial performance indicators	
C.2.3 Indikator kinerja non-keuangan Non-financial performance indicators	
C.2.4 Kebijakan dividen Dividend policy	
C.2.5 Rincian biografi (setidaknya usia, kualifikasi akademik, tanggal pengangkatan pertama, pengalaman relevan, dan jabatan direktur lain dari perusahaan tercatat) dari semua direktur/komisaris Biographical details (at least age, academic qualifications, date of first appointment, relevant experience, and any other directorships of listed companies) of all directors/commissioners	
Pernyataan Konfirmasi Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Confirmation Statement	
C.2.6 Apakah Laporan Tahunan memuat pernyataan yang mengonfirmasi kepatuhan penuh perusahaan terhadap kode tata kelola perusahaan dan jika ada ketidakpatuhan, identifikasi dan jelaskan alasan untuk setiap masalah tersebut? Does the Annual Report contain a statement confirming the company's full compliance with the code of corporate governance and where there is non-compliance, identify and explain reasons for each such issue?	

Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): IV.A. Pengungkapan harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada, informasi material tentang: IV.A.1. Hasil keuangan dan operasional perusahaan. IV.A.2. Tujuan perusahaan dan informasi terkait keberlanjutan. IV.A.5. Informasi tentang susunan dewan dan anggotanya, termasuk kualifikasi mereka, proses seleksi, jabatan direktur perusahaan lainnya, dan apakah mereka dianggap independen oleh dewan. IV.A.6. Remunerasi anggota dewan dan eksekutif utama. IV.A.8. Faktor risiko yang dapat diperkirakan. IV.A.10. Kontrak utang, termasuk risiko ketidakpatuhan terhadap perjanjian.	104
G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): Disclosure should include, but not be limited to, material information on: The financial and operating results of the company. Company objectives and sustainability-related information. Information about the composition of the board and its members, including their qualifications, the selection process, other company directorships and whether they are regarded as independent by the board. Remuneration of members of the board and key executives. IV.A.8. Foreseeable risk factors. IV.A.10. Debt contracts, including the risk of non-compliance with covenants.	38-45 46-49
ICGN (2021) PRINSIP 2: Kepemimpinan dan independensi ICGN (2021) PRINCIPLE 2: Leadership and independence ICGN (2021) PRINSIP 3: Komposisi dan Pengangkatan ICGN (2021) PRINCIPLE 3: Composition and appointment ICGN (2021) PRINSIP 5: Remunerasi ICGN (2021) PRINCIPLE 5: Remuneration	309-310 120-124 134-149
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): IV.A. Pengungkapan harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada, informasi material tentang: IV.A.9. Struktur dan kebijakan tata kelola, termasuk tingkat kepatuhan terhadap kode atau kebijakan tata kelola perusahaan nasional dan proses penerapannya. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): IV.A. Disclosure should include, but not limited to, material information on: IV.A.9. Governance structures and policies, including the extent of compliance with national corporate governance codes or policies and the process by which they are implemented.	348-352

	Prinsip Principle	
C.3	**Remunerasi Anggota Dewan dan Eksekutif Utama** Remuneration of Members of the Board and Key Executives	
C.3.1	Apakah ada pengungkapan struktur biaya untuk direktur/komisaris non-eksekutif? Is there disclosure of the fee structure for non-executive directors/commissioners?	
C.3.2	Apakah perusahaan mengungkapkan kepada publik [misalnya] laporan tahunan atau dokumen lain yang diungkapkan kepada publik] rincian remunerasi masing-masing direktur non-eksekutif/komisaris? Does the company publicly disclose [i.e.] annual report or other publicly disclosed documents] details of remuneration of each non- executive director/commissioner?	

Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
ICGN (2021) PRINSIP 5: 5.9. Remunerasi direktur non-eksekutif Dewan direksi, atau pemegang saham sebagaimana diwajibkan oleh hukum di beberapa yurisdiksi, harus menentukan tingkat gaji untuk direktur non-eksekutif dan ketua non-eksekutif dan memastikan bahwa gaji tersebut disusun sedemikian rupa sehingga menjamin independensi, objektivitas, dan keselarasan dengan kepentingan jangka panjang perusahaan dan semua pemegang sahamnya. Remunerasi yang dibayarkan kepada direktur non-eksekutif harus diungkapkan kepada publik. Gaji berbasis kinerja atau opsi saham tidak boleh diberikan kepada direktur non-eksekutif dan ketua non-eksekutif. ICGN (2021) PRINCIPLE 5: 5.9. Non-executive director remuneration The board, or shareholders as required by law in some jurisdictions, should determine levels of pay for non-executive directors and the non-executive chair and ensure that it is structured in a way which ensures independence, objectivity and alignment with the long- term interests of the company and all its shareholders. Remuneration paid to non-executive directors should be publicly disclosed. Performance-based pay or share options should not be granted to non-executive directors and non- executive chairs.	504-510
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): IV.A. Pengungkapan harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada, informasi material tentang: IV.A.6 Remunerasi anggota dewan dan eksekutif utama Pengungkapan secara individual (termasuk ketentuan pemberhentian dan pensiun) semakin dianggap sebagai praktik yang baik dan sekarang diwajibkan atau direkomendasikan di sebagian besar yurisdiksi. Beberapa yurisdiksi ini mengharuskan pengungkapan remunerasi sejumlah eksekutif dengan gaji tertinggi, sementara di yurisdiksi lain dibatasi pada posisi tertentu. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): IV.A. Disclosure should include, but not be limited to, material information on: IV.A.6 Remuneration of members of the board and key executives Disclosure on an individual basis (including termination and retirement provisions) is increasingly regarded as good practice and is now required or recommended in most jurisdictions. Some of these jurisdictions call for remuneration of a certain number of the highest paid executives to be disclosed, while in others it is confined to specified positions.	504-510

	Prinsip Principle	
C.3.3	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan/praktik remunerasi (biaya, tunjangan, manfaat dalam bentuk barang dan tunjangan lainnya) (misalnya penggunaan insentif jangka pendek dan jangka panjang serta ukuran kinerja) untuk direktur eksekutif dan CEO? Does the company disclose its remuneration (fees, allowances, benefit-in-kind and other emoluments) policy/practices (i.e. the use of short term and long term incentives and performance measures) for its executive directors and CEO?	
C.3.4	Apakah perusahaan mengungkapkan kepada publik [misalnya laporan tahunan atau dokumen lain yang diungkapkan kepada publik] rincian remunerasi masing-masing direktur eksekutif dan CEO [jika yang bersangkutan bukan anggota Dewan]? Does the company publicly disclose [i.e. annual report or other publicly disclosed documents] the details of remuneration of each of the executive directors and CEO [if he/she is not a member of the Board]?	

Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V.D. Dewan direksi harus memenuhi beberapa fungsi utama, termasuk: V.D.5 Menyelaraskan remunerasi eksekutif utama dan dewan direksi dengan kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemegang sahamnya. Dianggap sebagai praktik yang baik bagi dewan direksi untuk mengembangkan dan mengungkapkan pernyataan kebijakan remunerasi yang mencakup anggota dewan direksi dan eksekutif utama, serta mengungkapkan tingkat remunerasi yang ditetapkan sesuai dengan kebijakan ini. Pernyataan kebijakan tersebut dapat menentukan, khususnya yang berkaitan dengan eksekutif, hubungan antara remunerasi dan kinerja dengan kriteria ex ante yang terkait dengan kinerja, dan mencakup standar terukur yang menekankan kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemegang saham daripada pertimbangan jangka pendek. Standar terukur tersebut antara lain dapat terkait dengan total pengembalian pemegang saham dan sasaran serta metrik keberlanjutan yang sesuai. Pernyataan kebijakan umumnya cenderung menetapkan ketentuan pembayaran kepada anggota dewan direksi untuk kegiatan di luar dewan direksi, seperti konsultasi. Mereka juga sering menetapkan ketentuan yang harus dipatuhi oleh anggota dewan dan eksekutif utama tentang kepemilikan dan perdagangan saham perusahaan, serta prosedur yang harus diikuti dalam pemberian dan penetapan harga ulang opsi. Di beberapa yurisdiksi, pernyataan kebijakan juga memberikan panduan tentang pembayaran yang harus dilakukan saat mempekerjakan dan/atau mengakhiri kontrak seorang eksekutif. Dewan juga dapat memantau penerapan pernyataan kebijakan tentang remunerasi. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V.D. The board should fulfil certain key functions, including: V.D.5 Aligning key executive and board remuneration with the longer term interests of the company and its shareholders. It is regarded as good practice for boards to develop and disclose a remuneration policy statement covering board members and key executives, as well as to disclose their remuneration levels set pursuant to this policy. Such policy statements may specify, especially with respect to executives, the relationship between remuneration and performance with ex ante criteria linked to performance, and include measurable standards that emphasize the long-term interests of the company and the shareholders over short-term considerations. Such measurable standards among others may relate to total shareholder return and appropriate sustainability goals and metrics. Policy statements generally tend to set conditions for payments to board members for extra-board activities, such as consulting. They also often specify terms to be observed by board members and key executives about holding and trading the stock of the company, and the procedures to be followed in granting and re-pricing options. In some jurisdictions, policy statements also provide guidance on the payments to be made when hiring and/or terminating the contract of an executive. The board may also monitor the implementation of the policy statement on remuneration.	504-510
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): IV.A.6. Remunerasi anggota dewan dan eksekutif utama Pengungkapan secara individual (termasuk ketentuan pemberhentian dan pensiun) semakin dianggap sebagai praktik yang baik dan kini diwajibkan atau direkomendasikan di sebagian besar yurisdiksi. Beberapa yurisdiksi ini mengharuskan pengungkapan remunerasi sejumlah eksekutif dengan gaji tertinggi, sementara di yurisdiksi lain, pengungkapan dibatasi pada posisi tertentu. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): IV.A.6. Remuneration of members of the board and key executives Disclosure on an individual basis (including termination and retirement provisions) is increasingly regarded as good practice and is now required or recommended in most jurisdictions. Some of these jurisdictions call for remuneration of a certain number of the highest paid executives to be disclosed, while in others it is confined to specified positions.	504-510

	Prinsip Principle	
C.4	**Pengungkapan transaksi pihak berelasi (RPT)** Disclosure of related party transactions (RPT)	
C.4.1	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakannya yang mencakup peninjauan dan persetujuan RPT material? Does the company disclose its policy covering the review and approval of material RPTs?	
C.4.2	Apakah perusahaan mengungkapkan nama, hubungan, sifat dan nilai untuk setiap RPT material? Does the company disclose the name, relationship, nature and value for each material RPTs?	
C.5	**Direktur dan komisaris yang bertransaksi dalam saham perusahaan** Directors and commissioners dealings in shares of the company	
C.5.1	Apakah perusahaan mengungkapkan perdagangan saham perusahaan oleh orang dalam? Does the company disclose trading in the company's shares by insiders?	

Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): IV.A. Pengungkapan harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada, informasi material tentang: IV.A.7. Transaksi dengan pihak terkait. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): IV.A. Disclosure should include, but not limited to, material information on: IV.A.7. Related party transactions.	316-326
ICGN (2021) PRINSIP 9: 9.4 Transaksi pihak terkait Dewan direksi harus mengembangkan, mengadopsi, dan mengungkapkan Kebijakan Transaksi Pihak Terkait (RPT) dan memiliki proses yang kuat untuk menyetujui, meninjau, dan memantau RPT dan setiap konflik kepentingan yang melekat. Ini termasuk membentuk komite direktur independen, baik sebagai komite terpisah, atau komite yang sudah ada yang terdiri dari direktur independen, misalnya komite audit. Komite harus meninjau transaksi pihak terkait yang signifikan untuk menentukan apakah transaksi tersebut merupakan kepentingan terbaik perusahaan dan, jika demikian, untuk menentukan ketentuan apa yang adil dan wajar. Kesimpulan dari pertimbangan komite tentang transaksi pihak terkait yang signifikan harus diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan kepada pemegang saham. ICGN (2021) PRINCIPLE 9: 9.4 Related party transactions The board should develop, adopt and disclose a related party transactions (RPT) Policy and have a robust process for approving, reviewing and monitoring RPTs and any inherent conflicts of interest. This includes establishing a committee of independent directors, either as a separate committee, or an existing committee comprised of independent directors, for example the audit committee. The committee should review significant related party transactions to determine whether they are in the best interests of the company and, if so, to determine what terms are fair and reasonable. The conclusion of committee deliberations on significant related party transactions should be disclosed in the company's annual report to shareholders.	316-326
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): IV.A. Pengungkapan harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada, informasi material tentang: IV.A.4. Kepemilikan saham utama, termasuk pemilik manfaat, dan hak suara G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): IV.A. Disclosure should include, but not be limited to, material information on: IV.A.4. Major share ownership, including beneficial owners, and voting rights	
ICGN (2021) PRINSIP 4: 4.4 Transaksi saham oleh karyawan Dewan direksi harus mengembangkan aturan yang jelas terkait perdagangan saham oleh direktur dan karyawan perusahaan. Individu tidak boleh memperoleh keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari pengetahuan yang tidak tersedia secara umum di pasar. ICGN (2021) PRINCIPLE 4: 4.4 Employee share dealing The Board should develop clear rules regarding any trading by directors and employees in the company's own securities. Individuals should not benefit directly or indirectly from knowledge which is not generally available to the market.	595

Prinsip Principle	

C.6	**Auditor Eksternal dan Laporan Auditor** External auditor and Auditor Report
Ketika perusahaan audit yang sama digunakan untuk melakukan jasa audit dan non-audit Where the same audit firm is engaged for both audit and non-audit services	
C.6.1	Apakah biaya audit dan non-audit diungkapkan? Are the audit and non-audit fees disclosed?

Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
ICGN (2021) PRINSIP 5: 5.5 Kepemilikan saham Dewan direksi harus mengungkapkan kebijakan perusahaan mengenai kepemilikan saham perusahaan oleh CEO, direktur non-eksekutif, dan eksekutif. Kebijakan ini harus mencakup kebijakan perusahaan tentang bagaimana persyaratan kepemilikan saham harus dipenuhi dan berapa lama kepemilikan saham tersebut harus dipertahankan. Meskipun kepemilikan saham oleh CEO dan eksekutif dianjurkan, penggunaan derivatif atau struktur lain yang memungkinkan lindung nilai atas eksposur individu terhadap saham perusahaan harus dilarang. ICGN (2021) PRINCIPLE 5: 5.5 Share ownership The board should disclose the company policy concerning ownership of shares of the company by the CEO, non-executive directors and executives. This should include the company policy as to how share ownership requirements are to be achieved and for how long they are to be retained. While CEO and executive share ownership is encouraged, the use of derivatives or other structures that enable the hedging of an individual's exposure to the company's shares should be prohibited.	
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): IV.C. Audit eksternal tahunan harus dilakukan oleh auditor yang independen, kompeten, dan berkualifikasi sesuai dengan standar audit, etika, dan independensi yang diakui secara internasional untuk memberikan keyakinan yang wajar kepada dewan direksi dan pemegang saham tentang apakah laporan keuangan disiapkan, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): IV.C. An annual external audit should be conducted by an independent, competent and qualified auditor in accordance with internationally recognized auditing, ethical and independence standards in order to provide reasonable assurance to the board and shareholders on whether the financial statements are prepared, in all material respects, in accordance with an applicable financial reporting framework. Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): IV.D. Auditor eksternal harus bertanggung jawab kepada pemegang saham dan memiliki kewajiban kepada perusahaan untuk menjalankan kehati-hatian profesional dalam pelaksanaan audit demi kepentingan publik. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): IV.D. External auditors should be accountable to the shareholders and owe a duty to the company to exercise due professional care in the conduct of the audit in the public interest. ICGN (2021) PRINSIP 8: 8.3 Komite Audit Ketentuan acuan untuk komite harus diungkapkan kepada publik dan mencakup: f) Merekomendasikan pengangkatan, pengangkatan kembali dan, jika perlu, pemberhentian auditor eksternal, serta menyetujui biaya audit. Biaya non-audit biasanya harus lebih rendah dari biaya audit dan, jika tidak, harus ada penjelasan yang jelas tentang mengapa auditor perlu memberikan layanan ini dan bagaimana independensi dan objektivitas audit dipastikan. ICGN (2021) PRINCIPLE 8: 8.3 Audit Committee The terms of reference for the committee should be publicly disclosed and include: f) Recommending the appointment, reappointment and, if necessary, the removal of the external auditor, as well as approving audit fees. Any non-audit fees should normally be less than the audit fee and, if not, there should be a clear explanation as to why it was necessary for the auditor to provide these services and how the independence and objectivity of the audit was assured.	533-542

	Prinsip Principle	
C.6.2	Apakah biaya non-audit melebihi biaya audit? Does the non-audit fee exceed the audit fees?	
C.7	**Media komunikasi** Medium of communications	
Apakah perusahaan menggunakan mode komunikasi berikut? Does the company use the following modes of communication?		
C.7.1	Pelaporan triwulanan Quarterly reporting	
C.7.2	Situs web perusahaan Company website	
C.7.3	Arahan analis Analyst's briefing	
C.7.4	Arahan media/konferensi pers Media briefings/press conferences	

Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
ICGN (2021) PRINSIP 8: 8.3 Komite Audit Ketentuan acuan untuk komite harus diungkapkan kepada publik dan mencakup: f) Merekomendasikan pengangkatan, pengangkatan kembali dan, jika perlu, pemberhentian auditor eksternal, serta menyetujui biaya audit. Biaya non-audit biasanya harus lebih rendah dari biaya audit dan, jika tidak, harus ada penjelasan yang jelas tentang mengapa auditor perlu memberikan layanan ini dan bagaimana independensi dan objektivitas audit dipastikan. ICGN (2021) PRINCIPLE 8: 8.3 Audit Committee The terms of reference for the committee should be publicly disclosed and include: f) Recommending the appointment, reappointment and, if necessary, the removal of the external auditor, as well as approving audit fees. Any non-audit fees should normally be less than the audit fee and, if not, there should be a clear explanation as to why it was necessary for the auditor to provide these services and how the independence and objectivity of the audit was assured.	533-542
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): IV.E. Saluran penyebaran informasi harus menyediakan akses yang setara, tepat waktu, dan hemat biaya terhadap informasi yang relevan bagi pengguna. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): IV.E. Channels for disseminating information should provide for equal, timely and cost-efficient access to relevant information by users.	546-546 545-546
ICGN (2021) PRINSIP 7: Pelaporan Perusahaan Dewan direksi harus mengawasi pengungkapan perusahaan yang tepat waktu dan dapat diandalkan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan terkait terkait posisi keuangan perusahaan, pendekatan terhadap keberlanjutan, kinerja, model bisnis, strategi, dan prospek jangka panjang. ICGN (2021) PRINCIPLE 7: Corporate Reporting Boards should oversee timely and reliable company disclosures for shareholders and relevant stakeholders relating to the company's financial position, approach to sustainability, performance, business model, strategy, and long-term prospects.	545-546 545-546

Prinsip Principle		
C.8	**Pengarsipan/rilis laporan tahunan/keuangan tepat waktu** Timely filing/release of annual/financial reports	
C.8.1	Apakah laporan/pernyataan keuangan tahunan yang diaudit dirilis dalam waktu 120 hari sejak akhir tahun keuangan? Are the audited annual financial report/statement released within 120 days from the financial year end?	
C.8.2	Apakah laporan tahunan dirilis dalam waktu 120 hari sejak akhir tahun keuangan? Is the annual report released within 120 days from the financial year end?	
C.8.3	Apakah kebenaran dan kewajaran/kewajaran penyajian laporan keuangan tahunan telah ditegaskan oleh dewan direksi/komisaris dan/atau pejabat terkait di perusahaan? Is the true and fairness/fair representation of the annual financial statement/reports affirmed by the board of directors/commissioners and/or the relevant officers of the company?	

Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): IV.A. Pengungkapan harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada, informasi material tentang: IV.A.1. Hasil keuangan dan operasional perusahaan. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): Disclosure should include, but not be limited to, material information on: The financial and operating results of the company.	
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): IV.C. Audit eksternal tahunan harus dilakukan oleh auditor yang independen, kompeten, dan berkualifikasi sesuai dengan standar audit, etika, dan independensi yang diakui secara internasional untuk memberikan keyakinan yang wajar kepada dewan direksi dan pemegang saham tentang apakah laporan keuangan disiapkan, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): IV.C. An annual external audit should be conducted by an independent, competent and qualified auditor in accordance with internationally recognized auditing, ethical and independence standards in order to provide reasonable assurance to the board and shareholders on whether the financial statements are prepared, in all material respects, in accordance with an applicable financial reporting framework.	614
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): IV.E. Saluran penyebaran informasi harus menyediakan akses yang setara, tepat waktu, dan hemat biaya terhadap informasi yang relevan bagi pengguna. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): IV.E. Channels for disseminating information should provide for equal, timely and cost-efficient access to relevant information by users.	614
ICGN (2021) PRINSIP 7: Pelaporan Perusahaan Dewan direksi harus mengawasi pengungkapan perusahaan yang tepat waktu dan dapat diandalkan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan terkait terkait posisi keuangan perusahaan, pendekatan terhadap keberlanjutan, kinerja, model bisnis, strategi, dan prospek jangka panjang. ICGN (2021) PRINCIPLE 7: Corporate Reporting Boards should oversee timely and reliable company disclosures for shareholders and relevant stakeholders relating to the company's financial position, approach to sustainability, performance, business model, strategy, and long-term prospects.	
ICGN (2021) PRINSIP 7: 7.3 Laporan keuangan Dewan direksi harus menegaskan bahwa laporan tahunan dan akun perusahaan menyajikan pandangan yang benar dan wajar tentang posisi dan prospek jangka panjang perusahaan. ICGN (2021) PRINCIPLE 7: 7.3 Financial reports The board should affirm that the company's annual report and accounts present a true and fair view of the company's position and long-term prospects.	614

Prinsip Principle		
C.9	**Situs web perusahaan** Company website	
Apakah perusahaan memiliki situs web yang mengungkapkan informasi terkini tentang hal berikut: Does the company have a website disclosing up-to-date information on the following:		
C.9.1	Laporan keuangan (triwulanan terbaru) Financial statements/reports (latest quarterly)	
C.9.2	Materi yang diberikan dalam pengarahan kepada analis dan media Materials provided in briefings to analysts and media	
C.9.3	Laporan tahunan yang dapat diunduh Downloadable annual report	
C.9.4	Pemberitahuan Rapat Umum Tahunan dan/atau Rapat Umum Luar Biasa Notice of AGM and/or EGM	
C.9.5	Risalah Rapat Umum Tahunan dan/atau Rapat Umum Luar Biasa Minutes of AGM and/or EGM	
C.9.6	Konstitusi perusahaan (anggaran dasar perusahaan, memorandum dan anggaran dasar) Company's constitution (company's by-laws, memorandum and articles of association)	
C.10	**Hubungan investor** Investor relations	
C.10.1	Apakah perusahaan mengungkapkan rincian kontak (misalnya telepon, faks, dan email) pejabat/kantor yang bertanggung jawab atas hubungan investor? Does the company disclose the contact details (e.g. telephone, fax, and email) of the officer/office responsible for investor relations?	

Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): IV.A. Pengungkapan harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada, informasi material tentang: IV.A.1. Hasil keuangan dan operasional perusahaan.	594
G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): Disclosure should include, but not be limited to, material information on: The financial and operating results of the company.	545-546
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): IV.E. Saluran penyebaran informasi harus menyediakan akses yang setara, tepat waktu, dan hemat biaya terhadap informasi yang relevan bagi pengguna.	
G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): IV.E. Channels for disseminating information should provide for equal, timely and cost-efficient access to relevant information by users.	545-546
ICGN (2021) PRINSIP 7: Pelaporan Perusahaan Dewan direksi harus mengawasi pengungkapan perusahaan yang tepat waktu dan dapat diandalkan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan terkait terkait posisi keuangan perusahaan, pendekatan terhadap keberlanjutan, kinerja, model bisnis, strategi, dan prospek jangka panjang.	365 -396
	545-546
ICGN (2021) PRINCIPLE 7: Corporate Reporting Boards should oversee timely and reliable company disclosures for shareholders and relevant stakeholders relating to the company's financial position, approach to sustainability, performance, business model, strategy, and long-term prospects.	545-546
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V.D. Dewan direksi harus memenuhi beberapa fungsi utama, termasuk: V.D.9. Mengawasi proses pengungkapan dan komunikasi. Fungsi dan tanggung jawab dewan direksi dan manajemen terkait pengungkapan dan komunikasi perlu ditetapkan dengan jelas oleh dewan direksi. Di beberapa yurisdiksi, penunjukan pejabat hubungan investor yang melapor langsung kepada dewan direksi dianggap sebagai praktik yang baik bagi perusahaan yang diperdagangkan secara publik.	481
G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V.D. The board should fulfil certain key functions, including: V.D.9. Overseeing the process of disclosure and communications. The functions and responsibilities of the board and management with respect to disclosure and communication need to be clearly established by the board. In some jurisdictions, the appointment of an investor relations officer who reports directly to the board is considered good practice for publicly traded companies.	

D. Tanggung Jawab Dewan

D. Responsibilities of the Board

Prinsip Principle	
D.1	**Tugas dan Tanggung Jawab Dewan** Board Duties and Responsibilities
Tanggung jawab dewan dan kebijakan tata kelola perusahaan yang ditetapkan dengan jelas Clearly defined board responsibilities and corporate governance policy	
D.1.1	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan tata kelola perusahaan/piagam dewan? Does the company disclose its corporate governance policy/board charter?
D.1.2	Apakah jenis keputusan yang memerlukan persetujuan dewan direksi/komisaris diungkapkan? Are the types of decisions requiring board of directors/commissioners' approval disclosed ?
D.1.3	Apakah peran dan tanggung jawab dewan direksi/komisaris dinyatakan dengan jelas? Are the roles and responsibilities of the board of directors/commissioners clearly stated ?

Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): IV. Pengungkapan dan transparansi IV.A. Pengungkapan harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada, informasi material tentang: 9. Struktur dan kebijakan tata kelola, termasuk sejauh mana kepatuhan terhadap kode atau kebijakan tata kelola perusahaan nasional dan proses penerapannya. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): IV. Disclosure and transparency IV.A. Disclosure should include, but not be limited to, material information on: 9. Governance structures and policies, including the extent of compliance with national corporate governance codes or policies and the process by which they are implemented.	399 & 460
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V. Tanggung jawab dewan direksi V.D. Dewan direksi harus memenuhi beberapa fungsi utama, termasuk: 1. Meninjau dan mengarahkan strategi perusahaan, rencana aksi utama, anggaran tahunan, dan rencana bisnis; menetapkan tujuan kinerja; memantau implementasi dan kinerja perusahaan; dan mengawasi pengeluaran modal utama, akuisisi, dan divestasi. 2. Meninjau dan menilai kebijakan dan prosedur manajemen risiko. 3. Memantau efektivitas praktik tata kelola perusahaan dan membuat perubahan sesuai kebutuhan. 4. Memilih, mengawasi, dan memantau kinerja eksekutif utama, dan, jika perlu, menggantinya dan mengawasi perencanaan suksesi. 5. Menyelaraskan remunerasi eksekutif utama dan dewan direksi dengan kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemegang sahamnya. 6. Memastikan proses nominasi dan pemilihan dewan direksi yang formal dan transparan. 7. Memantau dan mengelola potensi konflik kepentingan manajemen, anggota dewan direksi, dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan penyalahgunaan dalam transaksi dengan pihak terkait. 8. Memastikan integritas sistem akuntansi dan pelaporan perusahaan untuk pengungkapan, termasuk audit independen, dan bahwa sistem pengendalian yang tepat telah diterapkan, sesuai dengan hukum dan standar yang relevan. 9. Mengawasi proses pengungkapan dan komunikasi. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V. The responsibilities of the board V.D. The board should fulfil certain key functions, including: 1. Reviewing and guiding corporate strategy, major plans of action, annual budgets and business plans; setting performance objectives; monitoring implementation and corporate performance; and overseeing major capital expenditures, acquisitions and divestitures. 2. Reviewing and assessing risk management policies and procedures. 3. Monitoring the effectiveness of the company's governance practices and making changes as needed. 4. Selecting, overseeing and monitoring the performance of key executives, and, when necessary, replacing them and overseeing succession planning. 5. Aligning key executive and board remuneration with the longer term interests of the company and its shareholders. 6. Ensuring a formal and transparent board nomination and election process. 7. Monitoring and managing potential conflicts of interest of management, board members and shareholders, including misuse of corporate assets and abuse in related party transactions. 8. Ensuring the integrity of the corporation's accounting and reporting systems for disclosure, including the independent audit, and that appropriate systems of control are in place, in compliance with the law and relevant standards. 9. Overseeing the process of disclosure and communications.	399 & 460

Prinsip Principle	
Visi/Misi Perusahaan Corporate Vision/Mission	
D.1.4	Apakah perusahaan memiliki pernyataan visi dan misi yang diperbarui? Does the company have an updated vision and mission statement?
D.1.5	Apakah dewan direksi memainkan peran utama dalam proses pengembangan dan peninjauan strategi perusahaan setidaknya setahun sekali? Does the board of directors play a leading role in the process of developing and reviewing the company's strategy at least annually?
D.1.6	Apakah dewan direksi memiliki proses untuk meninjau, memantau, dan mengawasi penerapan strategi perusahaan? Does the board of directors have a process to review, monitor and oversee the implementation of the corporate strategy?
D.2	**Struktur Dewan** Board structure
Kode Etik atau Perilaku Code of Ethics or Conduct	
D.2.1	Apakah rincian kode etik atau perilaku diungkapkan? Are the details of the code of ethics or conduct disclosed?
D.2.2	Apakah semua direktur/komisaris, manajemen senior dan karyawan diharuskan mematuhi kode tersebut? Are all directors/commissioners, senior management and employees required to comply with the code/s?

Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V. Tanggung jawab dewan direksi V.D. Dewan direksi harus menjalankan beberapa fungsi utama, termasuk: 1. Meninjau dan mengarahkan strategi perusahaan, rencana aksi utama, anggaran tahunan, dan rencana bisnis; menetapkan tujuan kinerja; memantau implementasi dan kinerja perusahaan; dan mengawasi pengeluaran modal utama, akuisisi, dan divestasi. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V. The responsibilities of the board V.D. The board should fulfil certain key functions, including: 1. Reviewing and guiding corporate strategy, major plans of action, annual budgets and business plans; setting performance objectives; monitoring implementation and corporate performance; and overseeing major capital expenditures, acquisitions and divestitures.	104-105
ICGN (2021) PRINSIP 1: Peran dan tanggung jawab dewan direksi 1.1 Tanggung jawab Dewan direksi bertanggung jawab kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan terkait untuk menjaga dan meningkatkan nilai berkelanjutan dalam jangka panjang yang sejalan dengan tujuan dan strategi jangka panjang perusahaan. ICGN (2021) PRINCIPLE 1: Board role and responsibilities 1.1 Responsibilities The board is accountable to shareholders and relevant stakeholders for preserving and enhancing sustainable value over the long-term in alignment with a company's purpose and long-term strategy. Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V: Tanggung jawab dewan direksi V.D. Dewan direksi harus menjalankan beberapa fungsi utama, termasuk: 1. Meninjau dan mengarahkan strategi perusahaan, rencana aksi utama, anggaran tahunan, dan rencana bisnis; menetapkan tujuan kinerja; memantau implementasi dan kinerja perusahaan; dan mengawasi pengeluaran modal utama, akuisisi, dan divestasi. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V: The responsibilities of the board V.D. The board should fulfil certain key functions, including: 1. Reviewing and guiding corporate strategy, major plans of action, annual budgets and business plans; setting performance objectives; monitoring implementation and corporate performance; and overseeing major capital expenditures, acquisitions and divestitures.	459-473
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V: Tanggung jawab dewan direksi V.C. Dewan direksi harus menerapkan standar etika yang tinggi. Dewan direksi memiliki peran penting dalam menetapkan standar etika perusahaan, tidak hanya melalui tindakannya sendiri, tetapi juga dalam menunjuk dan mengawasi eksekutif utama dan akibatnya manajemen secara umum. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V: The responsibilities of the board V.C. The board should apply high ethical standards. The board has a key role in setting the ethical tone of a company, not only through its own actions, but also in appointing and overseeing key executives and consequently the management in general.	550-556

	Prinsip Principle
D.2.3	Apakah perusahaan memiliki proses untuk menerapkan dan memantau kepatuhan terhadap kode etik atau perilaku? Does the company have a process to implement and monitor compliance with the code/s of ethics or conduct?

Struktur dan Komposisi Dewan
Board Structure & Composition

D.2.4	Apakah direktur/komisaris independen membentuk setidaknya 50% dari dewan direktur/komisaris? Do independent directors/commissioners make up at least 50% of the board of directors/commissioners?

Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
Standar etika yang tinggi adalah kepentingan jangka panjang perusahaan sebagai sarana untuk membuatnya kredibel dan dapat dipercaya, tidak hanya dalam operasi sehari-hari, tetapi juga berkenaan dengan komitmen jangka panjang. Untuk membuat tujuan dewan jelas dan operasional, banyak perusahaan telah merasa berguna untuk mengembangkan kode etik perusahaan berdasarkan, antara lain, standar profesional dan terkadang kode perilaku yang lebih luas, dan untuk mengomunikasikannya ke seluruh organisasi. Ini dapat mencakup komitmen oleh perusahaan (termasuk anak perusahaannya) untuk mematuhi Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional dan standar uji tuntas terkait. Demikian pula, yurisdiksi semakin menuntut agar dewan mengawasi strategi lobi, keuangan, dan perencanaan pajak, sehingga memberikan otoritas informasi yang tepat waktu dan tepat sasaran dan mencegah praktik, misalnya mengejar skema perencanaan pajak yang agresif, yang tidak berkontribusi pada kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemegang sahamnya, dan dapat menyebabkan risiko hukum dan reputasi. High ethical standards are in the long-term interests of the company as a means to make it credible and trustworthy, not only in day-to-day operations, but also with respect to longer term commitments. To make the objectives of the board clear and operational, many companies have found it useful to develop company codes of conduct based on, among others, professional standards and sometimes broader codes of behavior, and to communicate them throughout the organization. This may include a commitment by the company (including its subsidiaries) to comply with the OECD Guidelines for Multinational Enterprises and associated due diligence standards. Similarly, jurisdictions are increasingly demanding that boards oversee the lobbying, finance and tax planning strategies, thus providing authorities with timely and targeted information and discouraging practices, for example the pursuit of aggressive tax planning schemes, that do not contribute to the long-term interests of the company and its shareholders, and can cause legal and reputational risks. Kode etik di seluruh perusahaan berfungsi sebagai standar perilaku oleh dewan direksi dan eksekutif utama, yang menetapkan kerangka kerja untuk penerapan penilaian dalam berurusan dengan berbagai konstituen yang sering kali saling bertentangan. Paling tidak, kode etik harus menetapkan batasan yang jelas tentang pengejaran kepentingan pribadi, termasuk transaksi saham perusahaan. Kerangka kerja keseluruhan untuk perilaku etis melampaui kepatuhan terhadap hukum, yang seharusnya selalu menjadi persyaratan mendasar. Company-wide codes serve as a standard for conduct by both the board and key executives, setting the framework for the exercise of judgement in dealing with varying and often conflicting constituencies. At a minimum, the code of ethics should set clear limits on the pursuit of private interests, including dealings in the shares of the company. An overall framework for ethical conduct goes beyond compliance with the law, which should always be a fundamental requirement.	550-556
G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V: The responsibilities of the board V.E. The board should be able to exercise objective independent judgement on corporate affairs.	414

Prinsip Principle	
D.2.5	Apakah perusahaan memiliki batasan masa jabatan sembilan tahun atau kurang atau 2 masa jabatan selama lima tahun, masing-masing 1 masa jabatan untuk direktur/komisaris independen? Does the company have a term limit of nine years or less or 2 terms of five years 1 each for its independent directors/ commissioners? 1 Jangka waktu lima tahun harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum diperkenalkannya ASEAN Corporate Governance Scorecard pada tahun 2011. 1 The five years term must be required by legislation which pre- existed the introduction of the ASEAN Corporate Governance Scorecard in 2011

Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V: Tanggung jawab dewan direksi V.E. Dewan direksi harus mampu menjalankan penilaian independen yang objektif terhadap urusan perusahaan. Meskipun pendekatan nasional untuk mendefinisikan independensi bervariasi, berbagai kriteria digunakan, seperti tidak adanya hubungan dengan perusahaan, grupnya, dan manajemennya, auditor eksternal perusahaan, dan pemegang saham utama, serta tidak adanya remunerasi, secara langsung atau tidak langsung, dari perusahaan atau grupnya selain biaya jabatan direktur. Dewan direksi juga mungkin diminta untuk membuat temuan afirmatif bahwa seorang direktur independen terhadap perusahaan karena mereka tidak memiliki hubungan material dengan perusahaan atau bahwa direktur tidak memiliki hubungan yang akan mengganggu pelaksanaan penilaian independen dalam melaksanakan tanggung jawab seorang direktur. Banyak yurisdiksi juga menetapkan masa jabatan maksimum bagi direktur untuk dianggap independen.) G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V: The responsibilities of the board V.E. The board should be able to exercise objective independent judgement on corporate affairs. While national approaches to defining independence vary, a range of criteria are used, such as the absence of relationships with the company, its group and its management, the external auditor of the company and substantial shareholders, as well as the absence of remuneration, directly or indirectly, from the company or its group other than directorship fees. The board may also be required to make an affirmative finding that a director is independent of the company because they have no material relationship with the company or that the director has no relationship which would interfere with the exercise of independent judgement in carrying out the responsibilities of a director. Many jurisdictions also set a maximum tenure for directors to be considered independent.) ICGN (2021) PRINSIP 3: Komposisi dan pengangkatan 3.4 Masa Jabatan Direktur non-eksekutif independen harus menjabat dalam jangka waktu yang sesuai untuk memastikan mereka memberikan perspektif yang tidak memihak pada diskusi dan pengambilan keputusan dewan. Batasan masa jabatan, jika ada, dan identitas direktur yang telah melampaui batasan tersebut (dan dengan demikian tidak lagi dianggap independen) harus diungkapkan. Masa jabatan direktur harus ditinjau oleh Komite Nominasi setiap tahun dan pemilihan kembali direktur bergantung pada evaluasi yang memuaskan atas kontribusinya terhadap dewan. ICGN (2021) PRINCIPLE 3: Composition and appointment 3.4 Tenure Independent non-executive directors should serve for an appropriate length of time to ensure they contribute an impartial perspective to board discussion and decision-making. Term limits, where they exist, and the identity of directors who have exceeded such limits (and thus no longer deemed independent) should be disclosed. Director tenure should be reviewed by the Nomination Committee annually and director re-election contingent on a satisfactory evaluation of his or her contribution to the board.	414

	Prinsip Principle
D.2.6	Apakah perusahaan telah menetapkan batasan lima kursi dewan yang dapat dipegang oleh seorang direktur/komisaris independen/non-eksekutif secara bersamaan? Has the company set a limit of five board seats that an individual independent/non-executive director/commissioner may hold simultaneously?
D.2.7	Apakah perusahaan memiliki direktur eksekutif yang menjabat pada lebih dari dua dewan direksi perusahaan tercatat di luar grup? Does the company have any executive directors who serve on more than two boards of listed companies outside of the group?
Komite Nominasi Nominating Committee	
D.2.8	Apakah perusahaan memiliki Komite Nominasi? Does the company have a Nominating Committee?
D.2.9	Apakah Komite Nominasi terdiri dari mayoritas direktur/komisaris independen? Is the Nominating Committee comprised of a majority of independent directors/commissioners?
D.2.10	Apakah ketua Komite Nominasi seorang direktur/komisaris independen? Is the chairman of the Nominating Committee an independent director/commissioner?

Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V: Tanggung jawab dewan direksi V.E. Dewan direksi harus mampu menjalankan penilaian independen yang objektif terhadap urusan perusahaan. V.E.3 Anggota dewan direksi harus mampu berkomitmen secara efektif terhadap tanggung jawab mereka. Jabatan di terlalu banyak dewan direksi atau komite dapat mengganggu kinerja anggota dewan direksi. Beberapa yurisdiksi telah membatasi jumlah jabatan dewan direksi yang dapat dipegang. Pembatasan khusus mungkin kurang penting daripada memastikan bahwa anggota dewan direksi memiliki legitimasi dan kepercayaan di mata pemegang saham. Oleh karena itu, pengungkapan tentang keanggotaan dewan direksi dan komite lainnya serta tanggung jawab ketua kepada pemegang saham merupakan instrumen utama untuk meningkatkan nominasi dewan direksi dan komite. Pencapaian legitimasi juga akan difasilitasi oleh publikasi catatan kehadiran untuk masing-masing anggota dewan direksi (misalnya, apakah mereka telah melewatkan sejumlah besar rapat) dan pekerjaan lain yang dilakukan atas nama dewan direksi dan remunerasi terkait.	414
G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V: The responsibilities of the board V.E. The board should be able to exercise objective independent judgement on corporate affairs. V.E.3 Board members should be able to commit themselves effectively to their responsibilities. Service on too many boards or committees can interfere with the performance of board members. Some jurisdictions have limited the number of board positions that can be held. Specific limitations may be less important than ensuring that members of the board enjoy legitimacy and confidence in the eyes of shareholders. Disclosure about other board and committee memberships and chair responsibilities to shareholders is therefore a key instrument to improve board and committee nominations. Achieving legitimacy would also be facilitated by the publication of attendance records for individual board members (e.g. whether they have missed a significant number of meetings) and any other work undertaken on behalf of the board and the associated remuneration.	501
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): II: Hak dan perlakuan yang adil bagi pemegang saham dan fungsi kepemilikan utama II.C.5 Partisipasi pemegang saham yang efektif dalam keputusan tata kelola perusahaan utama, seperti pencalonan dan pemilihan anggota dewan, harus difasilitasi. Pemegang saham harus dapat menyampaikan pandangan mereka, termasuk melalui pemungutan suara pada rapat pemegang saham, tentang remunerasi anggota dewan dan/atau eksekutif utama, sebagaimana berlaku. Komponen ekuitas dari skema kompensasi untuk anggota dewan dan karyawan harus tunduk pada persetujuan pemegang saham.	432-448
G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): II: The rights and equitable treatment of shareholders and key ownership functions II.C.5 Effective shareholder participation in key corporate governance decisions, such as the nomination and election of board members, should be facilitated. Shareholders should be able to make their views known, including through votes at shareholder meetings, on the remuneration of board members and/or key executives, as applicable. The equity component of compensation schemes for board members and employees should be subject to shareholder approval.	

Prinsip Principle

D.2.11	Apakah perusahaan mengungkapkan ketentuan acuan/struktur tata kelola/piagam Komite Nominasi? Does the company disclose the terms of reference/governance structure/charter of the Nominating Committee?
D.2.12	Apakah kehadiran dalam rapat Komite Nominasi diungkapkan dan jika ya, apakah Komite Nominasi bertemu setidaknya dua kali selama setahun? Is the meeting attendance of the Nominating Committee disclosed and if so, did the Nominating Committee meet at least twice during the year?

Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
Terkait pencalonan kandidat, dewan direksi di banyak perusahaan telah membentuk komite pencalonan untuk memastikan kepatuhan dan transparansi yang tepat terhadap prosedur pencalonan yang ditetapkan dan untuk memfasilitasi dan mengoordinasikan pencarian dewan direksi yang seimbang, beragam, dan berkualitas. Merupakan praktik yang baik bagi anggota dewan direksi independen untuk memiliki peran kunci dalam komite ini. Untuk lebih meningkatkan proses seleksi, Prinsip-prinsip tersebut juga menyerukan pengungkapan penuh dan tepat waktu atas pengalaman dan latar belakang kandidat untuk dewan direksi dan proses pencalonan, yang akan memungkinkan penilaian yang tepat atas kemampuan dan kesesuaian setiap kandidat. Di beberapa wilayah hukum, diwajibkan atau dianggap sebagai praktik yang baik untuk juga mengungkapkan informasi tentang posisi dewan direksi atau keanggotaan komite lainnya yang dipegang oleh para kandidat, dan di beberapa wilayah hukum juga posisi yang mereka lamar. With respect to nomination of candidates, boards in many companies have established nomination committees to ensure proper compliance and transparency with established nomination procedures and to facilitate and co-ordinate the search for a balanced, diverse and qualified board. It is regarded as good practice for independent board members to have a key role on this committee. To further improve the selection process, the Principles also call for full and timely disclosure of the experience and background of candidates for the board and the nomination process, which will allow an informed assessment of the abilities and suitability of each candidate. It is required or considered good practice in some jurisdictions to also disclose information about any other board positions or committee memberships that nominees hold, and in some jurisdictions also positions that they are nominated for. Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V: Tanggung jawab dewan direksi V.E.1 Dewan direksi harus mempertimbangkan untuk menugaskan sejumlah anggota dewan independen yang mampu menjalankan penilaian independen untuk tugas-tugas yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Contoh tanggung jawab utama tersebut adalah memastikan integritas pelaporan keuangan dan pelaporan perusahaan lainnya, peninjauan transaksi pihak terkait, serta nominasi dan remunerasi anggota dewan direksi dan eksekutif utama. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V: The responsibilities of the board V.E.1 Boards should consider assigning a sufficient number of independent board members capable of exercising independent judgement to tasks where there is a potential for conflicts of interest. Examples of such key responsibilities are ensuring the integrity of financial and other corporate reporting, the review of related party transactions, and nomination and remuneration of board members and key executives.	
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V: Tanggung jawab dewan direksi V.E Dewan direksi harus mampu menjalankan penilaian independen yang objektif terhadap urusan perusahaan. V.E.2. Dewan direksi harus mempertimbangkan pembentukan komite khusus untuk mendukung seluruh dewan direksi dalam menjalankan fungsinya, khususnya komite audit – atau badan yang setara – untuk mengawasi pengungkapan, pengendalian internal, dan masalah terkait audit. Komite lain, seperti remunerasi, nominasi, atau manajemen risiko, dapat memberikan dukungan kepada dewan direksi tergantung pada ukuran, struktur, kompleksitas, dan profil risiko perusahaan. Mandat, komposisi, dan prosedur kerja mereka harus didefinisikan dengan baik dan diungkapkan oleh dewan direksi yang memegang tanggung jawab penuh atas keputusan yang diambil. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V: The responsibilities of the board V.E The board should be able to exercise objective independent judgement on corporate affairs. V.E.2. Boards should consider setting up specialized committees to support the full board in performing its functions, in particular the audit committee – or equivalent body – for overseeing disclosure, internal controls and audit-related matters. Other committees, such as remuneration, nomination or risk management, may provide support to the board depending upon the company's size, structure, complexity and risk profile. Their mandate, composition and working procedures should be well defined and disclosed by the board which retains full responsibility for the decisions taken.	432-448

Prinsip Principle

Komite Remunerasi / Komite Kompensasi
Remuneration Committee / Compensation Committee

D.2.13	Apakah perusahaan memiliki Komite Remunerasi? Does the company have a Remuneration Committee?
D.2.14	Apakah Komite Remunerasi terdiri seluruhnya dari direktur/komisaris non-eksekutif dengan mayoritas direktur/komisaris independen? Is the Remuneration Committee comprised entirely of non- executive directors/commissioners with a majority of independent directors/commissioners?
D.2.15	Apakah ketua Komite Remunerasi seorang direktur/komisaris independen? Is the chairman of the Remuneration Committee an independent director/commissioner?

Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
Jika dibenarkan dalam hal ukuran, struktur, sektor atau tingkat perkembangan perusahaan serta kebutuhan dewan dan profil anggotanya, penggunaan komite dapat meningkatkan kinerja dewan dan memungkinkan fokus yang lebih dalam pada area tertentu. Untuk mengevaluasi manfaat komite dewan, penting bagi pasar untuk menerima gambaran yang lengkap dan jelas tentang mandat, ruang lingkup, prosedur kerja, dan komposisi mereka. Informasi tersebut sangat penting di banyak yurisdiksi tempat dewan diharuskan membentuk komite audit independen dengan kewenangan untuk mengawasi hubungan dengan auditor eksternal. Where justified in terms of the size, structure, sector or level of development of the company as well as the board's needs and the profile of its members, the use of committees may improve the work of the board and allow for a deeper focus on specific areas. In order to evaluate the merits of board committees, it is important that the market receives a full and clear picture of their mandate, scope, working procedures and composition. Such information is particularly important in the many jurisdictions where boards are required to establish independent audit committees with powers to oversee the relationship with the external auditor.	
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V: Tanggung jawab dewan direksi V.D. Dewan direksi harus memenuhi beberapa fungsi utama, termasuk: V.D.5 Menyelaraskan remunerasi eksekutif dan dewan direksi dengan kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemegang sahamnya. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V: The responsibilities of the board V.D. The board should fulfil certain key functions, including: V.D.5 Aligning key executive and board remuneration with the longer term interests of the company and its shareholders. Dianggap sebagai praktik yang baik bagi dewan direksi untuk mengembangkan dan mengungkapkan pernyataan kebijakan remunerasi yang mencakup anggota dewan direksi dan eksekutif utama, serta mengungkapkan tingkat remunerasi mereka yang ditetapkan sesuai dengan kebijakan ini. Pernyataan kebijakan tersebut dapat menentukan, khususnya yang berkaitan dengan eksekutif, hubungan antara remunerasi dan kinerja dengan kriteria ex ante yang terkait dengan kinerja, dan mencakup standar yang dapat diukur yang menekankan kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemegang saham daripada pertimbangan jangka pendek. Standar yang dapat diukur tersebut antara lain dapat berkaitan dengan total pengembalian pemegang saham dan tujuan serta metrik keberlanjutan yang sesuai. Pernyataan kebijakan umumnya cenderung menetapkan ketentuan pembayaran kepada anggota dewan direksi untuk kegiatan di luar dewan direksi, seperti konsultasi. Pernyataan kebijakan tersebut juga sering menentukan ketentuan yang harus dipatuhi oleh anggota dewan direksi dan eksekutif utama tentang kepemilikan dan perdagangan saham perusahaan, serta prosedur yang harus diikuti dalam pemberian dan penetapan harga ulang opsi. Di beberapa yurisdiksi, pernyataan kebijakan juga memberikan panduan tentang pembayaran yang harus dilakukan saat mempekerjakan dan/atau mengakhiri kontrak seorang eksekutif. Dewan direksi juga dapat memantau penerapan pernyataan kebijakan tentang remunerasi. It is regarded as good practice for boards to develop and disclose a remuneration policy statement covering board members and key executives, as well as to disclose their remuneration levels set pursuant to this policy. Such policy statements may specify, especially with respect to executives, the relationship between remuneration and performance with ex ante criteria linked to performance, and include measurable standards that emphasize the long-term interests of the company and the shareholders over short-term considerations. Such measurable standards among others may relate to total shareholder return and appropriate sustainability goals and metrics. Policy statements generally tend to set conditions for payments to board members for extra-board activities, such as consulting. They also often specify terms to be observed by board members and key executives about holding and trading the stock of the company, and the procedures to be followed in granting and re-pricing options. In some jurisdictions, policy statements also provide guidance on the payments to be made when hiring and/or terminating the contract of an executive. The board may also monitor the implementation of the policy statement on remuneration.	432-448

Prinsip Principle	
D.2.16	Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/struktur tata kelola/piagam Komite Remunerasi? Does the company disclose the terms of reference/governance structure/ charter of the Remuneration Committee?
D.2.17	Apakah kehadiran dalam rapat Komite Remunerasi diungkapkan dan, jika demikian, apakah Komite Remunerasi bertemu setidaknya dua kali selama setahun? Is the meeting attendance of the Remuneration Committee disclosed and, if so, did the Remuneration Committee meet at least twice during the year?

Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
Banyak yurisdiksi merekomendasikan atau mengharuskan agar kebijakan dan kontrak remunerasi untuk anggota dewan dan eksekutif utama ditangani oleh komite khusus dewan yang terdiri dari seluruh atau sebagian besar direktur independen dan mengecualikan eksekutif yang bertugas di komite remunerasi masing-masing, yang dapat menyebabkan konflik kepentingan. Pengenalan ketentuan malus dan claw-back dianggap sebagai praktik yang baik. Ketentuan tersebut memberikan perusahaan hak untuk menahan dan memulihkan kompensasi dari para eksekutif dalam kasus penipuan manajerial dan keadaan lainnya, misalnya ketika perusahaan diharuskan untuk menyatakan kembali laporan keuangannya karena ketidakpatuhan material terhadap persyaratan pelaporan keuangan. Many jurisdictions recommend or require that remuneration policy and contracts for board members and key executives be handled by a special committee of the board comprising either wholly or a majority of independent directors and excluding executives that serve on each other's remuneration committees, which could lead to conflicts of interest. The introduction of malus and claw-back provisions is considered good practice. They grant the company the right to withhold and recover compensation from executives in cases of managerial fraud and other circumstances, for example when the company is required to restate its financial statements due to material noncompliance with financial reporting requirements.	
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V. Tanggung jawab dewan direksi V.E. Dewan direksi harus mampu menjalankan penilaian independen yang objektif terhadap urusan perusahaan. V.E.2. Dewan direksi harus mempertimbangkan pembentukan komite khusus untuk mendukung seluruh dewan direksi dalam menjalankan fungsinya, khususnya komite audit – atau badan yang setara – untuk mengawasi pengungkapan, pengendalian internal, dan masalah terkait audit. Komite lain, seperti remunerasi, nominasi, atau manajemen risiko, dapat memberikan dukungan kepada dewan direksi tergantung pada ukuran, struktur, kompleksitas, dan profil risiko perusahaan. Mandat, komposisi, dan prosedur kerja mereka harus didefinisikan dengan baik dan diungkapkan oleh dewan direksi yang memegang tanggung jawab penuh atas keputusan yang diambil. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V. The responsibilities of the board V.E. The board should be able to exercise objective independent judgement on corporate affairs. V.E.2. Boards should consider setting up specialized committees to support the full board in performing its functions, in particular the audit committee – or equivalent body – for overseeing disclosure, internal controls and audit-related matters. Other committees, such as remuneration, nomination or risk management, may provide support to the board depending upon the company's size, structure, complexity and risk profile. Their mandate, composition and working procedures should be well defined and disclosed by the board which retains full responsibility for the decisions taken. Jika dibenarkan dalam hal ukuran dan struktur perusahaan dan dewan direksinya, serta sektor atau tingkat perkembangan perusahaan, penggunaan komite dapat meningkatkan kinerja dewan direksi. Untuk mengevaluasi manfaat komite dewan direksi, penting bagi pasar untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang tujuan, tugas, dan komposisi mereka. Informasi tersebut khususnya penting di banyak yurisdiksi tempat dewan direksi diharuskan membentuk komite audit independen dengan kewenangan untuk mengawasi hubungan dengan auditor eksternal. Komite audit juga harus mampu mengawasi efektivitas dan integritas sistem pengendalian internal. Where justified in terms of the size and structure of the company and its board, as well as the company's sector or level of development, the use of committees may improve the work of the board. In order to evaluate the merits of board committees it is important that the market receives a full and clear picture of their purpose, duties and composition. Such information is particularly important in the many jurisdictions where boards are required to establish independent audit committees with powers to oversee the relationship with the external auditor. Audit committees should also be able to oversee the effectiveness and integrity of the internal control system.	432-448

Prinsip Principle	
Komite Audit Audit Committee	
D.2.18	Apakah perusahaan memiliki Komite Audit? Does the company have an Audit Committee?
D.2.19	Apakah Komite Audit seluruhnya terdiri dari direktur/komisaris non-eksekutif dengan mayoritas direktur/komisaris independen? Is the Audit Committee comprised entirely of non-executive directors/commissioners with a majority of independent directors/commissioners?
D.2.20	Apakah ketua Komite Audit seorang direktur/komisaris independen? Is the chairman of the Audit Committee an independent director/commissioner?
D.2.21	Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/struktur tata kelola/piagam Komite Audit? Does the company disclose the terms of reference/governance structure/charter of the Audit Committee?

Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V: Tanggung jawab dewan direksi V.E. Dewan direksi harus mampu menjalankan penilaian independen yang objektif terhadap urusan perusahaan. V.E.1 Dewan direksi harus mempertimbangkan untuk menugaskan sejumlah anggota dewan direksi independen yang mampu menjalankan penilaian independen untuk tugas-tugas yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Contoh tanggung jawab utama tersebut adalah memastikan integritas pelaporan keuangan dan pelaporan perusahaan lainnya, peninjauan transaksi pihak terkait, serta nominasi dan remunerasi anggota dewan direksi dan eksekutif utama. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V: The responsibilities of the board The board should be able to exercise objective independent judgement on corporate affairs. Boards should consider assigning a sufficient number of independent board members capable of exercising independent judgement to tasks where there is a potential for conflicts of interest. Examples of such key responsibilities are ensuring the integrity of financial and other corporate reporting, the review of related party transactions, and nomination and remuneration of board members and key executives.	484-492
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V: Tanggung jawab dewan direksi V.E. Dewan direksi harus mampu menjalankan penilaian independen yang objektif terhadap urusan perusahaan. Dewan direksi harus mempertimbangkan untuk menugaskan sejumlah anggota dewan direksi independen yang mampu menjalankan penilaian independen untuk tugas-tugas yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Contoh tanggung jawab utama tersebut adalah memastikan integritas pelaporan keuangan dan pelaporan perusahaan lainnya, peninjauan transaksi pihak terkait, serta nominasi dan remunerasi anggota dewan direksi dan eksekutif utama. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V: The responsibilities of the board The board should be able to exercise objective independent judgement on corporate affairs. Boards should consider assigning a sufficient number of independent board members capable of exercising independent judgement to tasks where there is a potential for conflicts of interest. Examples of such key responsibilities are ensuring the integrity of financial and other corporate reporting, the review of related party transactions, and nomination and remuneration of board members and key executives.	484-492
ICGN (2021) PRINSIP 8: Audit internal dan eksternal 8.3. Komite audit Dewan direksi harus membentuk komite audit yang seluruhnya terdiri dari direktur non-eksekutif independen. Setidaknya satu anggota komite audit harus memiliki keahlian keuangan terkini dan relevan dan semua anggota komite audit harus melek finansial, termasuk pemahaman dasar tentang akuntansi. Komite audit juga harus memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana faktor keberlanjutan dapat memengaruhi laporan keuangan perusahaan. Kerangka acuan untuk komite harus diungkapkan kepada publik dan mencakup: ICGN (2021) PRINCIPLE 8: Internal and external audit 8.3. Audit committee The board should establish an audit committee comprised entirely of independent non-executive directors. At least one member of the audit committee should have recent and relevant financial expertise and all audit committee members should be financially literate, including a basic understanding of accounting. Audit committees should also have a clear understanding of how sustainability factors can impact the company's financial statements. The terms of reference for the committee should be publicly disclosed and include:	484-492

	Prinsip Principle	
D.2.22	Apakah setidaknya satu direktur/komisaris independen dari komite memiliki keahlian akuntansi (kualifikasi atau pengalaman akuntansi)? Does at least one of the independent directors/commissioners of the committee have accounting expertise (accounting qualification or experience)?	
D.2.23	Apakah kehadiran Komite Audit dalam rapat diungkapkan dan, jika demikian, apakah Komite Audit bertemu setidaknya empat kali selama setahun? Is the meeting attendance of the Audit Committee disclosed and, if so, did the Audit Committee meet at least four times during the year?	
D.2.24	Apakah Komite Audit memiliki tanggung jawab utama untuk merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian auditor eksternal? Does the Audit Committee have primary responsibility for recommendation on the appointment, and removal of the external auditor?	

Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
ICGN (2021) PRINSIP 8: Audit internal dan eksternal 8.3. Komite audit Dewan direksi harus membentuk komite audit yang seluruhnya terdiri dari direktur non-eksekutif independen. Setidaknya satu anggota komite audit harus memiliki keahlian keuangan terkini dan relevan dan semua anggota komite audit harus melek finansial, termasuk pemahaman dasar tentang akuntansi. Komite audit juga harus memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana faktor keberlanjutan dapat memengaruhi laporan keuangan perusahaan. Kerangka acuan untuk komite harus diungkapkan kepada publik dan mencakup: ICGN (2021) PRINCIPLE 8: Internal and external audit 8.3. Audit committee The board should establish an audit committee comprised entirely of independent non-executive directors. At least one member of the audit committee should have recent and relevant financial expertise and all audit committee members should be financially literate, including a basic understanding of accounting. Audit committees should also have a clear understanding of how sustainability factors can impact the company's financial statements. The terms of reference for the committee should be publicly disclosed and include:	484-492
ICGN (2021) PRINSIP 8: Audit internal dan eksternal 8.3 Komite audit Dewan direksi harus membentuk komite audit yang seluruhnya terdiri dari direktur non-eksekutif independen. Setidaknya satu anggota komite audit harus memiliki keahlian keuangan terkini dan relevan dan semua anggota komite audit harus melek finansial, termasuk pemahaman dasar tentang akuntansi. Komite audit juga harus memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana faktor keberlanjutan dapat memengaruhi laporan keuangan perusahaan. Kerangka acuan untuk komite harus diungkapkan kepada publik dan mencakup: (f) merekomendasikan pengangkatan, pengangkatan kembali dan, jika perlu, pemberhentian auditor eksternal, serta menyetujui biaya audit. Setiap biaya non-audit biasanya harus lebih rendah dari biaya audit dan, jika tidak, harus ada penjelasan yang jelas tentang mengapa auditor perlu menyediakan layanan ini dan bagaimana independensi dan objektivitas audit dipastikan; ICGN (2021) PRINCIPLE 8: Internal and external audit 8.3 Audit committee The board should establish an audit committee comprised entirely of independent non-executive directors. At least one member of the audit committee should have recent and relevant financial expertise and all audit committee members should be financially literate, including a basic understanding of accounting. Audit committees should also have a clear understanding of how sustainability factors can impact the company's financial statements. The terms of reference for the committee should be publicly disclosed and include: (f) recommending the appointment, reappointment and, if necessary, the removal of the external auditor, as well as the approving audit fees. Any non-audit fees should normally be less than the audit fee and, if not, there should be a clear explanation as to why it was necessary for the auditor to provide these services and how the independence and objectivity of the audit was assured;	484-492

Prinsip Principle	
D.3	**Proses Dewan** Board Processes
Rapat dewan dan kehadiran Board meetings and attendance	
D.3.1	Apakah rapat dewan direksi dijadwalkan sebelum dimulainya tahun keuangan? Are the board of directors meeting scheduled before the start of financial year?
D.3.2	Apakah dewan direksi/komisaris bertemu setidaknya enam kali dalam setahun? Does the board of directors/commissioners meet at least six times during the year?

Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
Penjadwalan rapat dewan direksi sebelum atau di awal tahun akan memungkinkan para direktur untuk merencanakan lebih awal untuk menghadiri rapat tersebut, sehingga membantu memaksimalkan partisipasi, terutama karena direktur non-eksekutif sering kali memiliki komitmen lain. Rapat ad hoc tambahan selalu dapat dijadwalkan jika dan ketika diperlukan. Merupakan praktik umum bagi dewan direksi di pasar maju untuk menjadwalkan rapat dengan cara ini. Scheduling board meetings before or at the beginning of the year would allow directors to plan ahead to attend such meetings, thereby helping to maximize participation, especially as non-executive directors often have other commitments. Additional ad hoc meetings can always be scheduled if and when necessary. It is common practice for boards in developed markets to schedule meetings in this way.	469
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V. Tanggung jawab dewan direksi V.E.3 Anggota dewan direksi harus mampu berkomitmen secara efektif terhadap tanggung jawab mereka. Pencapaian legitimasi juga akan difasilitasi oleh publikasi catatan kehadiran masing-masing anggota dewan direksi (misalnya, apakah mereka telah melewatkan sejumlah besar rapat) dan pekerjaan lain yang dilakukan atas nama dewan direksi dan remunerasi terkait. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V. The responsibilities of the board V.E.3 Board members should be able to commit themselves effectively to their responsibilities. Achieving legitimacy would also be facilitated by the publication of attendance records for individual board members (e.g. whether they have missed a significant number of meetings) and any other work undertaken on behalf of the board and the associated remuneration. ICGN (2021) PRINSIP 1: Peran dan tanggung jawab dewan direksi 1.5 Komitmen Dewan direksi harus mengadakan rapat secara berkala untuk melaksanakan tugasnya dan para direktur harus menyediakan waktu yang cukup untuk mempersiapkan dan menghadiri rapat dewan direksi. ICGN (2021) PRINCIPLE 1: Board role and responsibilities 1.5 Commitment The board should meet regularly to discharge its duties and directors should commit adequate time to board meeting preparation and attendance.	494-499

	Prinsip Principle
D.3.3	Apakah masing-masing direktur/komisaris menghadiri setidaknya 75% dari semua rapat dewan yang diadakan selama tahun tersebut? Has each of the directors/commissioners attended at least 75% of all the board meetings held during the year?
D.3.4	Apakah perusahaan mensyaratkan kuorum minimal 2/3 untuk keputusan dewan? Does the company require a minimum quorum of at least 2/3 for board decisions?
D.3.5	Apakah direktur/komisaris non-eksekutif perusahaan mengadakan rapat terpisah setidaknya satu kali dalam setahun tanpa kehadiran satu pun eksekutif? Did the non-executive directors/commissioners of the company meet separately at least once during the year without any executives present?

Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V: Tanggung jawab dewan direksi V.E. Dewan direksi harus mampu menjalankan penilaian independen yang objektif terhadap urusan perusahaan. V.E.3 Anggota dewan direksi harus mampu berkomitmen secara efektif terhadap tanggung jawab mereka. Jabatan di terlalu banyak dewan direksi atau komite dapat mengganggu kinerja anggota dewan direksi. Beberapa yurisdiksi telah membatasi jumlah jabatan dewan direksi yang dapat dipegang. Pembatasan khusus mungkin kurang penting daripada memastikan bahwa anggota dewan direksi menikmati legitimasi dan kepercayaan di mata pemegang saham. Oleh karena itu, pengungkapan tentang keanggotaan dewan direksi dan komite lainnya serta tanggung jawab ketua kepada pemegang saham merupakan instrumen utama untuk meningkatkan nominasi dewan direksi dan komite. Pencapaian legitimasi juga akan difasilitasi oleh publikasi catatan kehadiran untuk masing-masing anggota dewan direksi (misalnya, apakah mereka telah melewatkan sejumlah besar rapat) dan pekerjaan lain yang dilakukan atas nama dewan direksi dan remunerasi terkait. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V: The responsibilities of the board V.E. The board should be able to exercise objective independent judgement on corporate affairs. V.E.3 Board members should be able to commit themselves effectively to their responsibilities. Service on too many boards or committees can interfere with the performance of board members. Some jurisdictions have limited the number of board positions that can be held. Specific limitations may be less important than ensuring that members of the board enjoy legitimacy and confidence in the eyes of shareholders. Disclosure about other board and committee memberships and chair responsibilities to shareholders is therefore a key instrument to improve board and committee nominations. Achieving legitimacy would also be facilitated by the publication of attendance records for individual board members (e.g. whether they have missed a significant number of meetings) and any other work undertaken on behalf of the board and the associated remuneration.	494-499
	469
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V. Tanggung jawab dewan direksi V.E. Dewan direksi harus mampu menjalankan penilaian independen yang objektif terhadap urusan perusahaan. Anggota dewan direksi yang independen dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengambilan keputusan dewan direksi. Mereka dapat memberikan pandangan yang objektif terhadap evaluasi kinerja dewan direksi dan manajemen. Selain itu, mereka dapat memainkan peran penting dalam bidang-bidang yang mungkin memiliki perbedaan kepentingan antara manajemen, perusahaan, dan pemegang sahamnya, seperti remunerasi eksekutif, perencanaan suksesi, perubahan kendali perusahaan, pembelaan terhadap pengambilalihan, akuisisi besar, dan fungsi audit. Agar mereka dapat memainkan peran penting ini, dewan direksi sebaiknya menyatakan siapa yang mereka anggap independen dan kriteria untuk penilaian ini. Beberapa yurisdiksi juga mengharuskan rapat terpisah dari direktur independen secara berkala. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V. The responsibilities of the board V.E. The board should be able to exercise objective independent judgement on corporate affairs. Independent board members can contribute significantly to the decision making of the board. They can bring an objective view to the evaluation of the performance of the board and management. In addition, they can play an important role in areas where the interests of management, the company and its shareholders may diverge such as executive remuneration, succession planning, changes of corporate control, take-over defenses, large acquisitions and the audit function. In order for them to play this key role, it is desirable that boards declare who they consider to be independent and the criterion for this judgement. Some jurisdictions also require separate meetings of independent directors on a periodic basis.	494-499

Prinsip Principle

Akses terhadap informasi
Access to information

D.3.6	Apakah berkas rapat direksi/komisaris diberikan kepada dewan setidaknya lima hari kerja sebelum rapat dewan? Are board papers for board of directors/commissioners meetings provided to the board at least five business days in advance of the board meeting?

Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
ICGN (2021) PRINSIP 2: Kepemimpinan dan independensi 2.7. Rapat independen Pimpinan harus secara rutin mengadakan rapat dengan direktur non-eksekutif tanpa kehadiran direktur eksekutif. Selain itu, direktur non-eksekutif (yang dipimpin oleh LID) harus bertemu setidaknya setahun sekali, tanpa kehadiran pimpinan, untuk menilai kinerja pimpinan atau jika diperlukan. ICGN (2021) PRINCIPLE 2: Leadership and independence 2.7. Independent meetings The chair should regularly hold meetings with the non-executive directors without executive directors present. In addition, the non-executive directors (led by the LID) should meet at least annually, without the chair present, to appraise the chair's performance or as appropriate.	
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V. Tanggung jawab dewan direksi V.F. Agar dapat memenuhi tanggung jawabnya, anggota dewan direksi harus memiliki akses ke informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu. Anggota dewan direksi memerlukan informasi yang relevan secara tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan mereka. Anggota dewan direksi non-eksekutif biasanya tidak memiliki akses yang sama terhadap informasi seperti manajer kunci dalam perusahaan. Kontribusi anggota dewan direksi non-eksekutif terhadap perusahaan dapat ditingkatkan dengan menyediakan akses ke manajer kunci tertentu dalam perusahaan seperti, misalnya, sekretaris perusahaan, auditor internal, dan kepala manajemen risiko atau kepala petugas risiko, dan menggunakan nasihat eksternal yang independen dengan biaya perusahaan. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V. The responsibilities of the board V.F. In order to fulfil their responsibilities, board members should have access to accurate, relevant and timely information. Board members require relevant information on a timely basis in order to support their decision-making. Non-executive board members do not typically have the same access to information as key managers within the company. The contributions of non-executive board members to the company can be enhanced by providing access to certain key managers within the company such as, for example, the company secretary, the internal auditor, and the head of risk management or chief risk officer, and recourse to independent external advice at the expense of the company. Agar dapat memenuhi tanggung jawabnya, anggota dewan direksi harus memiliki akses dan memastikan bahwa mereka memperoleh informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu. Dalam kasus ketika perusahaan yang diperdagangkan secara publik merupakan bagian dari suatu grup, kerangka peraturan juga harus memastikan akses anggota dewan direksi terhadap informasi penting tentang aktivitas anak perusahaannya untuk mengelola risiko di seluruh grup dan menerapkan tujuan di seluruh grup. Pada saat yang sama, kerangka peraturan harus menjaga perlindungan untuk memastikan bahwa orang dalam tidak akan menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi mereka atau orang lain. Jika perusahaan mengandalkan model manajemen risiko yang kompleks, anggota dewan direksi harus diberi tahu tentang kemungkinan kekurangan model tersebut. In order to fulfil their responsibilities, board members should have access to and ensure that they obtain accurate, relevant and timely information. In cases when a publicly traded company is a part of a group, the regulatory framework should also ensure board members' access to key information about the activities of its subsidiaries to manage group-wide risks and implement group-wide objectives. At the same time, the regulatory framework should maintain safeguards to ensure that insiders will not use such information for their personal gain or of others. Where companies rely on complex risk management models, board members should be made aware of the possible shortcomings of such models.	Diatur dalam Anggaran Dasar dan Board Manual

	Prinsip Principle	
D.3.7	Apakah sekretaris perusahaan memainkan peran penting dalam mendukung dewan dalam melaksanakan tanggung jawabnya? Does the company secretary play a significant role in supporting the board in discharging its responsibilities?	
D.3.8	Apakah sekretaris perusahaan terlatih dalam bidang hukum, akuntansi atau praktik kesekretariatan perusahaan dan selalu mengikuti perkembangan yang relevan? Is the company secretary trained in legal, accountancy or company secretarial practices and has kept abreast on relevant developments?	

Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V: Tanggung jawab dewan direksi V.F. Agar dapat memenuhi tanggung jawabnya, anggota dewan direksi harus memiliki akses ke informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu. Anggota dewan direksi memerlukan informasi yang relevan secara tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan mereka. Anggota dewan direksi non-eksekutif biasanya tidak memiliki akses yang sama terhadap informasi seperti manajer kunci dalam perusahaan. Kontribusi anggota dewan direksi non-eksekutif terhadap perusahaan dapat ditingkatkan dengan menyediakan akses ke manajer kunci tertentu dalam perusahaan seperti, misalnya, sekretaris perusahaan, auditor internal, dan kepala manajemen risiko atau kepala petugas risiko, dan menggunakan nasihat eksternal yang independen dengan biaya perusahaan. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V: The responsibilities of the board V.F. In order to fulfil their responsibilities, board members should have access to accurate, relevant and timely information. Board members require relevant information on a timely basis in order to support their decision-making. Non-executive board members do not typically have the same access to information as key managers within the company. The contributions of non-executive board members to the company can be enhanced by providing access to certain key managers within the company such as, for example, the company secretary, the internal auditor, and the head of risk management or chief risk officer, and recourse to independent external advice at the expense of the company. ICGN (2021) PRINSIP 1: Peran dan tanggung jawab dewan direksi 1.8. Nasihat Dewan direksi harus memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhi tanggung jawabnya secara efisien dan efektif berdasarkan hukum dan peraturan yang relevan. Dewan direksi harus memiliki akses terhadap nasihat dari sekretaris perusahaan (atau penasihat umum) dan/atau nasihat independen yang sesuai dengan biaya perusahaan. ICGN (2021) PRINCIPLE 1: Board role and responsibilities 1.8. Advice The board should have adequate resources to fulfil its responsibilities efficiently and effectively under relevant law and regulation. The board should have access to advice from a company secretary (or general counsel) and/or independent advice as appropriate at the company's expense.	474-483
	474-483

Prinsip Principle	
Pengangkatan dan Pemilihan Kembali Dewan Direksi Board Appointments and Re-Election	
D.3.9	Apakah perusahaan mengungkapkan kriteria yang digunakan dalam memilih direktur/komisaris baru? Does the company disclose the criteria used in selecting new directors/commissioners?
D.3.10	Apakah perusahaan menjelaskan proses yang diikuti dalam menunjuk direktur/komisaris baru? Did the company describe the process followed in appointing new directors/commissioners?

Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): II. Hak dan perlakuan yang adil bagi pemegang saham dan fungsi kepemilikan utama II.C.5 Partisipasi pemegang saham yang efektif dalam keputusan tata kelola perusahaan utama, seperti pencalonan dan pemilihan anggota dewan, harus difasilitasi. Pemegang saham harus dapat menyampaikan pandangan mereka, termasuk melalui pemungutan suara pada rapat pemegang saham, tentang remunerasi anggota dewan dan/atau eksekutif utama, sebagaimana berlaku. Komponen ekuitas dari skema kompensasi untuk anggota dewan dan karyawan harus tunduk pada persetujuan pemegang saham. Pemilihan anggota dewan adalah hak dasar pemegang saham. Agar proses pemilihan efektif, pemegang saham harus dapat berpartisipasi dalam pencalonan anggota dewan dan memberikan suara pada masing-masing calon atau pada daftar yang berbeda. Untuk tujuan ini, pemegang saham memiliki akses di sejumlah negara ke materi pemungutan suara perusahaan yang disediakan bagi pemegang saham, dengan ketentuan untuk mencegah penyalahgunaan. Terkait pencalonan kandidat, dewan direksi di banyak perusahaan telah membentuk komite pencalonan untuk memastikan kepatuhan dan transparansi yang tepat terhadap prosedur pencalonan yang ditetapkan dan untuk memfasilitasi dan mengoordinasikan pencarian dewan direksi yang seimbang, beragam, dan berkualitas. Merupakan praktik yang baik bagi anggota dewan direksi independen untuk memiliki peran penting dalam komite ini. Untuk lebih meningkatkan proses seleksi, Prinsip-prinsip tersebut juga menyerukan pengungkapan penuh dan tepat waktu atas pengalaman dan latar belakang kandidat untuk dewan direksi dan proses pencalonan, yang akan memungkinkan penilaian yang tepat atas kemampuan dan kesesuaian setiap kandidat. Di beberapa wilayah hukum, diwajibkan atau dianggap sebagai praktik yang baik untuk juga mengungkapkan informasi tentang posisi dewan direksi lain yang dipegang oleh para kandidat, dan di beberapa wilayah hukum juga posisi yang mereka lamar. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): II. The rights and equitable treatment of shareholders and key ownership functions II.C.5 Effective shareholder participation in key corporate governance decisions, such as the nomination and election of board members, should be facilitated. Shareholders should be able to make their views known, including through votes at shareholder meetings, on the remuneration of board members and/or key executives, as applicable. The equity component of compensation schemes for board members and employees should be subject to shareholder approval. Electing the members of the board is a basic shareholder right. For the election process to be effective, shareholders should be able to participate in the nomination of board members and vote on individual nominees or on different lists of them. To this end, shareholders have access in a number of countries to the company's voting materials which are made available to shareholders, subject to conditions to prevent abuse. With respect to nomination of candidates, boards in many companies have established nomination committees to ensure proper compliance and transparency with established nomination procedures and to facilitate and co-ordinate the search for a balanced, diverse and qualified board. It is regarded as good practice for independent board members to have a key role on this committee. To further improve the selection process, the Principles also call for full and timely disclosure of the experience and background of candidates for the board and the nomination process, which will allow an informed assessment of the abilities and suitability of each candidate. It is required or considered good practice in some jurisdictions to also disclose information about any other board positions that nominees hold, and in some jurisdictions also positions that they are nominated for.	397 dan 459

Prinsip Principle	
D.3.11	Apakah semua direktur/komisaris tunduk pada pemilihan ulang setiap 3 tahun; atau 5 tahun untuk perusahaan tercatat di negara yang undang-undangnya menetapkan masa jabatan 5 tahun2 masing-masing? Are all directors/commissioners subject to re-election every 3 years; or 5 years for listed companies in countries whose legislation prescribes a term of 5 years2 each? 2 Jangka waktu lima tahun harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum diperkenalkannya ASEAN Corporate Governance Scorecard pada tahun 2011. 2 The five years term must be required by legislation which pre- existed the introduction of the ASEAN Corporate Governance Scorecard in 2011

Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V: Tanggung jawab dewan direksi V.D. Dewan direksi harus memenuhi beberapa fungsi utama, termasuk: V.D.6 Memastikan proses nominasi dan pemilihan dewan direksi yang formal dan transparan. Prinsip-prinsip tersebut mendorong peran aktif pemegang saham dalam nominasi dan pemilihan anggota dewan direksi. Dewan direksi, dengan dukungan komite nominasi jika dibentuk, memiliki peran penting untuk memastikan bahwa proses nominasi dan pemilihan dipatuhi. Pertama, meskipun prosedur aktual untuk nominasi mungkin berbeda di setiap negara, dewan direksi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa prosedur yang ditetapkan transparan dan dipatuhi. Kedua, dewan direksi memiliki peran utama dalam menentukan profil umum atau individu anggota dewan direksi yang mungkin dibutuhkan perusahaan pada waktu tertentu, dengan mempertimbangkan pengetahuan, kompetensi, dan keahlian yang sesuai untuk melengkapi keterampilan dewan direksi yang ada. Ketiga, dewan direksi atau komite nominasi memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi kandidat potensial untuk memenuhi profil yang diinginkan dan mengusulkannya kepada pemegang saham, dan/atau mempertimbangkan kandidat yang diajukan oleh pemegang saham. Keterlibatan dan dialog dewan direksi dengan pemegang saham dianggap sebagai praktik yang baik dalam proses ini, dengan syarat dewan direksi memastikan transparansi, perlakuan yang sama, dan informasi sensitif internal dan bisnis tidak diungkapkan. Dianggap sebagai praktik yang baik untuk melakukan proses pencarian terbuka yang mencakup berbagai latar belakang untuk menanggapi tujuan keberagaman dan sifat risiko yang terus berkembang. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V: The responsibilities of the board V.D. The board should fulfil certain key functions, including: V.D.6 Ensuring a formal and transparent board nomination and election process. The Principles promote an active role for shareholders in the nomination and election of board members. The board, with the support of a nomination committee if established, has an essential role to play in ensuring that the nomination and election processes are respected. First, while actual procedures for nomination may differ among countries, the board has the responsibility to make sure that established procedures are transparent and respected. Second, the board has a key role in defining the general or individual profile of board members that the company may need at any given time, considering the appropriate knowledge, competencies and expertise to complement the existing skills of the board. Third, the board or nomination committee has the responsibility to identify potential candidates to meet desired profiles and propose them to shareholders, and/or consider those candidates advanced by shareholders. The board's engagement and dialogue with shareholders is considered good practice in this process, provided that the board ensures transparency, equal treatment and that inside and business sensitive information is not disclosed. It is considered good practice to conduct open search processes extending to a broad range of backgrounds to respond to diversity objectives and the evolving nature of risks.	
PRINSIP 3 ICGS (2021): Komposisi dan pengangkatan 3.7 Proses pemilihan direktur Para direktur sebaiknya dipilih menjadi anggota dewan setiap tahun, atau dipilih setiap tiga tahun sekali, dan bertanggung jawab kepada pemegang saham melalui persetujuan mayoritas saham yang memberikan suara mendukung pada setiap resolusi. ICGS (2021) PRINCIPLE 3: Composition and appointment 3.7 Director election process Directors should be elected to the board preferably on an annual basis, or stand for election once every three years, and be accountable to shareholders by approval of a majority of shares voted in favor on each resolution.	398 & 460

Prinsip Principle	
Masalah Remunerasi Remuneration Matters	
D.3.12	Apakah pemegang saham atau Dewan Direksi menyetujui remunerasi direktur eksekutif dan/atau eksekutif senior? Do the shareholders or the Board of Directors approve the remuneration of the executive directors and/or the senior executives?

D.3.12	Apakah pemegang saham atau Dewan Direksi menyetujui remunerasi direktur eksekutif dan/atau eksekutif senior? Do the shareholders or the Board of Directors approve the remuneration of the executive directors and/or the senior executives?

D.3.13	Apakah perusahaan memiliki standar yang terukur untuk menyelaraskan remunerasi berbasis kinerja direktur eksekutif dan eksekutif senior dengan kepentingan jangka panjang perusahaan, seperti ketentuan penarikan kembali dan bonus yang ditangguhkan? Does the company have measurable standards to align the performance-based remuneration of the executive directors and senior executives with long-term interests of the company, such as claw back provision and deferred bonuses?

Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V: Tanggung jawab dewan direksi V.D. Dewan direksi harus memenuhi beberapa fungsi utama, termasuk: V.D.5. Menyelaraskan remunerasi eksekutif dan dewan direksi dengan kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemegang sahamnya. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V: The responsibilities of the board V.D. The board should fulfil certain key functions, including: V.D.5. Aligning key executive and board remuneration with the longer term interests of the company and its shareholders. ICGN (2021) PRINSIP 5: Remunerasi Remunerasi harus dirancang untuk menyelaraskan kepentingan CEO, pejabat eksekutif, dan tenaga kerja secara adil dan efektif dengan strategi dan tujuan perusahaan untuk membantu memastikan pelestarian dan penciptaan nilai berkelanjutan dalam jangka panjang. Remunerasi agregat harus diimbangi dengan tepat dengan pembayaran dividen kepada pemegang saham dan retensi modal untuk investasi masa depan dan tingkat kuantum harus dapat dipertahankan relatif terhadap pertimbangan sosial yang berkaitan dengan ketimpangan pendapatan. ICGN (2021) PRINCIPLE 5: Remuneration Remuneration should be designed to equitably and effectively align the interests of the CEO, executive officers and workforce with a company's strategy and purpose to help ensure long-term sustainable value preservation and creation. Aggregate remuneration should be appropriately balanced with the payment of dividends to shareholders and retention of capital for future investment and the level of quantum should be defendable relative to social considerations relating to income inequality.	365-396
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V. Tanggung jawab dewan direksi V.D. Dewan direksi harus memenuhi beberapa fungsi utama, termasuk: V.D.5 Menyelaraskan remunerasi eksekutif dan dewan direksi dengan kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemegang sahamnya. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V. The responsibilities of the board V.D. The board should fulfil certain key functions, including: V.D.5 Aligning key executive and board remuneration with the longer term interests of the company and its shareholders. Banyak yurisdiksi merekomendasikan atau mengharuskan agar kebijakan dan kontrak remunerasi untuk anggota dewan dan eksekutif utama ditangani oleh komite khusus dewan yang terdiri dari seluruh atau sebagian besar direktur independen dan mengecualikan eksekutif yang bertugas di komite remunerasi masing-masing, yang dapat menyebabkan konflik kepentingan. Pengenalan ketentuan malus dan claw-back dianggap sebagai praktik yang baik. Ketentuan tersebut memberikan perusahaan hak untuk menahan dan memulihkan kompensasi dari para eksekutif dalam kasus penipuan manajerial dan keadaan lainnya, misalnya ketika perusahaan diharuskan untuk menyatakan kembali laporan keuangannya karena ketidakpatuhan material terhadap persyaratan pelaporan keuangan. Many jurisdictions recommend or require that remuneration policy and contracts for board members and key executives be handled by a special committee of the board comprising either wholly or a majority of independent directors and excluding executives that serve on each other's remuneration committees, which could lead to conflicts of interest. The introduction of malus and claw-back provisions is considered good practice. They grant the company the right to withhold and recover compensation from executives in cases of managerial fraud and other circumstances, for example when the company is required to restate its financial statements due to material noncompliance with financial reporting requirements.	504-510

Prinsip Principle

Audit Internal
Internal Audit

D.3.14	Apakah perusahaan memiliki fungsi audit internal yang terpisah? Does the company have a separate internal audit function?

Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
ICGN (2021) PRINSIP 5: Remunerasi 5.4 Malus dan clawback Perusahaan harus memasukkan ketentuan dalam rencana insentif mereka yang memungkinkan perusahaan untuk menahan pembayaran sejumlah uang ('malus'), atau memulihkan sejumlah uang yang dibayarkan ('clawback'), jika terjadi pelanggaran serius atau kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan perusahaan. ICGN (2021) PRINCIPLE 5: Remuneration 5.4 Malus and clawback Companies should include provisions in their incentive plans that enable the company to withhold the payment of any sum ('malus'), or recover sums paid ('clawback'), in the event of serious misconduct or a material misstatement in the company's financial statements.	
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V. Tanggung jawab dewan direksi V.D. Dewan direksi harus memenuhi beberapa fungsi utama, termasuk: V.D.8. Memastikan integritas sistem akuntansi dan pelaporan perusahaan untuk pengungkapan, termasuk audit independen, dan bahwa sistem pengendalian yang tepat telah diterapkan, sesuai dengan hukum dan standar yang relevan. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V. The responsibilities of the board V.D. The board should fulfil certain key functions, including: V.D.8. Ensuring the integrity of the corporation's accounting and reporting systems for disclosure, including the independent audit, and that appropriate systems of control are in place, in compliance with the law and relevant standards. Dewan direksi harus menunjukkan peran kepemimpinan untuk memastikan bahwa sarana pengawasan risiko yang efektif telah tersedia. Memastikan integritas sistem pelaporan dan pemantauan yang penting akan mengharuskan dewan direksi menetapkan dan menegakkan garis tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas di seluruh organisasi. Dewan direksi juga perlu memastikan bahwa ada pengawasan yang tepat oleh manajemen senior. The board should demonstrate a leadership role to ensure that an effective means of risk oversight is in place. Ensuring the integrity of the essential reporting and monitoring systems will require that the board sets and enforces clear lines of responsibility and accountability throughout the organization. The board will also need to ensure that there is appropriate oversight by senior management. Biasanya, hal ini mencakup pembentukan fungsi audit internal. Fungsi ini dapat memainkan peran penting dalam memberikan dukungan berkelanjutan kepada komite audit dewan atau badan setara dalam pengawasan komprehensifnya terhadap kontrol internal dan operasi perusahaan. Peran dan fungsi audit internal bervariasi di berbagai yurisdiksi, tetapi dapat mencakup penilaian dan evaluasi tata kelola, manajemen risiko, dan proses kontrol internal. Normally, this includes the establishment of an internal audit function. This function can play a critical role in providing ongoing support to the audit committee of the board or an equivalent body of its comprehensive oversight of the internal controls and operations of the company. The role and functions of internal audit vary across jurisdictions, but they can include assessment and evaluation of governance, risk management, and internal control processes.	484-492

	Prinsip Principle
D.3.15	Apakah kepala audit internal diidentifikasi atau, jika dialihdayakan, apakah nama firma eksternal diungkapkan? Is the head of internal audit identified or, if outsourced, is the name of the external firm disclosed?
D.3.16	Apakah pengangkatan dan pemberhentian auditor internal memerlukan persetujuan Komite Audit? Does the appointment and removal of the internal auditor require the approval of the Audit Committee?
Pengawasan Risiko Risk Oversight	
D.3.17	Apakah perusahaan menetapkan prosedur pengendalian internal/kerangka manajemen risiko yang baik dan secara berkala meninjau efektivitas kerangka tersebut? Does the company establish a sound internal control procedures/risk management framework and periodically review the effectiveness of that framework?

Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
Perusahaan sering kali mengungkapkan bahwa mereka memiliki audit internal, tetapi dalam praktiknya, audit internal lebih banyak bersifat formal daripada substansi. Misalnya, audit internal internal dapat ditugaskan kepada seseorang dengan tanggung jawab operasional lainnya. Karena audit internal tidak diatur, tidak seperti audit eksternal, ada firma yang menyediakan layanan audit internal yang dialihdayakan yang tidak memiliki kualifikasi yang tepat untuk melakukannya. Memublikasikan identitas kepala audit internal atau penyedia layanan eksternal akan memberikan sejumlah perlindungan bahwa audit internal bersifat substantif. Companies often disclose that they have an internal audit but, in practice, it is not uncommon for it to exist more in form than in substance. For example, the in-house internal audit may be assigned to someone with other operational responsibilities. As internal audit is unregulated, unlike external audit, there are firms providing outsourced internal audit services which are not properly qualified to do so. Making the identity of the head of internal audit or the external service provider public would provide some level of safeguard that the internal audit is substantive.	484-492
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V: Tanggung jawab dewan direksi V.D. Dewan direksi harus memenuhi beberapa fungsi utama, termasuk: V.D.8. Memastikan integritas sistem akuntansi dan pelaporan perusahaan untuk pengungkapan, termasuk audit independen, dan bahwa sistem pengendalian yang tepat telah diterapkan, sesuai dengan hukum dan standar yang relevan. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V: The responsibilities of the board V.D. The board should fulfil certain key functions, including: V.D.8. Ensuring the integrity of the corporation's accounting and reporting systems for disclosure, including the independent audit, and that appropriate systems of control are in place, in compliance with the law and relevant standards. Dianggap sebagai praktik yang baik bagi auditor internal untuk melapor kepada komite audit independen dari dewan atau badan setara yang juga bertanggung jawab untuk mengelola hubungan dengan auditor eksternal, sehingga memungkinkan tanggapan terkoordinasi oleh dewan. It is considered good practice for the internal auditors to report to an independent audit committee of the board or an equivalent body which is also responsible for managing the relationship with the external auditor, thereby allowing a co-ordinated response by the board.	484-492
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V: Tanggung jawab dewan direksi V.D. Dewan direksi harus memenuhi beberapa fungsi utama, termasuk: V.D.2. Meninjau dan menilai kebijakan serta prosedur manajemen risiko. V.D.8. Memastikan integritas sistem akuntansi dan pelaporan perusahaan untuk pengungkapan, termasuk audit independen, dan bahwa sistem pengendalian yang tepat telah diterapkan, sesuai dengan hukum dan standar yang relevan. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V: The responsibilities of the board V.D. The board should fulfil certain key functions, including: V.D.2. Reviewing and assessing risk management policies and procedures. V.D.8. Ensuring the integrity of the corporation's accounting and reporting systems for disclosure, including the independent audit, and that appropriate systems of control are in place, in compliance with the law and relevant standards.	524-533

Prinsip Principle	
D.3.18	Apakah Laporan Tahunan/Laporan CG Tahunan mengungkapkan bahwa dewan direksi/komisaris telah melakukan tinjauan terhadap pengendalian material perusahaan (termasuk pengendalian operasional, keuangan, dan kepatuhan) dan sistem manajemen risiko? Does the Annual Report/Annual CG Report disclose that the board of directors/commissioners has conducted a review of the company's material controls (including operational, financial and compliance controls) and risk management systems?
D.3.19	Apakah perusahaan mengungkapkan risiko utama yang secara material dihadapi perusahaan (yaitu keuangan, operasional termasuk TI, lingkungan, sosial, ekonomi)? Does the company disclose the key risks to which the company is materially exposed to (i.e. financial, operational including IT, environmental, social, economic)?

Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
ICGN (2021) PRINSIP 6: Pengawasan risiko Dewan direksi harus secara proaktif mengawasi penilaian dan pengungkapan risiko utama perusahaan dan menyetujui pendekatan terhadap manajemen risiko dan pengendalian internal secara berkala jika terjadi perubahan bisnis yang signifikan dan memastikan bahwa pendekatan tersebut berfungsi secara efektif. ICGN (2021) PRINCIPLE 6: Risk oversight The board should proactively oversee the assessment and disclosure of the company's key risks and approve the approach to risk management and internal controls regularly with any significant business change and satisfy itself that the approach is functioning effectively.	
ICGN (2021) PRINSIP 6: Pengawasan risiko Dewan direksi harus secara proaktif mengawasi penilaian dan pengungkapan risiko utama perusahaan dan menyetujui pendekatan terhadap manajemen risiko dan pengendalian internal secara berkala jika terjadi perubahan bisnis yang signifikan dan memastikan bahwa pendekatan tersebut berfungsi secara efektif. ICGN (2021) PRINCIPLE 6: Risk oversight The board should proactively oversee the assessment and disclosure of the company's key risks and approve the approach to risk management and internal controls regularly with any significant business change and satisfy itself that the approach is functioning effectively.	524-533
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): IV: Pengungkapan dan Transparansi IV. A Pengungkapan harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada, informasi material tentang: IV.A.8 Faktor risiko yang dapat diperkirakan Pengguna informasi keuangan dan pelaku pasar memerlukan informasi tentang risiko material yang dapat diperkirakan secara wajar yang dapat mencakup: risiko yang khusus untuk industri atau wilayah geografis tempat perusahaan beroperasi; ketergantungan pada komoditas dan rantai nilai; risiko pasar keuangan termasuk risiko suku bunga atau mata uang; risiko yang terkait dengan derivatif dan transaksi di luar neraca; risiko perilaku bisnis; risiko keamanan digital; dan risiko keberlanjutan, terutama risiko terkait iklim. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): IV: Disclosure and Transparency IV. A Disclosure should include, but not be limited to, material information on: IV.A.8 Foreseeable risk factors Users of financial information and market participants need information on reasonably foreseeable material risks that may include: risks that are specific to the industry or the geographical areas in which the company operates; dependence on commodities and value chains; financial market risks including interest rate or currency risk; risks related to derivatives and off-balance sheet transactions; business conduct risks; digital security risks; and sustainability risks, notably climate-related risks. Prinsip-prinsip tersebut membayangkan pengungkapan informasi yang memadai dan menyeluruh untuk sepenuhnya memberi tahu investor dan pengguna lain tentang risiko material dan yang dapat diperkirakan dari perusahaan. Pengungkapan risiko paling efektif bila disesuaikan dengan perusahaan dan industri tertentu yang bersangkutan. Pengungkapan tentang sistem untuk memantau dan mengelola risiko semakin dianggap sebagai praktik yang baik, termasuk sifat dan efektivitas proses uji tuntas terkait. The Principles envision the disclosure of sufficient and comprehensive information to fully inform investors and other users of the material and foreseeable risks of the company. Disclosure of risk is most effective when it is tailored to the particular company and industry in question. Disclosure about the system for monitoring and managing risk is increasingly regarded as good practice, including the nature and effectiveness of related due diligence processes.	524-533

	Prinsip Principle
D.3.20	Apakah Laporan Tahunan/Laporan CG Tahunan memuat pernyataan dari dewan direksi/komisaris atau Komite Audit yang mengomentari kecukupan pengendalian internal/sistem manajemen risiko perusahaan? Does the Annual Report/Annual CG Report contain a statement from the board of directors/commissioners or Audit Committee commenting on the adequacy of the company's internal controls/risk management systems?

Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V. Tanggung jawab dewan direksi V.D. Dewan direksi harus memenuhi beberapa fungsi utama, termasuk: V.D.8 Memastikan integritas sistem akuntansi dan pelaporan perusahaan untuk pengungkapan, termasuk audit independen, dan bahwa sistem pengendalian yang tepat telah diterapkan, sesuai dengan hukum dan standar yang relevan. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V. The responsibilities of the board V.D. The board should fulfil certain key functions, including: V.D.8 Ensuring the integrity of the corporation's accounting and reporting systems for disclosure, including the independent audit, and that appropriate systems of control are in place, in compliance with the law and relevant standards. Auditor internal dianggap sebagai praktik yang baik untuk melapor kepada komite audit independen dari dewan direksi atau badan setara yang juga bertanggung jawab untuk mengelola hubungan dengan auditor eksternal, sehingga memungkinkan respons yang terkoordinasi oleh dewan direksi. Fungsi audit internal dan eksternal harus diartikulasikan dengan jelas sehingga dewan direksi dapat memaksimalkan kualitas jaminan yang diterimanya. Komite audit, atau badan setara, juga harus dianggap sebagai praktik yang baik untuk meninjau dan melaporkan kepada dewan direksi kebijakan paling kritis yang menjadi dasar laporan keuangan dan laporan perusahaan lainnya. Namun, dewan direksi harus tetap memegang tanggung jawab akhir untuk mengawasi sistem manajemen risiko perusahaan dan untuk memastikan integritas sistem pelaporan. Beberapa yurisdiksi telah menetapkan ketentuan bagi ketua dewan direksi untuk melaporkan proses pengendalian internal. It is considered good practice for the internal auditors to report to an independent audit committee of the board or an equivalent body which is also responsible for managing the relationship with the external auditor, thereby allowing a co-ordinated response by the board. Both internal and external audit functions should be clearly articulated so that the board can maximize the quality of assurance it receives. It should also be regarded as good practice for the audit committee, or equivalent body, to review and report to the board the most critical policies which are the basis for financial and other corporate reports. However, the board should retain final responsibility for oversight of the company's risk management system and for ensuring the integrity of the reporting systems. Some jurisdictions have provided for the chair of the board to report on the internal control process.	524-533

Prinsip Principle	
D.4	**Orang-orang di Dewan** People on the Board
Ketua Dewan Board Chairman	
D.4.1	Apakah orang yang berbeda memegang peran sebagai ketua dan CEO? Do different persons assume the roles of chairman and CEO?
D.4.2	Apakah ketua merupakan direktur/komisaris independen? Is the chairman an independent director/commissioner?

Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V. Tanggung jawab dewan direksi V.E. Dewan direksi harus mampu menjalankan penilaian independen yang objektif terhadap urusan perusahaan. Di wilayah hukum dengan sistem dewan direksi tingkat tunggal, objektivitas dewan direksi dan independensinya dari manajemen dapat diperkuat dengan pemisahan peran kepala eksekutif dan Ketua. Pemisahan kedua jabatan tersebut secara umum dianggap sebagai praktik yang baik, karena dapat membantu mencapai keseimbangan kekuasaan yang tepat, meningkatkan akuntabilitas, dan meningkatkan kapasitas dewan direksi untuk membuat keputusan yang independen dari manajemen. Penunjukan direktur utama yang independen dari manajemen juga dianggap sebagai alternatif praktik yang baik di beberapa wilayah hukum jika peran tersebut ditetapkan dengan kewenangan yang cukup untuk memimpin dewan direksi dalam kasus-kasus di mana manajemen memiliki konflik yang jelas. Mekanisme semacam itu juga dapat membantu memastikan tata kelola perusahaan yang berkualitas tinggi dan fungsi dewan direksi yang efektif. Ketua atau direktur independen utama dapat, di beberapa wilayah hukum, didukung oleh sekretaris perusahaan. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V. The responsibilities of the board V.E. The board should be able to exercise objective independent judgement on corporate affairs. In jurisdictions with single tier board systems, the objectivity of the board and its independence from management may be strengthened by the separation of the role of chief executive and Chair. Separation of the two posts is generally regarded as good practice, as it can help to achieve an appropriate balance of power, increase accountability and improve the board's capacity for decision making independent of management. The designation of a lead director who is independent of management is also regarded as a good practice alternative in some jurisdictions if that role is defined with sufficient authority to lead the board in cases where management has clear conflicts. Such mechanisms can also help to ensure high quality governance of the company and the effective functioning of the board. The chair or lead independent director may, in some jurisdictions, be supported by a company secretary.	
ICGN (2021) PRINSIP 2: Kepemimpinan dan independensi 2.1 Kepemimpinan independen Harus ada pembagian tanggung jawab yang jelas antara peran ketua dewan dan CEO untuk menghindari kewenangan pengambilan keputusan yang tidak terbatas pada satu individu. Hal ini khususnya relevan dalam perusahaan yang dikendalikan ketika ketua atau CEO merupakan pemegang saham yang signifikan. Dewan harus diketuai oleh direktur independen yang harus independen pada tanggal pengangkatan. Jika peran ketua dan CEO digabungkan, dewan harus menjelaskan alasan mengapa hal ini merupakan kepentingan terbaik perusahaan dalam laporan tahunan dan terus meninjau strukturnya. Tanggung jawab ketua, CEO, direktur independen utama, dan ketua komite harus dijelaskan dengan jelas dan diungkapkan kepada publik. ICGN (2021) PRINCIPLE 2: Leadership and independence 2.1 Independent leadership There should be a clear division of responsibilities between the role of the chair of the board and the CEO to avoid unfettered powers of decision-making in any one individual. This is particularly relevant in controlled companies when either the chair or CEO are significant shareholders. The Board should be chaired by an independent director who should be independent on the date of appointment. Should the role of the chair and CEO be combined, the board should explain the reasons why this is in the best interests of the company in the annual report and keep the structure under review. The responsibilities of the chair, CEO, lead independent director and committee chairs should be clearly described and publicly disclosed.	134-149

	Prinsip Principle
D.4.3	Apakah ada direktur yang merupakan mantan CEO perusahaan dalam 2 tahun terakhir? Is any of the directors a former CEO of the company in the past 2 years?
D.4.4	Apakah peran dan tanggung jawab ketua diungkapkan? Are the roles and responsibilities of the chairman disclosed?
Direktur Independen Utama Lead Independent Director	
D.4.5	Jika Ketua tidak independen, apakah Dewan telah menunjuk Direktur Utama/Senior Independen dan apakah perannya telah ditetapkan? If the Chairman is not independent, has the Board appointed a Lead/Senior Independent Director and has his/her role been defined?

Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
ICGN (2021) PRINSIP 2: Kepemimpinan dan independensi 2.5 Suksesi CEO menjadi Ketua Praktik CEO perusahaan yang pensiun tetap berada di dewan direksi sebagai direktur harus dicegah, terlepas dari adanya masa tenang, atau jika praktik ini benar-benar terjadi, CEO yang pensiun tidak boleh bertugas di komite dewan yang mengharuskan perwakilan independen. Jika, sebagai pengecualian, dewan memutuskan bahwa CEO yang pensiun harus menggantikan posisi ketua, dewan harus berkonsultasi dengan pemegang saham terlebih dahulu dengan menetapkan alasan yang meyakinkan dan memberikan penjelasan terperinci dalam laporan tahunan. Kecuali jika ada keadaan luar biasa, harus ada jeda dalam masa jabatan di antara peran (misalnya, periode dua tahun) ICGN (2021) PRINCIPLE 2: Leadership and independence 2.5 CEO succession to Chair The practice of a company's retiring CEO remaining on the board as a director should be discouraged, regardless of any cooling off period, or in the event this practice does take place, the retiring CEO should not serve on board committees that require independent representation. If, exceptionally, the board decides that a retiring CEO should succeed to become chair, the board should consult with shareholders in advance setting out a convincing rationale and provide detailed explanation in the annual report. Unless there are extraordinary circumstances, there should be a break in service between the roles (e.g., a period of two years)	134-149
ICGN (2021) PRINSIP 2: Kepemimpinan dan independensi 2.3 Peran Ketua Ketua harus memimpin dewan dan memastikan efektivitasnya sambil mengilhami komitmen bersama di antara para direktur terhadap tujuan dan strategi jangka panjang perusahaan. Ini termasuk mendorong budaya keterbukaan untuk memungkinkan berbagai pandangan diungkapkan dan waktu yang cukup untuk membahas semua agenda. Ketua harus menetapkan agenda rapat, memastikan bahwa anggota dewan memiliki informasi yang cukup dan tepat waktu untuk menantang dan memperdebatkan proposal manajerial secara konstruktif. ICGN (2021) PRINCIPLE 2: Leadership and independence 2.3 Role of the Chair The chair should lead the board and ensure its effectiveness while inspiring a shared commitment among directors to the company's purpose and long-term strategy. This includes encouraging a culture of openness to allow a range of views to be expressed and adequate time for discussion of all agenda items. The chair should set the meeting agenda, ensuring that board members have sufficient and timely information to constructively challenge and debate managerial proposal.	495 & 467
ICGN (2021) PRINSIP 2: Kepemimpinan dan independensi 2.4 Direktur independen utama Dewan direksi harus menunjuk Direktur Independen Utama (DIU) meskipun ketua dewan direksi bersifat independen. DIU menyediakan saluran komunikasi yang berharga bagi pemegang saham, pemangku kepentingan terkait, dan direktur untuk membahas masalah yang mungkin melibatkan konflik kepentingan bagi ketua dewan direksi yang dapat mencakup pemegang saham signifikan jika ada hubungan di antara mereka. DIU tidak boleh memiliki masa jabatan direktur di perusahaan yang menimbulkan pertanyaan mengenai independensi DIU sebagaimana ditetapkan dalam Panduan 2.6.h. Dalam dewan direksi dua tingkat, peran DIU dapat diambil alih oleh wakil ketua. ICGN (2021) PRINCIPLE 2: Leadership and independence 2.4 Lead independent director The Board should appoint a Lead Independent Director (LID) even when the chair is independent. The LID provides shareholders, relevant stakeholders and directors with a valuable channel of communication to discuss matters that may involve a conflict of interest for the board chair which may include significant shareholders if there is a connection between them. The LID should not have directorship tenure in the company that raises questions as to the LID's independence as set out in Guidance 2.6.h. In a two-tier board the LID role could be assumed by a vice chair.	466

Prinsip Principle	
Keterampilan dan Kompetensi Skills and Competencies	
D.4.6	Apakah setidaknya satu direktur/komisaris non-eksekutif memiliki pengalaman kerja sebelumnya di sektor utama tempat perusahaan beroperasi? Does at least one non-executive director/commissioner have prior working experience in the major sector that the company is operating in?
D.5	**Kinerja Dewan** Board Performance
Pengembangan Direktur Directors Development	
D.5.1	Apakah perusahaan memiliki program orientasi untuk direktur/komisaris baru? Does the company have orientation programs for new directors/commissioners?
D.5.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan dan praktik serta program aktual yang mendorong direktur/komisaris untuk menghadiri program pendidikan profesional yang berkelanjutan atau berkesinambungan? Does the company have a policy and actual practice and programs that encourages directors/commissioners to attend on-going or continuous professional education programs?

Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
ICGN (2021) PRINSIP 3: Komposisi dan pengangkatan Dewan Direksi harus terdiri dari cukup banyak direktur dengan pengetahuan, independensi, kompetensi, pengalaman industri, dan keberagaman perspektif yang relevan untuk menghasilkan tantangan, diskusi, dan pengambilan keputusan yang efektif dan objektif yang sejalan dengan tujuan perusahaan, strategi jangka panjang, dan pemangku kepentingan yang relevan. ICGN (2021) PRINCIPLE 3: Composition and appointment The Board should comprise a sufficient mix of directors with relevant knowledge, independence, competence, industry experience and diversity of perspectives to generate effective challenge, discussion and objective decision-making in alignment with the company's purpose, long-term strategy and relevant stakeholders.	134 - 149 dan 511 - 512
ICGN (2021) PRINSIP 1: Peran dan tanggung jawab dewan direksi 1.5 Komitmen Dewan direksi harus mengadakan rapat secara berkala untuk melaksanakan tugasnya dan para direktur harus menyediakan waktu yang cukup untuk mempersiapkan dan menghadiri rapat dewan direksi. Harus ada induksi formal bagi semua direktur dewan direksi baru untuk memastikan mereka memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang tujuan, model bisnis, dan strategi perusahaan sesegera mungkin setelah pengangkatan mereka. ICGN (2021) PRINCIPLE 1: Board role and responsibilities 1.5 Commitment The board should meet regularly to discharge its duties and directors should commit adequate time to board meeting preparation and attendance. There should be a formal induction for all new board directors to ensure they have a comprehensive understanding of the company's purpose, business model and strategy as soon as possible after their appointment.	411 & 471
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V. Tanggung jawab dewan direksi V.E. Dewan direksi harus mampu menjalankan penilaian independen yang objektif terhadap urusan perusahaan. V.E.4 Dewan direksi harus secara berkala melakukan evaluasi untuk menilai kinerja mereka dan menilai apakah mereka memiliki perpaduan latar belakang dan kompetensi yang tepat, termasuk berkenaan dengan gender dan bentuk keberagaman lainnya. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V. The responsibilities of the board V.E. The board should be able to exercise objective independent judgement on corporate affairs. V.E.4 Boards should regularly carry out evaluations to appraise their performance and assess whether they possess the right mix of background and competences, including with respect to gender and other forms of diversity.	411 & 472

Prinsip Principle
Pengangkatan dan Kinerja CEO/Manajemen Eksekutif CEO/Executive Management Appointments and Performance
D.5.3 Apakah perusahaan mengungkapkan proses bagaimana dewan direksi/komisaris merencanakan suksesi CEO/Direktur Pelaksana/Presiden dan manajemen kunci? Does the company disclose the process on how the board of directors/commissioners plans for the succession of the CEO/Managing Director/President and key management?
D.5.4 Apakah dewan direksi/komisaris melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap CEO/Direktur Pelaksana/Presiden? Does the board of directors/commissioners conduct an annual performance assessment of the CEO/Managing Director/President?

Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
Untuk meningkatkan praktik dewan direksi dan kinerja anggotanya, semakin banyak yurisdiksi kini mendorong perusahaan untuk terlibat dalam evaluasi dan pelatihan dewan direksi dan komite. Banyak kode tata kelola perusahaan merekomendasikan evaluasi tahunan terhadap dewan direksi, yang dapat didukung secara berkala oleh fasilitator eksternal untuk meningkatkan objektivitas. Kecuali jika kualifikasi tertentu diperlukan, seperti untuk lembaga keuangan, hal ini dapat mencakup bahwa anggota dewan direksi memperoleh keterampilan yang sesuai saat diangkat. Setelah itu, anggota dewan direksi harus tetap mengikuti perkembangan undang-undang, peraturan baru yang relevan, dan perubahan risiko komersial dan risiko lainnya. In order to improve board practices and the performance of its members, an increasing number of jurisdictions now encourage companies to engage in board and committee evaluation and training. Many corporate governance codes recommend an annual evaluation of the board, which may periodically be supported by external facilitators to increase objectivity. Unless certain qualifications are required, such as for financial institutions, this might include that board members acquire appropriate skills upon appointment. Thereafter, board members should remain abreast of relevant new laws, regulations, and changing commercial and other risks.	
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V. Tanggung Jawab Dewan Direksi V.D. Dewan Direksi harus menjalankan beberapa fungsi utama, termasuk: V.D.4 Memilih, mengawasi, dan memantau kinerja eksekutif utama, dan, jika perlu, mengganti mereka dan mengawasi perencanaan suksesi. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V. The Responsibilities of the Board V.D. The board should fulfil certain key functions, including: V.D.4 Selecting, overseeing and monitoring the performance of key executives, and, when necessary, replacing them and overseeing succession planning.	397 dan 459
V.D. Dewan direksi harus menjalankan beberapa fungsi utama, termasuk: V.D.3 Memantau efektivitas praktik tata kelola perusahaan dan membuat perubahan sesuai kebutuhan. Pemantauan tata kelola oleh dewan direksi mencakup tinjauan berkelanjutan terhadap struktur internal perusahaan untuk memastikan adanya garis akuntabilitas yang jelas bagi manajemen di seluruh organisasi. Pemantauan tersebut juga harus mencakup apakah kerangka tata kelola perusahaan tetap sesuai dengan perubahan material pada ukuran, kompleksitas, strategi bisnis, pasar, dan persyaratan peraturan perusahaan. Selain mewajibkan pemantauan dan pengungkapan praktik tata kelola perusahaan secara berkala, setidaknya dalam bentuk ringkasan, banyak yurisdiksi telah merekomendasikan, atau bahkan mewajibkan, penilaian oleh dewan direksi atas kinerja mereka dan kinerja komite mereka, masing-masing anggota dewan direksi, ketua dewan direksi, dan CEO. V.D. The board should fulfil certain key functions, including: V.D.3 Monitoring the effectiveness of the company's governance practices and making changes as needed. Monitoring of governance by the board includes continuous review of the internal structure of the company to ensure that there are clear lines of accountability for management throughout the organization. Such monitoring should also include whether the company's governance framework remains appropriate in light of material changes to the company's size, complexity, business strategy, markets, and regulatory requirements. In addition to requiring the monitoring and disclosure of corporate governance practices on a regular basis, at least in summary form, many jurisdictions have moved to recommend, or indeed mandate, assessment by boards of their performance and of the performance of their committees, individual board members, the chair and the CEO.	513-515

Prinsip Principle	
Penilaian Dewan Board Appraisal	
D.5.5	Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap dewan direksi/komisaris dan mengungkapkan kriteria dan proses yang diikuti untuk penilaian? Did the company conduct an annual performance assessment of the board of directors/commissioners and disclose the criteria and process followed for the assessment?
Penilaian Direktur Director Appraisal	
D.5.6	Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap masing-masing direktur/komisaris dan mengungkapkan kriteria dan proses yang diikuti untuk penilaian tersebut? Did the company conduct an annual performance assessment of the individual directors/commissioners and disclose the criteria and process followed for the assessment?

Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V: Tanggung Jawab Dewan Direksi V.D. Dewan direksi harus memenuhi beberapa fungsi utama, termasuk: V.D.3 Memantau efektivitas praktik tata kelola perusahaan dan melakukan perubahan sesuai kebutuhan. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V: The Responsibilities of the Board V.D. The board should fulfil certain key functions, including: V.D.3 Monitoring the effectiveness of the company's governance practices and making changes as needed. ICGN (2021) PRINSIP 3: Komposisi dan pengangkatan 3.3 Evaluasi Evaluasi dewan direksi harus dilakukan setiap tahun untuk meninjau komposisi yang selaras dengan strategi jangka panjang perusahaan, perencanaan suksesi, dan kebijakan tentang keberagaman, kesetaraan, dan inklusi. Dewan direksi harus melakukan tinjauan ketat terhadap kinerjanya (sebagai badan kolektif), sekretaris perusahaan (jika ada posisi seperti itu), komite dewan direksi, dan direktur individu sebelum diusulkan untuk dipilih. Dewan direksi harus secara berkala (sebaiknya setiap tiga tahun) melibatkan konsultan eksternal independen untuk melakukan evaluasi eksternal. Direktur Independen Utama dan Komite Nominasi harus bertanggung jawab atas evaluasi kinerja ketua. Dewan direksi harus mengungkapkan proses evaluasi dan, sejauh mungkin, setiap masalah material yang relevan yang timbul dari kesimpulan dan/atau tindakan yang diambil sebagai konsekuensinya. ICGN (2021) PRINCIPLE 3: Composition and appointment 3.3 Evaluation Board evaluation should be conducted annually to review composition in alignment with the company's long-term strategy, succession planning and policy on diversity, equity and inclusion. The board should undertake a rigorous review of its performance (as a collective body), the company secretary (where such a position exists), the board's committees and individual directors prior to being proposed for election. The board should periodically (preferably every three years) engage an independent outside consultant to undertake an external evaluation. The Lead Independent Director and Nomination Committee should be responsible for performance evaluation of the chair. The board should disclose the process for evaluation and, as far as reasonably possible, any material issues of relevance arising from the conclusions and/or actions taken as a consequence.	513-515
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V: Tanggung Jawab Dewan Direksi V.D. Dewan direksi harus memenuhi beberapa fungsi utama, termasuk: V.D.3 Memantau efektivitas praktik tata kelola perusahaan dan melakukan perubahan sesuai kebutuhan. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V: The Responsibilities of the Board V.D. The board should fulfil certain key functions, including: V.D.3 Monitoring the effectiveness of the company's governance practices and making changes as needed.	513-515

Prinsip Principle

Penilaian Komite Committee Appraisal		
D.5.7	Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap komite dewan dan mengungkapkan kriteria dan proses yang diikuti untuk penilaian? Did the company conduct an annual performance assessment of the board committees and disclose the criteria and process followed for the assessment?	

Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
ICGN (2021) PRINSIP 3: Komposisi dan pengangkatan 3.3 Evaluasi Evaluasi dewan direksi harus dilakukan setiap tahun untuk meninjau komposisi yang selaras dengan strategi jangka panjang perusahaan, perencanaan suksesi, dan kebijakan tentang keberagaman, kesetaraan, dan inklusi. Dewan direksi harus melakukan tinjauan ketat terhadap kinerjanya (sebagai badan kolektif), sekretaris perusahaan (jika ada posisi seperti itu), komite dewan direksi, dan direktur individu sebelum diusulkan untuk dipilih. Dewan direksi harus secara berkala (sebaiknya setiap tiga tahun) melibatkan konsultan eksternal independen untuk melakukan evaluasi eksternal. Direktur Independen Utama dan Komite Nominasi harus bertanggung jawab atas evaluasi kinerja ketua. Dewan direksi harus mengungkapkan proses evaluasi dan, sejauh mungkin, setiap masalah material yang relevan yang timbul dari kesimpulan dan/atau tindakan yang diambil sebagai konsekuensinya. ICGN (2021) PRINCIPLE 3: Composition and appointment 3.3 Evaluation Board evaluation should be conducted annually to review composition in alignment with the company's long-term strategy, succession planning and policy on diversity, equity and inclusion. The board should undertake a rigorous review of its performance (as a collective body), the company secretary (where such a position exists), the board's committees and individual directors prior to being proposed for election. The board should periodically (preferably every three years) engage an independent outside consultant to undertake an external evaluation. The Lead Independent Director and Nomination Committee should be responsible for performance evaluation of the chair. The board should disclose the process for evaluation and, as far as reasonably possible, any material issues of relevance arising from the conclusions and/or actions taken as a consequence.	
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V. Tanggung Jawab Dewan Direksi V.D. Dewan Direksi harus memenuhi beberapa fungsi utama, termasuk: V.D.3 Memantau efektivitas praktik tata kelola perusahaan dan melakukan perubahan sesuai kebutuhan. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V. The Responsibilities of the Board V.D. The board should fulfil certain key functions, including: V.D.3 Monitoring the effectiveness of the company's governance practices and making changes as needed. ICGN (2021) PRINSIP 3: Komposisi dan pengangkatan 3.3 Evaluasi Evaluasi dewan direksi harus dilakukan setiap tahun untuk meninjau komposisi yang selaras dengan strategi jangka panjang perusahaan, perencanaan suksesi, dan kebijakan tentang keberagaman, kesetaraan, dan inklusi. Dewan direksi harus melakukan tinjauan ketat terhadap kinerjanya (sebagai badan kolektif), sekretaris perusahaan (jika ada posisi seperti itu), komite dewan direksi, dan direktur individu sebelum diusulkan untuk dipilih. Dewan direksi harus secara berkala (sebaiknya setiap tiga tahun) melibatkan konsultan eksternal independen untuk melakukan evaluasi eksternal. Direktur Independen Utama dan Komite Nominasi harus bertanggung jawab atas evaluasi kinerja ketua. Dewan direksi harus mengungkapkan proses evaluasi dan, sejauh mungkin, setiap masalah material yang relevan yang timbul dari kesimpulan dan/atau tindakan yang diambil sebagai konsekuensinya. ICGN (2021) PRINCIPLE 3: Composition and appointment 3.3 Evaluation Board evaluation should be conducted annually to review composition in alignment with the company's long-term strategy, succession planning and policy on diversity, equity and inclusion. The board should undertake a rigorous review of its performance (as a collective body), the company secretary (where such a position exists), the board's committees and individual directors prior to being proposed for election. The board should periodically (preferably every three years) engage an independent outside consultant to undertake an external evaluation. The Lead Independent Director and Nomination Committee should be responsible for performance evaluation of the chair. The board should disclose the process for evaluation and, as far as reasonably possible, any material issues of relevance arising from the conclusions and/or actions taken as a consequence.	412

TINGKAT 2 – ITEM TAMBAHAN **LEVEL 2 – BONUS ITEMS**

	Prinsip Principle
(B)A.	**Hak dan Perlakuan yang Adil terhadap Pemegang Saham** Rights and Equitable Treatment of shareholders
(B)A.1	**Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham dan harus diberitahu tentang peraturan, termasuk prosedur pemungutan suara, yang mengatur rapat umum pemegang saham.** Right to participate effectively in and vote in general shareholders meeting and should be informed of the rules, including voting procedures, that govern general shareholders meeting.
(B)A.1.1	Apakah perusahaan melaksanakan pemungutan suara elektronik secara langsung dan aman secara tidak langsung pada rapat umum pemegang saham? Does the company practice real time secure electronic voting in absentia at general meetings of shareholders?
(B)A.2	**Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham** Equitable treatment of shareholders
(B)A.2.	**Pemberitahuan Rapat Umum Tahunan** Notice of AGM
(B)A.2.1	Apakah perusahaan merilis pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (dengan agenda rinci dan edaran penjelasan), sebagaimana diumumkan kepada Bursa, setidaknya 28 hari sebelum tanggal rapat? Does the company release its notice of AGM (with detailed agendas and explanatory circulars), as announced to the Exchange, at least 28 days before the date of the meeting?

	Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): II.C.6. Tujuan memfasilitasi identifikasi dan partisipasi pemegang saham menunjukkan bahwa yurisdiksi dan/atau perusahaan mendorong perluasan penggunaan teknologi informasi dalam pemungutan suara, termasuk pemungutan suara elektronik yang aman di semua perusahaan yang diperdagangkan secara publik untuk rapat jarak jauh dan tatap muka. Prinsip-prinsip tersebut merekomendasikan agar pemungutan suara melalui kuasa diterima secara umum. Memang, penting untuk promosi dan perlindungan hak-hak pemegang saham bahwa investor dapat mengandalkan pemungutan suara melalui kuasa secara langsung. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): II.C.6. The objective of facilitating shareholder identification and participation suggests that jurisdictions and/or companies promote the enlarged use of information technology in voting, including secure electronic voting in all publicly traded companies for both remote and in person meetings. The principles recommend that voting by proxy be generally accepted. Indeed, it is important for the promotion and protection of shareholder rights that investors can rely on directed proxy voting.	365-396
	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): II.C.1. Pemegang saham harus diberikan informasi yang cukup dan tepat waktu mengenai tanggal, format, lokasi, dan agenda rapat umum, serta informasi yang terperinci dan tepat waktu mengenai isu-isu yang akan diputuskan dalam rapat. II.C.5 Partisipasi pemegang saham yang efektif dalam keputusan tata kelola perusahaan yang penting, seperti pencalonan dan pemilihan anggota dewan, harus difasilitasi. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): II.C.1. Shareholders should be furnished with sufficient and timely information concerning the date, format, location and agenda of general meetings, as well as fully detailed and timely information regarding the issues to be decided at the meeting. II.C.5 Effective shareholder participation in key corporate governance decisions, such as the nomination and election of board members, should be facilitated. ICGN (2021) PRINSIP 10: 10.3 Pemberitahuan Rapat Dewan direksi harus memastikan bahwa agenda rapat diunggah di situs web perusahaan setidaknya satu bulan sebelum rapat berlangsung. ICGN (2021) PRINCIPLE 10: 10.3 Meeting Notice The board should ensure that the meeting agenda is posted on the company's website at least one month prior to the meeting taking place.	365-396

	Prinsip Principle
(B).B.	**Keberlanjutan dan Ketahanan** Sustainability and Resilience
(B).B.1	
(B).B.1.1	Apakah perusahaan mengungkapkan bagaimana ia mengelola risiko dan peluang terkait iklim? Does the company disclose how it manages climate-related risks and opportunities?

	Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): VI.A.4. Jika perusahaan menetapkan tujuan atau target terkait keberlanjutan secara publik, kerangka pengungkapan harus memastikan bahwa metrik yang andal diungkapkan secara berkala dalam bentuk yang mudah diakses untuk memungkinkan investor menilai kredibilitas dan kemajuan dalam mencapai tujuan atau target yang diumumkan. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): VI.A.4. If a company publicly sets a sustainability-related goal or target, the disclosure framework should provide that reliable metrics are regularly disclosed in an easily accessible form to allow investors to assess the credibility and progress towards meeting the announced goal or target. ICGN (2021) PRINSIP 7: 7.5 Perubahan iklim Dewan direksi harus menilai dampak perubahan iklim terhadap model bisnis perusahaan dan bagaimana model tersebut akan disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi nol emisi sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Hal ini mencakup penetapan dan pengungkapan target untuk mengurangi emisi karbon dan periode pencapaian. Jika risiko perubahan iklim, baik fisik maupun transisi, diidentifikasi sebagai material dan relevan, pelaporan harus mencakup pembahasan tentang proses uji tuntas, strategi, metrik, target, dan inisiatif yang digunakan untuk mengelola risiko. ICGN (2021) PRINCIPLE 7: 7.5 Climate change The board should assess the impact of climate change on the company business model and how it will be adapted to meet the needs of a net zero economy as part of a long-term strategy. This includes setting and disclosing targets to reduce carbon emissions and a period for achievement. Where climate change risks, whether physical or transitional, are identified as material and relevant, reporting should include discussion of the diligence process, strategy, metrics, targets and initiatives used to manage the risks. TCFD, Metrik dan Target a. Pengungkapan metrik yang digunakan oleh organisasi untuk menilai risiko dan peluang terkait iklim sesuai dengan strategi dan proses manajemen risiko b. Pengungkapan Cakupan 1, Cakupan 2, dan jika sesuai, Cakupan 3 emisi GRK dan risiko terkait c. Menjelaskan target yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola risiko dan peluang terkait iklim serta kinerja terhadap target TCFD, Metrics and Targets a. Disclose the metrics used by the organization to assess climate-related risks and opportunities in line with strategy and risk management process b. Disclose Scope 1, Scope 2, and if appropriate, Scope 3 GHG emissions and related risks c. Describe the targets used by the organization to manage climate-related risks and opportunities and performance against targets	Merujuk Kepada Laporan Keberlanjutan WEGE yang disusun secara terpisah

Prinsip Principle	
(B).B.1.2	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa Laporan Keberlanjutan/Pelaporan Keberlanjutannya dijamin secara eksternal? Does the company disclose that its Sustainability Report / Sustainability Reporting is externally assured?

	Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023) VI.A.5. Penerapan persyaratan secara bertahap harus dipertimbangkan untuk pengesahan jaminan tahunan oleh penyedia layanan jaminan yang independen, kompeten, dan berkualifikasi sesuai dengan standar jaminan internasional berkualitas tinggi untuk memberikan penilaian eksternal dan objektif atas pengungkapan terkait keberlanjutan suatu perusahaan. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023) VI.A.5. Phasing in of requirements should be considered for annual assurance attestations by an independent, competent and qualified assurance service provider in accordance with high quality international assurance standards in order to provide an external and objective assessment of a company's sustainability-related disclosure. ICGN (2021) PRINSIP 7: 7.4 Laporan keberlanjutan Dewan direksi harus menyediakan pelaporan keberlanjutan untuk mencerminkan kompleksitas yang melekat dalam bisnis kontemporer dengan memadukan pertimbangan modal finansial, manusia, dan alam dalam konteks arah strategis perusahaan saat ini dan di masa mendatang. Pengungkapan tersebut harus: f. diperkuat jika memungkinkan melalui audit atau jaminan independen yang dilakukan setiap tahun dengan memperhatikan standar pengungkapan yang ditetapkan. ICGN (2021) PRINCIPLE 7: 7.4 Sustainability reports The board should provide sustainability reporting to reflect the complexities inherent in a contemporary business by blending financial, human and natural capital considerations in the context of a company's current and future strategic direction. Such disclosures should: f. be strengthened where possible by audit or independent assurance that is carried out annually having regard to established disclosure standards. GRI 2-5 Jaminan eksternal Organisasi harus: menjelaskan kebijakan dan praktiknya dalam mencari jaminan eksternal, termasuk apakah dan bagaimana badan tata kelola tertinggi dan eksekutif senior terlibat; Jika pelaporan keberlanjutan organisasi telah dijamin secara eksternal: i. menyediakan tautan atau referensi ke laporan jaminan eksternal atau pernyataan jaminan; ii. menjelaskan apa yang telah dijamin dan atas dasar apa, termasuk standar jaminan yang digunakan, tingkat jaminan yang diperoleh, dan batasan apa pun dari proses jaminan; iii. menjelaskan hubungan antara organisasi dan penyedia jaminan. GRI 2-5 External assurance The organization shall: describe its policy and practice for seeking external assurance, including whether and how the highest governance body and senior executives are involved; If the organization's sustainability reporting has been externally assured: provide a link or reference to the external assurance report(s) or assurance statement(s); describe what has been assured and on what basis, including the assurance standards used, the level of assurance obtained, and any limitations of the assurance process; describe the relationship between the organization and the assurance provider.	Merujuk Kepada Laporan Keberlanjutan WEGE yang disusun secara terpisah

Prinsip Principle	
(B).B.1.3	Apakah perusahaan mengungkapkan saluran keterlibatan dengan kelompok pemangku kepentingan dan bagaimana perusahaan menanggapi kekhawatiran ESG para pemangku kepentingan? Does the company disclose the engagement channel with stakeholder groups and how the company responds to stakeholders' ESG concerns?
(B).B.1.4	Apakah perusahaan memiliki unit/divisi/komite yang secara khusus bertanggung jawab untuk mengelola masalah keberlanjutan? Does the company have a unit/division/committee who is specifically responsible to manage the sustainability matters?

	Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023) VI.B. Kerangka tata kelola perusahaan harus memungkinkan terjadinya dialog antara perusahaan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan untuk bertukar pandangan tentang masalah keberlanjutan yang relevan bagi strategi bisnis perusahaan dan penilaiannya tentang masalah apa yang harus dianggap material. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023) VI.B. Corporate governance frameworks should allow for dialogue between a company, its shareholders and stakeholders to exchange views on sustainability matters as relevant for the company's business strategy and its assessment of what matters ought to be considered material. GRI 2-29 Pendekatan terhadap keterlibatan pemangku kepentingan Organisasi harus menjelaskan pendekatannya dalam melibatkan pemangku kepentingan, termasuk: i. kategori pemangku kepentingan yang dilibatkan, dan cara mengidentifikasi mereka; ii. tujuan keterlibatan pemangku kepentingan; iii. cara organisasi berupaya memastikan keterlibatan yang bermakna dengan pemangku kepentingan GRI 2-29 Approach to stakeholder engagement The organization shall describe its approach to engaging with stakeholders, including: the categories of stakeholders it engages with, and how they are identified; the purpose of the stakeholder engagement; how the organization seeks to ensure meaningful engagement with stakeholders	Merujuk Kepada Laporan Keberlanjutan WEGE yang disusun secara terpisah
	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): VI.C. Kerangka tata kelola perusahaan harus memastikan bahwa dewan direksi mempertimbangkan risiko dan peluang keberlanjutan yang material secara memadai saat menjalankan fungsi utama mereka dalam meninjau, memantau, dan memandu praktik tata kelola, pengungkapan, strategi, manajemen risiko, dan sistem pengendalian internal, termasuk yang berkaitan dengan risiko fisik dan transisi yang terkait dengan iklim. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): VI.C. The corporate governance framework should ensure that boards adequately consider material sustainability risks and opportunities when fulfilling their key functions in reviewing, monitoring and guiding governance practices, disclosure, strategy, risk management and internal control systems, including with respect to climate-related physical and transition risks. Saat menjalankan fungsi utamanya, dewan direksi semakin memastikan bahwa masalah keberlanjutan yang material juga dipertimbangkan. Khususnya, dewan direksi memiliki peran dalam memastikan bahwa tata kelola yang efektif dan pengendalian internal tersedia untuk meningkatkan keandalan dan kredibilitas pengungkapan terkait keberlanjutan. Misalnya, dewan direksi dapat menilai apakah dan bagaimana masalah keberlanjutan memengaruhi profil risiko perusahaan. Penilaian tersebut juga dapat terkait dengan remunerasi dan nominasi eksekutif utama (misalnya apakah target yang terintegrasi ke dalam rencana kompensasi eksekutif dapat diukur, dikaitkan dengan risiko yang material secara finansial, dan memberikan insentif untuk pandangan jangka panjang) atau bagaimana keberlanjutan didekati oleh dewan direksi dan komite-komitenya. When fulfilling their key functions, boards are increasingly ensuring that material sustainability matters are also considered. Notably, the board has a role in ensuring that effective governance and internal controls are in place to improve the reliability and credibility of sustainability-related disclosure. For instance, boards may assess if and how sustainability matters affect companies' risk profiles. Such assessments may also relate to key executive remuneration and nomination (e.g. whether targets integrated into executives' compensation plans would be quantifiable, linked to financially material risks and incentivize a long-term view) or how sustainability is approached by the board and its committees. ICGN (2021) PRINSIP 1: 1.1 Tanggung jawab e. akuntabilitas atas tata kelola keberlanjutan yang memastikan integrasi sumber daya manusia (terutama tenaga kerja) dan pengelolaan sumber daya alam dalam strategi, inovasi, dan risiko; ICGN (2021) PRINCIPLE 1: 1.1 Responsibilities e. accountability for the governance of sustainability ensuring the integration of human capital (particularly the workforce) and natural capital management in strategy, innovation and risk;	Merujuk Kepada Laporan Keberlanjutan WEGE yang disusun secara terpisah

	Prinsip Principle
(B).B.1.5	Apakah perusahaan mengungkapkan pengawasan dewan direksi/komisaris terhadap risiko dan peluang terkait keberlanjutan? Does the company disclose board of directors/commissioners' oversight of sustainability-related risks and opportunities?
(B).B.1.6	Apakah perusahaan mengungkapkan hubungan antara remunerasi direktur eksekutif dan manajemen senior serta kinerja keberlanjutan untuk tahun sebelumnya? Does the company disclose the linkage between executive directors and senior management remuneration and sustainability performance for the previous year?

	Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023) VI.C. Kerangka tata kelola perusahaan harus memastikan bahwa dewan direksi mempertimbangkan risiko dan peluang keberlanjutan yang material secara memadai saat menjalankan fungsi utama mereka dalam meninjau, memantau, dan memandu praktik tata kelola, pengungkapan, strategi, manajemen risiko, dan sistem pengendalian internal, termasuk yang berkaitan dengan risiko fisik dan transisi yang terkait dengan iklim. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023) VI.C. The corporate governance framework should ensure that boards adequately consider material sustainability risks and opportunities when fulfilling their key functions in reviewing, monitoring and guiding governance practices, disclosure, strategy, risk management and internal control systems, including with respect to climate-related physical and transition risks. ICGN (2021) PRINSIP 1: 1.1 Tanggung jawab f. mengawasi penilaian dan pengelolaan risiko perusahaan (termasuk risiko sistemik yang relevan seperti perubahan iklim, degradasi ekologi, kesenjangan sosial, dan transformasi digital) yang memengaruhi penciptaan dan pelestarian nilai berkelanjutan dan meninjau kebijakan setiap tahun, atau dengan adanya perubahan bisnis yang signifikan; ICGN (2021) PRINCIPLE 1: 1.1 Responsibilities f. overseeing the company's risk assessment and management (including relevant systemic risks such as climate change, ecological degradation, social inequality and digital transformation) that affect sustainable value creation and preservation and reviewing policies annually, or with any significant business change; TCFD, Tata Kelola. a. Jelaskan pengawasan dewan terhadap risiko dan peluang terkait iklim. TCFD, Governance. a. Describe the board's oversight of climate-related risks and opportunities.	Merujuk Kepada Laporan Keberlanjutan WEGE yang disusun secara terpisah
	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): VI.C. Saat menjalankan fungsi utamanya, dewan direksi semakin memastikan bahwa masalah keberlanjutan yang material juga dipertimbangkan. Khususnya, dewan direksi memiliki peran dalam memastikan bahwa tata kelola yang efektif dan pengendalian internal tersedia untuk meningkatkan keandalan dan kredibilitas pengungkapan terkait keberlanjutan. Misalnya, dewan direksi dapat menilai apakah dan bagaimana masalah keberlanjutan memengaruhi profil risiko perusahaan. Penilaian tersebut juga dapat terkait dengan remunerasi dan nominasi eksekutif utama (misalnya apakah target yang terintegrasi ke dalam rencana kompensasi eksekutif dapat diukur, dikaitkan dengan risiko yang material secara finansial, dan memberikan insentif untuk pandangan jangka panjang) atau bagaimana dewan direksi dan komite-komitenya melakukan pendekatan perihal keberlanjutan. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): VI.C. When fulfilling their key functions, boards are increasingly ensuring that material sustainability matters are also considered. Notably, the board has a role in ensuring that effective governance and internal controls are in place to improve the reliability and credibility of sustainability-related disclosure. For instance, boards may assess if and how sustainability matters affect companies' risk profiles. Such assessments may also relate to key executive remuneration and nomination (e.g. whether targets integrated into executives' compensation plans would be quantifiable, linked to financially material risks and incentivize a long-term view) or how sustainability is approached by the board and its committees.	Merujuk Kepada Laporan Keberlanjutan WEGE yang disusun secara terpisah

Prinsip Principle	
(B).B.1.7	Apakah Sistem Whistle Blowing di perusahaan dikelola oleh pihak/lembaga independen? Is the company's Whistle Blowing System managed by independent parties/institutions?
(B).C.	**Pengungkapan dan transparansi** Disclosure and transparency
(B).C.1	**Kualitas Laporan Tahunan** Quality of Annual Report
(B).C.1.1	Apakah laporan/pernyataan keuangan tahunan yang diaudit dirilis dalam waktu 60 hari sejak akhir tahun keuangan? Are the audited annual financial report/statement released within 60 days from the financial year end?

	Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
	ICGN (2021) PRINSIP 5: 5.3 Ukuran kinerja Selain metrik kinerja keuangan, indikator kuantitatif yang penting bagi penciptaan dan pelestarian nilai berkelanjutan perusahaan, seperti modal manusia dan modal alam, harus dipertimbangkan. Metrik yang memandu pemberian kinerja harus didasarkan pada data keuangan yang diaudit, dan, jika memungkinkan, indikator keberlanjutan yang terjamin. ICGN (2021) PRINCIPLE 5: 5.3 Performance measures In addition to financial performance metrics, quantifiable indicators that are material to the company's sustainable value creation and preservation, such as human capital and natural capital should be considered. Metrics guiding performance grants should be based on audited financial data, and, where possible, assured sustainability indicators. GRI 2-19 Kebijakan Remunerasi Organisasi harus menjelaskan bagaimana kebijakan remunerasi bagi anggota badan tata kelola tertinggi dan eksekutif senior berkaitan dengan tujuan dan kinerja mereka dalam kaitannya dengan pengelolaan dampak organisasi terhadap ekonomi, lingkungan, dan manusia. GRI 2-19 Remuneration Policies The organization shall describe how the remuneration policies for members of the highest governance body and senior executives relate to their objectives and performance in relation to the management of the organization's impacts on the economy, environment, and people.	
	ICGN (2021) PRINSIP 4: Budaya perusahaan 4.2 Pengungkapan pelanggaran Dewan direksi harus memastikan bahwa perusahaan memiliki mekanisme independen dan rahasia yang memungkinkan pekerja, pemasok, pemegang saham, atau pemangku kepentingan terkait (tanpa takut akan hukuman) menyampaikan masalah yang menjadi perhatian khusus terkait potensi atau dugaan pelanggaran kode etik perusahaan atau hukum setempat. ICGN (2021) PRINCIPLE 4: Corporate culture 4.2 Whistleblowing The board should ensure that the company has in place an independent, confidential mechanism whereby a worker, supplier, shareholder, or relevant stakeholder can (without fear of retribution) raise issues of particular concern with regard to potential or suspected breaches of a company's code of ethics or local law.	580-584
	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): IV.A. Pengungkapan harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada, informasi material tentang: IV.A.1. Hasil keuangan dan operasional perusahaan. Laporan keuangan yang diaudit yang menunjukkan kinerja keuangan dan situasi keuangan perusahaan (biasanya termasuk neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan) adalah sumber informasi yang paling banyak digunakan tentang perusahaan. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): Disclosure should include, but not be limited to, material information on: The financial and operating results of the company. Audited financial statements showing the financial performance and the financial situation of the company (most typically including the balance sheet, the profit and loss statement, the cash flow statement and notes to the financial statements) are the most widely used source of information on companies.	Iya Sesuai ketentuan OJK.

Prinsip Principle	
(B).D.	**Tanggung Jawab Dewan** Responsibilities of the Board
(B).D.1	**Kompetensi dan Keberagaman Dewan** Board Competencies and Diversity
(B).D.1.1	Apakah perusahaan memiliki setidaknya satu direktur/komisaris independen perempuan? Does the company have at least one female independent director/commissioner?
(B).D.1.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan dan mengungkapkan tujuan yang terukur untuk menerapkan keberagaman dewan dan melaporkan kemajuan dalam mencapai tujuannya? Does the company have a policy and disclose measurable objectives for implementing its board diversity and report on progress in achieving its objectives?
(B).D.2	**Struktur Dewan** Board Structure
(B).D.2.1	Apakah Komite Nominasi sepenuhnya terdiri dari direktur/komisaris independen? Is the Nominating Committee comprise entirely of independent directors/commissioners?
(B).D.2.2	Apakah Komite Nominasi melakukan proses mengidentifikasi kualitas direktur yang selaras dengan arah strategis perusahaan? Does the Nominating Committee undertake the process of identifying the quality of directors aligned with the company's strategic directions?

	Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
	Dalam bagian ini, direktur/komisaris independen, yang telah menjabat selama lebih dari sembilan tahun atau dua periode masing-masing lima tahun (mana yang lebih tinggi) dalam kapasitas yang sama, sejak tanggal pengangkatan pertama mereka, tidak akan dianggap independen meskipun mereka dianggap demikian di yurisdiksinya masing-masing. In this section, independent directors/commissioners, who have served for more than nine years or two terms of five years each (whichever is higher) in the same capacity, from their date of first appointment, will not be considered independent even if they are deemed to be as such in their respective jurisdictions.	
	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V.E. Dewan direksi harus mampu menjalankan penilaian independen yang objektif terhadap urusan perusahaan. V.E.4. Yurisdiksi dan perusahaan juga harus mempertimbangkan langkah-langkah tambahan dan pelengkap untuk memperkuat jalur bakat perempuan di seluruh perusahaan dan memperkuat langkah-langkah kebijakan lain yang bertujuan untuk meningkatkan keberagaman dewan direksi dan manajemen. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V.E. The boards should be able to exercise objective independent judgment on corporate affairs. V.E.4.Jurisdictions and companies should also consider additional and complementary measures to strengthen the female talent pipeline throughout the company and reinforce other policy measures aimed at enhancing board and management diversity.	404 dan 511-512
	ICGN (2021) PRINSIP 2: 2.2 Tingkat independensi Dewan direksi harus terdiri dari mayoritas direktur non-eksekutif yang independen sebagai standar umum. Hal ini harus dianggap sebagai praktik terbaik tidak hanya untuk perusahaan dengan kepemilikan saham yang dipegang secara luas, tetapi juga untuk perusahaan dengan kepemilikan saham terkonsentrasi dan perusahaan anak. Paling tidak, perusahaan yang dikendalikan harus berupaya menghubungkan tingkat independensi dewan direksi dengan saham ekonomi yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas. ICGN (2021) PRINCIPLE 2: 2.2 Independence levels The board should comprise a majority of independent non-executive directors as a general standard. This should be regarded as best practice not only for companies with widely-held share ownership, but also for companies with concentrated share ownership and subsidiary companies. At a minimum, controlled companies should seek to link board independence levels to the economic stake held by minority shareholders.	432-448
	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023) V.D.6. Memastikan proses nominasi dan pemilihan dewan direksi yang formal dan transparan. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023) V.D.6. Ensuring a formal and transparent board nomination and election process.	432-448

Prinsip Principle

(B).D.3	**Pengangkatan dan Penunjukan Kembali Dewan Direksi** Board Appointments and Re-Election
(B).D.3.1	Apakah perusahaan menggunakan firma pencarian profesional atau sumber kandidat eksternal lainnya (seperti basis data direktur yang dibuat oleh badan direktur atau pemegang saham) saat mencari kandidat untuk dewan direksi/komisaris? Does the company use professional search firms or other external sources of candidates (such as director databases set up by director or shareholder bodies) when searching for candidates to the board of directors/commissioners?

(B).D.4	**Struktur dan Komposisi Dewan** Board Structure & Composition
(B).D.4.1	Apakah direktur/komisaris non-eksekutif independen membentuk lebih dari 50% dari dewan direksi/komisaris untuk perusahaan dengan ketua independen? Do independent non-executive directors/commissioners make up more than 50% of the board of directors/commissioners for a company with independent chairman?

	Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
	Dewan direksi, dengan dukungan komite nominasi jika dibentuk, memiliki peran penting untuk memastikan bahwa proses nominasi dan pemilihan dipatuhi. Pertama, meskipun prosedur aktual untuk nominasi mungkin berbeda di antara yurisdiksi, dewan direksi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa prosedur yang ditetapkan transparan dan dipatuhi. Kedua, dewan direksi memiliki peran penting dalam menentukan profil kolektif atau individu anggota dewan direksi yang mungkin dibutuhkan perusahaan pada waktu tertentu, dengan mempertimbangkan pengetahuan, kompetensi, dan keahlian yang sesuai untuk melengkapi keterampilan dewan direksi yang ada. Ketiga, dewan direksi atau komite nominasi memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi kandidat potensial untuk memenuhi profil yang diinginkan dan mengusulkan mereka kepada pemegang saham, dan/atau mempertimbangkan kandidat yang diajukan oleh pemegang saham. The board, with the support of a nomination committee if established, has an essential role to play in ensuring that the nomination and election processes are respected. First, while actual procedures for nomination may differ among jurisdictions, the board has the responsibility to make sure that established procedures are transparent and respected. Second, the board has a key role in defining the collective or individual profile of board members that the company may need at any given time, considering the appropriate knowledge, competencies and expertise to complement the existing skills of the board. Third, the board or nomination committee has the responsibility to identify potential candidates to meet desired profiles and propose them to shareholders, and/or consider those candidates advanced by shareholders.	
	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V.D.6. Dewan direksi atau komite nominasi memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi kandidat potensial yang memenuhi profil yang diinginkan dan mengusulkannya kepada pemegang saham, dan/atau mempertimbangkan kandidat yang diajukan oleh pemegang saham. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V.D.6. The board or nomination committee has the responsibility to identify potential candidates to meet desired profiles and propose them to shareholders, and/or consider those candidates advanced by shareholders.	397 dan 459
	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V.E.1. Dewan direksi harus mempertimbangkan untuk menugaskan sejumlah anggota dewan independen yang mampu menjalankan penilaian independen untuk tugas-tugas yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Contoh tanggung jawab utama tersebut adalah memastikan integritas pelaporan keuangan dan pelaporan perusahaan lainnya, peninjauan transaksi pihak terkait, serta nominasi dan remunerasi anggota dewan direksi dan eksekutif utama. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V.E.1. Boards should consider assigning a sufficient number of independent board members capable of exercising independent judgement to tasks where there is a potential for conflicts of interest. Examples of such key responsibilities are ensuring the integrity of financial and other corporate reporting, the review of related party transactions, and nomination and remuneration of board members and key executives.	414-415

Prinsip Principle	
(B).D.5	**Pengawasan Risiko** Risk Oversight
(B).D.5.1	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa Dewan Direksi mengidentifikasi risiko utama terkait teknologi informasi termasuk gangguan, keamanan siber, dan pemulihan bencana, untuk memastikan bahwa risiko tersebut dikelola dan diintegrasikan ke dalam kerangka manajemen risiko secara keseluruhan? Does the company disclose that its Board identified key risk in relation to information technology including disruption, cyber security, and disaster recovery, to ensure that such risks are managed and integrated into the overall risk management framework?
(B).D.6	**Kinerja Dewan** Board Performance
(B).D.6.1	Apakah perusahaan memiliki Komite Risiko tingkat dewan yang terpisah? Does the company have a separate board level Risk Committee?

	Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V.D.2. Saat menjalankan fungsi-fungsi utama ini, dewan direksi harus memastikan bahwa masalah keberlanjutan yang material dipertimbangkan. Dengan tujuan meningkatkan ketahanan, dewan direksi juga harus memastikan bahwa mereka memiliki proses yang memadai dalam kerangka manajemen risiko mereka untuk menangani risiko eksternal perusahaan yang signifikan, seperti krisis kesehatan, gangguan rantai pasokan, dan ketegangan geopolitik. Kerangka kerja ini harus berfungsi secara ex ante (karena perusahaan harus memupuk ketahanan mereka jika terjadi krisis) dan ex post (karena perusahaan harus dapat menyiapkan proses manajemen krisis saat terjadi peristiwa negatif yang tiba-tiba). G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V.D.2. When fulfilling these key functions, the board should ensure that material sustainability matters are considered. With a view to increasing resilience, boards should also ensure that they have adequate processes in place within their risk management frameworks to deal with significant external company relevant risks, such as health crises, supply chain disruptions and geopolitical tensions. These frameworks should work ex ante (as companies should foster their resilience in the event of a crisis) and ex post (as companies should be able to set up crisis management processes at the onset of a sudden negative event). Yang perlu diperhatikan adalah pengelolaan risiko keamanan digital, yang bersifat dinamis dan dapat berubah dengan cepat. Risiko dapat terkait, antara lain, dengan keamanan dan privasi data, penanganan solusi cloud, metode autentikasi, dan perlindungan keamanan bagi personel jarak jauh yang bekerja pada jaringan eksternal. Seperti halnya risiko lainnya, risiko ini harus diintegrasikan secara lebih luas dalam kerangka manajemen risiko perusahaan secara keseluruhan. Of notable importance is the management of digital security risks, which are dynamic and can change rapidly. Risks may relate, among other matters, to data security and privacy, the handling of cloud solutions, authentication methods, and security safeguards for remote personnel working on external networks. As with other risks, these risks should be integrated more broadly within the overall cyclical company risk management framework.	232-243
	ICGN (2021) PRINSIP 6: 6.5 Komite Risiko Meskipun tanggung jawab utama atas pendekatan manajemen risiko perusahaan berada di tangan seluruh dewan, memiliki komite risiko dapat menjadi mekanisme yang efektif untuk menghadirkan transparansi, fokus, dan penilaian independen yang diperlukan untuk mengawasi pendekatan perusahaan terhadap manajemen risiko dan pengendalian internal. Komite risiko, dan dewan secara umum, harus diberi tahu melalui sistem pengendalian internal dan manajemen risiko di seluruh perusahaan. ICGN (2021) PRINCIPLE 6: 6.5 Risk Committee While ultimate responsibility for a company's risk management approach rests with the full board, having a risk committee can be an effective mechanism to bring the transparency, focus and independent judgement needed to oversee the company's approach to risk management and internal controls. A risk committee, and the board more generally, should be informed through the company's enterprise-wide internal control and risk management system.	493

TINGKAT 2 - PENALTI **LEVEL 2 - PENALTY**

	Prinsip Principle
(P)A.	**Hak dan Perlakuan yang Adil terhadap Pemegang Saham** Rights and Equitable Treatment of shareholders
(P)A.1	**Hak-hak dasar pemegang saham** Basic shareholder rights
(P)A.1.1	Apakah perusahaan gagal atau lalai memberikan perlakuan yang sama untuk pembelian kembali saham kepada semua pemegang saham? Did the company fail or neglect to offer equal treatment for share repurchases to all shareholders?
(P)A.2	**Para pemegang saham, termasuk pemegang saham institusional, harus diperbolehkan untuk berkonsultasi satu sama lain mengenai isu-isu yang menyangkut hak-hak dasar pemegang saham mereka sebagaimana didefinisikan dalam Prinsip-prinsip, dengan pengecualian untuk mencegah penyalahgunaan.** Shareholders, including institutional shareholders, should be allowed to consult with each other on issues concerning their basic shareholder rights as defined in the Principles, subject to exceptions to prevent abuse.
(P)A.2.1	Apakah ada bukti adanya hambatan yang menghalangi pemegang saham berkomunikasi atau berkonsultasi dengan pemegang saham lainnya? Is there evidence of barriers that prevent shareholders from communicating or consulting with other shareholders?
(P)A.3	**Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham dan harus diberitahu tentang peraturan, termasuk prosedur pemungutan suara, yang mengatur rapat umum pemegang saham.** Right to participate effectively in and vote in general shareholders meeting and should be informed of the rules, including voting procedures, that govern general shareholders meeting.
(P)A.3.1	Apakah perusahaan memasukkan agenda tambahan dan yang tidak diumumkan dalam pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan/Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa? Did the company include any additional and unannounced agenda item into the notice of AGM/EGM?
(P)A.3.2	Apakah Ketua Dewan dan Ketua semua Komite Dewan dan CEO tidak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham terakhir? Was the Chairman of the Board and the Chairmen of all Board Committees and the CEO absent from the most recent General Meeting?
(P)A.4	**Struktur dan pengaturan modal yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh tingkat pengendalian yang tidak proporsional dengan kepemilikan ekuitas mereka harus diungkapkan.** Capital structures and arrangements that enable certain shareholders to obtain a degree of control disproportionate to their equity ownership should be disclosed. **Apakah perusahaan gagal mengungkapkan keberadaan:** Did the company fail to disclose the existence of:
(P)A.4.1	Perjanjian pemegang saham? Shareholders agreement?
(P)A.4.2	Batasan pemungutan suara? Voting cap?
(P)A.4.3	Hak suara ganda? Multiple voting rights?

	Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
	G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): II.A.	Tidak
	G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): II.D. Shareholders, including institutional shareholders, should be allowed to consult with each other on issues concerning their basic shareholder rights as defined in the Principles, subject to exceptions to prevent abuse.	Tidak
	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): II.C.2 G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): II.C.2	Tidak
	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): II.C. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): II.C.	Ketua Dewan dan Ketua semua Komite Dewan dan CEO tidak hadir dalam RRUPS
	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): II.D. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): II.D.	Tidak

	Prinsip Principle
(P)A.5	**Struktur dan pengaturan modal yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh tingkat pengendalian yang tidak proporsional dengan kepemilikan ekuitas mereka harus diungkapkan.** Capital structures and arrangements that enable certain shareholders to obtain a degree of control disproportionate to their equity ownership should be disclosed.
(P)A.5.1	Apakah struktur kepemilikan piramida dan/atau struktur kepemilikan silang terlihat jelas? Is a pyramid ownership structure and/ or cross holding structure apparent?
(P)A.6	**Perdagangan orang dalam dan praktik jual-beli kepentingan pribadi yang merugikan harus dilarang.** Insider trading and abusive self-dealing should be prohibited.
(P)A.6.1	Pernahkah terjadi tindak pidana perdagangan orang dalam yang melibatkan direktur/komisaris, manajemen dan karyawan dalam tiga tahun terakhir? Has there been any conviction of insider trading involving directors/commissioners, management and employees in the past three years?

	Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): IV.A.3. Beberapa struktur modal seperti struktur piramida, kepemilikan silang, dan saham dengan hak suara terbatas atau ganda memungkinkan pemegang saham untuk menjalankan tingkat kendali atas perusahaan yang tidak proporsional dengan kepemilikan ekuitas mereka di perusahaan tersebut. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): IV.A.3. Some capital structures such as pyramid structures, cross-shareholdings and shares with limited or multiple voting rights allow shareholders to exercise a degree of control over the corporation disproportionate to their equity ownership in the company. Kelompok perusahaan sering kali merupakan struktur kompleks yang melibatkan beberapa lapisan anak perusahaan, termasuk di berbagai sektor dan yurisdiksi. Struktur ini dapat membatasi kemampuan pemegang saham nonpengendali dari perusahaan induk dan anak perusahaan untuk memengaruhi kebijakan perusahaan dan memahami risiko yang terlibat, dan dapat memungkinkan pemegang saham pengendali untuk mengambil keuntungan pribadi dari perusahaan kelompok. Company groups are often complex structures that involve several layers of subsidiaries, including across different sectors and jurisdictions. These structures may limit the ability of non-controlling shareholders of the parent and subsidiary companies to influence corporate policies and understand the risks involved, and may allow controlling shareholders to extract private benefits from group companies Mengingat potensi mekanisme ini untuk mendistribusikan kembali pengaruh pemegang saham terhadap kebijakan perusahaan, dan juga relevansinya terhadap penegakan peraturan pengambilalihan, pengungkapan struktur modal, struktur grup, dan pengaturan pengendaliannya harus diwajibkan. Pengungkapan tentang skema tersebut juga memungkinkan pemegang saham, pemegang utang, dan calon investor untuk membuat keputusan yang lebih tepat. Given the potential of these mechanisms to redistribute the influence of shareholders on company policy, and also its relevance for the enforcement of takeover regulation, the disclosure of such capital structures, group structures and their control arrangements should be required. Disclosure about such schemes also allows shareholders, debtholders and potential investors to make better informed decisions.	Tidak
	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): III.E. Investor institusional, pasar saham, dan perantara lainnya III.E.3. Perdagangan orang dalam dan manipulasi pasar harus dilarang dan aturan yang berlaku harus ditegakkan. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): III.E. Institutional investors, stock markets, and other intermediaries III.E.3. Insider trading and market manipulation should be prohibited and the applicable rules enforced. ICGN (2021) PRINSIP 4: 4.4 Transaksi saham oleh karyawan Dewan direksi harus mengembangkan aturan yang jelas terkait perdagangan saham oleh direktur dan karyawan perusahaan. Individu tidak boleh memperoleh keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari pengetahuan yang tidak tersedia secara umum di pasar. ICGN (2021) PRINCIPLE 4: 4.4 Employee share dealing The board should develop clear rules regarding any trading by directors and employees in the company's own securities. Individuals should not benefit directly or indirectly from knowledge which is not generally available to the market.	595

	Prinsip Principle
(P)A.7	**Melindungi pemegang saham minoritas dari tindakan yang merugikan** Protecting minority shareholders from abusive action
(P)A.7.1	Apakah ada kasus ketidakpatuhan terhadap undang-undang, peraturan, dan ketentuan yang berkaitan dengan transaksi material dengan pihak berelasi dalam tiga tahun terakhir? Has there been any cases of non-compliance with the laws, rules and regulations pertaining to material related party transactions in the past three years?
(P)A.7.2	Apakah ada RPT yang dapat diklasifikasikan sebagai bantuan keuangan (yaitu tidak dilakukan secara wajar) kepada entitas selain perusahaan anak yang dimiliki sepenuhnya? Were there any RPTs that can be classified as financial assistance (i.e not conducted at arm's length) to entities other than wholly- owned subsidiary companies?

	Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): III. Investor institusional, pasar saham, dan perantara lainnya III.E. Perdagangan orang dalam dan manipulasi pasar harus dilarang dan aturan yang berlaku harus ditegakkan. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): III. Institutional investors, stock markets, and other intermediaries III.E. Insider trading and market manipulation should be prohibited and the applicable rules enforced. ICGN (2021) PRINSIP 9: 9.3 Konflik kepentingan Dewan direksi harus memastikan bahwa kebijakan dan prosedur mengenai konflik kepentingan ditetapkan, dipahami, dan dilaksanakan oleh direksi, manajemen, pekerja, dan pihak terkait lainnya, termasuk anggota kelompok usaha terkait. Jika seorang direksi memiliki kepentingan dalam suatu masalah yang sedang dipertimbangkan oleh dewan direksi, maka direksi tersebut harus segera menyatakan kepentingan tersebut dan dilarang memberikan suara pada masalah tersebut atau memberikan pengaruh. ICGN (2021) PRINCIPLE 9: 9.3 Conflicts of interest The board should ensure that policies and procedures on conflicts of interest are established, understood and implemented by directors, management, workers and other relevant parties, including members of related business groups. If a director has an interest in a matter under consideration by the board, then the director should promptly declare such an interest and be precluded from voting on the subject or exerting influence 9.4 Transaksi dengan pihak terkait Dewan direksi harus mengembangkan, mengadopsi, dan mengungkapkan Kebijakan Transaksi dengan Pihak Terkait (RPT) dan memiliki proses yang kuat untuk menyetujui, meninjau, dan memantau RPT dan setiap konflik kepentingan yang melekat. Ini termasuk membentuk komite direktur independen, baik sebagai komite terpisah, atau komite yang sudah ada yang terdiri dari direktur independen, misalnya komite audit. 9.4 Related party transactions The board should develop, adopt and disclose a related party transactions (RPT) Policy and have a robust process for approving, reviewing and monitoring RPTs and any inherent conflicts of interest. This includes establishing a committee of independent directors, either as a separate committee, or an existing committee comprised of independent directors, for example the audit committee.	595 dan 316
	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): II.G. Pemegang saham minoritas harus dilindungi dari tindakan penyalahgunaan oleh, atau demi kepentingan, pemegang saham pengendali yang bertindak baik secara langsung maupun tidak langsung, dan harus memiliki sarana pemulihan yang efektif. Tindakan penyalahgunaan terhadap diri sendiri harus dilarang. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): II.G. Minority shareholders should be protected from abusive actions by, or in the interest of, controlling shareholders acting either directly or indirectly, and should have effective means of redress. Abusive self-dealing should be prohibited.	316

	Prinsip Principle
(P)B.1	**Hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang atau melalui kesepakatan bersama harus dihormati.** The rights of stakeholders that are established by law or through mutual agreements are to be respected.
(P)B.1.1	Apakah pernah terjadi pelanggaran hukum terkait ketenagakerjaan/ketenagakerjaan/konsumen/kepailitan/komersial/ persaingan atau masalah lingkungan? Have there been any violations of any laws pertaining to labor/employment/ consumer/insolvency/ commercial/competition or environmental issues?
(P)B.2	**Apabila pemangku kepentingan berpartisipasi dalam proses tata kelola perusahaan, mereka harus memiliki akses terhadap informasi yang relevan, memadai, dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan teratur.** Where stakeholders participate in the corporate governance process, they should have access to relevant, sufficient and reliable information on a timely and regular basis.
(P)B.2.1	Apakah perusahaan pernah menghadapi sanksi oleh regulator karena gagal membuat pengumuman dalam jangka waktu yang ditentukan untuk peristiwa material? Has the company faced any sanctions by regulators for failure to make announcements within the requisite time period for material events?
(P)B.2.2	Apakah ada bukti bahwa perusahaan terlibat dalam kegiatan greenwashing? Is there any evidence that the company is engaging in greenwashing activities?

	Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): IV.D. Hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh undang-undang atau melalui kesepakatan bersama harus dihormati. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): IV.D. The rights of stakeholders that are established by law or through mutual agreements are to be respected. (8) Perusahaan juga disarankan untuk menetapkan dan memastikan efektivitas pengendalian internal, etika, dan program atau langkah-langkah kepatuhan untuk mematuhi hukum, peraturan, dan standar yang berlaku, termasuk undang-undang yang mengkriminalisasi penyuapan pejabat publik asing, sebagaimana diwajibkan dalam Konvensi Anti-Penyuapan OECD, dan bentuk-bentuk penyuapan dan korupsi lainnya. Selain itu, kepatuhan juga harus terkait dengan hukum dan peraturan lainnya seperti yang mencakup sekuritas, perpajakan, persaingan, serta kondisi kerja dan keselamatan. (8) Companies are also well advised to establish and ensure the effectiveness of internal controls, ethics, and compliance programs or measures to comply with applicable laws, regulations and standards, including statutes criminalizing the bribery of foreign public officials, as required under the OECD Anti-Bribery Convention, and other forms of bribery and corruption. Moreover, compliance must also relate to other laws and regulations such as those covering securities, taxation, competition, and work and safety conditions.	543-544
	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): IV.D.4. Jika pemangku kepentingan berpartisipasi dalam proses tata kelola perusahaan, mereka harus memiliki akses ke informasi yang relevan, memadai, dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan teratur. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): IV.D.4. Where stakeholders participate in the corporate governance process, they should have access to relevant, sufficient and reliable information on a timely and regular basis.	524
	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): VI.C. Dewan direksi harus memastikan bahwa aktivitas lobi perusahaan sejalan dengan tujuan dan target terkait keberlanjutan. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): VI.C. Boards should ensure that companies' lobbying activities are coherent with their sustainability-related goals and targets. Dewan direksi harus mengawasi secara efektif kegiatan lobi yang dilakukan manajemen dan keuangan atas nama perusahaan, guna memastikan bahwa manajemen memperhatikan strategi jangka panjang untuk keberlanjutan yang diadopsi oleh dewan direksi. Misalnya, melobi terhadap kebijakan penetapan harga karbon apa pun dapat diharapkan dapat meningkatkan laba jangka pendek perusahaan, tetapi tidak sejalan dengan tujuan perusahaan untuk melakukan transisi yang tertib menuju ekonomi rendah karbon. Boards should effectively oversee the lobbying activities management conducts and finances on behalf of the company, in order to ensure that management gives due regard to the long-term strategy for sustainability adopted by the board. For instance, lobbying against any carbon pricing policy may be expected to increase a company's short-term profits but not be in line with the company's goal to make an orderly transition to a low carbon economy.	Merujuk Pada Laporan Keberlanjutan yang disusun terpisah dari Laporan Tahunan

Prinsip Principle	
(P)C.	**Pengungkapan dan transparansi** Disclosure and transparency
(P)C.1	**Sanksi dari regulator atas laporan keuangan** Sanctions from regulator on financial reports
(P)C.1.1	Apakah perusahaan menerima "pendapat wajar dengan pengecualian" dalam laporan audit eksternalnya? Did the company receive a "qualified opinion" in its external audit report?
(P)C.1.2	Apakah perusahaan menerima "pendapat tidak wajar" dalam laporan audit eksternalnya? Did the company receive an "adverse opinion" in its external audit report?
(P)C.1.3	Apakah perusahaan menerima "pendapat tidak setuju" dalam laporan audit eksternalnya? Did the company receive a "disclaimer opinion" in its external audit report?
(P)C.1.4	Apakah perusahaan pada tahun lalu telah merevisi laporan keuangannya karena alasan selain perubahan kebijakan akuntansi? Has the company in the past year revised its financial statements for reasons other than changes in accounting policies?

	Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): IV: Pengungkapan dan Transparansi IV.B. Informasi harus disiapkan dan diungkapkan sesuai dengan standar akuntansi dan pengungkapan yang diakui secara internasional. IV.C. Audit eksternal tahunan harus dilakukan oleh auditor yang independen, kompeten, dan berkualifikasi sesuai dengan standar audit, etika, dan independensi yang diakui secara internasional untuk memberikan keyakinan yang wajar kepada dewan dan pemegang saham tentang apakah laporan keuangan disiapkan, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. IV.D. Auditor eksternal harus bertanggung jawab kepada pemegang saham dan memiliki kewajiban kepada perusahaan untuk menjalankan kehati-hatian profesional yang sewajarnya dalam melakukan audit demi kepentingan publik. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): IV: Disclosure and Transparency IV.B. Information should be prepared and disclosed in accordance with internationally recognized accounting and disclosure standards. IV.C. An annual external audit should be conducted by an independent, competent and qualified auditor in accordance with internationally recognized auditing, ethical and independence standards in order to provide reasonable assurance to the board and shareholders on whether the financial statements are prepared, in all material respects, in accordance with an applicable financial reporting framework. IV.D. External auditors should be accountable to the shareholders and owe a duty to the company to exercise due professional care in the conduct of the audit in the public interest. ICGN (2021) PRINSIP 8: 8.2 Audit eksternal Dewan direksi harus menetapkan prosedur formal untuk memastikan audit eksternal yang efektif dan independen atas laporan keuangan perusahaan guna memberikan kepastian kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan terkait mengenai posisi keuangan, kinerja, dan prospek perusahaan. Hubungan pelaporan langsung dan akuntabilitas auditor eksternal harus ditujukan kepada komite audit independen. ICGN (2021) PRINCIPLE 8: 8.2 External audit The board should establish formal procedures to ensure an effective and independent external audit of the company's financial statements to provide assurance to shareholders and relevant stakeholders around a company's financial position, performance and prospects. The external auditor's direct reporting relationship and accountability should be to the independent audit committee.	Tidak Tidak Tidak Tidak

Prinsip Principle	
(P)D.	**Tanggung Jawab Dewan** Responsibilities of the Board
(P)D.1	**Kepatuhan terhadap peraturan, ketentuan, dan hukum yang berlaku** Compliance with listing rules, regulations and applicable laws
(P)D.1.1	Apakah ada bukti bahwa perusahaan tersebut tidak mematuhi aturan dan ketentuan pencatatan apa pun selain aturan pengungkapan selama setahun terakhir? Is there any evidence that the company has not complied with any listing rules and regulations apart from disclosure rules over the past year?
(P)D.1.2	Pernahkah ada kasus di mana direktur non-eksekutif/komisaris mengundurkan diri dan mengemukakan masalah terkait tata kelola? Have there been any instances where non-executive directors/commissioner have resigned and raised any issues of governance-related concerns?

	Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
	Dalam bagian ini, direktur/komisaris independen, yang telah menjabat selama lebih dari sembilan tahun atau dua periode masing-masing lima tahun (mana yang lebih tinggi) dalam kapasitas yang sama, sejak tanggal pengangkatan pertama mereka, tidak akan dianggap independen meskipun mereka dianggap demikian di yurisdiksinya masing-masing. In this section, independent directors/commissioners, who have served for more than nine years or two terms of five years each (whichever is higher) in the same capacity, from their date of first appointment, will not be considered independent even if they are deemed to be as such in their respective jurisdictions.	
	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): VI.D.8. Memastikan integritas sistem akuntansi dan pelaporan perusahaan untuk pengungkapan, termasuk audit eksternal yang independen, dan bahwa sistem pengendalian yang tepat telah diterapkan, sesuai dengan hukum dan standar yang relevan. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): VI.D.8. Ensuring the integrity of the corporation's accounting and reporting systems for disclosure, including the independent external audit, and that appropriate control systems are in place, in compliance with the law and relevant standards. Perusahaan juga disarankan untuk menetapkan dan memastikan efektivitas pengendalian internal, etika, dan program atau langkah kepatuhan untuk mematuhi hukum, peraturan, dan standar yang berlaku, termasuk undang-undang yang mengkriminalisasi penyuapan pejabat publik asing, sebagaimana diwajibkan dalam Konvensi Anti-Penyuapan OECD, dan bentuk-bentuk penyuapan dan korupsi lainnya. Selain itu, kepatuhan juga harus terkait dengan hukum dan peraturan lainnya seperti yang mencakup sekuritas, perpajakan, persaingan, dan kondisi kerja dan keselamatan. Hukum lain yang mungkin berlaku termasuk yang berkaitan dengan hak asasi manusia, lingkungan, penipuan, dan pencucian uang. Program kepatuhan tersebut juga akan mendukung kode etik perusahaan. Companies are also well advised to establish and ensure the effectiveness of internal controls, ethics, and compliance programs or measures to comply with applicable laws, regulations and standards, including statutes criminalizing the bribery of foreign public officials, as required under the OECD Anti-Bribery Convention, and other forms of bribery and corruption. Moreover, compliance must also relate to other laws and regulations such as those covering securities, taxation, competition, and work and safety conditions. Other laws that may be applicable include those relating to human rights, the environment, fraud and money laundering. Such compliance programs will also underpin the company's code of ethics.	Tidak
	KODE INGGRIS (JULI 2018) Ketentuan 8. Jika direktur memiliki kekhawatiran tentang operasi dewan direksi atau manajemen perusahaan yang tidak dapat diselesaikan, kekhawatiran mereka harus dicatat dalam notulen rapat dewan direksi. Saat mengundurkan diri, direktur non-eksekutif harus memberikan pernyataan tertulis kepada pimpinan dewan direksi, untuk diedarkan ke dewan direksi, jika mereka memiliki kekhawatiran tersebut. UK CODE (JULY 2018) Provision 8. Where directors have concerns about the operation of the board or the management of the company that cannot be resolved, their concerns should be recorded in the board minutes. On resignation, a non-executive director should provide a written statement to the chair, for circulation to the board, if they have any such concerns.	Tidak

Prinsip Principle		
(P)D.2	**Struktur Dewan** Board structure	
(P)D.2.1	Apakah Perusahaan memiliki direktur/komisaris independen yang telah menjabat lebih dari sembilan tahun atau dua periode masing-masing lima tahun (mana yang lebih tinggi) dalam kapasitas yang sama? Does the Company have any independent directors/commissioners who have served for more than nine years or two terms of five years each (whichever is higher) in the same capacity? 1 Jangka waktu lima tahun harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum diperkenalkannya ASEAN Corporate Governance Scorecard pada tahun 2011. 1 The five years term must be required by legislation which pre- existed before the introduction of the ASEAN Corporate Governance Scorecard in 2011	
(P)D.2.2	Apakah perusahaan gagal mengidentifikasi dengan benar deskripsi semua direktur mereka sebagai independen, non-eksekutif, dan eksekutif? Did the company fail to correctly identify the description of all their directors as independent, non-executive, and executive?	
(P)D.2.3	Apakah perusahaan tersebut memiliki direktur independen/non-eksekutif/komisaris yang menjabat pada lebih dari lima dewan direksi perusahaan publik? Does the company have any independent directors/non- executive/commissioners who serve on a total of more than five boards of publicly-listed companies?	

	Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
	ICGN (2021) PRINSIP 3: 3.4 Masa Jabatan Direktur non-eksekutif independen harus menjabat selama jangka waktu yang sesuai untuk memastikan mereka memberikan perspektif yang tidak memihak pada diskusi dan pengambilan keputusan dewan. Batasan masa jabatan, jika ada, dan identitas direktur yang telah melampaui batasan tersebut (dan dengan demikian tidak lagi dianggap independen) harus diungkapkan. Masa jabatan direktur harus ditinjau oleh Komite Nominasi setiap tahun dan pemilihan kembali direktur bergantung pada evaluasi yang memuaskan atas kontribusinya terhadap dewan. ICGN (2021) PRINCIPLE 3: 3.4 Tenure Independent non-executive directors should serve for an appropriate length of time to ensure they contribute an impartial perspective to board discussion and decision-making. Term limits, where they exist, and the identity of directors who have exceeded such limits (and thus no longer deemed independent) should be disclosed. Director tenure should be reviewed by the Nomination Committee annually and director re-election contingent on a satisfactory evaluation of his or her contribution to the board.	Tidak
	ICGN (2021) PRINSIP 2: 2.6 Kriteria independensi Dewan direksi harus mengidentifikasi dalam laporan tahunan nama-nama direktur yang dianggap oleh dewan direksi sebagai direktur independen dan yang mampu menjalankan penilaian independen tanpa dipengaruhi oleh pihak luar. ICGN (2021) PRINCIPLE 2: 2.6 Independence criteria The board should identify in the annual report the names of the directors considered by the board to be independent and who are able to exercise independent judgment free from any external influence.	Tidak
	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V.E.3. Anggota dewan direksi harus mampu berkomitmen secara efektif terhadap tanggung jawab mereka. Jabatan di terlalu banyak dewan direksi atau komite dapat mengganggu kinerja anggota dewan direksi. Beberapa yurisdiksi telah membatasi jumlah jabatan dewan direksi yang dapat dipegang. Pembatasan khusus mungkin kurang penting daripada memastikan bahwa anggota dewan direksi memiliki legitimasi dan kepercayaan di mata pemegang saham. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V.E.3. Board members should be able to commit themselves effectively to their responsibilities. Service on too many boards or committees can interfere with the performance of board members. Some jurisdictions have limited the number of board positions that can be held. Specific limitations may be less important than ensuring that members of the board enjoy legitimacy and confidence in the eyes of shareholders	Tidak

	Prinsip Principle
(P)D.3	**Audit Eksternal** External Audit
(P)D.3.1	Apakah ada direktur atau manajemen senior yang merupakan mantan karyawan atau mitra auditor eksternal saat ini (dalam 2 tahun terakhir)? Is any of the directors or senior management a former employee or partner of the current external auditor (in the past 2 years)?

	Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023) IV.C. Audit eksternal tahunan harus dilakukan oleh auditor yang independen, kompeten, dan berkualifikasi sesuai dengan standar audit, etika, dan independensi yang diakui secara internasional untuk memberikan keyakinan yang wajar kepada dewan direksi dan pemegang saham tentang apakah laporan keuangan disiapkan, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023) IV.C. An annual external audit should be conducted by an independent, competent and qualified auditor in accordance with internationally recognized auditing, ethical and independence standards in order to provide reasonable assurance to the board and shareholders on whether the financial statements are prepared, in all material respects, in accordance with an applicable financial reporting framework.	
	Penyediaan layanan non-audit oleh auditor eksternal kepada suatu perusahaan dapat mengganggu independensi mereka dan mungkin melibatkan mereka dalam mengaudit pekerjaan mereka sendiri atau menimbulkan ancaman lain terhadap independensi. Untuk menghadapi ancaman potensial tersebut, beberapa yurisdiksi mengharuskan pengungkapan pembayaran kepada auditor eksternal untuk layanan non-audit. Contoh ketentuan lain yang dirancang untuk mendorong independensi auditor eksternal mencakup larangan atau pembatasan ketat pada sifat pekerjaan non-audit yang dapat dilakukan oleh auditor untuk klien audit mereka; komunikasi berkala kepada komite audit yang membahas sifat, waktu, dan biaya pekerjaan non-audit (termasuk persetujuan pekerjaan tersebut) serta hubungan yang dapat mengancam independensi auditor; rotasi wajib auditor (baik mitra atau dalam beberapa kasus perusahaan audit); masa kerja tetap untuk auditor; audit bersama; larangan sementara atas pekerjaan mantan auditor oleh perusahaan yang diaudit; dan melarang auditor atau tanggungan mereka memiliki saham finansial atau peran manajemen di perusahaan yang mereka audit. Beberapa yurisdiksi mengambil pendekatan regulasi yang lebih langsung dan membatasi persentase pendapatan non-audit yang dapat diterima auditor dari klien tertentu atau membatasi persentase total pendapatan auditor yang dapat berasal dari satu klien. Provision of non-audit services by the external auditor to a company can impair their independence and might involve them auditing their own work or present other threats to independence. To deal with such potential threats, some jurisdictions require the disclosure of payments to external auditors for non-audit services. Examples of other provisions designed to promote external auditor independence include a ban or severe limitation on the nature of non-audit work which can be undertaken by an auditor for their audit client; periodic communications to the audit committee discussing the nature, timing and fees of the non-audit work (including the approval of such work) as well as relationships that may threaten auditor independence; mandatory rotation of auditors (either partners or in some cases the audit company); a fixed tenure for auditors; joint audits; a temporary ban on the employment of an ex-auditor by the audited company; and prohibiting auditors or their dependents from having a financial stake or management role in the companies they audit. Some jurisdictions take a more direct regulatory approach and limit the percentage of non-audit income that the auditor can receive from a particular client or limit the total percentage of auditor income that can come from one client.	Iya

	Prinsip Principle
(P)D.4	**Struktur dan komposisi dewan** Board structure and composition
(P)D.4.1	Apakah ketua pernah menjadi CEO perusahaan dalam tiga tahun terakhir? Has the chairman been the company CEO in the last three years?

LAMPIRAN
Item yang muncul dalam lampiran merujuk pada pertanyaan yang merupakan bagian dari kartu skor tahun 2017 tetapi kemudian dihapus dalam revisi tahun 2023. Item-item ini dihapus dari versi saat ini, karena semua yurisdiksi yang berpartisipasi dalam penilaian menganggap item-item ini sebagai Item Default. Item Default diberikan ketika suatu negara memiliki undang-undang atau persyaratan khusus yang akan memungkinkan semua perusahaan domestik yang dinilai untuk secara otomatis mendapat poin untuk item tertentu. Penghapusan item-item ini tidak berarti bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak lagi dipandang sebagai praktik tata kelola perusahaan yang penting.

APPENDIX
The items appearing in the appendix refer to questions which were part of the 2017 scorecard but were subsequently removed in the 2023 revision. These items were removed from the current version, since all participating jurisdictions in the assessment consider these items as Default Items. Default items are accorded when a country has specific legislation or requirements that will enable all domestic companies assessed to automatically score a point for a particular item. The removal of these items does not mean that the questions are no longer viewed to be important corporate governance practices.

	Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V.E. Dewan direksi harus mampu menjalankan penilaian independen yang objektif terhadap urusan perusahaan. Di wilayah hukum dengan sistem dewan direksi tingkat tunggal, objektivitas dewan direksi dan independensinya dari manajemen dapat diperkuat dengan pemisahan peran kepala eksekutif dan ketua. Pemisahan kedua jabatan tersebut dianggap sebagai praktik yang baik, karena dapat membantu mencapai keseimbangan kekuasaan yang tepat, meningkatkan akuntabilitas, dan meningkatkan kapasitas dewan direksi untuk membuat keputusan yang independen dari manajemen. Penunjukan direktur utama yang independen dari manajemen juga dianggap sebagai alternatif praktik yang baik di beberapa wilayah hukum jika peran tersebut ditetapkan dengan kewenangan yang cukup untuk memimpin dewan direksi dalam kasus-kasus di mana manajemen memiliki konflik yang jelas. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V.E. The board should be able to exercise objective independent judgement on corporate affairs. In jurisdictions with single tier board systems, the objectivity of the board and its independence from management may be strengthened by the separation of the role of chief executive and chair. Separation of the two posts is regarded as good practice, as it can help to achieve an appropriate balance of power, increase accountability and improve the board's capacity for decision-making independent of management. The designation of a lead director who is independent of management is also regarded as a good practice alternative in some jurisdictions if that role is defined with sufficient authority to lead the board in cases where management has clear conflicts ICGN (2021) PRINSIP 2: 2.5 Suksesi CEO menjadi Ketua Praktik CEO perusahaan yang pensiun tetap berada di dewan direksi sebagai direktur harus dicegah, terlepas dari adanya masa tenang, atau jika praktik ini benar-benar terjadi, CEO yang pensiun tidak boleh bertugas di komite dewan yang mengharuskan perwakilan independen. Jika, sebagai pengecualian, dewan memutuskan bahwa CEO yang pensiun harus menggantikan posisi ketua, dewan harus berkonsultasi dengan pemegang saham terlebih dahulu dengan menetapkan alasan yang meyakinkan dan memberikan penjelasan terperinci dalam laporan tahunan. Kecuali jika ada keadaan luar biasa, harus ada jeda dalam masa jabatan di antara peran-peran tersebut (misalnya, periode dua tahun). ICGN (2021) PRINCIPLE 2: 2.5 CEO succession to Chair The practice of a company's retiring CEO remaining on the board as a director should be discouraged, regardless of any cooling off period, or in the event this practice does take place, the retiring CEO should not serve on board committees that require independent representation. If, exceptionally, the board decides that a retiring CEO should succeed to become chair, the board should consult with shareholders in advance setting out a convincing rationale and provide detailed explanation in the annual report. Unless there are extraordinary circumstances, there should be a break in service between the roles (e.g., a period of two years).	Tidak

	Prinsip Principle
	Apakah pemegang saham memiliki hak untuk berpartisipasi dalam: Do shareholders have the right to participate in:
A.2.1	Perubahan pada anggaran dasar perusahaan? Amendments to the company's constitution?
A.2.2	Otorisasi saham tambahan? The authorization of additional shares?
A.2.3	Pengalihan semua atau sebagian besar aset, yang pada dasarnya mengakibatkan penjualan perusahaan? The transfer of all or substantially all assets, which in effect results in the sale of the company?
B.1.1	Apakah saham biasa atau saham biasa perusahaan memiliki satu suara untuk satu saham? Does the company's ordinary or common shares have one vote for one share?

	Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
	G20/OECD (2015) Prinsip II (B) Pemegang saham harus memperoleh informasi yang cukup mengenai, dan memiliki hak untuk menyetujui atau berpartisipasi dalam, keputusan yang berkaitan dengan perubahan fundamental perusahaan seperti: (1) amandemen anggaran dasar, atau akta pendirian atau dokumen serupa yang mengatur perusahaan. G20/OECD (2015) Principle II (B) Shareholders should be sufficiently informed about, and have the right to approve or participate in, decisions concerning fundamental corporate changes such as: (1) amendments to the statutes, or articles of incorporation or similar governing documents of the company.	545-546
	G20/OECD (2015) Prinsip II (B): (2) otorisasi penambahan saham. G20/OECD (2015) Principle II (B): (2) the authorization of additional shares.	Tidak
	Prinsip II (B) G20/OECD (2015): (3) transaksi luar biasa, termasuk pengalihan seluruh atau sebagian besar aset, yang pada dasarnya mengakibatkan penjualan perusahaan G20/OECD (2015) Principle II (B): (3) extraordinary transactions, including the transfer of all or substantially all assets, that in effect result in the sale of the company	Tidak
	Prinsip II OECD E. Semua pemegang saham dari seri yang sama dalam satu kelas harus diperlakukan sama. Struktur dan pengaturan modal yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh tingkat pengaruh atau kendali yang tidak proporsional dengan kepemilikan ekuitas mereka harus diungkapkan. 1. Dalam seri kelas apa pun, semua saham harus memiliki hak yang sama. Semua investor harus dapat memperoleh informasi tentang hak yang melekat pada semua seri dan kelas saham sebelum mereka membeli. Setiap perubahan dalam hak ekonomi atau hak suara harus tunduk pada persetujuan oleh kelas saham yang terkena dampak negatif. OECD Principle II E. All shareholders of the same series of a class should be treated equally. Capital structures and arrangements that enable certain shareholders to obtain a degree of influence or control disproportionate to their equity ownership should be disclosed. 1. Within any series of a class, all shares should carry the same rights. All investors should be able to obtain information about the rights attached to all series and classes of shares before they purchase. Any changes in economic or voting rights should be subject to approval by those classes of shares which are negatively affected. Prinsip 9.1 ICGN Kelas saham Informasi yang memadai tentang atribut material dari semua kelas dan seri saham perusahaan harus diungkapkan secara tepat waktu. Saham biasa atau saham biasa harus memiliki satu suara untuk setiap saham. Penyimpangan dari standar 'satu saham, satu suara' yang memberikan pemegang saham tertentu kekuasaan yang tidak proporsional dengan kepentingan ekonomi mereka harus diungkapkan dan dijelaskan. Struktur saham kelas ganda harus terus ditinjau dan harus disertai dengan perlindungan ekstra yang sepadan bagi pemegang saham minoritas, terutama jika terjadi tawaran pengambilalihan. ICGN Principle 9.1 Share classes Sufficient information about the material attributes of all of the company's classes and series of shares should be disclosed on a timely basis. Ordinary or common shares should feature one vote for each share. Divergence from a 'one-share, one-vote' standard which gives certain shareholders power disproportionate to their economic interests should be disclosed and explained. Dual class share structures should be kept under review and should be accompanied by commensurate extra protections for minority shareholders, particularly in the event of a takeover bid.	Tidak

	Prinsip Principle	
B.3.1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan dan/atau peraturan yang melarang direktur/komisaris dan karyawan untuk mendapatkan keuntungan dari pengetahuan yang tidak tersedia secara umum di pasar? Does the company have policies and/or rules prohibiting directors/commissioners and employees to benefit from knowledge which is not generally available to the market?	
B.4.1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mengharuskan direktur/komisaris untuk mengungkapkan kepentingan mereka dalam transaksi dan konflik kepentingan lainnya? Does the company have a policy requiring directors/commissioners to disclose their interest in transactions and any other conflicts of interest?	

	Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
	Prinsip III OECD E. Perdagangan orang dalam dan manipulasi pasar harus dilarang dan peraturan yang berlaku harus ditegakkan. OECD Principle III E. Insider trading and market manipulation should be prohibited and the applicable rules enforced. Prinsip 4 ICGN. Budaya Perusahaan 4.5 Transaksi saham oleh karyawan Harus ada aturan yang jelas mengenai perdagangan saham oleh direktur dan karyawan perusahaan itu sendiri. Individu tidak boleh mendapatkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari pengetahuan yang tidak tersedia secara umum di pasar. ICGN Principle 4. Corporate Culture 4.5 Employee share dealing There should be clear rules regarding any trading by directors and employees in the company's own securities. Individuals should not benefit directly or indirectly from knowledge which is not generally available to the market.	Iya
	Prinsip II OECD F. Transaksi dengan pihak terkait harus disetujui dan dilakukan dengan cara yang memastikan pengelolaan konflik kepentingan yang tepat dan melindungi kepentingan perusahaan dan pemegang sahamnya. 1. Konflik kepentingan yang melekat dalam transaksi dengan pihak terkait harus ditangani. 2. Anggota dewan dan eksekutif utama harus diminta untuk mengungkapkan kepada dewan apakah mereka, secara langsung, tidak langsung atau atas nama pihak ketiga, memiliki kepentingan material dalam setiap transaksi atau masalah yang secara langsung memengaruhi perusahaan. OECD Principle II F. Related-party transactions should be approved and conducted in a manner that ensures proper management of conflict of interest and protects the interest of the company and its shareholders. Conflicts of interest inherent in related-party transactions should be addressed. Members of the board and key executives should be required to disclose to the board whether they, directly, indirectly or on behalf of third parties, have a material interest in any transaction or matter directly affecting the corporation. Prinsip ICGN 9.3 Konflik kepentingan Kebijakan dan prosedur tentang konflik kepentingan harus ditetapkan, dipahami, dan dilaksanakan oleh direktur, manajemen, karyawan, dan pihak terkait lainnya. Jika seorang direktur memiliki kepentingan dalam suatu masalah yang sedang dipertimbangkan oleh dewan, maka direktur tersebut harus segera menyatakan kepentingan tersebut dan dilarang memberikan suara pada subjek tersebut atau memberikan pengaruh. 9.4 Transaksi pihak terkait Proses untuk meninjau dan memantau transaksi pihak terkait harus diungkapkan. Untuk transaksi yang signifikan, komite direktur independen harus dibentuk untuk memeriksa dan menyetujui transaksi tersebut. ICGN Principle 9.3 Conflicts of interest Policies and procedures on conflicts of interest should be established, understood and implemented by directors, management, employees and other relevant parties. If a director has an interest in a matter under consideration by the board, then the director should promptly declare such an interest and be precluded from voting on the subject or exerting influence. 9.4 Related party transactions The process for reviewing and monitoring related party transactions should be disclosed. For significant transactions, a committee of independent directors should be established to vet and approve the transaction.	Iya

	Prinsip Principle
D.2.6	Rincian kehadiran masing-masing direktur/komisaris pada seluruh rapat direktur/komisaris yang diadakan selama tahun tersebut Attendance details of each director/commissioner in all directors/commissioners' meetings held during the year

LAMPIRAN
Item yang muncul dalam lampiran merujuk pada pertanyaan yang merupakan bagian dari kartu skor tahun 2017 tetapi kemudian dihapus dalam revisi tahun 2023. Item-item ini dihapus dari versi saat ini, karena semua yurisdiksi yang berpartisipasi dalam penilaian menganggap item-item ini sebagai item standar dan sudah menjadi praktik umum. Item standar diberikan ketika suatu negara memiliki undang-undang atau persyaratan khusus yang akan memungkinkan semua perusahaan domestik yang dinilai untuk secara otomatis memperoleh poin untuk item tertentu. Penghapusan item-item ini tidak berarti bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak lagi dipandang sebagai praktik tata kelola perusahaan yang penting.

APPENDIX
The items appearing in the appendix refer to questions which were part of the 2017 scorecard but were subsequently removed in the 2023 revision. These items were removed from the current version, since all participating jurisdictions in the assessment consider these items as default items and already been common practice. Default items are accorded when a country has specific legislation or requirements that will enable all domestic companies assessed to automatically score a point for a particular item. The removal of these items does not mean that the questions are no longer viewed to be important corporate governance practices.

	Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
	PRINSIP VI G20/OECD: Tanggung Jawab Dewan Direksi (E) Dewan direksi harus mampu menjalankan penilaian independen yang objektif terhadap urusan perusahaan. 3. Anggota dewan direksi harus mampu berkomitmen secara efektif terhadap tanggung jawab mereka. Pengabdian di terlalu banyak dewan direksi dapat mengganggu kinerja anggota dewan direksi. Beberapa negara telah membatasi jumlah posisi dewan direksi yang dapat dipegang. Pembatasan khusus mungkin kurang penting daripada memastikan bahwa anggota dewan direksi memiliki legitimasi dan kepercayaan di mata pemegang saham. Oleh karena itu, pengungkapan tentang keanggotaan dewan direksi lainnya kepada pemegang saham merupakan instrumen utama untuk meningkatkan nominasi dewan direksi. Pencapaian legitimasi juga akan difasilitasi oleh publikasi catatan kehadiran untuk masing-masing anggota dewan direksi (misalnya apakah mereka telah melewatkan sejumlah besar rapat) dan pekerjaan lain yang dilakukan atas nama dewan direksi dan remunerasi terkait. G20/OECD PRINCIPLE VI: Responsibilities of the Board (E) The board should be able to exercise objective independent judgement on corporate affairs. 3. Board members should be able to commit themselves effectively to their responsibilities. Service on too many boards can interfere with the performance of board members. Some countries have limited the number of board positions that can be held. Specific limitations may be less important than ensuring that members of the board enjoy legitimacy and confidence in the eyes of shareholders. Disclosure about other board memberships to shareholders is therefore a key instrument to improve board nominations. Achieving legitimacy would also be facilitated by the publication of attendance records for individual board members (e.g. whether they have missed a significant number of meetings) and any other work undertaken on behalf of the board and the associated remuneration.	Iya

Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI)

General Guidelines for Indonesian Corporate Governance

BAB1 PENDAHULUAN

Pengertian Prinsip Governansi Korporat

Governansi korporat adalah suatu struktur dan proses yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola usaha untuk mencapai kemajuan usaha dan akuntabilitas korporasi dengan tujuan akhir menciptakan nilai korporasi dan kekayaan pemegang saham secara berkelanjutan dengan memerhatikan kepentingan para pemangku kepentingan.

Pada dasarnya, governansi korporat mencakup hak dan tanggung jawab serta hubungan di antara para pemangku kepentingan korporasi. Governansi korporat tidak hanya menyangkut kepentingan pemegang saham tetapi juga menjaga keseimbangan dengan kebutuhan pemangku kepentingan lain seperti pemberi pinjaman, karyawan, pelanggan, pemasok, otoritas, masyarakat umum, masyarakat yang di dalamnya korporasi menjalankan bisnisnya.

PUGKI menggunakan istilah governansi, bukan tata Kelola, karena frasa tata kelola dalam korporasi lebih berfokus pada pengurusan internal korporasi, sedangkan governansi berkaitan dengan pemangku kepentingan yang lebih luas, antara lain hak-hak para pemegang saham dan pihak lainnya yang berada di luar ruang lingkup pengelolaan Direksi.

Dalam Pedoman Umum Governansi Korporat ini yang dimaksud sebagai korporasi adalah suatu badan hukum yang dibentuk berdasarkan Undang Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang tersebut menetapkan struktur governansi korporat yang meliputi tiga organ dari korporasi, yaitu: organ kepemilikan, organ pengelolaan, dan organ pengawasan.

RUPS merupakan organ kepemilikan korporasi. Sebagai organ kepemilikan, RUPS merupakan kumpulan para pemegang saham korporasi yang secara bersama-sama mewujudkan sebagian hak-hak mereka melalui RUPS. Dilain pihak, RUPS digunakan oleh Direksi dan Dewan Komisaris sebagai forum untuk mempertanggunjawab kan aktivitas pengelolaan korporasi dan aktivitas pengawasannya, yang sekaligus untuk memenuhi sebagian hak-hak pemegang saham.

Seperti telah disebutkan diatas, korporasi diurus oleh dua organ, yaitu: (1) organ yang terdiri dari para direktur yang disebut dengan Direksi, yang berperan sebagai organ pengelolaan korporasi, dan (2) organ yang terdiri dari para komisaris yang disebut dengan Dewan Komisaris, yang berperan sebagai organ pengawasan dalam mengawasi aktivitas pengelolaan yang dilaksanakan oleh Direksi. Direksi mempertanggungjawabkan peran pengelolaannya dan Dewan Komisaris mempertanggungjawabkan peran pengawasannya kepada para pemegang saham melalui organ RUPS.

CHAPTER 1 INTRODUCTION

Understanding the Principles of Corporate Governance

Corporate governance is a structure and process used to direct and manage a business to achieve business progress and corporate accountability with the ultimate goal of creating corporate value and shareholder wealth in a sustainable manner by taking into account the interests of stakeholders.

Basically, corporate governance includes the rights and responsibilities and relationships between corporate stakeholders. Corporate governance not only concerns the interests of shareholders but also maintains a balance with the needs of other stakeholders such as lenders, employees, customers, suppliers, authorities, the general public, the community in which the corporation runs its business.

PUGKI uses the term governance, not Governance, because the phrase governance in corporations focuses more on the internal management of the corporation, while governance relates to broader stakeholders, including the rights of shareholders and other parties outside the scope of management of the Board of Directors.

In this General Guideline for Corporate Governance, what is meant by a corporation is a legal entity formed based on Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The law stipulates the corporate governance structure which includes three organs of the corporation, namely: ownership organs, management organs, and supervisory organs.

GMS is an organ of corporate ownership. As an organ of ownership, GMS is a collection of corporate shareholders who jointly realize some of their rights through GMS. On the other hand, GMS is used by the Board of Directors and the Board of Commissioners as a forum to be accountable for corporate management activities and supervisory activities, which also fulfills some of the rights of shareholders.

As mentioned above, a corporation is managed by two organs, namely: (1) an organ consisting of directors called the Board of Directors, which acts as the corporate management organ, and (2) an organ consisting of commissioners called the Board of Commissioners, which acts as a supervisory organ in supervising management activities carried out by the Board of Directors. The Board of Directors is responsible for its management role and the Board of Commissioners is responsible for its supervisory role to shareholders through the GMS organ.

Maksud Penerapan Prinsip Governansi Korporat Indonesia

Prinsip, rekomendasi dan panduan dalam Pedoman ini dimaksudkan untuk menetapkan praktik governansi korporat berstandar global yang direkomendasikan untuk korporasi yang terdaftar di pasar modal dan mengelola dana masyarakat guna melindungi kepentingan dan memenuhi harapan para pemegang saham, kreditur, debitur dan para pemangku kepentingan lain agar tercapai penciptaan nilai korporasi yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Penerapan Pedoman ini oleh berbagai korporasi tersebut pada akhirnya diharapkan dapat mendorong percepatan perkembangan pasar modal dan sektor jasa keuangan di Indonesia.

Pedoman Governansi Korporat ini dijadikan acuan bagi korporasi dalam menyusun ketentuan internal governansi korporat dan menerapkannya. Korporasi dapat mengadopsi praktik governansi yang sesuai kebutuhannya, menerapkan praktik dengan mempertimbangkan lingkungan tempat korporasi beroperasi, ukuran dan kompleksitas bisnis, serta sifat risiko dan tantangan yang dihadapi.

Penjelasan Singkat Prinsip Governansi Korporat Indonesia

Prinsip Governansi Korporat Indonesia berisi hak-hak pemegang saham, pemangku kepentingan dan pemenuhannya, aturan pokok tentang pengelolaan, dan pengawasan atas pengelolaan korporasi di Indonesia, termasuk aspek etika, manajemen risiko, dan pengungkapan.

Prinsip Governansi Korporat Indonesia terdiri dari delapan prinsip yang dibagi dalam tiga kelompok prinsip: (1) tiga prinsip pertama adalah kelompok prinsip yang mengatur fungsi pengurusan dan pengawasan korporasi, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris, (2) kelompok prinsip yang mengatur proses dan keluaran yang dihasilkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris, (3) kelompok prinsip yang mengatur pemilik sumberdaya, yang terutama akan menerima manfaat dari pelaksanaan governansi korporat. Prinsip-prinsip tersebut beserta turunannya dijiwai oleh empat pilar governansi korporat yaitu: perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan. Tercerminnya empat pilar dalam prinsip-prinsip governansi korporat Indonesia akan mendorong terciptanya nilai jangka panjang korporasi.

Berikut adalah empat pilar governansi korporat:

- Perilaku Beretika
  Dalam melaksanakan kegiatannya, korporasi senantiasa mengedepankan kejujuran, memperlakukan semua pihak dengan hormat (respect), memenuhi komitmen, membangun serta menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten. Korporasi memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (fairness) dan dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Purpose of Implementing the Principles of Indonesian Corporate Governance

The principles, recommendations and guidelines in these Guidelines are intended to establish global standard corporate governance practices recommended for corporations listed on the capital market and managing public funds in order to protect the interests and meet the expectations of shareholders, creditors, debtors and other stakeholders in order to achieve sustainable corporate value creation in the long term. The implementation of these Guidelines by various corporations is ultimately expected to accelerate the development of the capital market and financial services sector in Indonesia.

These Corporate Governance Guidelines are used as a reference for corporations in preparing internal corporate governance provisions and implementing them. Corporations can adopt governance practices that suit their needs, implementing practices taking into account the environment in which the corporation operates, the size and complexity of the business, and the nature of the risks and challenges faced.

A Brief Explanation of the Principles of Indonesian Corporate Governance

The Indonesian Corporate Governance Principles contain the rights of shareholders, stakeholders and their fulfillment, basic rules on management, and supervision of corporate management in Indonesia, including aspects of ethics, risk management, and disclosure.

The Indonesian Corporate Governance Principles consist of eight principles divided into three groups of principles: (1) the first three principles are the group of principles that regulate the functions of corporate management and supervision, namely the Board of Directors and the Board of Commissioners, (2) the group of principles that regulate the processes and outputs produced by the Board of Directors and the Board of Commissioners, (3) the group of principles that regulate resource owners, who will primarily receive benefits from the implementation of corporate governance. These principles and their derivatives are inspired by the four pillars of corporate governance, namely: ethical behavior, accountability, transparency, and sustainability. The reflection of the four pillars in the principles of Indonesian corporate governance will encourage the creation of long-term corporate value.

Here are the four pillars of corporate governance:

- Ethical Behavior
  In carrying out its activities, the corporation always prioritizes honesty, treats all parties with respect, fulfills commitments, builds and maintains moral values and trust consistently. The corporation pays attention to the interests of shareholders and other stakeholders based on the principles of fairness and equality and is managed independently so that each company organ does not dominate each other and cannot be intervened by other parties.

- Akuntabilitas
  Korporasi dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu Korporasi harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan korporat dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan.

- Transparansi
  Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, korporasi menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Korporasi mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

- Keberlanjutan
  Korporasi mematuhi peraturan perundang-undangan serta berkomitmen melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui kerjasama dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kehidupan mereka dengan cara yang selaras dengan kepentingan bisnis dan agenda pembangunan berkelanjutan. Penyusunan pedoman ini mengacu ke prinsip-prinsip governansi korporat berstandar global, pedoman governansi dan Corporate Governance Codes dari berbagai negara.

- Accountability
  The corporation can be accountable for its performance in a transparent and fair manner. For this reason, the corporation must be managed properly, measurably and in accordance with corporate interests while still taking into account the interests of shareholders and stakeholders. Accountability is a prerequisite for achieving sustainable performance

- Transparency
  To maintain objectivity in running a business, the corporation provides material and relevant information in a way that is easily accessible and understood by stakeholders. The corporation takes the initiative to disclose not only the issues required by laws and regulations, but also matters that are important for decision-making by shareholders, creditors and other stakeholders.

- Sustainability
  The Corporation complies with laws and regulations and is committed to carrying out its responsibilities towards society and the environment in order to contribute to sustainable development through cooperation with all relevant stakeholders to improve their lives in a manner that is in line with business interests and the sustainable development agenda. The preparation of this guideline refers to global standard corporate governance principles, governance guidelines and Corporate Governance Codes from various countries.

Struktur dan Penerapan Prinsip Governansi Korporat Indonesia

Struktur Pedoman adalah sebagai berikut: Prinsip, Rekomendasi, dan Panduan. Prinsip menjelaskan substansi keluaran yang diharapkan dari implementasi governansi korporat. Rekomendasi adalah praktik governansi korporat yang sebaiknya diterapkan korporasi untuk dapat mencapai substansi keluaran yang tercermin dalam Prinsip. Untuk sebagian Rekomendasi terdapat Panduan yang menyampaikan penjelasan lebih lanjut atas Rekomendasi dan beberapa praktik yang direkomendasikan untuk diimplementasikan. Selain melaksanakan praktik-praktik tersebut, korporasi diharapkan mengembangkan dan menjalankan praktik lainnya sesuai kebutuhan korporasi.

Penerapan Pedoman Governansi Korporat berlandaskan pada dasar "Terapkan atau Jelaskan" (apply or explain). Korporasi didorong untuk menerapkan setiap Prinsip, Rekomendasi, Panduan dengan cara yang sesuai untuk bisnis korporasi.

Rekomendasi dan panduan yang disampaikan adalah praktik governansi korporat berstandar global yang melengkapi praktik yang wajib untuk dilaksanakan dalam peraturan perundang -undangan yang berlaku. Dengan demikian, praktik governansi korporat yang diwajibkan

Structure and Implementation of Indonesian Corporate Governance Principles

The structure of the Guidelines is as follows: Principles, Recommendations, and Guidelines. Principles explain the substance of the expected output from the implementation of corporate governance. Recommendations are corporate governance practices that should be implemented by corporations in order to achieve the substance of the output reflected in the Principles. For some Recommendations, there are Guidelines that provide further explanation of the Recommendations and several recommended practices to be implemented. In addition to implementing these practices, corporations are expected to develop and implement other practices according to the needs of the corporation.

The implementation of the Corporate Governance Guidelines is based on the principle of "Apply or Explain". Corporations are encouraged to implement each Principle, Recommendation, Guideline in a manner that is appropriate for the corporation's business.

The recommendations and guidelines provided are global standard corporate governance practices that complement the practices that must be implemented in applicable laws and regulations. Thus, corporate governance practices required by laws and regulations are

dalam aturan perundangan tidak tercakup dalam pedoman ini. Aturan perundangan tersebut dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan Rekomendasi dan Panduan yang dianjurkan. Rekomendasi dan Panduan dimaksudkan untuk mendorong praktik governansi korporat terbaik sesuai dengan kebutuhan korporasi dalam rangka menciptakan nilai yang berkelanjutan. Penerapan Rekomendasi dan Panduan bukan hanya sekadar mematuhi prinsip governansi dalam bentuk penyusunan seperangkat aturan internal korporasi. Penerapan dilaksanakan secara substansi, yang mencakup pergeseran pola pikir dan budaya serta model bisnis dan bukan sekadar merupakan pendekatan daftar pengecekan (checklist).

not covered in these guidelines. These laws and regulations are used as the basis for determining the Recommendations and Guidelines. The Recommendations and Guidelines are intended to encourage best corporate governance practices in accordance with the needs of the corporation in order to create sustainable value. The implementation of the Recommendations and Guidelines is not just a matter of complying with governance principles in the form of compiling a set of internal corporate rules. The implementation is carried out in substance, which includes a shift in mindset and culture as well as a business model and is not just a checklist approach.

Untuk itu Direksi dan Dewan Komisaris perlu mempelajari dan memahami Pedoman ini sehingga dapat menerapkannya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan terbaik jangka panjang korporasi. Direksi memastikan karyawan sepenuhnya memahami dan menghargai manfaat governansi korporat, proses, prosedur yang baik melalui program pelatihan dan komunikasi yang kuat.

For this reason, the Board of Directors and the Board of Commissioners need to study and understand these Guidelines so that they can apply them in accordance with the needs and long-term best interests of the corporation. The Board of Directors ensures that employees fully understand and appreciate the benefits of good corporate governance, processes, procedures through strong training and communication programs.

Kepercayaan para pemangku kepentingan hanya dapat diperoleh jika korporasi dengan sungguh -sungguh dan transparan menerapkan Prinsip, Rekomendasi dan Panduan dalam Pedoman ini sesuai kebutuhan dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang korporasi dengan menghargai kepentingan para pemangku kepentingan. Kesungguhan dan tranparansi tersebut akan membangun kepercayaan para pemangku kepentingan termasuk calon investor kepada korporasi.

Stakeholder trust can only be obtained if the corporation seriously and transparently implements the Principles, Recommendations and Guidelines in these Guidelines as needed in order to achieve the corporation's long-term goals by respecting the interests of stakeholders. This seriousness and transparency will build the trust of stakeholders, including potential investors, in the corporation.

Untuk Rekomendasi dan Panduan yang telah diterapkan, korporasi harus mengungkapkan dalam laporan tahunan bagaimana Rekomendasi dan Panduan dilaksanakan dengan menyertakan bukti (seperti aturan korporasi, piagam, kebijakan) di situs web korporasi. Jika ada Rekomendasi dan Panduan yang tidak dapat/belum diterapkan atau tidak relevan, korporasi harus memberikan penjelasan mengapa tidak/belum dapat menerapkan serta menyampaikan alternatif mekanisme yang dilaksanakan sebagai pengganti Rekomendasi/Panduan untuk dapat mencapai keluaran yang diharapkan. Jika korporasi akan menerapkan Rekomendasi dan Panduan di masa datang, korporasi harus mengungkapkan target penerapannya.

For the Recommendations and Guidelines that have been implemented, the corporation must disclose in its annual report how the Recommendations and Guidelines are implemented by including evidence (such as corporate rules, charters, policies) on the corporation's website. If there are Recommendations and Guidelines that cannot/have not been implemented or are not relevant, the corporation must provide an explanation as to why it cannot/has not been implemented and convey alternative mechanisms implemented as a replacement for the Recommendations/Guidelines to achieve the expected output. If the corporation will implement the Recommendations and Guidelines in the future, the corporation must disclose the target for implementation.

Apply or Explain adalah pengembangan lebih lanjut dari Comply or Explain. Berbeda dengan dasar "Patuhi atau Jelaskan" (comply or explain), dasar "Terapkan atau Jelaskan" (apply or explain) dimaksudkan untuk mendorong korporasi agar menerapkan Pedoman Governansi Korporat secara komprehensif dan substantif pada bisnis korporasi untuk kepentingan penciptaan nilai berkelanjutan jangka panjang, bukan hanya sekadar dalam rangka mematuhi Pedoman.

Apply or Explain is a further development of Comply or Explain. Different from the "Comply or Explain" basis, the "Apply or Explain" basis is intended to encourage corporations to implement the Corporate Governance Guidelines comprehensively and substantively in the corporation's business for the sake of creating long-term sustainable value, not just in order to comply with the Guidelines.

Korporasi memandang pengungkapan informatif praktik governansi sebagai kesempatan untuk menunjukkan kepada pemangku kepentingan bahwa mereka menerapkan prinsip governansi korporat

Corporations view informative disclosure of governance practices as an opportunity to demonstrate to stakeholders that they implement corporate governance principles holistically and effectively, thus,

secara holistik dan efektif, dengan demikian, pengungkapan governansi korporat dapat, dalam jangka panjang, membantu korporasi menarik modal dan menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan di pasar modal dan sektor jasa keuangan.

corporate governance disclosure can, in the long term, help corporations attract capital and maintain stakeholder trust in the capital market and financial services sector.

Setiap tahun Dewan Komisaris bersama Direksi harus meninjau implementasi Pedoman ini. Perusahaan harus mengungkapkan dalam laporan tahunan apakah Direksi dan Dewan Komisaris telah meninjau implementasi Pedoman dengan cara yang sesuai dengan bisnis perusahaan.

Every year, the Board of Commissioners together with the Board of Directors must review the implementation of these Guidelines. Companies must disclose in their annual reports whether the Board of Directors and Board of Commissioners have reviewed the implementation of the Guidelines in a manner appropriate to the company's business.

Berlaku untuk Siapa Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia ini?

Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia utamanya berlaku bagi korporasi terbuka serta korporasi yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat yaitu korporasi yang mengeluarkan instrumen keuangan (obligasi, surat utang jangka menengah) dan korporasi yang berusaha di sektor jasa keuangan.

Who are the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance Applicable to?

The General Guidelines for Indonesian Corporate Governance are primarily applicable to public corporations and corporations that collect and manage public funds, namely corporations that issue financial instruments (bonds, medium-term debt securities) and corporations that operate in the financial services sector.

Pedoman ini dapat diterapkan pada korporasi lain termasuk korporasi milik negara, korporasi milik daerah yang telah menyadari pentingnya untuk mewujudkan governansi korporat yang baik. Pedoman ini juga dapat diterapkan pada korporasi yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta korporasi yang kegiatan bisnisnya berdampak luas terhadap kelestarian lingkungan dan masyarakat.

These guidelines can be applied to other corporations, including state-owned corporations, regional-owned corporations that have realized the importance of realizing good corporate governance. These guidelines can also be applied to corporations whose products or services are used by the wider community, as well as corporations whose business activities have a broad impact on environmental and community sustainability.

Dengan memperhatikan aturan perundangan yang bersangkutan, pedoman ini juga dapat diterapkan pada badan hukum yang berbentuk selain perseroan terbatas, jika kegiatannya adalah menghimpun dan mengelola dana masyarakat, produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, dan kegiatannya berdampak luas terhadap kelestarian lingkungan dan masyarakat.

By taking into account the relevant laws and regulations, these guidelines can also be applied to legal entities in the form of other than limited liability companies, if their activities are collecting and managing public funds, their products or services are used by the wider community, and their activities have a broad impact on environmental and community sustainability.

Pemutakhiran Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia

Komite Nasional Kebijakan Governansi berkewajiban dan berkomitmen untuk mereviu Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia paling tidak setiap dua tahun berdasarkan perkembangan governansi domestik dan internasional serta melakukan penyesuaian yang diperlukan.

Update of General Guidelines for Indonesian Corporate Governance

The National Committee for Governance Policy is obliged and committed to review the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance at least every two years based on domestic and international governance developments and make necessary adjustments.

BAB 2 RINGKASAN PRINSIP GOVERNANSI KORPORAT INDONESIA

Prinsip Governansi Korporat Indonesia terdiri dari delapan prinsip yang dibagi dalam tiga kelompok: (1) prinsip-prinsip yang mengatur organ-organ penyelenggara governansi korporat, dan (2) prinsip-prinsip yang mengatur proses dan keluaran yang dihasilkan oleh organ-organ di atas, (3) kelompok prinsip yang mengatur penerima manfaat dari pelaksanaan governansi korporat

Prinsip kelompok pertama disajikan dalam prinsip 1 sampai dengan 3. Prinsip kelompok kedua disajikan dalam prinsip 4 sampai dengan 6. Prinsip kelompok ketiga disajikan dalam prinsip 7 dan 8.

Prinsip 1: Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi dan Dewan Komisaris menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara independen untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan untuk kepentingan terbaik jangka panjang korporasi dan pemegang saham, dengan mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan.

Prinsip 1 berkaitan dengan peran dan tanggung jawab Direksi dalam melakukan pengelolaan korporasi serta peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan korporasi oleh Direksi. Di samping itu Prinsip ini mengatur penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris dan anggotanya masing-masing, penanganan benturan kepentingan yang terjadi pada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta peningkatan kompetensi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris

Prinsip 2: Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dipilih dan ditetapkan sedemikian rupa sehingga komposisi Direksi sebagai organ pengelolaan dan komposisi Dewan Komisaris sebagai organ pengawasan adalah beragam dan masing-masing terdiri dari para Direktur dan Komisaris yang memiliki komitmen, pengetahuan, kemampuan, pengalaman dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran pengelolaan Direksi dan peran pengawasan Dewan Komisaris.

Remunerasi dirancang untuk secara efektif menyelaraskan kepentingan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan kepentingan jangka panjang korporasi dan penciptaan nilai yang berkelanjutan.

Prinsip 2 mengharuskan pemilihan dan penetapan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dilakukan sedemikian rupa sehingga Direksi dan Dewan Komisaris masing-masing sebagai organ pengelolaan dan pengawasan memiliki komposisi anggota dengan pengetahuan,

CHAPTER 2 SUMMARY OF PRINCIPLES OF INDONESIAN CORPORATE GOVERNANCE

The Principles of Indonesian Corporate Governance consist of eight principles divided into three groups: (1) principles that regulate the organs that organize corporate governance, and (2) principles that regulate the processes and outputs produced by the above organs, (3) a group of principles that regulate the beneficiaries of the implementation of corporate governance

The first group of principles are presented in principles 1 to 3. The second group of principles are presented in principles 4 to 6. The third group of principles are presented in principles 7 and 8.

Principle 1: Roles and Responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners

The Board of Directors and Board of Commissioners carry out their roles and responsibilities independently to create sustainable value for the best long-term interests of the corporation and shareholders, taking into account the interests of stakeholders.

Principle 1 relates to the roles and responsibilities of the Board of Directors in managing the corporation and the roles and responsibilities of the Board of Commissioners in supervising the management of the corporation by the Board of Directors. In addition, this Principle regulates the performance assessment of the Board of Directors and Board of Commissioners and their respective members, handling of conflicts of interest that occur in members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners and improving the competence of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners

Principle 2: Composition and Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners

Members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners are selected and appointed in such a way that the composition of the Board of Directors as a management organ and the composition of the Board of Commissioners as a supervisory organ are diverse and each consists of Directors and Commissioners who have the commitment, knowledge, ability, experience and expertise needed to properly fulfill the management role of the Board of Directors and the supervisory role of the Board of Commissioners.

Remuneration is designed to effectively align the interests of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners with the long-term interests of the corporation and the creation of sustainable value.

Principle 2 requires that the selection and appointment of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners be carried out in such a way that the Board of Directors and Board of Commissioners each as management and supervisory organs

kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan perannya masing-masing. Di samping itu, Prinsip ini menekankan pentingnya kebijakan remunerasi untuk mendorong anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mengutamakan kepentingan jangka panjang korporasi berdasarkan prinsip keberlanjutan, serta mengharuskan pengungkapan kebijakan dan informasi remunerasi yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara transparan dan akuntabel.

have a composition of members with the knowledge, ability and expertise needed according to their respective roles. In addition, this Principle emphasizes the importance of remuneration policies to encourage members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners to prioritize the long-term interests of the corporation based on the principle of sustainability, and requires disclosure of remuneration policies and information received by the Board of Directors and Board of Commissioners in a transparent and accountable manner.

Prinsip 3: Hubungan Kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris

Principle 3: Working Relationship between the Board of Directors and Board of Commissioners

Direksi dan Dewan Komisaris memiliki hubungan kerja yang erat, terbuka, konstruktif, profesional dan saling percaya untuk kepentingan terbaik korporasi.

The Board of Directors and Board of Commissioners have a close, open, constructive, professional and trusting working relationship for the best interests of the corporation.

Prinsip 3 menekankan pentingnya hubungan kerja yang erat, terbuka, konstruktif, profesional, saling percaya antara Direksi dan Dewan Komisaris dalam mencapai kepentingan terbaik korporasi. Prinsip 3 ini juga mengatur perlunya Dewan Komisaris mengakses informasi yang lengkap serta pentingnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris memahami implikasi struktur kepemilikan korporasi terhadap pelaksanaan perannya.

Principle 3 emphasizes the importance of a close, open, constructive, professional and trusting working relationship between the Board of Directors and Board of Commissioners in achieving the best interests of the corporation. Principle 3 also regulates the need for the Board of Commissioners to access complete information and the importance of members of the Board of Directors and Board of Commissioners understanding the implications of the corporate ownership structure on the implementation of their roles.

Prinsip 4: Perilaku Etis

Korporasi memiliki komitmen untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab, menegakkan nilai-nilai dan budaya organisasi.

Principle 4: Ethical Behavior

The corporation is committed to acting ethically and responsibly, upholding the values and culture of the organization.

Prinsip 4 mengharuskan korporasi untuk membuat pernyataan secara berkala tentang komitmen korporasi tidak hanya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun juga komitmen untuk bertindak etis dan bertanggung jawab.

Principle 4 requires the corporation to make periodic statements about the corporation's commitment not only to comply with applicable laws and regulations, but also to act ethically and responsibly.

Prinsip 5: Manajemen Risiko, Pengendalian Intern dan Kepatuhan

Korporasi menjalankan praktik governansi korporat yang terintegrasi dengan penerapan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, serta sistem manajemen kepatuhan yang efektif dalam rangka mendukung pencapaian sasaran, visi, misi, tujuan, maupun target kinerja korporat dalam menjalankan bisnis secara bertintegritas.

Principle 5: Risk Management, Internal Control and Compliance

The corporation implements integrated corporate governance practices with the implementation of an effective internal control and risk management system, as well as a compliance management system in order to support the achievement of corporate goals, vision, mission, objectives, and performance targets in conducting business with integrity.

Prinsip 5 mengharuskan Direksi untuk mengimplementasikan governansi, sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, dan sistem manajemen kepatuhan secara terintegrasi sebagai bagian dari strategi, perangkat manajemen, dan praktik yang dijalankan korporasi dalam berbisnis secara bertanggung jawab (responsible business) sebagai warga korporat yang baik (good corporate citizen). Dewan Komisaris memantau dan menyampaikan masukan terhadap efektivitas penerapan governansi, sistem pengendalian internal dan

Principle 5 requires the Board of Directors to implement governance, internal control and risk management systems, and compliance management systems in an integrated manner as part of the strategy, management tools, and practices carried out by the corporation in conducting responsible business as a good corporate citizen. The Board of Commissioners monitors and provides input on the effectiveness of the implementation of governance, internal control and risk management systems, and corporate compliance management

manajemen risiko, dan sistem manajemen kepatuhan korporat yang dilaksanakan secara terintegrasi oleh Direksi.

Prinsip 6: Pengungkapan dan Transparansi
Korporasi membuat pengungkapan yang akurat dan tepat waktu mengenai semua hal yang material tentang korporasi.

Prinsip 6 mengharuskan korporasi untuk memiliki kerangka governansi yang mampu memberikan keyakinan yang dapat menghasilkan pengungkapan yang akurat dan tepat waktu mengenai semua hal yang material tentang korporasi, yang meliputi kondisi dan kinerja keuangan, kepemilikan atas korporasi, dan governansi korporat.

Prinsip 7: Hak-hak Pemegang Saham
Korporasi melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan hak pemegang saham dan memastikan perlakukan yang adil terhadap pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. Semua pemegang saham memiliki kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka.

Prinsip 7 menjelaskan mengenai pemenuhan hak pemegang saham dan perlakuan adil bagi pemegang saham, bagaimana cara kerjasama aktif antara korporasi dengan pemegang sahamnya dilaksanakan serta pelaksanaan sebagian hak pemegang saham secara efektif melalui RUPS.

Prinsip 8: Hak-hak Pemangku Kepentingan
Korporasi mengakui hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku atau suatu perjanjian yang disepakati oleh korporasi dan mendorong kerja sama aktif dengan pemangku kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan keberlanjutan usaha yang sehat secara finansial.

Prinsip 8 menjelaskan peran Direksi dan Dewan Komisaris mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam model bisnis korporasi, melaksanakan pelibatan pemangku kepentingan, serta memastikan perlindungan terhadap hak-hak para pemangku kepentingan. Dewan Komisaris memantau pengintegrasian semua aspek tersebut di atas yang dilakukan oleh Direksi.

systems implemented in an integrated manner by the Board of Directors.

Principle 6: Disclosure and Transparency
The corporation makes accurate and timely disclosures on all material matters about the corporation.

Principle 6 requires the corporation to have a governance framework that provides assurance that accurate and timely disclosures on all material matters about the corporation are made, including financial condition and performance, ownership of the corporation, and corporate governance.

Principle 7: Shareholder Rights
The corporation protects and facilitates the exercise of shareholder rights and ensures fair treatment of shareholders, including minority shareholders. All shareholders have the opportunity to obtain effective redress for violations of their rights.

Principle 7 explains the fulfillment of shareholder rights and fair treatment for shareholders, how active cooperation between the corporation and its shareholders is implemented and the effective exercise of some shareholder rights through the GMS.

Principle 8: Stakeholder Rights
The corporation recognizes the rights of stakeholders as set out in applicable laws and regulations or an agreement entered into by the corporation and encourages active cooperation with stakeholders in creating wealth, jobs, and financially sound business sustainability.

Principle 8 explains the role of the Board of Directors and the Board of Commissioners in integrating sustainability aspects into the corporation's business model, implementing stakeholder engagement, and ensuring the protection of stakeholder rights. The Board of Commissioners monitors the integration of all of the above aspects carried out by the Board of Directors.

Prinsip Principle		Kriteria	
1	**Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris** Roles and Responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners		
1.1	Peran dan Tanggung Jawab Direksi Role and Responsibilities of the Board of Directors	1.1.1	Untuk mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan, Direksi menjalankan peran kepemimpinannya dan berupaya mencapai hasil governansi sebagai berikut: 1. berdaya saing dan berfokus ke kinerja jangka panjang; 2. beretika dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis; 3. berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan; serta 4. berkemampuan dalam bertahan dan bertumbuh *(corporate resilience)*
		1.1.2	Direksi harus memastikan bahwa misi, visi, tujuan, sasaran, strategi, dan rencana tahunan dan jangka menengah korporasi konsisten dengan tujuan jangka panjang, dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi secara efektif.
		1.1.3	Direksi memastikan bahwa korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.
		1.1.4	Direksi memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporasi dan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas semua informasi material mengenai korporasi.
		1.1.5	Direksi memastikan pelaporan keberlanjutan telah disusun sebagaimana mestinya.
		1.1.6	Direksi membangun kerangka kerja untuk governansi teknologi informasi (TI) korporasi yang selaras dengan kebutuhan dan prioritas bisnis korporasi, mendorong peluang dan kinerja bisnis, memperkuat manajemen risiko, serta mendukung tujuan dan strategi korporasi.
		1.1.7	Bagi korporasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, Direksi perlu memastikan kewenangan dan ketersediaan perangkat pendukung yang memadai agar Dewan Pengawas Syariah dapat menjalankan perannya dengan efektif.
		1.1.8	Piagam Direksi secara periodik ditinjau. Piagam mencakup antara lain pembagian peran Direktur secara individual dapat diatur di Piagam Direksi atau dengan surat keputusan Direksi.
		1.1.9	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan.
1.2	Penilaian Kinerja - Direksi dan Anggotanya Performance Assessment - Board of Directors and its Members	1.2.1	Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif dan independen untuk menentukan efektivitas Direksi dan setiap individu direktur.
		1.2.2	Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi, bertanggung jawab menentukan kriteria evaluasi kinerja dan menilai kinerja Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya.
1.3	Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Role and Responsibilities of the Board of Commissioners	1.3.1	Dewan Komisaris mereviu strategi korporasi paling tidak setiap tahun dan menyetujui misi, visi dan strategi korporasi yang dirumuskan oleh Direksi. Dewan Komisaris juga mereviu, memberikan saran dan menyetujui rencana bisnis dan rencana keuangan jangka panjang dan rencana keuangan jangka pendek korporasi. Dewan Komisaris memberikan advis dan melakukan pemantauan kepada Direksi atas pengelolaan implementasinya. Direksi dan Dewan Komisaris terlibat dalam keputusan yang sangat penting bagi korporasi, diatur dalam anggaran dasar korporasi.
		1.3.2	Jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris harus diungkapkan dalam laporan tahunan.

	Criteria	Halaman Page
1.1.1	To achieve sustainable value creation, the Board of Directors carries out its leadership role and strives to achieve the following governance outcomes: 1. competitive and focused on long-term performance; 2. ethical and responsible in running the business; 3. contributing positively to society and the environment; and 4. capable of surviving and growing (corporate resilience)	465
1.1.2	The Board of Directors must ensure that the corporation's mission, vision, goals, objectives, strategies and annual and medium-term plans are consistent with long-term goals, by effectively utilizing innovation and technology.	79
1.1.3	The Board of Directors ensures that the corporation implements appropriate and effective risk management and internal control systems that are in line with the corporation's vision, mission, goals, objectives and strategies and comply with applicable laws and regulations and standards.	524
1.1.4	The Board of Directors ensures the integrity of the corporation's accounting and financial reporting systems and the timely and accurate disclosure of all material information regarding the corporation.	316, 596
1.1.5	The Board of Directors ensures that sustainability reporting has been prepared properly.	86
1.1.6	The Board of Directors establishes a framework for corporate information technology (IT) governance that aligns with corporate business needs and priorities, drives business opportunities and performance, strengthens risk management, and supports corporate objectives and strategies.	68, 232
1.1.7	For corporations that carry out business activities based on Sharia principles, the Board of Directors needs to ensure adequate authority and availability of supporting devices so that the Sharia Supervisory Board can carry out its role effectively.	N/A
1.1.8	The Board of Directors Charter is periodically reviewed. The Charter includes, among other things, the division of roles of individual Directors which can be regulated in the Board of Directors Charter or by a Board of Directors Decree.	460
1.1.9	The Board of Directors has a policy regarding the resignation of members of the Board of Directors if they are involved in financial crimes and are proven to have committed wrongdoing.	462
	The Board of Commissioners conducts an annual formal evaluation objectively and independently to determine the effectiveness of the Board of Directors and each individual director.	62 - 63
	The Board of Commissioners, with consideration from the Nomination and Remuneration Committee, is responsible for determining the performance evaluation criteria and assessing the performance of the President Director and other members of the Board of Directors.	445
	The Board of Commissioners reviews the corporate strategy at least annually and approves the mission, vision and corporate strategy formulated by the Board of Directors. The Board of Commissioners also reviews, provides advice and approves the business plan and the long-term financial plan and the short-term financial plan of the corporation. The Board of Commissioners provides advice and monitors the management of its implementation to the Board of Directors. The Board of Directors and the Board of Commissioners are involved in decisions that are very important to the corporation, regulated in the corporation's articles of association.	62 - 64
1.3.2	Types of decisions that require the approval of the Board of Commissioners must be disclosed in the annual report	403

Prinsip Principle	Kriteria	
	1.3.3	Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris mengusulkan kepada, dan untuk diputuskan oleh, RUPS pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam mengusulkan hal di atas, Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman, unsur nondiskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan jender. Dewan Komisaris memastikan proses pencalonan dan pemilihan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris adalah formal dan transparan.
	1.3.4	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi. Setiap tahun Dewan Komisaris meninjau pelaporan pelaksanaan rencana pengembangan dan suksesi yang disampaikan Direktur Utama.
	1.3.5	Dewan Komisaris a). mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite yang menjalankan fungsi remunerasi, besaran remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang selaras dengan pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan kepentingan jangka panjang korporasi dan pemegang saham; b). secara berkala mereviu sistem remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.
	1.3.6	Dewan Komisaris mengawasi efektivitas kebijakan governansi korporat dan implementasinya serta mengusulkan perubahan jika diperlukan.
	1.3.7	Dewan Komisaris memantau dan mengarahkan agar korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan, kode perilaku dan standar yang berlaku.
	1.3.8	Dewan Komisaris mengawasi dan mengarahkan agar tercapai integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporat, serta independensi fungsi audit internal dan eksternal.
	1.3.9	Dewan Komisaris memantau, mereviu dan menyetujui laporan tahunan dan laporan keberlanjutan Korporasi serta memastikan integritasnya, serta mengawasi proses pengungkapan dan pengkomunikasian korporasi.
	1.3.10	Piagam Dewan Komisaris secara periodik ditinjau.
	1.3.11	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan.
	1.3.12	Komisaris independen sangat diharapkan untuk dapat berkontribusi dalam diskusi yang jujur, obyektif, aktif dan konstruktif pada rapat Dewan Komisaris.
	1.3.13	Komisaris Utama berperan sebagai koordinator Dewan Komisaris dan memastikan efektivitasnya. Komisaris Utama mendorong budaya keterbukaan dan dialog konstruktif yang memungkinkan berbagai pandangan diungkapkan, termasuk mengkoordinasi penetapan agenda rapat dewan yang tepat dan memastikan waktu yang cukup tersedia untuk mendiskusikan semua agenda. Selain itu, juga harus ada kesempatan bagi Dewan Komisaris untuk bertemu dengan jajaran Direksi dan manajemen senior.

	Criteria	Halaman Page
1.3.3	By considering the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee, the Board of Commissioners proposes to, and to be decided by, the GMS the appointment and/or dismissal of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. In proposing the above, the Board of Commissioners pays attention to diversity, non-discriminatory elements and provides equal opportunities without distinguishing between ethnicity, religion, race, inter-group and gender. The Board of Commissioners ensures that the nomination and election process for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners is formal and transparent.	511 - 512
1.3.4	The Board of Commissioners or the Committee that carries out the nomination function prepares a succession policy in the nomination process for members of the Board of Directors. Every year the Board of Commissioners reviews the reporting on the implementation of the development and succession plan submitted by the President Director.	Diterapkan Implemented
1.3.5	The Board of Commissioners a). submits to the GMS, which may be preceded by a proposal from the Committee that carries out the remuneration function, the amount of remuneration for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners that is in line with sustainable corporate development and the long-term interests of the corporation and shareholders; b). periodically reviews the remuneration system for the Board of Directors and Board of Commissioners.	178, 364, 505
1.3.6	The Board of Commissioners oversees the effectiveness of corporate governance policies and their implementation and proposes changes if necessary.	61
1.3.7	The Board of Commissioners monitors and directs the corporation to implement appropriate and effective risk management and internal control systems that are in line with the corporation's goals, objectives and strategies and comply with applicable laws and regulations, codes of conduct and standards.	68
1.3.8	The Board of Commissioners supervises and directs the achievement of the integrity of the corporate accounting and financial reporting system, as well as the independence of the internal and external audit functions.	Diterapkan Implemented
1.3.9	The Board of Commissioners monitors, reviews and approves the Corporation's annual report and sustainability report and ensures its integrity, and oversees the corporate disclosure and communication process.	Diterapkan Implemented
1.3.10	The Board of Commissioners Charter is periodically reviewed.	399
1.3.11	The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of members of the Board of Commissioners if they are involved in financial crimes and are proven to have committed wrongdoing.	400
1.3.12	Independent commissioners are highly expected to be able to contribute to honest, objective, active and constructive discussions at Board of Commissioners meetings.	408 - 410
1.3.13	The President Commissioner acts as the coordinator of the Board of Commissioners and ensures its effectiveness. The President Commissioner encourages a culture of openness and constructive dialogue that allows various views to be expressed, including coordinating the determination of the appropriate board meeting agenda and ensuring sufficient time is available to discuss all agendas. In addition, there must also be an opportunity for the Board of Commissioners to meet with the Board of Directors and senior management.	Diterapkan Implemented

Prinsip Principle		Kriteria	
1.4	Pembentukan Komite Formation of the Committee	1.4.1	Korporasi memiliki komite-komite di bawah Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri dari: Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Pemantau Manajemen Risiko.
		1.4.2	Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Komite Audit seluruhnya independen dan komite lain yang dibentuk Dewan Komisaris adalah mayoritas dari pihak independen, serta semua anggota komite memiliki kompetensi, berkomitmen, serta memiliki wewenang yang memadai untuk menjalankan perannya secara efektif dan independen.
		1.4.3	Untuk memastikan pemantauan atas pelaksanaan tugas Komite Audit berjalan obyektif dan independen, Komisaris Utama tidak boleh menjadi ketua Komite Audit, kecuali dalam keadaan luar biasa yang harus dijelaskan dalam laporan tahunan.
1.5	Penilaian Kinerja - Dewan Komisaris dan Anggotanya Performance Assessment - Board of Commissioners and its Members	1.5.1	Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif untuk menentukan efektivitas Dewan, komitenya, dan setiap individu komisaris.
1.6	Benturan Kepentingan Conflict of Interest	1.6.1	Anggota Direksi yang mempunyai rangkap jabatan di luar korporasi, harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Seorang Komisaris memberi tahu Dewan Komisaris dan ketua komite yang menjalankan fungsi nominasi, sebelum menerima penunjukan baru sebagai direktur atau komisaris dari korporasi terbuka, jabatan direktur lainnya atau posisi lain dengan komitmen waktu yang signifikan.
		1.6.2	Dewan Komisaris memantau dan mengelola potensi benturan kepentingan manajemen, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset korporasi dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak berelasi. Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak turut serta dalam pemantauan dan pengambilan keputusan atas potensi benturan kepentingan yang melibatkan Komisaris atau afiliasi Komisaris yang bersangkutan.
1.7	Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Improving the Competence of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners	1.7.1	Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris memahami peran dan tanggung jawab mereka, karakteristik dan operasi korporasi, peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan serta kewajiban lain yang berlaku. Direksi melalui sekretaris korporasi mendukung semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam memperbarui dan menyegarkan keterampilan dan pengetahuan mereka yang diperlukan untuk menjalankan peran mereka di Dewan.
2	**Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris** Composition and Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners		
2.1	Komposisi Direksi Composition of the Board of Directors	2.1.1	Dalam menentukan kandidat calon direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi tidak hanya mengandalkan rekomendasi dari Dewan Komisaris, manajemen atau pemegang saham mayoritas. Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi dapat menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat.
		2.1.2	Dewan Komisaris memastikan bahwa kriteria dalam menyeleksi anggota Direksi mencakup paling tidak pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Direksi serta memperhatikan terpenuhinya keberagaman Direksi.
		2.1.3	Kebijakan korporasi tentang keberagaman pada, Direksi dan Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan.
		2.1.4	Dewan Komisaris memastikan bahwa kebijakan dan prosedur untuk seleksi dan nominasi Komisaris adalah jelas dan transparan sehingga dapat menghasilkan komposisi Dewan yang diinginkan. Dewan Komisaris menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat.

	Criteria	Halaman Page
1.4.1	The Corporation has committees under the Board of Commissioners consisting of at least: Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Risk Management Monitoring Committee.	416, 420, 432, 448
1.4.2	The Board of Commissioners ensures that all members of the Audit Committee are independent and that other committees formed by the Board of Commissioners are majority independent parties, and that all members of the committee have the competence, commitment, and sufficient authority to carry out their roles effectively and independently	428
1.4.3	To ensure that monitoring of the implementation of the Audit Committee's duties is carried out objectively and independently, the President Commissioner may not be the chairman of the Audit Committee, except in extraordinary circumstances that must be explained in the annual report.	Diterapkan Implemented
1.5.1	The Board of Commissioners conducts an annual formal evaluation objectively to determine the effectiveness of the Board, its committees, and each individual commissioner	424, 438, 455
1.6.1	Members of the Board of Directors who hold concurrent positions outside the corporation must obtain approval from the Board of Commissioners. A Commissioner shall notify the Board of Commissioners and the chairman of the committee that carries out the nomination function, before accepting a new appointment as a director or commissioner of a public corporation, other directorships or other positions with significant time commitments.	Diterapkan Implemented
1.6.2	The Board of Commissioners monitors and manages potential conflicts of interest of management, members of the Board of Directors, the Board of Commissioners and shareholders, including misuse of corporate assets and misuse in related party transactions. Commissioners who have a conflict of interest do not participate in monitoring and decision-making on potential conflicts of interest involving the Commissioner or affiliates of the Commissioner concerned	Diterapkan Implemented
1.7.1	The Board of Commissioners ensures that members of the Board of Directors and the Board of Commissioners understand their roles and responsibilities, the characteristics and operations of the corporation, relevant laws and regulations and standards and other applicable obligations. The Board of Directors through the corporate secretary supports all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners in updating and refreshing their skills and knowledge required to carry out their roles on the Board.	472
2.1.1	In determining candidate candidates for directors, the Board of Commissioners through the Nomination and Remuneration Committee does not only rely on recommendations from the Board of Commissioners, management or majority shareholders. The Board of Commissioners through the Nomination and Remuneration Committee can use independent sources to determine qualified candidates.	71
2.1.2	The Board of Commissioners ensures that the criteria for selecting members of the Board of Directors include at least the knowledge, abilities, and expertise needed to properly fulfill the role of the Board of Directors and pay attention to the fulfillment of diversity in the Board of Directors.	Diterapkan Implemented
2.1.3	The corporate policy on diversity in the Board of Directors and the Board of Commissioners is disclosed in the Annual Report.	511 - 512
2.1.4	The Board of Commissioners ensures that the policies and procedures for the selection and nomination of Commissioners are clear and transparent so that they can produce the desired composition of the Board. The Board of Commissioners uses independent sources to determine qualified candidates.	Diterapkan Implemented

Prinsip Principle		Kriteria	
		2.1.5	Dewan Komisaris/Komite yang menjalankan fungsi nominasi menetapkan prosedur dan kriteria nominasi yang konsisten dengan matriks keahlian Dewan Komisaris yang telah disetujui Dewan Komisaris dan memastikan bahwa profil kandidat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam matriks keahlian dan kriteria nominasi.
		2.1.6	Komposisi Dewan Komisaris harus dibentuk sedemikian rupa sehingga anggota -anggotanya secara kelompok mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan jender yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Dewan Komisaris.
		2.1.7	Untuk memampukan Dewan Komisaris dalam memberikan advis dan supervisi secara independen kepada Direksi dan untuk peran-peran yang terdapat potensi benturan kepentingan, Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen yang cukup jumlahnya, dengan masa jabatan yang dibatasi dan terdapat pengungkapan Jangka waktu keanggotaan Dewan Komisaris serta independensi mereka dari sudut pandang korporasi.
		2.1.8	Untuk memfasilitasi fungsi Direksi dan Dewan Komisaris yang efektif dan guna meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat proses yang formal, ketat dan transparan untuk penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
2.2	Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Remuneration of Directors and Board of Commissioners	2.2.1	Kebijakan remunerasi anggota Direksi terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Remunerasi Direksi harus diusulkan, dapat dengan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, oleh Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS. Jumlah remunerasi yang diusulkan kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Direksi dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi.
		2.2.2	Kebijakan remunerasi anggota Dewan Komisaris terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Jumlah remunerasi yang diusulkan Dewan Komisaris kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Dewan Komisaris dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. Di samping itu juga harus dipertimbangkan posisinya sebagai Komisaris Utama dan ketua serta keanggotaannya dalam komite-komite.
		2.2.3	Untuk memastikan bahwa paket remunerasi ditentukan berdasarkan prestasi, kualifikasi dan kompetensi direktur dan komisaris dengan memperhatikan kinerja operasi korporasi, kinerja individu dan kondisi pasar, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat prosedur yang adil dan transparan untuk menetapkan kebijakan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
3	**Hubungan Kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris** Working Relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners		
3.1	Sifat Hubungan Kerja Nature of Employment Relationship	3.1.1	Terdapat diskusi yang terbuka antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta di antara para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris. Namun, tetap penting menjaga kerahasiaan informasi agar tidak terjadi kebocoran informasi rahasia.
		3.1.2	Sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing, Direksi bekerjasama dengan Dewan Komisaris dalam merumuskan misi, visi dan strategi korporasi dan secara reguler membahas pengimplementasiannya.
		3.1.3	Sekretaris Korporasi memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan komisaris, mendorong implementasi praktek governansi korporat yang baik, termasuk komunikasi yang efektif dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

	Criteria	Halaman Page
2.1.5	The Board of Commissioners/Committee carrying out the nomination function establishes nomination procedures and criteria that are consistent with the Board of Commissioners' expertise matrix approved by the Board of Commissioners and ensures that the candidate's profile meets the requirements set out in the expertise matrix and nomination criteria.	72
2.1.6	The composition of the Board of Commissioners must be formed in such a way that its members as a group reflect the diversity in terms of ability, expertise, knowledge, experience, age, cultural background, and gender required to properly fulfill the role of the Board of Commissioners.	61 - 62
2.1.7	To enable the Board of Commissioners to provide independent advice and supervision to the Board of Directors and for roles that have the potential for conflict of interest, the Board of Commissioners consists of a sufficient number of Independent Commissioners, with limited terms of office and disclosure of the term of membership of the Board of Commissioners and their independence from a corporate perspective.	404
2.1.8	To facilitate the effective functioning of the Board of Directors and the Board of Commissioners and to increase investor and stakeholder confidence, the Nomination and Remuneration Committee ensures that there is a formal, strict and transparent process for the appointment and appointment of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.	445
2.2.1	The remuneration policy for members of the Board of Directors consists of a remuneration structure that is oriented towards sustainable corporate development and encourages the achievement of long-term goals. The remuneration of the Board of Directors must be proposed, possibly through the Nomination and Remuneration Committee, by the Board of Commissioners to be decided by the GMS. The amount of remuneration proposed to the GMS is determined by considering the role of each member of the Board of Directors and the economic situation and corporate performance.	Diterapkan Implemented
2.2.2	The remuneration policy for members of the Board of Commissioners consists of a remuneration structure that is oriented towards sustainable corporate development and encourages the achievement of long-term goals. The amount of remuneration proposed by the Board of Commissioners to the GMS is determined by considering the role of each member of the Board of Commissioners and the economic situation and corporate performance. In addition, their positions as President Commissioner and chairman and their membership in committees must also be considered.	364, 505 - 507
2.2.3	To ensure that the remuneration package is determined based on the achievements, qualifications and competencies of directors and commissioners by considering the performance of corporate operations, individual performance and market conditions, the Nomination and Remuneration Committee ensures that there is a fair and transparent procedure for determining the remuneration policy for members of the Board of Directors and Board of Commissioners.	Diterapkan Implemented
3.1.1	There is an open discussion between the Board of Directors and the Board of Commissioners and between the members of the Board of Directors and the members of the Board of Commissioners. However, it is still important to maintain the confidentiality of information to prevent leakage of confidential information.	Diterapkan Implemented
3.1.2	In accordance with their respective duties and roles, the Board of Directors works together with the Board of Commissioners in formulating the mission, vision and corporate strategy and regularly discusses its implementation.	406
3.1.3	The Corporate Secretary has an important role in supporting the effectiveness of the working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners, encouraging the implementation of good corporate governance practices, including effective communication with shareholders and other stakeholders.	475

Prinsip Principle		Kriteria	
3.2	Akses informasi Dewan Komisaris Access to Board of Commissioners information	3.2.1	Direksi bertanggung jawab untuk memastikan Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Dewan Komisaris sendiri memastikan bahwa ia memperoleh informasi yang memadai. Direksi menyediakan informasi kepada Dewan Komisaris secara teratur, tanpa penundaan dan secara komprehensif tentang semua masalah yang relevan dengan korporasi. Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat meminta Direksi untuk memberikan informasi tambahan.
3.3	Tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisaris atas Dampak Struktur Kepemilikan terhadap Korporasi Responsibility of the Board of Directors and Board of Commissioners for the Impact of Ownership Structure on the Corporation	3.3.1	Dampak struktur kepemilikan terhadap korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan tanggung jawabnya dalam konteks struktur kepemilikan saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi yang mungkin berdampak terhadap pengelolaan dan operasi korporasi.
4	**Perilaku Etis dan bertanggung jawab** Ethical and responsible behavior		
4.1	Pedoman Etika dan Perilaku Ethics and Conduct Guidelines	4.1.1	Pernyataan ini dituangkan dalam Pedoman Perilaku dan Etika Usaha yang harus secara jelas mengungkapkan harapan korporasi bahwa setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan akan: 1. Bertindak untuk kepentingan terbaik korporasi; 2. Bertindak dengan jujur dan dengan integritas berstandar tinggi; 3. Bersikap independen dan bertindak berdasarkan informasi yang lengkap, dengan itikad baik, dengan uji tuntas dan kehati-hatian. 4. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi korporasi dan operasinya; 5. Menghindari tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tindakan yang tidak etis berdasarkan pedoman etika korporasi; 6. Tidak terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang akan menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan terbaik korporasi atau yang akan berdampak negatif terhadap reputasi korporasi; 7. Tidak mengambil manfaat atas properti atau informasi yang dimiliki korporasi, kepemilikan aset lainnya atau pelanggannya untuk kepentingan pribadi atau yang menyebabkan kerugian bagi korporasi dan pelanggannya. 8. Tidak memanfaatkan jabatannya atau peluang yang dihasilkan oleh jabatannya untuk kepentingan pribadi. 9. Menghindari perbuatan meminta atau menerima dari pihak ketiga pembayaran, gratifikasi atau keuntungan lain untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang menimbulkan benturan kepentingan/memberikan keuntungan kepada pihak ketiga secara melanggar peraturan perundang-undangan. 10. Menghormati perbedaan pendapat dan hak-hak setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan. 11. Memastikan pengungkapan yang lengkap, adil, akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami dalam laporan dan dokumen yang disampaikan korporasi kepada regulator dan dalam komunikasi publik lainnya.
		4.1.2	Direksi menetapkan kebijakan dan praktik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti suap, antikorupsi, antikecurangan (antifraud), keterlibatan dalam politik dengan mengacu pada standar nasional atau internasional mengenai anti pencucian uang, anti suap, antikorupsi, antikecurangan atau standar terkait lainnya.
4.2	Nilai – nilai dan Budaya Organisasi Organizational Values and Culture	4.2.1	Korporasi mengartikulasikan, menumbuhkan dan mengungkapkan budaya dan nilai-nilai korporasi.
4.3	Komunikasi dan Penegakan Pedoman Etika, Nilai-nilai dan Budaya Communication and Enforcement of Ethical Guidelines, Values and Culture	4.3.1	Pedoman perilaku dan kode etik korporasi dikomunikasikan secara efektif kepada Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan, diintegrasikan ke dalam strategi dan operasi korporasi termasuk sistem manajemen risiko dan struktur remunerasi, serta ditegakkan.

	Criteria	Halaman Page
3.2.1	The Board of Directors is responsible for ensuring that the Board of Commissioners has access to accurate, relevant and timely information. The Board of Commissioners itself ensures that it obtains adequate information. The Board of Directors provides information to the Board of Commissioners regularly, without delay and comprehensively on all issues relevant to the corporation. The Board of Commissioners may request the Board of Directors to provide additional information at any time.	Diterapkan Implemented
3.3.1	Impact of ownership structure on the corporation. The Board of Directors and the Board of Commissioners consider their responsibilities in the context of the shareholding structure and relationships between corporate shareholders that may impact the management and operations of the corporation.	Diterapkan Implemented
4.1.1	This statement is outlined in the Code of Conduct and Business Ethics which must clearly express the corporation's expectation that each member of the Board of Directors and Board of Commissioners and employee will: 1. Act in the best interests of the corporation; 2. Act honestly and with high standards of integrity; 3. Be independent and act based on complete information, in good faith, with due diligence and prudence. 4. Comply with laws and regulations applicable to the corporation and its operations; 5. Avoid actions that violate laws and regulations or actions that are unethical based on the corporate ethics guidelines; 6. Not engage or participate in any activity that would create a conflict of interest with the best interests of the corporation or that would negatively impact the corporation's reputation; 7. Not take advantage of the property or information owned by the corporation, other asset ownership or its customers for personal gain or that causes losses to the corporation and its customers. 8. Not take advantage of his position or opportunities generated by his position for personal gain. 9. Avoiding the act of requesting or receiving from third parties payments, gratuities or other benefits for themselves or for others that cause a conflict of interest/provide benefits to third parties in violation of laws and regulations. 10. Respecting differences of opinion and the rights of each member of the Board of Directors, Board of Commissioners, and employees. 11. Ensuring complete, fair, accurate, timely, and understandable disclosure in reports and documents submitted by the corporation to regulators and in other public communications.	553
4.1.2	The Board of Directors establishes policies and practices for anti-money laundering and terrorism financing, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud, and political involvement by referring to national or international standards on anti-money laundering, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud or other related standards.	Diterapkan Implemented
4.2.1	The corporation articulates, fosters and expresses corporate culture and values.	104 - 107
4.3.1	The corporation articulates, fosters and expresses corporate culture and values The corporate code of conduct and code of ethics are effectively communicated to the Board of Directors, the Board of Commissioners, and all employees, integrated into the corporate strategy and operations including the risk management system and remuneration structure, and enforced.	553

Prinsip Principle		Kriteria	
5	**Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan** Risk Management, Internal Control and Compliance		
5.1	Pengendalian Internal dan Kepatuhan Internal Control and Compliance	5.1.1	Direksi melakukan reviu secara berkala atas ketepatan desain dan efektivitas operasional sistem governansi, pengelolaan risiko, pengendalian internal dan kepatuhan korporasi dan melaporkan pelaksanaan dan hasil reviu kepada para pemegang saham melalui laporan tahunan Korporasi.
5.2	Manajemen Risiko Risk Management	5.2.1	Strategi dan risiko merupakan satu kesatuan, diungkapkan secara transparan, masuk ke dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisaris, serta dalam diskusi di rapat Dewan Komisaris dan Direksi.
		5.2.2	Komite Pemantau Manajemen Risiko membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dengan menciptakan mekanisme yang transparan, fokus, dan independen dalam pengawasan manajemen risiko korporasi.
5.3	Integrasi Governansi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan Integration of Governance, Risk Management and Compliance	5.3.1	Direksi membangun sistem governansi, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) yang terintegrasi, dengan menangani berbagai ketidakpastian secara terpadu dan dengan integritas yang tinggi, untuk meyakinkan bahwa korporasi dapat mencapai tujuannya.
		5.3.2	Direksi memastikan bahwa bagian yang membawahi fungsi kepatuhan tidak merangkap melaksanakan fungsi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.
5.4	Audit Internal Internal Audit	5.4.1	Dewan Komisaris melalui Komite Audit memantau dan memastikan bahwa fungsi audit internal membantu korporasi untuk mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang objektif dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan governansi korporat.
6	**Pengungkapan dan Transparansi** Disclosure and Transparency		
6.1	Kebijakan Pengungkapan Disclosure Policy	6.1.1	Korporasi memiliki kebijakan dan prosedur pengungkapan dan transparansi yang memastikan pengungkapan informasi material dan menjaga informasi sensitif serta rahasia korporasi.
		6.1.2	Hak pemegang saham untuk memperoleh secara teratur dan tepat waktu informasi material yang relevan tentang korporasi harus dipenuhi.
6.2	Laporan Keuangan dan Keberlanjutan Financial Reporting and Sustainability	6.2.1	Korporasi mengungkapkan sistem dan prosedur untuk memastikan bahwa laporan keuangan interim yang tidak diaudit atau direviu oleh auditor eksternal secara material adalah akurat, lengkap, dan memberikan investor informasi yang tepat untuk membuat keputusan investasi yang tepat.
		6.2.2	Komite Audit memastikan kualitas audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Kegiatan ini termasuk merekomendasikan penunjukan, penunjukan kembali dan, jika perlu, pemberhentian dan remunerasi auditor eksternal.
		6.2.3	Laporan keberlanjutan harus disiapkan dan diungkapkan dengan akurat dan disusun sesuai kerangka pelaporan keberlanjutan nasional atau internasional.
		6.2.4	Korporasi menerbitkan laporan tahunan secara terintegrasi yang menempatkan kinerja historis ke dalam konteks dan menggambarkan risiko, peluang, dan prospek korporasi di masa depan, sehingga membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan memahami tujuan strategis korporasi dan kemajuannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan.

	Criteria	Halaman Page
5.1.1	The Board of Directors conducts regular reviews of the design accuracy and operational effectiveness of the governance system, risk management, internal control and corporate compliance and reports the implementation and results of the review to shareholders through the Corporation's annual report.	83
5.2.1	Strategy and risk are one entity, disclosed transparently, included in the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners, and in discussions at meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors.	Diterapkan Implemented
5.2.2	The Risk Management Monitoring Committee assists the implementation of the Board of Commissioners' duties by creating a transparent, focused and independent mechanism for supervising corporate risk management.	63, 67
5.3.1	The Board of Directors builds an integrated governance, risk management and compliance (GRC) system, by handling various uncertainties in an integrated manner and with high integrity, to ensure that the corporation can achieve its goals.	Diterapkan Implemented
5.3.2	The Board of Directors ensures that the part in charge of the compliance function does not concurrently carry out functions that have the potential to cause a conflict of interest.	Diterapkan Implemented
5.4.1	The Board of Commissioners through the Audit Committee monitors and ensures that the internal audit function helps the corporation achieve its goals by bringing an objective and disciplined approach to evaluating and improving the effectiveness of risk management, internal control and corporate governance.	Diterapkan Implemented
6.1.1	The corporation has disclosure and transparency policies and procedures that ensure disclosure of material information and safeguard sensitive and confidential corporate information.	Diterapkan Implemented
6.1.2	The right of shareholders to receive timely and regular information relevant to the corporation.	545 - 546
6.2.1	The corporation discloses systems and procedures to ensure that interim financial statements that are not audited or reviewed by external auditors are materially accurate, complete, and provide investors with the right information to make informed investment decisions.	614
6.2.2	The Audit Committee ensures the quality of the audit of financial statements performed by external auditors. This activity includes recommending the appointment, reappointment and, if necessary, the dismissal and remuneration of external auditors.	429
6.2.3	Sustainability reports must be prepared and disclosed accurately and prepared in accordance with a national or international sustainability reporting framework.	Diterapkan Implemented
6.2.4	The corporation publishes an integrated annual report that places historical performance in context and describes the corporation's future risks, opportunities, and prospects, thereby helping shareholders and stakeholders understand the corporation's strategic objectives and its progress in creating sustainable value.	Diterapkan Implemented

Prinsip Principle		Kriteria	
6.3	Diseminasi Informasi Dissemination of Information	6.3.1	Saluran penyebaran informasi harus menyediakan akses yang setara, tepat waktu, dan relatif murah untuk informasi yang relevan bagi pengguna.
		6.3.2	Korporasi memastikan bahwa pernyataan tahunan terhadap penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia, termasuk penjelasan atas penerapan atas masing-masing Rekomendasi dan Panduan tersedia di situs web selama jangka waktu minimal lima tahun.
		6.3.3	Untuk korporasi yang terdaftar di pasar modal di yurisdiksi selain yurisdiksi asal, peraturan perundang-undangan atas governansi korporat yang berlaku harus di diungkapkan dengan jelas. Dalam hal cross listing, kriteria dan prosedur cross listing, kriteria dan prosedur untuk mengakui persyaratan listing untuk listing utama harus transparan dan didokumentasikan.
7	Perlindungan terhadap Hak-Hak Pemegang Saham Protection of Shareholder Rights		
7.1	Hak Pemegang Saham Shareholder Rights	7.1.1	Korporasi memiliki suatu kebijakan komunikasi yang memfasilitasi dan mendorong partisipasi pemegang saham atau investor.
		7.1.2	Korporasi yang merupakan entitas induk memastikan bahwa kebijakan governansi korporatnya berlaku bagi entitas anak dan entitas sepengendali yang di dalamnya investasi korporasi adalah signifikan.
		7.1.3	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang mengatur akuisisi, pengambil alihan, dan transaksi luar biasa seperti merger dan penjualan aset korporasi yang substansial untuk memastikan transaksi terjadi secara transparan dan dalam kondisi yang wajar dan melindungi hak-hak semua pemegang saham sesuai dengan kelasnya.
7.2	Perlakuan Adil Terhadap Pemegang Saham Fair Treatment of Shareholders	7.2.1	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan a). semua pemegang saham dari seri yang sama dalam satu kelas saham harus diperlakukan setara, b).pengungkapan aturan dan prosedur tersebut serta pengungkapan struktur modal dan pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memeroleh pengaruh atau kendali yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya.
		7.2.2	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan transaksi pihak berelasi disetujui dan dilaksanakan sedemikian rupa yang dapat meyakinkan bahwa benturan kepentingan telah dikelola dengan tepat, dan melindungi kepentingan korporasi dan pemegang saham.
		7.2.3	Korporasi memiliki dan mengungkapkan kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading. Korporasi memiliki aturan yang jelas mengenai perdagangan apa pun dalam saham korporasi yang dilakukan oleh direktur, komisaris dan orang dalam untuk memastikan bahwa siapapun tidak boleh mendapatkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari informasi yang tidak/belum tersedia di pasar.
7.3	Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders	7.3.1	Korporasi melakukan panggilan RUPS dengan agenda dan materi RUPS selengkap dan sedini mungkin (paling lambat 28 hari sebelum RUPS) untuk memberikan waktu dan materi yang cukup bagi pemegang saham untuk mempelajari dengan baik agenda rapat. Undangan rapat dan seluruh informasi RUPS diungkapkan melalui sarana elektronik seperti melalui situs web korporasi.
		7.3.2	Korporasi memiliki dan mengungkapkan aturan dan prosedur yang memfasilitasi pemegang saham dalam berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif di RUPS.
		7.3.3	Pemegang saham berpartisipasi efektif dalam menetapkan penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
		7.3.4	Korporasi memastikan transparansi dan akuntabilitas auditor eksternal di RUPS.
		7.3.5	Penyampaian hasil pemungutan suara dan ringkasan risalah RUPS secara lengkap diumumkan ke publik pada hari kerja berikutnya.

	Criteria	Halaman Page
6.3.1	Information dissemination channels must provide equal, timely and relatively inexpensive access to relevant information for users.	225, 545 - 546
6.3.2	Corporations ensure that annual statements on the implementation of the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance, including explanations on the implementation of each Recommendation and Guideline are available on the website for a minimum period of five years.	Diterapkan Implemented
6.3.3	For corporations listed on a capital market in a jurisdiction other than the home jurisdiction, applicable corporate governance laws and regulations must be clearly disclosed. In the case of cross-listing, the criteria and procedures for cross-listing, the criteria and procedures for recognizing listing requirements for primary listing must be transparent and documented.	Diterapkan Implemented
7.1.1	The corporation has a communication policy that facilitates and encourages shareholder or investor participation	225 - 229
7.1.2	A corporation that is a parent entity ensures that its corporate governance policies apply to subsidiaries and entities under common control in which the corporation has significant investments.	Diterapkan Implemented
7.1.3	The corporation has rules and procedures that govern acquisitions, takeovers, and extraordinary transactions such as mergers and sales of substantial corporate assets to ensure that transactions occur transparently and on fair terms and protect the rights of all shareholders according to their class.	Diterapkan Implemented
7.2.1	The corporation has rules and procedures that ensure that a). all shareholders of the same series in a class of shares are treated equally, b). disclosure of such rules and procedures and disclosure of capital structures and arrangements that allow certain shareholders to obtain influence or control disproportionate to their shareholdings.	Diterapkan Implemented
7.2.2	The corporation has rules and procedures that ensure that related party transactions are approved and implemented in a manner that ensures that conflicts of interest are appropriately managed, and protects the interests of the corporation and its shareholders.	316
7.2.3	The corporation has and discloses a policy to prevent insider trading. The corporation has clear rules regarding any trading in corporate shares conducted by directors, commissioners and insiders to ensure that no one can directly or indirectly benefit from information that is not/not yet available in the market.	595 - 596
7.3.1	The corporation makes a call for a GMS with the agenda and materials of the GMS as complete and as early as possible (no later than 28 days before the GMS) to provide sufficient time and materials for shareholders to study the meeting agenda properly. Meeting invitations and all GMS information are disclosed through electronic means such as through the corporation's website	367
7.3.2	The corporation has and discloses rules and procedures that facilitate shareholders in participating and voting effectively at the GMS.	368
7.3.3	Shareholders participate effectively in determining the appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners.	365
7.3.4	The corporation ensures transparency and accountability of external auditors at the GMS.	Diterapkan Implemented
7.3.5	The submission of voting results and a complete summary of the minutes of the GMS are announced to the public on the following business day.	387

Prinsip Principle		Kriteria	
8	**Pemangku Kepentingan Lainnya** Other Stakeholders		
8.1	Keterlibatan Pemangku Kepentingan Kunci (stakeholder engagement) Key Stakeholder Engagement	8.1.1	Korporasi melalui Sekretaris Korporasi melaksanakan komunikasi yang regular, transparan dan efektif dengan pemangku kepentingan kunci serta melibatkan mereka untuk memahami harapan dan keluhan mereka serta dampak korporasi terhadap mereka.
8.2	Integrasi Keberlanjutan dalam Model Bisnis Integrating Sustainability into Business Models	8.2.1	Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi bertanggung jawab, akuntabel dan transparan atas governansi keberlanjutan, termasuk menetapkan strategi, prioritas, dan target keberlanjutan korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris memasukkan pertimbangan keberlanjutan ketika menjalankan perannya, termasuk antara lain dalam pengembangan dan implementasi strategi korporasi, rencana bisnis, rencana aksi utama dan manajemen risiko.
8.3	Perlindungan terhadap Pemangku Kepentingan Protection of Stakeholders	8.3.1	Direksi memastikan dan mengungkapkan bahwa operasi korporasi mencerminkan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi di seluruh korporasi dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang tepat diterapkan untuk menghormati serta mematuhi hak-hak pemangku kepentingan.
		8.3.2	Direksi mendorong karyawan bekerja untuk kepentingan jangka panjang korporasi dan mengedepankan keberlanjutan.

	Criteria	Halaman Page
8.1.1	The Corporation through the Corporate Secretary carries out regular, transparent and effective communication with key stakeholders and engages them to understand their expectations and concerns and the impact of the corporation on them.	475 - 476
8.2.1	The Board of Commissioners together with the Board of Directors are responsible, accountable and transparent for sustainability governance, including setting the corporate sustainability strategy, priorities and targets. The Board of Directors and the Board of Commissioners include sustainability considerations when carrying out their roles, including among others in the development and implementation of corporate strategies, business plans, main action plans and risk management.	65 - 67
8.3.1	The Board of Directors ensures and discloses that the corporation's operations reflect the implementation of high ethical standards, social and environmental responsibility throughout the corporation and ensures that appropriate policies and procedures are implemented to respect and comply with stakeholder rights.	Diterapkan Implemented
8.3.2	The Board of Directors encourages employees to work for the long-term interests of the corporation and prioritize sustainability	78, 86, 88

Index Kriteria Penilaian Annual Report Award (ARA)

Annual Report Award (ARA) Assessment Criteria Index

Indeks Index	Kriteria Criteria
A	
A.1.	Isi Laporan Tahunan Contents of the Annual Report
A.1.1	Uraian Isi Laporan Tahunan Description of the Contents of the Annual Report
A.1.2	Ikhtisar Data Keuangan Penting Important Financial Data Overview
A.1.3	Informasi Saham Stock Information

	Deskripsi Description	Halaman Page
A.1.1.1	Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit Audited annual financial statements	614
A.1.1.2	Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan Statement letter from members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners regarding responsibility for the Annual Report	92-93
	Informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun Financial information presented in comparative form for 3 (three) financial years or since starting its business if the Company has been running its business activities for less than 3 (three) years.	
A.1.2.1	Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset Ratio of profit (loss) to total assets	38-49
A.1.2.2	Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas Profit (loss) to equity ratio	
A.1.2.3	Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan Profit (loss) ratio to revenue/sales	
A.1.2.4	Rasio lancar Current ratio	
A.1.2.5	Rasio liabilitas terhadap ekuitas Liability to equity ratio	
A.1.2.6	Rasio liabilitas terhadap jumlah aset Ratio of liabilities to total assets	
A.1.2.7	Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Perusahaan dan jenis industrinya Other financial information and ratios relevant to the Company and its industry type.	
A.1.3.1	Saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir a. Jumlah saham yang beredar; b. Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; c. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; dan d. Volume perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan. Shares issued for each quarterly period presented in comparative form for the last 2 (two) fiscal years a. Number of shares outstanding; b. Market capitalization based on the price on the stock exchange where the shares are listed; c. Highest, lowest, and closing share prices based on the price on the stock exchange where the shares are listed; and d. Trading volume on the stock exchange where the shares are listed.	50-53
A.1.3.2	Dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham, penggabungan saham, dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal a. tanggal pelaksanaan aksi korporasi; b. rasio pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham; c. jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; d. jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada); dan e. harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi. In the event of a corporate action that causes changes to the shares, such as stock splits, stock mergers, stock dividends, bonus shares, changes in the nominal value of shares, issuance of convertible securities, and additions and reductions in capital a. date of implementation of the corporate action; b. ratio of stock splits, stock mergers (reverse stock), stock dividends, bonus shares, number of convertible securities issued, and changes in the nominal value of shares; c. number of shares outstanding before and after the corporate action; d. number of convertible securities implemented (if any); and e. share price before and after the corporate action.	54

Indeks Index	Kriteria Criteria
A.1.4	Laporan Direksi Board of Directors Report
A.1.5	Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners Report
A.1.6	Profil Perusahaan Company profile

	Deskripsi Description	Halaman Page
A.1.4.1	Kinerja Perusahaan a. Strategi dan kebijakan strategis Perusahaan; b. Peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Perusahaan; c. Proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi; d. Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Perusahaan; dan e. Kendala yang dihadapi. Company Performance a. Company's strategy and strategic policies; b. The role of the Board of Directors in formulating the Company's strategy and strategic policies; c. The process carried out by the Board of Directors to ensure strategy implementation; d. Comparison between the results achieved and those targeted by the Company; and e. Obstacles faced.	75-90
A.1.4.2	Gambaran tentang prospek usaha Perusahaan Overview of the Company's business prospects	88
A.1.4.3	Penerapan governansi Perusahaan Implementation of corporate governance	82-86
A.1.5.1	Penilaian terhadap kinerja direksi mengenai pengelolaan Perusahaan, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Perusahaan Assessment of the performance of the Board of Directors regarding the management of the Company, including supervision of the Board of Commissioners in the formulation and implementation of the Company's strategy	61
A.1.5.2	Pandangan atas prospek usaha Perusahaan yg disusun oleh Direksi Views on the Company's business prospects prepared by the Board of Directors	64
A.1.5.3	Pandangan atas penerapan governansi Perusahaan Views on the implementation of corporate governance	66
A.1.6.1	Akses terhadap Perusahaan termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Perusahaan meliputi alamat, nomor telepon, alamat surat elektronik dan alamat situs web Access to the Company, including branch offices or representative offices, enables the public to obtain information about the Company, including addresses, telephone numbers, email addresses and website addresses	96-97
A.1.6.2	Riwayat singkat Perusahaan Brief Company History	98-101
A.1.6.3	Visi dan misi Perusahaan serta budaya perusahaan (corporate culture) atau nilai-nilai perusahaan Company vision and mission and corporate culture or company values	104-105
A.1.6.4	Kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan Business activities according to the latest articles of association, business activities carried out in the financial year, and types of goods and/or services produced	109-112
A.1.6.5	Wilayah operasional Perusahaan; wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan Company operational area; operational area is the area or region where operational activities are carried out or the scope of the company's operational activities.	114-115
A.1.6.6	Struktur organisasi Perusahaan dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan The Company's organizational structure in the form of a chart, at least up to a structure of 1 (one) level below the Board of Directors, including committees under the Board of Directors (if any) and committees under the Board of Commissioners, accompanied by names and positions	118-119
A.1.6.7	Daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan List of industry association memberships both nationally and internationally related to the implementation of sustainable finance	116

Indeks Index	Kriteria Criteria
A.1.7	Profil Direksi Directors Profile

	Deskripsi Description	Halaman Page
A.1.6.8	Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel Number of employees by gender, position, age, education level, and employment status (permanent/contract) in the fiscal year; Disclosure of information can be presented in tabular form.	195-200
A.1.6.9	Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/aliansinya meliputi: a. Nama dan alamat; b. Periode penugasan; c. Informasi jasa audit yang diberikan; d. Biaya jasa (fee) audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; e. Informasi jasa non audit yang diberikan; dan f. Biaya jasa (fee) non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku. Catatan: dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut (atas poin A.1.6.9.e & f) Information on the use of public accountant (AP) and public accounting firm (KAP) services and their networks/associations/alliances includes: a. Name and address; b. Assignment period; c. Information on audit services provided; d. Audit service fees for each assignment provided during the financial year; e. Information on non-audit services provided; and f. Non-audit service fees for each assignment provided during the financial year. Note: in the case of AP and KAP and their networks/associations/alliances, which are appointed do not provide non-audit services, then this information is disclosed (on points A.1.6.9.e & f)	222
A.1.6.10	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP Name and address of capital market supporting institutions and/or professions other than AP and KAP	222-224
A.1.7.1	Nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Name and position appropriate to duties and responsibilities	136-149
A.1.7.2	Usia Age	
A.1.7.3	Kewarganegaraan Citizenship	
A.1.7.4	Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi Education history and/or certification	
A.1.7.5	Riwayat jabatan, meliputi informasi a. Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada Perusahaan yang bersangkutan; b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Perusahaan. Catatan: Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut (atas poin A.1.7.5.b) c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Perusahaan Job history, including information a. Legal basis for appointment as a member of the Board of Directors at the Company concerned; b. Concurrent positions, either as a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, and/or member of the committee and other positions both inside and outside the Company. Note: In the event that a member of the Board of Directors does not have a concurrent position, then this must be disclosed (as per point A.1.7.5.b) c. Work experience and time period both inside and outside the Company	
A.1.7.6	Hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Catatan: Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Perusahaan mengungkapkan hal tersebut (atas poin A.1.7.6) Affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controllers, both directly and indirectly, up to individual owners, including the names of affiliated parties. Note: In the event that a member of the Board of Directors does not have an affiliated relationship, the Company shall disclose this (on point A.1.7.6)	

Indeks Index	Kriteria Criteria
A.1.8	Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profile

	Deskripsi Description	Halaman Page
A.1.7.7	Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Catatan: (atas poin A.1.7.7) 1. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; 2. Dalam hal perubahan komposisi anggota Direksi terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi yang terakhir dan sebelumnya. Changes in the composition of the Board of Directors and the reasons for the changes. Note: (on point A.1.7.7) 1. In the event that there is no change in the composition of the Board of Directors, this shall be disclosed; 2. In the event that changes in the composition of the Board of Directors occur after the end of the financial year up to the deadline for submission of the Annual Report, the composition listed in the Annual Report is the composition of the last and previous Board of Directors.	
A.1.8.1	Nama dan jabatan Name and position	122-132
A.1.8.2	Usia Age	
A.1.8.3	Kewarganegaraan Citizenship	
A.1.8.4	Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi Education history and/or certification	
A.1.8.5	Riwayat jabatan, meliputi informasi a. Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris; b. Dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Perusahaan yang bersangkutan; c. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Perusahaan. Catatan: Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut (atas poin A.1.8.5.c) d. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Perusahaan Job history, including information a. Legal basis for appointment as a member of the Board of Commissioners; b. Legal basis for first appointment as a member of the Board of Commissioners who is an independent commissioner at the Company concerned; c. Concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or member of the committee and other positions both inside and outside the Company. Note: In the event that a member of the Board of Commissioners does not have a concurrent position, then this must be disclosed (in point A.1.8.5.c) d. Work experience and the time period both inside and outside the Company	
A.1.8.6	Hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi Catatan: Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Perusahaan mengungkapkan hal tersebut (atas poin A.1.8.6) Affiliated relationships with other members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controllers, both directly and indirectly, up to individual owners, including the names of affiliated parties Note: In the event that a member of the Board of Commissioners does not have an affiliated relationship, the Company shall disclose this (in point A.1.8.6)	493-499
A.1.8.7	Pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode Statement of independence of independent commissioners in the event that the independent commissioner has served for more than 2 (two) terms	398
A.1.8.8	Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya Catatan: (atas poin A.1.8.8) 1. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut 2. Dalam hal perubahan komposisi anggota Direksi terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya Changes in the composition of the members of the Board of Commissioners and the reasons for the changes Note: (on point A.1.8.8) 1. In the event that there are no changes in the composition of the members of the Board of Commissioners, this shall be disclosed. 2. In the event that changes in the composition of the members of the Board of Directors occur after the end of the financial year up to the deadline for submission of the Annual Report, the composition listed in the Annual Report is the composition of the members of the Board of Commissioners from the last and previous	146

Indeks Index	Kriteria Criteria
A.1.9	Informasi Pemegang Saham Shareholder Information

	Deskripsi Description	Halaman Page
A.1.9.1	Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai: a. Pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan; b. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Perusahaan; Catatan: Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut (atas poin A.1.9.1.b) c. Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik Names of shareholders and percentage of ownership at the beginning and end of the financial year, consisting of information regarding: a. Shareholders who own 5% (five percent) or more of the Company's shares; b. Members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who own shares of the Company; Note: In the event that all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners do not own shares, then this shall be disclosed (in point A.1.9.1.b) c. Group of public shareholders, namely groups of shareholders who each own less than 5% (five percent) of shares	205-206
A.1.9.2	Persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Perusahaan oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Catatan: Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Perusahaan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut (atas poin A.1.9.2) Percentage of indirect ownership of Company shares by members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners at the beginning and end of the financial year, including information regarding shareholders registered in the shareholders register for the benefit of indirect ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners Note: In the event that all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners do not have indirect ownership of Company shares, then this matter is disclosed (in point A.1.9.2)	204-206
A.1.9.3	Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan, berdasarkan klasifikasi: a. kepemilikan institusi lokal b. kepemilikan institusi asing c. kepemilikan individu lokal d. kepemilikan individu asing Number of shareholders and percentage of ownership, based on classification: a. local institutional ownership b. foreign institutional ownership c. local individual ownership d. foreign individual ownership	207
A.1.9.4	Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan Information regarding the Company's major and controlling shareholders, both direct and indirect, down to individual owners, presented in the form of a scheme or chart.	203
A.1.9.5	Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Perusahaan memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama. Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut Name of subsidiary, associate, joint venture company where the Company has joint control of the entity (if any), along with the percentage of share ownership, field of business, total assets, and operating status of the subsidiary, associate, joint venture company. For subsidiary entities, information regarding the address of the subsidiary is added.	210
A.1.9.6	Kronologis pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada) Chronology of share listing, number of shares, nominal value, and offering price from the start of listing until the end of the financial year and the name of the stock exchange where the Issuer's or Public Company's shares are listed, including stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, and changes in the nominal value of shares, implementation of convertible securities, implementation of capital additions and reductions (if any).	220-221

Indeks Index	Kriteria Criteria
A.1.10	Analisa dan Pembahasan Manajemen Management Analysis and Discussion

	Deskripsi Description	Halaman Page
A.1.9.7	Informasi pencatatan efek lainnya selain efek sebagaimana dimaksud sebelumnya, yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada) Information on the recording of other securities other than the securities as referred to above, which have not matured in the financial year, must at least include the name of the securities, year of issuance, interest rate/ yield, maturity date, offering value and securities rating (if any).	221
A.1.10.1	Perusahaan a. Produksi, yg meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya; b. Pendapatan/penjualan; c. Profitabilitas Company a. Production, including process, capacity, and development; b. Revenue/sales; c. Profitability	274-282
A.1.10.2	Kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut: a. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset b. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas c. Ekuitas d. Pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi), komprehensif; dan e. Arus kas Comprehensive financial performance that includes a comparison of financial performance in the last 2 (two) financial years, an explanation of the causes of changes and the impact of these changes: a. Current assets, non-current assets, and total assets b. Short-term liabilities, long-term liabilities, and total liabilities c. Equity d. Revenue/sales, expenses, profit (loss), other comprehensive income, and total profit (loss), comprehensive; and e. Cash flow	283-298
A.1.10.3	Kemampuan membayar utang atau kewajiban dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan Ability to pay debts or obligations by presenting relevant ratio calculations	299-300
A.1.10.4	Tingkat kolektibilitas piutang perusahaan dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan The level of collectibility of the company's receivables by presenting relevant ratio calculations.	300-301
A.1.10.5	Struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud Capital structure and management policy on capital structure along with the basis for determining the policy in question	306-307
A.1.10.6	Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan a. Tujuan dari ikatan tersebut b. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut c. Mata uang yang menjadi denominasi d. Langkah yang direncanakan Perubahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait Discussion on material commitments for capital goods investment with explanation a. Purpose of the commitment b. Source of funds expected to fulfill the commitment c. Currency of denomination d. Planned steps Changes to protect the risk of related foreign currency positions	308
A.1.10.7	Bahasan mengenai investasi barang modal yang yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir: a. Jenis investasi barang modal b. Tujuan investasi barang modal c. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan Discussion on capital goods investment realized in the last fiscal year: a. Type of capital goods investment b. Purpose of capital goods investment c. Value of capital goods investment issued	308

Indeks Index	Kriteria Criteria

	Deskripsi Description	Halaman Page
A.1.10.8	Prospek usaha dari Perusahaan dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya The Company's business prospects are linked to industry conditions, the general economy and international markets, accompanied by quantitative supporting data from reliable data sources.	
A.1.10.9	Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi) a. Pendapatan/penjualan; b. Laba (rugi); c. Struktur modal (capital structure); dan d. Hal lainnya yang dianggap penting bagi Perusahaan. Comparison between targets/projections at the beginning of the fiscal year with the results achieved (realization) a. Revenue/sales; b. Profit (loss); c. Capital structure; and d. Other matters considered important to the Company.	331-332
A.1.10.10	Target/proyeksi yang ingin dicapai Perusahaan untuk 1 (satu) tahun mendatang a. Pendapatan/penjualan; b. Laba (rugi); c. Struktur modal (capital structure); d. Kebijakan dividen; e. Hal lainnya yang dianggap penting bagi Perusahaan. Targets/projections that the Company wants to achieve for the next 1 (one) year a. Revenue/sales; b. Profit (loss); c. Capital structure; d. Dividend policy; e. Other matters that are considered important to the Company.	333-335
A.1.10.11	Aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Perusahaan, paling sedikit mengenai Strategi pemasaran dan Pangsa pasar Marketing aspects of the Company's goods and/or services, at least regarding marketing strategy and market share.	329
A.1.10.12	Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir a. Kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih; b. Tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas; c. Jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan d. Jumlah dividen per tahun yang dibayar; Catatan: Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak membagikan dividen dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka diungkapkan mengenai hal tersebut Description of dividends for the last 2 (two) financial years a. Dividend policy, including information on the percentage of the amount of dividends distributed to net profit; b. Cash dividend payment date and/or non-cash dividend distribution date; c. Amount of dividends per share (cash and/or non-cash); and d. Amount of dividends paid per year; Note: In the event that the Issuer or Public Company does not distribute dividends in the last 2 (two) years, this shall be disclosed	309-310
A.1.10.13	Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, dengan ketentuan: a. Dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; b. Dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut. Realization of the use of funds from the public offering, with the following provisions: a. In the event that during the financial year, the Issuer has an obligation to submit a report on the realization of the use of funds, then the realization of the use of funds from the public offering is disclosed cumulatively until the end of the financial year; b. In the event that there is a change in the use of funds as regulated in the Financial Services Authority Regulation concerning the report on the realization of the use of funds from the public offering, then the Issuer explains the change.	311-315

Indeks Index	Kriteria Criteria

	Deskripsi Description	Halaman Page
A.1.10.14	Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku a. Tanggal, nilai, dan objek transaksi; b. Nama pihak yang melakukan transaksi; c. Sifat hubungan afiliasi (jika ada); d. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; e. Pemenuhan ketentuan terkait; dan f. Dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf e), Perusahaan juga mengungkapkan informasi: • Pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (arms-length principle); • Peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (arms-length principle); g. Usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan; Catatan: Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut (atas point A.1.10.14.g) h. Untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi tersebut; Catatan: dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; (atas point A.1.10.14.i) Material information (if any), including investment, expansion, divestment, merger/amalgamation, acquisition, debt/capital restructuring, material transactions, affiliated transactions, and conflict of interest transactions, which occurred in the fiscal year a. Date, value, and object of the transaction; b. Name of the party conducting the transaction; c. Nature of the affiliated relationship (if any); d. Explanation of the fairness of the transaction; e. Compliance with related provisions; and f. In the event of an affiliated relationship, in addition to disclosing information as referred to in letters a) to e), the Company also discloses information: • Statement by the Board of Directors that the affiliated transaction has gone through adequate procedures to ensure that the affiliated transaction is carried out in accordance with generally accepted business practices, including by fulfilling the arm's-length principle; • The role of the Board of Commissioners and the audit committee in carrying out adequate procedures to ensure that the affiliated transaction is carried out in accordance with generally accepted business practices, including by fulfilling the arm's-length principle; g. Businesses that are run in order to generate business income and are run routinely, repeatedly, and/or continuously, an explanation is added that the affiliated transaction or material transaction is a business activity that is run in order to generate business income and is run routinely, repeatedly, and/or continuously; Note: In the case where the affiliated transaction or material transaction in question has been disclosed in the annual financial report, information is added regarding the reference to the disclosure in the annual financial report (on point A.1.10.14.g) h. For disclosure of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions that are the result of the implementation of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions that have been approved by independent shareholders, information is added regarding the date of the GMS that approved the transaction; Note: in the case where there is no affiliated transaction and/or conflict of interest transaction, then disclosure is made regarding this matter; (on point A.1.10.14.i)	316
A.1.10.15	Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Perusahaan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada) Changes in statutory provisions that have a significant impact on the Company and their impact on the financial statements (if any)	326

Indeks Index	Kriteria Criteria
A.1.11	Governansi Perusahaan Corporate Governance

	Deskripsi Description	Halaman Page
A.1.11.1	Pengungkapan terkait RUPS: a. Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku: • Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku • Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan b. Dalam hal Perusahaan menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut Disclosures related to GMS: a. Information regarding GMS decisions in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year: • GMS decisions in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year that were realized in the fiscal year • GMS decisions in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year that have not been realized along with the reasons for not being realized b. In the event that the Company uses an independent party in the implementation of the GMS to calculate votes, then this matter is disclosed	365-380
A.1.11.2	Pengungkapan terkait Direksi: a. Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; b. Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (charter) Direksi; c. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; Informasi tingkat kehadiran direksi dalam rapat Direksi dan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan dalam RUPS (dapat disajikan dalam bentuk tabel): • Kebijakan terkait frekuensi rapat Direksi dan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris; • Frekuensi pelaksanaan rapat Direksi dan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris; • Informasi tingkat kehadiran direksi dalam rapat direksi, rapat direksi dekom, RUPS d. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi: • Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada); • Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada) e. Penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku • Prosedur penilaian kinerja • Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat f. Catatan: Dalam hal Perusahaan tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut (atas point A.1.11.2.e1 & e2) Disclosures related to the Board of Directors: a. Duties and responsibilities of each member of the Board of Directors; b. Statement that the Board of Directors has guidelines or a charter for the Board of Directors; c. Policy and implementation of the frequency of Board of Directors meetings, Board of Directors meetings with the Board of Commissioners, and the level of attendance of members of the Board of Directors in these meetings including attendance at the GMS; Information on the level of attendance of directors in Board of Directors meetings and Board of Directors meetings with the Board of Commissioners, and in the GMS (can be presented in tabular form): • Policy related to the frequency of Board of Directors meetings and Board of Directors meetings with the Board of Commissioners; • Frequency of Board of Directors meetings and Board of Directors meetings with the Board of Commissioners; • Information on the level of attendance of directors in board of directors meetings, board of directors meetings, GMS d. Training and/or competency improvement of members of the Board of Directors: • Policy on training and/or competency improvement of members of the Board of Directors, including orientation programs for newly appointed members of the Board of Directors (if any); • Training and/or competency improvement attended by members of the Board of Directors in the financial year (if any) e. Board of Directors' assessment of the performance of committees supporting the implementation of the Board of Directors' duties in the financial year • Performance assessment procedures • Criteria used such as performance achievements during the financial year, competence and attendance at meetings f. Note: In the event that the Company does not have a committee supporting the implementation of the Board of Directors' duties, then it is disclosed regarding this (on point A.1.11.2.e1 & e2)	370, 382 dan 459-473

Indeks Index	Kriteria Criteria

	Deskripsi Description	Halaman Page
A.1.11.3	Pengungkapan terkait Dewan Komisaris a. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;; b. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (charter) Dewan Komisaris; c. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; d. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris: • Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat; dan • Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada) e. Penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris • Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja; • Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan • Pihak yang melakukan penilaian; f. Penilaian Dewan komisaris terhadap kinerja Komite Dewan Komisaris terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku, meliputi: • Prosedur penilaian kinerja; dan • Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat. Disclosures related to the Board of Commissioners a. Duties and responsibilities of the Board of Commissioners;; b. Statement that the Board of Commissioners has guidelines or a charter for the Board of Commissioners; c. Policy and implementation of the frequency of Board of Commissioners meetings, Board of Commissioners meetings with the Board of Directors and the level of attendance of members of the Board of Commissioners in these meetings including attendance at the GMS; d. Training and/or competency improvement of members of the Board of Commissioners: • Policy on training and/or competency improvement of members of the Board of Commissioners, including orientation programs for newly appointed members of the Board of Commissioners; and • Training and/or competency improvement attended by members of the Board of Commissioners in the financial year (if any) e. Performance assessment of the Board of Directors and Board of Commissioners and each member of the Board of Directors and member of the Board of Commissioners • Procedure for implementing performance assessments; • Criteria used such as performance achievements during the financial year, competency and attendance at meetings; and • Party conducting the assessment; f. Assessment of the Board of Commissioners on the performance of the Board of Commissioners Committee on the performance of the committees that support the implementation of the Board of Commissioners' duties in the financial year, including: • Performance assessment procedures; and • Criteria used such as performance achievements during the financial year, competence and attendance at meetings.	370, 382 dan 396-413
A.1.11.4	Pengungkapan terkait Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris: a. Prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; b. Prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain: • Prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris; • Struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya; dan • Besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Disclosures related to Nomination and remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners: a. Nomination procedures, including a brief description of the policy and process for nominating members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; b. Procedures and implementation of remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners, including: • Procedures for determining remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners; • Structure of remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners such as salary, allowances, tantiem/bonus and others; and • Amount of remuneration for each member of the Board of Directors and Board of Commissioners;	504-510

Indeks Index	Kriteria Criteria

	Deskripsi Description	Halaman Page
A.1.11.5	Pengungkapan terkait Dewan pengawas syariah, bagi Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar: a. Nama; b. Dasar hukum pengangkatan dewan pengawas syariah; c. Periode penugasan dewan pengawas syariah; d. Tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah; e. Frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap Perusahaan Disclosures related to the Sharia Supervisory Board, for Companies that carry out business activities based on Sharia principles as stated in the articles of association: a. Name; b. Legal basis for the appointment of the Sharia Supervisory Board; c. Period of assignment of the Sharia Supervisory Board; d. Duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board; e. Frequency and method of providing advice and suggestions as well as supervision of the fulfillment of Sharia principles in the capital market for the Company	WEGE tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah
A.1.11.6	Pengungkapan terkait Komite audit: a. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; b. Usia; c. Kewarganegaraan; d. Riwayat Pendidikan; e. Riwayat Jabatan: • Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; • Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); Catatan: Dalam tidak ada rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut (atas point A.1.11.6.e2) • Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Perusahaan; Periode dan masa jabatan anggota komite audit; f. Pernyataan independensi komite audit; g. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); h. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut; i. Pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku. Disclosures related to the Audit Committee: a. Name and position in the committee membership; b. Age; c. Nationality; d. Educational History; e. Job History: • Legal basis for appointment as a committee member; • Concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or member of the committee and other positions (if any); Note: In the absence of concurrent positions, the disclosure of this matter (as per point A.1.11.6.e2) • Work experience and its period of time both inside and outside the Company; Period and term of office of the audit committee members; f. Statement of independence of the audit committee; g. Training and/or competency improvement that has been attended in the financial year (if any); h. Policy and implementation of the frequency of audit committee meetings and the level of attendance of audit committee members in these meetings; i. Implementation of audit committee activities in the financial year.	420-423

Indeks Index	Kriteria Criteria

	Deskripsi Description	Halaman Page
A.1.11.7.a	Pengungkapan terkait Komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan. a. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; b. Usia; c. Kewarganegaraan; d. Riwayat Pendidikan; e. Riwayat Jabatan: • Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; • Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); Catatan: Dalam tidak ada rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; (A.1.11.7a.e2) • Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Perusahaan. f. Periode dan masa jabatan anggota komite nominasi dan remunerasi; g. Pernyataan independensi komite; h. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); i. Uraian tugas dan tanggung jawab; j. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter); k. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut; l. Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; Catatan: Dalam hal tidak dibentuk komite: 1. Alasan tidak dibentuknya komite 2. Pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi Disclosures related to the Company's nomination and remuneration committee or function. a. Name and position in the committee membership; b. Age; c. Nationality; d. Educational background; e. Job history: • Legal basis for appointment as a committee member; • Concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, a member of the Board of Directors, and/or a member of the committee and other positions (if any); Note: In the absence of concurrent positions, the disclosure of such matters shall be made; (A.1.11.7a.e2) • Work experience and its period of time both within and outside the Company. f. Period and term of office of the nomination and remuneration committee members; g. Statement of the committee's independence; h. Training and/or competency improvement that has been attended in the financial year (if any); i. Description of duties and responsibilities; j. Statement that a guideline or charter has been established; k. Policy and implementation of meeting frequency and level of member attendance at the meeting; l. Brief description of the implementation of activities in the fiscal year; Note: In the event that a committee is not formed: 1. Reasons for not forming a committee 2. Party carrying out the nomination and remuneration functions	432-448

Indeks Index	Kriteria Criteria

	Deskripsi Description	Halaman Page
A.1.11.7.b	Pengungkapan terkait Komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan. a. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; b. Usia; c. Kewarganegaraan; d. Riwayat pendidikan; e. Riwayat jabatan: • dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; • Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); Catatan: Dalam tidak ada rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut (atas point A.1.11.7b.e2); • Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Perusahaan f. Periode dan masa jabatan anggota komite nominasi dan remunerasi; g. Pernyataan independensi komite; h. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); i. Uraian tugas dan tanggung jawab; j. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter); k. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut; l. Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; m. Catatan: Dalam hal tidak dibentuk komite: • Alasan tidak dibentuknya komite; dan • Pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi Disclosures related to the Company's nomination and remuneration committee or function. a. Name and position in the committee membership; b. Age; c. Nationality; d. Educational background; e. Job history: • legal basis for appointment as a committee member; • Concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, a member of the Board of Directors, and/or a member of the committee and other positions (if any); Note: In the absence of concurrent positions, the disclosure of this matter is made (as per point A.1.11.7b.e2); • Work experience and its period both inside and outside the Company. f. Period and term of office of the nomination and remuneration committee members; g. Statement of the committee's independence; h. Training and/or competency improvement that has been attended in the financial year (if any); i. Description of duties and responsibilities; j. Statement that has guidelines or a charter; k. Policy and implementation of meeting frequency and level of member attendance at the meeting; l. Brief description of the implementation of activities in the fiscal year; m. Note: In the event that a committee is not formed: • Reasons for not forming a committee; and • Party carrying out the nomination and remuneration functions	436-437

Indeks Index	Kriteria Criteria

	Deskripsi Description	Halaman Page
A.1.11.8.a	Pengungkapan terkait Komite Manajemen Risiko a. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; b. Usia; c. Kewarganegaraan; d. Riwayat Pendidikan; e. Riwayat Jabatan: f. Periode dan masa jabatan anggota komite manajemen risiko; g. Pernyataan independensi komite; h. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada) i. Uraian tugas dan tanggung jawab; j. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter); k. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut; l. Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; m. Catatan: Dalam hal tidak dibentuk komite: • Alasan tidak dibentuknya komite; dan • Pihak yang melaksanakan fungsi manajemen risiko. Disclosures related to the Risk Management Committee a. Name and position in the committee membership; b. Age; c. Nationality; d. Educational History; e. Job History: f. Period and term of office of the risk management committee members; g. Statement of committee independence; h. Training and/or competency improvement that has been attended in the financial year (if any) i. Description of duties and responsibilities; j. Statement that there is a guideline or charter; k. Policy and implementation of meeting frequency and level of member attendance at the meeting; l. Brief description of implementation of activities in the financial year; m. Note: In the event that a committee is not formed: • Reasons for not forming a committee; and • Party implementing the risk management function.	448-457
A.1.11.8.b	Pengungkapan terkait Komite lain yang dimiliki Perusahaan dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris: a. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; b. Usia; c. Kewarganegaraan; d. Riwayat pendidikan; e. Riwayat jabatan; • Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; • Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); • Catatan: Dalam tidak ada rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; • Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Perusahaan. f. Periode dan masa jabatan anggota komite lain; g. Pernyataan independensi komite; h. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); i. Uraian tugas dan tanggung jawab; j. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter); k. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut; l. Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku. Disclosures related to other committees owned by the Company in order to support the functions and duties of the Board of Directors (if any) and/or committees that support the functions and duties of the Board of Commissioners: a. Name and position in the committee membership; b. Age; c. Citizenship; d. Educational history; e. Job history; • Legal basis for appointment as a committee member; • Concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, a member of the Board of Directors, and/or a member of a committee and other positions (if any); • Note: In the absence of concurrent positions, this is disclosed; • Work experience and its period both inside and outside the Company. f. Period and term of office of other committee members; g. Statement of committee independence; h. Training and/or competency improvement that has been attended in the financial year (if any); i. Description of duties and responsibilities; j. Statement that has guidelines or a charter; k. Policy and implementation of meeting frequency and level of member attendance at the meeting; l. Brief description of implementation of activities in the fiscal year;	458

Indeks Index	Kriteria Criteria

	Deskripsi Description	Halaman Page
A.1.11.9	Pengungkapan terkait Sekretaris perusahaan a. Nama; b. Domisili; c. Riwayat jabatan; • Dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan; dan • Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Perusahaan. d. Riwayat pendidikan; e. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; f. Buku. Disclosures related to the Corporate Secretary a. Name; b. Domicile; c. Employment Record; • Legal basis for appointment as corporate secretary; and • Work experience and time period both inside and outside the Company. d. Education background; e. Training and/or competency improvement attended in the financial year; f. Books.	474-483
A.1.11.10	Pengungkapan terkait Unit audit internal, paling sedikit memuat: a. Nama kepala unit audit internal; b. Riwayat jabatan; • Dasar hukum penunjukan sebagai kepala unit audit internal; dan • Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Perusahaan c. Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal; d. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; e. Struktur dan kedudukan unit audit internal; f. Uraian tugas dan tanggung jawab; g. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) unit audit internal; h. Uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit. Disclosures related to the Corporate Secretary a. Name; b. Domicile; c. Job history; • Legal basis for appointment as corporate secretary; and • Work experience and time period both inside and outside the Company. d. Education history; e. Training and/or competency improvement attended in the financial year; f. Books.	484-492
A.1.11.11	Uraian mengenai sistem pengendalian internal (internal control) yang diterapkan oleh Perusahaan: a. Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; b. Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal; dan c. Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal. Description of the internal control system implemented by the Company: a. Financial and operational control, and compliance with other laws and regulations; b. Review of the effectiveness of the internal control system; and c. Statement from the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the adequacy of the internal control system.	516-523

Indeks Index	Kriteria Criteria

	Deskripsi Description	Halaman Page
A.1.11.12	Uraian mengenai Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Perusahaan: a. Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Perusahaan; b. Jenis risiko dan cara pengelolaannya; c. Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Perusahaan; dan d. Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko. Description of the risk management system implemented by the Company: a. General description of the Company's risk management system; b. Types of risks and how they are managed; c. Review of the effectiveness of the Company's risk management system; and d. Statement from the Board of Directors and/or Board of Commissioners or audit committee on the adequacy of the risk management system.	524-533
A.1.11.13	-	
A.1.11.14	informasi tentang sanksi administratif/sanksi yang dikenakan kepada Perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya pada tahun buku information on administrative sanctions/sanctions imposed on the Company, members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, by the Financial Services Authority and other authorities in the financial year	524
A.1.11.15	Informasi mengenai kode etik Perusahaan a. Pokok-pokok kode etik; b. Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; c. Pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perusahaan. Information regarding the Company's code of ethics a. Main points of the code of ethics; b. Form of socialization of the code of ethics and its enforcement efforts; c. Statement that the code of ethics applies to members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company.	550-556
A.1.11.16	Uraian singkat mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan yang dimiliki oleh Perusahaan (jika ada), antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/ESOP) Dalam hal terdapat pemberian kompensasi berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/ESOP), informasi yang diungkapkan paling sedikit memuat: (atas point A.1.11.16) a. Jumlah saham dan/atau opsi; b. Jangka waktu pelaksanaan; c. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan d. Harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan. Brief description of the policy of providing long-term performance-based compensation to management and/or employees owned by the Company (if any), including in the form of a management stock ownership program (MSOP) and/or employee stock ownership program (ESOP) In the event that there is compensation provided in the form of a management stock ownership program (MSOP) and/or employee stock ownership program (ESOP), the information disclosed must at least include: (as per point A.1.11.16) a. Number of shares and/or options; b. Implementation period; c. Requirements for employees and/or management who are entitled; and d. Implementation price or determination of the implementation price.	557

Indeks Index	Kriteria Criteria

	Deskripsi Description	Halaman Page
A.1.11.17	Uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan informasi mengenai: a. Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka; dan b. Pelaksanaan atas kebijakan dimaksud. Brief description of the information disclosure policy regarding: a. Share ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners no later than 3 (three) working days after the occurrence of ownership or any change in ownership of shares of the Public Company; and b. Implementation of the said policy.	557
A.1.11.18	Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) di Perusahaan: a. Cara penyampaian laporan pelanggaran; b. Perlindungan bagi pelapor; c. Penanganan pengaduan; d. Pihak yang mengelola pengaduan; e. Hasil dari penanganan pengaduan: • Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan • Tindak lanjut pengaduan. Catatan: Dalam hal Perusahaan tidak memiliki sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system), maka diungkapkan mengenai hal tersebut. (atas point A.1.11.18) Description of the whistleblowing system in the Company: a. How to submit a report of violations; b. Protection for the reporter; c. Handling of complaints; d. The party that manages the complaint; e. Results of handling complaints: • Number of complaints received and processed in the fiscal year; and • Follow-up of complaints. Note: In the event that the Company does not have a whistleblowing system, then it is disclosed regarding this. (above point A.1.11.18)	580
A.1.11.19	Uraian mengenai kebijakan anti korupsi Perusahaan a. Program dan prosedur yang dilakukan; b. Pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Perusahaan; Catatan: Dalam hal Perusahaan tidak memiliki kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak dimilikinya kebijakan dimaksud (atas point A.1.11.19) Description of the Company's anti-corruption policy a. Programs and procedures implemented; b. Anti-corruption training/socialization for Company employees; Note: In the event that the Company does not have an anti-corruption policy, the reasons for not having the policy are explained (above point A.1.11.19)	584-585
A.1.11.20a	Penerapan atas pedoman governansi Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi: a. Pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; b. Bukti/penjelasan yang menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan rekomendasi tersebut; dan c. Penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif. Implementation of the Public Company governance guidelines for Issuers issuing equity securities or Public Companies, includes: a. Statement regarding recommendations that have been implemented; b. Evidence/explanation showing that the company has implemented the recommendations; and c. Explanation of recommendations that have not been implemented, accompanied by reasons and alternatives.	348-352
A.1.11.20b	Pengungkapan terkait penerapan atas pedoman governansi Perusahaan: a. Pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau b. Bukti/penjelasan yang menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan rekomendasi tersebut; c. Penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif. Disclosures related to the implementation of the Company's governance guidelines: a. Statement regarding recommendations that have been implemented; and/or b. Evidence/explanation showing that the company has implemented the recommendations; c. Explanation of recommendations that have not been implemented, accompanied by reasons and alternatives.	353-362

Indeks Index	Kriteria Criteria
A.2	Isi Laporan Keberlanjutan Contents of the Sustainability Report
A.2.1	Strategi Keberlanjutan Sustainability Strategy
A.2.2	Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan Sustainability Aspect Performance Overview
A.2.3	Profil Perusahaan Company profile
A.2.4	Penjelasan Direksi Directors' Explanation
A.2.5	Governansi Berkelanjutan Sustainable Governance

	Deskripsi Description	Halaman Page
A.2.1.1	Penjelasan Strategi Keberlanjutan Sustainability Strategy Explained	Merujuk Kepada Laporan Keberlanjutan WEGE yang disusun secara terpisah
	Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan Sustainability Aspect Performance Overview	
A.2.2.1	Aspek Ekonomi, paling sedikit memuat: a. Kuantitas produksi atau jasa yang dijual; b. Produk ramah lingkungan; dan c. Pelibatan pihak lokal yang berkaitan dengan proses bisnis Keuangan Berkelanjutan. Economic Aspects, at least include: a. Quantity of production or services sold; b. Environmentally friendly products; and c. Involvement of local parties related to the Sustainable Finance business process.	
A.2.2.2	Aspek Lingkungan Hidup, paling sedikit memuat: a. Penggunaan energi; b. Pengurangan emisi yang dihasilkan; c. Pengurangan limbah dan efluen; dan d. Pelestarian keanekaragaman hayati. Environmental Aspects, at least include: a. Energy use; b. Reduction of emissions produced; c. Reduction of waste and effluent; and d. Conservation of biodiversity.	Merujuk Kepada Laporan Keberlanjutan WEGE yang disusun secara terpisah
A.2.2.2	Aspek Sosial a. Penggunaan energi; b. Pengurangan emisi yang dihasilkan; c. Pengurangan limbah dan efluen; dan d. Pelestarian keanekaragaman hayati. Social Aspects a. Energy use; b. Reduction of emissions produced; c. Reduction of waste and effluent; and d. Conservation of biodiversity.	
A.2.2.3	Aspek Sosial Social Aspects	
A.2.3.1	Visi, Misi, dan Nilai Keberlanjutan Vision, Mission and Sustainability Values	Merujuk Kepada Laporan Keberlanjutan WEGE yang disusun secara terpisah
A.2.3.2	Produk, Layanan, dan Kegiatan Usaha yang Dijalankan Products, Services and Business Activities Carried Out	
A.2.3.3	Perubahan Perusahaan yang Bersifat Signifikan Significant Corporate Changes	
A.2.4.1	Kebijakan untuk merespon tantangan dalam pemenuhan strategi keberlanjutan Policies to respond to challenges in fulfilling sustainability strategies	Merujuk Kepada Laporan Keberlanjutan WEGE yang disusun secara terpisah
A.2.4.2	Penerapan Keuangan Berkelanjutan Implementation of Sustainable Finance	
A.2.4.3	Strategi pencapaian target Target achievement strategy	
A.2.5.1	Penanggung Jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan Responsible for Implementation of Sustainable Finance	Merujuk Kepada Laporan Keberlanjutan WEGE yang disusun secara terpisah
A.2.5.2	Pengembangan Kompetensi Terkait Keuangan Berkelanjutan Competency Development Related to Sustainable Finance	

Indeks Index	Kriteria Criteria
A.2.6	Kinerja Keberlanjutan Sustainability Performance

	Deskripsi Description	Halaman Page
A.2.5.3	Penilaian Risiko Atas Penerapan Keuangan Berkelanjutan Risk Assessment of Sustainable Finance Implementation	Merujuk Kepada Laporan Keberlanjutan WEGE yang disusun secara terpisah
A.2.5.4	Hubungan Dengan Pemangku Kepentingan Stakeholder Relations	
A.2.5.5	Permasalahan Terhadap Penerapan Keuangan Berkelanjutan Problems in the Implementation of Sustainable Finance	
A.2.6.1	Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan a. Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan Activities to Build a Culture of Sustainability a. Activities to Build a Culture of Sustainability	
A.2.6.2	Kinerja Ekonomi a. Perbandingan Target dan Kinerja Produksi, Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi, Pendapatan dan Laba Rugi; dan b. Perbandingan Target dan Kinerja Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi pada Instrumen Keuangan atau Proyek yang Sejalan dengan Keuangan Berkelanjutan. Economic Performance a. Comparison of Targets and Performance of Production, Portfolio, Financing Targets, or Investments, Income and Profit and Loss; and b. Comparison of Targets and Performance of Portfolio, Financing Targets, or Investments in Financial Instruments or Projects that are in Line with Sustainable Finance.	
A.2.6.3	Kinerja Lingkungan Hidup a. Aspek Umum: • Biaya Lingkungan Hidup b. Aspek Material: • Penggunaan Material yang Ramah Lingkungan c. Aspek Energi: • Jumlah dan Intensitas Energi yang Digunakan; dan • Upaya dan Pencapaian Efisiensi Energi dan Penggunaan Energi Terbarukan. d. Aspek Air: • Penggunaan air e. Aspek Keragaman Hayati: • Dampak dari Wilayah Operasional yang Dekat atau Berada di Daerah Konservasi atau Keanekaragaman Hayati; dan • Usaha Konservasi Keanekaragaman Hayati. f. Aspek Emisi: • Jumlah dan Intensitas Emisi yang Dihasilkan Berdasarkan Jenisnya; • Upaya dan Pencapaian Pengurangan Emisi yang Dilakukan. g. Aspek Limbah Dan Efluen: • Jumlah Limbah dan Efluen yang Dihasilkan Berdasarkan Jenis; • Mekanisme Pengelolaan Limbah dan Efluen. h. Aspek Pengaduan Terkait Lingkungan Hidup. • Jumlah dan Materi Pengaduan Lingkungan Hidup yang Diterima dan Diselesaikan. Environmental Performance a. General Aspect: • Environmental Cost b. Material Aspect: • Use of Environmentally Friendly Materials c. Energy Aspect: • Amount and Intensity of Energy Used; and • Efforts and Achievements of Energy Efficiency and Use of Renewable Energy. d. Water Aspect: • Water usage e. Biodiversity Aspect: • Impacts of Operational Areas Near or Located in Conservation or Biodiversity Areas; and • Biodiversity Conservation Efforts. f. Emission Aspect: • Amount and Intensity of Emissions Generated by Type; • Efforts and Achievements of Emission Reduction Carried Out. g. Waste and Effluent Aspect: • Amount of Waste and Effluent Generated by Type; • Waste and Effluent Management Mechanism. h. Environmental Complaint Aspect. • Number and Material of Environmental Complaints Received and Resolved.	Merujuk Kepada Laporan Keberlanjutan WEGE yang disusun secara terpisah

Indeks Index	Kriteria Criteria
A.2.7	Lain – Lain Etc
B	Indeks Referensi Reference Index
B.1	PUGKI
B.2	ASEAN CG Scorecard (ACGS)
B.3	Sumber Lainnya Other SOurce

*** pertanyaan yang memiliki tambahan catatan: dalam hal pengungkapan tidak dapat diterapkan oleh perusahaan**
questions that have additional notes: in cases where disclosure cannot be implemented by the company

	Deskripsi Description	Halaman Page
A.2.6.4	Kinerja Sosial a. Komitmen untuk Memberikan Layanan atas Produk dan/atau Jasa yang Setara kepada Konsumen; b. Aspek Ketenagakerjaan: • Kesetaraan Kesempatan Bekerja; • Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa; • Upah Minimum Regional; • Lingkungan Bekerja yang Layak dan Aman; dan • Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Pegawai. c. Aspek Masyarakat: • Dampak Operasi Terhadap Masyarakat Sekitar; • Pengaduan Masyarakat; dan • Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL). d. Tanggung Jawab Pengembangan Produk/Jasa Berkelanjutan: • Inovasi dan Pengembangan Produk/Jasa Keuangan Berkelanjutan; • Produk/Jasa yang Sudah Dievaluasi Keamanannya bagi Pelanggan; • Dampak Produk/Jasa; dan • Jumlah Produk yang Ditarik Kembali. e. Survei Kepuasan Pelanggan Terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan Social Performance a. Commitment to Provide Equal Services for Products and/or Services to Consumers; b. Employment Aspects: • Equal Employment Opportunities; • Child Labor and Forced Labor; • Regional Minimum Wage; • Decent and Safe Working Environment; and • Employee Training and Capacity Development. c. Community Aspects: • Impact of Operations on the Surrounding Community; • Public Complaints; and • Social and Environmental Responsibility (TJSL) Activities. d. Responsibility for Sustainable Product/Service Development: • Innovation and Development of Sustainable Financial Products/Services; • Products/Services That Have Been Evaluated for Their Safety for Customers; • Impact of Products/Services; and • Number of Products Recalled. e. Customer Satisfaction Survey for Sustainable Financial Products and/or Services	
A.2.7.1	Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen Written Verification from Independent Party	Merujuk Kepada Laporan Keberlanjutan WEGE yang disusun secara terpisah
A.2.7.2	Lembar umpan balik (feedback) untuk pembaca, jika ada Feedback sheet for readers, if any	
A.2.7.3	Tanggapan Terhadap Umpan Balik Laporan Keberlanjutan Tahun Sebelumnya Response to Previous Year Sustainability Report Feedback	
A.2.7.4	Daftar Pengungkapan Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. List of Disclosures in Accordance with Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies.	
B.2.1	Pertanyaan Bonus Bonus Questions	353-362
B.2.2	Pertanyaan Penalti Penalty Question	
B.3.1	Pertanyaan Bonus Bonus Questions	
B.3.2	Pertanyaan Penalti Penalty Question	

Transformation Journey to Achieve Sustainable Growth

Perjalanan Transformasi untuk Mencapai Pertumbuhan Berkelanjutan

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

Gedung WIKA Tower 1,
Lantai 7-10, JL. D.I. Panjaitan No.Kav.9,
RT.1/RW.11, Cipinang Cempedak, Kecamatan
Jatinegara, Kota Jakarta Timur,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13340

Email : investorrelations@wikagedung.id
Phone : (021) 85908862 / 85909003

www.wikagedung.co.id